# RANCANGAN QANUN
# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) ACEH TAHUN 2025 - 2029



**PEMERINTAH ACEH**
2025

# DAFTAR ISI


DAFTAR ISI ---------- i
DAFTAR TABEL ---------- v
DAFTAR GAMBAR ---------- xi

**BAB I PENDAHULUAN** ---------- 1
1.1. Latar Belakang ---------- 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ---------- 4
1.3. Hubungan Antar Dokumen ---------- 8
1.4. Maksud dan Tujuan ---------- 9
1.5. Sistematika Penulisan ---------- 10

**BAB II GAMBARAN UMUM ACEH** ---------- 11
2.1. Gambaran Umum Kondisi Aceh ---------- 11
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ---------- 11
2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah ---------- 11
2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam ---------- 12
A. Kondisi Hidrologi ---------- 12
B. Kondisi Topografi ---------- 21
C. Kondisi Klimatologi ---------- 27
2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan ------ 30
A. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Aceh ---------- 30
B. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Aceh ---------- 31
C. Kajian Lingkungan Hidup Strategis ---------- 32
2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan ---------- 97
A. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik ---------- 97
B. Energi dan Sumber Daya Mineral ---------- 100
C. Indikator Ketahanan Pangan ---------- 105
D. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan 107
E. Konsumsi Listrik Perkapita ---------- 107
2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas ---------- 108
A. Indek kualitas lingkungan hidup ---------- 108
B. Rumah Tangga dengan sanitasi aman ---------- 109
C. Timbulan sampah terolah ---------- 110
D. Proporsi Rumah Tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah ---------- 112
2.1.1.6. Resilensi terhadap bencana dan perubahan iklim 114
A. Penurunan intensitas Emisi GRK ---------- 114
B. Indeks Risiko Bencana ---------- 115
C. Indeks Ketahanan Daerah ---------- 123
2.1.1.7. Demografi ---------- 123

A. Jumlah Penduduk ---------- 123
B. Distribusi Jumlah Penduduk ---------- 124
C. Struktur Penduduk ---------- 125
D. Laju pertumbuhan penduduk, rasio dan kepadatan penduduk Aceh ---------- 126
E. Proyeksi dan analisis penduduk 5 (lima) tahun ke depan ---------- 129

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ---------- 130
2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi ---------- 130
A. Pertumbuhan PDRB ---------- 130
B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita ---------- 137
C. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan) -------- 138
D. Indeks Williamson (Ketimpangan Regional) --- 141
E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ---------- 142
F. Kemiskinan ---------- 143
G. Pengangguran ---------- 147
2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua ---------- 149
A. Angka Usia Harapan Hidup ---------- 149
B. Angka Kematian Ibu (AKI) ---------- 150
C. Angka Kematian Bayi (AKB) ---------- 151
D. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) ---------- 152
E. Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) ---------- 153
F. Insiden Tuberkolosis ---------- 154
G. Jaminan Kesehatan Masyarakat Aceh ---------- 154
H. Imunisasi ---------- 155
I. Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit -------- 156
2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang merata ---------- 156
A. Angka Rata-Rata Lama Sekolah ---------- 156
B. Angka Harapan Lama Sekolah ---------- 158
C. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah ---------- 159
D. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun ---------- 160
E. Kemampuan Literasi dan Numerasi ---------- 161
F. Tingkat Penyerapan Lulusan SMK ---------- 162
G. Sarana dan Prasarana Sekolah ---------- 162
H. Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan ---------- 163
2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif ---------- 164
A. Jaminan Sosial Tenaga kerja ---------- 164
B. Indeks Kesejahteraan Sosial ---------- 165
2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju ---- 172
A. Penyelenggaraan Kehidupan Beragama -------- 172
B. Kebudayaan ---------- 184

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif ---- 189
A. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) ---- 189
B. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ---- 190
C. Indeks Perlindungan Anak (IPA) ---- 191
D. Indeks Pembangunan Gender ---- 191
E. Indeks Ketimpangan Gender ---- 192
F. Indeks Pemberdayaan Gender ---- 193
G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ---- 193
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah ---- 194
2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia ---- 194
A. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) ---- 194
B. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ---- 195
C. Kepemudaan dan Olahraga ---- 198
2.1.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi ---- 202
A. Rasio PDRB Industri Pengolahan ---- 202
B. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum ---- 205
C. Capaian IPKN Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2023 (data terakhir 2022) ---- 207
D. Jumlah Kunjungan Wisata ke Aceh Tahun 2020- 2024 ---- 209
E. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah ---- 210
F. Rasio Kewirausahaan ---- 214
G. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ---- 215
H. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (menggunakan Proporsi UMKM terhadap Angkatan Kerja sebagai proxy pengganti) ---- 216
I. Indeks Inovasi Daerah ---- 218
J. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ---- 220
2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru ---- 221
A. Pertanian ---- 221
B. Perkebunan ---- 227
C. Peternakan ---- 238
D. Kehutanan ---- 241
E. Kelautan dan Perikanan ---- 256
F. Nilai Tukar Petani ---- 260
G. Nilai Tukar Peternakan ---- 264
H. Nilai Tukar Nelayan ---- 265
I. Porsi EBT dalam Bauran Energi ---- 267
2.1.3.4. Transformasi Digital ---- 268
A. Persandian ---- 268
B. Statistik ---- 269
2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global ---- 270

A. Penanaman Modal ---------- 270
B. Ekspor Barang dan Jasa ---------- 271
C. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ------ 273
2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi ---------- 274
A. Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur---------- 274
B. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum. ---------- 277
C. Persentase Desa mandiri (Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong) ---------- 280
D. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur---------- 282
E. Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh ---------- 283
F. Penataan Ruang ---------- 284
G. Pengairan ---------- 286
H. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman---------- 293
I. Perhubungan---------- 295
2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro---------- 300
A. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB---------- 300
B. Rasio Aset Perbankan Syariah terhadap PDRB ---------- 301
C. Tingkat Inflasi ---------- 302
D. Inklusi Keuangan ---------- 306
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum ---------- 307
2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif---------- 307
A. Komunikasi dan Informatika (Indeks SPBE) --- 307
B. Perpustakaan ---------- 309
C. Kearsipan ---------- 314
D. Standar Pelayanan Minimal (SPM) ---------- 316
E. Kepuasan Pelayanan Keuangan ---------- 318
2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substantial---------- 319
A. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh --- 319
B. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan MAsyarakat---------- 320
2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya Gentar Kawasan ---------- 321
A. Indeks Daya Saing Daerah ---------- 321
2.1.4.4. Kinerja Pembangunan Masa Lalu---------- 323
2.2. Gambaran Keuangan Aceh ---------- 342
2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu---------- 342
2.2.1.1. Pendapatan Daerah---------- 349
A. Pendapatan Asli Aceh (PAA)---------- 349

B. Pendapatan Transfer ---------- 353
C. Lain-Lain Pendapatan Aceh Yang Sah ---------- 358
2.2.1.2. Belanja Aceh ---------- 360
A. Belanja Operasi ---------- 361
B. Belanja Modal ---------- 365
C. Belanja Tidak Terduga ---------- 367
D. Belanja Transfer ---------- 367
2.2.1.3. Pembiayaan Aceh ---------- 368
A. Penerimaan Pembiayaan ---------- 369
B. Pengeluaran Pembiayaan ---------- 369
2.2.2. Neraca Daerah ---------- 370
3.2.2.1. Aset ---------- 372
A. Aset Lancar ---------- 372
B. Aset Tidak Lancar ---------- 373
3.2.2.2. Kewajiban ---------- 374
A. Kewajiban Jangka Pendek ---------- 374
B. Kewajiban Jangka Panjang ---------- 375
3.2.2.3. Ekuitas ---------- 375
3.2.1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ---------- 375
2.2.4.1. Proporsi Pengunaan Anggaran ---------- 377
2.2.4.2. Analisis Pembiayaan ---------- 378
3.2.2. Kerangka Pendanaan ---------- 378
3.2.4.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Aceh ---------- 379
A. Pendapatan ---------- 379
B. Belanja ---------- 391
C. Pembiayaan ---------- 394
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Aceh ---------- 399
2.3.1. Permasalahan Pembangunan ---------- 399
2.3.1.1. Implementasi Keistimewaan Aceh Belum Optimal terutama pelaksanaan otonomi khusus Aceh, Syariat Islam, Korban Konflik serta perdamaian. ---------- 399
2.3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Aceh belum maksimal dan fluktuatif: ---------- 401
2.3.1.3. Masih belum optimalnya Transformasi tata kelola pemerintahan Aceh: ---------- 404
2.3.1.4. Masih tingginya ketimpangan antar wilayah: ---------- 408
2.3.1.5. Sumber Daya Manusia masih rendah: ---------- 410
2.3.1.6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana masih rendah; ---------- 414
2.3.2. Isu Strategis Pembangunan ---------- 416
2.3.2.1. Isu Strategis Nasional ---------- 416
2.3.2.2. Isu Strategis Aceh ---------- 416

1. Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh - 416
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan Stunting ---------- 416
3. Pemerataan Pendidikan, Perkuatan Pendidikan Vokasi dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat. ---------- 417
4. Penanggulangan Kemiskinan.---------- 418
5. Peningkatan Pendapatan Perkapita, Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh---------- 418
6. Optimalisasi Riset dan Inovasi Serta Digital--- 419
7. Membuka Lapangan Kerja dan Meningkat Produktivitas Masyarakat. ---------- 419
8. Memperkuat Industri Pengolahan dan Ekspor 420
9. Mengembangkan Produktivitas Pangan dan Ekonomi Hijau. ---------- 420
10. Memperkuat Perkotaan dan Pendesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi---------- 420
11. Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas - 421
12. Memperkuat Otonomi Khusus---------- 421
13. Kemandirian dalam Ruang Fiskal ---------- 421
14. Penanganan PPKS dan Disabilitas, Memperkuat Gender dan Keluarga---------- 422
15. Pembangunan Berorientasi Lingkungan dan Energi Terbarukan ---------- 422
16. Pengurangan Risiko Bencana ---------- 422
17. Memperkuat Pembangunan Kewilayahan ----- 423
18. Memperkuat Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang berkualitas---------- 423

**BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH------** 425

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ---------- 425
3.1.1. Visi ---------- 425
3.1.2. Misi---------- 425
3.1.3. Tujuan dan Sasaran ---------- 426
3.2. Keterkaitan Visi dan Misi---------- 429
3.3. Penyelarasan dengan Visi dan Misi Aceh dan Nasional ---------- 429
3.4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh ---------- 430
3.5. Pentahapan Pembangunan Aceh 2026-2030 ---------- 444
3.6. Rumusan Program Prioritas ---------- 448
3.7. Rumusan Arah Kebijakan ---------- 485
3.8. Prioritas Aceh ---------- 490
3.8.1. Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam (Aqidah, Syariat, Akhlak dan Muamalah). ---------- 490
3.8.2. Penguatan implementasi kekhususan dan keistiwewaan Aceh ---------- 491
3.8.3. Penurunan Angka Kemiskinan ---------- 491

3.8.4. Hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumberdaya alam dan maritim ---------- 492
3.8.5. Penciptaan lapangan kerja ---------- 492
3.8.6. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas ---------- 493
3.8.7. Peningkatan sumber daya manusia, sains dan teknologi ---- 495
3.8.8. Transformasi digital yang terintegrasi ---------- 496
3.8.9. Tata Kelola birokrasi dan kemandirian fiskal daerah ---------- 496
3.8.10. Peningkatan kualitas lingkungan hidup ---------- 497
3.9. Pembangunan Kewilayahan Aceh ---------- 499
3.10. Kegiatan Prioritas Utama Aceh ---------- 500

**BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH** ---------- 505
4.1. Program Perangkat Daerah ---------- 505
4.2. Kinerja Penyelenggara pemerintah daerah ---------- 533

**BAB V PENUTUP** ---------- 559
5.1. Pedoman Transisi ---------- 559
5.2. Kaidah Pelaksanaan ---------- 560

# DAFTAR TABEL


Tabel 2.1. Luas DAS Wilayah Sungai berdasarkan Kewenangan ---------- 13
Tabel 2.2. Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai ---------- 16
Tabel 2.3. Potensi Danau Aceh ---------- 19
Tabel 2.4. Cekungan Air Tanah (CAT) Di Aceh ---------- 20
Tabel 2.5. Kemiringan Lereng Aceh ---------- 24
Tabel 2.6. Data iklim rata-rata Provinsi Aceh Tahun 2013-2022. ---------- 29
Tabel 2.7. Penduduk Optimum di Aceh ---------- 35
Tabel 2.8. Selisih Proyeksi Penduduk Tahun 2045 dengan Jumlah Optimum Aceh- 35
Tabel 2.9. Luas Potensi Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Tiap Kabupaten/Kota ---------- 36
Tabel 2.10. Luas Potensi Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Tiap Kabupaten/Kota 39
Tabel 2.11. Ekoregion Aceh ---------- 41
Tabel 2.12. Karakteristik Bentang Alam (KBA) dan Luasannya di Aceh ---------- 47
Tabel 2.13. Kawasan Vegetasi Alami (KVA) Aceh ---------- 51
Tabel 2.14. Bahaya Banjir di Aceh ---------- 54
Tabel 2.15. Bahaya Banjir Bandang Aceh ---------- 56
Tabel 2.16. Bahaya Tanah Longsor Aceh ---------- 58
Tabel 2.17. Bahaya Kekeringan Aceh ---------- 60
Tabel 2.18. Bahaya Likuifaksi Aceh ---------- 62
Tabel 2.19. Bahaya Gempa Bumi Aceh ---------- 64
Tabel 2.20. Bahaya Tsunami di Aceh ---------- 66
Tabel 2.21. Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) di Kabupaten/Kota Aceh 2018-2022 - 68
Tabel 2.22. Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Aceh ---------- 70
Tabel 2.23. Nilai IKA, IKU, IKL, dan IKLH Aceh Tahun 2022 ---------- 74
Tabel 2.24. Nilai IKLH Aceh Tahun 2016-2023 ---------- 74
Tabel 2.25. Perubahan Nilai IKLH dan Target dari Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2016 – 2022 ---------- 76
Tabel 2.26. Luas Pertambangan Aceh ---------- 78
Tabel 2.27. Luas HGU berdasarkan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh 2023 ----- 80
Tabel 2.28. Perusahaan Pemegang PBPH dan Luasannya di Provinsi Aceh 2023---- 81
Tabel 2.29. Pihak Pemegang PPKH berdasarkan Lokasi dan Luasannya di Provinsi Aceh 2023 ---------- 83
Tabel 2.30. Badan Hukum Pemegang Izin HKM di Provinsi Aceh 2023 ---------- 84
Tabel 2.31. Badan Hukum Pengelolaan HD dan Luasnya di Provinsi Aceh 2023 ----- 86
Tabel 2.32. Data SIDIK Aceh ---------- 87
Tabel 2.33. Luas PIPPIB Periode I Aceh ---------- 89
Tabel 2.34. Luas Tutupan Lahan di Provinsi Aceh ---------- 90
Tabel 2.35. Folu Net Sink RO1 s/d RO 12 Aceh ---------- 93

Tabel 2.36. Luas Kawasan Hutan di Aceh ---------- 94
Tabel 2.37. Home Range Satwa di Provinsi Aceh---------- 96
Tabel 2.38. Pembangkit Tenaga Listrik Eksisting ---------- 99
Tabel 2.39. Realisasi Kapasitas Trafo Gardu Induk (MVA) ---------- 99
Tabel 2.40. Jumlah Konsumen per Sektor Pelanggan Tahun 2024 ---------- 100
Tabel 2.41 Kejadian Kecelakaan di Lokasi PETI---------- 102
Tabel 2.42. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi di Aceh (per Tahun 2024)---------- 103
Tabel 2.43. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, IKAL) Tahun 2020-2024 ---------- 109
Tabel 2.44. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2020–2024 ---------- 109
Tabel 2.45. Persentase Capaian Pengelolaan Sampah di Provinsi Aceh Tahun 2020 - 2024---------- 111
Tabel 2.46. Persentase Jumlah Sampah Terolah di Provinsi Aceh Tahun 2024-------- 112
Tabel 2.47. Cakupan Area Pelayanan Sampah di Provinsi Aceh & Nilai IKPS Aceh Tahun 2024 ---------- 113
Tabel 2.48. Data Emisi Sektor Energi, IPPU, Pertanian, Kehutanan, dan Limbah Aceh (data termutakhir) ---------- 115
Tabel 2.49. Indek Risiko Bencana Provinsi Aceh Tahun 2020-2024 ---------- 116
Tabel 2.50. Potensi Bencana di Aceh---------- 118
Tabel 2.51. Kejadian Bencana Sejak Tahun 2017 Hingga 2024 ---------- 119
Tabel 2.52. Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Aceh Tahun 2020-2024 123
Tabel 2.53. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Aceh Tahun 2019-2024 ---------- 124
Tabel 2.54. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Aceh Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2019 – 2024 ---------- 124
Tabel 2.55. Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Aceh Tahun 2024 ---------- 127
Tabel 2.56. Proyeksi Penduduk Aceh 5 (lima) tahun kedepan ---------- 130
Tabel 2.57. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh, 2019-2024 (Triliun Rupiah) ---------- 133
Tabel 2.58. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh, 2019-2024 (Triliun Rupiah) ---------- 134
Tabel 2.59. Distribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHB 2010 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019 – 2024 (Persen)---------- 134
Tabel 2.60. Laju Pertumbuhan (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2019-2024 (Persen)---------- 136
Tabel 2.61. PDRB Kabupaten/Kota, Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB Tahun 2019-2024 (Juta Rupiah) ---------- 138
Tabel 2.62. Gini Rasio Kabupaten/Kota, Aceh dan Nasional Tahun 2019 – 2024 (Maret)---------- 140
Tabel 2.63. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh dan Nasional Tahun 2020 - 2024 ---------- 142

Tabel 2.64. Persentase Penduduk Miskin Provinsi se-Aceh Tahun 2017 – 2024 ------ 144
Tabel 2.65. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik, Tahun 2019-2024 ---------- 147
Tabel 2.66. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan, Tahun 2019-2024 ---------- 148
Tabel 2.67. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2019-2024 ---------- 148
Tabel 2.68. *Bed Occupancy Rate* (BOR) Tahun 2019 – 2024 ---------- 156
Tabel 2.69. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2020 – 2024 ---------- 157
Tabel 2.70. Angka Rata-rata Lama Sekolah Aceh dan Rata-rata Sumatera Tahun 2020–2024 ---------- 158
Tabel 2.71. Angka Harapan Lama Sekolah Aceh Tahun 2020 – 2024 ---------- 158
Tabel 2.72. Kelompok Kemampuan Literasi Aceh Tahun 2021-2023 ---------- 161
Tabel 2.73. Data Persentase Sertifikasi Guru Jenjang Pendidikan Tahun 2022 ------- 164
Tabel 2.74. Daftar Panti Pelayanan Sosial Dinas Sosial Provinsi Aceh Tahun 2024 -- 166
Tabel 2.75. Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial di Aceh ---------- 168
Tabel 2.76. Dukungan peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosia oleh Lembaga Non Pemerintah ---------- 168
Tabel 2.77. Data Penanganan Korban Bencana Tahun 2021 sampai dengan 2024 -- 169
Tabel 2.78. Data Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dari Tahun 2020 s.d 2024 --- 170
Tabel 2.79. Taman Makam Pahlawan ---------- 172
Tabel 2.80. Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Tahun 2019 – 2024 sesuai Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 ---------- 173
Tabel 2.81. Jumlah Da'i di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil Tahun 2019 – 2024 ---------- 174
Tabel 2.82. Data Mesjid Se-Aceh yang Melaksanakan Shalat Jum'at Tahun 2024 ---- 178
Tabel 2.83. Kegiatan dan Peserta Pembinaan Adat Istiadat dari Tahun 2020-2023 --- 179
Tabel 2.84. Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Tahun 2019 – 2024 ---------- 180
Tabel 2.85. Peran Ulama dalam Pembangunan/Fatwa Ulama Tahun 2019 – 2024 --- 182
Tabel 2.86. Realisasi Pemberdayaan Ekonomi dan Rehabilitasi Sosial Masyarakat dan Korban Konflik Aceh Tahun 2019 s.d. 2024 (Orang) ---------- 183
Tabel 2.87. Perkembangan Kelompok Sanggar Seni di Provinsi Aceh, 2020-2024 ---- 185
Tabel 2.88. Jumlah Situs/Cagar Budaya Di Aceh Tahun 2024 ---------- 187
Tabel 2.89. Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Aceh Tahun 2019 – 2024 ---------- 194
Tabel 2.90. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2019-Agustus 2024 ---------- 196
Tabel 2.91. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Agustus 2019-Agustus 2024 ---------- 197
Tabel 2.92. Jumlah Pemuda Berprestasi dan Organisasi Kepemudaan Tahun 2019 – 2024 ---------- 199
Tabel 2.93. Cabang Olahraga Atlit dan Infrastruktur Olahraga Aceh Tahun 2019 – 2024 ---------- 201

Tabel 2.94. Sebaran Sentra IKM Aceh Tahun 2023 Menurut Kabupaten/Kota (data termutakhir) ---------- 203
Tabel 2.95. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Aceh, 2019-2022 (Data Termutakhir tahun 2022)---------- 204
Tabel 2.96. Jumlah Kunjungan Wisata ke Aceh Tahun 2020 - 2024---------- 209
Tabel 2.97. Perkembangan Koperasi di Aceh Tahun 2020 – 2024 ---------- 210
Tabel 2.98. Jumlah KSPPS dan USPPS di Aceh Tahun 2024 ---------- 211
Tabel 2.99. Perkembangan Jumlah UMKM di Aceh Tahun 2020-2024 ---------- 212
Tabel 2.100. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024--------- 213
Tabel 2.101. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2019 - Agustus 2024---------- 215
Tabel 2.102. Perkembangan Proporsi UMKM Terhadap Angkatan Kerja Tahun 2020 – 2025) (sebagai proxy Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif) ---------- 217
Tabel 2.103. Capaian Indeks Inovasi Daerah Aceh (2021–2024) ---------- 218
Tabel 2.104. Jumlah Usaha Pertanian Menurut Subsektor dan Jenis Usaha di Aceh (unit) ---------- 223
Tabel 2.105. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung Sumatera 2020-2024 226
Tabel 2.106. Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani pada Sub sektor Perkebunan Tahun 2023---------- 228
Tabel 2.107. Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Kopi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023 ---------- 230
Tabel 2.108. Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Kelapa Sawit Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023 ---------- 232
Tabel 2.109. Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Kakao Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023 ---------- 233
Tabel 2.110. Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Karet Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023 ---------- 234
Tabel 2.111. Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Kelapa Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023---------- 236
Tabel 2.112. Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Kelapa Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023---------- 237
Tabel 2.113. Populasi Ternak di Aceh Tahun 2020-2024---------- 238
Tabel 2.114. Produksi Daging dan Telur Berdasarkan Kab/Kota di Aceh Tahun 2020-2024 ---------- 239
Tabel 2.115. Sebaran Padang Pengembalaan Masyarakat Berdasarkan Kabupaten/Kota---------- 240
Tabel 2.116. Kawasan Hutan Aceh Berdasarkan Luas dan Fungsinya ---------- 241
Tabel 2.117. Deforestasi Aceh Tahun 2013-2024 ---------- 243
Tabel 2.118. Hutan Rusak (Deforestasi) Provinsi Aceh Periode Tahun 2022-2023--- 243
Tabel 2.119. Kebakaran Hutan Dan Lahan Aceh Tahun 2015 s.d. 2024. ---------- 245
Tabel 2.120. Persentase Deforestasi di Aceh Tahun 2015-2024---------- 245
Tabel 2.121. Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Aceh Tahun 2016-2024---------- 247

Tabel 2.122. Data Konflik antara Manusia dan Satwa Liar di Aceh Tahun 2024------- 247
Tabel 2.123. PDRB Aceh dan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Aceh Tahun 2020-2024 ---------- 250
Tabel 2.124. Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan 2016-2024 ---------- 251
Tabel 2.125. Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) berdasarkan Kabupaten/Kota di Aceh, 2024---------- 252
Tabel 2.126. Penyelesaian konflik tenurial melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) menurut Kabupaten/Kota di Aceh ---------- 253
Tabel 2.127. Capaian Izin Perhutanan Sosia Aceh Tahun 2017 – 2024---------- 254
Tabel 2.128. Produksi Ikan Tuna/Tongkol/Cakalang Menurut Kabupaten/Kota Di Aceh---------- 258
Tabel 2.129. Jumlah Produksi Ikan Tuna Sirip Kuning di Aceh Tahun 2020 – 2024---- 259
Tabel 2.130. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Berdasarkan Sub Sektor, Tahun 2020-2024 ---------- 262
Tabel 2.131. Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura---------- 263
Tabel 2.132. Perkembangan NTP Peternakan Tahun 2024 ---------- 265
Tabel 2.133. Perkembangan Indeks Yang Diterima Nelayan dan Indeks Yang Dibayar Nelayan Tahun 2024 ---------- 266
Tabel 2.134. Neraca Perdagangan Provinsi Aceh Tahun 2020-2024 ---------- 271
Tabel 2.135. Nilai PMTB dan Perubahan Inventori (ADHB dan ADHK) Tahun 2019-2024 (Milyar Rupiah) ---------- 273
Tabel 2.136. Proporsi Panjang Jalan Provinsi dan Nasional dalam Kondisi Mantap Tahun 2020 – 2024---------- 275
Tabel 2.137. Rasio Jumlah Penduduk per Panjang Jalan Tahun 2020-2024 ---------- 276
Tabel 2.138. Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2020-2024 ---------- 277
Tabel 2.139. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2020–2024---------- 279
Tabel 2.140. Status Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2024 ---------- 281
Tabel 2.141. Alokasi Dana Desa Tahun 2019 – 2024---------- 281
Tabel 2.142. Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2024 ---------- 283
Tabel 2.143. Pola Ruang Berdasarkan RTRW Aceh 2013-2033 ---------- 284
Tabel 2.144. Luasan RTH Publik di Aceh Tahun 2019-2024 ---------- 286
Tabel 2.145. Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangannya ---------- 287
Tabel 2.146. Jenis Irigasi dan Luasannya ---------- 287
Tabel 2.147. Luasan Daerah Irigasi Wilayah Aceh Berdasarkan Kewenangan Menurut Kabupaten/Kota ---------- 288
Tabel 2.148. Kondisi Saluran Irigasi Permukaan berdasarkan Kewenangan ---------- 288
Tabel 2.149. Kondisi Bangunan Irigasi Permukaan Berdasarkan Kewenangan ------- 289

Tabel 2.150. Hasil Capaian Persentase Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik Tahun 2017-2024 ---------- 290
Tabel 2.151. Panjang Pantai Dalam Kondisi Kritis Tahun 2017-2024 ---------- 291
Tabel 2.152. Luas Kawasan Kumuh di Aceh Tahun 2020 dan 2024 ---------- 294
Tabel 2.153. Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2020-2024 ------- 297
Tabel 2.154. Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Aceh Tahun 2020-2024 ---------- 297
Tabel 2.155. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Aceh Tahun 2020-2024 298
Tabel 2.156. Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Aceh Tahun 2020-2024---------- 299
Tabel 2.157. Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2020-2024 ---------- 300
Tabel 2.158. Rasio Pajak Asli Aceh (PAA) terhadap PDRB Tahun 2019-2024 (Persen)---------- 301
Tabel 2.159. Perkembangan Inflasi Umum Aceh, 2019-2024 (Persen)---------- 305
Tabel 2.160. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Aceh Tahun 2019-2024---------- 307
Tabel 2.161. Data Kesesuaian Jabatan dengan Keahlian Pejabat/Angka IPP Tahun 2019 – 2024 ---------- 308
Tabel 2.162. Data Diklat Aparatur Pemerintah Aceh Tahun 2019 – 2024 ---------- 308
Tabel 2.163. Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Aceh Tahun 2019 – 2024--------- 309
Tabel 2.164. Rekapan UPLM Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020 – 2024 -------- 312
Tabel 2.165. Koleksi Buku Deposit, Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) Aceh Tahun 2022-2024 ---------- 313
Tabel 2.166. Jumlah Fungsional Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2022-2024 ---------- 314
Tabel 2.167. Jumlah Koleksi Arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan OPD Pengelola Arsip Secara Baku Tahun 2019 – 2024 ---------- 315
Tabel 2.168. Jumlah Koleksi Arsip pada JIKN Tahun 2019 – 2024 ---------- 315
Tabel 2.169. Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh Tahun 2019 – 2023- 319
Tabel 2.170. Rekapitulasi Jumlah Ormas, LSM danYayasan/Perkumpulan yang Telah Terdaftar pada Badan Kesbangpol Aceh 2019 – 2024---------- 320
Tabel 2.171. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2020-2024 ---------- 323
Tabel 2.172. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Tahun 2020-2024 ---------- 332
Tabel 2.173. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2019-2023 ---------- 343
Tabel 2.174. Penetapan APBA Tahun 2019-2024---------- 344
Tabel 2.175. Anggaran dan Realisasi APBA Tahun 2018-2024 ---------- 345
Tabel 2.176. Rata Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2018 – 2024---------- 346
Tabel 2.177. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Aceh Tahun 2018-2024---------- 349
Tabel 2.178. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) Tahun 2018-2024---------- 350
Tabel 2.179. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2018-2024 - 351

Tabel 2.180. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Aceh Tahun 2018-2024 351
Tabel 2.181. Deviden Pemerintah dari BUMD Tahun 2019-2023 ---------- 352
Tabel 2.182. Anggaran dan Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2018-2023 ---------- 352
Tabel 2.183. Anggaran dan Realisasi Lain Lain PAA yang Sah Tahun 2018-2024 ----- 353
Tabel 2.184. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2018-2024 -------- 354
Tabel 2.185. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2018-2024 ---------- 355
Tabel 2.186. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2018-2024 355
Tabel 2.187. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018-2024 356
Tabel 2.188. Anggaran dan Realisasi Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun 2018-2024---------- 357
Tabel 2.189. Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2018-2023---------- 357
Tabel 2.190. Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2018-2023 358
Tabel 2.191. Anggaran dan Realisasi Lain Lain Pendapatan Aceh Yang Sah Tahun 2018-2024 ---------- 359
Tabel 2.192. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2018-2023---------- 359
Tabel 2.193. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lainnya Tahun 2018-2024 -------- 360
Tabel 2.194. Anggaran dan Realisasi Belanja Aceh Tahun 2018-2024 ---------- 361
Tabel 2.195. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2018-2024 ---------- 361
Tabel 2.196. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018-2023 ---------- 363
Tabel 2.197. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018-2024---- 363
Tabel 2.198. Anggaran dan Realisasi Belanja Susidi Tahun 2018-2024 ---------- 364
Tabel 2.199. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2018-2024 ---------- 364
Tabel 2.200. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2018-2024----- 365
Tabel 2.201. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2018-2024 ---------- 366
Tabel 2.202. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2018-2024------- 367
Tabel 2.203. Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2018-2024---------- 367
Tabel 2.204. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Aceh Tahun 2018-2024 ---------- 368
Tabel 2.205. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018-2024--- 369
Tabel 2.206. Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2018-2024 -- 370
Tabel 2.207. Rata Rata Pertumbuhan Necara Aceh Tahun 2018 s.d 2023 ---------- 371
Tabel 2.208. Kontribusi Aset Lancar Tahun 2023 ---------- 373
Tabel 2.209. Kontribusi Aset Tidak Lancar Tahun 2018 s.d 2022 ---------- 373
Tabel 2.210. Kontribusi Kewajiban Tahun 2018 s.d 2022 ---------- 374
Tabel 2.211. Kontribusi Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2018 s.d 2022 ---------- 374
Tabel 2.212. Kontribusi Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2018 s.d 2022 ---------- 375
Tabel 2.213. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur Tahun 2018 s.d 2024 - 377
Tabel 2.214. Proyeksi Pajak Aceh Tahun 2026-2030---------- 382
Tabel 2.215. Proyeksi Retribusi Aceh Tahun 2026-2030 ---------- 383
Tabel 2.216. Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan Tahun 2026-2030 ---------- 383
Tabel 2.217. Proyeksi Lain-Lain PAA yang Sah Tahun 2026-2030 ---------- 384

Tabel 2.218. Bagian dari Komponen Lain-Lain PAA yang Sah Tahun 2026-2030 ----- 384
Tabel 2.219. Proyeksi Dana Perimbangan Tahun 2026-2030---------- 387
Tabel 2.220. Proyeksi Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun 2026-2030 ---------- 388
Tabel 2.221. Proyeksi Dana Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2025-2029---------- 390
Tabel 2.222. Proyeksi Belanja Tahun 2025-2029 ---------- 393
Tabel 2.223. Proyeksi Pembiayaan Tahun 2025-2029 ---------- 395
Tabel 2.224. Proyeksi Kerangka Pendanaan/Struktur APBA Tahun 2026-2030-------- 396
Tabel 3.2. Penyelarasan Visi dan Misi Aceh dan Nasional Tahun 2025-2029---------- 429
Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh, 2025-2030 Berdasarkan Misi-- 431
Tabel 3.4. Pentahapan Pembangunan RPJMA Tahun 2026-2030 ---------- 445
Tabel 3.5. Rumusan Program Prioritas RPJMA Tahun 2026-2030---------- 449
Tabel 3.6. Rumusan Arah Kebijakan RPJMA Tahun 2025-2029---------- 486
Tabel 3.7. Penyelarasan Pembangunan Kewilayahan Nasional dan Aceh---------- 499
Tabel 3.8. Penyelarasan Kegiatan Priorias Utama Aceh---------- 501
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030---------- 506
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2030---------- 534
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025-2030 ---------- 535

# DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1. Hubungan Antar DokumenGambar ---------- 9
Gambar 2.2. Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh ---------- 13
Gambar 2.3. Peta Batas DAS di Wilayah Aceh ---------- 17
Gambar 2.4. Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Aceh ---------- 20
Gambar 2.5. Peta Topografi Aceh ---------- 22
Gambar 2.6. Peta Geologi Aceh ---------- 23
Gambar 2.7. Peta Kemiringan Lereng Aceh ---------- 25
Gambar 2.8. Peta Jenis Tanah Aceh ---------- 26
Gambar 2.9. Peta Curah Hujan Aceh ---------- 29
Gambar 2.10. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air Aceh ---------- 33
Gambar 2.11. Persentase D3TLH Air di Aceh ---------- 33
Gambar 2.12. Persentase D3TLH Pangan di Provinsi Aceh ---------- 34
Gambar 2.13. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Aceh ---------- 34
Gambar 2.14. Persentase Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kabupaten/Kota -- 37
Gambar 2.15. Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Aceh ---------- 38
Gambar 2.16. Grafik Persentase Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten/Kota ---------- 40
Gambar 2.17. Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Provinsi Aceh ---------- 40
Gambar 2.18. Peta Ekoregion Aceh ---------- 46
Gambar 2.19. Peta Karakteristik Bentang Alam (KBA) Aceh ---------- 49
Gambar 2.20. Peta Kawasan Vegetasi Alami (KVA) Aceh ---------- 52
Gambar 2.21. Peta Bahaya Banjir Aceh ---------- 55
Gambar 2.22. Peta Bahaya Banjir Bandang Aceh ---------- 57
Gambar 2.23. Peta Bahaya Longsor Aceh ---------- 59
Gambar 2.24. Peta Bahaya Kekeringan Aceh ---------- 61
Gambar 2.25. Bahaya Likuifaksi Aceh ---------- 63
Gambar 2.26. Peta Bahaya Gempa Bumi Aceh ---------- 65
Gambar 2.27. Peta Bahaya Tsunami Aceh ---------- 67
Gambar 2.28. Kecenderungan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kota Aceh ---------- 69
Gambar 2.29. Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Aceh ---------- 71
Gambar 2.30. Peta Bahaya Cuaca Ekstrim di Aceh ---------- 71
Gambar 2.31. Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Aceh ---------- 72
Gambar 2.32. Peta IKLH Provinsi Aceh Tahun 2023 ---------- 75
Gambar 2.33 Pertumbuhan (%) Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian Tahun 2017 s.d 2022 ---------- 77
Gambar 2.34. Peta Sebaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Aceh ---------- 79
Gambar 2.35. KRP Pola Ruang Aceh ---------- 81
Gambar 2.36. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Aceh ---------- 82
Gambar 2.37. Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) Aceh ---------- 83
Gambar 2.38. Petan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Aceh ---------- 85
Gambar 2.39. Sebaran Hutan Desa (HD) Aceh ---------- 87
Gambar 2.40. Peta Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim (SIDIK) Aceh ---------- 88

Gambar 2.41. Peta PIPPIB Aceh ---- 90
Gambar 2.42. Peta Penutupan Lahan di Provinsi Aceh ---- 91
Gambar 2.43. Peta Folu Net Sink Aceh ---- 94
Gambar 2.44. Peta Kawasan Hutan di Provinsi Aceh ---- 95
Gambar 2.45. Peta Home Range Satwa Aceh ---- 96
Gambar 2.46. Persentase Rumah tangga Berlistrik di Aceh Tahun 2020-2024 ---- 97
Gambar 2.47. Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Aceh ---- 98
Gambar 2.48. Kontribusi Sub Sektor Pengadaan Listrik dan Gas Tahun Tahun 2020-2024 (ADHK) ---- 101
Gambar 2.49. Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) di Provinsi Aceh Tahun 2020-2024 ---- 104
Gambar 2.50. Pertumbuhan Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) di Provinsi Aceh Tahun 2020-2024 ---- 105
Gambar 2.51. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Aceh, Tahun 2020-2024 ---- 106
Gambar 2.52. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Konsumsi Aceh, Tahun 2015-2019 ---- 106
Gambar 2.53. Konsumsi Listrik Perkapita (kWh), Tahun 2020-2024 ---- 108
Gambar 2.54. Emisi dari Sektor Energi, IPPU, Pertanian, Kehutanan, dan Limbah -- 115
Gambar 2.55. Data Bencana Aceh Tahun 2019-2024 ---- 117
Gambar 2.56. Peta Rawan Bencana Gempa Aceh ---- 120
Gambar 2.57. Peta Risiko Bencana Banjir Aceh ---- 120
Gambar 2.58. Peta Indeks Rawan Bencana Aceh ---- 122
Gambar 2.59. Struktur Penduduk Aceh Tahun 2024 (jiwa) ---- 126
Gambar 2.60. Struktur Penduduk Aceh Tahun 2023 ---- 128
Gambar 2.61. Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh, dan Nasional, Tahun 2019- 2024 (Persen) ---- 131
Gambar 2.62. Pertumbuhan Ekonomi Aceh ADHK Migas dan non Migas Tahun 2019-2024 ---- 132
Gambar 2.63. PDRB Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB Tahun 2019-2024 (Juta Rupiah) ---- 137
Gambar 2.64. Perkembangan Gini Ratio Provinsi Aceh Periode Maret 2019-Maret 2024 ---- 139
Gambar 2.65. Gini Rasio Aceh dan Nasional, 2019-2024 ---- 139
Gambar 2.66. Perkembangan Nilai Indeks Williamson Tahun 2019-2024 ---- 141
Gambar 2.67. Perkembangan Angka Kemiskinan di Aceh 2017 dan 2024 ---- 145
Gambar 2.68. Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan (2017-2024) ---- 145
Gambar 2.69. Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Aceh Tahun 2017 – 2024 ---- 146
Gambar 2.70. Garis Kemiskinan Aceh Tahun 2023-2024 ---- 147
Gambar 2.71. Capaian Umur Harapan Hidup (UHH) Aceh dan Nasional Tahun 2020 – 2024 ---- 149
Gambar 2.72. Angka Kematian Ibu (AKI) Aceh per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2020 – 2024 ---- 150

Gambar 2.73. Persentase Pemeriksaan Kehamilan 6 Kali (ANC K6) Tahun 2022-2024 ---------- 151
Gambar 2.74. Angka Kematian Bayi (AKB) Aceh per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2020 – 2024 ---------- 151
Gambar 2.75. Prevalensi Balita dengan Stunting di Aceh Tahun 2019 – 2024 -------- 152
Gambar 2.76. Prevalensi Wasting di Aceh Tahun 2020 – 2024 ---------- 153
Gambar 2.77. Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk) Tahun 2019-2023 --- 154
Gambar 2.78. Capaian jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Aceh Tahun 2019-2023---------- 155
Gambar 2.79. Capaian Imunisasi Aceh Tahun 2019-2023 ---------- 155
Gambar 2.80. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2019 – 2024 ---------- 160
Gambar 2.81. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Aceh Usia 16-18 Tahun 2019 – 2024 ---------- 161
Gambar 2.82. Persentase Kondisi Ruang Kelas Jenjang SMA/SMK/SLB Tahun 2023 163
Gambar 2.83. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2020 – 2024 ---------- 167
Gambar 2.84. Data Pemulangan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan ---------- 171
Gambar 2.85. Jumlah Pendapatan dan Penyaluran Zakat dan Infak Tahun 2020-2024 ---------- 175
Gambar 2.85. Komponen Indeks Zakat Nasional, 2025 ---------- 176
Gambar 2.85. Indeks Zakat Nasional, 2025 ---------- 177
Gambar 2.86. Perkembangan indeks pembangunan kebudayaan Aceh dan Nasional Tahun 2018-2023 (Data termutakhir) ---------- 189
Gambar 2.87. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, 2020 – 2024 ---------- 190
Gambar 2.88. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Aceh Yang terlapor pada UPTD PPA Tahun 2019 – 2023---------- 190
Gambar 2.89. Indeks Perlindungan Anak Tahun 2019 – 2023 (data termutakhir)----- 191
Gambar 2.90. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh Tahun 2020 – 2024 --------- 192
Gambar 2.91. Indeks Ketimpangan Gender Aceh, 2019 – 2023 ---------- 192
Gambar 2.92. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh Tahun 2019 – 2023 (data termutakhir) ---------- 193
Gambar 2.93. Perkembangan Tingkat Ketergantungan Aceh, 2019-2024 ---------- 194
Gambar 2.94. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja, Agustus 2019-Agustus 2024 ---------- 198
Gambar 2.95. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Provinsi Aceh (persen) Tahun 2020-2024 ---------- 203
Gambar 2.95. Jumlah Produk Tersertifikasi Halal Provinsi Aceh ---------- 205
Gambar 2.96. Perkembangan Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) Aceh (Persen) Tahun 2020 – 2024 ---------- 206
Gambar 2.97. Capaian Pembangunan Kepariwisataan Tingkat Provinsi---------- 207
Gambar 2.98. Capaian IPKN Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2023 Per Sub Indeks (data terakhir tahun 2022)---------- 208
Gambar 2.99. Rasio Kewirausahaan Aceh Tahun 2020-2024 ---------- 214
Gambar 2.100. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin Aceh dan Nasional, 2019-2024 ---------- 216

Gambar 2.101. Komposisi Bentuk Inovasi Aceh ---------- 219
Gambar 2.102. Komposisi Tahapan Inovasi Aceh ---------- 220
Gambar 2.103. Perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Makanan dan Non Makanan) Tahun 2019-2024 ---------- 221
Gambar 2.104. PDRB ADHB Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2020-2024---------- 222
Gambar 2.105. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Menurut Subsektor pada Sektor Pertanian di Provinsi Aceh (rumah tangga), Tahun 2013 dan 2023---------- 222
Gambar 2.106. Perkembangan Luas Panen Padi di Provinsi Aceh (Ribu Hektare), Tahun 2023–2025* ---------- 223
Gambar 2.107. Perkembangan Produksi Padi di Provinsi Aceh (Ribu Ton-GKG), 2023–2025* ---------- 225
Gambar 2.108. Perkembangan Luas Panen dan Produksi Jagung di Aceh Tahun 2020–2024 ---------- 225
Gambar 2.109. Perkembangan Luas Panen dan Produksi Jagung di Aceh Tahun 2020–2024 ---------- 226
Gambar 2.110. Proporsi Komoditi paad sub Sektor Perkebunan ---------- 227
Gambar 2.111. Perkembangan Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Kopi Robusta dan Arabika ---------- 229
Gambar 2.112. Perkembangan Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Kelapa Sawit ---------- 231
Gambar 2.113. Luas deforestasi di Aceh pada periode 1990–2017 ---------- 242
Gambar 2.114. Kebakaran Hutan dan Lahan Aceh Tahun 2003-2023---------- 245
Gambar 2.115. Konflik Satwa Liar di Aceh Tahun 2017-2024 ---------- 248
Gambar 2.116. Capaian Perhutanan Sosial Aceh sd. 2024 ---------- 255
Gambar 2.117. Perkembangan Nilai PDRB ADHK Sub Sektor Perikanan dan Nilai PDRB Aceh Tahun 2020-2024 (Rp Triliun) ---------- 258
Gambar 2.118. Peta Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Berbasis Mukim ---------- 260
Gambar 2.119. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Sumatera, 2023-2024 -- 261
Gambar 2.120. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Aceh Tahun 2020-2024 ---- 262
Gambar 2.121. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) 3 Sub Sektor Tahun 2024 -- 263
Gambar 2.122. Perkembangan Nilai Tukar Peternak (NTPt), 2023–2024 ---------- 264
Gambar 2.123. Nilai Tukar Petani Peternak (NTPt), 2024 ---------- 265
Gambar 2.124. Perkembangan NTP Nelayan 2020-2024---------- 266
Gambar 2.125. Perkembangan NTPi Tahun 2020-2024 ---------- 267
Gambar 2.126. Porsi EBT dalam Bauran Energi Aceh (%)---------- 268
Gambar 2.127. Perkembangan Nilai Realisasi Investasi di Aceh Tahun 2020-2024 - 271
Gambar 2.128. Persentase Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB Provinsi Aceh Tahun 2020-2024---------- 273
Gambar 2.129. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi layak Aceh 2020-2024 ---------- 279
Gambar 2.130. Status Desa di Aceh Tahun 2019 – 2024 ---------- 280
Gambar 2.131. Pembagian Wilayah Sungai Aceh---------- 292
Gambar 2.132. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Persen ---------- 293

Gambar 2.133. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Aceh Tahun 2020-2025 ---------- 295
Gambar 2.134. Rasio Izin Trayek di Aceh Tahun 2020-2024---------- 296
Gambar 2.135. Persentase Pemasangan Rambu-Rambu di Aceh Tahun 2020-2024 ---------- 298
Gambar 2.135. Growth Total Aset Keuangan Syariah dan Rasio Terhadap PDRB ---- 302
Gambar 2.136. Laju Inflasi Aceh dan Nasional Tahun 2019-2024 (y-on-y) (Persen) - 303
Gambar 2.137. Laju Inflasi Aceh dan Nasional (m-to-m) Tahun 2024- Februari 2025 (Persen) ---------- 304
Gambar 2.138. Jumlah Kunjungan Perpustakaan Tahun 2018 – 2024---------- 310
Gambar 2.139. Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Aceh Tahun 2020-2024* ---------- 311
Gambar 2.140. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Aceh Tahun 2020-2024 ---------- 311
Gambar 2.141. Jumlah Pengunjung Pada Layanan Arsip/JIKN Pada Tahun 2018-2014 ---------- 316
Gambar 2.142. Capaian SPM Provinsi Aceh Tahun 2020-2024---------- 317
Gambar 2.143. Capaian SPM Seluruh Bidang Se-Aceh e-SPM Tahun 2024---------- 317
Gambar 2.144. Perbandingan Nilai Aspek IDSD Aceh Tahun 2020-2024 ---------- 322
Gambar 2.149. Kontribusi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2018 s.d 2024---------- 362
Gambar 2.150. Perkembangan Realisasi Belanja Operasi, 2018-2024 ---------- 362
Gambar 2.151. Kontribusi Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 s.d 2024---------- 366
Gambar 2.152. Proyeksi Pendapatan Aceh 2025-2029 ---------- 379
Gambar 2.153. Proyeksi Belanja Aceh Tahun 2025-2029---------- 391

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Pada prinsipnya pembangunan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Aceh yang memiliki konteks khusus pasca konflik dan tsunami.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Ketiga peraturan ini memberikan arahan tentang tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk 1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; 3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan; 4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, yang dibagi menjadi urusan wajib dan

urusan pilihan. Urusan wajib mencakup pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa perencanaan pembangunan Aceh disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: nilai-nilai Islam, perdamaian, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan, serta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mempertimbangkan responsifitas gender.

Petunjuk teknis perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Hal ini ditujukan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode tahun 2025-2029 telah dilantik pada tanggal 12 Februari 2025. Atas dasar ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan peraturan daerah. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah dan kearifan lokal sesuai dengan amanat pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Agar pembangunan dapat memberikan hasil yang optimal, maka RPJMD harus pula memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan spasial yang telah digariskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025-20229 disusun dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dalam mendukung pencapaian visi Nasional "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" yang dituangkan dalam delapan asta cita pembangunan dengan pedoman teknis penyusunan sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

RPJM Aceh 2025-2029 disusun telah mengakomodir dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMA 2025-2029 dengan menerapkan 4 (empat) pilar yaitu Pilar Ekonomi, Pilar Sosial, Pilar Hukum dan Tata Kelola dan Pilar Lingkungan serta 17 (tujuh belas) *Goals* yang mengacu kepada Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD.

RPJM Aceh 2025-2029 merupakan tahapan pembangunan pertama dari RPJP Aceh 2025-2045. Tahapan ini memfokuskan pada penguatan pondasi transformasi RPJPA, dengan fokus pembangunan dititikberatkan pada pencapaian transformasi sosial, transformasi tata kelola, keamanan yang tangguh, demokrasi, stabilitas ekonomi, implementasi Syariat Islam, pembangunan kewilayahan, ketahanan ekologi dan kesinambungan pembiayaan.

Dokumen RPJM Aceh adalah dokumen publik yang merangkum daftar rencana program pembangunan lima tahunan di bidang pelayanan umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka penyusunan RPJMD dilakukan dengan 4 (empat) pendekatan penting yaitu: *Pertama*, pendekatan teknokratik yakni proses penyusunan dengan berdasarkan pada penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. *Kedua*, pendekatan partisipatif yakni dengan memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberikan masukan, saran dan kritikan atas rancangan RPJMD. *Ketiga*, pendekatan politis yakni menetapkan RPJMD melalui proses legislasi daerah dalam bentuk Qanun. *Keempat*, pendekatan *bottom up* dan *top down* yang proses perencanaannya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan. Selain menggunakan pendekatan di atas, penyusunan RPJM Aceh dilaksanakan melalui pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai suatu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau

permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, sasaran dan kebijakan yang diuraikan dalam dokumen ini adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan, serta tetap mensinkronkan dengan sasaran, kebijakan dan program strategis nasional.

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, RPJM Aceh 2025-2029 telah terintegrasi dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMA karena Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) yang termuat dalam KLHS RPJMA menjadi pertimbangan untuk merumuskan isu-isu strategis dan menetapkan program-program dalam RPJM yang mempunyai dampak terhadap lingkungan. Dengan demikian, KLHS RPJMA menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMA sebagai upaya mewujudkan pembangunan Aceh yang berkelanjutan (*sustainable development*).

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2025 -2029 yang selanjutnya disebut RPJM Aceh adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif yang berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
38. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53).

39. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh tahun 2013 – 2033, Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
40. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
41. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
42. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
43. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
44. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
45. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Qanun Aceh Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus. (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
46. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
47. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 151);
48. Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor S.01/E/PDLKWS/PLA.5.1/B/1/2025 tanggal 2 Januari 2025 perihal Persetujuan Validasi KLHS RPJM Aceh Tahun 2025-2029.

## 1.3. Hubungan Antar Dokumen

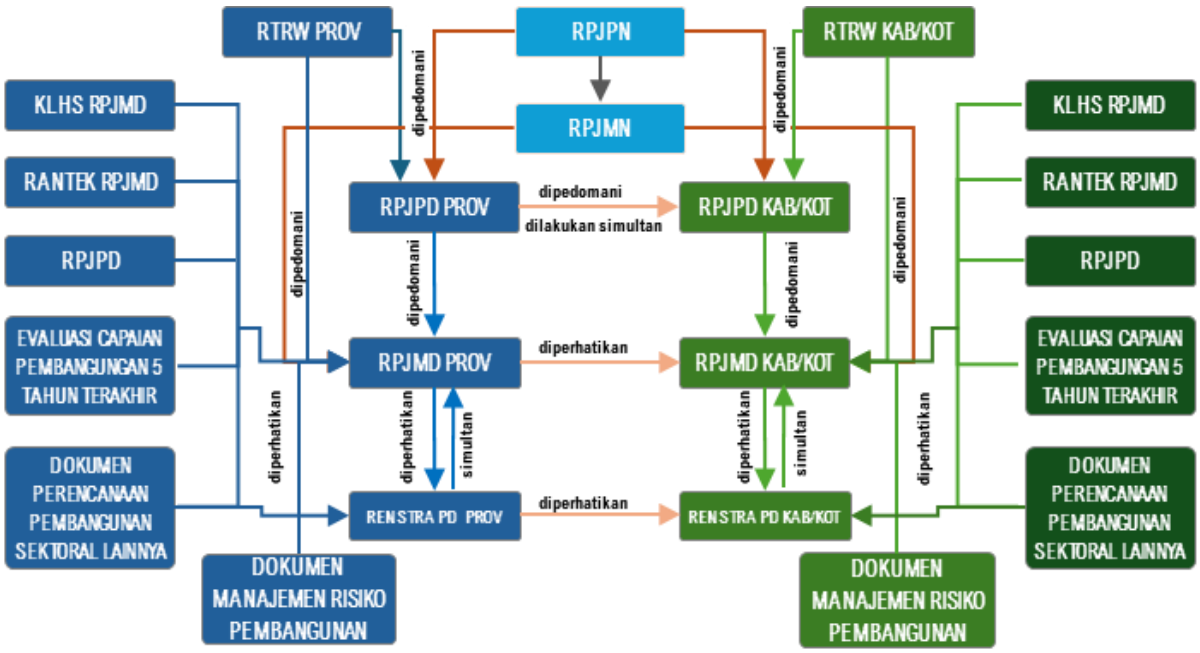
Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan.

Sehingga dalam penyusunan RPJM Aceh harus berpedoman pada RPJP Aceh dan mengacu pada RTRW Aceh serta memperhatikan RPJM Nasional.

RPJM Aceh ini menjadi pedoman dalam rangka penyesuaian dokumen-dokumen lainnya seperti:

1. Rencana pembangunan lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) SKPA;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Aceh, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
3. Rencana Pembangunan Tahunan SKPA, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja-SKPA) adalah dokumen perencanaan SKPA untuk periode 1 (satu) tahun.

Dengan demikian diharapkan akan terciptanya sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan wilayah baik bersifat jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, sehingga terwujudnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan (Gambar 1.1).




Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen

## 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJM Aceh Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Aceh untuk periode lima tahun, yang memuat visi, misi Kepala Daerah, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan.

Tujuan penyusunan RPJM Aceh Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi dalam bentuk strategi, arah kebijakan, dan menetapkan program pembangunan daerah;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA), dan perencanaan serta penganggaran.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi yang berbatasan.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dengan prioritas yang terencana.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJM Aceh Tahun 2025–2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 disajikan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini paling sedikit menyajikan Latar Belakang; Dasar Hukum Penyusunan; Hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya; maksud dan tujuan; dan sistematika penyusunan.

BAB II GAMBARAN UMUM ACEH

Pada bab ini paling sedikit berisikan Gambaran umum kondisi daerah; Gambaran umum kondisi keuangan daerah; serta permasalahan dan isu strategis daerah

BAB III VISI, MISI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH

Pada bab ini memuat paling sedikit Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD; Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

BAB VI PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ACEH

Dalam bab ini memuat paling sedikit Program Perangkat Daerah tahun 2025-2029; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKU dan IKD) tahun 2025-2029;

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

# BAB II
# GAMBARAN UMUM ACEH

Gambaran umum Aceh yang meguraikan secara sistematis gambaran umum kondisi Aceh yang meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kondisi keuangan Aceh yang menguraikan tentang kinerja kuangan masa lalu, Neraca daerah, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

## 2.1. Gambaran Umum Kondisi Aceh

### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi membahas karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, demografi, dan sosiologi.

#### 2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan ibukota Banda Aceh yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan nasional dan internasional. Aceh menghubungkan belahan dunia timur dan barat yang secara astronomis terletak pada 01o 58' 37,2"- 06o 04' 33,6" Lintang Utara dan 94o 57' 57,6"-98o 17' 13,2" Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis, batas wilayah Aceh adalah sebagai berikut:

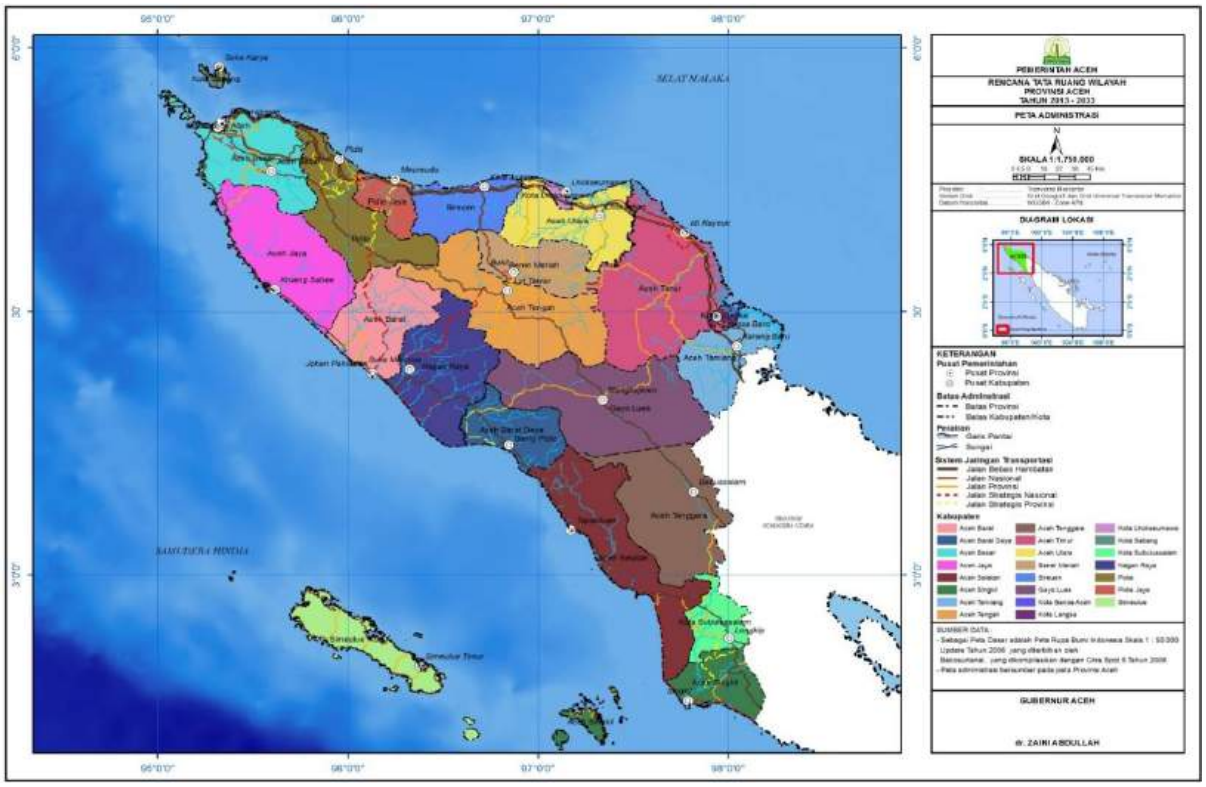
Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Indonesia

Sebelah Timur : berbatasan dengan Sumatera Utara

Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait batas administrasi antar kabupaten dalam provinsi Aceh dan dengan provinsi yang berbatasan. Luas wilayah daratan adalah sebesar 5.683.370,397 ha yang meliputi daratan utama di Pulau Sumatera, pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Luas wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaan Aceh berdasarkan Qanun RZWP3K Aceh Tahun 2020-2040 adalah sebesar 4.400.156,053 ha (12 mil laut dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan). Secara administratif, Aceh memiliki 23 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten, 5 Kota, 290 Kecamatan, 6.515 Gampong sesuai dengan data BPS Aceh yang dipublikasikan dalam Aceh Dalam Angka tahun 2023. Secara lebih jelas batas wilayah administrasi Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.1




*Sumber: Qanun RTRW Aceh 2013-2033*

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Aceh

### 2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

#### A. Kondisi Hidrologi

#### A1. Air Permukaan

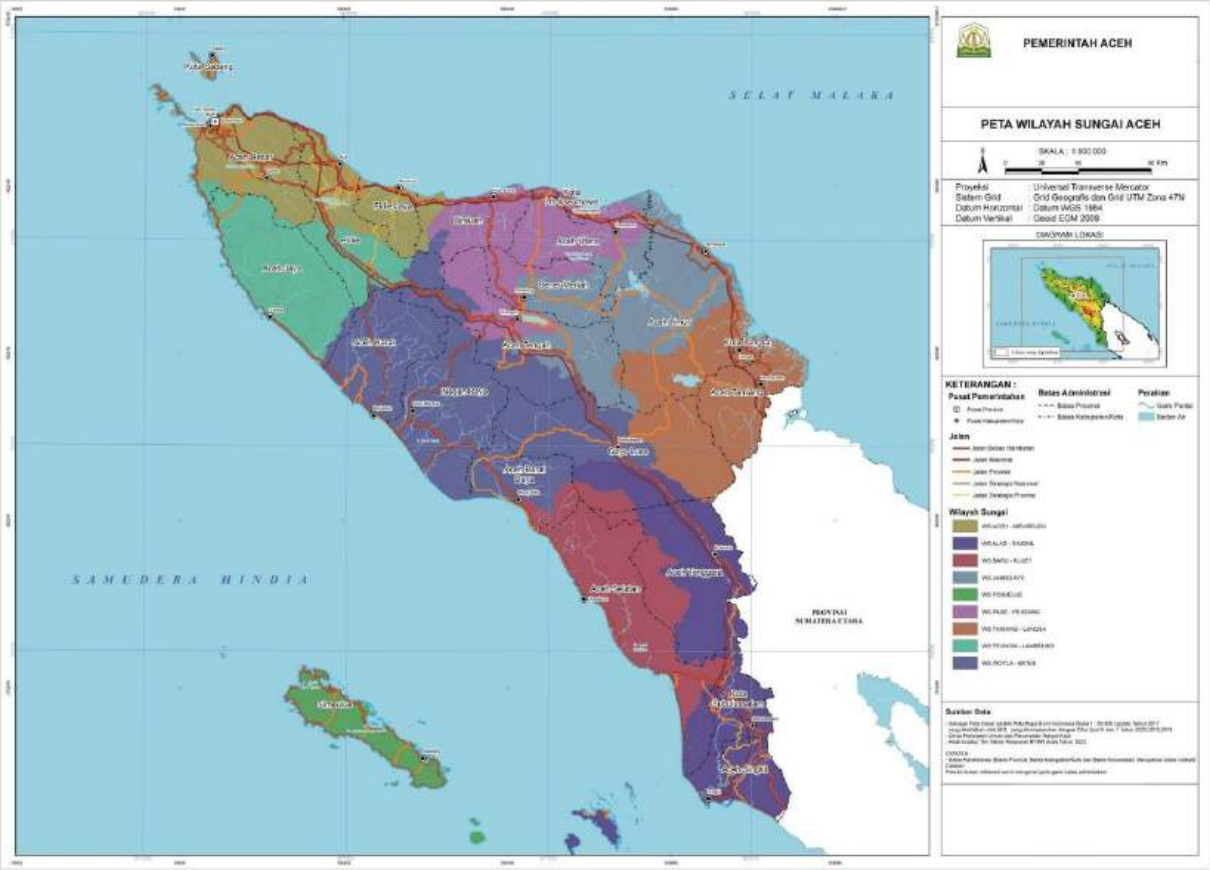
Menurut UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang dimaksud dengan Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah yang meliputi mata air, sungai, danau, waduk, rawa dan sumber permukaan air lainnya.

#### A1.1. Sungai dan Daerah Aliran Sungai

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Aceh memiliki 152 DAS, yang terletak dalam Daerah Strategis Nasional sebanyak 56 DAS yaitu WS. Aceh– Meureudu memiliki 30 DAS, WS. Woyla–Bateue memiliki 13 DAS dan WS. Jambo Aye memiliki 13 DAS. Pada Daerah Lintas Provinsi yaitu WS. Alas–Singkil memiliki 8 DAS, sedangkan pada Daerah Lintas Kab/Kota terdapat 62 DAS yaitu WS. Teunom–Lambeso memiliki 14 DAS, WS. Pase–Peusangan memiliki 10 DAS, WS. Tamiang–Langsa memiliki 17 DAS dan WS. Baru–Kluet memiliki 21 DAS dan dalam pemerintahan Kabupaten/Kota yaitu WS Simeulue memiliki 26 DAS.

Beberapa sungai yang telah mengalami degradasi dan sedimentasi sehingga diperlukan penanganan menyeluruh mulai dari bagian hulu, tengah, dan hilir sungai. Untuk bagian hulu dilakukan penanganan terhadap rehabilitasi lahan kritis melalui reboisasi pada luasan daerah aliran sungai. Sementara itu wilayah tengah sungai diperlukan pengawasan dan penertiban pemanfaatan sungai, berikut pembangunan tanggul terhadap

penyelamatan fasilitas publik yang didahului dengan perencanaan. Sedangkan wilayah hilir dilakukan Pengerukan pada daerah – daerah yang terjadi sedimentasi yang telah mengganggu aktivitas pelayaran dan aktivitas perekonomian lainnya. Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.5.




*Sumber: Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015*

Gambar 2.2. Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh

Berdasarkan gambar diatas, luas Wilayah Sungai dan Jumlah DAS masing – masing Wilayah Sungai, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Luas DAS Wilayah Sungai berdasarkan Kewenangan

| No. | Kewenangan | Letak Geografis | Kode WS | Wilayah Sungai | Luas WS ($Km^2$) | Jumlah DAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Pemerintah Pusat | Strategis Nasional | WS 01.01.A3 | Aceh – Meureudue | 5.558,36 | 30 |
| | | | WS 01.05.A3 | Jambo Aye | 6.781,05 | 13 |
| | | | WS 01.04.A3 | Woyla – Bateue | 12.406,89 | 13 |
| | | Lintas Provinsi | WS 01.09.A2 | Alas – Singkil | 13.400,31 | 8 |
| II | Pemerintah Aceh | Lintas Kabupaten/ Kota | WS 01.03.B | Pase – Peusangan | 5.601,34 | 10 |
| | | | WS 01.06.B | Tamiang – Langsa | 6.287,07 | 17 |
| | | | WS 01.02.B | Teunom – Lambesoi | 5.257,73 | 14 |
| | | | WS 01.07.B | Baru – Kluet | 5.311,44 | 21 |

| No. | Kewenangan | Letak Geografis | Kode WS | Wilayah Sungai | Luas WS ($Km^2$) | Jumlah DAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III | Pemerintah Kabupaten | Dalam Kabupaten/ Kota | WS 01.08.C | Pulau Simeulue | 1.828,65 | 26 |

*Sumber : Permen PUPR No. 04 Tahun 2015*

Berdasarkan Masterplan Pengendalian Banjir Tahun 2022, terdapat beberapa daerah Wilayah Sungai yang rawan banjir dan mengalami genangan banjir yaitu:

1. Wilayah Sungai Aceh-Meureudue

   Banjir, banjir bandang terjadi di Kecamatan Padang Tiji dan Kecamatan Tangse (DAS Aceh) karena penebangan liar (perubahan tutupan lahan/alih fungsi lahan) dari hutan menjadi lahan perkebunan. Beberapa DAS yang melintasi pemukiman mengalami banjir terutama terdapat di Kr. Aceh. Rawan Banjir yang disebabkan oleh meluapnya Kr. Aceh (DAS Aceh) berdampak pada Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie. Sungai lainnya yang rawan terjadi banjir diantaranya adalah Kr. Baro, Kr. Tiro di Kabupaten Pidie, Kr. Meureudu, Kr. Panteraja dan Kr. Ulim di Kabupaten Pidie Jaya;

2. Wilayah Sungai Jambo Aye

   DAS yang rawan banjir pada WS Jambo Aye antara lain DAS Jambo Aye (Krueng Jambo Aye), DAS Arakundo (Krueng Arakundo), dan DAS Peureulak (Krueng Peureulak). DAS Jambo Aye merupakan DAS dengan daerah rawan banjir terluas yaitu sekitar 20.392,99 Ha.

3. Wilayah Sungai Woyla-Bateue

   Terjadinya Banjir di beberapa wilayah di WS Woyla Bateue akibat dari curah hujan yang tinggi, koefisien aliran yang tinggi, perubahan lahan dari hutan menjadi kebun, penebangan secara liar sehingga daya resap air kecil. Sebagian besar kegagalan panen di WS Woyla-Bateue ini juga disebabkan oleh banjir akibat buruknya sistem drainase sehingga banjir menggenangi daerah irigasi (Krueng Meureubo, Woyla, Bateue, Tripa)

4. Wilayah Sungai Alas-Singkil

   Bencana banjir sering terjadi di daerah hulu Sungai Alas (Kabupaten Aceh Tenggara), Sungai Lae Soraya (Kota Subulussalam), dan hilir Sungai Singkil (Kabupaten Singkil).

5. Wilayah Sungai Teunom Lambesoi

   Terjadinya banjir pada daerah pertanian dan permukiman akibat dari bencana alam karena curah hujan tinggi dan ketidakmampuan badan sungai dalam menampung debit yang lewat, seperti banjir Sungai Kr. Teunom yang terjadi di hilir Sungai Kr. Teunom.

6. Wilayah Sungai Pase-Peusangan

   terjadi banjir/luapan air pada sungai-sungai antara lain Krueng Keureuto, Krueng Peuto, Krueng Buloh, Krueng Peuto, Krueng Pirak di Kabupaten Aceh Utara, Krueng Peusangan, Krueng Jeunib, Krueng Peudada dan Krueng Pase di Kabupaten Bireuen.

7. Wilayah Sungai Baru-Kluet

   Banjir melanda di hulu Krueng Kluet dan Krueng Baru. Banjir di hulu lebih disebabkan karena kerusakan DAS diantaranya di Kluet tengah yang berada pada hulu Kluet di DAS Kluet. Sedangkan banjir di daerah hilir disebabkan oleh selain kondisi topografinya yang relatif landai yaitu 0-8 persen juga disebabkan oleh tersumbatnya aliran anak-anak sungai akibat adanya pasang surut air laut yang berpengaruh terhadap sungai utamanya, diantaranya di Kec. Labuhan Haji sering mengalami banjir akibat meluapnya Kr.Baru. Kr. Kluet dan Kr. Baru setiap tahunnya meluap dan menggenangi daerah dataran rendah di Kabupaten Aceh Selatan, banjir juga sering terjadi di sekitar bantaran Kr. Kluet di Kota Fajar.

8. Wilayah Sungai Tamiang-Langsa

   Banjir tersebar hampir di semua kabupaten/kota (DAS Tamiang sekitar Kecamatan Kuala Simpang, Kecamatan Tamiang Hulu, Kecamatan Manyak Payed, Kecamatan Seruway, Kecamatan Bendahara, Kecamatan Kejuruan Muda dan Kecamatan Karang Baru, dan pada DAS Bayeun di Kabupaten Aceh Timur sekitar Kecamatan Bireun Bayeun dan Kecamatan Peureulak Timur). Dominasi DAS yang terkena genangan banjir adalah DAS Tamiang seluas 32,646.09 Ha sedangkan DAS Langsa seluas 7.617,30 Ha.

Ada beberapa sungai yang perlu dilakukan kegiatan Pemeliharaan seperti Krueng Arakundo, Krueng Keureuto, Krueng Tamiang, Krueng Langsa dan Krueng Teunom dan pada beberapa lokasi sungai-sungai tersebut diperlukan upaya penertiban terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sempadan sungai untuk mengamankan aset pemerintah.

Sebagian besar muara sungai, terjadi endapan sedimen yang sangat besar sehingga menyebabkan terhambatnya aliran banjir dan mengganggu lalu lintas kapal/perahu nelayan. Sungai-sungai yang muaranya terjadi endapan sedimen antara lain, Krueng Baro di Kabupaten Pidie, Krueng Ulim dan Krueng Pante Raja di Kabupaten Pidie Jaya, Krueng Peudada, Krueng Samalanga, Krueng Jeunib dan Krueng Plimbang di Kabupaten Bireuen, Krueng Idi di Kabupaten Aceh Timur, Krueng Langsa di Kota Langsa, Krueng Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang, Krueng Keureuto dan Krueng Pase di Kabupaten Aceh Utara, Krueng Teunom di Kabupaten Aceh Jaya, Krueng Seunagan dan Krueng Tripa di Kabupaten Nagan Raya dan Krueng Singkil di Kabupaten Aceh Singkil, Krueng Labuhan Haji dan Krueng Kluet di Aceh Selatan, Krueng Sarah di Kabupaten Aceh Besar.

Permasalahan pengelolaan sungai antara lain adalah: 1) terjadi degradasi beberapa daerah aliran sungai; 2) tingginya sedimentasi di muara sungai; 3) pengelolaan daerah aliran sungai belum terpadu, dimana sebagian besar wilayah sungai di Aceh dikelola oleh

BPDAS Krueng Aceh, sementara wilayah sungai Alas Singkil dikelola oleh BPDAS Sei Wampu. Oleh karena itu hal-hal yang perlu dilakukan antara lain: 1) rehabilitasi dan reboisasi daerah aliran sungai yang telah kritis; 2) pengerukan sedimen pada muara sungai dan 3) mengimplementasikan pengelolaan sungai secara terpadu dari hulu ke hilir.

Pendayagunaan sumber daya air meliputi pengembangan daerah irigasi, pengembangan daerah rawa, pengembangan irigasi air tanah, dan penyediaan air baku termasuk air minum, air industri dan penggelontoran untuk drainase. Pengendalian dan penanggulangan daya rusak air meliputi pengendalian dan pengaturan sungai, pengamanan akibat abrasi pantai, pengamanan terhadap potensi kerusakan akibat bencana, dan pengendalian dan penanggulangan daya rusak air tanah melalui pembangunan sumur pantau dan sumur resapan air tanah.

Arah dan pola aliran sungai yang melintasi wilayah Aceh dapat dikelompokkan atas dua pola utama yaitu: sungai - sungai yang bermuara ke Samudera Indonesia atau ke arah Barat - Selatan dan sungai - sungai yang bermuara ke Selat Malaka atau ke arah Timur - Utara. Potensi air di wilayah Provinsi Aceh dimana adanya ketersediaan air dan kebutuhan air pada Wilayah Sungai, dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai

| No. | Nama Wilayah Sungai | Jlh DAS | Panjang (Km) | Ketersediaan Air | | Kebutuhan Air | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $m^3/dt$ | milyar. $m^3/thn$ | $m^3/dt$ | milyar. $m^3/thn$ |
| *KEWENANGAN PUSAT* | | | | | | | |
| 1. | WS Aceh – Meureudue | 30 | 447,79 | 197,55 | 6,23 | 117,13 | 3,69 |
| 2. | WS Jambo Aye | 13 | 660,16 | 200,41 | 6,32 | 91,01 | 2,87 |
| 3. | WS Woyla – Batee | 13 | 547,40 | 638,64 | 20,14 | 109,40 | 3,45 |
| 4. | WS Alas – Singkil | 8 | 639,80 | 890,73 | 28,09 | 109,72 | 3,46 |
| *KEWENANGAN PROVINSI* | | | | | | | |
| 5. | WS Pase- Peusangan | 10 | 536 | 205,48 | 6,48 | 89,42 | 2,82 |
| 6. | WS Teunom– Lambesoi | 14 | 502,20 | 604,71 | 19,07 | 89,1 | 2,81 |
| 7. | WS Tamiang-Langsa | 17 | 261,30 | 354,20 | 11,17 | 129,38 | 4,08 |
| 8. | WS Baru-Kluet | 21 | 128,95 | 248,29 | 7,83 | 102,11 | 3,22 |
| *KEWENANGAN KAB/KOTA* | | | | | | | |
| 9. | WS Simeulue | 26 | 102,22 | 98,93 | 3,12 | 10,78 | 0,34 |
| TOTAL | | 152 | 3.825,82 | 3.438,93 | 108,45 | 847,92 | 26,74 |

*Sumber: Laporan Penyusunan Pola Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, 2017*

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai menggambarkan bahwa potensi sumber daya air dengan debit yang ada akan memenuhi berbagai kebutuhan seperti irigasi, air baku dan lain sebagainya. Pada Wilayah Krueng Aceh hingga Krueng Tiro, termasuk wilayah kering dengan curah hujan kurang dari 1.500 mm/tahun dan dengan debit andalan 4 liter/detik/$km^2$ , Wilayah Krueng Meureudu dan sepanjang wilayah pantai timur Aceh termasuk wilayah sedang dengan curah hujan 1.500 – 3.000 mm/tahun dengan debit andalan 7 – 8 liter/detik/$km^2$, dan wilayah pantai barat Aceh, yang termasuk wilayah basah dengan curah hujan 3.000 – 4.000 mm/tahun dan dengan debit andalan 17 – 18 liter/detik/$km^2$. Peta Batas DAS yang menguraikan penyebaran DAS di Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.3.




*Sumber : SK.304/MenLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018*

Gambar 2.3. Peta Batas DAS di Wilayah Aceh

### A1.2. Embung, Waduk dan Tampungan Air Lainnya

Embung merupakan bangunan konservasi air berbentuk cekungan di sungai atau aliran berupa urugan tanah, urugan batu, beton dan/atau pasangan batu yang dapat menahan dan menampung air untuk berbagai keperluan. Embung kewenangan Pemerintah Aceh diklasifikasikan berdasarkan pemanfaatan untuk konservasi pada Wilayah Sungai dan Daerah Irigasi. Embung Kewenangan Pemerintah Aceh yang diklasifikasi berdasarkan pemanfaatan untuk konservasi pada Wilayah Sungai antara lain Embung Teupin Keubu, Embung Paya Punjet dan Embung Lhok Gajah di Kab. Aceh Utara. Sedangkan embung kewenangan Pemerintah Aceh yang diklasifikasikan berdasarkan pemanfaatan untuk Daerah Irigasi yaitu Embung Paya Seupat, Embung Paya Reuleut, Embung Paya Pie, Embung Jurong Beurangkat, Embung Glee Bruk dan Embung Hutan Pantang di Kab. Pidie Jaya; Embung Paya Laot dan Embung Paya Sikameh di Kab. Bireuen; Embung Meurandeh di Kota Langsa.

Waduk adalah sebuah bendungan besar yang dibangun untuk menampung air dalam jumlah besar. Waduk biasanya dibangun di lembah sungai dan dapat menyimpan air hujan serta aliran sungai untuk berbagai keperluan seperti irigasi, air minum, pembangkit listrik tenaga air, dan pengendalian banjir. Berdasarkan kegunaannya, waduk bisa dikategorikan dalam 2 jenis yaitu waduk single purpose dan waduk multi purpose. Dalam rangka mendukung ketahanan energi, air dan kemandirian pangan dimana pada tahun 2045 pemerintah pusat menargetkan kapasitas tampungan air bisa mencapai 200 m3/kapita, Aceh mempunyai potensi–potensi tampungan air yang dapat dikembangkan dan diberdayakan. Potensi–potensi tersebut diantaranya dapat disebutkan adalah, Waduk Lhok Pineung di Kabupaten Pidie Jaya dengan potensi tampungan mencapai 49 juta m3, Waduk Tamiang Hulu di Kabupaten Aceh Tamiang dengan potensi tampungan mencapai 114,63 juta m3, Waduk Krueng Sabee di Kabupaten Aceh Jaya dengan potensi tampungan mencapai 54,85 juta m3 dan Waduk Krueng Kluet di Kabupaten Aceh Selatan dengan potensi tampungan mencapai 87,75 juta $m^3$.

### A1.3. Rawa

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2013 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak, Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung didalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem. Pengembangan Rawa di wilayah Pantai Utara Timur diprioritaskan untuk budidaya perikanan (tambak), sedangkan di Pantai Barat Selatan untuk lahan pertanian. Namun belum seluruh rawa dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena belum didukung oleh jaringan drainase yang memadai. Pengembangan rawa menjadi lahan pertanian harus dilakukan secara hati-hati dan berpedoman kepada RTRW Aceh yang telah ditetapkan. Dengan kata lain beberapa kawasan rawa yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan suaka marga satwa tidak boleh dimanfaatkan sebagai lahan budidaya (pertanian). Selanjutnya pengembangan rawa di luar kawasan lindung dan suaka marga satwa harus berpedoman kepada undang-undang tata ruang (UU Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penataan Tata Ruang).

Adapun Daerah Irigasi Rawa yang merupakan kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi antara lain D.I.R. Keutengga yang merupakan daerah irigasi rawa lintas kabupaten/kota yang tersebar di Kota Langsa, Kab. Aceh Timur dan Kab. Aceh Tamiang; D.I.R. Babah Nipah di Kab. Aceh Jaya dan D.I.R. Seuneubok Padang Kab. Aceh Jaya

### A1.4. Tambak

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2013 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak, Tambak adalah kolam air payau yang digunakan untuk budidaya perikanan darat berupa udang, ikan, kepiting, kerang-kerangan dan rumput laut. Jaringan irigasi tambak adalah saluran, bangunan, dan

bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi tambak.

Adapun Daerah Irigasi Tambak yang merupakan kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi antara lain D.I.T. Pasi Sibadeh dan D.I.T. Trumon di Kab. Aceh Selatan; D.I.T. Julok dan D.I.T. Simpang Ulim di Kab. Aceh Timur; D.I.T. Seuneudon di Kab. Aceh Utara; D.I.T. Jeumpa Peusangan di Kab. Bireuen.

### A1.5. Danau

Aceh memiliki beberapa danau yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Data potensi dari danau – danau tersebut disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Potensi Danau Aceh

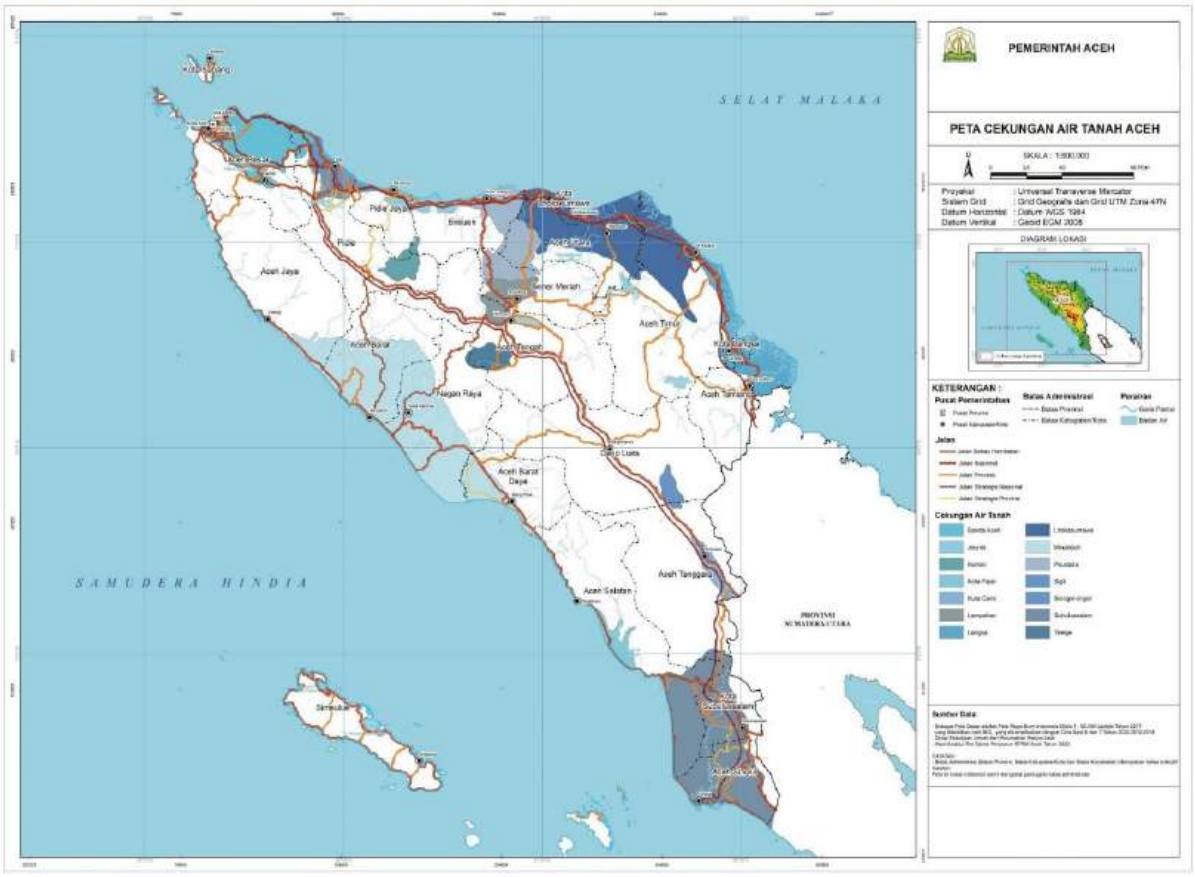
| No | Nama Danau | Lokasi | Luas (Ha) | Volume ($m^3$) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Danau Aneuk Laot | Sabang | 45,49 | 3.000.000 |
| 2. | Danau Laut Tawar | Aceh Tengah | 5.654,00 | 175.000.000 |
| 3. | Danau Laut Penang Suasa | Aceh Jaya | 47,73 | 7.064.040 |
| 4. | Danau Laut Bangko | Aceh Selatan | 70,76 | 2.400.000 |
| 5. | Danau Peastep | Aceh Singkil | 10,86 | 2.000.000 |
| 6. | Danau Paris | Aceh Singkil | 57,75 | 877.650 |
| 7. | Danau Bungara | Aceh Singkil | 77,78 | 1.446.375 |
| 8. | Danau Pinang | Aceh Singkil | 34,49 | 516.750 |
| 9. | Danau Lincier | Aceh Singkil | 64,53 | 9.034.200 |
| 10. | Danau Opupu | Simeulue | 138,10 | 19.334.000 |
| | Total | | 6.201,49 | 220.673.015 |

*Sumber: Dinas Pengairan Aceh*

Potensi daya tampung air danau yang ada cukup tinggi sehingga memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di sekitarnya, antara lain untuk penyediaan air bersih, media budidaya perikanan, tempat rekreasi, habitat bagi tumbuhan dan satwa. Selain itu, danau juga dapat dimanfaatkan sebagai objek penelitian dan pendidikan serta prasarana transportasi. Namun potensi danau tersebut belum dikelola secara optimal.

### A2. Air Tanah

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung, dan fungsi air tanah. Kelangsungan fungsi air tanah penting dilakukan untuk menjaga keseimbangan pendayagunaan sumber daya air yang bersumber dari air tanah agar tidak terjadi kerusakan air tanah seperti amblesan tanah, kekeringan air tanah, dan intrusi air asin.




*Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2017;Citra Spot 6, dan 7 tahun 2020, 2019, 2018*

Gambar 2.4. Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Aceh

Kegiatan pengelolaan air tanah yang dilakukan yaitu pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) yang meliputi pemetaan zona konservasi air tanah, penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah termasuk pembangunan sumur pantau dan pemutakhiran sumur pantau serta sumur masyarakat. Selain itu, kegiatan penatausahaan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam daerah provinsi dan kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Provinsi Aceh. Sesuai dengan Peta Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Aceh, dapat diidentifikasikan 14 (empat belas) CAT seperti disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Cekungan Air Tanah (CAT) Di Aceh

| NO | CAT | Kabupaten/Kota | Luas (HA) |
|---|---|---|---|
| 1 | Meulaboh | Aceh Barat | 166,559.89 |
| | | Aceh Barat Daya | 47,993.09 |
| | | Aceh Jaya | 27,601.39 |
| | | Aceh Selatan | 1,558.40 |
| | | Nagan Raya | 205,378.09 |
| 2 | Subulussalam | Aceh Selatan | 110,517.86 |
| | | Aceh Tenggara | 2,561.56 |
| | | Kota Subulussalam | 85,521.37 |
| | | Aceh Singkil | 136,164.79 |

| NO | CAT | Kabupaten/Kota | Luas (HA) |
|---|---|---|---|
| 3 | Kota Fajar | Aceh Selatan | 26,949.94 |
| 4 | Kuta Cane | Aceh Tenggara | 24,805.14 |
| 5 | Siongal-ongal | Aceh Tenggara | 2,029.26 |
| | | Gayo Lues | 16,097.90 |
| 6 | Langsa | Aceh Tamiang | 66,986.10 |
| | | Aceh Timur | 43,647.23 |
| | | Kota Langsa | 20,118.51 |
| 7 | Lhokseumawe | Aceh Timur | 114,357.26 |
| | | Aceh Utara | 171,618.32 |
| | | Bireuen | 1,384.88 |
| | | Kota Lhokseumawe | 15,343.51 |
| 8 | Peudada | Aceh Utara | 39,749.81 |
| | | Bener Meriah | 28,975.66 |
| | | Bireuen | 50,794.24 |
| 9 | Lampahan | Aceh Tengah | 16,348.21 |
| | | Bener Meriah | 33,123.36 |
| 10 | Telege | Aceh Tengah | 26,288.19 |
| | | Nagan Raya | 2,537.26 |
| 11 | Kemiki | Bireuen | 3,315.90 |
| | | Pidie | 21,068.42 |
| | | Pidie Jaya | 3,465.41 |
| 12 | Jeunib | Bireuen | 18,145.03 |
| | | Pidie Jaya | 12,527.09 |
| 13 | Sigli | Pidie | 48,731.81 |
| | | Pidie Jaya | 6,559.72 |
| 14 | Banda Aceh | Pidie | 13,990.81 |
| | | Kota Banda Aceh | 5,616.66 |
| | | Aceh Besar | 125,249.69 |
| JUMLAH | | | 1,743,681.75 |

*Sumber: Qanun RTRW Aceh 2013-2033*

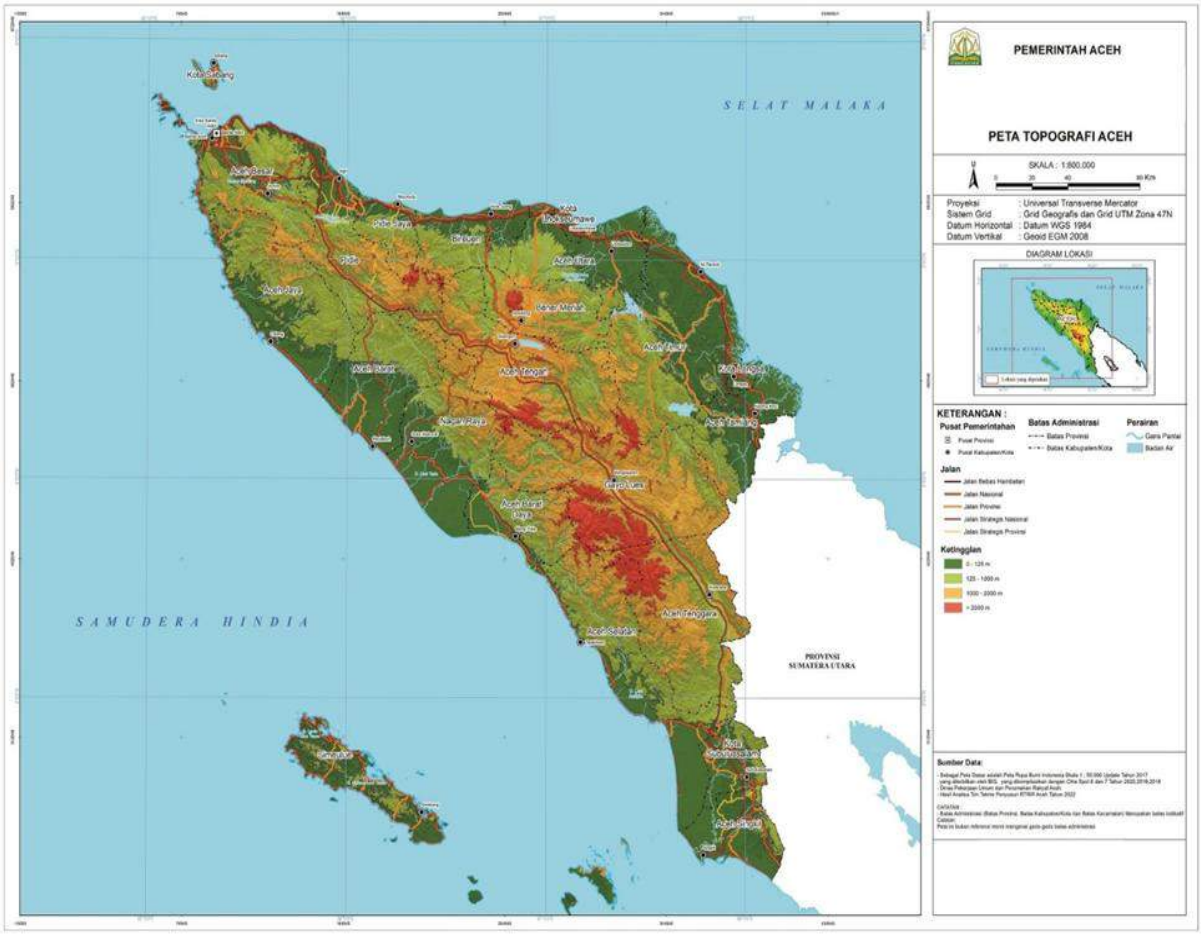
Pengelolaan air tanah juga perlu didukung oleh kegiatan penyelidikan geologi yaitu inventarisasi serta evaluasi kondisi geologi dan hidrogeologi dengan data yang bersumber dari peta geologi, peta hidrogeologi, analisa laboratorium, dan peninjauan lapangan.

## B. Kondisi Topografi

Topografi wilayah Aceh bervariasi dari datar hingga bergunung. Wilayah topografi datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah Aceh, sedangkan berbukit hingga bergunung sekitar 68 persen dari luas wilayah Aceh. Daerah dengan topografi bergunung terutama terdapat di bagian tengah Aceh yang termasuk ke dalam gugusan pegunungan bukit barisan, sedangkan daerah dengan topografi berbukit dan landai terutama terdapat di bagian Utara dan Timur Aceh.

Berdasarkan kelerengan wilayah Aceh memiliki kelerengan datar (0 – 8 persen) yang tersebar di sebagian besar sepanjang pantai utara – timur dan pantai barat – selatan seluas 2.795.650,22 Ha. Dataran landai (8 – 15 persen) yang tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh. Bagian tengah kabupaten/kota

yang berada di wilayah Barat – Selatan dan pantai Utara – Timur dengan luas 1.209.573,1 Ha. Agak curam (16 - 25 persen) seluas 1.276.759,5 Ha hingga curam (26 – 40 persen) dengan luas 219.599,85 Ha yang tersebar di daerah tengah. Wilayah sangat curam (> 40 persen) dengan total luas 175.498,3 Ha merupakan punggung pegunungan Seulawah, Gunung Leuser, dan tebing sungai.



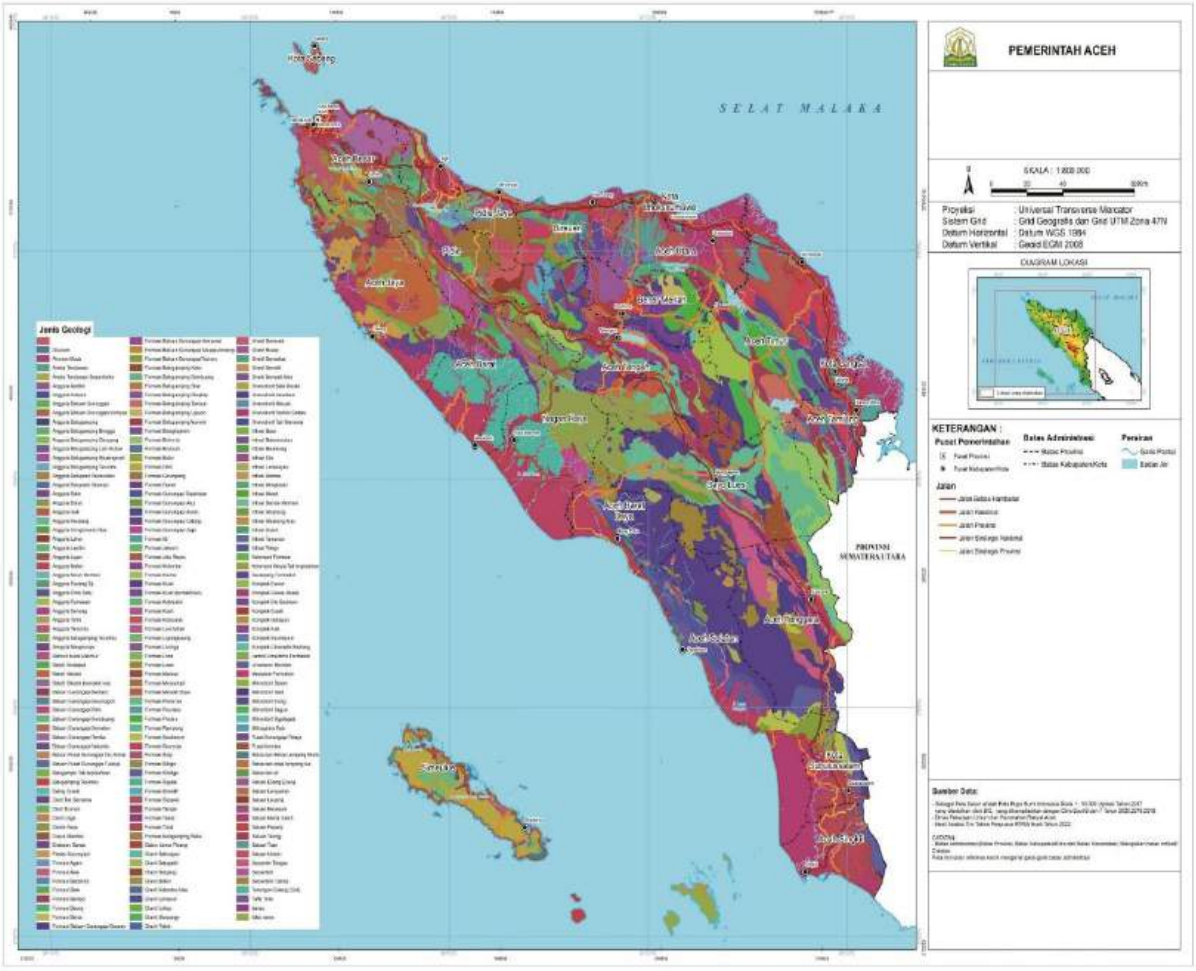

*Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2017;Citra Spot 6, dan 7 tahun 2020, 2019, 2018*

Gambar 2.5. Peta Topografi Aceh

Wilayah Aceh memiliki 4 (empat) level ketinggian, yaitu: 1) Dengan ketinggian 0 - 125 mdpl, berada di Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, hampir seluruh wilayah Simeulue, Sabang, dan Pulo Aceh, serta sebagian besar pesisir Aceh; pada bagian Barat, Selatan dan Timur Aceh bentuk dataran ini cenderung lebih lebar; 2) Daerah dengan ketinggian 125 – 1.000 m dpl, terdapat di seluruh kabupaten/kota, kecuali Kota Banda Aceh, Kota langsa, dan Pulo Aceh; 3) Daerah berketinggian 1.000 – 2.000 m dpl, terletak di wilayah tengah yang meliputi wilayah kabupaten: Pidie, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara; 4) Daerah paling tinggi dihitung > 2.000 m dpl, berada di daerah sekitar Gunung Peut Sagoe di Kabupaten Pidie, Gunung Burni Telong dan Gunung Geureudong di Kabupaten Bener Meriah, serta Gunung Leuser di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Selatan.

## B1.1. Kondisi Geologi

Kondisi geologi Aceh sangat kompleks, terdiri dari aneka jenis batuan dengan struktur yang rumit. Tektonisasi dan sejarah geologi, membuat keberadaan Sumber Daya Geologi Aceh sangat kaya dan bervariasi.




*Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2017;Citra Spot 6, dan 7 tahun 2020, 2019, 2018*

Gambar 2.6. Peta Geologi Aceh

Jenis batuan yang terdapat di Aceh dikelompokkan menjadi batuan beku, batuan metamorfik atau malihan, batuan sedimen, batuan gunung api serta endapan aluvium. Berdasarkan jenis litologi batuan dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Batuan beku atau malihan (igneous or metamorphic rocks), terletak pada kompleks pegunungan mulai dari puncak atau punggungan; dengan potensi air tanah sangat rendah;

b. Sedimen padu - tak terbedakan (consolidated sediment – undifferentiated), terletak di bagian bawah/hilir batuan beku di atas, namun masih pada kompleks pegunungan hingga ke kaki pegunungan, dan di Pulau Simeulue dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;

c. Batu gamping atau dolomit (limestones or dolomites), terletak setempat-setempat, yaitu di pegunungan di bagian barat laut Aceh Besar (sekitar Peukan

Bada dan Lhok Nga), di Aceh Jaya, di Gayo Lues dan Aceh Timur; dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;

d. Hasil gunung api – lava, lahar, tufa, dan breksi (volcanic products – lava, lahar, tuff, breccia), terutama terdapat di sekitar gunung berapi, terutama yang teridentifikasi terdapat di sekitar Gunung Geureudong, Gunung Seulawah, dan Gunung Peut Sagoe; dengan potensi air tanah rendah;

e. Sedimen lepas atau setengah padu – kerikil, pasir, lanau, lempung (loose or semi-consolidated sediment (gravel, sand, silt, clay), terdapat di bagian paling bawah/hilir yaitu di pesisir, baik di pesisir timur maupun pesisir barat dan di cekungan Krueng Aceh; dengan potensi air tanah sedang sampai tinggi.

### B1.2. Kondisi Kemiringan

Aceh memiliki berbagai macam variasi kemiringan lereng. Kemiringan lereng di Aceh dibagi menjadi 0% - 8%, 8%-15%,15%-25%, 25%-40%, dan >40%. Kabupaten/kota di Aceh memiliki bermacam-macam kemiringan lereng seperti yang disajikan pada Tabel 2.5 dan Gambar 2.7.

Tabel 2.5.
Kemiringan Lereng Aceh

| No | Kabupaten/Kota | Kemiringan Lereng (%) | Luas (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aceh Barat | 0 – 8 | 146.666,90 |
| | | 8 – 15 | 31.030,82 |
| | | 15 – 25 | 39.793,23 |
| | | 25 – 40 | 39.902,49 |
| | | >40 | 24.355,19 |
| 2 | Aceh Barat Daya | 0 – 8 | 47.140,47 |
| | | 8 – 15 | 4.551,77 |
| | | 15 – 25 | 10.850,11 |
| | | 25 – 40 | 33.396,67 |
| | | >40 | 92.291,98 |
| 3 | Aceh Besar | 0 – 8 | 96.720,25 |
| | | 8 – 15 | 40.851,82 |
| | | 15 – 25 | 4.7257,95 |
| | | 25 – 40 | 58.345,40 |
| | | >40 | 45.184,95 |
| 4 | Aceh Jaya | 0 – 8 | 103.997,80 |
| | | 8 – 15 | 42.847,65 |
| | | 15 – 25 | 80.850,95 |
| | | 25 – 40 | 96.327,80 |
| | | >40 | 65.365,46 |
| 5 | Aceh Selatan | 0 – 8 | 146.755,56 |
| | | 8 – 15 | 10.136,57 |
| | | 15 – 25 | 23..892,14 |
| | | 25 – 40 | 69.451,64 |
| | | >40 | 166.884,39 |

| No | Kabupaten/Kota | Kemiringan Lereng (%) | Luas (ha) |
|---|---|---|---|
| 6 | Aceh Singkil | 0 – 8 | 149.176,70 |
| | | 8 – 15 | 19.805,91 |
| | | 15 – 25 | 10.545,95 |
| | | 25 – 40 | 3.563,41 |
| | | >40 | 287,28 |
| 7 | Aceh Tamiang | 0 – 8 | 139.711,55 |
| | | 8 – 15 | 14.928,23 |
| | | 15 – 25 | 13.823,41 |
| | | 25 – 40 | 17.773,44 |
| | | >40 | 23.862,27 |
| 8 | Aceh Tengah | 0 – 8 | 25.204,65 |
| | | 8 – 15 | 36.212,55 |
| | | 15 – 25 | 88.961,74 |
| | | 25 – 40 | 160.170,39 |
| | | >40 | 141.892,09 |
| 9 | Aceh Tenggara | 0 – 8 | 26.039,84 |
| | | 8 – 15 | 16.902,18 |
| | | 15 – 25 | 44.759,28 |

*Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2017;Citra Spot 6, dan 7 tahun 2020, 2019, 2018*

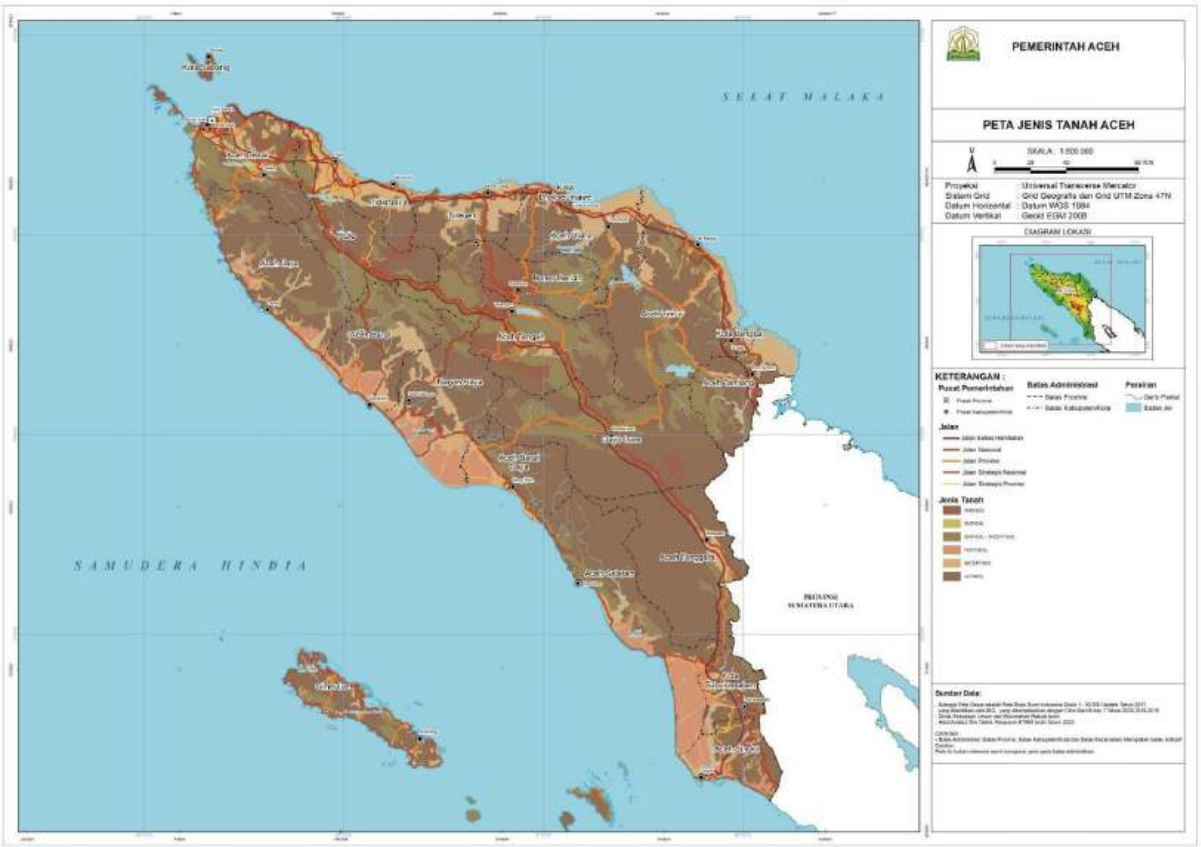



*Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2017;Citra Spot 6, dan 7 tahun 2020, 2019, 2018*

Gambar 2.7. Peta Kemiringan Lereng Aceh

## B1.3. Kondisi Jenis Tanah

Aceh memiliki jenis tanah yang bervariasi, seperti andisol, entisol – inceptisol, histosol, ultisol. Tanah andisol merupakan salah satu dari banyak jenis tanah yang tanahnya cukup subur tetapi memiliki tingkat serapan Ph tinggi. Tanah andisol alami yang belum mengalami proses pengolahan oleh manusia memiliki kandungan akan bahan organik (humus) yang tinggi, hal tersebut membuat tanah andisol memiliki warna hitam hingga coklat tua, tidak begitu plastis, tidak begitu lekat, dan mempunyai kemampuan tinggi dalam menyimpan air. Tanah entisol termasuk kategori tanah yang masih muda, dikarenakan baru dalam tahap permulaan perkembangan tanah. Tanah entisol memiliki kadar lempung serta bahan organik yang rendah, sehingga daya tahan airnya rendah, dengan struktur berbutir, dan sarang, hal inilah yang menyebabkan entisol mudah melewatkan air serta menyebabkan air mudah hilang. Tanah inceptisol merupakan tanah muda yang proses pembentukannya tergolong cepat dari hasil pelapukan bahan induk. Tanah inceptisol memiliki permasalahan dalam proses budidaya. Kendala ini perlu menjadi perhatian serius oleh petani agar tanah garapan dapat subur dan mencukupi nutrisi di tanaman. Kendala tersebut berupa tanah inceptisol memiliki pH yang tergolong masam (kurang dari 5) sehingga perlu penambahan kapur pertanian untuk kegiatan budidaya, tanah inceptisol rata-rata memiliki kandungan bahan organik yang rendah, sehingga membutuhkan banyak masukan bahan organik, dan perlu penanganan teknologi tepat guna untuk mengolah lahan inceptisol karena kesuburan tanah yang rendah.




*Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2017; Citra Spot 6, dan 7 tahun 2020, 2019, 2018*

Gambar 2.8. Peta Jenis Tanah Aceh

Tanah histosol atau yang sering diketahui sebagai tanah gambut adalah jenis lapisan tanah yang di dalamnya lebih banyak terkandung bahan organik dengan keadaan kedalaman lebih dari 40 cm dari permukaan tanah, berbeda dengan tanah mineral lainnya. Histosol terbentuk dalam kondisi seperti di lahan basah. Sehingga jenis tanah ini sangat cocok untuk ditanami sayur- sayuran, buah-buahan, dan produksi pertanian. Tanah ultisol adalah tanah yang telah mengalami pelapukan tingkat lanjut dan terdapat timbunan liat di horison bawah. Adanya endapan liat ini menyebabkan tanah ultisol tidak mendapatkan daya resap air yang cukup dan hal ini sebagai tanah dengan kemasaman kurang dari 5 sehingga dianggap tanah yang kurang subur. Ultisol juga memerlukan upaya pengelolaan untuk dijadikan sebagai tanah pertanian yang disebabkan kandungan aluminium yang tinggi akibat kemasaman tanah.

## C. Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim di Provinsi Aceh iklim ini dipengaruhi oleh arah angin yang senantiasa bertukar setiap tahunnya, sehingga terdapat dua musim yang berbeda yaitu musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan data dari 5 stasiun meteorologi dan klimatologi yaitu Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh; Stasiun Meteorologi Maimun Saleh; Sabang, Stasiun Meteorologi Cut Nyak Dhien, Nagan Raya; Stasiun Meteorologi Malikussaleh, Aceh Utara; dan Stasiun Klimatologi Aceh, Aceh Besar selama 20 tahun dari mulai tahun 2003-2022, diperoleh gambaran iklim di Aceh dalam jangka panjang.

Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 2898 mm dan 1352 mm. Wilayah Aceh bagian barat memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 4960 mm dan 2878 mm. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 4565 mm dan 970 mm. Berdasarkan data hujan tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi jumlah hujan tahunan yang meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun.

Suhu udara merupakan keadaan panas atau dinginnya suatu tempat pada waktu tertentu. Pengaruh langsung yang dirasakan di bumi sebagai akibat radiasi matahari adalah adanya perbedaan suhu udara di berbagai tempat. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki suhu udara berkisar antara 20,7-32,8oc. Wilayah Aceh bagian barat memiliki suhu udara berkisar antara 20,5-31,9oc. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki suhu udara berkisar antara 22,3-31,9oc. Suhu udara di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berbeda secara signifikan. Berdasarkan data suhu udara tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan suhu udara tahunan.

Kelembaban udara adalah banyak sedikitnya uap air yang ada di dalam udara. Kelembaban udara yang cukup besar pada suatu wilayah, memberikan informasi bahwa udara di wilayah tersebut banyak mengandung uap air atau udara dalam keadaan basah. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki kelembaban udara berkisar antara 73,0-86,5 persen. Wilayah Aceh bagian barat memiliki kelembaban udara berkisar antara 50,7-90,6 persen. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki

kelembaban udara berkisar antara 78,5-89,5 persen. Kelembaban udara di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data suhu udara tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi penurunan tingkat kelembaban suhu udara tahunan yang tidak ekstrim.

Lamanya penyinaran matahari pada suatu periode tertentu merupakan indikator pengukur keadaan berawan suatu wilayah. Faktor-faktor yang menyebabkan banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh bumi, yaitu: sudut datangnya sinar matahari, lamanya penyinaran matahari, serta keadaan permukaan bumi. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang mengalami penyinaran matahari berkisar antara 42,6-59,8 persen. Wilayah Aceh bagian barat memiliki kelembaban udara berkisar antara 36,8-65,8 persen. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki kelembaban udara berkisar antara 56,3-68,45 persen. Lamanya penyinaran matahari di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data penyinaran matahari tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan lamanya penyinaran matahari tahunan yang tidak ekstrim. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu udara.

Kecepatan angin merupakan kuantitas atmosterik fundamental yang disebabkan oleh pergerakan angin dari tekanan tinggi ke tekanan rendah yang diakibatkan karena perubahan suhu. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang berkecepatan angin rata-rata berkisar antara 3,6-6,8 knot. Wilayah Aceh bagian barat berkecepatan angin rata-rata antara 1,7-7,5 knot. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara berkecepatan angin rata-rata berkisar antara 3,4-7,5 knot. Kecepatan angin di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data kecepatan angin tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan tingkat kecepatan angin tahunan yang tidak ekstrim.

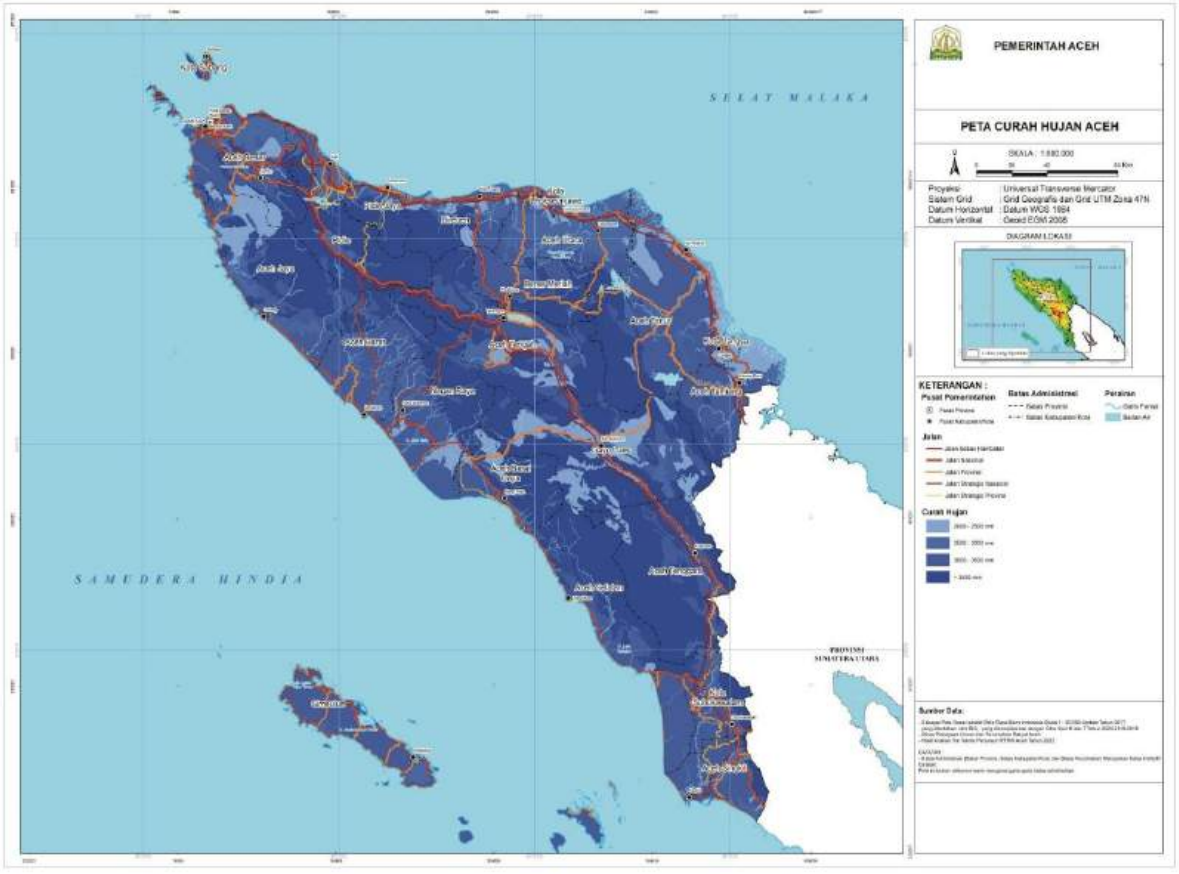
Hasil pengukuran iklim rata-rata di Provinsi Aceh selama kurun waktu tahun 2013-2022 yang ditentukan oleh parameter pengukuran suhu udara (℃), suhu udara maksimun (℃), suhu udara minimum (℃), kelembaban udara (%), lama penyinaran matahari (%), kecepatan angin rata-rata (knot) dan curah hujan (mm). Dari data tersebut bahwa suhu udara rata-rata sebesar 26,60 ℃, suhu udara maksimum 32,79 ℃ dan suhu udara minimun berkisar 22,31 ℃. Kelembaban udara di Provinsi Aceh sebesar 82,65 persen dengan kelembaban udara terendah sebesar 51,35 persen dan kelembaban udara tertinggi sebesar 84,34 persen. Lama penyinaran matahari rata-rata sebesar 55,13 persen, dengan hasil pengukuran lama penyinaran matahari yang terendah berada pada stasiun Banda Aceh dan stasiun Aceh Besar, sedangkan yang tertinggi berada pada stasiun Sabang dan stasiun Aceh Utara. Untuk kecepatan angin rata-rata, stasiun Sabang masih menempati rata-rata tertinggi sebesar 8,87 knot. Hasil pengukuran curah hujan di lima stasiun, bahwa pada stasiun Nagan Raya diperoleh curah hujan tertinggi dari semua stasiun dengan jumlah curah hujan rata-rata sebesar 3.853,30 mm. Hasil pengukuran iklim rata-rata di Provinsi Aceh selama kurun waktu tahun 2013-2022 disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6.
Data iklim rata-rata Provinsi Aceh Tahun 2013-2022.

| No | Parameter | Iklim Rata-Rata Tahun 2013-2022 (pada stasiun) | | | | | Rata-Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sabang | Banda Aceh | Nagan Raya | Aceh Utara | Aceh Besar | |
| 1 | Suhu Udara | 27,05 | 27,02 | 25,63 | 26,59 | 26,74 | 26,6 |
| 2 | Suhu Udara Maksimum (°C) | 30,85 | 32,41 | 31,2 | 31,27 | 32,79 | 31,7 |
| 3 | Suhu Udara Minimum (°C) | 22,31 | 23,29 | 22,45 | 23,14 | 22,59 | 22,76 |
| 4 | Kelembaban Udara (%) | 84,14 | 77,64 | 84,34 | 83,24 | 83,9 | 82,65 |
| 5 | Lama Penyinaran Matahari (%) | 57,9 | 51,35 | 54,77 | 60,14 | 51,5 | 55,13 |
| 6 | Kec. Angin Rata-Rata (Knot) | 8,87 | 4,99 | 4,11 | 4,09 | 2,42 | 4,89 |
| 7 | Curah Hujan (mm) | 2062,15 | 1989,3 | 3853,3 | 1439,42 | 1772,6 | 2223,35 |

*Sumber data : Data Analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Aceh Tahun 2023*

Suhu udara selama periode tahun 2003 hingga 2022 berfluktuatif pada periode sembilan belas tahun terakhir. Suhu udara pada tahun 2003 sebesar 26.7 C menjadi 27.1 C pada tahun 2022, suhu tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 27,5 dan terendah pada tahun 2003 sebesar 26,7 C. Hal ini menunjukan peningkatan sebesar 0.4 C atau suhu rata-rata mencapai 27.01 C. Pemerintah Aceh harus lebih serius dalam mengelola lingkungan hidup dan hutan serta pengendalian Gas Rumah Kaca dan memahami serta mengambil langkah konkrit untuk perubahan iklim ini.




*Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2017;Citra Spot 6, dan 7 tahun 2020, 2019, 2018*

Gambar 2.9. Peta Curah Hujan Aceh

### 2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Potensi pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) meliputi :

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN); dan
2. Kawasan Strategis Aceh (KSA).

#### A. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Aceh

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

#### A1. KSN dari sudut kepentingan Pertumbuhan ekonomi

Kawasan Strategis Nasional di Aceh dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Aceh terdiri dari:

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
2. Kawasan Banda Aceh Darussalam; dan
3. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun.

#### A2. KSN dari sudut kepentingan lingkungan hidup

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Aceh memiliki 4 KSN yaitu 1) Kawasan Banda Aceh Darussalam, 2) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, 3) Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas, dan 4) Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Perpres Nomor 49 Tahun 2018).

#### A3. KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan

Kawasan Strategis Nasional di Aceh dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan terdiri dari:

1. Kawasan Perbatasan Negara di Aceh dan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas;
3. Kawasan perbatasan Kota Sabang;
4. Kawasan pertahanan negara untuk daerah latihan militer di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Aceh Besar;
5. Daerah ranjau di Kota Sabang;
6. Daerah pembuangan amunisi di Kota Sabang;
7. Kawasan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (LANTAMAL) di Kabupaten Aceh Besar;

8. Kawasan daerah pangkalan TNI Angkatan Laut (LANAL) di Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Simeulue;
9. Pos TNI Angkatan Laut (POSAL) terdapat di Lampulo Kota Banda Aceh, Malahayati Aceh Besar, Sigli Kabupaten Pidie, Krueng Geukueh Kabupaten Aceh Utara, Idi Rayeuk kabupaten Aceh Timur, Langsa Kota Langsa, Seruway kabupaten Aceh Tamiang, Kuala Peudada Kabupaten Bireuen dan Sukakarya Kota Sabang;
10. Daerah Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Perang/ FASHARKAN) di Kota Sabang.

### A4. KSN Tertentu berupa Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)

Kawasan Strategis Nasional Tertentu berupa Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) terdiri dari:

1. Pulau Rondo di Kota Sabang;
2. Pulau Weh di Kota Sabang;
3. Pulau Bateeleblah, di Kabupaten Aceh Besar;
4. Pulau Rusa, di Kabupaten Aceh Besar;
5. Pulau Raya, di Kabupaten Aceh Jaya;
6. Pulau Salaut Besar, di Kabupaten Simeulue; dan
7. Pulau Simeulue Cut, di Kabupaten Simeulue

## B. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Aceh

Potensi pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) menetapkan Kawasan Strategis Aceh (KSA) dari sudut:

1. Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi; dan
2. Kepentingan Lingkungan Hidup.

### B1. Kawasan Strategis Aceh dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Mewujudkan Kawasan industri beserta sarana prasarana pendukungnya yang dapat mendongkrak perekonomian dan perkembangan industri di Aceh. Kawasan Industri Lampulo mengarahkan pada penanganan dan pengolahan perikanan. Pengembangan Kawasan Pertumbuhan ekonomi Banda Aceh-Sabang-Jantho (BASAJAN) yang berada di Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kabupaten Aceh Besar guna memajukan dan mewujudkan pengembangan dan penataan kawasan ekonomi daerah dengan bentuk kerja sama regional untuk memadukan potensi-potensi yang unggul agar diperoleh hasil yang lebih baik. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Aceh Barat - Selatan (BARSELA) yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat-selatan. Pengembangan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi LATIMTA untuk menunjang pertumbuhan ekonomi wilayah timur (Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang). Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata di wilayah tengah Aceh dapat diarahkan kepada pengembangan Dataran Tinggi Gayo dan Alas (DTGA) yang secara administratif meliputi 4 kabupaten yaitu: Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara dengan potensi kelas dunia, seperti Kopi Gayo, Tari Saman, dan Gunung Leuser.

Selain itu, pengembangan kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau Aceh Trade and Distribution Centre (ATDC), meliputi: 1) Wilayah Pusat: Berada di Kabupaten Aceh Besar yang melayani Kabupaten Aceh Besar, Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie; 2) Wilayah Utara: Berada di Kabupaten Bireuen yang melayani Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Gayo Lues; 3) Wilayah Barat-Selatan: Berada di Kabupaten Aceh Barat Daya yang melayani Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Jaya.

### B2. Kawasan Strategis Aceh dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup

Kawasan strategis ini adalah Kawasan Tahura Pocut Meurah Intan yang bertujuan untuk menata kawasan strategis tersebut menjadi kawasan yang terlindungi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, yang didukung oleh pengelolaan yang profesional, kearifan adat dan budaya, serta sarana dan prasarana yang memadai; dan memanfaatkan peluang kerja sama di bidang lingkungan secara global.

## C. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 mengamanahkan tentang penekanan bagaimana upaya untuk memastikan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2017 dapat diintegrasikan ke dalam RPJP/RPJMD. Meskipun demikian, tetap memberikan peranan penting aspek lingkungan hidup melalui instrument daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

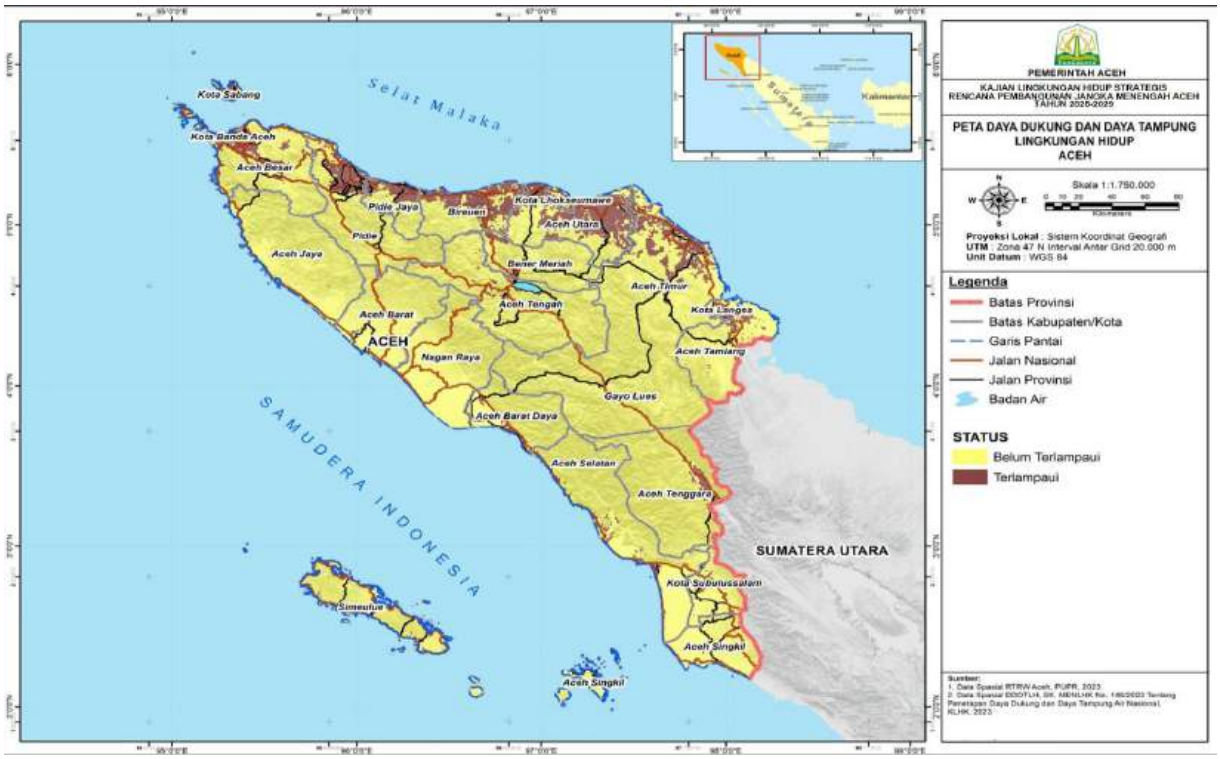
### C1. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

### C1.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Air Aceh

Berdasarkan SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 Tentang Penetapan D3T Air Nasional daya dukung dan daya tampung air di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Aceh termasuk kedalam klasifikasi sudah terlampaui dan yang belum terlampaui.

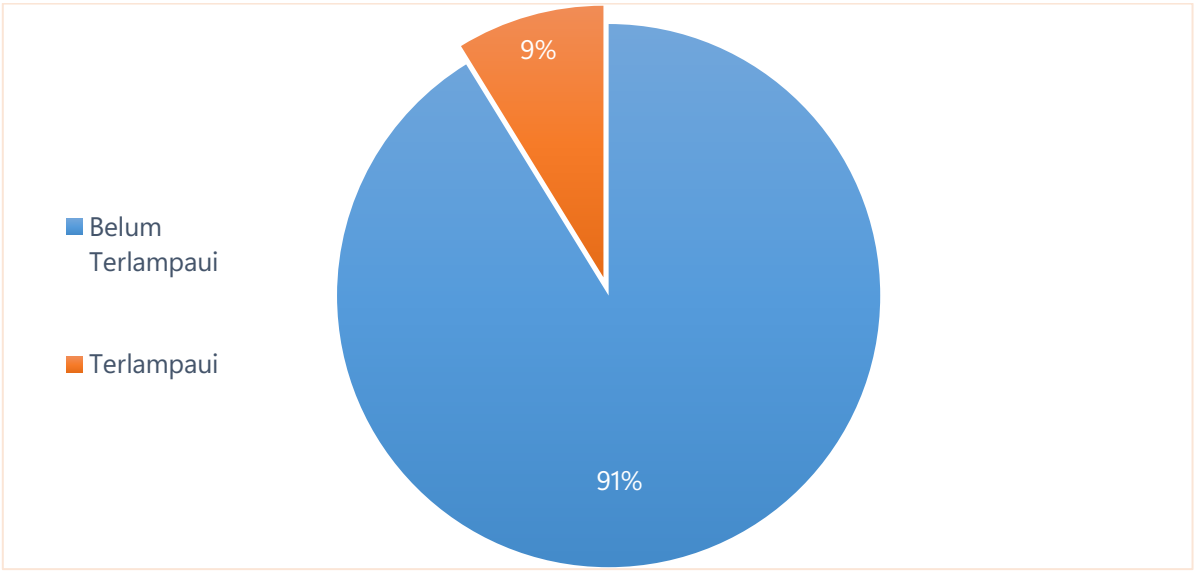
Dua kabupaten dengan persentase belum terlampaui yang tertinggi adalah Nagan Raya dan Gayo Lues, dengan persentase masing-masing sebesar 99,90 persen dan 99,78 persen. Sementara itu, Aceh Utara dan Bireuen memiliki persentase yang terlampaui paling tinggi, dengan nilai 48,54 persen dan 44,08 persen secara berurutan.

Secara keseluruhan, luas Aceh adalah 5.683.439,61 hektar. Dari total luas ini, sebagian besar, yaitu 5.183.902,45 hektar atau 91,21%, masih berada di bawah batas daya dukung dan daya tampung air, menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten/Kota ini masih memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola dan memenuhi kebutuhan air tanpa menimbulkan tekanan berlebih pada sumber daya hidrologisnya. Sementara itu, ada sekitar 499.537,16 hektar atau 8,79 persen dari wilayah yang telah melewati kapasitas daya dukung dan daya tampung airnya.




*Sumber : SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023*

Gambar 2.10. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air Aceh



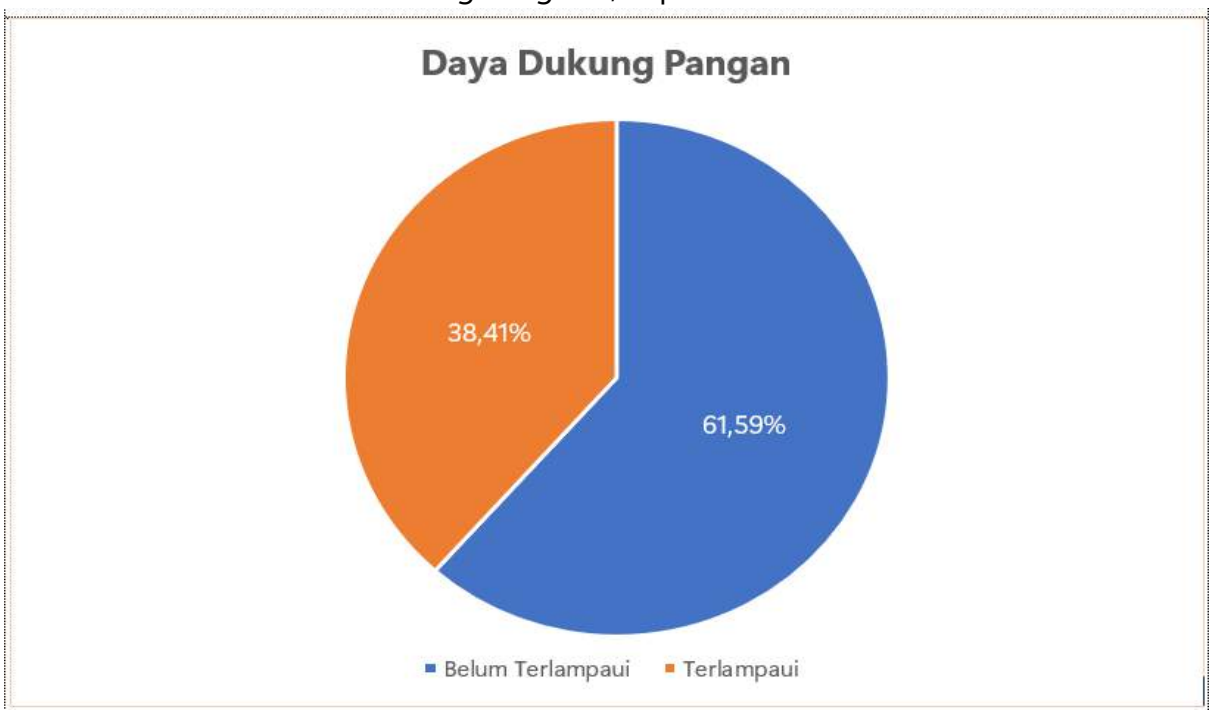

*Sumber : Analisis Data D3TLH Air, Tim KLHS RPJM Aceh, 2023*

Gambar 2.11. Persentase D3TLH Air di Aceh

## C1.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Aceh

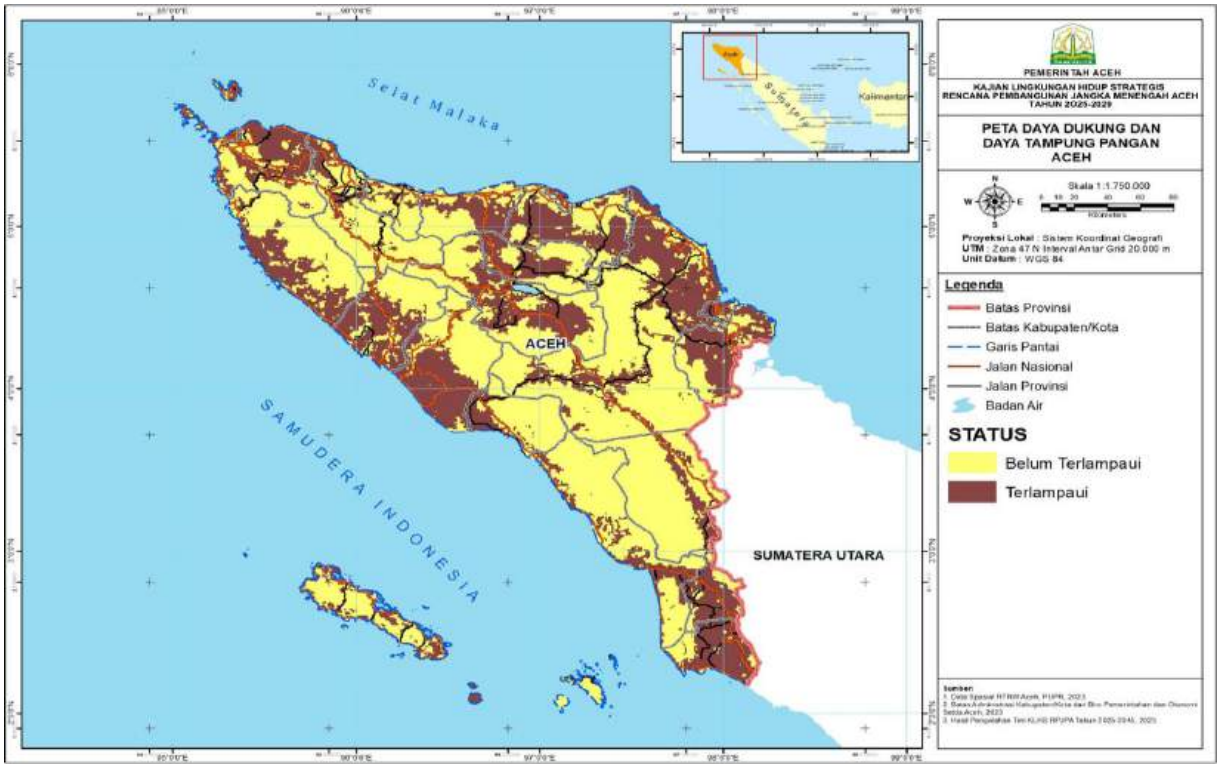
Secara keseluruhan, luas daya dukung dan daya tampung pangan yang belum terlampaui di Provinsi Aceh mencapai 3.500.495,07 Ha, atau 61,59 persen dari total luas daya dukung, sedangkan luas yang terlampaui adalah 2.183.417,00 Ha, yang mencakup 38,41 persen dari total. Beberapa kabupaten seperti Gayo Lues memiliki persentase lahan belum terlampaui yang signifikan (8,09%), sementara Kota Banda Aceh memiliki

persentase yang sangat rendah (0,07%). Wilayah dengan persentase total tertinggi adalah Aceh Selatan dengan 7,62 persen dari total luas, sementara wilayah dengan persentase total terendah adalah Kota Sabang dengan 0,05 persen.




*Sumber : KLHS RPJP Aceh, 2023*

Gambar 2.12. Persentase D3TLH Pangan di Provinsi Aceh




*Sumber : KLHS RPJP Aceh, 2023*

Gambar 2.13. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Aceh

### C1.3. Penduduk Optimum Aceh

Berdasarkan Materi Teknis D3TLH Provinsi Aceh, proyeksi ambang batas penduduk Aceh yang dapat ditampung berjumlah 13.288.715 jiwa di tahun 2045.

Tabel 2.7.
Penduduk Optimum di Aceh

| Provinsi Aceh | Jumlah Penduduk Eksisting Tahun 2022 (Jiwa) | D3TLH dikaitkan dengan Jumlah Penduduk | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Penduuk Optimum (Jiwa) | Perbandingan Jumlah Penduduk Eksisting dan Optimum (Jiwa) | Status D3TLH |
| | 5.407.855 | 13.288.715 | 7.879.525 | Belum Terlampaui |

*Sumber: Materi Teknis D3TLH Provinsi Aceh, 2023*

Tabel 2.8.
Selisih Proyeksi Penduduk Tahun 2045 dengan Jumlah Optimum Aceh

| Provinsi Aceh | D3TLH dikaitkan dengan Jumlah Penduduk | | | Status D3TLH |
|---|---|---|---|---|
| | Penduduk 2045 | Optimum | Selisih | |
| | 6.773.380 | 13.288.715 | 6.515.335 | Belum Terlampaui |

*Sumber: Materi Teknis D3TLH Provinsi Aceh, 2023*

Dengan jumlah penduduk eksisting yang berjumlah 5.407.855 jiwa, maka ambang batas D3TLH Provinsi Aceh secara indikatif memiliki status belum terlampaui, yang berarti wilayah ini masih aman dan jauh dari ambang batas sehingga dalam pemenuhan kebutuhan fisiologis penduduknya masih terpenuh dan mampu untuk mendukung jumlah penduduk yang diproyeksikan. Jika kita melihat hasil perbandingan proyeksi penduduk Provinsi Aceh Tahun 2045, diperkirakan jumlah penduduknya sekitar 6.773.380 juta orang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ambang batas D3TLH Provinsi Aceh secara kasar belum tercapai. Provinsi yang melebihi ambang batas tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan fisiologisnya secara mandiri karena keterbatasan lahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut melalui impor atau kerja sama antar pulau/kepulauan.

## C2. Jasa Ekosistem

### C2.1. Jasa Ekosistem Penyediaan Air bersih (JP2)

Pembangunan di Provinsi Aceh harus dirancang dengan mempertimbangkan faktor kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar tidak memberikan beban yang berlebihan kepada lingkungan sehingga mengancam keberlanjutan jangka panjang di wilayahnya.

Pasokan dan cadangan air tanah serta permukaan menentukan ketersediaan air bersih di suatu wilayah. Kemampuan tanah untuk menyerap dan mengalirkan air sangat dipengaruhi oleh karakteristiknya. Di setiap ekoregion di Provinsi Aceh, jenis batuan yang

ada dapat menunjukkan potensi adanya akuifer atau lapisan yang tidak dapat meresap air. Faktor ini memainkan peran penting dalam penyerapan air hujan ke dalam tanah.

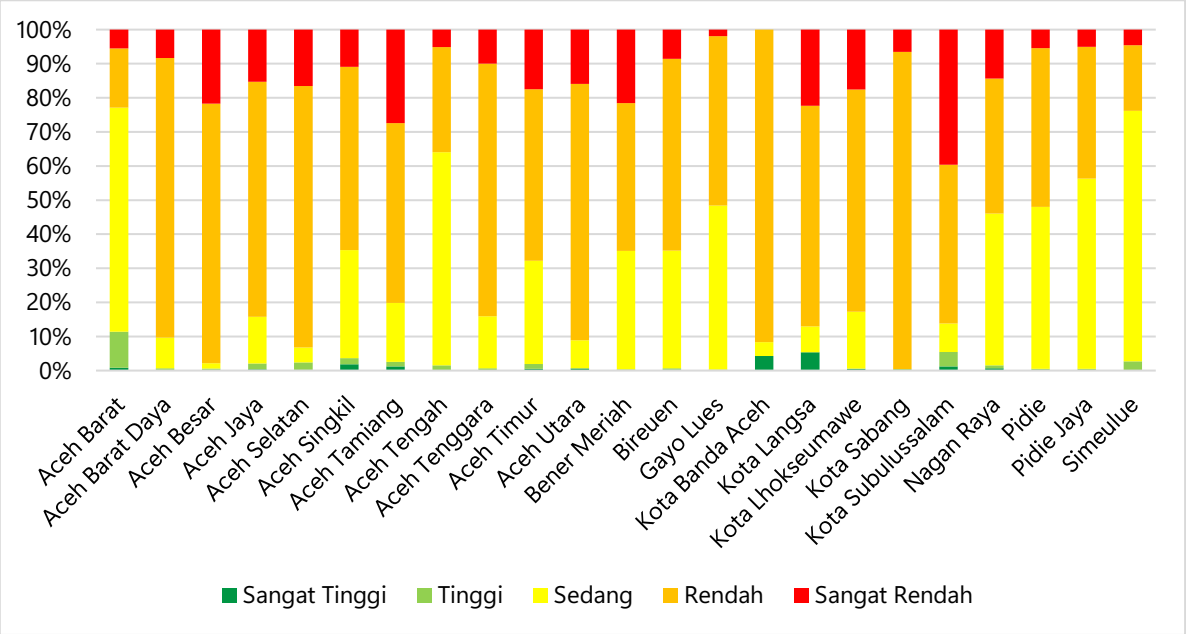
Potensi lahan dalam jasa ekosistem penyediaan air bersih di Provinsi Aceh lebih dari 53 persen adalah rendah, yaitu 3.044.838,18 ha dari luas wilayahnya. Potensi lahan sangat tinggi hanya mencapai 0,39 persen atau seluas 21.988,56 ha. Kabupaten Aceh Barat mempunyai luas dan persentase lahan potensi tinggi yang paling besar dibandingkan kabupaten lainnya, yakni seluas 29.874,84 ha atau 33,60 persen. Disusul Kabupaten Aceh Selatan dengan luas lahan mencapai 9,130,57 ha atau 10,27 persen. Kota Subulussalam memiliki lahan potensi sangat rendah terluas di Provinsi Aceh untuk penyediaan air bersih, yaitu 46.736,20 ha atau hampir 40 persen wilayahnya. Persentase lahan potensi rendah, juga relatif tinggi di daerah kota seperti Kota Sabang, Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Perbedaan penggunaan lahan dan ekoregion masing-masing kabupaten menyebabkan potensi untuk penyediaan air yang berbeda pula. Luas potensi jasa ekosistem penyediaan air bersih tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh disajikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9.
Luas Potensi Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Tiap Kabupaten/Kota

| Kabupaten/Kota | Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih (Ha) | | | | | Luas (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sangat Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah | Sangat Rendah | |
| Aceh Barat | 2.341,49 | 29.874,84 | 185.197,18 | 48.825,35 | 14.389,93 | 278.287,30 |
| Aceh Barat Daya | 458,42 | 737,60 | 17.070,13 | 154.148,12 | 16.234,38 | 188.190,24 |
| Aceh Besar | 680,15 | 936,81 | 4.549,67 | 217.989,75 | 65.671,31 | 289.147,54 |
| Aceh Jaya | 1.547,38 | 6.677,76 | 53.264,46 | 268.020,67 | 59.272,35 | 387.235,25 |
| Aceh Selatan | 871,06 | 9.130,57 | 18.366,12 | 319.473,57 | 70.596,85 | 417.567,12 |
| Aceh Singkil | 3.281,98 | 3.283,56 | 57.018,28 | 96.774,11 | 28.272,41 | 185.348,36 |
| Aceh Tamiang | 2.600,09 | 9.293,77 | 42.249,99 | 116.962,19 | 50.265,33 | 218.771,28 |
| Aceh Tengah | 0 | 6.893,60 | 282.751,20 | 139.466,97 | 17.729,98 | 446.841,74 |
| Aceh Tenggara | 0 | 4.187,66 | 63.444,56 | 308.642,44 | 41.637,66 | 417.912,32 |
| Aceh Timur | 2.785,12 | 7.593,42 | 164.308,29 | 272.365,91 | 96.632,43 | 540.900,05 |
| Aceh Utara | 1.346,80 | 698,03 | 22.079,73 | 203.583,89 | 44.163,70 | 270.525,36 |
| Bener Meriah | 0 | 668,36 | 67.205,30 | 83.614,17 | 39.252,09 | 190.739,93 |
| Bireuen | 510,60 | 755,68 | 61.718,61 | 100.562,86 | 16.662,09 | 179.699,24 |
| Gayo Lues | 0 | 1.526,75 | 266.752,01 | 275.431,11 | 10.418,58 | 554.128,46 |
| Kota Banda Aceh | 231,15 | 0 | 216,73 | 4.921,49 | 538,75 | 5.676,96 |
| Kota Langsa | 1.154,04 | 0 | 1.616,21 | 13.840,13 | 6.980,37 | 22.436,71 |
| Kota Lhokseumawe | 62,71 | 14,37 | 2.245,89 | 8.746,84 | 2.290,28 | 13.297,37 |
| Kota Sabang | 0 | 48,03 | 0 | 10.855,51 | 1.263,57 | 12.167,10 |
| Kota Subulussalam | 1.447,33 | 23.327,62 | 9.921,00 | 54.923,29 | 30.188,18 | 118.360,08 |
| Nagan Raya | 2.215,69 | 3.029,45 | 151.999,47 | 135.249,37 | 62.096,59 | 352.374,88 |
| Pidie | 405,68 | 1.241,04 | 148.981,17 | 146.063,91 | 21.466,72 | 317.752,84 |
| Pidie Jaya | 132,38 | 375,56 | 53.199,82 | 36.808,51 | 3.517,02 | 93.900,90 |
| Simeulue | 31,12 | 4.816,92 | 129.582,28 | 33.946,63 | 13.832,77 | 182.178,59 |
| ACEH | 22.103,19 | 115.111,38 | 1.803.738,12 | 3.051.216,78 | 713.373,33 | 5.683.439,61 |

*Sumber: DLHK Provinsi Aceh, 2022*

Berdasarkan Tabel 2.9 disimpulkan bahwa wilayah tengah Aceh merupakan pegunungan/perbukitan struktural yang mempunyai potensi sedang untuk penyediaan air bersih, bahkan beberapa memiliki potensi rendah. Kabupaten Aceh Tengah memiliki potensi lahan sedang lebih tinggi dibandingkan Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara, yaitu seluas 282.751,20 ha 62,48 ha wilayahnya. Kabupaten Gayo Lues memiliki potensi lahan tinggi untuk penyediaan air yang paling rendah di wilayah tengah, yaitu 1526,75 ha atau 0,28 % wilayahnya. Potensi air di wilayah pegunungan/perbukitan hanya terdapat di rekahan bantuan yang jumlahnya sedikit. Jenis penggunaan lahan yang berbeda di pegunungan juga berdampak terhadap tingkat potensi. Pegunungan yang masih berupa hutan primer memiliki potensi sedang, sedangkan hutan sekunder atau semak berpotensi rendah. Hal ini terkait dengan tutupan vegetasi, semakin lebat tutupan vegetasi, maka air yang diserap dan dialirkan oleh tanah relatif lebih banyak. Tingkat kerapatan vegetasi di hutan primer lebih tinggi dibandingkan hutan sekunder (bekas tebangan) atau semak.

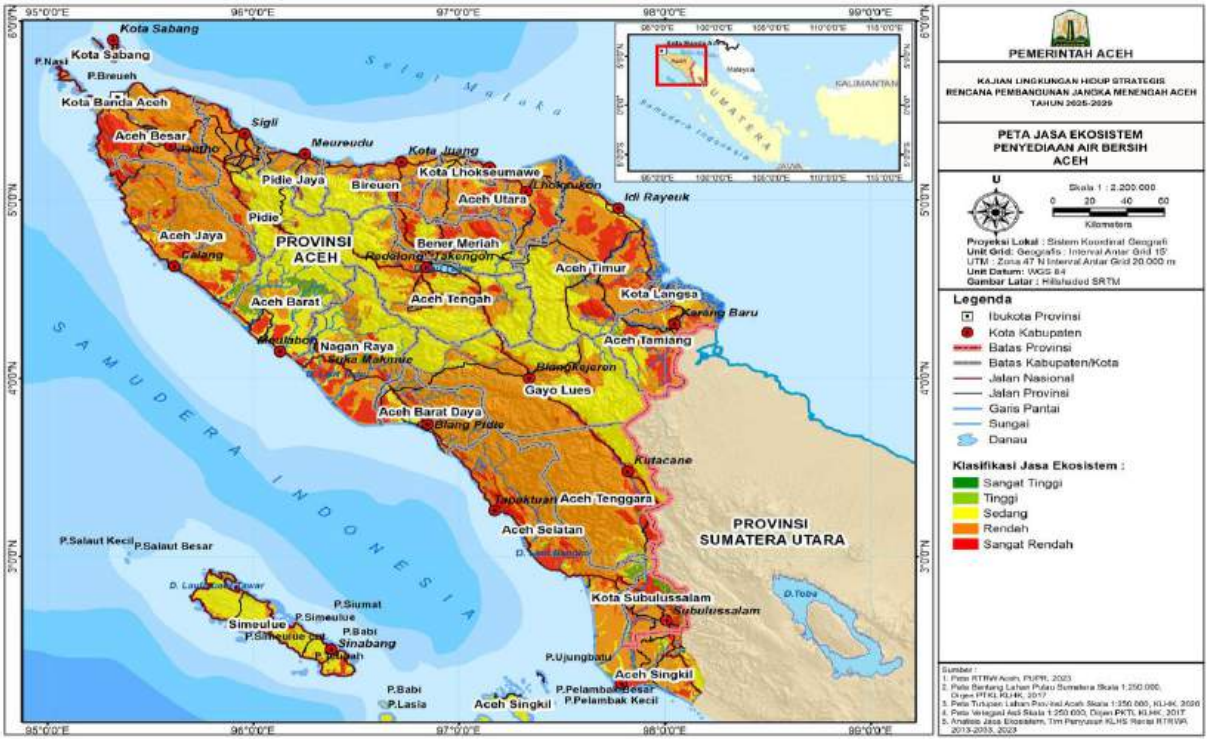



*Sumber: DLHK Provinsi Aceh, 2022*

Gambar 2.14. Persentase Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kabupaten/Kota

Provinsi Aceh terbentuk dari bentang lahan (ekoregion) dominan berupa bentukan asal proses struktural di wilayah tengah, kemudian mengarah ke wilayah barat dan utara timur ditemukan bentang lahan asal proses fluvial dan marin yang dominan. Ekoregion pegunungan/perbukitan struktural memiliki potensi rendah untuk penyediaan air bersih. Karakteristik batuan di bentukan struktural berupa batuan keras yang umumnya bersifat impermeable layer (lapisan yang terdiri dari batuan yang kedap air). Air hujan tidak akan mampu berinfiltrasi ke dalam tanah, melainkan mengalir ke tempat yang lebih rendah dalam bentuk limpasan permukaan (surface run-off). Kondisi ini menyebabkan air tanah sulit ditemukan di wilayah pegunungan/perbukitan struktural, kecuali terdapat rekahan batuan dan air hujan merembes melalui rekahan batuan tersebut. Air permukaan yang berupa sungai, hanya mengalir saat musim penghujan saja dan mengering saat musim

kemarau tiba. Berikut dibawah ini grafik persentase jasa ekosistem penyediaan air bersih Kabupaten/Kota dan Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Provinsi Aceh disajikan dalam gambar berikut.




*Sumber: DLHK Aceh, 2022*

Gambar 2.15. Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Aceh

Potensi tinggi untuk penyediaan air berada di kanan kiri sungai terutama di dataran aluvial. Jenis tanah alluvium memiliki tekstur pasir sehingga jarak antar pori relatif besar. Hal tersebut membuat kemampuan untuk menyerap dan mengalirkan air sangat baik. Air hujan akan ditampung dalam pori dan menjadi cadangan untuk air tanah. Jenis penggunaan lahan di pantai sepanjang Aceh dapat berdampak terhadap potensi. Wilayah perkotaan mempunyai potensi rendah karena sebagian besar lahan sudah dibangun. Hal ini membuat air hujan langsung masuk ke sistem sungai sehingga cadangan air tanah berkurang. wilayah yang masih didominasi vegetasi akan lebih baik dalam menyediakan air bersih. Potensi penyediaan air bersih Kepulauan di Provinsi Aceh relatif sedang dan rendah. Sistem DAS di kepulauan relatif sempit sehingga air hujan langsung menuju ke sungai. Hal tersebut menyebabkan potensi air tanah relatif rendah karena minimnya pasokan air dari proses infiltrasi. Ekoregion di kepulauan didominasi pegunungan/perbukitan struktural yang mempunyai impermeable layer sehingga ketersediaan air bersih di wilayah kepuluan relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan wilayah daratan utama.

### C2.2. Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan (JEP1)

Aceh memiliki lahan potensi sangat tinggi dalam menyediakan pangan hanya seluas 35.173,12 ha atau 0,62 pesern dari luas wilayahnya. Sedangkan lahan dengan potensi tinggi seluas 310.486,28 ha atau 5,49 persen. Potensi lahan sangat rendah mendominasi yaitu

mencapai 45,47 persen atau 2,6 juta ha. Lahan dengan potensi rendah untuk penyediaan pangan mencapai 2,2 juta hektar atau 39,42 persen. Kota Langsa memiliki persentase tertinggi lahan potensi sangat tinggi untuk pangan dibandingkan kabupaten/kota lain. Luasannya mencapai 1.189,41 ha atau 5,56 persen dari luas wilayahnya. Persentase lahan potensi pangan sangat rendah tertinggi adalah Kabupaten Aceh Selatan. 83,76 persen wilayahnya atau 349.087,58 ha tidak berpotensi untuk penyediaan pangan. Berikut dibawah ini grafik persentase jasa ekosistem penyediaan pangan Kabupaten/Kota dan Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Provinsi Aceh. Luas potensi jasa ekosistem penyediaan pangan tiap Kabupaten/Kota di Aceh di Provinsi Aceh disajikan pada Tabel Tabel 2.10.

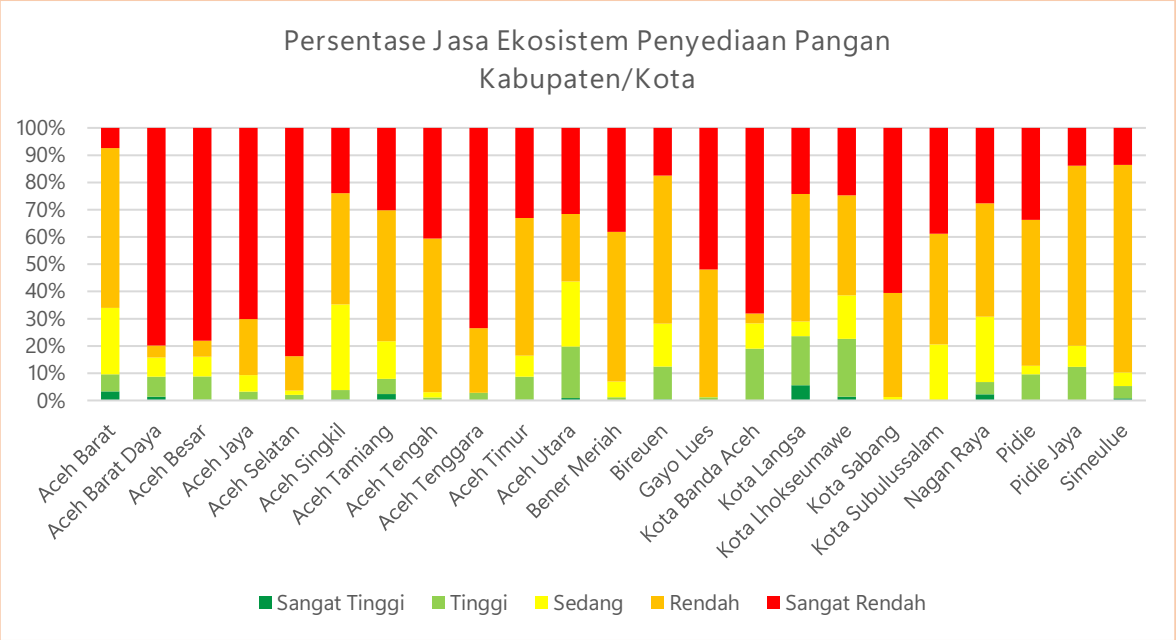
Tabel 2.10.
Luas Potensi Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Tiap Kabupaten/Kota

| Kabupaten | Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan | | | | | Luas (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sangat Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah | Sangat Rendah | |
| Aceh Barat | 9.457,87 | 17.465,96 | 68.868,25 | 165.184,69 | 20.908,26 | 281.885,03 |
| Aceh Barat Daya | 2.633,83 | 13.819,28 | 13.280,35 | 8.248,77 | 150.171,16 | 188.153,38 |
| Aceh Besar | 947,13 | 24.189,08 | 20.704,11 | 16.807,41 | 223.622,78 | 286.270,52 |
| Aceh Jaya | 693,78 | 12.026,36 | 23.629,75 | 79.765,28 | 272.816,53 | 388.931,69 |
| Aceh Selatan | 269,98 | 8.365,94 | 6.515,88 | 52.533,28 | 349.087,58 | 416.772,67 |
| Aceh Singkil | 643,20 | 6.304,85 | 56.439,58 | 73.492,87 | 43.142,69 | 180.023,19 |
| Aceh Tamiang | 4.983,03 | 11.618,21 | 29.070,87 | 100.635,02 | 63.455,02 | 209.762,15 |
| Aceh Tengah | | 4.748,05 | 8.908,45 | 255.094,11 | 183.690,81 | 452.441,42 |
| Aceh Tenggara | | 11.761,42 | 21,52 | 98.791,21 | 305.770,71 | 416.344,86 |
| Aceh Timur | 1.729,49 | 45.299,35 | 41.934,64 | 273.757,54 | 179.299,28 | 542.020,29 |
| Aceh Utara | 2.362,07 | 51.295,25 | 64.485,85 | 67.219,41 | 85.447,14 | 270.809,71 |
| Bener Meriah | | 2.290,80 | 11.086,39 | 106.193,25 | 73.585,62 | 193.156,06 |
| Bireuen | 665,23 | 21.663,35 | 28.177,87 | 97.058,26 | 31.331,92 | 178.896,62 |
| Gayo Lues | | 6.789,24 | 13,83 | 259.591,02 | 287.653,02 | 554.047,11 |
| Kota Banda Aceh | | 1.020,72 | 497,09 | 193,35 | 3.658,21 | 5.369,37 |
| Kota Langsa | 1.189,41 | 3.850,58 | 1.165,11 | 9.995,21 | 5.196,39 | 21.396,70 |
| Kota Lhokseumawe | 183,45 | 2.855,75 | 2.140,95 | 4.930,85 | 3.320,27 | 13.431,27 |
| Kota Sabang | | | 146,71 | 4.448,85 | 7.066,88 | 11.662,44 |
| Kota Subulussalam | | 68,80 | 24.203,24 | 47.927,45 | 45.798,29 | 117.997,78 |
| Nagan Raya | 7.652,00 | 15.407,50 | 82.061,37 | 142.067,54 | 94.333,68 | 341.522,08 |
| Pidie | 399,99 | 29.811,39 | 9.558,97 | 168.144,07 | 105.717,82 | 313.632,24 |
| Pidie Jaya | 50,66 | 11.748,42 | 7.342,78 | 62.945,91 | 13.245,03 | 95.332,80 |
| Simeulue | 1.312,00 | 8.085,98 | 8.668,91 | 134.524,17 | 23.863,75 | 176.454,81 |
| ACEH | 35.173,12 | 310.486,28 | 508.922,45 | 2.229.549,50 | 2.572.182,83 | 5.656.314,19 |

*Sumber: DLHK Aceh, 2022*

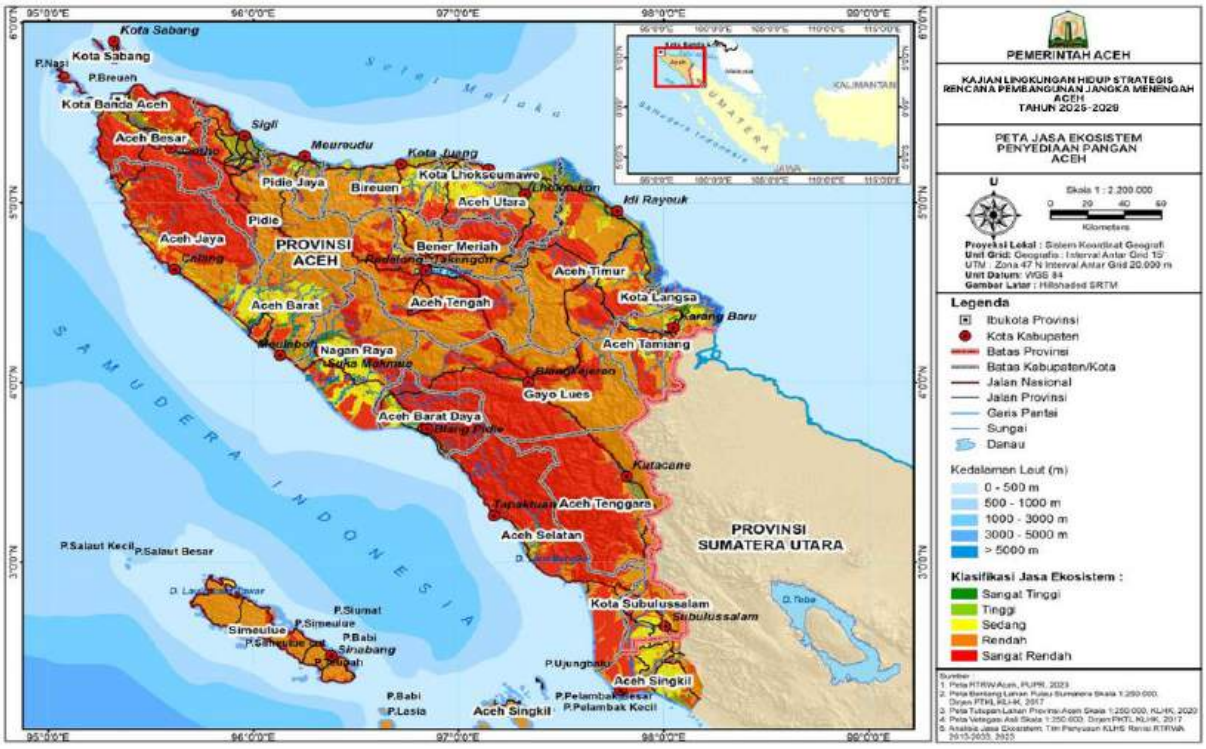
Lokasi wilayah yang memiliki potensi tinggi untuk penyediaan pangan berada di pesisir barat, timur dan utara. Wilayah tersebut termasuk dalam ekoregion dataran aluvial. Dataran ini sesuai untuk pengembangan pertanian lahan basah karena tanahnya yang relatif subur. Kondisi hidrologi di dataran ini mempunyai akuifer yang baik sehingga ketersediaan air tanah relatif melimpah. Material tanah penyusunnya didominasi oleh komposisi pasir, kerikil dan kerakal sehingga mampu mengalirkan air dengan baik. Karakteristik tanah di dataran aluvial adalah tekstur geluhan, solum tebal dan kandungan haranya tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tanah tersebut memiliki tingkat kesuburan

yang tinggi. Kabupaten yang mempunyai potensi tinggi antara lain Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Barat dan Nagan Raya. Kabupaten Aceh Utara memiliki pertanian lahan basah paling luas dan produksi padi tertinggi se-Provinsi Aceh. Pertanian lahan basahnya mencapai luas 62.689,44 ha dengan produksi padi 369.137,53 ton pada tahun 2021 (BPS, 2022).




*Sumber: DLHK Aceh, 2022*

Gambar 2.16. Grafik Persentase Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten/Kota




*Sumber: DLHK Provinsi Aceh, 2022*

Gambar 2.17 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Provinsi Aceh

Ekoregion di wilayah tengah adalah perbukitan dan pegunungan struktural. Kondisi geografisnya kurang sesuai untuk dikembangkan pertanian lahan basah. Pegunungan dan perbukitan cocok untuk budidaya tanaman tahunan, bukan semusim, seperti padi. Ekoregion ini membutuhkan tanaman yang berakar kuat untuk menahan tanah sehingga tidak mudah erosi.

Komoditas pangan mempunyai akar yang kecil dan kurang kuat. Ketersediaan air di daerah ini relatif minim karena pegunungan/perbukitan struktural mempunyai impermeable layer. Hal tersebut membuat air hujan tidak masuk ke tanah melalui proses infiltrasi melainkan langsung menuju sistem sungai. Sungai di ekoregion struktural bertipe intermitten atau tidak mengalir sepanjang tahun. Kondisi tersebut tidak sesuai untuk pengembangan budidaya tanaman pangan sehingga wilayah tengah berpotensi rendah untuk penyediaan jasa ekosistem pangan di Provinsi Aceh. Kota Sabang dan Kota Subulussalam mempunyai potensi rendah untuk penyediaan pangan. Sebagian besar wilayah dua kota ini berada dalam klasifikasi rendah dan sangat rendah. Penggunaan lahan yang banyak dikembangkan di Kota Subulussalam adalah perkebunan sawit.

### C3. Ekoregion

Provinsi Aceh, memiliki lima jenis ekoregion yang juga terhubung dengan wilayah di sekitarnya. Ekoregion pertama adalah Bentang Pegunungan Gayo Leuser yang merupakan bentang alam yang paling banyak ditemukan di wilayah Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, terdapat dua ekoregion lainnya yang juga terdapat di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Dataran Singkil Barus dan Bentang Lhokseumawe-Tebing Tinggi. Ekoregion lainnya adalah Lahan Basah Meulaboh Aceh. Adanya kesamaan dalam ekoregion pada beberapa provinsi tersebut membuat karakteristik fisik wilayah dan flora fauna memiliki kesamaan pula. Semua hal ini sangat penting dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup di Provinsi Aceh.

Tabel 2.11.
Ekoregion Aceh

| Ekoregion | Luas (Ha) | Persentase (%) |
|---|---|---|
| Danau bervegetasi terna tepian danau | 9.937,31 | 0,17% |
| Danau bervegetasi terna tepian danau pegunungan | 5.915,79 | 0,10% |
| Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi hutan dipterokarpa pamah | 18.719,35 | 0,33% |
| Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) | 28.453,89 | 0,50% |
| Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi hutan pegunungan bawah | 4.228,15 | 0,07% |
| Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi hutan tepian sungai | 9.425,06 | 0,17% |
| Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi hutan tepian sungai payau | 9.169,06 | 0,16% |
| Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa air tawar | 252.224,54 | 4,44% |
| Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa gambut | 8.197,30 | 0,14% |
| Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi terna tepian sungai | 17.325,33 | 0,30% |

| Ekoregion | Luas (Ha) | Persentase (%) |
|---|---|---|
| Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi terna tepian sungai payau | 283.122,22 | 4,98% |
| Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium bervegetasi hutan pantai | 210,05 | 0,00% |
| Dataran fluviomarin bermaterial aluvium bervegetasi mangrove | 64.436,98 | 1,13% |
| Dataran fluviomarin bermaterial aluvium bervegetasi nipah | 1.086,79 | 0,02% |
| Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium bervegetasi sagu | 1.904,19 | 0,03% |
| Dataran marin berpasir bermaterial aluvium bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) | 36.727,85 | 0,65% |
| Dataran marin berpasir bermaterial aluvium bervegetasi hutan pantai | 128.396,75 | 2,26% |
| Dataran marin berpasir bermaterial aluvium bervegetasi hutan rawa air payau | 10.641,65 | 0,19% |
| Dataran marin berpasir bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa air payau | 26.478,73 | 0,47% |
| Dataran marin berpasir bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa gambut | 2.035,61 | 0,04% |
| Dataran organik bermaterial gambut bervegetasi hutan gambut | 5.537,79 | 0,10% |
| Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat bervegetasi hutan kerangas pamah | 30.883,67 | 0,54% |
| Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) | 84.355,98 | 1,48% |
| Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat bervegetasi hutan pegunungan bawah | 173,84 | 0,00% |
| Dataran struktural plutonik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku dalam bervegetasi hutan pegunungan bawah | 656,75 | 0,01% |
| Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) | 18.540,02 | 0,33% |
| Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar bervegetasi hutan pegunungan bawah | 3.062,35 | 0,05% |
| Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik bervegetasi hutan gambut | 26.578,99 | 0,47% |
| Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) | 71.799,09 | 1,26% |
| Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah | 5.434,94 | 0,10% |
| Lembah sungai bermaterial aluvium bervegetasi hutan dipterokarpa pamah | 217,08 | 0,00% |
| Lembah sungai bermaterial aluvium bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) | 11.304,28 | 0,20% |
| Lembah sungai bermaterial aluvium bervegetasi hutan tepian sungai | 1.585,20 | 0,03% |
| Lembah sungai bermaterial aluvium bervegetasi hutan tepian sungai payau | 414,37 | 0,01% |
| Lembah sungai bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa air payau | 37.260,79 | 0,66% |
| Lembah sungai bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa air tawar | 8.235,41 | 0,14% |

| Ekoregion | Luas (Ha) | Persentase (%) |
|---|---|---|
| Lembah sungai bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa gambut | 22.183,17 | 0,39% |
| Lembah sungai bermaterial aluvium bervegetasi terna tepian sungai | 5.890,08 | 0,10% |
| Lembah sungai bermaterial aluvium bervegetasi terna tepian sungai payau | 72.003,98 | 1,27% |
| Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) | 63.880,82 | 1,12% |
| Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah | 4.698,64 | 0,08% |
| Pegunungan kerucut vulkanik lereng puncak bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan atas | 7.788,00 | 0,14% |
| Pegunungan kerucut vulkanik lereng puncak bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah | 1.194,56 | 0,02% |
| Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah | 23.886,37 | 0,42% |
| Pegunungan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat bervegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst | 220.487,62 | 3,88% |
| Pegunungan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat bervegetasi hutan batugamping pegunungan bawah pada bentang alam karst | 7.724,67 | 0,14% |
| Pegunungan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat bervegetasi hutan batugamping pegunungan pada bentang alam karst | 134.238,59 | 2,36% |
| Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat bervegetasi hutan kerangas pamah | 3.276,61 | 0,06% |
| Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) | 112.569,76 | 1,98% |
| Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar bervegetasi hutan pegunungan atas | 9.145,48 | 0,16% |
| Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar bervegetasi hutan pegunungan bawah | 32.772,37 | 0,58% |
| Pegunungan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) | 10.175,44 | 0,18% |
| Pegunungan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan atas | 258,12 | 0,00% |
| Pegunungan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah | 68.063,55 | 1,20% |
| Pegunungan vulkanik bermaterial piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) | 65.052,14 | 1,14% |
| Pegunungan vulkanik bermaterial piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah | 1.430,31 | 0,03% |
| Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) | 74.483,83 | 1,31% |
| Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah | 22.349,99 | 0,39% |

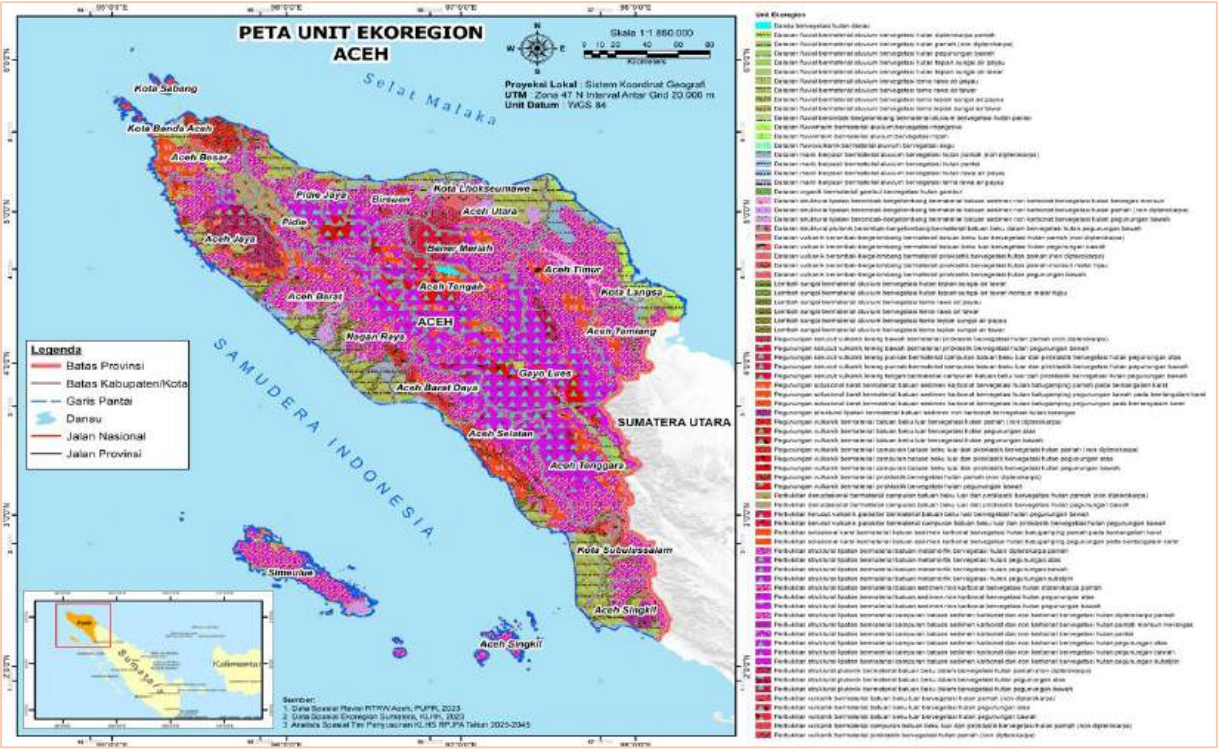
| Ekoregion | Luas (Ha) | Persentase (%) |
|---|---|---|
| Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial batuan beku luar bervegetasi hutan pegunungan bawah | 379,22 | 0,01% |
| Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah | 14.800,15 | 0,26% |
| Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat bervegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst | 24.534,82 | 0,43% |
| Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat bervegetasi hutan batugamping pegunungan pada bentang alam karst | 254,96 | 0,00% |
| Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik bervegetasi hutan dipterokarpa pamah | 413.896,04 | 7,28% |
| Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik bervegetasi hutan pegunungan atas | 503,45 | 0,01% |
| Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik bervegetasi hutan pegunungan bawah | 541.339,44 | 9,52% |
| Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik bervegetasi hutan pegunungan subalpin | 137.374,66 | 2,42% |
| Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat bervegetasi hutan dipterokarpa pamah | 179.268,26 | 3,15% |
| Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat bervegetasi hutan pegunungan atas | 1.770,50 | 0,03% |
| Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat bervegetasi hutan pegunungan bawah | 32.638,42 | 0,57% |
| Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat bervegetasi hutan dipterokarpa pamah | 1.366.209,16 | 24,04% |
| Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat bervegetasi hutan kerangas pamah | 34.312,98 | 0,60% |
| Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat bervegetasi hutan pantai | 4.889,65 | 0,09% |
| Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat bervegetasi hutan pegunungan atas | 70.395,85 | 1,24% |
| Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat bervegetasi hutan pegunungan bawah | 346.605,64 | 6,10% |
| Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat bervegetasi hutan pegunungan subalpin | 3.886,61 | 0,07% |
| Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) | 158.588,25 | 2,79% |
| Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam bervegetasi hutan pegunungan atas | 2.630,55 | 0,05% |
| Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam bervegetasi hutan pegunungan bawah | 60.145,81 | 1,06% |
| Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) | 47.116,87 | 0,83% |

| Ekoregion | Luas (Ha) | Persentase (%) |
|---|---|---|
| Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar bervegetasi hutan pegunungan atas | 1.360,39 | 0,02% |
| Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar bervegetasi hutan pegunungan bawah | 20.088,67 | 0,35% |
| Perbukitan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) | 24.767,11 | 0,44% |
| Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) | 7.451,00 | 0,13% |
| Total Luas (Ha) | 5.683.439,61 | 100,00% |

*Sumber: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021*

Berdasarkan Tabel 2.11, Provinsi Aceh didominasi oleh 3 (tiga) jenis/klasifikasi ekoregion yaitu:

1. Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat bervegetasi hutan dipterokarpa pamah, yaitu ekosistem yang terbentuk akibat aktivitas tektonik sehingga menghasilkan penampakan dataran tinggi dengan kelerengan lebih dari 16%. Ekosistem ini menjadi ekosistem untuk spesies mamalia besar seperti gajah, harimau, tapir dan rusa. Jenis ekoregion ini memiliki luas 1.366.209,16 Ha atau sekitar 24,04% dari total luas wilayah daratan Provinsi Aceh.
2. Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik bervegetasi hutan pegunungan bawah, yaitu bentuk lahan dengan relief perbukitan yang memiliki kemiringan lereng agak miring hingga sangat miring, tersusun atas batuan metamorf, seperti sekiss, gneiss, phylit atau lainnya. Perbukitan terbentuk akibat aktivitas tektonik yang menghasilkan struktur geologi lipatan pada batuan. Pola struktur lipatan ini di antaranya dicirikan oleh antiklin (hogback and cuesta) dan sinklin (subsequent valley). Perbukitan struktural lipatan memiliki fungsi lahan sebagai penyedia air permukaan (sungai kecil) dan sebagai tempat wisata alam. Jenis ekoregion ini memiliki luas 541.339,44 Ha atau sekitar 9,52% dari total luas wilayah daratan Provinsi Aceh.
3. Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik bervegetasi hutan dipterokarpa pamah, yaitu bentuk lahan dengan relief perbukitan yang memiliki kemiringan lereng agak miring hingga sangat miring, tersusun atas batuan metamorf, seperti sekiss, gneiss, phylit atau lainnya. Perbukitan terbentuk akibat aktivitas tektonik yang menghasilkan struktur geologi lipatan pada batuan. Vegetasi hutan dipterokarpa pamah fungsinya sebagai pelindung bagi ekosistem (abiotik dan biotik) yang berada dibawahnya. Sebagai komunitas vegetasi yang mendominasi suatu ekosistem, banyak komunitas vegetasi lain maupun satwa yang hidup di dalamnya sangat bergantung pada keberadaan hutan dipterokarpa. Jenis ekoregion ini memiliki luas 413.896,04 Ha atau sekitar 9,52% dari total luas wilayah daratan Provinsi Aceh.




*Sumber: SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 Tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia*

Gambar 2.18 Peta Ekoregion Aceh

C4. Karakteristik Bentang Alam (KBA)

Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera yang memiliki beragam bentang alam seperti perbukitan, dataran, dataran bergelombang, pegunungan, lembah sungai, dan danau. Perbukitan merupakan bentuk alam yang paling banyak ditemukan di Provinsi Aceh, mencakup 63% dari luas wilayahnya, sementara dataran mencakup 16.06%. Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat dan non karbonat bertipe vegetasi hutan berfungsi sebagai penyedia air tanah, tempat wisata alam, serta habitat fauna kelelawar. Vegetasi hutan juga berfungsi dalam melindungi ekosistem biotik dan abiotik, menyerap air hujan, dan menghambat laju air permukaan.

Taman Nasional Gunung Leuser atau pegunungan Gayo Leuser merupakan kawasan perlindungan flora fauna terbesar di Asia Tenggara dan kawasan suaka alam tropis terkaya di dunia. Taman ini memiliki lahan seluas 1.094.692 ha dengan ketinggian 3.404 m di atas permukaan laut. Kawasan Gunung Leuser juga menjadi kawasan tangkapan dan sumber air bagi banyak sungai besar di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. UNESCO telah menetapkan Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser sebagai Cagar Biosfer dan Cluster Natural World Heritage Site. Kawasan ini juga telah menjadi objek wisata yang dapat dikunjungi oleh masyarakat.

Dataran juga merupakan salah satu bentang alam yang terdapat di Provinsi Aceh. Dataran ini terletak di bagian barat, tengah, dan timur Provinsi Aceh dan memiliki beragam jenis seperti dataran fluvial, dataran struktural, dan dataran fluviomarin. Fungsi

dari dataran ini adalah untuk menyediakan air bersih yang berasal dari air tanah dan sungai, sementara dataran struktural berfungsi sebagai material bahan galian.

Karakteristik ekoregion laut di Provinsi Aceh terdiri dari Selat Malaka dan Samudera Hindia. Selat Malaka terletak di sebelah utara dan timur Provinsi Aceh. Pada Selat Malaka terdapat keanekaragaman hayati mangrove, burung-burung air yang bermigrasi, dan lain sebagainya. Selat Malaka berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran internasional, pariwisata, dan hasil laut, tetapi juga rawan terkena pencemaran oleh kegiatan domestik, pertanian/perkebunan, dan industri. Sedangkan, Samudera Hindia yang berada di sebelah barat Provinsi Aceh meliputi habitat bagi hiu mulut lebar, dugong, penyu hijau, dan hewan dilindungi lainnya. Samudera ini memiliki potensi pemanfaatan ikan laut dalam, migas, dan pariwisata, tetapi juga rawan terkena bencana gempa dan tsunami serta dapat terdampak pencemaran dari kegiatan domestik, pelabuhan, pertanian/perkebunan, dan industri.

Tabel 2.12.
Karakteristik Bentang Alam (KBA) dan Luasannya di Aceh

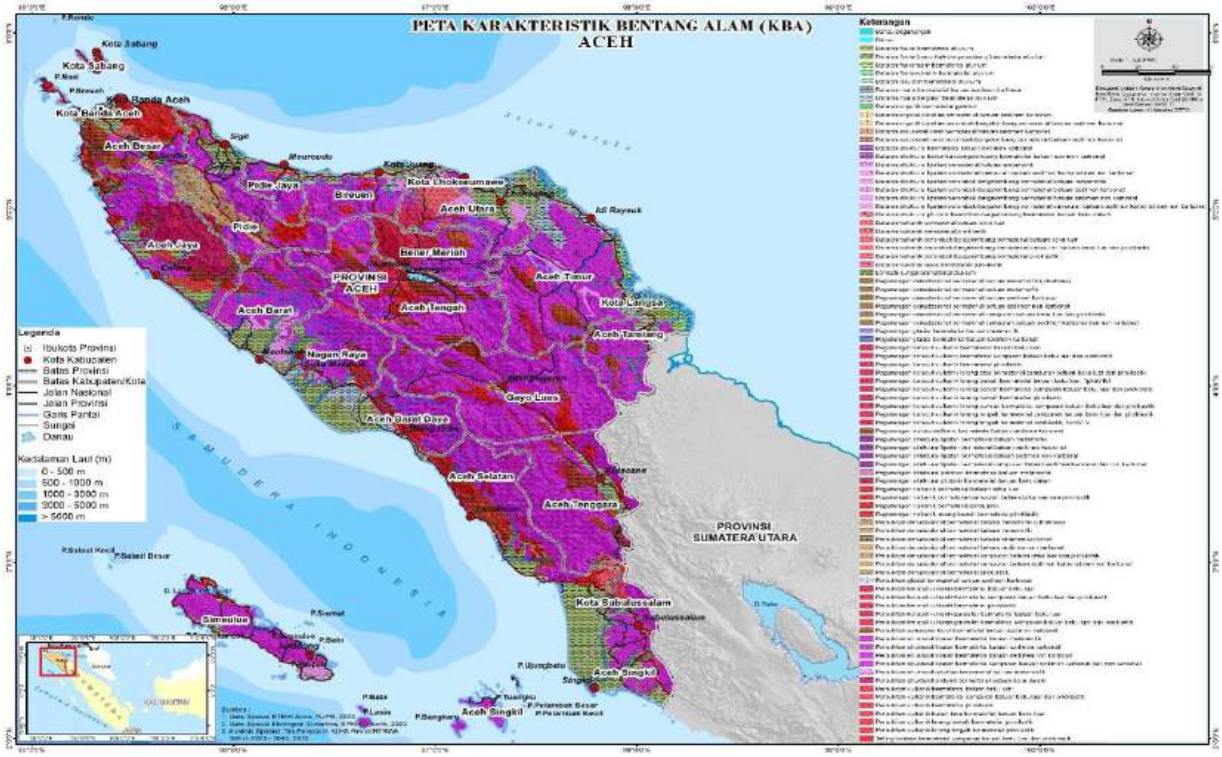
| Karakteristik Bentang Alam | Luas (Ha) | Persentase (%) |
|---|---|---|
| Danau | 15.853,09 | 0,28% |
| Dataran fluvial bermaterial aluvium | 630.864,89 | 11,10% |
| Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium | 210,05 | 0,00% |
| Dataran fluviomarin bermaterial aluvium | 65.523,77 | 1,15% |
| Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium | 1.904,19 | 0,03% |
| Dataran marin berpasir bermaterial aluvium | 204.280,59 | 3,59% |
| Dataran organik bermaterial gambut | 5.537,79 | 0,10% |
| Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat | 115.413,49 | 2,03% |
| Dataran struktural plutonik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku dalam | 656,75 | 0,01% |
| Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar | 21.602,37 | 0,38% |
| Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik | 103.813,02 | 1,83% |
| Lembah sungai bermaterial aluvium | 159.094,35 | 2,80% |
| Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik | 68.579,45 | 1,21% |
| Pegunungan kerucut vulkanik lereng puncak bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | 8.982,56 | 0,16% |
| Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | 23.886,37 | 0,42% |
| Pegunungan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat | 362.450,87 | 6,38% |
| Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat | 3.276,61 | 0,06% |
| Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar | 154.487,61 | 2,72% |
| Pegunungan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | 78.497,10 | 1,38% |
| Pegunungan vulkanik bermaterial piroklastik | 66.482,45 | 1,17% |
| Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | 96.833,81 | 1,70% |
| Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial batuan beku luar | 379,22 | 0,01% |
| Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | 14.800,15 | 0,26% |
| Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat | 24.789,77 | 0,44% |

| Karakteristik Bentang Alam | Luas (Ha) | Persentase (%) |
|---|---|---|
| Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik | 1.093.113,59 | 19,23% |
| Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat | 213.677,17 | 3,76% |
| Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat | 1.826.299,89 | 32,13% |
| Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam | 221.364,61 | 3,89% |
| Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar | 68.565,94 | 1,21% |
| Perbukitan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik | 24.767,11 | 0,44% |
| Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik | 7.451,00 | 0,13% |
| Total Luas (Ha) | 5.683.439,61 | 100,00% |

*Sumber: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021*

Berdasarkan tabel di atas, Provinsi Aceh didominasi oleh 3 (tiga) karakteristik bentang alam yaitu:

1. Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat, yaitu bentuk lahan dengan relief perbukitan yang memiliki kemiringan lereng agak miring hingga sangat miring, tersusun atas material campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat, seperti batu gamping (*limestones*), napal (*marls*), batupasir (*sandstones*), batu lempung (*claystones*), breksi (*breccia*), konglomerat (*conglomerate*), atau yang lainnya. Perbukitan terbentuk akibat aktivitas tektonik yang menghasilkan struktur geologi lipatan pada batuan. Pola struktur lipatan ini di antaranya dicirikan oleh antiklin (*hogback and cuesta*) dan sinklin (*subsequent valley*).Perbukitan struktural lipatan ini memiliki fungsi lahan sebagai penyedia air permukaan (mata air, sungai kecil), sebagai daerah tangkapan hujan, dan sebagai tempat wisata alam. Jenis bentang alam ini memiliki luas 1.826.299,89 Ha atau sekitar 32,13% dari total luas wilayah daratan Provinsi Aceh.
2. Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik, yaitu bentuk lahan dengan relief pegunungan yang memiliki kemiringan lereng agak miring hingga sangat miring, tersusun atas batuan metamorf, seperti sekiss, gneiss, batu sabak, lit, atau lainnya. Perbukitan ini terbentuk akibat aktivitas tektonik yang menghasilkan struktur geologi patahan/sesar (fault ) pada batuan. Pola-pola struktur patahan ini di antaranya dicirikan oleh kelurusan-kelurusan (lineaments) pada punggungan maupun lembahan, tebing patahan/gawir sesar (fault scarp), atau blok patahan (hanging wall/foot wall). Jenis bentang alam ini memiliki luas 1.093.113,59 Ha atau sekitar 19,23% dari total luas wilayah daratan Provinsi Aceh.
3. Dataran fluvial bermaterial aluvium, yaitu bentuk lahan yang mempunyai relief dataran rata (flat ) dengan kemiringan lereng datar hingga landai, tersusun atas material aluvium hasil proses deposisi fluvial (aliran permukaan atau sungai). Dataran ini memiliki fungsi lingkungan sebagai penyedia air bersih di permukaan yang bersumber dari air tanah dan sungai, lahan yang subur untuk dimanfaatkan pertanian dan perkebunan, serta sebagai pembentuk lapisan tanah baru hasil sedimentasi fluvial. Jenis bentang alam ini memiliki luas 630.864,89 Ha atau sekitar 11,10% dari total luas wilayah daratan Provinsi Aceh




*Sumber: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021*

Gambar 2.19 Peta Karakteristik Bentang Alam (KBA) Aceh

C5. Karakteristik Vegetasi Alami (KVA)

Vegetasi alami diartikan sebagai vegetasi yang terdapat dalam landskap yang belum dipengaruhi oleh kegiatan manusia (Kuchler, 1967). Vegetasi alami beradaptasi dengan lingkungannya dan karena itu harmonis dengan sifat-sifat lain dari landskap. Vegetasi alami bukan hanya merupakan sebuah komponen dari keanekaragaman hayati yang menyediakan sumber daya alam, tetapi juga mempunyai peran penting dalam berbagai proses alam yang menunjang kehidupan manusia seperti hidrologi dan iklim. di Provinsi Aceh terdapat empat jenis vegetasi alami yang dominan yaitu:

1. Vegetasi hutan pegunungan bawah

   Vegetasi hutan pegunungan bawah adalah vegetasi yang terdapat pada wilayah dengan elevasi 750-2500 mdpl. Vegetasi pada habitat ini berupa hutan lebat dengan tajuk yang tidak rata dengan komposisi floristik yang kaya spesies. Umumnya ukuran batang pohonnya sudah mengecil, demikian juga daunnya. Pada batang pohon biasanya tumbuh melimpah berbagai jenis epifit, tumbuhan memanjat dan lumut pada batang pohon maupun substrat tanah dan batuan di lantai dasar hutan. Vegetasi hutan pegunungan bawah berfungsi sebagai penutup permukaan morfologi pegunungan bawah dengan batuan vulkanik. Komunitas vegetasi ini variasi spesies pohonnya cukup melimpah, berupa tegakan pohon tinggi ramping bertajuk yangmenghasilkan serasah daun cukup banyak dan bersama lumut yang tumbuh pada lantai dasar hutan membentuk komunitas lantai dasar hutan yang lembab. Pada lantai dasar hutan sering ditemukan semai dab merupakan habitat yang baik bagi mikroorganisme dan satwa perombak tanah. Tumpukan serasah di lantai dasar hutan

akan terdekomposisi secara alami menjadi humus bersama dengan lumut yang menyerap air. Lumut yang mati akan berubah menjadi tanah yang kaya hara. Pada saat ada hujan, sebagian besar air permukaan akan diserap dan diikat oleh humus sehingga mengurangi laju derasnya aliran permukaan. Air yang diikat oleh humus dan lumut akan dilepas secara bertahap dan melalui lantai dasar hutan yang berupa batuan vulkanik akan akan turun ke bawah masuk dalam sistem hidrologi permukaan dan bawah tanah sebagai cadangan air. Air yang dilepaskan akan menyebabkan proses kartstifikasi berlangsung dan kondisi lingkungan menjadi relatif lebih lembab dan sejuk.

2. Vegetasi hutan dipterokarpa pamah

   Vegetasi hutan dipterokarpa pamah adalah komunitas vegetasi dengan tegakan pohon-pohon tinggi 30–60 m, batangnya lurus dan relatif ramping, tajuknya lebat berdaun sedang sampai lebar dan selalu hijau, pada tanah podsolik merah kuning dan gugus tanah asosiasinya yang beraneka ragam (kompleks) pada elevasi 0 - 1000 m. Tanah Podsolik Merah Kuning adalah tanah yang telah mengalami pelapukan dan pelindian sangat hebat dan banyak mengandung oksida besi dan aluminium dan umumnya kurang subur. Meskipun demikian secara alami keragaman spesies di ekosistem hutan dipterokarpa ini cukup tinggi, namun dominasi spesies pada komunitas hutan ini adalah kelompok Dipterocarpaceae. Vegetasi hutan dipterokarpa pamah fungsinya sebagai pelindung bagi ekosistem (abiotik dan biotik) yang berada di bawahnya. Sebagai komunitas vegetasi yang mendominasi suatu ekosistem, banyak komunitas vegetasi lain maupun satwa yang hidup di dalamnya sangat bergantung pada keberadaan hutan dipterokarpa. Berbagai unsur hara tanah juga menjadi terjaga kelestariannya oleh hutan dipterokarpa pamah ini. Tajuk dan perawakan yang cukup besar berfungsi sebagai penyerap karbon dan penghasil oksigen. Tajuk pohon mampu untuk menarik uap air menghasilkan tetesan kondensasi karena adanya perbedaan suhu. Pohonnya menghasilkan serasah organik yang cukup banyak, dan bersama dengan bahan organik lain yang mati melalui proses dekomposisi oleh organisme tanah membentuk humus.

3. Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)

   Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) adalah komunitas vegetasi dengan tegakan pohon-pohon tinggi 30–45 m, batangnya lurus dan relatif ramping, tajuknya lebat berdaun kecil, sedang sampai lebar dan selalu hijau, tumbuh pada berbagai tipe tanah dengan variasi tingkat kesuburannya pada elevasi 0 - 1000 m. Bergantung kepada wilayah dan iklimnya dominasi spesies pada komunitas ini adalah bukan dari kelompok Dipterocarpaceae, umumnya banyak ditemukan bebagai spesies pohon penghasil buah-buahan, penghasil getah dan minyak atsiri, dan penghasil komoditas tanaman perkebunan (kopi, kakao, minyak nabati, serat dll.). Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) fungsinya sebagai pelindung bagi ekosistem (abiotik dan biotik) yang berada di bawahnya. Sebagai komunitas vegetasi yang mendominasi suatu ekosistem, banyak komunitas vegetasi lain maupun satwa yang hidup di dalamnya sangat bergantung oleh keberadaan hutan pamah (non dipterokarpa) . Berbagai unsur hara tanah juga menjadi terjaga kelestariannya oleh vegetasi hutan pamah ini. Keragaman spesies hutan pamah dengan tajuk yang beragam bentuknya berfungsi sebagai penyerap karbon dan penghasil oksigen. Tajuk pohon yang sangat beragam mampu untuk menarik uap air menghasilkan tetesan kondensasi karena adanya perbedaan suhu. Pohonnya menghasilkan serasah organik yang cukup banyak, dan bersama dengan bahan organik lain yang mati melalui proses dekomposisi oleh organisme tanah membentuk humus.

4. Vegetasi terna tepian sungai payau

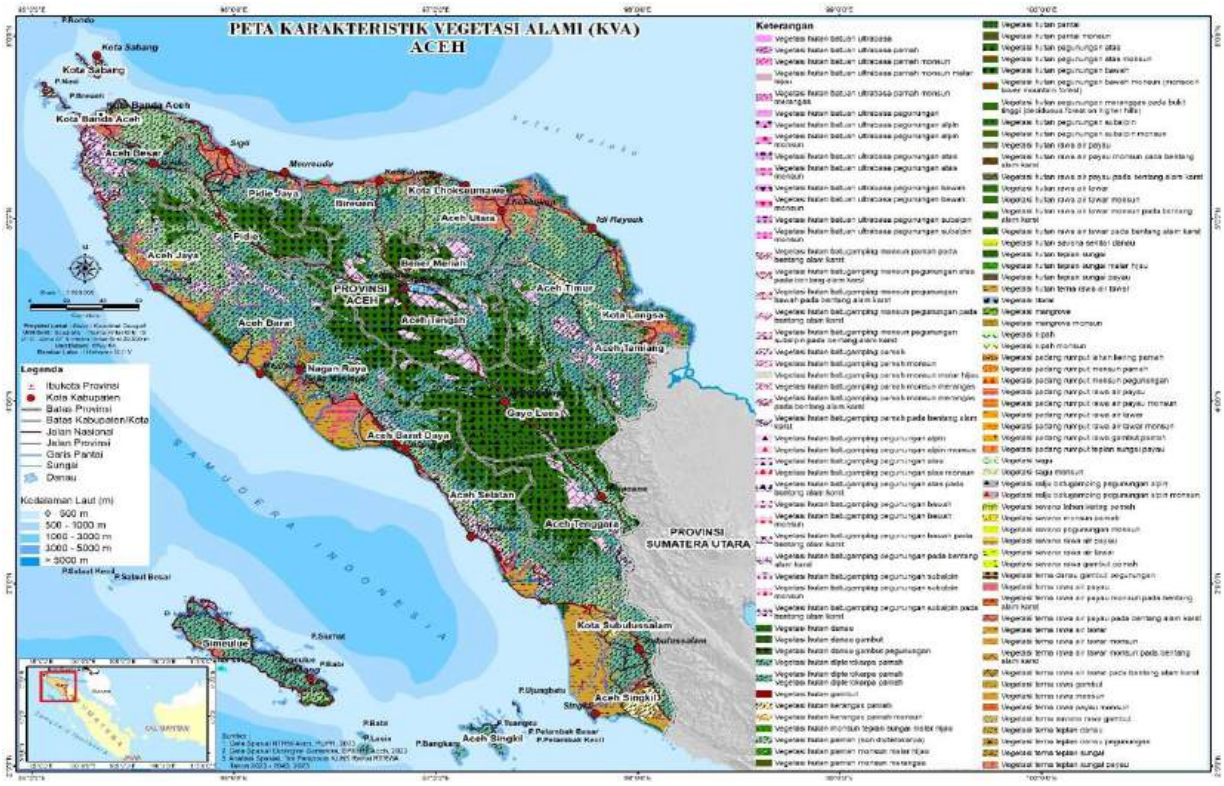
Vegetasi terna tepian sungai payau definisi operasionalnya adalah kelompok komunitas tumbuhan terna yang tumbuh dan berkembang pada wilayah lahan basah yang terdapat di bantaran sungai atau wilayah di sekitar aliran sungai sehingga sering tergenang, terkena arus pasang surut air laut. Vegetasi terna tepian sungai payau fungsinya sebagai penangkap sedimentasi berupa lumpur, pasir, batu maupun bahan lain yang diakibatkan oleh aliran air permukaan yang dari perbukitan di atasnya maupun yang mengalir pada badan air sungai yang terpengaruh oleh pasang surut laut. Dengan proses ini maka air yang menuju ke hulu sungai sudah tersaring material batuannya sehingga proses sedimentasi pada pinggiran sungai, pendangkalan sungai maupun muara sungai tidak terjadi. Sedimen yang terbawa ini umumnya membawa unsur hara dari bagian hulu, dan membentuk lahan relatif kering yang tidak digenangi air secara permanen membentuk bantaran sungai yang subur. Pada bagian ini umumnya banyak ditumbuhi oleh vegetasi berupa terna dan juga pohon yang selalu hijau di sepanjang tahun. Kombinasi terna dan vegetasi pepohonan yang ukurannya tidak terlalu besar dengan sistem perakaran yang kuat membentuk rajutan akar ini akan memperkuat struktur pinggiran yang berupa tebing sungai menjadi lebih kuat menahan longsornya tanah, terutama saat musim hujan tiba.

Tabel 2.13.
Kawasan Vegetasi Alami (KVA) Aceh

| Karakteristik Vegetasi Alami | Luas (Ha) | Persentase |
|---|---|---|
| Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst | 245.022,43 | 4.31 |
| Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah pada bentang alam karst | 7.724,67 | 0.14 |
| Vegetasi hutan batugamping pegunungan pada bentang alam karst | 134.493,55 | 2.37 |
| Vegetasi hutan dipterokarpa pamah | 1.978.309,88 | 34.81 |
| Vegetasi hutan gambut | 32.116,79 | 0.57 |
| Vegetasi hutan kerangas pamah | 68.473,26 | 1.20 |
| Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) | 815.266,29 | 14.34 |
| Vegetasi hutan pantai | 133.496,46 | 2.35 |
| Vegetasi hutan pegunungan atas | 93.852,34 | 1.65 |
| Vegetasi hutan pegunungan bawah | 1.183.949,16 | 20.83 |
| Vegetasi hutan pegunungan subalpin | 141.261,27 | 2.49 |
| Vegetasi hutan rawa air payau | 10.641,65 | 0.19 |
| Vegetasi hutan tepian sungai | 11.010,26 | 0.19 |
| Vegetasi hutan tepian sungai payau | 9.583,43 | 0.17 |
| Vegetasi mangrove | 64.436,98 | 1.13 |
| Vegetasi nipah | 1.086,79 | 0.02 |
| Vegetasi sagu | 1.904,19 | 0.03 |
| Vegetasi terna rawa air payau | 63.739,51 | 1.12 |
| Vegetasi terna rawa air tawar | 260.459,95 | 4.58 |
| Vegetasi terna rawa gambut | 32.416,08 | 0.57 |
| Vegetasi terna tepian danau | 9.937,31 | 0.17 |

| Karakteristik Vegetasi Alami | Luas (Ha) | Persentase |
|---|---|---|
| Vegetasi terna tepian danau pegunungan | 5.915,79 | 0.10 |
| Vegetasi terna tepian sungai | 23.215,41 | 0.41 |
| Vegetasi terna tepian sungai payau | 355.126,20 | 6.25 |
| Total Luas (Ha) | 5.683.439,61 | 4.31 |

*Sumber: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021*




*Sumber: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021*

Gambar 2.20 Peta Kawasan Vegetasi Alami (KVA) Aceh

## C6. Risiko Dampak

### C6.1. Kerawanan Bencana Banjir

Bencana banjir merupakan bencana yang perlu diwaspadai karena kerugian yang ditimbulkannya dapat mengganggu perekonomian rakyat secara langsung. Berdasarkan kajian Master Plan Banjir di Provinsi Aceh tahun 2022, beberapa wilayah Sungai menunjukkan kerentanan terhadap banjir dan genangan air di setiap wilayah sungai, antara lain:

a. Wilayah Sungai Aceh-Meureudue: Banjir dan banjir bandang di Kecamatan Padang Tiji dan Tangse (DAS Aceh) terjadi akibat deforestasi ilegal yang mengubah hutan menjadi lahan perkebunan. Beberapa DAS yang melintasi pemukiman mengalami banjir, terutama di Kr. Aceh. Genangan air dari meluapnya Kr. Aceh (DAS Aceh) mempengaruhi Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie. Beberapa sungai lainnya yang berpotensi banjir adalah Kr. Baro, Kr. Tiro di Kabupaten Pidie, serta Kr. Meureudu, Kr. Panteraja dan Kr. Ulim di Kabupaten Pidie Jaya.

b. Wilayah Sungai Jambo Aye: DAS Jambo Aye (Krueng Jambo Aye), DAS Arakundo (Krueng Arakundo), dan DAS Peureulak (Krueng Peureulak) menunjukkan potensi risiko banjir dalam WS Jambo Aye.
c. Wilayah Sungai Woyla-Bateue: Banjir seringkali terjadi disebabkan oleh curah hujan tinggi, aliran tinggi, perubahan lahan dari hutan menjadi kebun, penebangan liar sehingga kapasitas penyerapan air berkurang.
d. Wilayah Sungai Alas-Singkil: Daerah-daerah seperti hulu Sungai Alas (Kabupaten Aceh Tenggara), Sungai Lae Soraya (Kota Subulussalam), dan hilir Sungai Singkil (Kabupaten Singkil) sering kali mengalami bencana banjir.
e. Wilayah Sungai Teunom Lambesoi: Banjir sering kali terjadi pada daerah pertanian dan permukiman akibat curah hujan tinggi serta ketidakmampuan badan sungai dalam menampung debit air yang lewat.
f. Wilayah Sungai Pase-Peusangan : Terdapat beberapa sungai seperti Krueng Keureuto,Krueng Peuto,Krueng Buloh, Krueng Peusangan, Krueng Jeunib, Krung Peudada, dan Krueng Pase dimana sering kali meluap atau mengalami genagan air.
g. Wilayah Sunga Baru-Kluet : Sering kali terjadi bencana banjor di daerah ini baik itu disebabkan oleh kerusakan DAS maupun tersumbatnya aliran anak-anak sunga akibat adanya pasang surut air laut.
h. Wilayah Sungai Tamiang-Langsa : Banjir tersebar hampir di semua kabupaten/kota (DAS Tamiang sekitar Kecamatan Kuala Simpang, Kecamatan Tamiang Hulu, Kecamatan Manyak Payed, Kecamatan Seruway, Kecamatan Bendahara, Kecamatan Kejuruan Muda dan Kecamatan Karang Baru dan pada DAS Bayeun di Kabupaten Aceh Timur sekitar Kecamatan Bireun Bayeun dan kecamatan Peureulak Timur).

Analisis bahaya banjir di Provinsi Aceh memperlihatkan bahwa risiko banjir berbeda-beda di setiap kabupaten dan kota, dengan dampak yang bisa sangat signifikan terhadap tempat tinggal, infrastruktur, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Kabupaten Aceh Barat, memiliki luas daerah dengan risiko banjir rendah sebesar 65.267 hektar (23,45% dari total wilayah), sedang 40.217 hektar (14,45%), dan tinggi 17.625 hektar (6,33%), dengan sebagian besar wilayahnya 155.178 hektar (55,77%) tidak terdampak oleh banjir. Ini mengindikasikan bahwa meski ada area yang berisiko, Aceh Barat memiliki wilayah luas yang aman dari bahaya banjir. Sementara itu, Aceh Barat Daya memiliki area berisiko banjir rendah dengan luas 8.087 hektar (4,29% dari total wilayah), sedang sebesar 9.302 hektar (4,94%), dan tinggi 8.431 hektar (4,48%), namun sebagian besar wilayahnya 162.370 hektar (86,29%) tidak terdampak banjir. Ini menunjukkan bahwa walaupun ada potensi risiko, masih banyak lahan yang tergolong aman.

Di Kabupaten Aceh Besar, terdapat 34.728 hektar (12,01% dari total wilayah) dengan risiko banjir rendah, sedang 19.305 hektar (6,67%), dan tinggi 5.850 hektar (2,02%), sedangkan wilayah yang tak terdampak adalah 229.265 hektar (79,30%). Ini memperlihatkan bahwa Aceh Besar memiliki area yang cukup signifikan yang aman dari bahaya banjir. Khusus untuk Aceh Tengah dan Aceh Tenggara, yang berada di wilayah tengah, risiko banjirnya tergolong lebih kecil dibandingkan kabupaten lain. Aceh Tengah memiliki 10.074 hektar (2,25% dari total wilayah) dengan risiko rendah, sedang 5.691

hektar (1,27%), dan tinggi 6.817 hektar (1,53%), sementara sebagian besar wilayahnya 424.260 hektar (95,95%) tidak terdampak. Aceh Tenggara memiliki 20.198 hektar (4,83%) dengan risiko rendah, sedang 10.584 hektar (2,53%), dan tinggi 3.562 hektar (0,85%), dengan area tak terdampak mencapai 383.568 hektar (91,79%).

Dalam konteks kota, Kota Banda Aceh memiliki area dengan risiko banjir rendah sebesar 663 hektar (11,68% dari total wilayah), sedang 2.056 hektar (36,23%), dan tinggi 2.400 hektar (42,27%), tetapi area yang tak terdampak hanya 558 hektar (9,82%). Sementara Kota Langsa memiliki risiko banjir rendah pada 5.018 hektar (22,36%), sedang 4.512 hektar (20,11%), dan tinggi 4.935 hektar (22,00%), dengan wilayah tak terdampak sebesar 7.972 hektar (35,53%). Lebih rinci dapat merujuk pada Tabel 2.14.

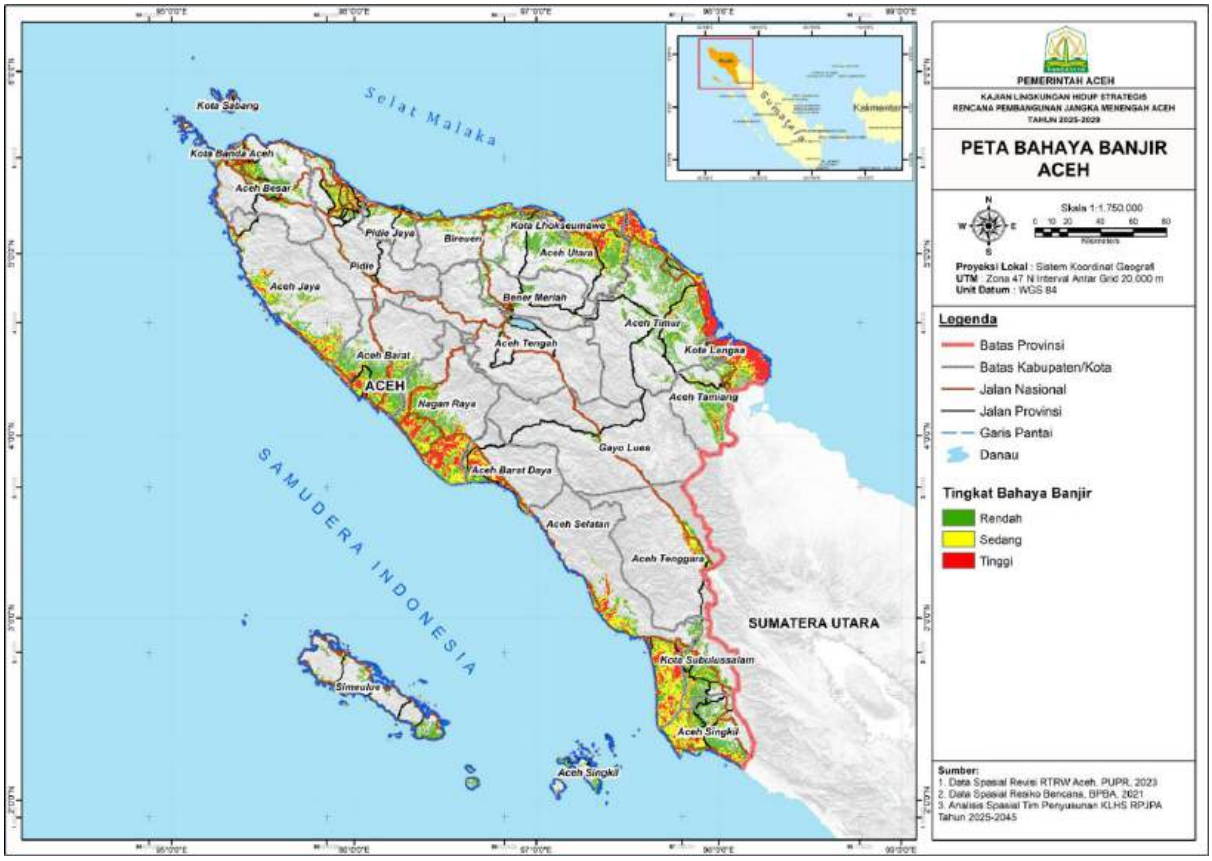
Tabel 2.14.
Bahaya Banjir di Aceh

| No. | Kabupaten/Kota | Bahaya Banjir | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Luas (Ha) | | | | |
| | | Rendah | Sedang | Tinggi | Tak Terdampak | Total |
| A | Kabupaten | | | | | |
| 1 | Aceh Barat | 65.267,00 | 40.217,00 | 17.625,00 | 155.178,30 | 278.287,30 |
| 2 | Aceh Barat Daya | 8.087,00 | 9.302,00 | 8.431,00 | 162.370,24 | 188.190,24 |
| 3 | Aceh Besar | 34.728,00 | 19.305,00 | 5.850,00 | 229.264,54 | 289.147,54 |
| 4 | Aceh Jaya | 40.612,00 | 28.324,00 | 12.669,00 | 305.630,25 | 387.235,25 |
| 5 | Aceh Selatan | 52.085,00 | 44.315,00 | 23.439,00 | 297.728,12 | 417.567,12 |
| 6 | Aceh Singkil | 48.952,00 | 30.652,00 | 18.020,00 | 87.724,36 | 185.348,36 |
| 7 | Aceh Tamiang | 44.213,00 | 28.497,00 | 27.777,00 | 118.284,28 | 218.771,28 |
| 8 | Aceh Tengah | 10.074,00 | 5.691,00 | 6.817,00 | 424.259,74 | 446.841,74 |
| 9 | Aceh Tenggara | 20.198,00 | 10.584,00 | 3.562,00 | 383.568,32 | 417.912,32 |
| 10 | Aceh Timur | 64.336,00 | 46.679,00 | 38.107,00 | 391.778,05 | 540.900,05 |
| 11 | Aceh Utara | 52.941,00 | 47.735,00 | 32.267,00 | 137.582,36 | 270.525,36 |
| 12 | Bener Meriah | 11.260,00 | 6.828,00 | 4.601,00 | 168.050,93 | 190.739,93 |
| 13 | Bireuen | 18.123,00 | 13.272,00 | 5.379,00 | 142.925,24 | 179.699,24 |
| 14 | Gayo Lues | 9.110,00 | 4.142,00 | 1.827,00 | 539.049,46 | 554.128,46 |
| 15 | Nagan Raya | 67.242,00 | 46.437,00 | 30.881,00 | 207.814,88 | 352.374,88 |
| 16 | Pidie | 21.213,00 | 18.940,00 | 10.985,00 | 266.614,84 | 317.752,84 |
| 17 | Pidie Jaya | 9.083,00 | 7.702,00 | 4.030,00 | 73.085,90 | 93.900,90 |
| 18 | Simeulue | 31.140,00 | 17.794,00 | 5.921,00 | 127.323,59 | 182.178,59 |
| B | Kota | | | | | |
| 1 | Kota Banda Aceh | 663,00 | 2.056,00 | 2.400,00 | 557,96 | 5.676,96 |
| 2 | Kota Langsa | 5.018,00 | 4.512,00 | 4.935,00 | 7.971,71 | 22.436,71 |
| 3 | Kota Lhokseumawe | 7.097,00 | 3.402,00 | 1.784,00 | 1.014,37 | 13.297,37 |
| 4 | Kota Sabang | 6.470,00 | 2.753,00 | 736,00 | 2.208,10 | 12.167,10 |
| 5 | Kota Subulussalam | 31.147,00 | 13.310,00 | 2.623,00 | 71.280,08 | 118.360,08 |
| Provinsi Aceh | | 659.059,00 | 452.449,00 | 270.666,00 | 4.301.265,61 | 5.683.439,61 |

*Sumber: BPBA, 2021*

Secara keseluruhan, Provinsi Aceh memiliki total 659.059 hektar (11,60% dari total wilayah) dengan risiko banjir rendah, 452.449 hektar (7,96%) dengan risiko sedang, dan

270.666 hektar (4,76%) dengan risiko tinggi. Sebagian besar wilayah Aceh, yaitu 4.301.266 hektar (75,68%), tidak terdampak oleh banjir. Peta rawan banjir di Provinsi Aceh dapat dilihat dalam gambar berikut.




*Sumber: BPBA, 2021*

Gambar 2.21 Peta Bahaya Banjir Aceh

Data ini penting untuk perencanaan pengembangan wilayah dan mitigasi bencana. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mempertimbangkan area dengan risiko banjir yang tinggi dalam pengembangan infrastruktur dan permukiman serta memperkuat sistem peringatan dini dan respons bencana untuk mengurangi dampak banjir. Di sisi lain, wilayah yang tidak terdampak banjir dapat dijadikan sebagai area prioritas untuk pengembangan lebih lanjut, tentunya dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan.

### C6.2. Banjir Bandang

Analisis ancaman banjir bandang di Aceh memperlihatkan variasi geospasial yang mencerminkan tingkat kerentanan yang berbeda antar kabupaten dan kota. Banjir bandang, yang diakibatkan oleh aliran air dengan volume besar dan kecepatan tinggi yang terjadi secara tiba-tiba, biasanya terjadi di wilayah dengan gradien topografi yang curam dan kondisi hidrologis yang memungkinkan akumulasi cepat aliran permukaan.

Kabupaten Aceh Barat, memiliki area dengan ancaman banjir bandang rendah seluas 572 hektar (0,21% dari total wilayah), sedang seluas 1.838 hektar (0,66%), dan tinggi seluas 13.246 hektar (4,76%). Namun, sebagian besar wilayahnya, yaitu 262.631

hektar (94,37%), dinyatakan tidak terdampak oleh banjir bandang, menandakan adanya wilayah yang lebih resisten terhadap jenis bencana ini. Aceh Barat Daya menonjol dengan tidak adanya catatan wilayah yang terpengaruh oleh ancaman banjir bandang, dengan seluruh 188.190 hektarnya dikategorikan sebagai tidak terdampak. Hal ini menunjukkan karakteristik wilayah yang lebih stabil dan kurang rentan terhadap banjir bandang. Aceh Besar menghadapi ancaman banjir bandang yang tinggi di wilayah seluas 40.714 hektar (14,08% dari total wilayah), yang menandakan perlunya perhatian khusus untuk mitigasi dan penanganan bencana, termasuk penguatan infrastruktur penahan banjir dan pencegahan erosi.

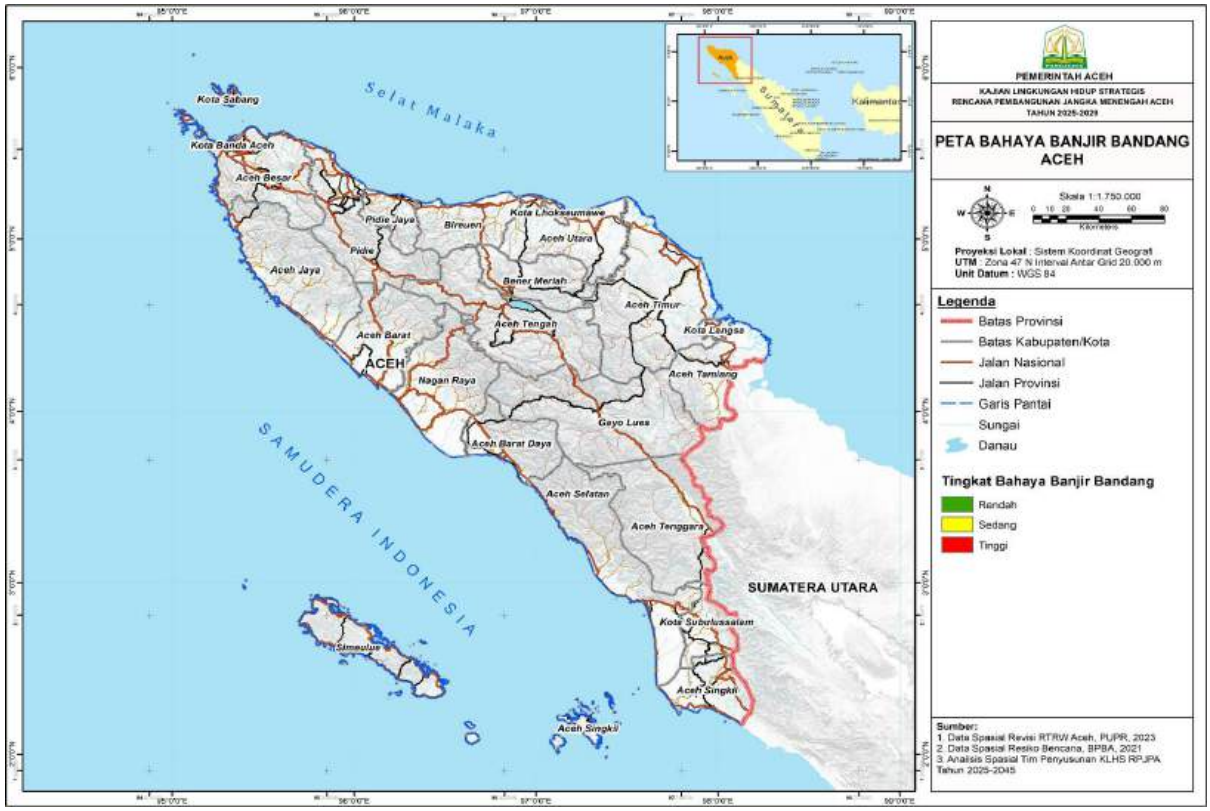
Kabupaten seperti Aceh Tengah dan Aceh Timur memiliki luasan yang cukup signifikan dalam kategori ancaman tinggi, dengan Aceh Tengah mencatat 23.455 hektar (5,25%) dan Aceh Timur dengan 25.615 hektar (4,74%). Kedua kabupaten ini membutuhkan implementasi kebijakan pengelolaan lahan dan air yang efektif untuk mengurangi kerentanan terhadap banjir bandang. Di wilayah perkotaan, Kota Banda Aceh dan Kota Langsa juga tercatat memiliki wilayah dengan ancaman tinggi, yaitu 2.824 hektar (49,77%) dan 3.460 hektar (15,42%), menunjukkan pentingnya perbaikan sistem drainase perkotaan dan perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan ancaman banjir bandang. Untuk rincinya dapat merujuk pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15.
Bahaya Banjir Bandang Aceh

| No | Kabupaten/Kota | Bahaya Banjir Bandang | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Luas (Ha) | | | | |
| | | Rendah | Sedang | Tinggi | Tak Terdampak | Total |
| A | Kabupaten | | | | | |
| 1 | Aceh Barat | 572,00 | 1.838,00 | 13.246,00 | 262.631,30 | 278.287,30 |
| 2 | Aceh Barat Daya | - | - | - | 188.190,24 | 188.190,24 |
| 3 | Aceh Besar | 1.023,00 | 4.468,00 | 40.714,00 | 242.942,54 | 289.147,54 |
| 4 | Aceh Jaya | 384,00 | 1.419,00 | 8.796,00 | 376.636,25 | 387.235,25 |
| 5 | Aceh Selatan | 422,00 | 1.596,00 | 11.051,00 | 404.498,12 | 417.567,12 |
| 6 | Aceh Singkil | 92,00 | 236,00 | 909,00 | 184.111,36 | 185.348,36 |
| 7 | Aceh Tamiang | 254,00 | 903,00 | 5.431,00 | 212.183,28 | 218.771,28 |
| 8 | Aceh Tengah | 216,00 | 989,00 | 23.455,00 | 422.181,74 | 446.841,74 |
| 9 | Aceh Tenggara | 160,00 | 600,00 | 3.065,00 | 414.087,32 | 417.912,32 |
| 10 | Aceh Timur | 874,00 | 3.558,00 | 25.615,00 | 510.853,05 | 540.900,05 |
| 11 | Aceh Utara | 545,00 | 1.830,00 | 8.808,00 | 259.342,36 | 270.525,36 |
| 12 | Bener Meriah | 123,00 | 683,00 | 9.716,00 | 180.217,93 | 190.739,93 |
| 13 | Bireuen | 353,00 | 1.475,00 | 30.667,00 | 147.204,24 | 179.699,24 |
| 14 | Gayo Lues | 9,00 | 82,00 | 3.965,00 | 550.072,46 | 554.128,46 |
| 15 | Nagan Raya | 256,00 | 867,00 | 2.736,00 | 348.515,88 | 352.374,88 |
| 16 | Pidie | 654,00 | 2.825,00 | 28.560,00 | 285.713,84 | 317.752,84 |
| 17 | Pidie Jaya | 2,00 | 19,00 | 74,00 | 93.805,90 | 93.900,90 |
| 18 | Simeulue | 89,00 | 556,00 | 7.004,00 | 174.529,59 | 182.178,59 |
| B | Kota | | | | | |
| 1 | Kota Banda Aceh | 785,00 | 860,00 | 2.824,00 | 1.207,96 | 5.676,96 |
| 2 | Kota Langsa | 297,00 | 719,00 | 3.460,00 | 17.960,71 | 22.436,71 |
| 3 | Kota Lhokseumawe | - | - | - | 13.297,37 | 13.297,37 |
| 4 | Kota Sabang | - | - | - | 12.167,10 | 12.167,10 |
| 5 | Kota Subulussalam | - | - | - | 118.360,08 | 118.360,08 |
| Provinsi Aceh | | 7.110,00 | 25.523,00 | 230.096,00 | 5.420.710,61 | 5.683.439,61 |

*Sumber: BPBA, 2021*

Keseluruhan data mencatat bahwa wilayah Aceh memiliki total 7.110 hektar (0,13%) dengan ancaman rendah, 25.523 hektar (0,45%) dengan ancaman sedang, dan 230.096 hektar (4,05%) dengan ancaman tinggi, sementara 5.420.711 hektar (95,38%) tidak terdampak. Pendekatan terintegrasi antara perencanaan ruang, manajemen sumber daya alam, dan penguatan komunitas diperlukan untuk menghadapi ancaman banjir bandang. Langkah-langkah seperti konstruksi bendungan penahan (check dam), konservasi vegetasi riparian, dan pengembangan sistem peringatan dini penting untuk dikembangkan guna mengurangi dampak bencana banjir bandang di Provinsi Aceh.




*Sumber: BPBA, 2021*

Gambar 2.22 Peta Bahaya Banjir Bandang Aceh

## C6.3. Longsor

Analisis ancaman tanah longsor di Aceh memiliki kerentanan yang beragam terhadap fenomena ini, yang sering kali dikaitkan dengan curah hujan yang tinggi, topografi, serta kondisi geologis dan vegetasi yang mempengaruhi stabilitas lereng. Dalam konteks kerentanan terhadap tanah longsor, Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten yang paling terpengaruh dengan 270.134 hektar (60,45% dari total wilayah) berada pada ancaman sedang dan 105.661 hektar (23,64%) pada ancaman tinggi, menyisakan hanya 65.506 hektar (14,66%) yang tidak terdampak. Ini menegaskan pentingnya intervensi konservasi tanah dan pengelolaan lereng yang efektif dalam perencanaan tata ruang daerah. Aceh Tenggara juga mencatat ancaman yang signifikan dengan 202.198 hektar (48,38% dari total wilayah) pada ancaman sedang dan 145.290 hektar (34,77%) pada ancaman tinggi, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayahnya memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap tanah longsor.

Di sisi lain, Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki luasan yang luas yang tercatat dalam kategori ancaman tinggi dengan 64.231 hektar (34,13% dari total wilayah), sementara 66.866 hektar (35,55%) berada pada ancaman sedang, menandakan bahwa topografi dan kondisi geologis daerah tersebut menyebabkan kerentanan yang lebih besar terhadap tanah longsor. Kabupaten Gayo Lues mencatat luasan terbesar dalam kategori ancaman tinggi dengan 292.359 hektar (52,74% dari total wilayah) dan 190.016 hektar (34,28%) pada ancaman sedang, yang mengindikasikan bahwa daerah ini membutuhkan pengelolaan lingkungan dan tata ruang yang sangat hati-hati untuk mencegah kerusakan akibat tanah longsor.

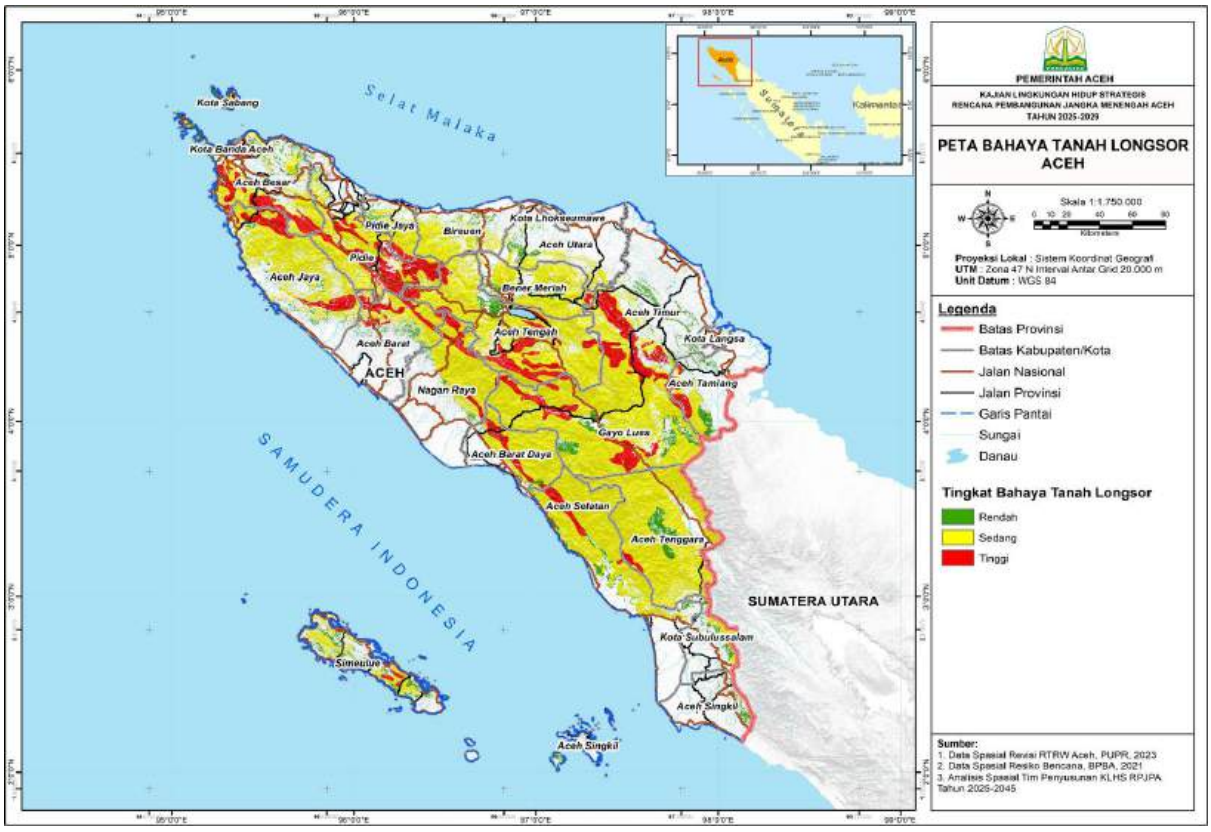
Untuk wilayah perkotaan, Kota Subulussalam mencatat 13.235 hektar (11,18% dari total wilayah) pada ancaman sedang dan 2.808 hektar (2,37%) pada ancaman tinggi, sementara Kota Sabang memiliki 3.392 hektar (27,87%) pada ancaman sedang dan 1.295 hektar (10,64%) pada ancaman tinggi. Data ini menunjukkan bahwa bahkan area perkotaan tidak terlepas dari ancaman tanah longsor, memerlukan upaya pengurangan risiko yang termasuk dalam perencanaan perkotaan.

Tabel 2.16.
Bahaya Tanah Longsor Aceh

| No. | Kabupaten/Kota | Bahaya Tanah Longsor | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Luas (Ha) | | | | |
| | | Rendah | Sedang | Tinggi | Tak Terdampak | Total |
| **A** | **Kabupaten** | | | | | |
| 1 | Aceh Barat | 4.592,00 | 69.242,00 | 13.198,00 | 191.255,30 | 278.287,30 |
| 2 | Aceh Barat Daya | 3.061,00 | 66.866,00 | 64.231,00 | 54.032,24 | 188.190,24 |
| 3 | Aceh Besar | 12.076,00 | 99.800,00 | 35.149,00 | 142.122,54 | 289.147,54 |
| 4 | Aceh Jaya | 4.777,00 | 165.451,00 | 44.841,00 | 172.166,25 | 387.235,25 |
| 5 | Aceh Selatan | 11.632,00 | 130.170,00 | 116.576,00 | 159.189,12 | 417.567,12 |
| 6 | Aceh Singkil | 7.475,00 | 2.536,00 | 258,00 | 175.079,36 | 185.348,36 |
| 7 | Aceh Tamiang | 9.101,00 | 26.670,00 | 17.656,00 | 165.344,28 | 218.771,28 |
| 8 | Aceh Tengah | 5.541,00 | 270.134,00 | 105.661,00 | 65.505,74 | 446.841,74 |
| 9 | Aceh Tenggara | 20.079,00 | 202.198,00 | 145.290,00 | 50.345,32 | 417.912,32 |
| 10 | Aceh Timur | 11.997,00 | 112.927,00 | 54.012,00 | 361.964,05 | 540.900,05 |
| 11 | Aceh Utara | 8.146,00 | 30.070,00 | 1.667,00 | 230.642,36 | 270.525,36 |
| 12 | Bener Meriah | 11.100,00 | 81.043,00 | 39.233,00 | 59.363,93 | 190.739,93 |
| 13 | Bireuen | 3.152,00 | 54.977,00 | 13.518,00 | 108.052,24 | 179.699,24 |
| 14 | Gayo Lues | 24.614,00 | 292.359,00 | 190.016,00 | 47.139,46 | 554.128,46 |
| 15 | Nagan Raya | 3.559,00 | 91.818,00 | 43.513,00 | 213.484,88 | 352.374,88 |
| 16 | Pidie | 3.416,00 | 157.204,00 | 38.835,00 | 118.297,84 | 317.752,84 |
| 17 | Pidie Jaya | 3.319,00 | 43.360,00 | 13.265,00 | 33.956,90 | 93.900,90 |
| 18 | Simeulue | 18.831,00 | 37.355,00 | 777,00 | 125.215,59 | 182.178,59 |
| **B** | **Kota** | | | | | |
| 1 | Kota Banda Aceh | - | - | - | 5.676,96 | 5.676,96 |
| 2 | Kota Langsa | 51,00 | - | - | 22.385,71 | 22.436,71 |
| 3 | Kota Lhokseumawe | 5,00 | 81,00 | - | 13.211,37 | 13.297,37 |
| 4 | Kota Sabang | 2.628,00 | 3.392,00 | 1.295,00 | 4.852,10 | 12.167,10 |
| 5 | Kota Subulussalam | 7.693,00 | 13.235,00 | 2.808,00 | 94.624,08 | 118.360,08 |
| **Aceh** | | **176.845,00** | **1.950.888,00** | **941.799,00** | **2.613.907,61** | **5.683.439,61** |

*Sumber: BPBA, 2021*

Data ini menggarisbawahi pentingnya mitigasi dan adaptasi terhadap ancaman tanah longsor, termasuk peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengelolaan risiko bencana, pengembangan sistem peringatan dini, serta pengelolaan lahan dan vegetasi untuk mencegah pergerakan tanah.




*Sumber: BPBA, 2021*

Gambar 2.23 Peta Bahaya Longsor Aceh

## C6.4. Kekeringan

Dalam analisis ancaman kekeringan di Aceh, terdapat distribusi yang beragam dalam hal luas wilayah yang terpengaruh oleh kekeringan. Kekeringan merupakan fenomena hidrologis yang terjadi karena ketidakcukupan curah hujan selama periode tertentu, yang dapat mempengaruhi sumber daya air, pertanian, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Kabupaten Aceh Besar menunjukkan angka yang tinggi dalam kategori ancaman rendah dengan luasan 180.296 hektar (62,32% dari total wilayah), sedangkan ancaman sedang tercatat sebesar 107.662 hektar (37,22%), dan hanya 997 hektar (0,34%) yang mengalami ancaman tinggi. Hal ini menandakan bahwa Aceh Besar memiliki sebagian besar wilayah yang relatif aman dari kekeringan meskipun tetap memiliki area yang berisiko. Aceh Jaya dengan 192.563 hektar (49,73%) mengalami ancaman rendah dan 163.087 hektar (42,09%) ancaman sedang, menunjukkan bahwa kabupaten ini memiliki wilayah yang cukup luas yang berisiko menghadapi kekeringan. Sementara itu, Aceh Tenggara memiliki area yang sangat luas yang terdampak oleh ancaman tinggi, yaitu 303.773 hektar (72,68%), yang mengindikasikan bahwa wilayah ini sangat rentan terhadap kekeringan dan membutuhkan langkah-langkah adaptasi dan mitigasi yang efektif.

Kabupaten Aceh Timur juga mencatat angka yang cukup besar dalam ancaman tinggi kekeringan dengan 264.794 hektar (48,97%), memerlukan strategi pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak ancaman kekeringan. Di wilayah perkotaan, Kota Subulussalam memiliki luasan yang terdampak oleh ancaman rendah dengan 70.685 hektar (59,74%) dan ancaman sedang sebesar 35.640 hektar (30,12%), menandakan bahwa urbanisasi dan pengembangan infrastruktur harus mempertimbangkan ketersediaan dan pengelolaan sumber daya air.

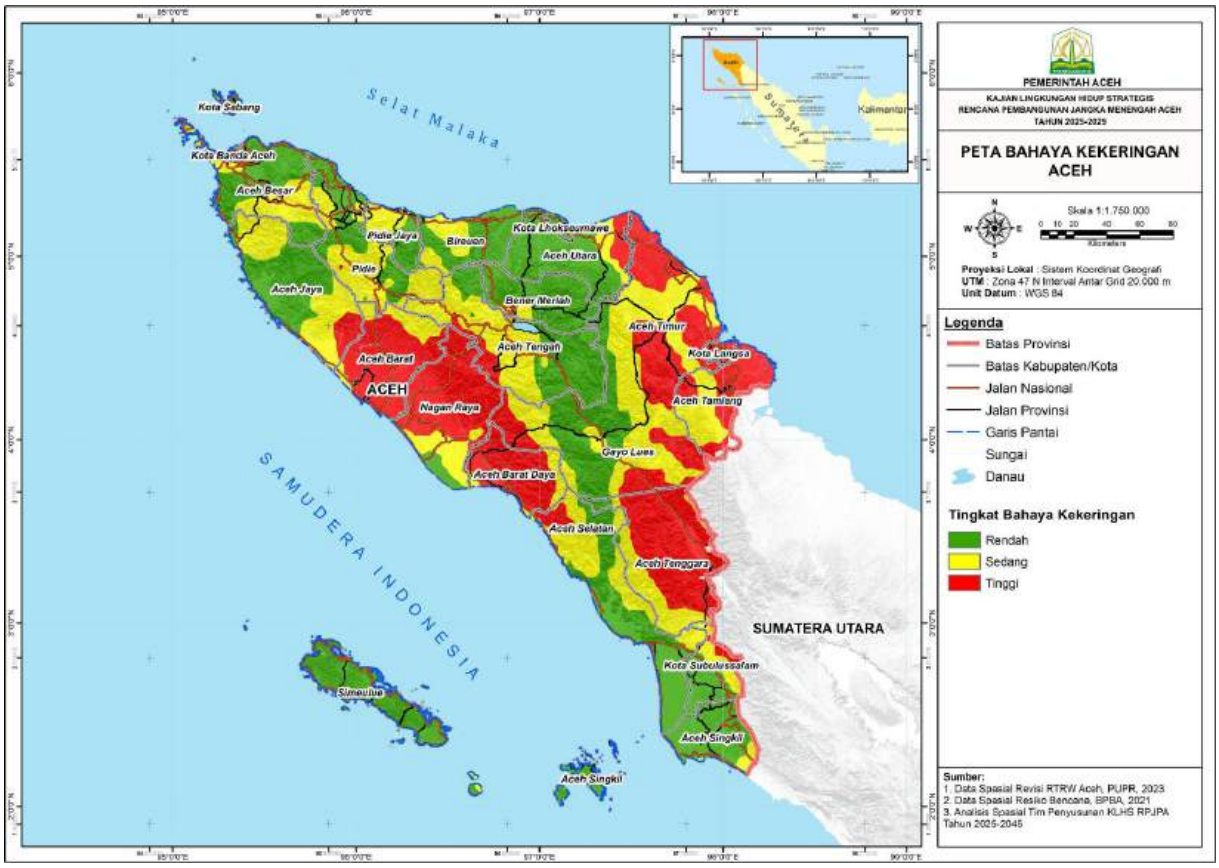
Secara keseluruhan, Aceh memiliki luasan yang terdampak oleh ancaman rendah sebesar 2.212.319 hektar (38,92%), ancaman sedang sebesar 1.806.104 hektar (31,76%), dan ancaman tinggi sebesar 1.663.157 hektar (29,26%), dengan wilayah yang tidak terdampak oleh kekeringan hanya 1.860 hektar (0,03%). Data ini menekankan pentingnya inisiatif konservasi air dan penggunaan teknologi irigasi yang efisien, serta diversifikasi sumber air melalui pembangunan infrastruktur seperti embung dan dam penampung untuk menanggulangi potensi ancaman kekeringan yang mungkin terjadi. Rincinya silahkan merujuk pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17.
Bahaya Kekeringan Aceh

| No | Kabupaten/Kota | Bahaya Kekeringan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Luas (Ha) | | | | |
| | | Rendah | Sedang | Tinggi | Tak Terdampak | Total |
| A | Kabupaten | | | | | |
| 1 | Aceh Barat | - | 54.061,92 | 224.005,27 | 220,12 | 278.287,30 |
| 2 | Aceh Barat Daya | 104,20 | 28.778,11 | 159.149,80 | 158,13 | 188.190,24 |
| 3 | Aceh Besar | 180.296,06 | 107.661,63 | 997,31 | 192,54 | 289.147,54 |
| 4 | Aceh Jaya | 192.562,55 | 163.086,78 | 31.328,90 | 257,02 | 387.235,25 |
| 5 | Aceh Selatan | 234.741,92 | 158.351,39 | 24.458,26 | 15,54 | 417.567,12 |
| 6 | Aceh Singkil | 170.008,88 | 15.202,33 | - | 137,15 | 185.348,36 |
| 7 | Aceh Tamiang | - | 78.599,88 | 140.066,52 | 104,88 | 218.771,28 |
| 8 | Aceh Tengah | 192.340,11 | 218.152,46 | 36.294,73 | 54,44 | 446.841,74 |
| 9 | Aceh Tenggara | 14.539,38 | 99.485,42 | 303.772,69 | 114,83 | 417.912,32 |
| 10 | Aceh Timur | 47.395,91 | 228.592,60 | 264.794,30 | 117,24 | 540.900,05 |
| 11 | Aceh Utara | 207.596,05 | 30.350,22 | 32.372,08 | 207,01 | 270.525,36 |
| 12 | Bener Meriah | 173.261,53 | 17.457,02 | - | 21,38 | 190.739,93 |
| 13 | Bireuen | 122.701,29 | 56.945,72 | - | 52,23 | 179.699,24 |
| 14 | Gayo Lues | 195.233,83 | 213.273,45 | 145.592,89 | 28,29 | 554.128,46 |
| 15 | Nagan Raya | 22.863,16 | 64.474,27 | 265.000,26 | 37,19 | 352.374,88 |
| 16 | Pidie | 135.560,87 | 181.296,11 | 885,30 | 10,55 | 317.752,84 |
| 17 | Pidie Jaya | 47.719,76 | 46.130,23 | - | 50,90 | 93.900,90 |
| 18 | Simeulue | 179.553,93 | 2.608,85 | - | 15,81 | 182.178,59 |
| B | Kota | | | | | |
| 1 | Banda Aceh | 669,65 | 5.007,31 | - | - | 5.676,96 |
| 2 | Langsa | - | - | 22.425,88 | 10,83 | 22.436,71 |
| 3 | Lhokseumawe | 13.297,37 | - | - | - | 13.297,37 |
| 4 | Sabang | 11.187,68 | 948,63 | 30,79 | - | 12.167,10 |
| 5 | Subulussalam | 70.684,53 | 35.640,03 | 11.982,06 | 53,46 | 118.360,08 |
| Aceh | | 2.212.318,65 | 1.806.104,38 | 1.663.157,04 | 1.859,54 | 5.683.439,61 |

*Sumber : BPBA, 2021*

Isu kawasan rawan kekeringan, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana kekeringan, meliputi sebagian wilayah Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Selatan dan Nagan Raya. Untuk jelasnya dapat dilihat Gambar 2.24.




*Sumber: BPBA, 2021*

Gambar 2.24 Peta Bahaya Kekeringan Aceh

## C6.5. Likuifaksi

Dalam analisis bahaya likuifaksi di Aceh, kita mengamati distribusi geografis dari area yang memiliki potensi untuk mengalami fenomena likuifaksi, yang terjadi ketika guncangan seperti gempa bumi membuat tanah yang jenuh air kehilangan kekakuan dan kekuatannya, berpotensi menyebabkan kerusakan struktur yang signifikan pada infrastruktur dan permukiman.

Kabupaten Aceh Tamiang menonjol dengan area berpotensi ancaman rendah seluas 26.921 hektar (12,31% dari total wilayahnya), sedangkan 41.964 hektar (19,21%) berada pada ancaman sedang, dan tidak ada luasan yang tercatat pada ancaman tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat area yang rentan, sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Tamiang memiliki risiko yang lebih rendah terhadap likuefaksi. Kabupaten Aceh Utara memiliki area dengan ancaman sedang yang cukup luas, yaitu 101.633 hektar (37,57%) dari total wilayahnya), dan area berpotensi ancaman tinggi seluas 1.095 hektar (0,40%). Ini menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai kondisi geologi dan hidrologi untuk menginformasikan strategi mitigasi dan tanggap darurat.

Kabupaten Aceh Timur memiliki area dengan ancaman rendah seluas 15.587 hektar (2,88%), ancaman sedang seluas 65.392 hektar (12,09%), dan ancaman tinggi seluas 1.677 hektar (0,31%), dengan sebagian besar wilayahnya, yaitu 458.244 hektar (84,72%), tidak terdampak. Ini mengindikasikan adanya wilayah-wilayah spesifik yang memerlukan perhatian terhadap potensi likuefaksi. Sedangkan di wilayah perkotaan, Kota Langsa memiliki area dengan ancaman rendah seluas 9.352 hektar (41,68%) dan ancaman sedang seluas 4.839 hektar (21,57%), sementara Kota Lhokseumawe mencatatkan area dengan ancaman sedang seluas 12.342 hektar (92,82%) dan ancaman tinggi seluas 545 hektar (4,10%).

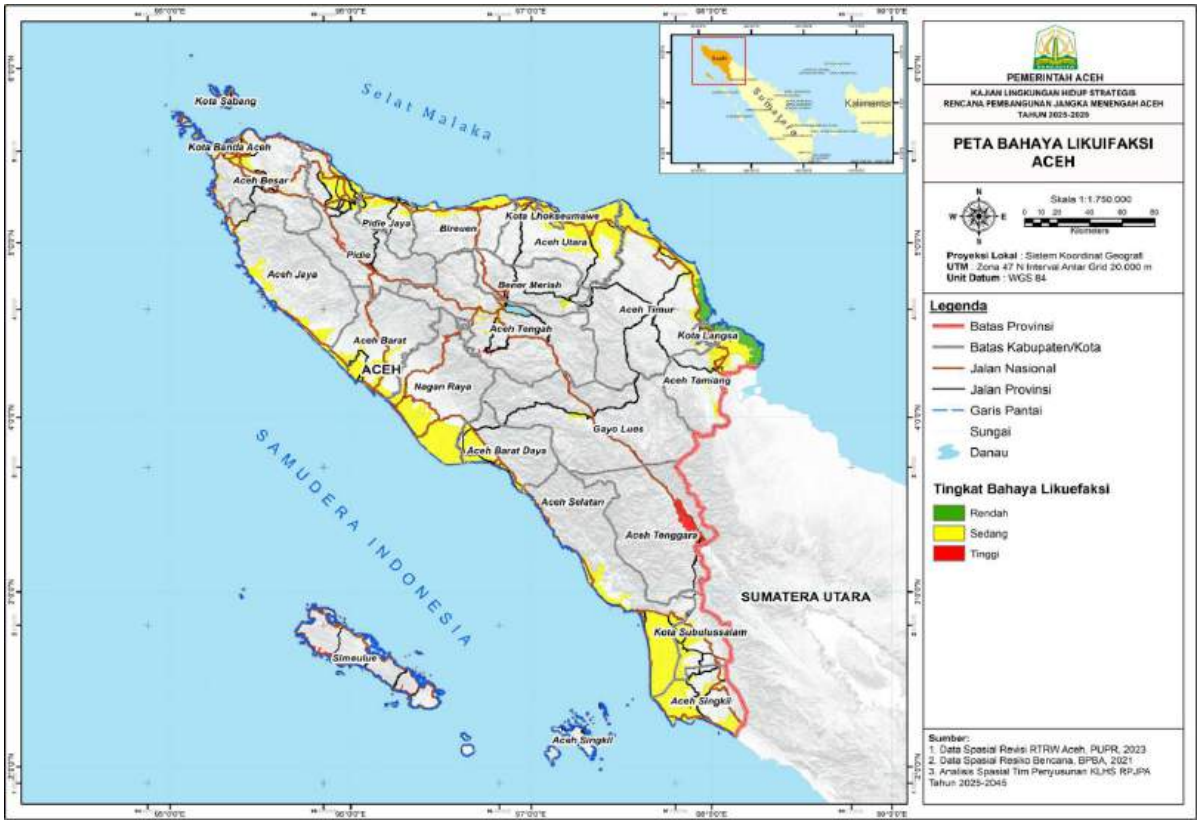
Secara keseluruhan, Aceh memiliki luasan yang berpotensi ancaman rendah sebesar 51.860 hektar (0,91%), ancaman sedang sebesar 836.105 hektar (14,71%), dan ancaman tinggi sebesar 41.555 hektar (0,73%), dengan wilayah yang tidak terdampak likuefaksi mencapai 4.753.920 hektar (83,65%). Data ini menekankan pentingnya integrasi analisis risiko likuefaksi dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan, serta pengembangan sistem peringatan dini dan prosedur evakuasi untuk area yang berisiko terkena dampak likuifaksi.Isu kawasan rawan bencana Likuefaksi meliputi wilayah Aceh Besar, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Gayo Lues, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Kata Banda Aceh, Kota Langsa, Kata Lhokseumawe, dan Kata Subulussalam. Lebih jelasnya secara spasial dapat melihat dalam Tabel 2.18.

Tabel 2.18.
Bahaya Likuifaksi Aceh

| No. | Kabupaten/Kota | Bahaya Likuefaksi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Luas (Ha) | | | | |
| | | Rendah | Sedang | Tinggi | Tak Terdampak | Total |
| A | Kabupaten | | | | | |
| 1 | Aceh Barat | - | 52.537,00 | 938,00 | 224.812,30 | 278.287,30 |
| 2 | Aceh Barat Daya | - | 39.481,00 | 748,00 | 147.961,24 | 188.190,24 |
| 3 | Aceh Besar | - | 32.006,00 | 1.501,00 | 255.640,54 | 289.147,54 |
| 4 | Aceh Jaya | - | 38.494,00 | 1.662,00 | 347.079,25 | 387.235,25 |
| 5 | Aceh Selatan | - | 115.045,00 | 2.414,00 | 300.108,12 | 417.567,12 |
| 6 | Aceh Singkil | - | 70.921,00 | 1.103,00 | 113.324,36 | 185.348,36 |
| 7 | Aceh Tamiang | 26.921,00 | 41.964,00 | - | 149.886,28 | 218.771,28 |
| 8 | Aceh Tengah | - | 10.774,00 | 2.671,00 | 433.396,74 | 446.841,74 |
| 9 | Aceh Tenggara | - | - | 18.270,00 | 399.642,32 | 417.912,32 |
| 10 | Aceh Timur | 15.587,00 | 65.392,00 | 1.677,00 | 458.244,05 | 540.900,05 |
| 11 | Aceh Utara | - | 101.633,00 | 1.095,00 | 167.797,36 | 270.525,36 |
| 12 | Bener Meriah | - | 3.605,00 | - | 187.134,93 | 190.739,93 |
| 13 | Bireuen | - | 30.995,00 | 1.281,00 | 147.423,24 | 179.699,24 |
| 14 | Gayo Lues | - | 4.745,00 | - | 549.383,46 | 554.128,46 |
| 15 | Nagan Raya | - | 94.707,00 | 1.380,00 | 256.287,88 | 352.374,88 |
| 16 | Pidie | - | 45.836,00 | 5.028,00 | 266.888,84 | 317.752,84 |
| 17 | Pidie Jaya | - | 22.462,00 | 517,00 | 70.921,90 | 93.900,90 |
| 18 | Simeulue | - | 9.599,00 | 496,00 | 172.083,59 | 182.178,59 |

| No. | Kabupaten/Kota | Bahaya Likuefaksi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Luas (Ha) | | | | |
| | | Rendah | Sedang | Tinggi | Tak Terdampak | Total |
| B | Kota | | | | | |
| 1 | Banda Aceh | - | 5.259,00 | 229,00 | 188,96 | 5.676,96 |
| 2 | Langsa | 9.352,00 | 4.839,00 | - | 8.245,71 | 22.436,71 |
| 3 | Lhokseumawe | - | 12.342,00 | 545,00 | 410,37 | 13.297,37 |
| 4 | Sabang | - | - | - | 12.167,10 | 12.167,10 |
| 5 | Subulussalam | - | 33.469,00 | - | 84.891,08 | 118.360,08 |
| Aceh | | 51.860,00 | 836.105,00 | 41.555,00 | 4.753.919,61 | 5.683.439,61 |

*Sumber : BPBA, 2021*




*Sumber: BPBA, 2021*

Gambar 2.25 Bahaya Likuifaksi Aceh

## C6.6. Gempa bumi

Isu kawasan rawan gempa bumi, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang memiliki risiko tinggi jika terjadi gempa bumi dengan skala VII - XII MMI (Modified Mercally Intensity) meliputi seluruh wilayah Aceh. Sedangkan kawasan yang terletak di zona patahan aktif, meliputi Kata Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Barat, Nagan Raya.

Dalam evaluasi risiko seismik di Aceh, kita memahami bahwa wilayah ini termasuk salah satu daerah dengan aktivitas tektonik yang tinggi di Indonesia, yang berpotensi menyebabkan gempa bumi. Gempa bumi merupakan peristiwa alam yang terjadi akibat

pergeseran lempeng tektonik dan bisa menimbulkan kerusakan signifikan pada infrastruktur serta membahayakan kehidupan masyarakat.

Kabupaten Aceh Tengah memiliki luasan yang besar dalam kategori risiko rendah untuk gempa bumi sebesar 328.749 hektar (73,59% dari total wilayah). Meskipun demikian, terdapat juga wilayah dengan risiko sedang dan tinggi yang luasnya masing-masing adalah 100.788 hektar (22,55%) dan 17.305 hektar (3,87%), menandakan bahwa struktur bangunan dan infrastruktur di wilayah ini perlu didesain untuk tahan gempa. Aceh Timur mencatat luasan risiko rendah yang sangat besar, yaitu 507.690 hektar (93,86%), dengan wilayah risiko sedang yang lebih kecil, sebesar 32.976 hektar (6,10%). Hal ini memberikan indikasi bahwa meski wilayah ini memiliki risiko rendah, masih ada perlunya perhatian terhadap risiko sedang dan langkah-langkah mitigasi yang sesuai.

Pada sisi lain, Aceh Selatan mencatat luasan yang signifikan dalam kategori risiko tinggi sebesar 187.207 hektar (44,83%), yang mengharuskan adanya perencanaan yang matang dalam pengurangan risiko bencana serta sistem peringatan dini yang efektif untuk menghadapi potensi gempa bumi. Kabupaten Aceh Singkil menunjukkan keunikan dengan hampir seluruh wilayahnya, yaitu 176.985 hektar (95,48%), tercatat berada pada risiko tinggi. Ini mengindikasikan bahwa Aceh Singkil berada pada zona yang sangat berisiko dan membutuhkan perhatian khusus dalam aspek keselamatan dan kesiapsiagaan bencana.

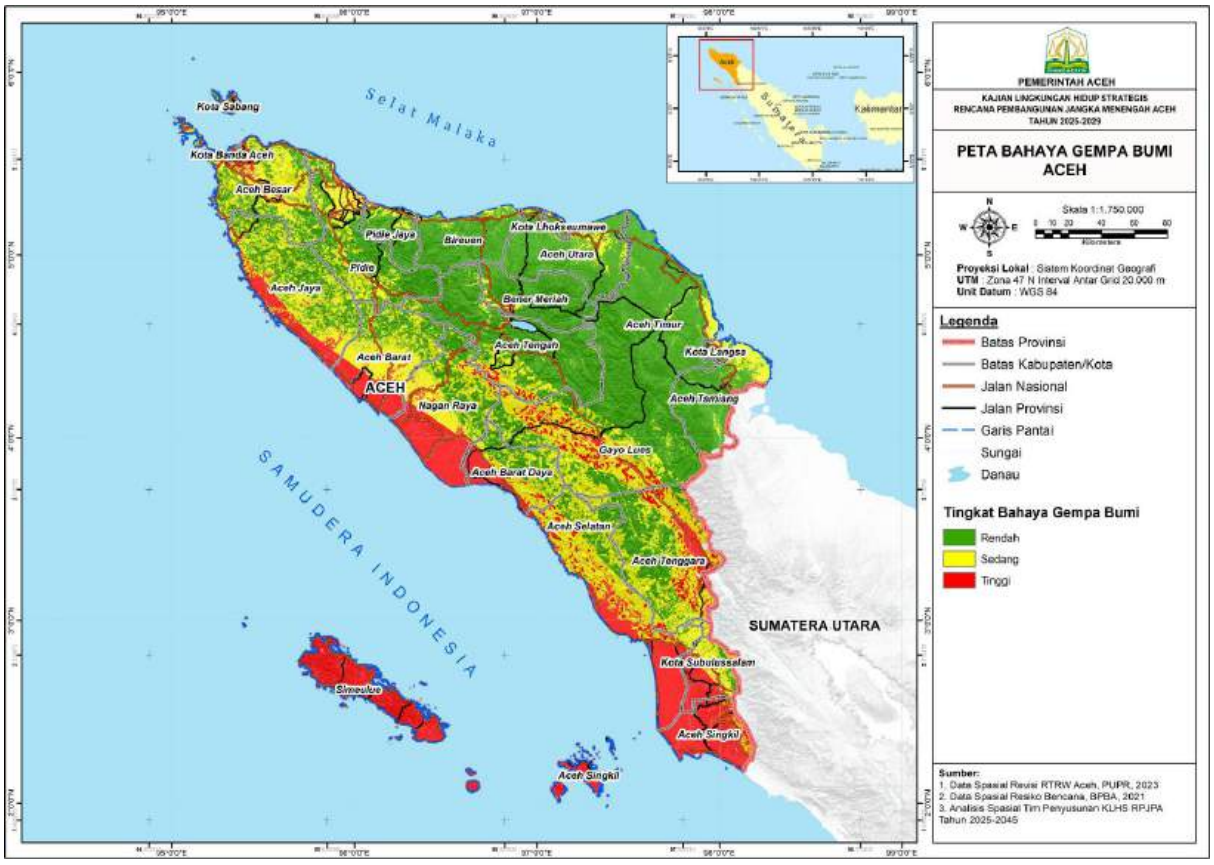
Di wilayah perkotaan, Kota Subulussalam juga memiliki area risiko tinggi yang luas, sebesar 55.803 hektar (47,15%), yang menuntut adanya langkah-langkah khusus dalam perencanaan urban untuk memitigasi dampak potensial dari gempa bumi.

Tabel 2.19.
Bahaya Gempa Bumi Aceh

| No. | Kabupaten/Kota | Bahaya Gempa Bumi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Luas (Ha) | | | | |
| | | Rendah | Sedang | Tinggi | Tak Terdampak | Total |
| A | Kabupaten | | | | | |
| 1 | Aceh Barat | 39.246,01 | 157.901,88 | 81.139,41 | - | 278.287,30 |
| 2 | Aceh Barat Daya | 36.601,99 | 92.571,50 | 59.016,75 | - | 188.190,24 |
| 3 | Aceh Besar | 47.430,24 | 208.548,31 | 33.168,99 | - | 289.147,54 |
| 4 | Aceh Jaya | 65.355,43 | 240.409,97 | 81.469,85 | - | 387.235,25 |
| 5 | Aceh Selatan | 37.159,40 | 193.169,42 | 187.207,23 | 31,07 | 417.567,12 |
| 6 | Aceh Singkil | 209,11 | 7.880,00 | 176.984,94 | 274,30 | 185.348,36 |
| 7 | Aceh Tamiang | 157.150,46 | 61.411,06 | - | 209,76 | 218.771,28 |
| 8 | Aceh Tengah | 328.748,99 | 100.788,14 | 17.304,62 | - | 446.841,74 |
| 9 | Aceh Tenggara | 109.169,06 | 220.088,03 | 88.425,58 | 229,65 | 417.912,32 |
| 10 | Aceh Timur | 507.689,55 | 32.976,02 | - | 234,48 | 540.900,05 |
| 11 | Aceh Utara | 212.433,99 | 58.091,37 | - | - | 270.525,36 |
| 12 | Bener Meriah | 173.023,17 | 17.707,82 | 8,94 | - | 190.739,93 |
| 13 | Bireuen | 155.273,66 | 24.425,58 | - | - | 179.699,24 |
| 14 | Gayo Lues | 229.212,18 | 247.020,20 | 77.896,07 | | 554.128,46 |
| 15 | Nagan Raya | 61.409,37 | 145.534,23 | 145.431,28 | | 352.374,88 |
| 16 | Pidie | 142.052,17 | 164.579,59 | 11.121,08 | | 317.752,84 |
| 17 | Pidie Jaya | 68.237,01 | 24.295,43 | 1.368,47 | | 93.900,90 |

| No. | Kabupaten/Kota | Bahaya Gempa Bumi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Luas (Ha) | | | | |
| | | Rendah | Sedang | Tinggi | Tak Terdampak | Total |
| 18 | Simeulue | - | - | 182.178,59 | | 182.178,59 |
| B | Kota | | | | | |
| 1 | Banda Aceh | - | 205,48 | 5.471,48 | - | 5.676,96 |
| 2 | Langsa | 9.877,27 | 12.548,61 | - | 10,83 | 22.436,71 |
| 3 | Lhokseumawe | 8.699,01 | 4.598,36 | - | - | 13.297,37 |
| 4 | Sabang | 694,78 | 11.187,83 | 284,49 | - | 12.167,10 |
| 5 | Subulussalam | 8.344,78 | 54.158,89 | 55.802,94 | 53,47 | 118.360,08 |
| Aceh | | 2.398.017,61 | 2.080.097,72 | 1.204.280,73 | 1.043,55 | 5.683.439,61 |

*Sumber : BPBA, 2021*




*Sumber: BPBA, 2021*

Gambar 2.26. Peta Bahaya Gempa Bumi Aceh

Dengan total luasan 2.398.018 hektar (42,19%) yang berisiko rendah, 2.080.098 hektar (36,58%) yang berisiko sedang, dan 1.204.281 hektar (21,19%) yang berisiko tinggi, serta 1.044 hektar (0,02%) yang tidak terdampak, Aceh membutuhkan strategi komprehensif dalam manajemen risiko gempa. Pendekatan ini mencakup peningkatan standar pembangunan yang tahan gempa, penguatan kapasitas komunitas lokal, serta integrasi sistem peringatan dini untuk meminimalisir kerugian jiwa dan harta benda akibat gempa bumi.

## C6.7. Tsunami

Analisis ancaman tsunami di Aceh menunjukkan bahwa beberapa wilayah memiliki potensi lebih tinggi untuk terdampak oleh bencana ini, sebuah pertimbangan yang sangat penting mengingat sejarah tsunami dahsyat yang pernah terjadi pada tahun 2004. Tsunami adalah gelombang laut yang dihasilkan oleh pergerakan lempeng tektonik bawah laut, gempa bumi, letusan gunung berapi, atau longsoran bawah air yang mampu menciptakan gelombang besar dengan dampak yang sangat merusak. Berdasarkan data yang disediakan, kabupaten Aceh Barat memiliki area dengan tingkat ancaman tsunami rendah seluas 1.210 hektar (0,43%), sedang seluas 856 hektar (0,31%), dan tinggi seluas 4.673 hektar (1,68%), sementara wilayah yang terlindungi dari dampak tsunami mencapai 271.548 hektar (97,58%). Meskipun terdapat zona dengan risiko tsunami, sebagian besar wilayah Aceh Barat relatif aman. Di sisi lain, kabupaten Aceh Besar, yang memiliki garis pantai yang panjang, mencatat 802 hektar (0,28%) pada ancaman rendah, 649 hektar (0,22%) pada ancaman sedang, dan 8.564 hektar (2,96%) pada ancaman tinggi, dengan mayoritas wilayahnya, sekitar 279.133 hektar (96,54%), dilindungi dari dampak tsunami. Fakta ini menegaskan pentingnya memiliki sistem peringatan dini dan rute evakuasi yang efektif di wilayah-wilayah yang berisiko.

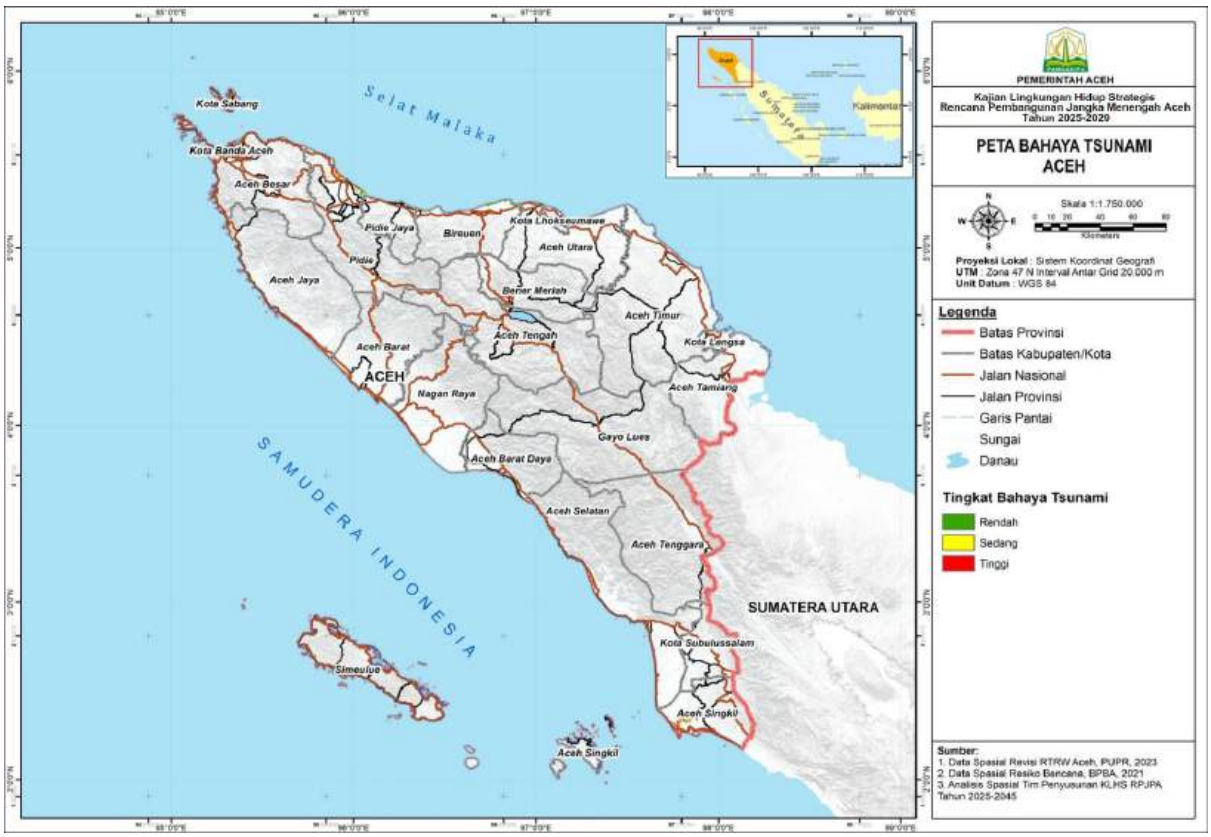
Kota Banda Aceh, yang merupakan ibu kota provinsi dan terletak di tepi pantai, memiliki luas area dengan tingkat ancaman tsunami yang beragam. Wilayah ini mencakup area dengan tingkat ancaman rendah seluas 330 hektar (5,81%), sedang seluas 198 hektar (3,49%), dan tinggi seluas 1.879 hektar (33,09%), sementara wilayah yang tidak akan terdampak tsunami mencapai 3.270 hektar (57,61%). Data ini menegaskan perlunya kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana tsunami di kawasan perkotaan seperti Banda Aceh. Di sisi lain, Simeulue, yang terletak di pesisir barat dan dekat dengan zona subduksi yang aktif, memiliki luas area dengan tingkat ancaman tinggi seluas 20.767 hektar (11,39%). Ini menunjukkan bahwa Simeulue memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap potensi tsunami, menggarisbawahi pentingnya upaya mitigasi dan persiapan bencana di wilayah tersebut. Untuk jelasnya dapat merujuk pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20.
Bahaya Tsunami di Aceh

| No. | Kabupaten/Kota | Bahaya Tsunami | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Luas (Ha) | | | | |
| | | Rendah | Sedang | Tinggi | Tak Terdampak | Total |
| A | Kabupaten | | | | | |
| 1 | Aceh Barat | 1.210,00 | 856,00 | 4.673,00 | 271.548,30 | 278.287,30 |
| 2 | Aceh Barat Daya | 1.256,00 | 557,00 | 1.603,00 | 184.774,24 | 188.190,24 |
| 3 | Aceh Besar | 802,00 | 649,00 | 8.564,00 | 279.132,54 | 289.147,54 |
| 4 | Aceh Jaya | 2.000,00 | 1.258,00 | 7.667,00 | 376.310,25 | 387.235,25 |
| 5 | Aceh Selatan | 1.666,00 | 1.383,00 | 4.727,00 | 409.791,12 | 417.567,12 |
| 6 | Aceh Singkil | 2.021,00 | 1.443,00 | 9.347,00 | 172.537,36 | 185.348,36 |
| 7 | Aceh Tamiang | - | - | - | 218.771,28 | 218.771,28 |
| 8 | Aceh Tengah | - | - | - | 446.841,74 | 446.841,74 |
| 9 | Aceh Tenggara | - | - | - | 417.912,32 | 417.912,32 |
| 10 | Aceh Timur | 1,00 | - | - | 540.899,05 | 540.900,05 |

| No. | Kabupaten/Kota | Bahaya Tsunami | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Luas (Ha) | | | | |
| | | Rendah | Sedang | Tinggi | Tak Terdampak | Total |
| A | Kabupaten | | | | | |
| 11 | Aceh Utara | 343,00 | - | - | 270.182,36 | 270.525,36 |
| 12 | Bener Meriah | - | - | - | 190.739,93 | 190.739,93 |
| 13 | Bireuen | 2.105,00 | - | - | 177.594,24 | 179.699,24 |
| 14 | Gayo Lues | - | - | - | 554.128,46 | 554.128,46 |
| 15 | Nagan Raya | 1.140,00 | 716,00 | 1.684,00 | 348.834,88 | 352.374,88 |
| 16 | Pidie | 1.452,00 | 980,00 | 2.937,00 | 312.383,84 | 317.752,84 |
| 17 | Pidie Jaya | 416,00 | 3,00 | 3,00 | 93.478,90 | 93.900,90 |
| 18 | Simeulue | 1.956,00 | 1.373,00 | 20.767,00 | 158.082,59 | 182.178,59 |
| B | Kota | | | | | |
| 1 | Kota Banda Aceh | 330,00 | 198,00 | 1.879,00 | 3.269,96 | 5.676,96 |
| 2 | Kota Langsa | - | - | - | 22.436,71 | 22.436,71 |
| 3 | Kota Lhokseumawe | 221,00 | - | - | 13.076,37 | 13.297,37 |
| 4 | Kota Sabang | 1,00 | 9,00 | 649,00 | 11.508,10 | 12.167,10 |
| 5 | Kota Subulussalam | - | - | - | 118.360,08 | 118.360,08 |
| Aceh | | 16.920,00 | 9.425,00 | 64.500,00 | 5.592.594,61 | 5.683.439,61 |

*Sumber : BPBA, 2021*




*Sumber : BPBA, 2021*

Gambar 2.27 Peta Bahaya Tsunami Aceh

Secara keseluruhan, Aceh memiliki area dengan ancaman rendah seluas 16.920 hektar (0,30%), ancaman sedang seluas 9.425 hektar (0,17%), dan ancaman tinggi seluas 64.500 hektar (1,13%), sedangkan wilayah yang tidak terdampak oleh tsunami sangat luas, mencapai 5.592.595 hektar (98,40%). Data ini menggarisbawahi perlunya pengelolaan risiko bencana yang komprehensif, termasuk pembangunan infrastruktur

pencegahan bencana, perencanaan tata ruang yang memperhitungkan ancaman tsunami, serta pendidikan dan pelatihan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas adaptasi terhadap bencana tsunami.

### C6.8. Kebakaran Hutan dan Lahan

Analisis bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh mencerminkan risiko yang bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti kondisi vegetasi, tingkat aksesibilitas, dan praktik pengelolaan lahan. Kebakaran hutan dan lahan bisa dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk aktivitas manusia, kondisi kekeringan, serta dampak perubahan iklim, yang semuanya memiliki pengaruh terhadap frekuensi dan keparahan kebakaran.

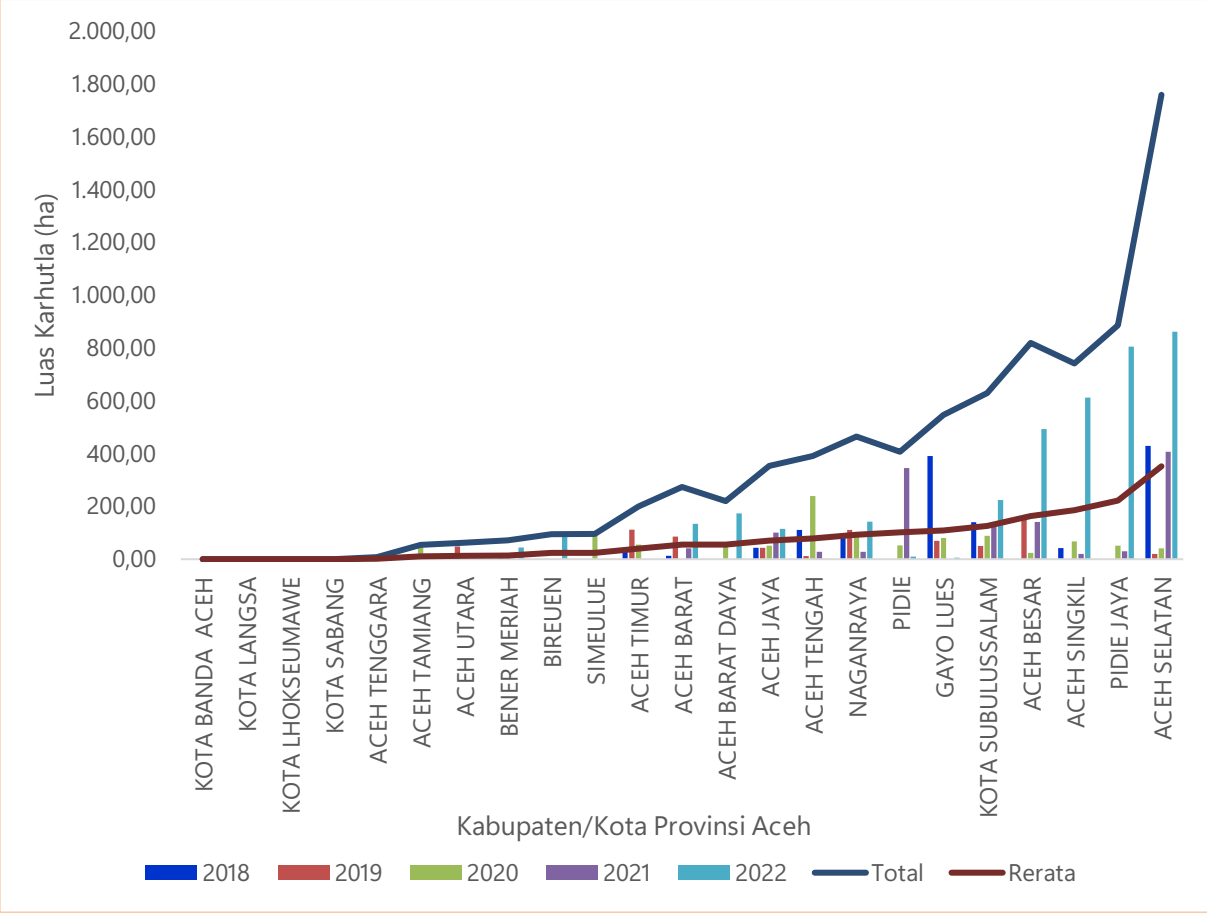
Tabel 2.21.
Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) di Kabupaten/Kota Aceh 2018-2022

| No. | Kabupaten/Kota | Luasan Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) | | | | | Total | Rata-Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 | Aceh Barat | 13,00 | 86,00 | 0,00 | 41,00 | 134,00 | 274,00 | 54,80 |
| 2 | Aceh Barat Daya | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 173,00 | 220,00 | 55,00 |
| 3 | Aceh Besar | 0,00 | 161,00 | 24,00 | 141,00 | 493,00 | 819,00 | 163,80 |
| 4 | Aceh Jaya | 43,00 | 43,00 | 51,00 | 101,00 | 115,00 | 353,00 | 70,60 |
| 5 | Aceh Selatan | 429,00 | 20,00 | 41,00 | 407,00 | 862,00 | 1.759,00 | 351,80 |
| 6 | Aceh Singkil | 42,00 | 0,00 | 67,00 | 20,00 | 612,00 | 741,00 | 185,25 |
| 7 | Aceh Tamiang | 0,00 | 7,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 10,80 |
| 8 | Aceh Tengah | 111,00 | 12,00 | 239,00 | 28,00 | 1,00 | 391,00 | 78,20 |
| 9 | Aceh Tenggara | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 2,00 |
| 10 | Aceh Timur | 33,00 | 112,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 40,00 |
| 11 | Aceh Utara | 0,00 | 48,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 12,40 |
| 12 | Bener Meriah | 0,00 | 11,00 | 16,00 | 0,00 | 44,00 | 71,00 | 14,20 |
| 13 | Bireuen | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 94,00 | 95,00 | 23,75 |
| 14 | Gayo Lues | 391,00 | 69,00 | 80,00 | 0,00 | 6,00 | 546,00 | 109,20 |
| 15 | Banda Aceh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Langsa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Lhokseumawe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Kota Sabang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Subulussalam | 140,00 | 50,00 | 89,00 | 126,00 | 224,00 | 629,00 | 125,80 |
| 20 | Naganraya | 83,00 | 111,00 | 100,00 | 28,00 | 142,00 | 464,00 | 92,80 |
| 21 | Pidie | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 345,00 | 10,00 | 407,00 | 101,75 |
| 22 | Pidie Jaya | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 30,00 | 805,00 | 886,00 | 221,50 |
| 23 | Simeulue | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 24,00 |
| Total | | 1.285,00 | 730,00 | 1.078,00 | 1.267,00 | 3.715,00 | 8.075,00 | 1.615,00 |

*Sumber: https://sipongi.menlhk.go.id/, 2023*

Selama lima tahun terakhir, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh telah menunjukkan kecenderungan tertentu. Lima kabupaten atau kota yang secara berturut-turut mengalami kejadian kebakaran dengan luas total terbesar adalah Kabupaten Aceh Selatan (1.759 ha), Kota Subulussalam (629 ha), Nagan Raya (464 ha), Aceh Tengah (391 ha), dan Aceh Jaya (353 ha). Namun, jika melihat luas total kejadian kebakaran selama

periode waktu tersebut, lima wilayah dengan kejadian terluas berturut-turut adalah Kabupaten Aceh Selatan (1.759 ha), Pidie Jaya (1.759 ha), Aceh Besar (819 ha), Aceh Singkil (741 ha), Kota Subulussalam (629 ha), dan Gayo Lues (546 ha). Terlebih lagi, kecenderungan kebakaran hutan dan lahan rata-rata tahunan juga menunjukkan bahwa lima kabupaten ini merupakan yang terluas.




*Sumber: https://sipongi.menlhk.go.id/, 2023*

Gambar 2.28 Kecenderungan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kota Aceh

Kabupaten Aceh Tenggara menonjol dengan luas area yang memiliki risiko tinggi untuk kebakaran hutan dan lahan, yang mencapai 337.712 hektar (80,81% dari total wilayahnya), dan merupakan daerah yang tidak terdampak. Ini menandakan potensi besar untuk kebakaran yang dapat berdampak luas terhadap ekosistem, habitat, dan kehidupan masyarakat setempat. Di Provinsi Aceh Selatan, area dengan risiko rendah sangat luas, mencapai 243.014 hektar (58,19%), dan risiko sedang sebesar 96.013 hektar (22,99%), menunjukkan perlunya pengelolaan dan pencegahan kebakaran yang efektif. Kabupaten Aceh Barat, yang memiliki luas area berisiko rendah sebesar 57.130 hektar (20,52%) dan risiko sedang sebesar 143.525 hektar (51,57%), menghadapi potensi kebakaran yang signifikan, membutuhkan sistem peringatan dini dan respons cepat dalam manajemen kebakaran. Gayo Lues memiliki area berisiko tinggi sebesar 24.135 hektar (4,35%), yang, meskipun lebih kecil dibandingkan dengan area berisiko rendah

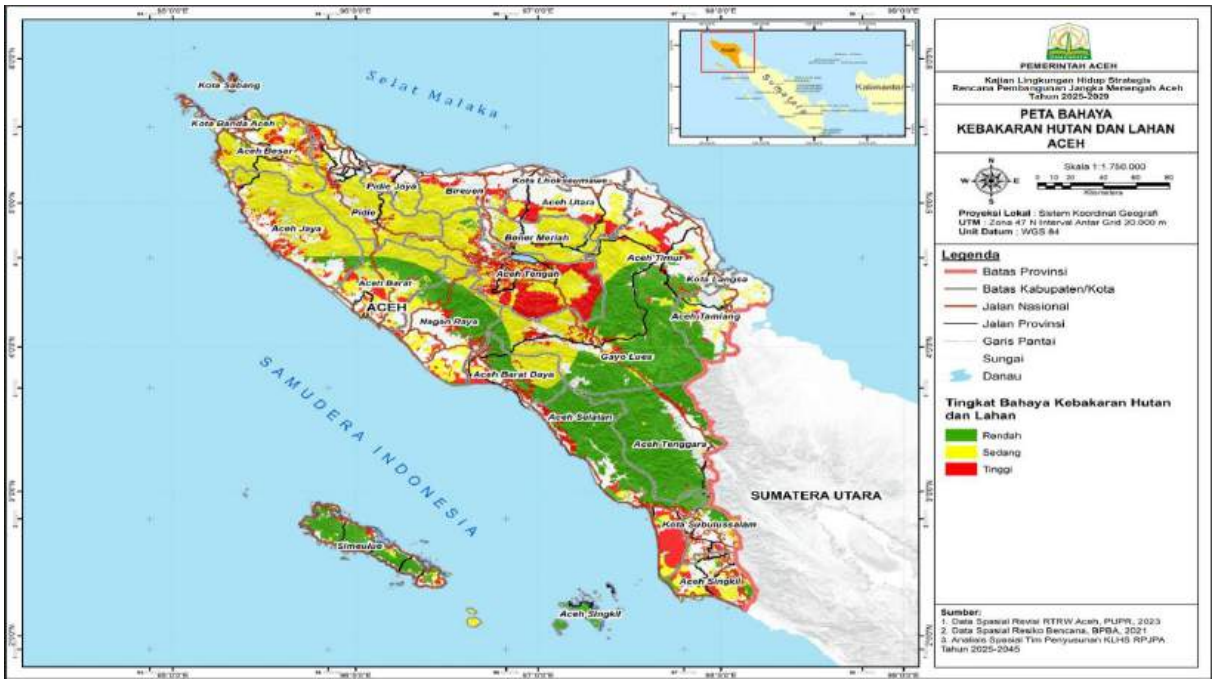
dan sedang, tetap memerlukan perhatian khusus karena potensi dampaknya terhadap konservasi biodiversitas dan penghidupan masyarakat.

Kota Subulussalam mencatat area dengan risiko tinggi sebesar 11.815 hektar (9,98%), menunjukkan bahwa bahkan area perkotaan tidak terlepas dari risiko kebakaran hutan dan lahan, menekankan pentingnya integrasi antara pengelolaan lahan perkotaan dengan mitigasi risiko kebakaran.Secara keseluruhan, Provinsi Aceh memiliki area dengan risiko rendah seluas 1.553.429 hektar (27,33%), risiko sedang seluas 2.029.617 hektar (35,71%), dan risiko tinggi seluas 478.716 hektar (8,42%), dengan sebagian besar wilayahnya, yaitu 1.621.678 hektar (28,54%), tidak terdampak oleh kebakaran hutan dan lahan. Data ini menyoroti pentingnya upaya pencegahan dan manajemen kebakaran yang melibatkan komunitas, serta koordinasi antar lembaga untuk mengurangi insiden dan dampak kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh.

Tabel 2.22.
Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Aceh

| No. | Kabupaten/Kota | Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Luas (Ha) | | | | |
| | | Rendah | Sedang | Tinggi | Tak Terdampak | Total |
| A | Kabupaten | | | | | |
| 1 | Aceh Barat | 57.130,26 | 143.524,82 | 9.092,00 | 68.540,21 | 278.287,30 |
| 2 | Aceh Barat Daya | 64.262,52 | 82.431,23 | 15.125,02 | 26.371,47 | 188.190,24 |
| 3 | Aceh Besar | - | 99.637,94 | 107.024,58 | 82.485,01 | 289.147,54 |
| 4 | Aceh Jaya | 17.918,65 | 231.286,46 | 38.792,18 | 99.237,95 | 387.235,25 |
| 5 | Aceh Selatan | 43.014,11 | 96.013,34 | 11.977,97 | 66.561,69 | 417.567,12 |
| 6 | Aceh Singkil | 2.229,37 | 74.286,83 | 11.859,60 | 66.972,56 | 185.348,36 |
| 7 | Aceh Tamiang | 5.519,26 | 41.777,32 | - | 121.474,70 | 218.771,28 |
| 8 | Aceh Tengah | 12.128,42 | 300.059,31 | 87.816,01 | 46.838,00 | 446.841,74 |
| 9 | Aceh Tenggara | 337.712,26 | 11.424,78 | - | 68.775,29 | 417.912,32 |
| 10 | Aceh Timur | 164.799,16 | 126.549,71 | 31.277,00 | 218.274,17 | 540.900,05 |
| 11 | Aceh Utara | - | 88.497,29 | 16.344,70 | 165.683,37 | 270.525,36 |
| 12 | Bener Meriah | - | 104.869,50 | 31.031,14 | 54.839,30 | 190.739,93 |
| 13 | Bireuen | - | 70.082,43 | 22.742,48 | 86.874,34 | 179.699,24 |
| 14 | Gayo Lues | 329.138,24 | 140.273,94 | 24.135,32 | 60.580,96 | 554.128,46 |
| 15 | Nagan Raya | 14.969,61 | 116.802,37 | 9.270,75 | 111.332,14 | 352.374,88 |
| 16 | Pidie | - | 190.623,50 | 41.958,63 | 85.170,71 | 317.752,84 |
| 17 | Pidie Jaya | - | 52.710,25 | 7.641,56 | 33.549,09 | 93.900,90 |
| 18 | Simeulue | 100.740,62 | 21.009,42 | - | 60.428,55 | 182.178,59 |
| B | Kota | | | | | |
| 1 | Banda Aceh | - | - | - | 5.676,96 | 5.676,96 |
| 2 | Langsa | - | 4.102,63 | - | 18.334,07 | 22.436,71 |
| 3 | Lhokseumawe | - | - | - | 13.297,37 | 13.297,37 |
| 4 | Kota Sabang | - | 2.994,63 | 811,93 | 8.360,55 | 12.167,10 |
| 5 | Subulussalam | 23.866,12 | 30.659,44 | 11.815,25 | 52.019,27 | 118.360,08 |
| Aceh | | 1.553.428,61 | 2.029.617,14 | 478.716,12 | 1.621.677,74 | 5.683.439,61 |

*Sumber : BPBA, 2021*

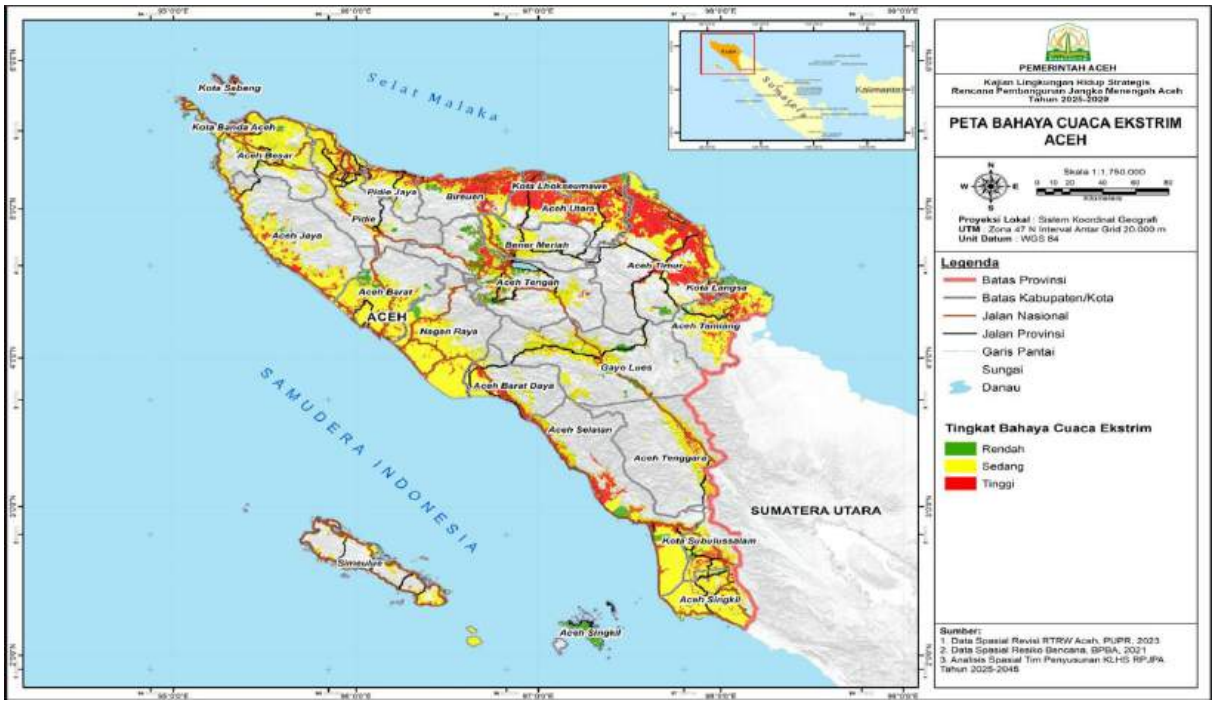



*Sumber : BPBA, 2021*

Gambar 2.29. Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Aceh

## C6.9. Rawan Cuaca Ekstrim

Total luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Aceh secara keseluruhan mencapai 1.432.696,00 Ha dan tergolong dalam kelas Tinggi. Dari total luas bahaya tersebut, luas bahaya dengan kelas rendah adalah 860,00 Ha, sedangkan luas dengan kelas sedang mencapai 1.116.294,00 Ha. Daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi mencakup luas seluas 315.542,00 Ha.



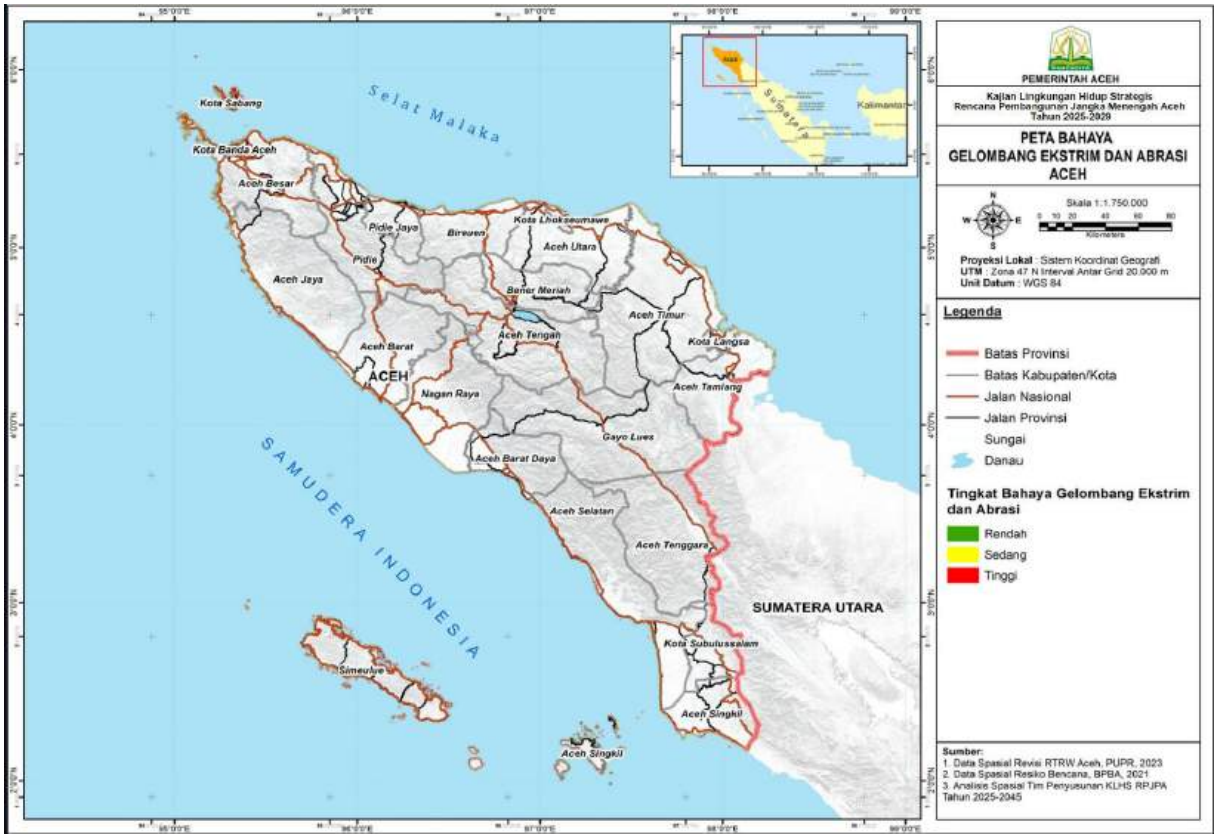

*Sumber: BPBA, 2021*

Gambar 2.30. Peta Bahaya Cuaca Ekstrim di Aceh

Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas rendah adalah Kabupaten Aceh Timur dengan luas 793,00 Ha. Luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas sedang, yaitu 218.290,00 Ha, terdapat di Kabupaten Aceh Timur, sementara wilayah kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi adalah Kabupaten Aceh Barat, dengan luas 73.304,00 Ha. Isu kawasan rawan angin badai ditetapkan berdasarkan identifikasi wilayah yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana angin badai, meliputi Banda Aceh, wilayah pesisir Aceh Besar, pesisir utara-timur, pesisir barat-selatan, Pulau Simeulue, Pulau Weh, dan pulau-pulau kecil terluar lainnya.

### C6.10. Rawan Gelombang ekstrim dan Abrasi

Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Aceh mencapai 42.319,00 Ha dan tergolong dalam kelas Tinggi. Secara rinci, luas bahaya dengan kelas rendah adalah 20.447,00 Ha, kelas sedang seluas 3.038,00 Ha, dan kelas tinggi seluas 18.834,00 Ha. Berdasarkan gambar yang tersedia, sebaran luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dapat dilihat di masing-masing kabupaten/kota, di mana Kabupaten Simeulue memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas rendah, yaitu seluas 10.729,00 Ha. Kabupaten Nagan Raya memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas sedang, dengan luas 721,00 Ha, sedangkan Kabupaten Aceh Besar memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas tinggi, yaitu 4.102,00 Ha.




*Sumber: BPBA, 2021*

Gambar 2.31. Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Aceh

Kawasan gelombang pasang tersebar di sepanjang pantai Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Simeulue, dan Sabang. Sementara kawasan rawan abrasi meliputi sepanjang pesisir wilayah Aceh, termasuk Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Singkil, dan pulau-pulau terluar lainnya.

### C6.11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Salah satu informasi yang sangat penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan adalah indeks kualitas lingkungan (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan alat ukur sederhana yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian dari upaya untuk pemulihan kualitas lingkungan dan mengurangi laju kerusakan lingkungan. Sebagai indeks komposit, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menggabungkan data dari berbagai indikator keberlanjutan seperti Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), menjadi satu nilai yang mudah dipahami dan dapat dikategorikan sebagai kondisi "Sangat Baik", "Baik", "Sedang", "Kurang", atau "Sangat Kurang" (sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021).

Informasi yang diberikan oleh nilai IKLH memberikan gambaran sejauh mana target kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan, baik pada tingkat regional maupun nasional, telah tercapai. Selain itu, IKLH dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah, menetapkan target, melacak tren, memahami hasil, dan mengidentifikasi praktik kebijakan lingkungan terbaik. Analisis berdasarkan data dan fakta ini dapat membantu pejabat pemerintah dalam tingkat regional maupun nasional untuk memperbaiki agenda kebijakan mereka, memfasilitasi komunikasi dengan para pemangku kepentingan utama, dan memaksimalkan manfaat dari investasi lingkungan yang telah dilakukan. Dengan demikian, IKLH menyediakan alat kebijakan yang berguna dalam menginformasikan dan membimbing pengambilan keputusan terkait lingkungan.

Sebagai alat pendukung kebijakan, indeks memiliki peran penting dalam menentukan prioritas tindakan yang harus diambil sesuai dengan tingkat masalah lingkungan yang tercermin dalam angka indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup juga dapat membantu mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup juga erat kaitannya dengan kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJP/RPJM), dengan tujuan menjaga kualitas lingkungan hidup dan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah (RPJP/RPJM).

## Tabel 2.23.
## Nilai IKA, IKU, IKL, dan IKLH Aceh Tahun 2022

| No. | Kode Kota | Kabupaten/Kota | IKA | IKU | IKL | IKAL | IKLH | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101 | Simeulue | 63,33 | 91,12 | 81,51 | - | 77,77 | Baik |
| 2 | 1102 | Aceh Singkil | - | 94,65 | 54,79 | - | 69,01 | Sedang |
| 3 | 1103 | Aceh Selatan | 63,33 | 93,96 | 93,50 | - | 83,53 | Baik |
| 4 | 1104 | Aceh Tenggara | 66,67 | 85,62 | 98,76 | - | 80,31 | Baik |
| 5 | 1105 | Aceh Timur | 60,00 | 89,73 | 67,03 | - | 73,95 | Baik |
| 6 | 1106 | Aceh Tengah | - | 89,15 | 93,74 | - | 82,92 | Sedang |
| 7 | 1107 | Aceh Barat | 62,50 | 90,66 | 63,58 | - | 72,41 | Baik |
| 8 | 1108 | Aceh Besar | 55,88 | 90,76 | 63,58 | - | 69,32 | Baik |
| 9 | 1109 | Pidie | 61,54 | 92,30 | 82,91 | - | 76,95 | Baik |
| 10 | 1110 | Bireuen | 67,50 | 88,48 | 56,34 | - | 69,84 | Baik |
| 11 | 1111 | Aceh Utara | 41,67 | 87,81 | 37,02 | - | 55,92 | Sedang |
| 12 | 1112 | Aceh Barat Daya | 57,50 | 88,61 | 84,40 | - | 74,28 | Baik |
| 13 | 1113 | Gayo Lues | 60,91 | 93,87 | 100 | - | 84,32 | Baik |
| 14 | 1114 | Aceh Tamiang | 61,52 | 91,50 | 50,12 | - | 71,16 | Baik |
| 15 | 1115 | Nagan Raya | 66,67 | 95,30 | 65,49 | - | 78,20 | Baik |
| 16 | 1116 | Aceh Jaya | 66,67 | 95,54 | 83,21 | - | 80,56 | Baik |
| 17 | 1117 | Bener Meriah | 60,00 | 90,58 | 77,02 | - | 76,54 | Baik |
| 18 | 1118 | Pidie Jaya | 63,33 | 92,15 | 75,40 | - | 71,32 | Baik |
| 19 | 1171 | Kota Banda Aceh | 56,67 | 81,69 | 25,59 | - | 59,39 | Sedang |
| 20 | 1172 | Kota Sabang | 70,00 | 93,50 | 54,95 | - | 76,64 | Baik |
| 21 | 1173 | Kota Langsa | 70,00 | 91,98 | 30,73 | - | 69,83 | Baik |
| 22 | 1174 | Kota Lhokseumawe | 58,57 | 89,96 | 22,48 | - | 62,54 | Sedang |
| 23 | 1175 | Kota Subulussalam | 65,00 | 92,66 | 50,27 | - | 73,88 | Baik |
| Indeks Provinsi Aceh | | | 61,30 | 90,94 | 76,51 | 86,75* | 78,53 | Baik |

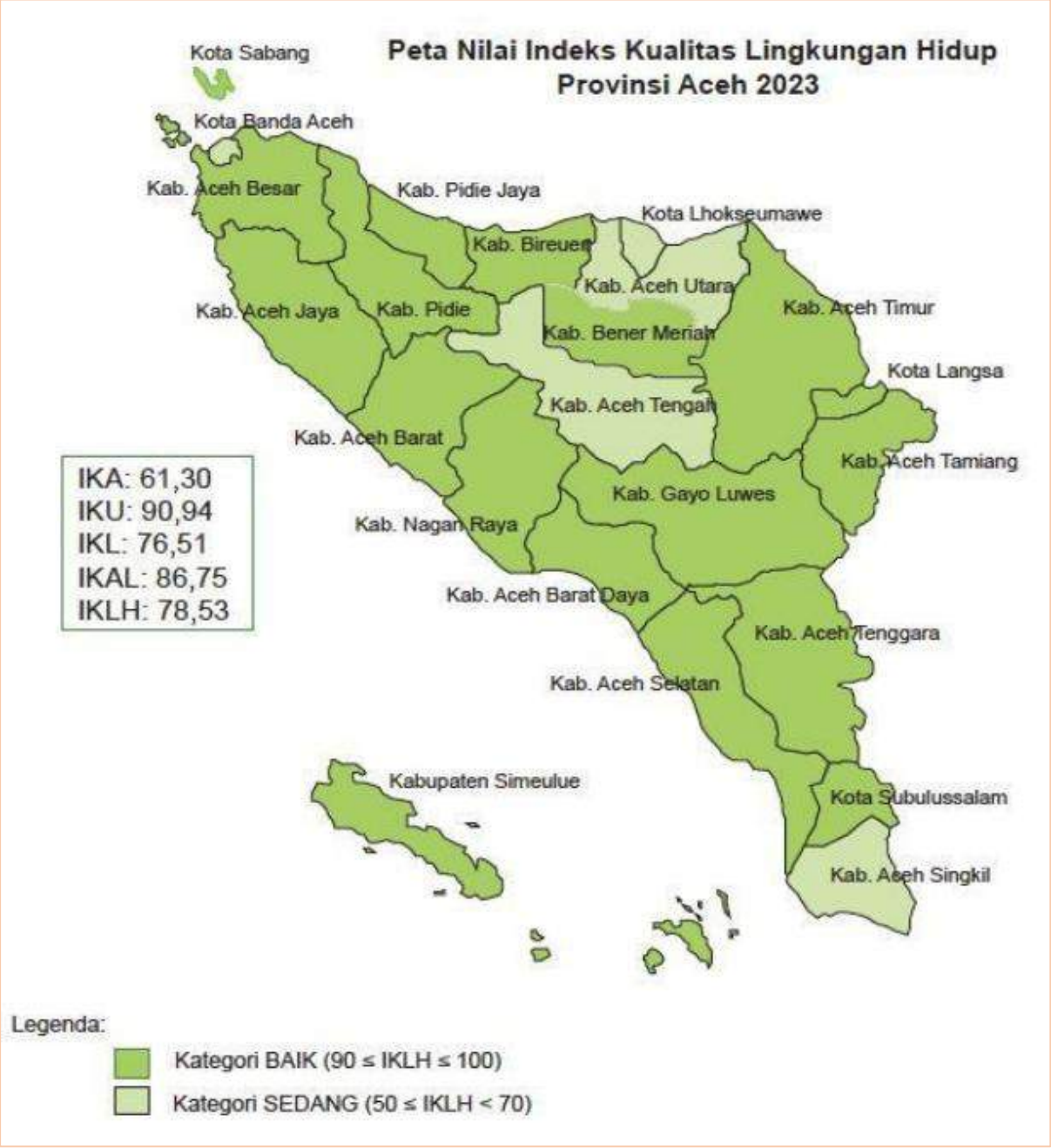
*Sumber: DLHK Aceh, 2023*

## Tabel 2.24.
## Nilai IKLH Aceh Tahun 2016-2023

| No | Kode Kota | Kabupaten/ Kota | Tahun | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target 2023 |
| 1 | 1101 | Simeulue | 25.15 | 21.09 | 27.65 | 57.56 | 51.38 | - | 77,77 | 78,82 | 77,79 |
| 2 | 1102 | Aceh Singkil | 41.78 | - | 17.69 | 48.75 | 48.53 | 71,18 | 69,01 | 50,03 | 73,69 |
| 3 | 1103 | Aceh Selatan | 56.99 | 62.03 | 59.98 | 63.48 | 86.10 | 83,36 | 85,53 | 82,46 | 81,16 |
| 4 | 1104 | Aceh Tenggara | 58.03 | 38.08 | 35.97 | 61.05 | 55.56 | - | 80,31 | 81,21 | 80,83 |
| 5 | 1105 | Aceh Timur | 41.16 | 70.18 | 74.45 | 76.86 | 79.27 | 71,11 | 73,95 | 73,37 | 75,41 |
| 6 | 1106 | Aceh Tengah | 76.75 | 79.08 | 82.18 | 84.64 | 84.26 | 82,08 | 82,92 | 56,81 | 82,57 |
| 7 | 1107 | Aceh Barat | 63.41 | 67.50 | 72.15 | 76.36 | 78.98 | 70,77 | 72,41 | 73,93 | 73,75 |
| 8 | 1108 | Aceh Besar | 60.37 | 77.67 | 68.24 | 76.29 | 77.82 | 71,58 | 69,32 | 71,58 | 75,70 |
| 9 | 1109 | Pidie | 45.18 | 80.10 | 75.78 | 82.71 | 83.22 | 77,04 | 76,95 | 78,75 | 78,89 |
| 10 | 1110 | Bireuen | 62.94 | 64.43 | 67.51 | 75.50 | 75.61 | 69,39 | 69,84 | 73,47 | 72,05 |
| 11 | 1111 | Aceh Utara | 54.64 | 30.75 | 32.84 | 68.84 | 73.88 | 68,39 | 55,92 | 59,16 | 70,09 |
| 12 | 1112 | Aceh Barat Daya | 64.63 | 65.90 | 76.24 | 85.79 | 84.55 | 72,01 | 74,28 | 76,01 | 77,15 |
| 13 | 1113 | Gayo Luwes | 60.78 | 37.21 | 34.96 | 62.61 | 57.51 | 77,91 | 84,32 | 82,82 | 82,69 |
| 14 | 1114 | Aceh Tamiang | 61.69 | 69.82 | 63.44 | 52.13 | 69.85 | 70,56 | 72,16 | 71,55 | 71,53 |
| 15 | 1115 | Nagan Raya | 49.66 | 50.21 | 70.48 | 79.91 | 81.85 | 73,96 | 78,20 | 77,84 | 75,67 |
| 16 | 1116 | Aceh Jaya | 71.37 | 77.24 | 76.61 | 84.02 | 84.70 | 79,11 | 80,56 | 82,16 | 79,59 |

| No | Kode Kota | Kabupaten/ Kota | Tahun | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target 2023 |
| 17 | 1117 | Bener Meriah | 58.85 | 63.25 | 53.83 | 61.67 | 52.20 | - | 76,54 | 76,12 | 77,50 |
| 18 | 1118 | Pidie Jaya | 50.04 | 51.19 | 53.76 | 55.03 | 51.32 | - | 71,32 | 77,92 | 77,30 |
| 19 | 1171 | Banda Aceh | 28.69 | 32.49 | 48.75 | 63.01 | 67.01 | 57,29 | 59,39 | 61,75 | 57,77 |
| 20 | 1172 | Sabang | 31.21 | 50.73 | 35.12 | 71.95 | 77.99 | 72,80 | 76,64 | 77,78 | 70,77 |

Berdasarkan klasifikasi kriteria tahun 2023, maka IKLH Provinsi Aceh termasuk kelompok "BAIK" dengan skor 78,53. Peta IKLH Provinsi Aceh disajikan dalam gambar berikut.




*Sumber: DLHK Aceh, 2023*

Gambar 2.32. Peta IKLH Provinsi Aceh Tahun 2023

Tabel 2.25.
Perubahan Nilai IKLH dan Target dari Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
Tahun 2016 – 2022

| No. | Kabupaten/ Kota | Tahun | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Target 2022 |
| 1 | Simeulue | 25,15 | 21,09 | 27,65 | 57,56 | 51,38 | | 77,77 | 77,53 |
| 2 | Aceh Singkil | 41,78 | | 17,69 | 48,75 | 48,53 | 71,18 | 69,01 | 73,24 |
| 3 | Aceh Selatan | 56,99 | 62,03 | 59,98 | 63,48 | 86,10 | 83,36 | 83,53 | 80,98 |
| 4 | Aceh Tenggara | 58,03 | 38,08 | 35,97 | 61,05 | 55,56 | | 80,31 | 80,67 |
| 5 | Aceh Timur | 41,16 | 70,18 | 74,45 | 76,86 | 79,27 | 71,11 | 73,95 | 75,04 |
| 6 | Aceh Tengah | 76,75 | 79,08 | 82,18 | 84,64 | 84,26 | 82,08 | 82,92 | 81,55 |
| 7 | Aceh Barat | 63,41 | 67,50 | 72,15 | 76,36 | 78,98 | 70,77 | 72,41 | 73,32 |
| 8 | Aceh Besar | 60,37 | 77,67 | 68,24 | 76,29 | 77,82 | 71,58 | 69,32 | 75,39 |
| 9 | Pidie | 45,18 | 80, 10 | 75,78 | 82,71 | 83,22 | 77,04 | 76,95 | 78,68 |
| 10 | Bireuen | 62,94 | 64,43 | 67,51 | 75,50 | 75,61 | 69,39 | 69,84 | 71,66 |
| 11 | Aceh Utara | 54,64 | 30,75 | 32,84 | 68,84 | 73,88 | 68,39 | 55,92 | 69,59 |
| 12 | Aceh Barat Daya | 64,63 | 65,90 | 76,24 | 85,79 | 84,55 | 72,01 | 74,28 | 57,33 |
| 13 | Gayo Luwes | 60,78 | 37,21 | 34,96 | 62,61 | 57,51 | 77,91 | 84,32 | 79,49 |
| 14 | Aceh Tamiang | 61,69 | 69,82 | 63,44 | 52,13 | 69,85 | 70,56 | 72,16 | 70,41 |
| 15 | Nagan Raya | 49,66 | 50,21 | 70,48 | 79,91 | 81,85 | 73,96 | 78,20 | 75,24 |
| 16 | Aceh Jaya | 71,37 | 77,24 | 76,61 | 84,02 | 84,70 | 79,11 | 80,56 | 79,31 |
| 17 | Bener Meriah | 58,85 | 63,25 | 53,83 | 61,67 | 52,20 | | 76,54 | 77,17 |
| 18 | Pidie Jaya | 50,04 | 51,19 | 53,76 | 55,03 | 51,32 | | 71,32 | 77,02 |
| 19 | Banda Aceh | 28,69 | 32,49 | 48,75 | 63,01 | 67,01 | 57,29 | 59,39 | 57,33 |
| 20 | Sabang | 31,21 | 50,73 | 35,12 | 71,95 | 77,99 | 72,80 | 76,64 | 72,86 |
| 21 | Langsa | 38,07 | 43,75 | 40,42 | 46,20 | 44,44 | 61,17 | 69,83 | 66,28 |
| 22 | Lhokseumawe | 31,27 | 33,19 | 30,80 | 41,23 | 41,34 | 63,70 | 62,54 | 64,90 |
| 23 | Subulussalam | 43,80 | 43,01 | 42,20 | 45,17 | 45,45 | 71,54 | 73,88 | 74,23 |
| Indeks Provinsi Aceh | | 65,08 | 73,38 | 69,14 | 77,72 | 78,99 | 74,71 | 73,55 | 73,44 |

Ket : Hijau melampaui target tahun 2022
Kuning menurun dari tahun sebelumnya

*Sumber: DLHK Aceh, 2023*

Peningkatan nilai IKLH menjadi dasar untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional dan RPJM Aceh 2026. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, sejumlah saran strategis diperlukan dalam perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pengendalian pencemaran lingkungan. Beberapa saran yang dapat diimplementasikan meliputi:

1. Strengthening Program for Environmental Protection: Menguatkan program perlindungan lingkungan, terutama di kabupaten/kota dengan nilai IKLH di bawah target, dengan fokus pada pengawasan dan penegakan hukum.
2. Enhancing Sustainable Land Use Practices: Meningkatkan praktik penggunaan lahan berkelanjutan, khususnya di daerah yang mengalami penurunan nilai IKLH, dengan mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan dan lindung.

3. Promoting Afforestation and Reforestation: Mendorong program penanaman kembali dan reboisasi di daerah dengan penurunan nilai IKLH untuk meningkatkan kualitas lahan dan fungsi ekosistem.
4. Community Engagement and Education: Melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dan memberikan edukasi mengenai pentingnya pelestarian alam.
5. Waste Management Improvement: Meningkatkan pengelolaan limbah secara efisien dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap kualitas lingkungan.
6. Monitoring and Evaluation: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap program-program perlindungan lingkungan yang diimplementasikan.
7. Collaboration and Partnerships: Menggalang kerjasama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta untuk mendukung inisiatif perlindungan lingkungan.
8. Research and Innovation: Mendorong penelitian dan inovasi untuk mengidentifikasi solusi berbasis ilmiah dalam meningkatkan kualitas lingkungan.

## C7. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Sebaran Perizinan)

### C7.1. Pertambangan

Provinsi Aceh memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam sektor pertambangan dan penggalian yang tersedia dalam jumlah besar dan tersebar di beberapa kabupaten. Pertumbuhan sub-sektor pertambangan dan penggalian dari tahun 2017 hingga 2021 tergambar dalam gambar berikut




*Sumber : Dinas ESDM Aceh, 2023*

Gambar 2.33 Pertumbuhan (%) Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian Tahun 2017 s.d 2022

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Mineral dan Batu bara (Minerba) tahun 2014, yang menghentikan ekspor hasil pertambangan dalam bentuk logam mentah, terjadi penurunan yang signifikan dalam sektor pertambangan. Dibandingkan dengan tahun 2015, penurunan pada tahun 2018 tidak sebesar sebelumnya, hanya mencapai 2,33 persen dibandingkan dengan penurunan sebelumnya yang mencapai 28,03 persen. Pertambangan bijih dan logam hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,49 persen pada tahun 2020, sementara pada tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 14,99 persen. Sedangkan sub-sektor terakhir yang mengalami kenaikan dalam pertambangan dan penggalian lainnya sebesar 4,22 persen pada tahun 2020, setelah mengalami kontraksi sebesar 4,57 persen pada tahun-tahun sebelumnya. Ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas penggalian pasir secara ilegal yang berkaitan dengan permintaan bahan bangunan yang meningkat, meskipun izin belum dicabut.

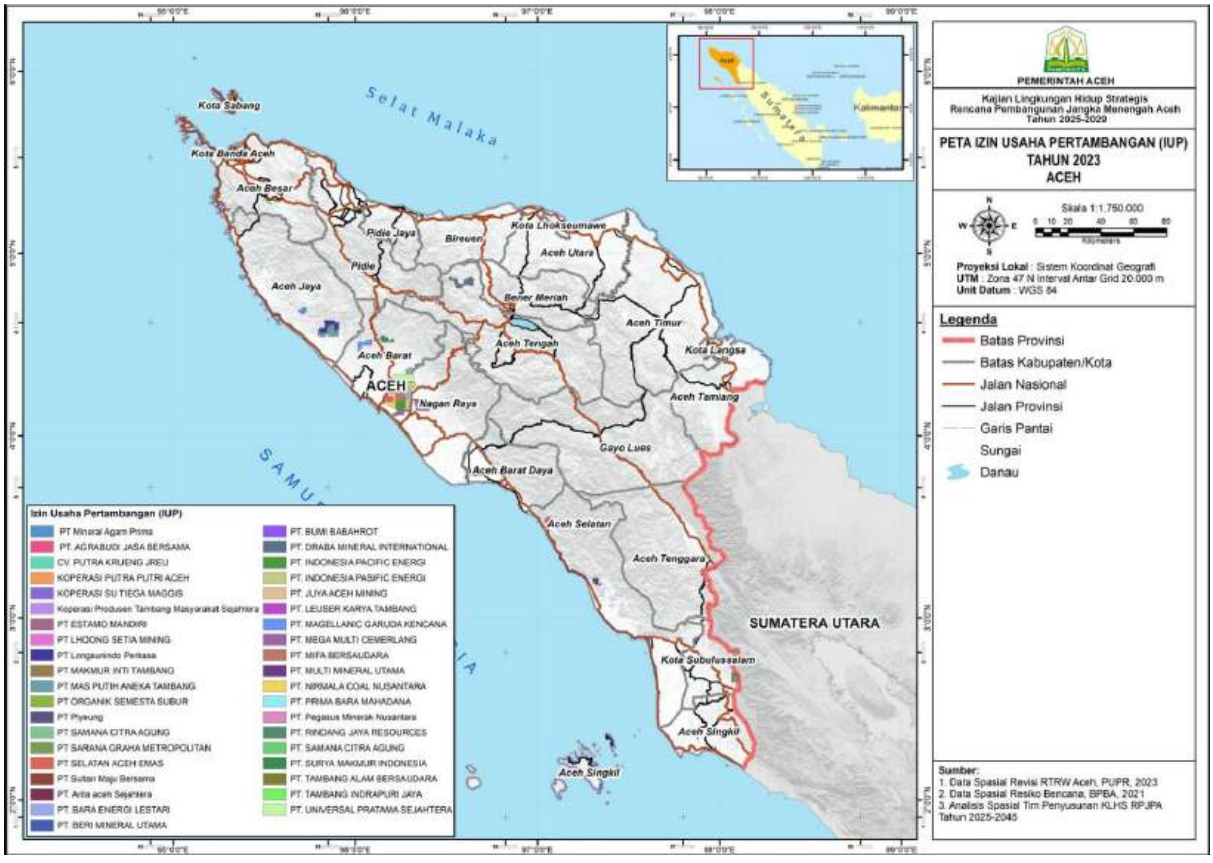
Selama tahun 2017, peran sektor pertambangan dan penggalian meningkat, terutama dipengaruhi oleh kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi oleh PT. Perta Arun Gas yang telah memulai produksi sejak tahun 2017. Ini terlihat dari kontribusi tertinggi dari minyak, gas, dan panas bumi yang mencapai 8,55 persen, sedangkan kontribusi terendah dimiliki oleh sub-sektor pertambangan biji logam sebesar 0,49 persen pada tahun 2020. Luas pertambangan di Provinsi Aceh dapat dilihat dalam Tabel 2.26.

Tabel 2.26.
Luas Pertambangan Aceh

| Nama | Komoditas | Kabupaten | Tahapan | Keterangan | Luas (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| CV. Putra Krueng Jreu | Magnesit | Aceh Besar | - | Eks 2022 | 1,49 |
| Koperasi Produsen Tambang Masyarakat Sejahtera | Emas | Gayo Lues | - | - | 18,56 |
| Koperasi Su Tiega Maggis | Bijih Besi | Aceh Selatan | Iup Op | - | 199,31 |
| Koperasi Putra Putri Aceh | Emas (Placer) | Aceh Barat | Iup Op | - | 206,33 |
| PT. Agrabudi Jasa Bersama | Batubara | Aceh Barat | Iup Op | - | 5.019,98 |
| PT. Arita Aceh Sejahtera | Galena | Aceh Jaya | - | - | 45,86 |
| PT. Bara Energi Lestari | Batubara | Nagan Raya | Iup Op | - | 1.492,09 |
| PT. Beri Mineral Utama | Bijih Besi | Aceh Selatan | Iup Op | - | 1.060,52 |
| PT. Bumi Babahrot | Bijih Besi | Aceh Barat Daya | Iup Op | - | 548,41 |
| PT. Draba Mineral International | Emas | Aceh Tengah | - | - | 4.572,42 |
| PT Estamo Mandiri | Bijih Besi | Kota Subulussalam | - | - | 588,42 |
| PT. Indonesia Pacific Energi | Batubara | Aceh Barat | - | - | 3.260,63 |
| PT. Indonesia Pasific Energi | Batubara | Nagan Raya | Iup Op | - | 5.096,81 |
| PT. Juya Aceh Mining | Bijih Besi | Aceh Barat Daya | Iup Op | - | 100,07 |
| PT. Leuser Karya Tambang | Bijih Besi | Aceh Barat Daya | Iup Op | - | 99,74 |
| PT Lhoong Setia Mining | Pasir Besi | Aceh Besar | Iup Op | - | 499,96 |
| PT Longsunindo Perkasa | Batubara | Aceh Jaya | - | - | 4.660,74 |
| PT. Magellanic Garuda Kencana | Emas (Placer) | Aceh Barat | Iup Op | - | 3.241,72 |
| PT Makmur Inti Tambang | Pasir Besi | Aceh Besar | Iup Eks - Aktif | - | 179,57 |
| PT Mas Putih Aneka Tambang | Batubara | Aceh Jaya | - | - | 4.953,24 |
| PT. Mega Multi Cemerlang | Batubara | Nagan Raya | Iup Op | - | 7.949,97 |

| Nama | Komoditas | Kabupaten | Tahapan | Keterangan | Luas (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| PT. Mifa Bersaudara | Batubara | Aceh Barat | Iup Op | - | 3.126,79 |
| PT Mineral Agam Prima | Bijih Besi | Aceh Jaya | - | Eks Agustus 2022 | 1.391,67 |
| PT. Multi Mineral Utama | Emas | Aceh Selatan | Iup Op | - | 1.060,52 |
| PT. Nirmala Coal Nusantara | Batubara | Aceh Barat | Iup Op | - | 3.192,06 |
| PT Organik Semesta Subur | Bijih Besi | Kota Subulussalam | - | - | 982,64 |
| PT. Pegasus Minerak Nusantara | Emas | Aceh Tengah | - | Eksplorasi Februari 2022 | 1.009,25 |
| PT. Prima Bara Mahadana | Batubara | Aceh Barat | Iup Op | - | 2.026,45 |
| PT. Rindang Jaya Resources | Bijih Besi | Gayo Lues | - | Eks 2022 | 85,23 |
| PT. Samana Citra Agung | Pasir Besi | Aceh Besar | Iup Op | - | 120,51 |
| PT Samana Citra Agung | Pasir Besi | Pidie | Iup Op | - | 158,77 |
| PT Sarana Graha Metropolitan | Batubara | Aceh Jaya | - | - | 197,25 |
| PT Selatan Aceh Emas | Emas | Aceh Selatan | - | - | 1.650,05 |
| PT. Surya Makmur Indonesia | Batubara | Aceh Barat | Iup Op | PT. Bara Adipratama | 1.598,91 |
| PT. Tambang Alam Bersaudara | Bijih Besi | Kota Subulussalam | - | Eksplorasi | 1.356,10 |
| PT. Tambang Indrapuri Jaya | Bijih Besi | Aceh Besar | Iup Op | - | 526,8 |
| PT. Universal Pratama Sejahtera | Batubara | Nagan Raya | - | Eksplorasi 2021 | 4.974,57 |
| PT. Sultan Maju Bersama | Tembaga | Aceh Besar | - | - | 999,7 |
| PT. Piyeung | | Aceh Besar | - | - | 197,96 |
| Total Luas (Ha) | | | | | 68451,07 |

*Sumber : Dinas ESDM Aceh, 2023*




*Sumber : Dinas ESDM Aceh, 2023*

Gambar 2.34. Peta Sebaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Aceh

## C7.2. Perkebunan

Tanaman perkebunan yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Provinsi Aceh meliputi kelapa sawit, kelapa, kopi, dan kakao. Potensi perkebunan ini tersebar di 15 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Menurut data BPS tahun 2016, luas lahan perkebunan kelapa sawit rakyat di Provinsi Aceh mencapai 228.230 hektar dengan produksi sebanyak 399.618 ton. Sedangkan untuk perkebunan kelapa sawit skala besar, luasnya mencapai 201.728 hektar dengan produksi sebanyak 362.831 ton. Luas perkebunan kelapa rakyat mencapai 106.251 hektar dengan produksi 62.752 ton. Perkebunan kopi rakyat memiliki luas 123.443 hektar dengan produksi 65.231 ton. Sementara untuk perkebunan kakao rakyat pada tahun 2016 memiliki luas mencapai 103.316 hektar dengan produksi sebanyak 42.889 ton. Pada tahun 2014, luas perkebunan kakao skala besar mencapai 581 hektar dengan jumlah produksi yang tidak diketahui (BPS Aceh, 2017).

Berdasarkan data luas pemanfaatan lahan untuk Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan saat ini di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Timur memiliki HGU terluas, dengan luas hampir mencapai 110 ribu hektar. Kabupaten Nagan Raya menyusul dengan luas hampir 73 ribu hektar, diikuti oleh Kabupaten Aceh Singkil dengan luas lebih dari 63 ribu hektar.

Permasalahan yang dihadapi di sektor perkebunan di Provinsi Aceh yaitu pertambahan jumlah penduduk sehingga menyebabkan lahan produktif untuk perkebunan semakin berkurang. Lahan-lahan produktif tersebut dialih fungsikan menjadi pemukiman (DLHK Aceh, 2017). Selain itu sektor perkebunan menjadi pemicu deforestasi karena semakin berkurangnya lahan-lahan produktif di Provinsi Aceh. Sebaran HGU dapat dilihat pada peta KRP pola ruang berdampak pada sebaran HGU Aceh Tabel 2.27.

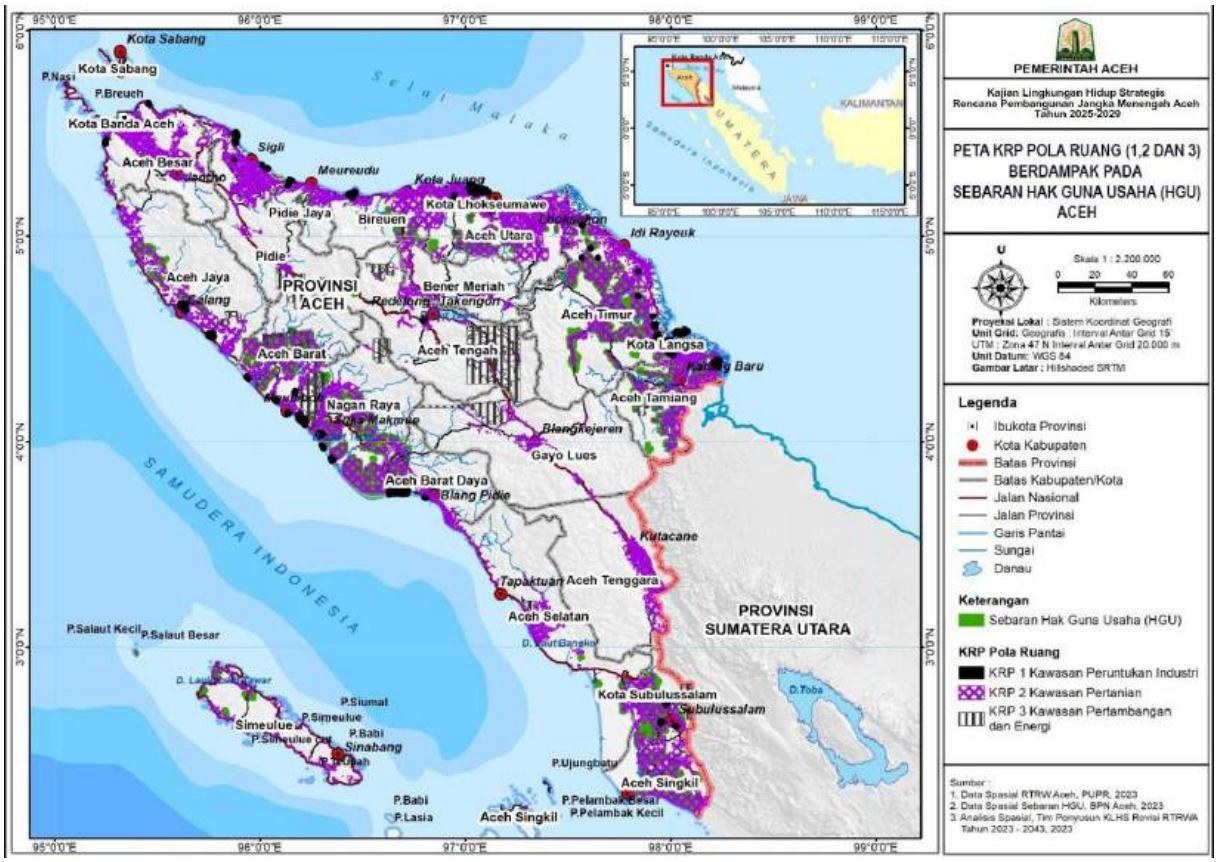
Tabel 2.27.
Luas HGU berdasarkan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh 2023

| No. | Kabupaten/Kota | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| 1 | Aceh Barat | 39.436,74 |
| 2 | Aceh Barat Daya | 13.170,67 |
| 3 | Aceh Besar | 512,11 |
| 4 | Aceh Jaya | 7.866,06 |
| 5 | Aceh Selatan | 9.810,38 |
| 6 | Aceh Singkil | 63.316,38 |
| 7 | Aceh Tamiang | 45.857,82 |
| 8 | Aceh Tengah | 688,46 |
| 9 | Aceh Tenggara | 0,01 |
| 10 | Aceh Timur | 109.412,49 |
| 11 | Aceh Utara | 23.469,75 |
| 12 | Bireuen | 8.141,92 |
| 13 | Gayo Lues | 0,55 |
| 14 | Kota Langsa | 5.769,14 |
| 15 | Kota Lhokseumawe | 289,37 |
| 16 | Kota Subulussalam | 33.054,29 |
| 17 | Nagan Raya | 72.466,45 |
| 18 | Pidie Jaya | 715,23 |
| 19 | Simeulue | 3.490,66 |
| | Total | 437.468,49 |

*Sumber: BPN Aceh, 2023*

Permasalahan yang dihadapi di sektor perkebunan di Provinsi Aceh yaitu pertambahan jumlah penduduk sehingga menyebabkan lahan produktif untuk perkebunan semakin berkurang. Lahan-lahan produktif tersebut dialih fungsikan menjadi pemukiman (DLHK Aceh, 2017). Selain itu sektor perkebunan menjadi pemicu

deforestasi karena semakin berkurangnya lahan-lahan produktif di Provinsi Aceh. Sebaran HGU dapat dilihat pada peta KRP pola ruang berdampak pada sebaran HGU Aceh sebagai berikut.




*Sumber: BPN Aceh, 2023*

Gambar 2.35. KRP Pola Ruang Aceh

## C7.3. Kehutanan

Kebijakan pengelolaan hutan melibatkan proses perizinan yang dikenal sebagai Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. PBPH adalah bentuk perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan melaksanakan berbagai usaha dan kegiatan dalam rangka pemanfaatan sumber daya hutan.

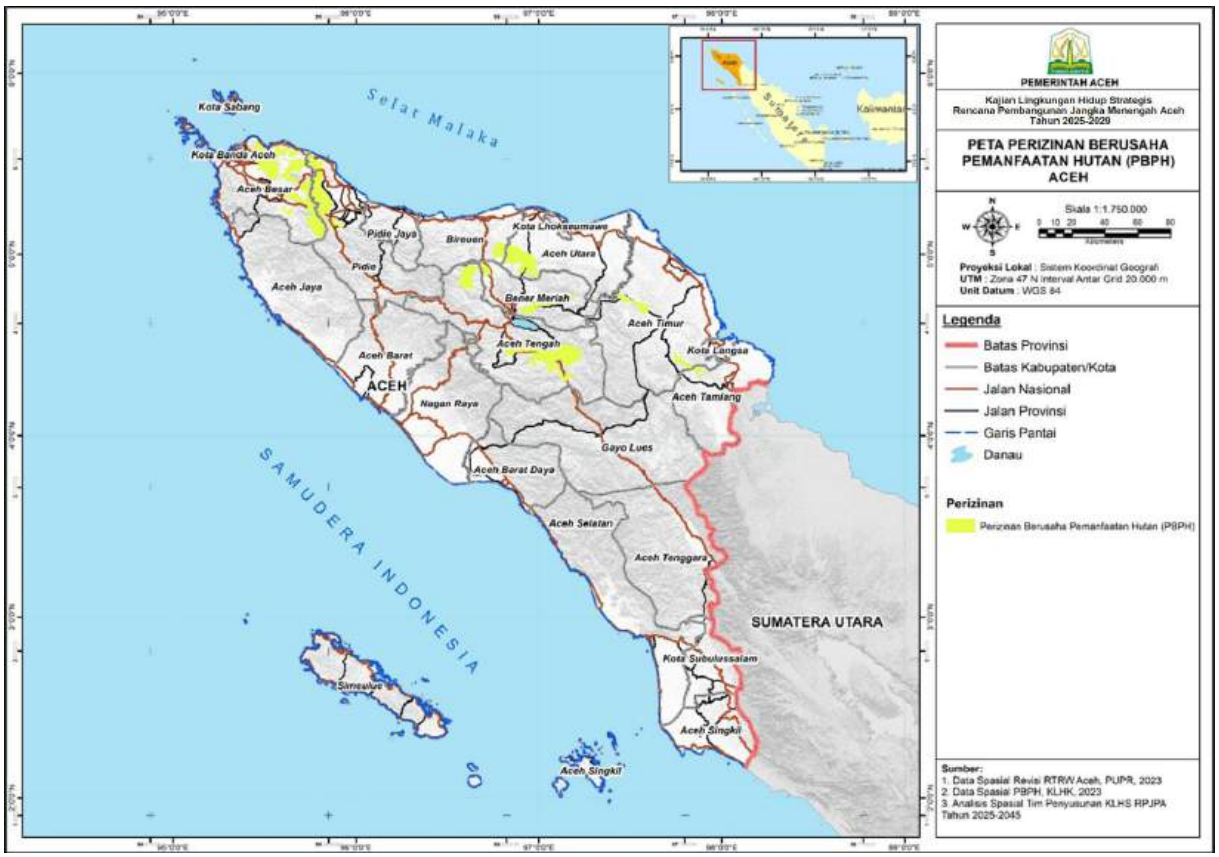
Tabel 2.28.
Perusahaan Pemegang PBPH dan Luasannya di Provinsi Aceh 2023

| No. | Nama Perusahaan | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| 1 | PT Multi Sibolga Timber | 279,03 |
| 2 | PT Gunung Raya Timber Utama | 30,43 |
| 3 | PT Rimba Wawasan Permai | 6.169,67 |
| 4 | PT Rimba Timur Sentosa | 6.670,94 |
| 5 | PT Tusam Hutani Lestari | 12.393,16 |
| 6 | PT Rencong Pulp & Paper Industry | 8.977,10 |

| No. | Nama Perusahaan | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| 7 | PT Aceh Nusa Indrapuri | 98.015,62 |
| 8 | PD Pembangunan Tanoh Gayo | 3.188,02 |
| Total | | 135.723,98 |

*Sumber: BPKHTL, 2023*

Kedelapan izin yang sedang berlaku saat ini diberikan pada tahun-tahun yang berbeda. Mayoritas izin diterbitkan pada tahun 2021, kecuali 2 di antaranya, yaitu milik PT. Tusam Hutani Lestari dan PD. Pembangunan Tanoh Gayo, yang diberikan pada tahun 2014. Dari 8 perusahaan tersebut, 7 di antaranya saat ini memegang izin untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi (PHHK_HP), sementara satu lainnya, yaitu PD. Pembangunan Tanoh Gayo, melakukan kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi (PHHBK_HP). Di bawah ini adalah peta dengan lokasi-lokasi perusahaan yang memegang izin tersebut di Provinsi Aceh.




*Sumber: BPKHTL, 2023*

Gambar 2.36. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Aceh

a. Pinjam Pakai Kawasan Hutan

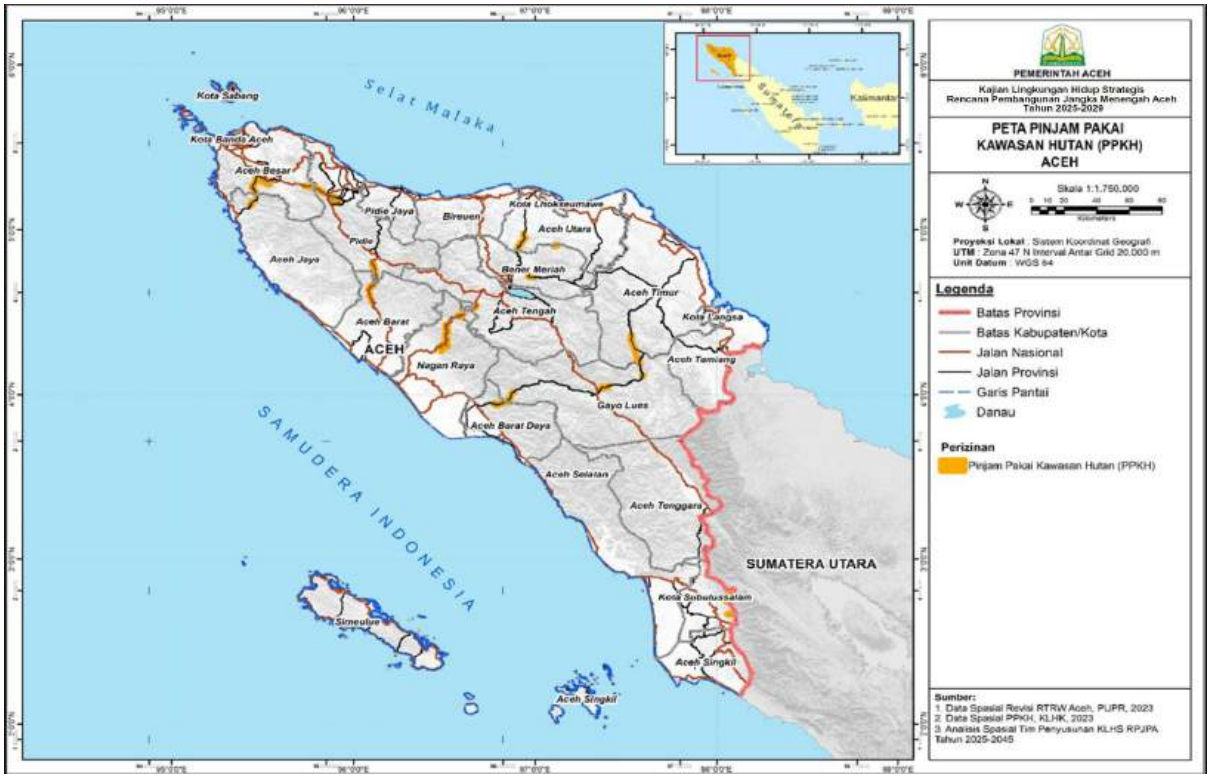
Dalam pengelolaan hutan, salah satu aspeknya adalah perizinan terkait dengan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH), yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Panduan Pinjam Pakai Kawasan Hutan. PPKH merupakan izin yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan hutan untuk tujuan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, tanpa mengubah fungsi dan tujuan kawasan hutan tersebut.

Tabel 2.29.
Pihak Pemegang PPKH berdasarkan Lokasi dan Luasannya
di Provinsi Aceh 2023

| No. | Nama PPKH | Kab/Kota | Jenis PPKH | Luas PPKH (Ha) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemerintah Aceh | Bener Meriah | Non Tambang | 28,9 |
| 2 | Tambang Indrapuri Jaya, PT | Aceh Besar | Tambang | 344 |
| 3 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Pidie | Non Tambang | 362,1 |
| 4 | PLN (Persero), PT | Aceh Barat dan Pidie | Non Tambang | 62 |
| 5 | Pemerintah Kabupaten Pidie | Pidie | Non Tambang | 12 |
| 6 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Aceh Utara | Non Tambang | 39,14 |
| 7 | Senagan Energi, PT | Nagan Raya | Non Tambang | 19,02 |
| 8 | Estamo Mandiri, PT | Subulussalam | Tambang | 100,42 |
| 9 | Gubernur Aceh | Prov. Aceh | Non Tambang | 841,93 |
| 10 | Organik Semesta Subur, PT | Kota Subulussalam | Tambang | 335,71 |
| Total | | | | 2.145,22 |

*Sumber: KLHK, 2023*

Saat ini, terdapat sepuluh pihak yang memiliki perizinan dan masih berlaku dengan masa berlaku yang bervariasi. Salah satunya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalami pengaktifan kembali izin pada tahun 2017, sementara PT. Senagan Energi mengalami perubahan dari izin tambang menjadi non-tambang. Penguasaan izin yang paling luas saat ini dimiliki oleh Gubernur Aceh, yang beroperasi di sektor non-tambang, dengan luas sekitar 842 hektar.




*Sumber: KLHK, 2023*

Gambar 2.37. Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) Aceh

b. Perhutanan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 juga terdapat jenis pengelolaan hutan jugu terdapat upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan. Tujuannya adalah agar hutan juga dapat berperan dalam pembangunan, yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengganggguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial.

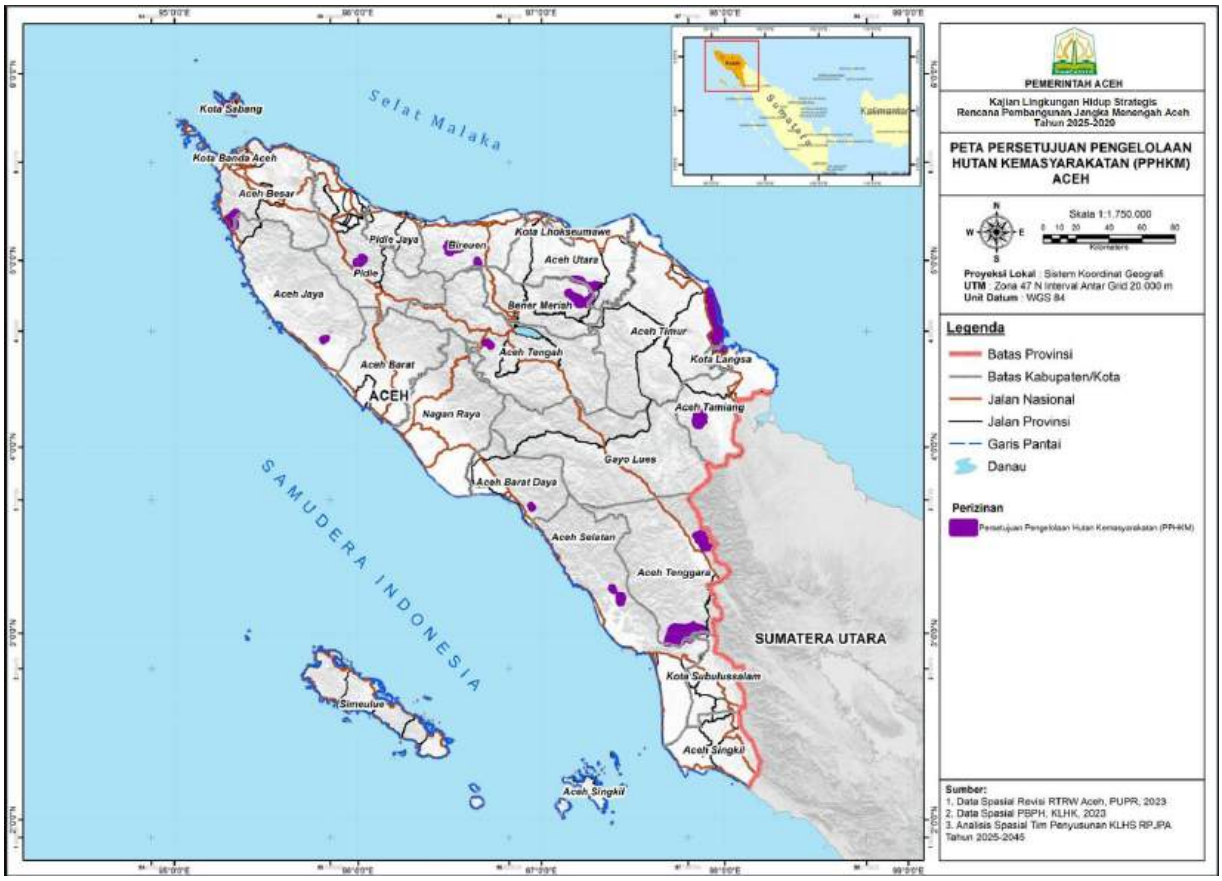
c. Hutan Kemasyarakatan (HKM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 lebih lanjut mengatur tentang Hutan Kemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat dengan HKM, yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Pengelolaannya dapat dajukan permohonan oleh ketua kelompok masyarakat; b. ketua gabungan kelompok tani hutan; atau c. ketua koperasi. Izinnya sendiri diberikan pada: a. hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin; b. hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani; dan c. wilayah tertentu dalam KPH. Saat ini di Provinsi Aceh terdapat lebih dari 54 ribu hektar lahan dengan status sebagai HKM, yang tersebar di sejumlah wilayah kabupaten dan kota. Terdapat sedikitnya 25 badan hukum yang memiliki izin pengelolaan HKM.

Tabel 2.30.
Badan Hukum Pemegang Izin HKM di Provinsi Aceh 2023

| No. | Nama | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| 1 | KLP Tangse Lestari | 1.484,31 |
| 2 | KOP Pertanian Majumi | 424,65 |
| 3 | KTH Ujung Delong Kedie | 104,86 |
| 4 | KTH Rumah Rungko | 104,10 |
| 5 | Gapoktan Lawe Tanebok | 973,21 |
| 6 | KSU Putera Selatan Kluet | 6.089,76 |
| 7 | KTH Jambur Latong | 2.466,17 |
| 8 | Gapoktan Muara Lawe Bengkung | 8.768,90 |
| 9 | KTH Rencong | 1.880,65 |
| 10 | KTH Tuah Sejati | 1.704,76 |
| 11 | Gapoktan Bekhu Dihe | 5.436,81 |
| 12 | KTH Alue Simantok | 765,93 |
| 13 | KTH Bandar Islamic Centre | 3.967,21 |
| 14 | Koperasi Bina Lestari | 3.349,87 |
| 15 | KTH Aneuk Glee | 1.083,63 |
| 16 | Gapoktan Peteri Ijo | 93,43 |
| 17 | Beringin Jaya | 195,59 |
| 18 | KTH Darul Atiq Putra | 497,12 |
| 19 | KTH Kulam Keuh | 331,24 |
| 20 | Goh Dara | 605,27 |
| 21 | Jaya Lestari Lamsujen | 641,31 |
| 22 | Lestari Kamp Liemong | 250,92 |
| 23 | Bangka Ban Timoh | 332,21 |
| 24 | KSU Flora Potensi | 6.167,77 |
| 25 | KSU Bina Meufakat | 5.968,24 |
| | Total | 53.687,96 |

Tabel 2.30 terlihat banwa pengelola HKM terluas di Provinsi Aceh adalah Gapoktan Muara Lawe Bengkung, yaitu dengan luas lahan sebesar hampir 9 ribu hektar, berikutnya adalah KSU Plora Potensi seluas lebih dari 6 ribu hektar, berikut kampir sama adalah oleh KSU Putera Selatan Kluet, kemudian KSU Bina Mufakat seluas hampir 6 ribu hektar. Peta hutan kemasyarakatan sebagaimana disajikan pada Gambar 2.38.




*Sumber: KLHK, 2023*

Gambar 2.38. Petan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Aceh

d. Hutan Desa (HD)

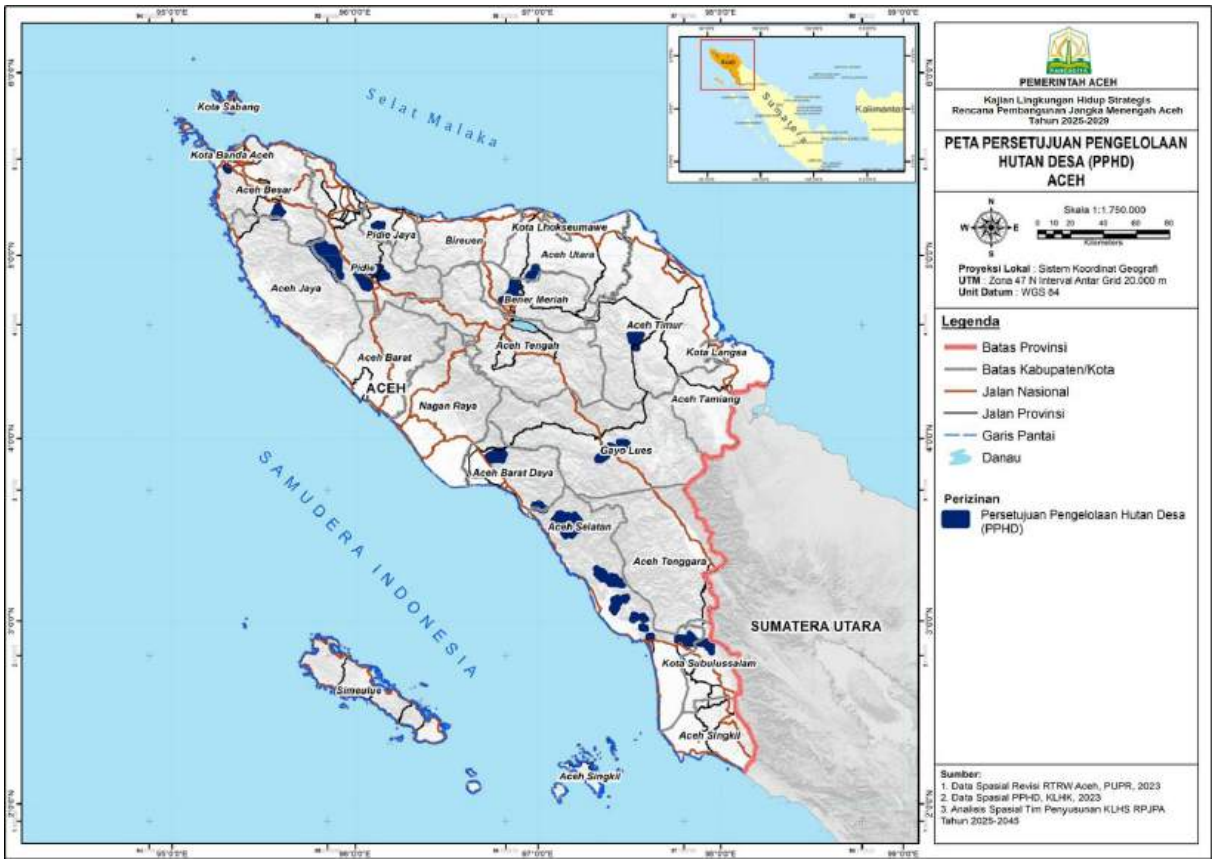
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/Menhut-II/2014 lebih lanjut mengatur tentang Hutan Desa mengatur tentang HD, yaitu hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, yaitu yang diberikan pada: a. hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin; b. hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani; dan/atau c. wilayah tertentu dalam KPH. Permintaan untuk mengelola hutan desa bisa diajukan oleh koperasi atau badan usaha yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Aturan ini juga mengatur cara pengelolaannya, dengan menyatakan bahwa Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), yang disingkat sebagai HPHD, adalah hak untuk mengelola kawasan hutan lindung atau produksi yang diberikan kepada lembaga desa. Peraturan ini juga menetapkan bahwa Lembaga Pengelola Hutan Desa (Lembaga Desa) adalah lembaga di desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan Hutan Desa.

Tabel 2.31.
Badan Hukum Pengelolaan HD dan Luasnya di Provinsi Aceh 2023

| No. | Nama Lembaga Desa | Kabupaten/Kota | Luas PPHD (Ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | LPHD PINTO RIMBA | Pidie Jaya | 1.139 |
| 2 | LPHD LEMBAH BIRU | Pidie Jaya | 1.088 |
| 3 | LPHD NAMUEK PANGMALEM BLANG RAWEU | Pidie | 1.048 |
| 4 | LPHD PUTRO IJO | Pidie | 2.271 |
| 5 | LPHD/K BALE PURNAMA | Bener Meriah | 1.168 |
| 6 | LPHD/K BENER PEPANYI | Bener Meriah | 701 |
| 7 | LPHD/K GEMBULO BERKAH | Gayo Lues | 1.276 |
| 8 | LPHD/K KEPIES | Bener Meriah | 88 |
| 9 | LPHD/K WAQ PONDOK SAYUR | Bener Meriah | 813 |
| 10 | LPHD/K BALE REDELONG | Bener Meriah | 828 |
| 11 | LPHD/K PALOK SEPAKAT | Gayo Lues | 320 |
| 12 | LPHD GAMPONG KAYE ACEH | Aceh Barat Daya | 1.631 |
| 13 | LPHD/G PULO MEURIA | Aceh Utara | 1.428 |
| 14 | LPHD/G GUNONG KAYEE PEUT SAGOE | Pidie | 7.944 |
| 15 | LPHD/G SINGGAHMATA | Pidie | 6.992 |
| 16 | LPHD/G KAPA SEUSAK | Aceh Selatan | 1.809 |
| 17 | LPHD/K BLANG TEMUNG | Gayo Lues | 1.331 |
| 18 | LPHD LEMBAH PUNCAK TUDOENG | Pidie | 4.315 |
| 19 | LPHD JANTHO LEMBAH GAHARU | Aceh Besar | 2.344 |
| 20 | LPHD/G JAMBOPAPEUN | Aceh Selatan | 13.594 |
| 21 | LPHD ALUE JEUREUJAK | Aceh Barat Daya | 4.239 |
| 22 | LPHD DURIAN KAWAN | Aceh Selatan | 699 |
| 23 | LPHD/K PASIR BELO | Kota Subulussalam | 1.123 |
| 24 | LPHD/K DAMARAN BARU | Bener Meriah | 251 |
| 25 | LPHD/G BUNIN | Aceh Timur | 2.698 |
| 26 | LPHD RIMUENG TUHAN | Aceh Besar | 206 |
| 27 | LPHD PUCUK LEMBANG | Aceh Selatan | 1.826 |
| 28 | LPHD GUNONG TGK DI MANE | Pidie | 4.620 |
| 29 | LPHD KOTO INDARUNG | Aceh Selatan | 1.207 |
| 30 | LPHD/G SIURAI URAI | Aceh Selatan | 1.078 |
| 31 | LPHD/G KAMPUNG SAWAH | Aceh Selatan | 1.330 |
| 32 | LPHD/G JAMBO DALEM | Aceh Selatan | 1.930 |
| 33 | LPHD KAMPONG TEUNGOH | Aceh Selatan | 400 |
| 34 | LPHD LATONG BERSAMA GAMPONG ALURDUAMAS | Aceh Selatan | 782 |
| 35 | LPHD/G KAMPUNG PADANG | Aceh Selatan | 1.071 |
| 36 | LPHD/G LADANG BARO KEURANJI BLANDEH | Aceh Selatan | 590 |
| Total | | | 76.178 |

*Sumber: KLHK, 2023*

Sebanyak 12 desa (48 persen) yang memiliki izin pengelolaan HD saat ini berada pada sejumlah desa di Kabupaten Aceh Selatan, yaitu dengan luas sekitar 26 ribu hektar. Namun HD yang paling luas saat ini adalah di Kabupaten Pidie, yaitu sebesar 27 ribu hektar yang berada di 6 desa (11,5 persen), sebagaimana dapat disajikan pada Tabel 2.31 dan sebaran hutan desa pada Gambar 2.39.




*Sumber: KLHK, 2023*

Gambar 2.39. Sebaran Hutan Desa (HD) Aceh

## C8. Perubahan Iklim

### C8.1. Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)

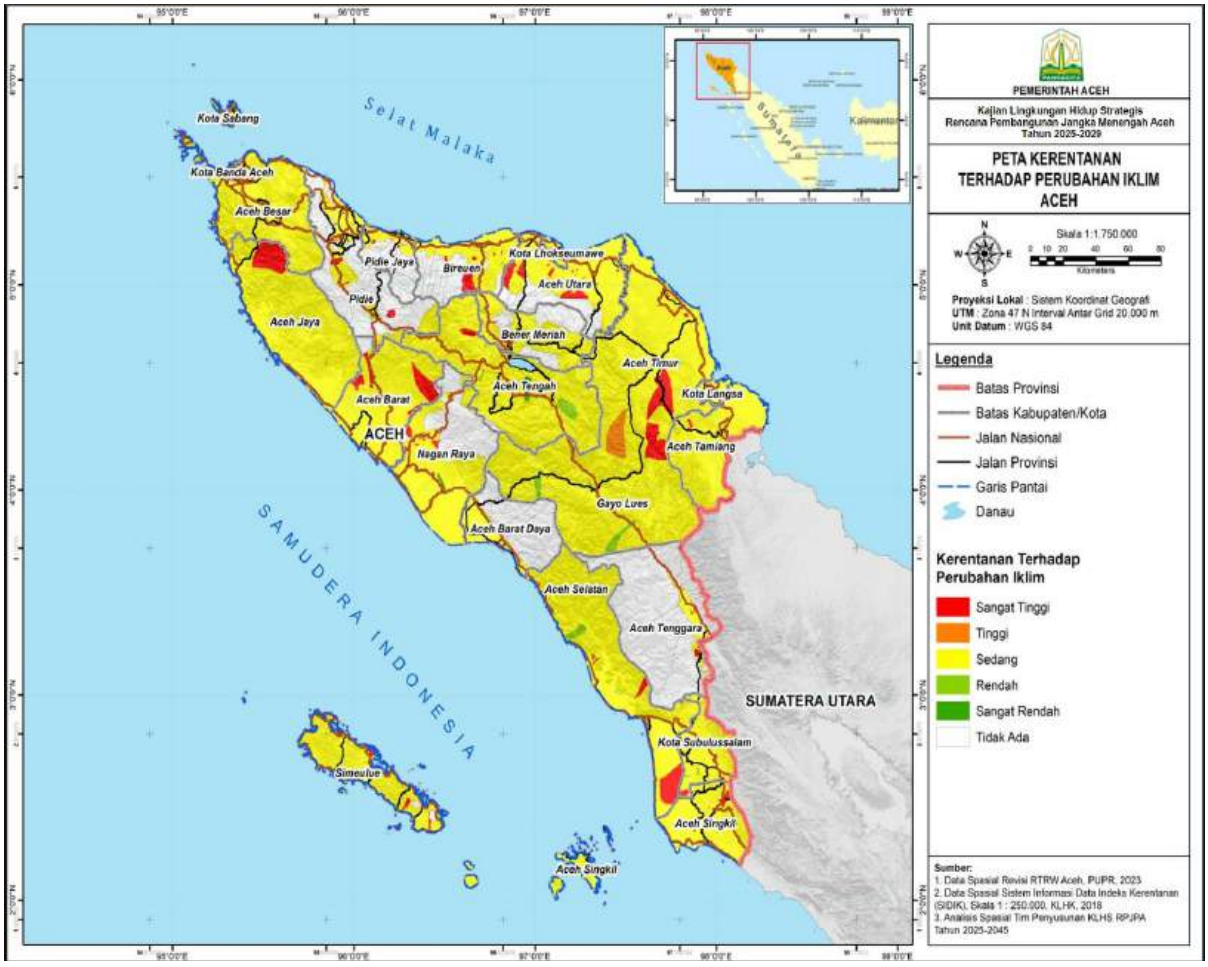
SIDIK merupakan suatu indeks yang memperlihatkan hubungan antara Indek Keterpaparan dan Sensitifitas (IKS) dan Indek Kapasitas Adaptif (IKA). Untuk wilayah Provinsi Aceh, kerentanan iklim berdasarkan SIDIK didominasi berada pada kerentanan sedang dengan luasan 4,279,555.30 ha atau sekitar 75.30 persen dari total luasan wilayah Provinsi Aceh, sekitar 20 persen (1,140,135.41 ha) wilayah Aceh berada dalam kondisi tidak rentan, dan sekitar 3.40 persen (193,371.18 ha) berada dalam kondisi kerentanan iklim sangat tinggi. Untuk kategori kerentanan iklim sangat tinggi ini, Kabupaten Aceh Timur memiliki luasan tertinggi dengan 33,355.63 ha (17.25%), diikuti Kabupaten Aceh Jaya sebesar 28,736.60 ha (14.86%) dan Kabupaten Aceh Selatan sebesar 26,438.89 ha (13.67%).

Tabel 2.32.
Data SIDIK Aceh

| Kabupaten/ Kota | Kerentanan Iklim (Data SIDIK) | | | | | | Luas (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sangat Rendah | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi | Tidak Rentan | |
| Aceh Barat | - | - | 249.497,09 | - | 26.427,06 | 2.363,15 | 278.287,30 |
| Aceh Barat Daya | - | 539,65 | 50.182,60 | - | 644,50 | 136.823,49 | 188.190,24 |
| Aceh Besar | 48,07 | - | 286.924,37 | 96,02 | 931,40 | 1.147,68 | 289.147,54 |
| Aceh Jaya | 138,22 | 7,93 | 356.044,21 | - | 28.736,60 | 2.308,29 | 387.235,25 |
| Aceh Selatan | 0 | 6.458,09 | 383.990,03 | - | 26.438,89 | 680,10 | 417.567,12 |

| Kabupaten/ Kota | Kerentanan Iklim (Data SIDIK) | | | | | | Luas (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sangat Rendah | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi | Tidak Rentan | |
| Aceh Singkil | - | - | 179.666,04 | - | 5.682,33 | - | 185.348,36 |
| Aceh Tamiang | - | - | 217.349,78 | 340,82 | 1.080,67 | - | 218.771,28 |
| Aceh Tengah | 5.475,15 | 10.614,76 | 417.661,33 | - | 3.466,36 | 9.624,15 | 446.841,74 |
| Aceh Tenggara | - | 530,18 | 33.995,50 | - | 3.027,41 | 380.359,24 | 417.912,32 |
| Aceh Timur | - | | 485.335,70 | 22.164,61 | 33.355,63 | 44,10 | 540.900,05 |
| Aceh Utara | - | 33,53 | 187.757,03 | - | 20.377,35 | 62.357,44 | 270.525,36 |
| Bener Meriah | - | 2.437,57 | 123.435,51 | - | 1.593,51 | 63.273,34 | 190.739,93 |
| Bireuen | 21,74 | 495,55 | 94.556,84 | - | 9.467,94 | 75.157,17 | 179.699,24 |
| Gayo Lues | - | 14.226,93 | 525.246,87 | 123,23 | 11.099,05 | 3.432,38 | 554.128,46 |
| Banda Aceh | 45,46 | - | 5.623,60 | - | 7,91 | - | 5.676,96 |
| Langsa | 53,92 | - | 22.382,79 | - | - | - | 22.436,71 |
| Lhokseumawe | - | - | 12.450,65 | - | 0,40 | 846,32 | 13.297,37 |
| Sabang | - | 869,11 | 11.259,42 | - | - | 38,57 | 12.167,10 |
| Subulussalam | - | 1.169,14 | 115.094,98 | - | 2.050,86 | 45,11 | 118.360,08 |
| Nagan Raya | 1.536,51 | 38,67 | 230.821,26 | - | 5.452,54 | 114.525,90 | 352.374,88 |
| Pidie | - | 1.527,30 | 94.196,06 | - | 6.979,87 | 215.049,61 | 317.752,84 |
| Pidie Jaya | - | 146,22 | 24.169,85 | - | 800,51 | 68.784,31 | 93.900,90 |
| Simeulue | - | 1.239,34 | 171.913,79 | - | 5.750,41 | 3.275,05 | 182.178,59 |
| Total Luas (Ha) | 7.319,06 | 40.333,97 | 4.279.555,30 | 22.724,68 | 193.371,18 | 1.140.135,41 | 5.683.439,61 |

*Sumber: BPKHTL, 2023*




*Sumber: BPKHTL, 2023*

Gambar 2.40. Peta Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim (SIDIK) Aceh

## C8.2. PIPPIB

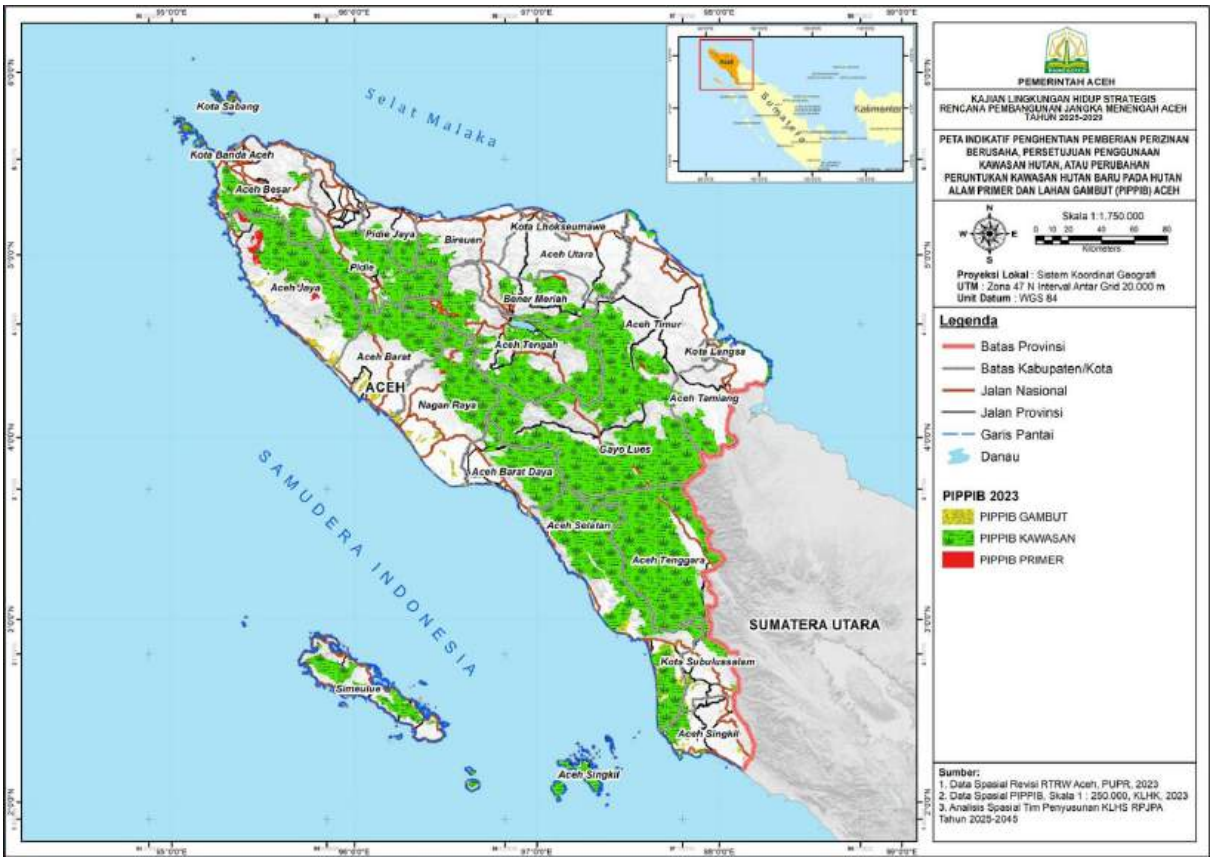
PIPPIB adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang menghentikan pemberian izin baru untuk hutan alam primer dan lahan gambut. Kebijakan ini terdiri dari tiga kategori utama, yaitu PIPPIB Kawasan, PIPPIB Gambut, dan PIPPIB Primer. Tujuan dari PIPPIB adalah melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam tata kelola hutan dan lahan gambut, serta menyeimbangkan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. PIPPIB merupakan langkah berkelanjutan untuk melindungi hutan alam primer dan lahan gambut, serta terus mengurangi emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan.

Berdasarkan Tabel 2.33 dapat diketahui bahwa PIPBIB kawasan seluas 2.637.788,58 Ha atau sebesar 96,92 persen dari luas total PIPPIB Aceh 2.721.560,92 Ha, berikutnya PIPPIB Gambut seluas 61.080,24 Ha (2,24 %), dan PIPPIB Primer seluas 22.692,10 Ha (0,83). Berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Aceh, PIPPIB Gambut terluas terdapat di Provinsi Aceh Selatan, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya. Selanjutnya, PIPPIB Primer terluas terdapat di Provinsi Aceh Jaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Nagan Raya. Sementara PIPPIB Kawasan tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh kecuali Banda Aceh dan Lhokseumawe.

Tabel 2.33.
Luas PIPPIB Periode I Aceh

| Kabupaten/ Kota | Kategori PIPPIB | | | Luas Total PIPPIB (Ha) |
|---|---|---|---|---|
| | PIPPIB Gambut | PIPPIB Kawasan | PIPPIB Primer | |
| Aceh Barat | 12.800,85 | 105.101,37 | - | 117.902,22 |
| Aceh Barat Daya | 2.346,62 | 112.214,75 | 18,30 | 114.579,67 |
| Aceh Besar | - | 95.517,98 | 0,52 | 95.518,51 |
| Aceh Jaya | 10.676,23 | 169.620,47 | 14.286,34 | 194.583,05 |
| Aceh Selatan | 14.794,58 | 288.728,97 | 5,78 | 303.529,34 |
| Aceh Singkil | 4.073,21 | 47.839,92 | 4,06 | 51.917,19 |
| Aceh Tamiang | - | 51.483,33 | 36,95 | 51.520,28 |
| Aceh Tengah | - | 270.720,56 | 3.268,80 | 273.989,35 |
| Aceh Tenggara | - | 367.024,38 | 4,63 | 367.029,01 |
| Aceh Timur | - | 172.111,97 | 1.022,96 | 173.134,93 |
| Aceh Utara | - | 7.936,68 | - | 7.936,68 |
| Bener Meriah | - | 67.710,25 | 2.196,77 | 69.907,02 |
| Bireuen | - | 31.008,36 | 234,63 | 31.243,00 |
| Gayo Lues | - | 421.987,87 | 228,99 | 422.216,86 |
| Kota Langsa | - | 1.213,74 | - | 1.213,74 |
| Kota Sabang | - | 4.466,41 | - | 4.466,41 |
| Kota Subulussalam | 4.802,16 | 23.757,79 | - | 28.559,95 |
| Nagan Raya | 11.586,59 | 121.403,48 | 1.287,14 | 134.277,21 |
| Pidie | - | 170.733,15 | 96,22 | 170.829,38 |
| Pidie Jaya | - | 48.577,77 | - | 48.577,77 |
| Simeulue | - | 58.629,35 | - | 58.629,35 |
| Total Luas (Ha) | 61.080,24 | 2.637.788,58 | 22.692,10 | 2.721.560,92 |

*Sumber: SK.3554/MENLHK-PKTL/PLA.13/2023*




*Sumber: SK.3554/MENLHK-PKTL/PLA.13/2023*

Gambar 2.41. Peta PIPPIB Aceh

## C8.3. Tutupan Lahan

Luas tutupan lahan di Provinsi Aceh Tahun 2022 sebesar 5.683.439,61 Ha. Hutan lahan kering primer seluas 2.054.541,38 Ha atau 36,15 % dari luas total tutupan lahan Aceh sebesar 5.683.439,61 Ha. Tutupan lahan kering primer ini menjadi jenis tutupan lahan terluas dibandingkan jenis tutupan lahan lainnya. Selanjutnya, secara berturut-turut jenis tutupan lahan perkebunan seluas 954.668,43 Ha ( 16,80 %), hutan lahan kering sekunder seluas 826.393,37 Ha (14,54 %), belukar seluas 490.055,67 Ha (8,62 %), dan pertanian lahan kering campuran seluas 394.377, 24 Ha (6,94 %).

Tabel 2.34.
Luas Tutupan Lahan di Provinsi Aceh

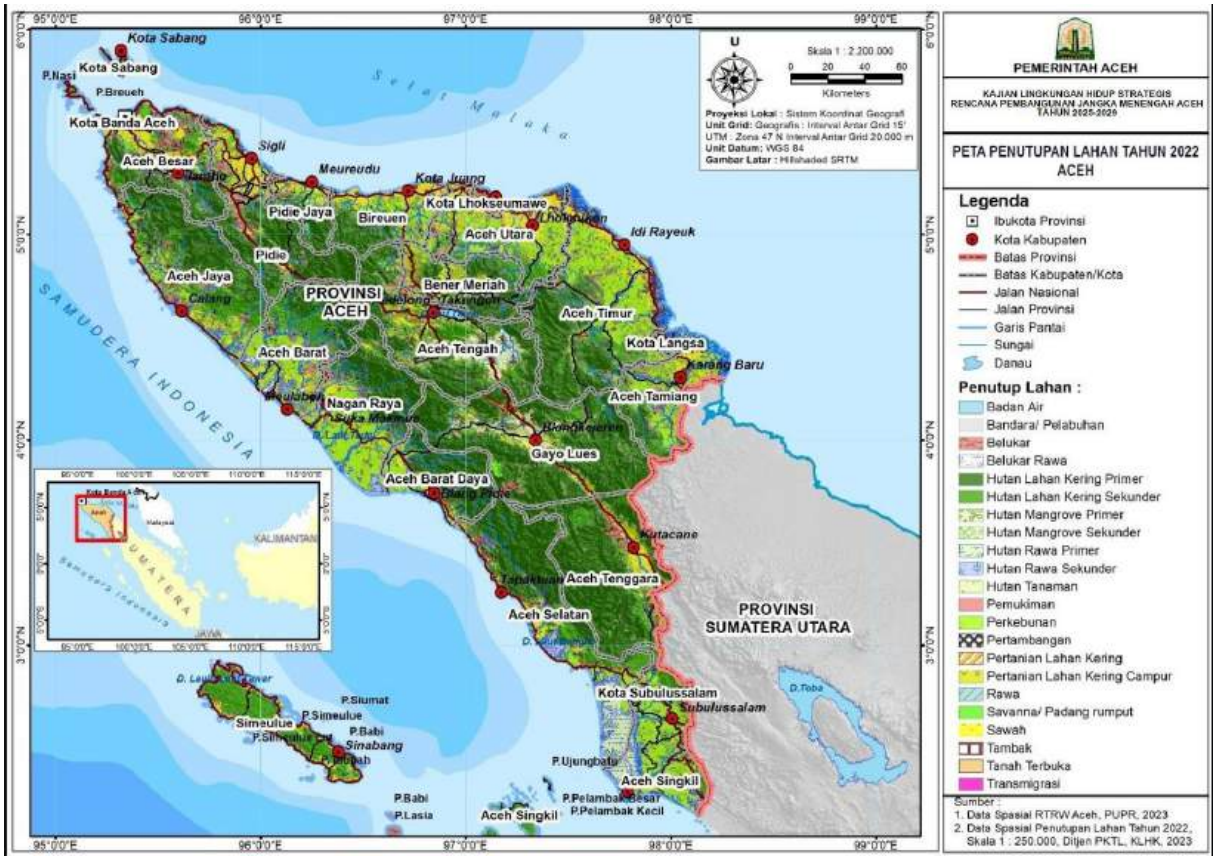
| Penutup Lahan 2022 | Luas (Ha) |
|---|---|
| Badan Air | 36.429,85 |
| Bandara / Pelabuhan | 939,11 |
| Belukar | 490.055,67 |
| Belukar Rawa | 47.767,83 |
| Hutan Lahan Kering Primer | 2.054.541,38 |
| Hutan Lahan Kering Sekunder | 826.393,37 |
| Hutan Mangrove Primer | 271,55 |

| Penutup Lahan 2022 | Luas (Ha) |
|---|---|
| Pemukiman | 153.644,71 |
| Perkebunan | 954.668,43 |
| Pertambangan | 2.022,30 |
| Pertanian Lahan Kering | 74.697,43 |
| Pertanian Lahan Kering Campur | 394.377,24 |
| Rawa | 2.092,39 |
| Savanna/ Padang rumput | 70.621,04 |

| Penutup Lahan 2022 | Luas (Ha) |
|---|---|
| Hutan Mangrove Sekunder | 22.497,02 |
| Hutan Rawa Primer | 65.813,43 |
| Hutan Rawa Sekunder | 35.843,31 |
| Hutan Tanaman | 128.053,38 |
| | |

| Penutup Lahan 2022 | Luas (Ha) |
|---|---|
| Sawah | 209.046,39 |
| Tambak | 71.763,10 |
| Tanah Terbuka | 39.644,87 |
| Transmigrasi | 2.255,84 |
| Total Luas (Ha) | 5.683.439,61 |

*Sumber : BPKHTL, KLHK 2023*




*Sumber : BPKHTL, KLHK 2023*

Gambar 2.42. Peta Penutupan Lahan di Provinsi Aceh

## C8.4. *Forestry and Other Land Use* (FOLU) NET SINK 2030

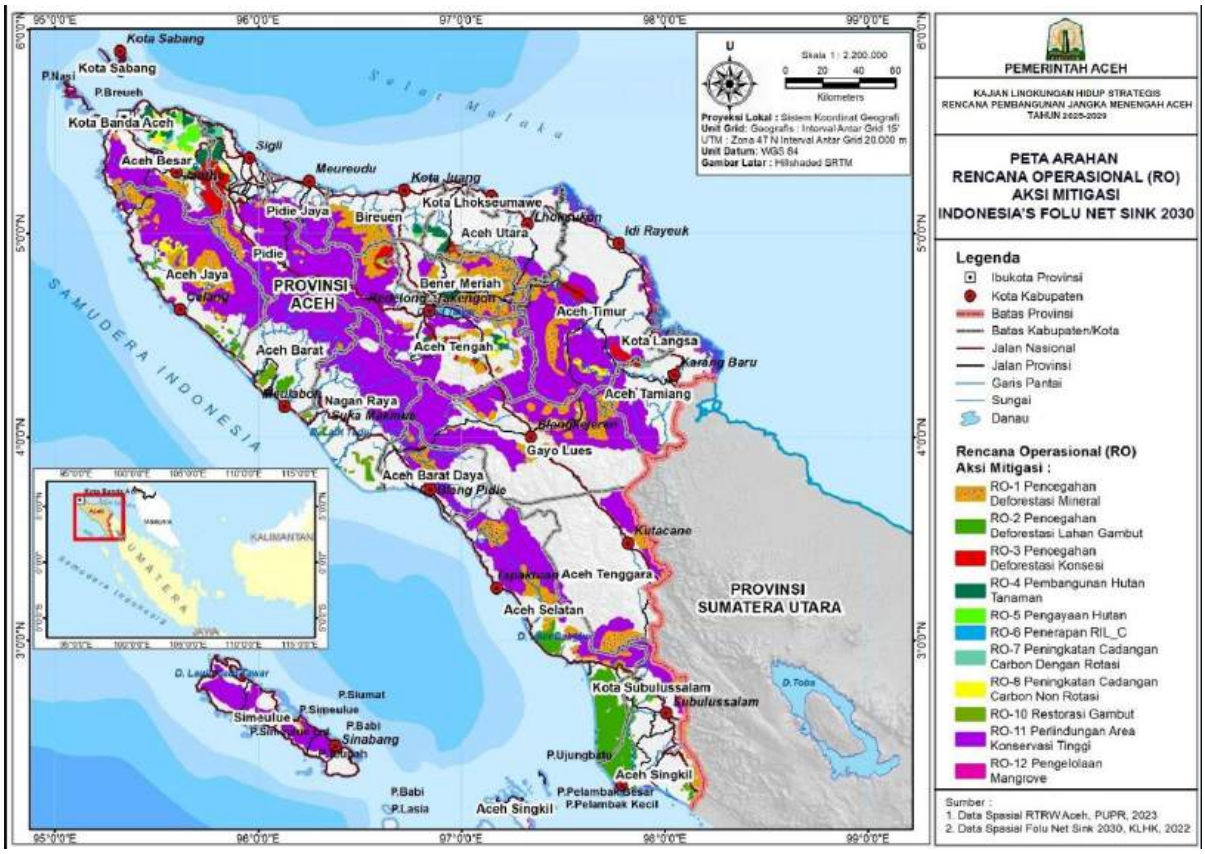
Konteks perubahan iklim dan kebijakan lingkungan, istilah "FOLU Net Sink" merujuk pada situasi di mana karbon dioksida yang diserap oleh hutan dan penggunaan lahan lainnya melebihi jumlah yang dilepaskan ke atmosfer. Targetnya adalah mencapai kondisi di mana sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya secara netto berfungsi sebagai penyerap karbon pada tahun 2030. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi konsentrasi gas rumah kaca dan memerangi pemanasan global di Provinsi Aceh. Upaya untuk mencapai status "FOLU Net Sink" dapat meliputi penanaman kembali hutan, restorasi ekosistem yang rusak, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan praktik pertanian yang mendukung penyerapan karbon. Langkah-langkah ini sering menjadi bagian dari komitmen negara-negara dalam kontribusi mereka terhadap perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris tentang perubahan iklim.

FOLU NET SINK 2030 adalah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan, dengan tingkat serapan karbon lebih tinggi dari emisi pada tahun 2030. Dalam konteks Provinsi Aceh, Rencana Operasional (RO) yang terkait dengan Perlindungan Area Konservasi Tinggi memiliki peran utama dalam aksi mitigasi ini, dengan luas wilayah yang signifikan. Misalnya, Kabupaten Gayo Lues memiliki luas terbesar di antara lainnya. Selain itu, Provinsi Aceh juga didominasi oleh RO lainnya seperti Pencegahan Deforestasi Mineral dan Pencegahan Deforestasi Lahan Gambut, yang juga memiliki luas wilayah yang cukup besar."

## Tabel 2.35.
## Folu Net Sink RO1 s/d RO 12 Aceh

| Kabupaten/Kota | RO-1 Pencegahan Deforestasi Mineral | RO-2 Pencegahan Deforestasi Lahan Gambut | RO-3 Pencegahan Deforestasi Konsesi | RO-4 Pembangunan Hutan Tanaman | RO-5 Pengayaan Hutan | RO-6 Penerapan RIL-C | RO-7 Peningkatan Cadangan Carbon Dengan Rotasi | RO-8 Peningkatan Cadangan Carbon Non Rotasi | RO-10 Restorasi Gambut | RO-11 Perlindungan Area Konservasi Tinggi | RO-12 Pengelolaan Mangrove |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh Barat | 456,76 | 1.477,65 | - | - | - | - | - | - | 4.282,70 | 106.840,09 | 364,35 |
| Aceh Barat Daya | 10.399,78 | 77,98 | - | - | - | - | - | - | 112,90 | 46.155,66 | - |
| Aceh Besar | 5.792,95 | 0 | 17.094,91 | 5.491,59 | 7.332,83 | 7.240,13 | 1.817,36 | 18.735,46 | - | - | - |
| Aceh Jaya | 28.571,38 | 566,71 | - | - | - | - | - | 10.407,23 | 2.033,00 | 199.537,17 | 209,25 |
| Aceh Selatan | 28.283,44 | 64.231,59 | - | - | - | - | - | | 4.439,30 | 130.531,35 | - |
| Aceh Singkil | 3.468,94 | 18.208,03 | - | - | - | - | - | 33,01 | 1.430,11 | | 1.261,80 |
| Aceh Tamiang | 1.089,57 | - | 584,00 | 2,09 | 6,15 | | 295,74 | 1.272,17 | - | 45.040,95 | 11.319,78 |
| Aceh Tengah | 18.534,75 | - | 8.638,49 | 1.266,87 | 1.448,46 | 639,50 | 250,04 | 7.097,57 | - | 151.025,03 | - |
| Aceh Tenggara | 22.210,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.326,86 | - |
| Aceh Timur | 20.687,08 | - | 5.968,23 | 20,64 | 594,41 | | 152,00 | 3.104,51 | - | 200.011,88 | 6.368,41 |
| Aceh Utara | 7.935,42 | - | 2.837,53 | 2.823,17 | 1.628,86 | 418,25 | 778,38 | 1.917,49 | - | 12.299,27 | 92,75 |
| Bener Meriah | 61.368,88 | - | 2.361,24 | 4.054,81 | 18,65 | 11,34 | 3.466,76 | 1.141,50 | - | 31.445,12 | - |
| Bireuen | 27.431,90 | - | | 901,82 | 219,12 | 219,12 | 1.048,27 | 241,92 | - | 32.505,26 | - |
| Gayo Lues | 25.421,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.304,70 | - |
| Kota Banda Aceh | | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 48,86 |
| Kota Langsa | 100,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.699,25 |
| Kota Lhokseumawe | | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15,59 |
| Kota Sabang | 733,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.433,42 | 9,61 |
| Kota Subulussalam | 2.905,34 | 2.943,21 | - | - | - | - | - | - | 473,63 | 22.120,23 | - |
| Nagan Raya | 5,07 | 875,72 | - | - | - | - | - | - | 2.785,75 | 132.788,77 | - |
| Pidie | 13.287,83 | | 8.283,19 | 3.884,59 | 360,75 | 171,91 | 3.842,71 | 3.178,53 | | 154.820,16 | 55,34 |
| Pidie Jaya | 836,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.107,84 | 92,77 |
| Simeulue | 82,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.481,30 | 1.405,81 |
| Total Luas (Ha) | 279.604,75 | 88.380,88 | 45.767,59 | 18.445,58 | 11.609,23 | 8.700,25 | 11.651,26 | 47.129,37 | 15.557,38 | 1.678.587,95 | 25.987,93 |

*Sumber : BPKHTL, 2023*




*Sumber : BPKHTL, 2023*

Gambar 2.43. Peta *Folu Net Sink* Aceh

## C9. Biodiversitas

### C9.1. Kawasan Hutan

Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan berdasarkan SK.6616/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 menyatakan bahwa Provinsi Aceh memiliki Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan seluas ± 3.550.344,54 Ha. Kawasan Hutan/Klasifikasi Fungsi Hutan Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36.
Luas Kawasan Hutan di Aceh

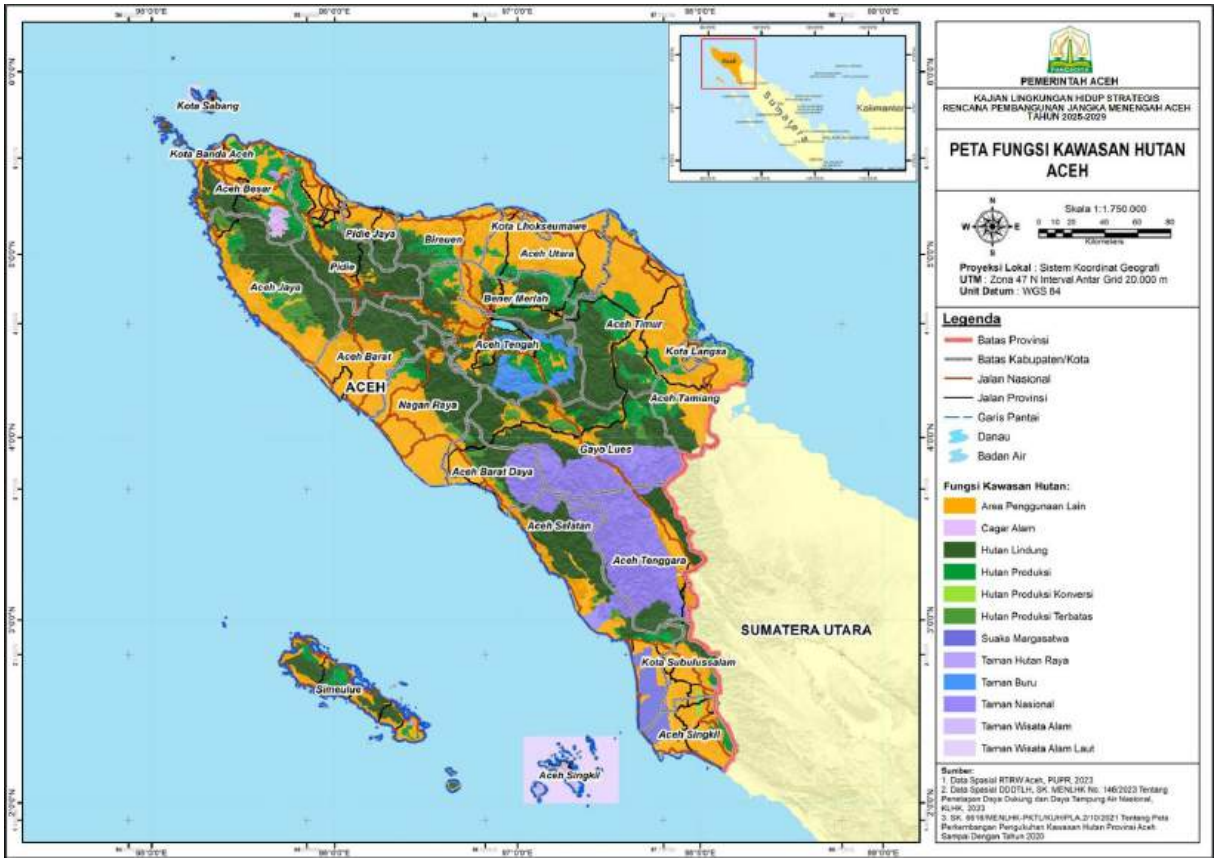
| Kawasan Fungsi Hutan | Luas (Ha) |
|---|---|
| Cagar Alam | 15.626,83 |
| Hutan Lindung | 1.784.072,82 |
| Hutan Produksi | 550.176,33 |
| Hutan Produksi Konversi | 15.337,47 |
| Hutan Produksi Terbatas | 141.730,05 |
| Suaka Margasatwa | 81.832,84 |

| Kawasan Fungsi Hutan | Luas (Ha) |
|---|---|
| Taman Buru | 86.324,13 |
| Taman Hutan Raya | 8.624,43 |
| Taman Nasional | 625.224,73 |
| Taman Wisata Alam | 30.188,46 |
| Taman Wisata Alam Laut | 211.206,45 |
| Total Luas (Ha) | 3.550.344,54 |

*Sumber : SK.6616/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021*

Menurut data yang tertera dalam tabel, dapat diketahui bahwa luas total kawasan hutan di Provinsi Aceh mencapai 3.550.344,54 hektar, yang setara dengan 58,8 persen luas wilayah daratan Aceh. Dari kawasan hutan tersebut, kewenangan pengelolaannya oleh Pemerintah Aceh terdiri dari Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP) dengan

total luas mencapai 2.527.633 hektar. Secara fungsional, mayoritas kawasan hutan di Provinsi Aceh didedikasikan sebagai Hutan Lindung, mencapai sekitar ±1.784.072,82 hektar (atau sekitar 50,18 persen). Dengan persentase luas mencapai 62 persen dari total luas wilayah Aceh, atau sekitar 58 persen dari luas daratan Aceh, kawasan hutan tersebut memiliki status sebagai kawasan hutan negara. Selain itu terdapat kawasan konservasi Tahura Pocut Meurah Intan yang terletak di Kabupaten Aceh Besar dan Pidie seluas 6.200 hektar, Tahura Lae Kombih terletak di Kota Subulussalam seluas 1.483 hektar, dan Tahura Simeulu terletak di Kabupaten Simeulue seluas 918 hektar.

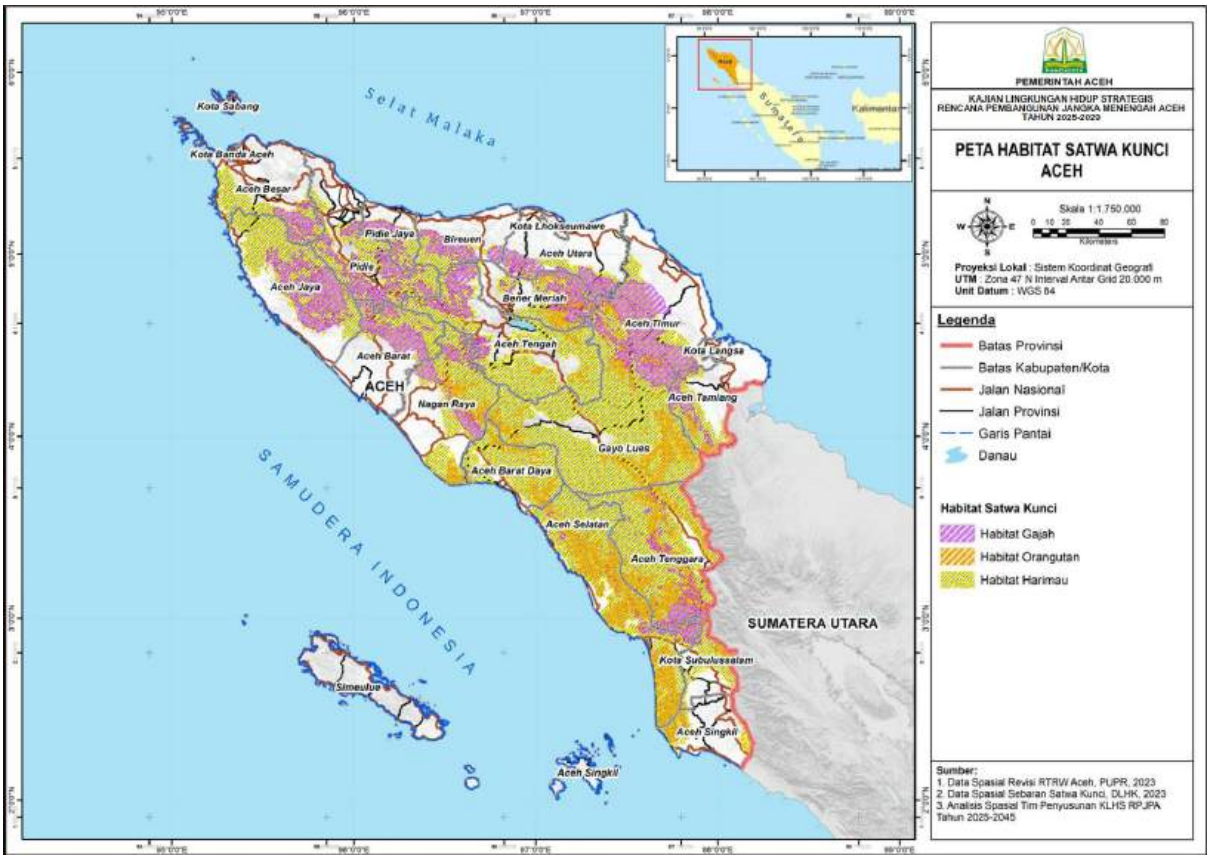



*Sumber : SK.6616/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021*

Gambar 2.44. Peta Kawasan Hutan di Provinsi Aceh

### C9.2. *Home Range* Satwa (Koridor Satwa)

Wilayah bergerak (home range) di Provinsi Aceh terdiri atas wilayah bergerak berupa satwa seperti orangutan, harimau, dan gajah. Orangutan memiliki wilayah gerak di 17 kabupaten/kota, dengan wilayah terluas terletak di Kabupaten Aceh Timur mencapai 175.651,91 hektar (Ha), dan yang terkecil di Kabupaten Gayo Lues hanya 8,42 Ha. Sementara itu, wilayah bergerak harimau terdapat di 18 kabupaten/kota, dengan luas terbesar di Kabupaten Gayo Lues mencapai 508.709,16 Ha, dan yang terkecil di Kabupaten Aceh Singkil sebesar 33.879,12 Ha. Terakhir, wilayah bergerak gajah tersebar di 12 kabupaten/kota, dengan wilayah terluas berada di Kabupaten Aceh Selatan mencapai 163.571,53 Ha, dan yang terkecil di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 11.288,37 Ha. Informasi tentang luas dan distribusi sebaran wilayah bergerak satwa kunci di Provinsi Aceh tercantum dalam Gambar 2.45 dan Tabel 2.37.




*Sumber : BKSDA, 2023*

Gambar 2.45. Peta Home Range Satwa Aceh

Tabel 2.37.
Home Range Satwa di Provinsi Aceh

| Kabupaten/Kota | Luas (Ha) | | |
|---|---|---|---|
| | Habitat Orang Utan | Habitat Harimau | Habitat Gajah |
| Aceh Barat | - | 124.352,73 | 53.882,23 |
| Aceh Barat Daya | 27.060,48 | 164.400,75 | 30,09 |
| Aceh Besar | - | 100.800,92 | 22.732,15 |
| Aceh Jaya | - | 270.293,56 | 96.876,68 |
| Aceh Selatan | 163.441,65 | 373.287,07 | 18.463,18 |
| Aceh Singkil | 17.576,38 | 33.879,12 | - |
| Aceh Tamiang | 12.918,70 | 82.377,55 | - |
| Aceh Tengah | 12.142,53 | 326.318,95 | 45.017,71 |
| Aceh Tenggara | 123.529,76 | 390.432,71 | 42.860,01 |
| Aceh Timur | 37.274,55 | 327.587,79 | 175.342,98 |
| Aceh Utara | 10.974,48 | 74.815,73 | 48.306,43 |
| Bener Meriah | 37.229,12 | 128.406,12 | 42.701,37 |
| Bireuen | - | 71.727,11 | 38.199,31 |
| Gayo Lues | - | 508.709,16 | 8,43 |
| Kota Banda Aceh | - | - | - |
| Kota Langsa | - | - | - |
| Kota Lhokseumawe | - | - | - |
| Kota Sabang | - | - | - |
| Kota Subulussalam | 14.062,03 | 67.597,17 | 5.875,17 |
| Nagan Raya | 35.551,42 | 216.254,31 | 42.515,18 |

| Kabupaten/Kota | Luas (Ha) | | |
|---|---|---|---|
| | Habitat Orang Utan | Habitat Harimau | Habitat Gajah |
| Pidie | 0 | 198.330,17 | 64.827,51 |
| Pidie Jaya | 0 | 61.147,60 | 17.892,97 |
| Simeulue | 0 | 0 | 0 |
| Total Luas (Ha) | 568.033,22 | 3.520.718,51 | 735.784,59 |

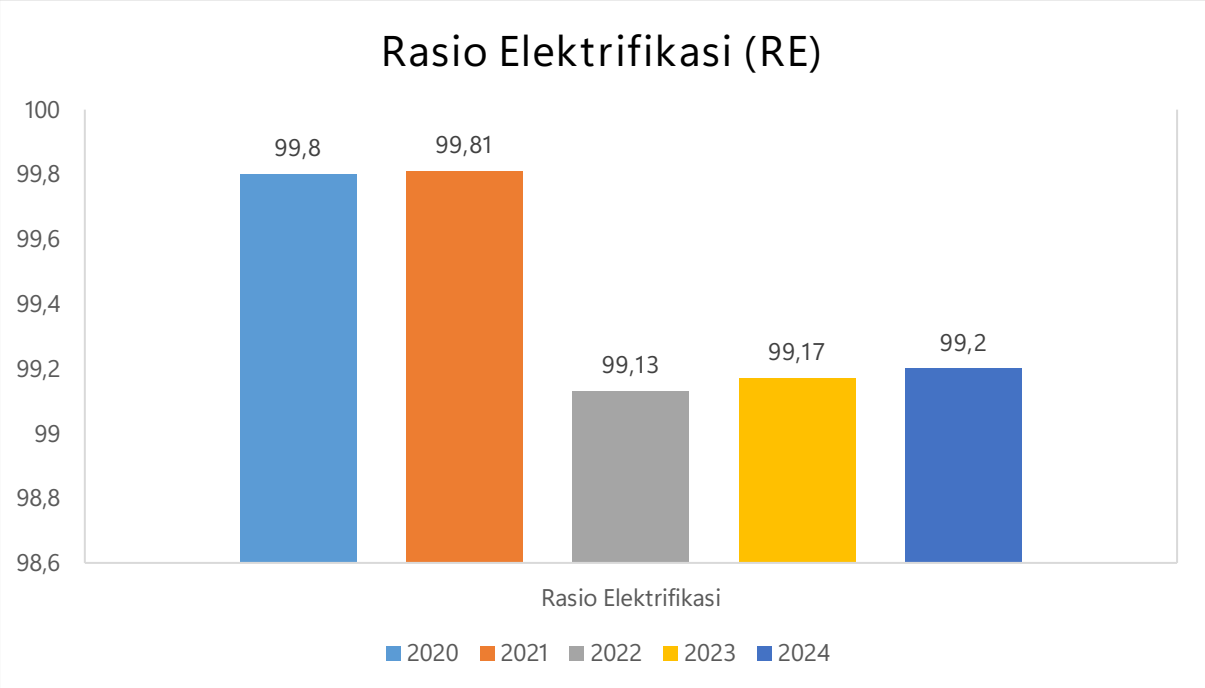
*Sumber : BKSDA, 2023*

### 2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Menjelaskan kondisi energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan memuat seperti:

#### A. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Jumlah Rumah Tangga yang meggunakan listrik di Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 jumlah persentase rumah tangga berlistrik di Aceh mengalami fluktuasi. Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Aceh hingga tahun 2024 sebanyak 1.534.855 Rumah Tangga. Persentase jumlah rumah tangga berlistrik di Aceh dapat di lihat pada Gambar 2.46.




*Sumber : Dinas ESDM Aceh, 2025*

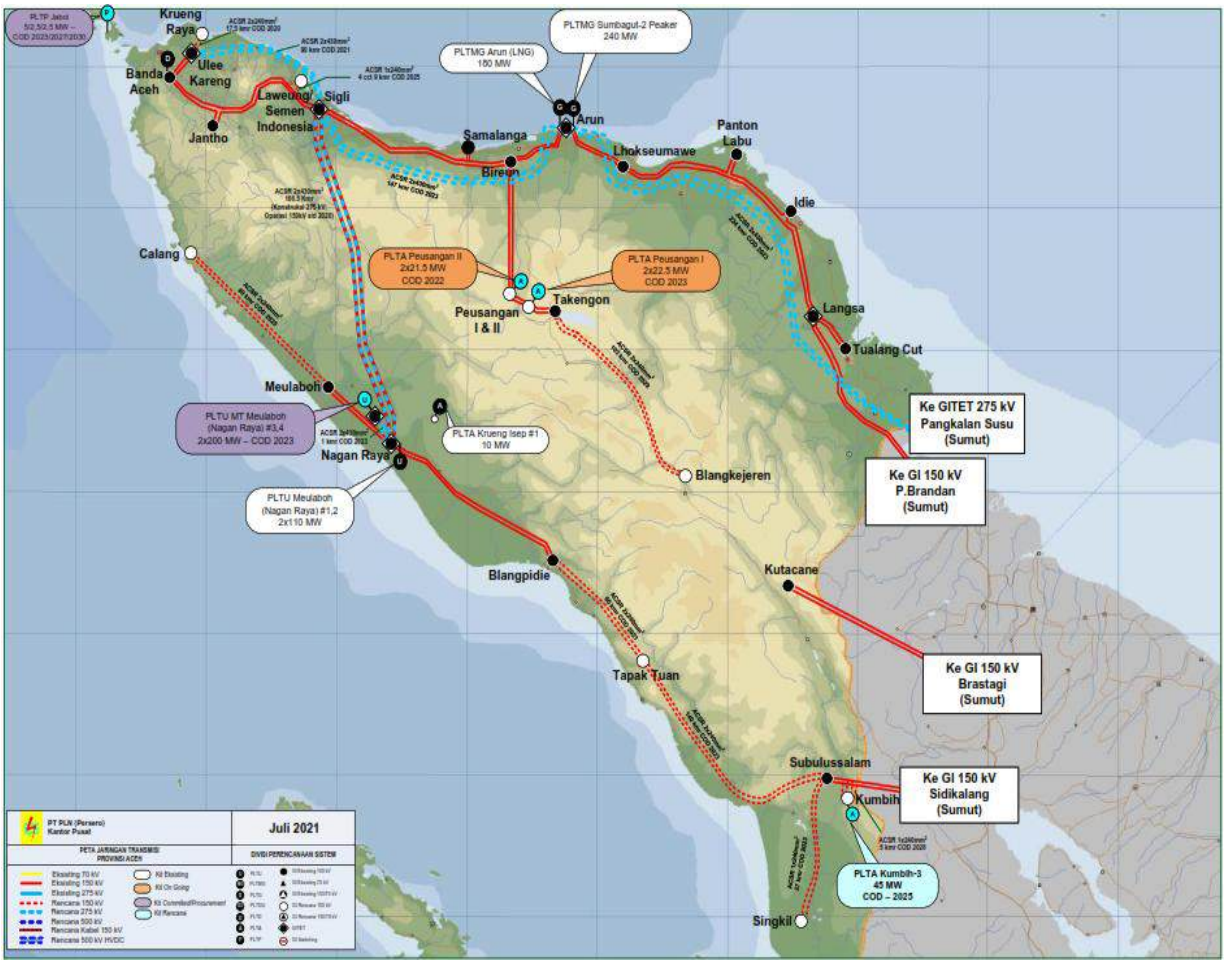
Gambar 2.46. Persentase Rumah tangga Berlistrik di Aceh Tahun 2020-2024

Perkembangan Permasalahan kelistrikan di Aceh diantaranya adalah belum tercapainya akses listrik untuk seluruh masyarakat yang tercermin dari belum tercapainya rasio elektrifikasi 100 persen hingga saat ini. Upaya pemerintah Aceh untuk mengatasi permasalahan kelistrikan adalah antara lain: 1) pemanfaatan potensi energi terbarukan untuk desa-desa yang tidak terjangkau jaringan listrik dan 2) meningkatkan

rasio elektrifikasi hingga mencapai hasil 100 % melalui penyambungan listrik gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

### A1. Kapasitas Terpasang dan Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik PLN

Sistem tenaga listrik di Aceh terdiri dari sistem internoneksi 150 kV Sumbagut dan sistem isolated dengan tegangan distribusi 20 kV. Sebagian besar sistem tenaga listrik Aceh dipasok oleh sistem interkoneksi 150 kV Sumatera dan sebagian kecil masih berada di daerah isolated terutama untuk lokasi-lokasi di pulau terpisah. Saat ini daerah yang sudah dipasok sistem interkoneksi meliputi seluruh lokasi di Aceh (daratan), baik melalui jaringan 150kV ataupun 20kV. Beban puncak tertinggi Aceh tahun 2020 bulan Oktober sebesar 542 MW. Peta sistem tenaga listrik Provinsi Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.47.




*Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2021-2030*

Gambar 2.47. Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Aceh

Pada sistem isolated 20 kV yang meliputi Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Sistem Blangkejeren (Gayo Lues), Sistem Takengon (Aceh Tengah) terdapat sewa genset untuk mensuplai sistem tersebut. Sistem Isolated di luar pulau Sumatera adalah Kota Sabang, Sistem Sinabang (Simeulue) dan sistem kecil lainnya. Kapasitas pembangkit tenaga listrik eksisting, gardu induk dan Realisasi Kapasitas Trafo Gardu Induk (MVA) dapat dilihat seperti pada Tabel 2.38 dan Tabel 2.39.

Tabel 2.38.
Pembangkit Tenaga Listrik Eksisting

| Pembangkit | Sistem Tenaga Listrik | Jumlah unit | Total Kapasitas (MW) | Daya Mampu Netto (MW) | DMP Tertinggi 1 Tahun Terkahir |
|---|---|---|---|---|---|
| PLN | | | | | |
| PLTU | Sumatera | 2 | 220 | 140 | 136 |
| PLTMG | Sumatera | 32 | 424 | 401,5 | 407,2 |
| | Sumatera | 18 | 64,2 | 42,3 | 36,5 |
| | Sinabang | 18 | 13,8 | 9,1 | 9,1 |
| PLTD | Sabang | 15 | 12,9 | 8,7 | 8,7 |
| Jumlah PLN | | 72 | 735,8 | 601,6 | 597,5 |
| IPP | | | | | |
| PLTD | Sumatera | 2 | 23 | 15,7 | 7 |
| PLTM | Sumatera | 2 | 11 | 11,6 | 11,4 |
| Jumlah IPP | | 4 | 34 | 27,3 | 18,4 |
| Jumlah | | 76 | 769,8 | 628,9 | 615,9 |

*Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2021-2030*

Kondisi sistem isolated 20 kV yang tersisa adalah sistem isolated di kepulauan seperti Sistem Sabang, Sistem Sinabang (Simeulue) dan system kecil lainnya juga masih dipasok oleh PLTD.

Tabel 2.39.
Realisasi Kapasitas Trafo Gardu Induk (MVA)

| No. | Nama GI | Tegangan (kV) | Jumlah Trafo (Unitt) | Total Kapasitas (MVA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alue Dua/ Langsa | 150/20 | 2 | 90 |
| 2 | Tualang Cut | 150/20 | 3 | 110 |
| 3 | Alue Batee/ Idi | 150/20 | 2 | 50 |
| 4 | Lhokseumawe | 150/20 | 2 | 120 |
| 5 | Bireuen | 150/20 | 2 | 120 |
| 6 | Sigli | 150/20 | 2 | 90 |
| 7 | Banda Aceh I / Lambaroe | 150/20 | 3 | 180 |
| 8 | Jantho | 150/20 | 1 | 30 |
| 9 | Pantonlabu | 150/20 | 2 | 60 |
| 10 | PLTU Nagan Raya | 150/20 | 1 | 30 |
| 11 | Arun | 150/20 | 1 | 60 |
| 12 | Meulaboh | 150/20 | 2 | 90 |
| 13 | Blang Pidie | 150/20 | 1 | 30 |
| 14 | Kutacane | 150/20 | 1 | 30 |
| 15 | Subulussalam | 150/20 | 1 | 30 |
| 16 | Takengon | 150/20 | 1 | 30 |
| 17 | Samalanga | 150/20 | 1 | 30 |
| 18 | Ulee Kareeng | 150/20 | 1 | 30 |
| 19 | Krueng Raya | 150/20 | 1 | 30 |
| TOTAL | | | 30 | 1240 |

*Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2021-2030*

A2. Persentase Daya Tersambung Per Sektor Pelanggan

Pada tahun 2024 jumlah Pelanggan listrik sebanyak 1.791.668 pelanggan. Mengalami peningkatan sebanyak 67.308 pelanggan dibanding tahun 2023 atau terjadi peningkatan sebesar 3,76% (persen). Adapun daya listrik terpasang untuk Provinsi Aceh tahun 2023 sebesar 2.173.863MVA. Jumlah kelompok pelanggan PLN di Aceh terbesar adalah pelanggan kelompok rumah tangga dengan persentase 85.67 persen dengan jumlah pelanggan 1.534.855. Sedangkan Kelompok pelanggan paling rendah di sektor industri yaitu 0.26 persen dengan jumlah pelanggan 4.626 pelanggan. Seperti yang tersaji pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40.
Jumlah Konsumen per Sektor Pelanggan Tahun 2024

| Kelompok Pelanggan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Rumah Tangga | 1.534.855 | 85,67 |
| Sosial | 58.081 | 3,24 |
| Bisnis | 177.598 | 9,91 |
| Industri | 4.626 | 0,26 |
| Pemerintah | 16.192 | 0,90 |
| Lain-lain | 316 | 0,02 |
| Jumlah | 1.724.360 | 100 |

*Sumber : PT.PLN(Persero) Wilayah Aceh, 2025*

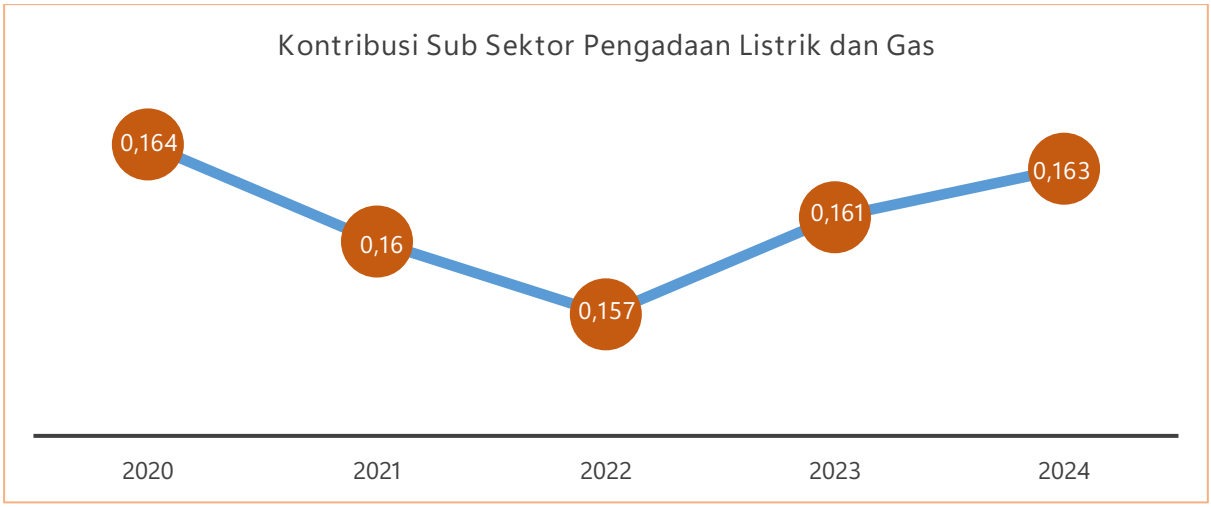
Adapun perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non PLN dengan jumlah rumah tangga total di Aceh menunjukkan nilai rasio ketersediaan daya listrik sebesar 99,99 %. Hal ini menunjukkan bahwa dari 1.534.855 pelanggan rumah tangga, hanya terdapat 130 yang non PLN. Total daya terpasang pembangkit seluruh Aceh adalah sebesar 1.105 MW.

B. Energi dan Sumber Daya Mineral

B1. Kontribusi Sub Sektor Listrik dan Gas

Secara umum kontribusi subsektor listrik dan gas terhadap PDRB Aceh menurut lapangan usaha dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,157 persen. Fluktuasi kontribusi sektor listrik dan gas dipengaruhi oleh situasi ekonomi makro secara keseluruhan. Misalnya, pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak sektor ekonomi terhenti atau melambat. Meskipun sektor ini tetap diperlukan untuk kegiatan dasar, efek ekonomi dari pandemi dapat mengubah laju konsumsi energi dan kontribusinya terhadap PDRB. Sebaliknya, pada tahun 2022, meskipun situasi ekonomi mulai membaik, pemulihan ekonomi mungkin tidak merata atau ada kendala struktural yang menyebabkan kontribusi subsektor ini lebih rendah.

Adapun posisi tahun 2022 terendah selama lima tahun yaitu 0,157 persen. Sebagaimana tersaji pada Gambar 2.48.




*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2025*

Gambar 2.48. Kontribusi Sub Sektor Pengadaan Listrik dan Gas Tahun Tahun 2020-2024 (ADHK)

Kondisi ini mengalami stagnan karena subsektor listrik dan sumber-sumber energi terbarukan belum optimal dalam pengembangannya, sementara belum ditemukannya ladang sumber gas baru.

B2. Pertambangan tanpa izin

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi dengan kekayaan sumber daya mineral dan batubara yang melimpah yang dapat diandalkan pada sektor pertambangan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya. Namun belum semua pemanfaatan sumberdaya tersebut dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Masih banyak kegiatan pertambangan (khususnya komoditas emas) masih bersifat ilegal sehingga menimbulkan lebih banyak kerugian dan persoalan baik bagi daerah maupun bagi masyarakat sendiri dibandingkan manfaat yang dapat diperoleh darinya.

Daerah kehilangan pendapatan karena para penambang illegal ini yang lazim kegiatannya disebut pertambangan tanpa izin (PETI) tidak membayar pajak dan royalti. terjadi pemborosan sumberdaya mineral sementara lingkungan menjadi rusak dan tercemar karena cara penambangan dan pengolahan yang tidak mengikuti kaidah-kaidah good mining practices.

Adapun beberapa lokasi kegiatan pertambangan illegal (PETI) emas di Aceh meliputi:

1. Kabupaten Aceh Barat disepanjang aliran Sungai emas (placer)
2. Kabupaten Nagan Raya di sepanjang Krueng Kila, Beutong (pacer)
3. Kabupaten Aceh Jaya lokasi Gunung Ujeuen, Kecamatan Krueng Sabe (primer)
4. Kabupaten Pidie, di kecamatan Geumpang dan Mane (placer dan primer)
5. Kabupaten Aceh Selatan, kecamatan Manggamat (primer)
6. Kabupaten Aceh Tengah, kecamatan Lumut (primer)

Kegiatan PETI di Aceh telah ada sejak tahun 1930an. Bermula aktifitasnya di bantaran sungai Kr. Kila dan Kr. Cut Kabupaten Nagan Raya dan Kr. Woyla Kabupaten Aceh Barat. masyarakat mencoba mengambil emas dengan cara tradisional yaitu dengan cara

mendulang. Sejak saat itu kegiatan PETI mulai tumbuh dan berkembang di beberapa kabupaten lainnya di Aceh. Sejak tahun 2006 kegiatan PETI di Aceh sudah sangat marak dan meresahkan serta terkonsentrasi di Kabupaten Pidie. Kabupaten Aceh Jaya. Kabupaten Aceh selatan yang notabenenya memiliki kandungan emas yang cukup potensial untuk ditambang.

Lokasi PETI di Provinsi Aceh yang tersebar di beberapa kabupaten. secara umum terdapat dilahan kawasan hutan baik pada kawasan hutan lindung maupun kawasan hutan produksi dan lahan areal penggunaan lain (APL) milik masyarakat. Di beberapa tempat terdapat dalam wilayah yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Sebagian besar kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten/Kota di Aceh belum dapat ditertibkan dan diarahkan untuk memiliki izin dari pemerintah setempat. Berbagai usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota setempat belum juga dapat mengatasi kegiatan penambangan illegal tersebut diantaranya melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan, pengawasan dan penertiban serta penutupan kegiatan pertambangan untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan illegal tersebut.

Tabel 2.41
Kejadian Kecelakaan di Lokasi PETI

| No | Tanggal Kejadian | Lokasi Kejadian | Uraian Kejadian | Jumlah Korban |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20-Jan-14 | Desa Pulo Loh Lam Jeu, Kec. Geumpang Kab. Pidie | Kekurangan oksigen dalam lubang tambang pada kedalaman 17 meter | 3 (tiga) orang meninggal dunia |
| 2. | 03-Sep-18 | Desa Pulo Loh Kec. Geumpang | Kekurangan oksigen dalam lubang tambang pada kedalaman 17 meter | 3 (tiga) orang meninggal dunia |
| 3. | 21-Apr-19 | Desa Alue Baro Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan | Terhimpit batu di lubang penembangan pada kedalaman 100 meter | 1 (satu) orang meninggal dunia |
| 4. | 14-Mar-21 | Desa Simpang Dua Kec. Kluet Tengah Kemukiman Manggamat Kabupaten Aceh Selatan | Tertimbun oleh longsoran dalam lubang tambang | 2 (dua) orang meninggal dunia |
| 5. | 10-Jul-21 | Kec. Geumpang Desa Bangkeh Kab. Pidie | Tertimbun longsor batuan | 4 (empat) orang meninggal dunia |

*Sumber : Dinas ESDM Aceh,2025*

Beberapa opsi telah diwacanakan untuk mengatasi PETI di daerah ini telah dilakukan diantaranya adalah dengan melegalkan kegiatan PETI dan telah di lakukan di Lokasi Gunung Ujeun Kabupaten Aceh Jaya (telah adanya WPR yang diterbitkan Bupati Aceh Jaya). Bahkan Undang- Undang No.3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang No 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan Batubara, pada pasal 158 disampaikan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan

denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (serratus milyar rupiah). Selanjutnya Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Seruan Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh (FORKOPIMDA) Tanggal 5 Agustus 2014, namun demikian apakah pilihan untuk melegalkan PETI merupakan pilihan terbaik, masih perlu kajian lintas sektor yang lebih mendalam.

Kendala utama dalam melegalkan kegiatan pertambangan rakyat adalah aspek regulasi di bidang pertambangan diantaranya adalah belum tersedianya ruang wilayah pertambangan yang sampai dengan saat ini belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Diperlukan peningkatan pengelolaan usaha pertambangan. untuk itu Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota sudah mengusulkan Wilayah Pertambangan (WP) sebagai usulan dari Pemerintah/Kabupaten Kota kepada Pemerintah Pusat dan mendorong segera ditetapkannya wilayah pertambangan di beberapa daerah tempat berlangsungnya kegiatan PETI selama ini. agar PETI didorong menjadi Izin Prtambangan Rakyat (IPR) yang memenuhi Aspek legal. sehingga dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan rakyat segera dapat dieliminir melalui pembinaan dan pengawasan yang baik.

### B3. Pertambangan Mineral dan Batubara

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi dengan kekayaan sumber daya mineral dan batubara yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Diantaranya batubara, emas, bijih besi, Batu Gamping, Batu Lempung, Tras, Marmer, Andesit dan mineral lainnya. Potensi sektor mineral dan batubara di Aceh ini membuka peluang investasi berupa usaha pertambangan dan industri lainnya di sekitar tambang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan usaha pertambangan tersebut dilaksanakan berdasarkan Perizinan berusaha. Pada tahun 2024, tercatat 291 Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas mineral dan batubara yang tersebar di kabupaten/kota di Aceh. Diantaranya terdapat 210 IUP Operasi Produksi dan 81 IUP Eksplorasi (Tabel 2.42).

Tabel 2.42.
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi di Aceh
(per Tahun 2024)

| Jenis Komoditas | Jumlah IUP | | |
|---|---|---|---|
| | Eksplorasi | Operasi Produksi | Total |
| Batubara | 5 | 8 | 13 |
| Mineral Logam | 9 | 11 | 20 |
| Mineral Bukan Logam | 4 | 7 | 11 |
| Batuan | 63 | 184 | 247 |
| Jumlah | 81 | 210 | 291 |

*Sumber: Data Izin Usaha Pertambangan Dinas ESDM Aceh (2025)*

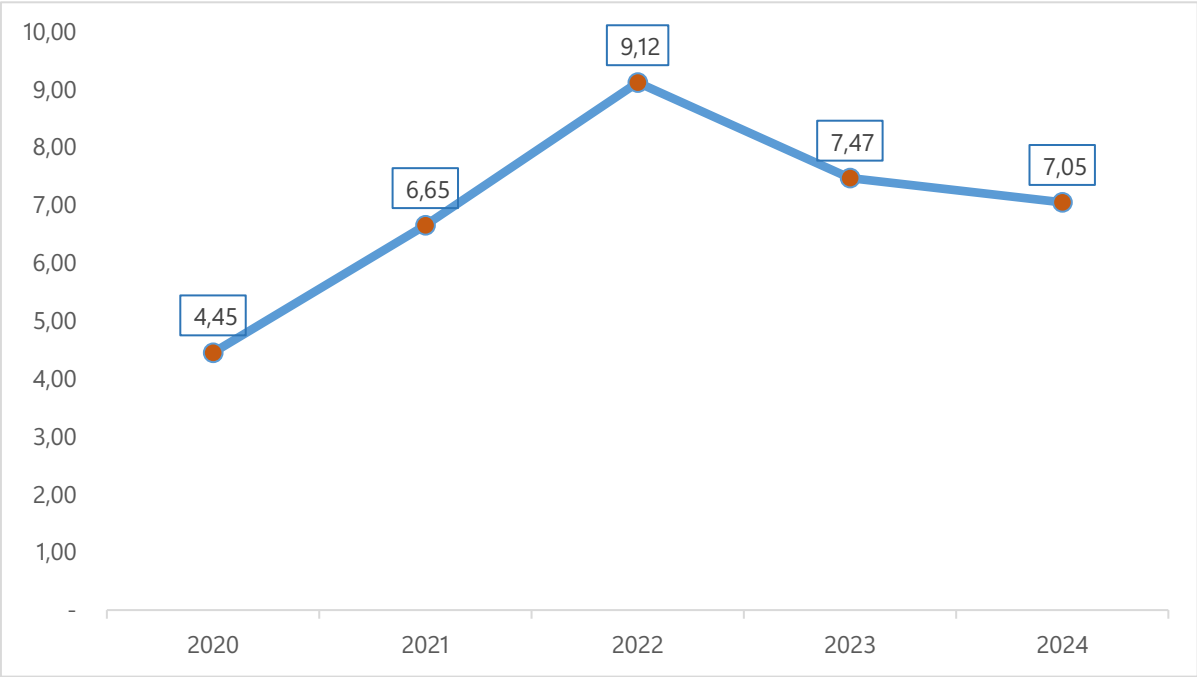
Usaha pertambangan yang telah berjalan di Aceh, tidak hanya memberikan dampak terhadap penerimaan negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh, namun juga dapat memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat sekitar seperti penyerapan tenaga kerja,

pembangunan/Pengembangan Masyarakat dan Wilayah, dan kemandirian ekonomi masyarakat Aceh. Dengan demikian, agar pemanfaatan sumber daya cadangan mineral dan batubara diperoleh secara maksimal semestinya dilaksanakan dengan mengedepankan tata kelola pertambangan yang profesional, menerapkan kaidah pertambangan yang baik serta berdampak positif bagi masyarakat Aceh

### B4. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2024 masih didominasi oleh besarnya kontribusi migas (subsektor pertambangan migas dan industri pengolahan migas). Sub sektor tertinggi berkontribusi yaitu sub sektor pertambangan minyak, gas dan panas bumi (3,68% atau Rp.8,94 Trilyun), diikuti sub sektor pertambangan batu bara dan lignit (1,76% atau Rp.4,27 Trilyun), sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya (1,38% atau Rp.3,35 Trilyun)serta pertambangan biji logam (0,24% atau Rp.577 Milyar). Adapun perkembangannya dapat dilihat pada Gambar 2.49.

Secara umum kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama tahun 2019-2024 menunjukkan peningkatan, tertinggi pada tahun 2022 sebesar 9,12 persen kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023-2024 masing-masing sebesar 7,47 persen dan 7,05 persen.

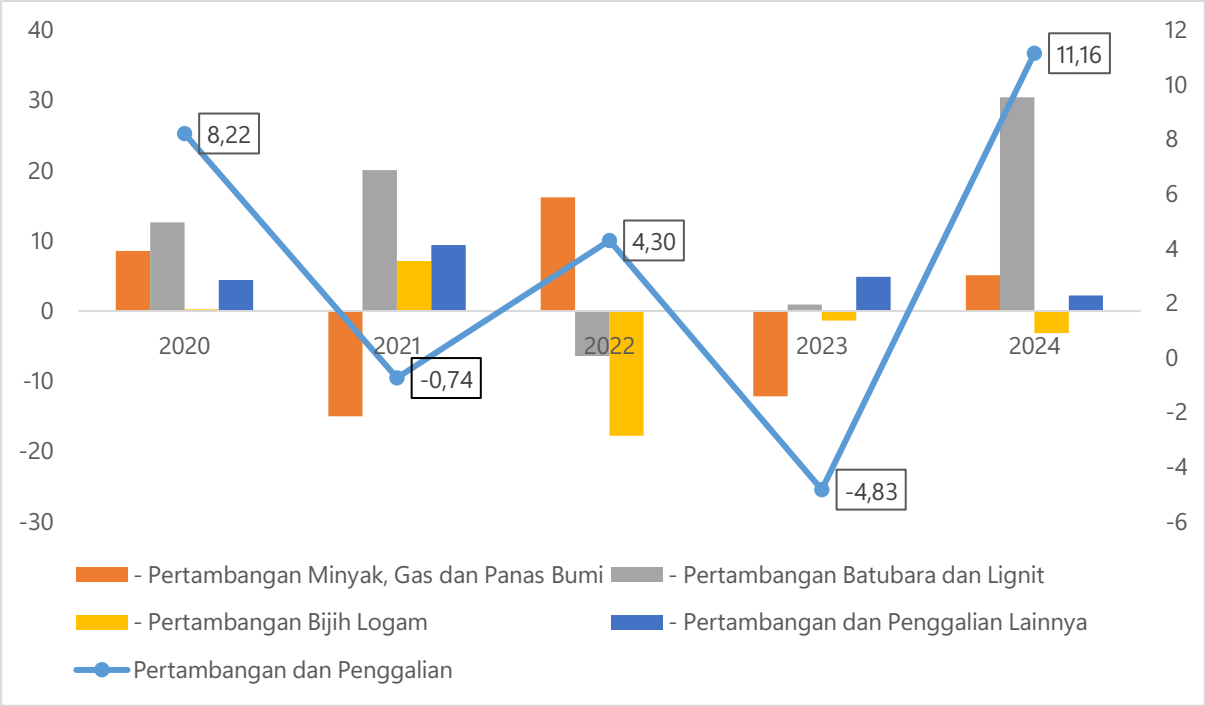



*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)*

Gambar 2.49. Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) di Provinsi Aceh Tahun 2020-2024

Selama 5 (lima) tahun terakhir, peranan sektor pertambangan dan penggalian naik dari 4,45 persen pada tahun 2020 menjadi 7,05 persen pada tahun 2024. Selama lima tahun terakhir dari tahun 2020 ke tahun 2024 peranan kategori pertambangan dan penggalian cenderung fluktuatif.

Namun, jika dilihat dari laju pertumbuhannya di tahun 2024, kategori pertambangan dan penggalian mengalami laju pertumbuhan yang signifikan sebesar 11,16 persen. Peningkatan ini didominasi oleh subkategori pertambangan batubara dan lignit yang tumbuh 30,45 persen, serta pertambangan minyak, gas, dan panas bumi yang tumbuh 5,10 persen sebagaimana yang tersaji pada Gambar 2.50.



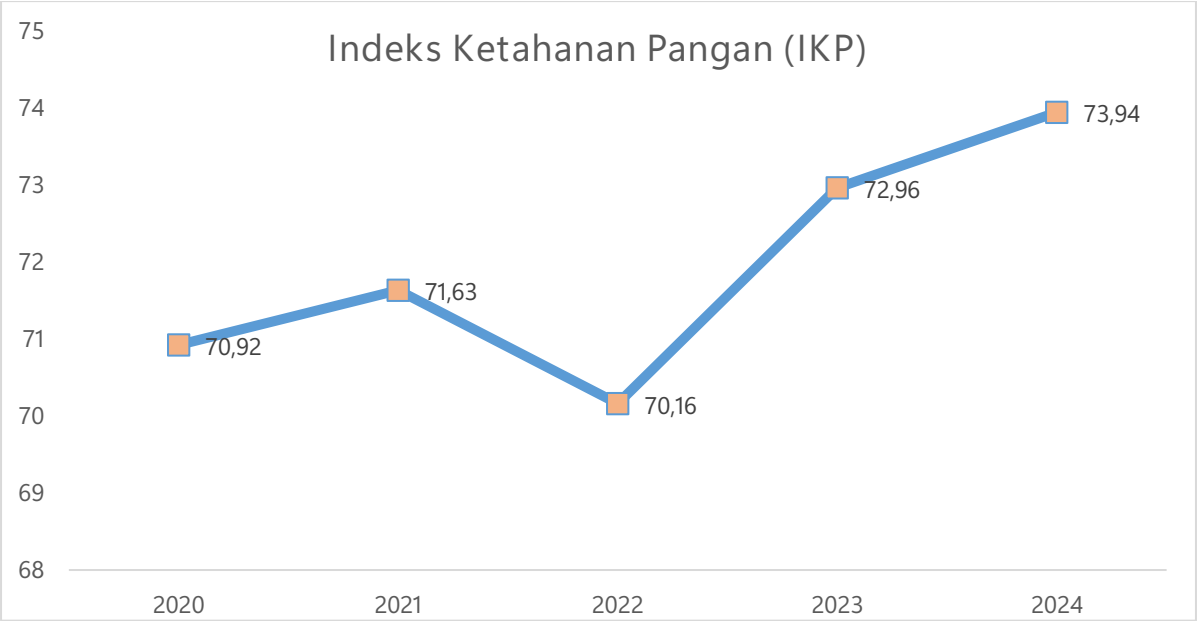

*Sumber: Badan Pusat Statistik 2025 (data diolah)*

Gambar 2.50. Pertumbuhan Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) di Provinsi Aceh Tahun 2020-2024

## C. Indikator Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang selalu akan menjadi isu krusial dan strategis baik di tingkat daerah, nasional, maupun dunia. Ketahanan pangan sangat penting bagi suatu daerah karena berbagai alasan, diantaranya: (1) menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh penduduk, (2) menjaga kesehatan dan produktivitas, dan (3) mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kesemua alasan tersebut akan berimplikasi positif dalam menjaga stabilitas sosial dan politik.

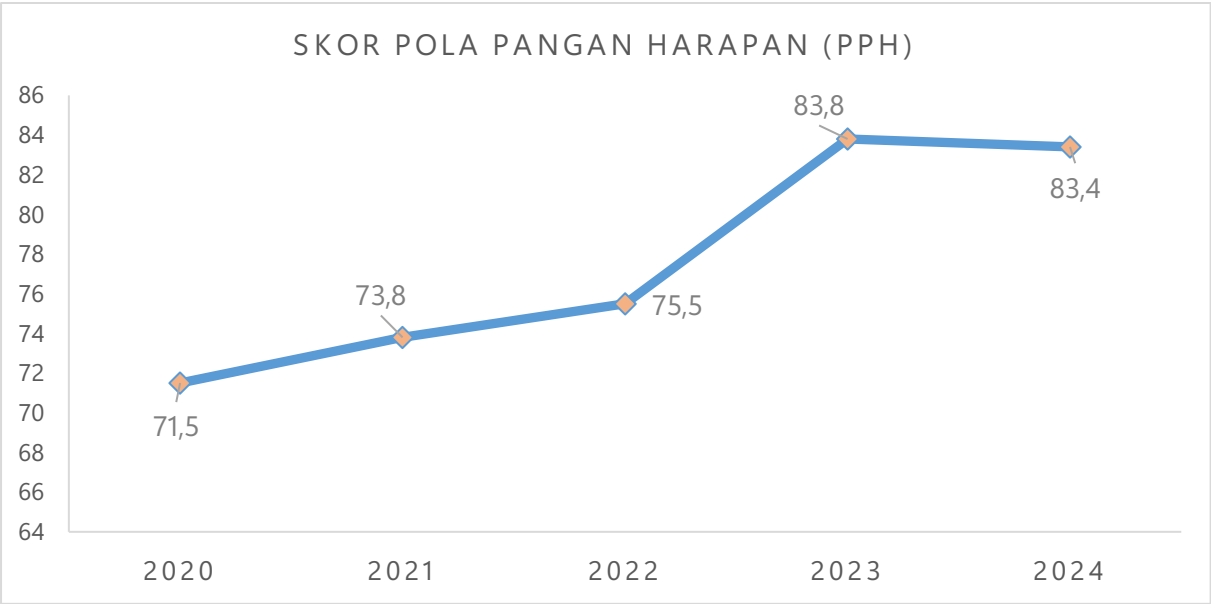
Ketahanan pangan suatu daerahj diukur dari capaian indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian ketahanan pangan, kinerja daerah, dan membantu menentukan prioritas pembangunan dan intervensi program. IKP Aceh dari 2020 s.d 2024 menunjukkan kondisi yang cenderung meningkat, kecuali pada tahun 2022 yang sempat menurun akibat Covid 19. Jika dilihat dari perkembangannya nilai, IKP Aceh mengalami kenaikan dari 70,92 pada tahun 2020 menjadi 73,94 pada tahun 2024. Capaian IKP Aceh tahun 2024 belum sesuai dengan target sebesar 75,59 , namun demikian kondisi ini telah mencerminkan kinerja pemerintahan yang cukup baik. Perkembangan IKP Aceh tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.51.




*Sumber: Dinas Pangan Aceh, 2025 (diolah)*

Gambar 2.51. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Aceh, Tahun 2020-2024

Pemenuhan kebutuhan pangan tidak hanya diperhatikan dari sisi kuantitas saja, namun juga harus mengedepankan kualitas pangan yang tercermin dari keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Konsumsi pangan yang beragam sangat penting karena tubuh memerlukan 45 jenis zat gizi yang dapat diperoleh dari berbagai jenis makanan dan minuman. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah baik Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.




*Sumber: Dinas Pangan Aceh, 2025 (diolah)*

Gambar 2.52. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Konsumsi Aceh, Tahun 2015-2019

Gambar 2.52 menyajikan perkembangan kondisi konsumsi pangan masyarakat Aceh selama 5 tahun terakhir. Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Sedangkan di tingkat keluarga dan individu, asupan makanan sesuai prinsip konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dapat diketahui dengan melakukan penilaian konsumsi pangan, melalui pendekatan penghitungan porsi.

Berdasarkan hasil analisis konsumsi Tahun 2023 PPH konsumsi Aceh belum mencapai nilai optimal, masih berada dibawah nilai PPH Ideal yaitu sebesar 100. PPH Konsumsi Tahun 2023 baru mencapai 83,8 atau masih kurang 16,2 skor dari PPH Konsumsi ideal. Sedangkan untuk tahun 2024 ini nilai PPH Konsumsi Aceh 83,4 (berdasarkan angka AKE 2.100 Kkal/Kap/Hari).

Dalam mencapai beberapa indikator pangan tersebut tidak terlepas dari beberapa peran prasarana dan sarana pangan berupa lumbung pangan di beberapa kabupaten/kota yang saat ini belum mampu dioptimalkan. Selain itu juga meskipun banyak daerah yang notabenenya merupakan daerah lumbung pangan namun beberapa desa yang mencakup di dalamnya masih dikategorikan sebagai kecamatan dan desa rawan pangan. Ini tercatat dari jumlah kecamatan-kecamatan rawan pangan di wilayah Provinsi Aceh yang masih mencapai 33 kecamatan pada tahun 2024, yaitu: sebanyak 2 kecamatan Prioritas 1, sebanyak 11 kecamatan prioritas 2, dan sisanya 20 kecamatan prioritas 3.

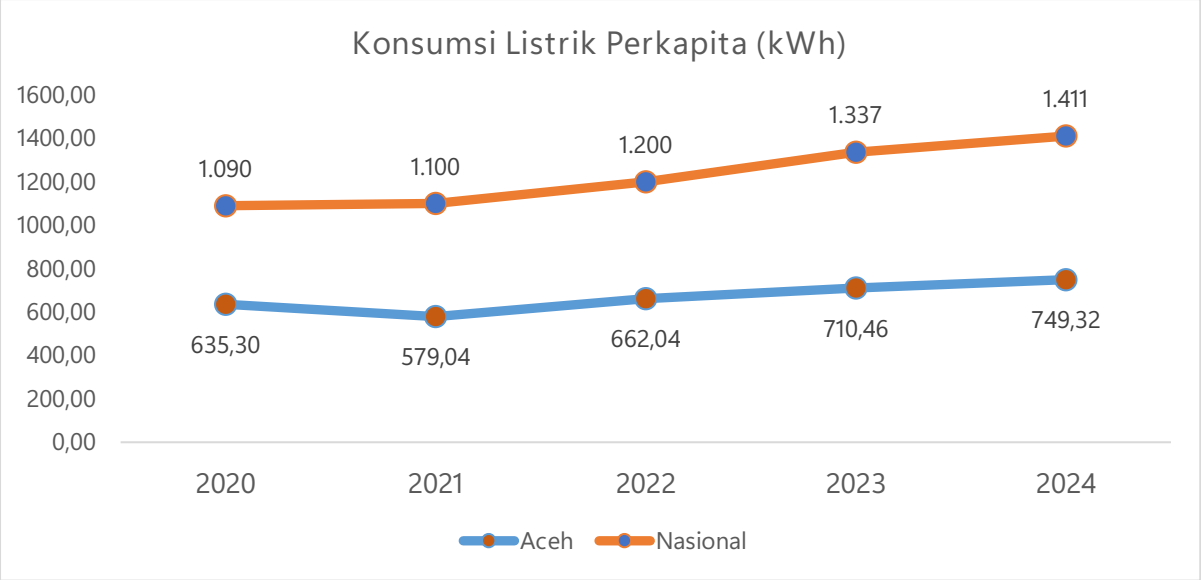
Penanganan daerah rawan pangan tidak sesuai dengan target, hal ini terlihat dari jumlah daerah rawan pangan prioritas 1 sd 3 yang awalnya berjumlah 29 kecamatan, kini bertambah menjadi 33 kecamatan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor kompleks yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya kerawanan pangan meliputi: (1) Resiko bencana alam, (2) Gagal panen, (3) Ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya seperti lahan, air, dan teknologi, (4) Kenaikan harga pangan, dan (5) Rendahnya pendapatan masyarakat.

D. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

E. Konsumsi Listrik Perkapita

Energi Listrik merupakan salah satu sumber energi yang berperan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari, baik untuk kegiatan industri, komersial, pemerintah maupun rumah tangga. Dengan adanya Listrik maka segala proses yang berhubungan dengan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan cepat, efektif dann efisien.

Konsumsi listrik perkapita merupakan perbandingan total jumlah energi listrik yang digunakan, dibagi dengan jumlah penduduk dalam periode satu tahun. Adapun perkembangan konsumsi listrik perkapita Aceh dan Nasional selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.53.




*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Gambar 2.53. Konsumsi Listrik Perkapita (kWh), Tahun 2020-2024

Konsumsi listrik perkapita Aceh menunjukkkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2021. Listrik adalah sektor penggerak utama pembangunan yang dapat mendorong produktivitas dan aktivitas masyarakat. Namun kondisi covid yang mewabah di Aceh sejak tahun 2020, masih membawa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi hingga sektor listrik dan penggunaannya karena adanya pembatasan aktivitas dimasa itu.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi listrik per kapita meliputi: jumlah penduduk, aktivitas ekonomi penduduk, permintaan pemanas serta keberadaan industri yang membutuhkan banyak energi. Peningkatan konsumsi listrik per kapita dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan konsumsi listrik, baik di Aceh maupun nasional menunjukkan nilai yang positif. Namun, pertumbuhan ini mulai mengalami perlambatan pada tahun 2024. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat, pergeseran pola hidup, belum optimalnya penerapan efisiensi energi, belum maksimalnya rasio elektrifikasi, bahkan perlambatan ekonomi dunia.

### 2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

#### A. Indek kualitas lingkungan hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan suatu indeks untuk mengidentifikasi kualitas lingkungan suatu kawasan dan membandingkan kawasan-kawasan dengan tingkat kualitas lingkungan yang berbeda. Di Indonesia, perhitungan IKLH mengalami beberapa kali revisi sejak dua dekade belakangan ini, untuk tahun 2021 perhitungan semua komponen IKLH meliputi nilai Indeks Kualitas Air (IKA), nilai Indeks Kualitas Udara (IKU), nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Perhitungan ini berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Dalam peraturan tersebut, kontribusi IKA, IKU, IKL, dan IKA masing-masing sebesar 34 persen, 42,8 persen, 13,3 persen, dan 9,9 persen. Untuk tingkat kabupaten/ kota, nilai IKLH dihitung berdasarkan jumlah dari nilai IKA (37,6%), IKU (40,5%), dan IKL (21,9) tanpa kontribusi IKAL.

Nilai IKLH Provinsi Aceh tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan nilai pada tahun 2023 sebesar 0,93 poin, kenaikan ini sangat signifikan dan salah satunya disebabkan adanya peningkatan nilai indeks dari kabupatan/kota khususnya nilai IKA, IKU dan IKAL. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, nilai IKA mengalami kenaikan sebesar 6,27 poin, nilai IKU 0,99 poin, nilai IKAL 5,40 poin.

Tabel 2.43.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, IKAL) Tahun 2020-2024

| Indeks | Tahun | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| IKA | 78,66 | 57,14 | 60,41 | 61,30 | 67,57 | |
| IKU | 89,48 | 89,63 | 90,62 | 90,94 | 91,93 | |
| IKL | 60,59 | 76,52 | 76,24 | 76,51 | 60,29 | |
| IKAL | 59,41 | 76,51 | 89,2 | 86,75 | 92,15 | |
| IKLH | 78,99 | 75,54 | 78,29 | 78,53 | 79,46 | |

*Sumber : DLHK Aceh, Tahun 2025 (90 ≤ IKLH ≤ 100 : sangat baik; 70 ≤ IKLH < 90 : Baik; 50 ≤ IKLH < 70: Sedang; 25 ≤ IKLH < 50 ; kurang; 0 ≤ IKLH < 25 ; sangat kurang)*

B. Rumah Tangga dengan sanitasi aman

Kondisi pelayanan akses sanitasi layak juga terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan demikian akses sanitasi layak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 5,69 persen. Sektor sanitasi peningkatan capaian terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang lebih baik. Persentase Rumah Tangga terhadap akses sanitasi layak menurut Kabupaten/Kota sejak tahun 2020 sampai dengan 2024, Kota Banda Aceh masih mendominasi tingkat Rumah Tangga dengan Akses terhadap sanitasi layak tertinggi dan yang terendah adalah Kabupaten Gayo Lues. Secara rinci Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2020–2024 disajikan pada Tabel 2.44.

Tabel 2.44.
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2020–2024

| Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Simeulue | 66,51 | 71,56 | 70,21 | 72,67 | 76,51 |
| Aceh Singkil | 64,22 | 69,56 | 78,92 | 67,93 | 63,22 |
| Aceh Selatan | 68,78 | 62,55 | 70,83 | 74,54 | 77,96 |
| Aceh Tenggara | 54,04 | 62,71 | 62,88 | 65,08 | 64,01 |
| Aceh Timur | 74,65 | 66,75 | 69,06 | 70,01 | 73,59 |

| Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Aceh Tengah | 81,26 | 90,58 | 89,69 | 92,61 | 86,34 |
| Aceh Barat | 83,45 | 89,60 | 88,39 | 90,16 | 91,09 |
| Aceh Besar | 87,51 | 87,40 | 83,49 | 89,07 | 90,30 |
| Pidie | 63,54 | 54,10 | 54,68 | 60,36 | 63,88 |
| Bireuen | 84,16 | 81,89 | 85,39 | 84,96 | 88,26 |
| Aceh Utara | 75,83 | 79,97 | 78,92 | 77,95 | 80,63 |
| Aceh Barat Daya | 50,27 | 65,71 | 65,94 | 64,69 | 69,39 |
| Gayo Lues | 43,32 | 47,63 | 46,33 | 46,05 | 49,79 |
| Aceh Tamiang | 84,61 | 87,45 | 82,74 | 78,61 | 85,93 |
| Nagan raya | 80,35 | 74,86 | 79,97 | 82,72 | 87,32 |
| Aceh Jaya | 83,27 | 81,60 | 78,05 | 78,83 | 82,31 |
| Bener Meriah | 84,12 | 86,69 | 81,56 | 87,04 | 88,05 |
| Pidie Jaya | 66,39 | 74,30 | 73,49 | 78,07 | 80,82 |
| Banda Aceh | 99,41 | 99,88 | 96,88 | 99,91 | 99,39 |
| Sabang | 89,20 | 92,25 | 89,52 | 93,96 | 95,90 |
| Langsa | 91,57 | 91,81 | 91,92 | 92,92 | 94,30 |
| Lhokseumawe | 88,07 | 93,10 | 90,27 | 90,36 | 93,71 |
| Subulussalam | 73,54 | 69,71 | 72,46 | 63,40 | 61,57 |
| Aceh | 77,06 | 77,55 | 77,48 | 78,85 | 81,10 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025*

## C. Timbulan sampah terolah

Permasalahan sampah di Aceh sudah memasuki tahap darurat. Hal ini terlihat dari jumlah timbulan sampah yang besar dengan jenis sampah yang beragam yang disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah dari rumah/sumber. Secara umum pola penanganan sampah di Aceh hanya melalui tahapan paling sederhana, yaitu kumpul, angkut, dan buang. Pola pengelolaan sampah tersebut berjalan karena dilandasi oleh *mindset* bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak berguna dan harus dibuang. Pendekatannya melalui penyelesaian di tempat pemrosesan akhir (*end of pipe*), sehingga menimbulkan permasalahan di TPA.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir.

Penanganan sampah di Aceh masih tergolong rendah dengan persentase sampah terkelola pada tahun 2024 sebesar 36,49 persen tidak termasuk TPA Open Dumping sebesar 19,6 persen, dikarenakan kebijakan pusat tidak lagi memasukkan volume TPA Open Dumping ke dalam volume sampah terkelola berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Data capaian pengelolaan sampah di Aceh dari tahun 2021-2024 tersaji pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45.
Persentase Capaian Pengelolaan Sampah di Provinsi Aceh Tahun 2020 - 2024

| No | Kabupaten/ Kota | 2020 (Ton/Tahun) | | 2021 (Ton/Tahun) | | 2022 (Ton/Tahun) | | 2023 (Ton/Tahun) | | 2024 (Ton/Tahun) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R | Open Dumping (OD) |
| 1 | Sabang | 8.064 | 5.621 | 8.226 | 6.123 | 8.390 | 6.308,37 | 8.558 | 5.999,14 | 8.729 | 4.657,40 | - |
| 2 | Banda Aceh | 67.408 | 86.870 | 67.913 | 80.256 | 68.423 | 90.190,75 | 68.936 | 91.955,35 | 69.453 | 91.977,54 | - |
| 3 | Aceh Besar | 77.248 | 9.198 | 78.793 | 20.486 | 80.369 | 26.811,22 | 81.976 | 36.056,65 | 83.616 | 37.944,94 | - |
| 4 | Pidie | 66.551 | 3.430 | 67.723 | 22.740 | 68.914 | 23.800 | 70.127 | 25.151,29 | 71.362 | 22.239,89 | - |
| 5 | Pidie jaya | 27.957 | 5.132 | 28.488 | 6.583 | 29.029 | 7.131,73 | 29.581 | 5.475,00 | 30.143 | OD | 6.022,50 |
| 6 | Bireuen | 24.012 | 17.885 | 24.456 | 18.178 | 24.909 | 18.685,26 | 25.370 | 32.743,35 | 25.839 | 10.113,35 | 27.615,90 |
| 7 | Aceh Utara | - | 46.138 | 109.966 | 49.176 | 112.165 | 45.553 | 114.409 | 18.262,78 | 116.697 | 20.422,89 | - |
| 8 | Lhokseumawe | 33.729 | 32.485 | 34.403 | 25.459 | 35.091 | 31.436,79 | 35.793 | 31.136,78 | 36.509 | 1.660,75 | 28.470,00 |
| 9 | Aceh Timur | 49.350 | 30.114 | 50.337 | 27.250 | 51.344 | 21.160,82 | 52.371 | 23.792,35 | 53.419 | 29.692,49 | - |
| 10 | Langsa | 36.349 | 34.624 | 37.076 | 27.436 | 37.818 | 34.470,24 | 38.574 | 30.191,04 | 39.345 | 28.981,67 | - |
| 11 | Aceh Tamiang | - | 4.825 | 37.050 | 17.285 | 37.791 | 20.075 | 38.547 | 19.698,70 | 39.318 | 12.144,22 | - |
| 12 | Bener Meriah | 23.312 | 17.520 | 23.358 | 16.884 | 23.405 | 9.411,47 | 23.452 | 10.605,22 | 23.499 | 14.618,61 | - |
| 13 | Aceh Tengah | 36.145 | 31.770 | 36.330 | 20.523 | 36.515 | 27.588,53 | 36.701 | 23.723,18 | 36.888 | 1.095,00 | 22.995,00 |
| 14 | Gayo Lues | 13.983 | 12.012 | 14.221 | 13.324 | 14.462 | 9.684,09 | 14.708 | 9.179,74 | 14.958 | OD | 10.950,00 |
| 15 | Aceh Tenggara | 31.155 | 7.227 | 31.519 | 13.066 | 31.888 | 10.406,88 | 32.261 | 7.252,55 | 32.638 | 390,55 | 8.048,25 |
| 16 | Aceh Jaya | 17.311 | 10.782 | 17.657 | 19.068 | 18.010 | 17.231,29 | 18.370 | 12.900,40 | 18.738 | 322,60 | 11.639,85 |
| 17 | Aceh Barat | 38.462 | 34.310 | 39.281 | 28.141 | 40.118 | 32.017,49 | 40.972 | 33.825,52 | 41.845 | 25.384,77 | - |
| 18 | Nagan Raya | 24.034 | 325 | 24.514 | 20.861 | 25.005 | 11.845,16 | 25.505 | 16.758,68 | 26.015 | 17.422,27 | - |
| 19 | Aceh Barat Daya | - | 5.475 | 28.191 | 6.957 | 28.533 | 8.558,48 | 28.910 | 6.961,82 | 29.286 | 2.188,92 | 6.570,00 |
| 20 | Aceh Selatan | 35.714 | 22.754 | 36.428 | 12.957 | 37.156 | 12.820,35 | 37.900 | 12.888,25 | 38.658 | 7,66 | 12.775,00 |
| 21 | Subulussalam | - | 12.775 | 13.623 | 10.081 | 13.868 | 13.529,97 | 14.117 | 14.654,75 | 14.371 | 91,25 | 10.950,00 |
| 22 | Aceh Singkil | - | 2.920 | 18.884 | 1.974 | 19.261 | 1.866,61 | 19.647 | 3.392,68 | 20.039 | 1.248,20 | 4.197,50 |
| 23 | Simeulue | 13.715 | 13.505 | 13.989 | 8.352 | 14.269 | 7.132,65 | 14.555 | 6.808,45 | 14.846 | 767,70 | 6.577,30 |
| **Jumlah** | | 624.499 | 447.697 | 842.426 | 473.160 | 856.733 | 487.716,15 | 871.340 | 479.413,67 | 886.211 | 323.372,67 | 156.811,30 |
| **Persentase Sampah Terkelola (%)** | | **71,69** | | **56,17** | | **56,93** | | **55,02** | | **36,49** | | |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2025*

Pengolahan sampah adalah serangkaian tindakan yang sistematis dan menyeluruh dalam bentuk merubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Jumlah sampah terolah di Aceh berdasarkan data pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Tahun 2024 Periode 2 sebesar 6.648,54 ton/tahun dari total timbulan sampah Aceh Tahun 2024 sebesar 931.689,37 ton/tahun. Adapun data sampah terolah di Bank Sampah, TPS3R dan Rumah Kompos yang berada dalam wilayah Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46.
Persentase Jumlah Sampah Terolah di Provinsi Aceh Tahun 2024

| No | Kabupaten/Kota | Persentase Sampah Terolah tahun 2024 (Ton/Tahun) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BSU | BSI | TPS3R | Rumah Kompos |
| 1 | Kota Sabang | | | | |
| 2 | Kota Banda Aceh | 49,81 | 1.731,98 | 53,19 | 737,33 |
| 3 | Kabupaten Aceh Besar | 10,92 | | 35,99 | |
| 4 | Kabupaten Pidie | | | | |
| 5 | Kabupaten Pidie jaya | | | | |
| 6 | Kabupaten Bireuen | | 146,00 | 74,83 | |
| 7 | Kabupaten Aceh Utara | | | | |
| 8 | Kota Lhokseumawe | | 1.460,00 | | |
| 9 | Kabupaten Aceh Timur | | | | |
| 10 | Kota Langsa | 6,48 | 23,73 | 24,82 | 332,15 |
| 11 | Kabupaten Aceh Tamiang | | 2.438,20 | | |
| 12 | Kabupaten Bener Meriah | | 730,00 | | |
| 13 | Kabupaten Aceh Tengah | | | | |
| 14 | Kabupaten Gayo Lues | | | | |
| 15 | Kabupaten Aceh Tenggara | | | | |
| 16 | Kabupaten Aceh Jaya | | | | |
| 17 | Kabupaten Aceh Barat | | | | |
| 18 | Kabupaten Nagan Raya | | 9,13 | 40,15 | |
| 19 | Kabupaten Aceh Barat Daya | | | | |
| 20 | Kabupaten Aceh Selatan | | | | |
| 21 | Kota Subulussalam | | | | |
| 22 | Kabupaten Aceh Singkil | 7,20 | 109,50 | | 109,50 |
| 23 | Kabupaten Simeulue | 4,14 | | | |
| umlah | | 78,55 | 6.648,54 | 228,98 | 1.178,98 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2025*

D. Proporsi Rumah Tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah

Persentase cakupan layanan penanganan sampah berdasarkan jumlah desa terlayani sebesar 27,52 persen, dimana dari total desa/gampong yang ada di Aceh 6.496 desa/gampong hanya sekitar 1.788 desa/gampong yang terlayani oleh armada pegangkutan sampah. Rendahnya persentase penanganan sampah disebabkan oleh ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum memadai dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga secara baik. Hal tersebut sangat diperanguhi oleh ketersediaan anggaran untuk pengelolaan persampahan. Data Pengelolaan Sampah di Aceh termasuk cakupan area pelayanan sampah Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3. di bawah ini

## Tabel 2.47.
## Cakupan Area Pelayanan Sampah di Provinsi Aceh & Nilai IKPS Aceh Tahun 2024

| No. | Kab/Kota | Potensi Timbulan Sampah (Ton/Thn) | Realisasi Timbulan Sampah (Ton/Thn) | Cakupan Area Pelayanan Sampah | | | | | Pengurangan Sampah | | Penanganan Sampah | | TOTAL SAMPAH TERKELOLA (TON/THN) | TPA OPEN DUMPING (TON/THN) | TERBUANG KE LINGKUNGAN (TON/THN) | NILAI IKPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jlh Kec | Jlh Kec. Terlayani | Jlh Desa | Jlh Desa Terlayani | % | Ton/Thn | % | Ton/Thn | (%) | | | | |
| 1 | Banda Aceh | 98.076 | 94.679,61 | 9 | 9 | 90 | 90 | 100,00 | 15.501,03 | 16,37 | 76.476,51 | 80,77 | 91.977,54 | - | 2.702,07 | 60,50 |
| 2 | Sabang | 8.729 | 6.354,94 | 3 | 3 | 18 | 16 | 88,89 | - | 0,00 | 4.657,40 | 73,29 | 4.657,40 | - | 1.697,54 | 39,10 |
| 3 | Lhokseumawe | 36.509 | 36.571,41 | 4 | 4 | 68 | 45 | 66,18 | 1.660,7500 | 4,54 | - | 0,00 | 1.660,75 | 28.470,00 | 6.440,66 | 43,00 |
| 4 | Langsa | 39.345 | 35.538,23 | 5 | 5 | 66 | 22 | 33,33 | 3.210,12 | 9,03 | 25.771,55 | 72,52 | 28.981,67 | - | 6.556,56 | 54,60 |
| 5 | Subulussalam | 14.371 | 17.843,03 | 5 | 2 | 82 | 12 | 14,63 | 91,25 | 0,51 | - | 0,00 | 91,25 | 10.950,00 | 6.801,78 | 23,20 |
| 6 | Aceh Besar | 63.524 | 54.434,93 | 23 | 23 | 604 | 217 | 35,93 | 1.343,47 | 2,47 | 36.601,47 | 67,24 | 37.944,94 | - | 16.489,99 | 46,80 |
| 7 | Pidie | 71.362 | 66.071,86 | 23 | 13 | 730 | 69 | 9,45 | 7.806,88 | 11,82 | 14.433,01 | 21,84 | 22.239,89 | - | 43.831,97 | 33,20 |
| 8 | Pidie Jaya | 30.716 | 30.143,46 | 8 | 8 | 222 | 65 | 29,28 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 6.022,50 | 24.120,96 | 29,20 |
| 9 | Bireuen | 25.839 | 59.046,49 | 17 | 15 | 609 | 67 | 11,00 | 10.113,35 | 17,13 | - | 0,00 | 10.113,35 | 27.615,90 | 21.317,24 | 56,20 |
| 10 | Aceh Utara | 116.697 | 112.171,80 | 27 | 25 | 852 | 105 | 12,32 | 2.355,39 | 2,10 | 18.067,50 | 16,11 | 20.422,89 | - | 92.848,91 | 36,00 |
| 11 | Aceh Timur | 53.419 | 67.363,09 | 24 | 24 | 513 | 448 | 87,33 | 1.066,27 | 1,58 | 28.626,22 | 42,50 | 29.692,49 | - | 37.670,60 | 51,40 |
| 12 | Aceh Tamiang | 39.318 | 45.127,58 | 12 | 11 | 213 | 57 | 26,76 | 2.526,47 | 5,60 | 9.617,75 | 21,31 | 12.144,22 | - | 32.983,37 | 20,70 |
| 13 | Bener Meriah | 23.499 | 23.371,68 | 10 | 4 | 232 | 33 | 14,22 | 18,61 | 0,08 | 14.600,00 | 62,47 | 14.618,61 | - | 8.753,08 | 59,50 |
| 14 | Aceh Tengah | 36.888 | 41.273,39 | 14 | 5 | 295 | 84 | 28,47 | 1.095,00 | 2,65 | - | 0,00 | 1.095,00 | 22.995,00 | 17.183,39 | 30,40 |
| 15 | Gayo Lues | 14.958 | 15.308,98 | 11 | 9 | 136 | 55 | 40,44 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 10.950,00 | 4.358,98 | 34,20 |
| 16 | Aceh Tenggara | 32.638 | 54.634,66 | 16 | 14 | 385 | 134 | 34,81 | 25,55 | 0,05 | 365,00 | 0,67 | 390,55 | 8.048,25 | 46.195,86 | 32,10 |
| 17 | Aceh Jaya | 18.738 | 18.373,01 | 9 | 5 | 172 | 30 | 17,44 | 322,60 | 1,76 | - | 0,00 | 322,60 | 11.639,85 | 6.410,50 | 35,20 |
| 18 | Aceh Barat | 41.845 | 37.432,21 | 12 | 8 | 321 | 105 | 32,71 | 1.656,12 | 4,42 | 23.728,65 | 63,39 | 25.384,77 | - | 12.047,44 | 40,90 |
| 19 | Nagan Raya | 26.015 | 25.763,31 | 10 | 8 | 222 | 56 | 25,23 | 4.479,37 | 17,39 | 12.942,90 | 50,24 | 17.422,27 | - | 8.341,04 | 64,00 |
| 20 | Aceh Barat Daya | 29.286 | 29.210,59 | 9 | 8 | 152 | 34 | 22,37 | 2.188,92 | 7,49 | - | 0,00 | 2.188,92 | 6.570,00 | 20.451,68 | 45,10 |
| 21 | Aceh Selatan | 38.658 | 34.963,35 | 18 | 4 | 260 | 15 | 5,77 | 7,66 | 0,02 | - | 0,00 | 7,66 | 12.775,00 | 22.180,69 | 36,60 |
| 22 | Aceh Singkil | 20.039 | 20.039,08 | 11 | 5 | 116 | 11 | 9,48 | 1.248,20 | 6,23 | - | 0,00 | 1.248,20 | 4.197,50 | 14.593,38 | 24,30 |
| 23 | Simeulue | 14.846 | 16.673,93 | 10 | 4 | 138 | 18 | 13,04 | 767,70 | 4,60 | - | 0,00 | 767,70 | 6.577,30 | 9.328,93 | 42,30 |
| Total Cakupan Area Pelayanan Sampah | | | | | | 6.496 | 1.788 | 27,52 | | | | | | | Nilai IKPS Aceh | 40,80 |

2.1.1.6. Resilensi terhadap bencana dan perubahan iklim

A. Penurunan intensitas Emisi GRK

Aceh, seperti banyak wilayah lain di Indonesia, menghadapi dampak buruk perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut, peningkatan suhu, dan perubahan pola curah hujan. Perubahan-perubahan ini mempunyai dampak langsung terhadap lingkungan hidup, perekonomian, dan masyarakat di Aceh. Perubahan iklim dipengaruhi oleh peningkatan emisi Gas Rumah Kaca berbagai aktivitas yang dilakukan dari berbagai sektor. Hal ini menjadi dasar pentingnya melakukan penilaian dan mitigasi emisi gas rumah kaca sebagai upaya untuk menurunkan atau memperkecil dampak yang ditimbulkan.

Informasi mengenai pencapaian penurunan emisi GRK dari kegiatan mitigasi perubahan iklim diperoleh dari kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca. Kebijakan pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 98 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) nomor 73 tahun 2017. Kedua peraturan ini menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah sub-nasional, termasuk provinsi, kabupaten, dan kota, dalam menyusun inventarisasi GRK nasional. Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) Tingkat Provinsi merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi untuk menyediakan informasi secara berkala mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon pada tingkat Provinsi dengan kolaborasi kolektifitas data dari lintas institusi dan Kabupaten Kota.

Data emisi karbon dioksida ($CO_2$) tahun 2023 dari lima sektor di Aceh menunjukkan gambaran yang beragam dalam kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Dari data ini, sektor Energi memiliki emisi terbesar dengan total 14.150 Gg $CO_2$ eq, yang menunjukkan penggunaan energi sebagai sumber utama emisi di wilayah tersebut. Diikuti oleh sektor Pertanian dan Industri Proses dan Penggunaan Produk (IPPU) masing-masing dengan emisi 2.535 Gg $CO_2$ eq dan 1.581 Gg $CO_2$ eq. sektor limbah menyumbang 1.208 Gg $CO_2e$. Sektor kehutanan di Aceh justru berperan sebagai penyerap karbon dengan nilai -9.504 Gg $CO_2e$, yang menunjukkan bahwa kawasan hutan di wilayah ini mampu menyerap lebih banyak karbon dibandingkan yang dilepaskan.

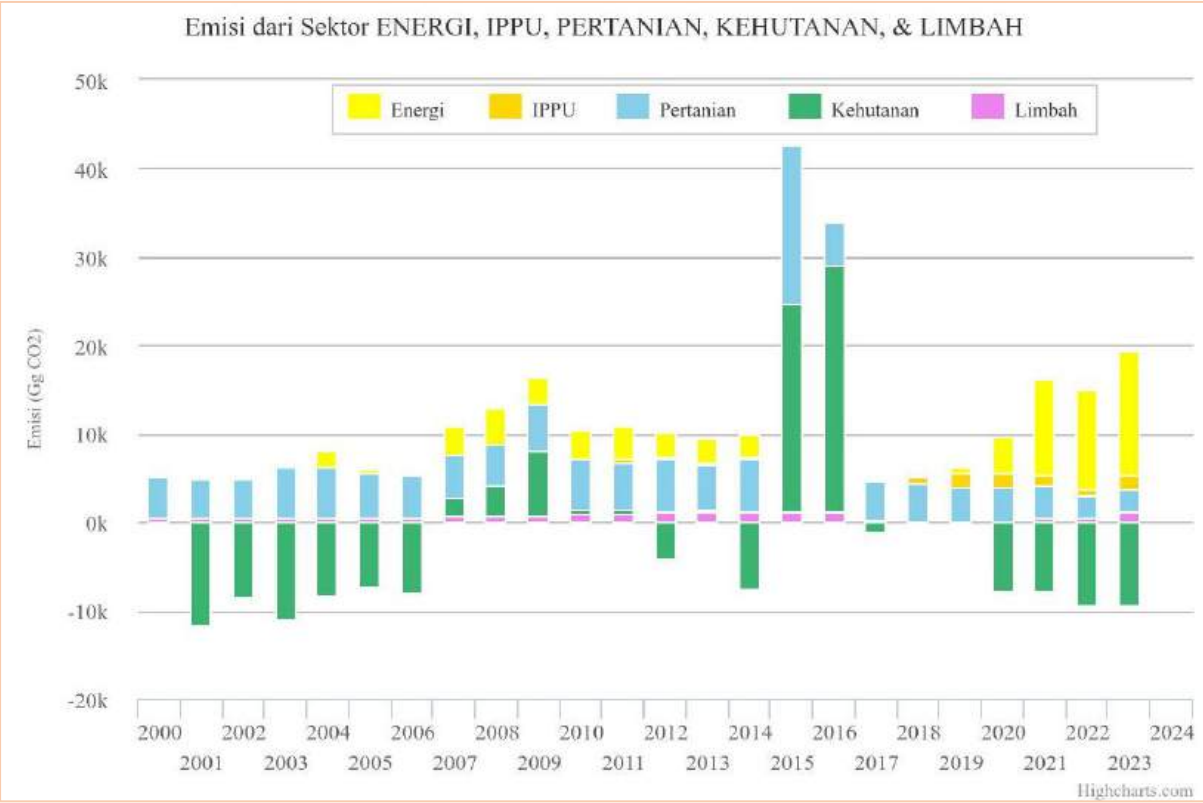
Pada sektor energi, yang menyumbang emisi tertinggi berasal dari kegiatan pembakaran bahan bakar, khususnya pada subsektor permukiman dan perkantoran, yang menyumbang emisi $CO_2$ sebesar 8.216,61 Gg dengan total emisi setara $CO_2$ mencapai 8.245,32 Gg. Pada sektor IPPU, kategori industri mineral merupakan penyumbang emisi terbesar dengan total emisi sebesar 1,304 Gg $CO_2$. Pada sektor kehutanan, subkategori Forest Remaining Forest berkontribusi signifikan terhadap penyerapan karbon, dengan jumlah penyerapan sebesar -18.387,87 Gg $CO_2$. Sumber emisi terbesar dalam sektor pertanian berasal dari budidaya padi, khususnya emisi CH4 tahunan yang dihasilkan dari aktivitas tersebut dengan jumlah 973,14 Gg $CO_2$ eq. Sumber emisi terbesar dari sektor limbah adalah

limbah domestik, khususnya dari pengolahan air limbah domestik yang menghasilkan 403,48 Gg $CO_2$ eq. Data Emisi Sektor Energi, IPPU, Pertanian, Kehutanan, dan Limbah Aceh disajikan pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48.
Data Emisi Sektor Energi, IPPU, Pertanian, Kehutanan, dan Limbah Aceh
(data termutakhir)

| No | Item | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Energi | 750 | 4.034 | 10.855 | 11.197 | 14.140 |
| 2 | IPPU | 1.494 | 1.717 | 1.069 | 842 | 1.581 |
| 3 | Pertanian | 3.922 | 3.852 | 3.584 | 2.380 | 2.535 |
| 4 | Kehutanan | 29 | -7.870 | 7.828 | -9.454 | -9.504 |
| 5 | Limbah | 64 | 49 | 582 | 571 | 1.208 |
| | Total Emisi | 6.259 | 1.782 | 8.262 | 5.535 | 9.959 |

*Sumber : SIGN SMART KLHK RI, 2025*




*Sumber: DLHK, 2025*

Gambar 2.54. Emisi dari Sektor Energi, IPPU, Pertanian, Kehutanan, dan Limbah

## B. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat atau kategori risiko bencana di Indonesia, yaitu: kategori rendah (<36), sedang (36-144) dan tinggi (>144). Data tahun 2024, menunjukkan IRB Provinsi Aceh Tahun 2024

memiliki tingkat risiko bencana tinggi mencapai 144,29. Sebaran IRB di Provinsi Aceh disajikan dalam Tabel 2.49.

Tabel 2.49.
Indek Risiko Bencana Provinsi Aceh Tahun 2020-2024

| No. | Kabupaten/Kota | Indek Risiko Bencana (IRB) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Simeulue | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 171,20 | 162,00 |
| 2 | Aceh Singkil | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 118,31 | 178,00 |
| 3 | Aceh Selatan | 171,20 | 171,20 | 171,20 | 164,56 | 171,20 |
| 4 | Aceh Tenggara | 127,23 | 120,03 | 121,43 | 118,95 | 112,89 |
| 5 | Aceh Timur | 176,05 | 166,74 | 173,00 | 185,57 | 155,31 |
| 6 | Aceh Tengah | 124,80 | 124,80 | 121,46 | 202,01 | 116,18 |
| 7 | Aceh Barat | 189,04 | 179,15 | 179,15 | 159,02 | 173,76 |
| 8 | Aceh Besar | 211,20 | 209,78 | 207,78 | 165,86 | 195,61 |
| 9 | Pidie | 163,20 | 163,20 | 163,15 | 162,00 | 151,00 |
| 10 | Bireuen | 168,00 | 168,00 | 165,83 | 178,00 | 155,99 |
| 11 | Aceh Utara | 175,20 | 175,20 | 170,46 | 163,23 | 166,20 |
| 12 | Aceh Barat Daya | 183,20 | 183,20 | 183,20 | 183,20 | 183,20 |
| 13 | Gayo Lues | 101,41 | 97,59 | 97,59 | 94,63 | 98,40 |
| 14 | Aceh Tamiang | 146,52 | 139,20 | 133,66 | 166,09 | 125,06 |
| 15 | Nagan Raya | 203,20 | 200,08 | 200,08 | 197,60 | 192,31 |
| 16 | Aceh Jaya | 178,80 | 165,00 | 166,43 | 129,56 | 175,54 |
| 17 | Bener Meriah | 123,20 | 119,36 | 115,98 | 112,63 | 108,97 |
| 18 | Pidie Jaya | 137,60 | 137,60 | 137,60 | 137,60 | 137,60 |
| 19 | Banda Aceh | 127,31 | 117,02 | 109,29 | 102,93 | 105,80 |
| 20 | Sabang | 116,62 | 108,65 | 113,73 | 113,73 | 113,73 |
| 21 | Langsa | 143,20 | 138,73 | 130,44 | 134,83 | 136,99 |
| 22 | Lhokseumawe | 130,11 | 130,11 | 132,70 | 124,22 | 115,04 |
| 23 | Subulussalam | 95,20 | 95,20 | 95,20 | 92,88 | 87,87 |
| IRB Provinsi Aceh | | 153,58 | 149,99 | 149,10 | 146,90 | 144,30 |
| IRB Nasional | | 141,85 | 138,81 | 135,56 | 132,25 | 128,5 |

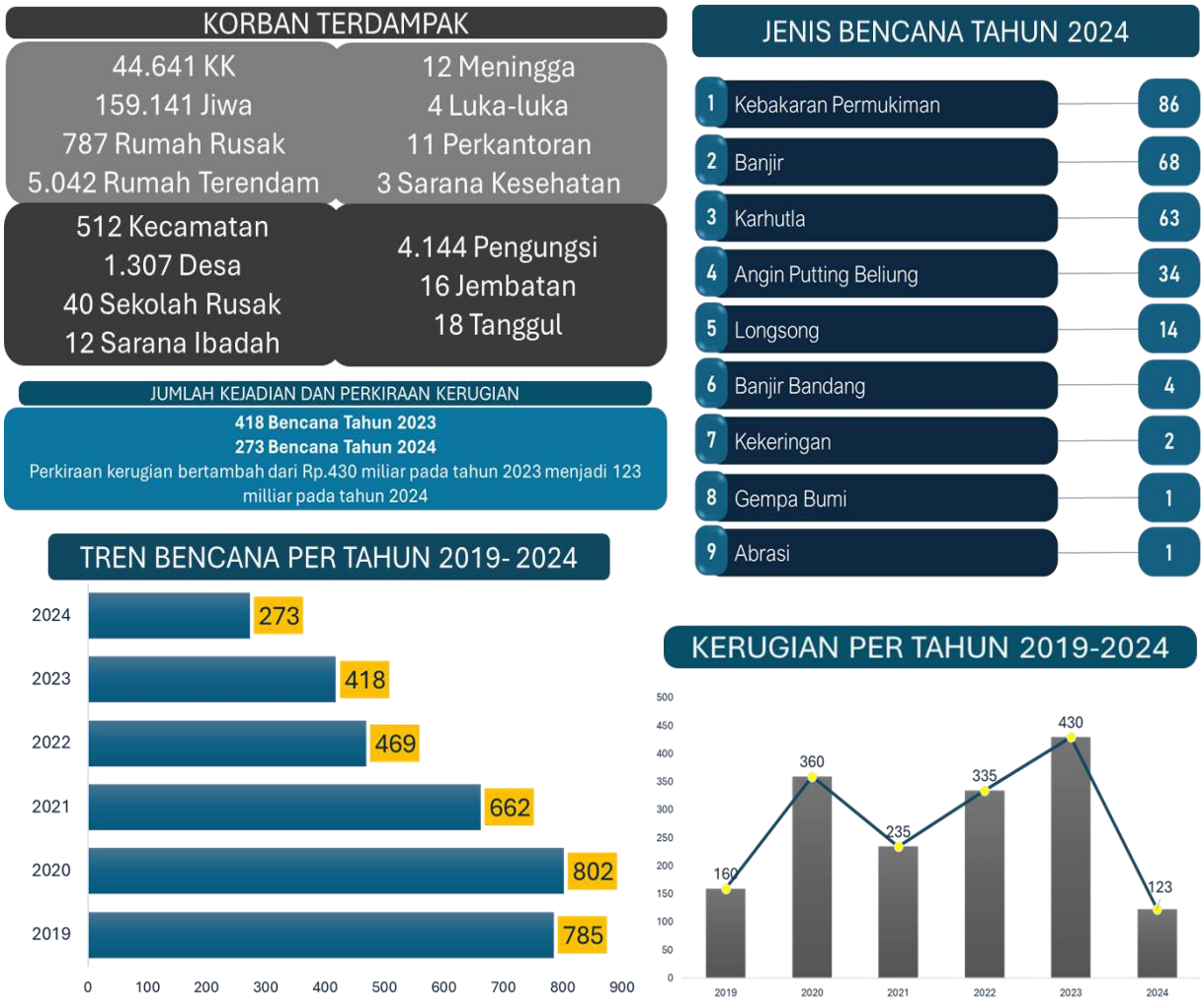
*Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025*

Potensi ancaman bahaya dan risiko dari suatu bencana berkaitan dengan kondisi wilayah. Kondisi wilayah Aceh yang meliputi geografi, kependudukan, perekonomian dan sebagainya menentukan tingkat kerentanan wilayah jika terjadi suatu bencana. Potensi risiko bencana akan meningkat dan memberikan dampak yang besar apabila kapasitas wilayahnya rendah. Aceh memiliki riwayat terjadinya bencana di masa lalu, yang tentu harus diantisipasi kemungkinan berulangnya kejadian bencana tersebut dalam skala yang lebih besar.

Kerawanan bencana dapat disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,

bencana dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Potensi bencana alam di Aceh adalah bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, likuefaksi dan letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrem dan abrasi serta cuaca ekstrem).

Bencana non alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam. Potensi bencana non alam di Aceh antara lain yaitu epidemi dan wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ ternak) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, dan pencemaran bahan kimia). Pandemi Covid- 19 yang terjadi di Indonesia tahun 2020 lalu merupakan salah satu jenis bencana non-alam. Jenis bencana yang terakhir adalah bencana sosial yang merupakan bencana akibat serangkaian peristiwa oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.




*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2024*

Gambar 2.55. Data Bencana Aceh Tahun 2019-2024

Dari Gambar 2.55 dapat dilihat bahwa Aceh mengalami beberapa bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami, abrasi, erosi, angin puting beliung, banjir, banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman dan longsor. Aceh dalam beberapa tahun terakhir (2019-2024) mengalami kecendrungan penurunan kejadian bencana setiap tahunnya. Jumlah kejadian bencana dari tahun 2019 hingga tahun 2024 dilaporkan sebanyak 3.409 kejadian bencana atau rata-rata 568 kejadian bencana per tahun. Sehingga potensi bencana di Aceh menjadi 15 jenis sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50.
Potensi Bencana di Aceh

| No. | Jenis Bencana | No. | Jenis Bencana |
|---|---|---|---|
| 1 | Gempa Bumi | 9 | Kebakaran Hutan dan Lahan |
| 2 | Gunung Api | 10 | Angin Puting Beliung |
| 3 | Tsunami | 11 | Gelombang Pasang atau Badai |
| 4 | Tanah Longsor | 12 | Abrasi |
| 5 | Banjir | 13 | Kejadian Luar Biasa (Epidemi/Covid 19) |
| 6 | Banjir Bandang | 14 | Likuifaksi |
| 7 | Kekeringan | 15 | Ledakan Sumur Minyak Masyarakat |
| 8 | Kebakaran | | |

*Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, dan hasil Kajian Risiko Bencana Aceh 2020-2025*

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 6 ayat (1) sampai ayat (7) bahwa pemerintah daerah diwajibkan Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Dokumen RPB merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengurangi risiko akibat dampak bencana dengan perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan. Penyusunan dokumen RPB melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait penanggulangan kebencanaan di daerah, mulai dari pengumpulan data, cek lapangan, sosialisasi dan internalisasi, diskusi kelompok subtansi, diskusi publik, paparan draft RPB hingga finalisasi penyusunan dokumen RPB.

Penyusunan dokumen RPB Aceh menyikapi tingginya potensi bencana yang terjadi di Provinsi Aceh. secara historis, di Aceh telah mengalami beberapa jenis bencana alam seperti abrasi, erosi, angin puting beliung, banjir, banjir bandang, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman dan longsor. Statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBA menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana yang signifikan dari tahun 2017 hingga 2020 dan terjadi penurunan pada tahun 2021 hingga 2024. Jumlah kejadian bencana dari tahun 2017 hingga tahun 2024 dilaporkan sebanyak 3.955 kejadian bencana atau rata-rata 494 kejadian bencana per tahun. Jumlah dan jenis kejadian bencana dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.51.

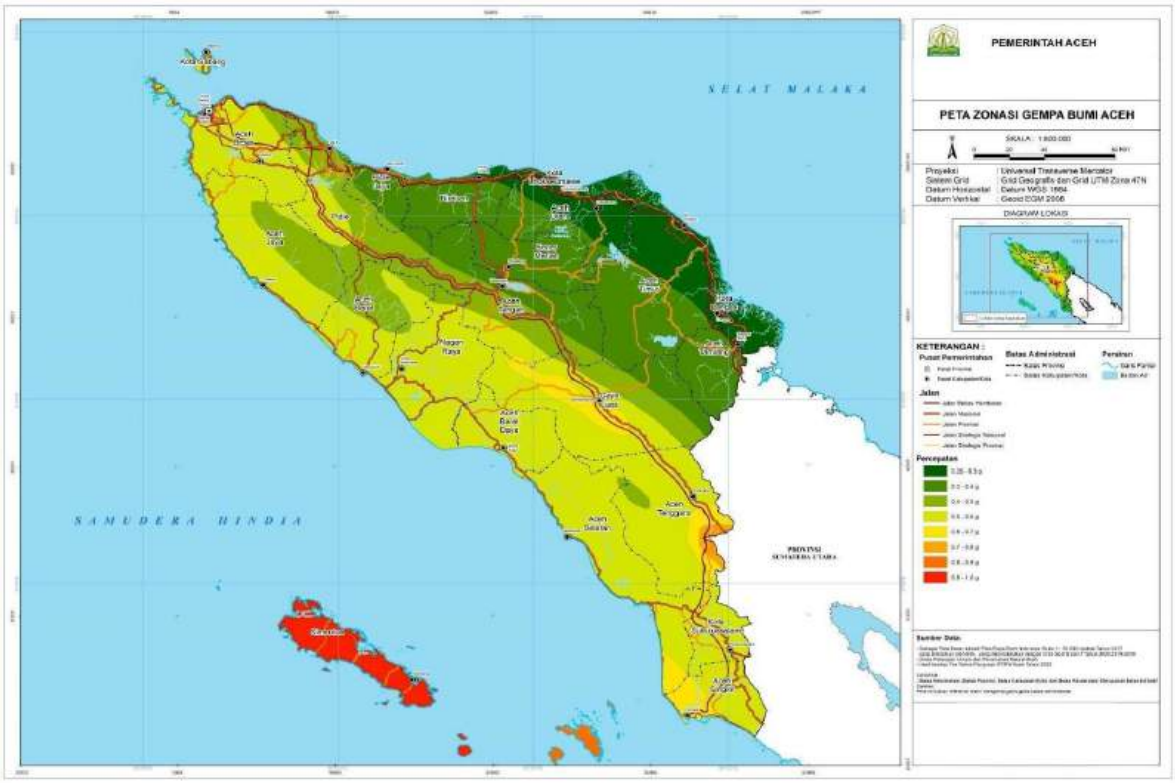
Tabel 2.51.
Kejadian Bencana Sejak Tahun 2017 Hingga 2024

| No | Jenis Bencana | Tahun (Jumlah Kejadian) | | | | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Gempa Bumi | 1 | 6 | 14 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 48 |
| 2 | Letusan Gunung Api | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tsunami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tanah Longsor | 18 | 27 | 46 | 57 | 42 | 35 | 27 | 14 | 266 |
| 5 | Banjir | 61 | 80 | 102 | 108 | 112 | 120 | 105 | 68 | 756 |
| 6 | Banjir Bandang | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 42 |
| 7 | Kekeringan | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 5 |
| 8 | Kebakaran | 71 | 97 | 285 | 289 | 269 | 153 | 149 | 86 | 1399 |
| 9 | Kebakaran Hutan dan Lahan | 9 | 66 | 220 | 205 | 133 | 79 | 85 | 63 | 860 |
| 10 | Angin Puting Beliung | 17 | 71 | 102 | 100 | 89 | 71 | 44 | 34 | 528 |
| 11 | Gelombang Pasang | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | Abrasi | 1 | 7 | 6 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 38 |
| 13 | Kejadian Luar Biasa (Epidemi/Covid 19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Likuifaksi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | | 185 | 361 | 785 | 802 | 662 | 469 | 418 | 273 | 3.955 |

*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2025*

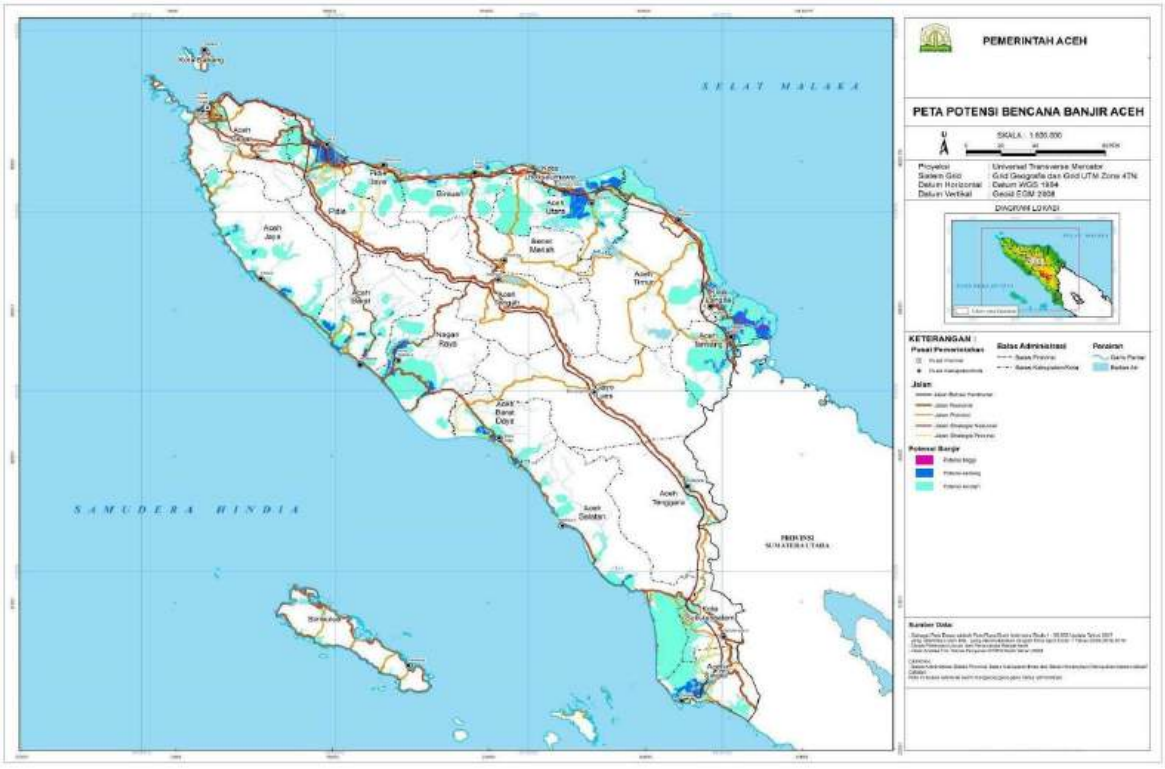
Dari 14 jenis bencana tersebut diatas, masih terdapat 1 bencana tambahan berupa bencana ledakan sumur minyak masyarakat yang kerap terjadi di kabupaten Aceh Timur. Melihat jumlah dan jenis bencana tersebut diatas, sehingga dibutuhkan RPB Aceh yang komprehensif, terpadu dan optimal. Optimalisasi perencanaan penanggulangan bencana tersebut dilakukan melalui pelibatan setiap pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana serta pengintegrasian RPB Aceh ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA). RPB Aceh memuat panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Aceh.

Gambar 2.56 memberikan informasi bahwa Kabupaten Bener Meriah, Nagan Raya dan Gayo Lues yang memiliki indeks rawan bencana gempa bumi moderat. Selebihnya termasuk dalam kategori tinggi. Kemudian bencana banjir bandang diketahui melanda beberapa kabupaten seperti Kabupaten Pidie (Krueng Tangse), Kabupaten Aceh Tenggara (Sungai Lawe Sigala-gala), dan Kabupaten Gayo Lues. Banjir bandang telah menimbulkan kerugian harta benda dan merenggut korban jiwa akibat dari rusaknya lingkungan. Demikian juga dengan banjir genangan yang secara rutin dan berkala terjadi di Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Kota Subulussalam dan Aceh Singkil. Bencana tanah longsor terjadi pada beberapa kabupaten seperti Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Pidie, lintasan perbatasan Aceh Besar dan Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Bener Meriah serta Kabupaten Aceh Tengah. Peta sebaran risiko bencana banjir di Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.57.




*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2023*

Gambar 2.56. Peta Rawan Bencana Gempa Aceh




*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2023*

Gambar 2.57. Peta Risiko Bencana Banjir Aceh

Bahaya bencana banjir di Aceh berdampak terhadap 5.205 desa di setiap kabupaten kota dengan dominasi risiko paparan sedang. Wilayah dengan risiko paparan bencana banjir tertinggi ditunjukkan kepada Aceh Besar dengan sebaran 706 desa yang terpapar risiko bencana banjir dominasi sedang. Adapun wilayah Kota Sabang berada pada tingkat risiko terkecil dengan 5 desa yang berisiko terpapar bencana banjir dominasi rendah.

Statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBA pada tahun 2022 per bulan Agustus menunjukkan bahwa bencana banjir sudah terjadi sebanyak 42 kali yang berdampak pada 171 rumah masyarakat terendam. Berdasarkan data kebencanaan Aceh dapat dibagi dalam beberapa kawasan rawan bencana yaitu:

1. Kawasan gelombang pasang, tersebar pada kawasan pantai meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Simeulue, dan Sabang;
2. Kawasan rawan banjir, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir, yang tersebar pada beberapa kawasan yaitu pada Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya;
3. Kawasan rawan kekeringan, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana kekeringan, meliputi sebagian wilayah Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Selatan dan Nagan Raya;
4. Kawasan rawan angin badai, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana angin badai, meliputi Banda Aceh, wilayah pesisir Aceh Besar, pesisir utara-timur, pesisir barat-selatan, Pulau Simeulue dan Pulau Weh serta pulau-pulau kecil terluar lainnya;
5. Kawasan rawan gempa bumi, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang memiliki risiko tinggi jika terjadi gempa bumi dengan skala VII – XII MMI (Modified Mercally Intensity) meliputi seluruh wilayah Aceh;
6. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif, meliputi Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Barat, Nagan Raya;
7. Kawasan rawan tsunami, ditetapkan dengan ketentuan kawasan pesisir yang memiliki risiko tinggi jika terjadi gempa bumi kuat yang disusul oleh tsunami meliputi kabupaten/kota pesisir yang menghadap perairan Samudera Hindia di sebelah Barat, perairan Laut Andaman di sebelah Utara, dan sebagian di Selat Malaka di sebelah Utara dan Timur;
8. Kawasan rawan abrasi, yaitu kawasan di sepanjang pesisir wilayah Aceh meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Singkil dan pulau-pulau terluar lainnya;
9. Kawasan rawan erosi mencakup seluruh wilayah di sepanjang aliran sungai besar dan/atau sungai berarus deras;

10. Kawasan rawan bahaya gas beracun kimia dan logam berat meliputi wilayah-wilayah gunung api seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Jaya dan Sabang;
11. Kawasan rawan polusi air, udara dan tanah yaitu kawasan sekitar industri, pelabuhan laut, pertambangan dan kawasan pusat kota.

Kawasan rawan bencana Likuefaksi meliputi wilayah Aceh Besar, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Gayo Lues, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, dan Kota Subulussalam

Data tahun 2023, menunjukkan Provinsi Aceh masih memiliki tingkat risiko bencana tinggi mencapai 146.9/tinggi Sedangkan pada tahun 2024, nilai IRB Provinsi Aceh mengalami koreksi menjadi lebih rendah dengan nilai IRB sebesar 144.29/tinggi. Namun demikian IRB Aceh masih berada pada tingkatan 'tinggi', sehingga masih dibutuhkan usaha untuk mencapai angka IRB dengan tingkatan 'sedang'. Sebagian besar kabupaten/kota di Aceh terkategori memiliki risiko tinggi (peta bergambar merah), sisanya sebanyak 11 wilayah kabupaten/kota tergolong berisiko sedang. Untuk itu perlu dilakukan upaya mitigasi, adaptasi, ketahanan tinggi, terstruktur, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar IRB di Provinsi diturunkan menjadi kategori rendah. Peta sebaran Indeks Rawan Bencana Aceh disajikan pada Gambar 2.58.




PETA RESIKO BENCANA
PROVINSI ACEH 2023

| KODE KAB. | KABUPATEN/KOTA | INDEX RESIKO BENCANA (IRB) | KODE KAB. | KABUPATEN/KOTA | INDEX RESIKO BENCANA (IRB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Aceh Selatan | 171,20 | 1113 | Gayo Lues | 94,63 |
| 1102 | Aceh Tenggara | 118,31 | 1114 | Aceh Jaya | 166,09 |
| 1103 | Aceh Timur | 164,56 | 1115 | Nagan Raya | 197,60 |
| 1104 | Aceh Tengah | 118,95 | 1116 | Aceh Tamiang | 129,56 |
| 1105 | Aceh Barat | 185,57 | 1117 | Bener Meriah | 112,63 |
| 1106 | Aceh Besar | 202,01 | 1118 | Pidie Jaya | 137,60 |
| 1107 | Pidie | 159,02 | 1171 | Kota Banda Aceh | 102,93 |
| 1108 | Aceh Utara | 165,86 | 1172 | Kota Sabang | 113,73 |
| 1109 | Simeulue | 162,00 | 1173 | Kota Lhokseumawe | 134,83 |
| 1110 | Aceh Singkil | 178,00 | 1174 | Kota Langsa | 124,22 |
| 1111 | Bireuen | 163,23 | 1175 | Kota Subulussalam | 92,88 |
| 1112 | Aceh Barat Daya | 183,20 | | | |

*Sumber: Badan nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2024*

Gambar 2.58. Peta Indeks Rawan Bencana Aceh

### C. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Semakin tinggi nilai IKD, semakin baik kemampuan suatu daerah dalam menghadapi dan merespons tantangan-tantangan yang mungkin timbul. IKD tertinggi diraih oleh Kota Langsa dengan indeks sebesar 0,49, menyusul Kabupaten/Kota Banda Aceh, Aceh Timur Aceh Barat, dan Aceh Tamiang dengan angka IKD masing-masing sebesar 0,48, 0,46, 0,45, dan 0,44 Selanjutnya daerah yang memiliki nilai IKD terendah sebesar 0,25 adalah Kabupaten Gayo Lues. Nilai IKD setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52.
Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Aceh Tahun 2020-2024

| No | Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Simeulue | | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,30 |
| 2 | Aceh Singkil | | 0,23 | 0,23 | 0,29 | 0,29 |
| 3 | Aceh Selatan | | 0,22 | 0,22 | 0,30 | 0,29 |
| 4 | Aceh Tenggara | 0,36 | 0,41 | 0,34 | 0,38 | 0,42 |
| 5 | Aceh Timur | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,46 |
| 6 | Aceh Tengah | | 0,20 | 0,35 | 0,36 | 0,37 |
| 7 | Aceh Barat | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,45 |
| 8 | Aceh Besar | 0,30 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,38 |
| 9 | Pidie | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,40 |
| 10 | Bireuen | | 0,21 | 0,34 | 0,34 | 0,39 |
| 11 | Aceh Utara | | 0,29 | 0,35 | 0,36 | 0,34 |
| 12 | Aceh Barat Daya | 0,23 | 0,25 | | 0,30 | 0,31 |
| 13 | Gayo Lues | 0,39 | 0,39 | | 0,39 | 0,25 |
| 14 | Aceh Tamiang | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,44 |
| 15 | Nagan Raya | 0,30 | 0,34 | | 0,34 | 0,36 |
| 16 | Aceh Jaya | 0,47 | 0,48 | 0,38 | 0,39 | 0,29 |
| 17 | Bener Meriah | | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,40 |
| 18 | Pidie Jaya | | 0,28 | 0,27 | 0,29 | 0,29 |
| 19 | Banda Aceh | 0,64 | 0,58 | 0,59 | 0,61 | 0,48 |
| 20 | Sabang | 0,42 | 0,45 | 0,30 | 0,30 | 0,29 |
| 21 | Langsa | 0,32 | 0,36 | 0,42 | 0,42 | 0,40 |
| 22 | Lhokseumawe | | | 0,41 | 0,40 | 0,49 |
| 23 | Subulussalam | 0,26 | 0,26 | 0,31 | 0,35 | 0,40 |
| | Aceh | | | | 0,37 | |

*Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025*

## 2.1.1.7. Demografi

### A. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Aceh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Aceh mencapai 5.623.479 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 97,03 orang per kilometer persegi. Angka ini meningkat dibandingkan dengan

jumlah penduduk pada tahun 2023 yang tercatat sebanyak 5.515.839 jiwa. Berikut ini, adalah Gambar 2.8 tentang jumlah penduduk, laju pertumbuhan, dan kepadatan penduduk per kilometer di Aceh selama 5 terakhir.

Tabel 2.53.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Aceh Tahun 2019-2024

| Tahun | Jumlah Penduduk | Laju Pertumbuhan | Kepadatan Penduduk per Km |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5.247.257 | 0,42 | 90,54 |
| 2020 | 5.269.809 | 0,78 | 92,84 |
| 2021 | 5.311.320 | 0,68 | 93,58 |
| 2022 | 5.432.312 | 0,60 | 92,27 |
| 2023 | 5,515,839 | 1,54 | 95,71 |
| 2024 | 5,623,479 | 1,91 | 97,03 |

*Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Tahun 2025 (Diolah)*

## B. Distribusi Jumlah Penduduk

Distribusi dan pertumbuhan penduduk di Aceh antara tahun 2020 hingga 2024 tersebar di 18 kabupaten dan 5 kota, namun belum merata. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54.
Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Aceh Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2019 – 2024

| Kabupaten/ Kota | Tahun | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Jmlh Pddk | Pertumbuhan Pddk | Jmlh Pddk | Pertumbuhan Pddk | Jmlh Pddk | Pertumbuhan Pddk | Jmlh Pddk | Pertumbuhan Pddk | Jmlh Pddk | Pertumbuhan Pddk | Jmlh Pddk | Pertumbuhan Pddk |
| Aceh Selatan | 236.359 | 0,67 | 237.326 | 0,41 | 236.487 | -0,35 | 234.339 | -0.99 | 236.933 | 1.11 | 239,629 | 1.13 |
| Aceh Tenggara | 226.162 | 0,45 | 227.174 | 0,45 | 227.456 | 0,12 | 228.175 | 0.20 | 231.331 | 1,38 | 235,589 | 1.81 |
| Aceh Timur | 423.638 | -1,26 | 426.398 | 0,65 | 429.094 | 0,63 | 441.719 | 1.34 | 449.796 | 1,83 | 461,391 | 2.51 |
| Aceh Tengah | 214.828 | 0,82 | 216.072 | 0,58 | 219.098 | 0,58 | 222.558 | 0.29 | 227.168 | 2,07 | 232,606 | 2.34 |
| Aceh Barat | 195.955 | 0,63 | 196.834 | 0,45 | 198.411 | 0,8 | 200.123 | 0.22 | 204.475 | 2,17 | 209,220 | 2.27 |
| Aceh Besar | 393.903 | 0,98 | 403.711 | 2,43 | 416.532 | 3,13 | 429.143 | 1.35 | 435.298 | 1,43 | 442,987 | 1.74 |
| Pidie | 442.45 | 0,50 | 444.149 | 0,38 | 435.797 | -1,9 | 439.298 | 0.23 | 444.898 | 1,27 | 451,076 | 1.37 |
| Aceh Utara | 586.851 | 0,59 | 590.536 | 0,62 | 600.163 | 1,62 | 619.506 | 1.57 | 627.543 | 1,30 | 641,007 | 2.10 |
| Simeulue | 93.724 | 0,79 | 94.146 | 0,45 | 94.368 | 0,24 | 95.047 | 0.20 | 96.031 | 1,04 | 96,812 | 0.81 |
| Aceh Singkil | 126.996 | 0,17 | 127.711 | 0,56 | 129.333 | 1,26 | 131.423 | 0.26 | 135.435 | 3,05 | 140,461 | 3.58 |
| Bireuen | 440.35 | 0,39 | 444.149 | 0,59 | 444.383 | 0,32 | 451.952 | 0.25 | 458.978 | 1,55 | 468,696 | 2.07 |
| Aceh Barat Daya | 152.248 | 0,50 | 152.949 | 0,46 | 153.213 | 0,17 | 153.829 | 0.20 | 154.800 | 0,63 | 156,128 | 0.85 |
| Gayo Lues | 101.045 | 1,09 | 101.54 | 0,49 | 101.754 | 0,21 | 102.314 | 0.20 | 104.856 | 2,48 | 107,506 | 2.46 |
| Aceh Jaya | 92.109 | 1,61 | 92.781 | 0,72 | 94.761 | 2,11 | 97.124 | 1.34 | 99.717 | 2,67 | 101,407 | 1.67 |
| Nagan Raya | 171.55 | 0,78 | 172.257 | 0,41 | 172.484 | 0,13 | 173.316 | 0.20 | 176.461 | 1,81 | 181,103 | 2.56 |
| Aceh Tamiang | 297.429 | 1,03 | 299.487 | 0,69 | 300.831 | 0,45 | 303.471 | 0.32 | 308.102 | 1,53 | 312,061 | 1.27 |
| Bener Meriah | 160.634 | 0,62 | 161.627 | 0,61 | 166.448 | 2,94 | 171.400 | 1.20 | 175.781 | 2,56 | 181,376 | 3.08 |
| Pidie Jaya | 161.43 | 0,81 | 162.174 | 0,46 | 159.941 | -1,39 | 160.828 | 0.21 | 163.591 | 1,72 | 166,517 | 1.76 |
| Banda Aceh | 245.779 | 0,44 | 248.892 | 1,25 | 253.198 | 1,72 | 255.409 | 0.33 | 259.538 | 1,62 | 265,310 | 2.18 |
| Sabang | 42.191 | 0,41 | 42.457 | 0,63 | 42.696 | 0,56 | 43.176 | 0.40 | 43.527 | 0,81 | 42,793 | -1.72 |
| Lhokseumawe | 189.505 | -2,05 | 190.479 | 0,51 | 191.034 | 0,29 | 192.860 | 0.34 | 196.067 | 1,66 | 198,705 | 1.33 |

| Kabupaten/ Kota | Tahun | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | Jmlh Pddk | Pertumbuhan Pddk | Jmlh Pddk | Pertumbuhan Pddk | Jmlh Pddk | Pertumbuhan Pddk | Jmlh Pddk | Pertumbuhan Pddk | Jmlh Pddk | Pertumbuhan Pddk | Jmlh Pddk | Pertumbuhan Pddk |
| Langsa | 187.388 | 0.51 | 188.244 | 0,45 | 185.836 | -1,29 | 186.211 | 0.13 | 182.469 | -2,01 | 183,914 | 0.79 |
| Subulussalam | 87.285 | 1,78 | 91.423 | 4,53 | 94.571 | 3,39 | 99.091 | 1.79 | 103.044 | 3,99 | 107,185 | 3.86 |
| Aceh | **5.247.257** | **0,42** | **5.269.809** | **0,78** | **5.311.320** | **0,68** | **5.432.312** | **0.60** | **5,515,839** | **1,54** | **5,623,479** | **1.91** |

*Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Tahun 2025 (Diolah)*

Data diatas, menunjukkan bahwa pada periode 2019 hingga 2024, jumlah penduduk di Aceh terus meningkat meskipun ada fluktuasi di beberapa daerah. Secara keseluruhan, jumlah penduduk Aceh meningkat dari 5.247.257 jiwa pada 2019 menjadi 5.623.479 jiwa pada 2024, dengan angka pertumbuhan penduduk tahunan rata-rata sebesar 1,91 persen pada 2024.

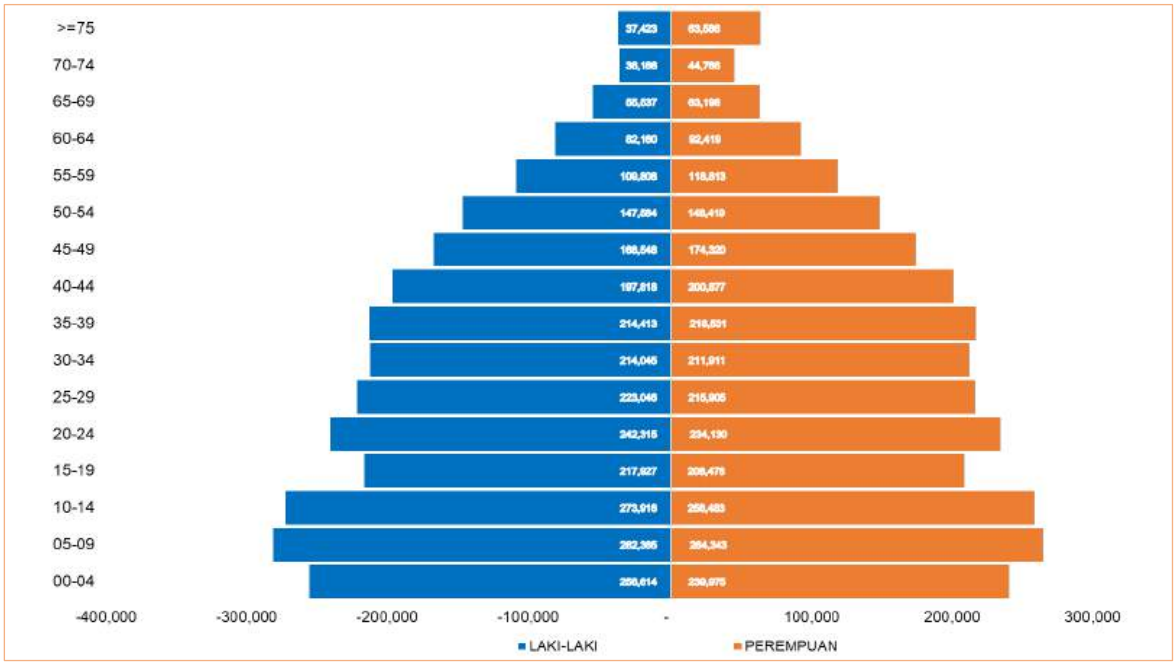
Kabupaten/kota di Aceh yang menunjukkan pertumbuhan pesat, adalah Aceh Singkil mengalami peningkatan yang sangat tinggi dengan angka pertumbuhan mencapai 3,58 persen pada 2024; Bener Meriah juga mencatatkan angka pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu 3,08 persen pada 2024; Subulussalam mengalami pertumbuhan yang sangat baik, dengan angka 3,86 persen pada 2024, sedangkan daerah yang menunjukkan penurunan angka pertumbuhan, yaitu Sabang mengalami penurunan signifikan pada 2024, dengan angka pertumbuhan sebesar -1,72 persen; Langsa juga mencatatkan angka pertumbuhan negatif pada 2023 yaitu -2,01 persen, meskipun sedikit meningkat pada 2024 menjadi 0,79 persen.

## C. Struktur Penduduk

Pengelompokan penduduk berdasarkan struktur umur penduduk dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu penduduk usia muda (0-14) tahun penduduk usia produktif (15-59) tahun dan penduduk usia lanjut (>60). Struktur penduduk Aceh memiliki pola struktur yang relatif serupa dengan struktur penduduk nasional yang terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu: 1) Piramida penduduk muda. Struktur ini menggambarkan komposisi penduduk dalam pertumbuhan dan sedang berkembang. Struktur penduduk ini menunjukkan jumlah angka kelahiran lebih besar dari jumlah kematian; 2) Piramida stationer. Struktur ini menggambarkan keadaan penduduk yang tetap (statis) karena tingkat kematian rendah dan tingkat kelahiran relatif tidak tinggi; 3) Piramida penduduk tua. Struktur ini menggambarkan adanya penurunan tingkat kelahiran yang sangat pesat dan tingkat kematian yang relatif kecil.

Jumlah penduduk menurut kelompok umur tertinggi pada tahun 2024 berada pada kelompok umur antara (20-24) tahun, yaitu 476,445 jiwa (8.64%) dengan jumlah jenis kelamin laki-laki sebesar 242,315 jiwa (8.78%) dan perempuan sebesar 234,130 jiwa (8.49%). Jumlah penduduk menurut kelompok umur terendah adalah pada kelompok umur non produktif antara (70-74) tahun, yakni sebesar 80,932 jiwa (1,47%). Jumlah penduduk usia produktif pada kelompok umur antara (15-64) tahun sebesar 3,639,467.00 jiwa (65,98%). Jika di lihat berdasarkan pengelompokkan umur (15-64) tahun, kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar kelompok tersebut merupakan penduduk

usia kerja (usia produktif) dan sisanya merupakan penduduk lanjut usia (≥65 tahun), yaitu sebesar 300,676.00 jiwa (5,45%).




*Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 2025 (Diolah)*

Gambar 2.59. Struktur Penduduk Aceh Tahun 2024 (jiwa)

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan diantaranya terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun atau lebih) yang berarti semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Semakin kecil angka beban ketergantungan akan semakin mengurangi beban ekonomi penduduk usia produktif.

Beban Ketergantungan Penduduk memberi gambaran tentang perbandingan antara jumlah penduduk produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk tidak produktif. Diperkirakan sepuluh tahun ke depan, Aceh akan mendapat Bonus Demografi dengan struktur penduduk Aceh akan didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun). Peluang Bonus Demografi ini harus mampu dimanfaatkan oleh Pemerintah Aceh karena akan memberikan pengaruh positif dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ke depan. Syarat utama yang harus dipenuhi untuk memperoleh manfaat dan keuntungan Bonus Demografi ini, diantaranya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai keahlian dan memiliki daya saing; dan meningkatan peluang kesempatan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

## D. Laju pertumbuhan penduduk, rasio dan kepadatan penduduk Aceh

Tahun 2024 rasio kepadatan penduduk Kota Banda Aceh adalah tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya yaitu sebesar 4.632.059 Jiwa/Km$^2$, menyusul Kota Lhokseumawe yaitu sebesar 1.484.131 Jiwa/Km$^2$ dan Kota Langsa sebesar 814.396

Jiwa/Km$^2$. Sedangkan sebaran penduduk terendah terdapat pada Kabupaten Gayo Lues (19,54Jiwa/Km$^2$) dan Aceh Jaya (25,988 Jiwa/Km$^2$). Kepadatan penduduk yang rendah umumnya pada wilayah tengah dan barat, hal ini disebabkan karena kondisi geografis wilayah tersebut merupakan pegunungan, sungai, lembah, rawa, hutan dan pesisir pantai, sehingga sebahagian potensi wilayahnya dipergunakan oleh masyarakat untuk pertanian, perkebunan dan perikanan.

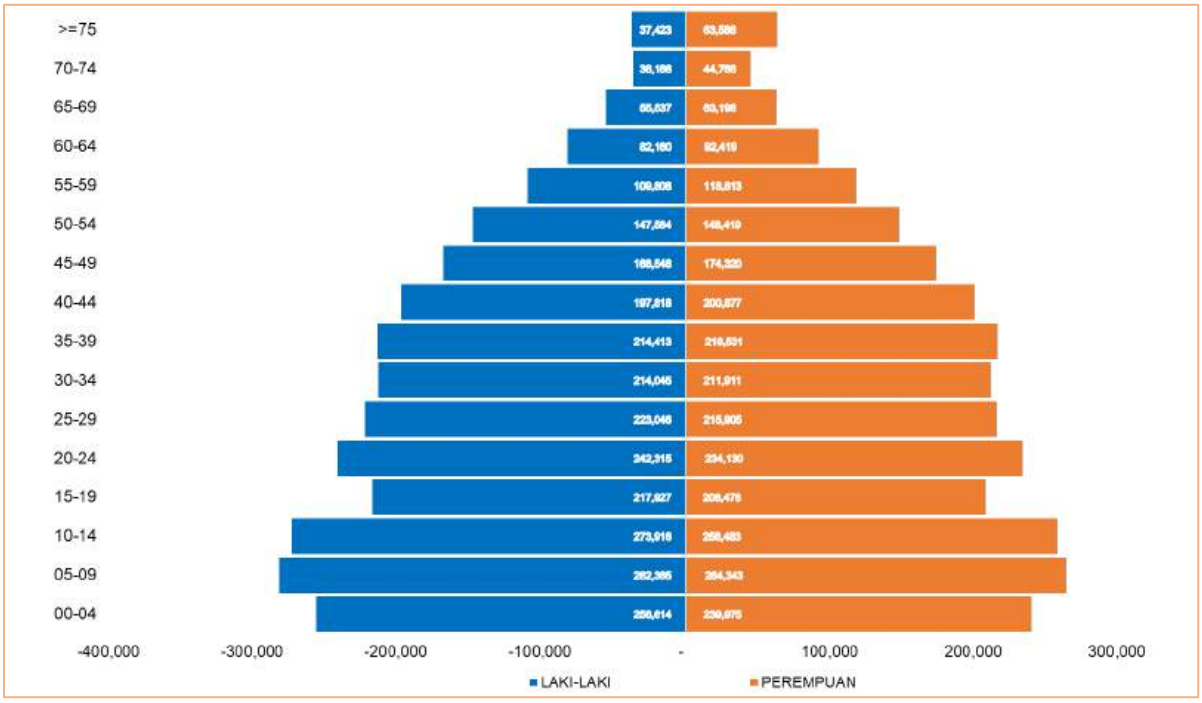
Tabel 2.55.
Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Aceh Tahun 2024

| No | Kabupaten/ Kota | Data Penduduk (Jiwa) | | | Angka Pertumbuhan Penduduk (%) | Luas Wilayah (km$^2$) | Rasio Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km$^2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lk | Pr | Jlh | | | |
| 1 | Aceh Selatan | 119.185 | 118.836 | 238.021 | 0,46 | 4.175,375 | 57,006 |
| 2 | Aceh Tenggara | 117.132 | 116.495 | 233.627 | 0,98 | 4.179,123 | 55,903 |
| 3 | Aceh Timur | 228.968 | 225.755 | 454.723 | 1,08 | 5.409,406 | 84,062 |
| 4 | Aceh Tengah | 116.553 | 114.218 | 230.771 | 1,56 | 4.468,417 | 51,645 |
| 5 | Aceh Barat | 104.626 | 103.064 | 207.690 | 1,55 | 2.782,873 | 74,632 |
| 6 | Aceh Besar | 220.028 | 219.020 | 439.048 | 0,85 | 2.891,477 | 151,842 |
| 7 | Pidie | 220.673 | 227.458 | 448.131 | 0,72 | 3.177,485 | 141,033 |
| 8 | Aceh Utara | 315.500 | 318.133 | 633.633 | 0,96 | 2.705,255 | 234,223 |
| 9 | Simeulue | 49.412 | 47.098 | 96.510 | 0,50 | 1.821,747 | 52,977 |
| 10 | Aceh Singkil | 70.085 | 68.707 | 138.792 | 2,42 | 1.852,823 | 74,908 |
| 11 | Bireuen | 227.973 | 234.863 | 462.836 | 0,83 | 1.796,992 | 257,562 |
| 12 | Aceh Barat Daya | 78.086 | 76.911 | 154.997 | 0,13 | 1.882,277 | 82,345 |
| 13 | Gayo Lues | 53.360 | 52.776 | 106.136 | 1,21 | 5.541,285 | 19,154 |
| 14 | Aceh Jaya | 51.030 | 49.644 | 100.674 | 0,95 | 3.872,352 | 25,998 |
| 15 | Nagan Raya | 90.325 | 88.783 | 179.108 | 1,48 | 3.524,164 | 50,823 |
| 16 | Aceh Tamiang | 156.927 | 153.556 | 310.483 | 0,77 | 2.187,657 | 141,925 |
| 17 | Bener Meriah | 90.648 | 88.358 | 179.006 | 1,80 | 1.907,399 | 93,848 |
| 18 | Pidie Jaya | 81.788 | 83.292 | 165.080 | 0,90 | 939,004 | 175,803 |
| 19 | Banda Aceh | 131.107 | 131.855 | 262.962 | 1,30 | 56,770 | 4632,059 |
| 20 | Sabang | 21.461 | 21.256 | 42.717 | -1,90 | 122,063 | 349,959 |
| 21 | Lhokseumawe | 97.982 | 99.357 | 197.339 | 0,64 | 132,966 | 1484,131 |
| 22 | Langsa | 91.551 | 91.065 | 182.616 | 0,08 | 224,235 | 814,396 |
| 23 | Subulussalam | 53.655 | 51.898 | 105.553 | 2,38 | 1.183,601 | 89,180 |
| Aceh | | 2.788.055 | 2.782.398 | 5.570.453 | 0,98 | 56.834,75 | 98,011 |

*Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 2025 (diolah)*

Berdasarkan proporsi penduduk menurut jenis kelamin, dari total penduduk Pada tahun 2024 sebesar 5,570.453 jiwa, proporsi penduduk laki-laki mencapai 2.788.055 jiwa (50,05%) dan perempuan sebesar 2.782.398 jiwa (49,95%).. Jika dilihat dari struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang, namun pertumbuhan jumlah penduduk laki-laki cenderung mengalami peningkatan.

Pengelompokan penduduk berdasarkan struktur umur penduduk dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu penduduk usia muda (0-14) tahun penduduk usia produktif (15-59) tahun dan penduduk usia lanjut (>60). Struktur penduduk Aceh memiliki pola struktur yang relatif serupa dengan struktur penduduk nasional yang terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu: 1) Piramida penduduk muda. Struktur ini menggambarkan komposisi penduduk dalam pertumbuhan dan sedang berkembang. Struktur penduduk ini menunjukkan jumlah angka kelahiran lebih besar dari jumlah kematian; 2) Piramida stationer. Struktur ini menggambarkan keadaan penduduk yang tetap (statis) karena tingkat kematian rendah dan tingkat kelahiran relatif tidak tinggi; 3) Piramida penduduk tua. Struktur ini menggambarkan adanya penurunan tingkat kelahiran yang sangat pesat dan tingkat kematian yang relatif kecil.




*Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 2025 (Diolah)*

Gambar 2.60. Struktur Penduduk Aceh Tahun 2023

Jumlah penduduk menurut kelompok umur tertinggi pada tahun 2024 berada pada kelompok umur antara (20-24) tahun, yaitu 476,445 jiwa (8.64%) dengan jumlah jenis kelamin laki-laki sebesar 242,315 jiwa (8.78%) dan perempuan sebesar 234,130 jiwa (8.49%). Jumlah penduduk menurut kelompok umur terendah adalah pada kelompok umur non produktif antara (70-74) tahun, yakni sebesar 80,932 jiwa (1,47%). Jumlah penduduk usia produktif pada kelompok umur antara (15-64) tahun sebesar 3,639,467.00 jiwa (65,98%). Jika di lihat berdasarkan pengelompokkan umur (15-64) tahun, kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar kelompok tersebut merupakan penduduk usia kerja (usia produktif) dan sisanya merupakan penduduk lanjut usia (≥65 tahun), yaitu sebesar 300,676.00 jiwa (5,45%).

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan diantaranya terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan

kelompok umur 65 tahun atau lebih) yang berarti semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Semakin kecil angka beban ketergantungan akan semakin mengurangi beban ekonomi penduduk usia produktif.

Beban Ketergantungan Penduduk memberi gambaran tentang perbandingan antara jumlah penduduk produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk tidak produktif. Diperkirakan sepuluh tahun ke depan, Aceh akan mendapat Bonus Demografi dengan struktur penduduk Aceh akan didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun). Peluang Bonus Demografi ini harus mampu dimanfaatkan oleh Pemerintah Aceh karena akan memberikan pengaruh positif dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ke depan. Syarat utama yang harus dipenuhi untuk memperoleh manfaat dan keuntungan Bonus Demografi ini, diantaranya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai keahlian dan memiliki daya saing; dan meningkatan peluang kesempatan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

## E. Proyeksi dan analisis penduduk 5 (lima) tahun ke depan

Perencanaan pembangunan membutuhkan data kependudukan yang akurat, termasuk proyeksi jumlah penduduk di masa mendatang. Berdasarkan proyeksi dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Provinsi Aceh diperkirakan terus meningkat dalam periode lima tahun ke depan. Pada tahun 2025, jumlah penduduk Aceh diproyeksikan sebesar 5.625.960 jiwa, dan akan meningkat secara bertahap setiap tahunnya hingga mencapai 5.898.194 jiwa pada tahun 2029. Ini menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk yang konsisten dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 1,2% per tahun.

Jika dilihat pada Tabel 2.56 pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Utara diproyeksikan meningkat dari 638.957 jiwa pada tahun 2025 menjadi 665.399 jiwa pada tahun 2029, disusul oleh Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Pidie dengan proyeksi penduduk sebesar 486.206 jiwa dan sebesar 473.687 jiwa pada tahun 2029. Sementara itu, Kota Sabang tetap menjadi daerah dengan jumlah penduduk terkecil, yakni sekitar 44.042 jiwa pada tahun 2025 dan diproyeksikan naik sedikit menjadi 46.293 jiwa pada tahun 2029.

Selain ketiga kabupaten/kota tersebut, beberapa daerah lain juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, seperti: Banda Aceh, sebagai ibu kota provinsi, diproyeksikan tumbuh dari 267.962 jiwa di tahun 2025 menjadi 278.719 jiwa di tahun 2029; Aceh Besar menunjukkan pertumbuhan stabil dari 434.042 jiwa menjadi 456.503 jiwa dalam periode yang sama; Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa juga mengalami peningkatan jumlah penduduk yang konsisten dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, meskipun terjadi pertumbuhan di semua wilayah, laju pertumbuhan antar-kabupaten/kota bervariasi. Daerah-daerah seperti Gayo Lues, Simeulue, dan Aceh Jaya mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif lambat dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Implikasi dari proyeksi ini adalah, pertama, daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi perlu mendapatkan perhatian dalam penyediaan sarana dan prasarana publik,

seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lapangan kerja; Kedua, daerah dengan pertumbuhan lambat dapat difokuskan pada pengembangan sektor ekonomi spesifik, revitalisasi daerah, atau program penguatan sumber daya manusia. Secara keseluruhan, proyeksi ini memberikan gambaran penting bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kependudukan lima tahun mendatang.

Tabel 2.56.
Proyeksi Penduduk Aceh 5 (lima) tahun kedepan

| PROVINSI & KAB/KOTA | Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Simeulue | 100 136 | 101 604 | 103 071 | 104 511 | 105 943 |
| Aceh Singkil | 138 070 | 140 432 | 142 762 | 145 078 | 147 357 |
| Aceh Selatan | 244 472 | 246 901 | 249 282 | 251 570 | 253 781 |
| Aceh Tenggara | 237 910 | 241 328 | 244 706 | 248 015 | 251 237 |
| Aceh Timur | 449 080 | 454 431 | 459 719 | 464 911 | 470 032 |
| Aceh Tengah | 229 608 | 232 425 | 235 210 | 237 939 | 240 630 |
| Aceh Barat | 208 812 | 210 738 | 212 583 | 214 370 | 216 080 |
| Aceh Besar | 434 042 | 439 753 | 445 392 | 450 977 | 456 503 |
| Pidie | 456 942 | 461 254 | 465 480 | 469 630 | 473 687 |
| Bireuen | 464 776 | 470 358 | 475 793 | 481 077 | 486 206 |
| Aceh Utara | 638 957 | 645 802 | 652 493 | 659 029 | 665 399 |
| Aceh Barat Daya | 161 341 | 163 464 | 165 536 | 167 566 | 169 558 |
| Gayo Lues | 108 672 | 110 542 | 112 395 | 114 203 | 115 999 |
| Aceh Tamiang | 312 820 | 316 534 | 320 196 | 323 780 | 327 289 |
| Nagan Rsaya | 178 460 | 180 440 | 182 372 | 184 245 | 186 070 |
| Aceh Jaya | 100 738 | 102 242 | 103 739 | 105 217 | 106 686 |
| Bener Meriah | 174 824 | 177 600 | 180 342 | 183 064 | 185 763 |
| Pidie Jaya | 168 546 | 170 580 | 172 577 | 174 534 | 176 442 |
| Banda Aceh | 267 962 | 270 795 | 273 523 | 276 171 | 278 719 |
| Sabang | 44 042 | 44 610 | 45 170 | 45 732 | 46 293 |
| Langsa | 201 058 | 204 203 | 207 309 | 210 387 | 213 418 |
| Lhokseumawe | 203 410 | 206 394 | 209 323 | 212 219 | 215 045 |
| Subulussalam | 101 282 | 103 499 | 105 703 | 107 889 | 110 057 |
| Aceh | 5 625 960 | 5 695 929 | 5 764 676 | 5 832 114 | 5 898 194 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025*

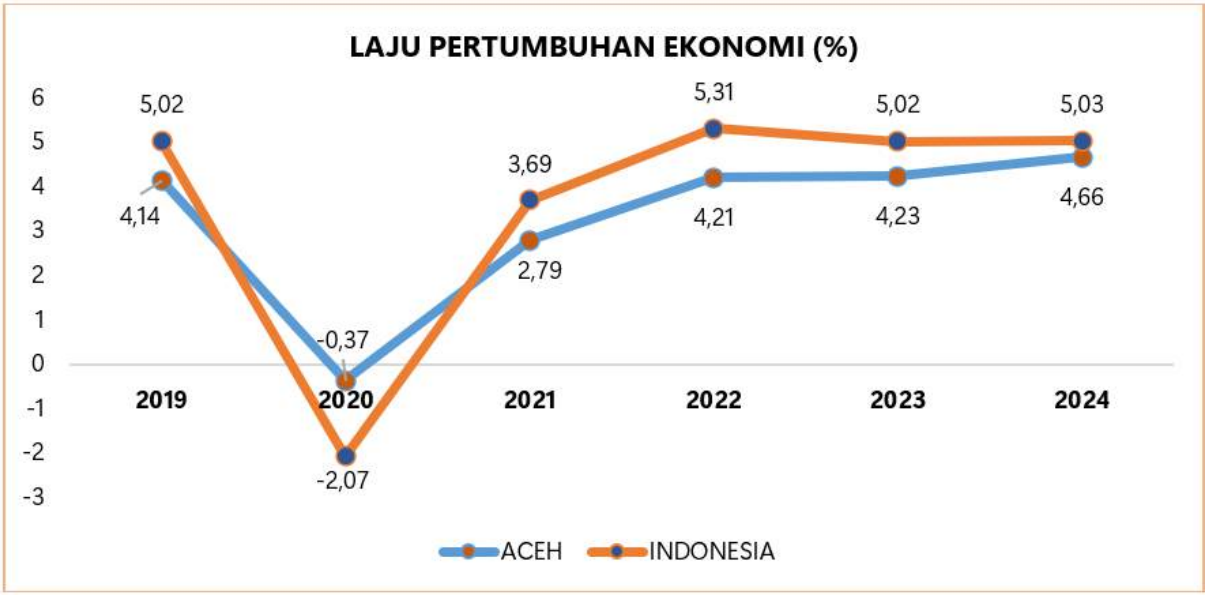
### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

#### 2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

#### A. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dengan angka Pertumbuhan Ekonomi tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

merupakan cerminan dari kinerja perekonomian Aceh. Selama kurun waktu 2019-2023, pertumbuhan ekonomi Aceh mengalami fluktuasi dan konstraksi. Pada tahun 2019, Pertumbuhan Ekonomi Aceh mencapai 4,14 persen, namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,37 persen. Kondisi ini relevan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, yang mana pada tahun 2019 telah mencapai 5,02 persen, namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi hingga 0,27 persen. Kontraksi ekonomi Aceh dan nasional merupakan dampak dari resesi ekonomi global yang diakibatkan pandemi covid-19 yang mengharuskan negara-negara memberlakukan pembatasan pergerakan orang dan barang (*lockdown*).




*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional , 2025*

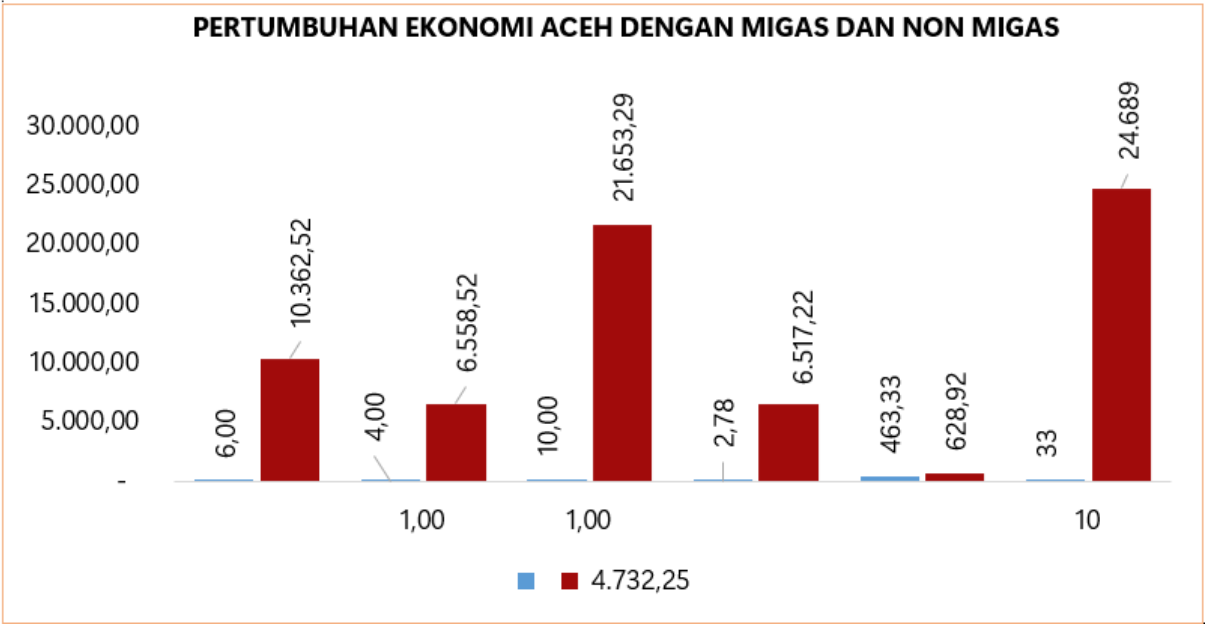
Gambar 2.61. Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh, dan Nasional, Tahun 2019- 2024 (Persen)

Paska Covid 19, Perekonomian Aceh mulai berangsur membaik sebagai dampak positif dari upaya pemulihan ekonomi nasional dan global. Laju pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2021 sebesar 2,79 persen, kemudian meningkat mencapai 4.23 persen pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 menjadi 4,66 persen. Begitu juga dengan perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 3,69 persen pada tahun 2021, melonjak hingga 5,31 persen pada tahun 2022, kemudian sedikit menurun menjadi 5.05 persen pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 5,03 persen (Gambar 2.61).

Secara umum ekonomi Aceh mengalami pergerakan yang relatif sama dengan nasional dan terjadi kontrasksi pertumbuhan pada tahun 2020 akibat Covid 19. Pada tahun 2023-2024 laju pertumbuhan ekonomi Nasional mengalami perlambatan pertumbuhan, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Aceh menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dan 2024. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi Aceh masih berada dibawah rata-rata nasional.

Bila ditinjau berdasarkan komposisi penyumbang, pertumbuhan ekonomi dengan migas dan non migas selama periode 2019-2024 juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Kinerja perekonomian Aceh Non Migas tumbuh

signifikan bila dibandingkan dengan migas. (Gambar 2.10). Perekonomian dengan Migas tumbuh signifikan pada tahun 2024 sebesar 4.66 persen bila dibandingkan tahun 2023 sebesar 4.23 persen, sedangkan laju pertumbuhan tanpa Migas tumbuh sebesar 4.91 persen dan pengalami perlambatan pada tahun 2024 yang tumbuh sebesar 4.69 persen.. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Aceh secara umum mengalami perubahan dari dominasi sektor migas menuju sektor non migas. Dengan demikian, tingkat ketergantungan ekonomi Aceh terhadap sektor migas mulai berkurang dan sektor non migas tercatat tumbuh relatif lebih stabil.




*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh dan Nasional, 2025*

Gambar 2.62. Pertumbuhan Ekonomi Aceh ADHK Migas dan non Migas Tahun 2019-2024

Struktur perekonomian Aceh dari tahun 2019 hingga tahun 2024 masih dan didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan konstribusi rata-rata yang mencapai lebih dari 30 persen. Kemudian pada peringkat kedua diduduki oleh sektor Perdagangan dan Reparasi (Mobil dan Sepeda Motor), diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib pada posisi ke empat..

Pada Tabel 2.57, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh, 2019-2024, nilai nominal PDRB migas dan non migas terus mengalami peningkatan. Nilai PDRB migas padaa tahun 2019 sebesar Rp. 164.17 triliun dan pada tahun 2023 menjadi Rp.227.11 triliun dan pada tahun 2024 sebesar Rp.. Sedangkan PDRB non migas sebesar Rp.158.51 triliun meningkat menjadi Rp. 216.72 triliun pada tahun 2023 dan tahun 2024 meningkat menjadi Rp.243,20 triliun. Lapangan usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terus mengalami peningkatan dan penyumbang terbesar perekonomian Aceh, Pada tahun 2019 sebesar Rp.48.44 triliun menjadi Rp.75.32 triliun pada tahun 2024. Lapangan Usaha Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor peringkat kedua dengan nilai nomonal sebesar Rp.25.47 triliun dan meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp. 34.43 triliun dan meningkat menjadi Rp.36.46 triliun pada tahun 2024. Administrasi

Pemerintaahan, Pertahanan dan Jasa Jaminan Sosial Wajib menduduki peringkat ke tiga, pada tahun 2019 sebesar Rp.16.83 triliun menjadi Rp.22.08 triliun pada tahun 2024 dan peringkat ke empat yaitu Lapangan Usaha Konstruksi sebesar Rp.15.79 triliun menjadi Rp.21.39 triliun.

Tabel 2.57.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh, 2019-2024 (Triliun Rupiah)

| Kategori | Lapangan Usaha | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| A. | Pertanian, Kehutanan, Perikanan | 48,44 | 51,55 | 55,61 | 62,3 | 69,76 | 75,32 |
| B. | Pertambangan & Penggalian | 7,9 | 7,41 | 12,31 | 19,12 | 16,95 | 17,15 |
| B1. | Pertambangan Minyak & Gas Bumi | 4,17 | 3,59 | 6,3 | 10,89 | 8,56 | 8,94 |
| B2. | Pertambangan dan Penggalian Nonmigas | 3,73 | 3,82 | 6,01 | 8,24 | 8,37 | 8,02 |
| C. | Industri Pengolahan | 7,78 | 7,59 | 9,31 | 10,87 | 10,98 | 11,46 |
| C1. | Industri Batubara & Pengilangan Migas | 1,48 | 1,48 | 1,54 | 1,71 | 1,71 | 1,63 |
| C2. | Industri Nonmigas | 6,3 | 6,11 | 5,87 | 9,17 | 9,27 | 9,83 |
| D. | Pengadaan Listrik, Gas | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,28 |
| E. | Pengadaan Air | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,16 |
| F. | Konstruksi | 15,79 | 17,76 | 18,31 | 19,05 | 20,32 | 21,39 |
| G. | Perdagangan Besar & Eceran, & Reparasi Mobil & Sepeda Motor | 25,47 | 24,6 | 26,46 | 29,36 | 34,43 | 36,46 |
| H. | Transportasi & Pergudangan | 10,59 | 7,65 | 9,49 | 11,5 | 14,3 | 16,91 |
| I. | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 2,78 | 2,65 | 2,53 | 3,57 | 4,01 | 4,17 |
| J. | Informasi & Komunikasi | 4,67 | 5,19 | 5,57 | 6,2 | 6,59 | 6,69 |
| K. | Jasa Keuangan | 3,51 | 3,51 | 3,53 | 3,62 | 3,28 | 4,06 |
| L. | Real Estate | 7,16 | 7,17 | 7,53 | 8,13 | 8,56 | 8,58 |
| M.N | Jasa Perusahaan | 1,07 | 1,06 | 1,1 | 1,34 | 1,38 | 1,44 |
| O. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & JSW | 16,83 | 17,08 | 19,05 | 18,75 | 19,87 | 22,08 |
| P. | Jasa pendidikan | 4,9 | 5,24 | 5,51 | 5,78 | 5,95 | 6,42 |
| Q. | Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial | 4,62 | 5,14 | 5,8 | 6,8 | 6,99 | 7,3 |
| R, S, T, U | Jasa Lainnya | 2,36 | 2,47 | 2,57 | 2,95 | 3,28 | 3,38 |
| | PDRB | 164,17 | 166,37 | 184,98 | 209,698 | 227,018 | 243,202 |
| | PDRB NON MIGAS | 158,51 | 161,3 | 177,14 | 197,11 | 216,72 | |

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh, 2025*

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh, 2019-2024 sebagaimana pada tabel 2.15 relatif stabil kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan pada PDRB migas dan non migas dampak dari pandemic Covid 19 atau terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2019 nilai PDRB migas sebesar Rp.132.07 triliun dan menurun pada tahun 2020, menjadi 131.58 triliun atau sebesar Rp.49.00 milyar kemudian pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi Rp.146.93 triliun dan Rp.153.78 triliun. Sedangkan nilai PDRB non migas juga mengalami pergerakan yang sama yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp.125.91 dan pada tahu 2020 sebesar Rp.124.97 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp.94.00 milyar dan terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi Rp. 141.00 triliun dan relative mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi Rp. 147.62 triliun.

Tabel 2.58
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh, 2019-2024 (Triliun Rupiah)

| Kategori | Lapangan Usaha | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| A. | Pertanian, Kehutanan, Perikanan | 36,63 | 37,9 | 37,77 | 39,01 | 41,63 | 42,121 |
| B. | Pertambangan & Penggalian | 9,69 | 10,49 | 10,41 | 10,86 | 10,33 | 11,48 |
| B1. | Pertambangan Minyak & Gas Bumi | 4,99 | 5,42 | 4,61 | 5,35 | 4,7 | 4,94 |
| B2. | Pertambangan dan Penggalian Nonmigas | 4,7 | 5,07 | 5,8 | 5,5 | 5,63 | 3,16 |
| C. | Industri Pengolahan | 6,34 | 6,06 | 6,21 | 6,47 | 6,37 | 6,56 |
| C1. | Industri Batubara & Pengilangan Migas | 1,18 | 1,19 | 1,18 | 1,21 | 1,23 | 1,22 |
| C2. | Industri Nonmigas | 5,16 | 4,87 | 5,03 | 5,26 | 5,15 | 5,33 |
| D. | Pengadaan Listrik, Gas | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,25 |
| E. | Pengadaan Air | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| F. | Konstruksi | 12,57 | 13,9 | 13,84 | 13,52 | 14,02 | 14,63 |
| G. | Perdagangan Besar & Eceran, & Reparasi Mobil & Sepeda Motor | 20,32 | 19,24 | 20,05 | 21,33 | 23,26 | 23,85 |
| H. | Transportasi & Pergudangan | 9,85 | 7,06 | 8,43 | 9,04 | 9,72 | 11,35 |
| I. | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 1,79 | 1,65 | 1,55 | 2,05 | 2,22 | 2,28 |
| J. | Informasi & Komunikasi | 4,63 | 5,19 | 5,58 | 6,21 | 6,51 | 6,63 |
| K. | Jasa Keuangan | 2,34 | 2,36 | 2,24 | 2,1 | 1,87 | 2,29 |
| L. | Real Estate | 5,51 | 5,45 | 5,67 | 5,89 | 6,11 | 6,32 |
| M.N | Jasa Perusahaan | 0,87 | 0,84 | 0,84 | 0,94 | 0,93 | 0,97 |
| O. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & JSW | 11,85 | 11,46 | 12,19 | 12,18 | 12,41 | 13,33 |
| P. | Jasa pendidikan | 3,53 | 3,65 | 3,7 | 3,84 | 3,908 | 4,079 |
| Q. | Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial | 3,99 | 4,17 | 4,58 | 5,02 | 5 | 5,11 |
| R, S, T, U | Jasa Lainnya | 1,89 | 1,91 | 1,96 | 2,22 | 2,35 | 2,45 |
| | PDRB | 132,07 | 131,58 | 135,27 | 140,97 | 146,93 | 153,78 |
| | PDRB NON MIGAS | 125,91 | 124,97 | 129,48 | 134,41 | 141 | |

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh, 2025*

Besarnya kontribusi masing-masing sektor berdasarkan Harga Berlaku (ADHB) dapat dilihat pada Tabel 2.59.

Tabel 2.59
Distribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHB 2010 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019 – 2024 (Persen)

| Kategori | Lapangan Usaha | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| A. | Pertanian, Kehutanan, Perikanan | 29,51 | 30,98 | 30,06 | 29,71 | 30,73 | 30,97 |
| B. | Pertambangan & Penggalian | 4,82 | 4,45 | 6,65 | 9,12 | 7,5 | 7,05 |
| B1. | Pertambangan Minyak & Gas Bumi | 2,54 | 2,16 | 3,4 | 5,19 | 3,78 | 3,68 |
| B2. | Pertambangan dan Penggalian Nonmigas | 2,27 | 2,29 | 3,25 | 3,93 | 3,69 | 3,38 |
| C. | Industri Pengolahan | 4,47 | 4,56 | 5,04 | 5,19 | 4,84 | 4,71 |

| Kategori | Lapangan Usaha | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| C1. | Industri Batubara & Pengilangan Migas | 0,9 | 0,89 | 0,83 | 0,82 | 0,75 | 0,67 |
| C2. | Industri Nonmigas | 3,84 | 3,67 | 4,2 | 4,37 | 4,07 | 4,05 |
| D. | Pengadaan Listrik, Gas | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| E. | Pengadaan Air | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| F. | Konstruksi | 9,62 | 10,67 | 9,9 | 9,09 | 8,95 | 8,80 |
| G. | Perdagangan Besar & Eceran, & Reparasi Mobil & Sepeda Motor | 15,51 | 14,79 | 14,3 | 14 | 15,17 | 14,99 |
| H. | Transportasi & Pergudangan | 6,45 | 4,60 | 5,13 | 5,48 | 6,30 | 6,95 |
| I. | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 1,69 | 1,59 | 1,37 | 1,7 | 1,77 | 1,72 |
| J. | Informasi & Komunikasi | 2,85 | 3,12 | 3,01 | 2,96 | 2,9 | 2,75 |
| K. | Jasa Keuangan | 2,14 | 2,11 | 1,91 | 1,73 | 1,45 | 1,67 |
| L. | Real Estate | 4,36 | 4,31 | 4,07 | 3,88 | 3,77 | 3,52 |
| M.N | Jasa Perusahaan | 0,65 | 0,64 | 0,59 | 0,64 | 0,61 | 0,59 |
| O. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & JSW | 10,25 | 10,26 | 10,3 | 8,94 | 8,75 | 9,04 |
| P. | Jasa pendidikan | 2,98 | 3,15 | 2,98 | 2,75 | 2,62 | 2,64 |
| Q. | Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial | 2,81 | 3,09 | 3,13 | 3,24 | 3,08 | 3,00 |
| R, S, T, U | Jasa Lainnya | 1,44 | 1,49 | 1,39 | 1,41 | 1,45 | 1,39 |
| | PDRB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | PDRB NON MIGAS | 95,56 | 96,95 | 95,76 | 93,67 | 95,43 | |

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh, 2025*

Laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota selama tahun 2019-2023 sebagaimana tergambar pada Tabel 2.60 secara umum mengalami fluktuasi dan kontraksi. Pada tahun 2019 perekonomian relative stabil dan terdapat beberapa kabupaten yang tumbuh relative kecil atau pertumbuhan dibawah 4 persen dan yang terkecil adalah Kabupaten Gayo Lues dengan pertumbuhan sebesar 2.62 persen. Pertumbuhan tertinggi yang berada di atas rata-rata Aceh dan Nasional adalah Kota Sabang sebesar 5.82 persen dan Kabupaten Nagan Raya sebesar 6.77 persen. Kemudian pada tahun 2020, semua kabupaten/kota mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, kecuali 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu: Siumeulue (tumbuh 0.12%), Aceh Timur (tumbuh 1.54%), Aceh Barat (tumbuh 1.88%), Aceh Utara (0.98%), Nagan Raya (tumbuh 3.36%), Bener Meriah (tumbuh 0.09%) dan Subulussalam (tumbuh 1.97%). Baru pada tahun 2021-2023 seluruh PDRB kabupaten/kota tumbuh positif, kecuali Aceh Utara yang masih mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0.54 persen pada tahun 2021.

Perkembangan pertumbuhan PDRB kabupaten/kota pada tahun 2023 terdapat 3 (tiga) kota dan 5 (lima) kabupaten mengalami pertumbuhan positif namun terdapat perlambatan pertumbuhan bila dibandingkan pada tahun 2022 yaitu Kota Subulussalam sebesar (0.06 %), Kota Langsa (0.56%), Kota Banda Aceh (0.17%), Kabupaten Aceh Singkil (0.09%), Kabupaten Aceh Timur (0.64%), Kabupaten Pidie

(0.03%), Kabupaten Aceh Tamiang (0.02%) dan Kabupaten Aceh Utara mengalami perlambatan yang signifikan yaitu sebesar (4.18%). Kabupaten/kota yang mengalami pertumbuhan signifikan atau berada di atas rata-rata Aceh dan Nasional yaitu: Aceh Tengah (5.60%), Nagan Raya (7.57%), Bener Meriah (5.22%) dan Banda Aceh (5.06%).

Tabel 2.60.
Laju Pertumbuhan (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2019-2024 (Persen)

| Wilayah | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Simeulue | 4,6 | 0,12 | 3,14 | 4,2 | 4,63 | 4,43 |
| Aceh Singkil | 3,99 | -1,01 | 3,9 | 3,61 | 3,52 | 3,46 |
| Aceh Selatan | 4,43 | -0,05 | 2,46 | 3,11 | 3,53 | 3,21 |
| Aceh Tenggara | 4,23 | -0,17 | 1,57 | 2,69 | 3,04 | 3,59 |
| Aceh Timur | 4,42 | 1,54 | 1,94 | 3,73 | 2,09 | 4,63 |
| Aceh Tengah | 3,51 | -1,18 | 3,3 | 4,93 | 5,6 | 4,98 |
| Aceh Barat | 4,99 | 1,88 | 5,84 | 3,28 | 4,08 | 7,5 |
| Aceh Besar | | 0,39 | 2,44 | 3,87 | 4,37 | 4,95 |
| Pidie | 4,43 | -0,12 | 2,63 | 3,98 | 3,95 | 4,15 |
| Bireuen | 5 | -1,02 | 4,09 | 4,35 | 4,38 | 4,52 |
| Aceh Utara | 3,48 | 0,98 | -0,54 | 4,69 | 0,51 | 3,56 |
| Aceh Barat Daya | 4,75 | -0,65 | 2,88 | 3,87 | 3,92 | 4,24 |
| Gayo Lues | 1,26 | 0,88 | 2,32 | 3,51 | 3,98 | 3,26 |
| Aceh Tamiang | 4,55 | 0,42 | 0,88 | 3,27 | 2,25 | 4,25 |
| Nagan Raya | 6,77 | 3,36 | 4,26 | 3,06 | 6,83 | 4,38 |
| Aceh Jaya | 3,75 | -0,62 | 2,59 | 3,68 | 4,15 | 3,83 |
| Bener Meriah | 4,32 | 0,09 | 3,42 | 3,42 | 5,22 | 3,27 |
| Pidie Jaya | | -0,79 | 2,03 | 3,57 | 4,24 | 4,55 |
| Banda Aceh | 4,13 | -3,39 | 5,5 | 5,23 | 5,06 | 6,08 |
| Sabang | 5,82 | -1,29 | 2,67 | 2,57 | 2,96 | 4,16 |
| Langsa | 4,39 | -1,12 | 3,92 | 4,78 | 4,22 | 4,43 |
| Lhokseumawe | 3,98 | -1,8 | 3,84 | 4,01 | 4,21 | 4,46 |
| Subulussalam | 4,42 | 1,97 | 3,87 | 4,12 | 4,06 | 4,12 |
| Aceh | 4,12 | -0,37 | 2,81 | 4,21 | 4,23 | 4,66 |
| Nasional | 5,02 | -2,07 | 3,69 | 5,31 | 5,05 | 5,03 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh dan Nasional, 2025*

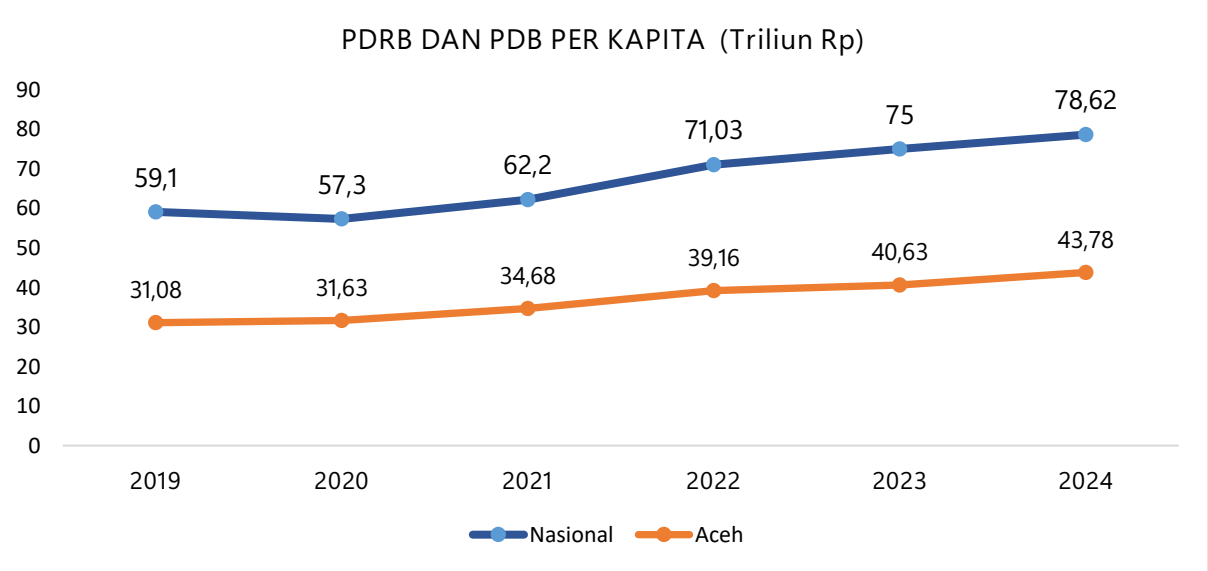
Berdasarkan indikator pertumbuhan PDRB kabupaten/kota sepanjang tahun 2019-2024, dapat disimpulkan bahwa kabupaten/kota yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonominya diindikasikan adanya sektor atau lapangan usaha yang tidak produktif (tidak efisien dalam pengelolaan, tidak inovatif dan sumber bahan baku yang terbatas/berkurang). Kabupaten/kota ini perlu mencari lapangan usaha alternatif sebagai unggulan untuk pengembangan. Sedangkan untuk kabupaten/kota yang mengalami pertumbuhan signifikan dapat terus melakukan inovasi melalui diversifikasi produk, ekspansi usaha, meningkatkan daya saing dan keberlanjutan.

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita Aceh 2019-2024 secara konsisten mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, PDB Perkapita Aceh sebesar 31,08 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 40,63 juta rupiah.

Jika dibandingkan dengan nasional, PDB Per Kapita Aceh jauh berada di bawah rata-rata nasional. PDRB perkapita Aceh pada tahun 2024 sebesar Rp. 43,78 juta Rupiah lebih kecil bila dibandingkan dengan PDB per kapita pada tahun 2019 sebesar Rp. 59.1 Juta. PDRB Per Kapita Nasional pada tahun 2019 sebesar 59,10 ribu rupiah, dan terus mengalami peningkatan tajam menjadi Rp. 78,62 Juta pada tahun 2024. Sementara trend kenaikan PDB Per Kapita Aceh terlihat melemah dan semakin menjauh dari rerata PDB nasional.

Untuk melihat persebaran tingkat kesejahteraan penduduk kabupaten/kota di Aceh, dapat memperhatikan PDRB Kabupaten/Kota, Aceh dan PDB Nasional Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2019-2024 sebagaimana ditunjukkan dalam table di bawah ini. Secara umum dapat dikatakan bahwa selama periode 2019-2024, PDRB per kapita Kabupaten/kota masih berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional kecuali Kota Banda Aceh (98.20 juta Rupiah) yang berada di atas rata-rata Aceh dan Nasional. Sedangkan




*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh dan Nasional, 2025*

Gambar 2.63. PDRB Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB Tahun 2019-2024 (Juta Rupiah)

Selanjutnya terdapat beberapa kabupaten/kota dengan PDRB perkapita berada di atas rata-rata Aceh, namun masih di bawah Nasional yaitu, Kabupaten Aceh Tengah (47.28 Juta Rupiah), Kabupaten Aceh Barat (67.98 Juta Rupiah), Nagan Raya (70.46 Juta), Aceh Utara, (47.60 Juta Rupiah) Kota Sabang (44.61 Juta Rupiah) dan Lhokseumawe (59.12 Juta Rupiah). Kabupaten Aceh Besar dan Kota Sabang yang pada tahun 2019-2020

berada di atas-rata-rata Aceh, kemudian pada tahun 2021-2023 mengalami penurunan hingga berada di bawah rata-rata Aceh. Kondisi ini mengindikasikan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi sektoral di kabupaten/kota tersebut dan terjadinya percepatan perekonomian di beberapa kabupaten/kota lainnya. Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota, Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah), sebagaimana disajikan pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61.
PDRB Kabupaten/Kota, Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB
Tahun 2019-2024 (Juta Rupiah)

| Kab/Kota, Aceh dan Nasional | PDRB/Kapita/Tahun (Juta Rupiah) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Simeulue | 23.49 | 24.55 | 26.15 | 28.12 | 30.22 | 31.94 |
| Aceh Singkil | 19.62 | 19.23 | 21.13 | 22.96 | 24.03 | 25.36 |
| Aceh Selatan | 22.93 | 23.85 | 25.47 | 27.21 | 29.37 | 30.85 |
| Aceh Tenggara | 23.01 | 23.00 | 24.24 | 25.64 | 27.10 | 28.74 |
| Aceh Timur | 23.91 | 25.18 | 27.40 | 30.29 | 31.50 | 33.67 |
| Aceh Tengah | 35.73 | 34.41 | 36.86 | 40.17 | 43.97 | 47.28 |
| Aceh Barat | 38.56 | 40.90 | 49.80 | 62.82 | 66.28 | 67.98 |
| Aceh Besar | 31.64 | 32.95 | 34.24 | 37.12 | 40.20 | 42.99 |
| Pidie | 23.84 | 24.78 | 25.84 | 27.98 | 30.11 | 32.15 |
| Bireuen | 27.78 | 30.03 | 31.91 | 34.58 | 37.57 | 40.03 |
| Aceh Utara | 31.96 | 32.76 | 38.08 | 45.83 | 45.56 | 47.60 |
| Aceh Barat Daya | 25.74 | 26.07 | 27.13 | 29.38 | 31.63 | 33.72 |
| Gayo Lues | 28.10 | 27.18 | 28.32 | 29.88 | 31.81 | 33.55 |
| Aceh Tamiang | 25.13 | 25.59 | 29.83 | 34.62 | 35.15 | 37.34 |
| Nagan Raya | 45.02 | 45.63 | 53.43 | 61.75 | 68.54 | 70.46 |
| Aceh Jaya | 27.72 | 28.29 | 30.28 | 32.50 | 34.55 | 36.36 |
| Bener Meriah | 30.29 | 28.23 | 30.62 | 32.92 | 35.55 | 37.90 |
| Pidie Jaya | 21.75 | 22.17 | 22.99 | 24.54 | 26.46 | 28.38 |
| Banda Aceh | 69.25 | 73.31 | 78.06 | 83.31 | 90.76 | 98.20 |
| Sabang | 44.61 | 37.41 | 38.42 | 38.85 | 40.73 | 42.81 |
| Langsa | 29.70 | 28.49 | 30.61 | 32.70 | 35.19 | 37.00 |
| Lhokseumawe | 43.56 | 47.05 | 49.34 | 52.91 | 56.60 | 59.12 |
| Subulussalam | 21.59 | 20.00 | 22.83 | 24.99 | 26.43 | 27.88 |
| Aceh | 30.88 | 31.63 | 34.67 | 38.90 | 41.42 | 43.78 |
| Nasional | 59.10 | 57.30 | 62.20 | 71.03 | 75.00 | 78.62 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh dan Nasional, 2025*

## C. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (disparitas) pendapatan agregat, yaitu suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Semakin besar nilai Indeks Gini menunjukkan ketimpangan pendapatan (pengeluaran) masyarakat yang semakin lebar. Jika Indeks Gini bernilai 0 berarti kemerataan sempurna,

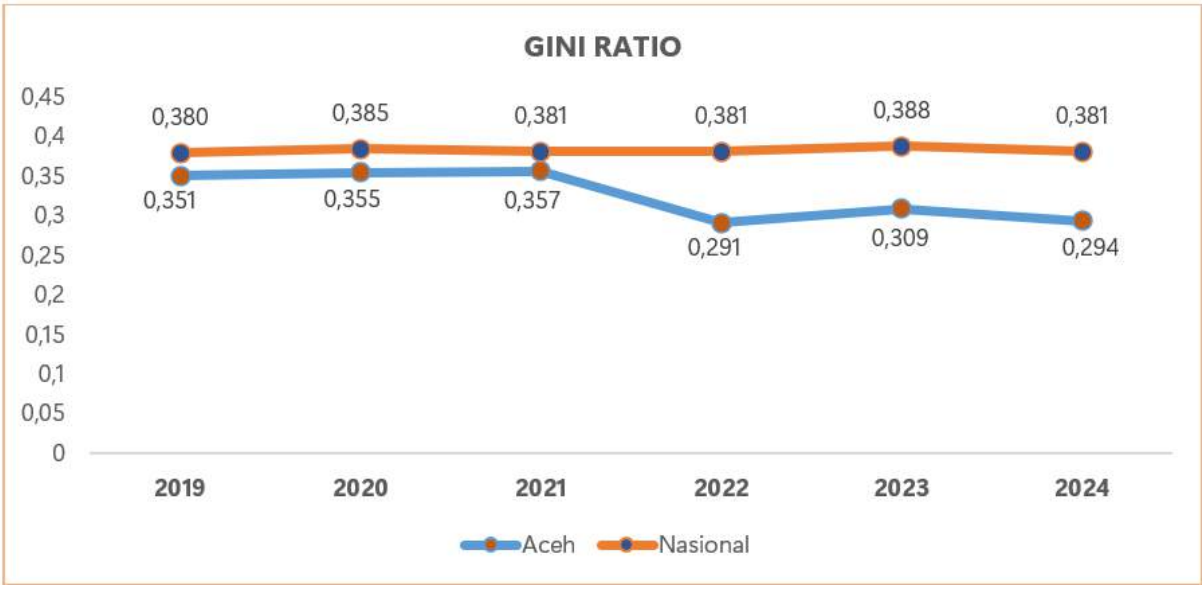
sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Koefesien Gini dari negara-negara yang mengalami ketidakmerataan tinggi berkisar antara 0.50-0.70; ketidakmerataan sedang berkisar antara 0.36-0.49; dan yang mengalami ketidakmerataan rendah antara 0.20-0.35.

Gini Rasio membantu Pemerintah Aceh dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat Aceh. Perkembangan Gini Rasio Aceh dan Nasional tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.65.




*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional 2025*

Gambar 2.64. Perkembangan Gini Ratio Provinsi Aceh Periode Maret 2019-Maret 2024




*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional 2025*

Gambar 2.65. Gini Rasio Aceh dan Nasional, 2019-2024

Gambar 2.65 menunjukkan bahwa dalam kurun periode September 2019-2022 dan Maret 2023-2024, Rasio Gini Aceh relatif lebih baik atau berada di bawah rata-rata nasional. Indek Gini Aceh dan Nasional mengalami pola pergerakan fluktuasi yang sama. Pada September tahun 2019 Indek Gini Aceh sebesar 0.321 dan mengalami penurunan hingga menjadi 0.296 pada Maret tahun 2023. Sedangkan Nasional

mengalami peningkatan dari 0,380 pada September tahun 2019 menjadi 0,388 pada Maret 2023. Koefisien gini Aceh terendah terjadi pada September tahun 2022 sebesar 0.291 dan tertinggi pada September tahun 2021 sebesar 0.323. Pada tahun 2024 gini rasio Aceh dan nasional memiliki kecenderungan yang sama dengan penurunan masing-masing menjadi 0,294 dan 0,381. Secara umum Rasio Gini Aceh ini masih dikategorikan sebagai ketimpangan sedang karena berada di bawah 0,40. Bila dibandingkan dengan nasional, maka ketimpangan Aceh relatif lebih baik atau berada di bawah rata-rata Nasional.

Tabel 2.62.
Gini Rasio Kabupaten/Kota, Aceh dan Nasional Tahun 2019 – 2024 (Maret)

| Kabupaten/Kota | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Simeulue | 0,34 | 0,296 | 0,31 | 0,279 | 0,297 | 0,259 |
| Aceh Singkil | 0,282 | 0,287 | 0,336 | 0,296 | 0,270 | 0,26 |
| Aceh Selatan | 0,273 | 0,313 | 0,295 | 0,257 | 0,258 | 0,274 |
| Aceh Tenggara | 0,278 | 0,315 | 0,247 | 0,274 | 0,277 | 0,233 |
| Aceh Timur | 0,249 | 0,282 | 0,271 | 0,283 | 0,224 | 0,221 |
| Aceh Tengah | 0,256 | 0,331 | 0,29 | 0,27 | 0,248 | 0,258 |
| Aceh Barat | 0,33 | 0,304 | 0,295 | 0,265 | 0,237 | 0,249 |
| Aceh Besar | 0,288 | 0,352 | 0,296 | 0,293 | 0,299 | 0,262 |
| Pidie | 0,249 | 0,249 | 0,22 | 0,223 | 0,213 | 0,209 |
| Bireuen | 0,295 | 0,304 | 0,296 | 0,275 | 0,258 | 0,258 |
| Aceh Utara | 0,308 | 0,261 | 0,283 | 0,275 | 0,294 | 0,267 |
| Aceh Barat Daya | 0,301 | 0,273 | 0,282 | 0,24 | 0,250 | 0,226 |
| Gayo Lues | 0,29 | 0,28 | 0,263 | 0,254 | 0,241 | 0,241 |
| Aceh Tamiang | 0,289 | 0,264 | 0,276 | 0,305 | 0,277 | 0,256 |
| Nagan Raya | 0,252 | 0,275 | 0,257 | 0,236 | 0,207 | 0,159 |
| Aceh Jaya | 0,253 | 0,252 | 0,312 | 0,299 | 0,267 | 0,254 |
| Bener Meriah | 0,267 | 0,259 | 0,255 | 0,257 | 0,226 | 0,23 |
| Pidie Jaya | 0,236 | 0,227 | 0,236 | 0,231 | 0,221 | 0,214 |
| Banda Aceh | 0,289 | 0,303 | 0,347 | 0,391 | 0,330 | 0,339 |
| Sabang | 0,281 | 0,271 | 0,293 | 0,298 | 0,306 | 0,295 |
| Langsa | 0,363 | 0,356 | 0,34 | 0,368 | 0,330 | 0,305 |
| Lhokseumawe | 0,306 | 0,307 | 0,296 | 0,348 | 0,293 | 0,326 |
| Subulussalam | 0,342 | 0,344 | 0,303 | 0,33 | 0,296 | 0,276 |
| Aceh | 0,319 | 0,323 | 0,324 | 0,311 | 0,296 | 0,294 |
| Nasional | 0,382 | 0,381 | 0,384 | 0,384 | 0,388 | 0,379 |

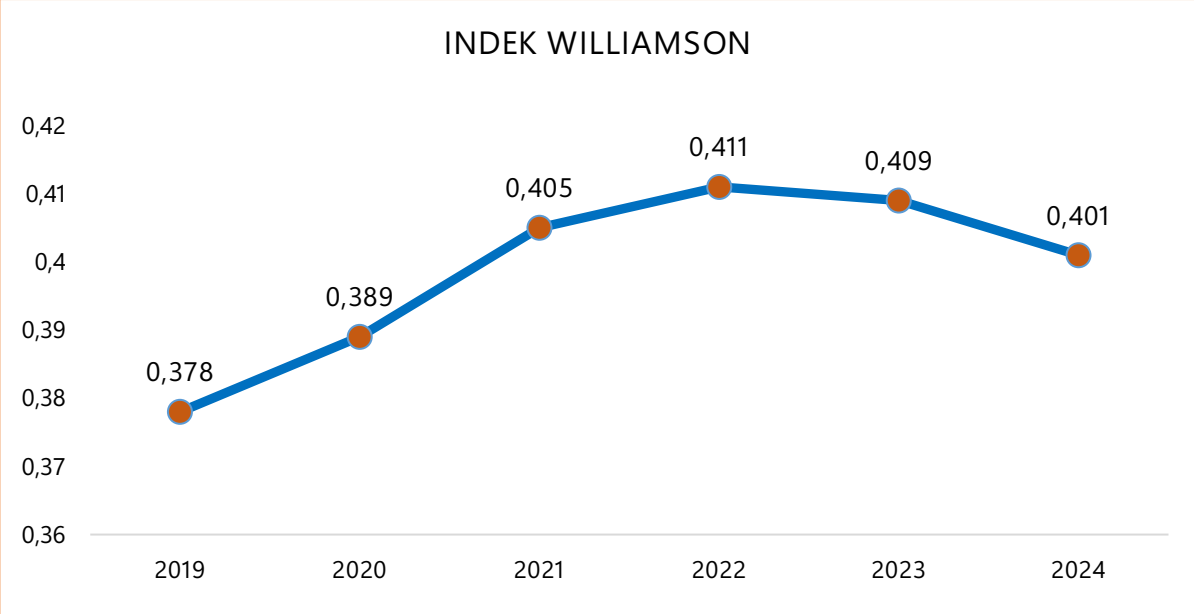
*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional , 2025*

Persebaran Indek Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh menggambarkan suatau kondisi yang relative berada pada kisaran ketidakmerataan sedang dan rendah (0.20-0.49) dan masih berada di bawah rata-rata Nasional. Indek Gini kabupaten terkecil terdapat di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2019 sebesar 0.236 dan yang tertinggi di Kota Langsa sebesar 0.363. Selanjutnya Indek Gini kategori terkecil pada tahun 2024 yaitu Kabupaten Nagan Raya yaitu 0.159 dan yang tertinggi terdapat di dua kota yaitu

kota Banda Aceh dan kota Lhokseumawe dengan Indek Gini masing-masing sebesar 0.339 dan 0.326. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan distribusi pendapan masyarakat di Aceh relative merata, namun perlu intervensi melalui program dan kegiatan pada sektor prioritas yang relatif memberi peluang dan kesempatan kerja. Produktivitas dan kreativitas masyarakat terutama kaum melinial dapat memberikan keseimbangan pendapatan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.

D. Indeks Williamson (Ketimpangan Regional)

Ketimpangan pembangunan antar wilayah (*regional disparity*) merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kondisi geografis suatu wilayah, serta adanya wilayah yang sudah maju dan wilayah yang masih terbelakang. Ukuran ketimpangan antar wilayah (regional) cerminan dari kemajuan pembangunan di suatu wilayah dengan menggunakan Indek Williamson. Indek Williamson merupakan persebaran (*coeffesien of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penduduk daerah-daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis. Walaupun indek ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan ketimpangan namun alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok.




*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025 (data diolah)*

Gambar 2.66. Perkembangan Nilai Indeks Williamson Tahun 2019-2024

Gambar 2.66 menunjukkan perkembangan nilai ketimpangan berdasarkan Indeks Williamson dari tahun 2019 - 2024 yang dikategorikan sedang menuju rendah. Nilai tersebut terlihat dari capaian pada tahun 2019 sebesar 0,378 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 0,411, dengan rata-rata peningkatan pertumbuhan sebesar 2.00 persen dan pada tahun 2023-2024 kembali mengalami perbaikan ketimpangan ditandai dengan nilai indek yang menurun masing-masing

sebesar 0.409 dan 0,401. Selama kurun waktu 6 tahun (2019-2023) relatif mengalami penurunan ketimpangan. Nilai Indeks Williamson ini mengindikasikan adanya perubahan dari tinggi dan rendahnya nilai pendapatan perkapita di beberapa Kabupaten/Kota karena dampak Covid-19. Sedangkan nilai indek yang semakin menurun mencerminkan terdapat pertumbuhan ekonomi yang signifikan di beberapa kabupaten/kota dengan meningkatnya harga komoditi non migas (seperti batubara dan Sawit). Walaupun ketimpangan di Aceh relative tergolong sedang, namun kondisi ketimpangan ini mengindikasikan adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki antar kabupaten/ikota yang belum dioptimalkan pemanfaatannya.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat namun tidak diimbangi dengan pemerataan, maka akan berdampak pada ketimpangan wilayah. Indeks ketimpangan wilayah dapat diukur melalui Indeks Williamson dengan interval indeks 0-1. Kriteria besaran indek Williamson adalah 0 < IW < 1. Jika IW= 0, berarti pembangunan wilayah sangat merata, IW=1, berarti pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan sempurna), IW~0, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata dan IW~1, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata. Indeks Williamson mencerminkan ketimpangan pada tingkat pembagunan ekonomi suatu daerah.

## E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Aceh meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 IPM Aceh sedikit lebih tinggi dari IPM Nasional. IPM Aceh berada pada angka 75,36 sementara nasional 75,02. Meskipun demikian, masih terdapat disparitas IPM di kabupaten/kota seperti yang terlihat pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh dan Nasional Tahun 2020 - 2024

| No | Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Simeulue | 66.03 | 66.41 | 67.27 | 69.98 | 70,95 |
| 2 | Aceh singkil | 68.94 | 69.22 | 69.62 | 71.14 | 71,76 |
| 3 | Aceh Selatan | 67.12 | 67.44 | 67.87 | 71.14 | 71,82 |
| 4 | Aceh Tenggara | 69.37 | 69.44 | 70.32 | 72.93 | 73,59 |
| 5 | Aceh Timur | 67.63 | 67.83 | 68.72 | 70.73 | 71,29 |
| 6 | Aceh Tengah | 73.24 | 73.37 | 73.95 | 76.45 | 77,27 |
| 7 | Aceh Barat | 71.38 | 71.67 | 72.34 | 74.62 | 75,45 |
| 8 | Aceh Besar | 73.56 | 73.58 | 74.00 | 75.98 | 76,57 |
| 9 | Pidie | 70.63 | 70.70 | 71.20 | 72.95 | 73,60 |
| 10 | Bireuen | 72.28 | 72.33 | 73.16 | 74.56 | 75,39 |
| 11 | Aceh Utara | 69.33 | 69.46 | 70.22 | 72.50 | 73,35 |
| 12 | Aceh Barat Daya | 66.75 | 66.99 | 67.41 | 70.47 | 71,16 |
| 13 | Gayo Lues | 67.22 | 67.56 | 68.25 | 70.82 | 71,75 |
| 14 | Aceh Tamiang | 69.24 | 69.48 | 70.43 | 73.02 | 74,00 |
| 15 | Nagan Raya | 69.18 | 69.31 | 70.10 | 72.15 | 73,10 |
| 16 | Aceh Jaya | 69.75 | 69.84 | 70.36 | 72.44 | 73,40 |
| 17 | Bener Meriah | 72.98 | 73.27 | 73.90 | 76.06 | 76,58 |
| 18 | Pidie Jaya | 73.20 | 73.60 | 74.34 | 76.04 | 76,39 |

| No | Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 19 | Banda Aceh | 85.41 | 85.71 | 86.28 | 88.32 | 88,85 |
| 20 | Sabang | 75.78 | 76.11 | 76.85 | 78.70 | 79,50 |
| 21 | Langsa | 77.17 | 77.44 | 77.82 | 80.50 | 80,96 |
| 22 | Lhokseumawe | 77.31 | 77.57 | 78.04 | 80.26 | 80,89 |
| 23 | Subulussalam | 64.93 | 65.27 | 66.20 | 69.66 | 70,64 |
| **ACEH** | | **73,29** | **73,48** | **74,11** | **74,70** | **75,36** |
| **NASIONAL** | | **71.92** | **71.94** | **72.29** | **72.91** | **75,02** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025*

Berdasarkan data pada Tabel 2.63, terlihat bahwa tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh mengalami peningkatan yang cukup stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, IPM Aceh berada di angka 73,29, kemudian naik menjadi 73,48 pada 2021, dan terus meningkat hingga mencapai 75,36 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.

Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, IPM Aceh sejak tahun 2020 konsisten berada di atas angka nasional, meskipun selisihnya semakin mengecil. Pada tahun 2020, IPM nasional tercatat 71,92, sementara Aceh berada di angka 73,29. Namun pada tahun 2024, IPM nasional melonjak ke 75,02, mendekati capaian Aceh yang mencapai 75,36. Kota dengan IPM tertinggi di Aceh adalah Kota Banda Aceh, yang mencatat angka 85,41 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 88,85 di tahun 2024. Angka ini jauh melampaui rata-rata provinsi maupun nasional. Disusul oleh Kota Langsa dengan IPM 80,96 dan Kota Lhokseumawe 80,89 pada tahun 2024.

Sebaliknya, daerah dengan IPM terendah adalah Kota Subulussalam, yang meskipun menunjukkan peningkatan dari 64,93 (2020) menjadi 70,64 (2024), tetap menjadi yang terendah di Provinsi Aceh. Kabupaten Simeulue dan Aceh Barat Daya juga mencatat IPM yang relatif rendah, walaupun keduanya menunjukkan tren peningkatan yang positif.

Dalam lima tahun terakhir, beberapa daerah menunjukkan pertumbuhan IPM yang cukup pesat. Di antaranya adalah Kabupaten Aceh Selatan, yang meningkat dari 67,12 (2020) menjadi 71,82 (2024), Simeulue dari 66,03 menjadi 70,95, dan Subulussalam dari 64,93 ke 70,64. Capaian ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan manusia yang signifikan, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya memiliki tingkat IPM yang rendah.

## F. Kemiskinan

Kinerja penurunan angka kemiskinan Aceh berada pada tracknya. Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, seluruh kab/kota di Aceh menunjukkan kinerja yang sejalan disemua tahun (2017 – 2024). Angka kemiskinan Aceh sempat mengalami kenaikan diseluruh daerah di Provinsi Aceh pada tahun 2021. Kenaikan tersebut merupakan imbas dari kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat saat covid 19 melanda dunia.

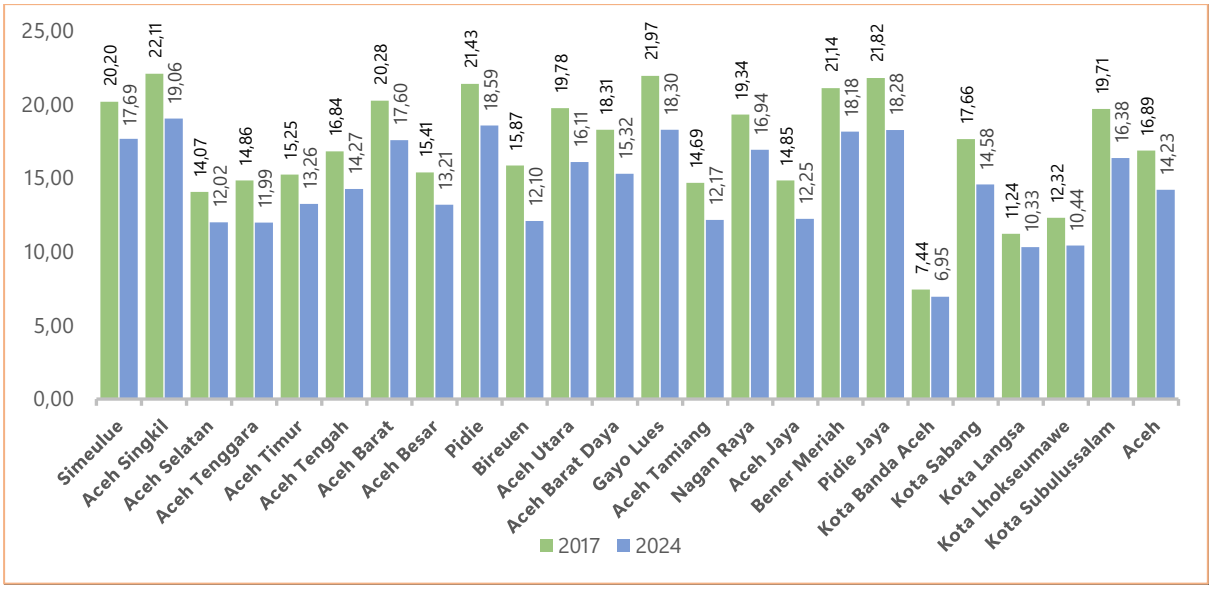
Kabupaten/kota yang paling terimbas kebijakan penanganan covid 19 adalah Kota Banda Aceh, yang mengalami kenaikan hingga 10 persen yakni dari 6.9 persen menjadi 7.61 persen.

Tabel 2.64.
Persentase Penduduk Miskin Provinsi se-Aceh Tahun 2017 – 2024

| Kab/Kota, Aceh | Tahun | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Simeulue | 20,2 | 19,78 | 18,99 | 18,49 | 18,98 | 18,37 | 17,92 | 17,69 |
| Aceh Singkil | 22,11 | 21,25 | 20,78 | 20,2 | 20,36 | 19,18 | 19,15 | 19,06 |
| Aceh Selatan | 14,07 | 14,01 | 13,09 | 12,87 | 13,18 | 12,43 | 12,1 | 12,02 |
| Aceh Tenggara | 14,86 | 14,29 | 13,43 | 13,21 | 13,41 | 12,83 | 12,45 | 11,99 |
| Aceh Timur | 15,25 | 14,49 | 14,47 | 14,08 | 14,45 | 13,91 | 13,39 | 13,26 |
| Aceh Tengah | 16,84 | 15,58 | 15,5 | 15,08 | 15,26 | 14,5 | 14,38 | 14,27 |
| Aceh Barat | 20,28 | 19,31 | 18,79 | 18,34 | 18,81 | 17,93 | 17,86 | 17,6 |
| Aceh Besar | 15,41 | 14,47 | 13,92 | 13,84 | 14,05 | 13,38 | 13,38 | 13,21 |
| Pidie | 21,43 | 20,47 | 19,46 | 19,23 | 19,59 | 18,79 | 18,78 | 18,59 |
| Bireuen | 15,87 | 14,31 | 13,56 | 13,06 | 13,25 | 12,51 | 12,12 | 12,1 |
| Aceh Utara | 19,78 | 18,27 | 17,39 | 17,02 | 17,43 | 16,86 | 16,64 | 16,11 |
| Aceh Barat Daya | 18,31 | 17,1 | 16,26 | 15,93 | 16,34 | 15,44 | 15,43 | 15,32 |
| Gayo Lues | 21,97 | 20,7 | 19,87 | 19,32 | 19,64 | 18,87 | 18,82 | 18,3 |
| Aceh Tamiang | 14,69 | 14,21 | 13,38 | 13,08 | 13,34 | 12,61 | 12,51 | 12,17 |
| Nagan Raya | 19,34 | 18,97 | 17,97 | 17,7 | 18,23 | 17,38 | 17,25 | 16,94 |
| Aceh Jaya | 14,85 | 14,16 | 13,36 | 12,87 | 13,23 | 12,51 | 12,42 | 12,25 |
| Bener Meriah | 21,14 | 20,13 | 19,3 | 18,89 | 19,16 | 18,39 | 18,31 | 18,18 |
| Pidie Jaya | 21,82 | 20,17 | 19,31 | 19,19 | 19,55 | 18,45 | 18,4 | 18,28 |
| Banda Aceh | 7,44 | 7,25 | 7,22 | 6,9 | 7,61 | 7,13 | 7,04 | 6,95 |
| Sabang | 17,66 | 16,31 | 15,6 | 14,94 | 15,32 | 14,66 | 14,59 | 14,58 |
| Langsa | 11,24 | 10,79 | 10,57 | 10,44 | 10,96 | 10,62 | 14,59 | 10,33 |
| Lhokseumawe | 12,32 | 11,81 | 11,18 | 10,8 | 11,16 | 10,84 | 10,73 | 10,44 |
| Subulussalam | 19,71 | 18,51 | 17,95 | 17,6 | 17,65 | 16,94 | 16,41 | 16,38 |
| Aceh | 16,89 | 15,97 | 15,01 | 14,99 | 15,53 | 14,64 | 14,45 | 14,23 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025*

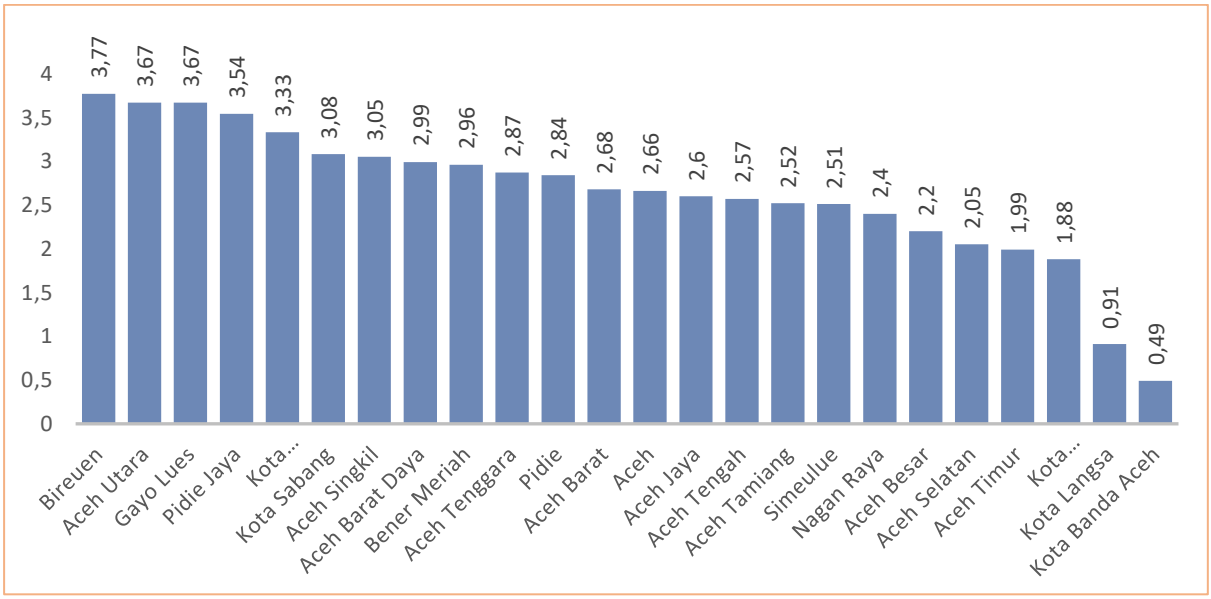
Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Pidie, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Bener Meriah merupakan wilayah sebaran kemiskinan tertinggi di Aceh dengan poin rata-rata diatas 18 persen dan menjadi fokus penurunan angka kemiskinan Aceh. Enam wilayah lainnya, Kab. Simeulue, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Utara, Kota Subulussalam, Kab. Aceh barat Daya berada pada rang 15 hingga dibawah 18 persen. Banda Aceh menjadi satu satunya wilayah di Aceh yang memiliki persentase kemiskinan di bawah 10 persen. Dalam hal kinerja penurunan angka kemiskinan dalam 2017 – 2024, Aceh mengalami penurunan sebesar 2.66 poin atau setara dengan 0.38 poin pertahun. Untuk Kab. Bireuen menjadi daerah paling perform dalam kurun waktu delapan tahun terakhir dengan kinerja penurunan sebesar 3.77 poin. Wilayah lain yang memiliki kinerja penurunan angka kemiskinan diatas 3 persen adalah Kab. Aceh Utara, Kab. Gayo Lues, Kab. Pidie Jaya, Kota Subulussalam, Kota Sabang dan Kab. Aceh Singkil.




*Sumber: BPS Aceh (2025), data diolah*

Gambar 2.67. Perkembangan Angka Kemiskinan di Aceh 2017 dan 2024

Selain angka kemiskinan, terdapat indikator lain dalam memahami kondisi kemiskinan yang lebih komprehensif, yaitu indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan menggambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.



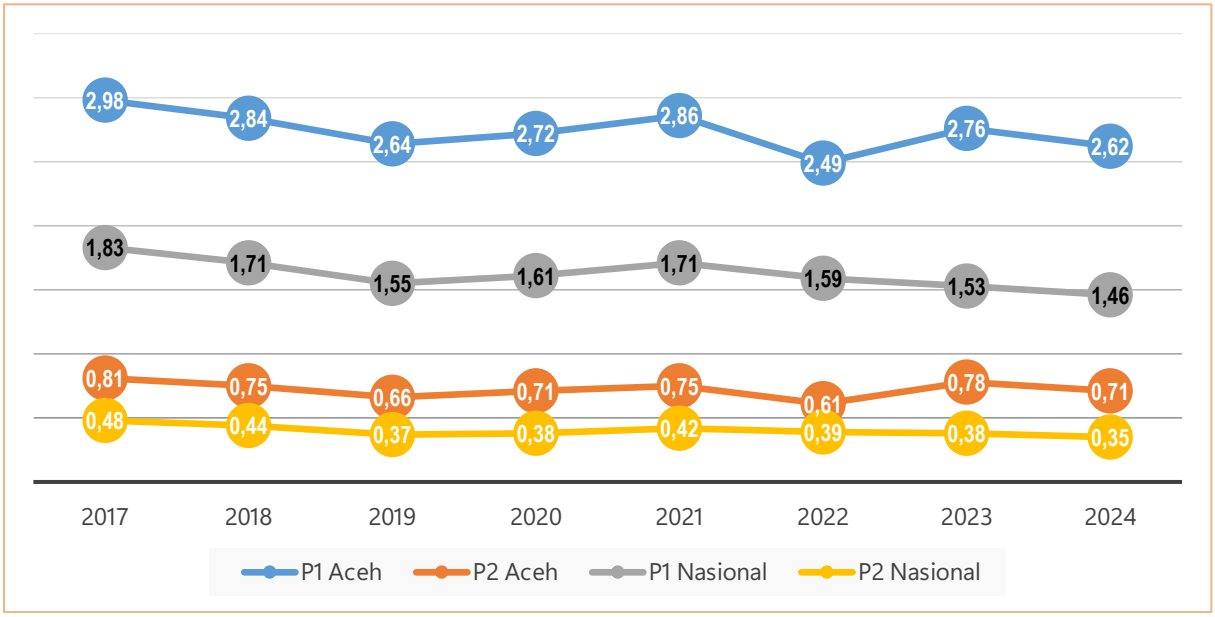

*Sumber: BPS Aceh (2025), data diolah*

Gambar 2.68. Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan (2017-2024)

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), dan Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) Aceh dan Nasional, periode 2017-2024 mengalami pergerakan pola penurunan dan kenaikan yang sama. Namun pada 2024 baik P1 maupun P2 Aceh mengalami penurunan, sementara P1 dan P2 rata-rata nasional stagnan pada level sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa terdapat

progress yang baik pada 2024 dalam hal pengeluaran penduduk miskin Aceh yang cenderung makin mendekati garis kemiskinan maupun ketimpangan pengeluaran penduduk miskin Aceh yang juga semakin menyempit.

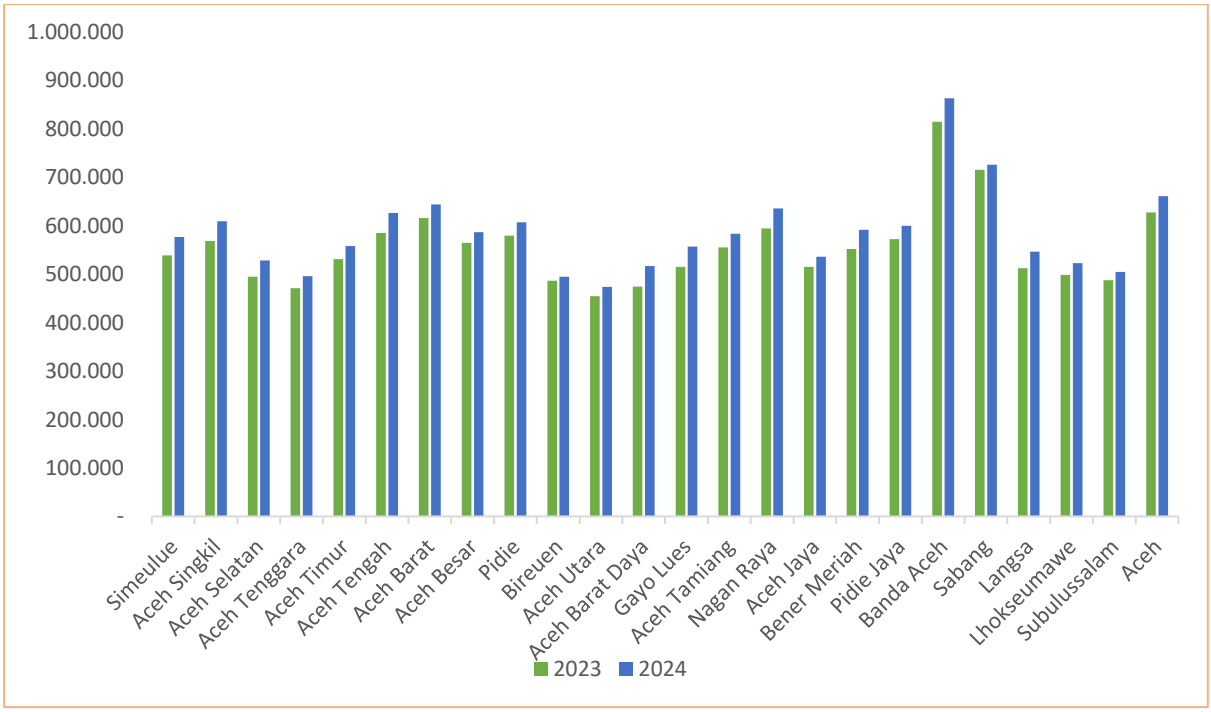
Faktor lain yang perlu menjadi perhatian dalam upaya penurunan angka kemiskinan adalah garis kemiskinan itu sendiri. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Aceh pada periode tahun 2017-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.69.




*Sumber: BPS Aceh (2025), data diolah*

Gambar 2.69. Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Aceh Tahun 2017 – 2024

Garis Kemiskinan pada 2024 mengalami perubahan sebesar 5,37 persen jika dibandingkan dengan 2023, yaitu dari Rp. 627.534,- per kapita per bulan menjadi Rp. 661.227,- per kapita per bulan. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Perubahan garis kemiskinan ini sangat erat kaitannya dengan inflasi di masing-masing kabupaten kota, sehingga pengendalian inflasi menjadi penting bagi upaya penanggulangan kemiskinan terutama dalam hal intervensi pengurangan beban penduduk miskin.




*Sumber: BPS Aceh (2025), data diolah*

Gambar 2.70. Garis Kemiskinan Aceh Tahun 2023-2024

Garis kemiskinan bervariasi antar daerah, hal ini mengindikasikan bahwa standar kemiskinan itu berbeda antar daerah. Kota Banda Aceh merupakan Kabupaten/kota yang mempunyai garis kemiskinan tertinggi yaitu Rp. 862.944,-, sementara Kab. Aceh Utara mempunyai garis kemiskinan yang terendah Rp. 473.719,-.

## G. Pengangguran

Secara umum perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Aceh menunjukkan tren yang positif terutama pada indikator pengangguran. Meskipun terjadi peningkatan secara jumlah di tahun 2020 akibat covid-19 yang didominasi oleh pekerja formal, namun jumlah tersebut terus menurun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Berdasarkan Tabel 2.22 menggambarkan bahwa tahun 2020 jumlah pengangguran sebanyak 167 ribu jiwa dan terus menurun menjadi 153 ribu jiwa di tahun 2024. Trend penurunan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dapat dilihat pada Tabel 2.65.

Tabel 2.65.
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik, Tahun 2019-2024

| Karakteristik | | Tahun (Ribu Orang) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Penduduk Usia Kerja | | 3.809 | 3.881 | 3.951 | 4.020 | 4.021 | 4.087 |
| a. | Angkatan Kerja | 2.405 | 2.527 | 2.520 | 2.553 | 2.604 | 2.661 |
| | - Bekerja | 2.257 | 2.360 | 2.361 | 2.395 | 2.447 | 2.508 |
| | - Pengangguran | 148 | 167 | 159 | 158 | 157 | 153 |
| b. | Bukan Angkatan Kerja | 1.404 | 1.354 | 1.431 | 1.467 | 1.417 | 1.426 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025*

Bila dilihat dari distribusi pengangguran berdasarkan kelompok pendidikan, sebagian besar pengangguran didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMTA kejuruan, dengan persentase mencapai 10,59 persen. Bila dilihat dari perkembangannya persentase tersebut masih berfluktuasi meskipun kecenderungannya masih cukup tinggi di atas 10 persen. Sedangkan TPT untuk tingkat pendidikan SMA umum cenderung berkurang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Tingkat pengangguran penduduk berpendidikan tinggi juga cukup memberi perhatian bagi Aceh secara umum karena masih berada di atas TPT Aceh secara umum. Distribusi pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan, Tahun 2019-2024

| Pendidikan | Tahun | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ≤ SD | 3,07 | 2,32 | 3,22 | 2,9 | 2,57 | 2,88 | 2,46 | 1,8 | 2,72 |
| SMPT | 3,01 | 4,53 | 3,42 | 5,04 | 4,9 | 4,76 | 5,79 | 3,4 | 3,96 |
| SMTA Umum | 12,96 | 10,74 | 9,83 | 8,5 | 9,39 | 8,88 | 10,1 | 9,77 | 7,92 |
| SMTA Kejuruan | 14,85 | 10,95 | 10,72 | 10,76 | 10,87 | 10,55 | 7,45 | 9,56 | 10,59 |
| DIPLOMA I/II/III/AKADEMI | 5,79 | 8,2 | 5,92 | 7,45 | 6,67 | 7,27 | 4,3 | 6,74 | 5,7 |
| DIPLOMA IV/S1/S2/S3 | 10,77 | 8,06 | 9,3 | 7,04 | 8,42 | 6,53 | 4,91 | 6,76 | 6,22 |
| TPT | 7,57 | 6,57 | 6,36 | 6,2 | 6,59 | 6,3 | 6,17 | 6,03 | 5,75 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025*

Distribusi pengangguran pada tahun 2019-2024 menurut kabupaten/kota menunjukkan keadaan yang sama dengan provinsi yang cenderung mengalami penurunan. Lhokseumawe merupakan daerah dengan TPT tertinggi di Aceh dengan persentase sebesar 8,47 persen di tahun 2024. Sedangkan Bener Meriah merupakan daerah dengan TPT terendah yang mencapai 2,2 persen di tahun yang sama. Perkembangan distribusi TPT di kabupaten/kota tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.67.

Tabel 2.67.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2019-2024

| Kabupaten/Kota | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Simeulue | 5,82 | 5,47 | 5,71 | 6 | 5,85 | 5,5 |
| Aceh Singkil | 8,58 | 8,24 | 8,36 | 6,88 | 6,84 | 6,44 |
| Aceh Selatan | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 4,82 | 4,73 | 4,56 |
| Aceh Tenggara | 3,45 | 5,72 | 6,43 | 5,09 | 5 | 4,79 |
| Aceh Timur | 7,61 | 7,26 | 7,13 | 8,07 | 8,03 | 7,75 |
| Aceh Tengah | 2,65 | 3,05 | 2,61 | 4,44 | 4,42 | 4,21 |
| Aceh Barat | 7,41 | 7,3 | 7,09 | 6,09 | 6,07 | 5,58 |
| Aceh Besar | 7,67 | 7,62 | 7,7 | 8,28 | 8,17 | 7,93 |
| Pidie | 6,83 | 6,45 | 7,28 | 5,94 | 5,92 | 5,74 |
| Bireuen | 3,83 | 4,12 | 4,32 | 4,2 | 4,14 | 3,93 |
| Aceh Utara | 8,65 | 8,56 | 8,31 | 7,08 | 7,07 | 6,88 |

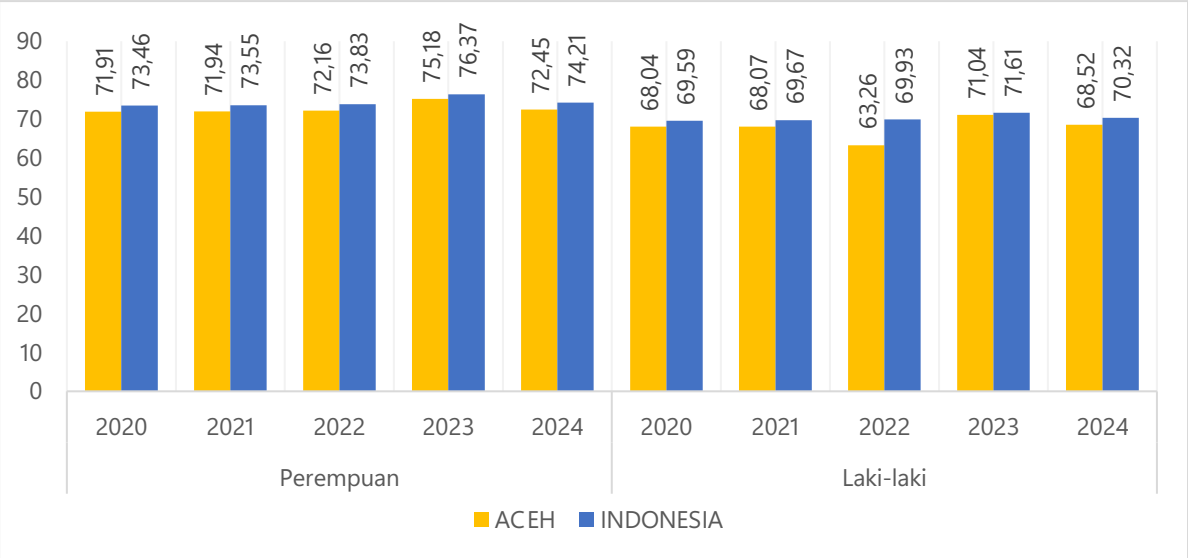
| Kabupaten/Kota | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Aceh Barat Daya | 4,29 | 3,93 | 4,04 | 4,12 | 4,08 | 3,83 |
| Gayo Lues | 1,74 | 2,01 | 1,84 | 2,7 | 2,65 | 2,4 |
| Aceh Tamiang | 6,04 | 7,97 | 5,87 | 7,38 | 7,21 | 6,95 |
| Nagan Raya | 5,35 | 5,11 | 4,99 | 5,84 | 5,74 | 5,22 |
| Aceh Jaya | 4,18 | 4,08 | 3,47 | 3,12 | 2,88 | 2,75 |
| Bener Meriah | 1,03 | 1,35 | 1,24 | 2,61 | 2,45 | 2,2 |
| Pidie Jaya | 4,34 | 6,58 | 3,57 | 4,4 | 4,34 | 3,82 |
| Banda Aceh | 6,89 | 9,54 | 8,94 | 8,62 | 8,03 | 7,55 |
| Sabang | 4,6 | 4,81 | 3,56 | 4,01 | 3,92 | 2,95 |
| Langsa | 7,69 | 9,75 | 7,21 | 7,85 | 7,73 | 7,34 |
| Lhokseumawe | 11,01 | 11,99 | 11,16 | 9,15 | 8,78 | 8,47 |
| Subulussalam | 7,25 | 6,93 | 6,26 | 5,75 | 5,69 | 5,12 |
| Aceh | 6,17 | 6,59 | 6,3 | 6,17 | 6,03 | 5,75 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh, 2025,*

### 2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua

### A. Angka Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup saat lahir yang diwakili dimensi angka panjang dan hidup sehat secara konsisten terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir mempunyai harapan untuk dapat menjalani hidup lebih panjang. Secara tidak langsung mencerminkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat di Aceh. Secara umum umur harapan hidup penduduk Aceh meningkat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 73,20 dibandingkan dengan Nasional sebesar 74,15. Namun demikian, umur harapan hidup Aceh masih berada dibawah angka nasional. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 2.71.

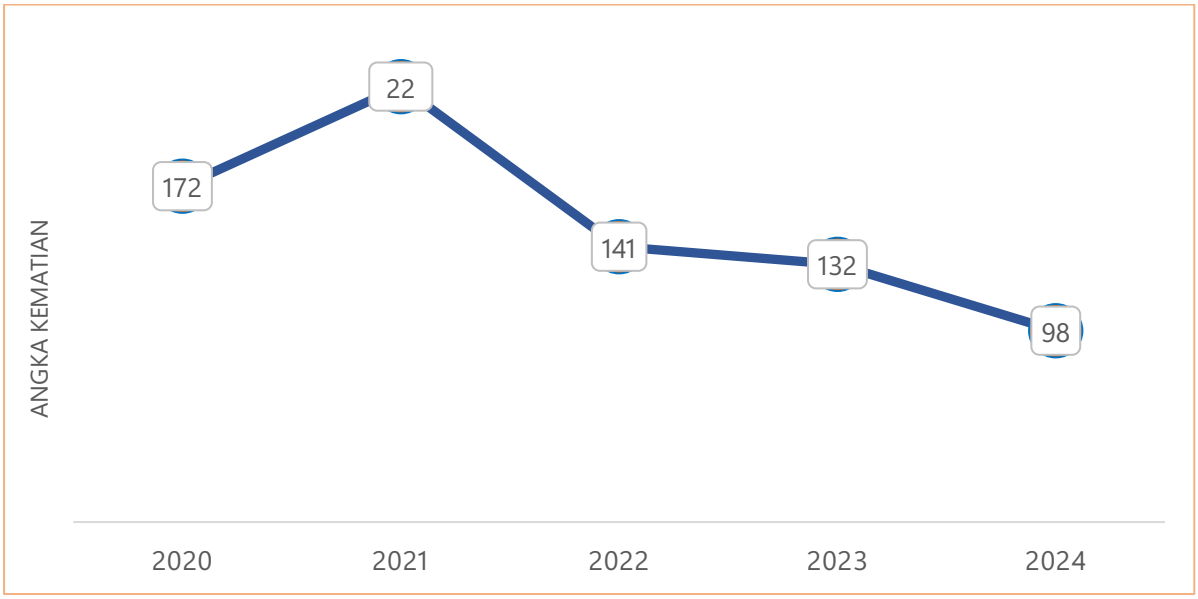



*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025*

Gambar 2.71. Capaian Umur Harapan Hidup (UHH) Aceh dan Nasional Tahun 2020 – 2024

B. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator kesehatan ibu, sebagai nilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksebilitas maupun kualitas. Aki juga menggambarkan kesehatan ibu, status gizi, kesehatan lingkungan, tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, tingkat pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.




*Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, 2025*

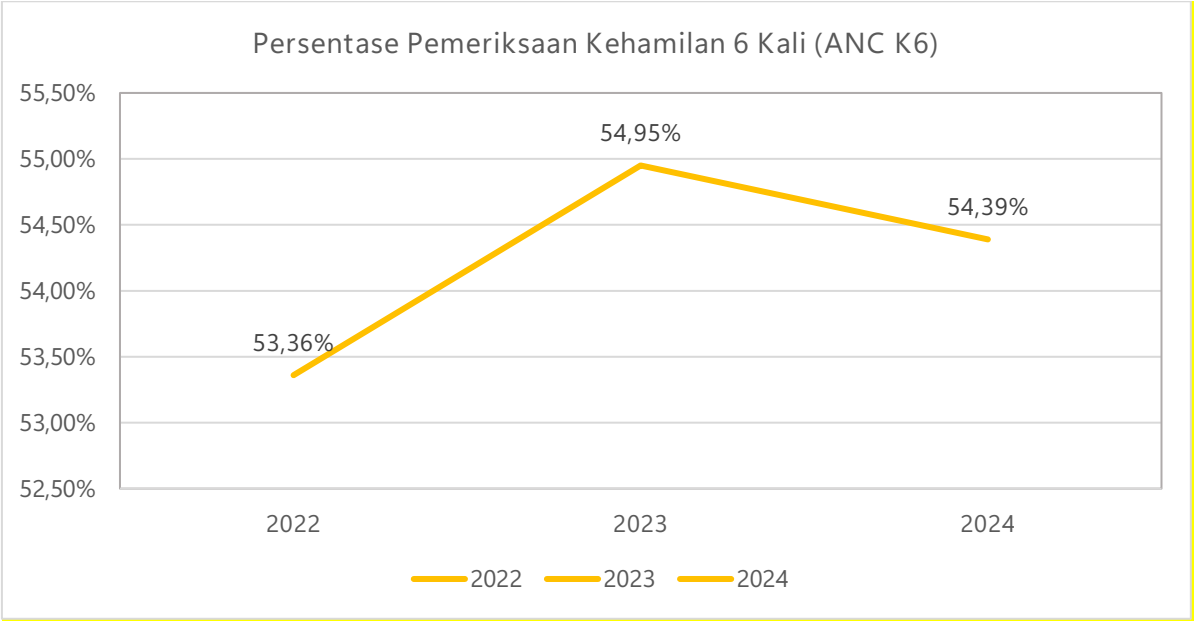
Gambar 2.72. Angka Kematian Ibu (AKI) Aceh per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2020 – 2024

Angka kematian Ibu di Aceh mengalami penurunan dari 223/100.000 kelahiran hidup di tahun 2021, menjadi 98/100.000 kelahiran hidup di tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan kesehatan ibu, status gizi dan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat masyarakat.

Salah satu pelayanan kesehatan ibu yang mempengaruhi AKI adalah pemeriksaan kehamilan atau *Antenatal Care* (ANC) yang bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan fisik dan mental ibu hamil, hingga siap menghadapi masa persalinan, masa nifas, pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi secara alami dan bertahap. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual, ibu hamil diharapkan mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar (12T) paling sedikit 6 (enam) kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal 1 (satu) kali pada trimester pertama (K1) oleh dokter, 2 (dua) kali pada trimester kedua dan 3 (tiga) kali pada trimester ketiga, dan (K5) dilakukan oleh dokter.

Gambar di atas menunjukkan Persentase ANC K6 di Tahun 2022 di angka 53,36% terjadi peningkatan di Tahun 2023 menjadi 54,95%, di tahun selanjutnya mengalami sedikit

penurunan 54,39%, dikarenakan sasaran ibu hamil yang ditentukan jauh lebih besar dibandingkan dengan data riil di beberapa kabupaten/kota.

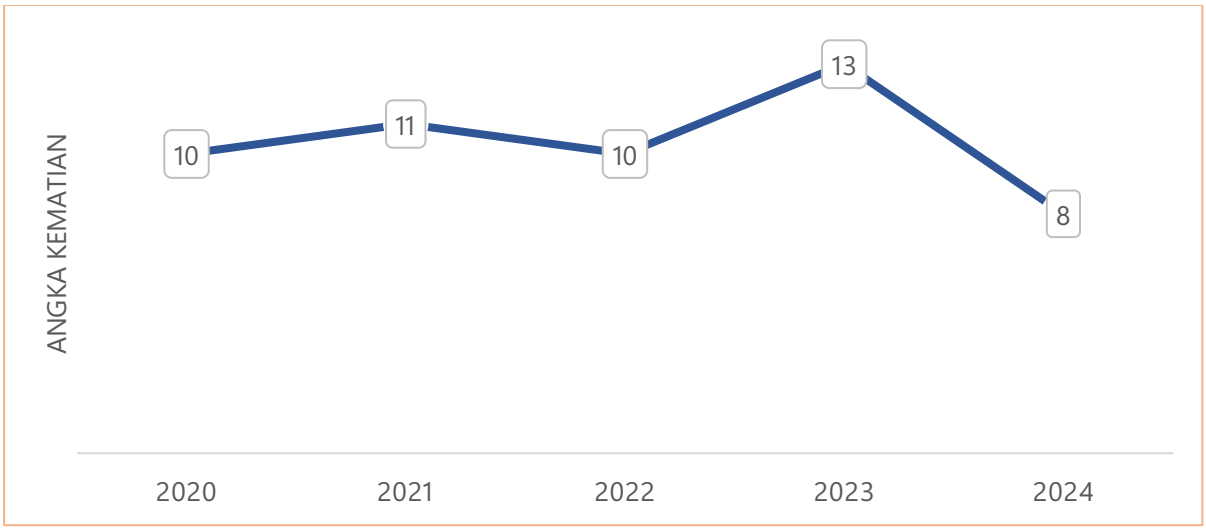



*Sumber : Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas), 2025*

Gambar 2.73. Persentase Pemeriksaan Kehamilan 6 Kali (ANC K6) Tahun 2022-2024

## C. Angka Kematian Bayi (AKB)

AKB menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 -11 bulan dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Faktor yang dapat menyebabkan penurunan AKB diantaranya peningkatan kompetensi petugas penolong persalinan, pemerataan pelayanan kesehatan dan fasilitasnya serta perbaikan gizi pada ibu hamil.




*Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, 2025*

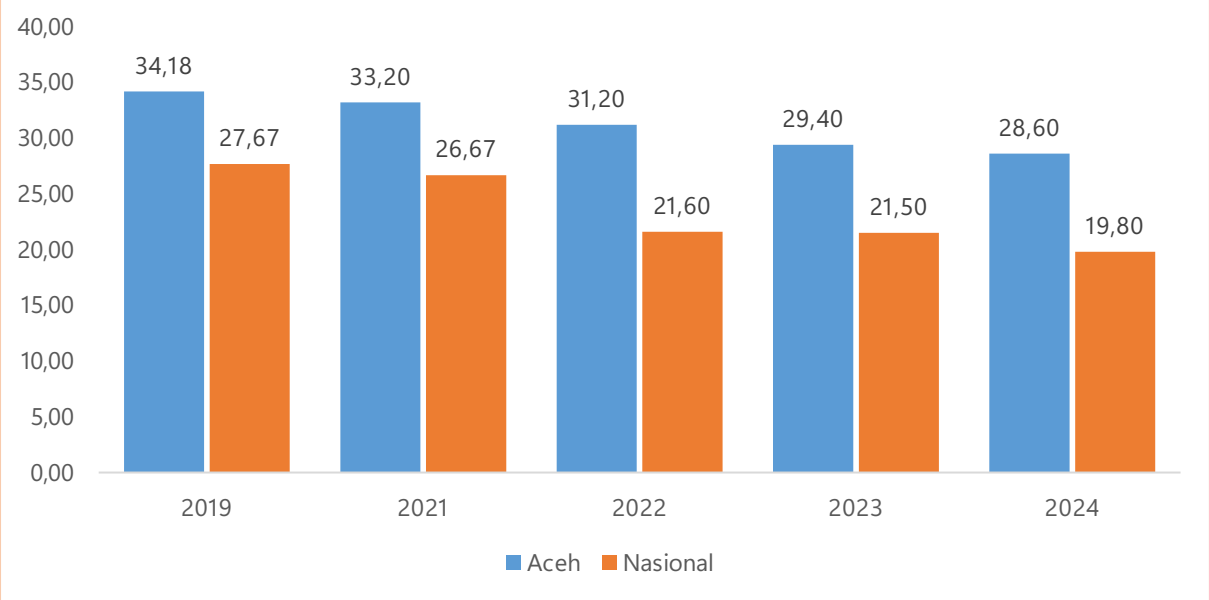
Gambar 2.74. Angka Kematian Bayi (AKB) Aceh per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2020 – 2024

AKB sangat berkaitan erat dengan kualitas perawatan bayi baru lahir, serta dipengaruhi oleh perbaikan pelaporan melalui Aplikasi *Maternal Perinatal Death Notification* (MPDN), sehingga laporan yang diterima lebih konkrit guna mengkaji dan mencegah penyebab kematian serupa di kemudian hari.

Tahun 2024 Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami penurunan sebesar 8 per 1.000 kelahiran hidup dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 13 per 1.000 kelahiran hidup. AKB tahun 2023 menjadi yang tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir.

## D. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)

Secara umum status gizi balita di Aceh masih sangat memprihatinkan. Jika dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh WHO maka status gizi balita di Aceh untuk semua kategori yaitu; kurus, gizi kurang dan pendek tergolong dalam masalah yang mengkhawatirkan dan perlu penanganan yang serius dari berbagai pemangku kepentingan. Persentase balita stunting di Aceh sampai dengan tahun 2024 masih berada di 5 (lima) besar provinsi dengan kasus stunting tertinggi di Indonesia (Aceh 28,60) (Nasional 19,80) sebagaimana disajikan pada Gambar 2.75. Data yang disajikan Tahun 2021, 2022, dan 2024 merupakan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Tahun 2023 merupakan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI).




*Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, Tahun 2024*

Gambar 2.75. Prevalensi Balita dengan Stunting di Aceh Tahun 2019 – 2024

Penurunan angka stunting di Aceh belum optimal sehingga diperlukan penguatan di beberapa faktor antara lain koordinasi lintas sektor, sinergitas pengelolaan program, kualitas pendataan, akses layanan gizi dan kesehatan serta kualitas air bersih dan sanitasi. Selain itu, faktor sosial yang perlu diperkuat adalah perubahan perilaku mencakup pola asuh (termasuk di dalamnya Pemberian Makan Bayi dan Anak, yakni ASI

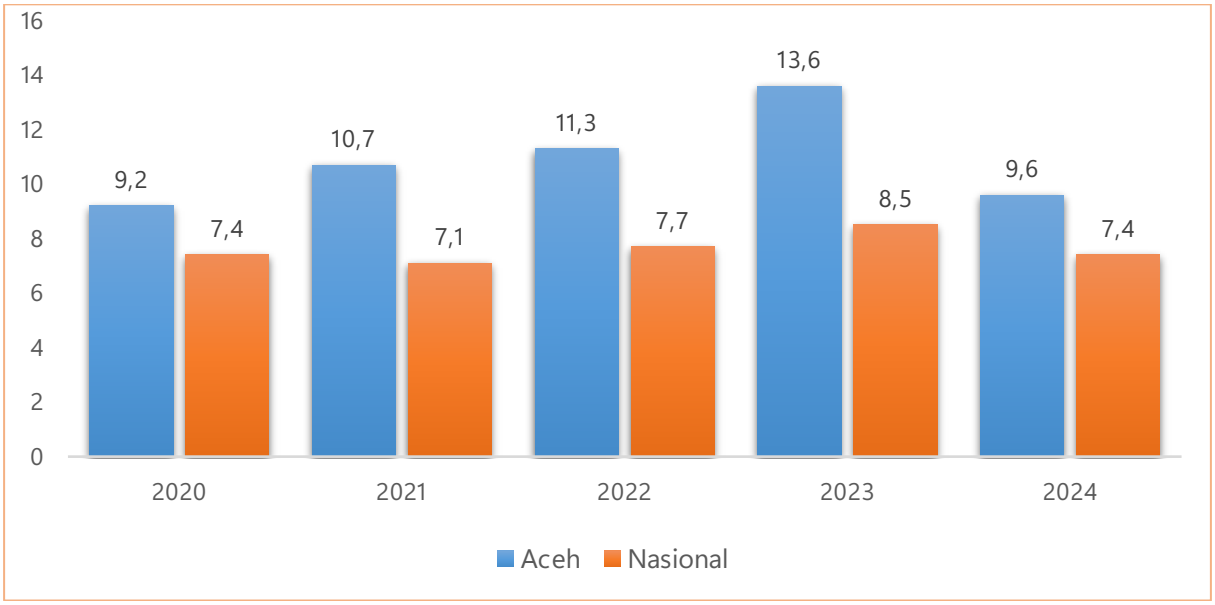
dan MPASI serta pemantauan di posyandu) dan peningkatan pola hidup bersih dan sehat.

E. *Wasting* (Gizi Kurang dan Gizi Buruk)

Prevalensi *wasting* di Aceh masih berada jauh diatas Nasional (Aceh 9,6%) (Nasional 7,4%). Pada Tahun 2024 Nasional menargetkan penurunkan prevalensi wasting sebesar 7 persen dengan realisasi sebesar 7,4 persen berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), sedangkan Aceh menargetkan penurunkan prevalensi wasting sebesar 11,5 persen dengan realisasi sebesar 9,6 persen pada tahun 2024. Namun demikian, saat ini 1 (satu) dari 10 (sepuluh) orang anak di Aceh masih menderita gizi kurang atau gizi buruk. Kondisi prevalensi wasting di Aceh masih tinggi dibandingkan dengan kondisi nasional.

Tahun 2024 kabupaten/kota dengan prevalensi wasting tertinggi adalah Bireuen (14,7%), Aceh Timur (14,5%) dan Lhokseumawe (13,6%), namun jumlah balita terbanyak tetap terdapat di kabupaten dengan luas wilayah besar dan kepadatan penduduk yang tinggi seperti Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie dan Bireuen.

Balita dengan wasting memiliki resiko kematian yang besar, mulai dari 3,5 kali (bagi gizi kurang) dan 12 kali (bagi gizi buruk) lebih tinggi, dibanding balita yang normal. Situasi gizi terkait wasting ini disebabkan oleh belum tersedianya anggaran bagi logistik obat gizi serta masih kurangnya kapasitas tenaga kesehatan untuk memberikan perawatan. Aceh saat ini perlu investasi lebih untuk mempersiapkan tim asuhan yang baik sehingga dapat menyelamatkan nyawa balita gizi buruk. Gambaran prevalensi wasting Aceh dan Nasional disajikan pada Gambar 2.76. Data yang disajikan Tahun 2021, 2022, dan 2024 merupakan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Tahun 2023 merupakan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI).

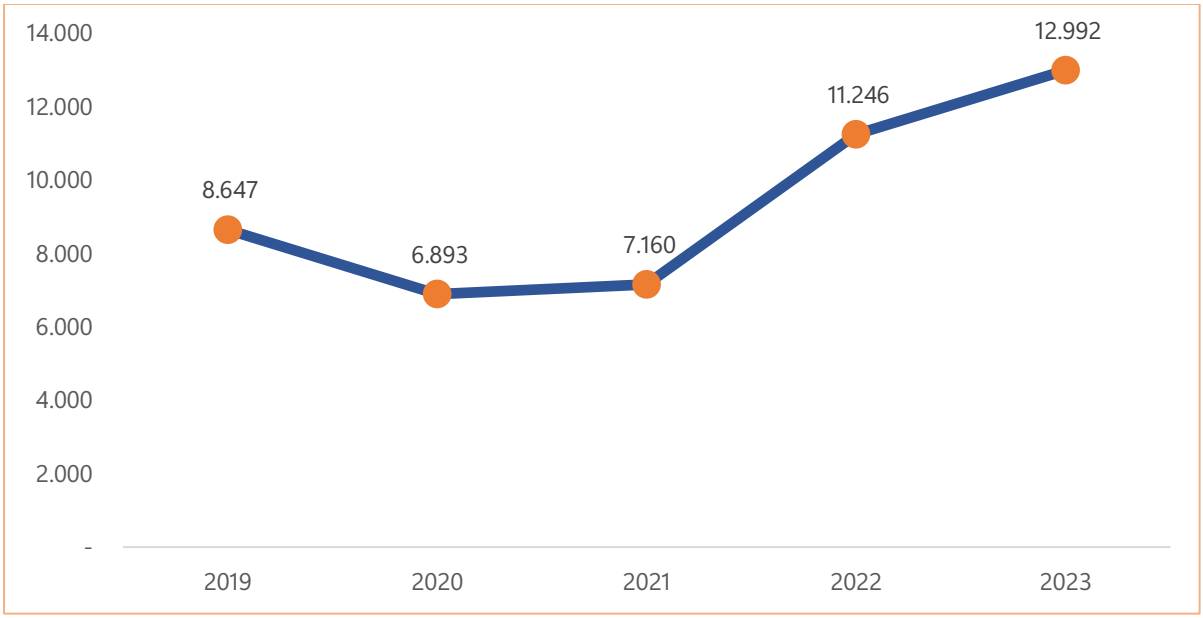



*Sumber : Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023* (Data Termutakhir)

Gambar 2.76. Prevalensi Wasting di Aceh Tahun 2020 – 2024

## F. Insiden Tuberkolosis

Penyakit Tuberkulosis (TB) di Indonesia secara gobal menempati peringkat kedua setelah India dengan jumlah kasus 969 ribu dan kematian 144 ribu per tahun atau setara dengan 11 kematian per jam. Berdasarkan Global TB Report tahun 2022 jumlah kasus TB terbanyak pada kelompok usia produktif terutama pada usia 25 sampai 34 tahun. Di Indonesia jumlah kasus TB terbanyak yaitu pada kelompok usia produktif terutama pada usia 45 sampai 54 tahun. Sementara Aceh sebagai provinsi paling barat menempati peringkat kesebelas tertinggi kasus TB di Indonesia dengan jumlah insiden kasus sebanyak 21.289 kasus tahun 2023. Meningkatnya kasus TB di Aceh menunjukan masih tingginya penularan TB yang terjadi di masyarakat. Dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri, investigasi kontak kasus aktif, pengobatan lengkap, serta perbaikan pencatatan dan pelaporan TB, diharapkan dapat memutus penularan TB di masyarakat. Data Tuberkolosis disajikan pada Gambar 2.77.

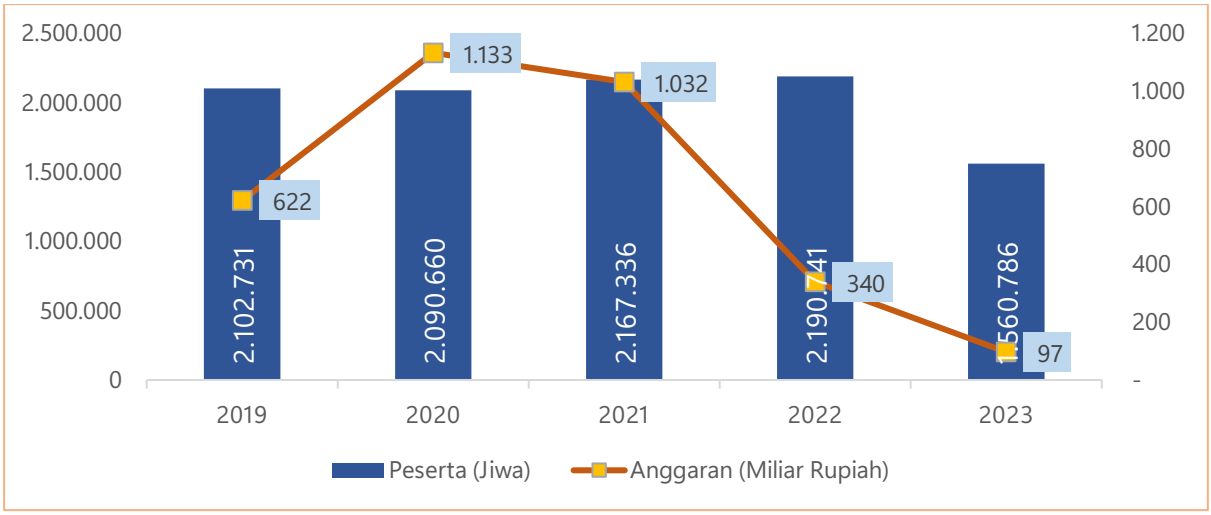



*Sumber : Dinas Kesehatan Aceh,2024*

Gambar 2.77. Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk) Tahun 2019-2023

## G. Jaminan Kesehatan Masyarakat Aceh

Jaminan sosial merupakan hak setiap orang yang pemenuhannya dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemenuhan jaminan tersebut merupakan upaya dalam penuntasan kemiskinan yang terjadi dalam rangka mengurangi beban masyarakat miskin. Salah satu program Jaminan Sosial Pemerintah Aceh dalam rangka pemenuhan hak masyarakat adalah Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Persentase proporsi kepesertaan JKA mengalami fluktuasi, dengan tren penurunan dari tahun 2019 hingga 2020 dengan capaian berturut-turut sebesar 99,5 persen dan 98,14 persen. Namun sebaliknya pada tahun 2021 persentasenya meningkat tajam menjadi sebesar 105,13 persen. Perkembangan persentase kepesertaan JKA Tahun 2018 s.d 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.78.

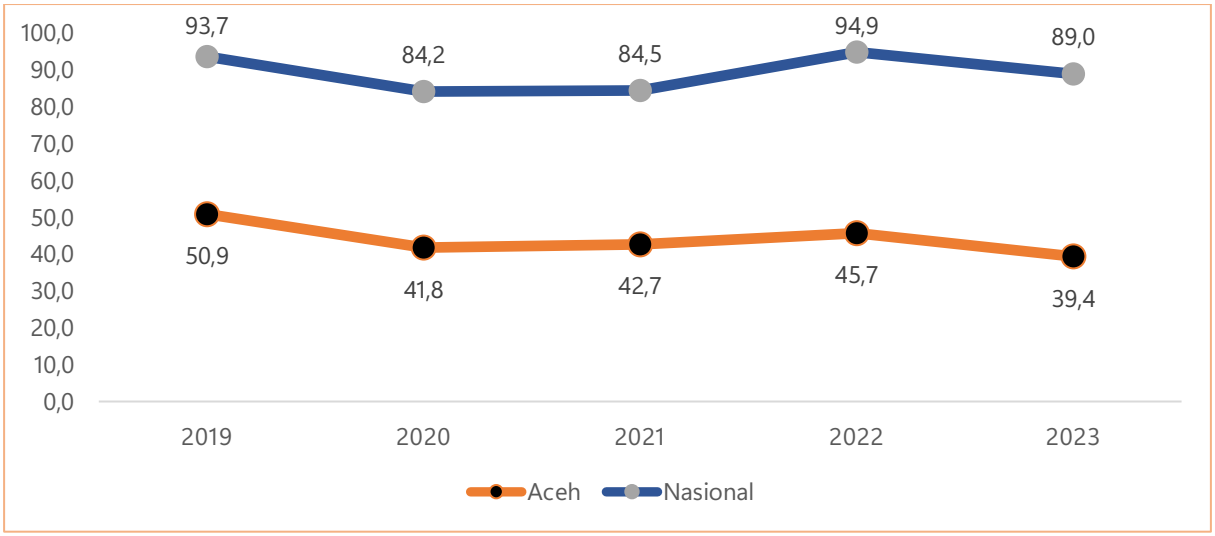



*Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, 2023*

Gambar 2.78. Capaian jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Aceh Tahun 2019-2023

## H. Imunisasi

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga menurunkan risiko penularan dan komplikasi penyakit menjadi berat. Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) seperi Hepatitis B, Difteri, Pertusis, Tetanus, Tuberkulosis, Polio (lumpuh layu), Campak, Rubela, Meningitis, dan Pneumonia sangat mudah menular dan dapat mengakibatkan kecacatan permanen bahkan kematian. Cakupan imunisasi yang rendah tidak dapat menghasilkan kekebalan kelompok yang dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa atau wabah penyakit secara luas di masyarakat. Selain itu, penyakit infeksi berulang meningkatkan risiko terjadinya stunting pada anak.




*Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, 2023*

Gambar 2.79. Capaian Imunisasi Aceh Tahun 2019-2023

Dalam lima tahun terakhir, Aceh menjadi salah satu Provinsi di Indonesia dengan capaian imunisasi terendah, baik Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) untuk bayi di bawah satu

tahun, maupun Imunisasi Lanjutan untuk anak di bawah dua tahun dan anak usia Sekolah Dasar/sederajat. Secara akumulatif dari tahun 2018 – 2023 sebanyak 250,000 ribu lebih bayi tidak mendapatkan imunisasi sama sekali, atau Zero-Dose Children (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023) dan menjadi yang tertinggi di Indonesia. Di tahun 2023, capaian IDL di Aceh adalah sebesar 39.4%, jauh dari target nasional sebesar 100 persen. Berikut adalah capaian IDL di Aceh dan di Indonesia dari tahun 2019 – 2023:

Aceh diketahui mempunyai masalah keengganan vaksin (*vaccine hesitancy*) yang cukup besar, berbagai isu negatif dan hoaks mengenai imunisasi beredar di masyarakat, di samping juga pengaruh kultur dan kepercayaan. Namun tantangan imunisasi di Aceh tidak hanya dari sisi masyarakat, namun juga dari sisi penyedia layanan yang belum optimal (kompetensi, kemampuan komunikasi) dan komitmen serta dukungan dari sektor terkait di luar sektor kesehatan – termasuk dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan media – yang masih perlu diperkuat. Semua aspek tantangan perlu direspon dan ditanggulangi untuk meningkatkan cakupan imunisasi untuk melindungi masyarakat terutama anak-anak dari wabah PD3I (Penyakit dapat dicegah dengan imunisasi).

### I. Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja rumah sakit adalah *Bed Occupancy Rate* (BOR). BOR mengukur persentase tempat tidur yang terisi dibandingkan dengan kapasitas tempat tidur yang tersedia pada layanan rawat inap. Data BOR pada rumah sakit di Aceh untuk periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68.
*Bed Occupancy Rate* (BOR) Tahun 2019 – 2024

| *Bed Occupancy Rate* (BOR) (%) | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) | 69,09 | 48,46 | 52,92 | 67,46 | 70,16 | 67,62 |
| Rumah Sakit Jiwa (RSJ) | 92,01 | 90,14 | 91,01 | 94,72 | 83,08 | 78,72 |
| Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) | 58,00 | 23,00 | 36,00 | 53,00 | 51,20 | 72,4 |

*Sumber : RSUZA, RSJ, RSIA, 2025*

Berdasarkan Tabel 2.68 di atas, persentase BOR pada Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) untuk periode 2020-2021 belum mencapai kondisi ideal, namun pada periode 2022-2024 sudah mencapai kondisi ideal dengan nilai BOR tahun 2024 sebesar 67,62 persen. Di Rumah Sakit Jiwa, kondisi ideal sudah tercapai sejak periode 2020-2024. Sementara itu, pada Rumah Sakit Ibu dan Anak, BOR pada tahun 2020-2023 belum mencapai kondisi ideal, namun pada tahun 2024 sudah mencapai kondisi ideal dengan nilai 72,4 Persen.

## 2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang merata

### A. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

menunjukkan tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat pada suatu daerah atau lamanya pendidikan yang dijalani. Makin tinggi RLS berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Jika dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota, perkembangan RLS di Aceh relatif merata seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.69.

Tabel 2.69.
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2020 – 2024

| Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Simeulue | 9,34 | 9,48 | 9,73 | 9,81 | 9,89 |
| Aceh Singkil | 8,53 | 8,68 | 8,69 | 8,70 | 8,72 |
| Aceh Selatan | 8,87 | 8,88 | 8,89 | 8,91 | 8,92 |
| Aceh Tenggara | 9,66 | 9,67 | 9,92 | 10,09 | 10,1 |
| Aceh Timur | 8,15 | 8,21 | 8,32 | 8,47 | 8,48 |
| Aceh Tengah | 9,85 | 9,86 | 9,87 | 9,89 | 10,03 |
| Aceh Barat | 9,37 | 9,55 | 9,87 | 9,89 | 9,99 |
| Aceh Besar | 10,32 | 10,33 | 10,35 | 10,36 | 10,37 |
| Pidie | 8,99 | 9,00 | 9,02 | 9,03 | 9,04 |
| Bireuen | 9,28 | 9,29 | 9,31 | 9,32 | 9,59 |
| Aceh Utara | 8,63 | 8,64 | 8,73 | 8,85 | 9,11 |
| Aceh Barat Daya | 8,66 | 8,67 | 8,68 | 8,77 | 8,78 |
| Gayo Lues | 8,20 | 8,40 | 8,41 | 8,42 | 8,44 |
| Aceh Tamiang | 8,90 | 8,91 | 9,04 | 9,24 | 9,3 |
| Nagan Raya | 8,68 | 8,69 | 8,95 | 8,96 | 9,25 |
| Aceh Jaya | 8,70 | 8,71 | 8,72 | 8,74 | 9,02 |
| Bener Meriah | 9,79 | 10,00 | 10,01 | 10,12 | 10,13 |
| Pidie Jaya | 9,33 | 9,34 | 9,53 | 9,58 | 9,59 |
| Banda Aceh | 12,65 | 12,83 | 13,03 | 13,04 | 13,1 |
| Sabang | 11,14 | 11,18 | 11,19 | 11,20 | 11,22 |
| Langsa | 11,11 | 11,12 | 11,14 | 11,27 | 11,28 |
| Lhokseumawe | 10,91 | 11,11 | 11,12 | 11,27 | 11,31 |
| Subulussalam | 7,84 | 8,03 | 8,22 | 8,32 | 8,43 |
| Aceh | 9,33 | 9,37 | 9,44 | 9,55 | 9,64 |
| Nasional | 8,48 | 8,54 | 8,69 | 8,77 | 8,85 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025 (Data diolah)*

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Aceh tahun 2020-2024 menunjukkan tren positif dan lebih baik dibandingkan dengan nasional. Rata-rata Lama Sekolah penduduk Aceh tahun 2024 adalah 9,64 tahun menunjukkan bahwa secara umum penduduk Aceh usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam tingkat pendidikan hingga kelas XII (SMP kelas III) hingga pendidikan tinggi. Kota Banda Aceh memiliki angka RLS paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Sedangkan Kota Subulussalam, Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Timur merupakan daerah yang terendah capaian angka Rata-rata Lama Sekolah bahkan masih dibawah angka Nasional. Rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah pada Kabupaten/Kota tersebut diantaranya adalah sulitnya akses menuju sekolah. Pemerintah Aceh berupaya melakukan pemerataan dan peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dengan meningkatkan akses bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Apabila ditinjau dari angka rata-rata lama sekolah, Aceh berada diatas rata-rata Sumatera, namun masih berada di bawah angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Utara, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.70. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah Aceh di awal periode tercatat 9,33 tahun, angka ini di atas rerata nasional dan Sumatera, namun masih lebih rendah dibandingkan Sumatera Utara dengan angka 9,54. Pada periode akhir yaitu tahun 2024, angka rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 9,64 tahun dan berada di atas rerata nasional dan Sumatera. Jika dibandingkan dengan Sumatera Utara, angka tersebut masih relatif lebih rendah dimana Sumatera Utara berada pada angka 10,18 tahun.

Tabel 2.70.
Angka Rata-rata Lama Sekolah Aceh dan Rata-rata Sumatera Tahun 2020–2024

| Tahun | Aceh | Sumatera Utara | Rata-Rata Sumatera | Nasional |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9,33 | 9,54 | 8,89 | 8,48 |
| 2021 | 9,37 | 9,58 | 8.93 | 8,54 |
| 2022 | 9.44 | 9,71 | 9.02 | 8.69 |
| 2023 | 9.55 | 9,82 | 9.02 | 8.77 |
| 2024 | 9.64 | 10.18 | 9.54 | 8.85 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025 (Data diolah)*

Angka rata-rata lama sekolah harus terus ditingkatkan mengingat angka lama sekolah yang berada pada rata-rata 9 tahun mencerminkan bahwa lama sekolah di Aceh masih pada tingkat menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama. Pemerintah Aceh berupaya melakukan percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas antara lain dengan memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan angka melanjutkan antar jenjang pendidikan.

## B. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka harapan lama sekolah Aceh mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 14,63 tahun menjadi 14,39 tahun pada tahun 2024, namun demikian HLS Aceh Tahun 2024 masih berada diatas nasional 13,21 tahun. Ini menunjukkan bahwa seorang yang berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,39 tahun atau sampai jenjang perkuliahan di tahun kedua. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Aceh periode tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan dalam Tabel 2.71..

Tabel 2.71.
Angka Harapan Lama Sekolah Aceh Tahun 2020 – 2024

| Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Simeulue | 13,76 | 13,9 | 14,08 | 14,28 | 14,53 |
| Aceh Singkil | 14,31 | 14,32 | 14,34 | 14,35 | 14,36 |
| Aceh Selatan | 14,42 | 14,6 | 14,69 | 14,7 | 14,71 |

| Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Aceh Tenggara | 14 | 14,01 | 14,26 | 14,27 | 14,47 |
| Aceh Timur | 13,03 | 13,04 | 13,06 | 13,07 | 13,08 |
| Aceh Tengah | 14,27 | 14,28 | 14,61 | 14,85 | 15,03 |
| Aceh Barat | 14,6 | 14,61 | 14,63 | 14,64 | 14,93 |
| Aceh Besar | 14,72 | 14,73 | 14,75 | 14,76 | 14,77 |
| Pidie | 14,46 | 14,47 | 14,49 | 14,5 | 14,52 |
| Bireuen | 14,83 | 14,84 | 14,86 | 14,87 | 14,88 |
| Aceh Utara | 14,7 | 14,71 | 14,73 | 14,74 | 14,75 |
| Aceh Barat Daya | 13,58 | 13,65 | 13,66 | 13,67 | 13,69 |
| Gayo Lues | 13,77 | 13,78 | 14,08 | 14,34 | 14,59 |
| Aceh Tamiang | 13,59 | 13,76 | 13,96 | 14,23 | 14,51 |
| Nagan Raya | 14,13 | 14,14 | 14,16 | 14,17 | 14,18 |
| Aceh Jaya | 13,98 | 13,99 | 14,01 | 14,02 | 14,06 |
| Bener Meriah | 13,46 | 13,47 | 13,71 | 13,72 | 13,73 |
| Pidie Jaya | 14,82 | 14,97 | 14,98 | 14,99 | 15,01 |
| Banda Aceh | 17,79 | 17,8 | 17,81 | 17,93 | 17,94 |
| Sabang | 13,95 | 14,13 | 14,4 | 14,68 | 14,97 |
| Langsa | 15,35 | 15,63 | 15,64 | 15,7 | 15,71 |
| Lhokseumawe | 15,2 | 15,21 | 15,27 | 15,54 | 15,55 |
| Subulussalam | 14,61 | 14,62 | 14,81 | 15,06 | 15,31 |
| Aceh | 14,31 | 14,63 | 14,37 | 14,38 | 14,39 |
| Nasional | 12,98 | 13,08 | 13,1 | 13,15 | 13,21 |

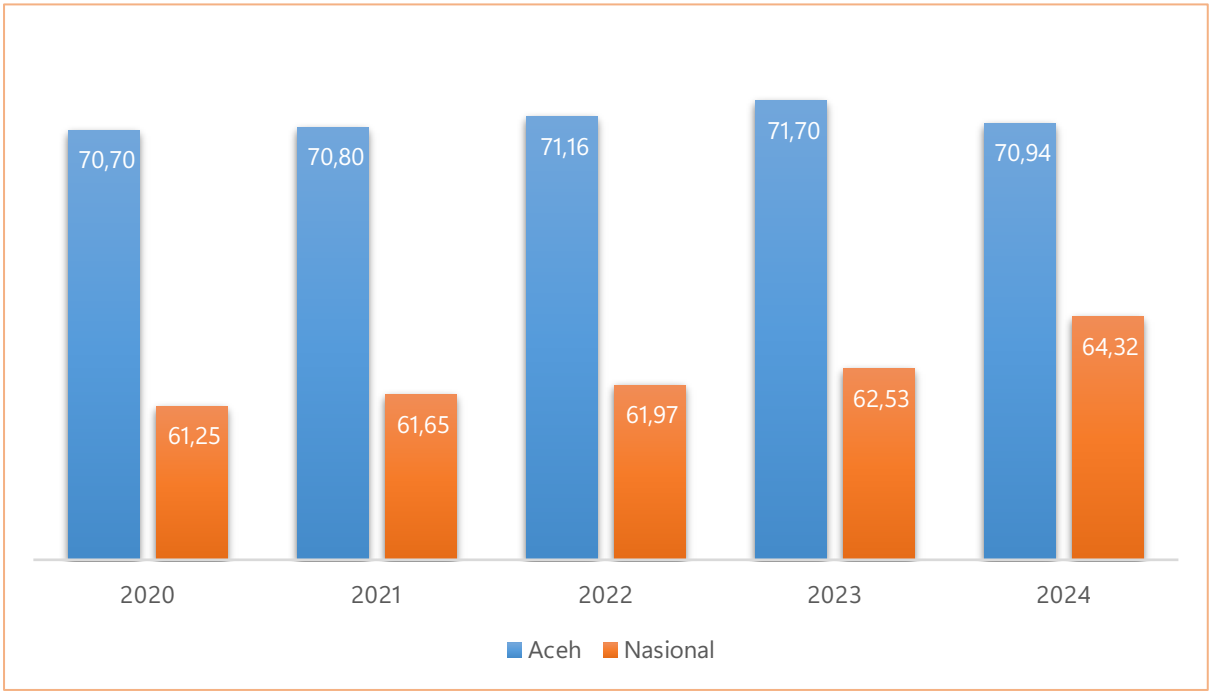
*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025 (Data diolah)*

Dalam rangka meningkatkan HLS dilakukan pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu dan berkeadilan salah satunya yaitu dengan meningkatkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM melaksanakan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan melalui Paket A, Paket B, Paket C dan Keaksaraan Fungsional pada masyarakat serta membuka pelatihan keahlian untuk masyarakat di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota.

## C. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APM Aceh untuk tingkat pendidikan menengah setiap tahunnya terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2023 tercatat sebesar 71,70 persen. Tetapi di tahun berikutnya telah mengalami penurunan walaupun tidak besar menjadi 70,94 persen dan masih berada di atas angka capaian nasional yang hanya 64,32 persen. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan anak tepat waktu serta tercapainya kemajuan terutama dalam hal pemerataan akses terhadap pendidikan

menengah masih tinggi walaupun ada hal-hal yang masih harus terus diperbaiki dan dilakukan usaha yang maksimal sehingga di tahun berikutnya tidak mengalami penurunan lagi tetapi meningkat menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM) Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.80.



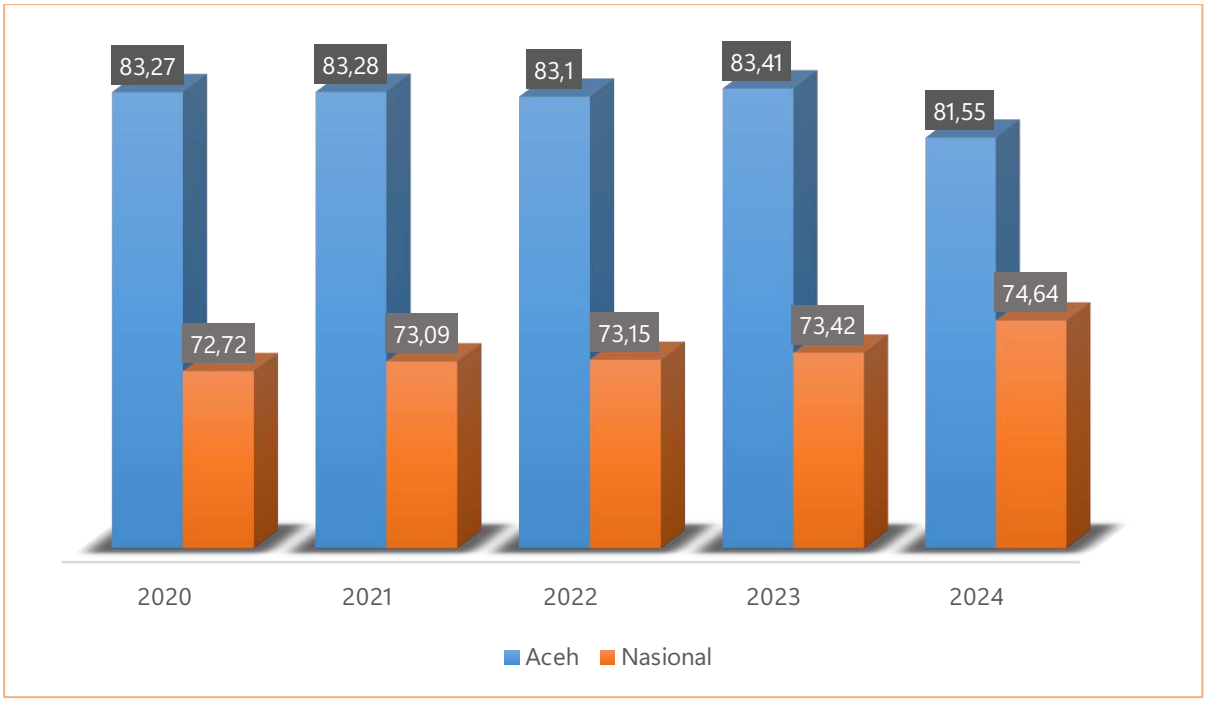

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025 (Data diolah)*

Gambar 2.80. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2019 – 2024

Berdasarkan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2020-2024, dapat dilihat bahwa capaian APM Aceh selalu lebih tinggi dari rata-rata capaian APM secara nasional.

D. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun

Angka partisipasi sekolah menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS adalah jumlah siswa kelompok usia tertentu yang bersekolah ditingkat jenjang pendidikan tertentu pada tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah tersebut. APS provinsi Aceh dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus berfluktuasi. Tahun 2020 APS Provinsi Aceh adalah sebesar 83,27 persen, mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 83,28 persen tetapi mengalami penurunan ditahun 2022 menjadi 83,1 persen, sedangkan pada Tahun 2023 meningkat kembali dengan capaian APS sebesar 83,41 persen, dan di tahun 2024 kembali mengalami penurunan sebesar 81,55 persen, ini berarti masih terdapat 18,45 persen penduduk usia 16-18 tahun yang tidak aktif bersekolah pada tingkat SMA/sederajat atau tidak bersekolah lagi. Jika dibandingkan secara nasional, dalam kurun waktu Tahun 2020 – 2024, Provinsi Aceh masih berada di atas rata-rata nasional yang berada dikisaran 74 persen. Perkembangan APS Provinsi Aceh dan nasional usia 16 – 18 tahun terlihat pada Gambar 2.81.




*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025 (Data diolah)*

Gambar 2.81. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Aceh Usia 16-18 Tahun 2019 – 2024

## E. Kemampuan Literasi dan Numerasi

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan bagi peserta didik secara berkualitas, terukur, cepat, dan terjangkau, diperlukan standar teknis pelayanan minimal pendidikan yang sesuai jenjang dan jalur pendidikannya. Pentingnya pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan ini untuk memenuhi hak warga negara dalam hal ini anak usia sekolah. Pada level provinsi terdapat sebanyak 29 indikator yang terbagi dalam 4 kelompok yaitu:

a. Angka Partisipasi Sekolah, dengan target 100% pertahun;
b. Kemampuan literasi dan numerasi;
c. Kualitas Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
d. Iklim keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas.

Untuk kelompok Kemampuan Literasi dan Numerasi terdapat sebanyak 10 (sepuluh) indikator secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72.
Kelompok Kemampuan Literasi Aceh Tahun 2021-2023

| No | Indikator | Satuan | Capaian 2021 | Capaian 2022 | Capaian 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 57,28 | 56,03 | 64,96 |
| 2 | Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 48,06 | 48,94 | 65,25 |
| 3 | Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 55,28 | 53,27 | 59,06 |

| No | Indikator | Satuan | Capaian 2021 | Capaian 2022 | Capaian 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 47,17 | 47,09 | 57,89 |
| 5 | Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 58,95 | 58,96 | 65,09 |
| 6 | Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 41,55 | 44,51 | 57,24 |
| 7 | Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 62,14 | 59,6 | 68,62 |
| 8 | Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 53,77 | 53,29 | 59,93 |
| 9 | Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 58,05 | 57,27 | 63,21 |
| 10 | Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 54,78 | 52,41 | 57,46 |

*Sumber : Indikator Rapor Pendidikan, 2024*

Kemampuan Literasi yaitu persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi), sedangkan Kemampuan numerasi merupakan persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Berdasarkan tabel diatas, capaian literasi dan numerasi untuk masing-masing jenjang pendidikan mengalami penurunan. Kemampuan literasi dan numerasi Jenjang SMA masing lebih baik jika dibandingkan dengan SMK. Secara umum diperlukan upaya mendorong peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.

## F. Tingkat Penyerapan Lulusan SMK

Tingkat Penyerapan Lulusan SMK menunjukkan keberhasilan sekolah dalam mempersiapkan murid untuk melanjutkan Pendidikan, berkarya di dunia kerja, dan berwirausaha. Penyerapan lulusan SMK dari tahun 2022 sebesar 29,5 persen meningkat menjadi 80,69 persen. Upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah Aceh yaitu dengan memberikan pemagangan di perusahaan-perusahaan dan guru yang berkopentensi dalam melatih siswa SMK

## G. Sarana dan Prasarana Sekolah

Sarana dan prasarana merupakan bagian yang menunjang proses pembelajaran. Sarana merupakan semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana merupakan semua kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.

Kondisi ruang kelas sekolah negeri/ swasta tahun 2023 dalam Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing jenjang pendidikan. Hal ini terlihat pada kondisi ruang kelas sekolah

yang terus dilakukan perbaikan demi kenyamanan proses belajar-mengajar. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, fokus provinsi pada pembagian urusan bidang pendidikan adalah pada manajemen pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Implementasi dari peraturan tersebut adalah diletakkannya kewenangan pengelolaan SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa berada pada pemerintah provinsi (Aceh). Persentase kondisi ruang kelas jenjang SMA/SMK/SLB Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.82.




| | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang + Berat |
|---|---|---|---|
| | Kondisi Ruang Kelas (%) | | |
| 3 SLB | 3.016 | 142 | - |
| 2 SMK | 6.700 | 252 | 11 |
| 1 SMA | 767 | 60 | - |

Gambar 2.82. Persentase Kondisi Ruang Kelas Jenjang SMA/SMK/SLB Tahun 2023

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa masih terdapat kondisi ruang kelas dengan kondisi rusak sedang/berat dan rusak ringan. Pada tahun 2023, ruang kelas jenjang pendidikan SMA/SMK/SLB berjumlah 10.948 ruang, dengan kondisi baik sebanyak 10.483 ruang kelas (95,75%) sedangkan kondisi rusak ringan dan rusak sedang/berat hanya sebesar 4,25 persen atau 465 ruang kelas. Dalam ruang lingkup Aceh, tren kondisi ruang kelas baik terus meningkat, artinya progres peningkatan kualitas ruang kelas berjalan dengan baik di provinsi Aceh.

## H. Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi : 1) Kompetensi pedagogik; 2) Kompetensi kepribadian; 3) Kompetensi profesional; dan 4) Kompetensi sosial. Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/ SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan guru pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.

Jadi guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik dapat diartikan bahwa guru tersebut sudah di anggap profesional dalam menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas sehingga guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik diharapkan mampu membawa perubahan pendidikan menjadi pendidikan yang berkualitas baik dari segi proses maupun outputnya. Untuk menguji kompetensi pendidik berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada data sertifikasi guru tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.73.

Tabel 2.73.
Data Persentase Sertifikasi Guru Jenjang Pendidikan Tahun 2022

| Kabupaten/Kota | SMA | | SMK | | SLB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sudah | Belum | Sudah | Belum | Sudah | Belum |
| Simeulue | 23,69 | 76,31 | 26,69 | 73,31 | 15,38 | 84,62 |
| Aceh Singkil | 42,64 | 57,36 | 30,65 | 69,35 | 20,00 | 80,00 |
| Aceh Selatan | 31,17 | 68,83 | 32,92 | 67,08 | 2,70 | 97,30 |
| Aceh Tenggara | 34,19 | 65,81 | 27,06 | 72,94 | 37,78 | 62,22 |
| Aceh Timur | 36,06 | 63,94 | 29,57 | 70,43 | 23,08 | 76,92 |
| Aceh Tengah | 43,45 | 56,55 | 43,97 | 56,03 | 18,31 | 81,69 |
| Aceh Barat | 38,03 | 61,97 | 40,51 | 59,49 | 28,00 | 72,00 |
| Aceh Besar | 45,01 | 54,99 | 35,60 | 64,40 | 24,42 | 75,58 |
| Pidie | 40,72 | 59,28 | 29,68 | 70,32 | 45,07 | 54,93 |
| Bireuen | 36,71 | 63,29 | 41,08 | 58,92 | 25,64 | 74,36 |
| Aceh Utara | 34,16 | 65,84 | 24,19 | 75,81 | 17,65 | 82,35 |
| Aceh Barat Daya | 42,10 | 57,90 | 48,44 | 51,56 | 38,46 | 61,54 |
| Gayo Lues | 34,82 | 65,18 | 29,59 | 70,41 | 13,89 | 86,11 |
| Aceh Tamiang | 35,83 | 64,17 | 38,30 | 61,70 | 31,08 | 68,92 |
| Nagan Raya | 39,25 | 60,75 | 28,57 | 71,43 | 22,58 | 77,42 |
| Aceh Jaya | 39,33 | 60,67 | 38,46 | 61,54 | 11,11 | 88,89 |
| Bener Meriah | 40,24 | 59,76 | 39,77 | 60,23 | 30,69 | 69,31 |
| Pidie Jaya | 33,83 | 66,17 | 25,90 | 74,10 | 24,19 | 75,81 |
| Banda Aceh | 51,40 | 48,60 | 40,82 | 59,18 | 23,29 | 76,71 |
| Sabang | 47,37 | 52,63 | 55,74 | 44,26 | 38,46 | 61,54 |
| Langsa | 42,01 | 57,99 | 45,94 | 54,06 | 31,17 | 68,83 |
| Lhokseumawe | 45,90 | 54,10 | 40,51 | 59,49 | 21,18 | 78,82 |
| Subulussalam | 30,00 | 70,00 | 35,93 | 64,07 | 15,38 | 84,62 |
| **Aceh** | **38** | **62** | **35** | **65** | **25** | **75** |

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa persentase sertifikasi guru pada jenjang pendidikan SLB yang memiliki guru sudah bersertifikasi paling kecil sebesar 25 persen dan yang belum bersertifikasi sebanyak 75 persen.

### 2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

#### A. Jaminan Sosial Tenaga kerja

Perlindungan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu isu krusial yang harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Aceh sebagaimana amanat Peraturan Gubernur No.11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Sosial Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Peraturan dan kebijakan yang telah dirumuskan

tersebut harus ditindak lanjuti sebagai upaya untuk mendukung langkah pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan sosial terutama bagi pekerja rentan yang saat ini masih cukup rendah. Berdasarkan data tahun 2024 tercatat bahwa jumlah pekerja yang sudah terlindungi sebanyak 414.660 pekerja atau baru mencapai 23,6 persen. Sehingga masih terdapat sejumlah 1.342.069 pekerja yang belum terlindungi. Jumlah tersebut mencover hampir dari seluruh tenaga kerja informal di Aceh yang saat ini mencapai 63,19 persen.

Dalam upaya mencapai target perlindungan social tersebut, Pemerintah Aceh juga telah mendorong pemenfaatan alokasi Dana Bagi Hasil Sawit bagi pekerja rentan yang bekerja di sektor kelapa sawit. Intervensi pengelolaan dana perlindungan sosial pekerja sawit ini tentu menjadi optimal bila peruntukannya tepat dan jelas bagi penerima yang benar-benar layak untuk didanai oleh pemerintah kabupaten dan kota melalui lembaga atau badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan. Intervensi ini dapat dilakukan salah satunya melalui pemanfaatan data Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang menjadi base data untuk melihat siapa dan sejauh mana mereka yang digolongkan sebagai kelompok miskin ektrem. Melalui pemetaan tersebut akan menghasilkan sebuah keniscayaan bahwa jaminan sosial pekerja perkebunan sawit akan terwujud dan terdistribusi secara tepat sesuai dengan tingkat kerentanan mereka secara ekonomi sebagai masyarakat miskin ekstrem.

## B. Indeks Kesejahteraan Sosial

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) merupakan ukuran komprehensif yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari berbagai dimensi sosial, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan, keamanan, dan partisipasi sosial. IKS bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas hidup masyarakat, di luar aspek ekonomi semata, Dengan demikian, Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) bukan hanya menjadi angka statistik, tetapi juga cerminan keberpihakan terhadap pembangunan manusia yang adil dan inklusif.

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) Bidang Sosial merupakan indikator penting yang menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat dari aspek sosial. Indeks ini disusun berdasarkan sejumlah indikator yang mencakup akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan sosial, serta partisipasi sosial masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan kualitas hidup sosial mereka terjamin. Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pemerataan pelayanan sosial di wilayah terpencil, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan data terpadu untuk menjangkau kelompok sasaran secara lebih tepat, secara keseluruhan, capaian Indeks Kesejahteraan Sosial menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pembangunan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### B.1. Sarana Sosial Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rehabilitasi Sosial

Panti pelayanan sosial milik Pemerintah Aceh memiliki peran strategis sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dalam penanganan Pemerlu Pelayanan

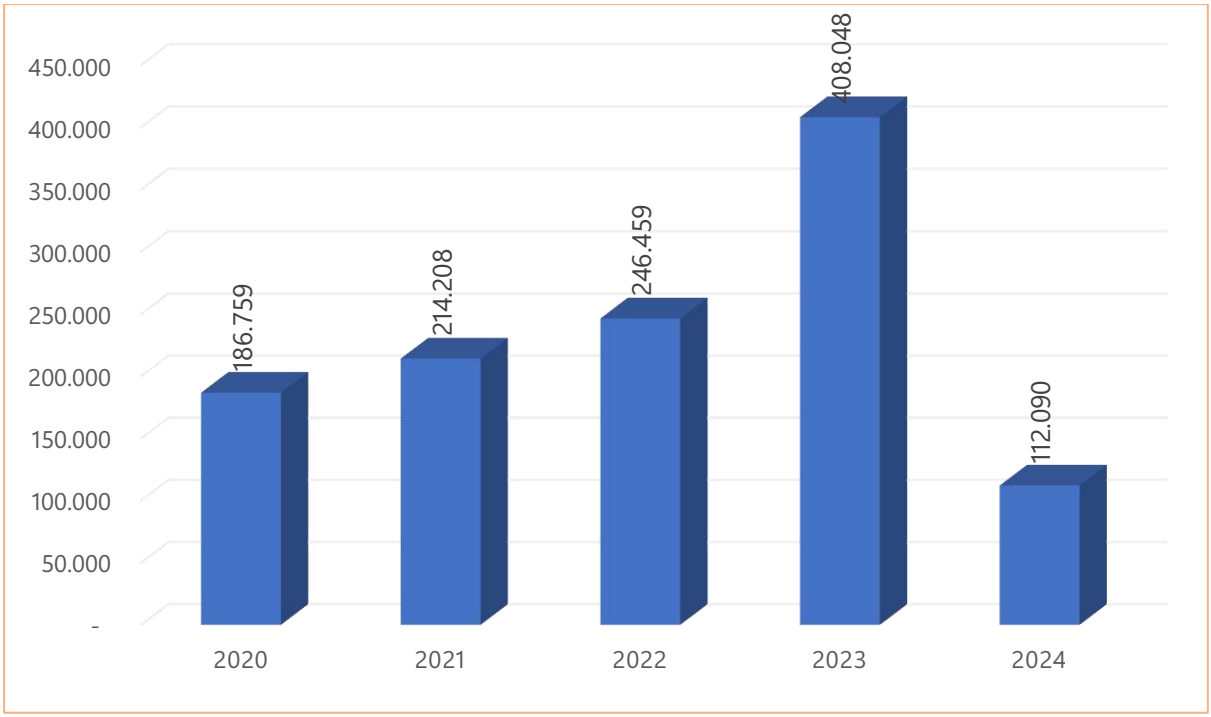
Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam hal pemenuhan kebutuhan sosial dasar di dalam panti membutuhkan peningkatan sarana seiring dengan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial. Ketersediaan sarana prasarana sosial guna optimalisasi pelayanan sosial yang menjamin pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat di dalam panti. Kondisi sarana prasarana panti pelayanan sosial saat ini sebanyak 6 (enam) unit dalam kondisi baik 1 (satu) unit dalam kondisi kurang baik. Panti pelayanan sosial merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial dasar secara langsung kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai dengan standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial. Daftar panti pelayanan sosial milik Pemerintah Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.74.

Tabel 2.74.
Daftar Panti Pelayanan Sosial Dinas Sosial Provinsi Aceh Tahun 2024

| No. | Nama Panti | Jenis PPKS yang dilayani | Daya Tampung | Jumlah Tertampung | Jenis Pelayanan PPKS | Tempat Kedudukan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panti Sosial Anak Jroh Naguna | Anak Putus Sekolah | 50 Orang | 50 Orang | Rehabilitasi Sosial Dasar | Lampineung – Kota Banda Aceh |
| 2. | Panti Sosial Lanjut Usia Geunaseh Sayang | Lanjut Usia Terlantar | 70 Orang | 65 Orang | Rehabilitasi Sosial Dasar | Ulee Kareng – Kota Banda Aceh |
| 3. | Panti Sosial Disabilitas Meujroh Meukarya | Disabilitas | 60 Orang | 50 Orang | Rehabilitasi Sosial Dasar | Desa Ladong - Kab. Aceh Besar |
| 4. | Panti Sosial Anak Terlantar Aneuk Nanggroe | Anak Terlantar | 70 Orang | 50 Orang | Rehabilitasi Sosial Dasar | Desa Geu Gajah – Kab. Aceh Besar |
| 5. | Panti Sosial Tuna Sosial | Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis | 30 Orang | - Orang | Rehabilitasi Sosial Dasar | Desa Ladong - Kab. Aceh Besar |
| 6. | Panti Sosial Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi | Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi | 30 Orang | – Orang | Rehabilitasi Sosial Dasar | Lampineung – Kota Banda Aceh |

*Sumber : Dinas Sosial Aceh, 2025*

Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Aceh cenderung fluktuatif, hal ini dikarenakan masih terdapat masyarakat dengan kondisi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, serta perubahan lingkungan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar. Berdasarkan Gambar 2.83, dapat dilihat bahwa Pemerintah Aceh berupaya melaksanakan optimalisasi penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, dan pemberdayaan sosial. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilaksanakan Dinas Sosial Aceh selama 5 tahun terakhir yaitu periode tahun 2020-2024 sebanyak 1.167.564 jiwa.




*Sumber : Dinas Sosial Aceh, 2025*

Gambar 2.83. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2020 – 2024

Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang menjadi Indikator Kinerja Kunci, Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial memiliki Unit Pelayanan Teknis Dinas untuk menjalankan fungsi rehabilitasi sosial bagi Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Disabilitas, Gelandangan dan Pengemis di dalam panti serta penanganan korban bencana alam dan bencana sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam rangka meningkatkan mutu kualitas layanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Dinas Sosial perlu meningkatkan penguatan kapasitas baik secara kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama bagi Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Seiring dengan meningkatnya permasalahan sosial maka sarana dan prasarana di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) serta sarana dan prasaran dalam penanganan korban bencana perlu ditingkatkan dari segi pelayanan multifungsi sehingga bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) saat ini dapat dilakukan secara optimal dan konfrehensif.

## B.2. Pemberdayaan Sosial

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial. Peningkatan kompetensi PSKS merupakan upaya mendorong percepatan secara kongkrit dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) disekitarnya. Berikut jumlah PSKS di Aceh periode tahun 2020 sampai dengan 2024 seperti terlihat pada Tabel 2.75.

Tabel 2.75.
Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial di Aceh

| No. | Jenis | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Karang Taruna (Lembaga) | 1.376 | 1.413 | 1.462 | 1.542 | 1542 |
| 2 | Organisasi Sosia (Lembaga) | 57 | 60 | 60 | 65 | 65 |
| 3 | LKS Panti (Lembaga) | 166 | 164 | 158 | 143 | 143 |
| 4 | PSM (Orang) | 1.252 | 1.295 | 1.302 | 1.349 | 1.349 |
| 5 | TKSK (Orang) | 289 | 289 | 289 | 290 | 274 |
| 6 | LK3 (Lembaga) | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| 7 | Dunia Usaha (Lembaga) | 13 | 13 | 15 | 18 | 18 |
| 8 | Tagana (Orang) | 772 | 759 | 873 | 757 | 768 |
| 9 | Kader Perempuan (Orang) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 10 | Pendamping Sosial (PKH & Rehsos) (Orang) | 1.246 | 1.246 | 1.248 | 1.251 | 1.148 |
| 11 | Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat (WKSBM) (Lembaga) | 364 | 371 | 385 | 453 | 441 |
| | Jumlah | 5.562 | 5.637 | 5.819 | 5.894 | 4.649 |

Pemerintah Aceh bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Non Pemerintah Nasional dan internasional dalam memperkuat potensi PSKS di Provinsi Aceh, Pemerintah Aceh berkalaborasi dengan Lembaga-Lembaga Non Pemerintah dan Lembaga Pendidikan sebagai upaya dukungan untuk memperkuat dan meningkatkan PSKS di Aceh. Dukungan terhadap kolaborasi ini harus ditingkatkan, terutama dalam menggali dan mengembangkan potensi lokal serta sumber kesejahteraan sosial yang dimiliki masyarakat. Potensi tersebut mencakup sumber daya manusia, kearifan lokal, serta partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kesejahteraan sosial.

Berikut adalah Tabel Tabel 2.76 menyajikan dukungan peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang telah dilakukan oleh kerjasama Lembaga Non Pemerintah serta permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan potensi dan sumber yang ada.

Tabel 2.76.
Dukungan peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosia oleh Lembaga Non Pemerintah

| Unsur | Bentuk Dukungan | Permasalahan yang Dihadapi |
|---|---|---|
| Pemerintah | - Regulasi<br>- Bantuan operasional<br>- Pembinaan | - Minimnya anggaran<br>- Belum semua Kab/kota menjangkau PSKS secara merata |
| Lembaga Non. Pemerintah | - Advokasi kebijakan<br>- Pendampingan komunitas<br>- Bantuan sosial langsung | - Ketergantungan pada donatur<br>- SDM tidak merata di tiap Kab/kota |

| Unsur | Bentuk Dukungan | Permasalahan yang Dihadapi |
|---|---|---|
| Perguruan Tinggi | Kerjasama peningkatan SDM Kessos | Belum terkoordinasi dengan baik dalam penetapan SDM Kesos |
| Dunia Usaha (CSR) | Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) | - Kurangnya monitoring & evaluasi<br>- Program tidak berkelanjutan |
| Masyarakat dan Usaha Kesejahteraan Sosial lainnya | - Partisipasi aktif dalam kegiatan sosial<br>- Donasi dan gotong royong | - Kurangnya pelatihan<br>- Masih sektoral, belum terkoordinasi dengan baik |

Selain penguatan kapasitas PSKS, Pemerintah Aceh juga melakukan Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial merupakan bagian integral dari pembangunan kartakter bangsa. Sebagai bentuk penghormatan dan pembelajaran sejarah bagi generasi mendatang Pemerintah Aceh secara aktif mengusulkan tokoh-tokoh yang telah berjasa kepada bangsa untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional.

## B.3. Penanganan Bencana

Penanganan Korban Bencana merupakan salah satu dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang menjadi tugas Dinas Sosial Aceh. Tentunya Dinas Sosial Aceh yang diberikan mandat dan tanggung jawab menangani pelayanan dasar dan urusan wajib pemerintah daerah, mempunyai kewajiban yang memfokuskan pada penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang Sosial terutama di sektor penanganan urusan kebencanaan. Skema mitigasi bencana dan kesiapsiagaan penangananan bencana pada saat terjadi bencana dan pasca bencana, terkhusus penyediaan buffrerstok pangan dan sandang menjadi sebuah keharusan dan skala prioritas, baik pada aspek perencanan dan aspek implementasi program dan kegiatan.

Tabel 2.77.
Data Penanganan Korban Bencana Tahun 2021 sampai dengan 2024

| No | Kab/Kota | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LK | PR | LK | PR | LK | PR | LK | PR |
| 1 | Sabang | 85 | 123 | 140 | 235 | 48 | 56 | 68 | 78 |
| 2 | Banda Aceh | 166 | 158 | 388 | 364 | 18 | 29 | 92 | 81 |
| 3 | Aceh Besar | 286 | 434 | 574 | 690 | 126 | 135 | 158 | 479 |
| 4 | Pidie | 1.415 | 1.940 | 108 | 119 | 222 | 208 | 3.915 | 5.494 |
| 5 | Pidie Jaya | 1.769 | 1.074 | 6.093 | 6.005 | 9 | 10 | 5.206 | 6.207 |
| 6 | Bireuen | 1.750 | 1.194 | 2.070 | 2.056 | 485 | 515 | 5.697 | 7.012 |
| 7 | Lhoksumawe | 198 | 292 | 46 | 49 | 6.332 | 6.660 | 216 | 168 |
| 8 | Aceh Utara | 33.223 | 33.020 | 55.731 | 55.456 | 40.824 | 40.641 | 3.115 | 2.964 |
| 9 | Aceh Timur | 1.291 | 1.181 | 44 | 46 | 3.503 | 3.228 | 326 | 271 |
| 10 | Langsa | 979 | 949 | 40 | 37 | 2.776 | 2.704 | 122 | 108 |
| 11 | Aceh Tamiang | 31.517 | 30.075 | 83.773 | 78.656 | 6.226 | 6.978 | 4.553 | 4.592 |
| 12 | Bener Meriah | 390 | 407 | 1.046 | 1.081 | 41 | 44 | 85 | 97 |

| No | Kab/Kota | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LK | PR | LK | PR | LK | PR | LK | PR |
| 13 | Aceh Tengah | 346 | 359 | 693 | 713 | 138 | 139 | 207 | 226 |
| 14 | Gayo Lues | 144 | 148 | 194 | 221 | 64 | 63 | 176 | 160 |
| 15 | Aceh Tenggara | 3.630 | 3.793 | 973 | 915 | 5.106 | 5.217 | 4.813 | 5.249 |
| 16 | Aceh Jaya | 1.469 | 1.920 | 2.859 | 2.892 | 3.452 | 3.246 | 1.098 | 1.124 |
| 17 | Aceh Barat | 370 | 420 | 260 | 293 | 46.160 | 46.319 | 492 | 550 |
| 18 | Nagan Raya | 998 | 1.004 | 2.819 | 2.804 | 3.025 | 3.579 | 3.752 | 2.931 |
| 19 | Aceh Barat Daya | 5.027 | 5.099 | 14.598 | 14.826 | 409 | 393 | 76 | 79 |
| 20 | Aceh Selatan | 2.945 | 3.950 | 6.024 | 6.074 | 22.894 | 18.966 | 12.919 | 10.812 |
| 21 | Subulussalam | 1.505 | 1.606 | 9.460 | 9.613 | 4.447 | 4.553 | 5.609 | 5.653 |
| 22 | Aceh Singkil | 2.545 | 3.442 | 5.260 | 5.130 | 14.260 | 14.156 | 115 | 41 |
| 23 | Simeulue | 123 | 240 | 337 | 367 | 493 | 533 | 140 | 122 |
| JUMLAH | | 92.171 | 92.828 | 193.530 | 188.642 | 161.058 | 158.372 | 52.950 | 54.498 |

## B.4. Perlindungan dan Jaminan Sosial

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang berkeadilan dan inklusif, Pemerintah Aceh melaksanakan program Perlindungan dan jaminan sosial dengan mengembangkan skema perlindungan yang adaptif dan responsif bagi kelompok rentan. Perlindungan dan jaminan sosial untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak-hak dasar kelompok masyarakat yang berisiko mengalami disfungsi sosial dan ekonomi , seperti lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, perempuan kepala keluarga, serta korban bencana dan kemiskinan ekstrem. Jaminan Sosial melalui program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta skema jaminan sosial yang terintegrasi, pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial berkomitmen menghadirkan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan guna menciptakan rasa aman, mendorong kemandirian, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat secara menyeluruh. Seluruh upaya ini ditujukan untuk memastikan perlindungan dan jaminan sosial berjalan secara efektif, akuntabel, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

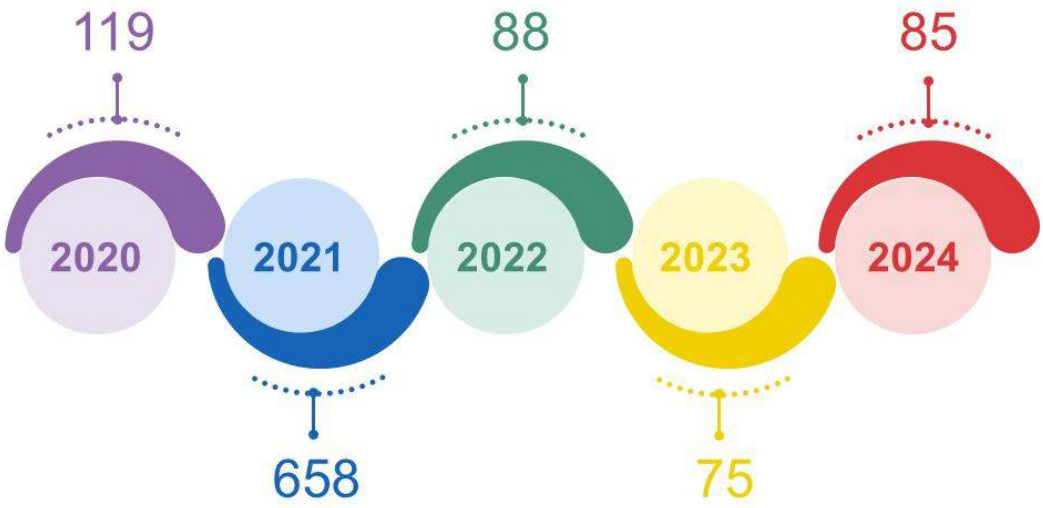
Tabel 2.78.
Data Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dari Tahun 2020 s.d 2024

| No | Kab/Kota | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LK | PR | LK | PR | LK | PR | LK | PR | LK | PR |
| 1 | Aceh Barat | - | - | 6 | 99 | 68 | 338 | 24 | 45 | - | - |
| 2 | Aceh Barat Daya | - | - | 24 | 170 | - | 13 | - | - | - | - |
| 3 | Aceh Besar | - | 15 | 199 | 130 | 46 | 103 | 69 | 38 | 4 | 13 |
| 4 | Aceh Jaya | - | - | 1 | 9 | 106 | 120 | - | 20 | - | - |
| 5 | Aceh Selatan | - | - | 8 | 63 | - | 129 | - | 43 | - | - |
| 6 | Aceh Singkil | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Aceh Tamiang | - | - | - | - | 25 | 43 | - | 6 | 2 | 33 |
| 8 | Aceh Tengah | - | - | 49 | 165 | - | - | 8 | 13 | - | - |
| 9 | Aceh Tenggara | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 |
| 10 | Aceh Timur | - | - | 2 | 78 | 106 | 267 | - | 60 | - | - |
| 11 | Aceh Utara | - | - | 30 | 115 | 386 | 548 | 51 | 99 | - | - |
| 12 | Bener Meriah | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 | 20 |
| 13 | Bireuen | - | - | 54 | 69 | 36 | 350 | 2 | 21 | 6 | 35 |
| 14 | Gayo Lues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 15 | Nagan Raya | - | - | 15 | - | 23 | 177 | 5 | 15 | - | - |
| 16 | Pidie | - | 76 | - | 22 | 13 | 1 | 32 | 38 | - | 1 |

| No | Kab/Kota | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LK | PR | LK | PR | LK | PR | LK | PR | LK | PR |
| 17 | Pidie Jaya | - | - | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Simeulue | - | - | 23 | 60 | | 100 | - | - | - | - |
| 19 | Banda Aceh | - | 27 | 88 | 75 | 13 | 37 | 17 | 57 | 3 | 3 |
| 20 | Kota Langsa | 169 | 239 | - | - | 25 | 43 | 1 | 23 | 9 | 26 |
| 21 | Lhokseumawe | - | - | 1 | 13 | 4 | 52 | 2 | - | - | - |
| 22 | Kota Sabang | - | - | 3 | 11 | - | 13 | - | 3 | - | - |
| 23 | Subulussalam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | 169 | 357 | 507 | 1.111 | 851 | 2.334 | 213 | 481 | 34 | 151 |

B.5. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal.

Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh mengupayakan memberikan perlindungan sosial bagi warga negara migran korban tindak kekerasan yang mengalami permasalahan diluar negeri dan dalam negeri melalui program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang adaptif dan responsif untuk dipulangkan ke daerah asal kabupaten/kota dari titik Debarkasi di daerah Provinsi. Berikut data pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan




Gambar 2.84. Data Pemulangan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan

B.6. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pemerintah Aceh untuk memulikan jasa pahlawan, merawat bukti sejarah perjuangan bangsa serta menjaga Taman Makam Pahlawan dan makam pahlawan nasional dilakukan secara komprahensif. Seluruh upaya ini dilakukan Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh dalam melaksanakan program pengelolaan taman makam pahlawan dengan merawat dan rehabilitasi sarana dan prasarana. Provinsi Aceh memiliki Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional dapat dilihat pada Tabel 2.79.

Tabel 2.79.
Taman Makam Pahlawan

| No. | Kab/Kota | Nama TMP | Lokasi | Luas TMP/MPN | Jumalh Makam | | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Banda Aceh | TMP. Kampung Ateuk | Banda Aceh | 10.000 $M^2$ | 450 | Makam Pahlawan Nasional | Jl. Taman Makam Pahlawan Kel. Kp. Ateuk Kec. Peuniti Kota Banda Aceh |

| No. | Nama Pahlawan Nasional | Kelahiran | | Wafat | Alamat Makam | SK Pengangkatan Gelar Pahlawan Nasional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tempat | Tanggal Lahir | | | |
| 1. | Sultan Iskandar Muda | Bandar Aceh Darusslam | 1593 | 27 Desember 1636 (Umur 43 Tahun) di Bandar Aceh Darussalam. | Komplek Kandang Meuh, Kelurahan Peniti, Kec, Baiturrahman, Kota Banda Aceh. | 077/TK/Tahun 1993 Tanggal 14 September 1993. |
| 2. | Laksamana Malahayati | Aceh Besar, Kesultanan Aceh | 1 Januari 1550 | 30 Juni 1615 (umur 65 Tahun) di Aceh Besar. | Desa Lamreh, Kec. Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. | 115/TK/Tahun 2017 Tanggal 6 November 2017. |
| 3. | Teuku Chik Ditiro | Tiro, Pidie, Kesultanan Aceh Darussalam | 1 Januari 1836 | 31 Januari 1891 (Umur 55 Tahun) di Aneuk Galong. | Jl. Makam Pahlawan Nasional Tgk. Chik Ditiro Mureu lamglumpang Kec. Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. | 087/TK/Tahun 1973 Tanggal 6 November 1973. |
| 4. | Cut Nyak Dhien | Lampadang, Kesultanan Aceh | 12 Mei 1848 | 06 November 1908 (Umur 60 Tahun) di Sumedang. | Jalan Gunung Puyuh No. 1 Desa Sukajaya, Kec. Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Jawa Barat. | 106/TK/Tahun 1964 tanggal 2 Mei 1964. |
| 5. | Teuku Umar | Meulaboh, Kesultanan Aceh Darussalam | 1854 | 11 Februari 1899 (Umur 44-45 tahun) di Meulaboh. | Gle Raya Tameh Uteun Mugo, Gampong, Mugo Rayeuk, Kec. Panton Reu, Kabupaten Aceh Barat. | 087/TK/1973 tanggal 6 November 1973. |
| 6. | Cut Nyak Mutia | Keureutoe, Pirak, Aceh Utara | 15 Februari 1870 | 24 Oktober 1910 (Umur 40 Tahun) di Alue Kurieng. | Makam ini terletak di Hutan, Kec. Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara. | 107/TK/1964 Tanggal 2 Mei 1964. |
| 7. | Teuku Nyak Arif | Ulee Lheue, Banda Aceh | 17 Juli 1899 | 04 Mei 1946 (Umur 46 Tahun) di Takengon Kabupaten Aceh Tengah. | Makam Bak Trieng, Kec. Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar. | 071/TK/1974. |
| 8. | Teuku Muhammad Hasan | Sigli | 04 April 1906 | 21 September 1997 (Umur 91 Tahun) di Jakarta. | Jl. Raya Kalibata No.14, RT.14/RW.1, Kalibata, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta. | 085/TK/2006 tertanggal 3 November 2006. |

### 2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

### A. Penyelenggaraan Kehidupan Beragama

### A1. Syariat Islam

Penguatan penerapan syariat Islam secara holistik merupakan salah satu misi dari Gubernur Aceh tahun 2025-2029. Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Syariat Islam di Aceh merupakan salah satu keistimewaan provinsi ini dan diatur oleh berbagai qanun (peraturan daerah) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan Syariat Islam di Aceh mencakup beberapa aspek penting kehidupan masyarakat, antara lain:

1. Bidang Hukum: Penerapan hukum pidana dan perdata yang berbasis syariat, seperti hukum jinayat yang mengatur tindak pidana dalam perspektif Islam. Contoh hukuman yang diterapkan termasuk cambuk untuk pelanggaran tertentu.

2. Bidang Ekonomi: Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk keberadaan lembaga keuangan syariah yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam. Zakat, infaq, dan wakaf juga merupakan bagian dari sistem ekonomi syariah di Aceh.
3. Bidang Sosial dan Budaya: Promosi dan pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk penggunaan busana Muslim, pemisahan tempat duduk pria dan wanita di tempat umum, serta pengaturan waktu operasional tempat hiburan sesuai dengan waktu ibadah.
4. Pendidikan Islam: Penekanan pada pendidikan berbasis Islam di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Kurikulum yang digunakan juga mencakup pendidikan agama yang mendalam.
5. Layanan Keagamaan: Fasilitas dan program yang mendukung pelaksanaan ibadah dan pengembangan spiritual, seperti pembangunan masjid, pelaksanaan haji dan umrah, serta kegiatan keagamaan lainnya.
6. Pengawasan dan Penegakan Syariat: Pemerintah Aceh memiliki lembaga pengawas dan penegak syariat, seperti Wilayatul Hisbah (polisi syariah) yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam di masyarakat.

Penerapan Syariat Islam di Aceh bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih taat beragama, menjaga nilai-nilai keislaman, serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga.

Dari tahun 2020–2024, secara umum kondisi jarimah (kejahatan) meningkat. Pada tahun 2023 jumlah jarimah sebanyak 409 kasus, sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 516 kasus. Namun, kalau dilihat kasus per kasus terdapat sejumlah jarimah yang menurun, tetapi tidak dapat dipungkiri juga ada yang meningkat. Seperti Khamar, Ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan dan liwath mengalami pengurangan, sedangkan Maisir dan Khalwat mengalami peningkatan. Bahkan kasus Maisir meningkat signifikan, di mana pada tahun 2023 dari 153 kasus Maisir menjadi meningkat sebanyak 247 kasus di tahun 2024, adapun kasus Khalwat dari 4 kasus bertambah menjadi 8 kasus pada tahun 2024.

Jumlah kasus pelanggaran syariat islam yang dilakukan masyarakat periode tahun 2019-2024 disajikan dalam Tabel 2.80.

Tabel 2.80.
Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Tahun 2019 – 2024 sesuai Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014

| No. | Jenis Pelanggaran | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Khamar | 11 | 18 | 18 | 13 | 23 | 17 |
| 2 | Maisir | 83 | 65 | 194 | 153 | 95 | 247 |
| 3 | Khalwat | 9 | 7 | 10 | 7 | 4 | 8 |
| 4 | Ikhtilath | 84 | 39 | 46 | 25 | 22 | 15 |

| No. | Jenis Pelanggaran | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5 | Zina | 32 | 49 | 51 | 28 | 38 | 21 |
| 6 | Pelecehan Seksual | 16 | 41 | 36 | 55 | 48 | 42 |
| 7 | Pemerkosaan | 21 | 49 | 115 | 136 | 177 | 165 |
| 8 | Liwath | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Jumlah Kasus | | 312 | 269 | 472 | 419 | 409 | 516 |

*Sumber : Dinas Syariat Islam, Tahun 2025*

Selain masih banyaknya jumlah kasus pelanggaran syariat islam, kerawanan terhadap pemahaman syariat islam di wilayah perbatasan dan daerah terpencil masih dijumpai. Dalam rangka meningkatkan pemahaman syariat islam di daerah tersebut, Pemerintah Aceh menempatkan Da'i Perbatasan di 6 (enam) Kabupaten/Kota. Jumlah Da'i Perbatasan dan Daerah Terpencil di tahun 2020 sampai dengan 2021 berjumlah 200 orang dan mulai berkurang menjadi 189 orang pada tahun 2022 orang dan 179 orang pada tahun 2023 selanjutnya mengalami penurunan kembali pada tahun 2024 sehingga menjadi 170 orang. Secara keseluruhan terjadi pengurangan Da'i sebanyak 30 orang, umumnya disebabkan karena sebagian Da'i telah mencapai batas umur maksimal tenaga kontrak, mengundurkan diri karena telah lulus seleksi PPPK, menjadi Calon anggota DPR Kabupaten/Kota dan menjadi Calon Anggota DPR Aceh pada Pemilu tahun 2024. Berikut jumlah Da'i perbatasan di Aceh. Berikut jumlah Da'i perbatasan di Aceh. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.81.

Tabel 2.81.
Jumlah Da'i di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil Tahun 2019 – 2024

| Kabupaten/ Kota | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pbts | Tpcl | Pbts | Tpcl | Pbts | Pbts | Tpcl | Tpcl | Pbts | Tpcl | Pbts | Tpcl |
| Aceh Singkil | 26 | 16 | 26 | 17 | 26 | 21 | 17 | 17 | 26 | 17 | 21 | 17 |
| Subulussalam | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 8 | 18 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 |
| Aceh Selatan | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Aceh Tamiang | 15 | 24 | 24 | 15 | 24 | 24 | 13 | 15 | 24 | 13 | 24 | 12 |
| Aceh Tenggara | 40 | 3 | 38 | 5 | 38 | 36 | 5 | 5 | 38 | 5 | 32 | 5 |
| Simeulue | 0 | 32 | 0 | 31 | 0 | 0 | 23 | 31 | 0 | 27 | 0 | 21 |
| Jumlah | 89 | 111 | 96 | 104 | 96 | 89 | 90 | 104 | 96 | 93 | 84 | 86 |
| Total | 200 | | 200 | | 200 | | 189 | | 179 | | 170 | |

*Sumber : Dinas Syariat Islam Aceh, Tahun 2025 (Ket : Pbts : Perbatasan; Tpcl : Terpencil*

## A2. Pengelolaan Harta Agama

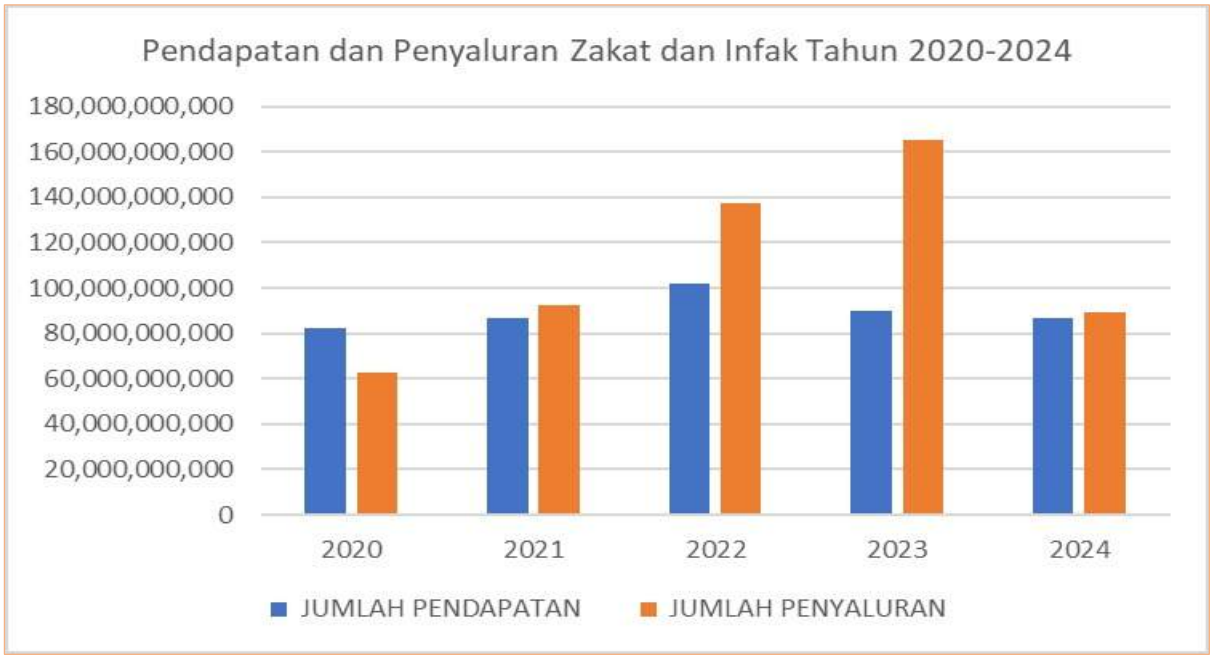
Dinul Islam merupakan suatu rangkaian dari 3 (tiga) pilar yaitu syari'ah, aqidah dan akhlak. Definisi Syri'ah adalah sistem norma (kaidah) Illahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Aqidah adalah iman (keyakinan) yang ditautkan dengan Rukun Iman yang merupakan

asas seluruh ajaran Islam. Sedangkan kaidah yang mengatur hubungan langsung manusia dengan Allah disebut kaidah ibadah. Selanjutnya akhlak adalah sikap yang menimbulkan prilaku baik dan buruk. Akhlak berasal dari kata khuluk yang berarti perangai, sikap, perilaku, watak, budi pekerti.

Pengelolaan Harta Agama menjadi elemen penting dalam penerapan nilai Syariat Islam dalam masyarakat. Kehadiran Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menegaskan komitmen pemerintahan Aceh dalam merealisasikan syariat Islam di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan ummat. Baitul Mal diberikan kewenangan untuk mengelola zakat, infak, shadaqah, wakaf, perwalian (ZISWAF dan Perwalian) dan harta agama lainnya. Instrument harta agama ini memiliki nilai yang cukup strategis dalam pemberdayaan ummat. Sejak zaman Rasulullah sampai dengan sekarang pengelolaan harta agama yang dilakukan dengan manajemen yang baik mampu menciptakan kemandirian dan produktifitas masyarakat.

### A2.1. Pengelolaan Zakat dan Infak

Regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 192 belum dapat dilaksanakan. Ini terjadi akibat belum singkron UU Pajak Penghasilan dengan UUPA. Untuk ini diperlukan kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga zakat sebagai pengurang pajak dapat terlaksana dan muzakki tidak merasakan pembayaran ganda zakat dan pajak. Secara umum pemanfaatan dan pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) di Aceh belum optimal.




*Sumber: Baitul Mal Aceh, 2025*

Gambar 2.85. Jumlah Pendapatan dan Penyaluran Zakat dan Infak Tahun 2020-2024

Pendapatan zakat dan infak selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir berkisar antara 40M hingga 100M. Adapun pada tahun 2019-2020 pertumbuhan pendapatan

zakat dan infak mengalami perlambatan dipengaruhi oleh kondisi covid-19 yang juga berdampak terhadap pendapatan masyarakat Aceh. Namun demikian di tahun 2021-2022 pendapatan zakat dan infak sudah mulai meningkat kembali seiring dengan adanya pemulihan perekonomian diberbagai sektor. Akan tetapi pada tahun 2023 dan 2024 pendapatan zakat dan infak sedikit mengalami penurunan dikarenakan adanya perubahan kebijakan penganggaran, yang berpengaruh terhadap besaran anggaran belanja pembangunan fisik, dimana setiap anggaran belanja pembangunan fisik yang bersumber dari APBA akan dipotong sebesar 0.5% untuk pendapatan infak.

Sementara dari sisi penyaluran zakat dan infak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, selain potensi pendapatan juga ditambahkan dengan silpa dari tahun sebelumnya. Selanjutnya dari sisi peningkatan peran keuangan sosial syariah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial ekonomi. Pengumpulan dan penyaluran zakat belum optimal. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang menjalankan tugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak/sedekah (ZIS), dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) serta mengoordinasikan pengelolaan ZIS dari seluruh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat se-Indonesia. Perkembangan Pengumpulan Zakat Nasional mengalami Pertumbuhan Konsisten kisaran 30 persen, peningkatan nilai absolut selama lima tahun terakhir. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kondisi ini diperlukan sinergi lintas sektoral, optimalisasi potensi muzaki badan, serta strategi pemetaan potensi zakat nasional. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan pada digunakan satu konsep yang sama secara nasional yaitu dengan menggunakan indeks zakat nasional indikator berbasis data, dan menjadi referensi standar kemajuan sekaligus refleksi kinerja perzakatan di Indonesia, yang penerapannya dapat dilakukan secara periodik di setiap level (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Alat ukur ini berperan sebagai measurement standard untuk menilai dan mengevaluasi kinerja perzakatan nasional, dengan mencakup penilaian kuantitatif sekaligus kualitatif.

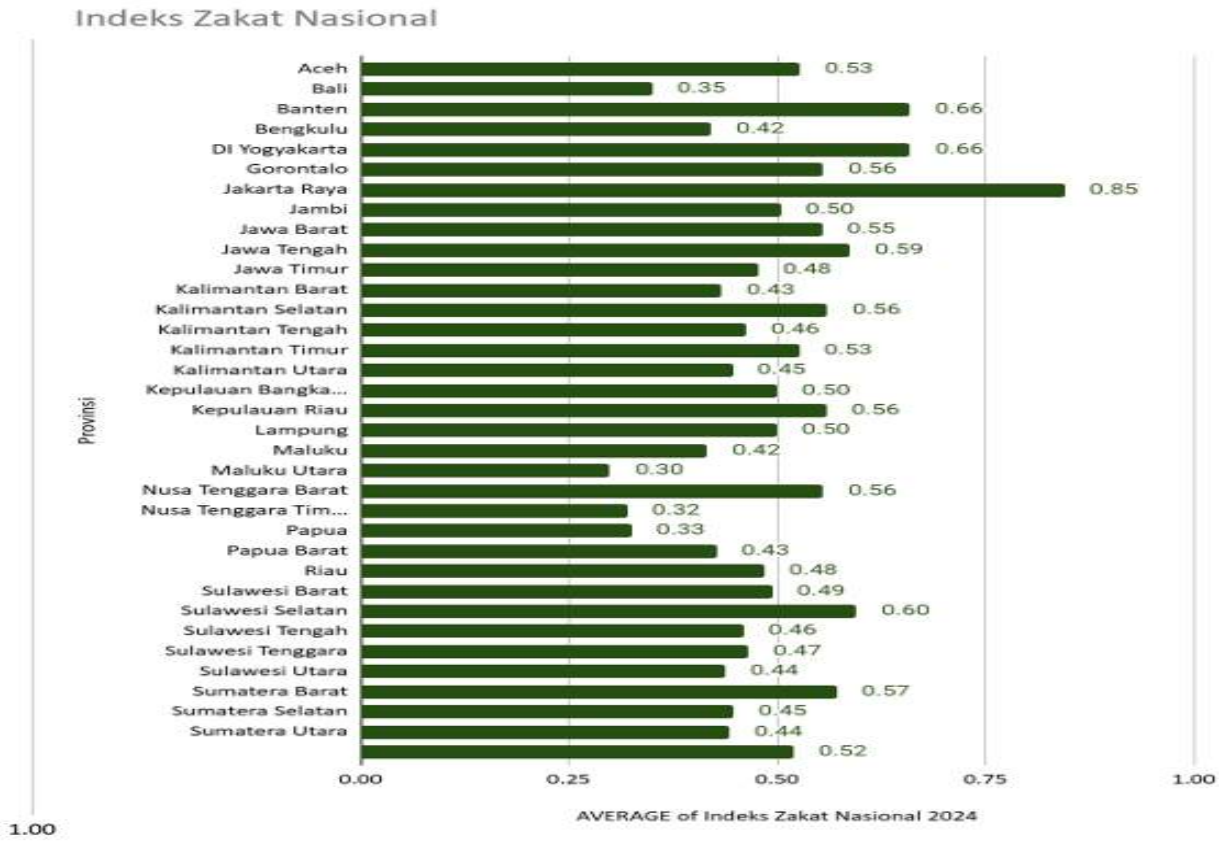
**Komponen IZN Versi 3.0**

| Dimensi | Indikator | Variabel |
|---|---|---|
| Makro (X1) | Regulasi (X11) | **Regulasi Nasional/Daerah (X111)**<br>**Pelaksanaan Regulasi (X112)** |
| | Dukungan APBN/APBD (X12) | **Dukungan APBN/APBD untuk Operasional (X121)**<br>**Keberlanjutan APBN/APBD (X122)**<br>**Alokasi APBN/APBD untuk Hak Keuangan Pimpinan (X123)** |
| | Database Lembaga Zakat (X13) | Lembaga Zakat (X131)<br>Muzaki (X132)<br>Mustahik (X133) |
| | Penguatan Jaringan (X14) | **Koordinasi Eksternal (X141)**<br>Koordinasi Internal (X142) |
| | Literasi dan Dakwah Zakat (X15) | **Literasi (X151)**<br>Dakwah (X152)<br>Pelayanan sosialisasi zakat (langsung dan tidak langsung) (X153) |
| Mikro (X2) | Tata Kelola (X21) | **Perencanaan dan Pengembangan (X211)**<br>**Pengendalian dan Ketaatan Regulasi (3 Aman) (X212)**<br>Pengumpulan (X213)<br>Operasi (X214)<br>**Pendistribusian dan Pendayagunaan (X215)**<br>Kesehatan Lembaga Zakat (X216)<br>Pelaporan (X217)<br>Teknologi (X218) |
| | Dampak Zakat (X22) | Mustahik Menjadi Muzaki (X221)<br>Mustahik Dientaskan dari Kemiskinan (X222)<br>Perubahan Budaya Produktif (X223)<br>Indeks Kesejahteraan CIBEST (X224)<br>Zakat dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (X225) |

*Sumber: Baznas, 2025*

Gambar 2.86. Komponen Indeks Zakat Nasional, 2025

Berdasarkan perhitungan BAZNAS ditahun 2024, kondisi Indeks Zakat Nasional di seluruh provinsi dapat dilihat pada gambar berikut ini.




*Sumber: Baznas, 2025*

Gambar 2.87. Indeks Zakat Nasional, 2025

Provinsi Aceh di tahun 2024 memperoleh indeks zakat nasional sebesar 0,53 yang berarti bahwa cukup baik dan dalam kondisi stabil. Pengumpulan dan penyaluran zakat di Aceh mengalami pertumbuhan, namun masih memiliki potensi untuk optimalisasi.

## A2.2. Pengelolaan Wakaf

Sepanjang sejarah, institusi wakaf memiliki rekam jejak yang gemilang, pada masa era keemasan Aceh, Wakaf mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi perkembangan sosio ekonomi masayarakat Islam.

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang telah lama dikenal dan dipraktikkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam sejarah Islam, wakaf berperan penting dalam mendukung sektor pendidikan, sosial, dan keagamaan, terutama dalam penyediaan fasilitas umum seperti masjid, sekolah, serta pusat kesehatan. Konsep ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi umat dengan mengalokasikan harta yang tidak boleh diperjualbelikan tetapi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, wakaf menjadi salah satu bentuk amal jariyah yang memiliki dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

Kesadaran mengenai peranan wakaf dapat dilihat dalam beberapa tahun terakhir. Kesadaran ini telah mendorong para pemangku kepentingan menjalankan berbagai agenda untuk memamjukan wakaf. Bahwa setelah sempat lama menajdi raksasa tidur, kini revitalisasi wakaf kembali menjadi agenda utama. Kehadiran wakaf adalah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh komunitas masayarakat di suatu tempat, khususnya di Aceh.

### A3. Pelaksanaan Ibadah

Dalam upaya meningkatkan persentase mesjid yang melaksanakan fungsi idarah, imarah dan riayah sesuai klasifikasi maka Dinas Syariat Islam menjadikan indikator kinerja dan Dinas Syariat Islam telah melaksanakan beberapa pendekatan antara lain melakukan koordinasi dengan Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota dan pembinaan takmir masjid melalui para takmir masjid di kabupaten/kota serta melibatkan Badan Kontak Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) se-Aceh. Data masjid yang melaksanakan fungsi idarah, imarah dan riayah sesuai klasifikasinya yang disajikan oleh laporan berbasis aplikasi Sistem Informasi Masjid Aceh (SIMASA) yang telah dilakukan pengembangannya mulai tahun 2018 bersama Dinas Komunikasi dan Informasi Persandian Aceh. Adapun rincian data masjid berdasarkan tipologi sampai Desember 2024 sebagai berikut. Kondisi jumlah masjid di Provinsi Aceh sampai dengan tahun 2024 dan yang melaksanakan shalat Jum'at dapat dilihat pada Tabel 2.82.

Tabel 2.82.
Data Mesjid Se-Aceh yang Melaksanakan Shalat Jum'at Tahun 2024

| No. | Kabupaten/Kota | Mesjid Raya | Mesjid Agung | Mesjid Kecamatan | Mesjid Mukim | Mesjid Gampong | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh Selatan | | 1 | 18 | 50 | 260 | 329 |
| 2 | Aceh Tenggara | | 1 | 16 | 51 | 385 | 453 |
| 3 | Aceh Timur | | 1 | 24 | 66 | 513 | 604 |
| 4 | Aceh Tengah | | 1 | 14 | 20 | 295 | 330 |
| 5 | Aceh Barat | | 1 | 12 | 36 | 322 | 371 |
| 6 | Aceh Besar | | 1 | 23 | 68 | 604 | 696 |
| 7 | Pidie | | 1 | 23 | 97 | 730 | 851 |
| 8 | Aceh Utara | | 1 | 27 | 76 | 852 | 956 |
| 9 | Simeulue | | 1 | 10 | 29 | 138 | 178 |
| 10 | Aceh Singkil | | 1 | 11 | 16 | 116 | 144 |
| 11 | Bireuen | | 1 | 17 | 75 | 609 | 702 |
| 12 | Aceh Barat Daya | | 1 | 9 | 20 | 152 | 182 |
| 13 | Gayo Lues | | 1 | 11 | 25 | 136 | 173 |
| 14 | Aceh Jaya | | 1 | 9 | 21 | 172 | 203 |
| 15 | Nagan Raya | | 1 | 10 | 30 | 222 | 263 |
| 16 | Aceh Tamiang | | 1 | 12 | 31 | 213 | 257 |
| 17 | Bener Meriah | | 1 | 10 | 27 | 232 | 270 |
| 18 | Pidie Jaya | | 1 | 8 | 34 | 222 | 265 |
| 19 | Banda Aceh | 1 | 1 | 9 | 17 | 90 | 117 |
| 20 | Sabang | | 1 | 3 | 7 | 18 | 29 |
| 21 | Lhokseumawe | | 1 | 4 | 9 | 68 | 82 |

| No. | Kabupaten/Kota | Mesjid Raya | Mesjid Agung | Mesjid Kecamatan | Mesjid Mukim | Mesjid Gampong | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Langsa | | 1 | 5 | 6 | 66 | 78 |
| 23 | Subulussalam | | 1 | 5 | 8 | 82 | 96 |
| | Jumlah | 1 | 23 | 290 | 819 | 6497 | 7,629 |

*Sumber : Dinas Syariat Islam, Tahun 2025*

Berdasarkan Tabel 2.82 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah masjid se-Aceh yang melaksanakan shalat Jumat pada tahun 2025 bervariasi di setiap kabupaten/kota, dengan beberapa kategori masjid seperti Mesjid Raya, Mesjid Agung, Mesjid Kecamatan, Mesjid Mukim, dan Mesjid Gampong. Hal ini mencerminkan pentingnya peran masjid dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Aceh, serta menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi dan pembinaan terhadap takmir masjid di seluruh wilayah untuk memastikan fungsinya berjalan dengan baik.

### A4. Penyelenggaraan Kehidupan Adat

Untuk mempertahankan adat istiadat dilakukan berbagai kegiatan diantaranya melalui sosialisasi dan pelatihan. Dari tahun 2019-2023 Sekretariat Majelis Adat Aceh telah melakukan pembinaan kepada tokoh-tokoh adat di kabupaten/kota sebanyak 845 orang. Dengan dilaksanakannya sosialisasi dan pelatihan pembinaan adat istiadat di beberapa kabupaten/kota diharapkan penyelenggaran kehidupan adat istiadat di masyarakat terus membaik. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020-2023 disajikan pada Tabel 2.83.

Tabel 2.83.
Kegiatan dan Peserta Pembinaan Adat Istiadat dari Tahun 2020-2023

| No | Nama Kegiatan | Satuan | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja dan Meunasib | orang | 30 | 0 | 30 | 50 |
| 2 | Sosialisasi Adat Istiadat | orang | 0 | 60 | 268 | 0 |
| 3 | Pemasyarakatan Adat Do Da Idi | orang | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 4 | Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan | orang | 46 | 0 | 46 | 0 |
| Total | | 845 | 255 | 106 | 60 | 374 |

*Sumber : Sekretariat MAA, 2024*

Selain melaksanakan pembinaan adat istiadat, dilakukan juga pembinaan dan pengembangan hukum adat yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat secara adat seperti perselisihan dalam rumah tangga, perselisihan antar warga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, khalwat mesum, pencurian ringan dan lain sebagainya. Pada tahun 2022 telah diselesaikan beberapa sengketa secara adat sebanyak 509 perkara dan tahun 2023 menurun menjadi 250 perkara yang tersebar di semua kabupaten/kota. Terdapat beberapa permasalahan dimasyarakat yang belum dapat diselesaikan secara adat dikarenakan mengandung unsur tindak pidana.

## A5. Penyelenggaraan Pendidikan Dayah

Pendidikan Islami bertujuan memadukan dan menyempurnakan iman dan amal saleh untuk tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Pendidikan Islami bukan semata-mata menekankan pada pengembangan aspek jasmaniah, akal dan moral, tetapi juga menekankan pentingnya ubudiyah dan amal saleh, yang semuanya berkembang secara seimbang.

Upaya meningkatkan pendidikan Islami di Aceh melalui dayah sudah melembaga dan membudaya, sehingga meskipun dewasa ini di Aceh memiliki lembaga pendidikan baru, namun masyarakat Aceh tetap menjaga keberadaan lembaga pendidikan dayah. Tujuan pendidikan dayah adalah untuk menjaga kebutuhan masyarakat dalam bidang studi keagamaan dan dalam upaya untuk mengendalikan gejala-gejala negatif yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Lembaga pendidikan dayah dalam masyarakat merupakan sebuah cita-cita, karena dayah berperan sebagai media kontrol dalam lingkungan masyarakat. Perkembangan dayah di Aceh dari tahun ke tahun terus meningkat dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pendidikan agama islam yang ditujukan sesuai dengan Tabel 2.84.

Tabel 2.84.
Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Tahun 2019 – 2024

| Tahun | Jumlah Tipe Dayah | | | | | | Jumlah Dayah Tipe & Non Tipe Tipe B | Jumlah Guru Dayah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tipe A+ | Tipe A | Tipe B | Tipe C | Tipe D | Non Tipe | | |
| 2019 | 23 | 94 | 168 | 338 | - | 513 | 1.136 | 22.951 |
| 2020 | 23 | 94 | 168 | 338 | - | 513 | 1.136 | 22.951 |
| 2021 | 23 | 94 | 168 | 338 | - | 513 | 1.136 | 22.951 |
| 2022 | 23 | 110 | 230 | 499 | - | 626 | 1.488 | 23.551 |
| 2023 | 29 | 151 | 361 | 547 | - | 569 | 1.657 | 24.710 |
| 2024 | 29 | 158 | 362 | 554 | - | 582 | 1.685 | 24.710 |

*Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Aceh, 2025 (Diolah)*

Berdasarkan Tabel 2.84 diatas terlihat bahwa jumlah dayah tipe maupun non tipe terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2018 setelah melalui proses verifikasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh, Pemerintah Aceh telah menetapkan 27 (dua puluh tujuh) dayah dengan kategori tipe A+ dan jumlah ini sedikit mengalami penurunan pada tahun 2019, menjadi 23 (dua puluh tiga) dayah atau berkurang sebanyak 4 (empat) dayah. Kondisi ini salah satunya disebabkan karena pada saat dilakukan verifikasi ulang ada beberapa kriteria yang ditetapkan sebagai dasar dalam penetapan dayah tipe mengalami penurunan yang salah satunya adalah penurunan jumlah santri dan guru yang belajar dan mengajar pada dayah.

Mulai dari tahun 2019, tidak lagi terdapat dayah dengan kriteria Tipe D, karena sesuai Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah, bahwa Pemerintah Aceh menyelenggarakan Pendidikan Dayah Tipe A+, Tipe A, Tipe B, Tipe C dan Non Tipe. Pada tahun 2020, jumlah dayah yang terdata dalam database dayah Aceh masih belum adanya peningkatan, dikarenakan Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah

Aceh belum melakukan pendataan ulang/akreditasi terhadap dayah-dayah yang ada di Aceh. Kondisi ini salah satunya disebabkan karena berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Akreditasi Dayah Aceh bahwa pelaksanaan akreditasi dayah dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Dayah (BADA). Pada tahun 2020, Pemerintah Aceh telah melakukan inisiasi terhadap pembentukan BADA yang akan melaksanakan fungsi akreditasi dayah di Aceh. Dengan terbentuknya BADA, pada tahun 2021 akan dilakukannya pendataan ulang terhadap dayah-dayah di Aceh untuk dapat dilakukan proses Akreditasi. Dayah-dayah yang telah terakreditasi akan ditetapkan dalam database dayah Aceh untuk kemudian dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pengembangan dayah di Aceh.

Pada Tahun 2022 jumlah dayah mengalami peningkatan yaitu sebanyak 1.488 dayah. Hal ini diputuskan setalah dilaksanakannya kegiatan akreditasi dayah Aceh oleh Tim Badan Akreditasi Dayah. Pada Tahun 2023 jumlah dayah yang terakreditasi terus mengalami peningkatan yaitu 1685 dayah. ada penambahan jumlah dayah yang terakreditasi sekitar 197 dayah (dayah baru yang masuk dalam database), ada sejumlah dayah yang mengalami kenaikan tipe setelah dilakukan Re-akreditasi oleh Tim BADA pada Tahun 2023 artinya terjadi peningkatan terhadap sejumlah dayah setelah dilihat dan divalidasi kembali oleh Tim BADA dengan melihat kesesuaian antara dokumen-dokumen yang diajukan oleh dayah yang bersangkutan dengan kondisi riil di lapangan, sehingga sejumlah dayah tersebut layak untuk dinaikkan tipologinya. Sedangkan pada Tahun 2024 tidak dilakukan akreditasi berhubung, Tim Majelis Akreditasi Dayah Aceh (MADA) berakhir kepegurusan di bulan Januari 2024, dan dilakukan kembali seleksi perekrutan Tim MADA di pertengahan Tahun 2024.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian dayah di Aceh, Pemerintah Aceh terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dayah melalui pelaksanaan akreditasi dayah yang akan terus dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, sehingga standar pendidikan dayah dapat disetarakan dengan pendidikan formal. Selain itu, untuk memaksimalkan pelaksanaan pendidikan di dayah, Pemerintah Aceh terus melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan keilmuan dari guru-guru dayah serta pendataan secara berkala terhadap guru dayah yang tersedia, agar rasio antara santri dan guru dayah pada masing-masing bidang keilmuan yang dibutuhkan dapat terpenuhi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari dayah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Aceh.

### A6. Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah

Peran dan fungsi ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) banyak berpengaruh dalam menetapkan fatwa dalam taushiyah untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Aceh dan Masyarakat. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) telah mengeluarkan fatwa dan taushiyah serta menetapkan kehalalan suatu produk baik berupa pangan, obat-obatan dan kosmetika melalui penerbitan sertifikat halal. Disamping itu, MPU juga melaksanakan Pendidikan Kader

Ulama (PKU) untuk melahirkan para ulama yang mempunyai kompetensi dalam artian mempunyai wawasan ke-islaman yang luas dan tersebar di seluruh wilayah Aceh.

Tabel 2.85.
Peran Ulama dalam Pembangunan/Fatwa Ulama Tahun 2019 – 2024

| Uraian | | Satuan | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Fatwa dan Taushiah yang ditetapkan | Dokumen | 7 | 13 | 12 | 12 | 20 | 20 |
| 2 | Jumlah kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya | Orang | 72 | 0 | 24 | 48 | 48 | 24 |
| 3 | Jumlah sertifikat produk halal yang diterbitkan | Sertifikat | 184 | 150 | 213 | 148 | 220 | 192 |

*Sumber : Sekrt. MPU Aceh, Tahun 2025*

Berdasarkan data Tabel 2.85 dapat diketahui indikator kinerja sekretariat MPU mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2024. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah fatwa dan taushiyah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dari tahun 2020 sebanyak 13 dokumen berturut-turut mengalami penambahan pada tahun 2023 dan 2024 menjadi 20 dokumen. Peningkatan ini dipengaruhi oleh banyak permintaan penetapan fatwa dan taushiyah oleh lembaga pemerintah maupun lembaga lainnya serta melihat fenomena kekinian terhadap. Jumlah sertifikat Produk halal yang telah diterbitkan terus meningkat dari tahun 2020-2024 dari 150 menjadi 220 sertifikat pada tahun 2023 dan 192 sertifikat pada tahun 2024. Upaya pemerintah untuk terus mendorong pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal melalui sosialisasi, kebijakan pemerintah agar menggunakan produk UMKM lokal yang bersertifikasi halal serta melakukan pengawasan terhadap produk-produk baik makanan, obat-obatan dan kosmetik yang beredar di Aceh.

### A7. Perdamaian

Kemiskinan dan rendahnya kesejahteraan merupakan isu yang sangat penting pascakonflik di Aceh. Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat, Pemerintah melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dan institusi terkait dalam melaksanakan penguatan perdamaian Aceh yang meliputi pengarusutamaan perdamaian dalam pembangunan Aceh yang berkelanjutan, pelaksanaan pembangunan atau perbaikan ekonomi dan sosial budaya serta memediasi lahan pertanian dan lapangan pekerjaan bagi mantan pasukan Gerakan Aceh Merdeka, tahanan politik yang memperoleh amnesti, dan masyarakat yang terkena dampak konflik. Berbagai program di bidang ekonomi akan diarahkan pada pembangunan ekonomi produktif masyarakat dan nilai tambah produk unggulan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, rendahnya pendapatan per kapita dan pengangguran. Program pengembangan ekonomi dilaksanakan

berdasarkan kebutuhan kelompok sasaran BRA yang mengarah pada kegiatan produktif sesuai dengan prinsip ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic development*), sehingga setiap program ekonomi lebih efektif mencapai tujuan yang diharapkan.

Keberlangsungan penguatan perdamaian pascakonflik perlu dilakukan secara optimal melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial sehingga menciptakan perdamaian secara berkelanjutan (*sustainable peace*). Dari 62.069 orang target sasaran program Reintegrasi Aceh, terdapat 4.535 orang atau 7,31 persen yang telah mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan terbantu dalam rehabilitasi dan perlindungan sosial. Dengan demikian, masih terdapat 55.202 orang yang perlu diintervensi Pemerintah, dimana sebanyak 24.114 orang yang akan menjadi target sasaran dalam kurun waktu tahun 2025 s.d. 2029. Hal Ini, menjadi capaian kinerja pemerintah Aceh dalam melaksanakan isi MoU Helsinki, yang berbunyi: "Pemerintah Indonesia dan GAM sepakat untuk memberikan bantuan kepada korban konflik, termasuk bantuan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Adapun realisasi pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi sosial masyarakat dan Korban Konflik Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.86.

Tabel 2.86.
Realisasi Pemberdayaan Ekonomi dan Rehabilitasi Sosial Masyarakat dan Korban Konflik Aceh Tahun 2019 s.d. 2024 (Orang)

| No. | Kegiatan | Tahun | | | | | | Jmlh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Korban Konflik | 737 | - | 418 | 2.200 | - | - | 3.355 |
| 2. | Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Masyarakat Korban Konflik | 195 | - | 247 | 283 | 455 | - | 1.180 |
| | Jumlah | 932 | - | 665 | 2.483 | 455 | - | 4.535 |

*Sumber : Badan Reintegrasi Aceh, 2025*

Selanjutnya berdasarkan data Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Tahun 2023 bahwa korban konflik juga terinci berdasarkan korban pelanggaran HAM masa lalu di 17 Kabupaten Kota. Secara keseluruhan sebanyak 8.029 orang telah menjadi korban tindak kejahatan hak asasi manusia utama. Para korban ini terdiri dari 848 orang perempuan dan 7.181 orang laki-laki, dengan rincian: 1). 1776 orang laki-laki dan 144 perempuan menjadi korban kejahatan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, 2).1085 laki-laki dan 38 perempuan menjadi pembunuhan tidak sah dan bertentangan dengan hukum, 3).3021 laki- laki dan 327 perempuan menjadi korban tindak penyiksaan, 4). 87 laki-laki dan 78 perempuan menjadi korban kejahatan kekerasan seksual dan perkosaan, 5). 359 laki-laki dan 10 perempuan menjadi korban penghilangan paksa, 6). 863 laki-laki dan 251 perempuan menjadi korban perusakan dan perampasan harta benda (*sumber: Buku Peulara Damee*). Kondisi ini membutuhkan program dan intervensi berbeda, baik dari segi pemulihan maupun dukungannya lainnya, serta perbedaan pendekatan bagi laki-laki dan perempuan.

## B. Kebudayaan

Aceh memiliki berbagai warisan budaya yang berharga, baik berupa warisan budaya benda atau Cagar Budaya maupun Warisan Budaya Tak Benda Budaya (WBTB). Nilai-nilai budaya ini telah diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai dan karakteristik suku dan bahasa, karakteristik sosial budaya masyarakat Aceh, sangat dipengaruhi oleh keragaman suku/anak suku dan bahasa di Aceh. Yang terdiri dari suku dan bahasa Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Aneuk Jamee, Kluet, Singkil, dan Simeulue.

Daerah Aceh yang terletak di bagian paling barat gugusan kepulauan nusantara, memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara. Pada abad ke-7 para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Budha. Namun peran Aceh kemudian baru menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah ini, yang diperkenalkan oleh pedagang Gujarat dari jajaran Arab menjelang abad ke-9. Jejak sejarah dan peradaban inilah yang kemudian mewariskan tradisi, seni dan budaya yang masih ada hingga saat ini dan perlu dijaga kelestariannya untuk generasi yang akan datang. Pelestarian kebudayaan berupa warisan budaya benda dan tak benda, baik berupa cagar budaya maupun objek pemajuan kebudayaan Aceh memerlukan perhatian dan penanganan khusus, sehingga dokumen lain seperti Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dapat menjadi rujukan dalam penanganan pelestarian kebudayaan.

### B1. Seni dan Budaya

Memajukan kebudayaan Aceh merupakan salah satu tujuan utama rencana pembangunan Aceh, kebudayaan Aceh yang perlu dilestarikan dan dikembangkan adalah kebudayaan yang memiliki keunikan, ciri khas dan kebudayaan yang sudah hampir punah atau sudah jarang diketahui masyarakat luas. Selain itu, diversifikasi kebudayaan juga menjadi penting karena memiliki nilai jual kebudayaan dan juga bertujuan untuk menggiatkan pelaku budaya dalam berkreasi. Warisan budaya yang telah ditetapkan di dalam undang-undang disebut dengan cagar budaya. Warisannya ada yang berupa benda, bangunan, situs, dan kawasan cagar budaya yang diwarisi dan menjadi sejarah masa lalu (cultural heritage). Warisan budaya itu merupakan peninggalan masa pra sejarah, klasik, Islam, kolonial, serta peninggalan bencana gempa dan tsunami. Semua warisan peninggalan masa lalu tersebut terdiri dari budaya benda (tangible) seperti situs Mendale, Bukit Kerang, naskah/benda kuno, makam kuno, Masjid Raya, Baiturrahman, Kerkhof Peutjoet, kapal apung dan cagar budaya lainnya yang keseluruhannya berjumlah 1.138 cagar budaya yang tersebar di seluruh Provinsi Aceh.

Seluruh warisan peninggalan tersebut memiliki keunikan dan kebesaran budaya serta mengandung nilai sejarah Aceh masa lalu. Nilai yang terkandung dalam warisan budaya itu dapat dijadikan sebagai media edukasi, penelitian dan daya tarik wisata, khususnya wisata budaya (culture tourism). Namun, peninggalan warisan budaya itu belum sepenuhnya dilestarikan dan dimanfaatkan sebagaimana pesan yang terdapat di dalam Undang-Undang RI tentang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Registrasi cagar

budaya mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan registrasi dunia oleh UNESCO merupakan hal yang paling penting dilakukan. Berdasarkan jenis cagar budaya yang tersebut di atas, 9 (sembilan) bangunan cagar budaya telah memiliki pengakuan sebagai situs budaya melalui Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Registrasi Nasional). Untuk pemeliharaannya, terdapat 91 (sembilan puluh satu) situs/bangunan cagar budaya telah memiliki juru pelihara, sehingga ke depan perlu ditingkatkan jumlah dan kualitas perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan berbagai situs cagar budaya yang ada di Aceh.

Selain itu, Aceh juga memiliki kekayaan budaya tak benda (intangible) yang menarik lainnya, seperti tarian, adat istiadat dan kegiatan spiritual. Keunikan lainnya adalah keberagaman suku/etnis yang terdiri dari 8 (delapan) etnis/suku yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jame, Gayo, Kluet, Tamiang, Singkil, Simelue dan 13 (tiga belas) jenis bahasa daerah yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet, Tamiang, Julu, Haloban, Pakpak, Nias, Lekon, Sigulai, Devayan. Keberagaman suku/etnis tersebut melahirkan seni yang beragam juga sehingga muncul seni tari dari masing-masing suku/etnis yang memiliki kekhasan masing-masing. Tarian yang ada di Aceh misalnya rapai, rapai debus, rapai geleng, likok pulo, meuseukat, seureune kalee, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, didong, rebana dan qasidah gambus, sastra, pantun, syair, hikayat, seumapa, seni lukis (kaligrafi), dalail khairat, meurukon, adat perkawinan, peutreun aneuk, sunatan, kenduri maulid, rabu habeh, kegiatan semeulung dan semeunap pada makam Raja Meureuhom Daya di Lamno dan lain-lain. Keseluruhan tarian yang terdata di Aceh berjumlah 221 tarian. Kekayaan budaya yang dimiliki Aceh menjadi daya tarik dunia, dan keunikannya telah diakui dengan ditetapkannya Tari Saman sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda oleh UNESCO sejak tahun 2011.

Jenis tari-tarian tersebut juga terus dilakukan pelestarian, pengembangan dan promosi oleh pemerintah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau budayawan/seniman sanggar-sanggar kesenian yang tersebar di seluruh Aceh yang jumlahnya telah mencapai kurang lebih 1.280 sanggar kesenian. Sanggar-sanggar kesenian diupayakan mendapatkan pembinaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.87.

Tabel 2.87.
Perkembangan Kelompok Sanggar Seni di Provinsi Aceh, 2020-2024

| No | Keterangan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Group Kesenian | 1.279 | 1.236 | 1.266 | 1.254 | 1.280 |

*Sumber : Dinas Kabudayaan dan Pariwisata Aceh, 2024 (diolah)*

Berdasarkan tabel diatas, jumlah kelompok kesenian atau sanggar seni di Aceh mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 1.279 kelompok kesenian yang aktif. Namun, jumlah ini mengalami penurunan

cukup signifikan pada tahun dibanding tahun 2019. Penurunan tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas sosial dan budaya, termasuk kegiatan seni dan pertunjukan. Tren penurunan berlanjut hingga tahun 2021, dengan jumlah kelompok kesenian tercatat sebanyak 1.236. Meski begitu, pada tahun 2022, terjadi sedikit peningkatan menjadi 1.266 kelompok, yang menandakan mulai pulihnya kegiatan seni di tengah masyarakat.

Namun, pada tahun 2023, jumlah kelompok kesenian kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 1.254. Meskipun penurunannya tidak terlalu signifikan, hal ini mengindikasikan bahwa pemulihan sektor seni dan budaya masih memerlukan dukungan yang lebih intensif, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Sedangkan pada tahun 2024, jumlah kelompok seni meningkat menjadi 1.280 kelompok. Selain itu Aceh juga memiliki Gedung kesenian yang diperuntukkan untuk mewadahi aktifitas seni yang memiliki fasilitas seperti auditorium untuk melakukan pertunjukan dan galeri untuk menyelenggarakan pameran. Saat ini baru 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang memiliki gedung kesenian, yaitu; Sabang, Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Tenggara, Simeulue dan Aceh Singkil.

Ketersediaan gedung kesenian di Aceh masih sangat minim, demikian juga dari sisi pemerataan juga belum merata di seluruh Kabupaten/Kota. Untuk itu Pemerintah Aceh mendorong Kabupaten/Kota untuk memperioritaskan program/kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan revitalisasi gedung kesenian diseluruh Kabupaten/Kota secara bertahap. Pemerintah Aceh juga telah menyusun dokumen Pokok-Pokok Pikiran Daerah (PPKD) Aceh tahun 2019 lalu, dokumen ini dapat menjadi rujukan dan acuan dalam pemajuan kebudayaan Aceh

### B2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Pengembangan cagar budaya merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya. Bentuk kegiatannya berupa konservasi, penerbitan buku, dokumentasi digital, workshop, penataan, dan lain sebagainya. Aceh memiliki sejumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang terdiri dari: naskah kuno, koin emas, peralatan emas, makam, mesjid, tugu, rumah tradisional, monumen, benteng, perpustakaan, bangunan/gedung, tempat bersejarah, arca, gua, dan lain-lain yang belum dilestarikan. Sampai dengan tahun 2024 telah dilakukan pelestarian terhadap berbagai cagar budaya, naskah kuno, keping koin emas peralatan emas dan berbagai benda lainnya. Kegiatan lainnya adalah sosialisasi, digitalisasi naskah kuno, workshop dan pembiayaan juru pelihara situs dan konservasi yang dilakukan di Museum Aceh. Pada akhir tahun 2024 jumlah benda dan situs kawasan cagar budaya mencapai 1.262 buah.

Peninggalan budaya masa prasejarah dapat dibuktikan dengan ditemukannya peninggalan manusia prasejarah di kawasan Gua Kampung Mendale, Takengon. Pada masa periode klasik, Aceh memiliki tiga situs sejarah seperti situs Indrapurwa, Indrapuri, dan Indrapatra. Selanjutnya, pada masa Islam dan kolonial, situs/cagar budaya banyak ditemukan di seluruh Aceh. Gambaran penyebaran situs/cagar budaya di Aceh, secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 2.88.

Tabel 2.88.
Jumlah Situs/Cagar Budaya Di Aceh Tahun 2024

| No. | Kab/Kota | Makam | Masjid | Tugu | Rumah Tradisional | Monumen | Benteng | Perpustakaan | Bangunan/Gedung | Struktur | Tempat Bersejarah | Arca | Gua | Prasejarah | Benda | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aceh Selatan | 26 | 1 | 5 | 2 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 51 |
| 2. | Aceh Tenggara | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 3. | Aceh Timur | 35 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 39 |
| 4. | Aceh Tengah | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 12 |
| 5. | Aceh Barat | 14 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 25 |
| 6. | Aceh Besar | 227 | 21 | 3 | 6 | - | 31 | 1 | 9 | - | - | - | 14 | - | 10 | 322 |
| 7. | Pidie | 34 | 10 | - | 5 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 53 |
| 8. | Aceh Utara | 75 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 87 |
| 9. | Simeulue | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 10. | Aceh Singkil | 17 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 28 |
| 11. | Bireuen | 38 | 5 | 3 | - | 1 | - | - | 8 | - | 2 | - | - | - | 6 | 63 |
| 12. | Aceh Barat Daya | 27 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 36 |
| 13. | Gayo Lues | 20 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 26 |
| 14. | Aceh Jaya | 50 | 1 | - | - | 4 | 3 | - | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 8 | 74 |
| 15. | Nagan Raya | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 16. | Aceh Tamiang | 36 | - | 1 | 3 | - | - | - | 10 | - | 2 | - | - | 2 | - | 54 |
| 17. | Bener Meriah | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 18. | Pidie Jaya | 78 | 9 | - | - | 1 | 5 | - | 5 | - | - | - | 3 | - | 16 | 117 |
| 19. | Banda Aceh | 50 | 6 | 6 | 1 | 6 | - | - | 13 | - | 4 | - | - | - | 9 | 95 |
| 20. | Sabang | 3 | 2 | 1 | - | - | 14 | - | 82 | - | 2 | - | - | - | - | 104 |
| 21. | Lhokseumawe | 15 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 25 |
| 22. | Langsa | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 23. | Subulussalam | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 |
| Jumlah | | 768 | 73 | 31 | 26 | 15 | 66 | 1 | 166 | 5 | 15 | 0 | 20 | 4 | 72 | 1.262 |

*Sumber: Dinas Kebudayaan dan pariwisata, Tahun 2025*

Berdasarkan Tabel 2.95, menunjukkan bahwa situs/cagar budaya terbanyak berada di Kabupaten Aceh Besar yaitu sebanyak 322 situs, Pidie Jaya sebanyak 117 situs dan Kota Sabang sebanyak 104 Situs. Sedangkan situs/cagar budaya paling sedikit terdapat di Kabupaten Simeulue yaitu sebanyak 3 situs. Dari jumlah situs/cagar budaya yang diuraikan di atas, terdapat 33 buah situs/cagar budaya yang telah memiliki SK Menteri atau Register Nasional diantaranya : Komplek Makam Kandang Meuh, Komplek Taman Sari Gunongan, Benteng Indrapatra, Benteng dan Masjid Indrapuri, Pendopo Gubernur, Gedung Bapperis, Gedung Menara (Sentral Telepon Militer Belanda) dan Gedung Bank Indonesia, Komplek Makam Poteu Meureuhom Daya, dan lain-lain seterusnya.

Kondisi situs/cagar budaya di beberapa daerah ada yang sudah mengalami kerusakan dan yang sangat memprihatinkan khususnya di wilayah yang terkena bencana tsunami seperti Banda Aceh dan Aceh Besar. Cagar Budaya yang mengalami kerusakan antara lain situs Kampung Pande di Kota Banda Aceh, sebelumnya juga nisan-nisan di situs ini belum satupun yang tertata dan masih berserakan di rawa-rawa. Hasil

penelitian Edwar Mc. Canon tahun 2007 memberikan informasi bahwa terdapat tulang-tulang manusia di lokasi Cot Makam Kampung Pande, namun pada saat ini tulang-tulang tersebut sudah tidak ditemukan lagi. Kondisi memprihatinkan juga terlihat pada situs Makam Syiah Kuala, situs Lamreh dan situs Ujung Pancu. Selayaknya dalam rangka pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan, maka situs/cagar budaya perlu mendapat perhatian khusus.

Dari jumlah total 1.262 situs/cagar budaya yang ada di Aceh masih banyak yang belum memiliki juru pelihara. Data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2024 baru 91 (sembilan puluh satu) situs dibiayai oleh Pemerintah. Demikian juga situs/cagar budaya yang termasuk naskah-naskah kuno yang belum teregistrasi perlu dilakukan pengkajian, pencatatan dan penetapan, sehingga pelestarian situs/cagar budaya dapat dilaksanakan sesuai kaidah pelestarian.

Selain memiliki budaya benda berupa situs/cagar budaya, Aceh juga memiliki Budaya Tak Benda (intangible) yang beragam seperti Tarian, Adat-Istiadat, dan kegiatan Spiritual. Berbagai jenis budaya tak benda tersebut tersebar diseluruh kabupaten/kota dengan ciri khas tersendiri, seperi: rapai, rapai debus, rapai geleng, seureune kalee, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, didong, rebana, qasidah gambus, pantun, syair, hikayat, seumapa dan seni lukis (kaligrafi) dalail khairat, meurukon, adat perkawinan, peutreun aneuk, sunatan, kenduri maulid, rabu habeh, kegiatan semeulung dan semeunap pada makam Raja Meureuhom Daya di Lamno. Kekayaan budaya yang dimiliki Aceh menjadi dayatarik dunia, dan keunikannya telah diakui dengan ditetapkannya Tari Saman sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda oleh UNESCO sejak tahun 2011.

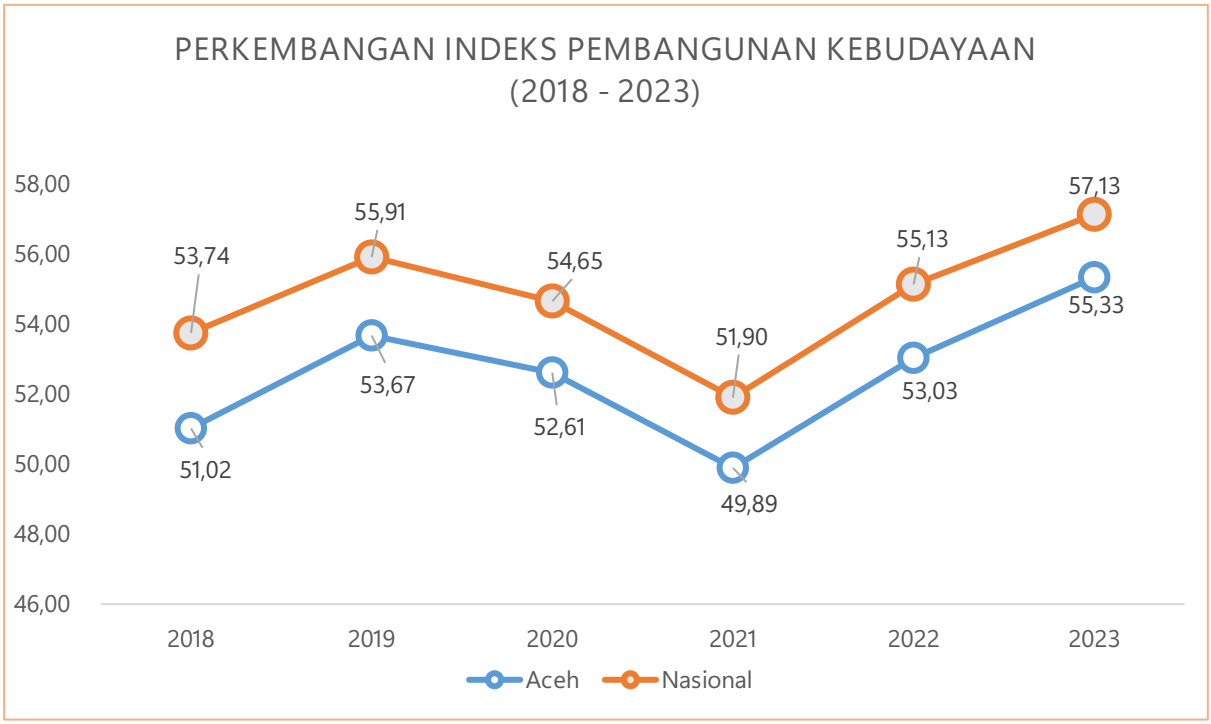
### B3. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan salah satu indikator yang lebih komprehensif yang dapat digunakan untuk mengukur capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Aceh sebagaimana disajikan pada Gambar 2.88 dan kinerja pembangunan kebudayaan yang terdiri dari 7 dimensi, yaitu:

1. Dimensi Ekonomi budaya
2. Dimensi Pendidikan
3. Dimensi Ketahanan Sosial
4. Dimensi Warisan Budaya
5. Dimensi Ekspresi Budaya
6. Dimensi Budaya Literasi
7. Dimensi Gender

Pembangunan kebudayaan Aceh cukup baik, namun dengan potensi yang ada, pembangunan kebudayaan di Aceh dapat dikatakan belum optimal dan masih berada sedikit dibawah rata-rata nasional. Indeks Pembangunan Kebudayaan Aceh mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2019, hal ini juga terjadi secara nasional akibat dari dampak pembatasan pada pandemi covid-19. Seiring dengan pelonggaran pembatasan dan pemulihan ekonomi

nasional dan daerah, indeks pembangunan kebudayaan Aceh kembali meningakat mencapai angka 53,03 pada tahun 2022 dan terus mengalami tren positif pada 2023 menjadi 55,33, sedikit dibawah capaian nasional pada angka 57,13.




*Sumber : Kemendikbud, 2024*
*Kemendikdasmen, 2025 (diolah)*

Gambar 2.88. Perkembangan indeks pembangunan kebudayaan Aceh dan Nasional Tahun 2018-2023 (Data termutakhir)

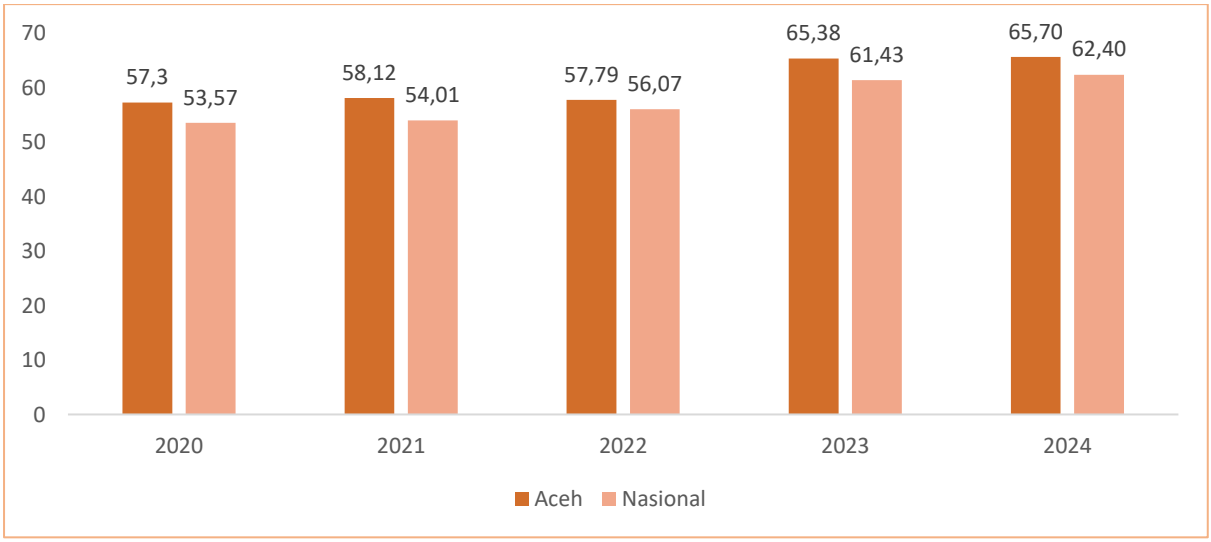
Capaian Pembangunan Kebudayaan Aceh paling tinggi dipengaruhi oleh dimensi pendidikan dengan capaian 80,90, kemudian dimensi budaya literasi, ketahanan sosial budaya, gender, warisan budaya, ekspresi budaya dan terakhir yang paling rendah pada dimensi ekonomi budaya dengan capaian 11,79.

### 2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

#### A. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Perkembangan iBangga Aceh meningkat sangat baik berkat terintegrasinya program lintas sektor dalam mewujudkan keluarga berkualitas, sehingga peran dan fungsi keluarga berjalan baik mendukung capaian indikator dimensi ketenteraman, kebahagiaan dan kemandirian.

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga pada periode 2022 iBangga aceh turun sebesar 0,33 poin dari tahun 2021, kembali meningkat. Ibangga Aceh selama tahun 5 (lima) tahun terakhir lebih baik dibandingkan dengan iBangga Nasional. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, 2020 – 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.89.

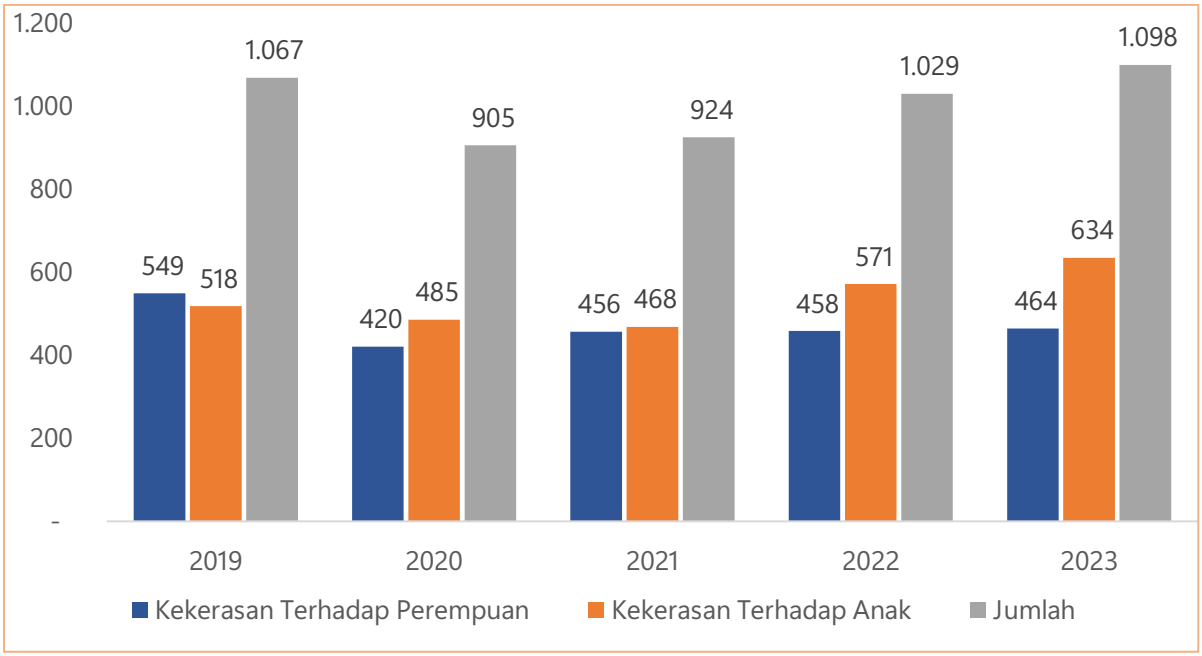



*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025*

Gambar 2.89. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, 2020 – 2024

B. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak menurun pada kondisi tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, namun kembali mengalami kenaikan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 1.098 kasus. Pada tahun 2022 tercatat ada 458 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 571 kasus kekerasan terhadap anak, kemudian di tahun 2023, tercatat kasus meningkat menjadi 464 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 634 kasus kekerasan terhadap anak. Untuk lebih jelasnya perkembangan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.90.

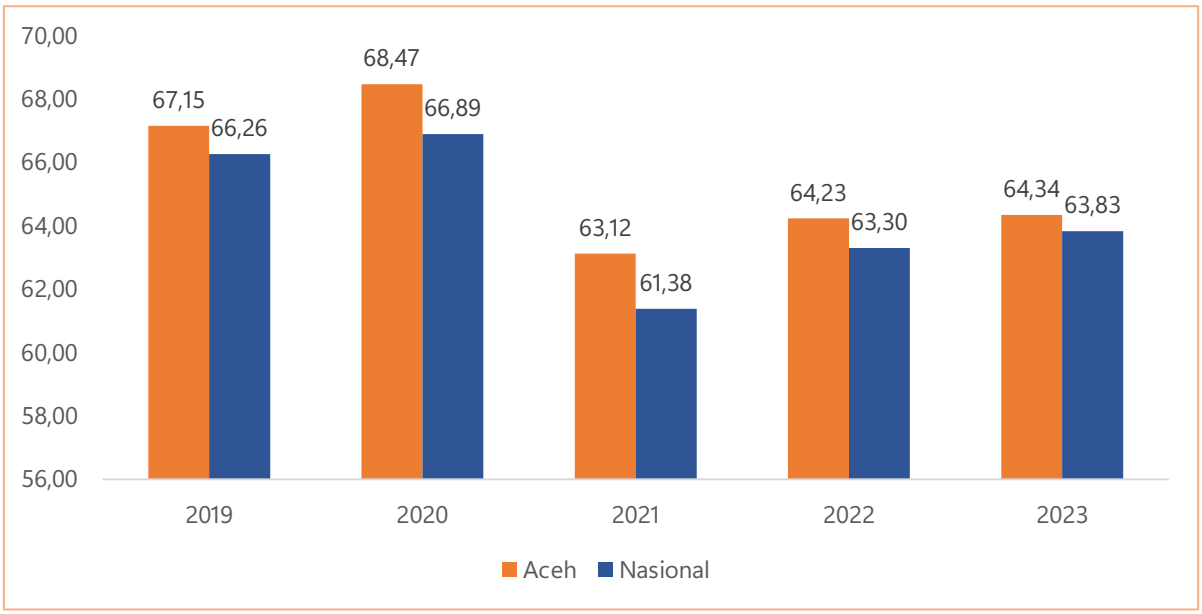



*Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2024*

Gambar 2.90. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Aceh Yang terlapor pada UPTD PPA Tahun 2019 – 2023

C. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) menggambarkan capaian perlindungan anak yang terdiri dari 5 (lima) kluster konvensi hak anak, yaitu 1) Hak Sipil dan Kebebasan; 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; 3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; 4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; dan 5) Perlindungan Khusus. Capaian IPA Aceh mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 68,47 menjadi 63,12 di tahun 2021 dan naik kembali sebesar 64,34 di tahun 2023. Namun demikian IPA Aceh di atas IPA Nasional sebesar 63,83 di tahun 2023, perlu perhatian untuk ditingkatkan pada beberapa indikator IPA Aceh. Sebagaimana yang tersajikan pada Gambar 2.91.



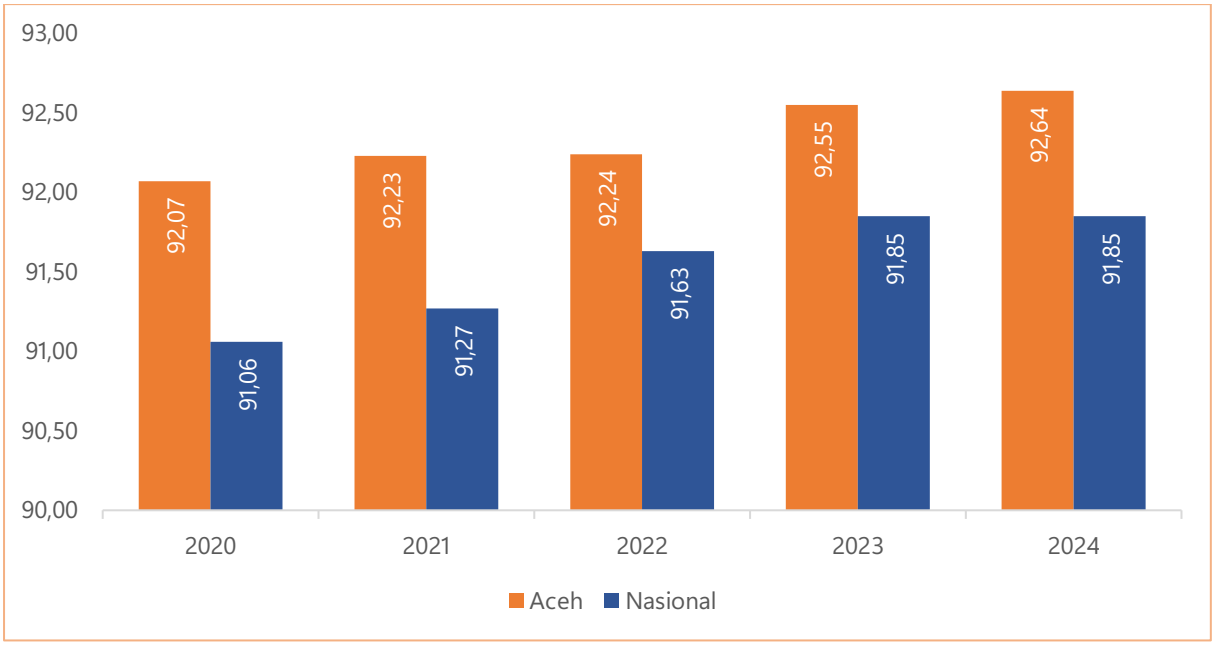

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2025*

Gambar 2.91. Indeks Perlindungan Anak Tahun 2019 – 2023 (data termutakhir)

Upaya yang perlu ditingkatkan penguatan layanan penanganan kekerasan terhadap anak secara terpadu, termasuk perlindungan dan pencegahan perkawinan anak dan pekerjaan terburuk bagi anak, dengan mengoptimalkan pengasuhan berbasis hak anak dan menciptakan lingkungan yang ramah anak serta memberikan perlindungan khusus terhadap anak terutama penyandang disabilitas, kelompok marjinal.

D. Indeks Pembangunan Gender

Selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 Indeks Pembangunan Gender Aceh lebih baik dibandingkan dengan Nasional. Capaian IPG Nasional pada tahun 2024 sebesar 91,85 dan IPG Aceh sebesar 92,64. Capaian IPG Aceh pada tahun 2024 sebesar 92,64 naik 0,09 poin dari tahun 2023 yang capaiannya sebesar 92,55. Namun meskipun berada di atas rata-rata nasional tetapi masih saja percepatan pembangunan untuk perempuan Aceh masih lebih lambat dari laki-laki terutama di sektor ekonomi. Perkembangan dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh Tahun 2020-2024 sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dilihat pada Gambar 2.92.

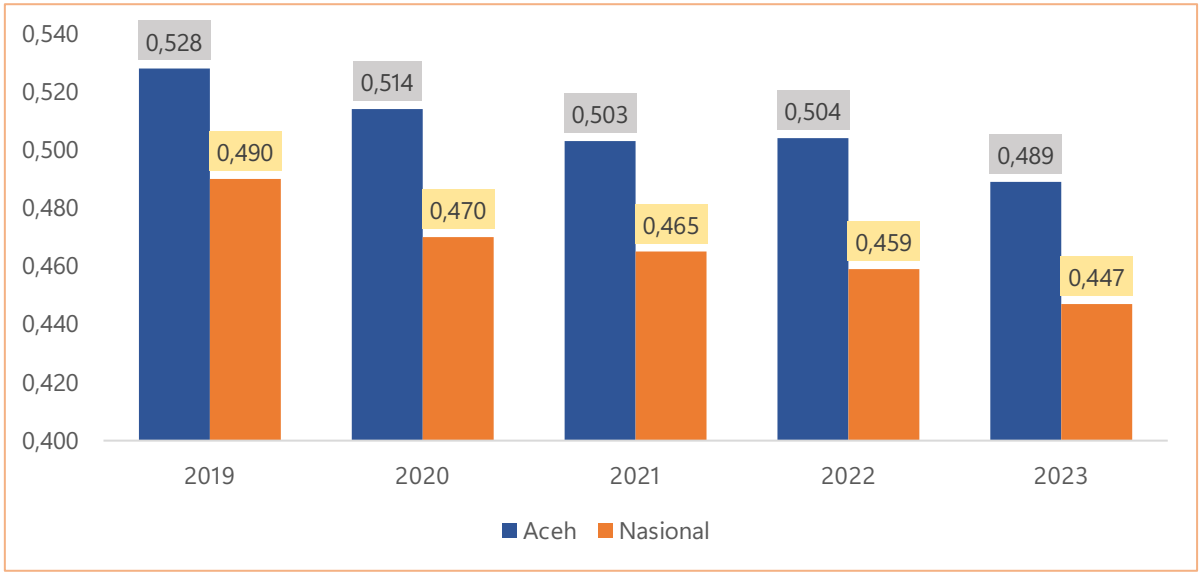



*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025*

Gambar 2.92. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh Tahun 2020 – 2024

## E. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator pendukung pembangunan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada isu gender. Komponen IKG Aceh semakin mengecil menandakan kesetaraan gender mulai membaik didukung peningkatan TPAK dan Pendidikan, terdapat 8 kab/kota angka IKG di atas 0,500 IKG Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Utara sebesar 0,789.




*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024*

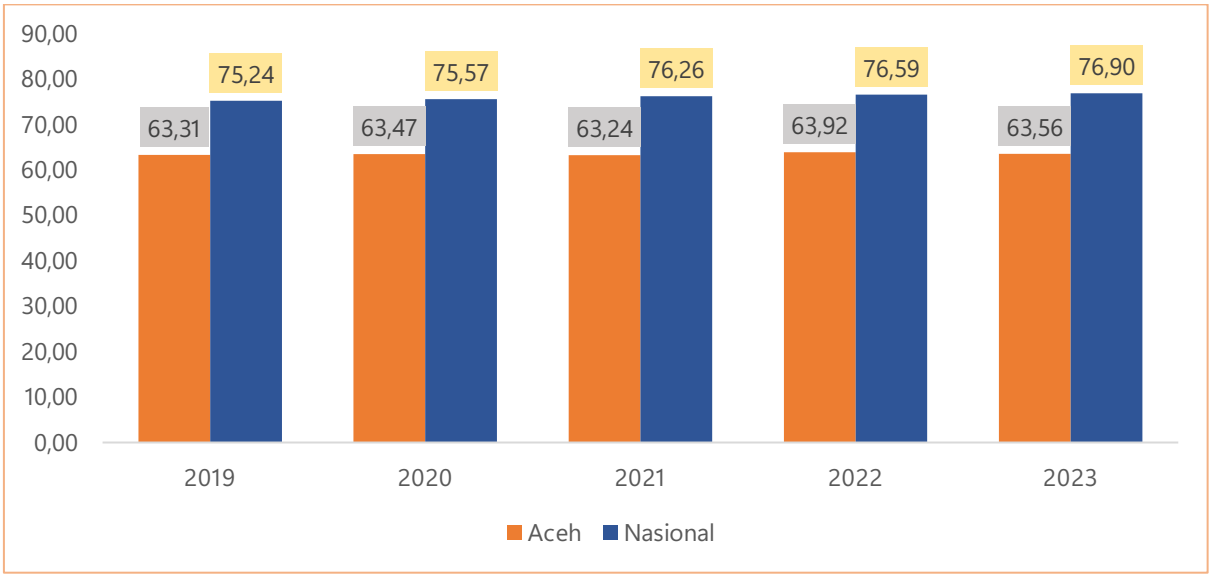
Gambar 2.93. Indeks Ketimpangan Gender Aceh, 2019 – 2023

Gambar diatas menunjukkan bahwa antara tahun 2019 dan 2023, IKG Aceh mengalami penurunan, yang berarti ketimpangan gender semakin mengecil, dan kesetaraan gender semakin membaik. Perbandingan dengan nilai IKG Nasional pada

tahun yang sama menunjukkan bahwa meskipun terjadi perbaikan, IKG di Aceh masih sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional

F. Indeks Pemberdayaan Gender

Berdasarkan trend, setiap angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh mengalami penurunan dan peningkatan seperti pada Gambar 2.94




*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024*

Gambar 2.94. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh Tahun 2019 – 2023 (data termutakhir)

Capaian IDG nasional pada tahun 2022 mengalami kenaikan 0,33 poin dari tahun 2021 yaitu sebesar 76,59, sedangkan capaian tahun sebelumnya sebesar 76,26 dan di tahun 2023 meningkat 0,31 poin menjadi 76,90. Provinsi Aceh juga mengalami peningkatan sebesar 0,68 poin, yaitu dari capaian 63,24 tahun 2021 menjadi 63,92 pada tahun 2022 dan di tahun 2023 mengalami penurunan 0,36 poin menjadi 63,56.

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial, ekonomi dan kependudukan. Karena disamping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk (migrasi).

Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Aceh selama periode 2019-2023 terus menunjukkan fluktuasi, yaitu dari 1,93 pada tahun 2019 menjadi 1,54 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Aceh masih terkendali. Total Fertility Rate (TFR) Aceh selama periode 2019-2021 mengalami peningkatan, tahun 2019 TFR Aceh sebesar 2,63 persen meningkat menjadi 2,68 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2023 TFR Aceh mengalami penurunan menjadi 2,32 persen. Cakupan peserta KB Aktif tahun 2019 sebanyak 404.527 orang, pada tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi peningkatan. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 407.537 orang.

Tetapi pada tahun 2023 cakupan peserta KB Aktif kembali mengalami peningkatan menjadi 525.096 orang. seperti yang tersaji dalam Tabel 2.89.

Tabel 2.89.
Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Aceh Tahun 2019 – 2024

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Laju Pertumbuhan Penduduk | Persen | 1,93 | 1,56 | 1,10 | 1,37 | 1,54 |
| Total Fertility Rate (TFR) | Rata-rata anak per wanita | 2,63 | 2,68 | 2,68 | 2,42 | 2,32 |
| Cakupan Peserta KB Aktif | Orang | 404.527 | 519.709 | 557.901 | 407.537 | 525.096 |

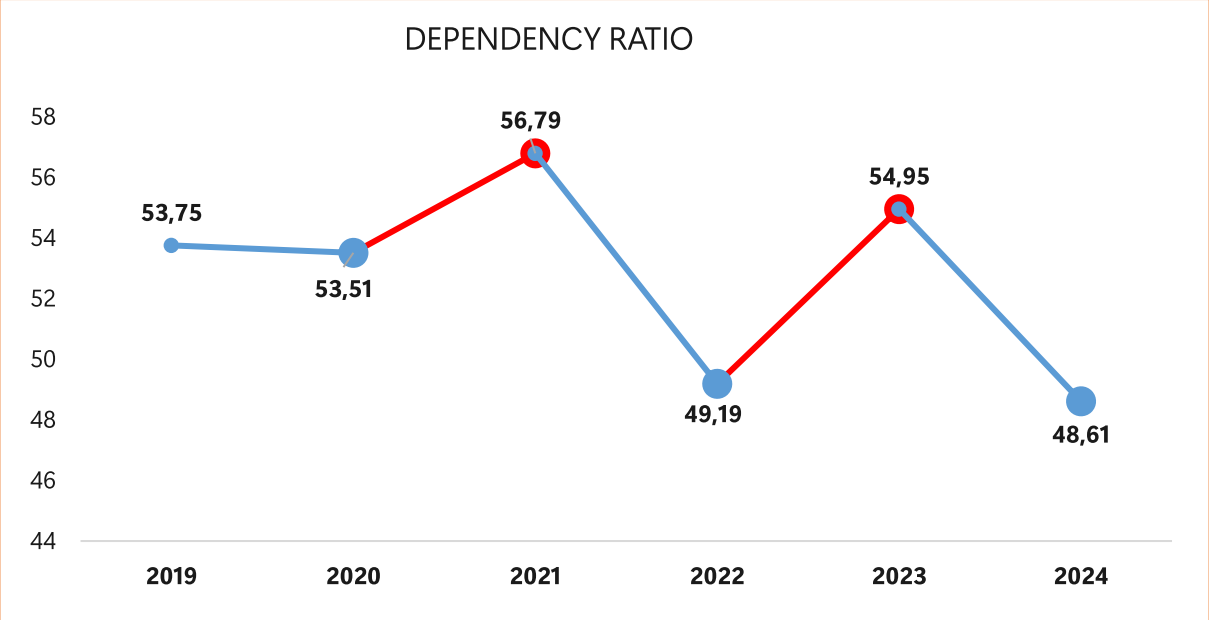
*Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2024*

## 2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

### 2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

#### A. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).




*Sumber :Badan Pusat StatistikProvinsi Aceh, 2025 (diolah)*

Gambar 2.95. Perkembangan Tingkat Ketergantungan Aceh, 2019-2024

Perkembangan tingkat ketergantungan masyarakat Aceh dari tahun 2019 hingga 2024 terdapat pada Gambar 2.95. Pada tahun 2020 angka rasio ketergantungan hidup di Aceh mencapai 53,51 persen menurun dibanding tahun sebelumnya sebesar 53,75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 54-55 penduduk usia tidak produktif. Kecenderungan rasio ketergantungan

di Aceh adalah menurun dimana diprediksikan pada tahun 2025 angka rasio ketergantungan Aceh adalah sebesar 50,8. Rasio ketergantungan ini dapat mengukur dampak keberhasilan pembangunan kependudukan dengan melihat perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur ≥ 65 tahun). Semakin kecil angka rasio ketergantungan hidup akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan produktifitasnya.

B. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Dari Tabel 2.90 dibawah, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Aceh bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu mencapai 38,70 persen dari total penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Sektor lain yang juga banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan besar, Reparasi & Perawatan Mobil & Sepeda Motor (14,65 persen) dan sektor industri pengolahan (7,19 persen). Sektor pekerjaan yang digeluti oleh tenaga kerja Aceh sedikit banyak tidak lepas dari tingkat pendidikan yang mereka tamatkan. Maka wajarlah jika sektor yang digeluti oleh tenaga kerja Aceh lebih didominasi oleh sektor yang berproduktifitas rendah seperti pertanian, walaupun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah yang bekerja di sektor pertanian menurun, kemungkinan dikarenakan adanya peralihan ke sektor industri dan perdagangan yang meningkat sejalan dengan membaiknya pandemi Covid-19.

Meski demikian banyak juga pekerja yang berpendidikan SMA. Diperkirakan mereka inilah yang menggeluti sektor industri dan sektor perdagangan. Sektor lain yang cukup banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa (keuangan dan asuransi, perusahaan, pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial, lainya) sektor ini menyerap tenaga kerja mencapai 15,4 persen. Sedangkan sektor lainnya (pertambangan dan penggalian; konstruksi; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib) menyerap sekitar 22,84 persen Cukup tingginya sektor jasa yang digeluti oleh pekerja Aceh diperkirakan berasal dari pekerjaan jasa yang berproduktifitas rendah, seperti tukang parkir, agen penjualan dan sebagainya, serta bukan sektor jasa yang dilakukan oleh profesional seperti dokter, peneliti, akuntan dan sejenisnya. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya pekerja di Aceh yang berpendidikan Diploma/Universitas.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 38,68 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 14,65 persen; dan Konstruksi sebesar 7,30 persen.

Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini berbeda dengan bulan Agustus 2022. Dibandingkan dengan Agustus 2022, lapangan pekerjaan yang mengalami

penurunan adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar minus 1,82 persen poin), sektor jasa lainnya (minus 0,48 persen poin); dan sektor Pendidikan (minus 0,26 Persen Poin). Sedangkan sektor yang mengalami peningkatan dalam menyerap tenaga kerja terbesar terjadi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran (1,28 persen poin).

Tabel 2.90.
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2019-Agustus 2024

| Lapangan Pekerjaan | Ketenegakerjaan Agustus (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan | 39.29 | 36.71 | 36.16 | 40.50 | 38.65 | 38.70 |
| B. Pertambangan & Penggalian | 0.80 | 0.70 | 0.58 | 0.90 | 0.56 | 1.00 |
| C. Industri Pengolahan | 8.20 | 8.21 | 8.36 | 7.32 | 7.15 | 7.19 |
| D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas & Udara Dingin | 0.28 | 0.22 | 0.29 | 0.24 | 0.20 | 0.20 |
| E. Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment & Pemulihan | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.22 |
| F. Konstruksi | 7.57 | 6.46 | 5.96 | 6.63 | 7.30 | 7.30 |
| G. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi & Perawatan Mobil & Sepeda Motor | 14.18 | 15.17 | 16.24 | 13.37 | 14.25 | 14.65 |
| H. Pengangkutan & Pergudangan | 3.71 | 3.38 | 3.47 | 3.14 | 3.45 | 3.45 |
| I. Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum | 4.52 | 7.42 | 5.18 | 4.94 | 5.58 | 5.58 |
| J. Informasi & Komunikasi | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.39 | 0.56 | 0.38 |
| K. Aktivitas Keuangan & Asuransi | 0.76 | 0.63 | 0.48 | 0.45 | 0.51 | 0.51 |
| L. Real Estat | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| M,N. Jasa Profesional & Perusahaan | 0.64 | 0.75 | 0.80 | 1.12 | 1.01 | 1.01 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib | 6.69 | 7.48 | 7.65 | 6.64 | 6.54 | 6.54 |
| P. Pendidikan | 6.75 | 7.51 | 7.76 | 7.38 | 7.12 | 7.12 |
| Q. Aktivitas Kesehatan Manusia & Aktivitas Sosial | 2.72 | 2.91 | 2.88 | 2.77 | 2.58 | 2.58 |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya | 3.48 | 3.35 | 3.48 | 4.03 | 3.56 | 3.56 |
| Total Penduduk 15+ Bekerja (ribu jiwa) | 2,219.70 | 2,359.917 | 2,361.30 | 2,394.99 | 2,447.35 | 2,508.35 |

*Sumber :Badan Pusat StatistikProvinsi Aceh, 2025*

## B1. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Pada Agustus 2023, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 35,52 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yaitu sebesar 4,22 persen. Dibandingkan Agustus 2022, status berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tetap/dibayar mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,38 persen poin dan 0,08 persen poin.

Tabel 2.91.
Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama,
Agustus 2019-Agustus 2024

| Status Pekerjaan Utama | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berusaha sendiri | 478.94 | 509.80 | 542.497 | 604.272 | 626.676 | 645.318 |
| Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar | 328.09 | 339.30 | 297.32 | 318.339 | 323.177 | 325.122 |
| Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 90.07 | 90.45 | 88.407 | 80.333 | 103.392 | 104.835 |
| Buruh/Karyawan/Pegawai | 866.71 | 809.10 | 839.815 | 842.954 | 879.044 | 894.197 |
| Pekerja bebas | 193.17 | 270.40 | 278.343 | 248.932 | 231.667 | 259.618 |
| Pekerja keluarga/tak dibayar | 262.73 | 340.80 | 314.918 | 300.164 | 283.389 | 279.264 |
| Jumlah | 2.219.698 | 2,359,905 | 2.361.300 | 2.394.994 | 2.447.345 | 2.508.354 |

*Sumber :Badan Pusat StatistikProvinsi Aceh, 2025*

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2023, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebesar 59,86 persen, sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebesar 40,14 persen. Dibandingkan Agustus 2022, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami kenaikan sebesar 1,59 persen poin.

B2. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

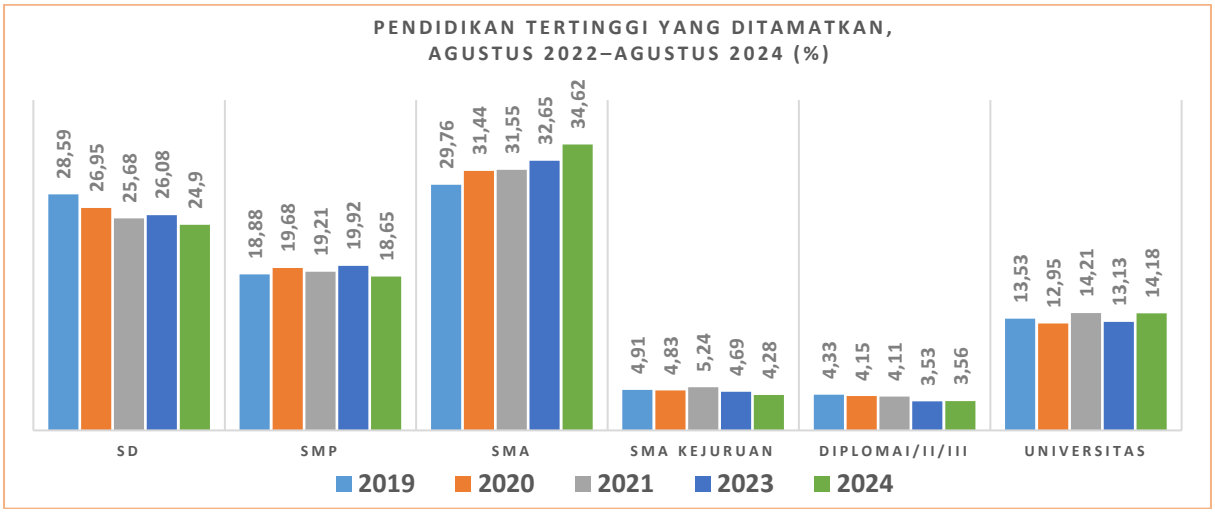
Pada Agustus 2023, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 35,52 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yaitu sebesar 4,22 persen. Dibandingkan Agustus 2022, status berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tetap/dibayar mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,38 persen poin dan 0,08 persen poin.

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2023, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebesar 59,86 persen, sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebesar 40,14 persen. Dibandingkan Agustus 2022, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami kenaikan sebesar 1,59 persen poin.

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Selama Agustus 2021-2023, Lapangan Pekerjaan Utama yang menyerap tenaga kerja adalah sektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja berjumlah 946.64 9 orang pada Agustus 2023 dengan didominasi Tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 294.545 orang. Sedangkan pada Agustus 2022, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SMA, yaitu sebesar 31,07 persen. Sementara penduduk bekerja tamatan diploma I/II/III dan universitas sebesar 15,39 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2021.

Dibandingkan dengan Agustus 2021, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah dan Sekolah Menengah Pertama mengalami peningkatan persentase, masing-masing sebesar 3,52 persen poin dan 0,72 persen poin. Sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma I/II/III dan Universitas mengalami penurunan persentase, dengan penurunan terbesar pada pendidikan Universitas, yakni sebesar 2,15 persen poin.




*Sumber :Badan Pusat StatistikProvinsi Aceh, 2025*

Keterangan: [1)]Diploma mencakup Diploma I/II/III, [3)] Universitas mencakup Diploma IV, S1, S2, S3

Gambar 2.96. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja, Agustus 2019-Agustus 2024

## C. Kepemudaan dan Olahraga

### C1. Kepemudaan

Pemuda merupakan salah satu pilar pembangun kehidupan bangsa. Keberadaan pemuda sebagai aset dan penerus cita-cita bangsa di masa depan harus menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam setiap pembangunan yang dilakukan. Bangsa yang kuat tidak hanya ditopang oleh kehadiran pertahanan yang kuat tapi juga adanya pemuda-pemuda yang kuat dalam berbagai sektor baik dalam sektor ekonomi, maupun pendidikan.

Menghadapi kompleksnya permasalahan bangsa menghadapi era revolusi industri 4.0, peranan pemuda Indonesia dan Aceh khususnya terlihat nyata melalui berbagai

usaha-usaha kreatif yang dilakukan dalam menggerakkan dan meningkatkan ekonomi bangsa melalui bisnis-bisnis startup. Kehadiran wirausaha muda melalui bisnis startup telah terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Tidak hanya itu, keberadaaan pemuda dengan berbagai prestasi juga telah ikut mengharumkan nama bangsa di berbagai kancah internasional baik dalam skala ASEAN, ASIA, maupun global.

Pada tahun 2024 jumlah organisasi kepemudaan berjumlah 68 (OKP) sama dengan tahun 2022. Keseluruhan organisasi kepemudaan Aceh yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Keberadaan KNPI Aceh sejatinya merupakan partner pemerintah Aceh dalam merespon permasalahan aktual kepemudaan dalam kehidupan masyarakat dan untuk mempersiapkan kader-kader penerus kepemimpinan bangsa. Adapun data rinci mengenai jumlah pemuda, pemuda prestasi dan jumlah organisasi kepemudaan tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.92.

Tabel 2.92.
Jumlah Pemuda Berprestasi dan Organisasi Kepemudaan Tahun 2019 – 2024

| Organisasi Kepemudaan | Satuan | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Jumlah Pemuda | Orang | 1.343.768 | 1.343.768 | 1.319.818 | 1.344.984 | 1.349.801 | 1.349.801 |
| Jumlah Pemuda Berprestasi | Orang | 61 | 2 | 80 | 32 | 36 | 20 |
| Jumlah Organisasi Kepemudaan Politik (OKP) | Unit | 70 | 71 | 66 | 68 | 68 | 68 |

*Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Tahun 2025*

Kualitas pemuda Aceh masih belum mengembirakan yang terlihat dari masih rendahnya jumlah pemuda yang berprestasi baik dalam bidang wirausaha, sosial, politik, akademik, hukum dan agama. Jumlah pemuda berprestasi Aceh Tahun 2024 adalah 20 orang menurun 44,44 persen dari tahun 2023 sebanyak 36 orang. Padahal secara kuantitas jumlah pemuda Aceh tahun 2024 meningkat sebesar 4,07% menjadi 1.404.738 pemuda (sumber Dinas Kependudukan dan Registrasi Aceh). Keadaan dan kondisi ini tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja namun banyak faktor yang mempengaruhinya diantaranya kualitas pendidikan pemuda Aceh yang stagnan di angka 76,67 selama 3 tahun terakhir (sumber: IPP Indonesia). Meskipun demikian, Aceh menempati peringkat 2 nasional pada dimensi pendidikan.

Kesehatan dan kesejahteraan pemuda Aceh juga belum menggembirakan, dimana (1) Indeks kesehatan pemuda Aceh tahun 2024 berada pada angka 0,433 dan masih berada pada kategori rendah (sumber: SDI 2024). Sedangkan indeks kesehatan dan kesejahteraan pemuda Aceh berada di angka 65,00 sejak 2 tahun terakhir (sumber: IPP 2023). Berdasarkan data IPP Aceh, Indeks kesehatan dan kesejahteraan pemuda Aceh mengalami penurunan signifikan hingga 5 poin dari tahun sebelumnya pada skor 70,00.

(2) Angka pemuda yang merokok dalam sebulan terakhir berada pada rata-rata skor 23,12 (sumber: BPS Aceh).

Dalam hal penyalahgunaan narkoba, data BNNP Aceh menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan dari 1,95 persen menjadi 1,73 persen untuk kategori setahun terakhir pakai, dan pada kategori pernah pakai menurun dari 2,47 persen menjadi 2,20 persen (sumber analisaaceh.com, 2024). Hal ini menunjukkan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Aceh melalui kegiatan penyadaran pemuda dalam hal ini sosialisasi bahaya narkoba dan kegiatan lainnya mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan.

C2. Keolahragaan

Olahraga merupakan suatu fenomena yang mendunia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahkan melalui olahraga dapat dilakukan national character building suatu bangsa, sehingga olahraga menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri, identitas bangsa, dan kebanggaan nasional. Berbagai kemajuan pembangunan di bidang keolahragaan yang bermuara pada meningkatnya budaya dan prestasi olahraga. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh hasil pengukuran Sport Development Index (SDI) Tahun 2024, dimana:

(1) Kondisi dan ketersediaan ruang terbuka olahraga provinsi Aceh juga berada pada kategori tinggi dengan skor indeks 1,000, hal ini menunjukkan bahwa indeks ruang terbuka olahraga Aceh berada pada kategori tinggi.

(2) Indeks literasi fisik yang mulai membaik pada skor 0,637 dengan kategori menengah, hal ini menunjukkan bahwa mulai meratanya pengetahuan, keterampilan, keterlibatan, dan tanggungjawab masyarakat Aceh dalam melakukan aktivitas fisik untuk kehidupan yang berkualitas.

(3) Mulai tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat Aceh dalam melakukan kegiatan olahraga meskipun berada dalam kategori rendah namun skor sudah mencapai 0,382.

(4) Indeks kesehatan fisik dan kesejahteraan psikis yang mulai membaik meskipun masih berada pada kategori rendah dengan indeks 0,433.

Dengan demikian mulai adanya hasil dari program dan kegiatan pembudayaan dan pembinaan olahraga baik olahraga pendidikan, olahraga olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Pembinaan dan pengembangan pada ketiga lingkup olahraga ini dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra keolahragaan, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan nasional sehingga olahragawan andalan dapat meraih puncak pencapaian prestasi.

Organisasi olahraga merupakan wadah berkumpulnya para atlet berbagai cabang olahraga yang dibina Pemerintah Aceh. Saat ini terdapat 66 cabang olahraga yang

terdaftar dan terhimpun dalam wadah KONI Aceh. Olahraga tersebut merupakan olahraga yang diminati dan digemari oleh masyarakat Aceh seperti sepakbola, badminton, tenis meja, footsal, volyball, futsal, tinju, panjat tebing, atletik, senam dan lain-lain. Meskipun demikian, tidak semua cabang olahraga tersebut mampu dibina oleh Pemerintah Aceh dan tidak semua atlet pada cabang olahraga tesebut mampu dibina oleh Pemerintah Aceh. Selain dikarenakan anggaran yang masih belum memadai, namun juga ketersedian sumber daya manusia olahraga yang masih mencukupi baik pelatih, wasit dan calon atlet.

Adapun cabang olahraga, sumber daya manusia keolahragaan dan infrasruktur olahraga Aceh disajikan pada Tabel 2.93.

Tabel 2.93.
Cabang Olahraga Atlit dan Infrastruktur Olahraga Aceh Tahun 2019 – 2024

| No. | Keolahragaan | Satuan | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Cabang Olahraga Binaan | Cabor | 20 | 24 | 29 | 14 | 19 | 27 |
| 2 | Atlit Olahraga Binaan | Orang | 454 | 456 | 309 | 309 | 219 | 172 |
| 3 | Atlit Berprestasi | Orang | 42 | 3 | 84 | 75 | 90 | 43 |
| 4 | Pelatih Berprestasi | Orang | 13 | 13 | 55 | 15 | 8 | ... |
| 5 | Pelatih Olahraga Binaan | Orang | 84 | 84 | 56 | 35 | 35 | 35 |
| 6 | Prestasi Olahraga | Cabor | 15 | 1 | 30 | 12 | 16 | 9 |
| 7 | Gedung Pemuda | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Lapangan Olahraga | Unit | 122 | 19 | 19 | 19 | 8 | 1 |

*Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Tahun 2025*

Dari Tabel 2.93 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 23 cabang olahraga binaan yang terbagi dalam 4 kegiatan binaan yaitu 1) Binaan PPLPD/SMAKON 15 jenis cabor, 2) Binaan PPLP 4 jenis cabor, 3) Binaan atlet prioritas peparpenas 2024 4 jenis cabor, 4) Binaan atlet prioritas peparpenas 8 jenis cabor cabang. Total ada 172 atlet binaan yang diharapkan bisa menghasilkan bibit-bibit unggul. Beberapa cabang olahraga yang dibina antara lain: Atletik, Angkat Besi, Panahan, Pencak Silat, Karate, Sepakbola, Sepak Takraw, Taekwondo, Bola Voli, Tinju, Bulutangkis, dan lainnya.

Adapun 27 cabang olahraga binaan pada Tahun 2024 diantaranya yaitu: a) Binaan PPLP, yaitu: 1) Atletik; 2) Angkat Besi; 3) Panahan; 4) Pencak Silat, b) Binaan PPLPD/ SMAKON, yaitu : 1) Karate; 2) Tarung Derajat; 3) Sepakbola; 4) Sepak Takraw; 5) Taekwondo, 6) Bola Voly; 7) Kempo; 8) Tinju; 9) Anggar, 10) Bulutangkis; 11) Dayung, 12) Atletik, 13) Angkat Besi, 14)Panjat Tebing, 15) Wushu, c) Binaan Atlet Prioritas Peparpenas, yaitu: 1) Menembak, 2) Atletik, 3) Tenis Meja, 4) Catur, 5) Angkat Berat, 6) Bulutangkis, 7) Anggar, 8) Bocica.

Dari 27 cabang olahraga yang dibina, ada 9 cabang yang berhasil menyumbangkan medali, seperti Panahan, Karate, Taekwondo, Anggar, Dayung, Atletik, Tenis Meja, Catur, dan Angkat Besi. Selain itu, ada juga beberapa cabang olahraga yang menyumbang medali meski bukan binaan, seperti Catur Kilat Perseorangan, Olah Vocal, dan Dum Domino.

Pada tahun 2024, ada 8 pelatih yang berhasil mengukir prestasi. Kehadiran pelatih berkualitas diharapkan bisa meningkatkan prestasi olahraga Aceh ke depan. Selain itu, pada tahun ini, dibangun 1 unit lapangan olahraga baru. Aceh juga sukses menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2023 dengan pelaksanaan yang sangat baik. Berbagai kontingen dari provinsi lain mengakui keberhasilan Aceh dalam melaksanakan event ini, mulai dari penerimaan kontingen yang ramah hingga keamanan yang terjamin. Dalam hal prestasi, Aceh berhasil meraih posisi ke-5 nasional dengan total 192 medali: 65 emas, 48 perak, dan 79 perunggu.

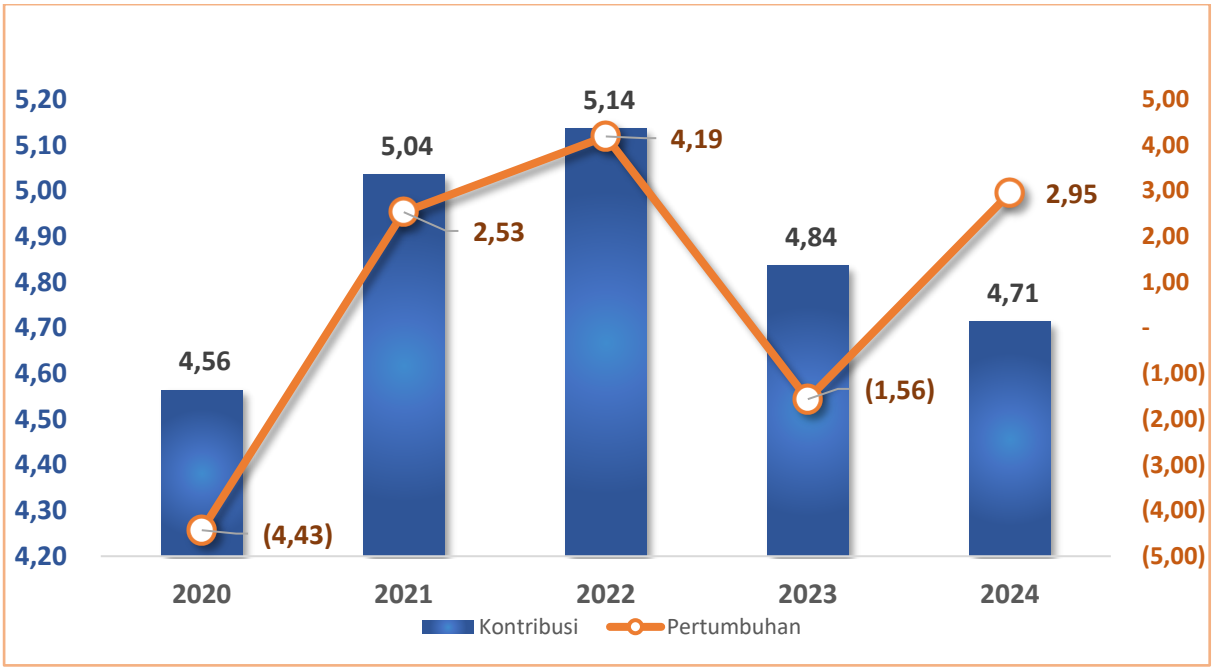
### 2.1.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

#### A. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Salah satu sektor ekonomi yang mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan adalah sektor industri. Sektor industri terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipandang sebagai bagian dari pembangunan ekonomi. Pembangunan sektor industri mampu memberikan peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sumbangan dalam berbagai sektor pembangunan nasional adalah wujud nyata dan tidak perlu disangsikan, seperti menyerap tenaga kerja, memperluas lapangan kerja dan kontribusi terhadap penerimaan devisa negara.

Perkembangan sektor industri di Aceh dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana dalam periode waktu tersebut sektor industri di Aceh mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 4,19 persen dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 5,14 persen. Namun pertumbuhan dan kontribusi tersebut masih belum optimal dibanding dengan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor yang dibergerak di hulu.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan di Aceh sempat mengalami lonjakan pertumbuhan pada masa pemulihan ekonomi pasca covid-19, yaitu pada tahun 2021 tumbuh signifikan sebesar 2,53 persen setelah terkontraksi sebesar 4,43 persen pada tahun 2020, tren positif berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 4,19 persen. Namun pada tahun 2023 sektor industri kembali mengalami tekanan dan berkontraksi sebesar 1,56 persen, terjadinya kontraksi pada tahun 2023 salah satunya diakibatkan karena terjadinya penurunan harga CPO di pasar global. Pada tahun 2024 sektor industri tumbuh kembali sebesar 2,95 persen. Penyebab pertumbuhan ini paling dominan terjadi pada sub sektor industri makanan dan minuman yang dipicu oleh peningkatan harga CPO, sehingga mendorong pelaku industri terkait baik dihulu maupun dihilir meningkatkan produksinya. Adapun laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.97.




*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025 (diolah)*

Gambar 2.97. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Provinsi Aceh (persen) Tahun 2020-2024

Sejalan dengan pertumbuhan, kontribusi sektor industri juga mengalami fluktuasi yang sama, dimana kontribusi terkecil terhadap PDRB terjadi pada tahun 2020 sebesar 4,56 persen, kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,14 persen, sedangkan pada tahun 2023 kontribusi sektor ekonomi menurun menjadi sebesar 4,48 persen. Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata kontribusi sektor industri masih belum optimal. Bahkan pada tahun 2024 meskipun pertumbuhannya tumbuh positif sebesar 2,95 persen, namun kontribusinya lebih kecil dibanding tahun sebelumnya, dimana kontribusi tahun 2024 sebesar 4,71 persen. Hal ini menandakan perkembangan pada sektor-sektor hulu, terutama sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan lebih progresif, dengan rata-rata kontribusi selama 5 tahun terakhir sebesar 29,43 – 30,98 persen. Fenomena ini menunjukkan belum tumbuhnya industri pengolahan yang cukup di Aceh, terutama pabrik pengolahan yang berskala sedang maupun besar, sehingga kontribusi sektor industri pengolahan lebih dominan dipicu oleh Industri berskala kecil. Selain itu, mengingat potensi dan kebijakan Aceh, perkembangan industri perlu di posisikan menuju pada perkembangan industri halal. Selanjutnya perkembangan jumlah Sentra IKM terdapat pada Tabel 2.94.

Tabel 2.94.
Sebaran Sentra IKM Aceh Tahun 2023 Menurut Kabupaten/Kota (data termutakhir)

| No. | Kabupaten/ Kota | Sentra | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Jlh. Sentra | Unit Usaha | Tenaga Kerja | |
| 1 | Sabang | 1 | 20 | 71 | |
| 2 | Banda Aceh | 5 | 58 | 77 | |
| 3 | Aceh Besar | 11 | 241 | 927 | |
| 4 | Pidie | 24 | 590 | 1.890 | |
| 5 | Pidie Jaya | 18 | 662 | 1.839 | |
| 6 | Bireuen | 19 | 578 | 1.735 | |

| No. | Kabupaten/ Kota | Sentra | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Jlh. Sentra | Unit Usaha | Tenaga Kerja | |
| 7 | Aceh Utara | 12 | 741 | 1.859 | |
| 8 | Lhokseumawe | 2 | 90 | 263 | |
| 9 | Aceh Timur | 15 | 181 | 1.479 | |
| 10 | Langsa | 6 | 81 | 231 | |
| 11 | Aceh Tamiang | 7 | 125 | 318 | |
| 12 | Gayo Lues | 1 | 1 | 7 | |
| 13 | Aceh Tenggara | 15 | 226 | 226 | |
| 14 | Aceh Tengah | 2 | 107 | 531 | |
| 15 | Bener Meriah | 3 | 60 | 103 | |
| 16 | Aceh Selatan | 4 | 151 | 341 | |
| 17 | Nagan Raya | - | - | - | |
| 18 | Aceh Barat Daya | 13 | 89 | 388 | |
| 19 | Aceh Barat | 9 | 143 | 377 | |
| 20 | Aceh Jaya | 7 | 77 | 184 | |
| 21 | Singkil | 15 | 1.116 | 2.564 | |
| 22 | Subulussalam | - | - | - | |
| 23 | Simeulue | - | - | - | |
| Jumlah | | 189 | 5.337 | 15.410 | |

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, 2025*

Dari Tabel 2.94 dapat dilihat bahwa Sentra IKM di Aceh sebanyak 189 sentra dengan unit usaha sebanyak 5.337 unit mampu menyerap 15.410 orang tenaga kerja. Sebaran Sentra IKM terbanyak berada di Kabupaten Pidie sebanyak 24 sentra, kemudian Bireuen 19 sentra, dan Pidie Jaya 18 Sentra. Sedangkan kabupaten Nagan Raya, Subulussalam dan Simeulue masih belum memiliki Sentra IKM.

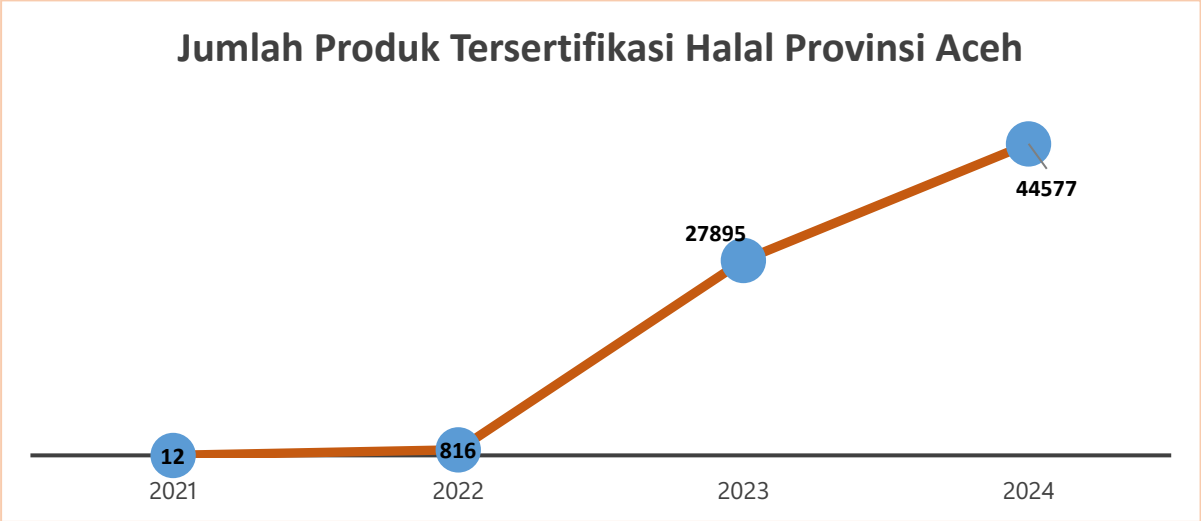
Tabel 2.95.
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Aceh, 2019-2022
(Data Termutakhir tahun 2022)

| IKM | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Industri Kecil dan Menengah | N/A | 2.606 | 1.411 | 504 |
| Total Industri | N/A | 103.254 | 113.354 | 108.580 |
| **Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)** | **-** | **2,52** | **1,24** | **0,46** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)*

Sedangkan jumlah IKM di Aceh mengalami penurunan dari tahun 2020 sebanyak 2.606 IKM, turun menjadi 1.411 IKM dan turun kembali pada tahun 2022 menjadi 504 IKM. Hal ini diduga akibat tekanan kondisi perekonomian global dan nasional yang dimulai sejak pandemi covid-19, belum sepenuhnya pulih pada sektor IKM sampai dengan data tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2024 BPS belum merilis data terbaru untuk tahun 2023. Jumlah Industri Kecil dan industri Menengah yang berkurang berbanding terbalik dengan jumlah industri mikro yang bertambah pada tahun 2022 sebanyak 108.050 dibanding tahun 2020 sebanyak 100.625. Hal ini menyebabkan turunnya proporsi jumlah industri kecil dan industri menengah sebanyak 0,46 persen dari 2,52 persen pada tahun 2020.

Penguatan Industri Halal, UMKM Halal, Ekspor Halal dan Ekosistem Halal merupakan upaya dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri halal dengan produk halal didalamnya. Adapun perkembangan produk tersertifikasi halal secara total di Aceh dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat seperti pada Gambar 2.98.




Gambar 2.98. Jumlah Produk Tersertifikasi Halal Provinsi Aceh

Produk tersertifikasi halal di Aceh menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkkan telah adanya keseriusan dan pemahaman dari masyarakat pelaku usaha, baik mikro, kecil dan besar, terhadap pentingnya sertifikasi halal dalam mendukung perluasan pasar dalam Ekosistem halal.

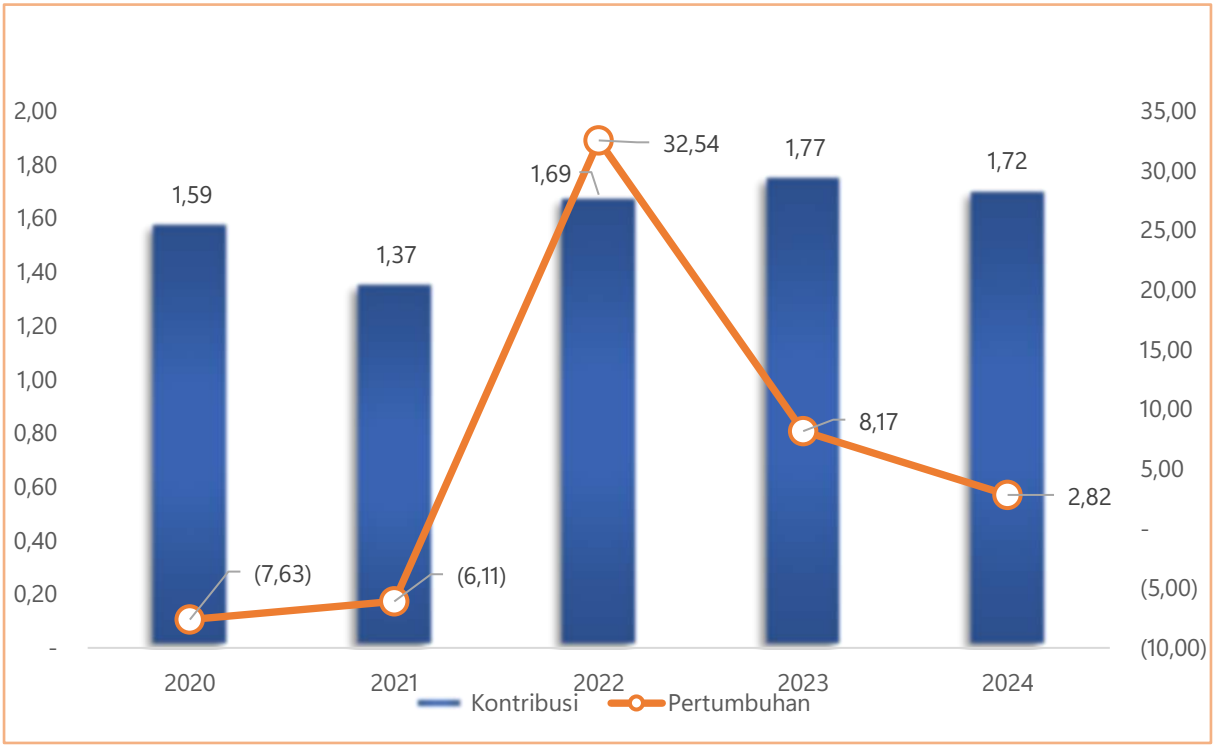
B. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun di Provinsi Aceh. Peningkatan sektor pariwisata dapat menggerakkan berbagai sektor lain dalam perkonomian seperti penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor industri, perdagangan, transportasi, pertanian dan lain sebagainnya. Secara umum, sektor pariwisata dapat memberikan efek ganda (multiplier effect) bagi hampir seluruh sektor jasa dalam sebuah struktur perekonomian. Besarnya kontribusi sektor pariwisata dapat dilihat melalui pendekatan penyediaan akomodasi dan makan minum yang merupakan sektor yang paling berpengaruh besar dalam pariwisata dan merupakan kategori penanda sektor pariwista dalam struktur PDRB.

Pariwisata di Aceh saat ini telah diarahkan untuk menjadi salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Peningkatan sektor ini bukan hanya mampu menggerakkan sebagian besar sektor penyediaan akomodasi dan makan minum secara khusus. tapi juga mampu memberikan dampak positif bagi hampir seluruh sektor jasa dalam sebuah struktur perekonomian.

Dalam kurun waktu 2020-2024 pertumbuhan sektor pariwisata di Aceh menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Dari grafik diatas dapat dilihat pertumbuhan sektor pariwisata mengalami kontraksi sebesar 7,63 persen pada tahun

2020. Sektor ini mengalami tekanan paling besar akibat pembatasan sosial pada masa pandemi covid-19 sehingga mengalami kontraksi sebesar 7,63 persen pada 2020 dan 6,11 persen pada tahun 2021. Namun sektor pariwisata kembali tumbuh dengan sangat signifikan dan mengalami rebounce pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 32,54 persen akibat dari dampak positif pemulihan perekonomian nasional dan daerah. Pada tahun 2023 sektor pariwisata merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi kedua setelah sektor perdagangan besar dan eceran, dengan pertumbuhan sebesar 8,17 persen. Pada tahun 2024 sektor ini terus mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,82 persen, meskipun tidak setinggi tahun sebelumnya. Hal ini tidak dapat dipungkiri merupakan gambaran level aktivitas kepariwisataan yang berangsur normal dan secara kuantitatif hilangnya pengaruh efek *rebounce* pada tahun 2022. Pertumbuhan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.99.




*Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh. 2025 (diolah)*

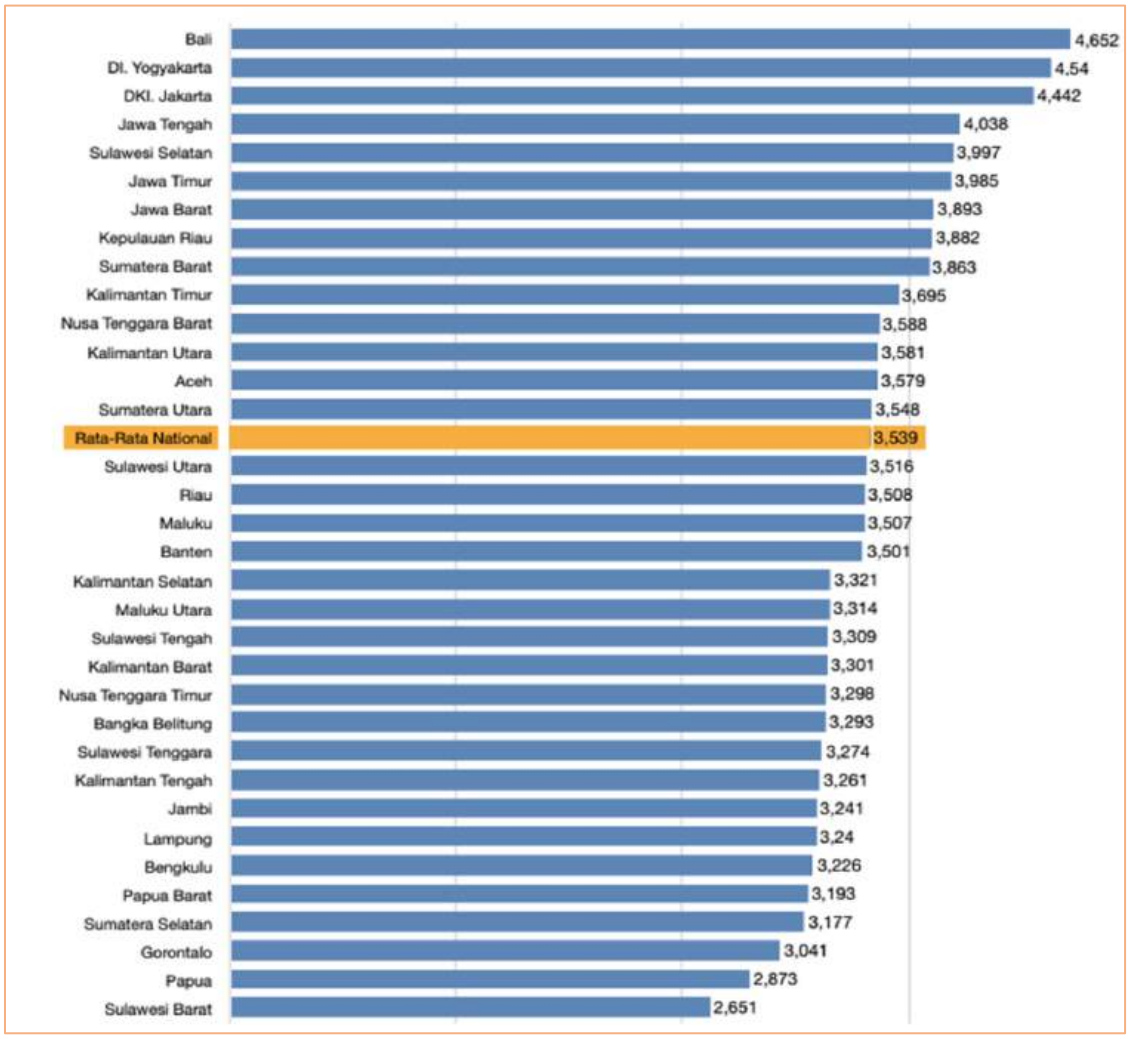
Gambar 2.99. Perkembangan Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) Aceh (Persen) Tahun 2020 – 2024

Sedangkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Aceh relatif masih kecil yaitu pada range 1,37 persen pada tahun 2021 yang merupakan kontribusi terkecil menjadi 1,77 persen pada tahun 2023 yang merupakan kontribusi terbesar selama 5 tahun sejak tahun terakhir sejak 2019. Sedangkan pada tahun 2024, kontribusi sektor pariwisata sebesar 1,72 persen merupakan sektor dengan kontribusi terkecil ke-6 dari 17 sektor pembentuk PDRB. Pengembangan pariwisata Aceh perlu diposisikan pada pariwisata halal atau *Muslim Friendly*, mengingat regulasi yang mendukung dan visi Aceh yang islami. Sektor lain dengan kontribusi lebih kecil dari pariwisata adalah sektor jasa keuangan dan

asuransi, sektor jasa lainnya, sektor jasa perusahaan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan sektor pengadaan listrik dan gas.

## C. Capaian IPKN Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2023 (data terakhir 2022)

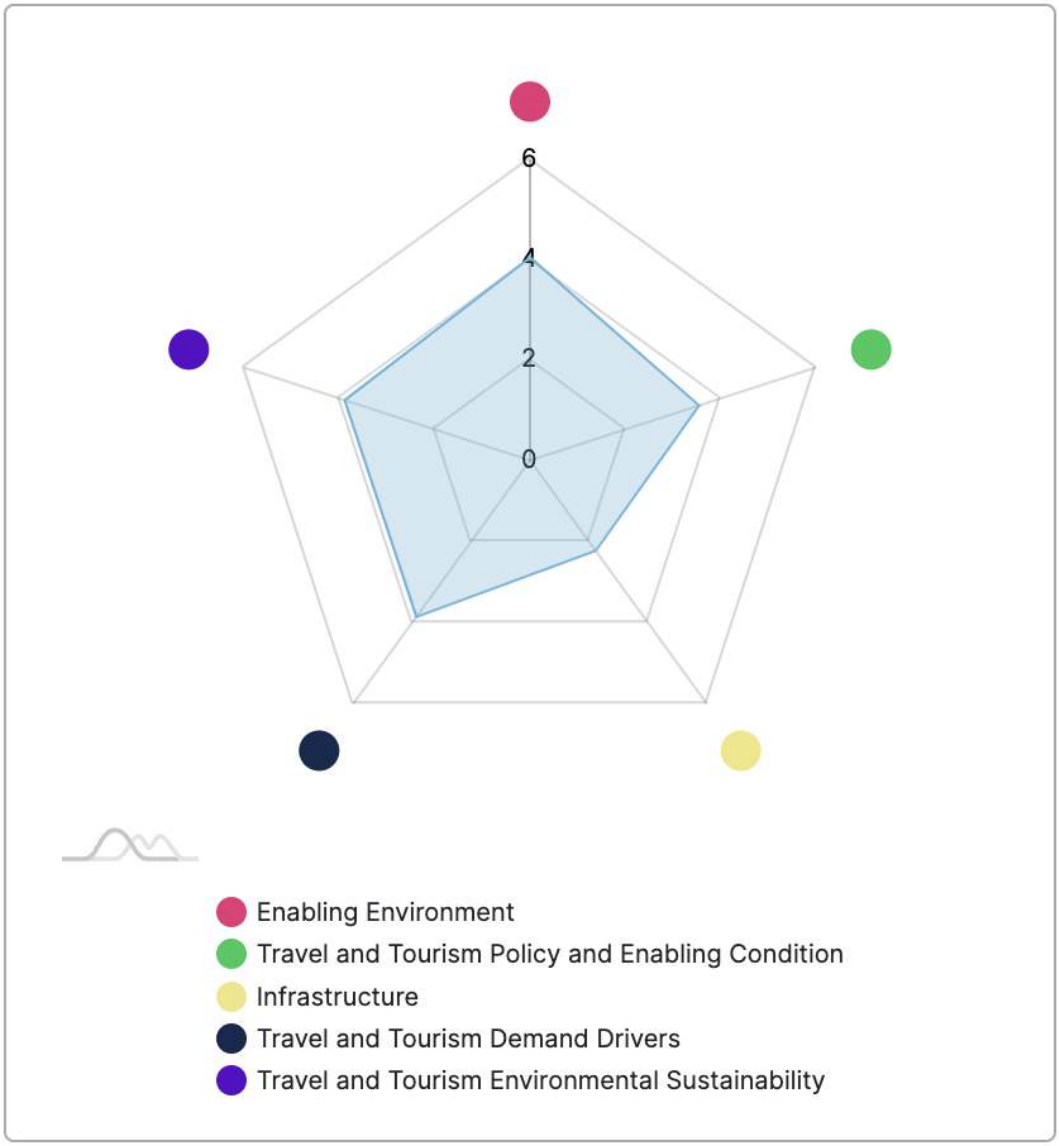
Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) pertama kali dicetuskan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno pada tahun 2022. Indikator ini ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran nasional pentingnya pembangunan ekosistem kepariwisataan di Indonesia dan mengukur besaran peran Pemerintah Daerah terhadap pembangunan kepariwisataan nasional. Aceh mampu bersaing secara nasional dengan meraih peringkat ke-13 dalam capaian indeks tersebut, dengan nilai indeks sebesar 3,58. Sedangkan pada peringkat pertama diperoleh oleh Provinsi Bali dengan nilai sebesar 4,65 dan paling rendah adalah Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai sebesar 2,65. sedangkan capaian pada tahun 2023 dan 2024 belum dirilis. Adapun perbandingan nilai capaian Aceh secara nasional dapat dilihat pada Gambar 2.100.




*Sumber: Kemenparekraf 2025*

Gambar 2.100. Capaian Pembangunan Kepariwisataan Tingkat Provinsi

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Aceh menduduki peringkat ke-13 dari 35 provinsi yang ada di Indonesia. Terdapat 5 Sub Indeks Penilaian IPKN yaitu, *Enabling Enivornment, Travel and Tourism Policy and Conditions, Infrastructure, Travel and Tourism Demand Drivers, dan T&T Sustainability*, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.101.




*Sumber: Kemenparekraf 2025*

Gambar 2.101. Capaian IPKN Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2023 Per Sub Indeks (data terakhir tahun 2022)

Dari data yang dirilis Kemenparekraf dapat dijelaskan nilai dari grafik diatas per sub indeks sebagai berikut:

1) *Enabling Environtment* : Aceh mencapai skor 4,05;
2) *Travel & Tourism Policy and Conditions*, : Aceh mencapai skor 3.55;
3) *Infrastructure* : Aceh mencapai skor 2.23;
4) *Travel & Tourism Demand Drivers*, : Aceh mencapai skor 3.86;
5) *Travel & Tourism Environmental Sustainability*, Aceh mencapai skor 3.89.

Nilai Provinsi Aceh paling tinggi terdapat pada sub indeks *Enabling Environtment*, hal ini menunjukkan kondisi pemungkin di Aceh yang mendukung perkembangan pariwisata cukup baik, terutama pada indikator kesehatan dan higenitas, lingkungan bisnis, keselamatan dan keamanan. Pada Sub Indeks T&T *Demand Drivers* Aceh bahkan meraih peringkat 5 besar dengan skor 3,86, hal ini menunjukkan daya saing Aceh sangat unggul secara nasional terutama pada sumber daya alam dan sumber daya budayanya. Namun Aceh masih sangat lemah pada sub indikator infrastruktur, baik infrastruktur pelayanan pada objek wisata maupun infrastruktur pendukung seperti transportasi udara dan transportasi laut.

Pembangunan pariwisata Aceh merupakan upaya yang signifikan dalam meningkatkan sektor pariwisata, Aceh memiliki potensi alam yang kaya, budaya yang unik, dan sejarah yang menarik, menjadi perhatian bagi wisatawan yang ingin berkunjung di Aceh. Dari ketiga Indikator tersebut pembangunan pariwisata dihitung untuk memperoleh ranking dari seluruh provinsi se-Indonesia, tahun 2022 Provinsi Aceh berada di peringkat ke-13.

Salah satu tujuan utama dalam pembangunan pariwisata di Aceh adalah memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat setempat, dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung, diharapkan akan terciptanya lapangan kerja baru, peningkatan masyarakat dan penguatan kearifan lokal sosial ekonomi di Aceh.

### D. Jumlah Kunjungan Wisata ke Aceh Tahun 2020- 2024

Secara umum kondisi kepariwisataan Aceh dapat dikatakan mulai membaik, hal ini dapat dilihat dari mulai meningkatnya jumlah kunjungan wisata, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Aceh yang terus mengalami pemulihan kembali pasca terdampak covid pada tahun 2020-2021, sebagaimana data disajikan pada Tabel 2.96.

Tabel 2.96.
Jumlah Kunjungan Wisata ke Aceh Tahun 2020 - 2024

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Wisatawan Nusantara | 4.142.179 | 5.534.405 | 6.954.578 | 7.270.318 | 12.924.997 |
| 2 | Wisatawan Mancanegara | 10.402 | - | 2.632 | 29.848 | 33.854 |

*Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)*

Secara keseluruhan kondisi kunjungan wisata ke Aceh terus mengalami peningkatan, baik kunjungan wisatawan mancanegara maupun kunjungan wisatawan nusantara. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Aceh pada tahun 2024 melalui Bandara Sultan Iskandar Muda tercatat sebanyak 33.854 orang, hal ini menandakan minat kunjungan terhadap Aceh mulai meningkat dibandingkan tahun 2022 dan 2023 dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 2.632 dan 29.848 orang, sedangkan pada tahun 2021 tidak ada kunjungan mancanegara akibat

pembatasan sosial pandemi covid-19. Namun jumlah ini belum kembali pada kondisi sebelum Aceh terdampak covid-19, dimana pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berjumlah 34.461 orang. Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara juga mengalami peningkatan, Badan Pusat Statistik Nasional Republik Indonesia (BPS RI) mencatat jumlah wisatawan nusantara dengan provinsi tujuan Aceh sebanyak 8.943.786 perjalanan pada tahun 2023, meningkat menjadi 12.924.997 perjalanan pada tahun 2024.

Selain infrastruktur sarana dan prasarana pada destinasi maupun objek wisata, permasalahan kelembagaan, tata kelola dan sumber daya manusia (SDM) juga masih menjadi kendala dalam peningkatan pengembangan sektor pariwisata. SDM pariwisata yang berperan sebagai pemandu wisata masih kurang dari segi kuantitas dan kualitasnya, serta pengetahuan kepariwisataan bagi masyarakat umum. Sedangkan upaya promosi dan pemasaran pariwisata di Aceh dengan brand "*The Light of Aceh*" atau disebut juga "Cahaya Aceh" belum mampu dioptimalkan.

## E. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

### G.1. Koperasi

Perkembangan koperasi di Aceh cukup fluktuatif, jumlah koperasi yang tumbuh terus bertambah namun begitu juga dengan jumlah koperasi aktif dan jumlah koperasi tidak aktif. Secara rinci, perkembangan koperasi di Aceh Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.97.

Tabel 2.97.
Perkembangan Koperasi di Aceh Tahun 2020 – 2024

| No | Tahun | Total Koperasi | Koperasi Aktif | Persentase Koperasi Aktif | Tidak Aktif | Persentase Koperasi Tidak Aktif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (unit) | (unit) | (%) | (unit) | (%) |
| 1 | 2020 | 6.602 | 3.777 | 57,21 | 2.825 | 42,79 |
| 2 | 2021 | 6.767 | 3.910 | 57,80 | 2.857 | 42,20 |
| 3 | 2022 | 6.931 | 3.951 | 57,00 | 2.980 | 43,00 |
| 4 | 2023 | 7.772 | 4.037 | 51,94 | 3.735 | 48,06 |
| 5 | 2024 | 8.177 | 3.942 | 48,21 | 4.235 | 51,79 |

*Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh, 2025*
*Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)*

Dari data diatas dapat dilihat secara kuantitas jumlah koperasi di Aceh yang tersebar 23 Kabupaten/Kota terus mengalami pertumbuhan, namun jumlah koperasi aktif yang bertambah tidak lebih besar dibanding pertambahan jumlah koperasi tidak aktif. Hal ini menyebabkan persentase koperasi tidak aktif meningkat menjadi 51,79 persen pada tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya sebesar 48,06 persen, bahkan persentase koperasi aktif sedikit lebih kecil dari persentase koperasi tidak aktif yaitu 48,21 persen.

Dari data tersebut menunjukkan fenomena bahwa koperasi baru terus tumbuh, namun koperasi lama kemungkinan tidak dapat bertahan dalam periode waktu yang lama, atau masa hidup koperasi sebagian besarnya tidak panjang.

Sedangkan komposisi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/ Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) sebagaimana Tabel 2.98.

Tabel 2.98.
Jumlah KSPPS dan USPPS di Aceh Tahun 2024

| No | Kab/Kota | Jenis Koperasi | | | | Total | Jumlah | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KSP | USP | KSPPS | USPPS | | Anggota | Aktif | Tdk. Aktif | |
| 1 | Banda Aceh | 4 | 358 | 4 | 78 | 444 | 41.261 | 346 | 98 | |
| 2 | Aceh Besar | 18 | 423 | 29 | 10 | 480 | 29.119 | 318 | 162 | |
| 3 | Pidie | 9 | 122 | - | 7 | 138 | 13.033 | 126 | 10 | |
| 4 | Pidie Jaya | - | 9 | 9 | 2 | 20 | 4.293 | 20 | - | |
| 5 | Bireuen | 8 | 93 | - | - | 101 | 7.592 | 88 | 13 | |
| 6 | Lhokseumawe | - | 316 | 7 | 12 | 335 | 9.617 | 131 | 204 | |
| 7 | Aceh Utara | 13 | 80 | 3 | 9 | 105 | 11.854 | 53 | 54 | |
| 8 | Aceh Timur | 2 | 48 | - | - | 50 | 3.542 | 11 | 39 | |
| 9 | Langsa | 7 | 150 | 1 | 9 | 167 | 974 | 30 | 137 | |
| 10 | Aceh Tamiang | 1 | 37 | 7 | 2 | 47 | 4.124 | 30 | 17 | |
| 11 | Aceh Tenggara | 18 | 161 | 5 | - | 184 | 3.456 | 51 | 133 | |
| 12 | Gayo Lues | 2 | 96 | - | 1 | 99 | 5.519 | 6 | 93 | |
| 13 | Aceh Tengah | 6 | 252 | 6 | 1 | 265 | 22.698 | 34 | 225 | |
| 14 | Bener Meriah | 4 | 5 | 10 | - | 19 | 2.351 | 17 | 2 | |
| 15 | Aceh Jaya | 2 | 17 | - | - | 19 | 871 | 18 | 1 | |
| 16 | Aceh Barat | 70 | 5 | 12 | - | 87 | 2.215 | 32 | 55 | |
| 17 | Nagan Raya | 4 | 56 | 4 | 3 | 67 | 5.392 | 43 | 24 | |
| 18 | Aceh Barat Daya | - | 204 | 2 | 7 | 213 | 19.793 | 67 | 146 | |
| 19 | Aceh Selatan | 6 | 401 | 10 | - | 417 | 24.918 | 303 | 114 | |
| 20 | Subulussalam | 7 | 8 | - | 3 | 18 | 992 | 15 | 3 | |
| 21 | Aceh Singkil | 5 | 113 | - | - | 118 | 6.022 | 62 | 56 | |
| 22 | Sabang | 1 | 34 | 4 | 6 | 45 | 3.440 | 21 | 24 | |
| 23 | Simeulue | 1 | 105 | - | 10 | 116 | 3.299 | 27 | 89 | |
| 24 | Provinsi | 3 | 4 | 3 | 12 | 22 | 39.970 | 17 | 5 | |
| **Jumlah** | | **191** | **3.097** | **116** | **172** | **3.576** | **266.345** | **1.866** | **1.704** | |

*Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh, 2025*

Dari data Tabel 2.98 dapat dilihat bahwa persentase Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) masih cukup rendah dibanding keseluruhan entitas koperasi/usaha simpan pinjam. Sampai tahun 2024, jumlah KSPPS dan USPPS hanya sebanyak 288 atau sebesar 8,05 persen dari total koperasi dan usaha simpan pinjam.

Kondisi koperasi yang demikian menunjukkan masih adanya tantangan terhadap perkembangan koperasi di Aceh, terutama alih teknologi dan kurangnya kepercayaan dari masyarakat. Selain itu, faktor lain penyebab tidak aktifnya koperasi antara lain disebabkan oleh:

1. Pengelolaan koperasi belum mapan sehingga banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga ekonomi koperasi, diantaranya tidak melaksanakan

Rapat Anggota Tahunan (RAT), tidak melaksanakan kegiatan usaha, tidak menyampaikan laporan kegiatannya ke Dinas Teknis, dan masih banyak yang belum melakukan pernyataan mandiri *(self declare),* karena masih rendahnya kesadaran pengelola koperasi serta masyarakat/anggota koperasi terhadap manfaat berkoperasi;

2. Belum optimalnya upaya edukasi dan fasilitasi untuk konversi koperasi syariah;

Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan koperasi serta kualitas dan kuantitas SDM pembina Koperasi, termasuk SDM koperasi syariah.

## G.2. UMKM

Pertumbuhan perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kontribusi sektor riil di Aceh, salah satunya sektor UMKM yang merupakan sektor yang strategis dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jumlah UMKM di Aceh terus mengalami pertumbuhan, fasilitasi untuk menumbuhkembangkan UMKM terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi pada skala ekonomi. Perkembangan jumlah UMKM dapat dilihat pada Tabel 2.99.

Tabel 2.99.
Perkembangan Jumlah UMKM di Aceh Tahun 2020-2024

| No | Skala UMKM | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020* | 2021* | 2022** | 2023 | 2024 |
| 1 | Mikro | 226.290 | 226.290 | 224.523 | 423.178 | 622.394 |
| 2 | Kecil | 30.780 | 30.780 | 61 | 1.470 | 1.839 |
| 3 | Menengah | 2.679 | 2.679 | 26 | 202 | 288 |
| **Total** | | **259.749** | **259.749** | **224.610** | **424.850** | **624.521** |

*Sumber : Kemenkopukm, 2024*
*Diskopukm, 2025*
*KemenUMKM,2025*

* Tidak dilakukan sensus, data menggunakan tahun sebelumnya

** Sensus hanya dilakukan pada 7 kabupaten - *2024 Data KemenUMKM merupakan sandingan SIDT dan Regsosek*

Dari Tabel 2.99 dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di Aceh mengalami peningkatan dalam rentang waktu 2020-2024, dimana pada tahun 2020 secara keseluruhan berjumlah 259.749 tumbuh menjadi 624.521 pada tahun 2024. Proporsi pertumbuhan terbesar terjadi pada kelompok mikro, dimana tumbuh sebanyak 199.216 usaha atau tumbuh sebesar 47,08 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan minat yang tinggi di masyarakat untuk menjadi wirausahawan dan peluang berusaha di Aceh yang masih terbuka. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021, Kemenkopukm tidak melakukan sensus, sehingga data yang disajikan mengunakan data tahun 2019.

Pada tahun 2022, Kementerian Koperasi dan UKM hanya melakukan sensus di 7 Kabupaten/Kota di Aceh yaitu di Kabupaten Aceh Besar, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh

Timur, Aceh Utara, Tamiang, dan Kota Banda Aceh. Sedangkan berkurangnya jumlah usaha kecil dan usaha menengah pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2019 diakibatkan karena terbitnya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 yang mengatur kembali kriteria kelas usaha, dimana sebelumnya sebuah usaha dikelompokkan mikro jika memiliki aset maksimal Rp. 50 juta atau omzet maksimal Rp. 300 juta menjadi maksimal modal Rp. 1 Milyar atau memiliki omzet maksimal Rp. 2 Milyar, begitu juga dengan kelas kecil dan menengah mengalami kenaikan tingkat kriteria. Sehingga banyak unit usaha yang sebelumnya berada dipengelompokan kecil dan menengah menjadi berada pada kelompok mikro. Hal tersebut juga mangakibatkan rasio proporsi jumlah usaha kecil dan menengah di Aceh menjadi berubah secara signifikan, sebagaimana pada Tabel 2.100.

Tabel 2.100.
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020* | 2021* | 2022** | 2023 | 2024 |
| Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah | 12,88 | 12,88 | 0,04 | 0,39 | 0,34 |

*Sumber : Kemenkopukm, 2024 (diolah)*
*Diskopukm, 2025 (diolah)*
*KemenUMKM, 2025 (diolah)*
* Tidak dilakukan sensus, data menggunakan tahun sebelumnya (2019)
** Sensus hanya dilakukan pada 7 kabupaten

Dari data diatas dapat dilihat terjadinya penurunan signifikan proporsi jumlah usaha kecil dan menengah pada tahun 2022, yang merupakan dampak dari perubahan regulasi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 yang mengatur kembali kriteria kelas usaha. Perubahan kriteria usaha tersebut mengakibatkan banyak usaha yang berada pada kelompok kecil dan menengah turun menjadi kelas mikro.

Pada tahun 2023 terjadi peningkatan proporsi jumlah usaha kecil dan menengah menjadi 0,39 persen dari 0,04 persen dari tahun 2022 yang menunjukkan adanya peningkatan volume usaha pada usaha mikro yang dapat meningkatkan aset maupun omzet usahanya. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan dan peningkatan geliat ekonomi secara umum, selain peningkatan kapasitas usaha itu sendiri. Sedangkan pada tahun 2024, terjadi sedikit penurunan menjadi 0,34 persen. Melihat secara jumlah, baik total UMKM, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, semuanya mengalami peningkatan. Namun pertumbuhan pada kelompok mikro jauh lebih dominan dibandingkan pada kelompok kecil dan menengah, hal ini mengakibatkan proporsi jumlah usaha kecil dan menengah ini sedikit mengalami penurunan.

Rendahnya proporsi jumlah usaha kecil dan menengah saat ini menunjukkan sebagian besar usaha belum mampu meningkatkan kapasitas sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing, ini dikarenakan faktor penyebabnya antara lain :

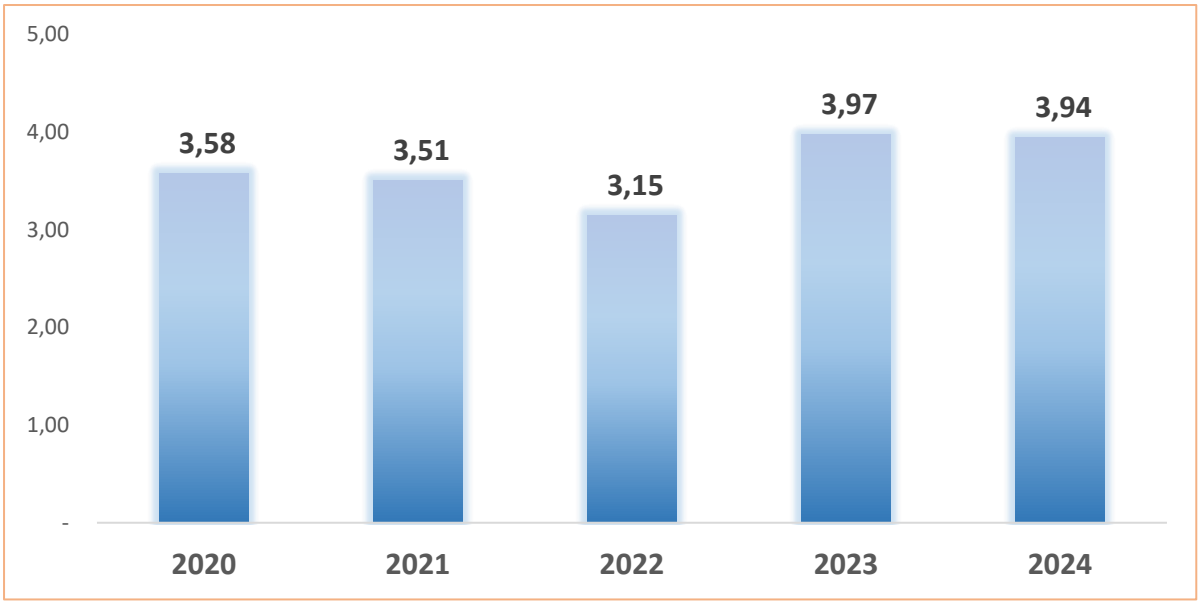
1. Kualitas produk UMKM belum mampu bersaing dengan produk unggulan dari daerah lain;
2. Terbatasnya akses kepada sumberdaya produktif terhadap bahan baku;

3. Terbatasnya sarana dan prasarana, informasi dan akses pasar;
4. Rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumberdaya manusia;
5. Terbatasnya dukungan/akses modal.

Hal tersebut perlu diperkuat agar UMKM mampu memliki sertifikat produk sebagai bagian dari peningkatan mutu produk, terutama didorong pada sertifikat produk halal. Selain beberapa poin diatas, permasalahan pendataan, monitoring dan evaluasi terhadap UMKM juga menjadi isu penting yang perlu dibenahi.

## F. Rasio Kewirausahaan

Sedangkan Rasio Kewirausahaan Aceh meskipun berfluktuasi dan mengalami tekanan pada tahun 2021 dan 2022 menjadi sebesar 3,15 persen. Hal ini diduga merupakan akibat dari berbagai pembatasan pada saat pandemi covid-19, yang mengakibatkan kelesuan perekonomian baik secara global, nasional dan daerah, sehingga dunia usaha juga menjadi sektor yang paling terdampak. Namun pada tahun 2023 kembali menunjukkan kenaikan sebesar 3,97 persen, yang berarti sudah mulai pulih kembali keyakinan dalam masyarakat untuk berwirausaha. Meskipun pada tahun 2024 sedikit turun menjadi 3,94 persen, namun angka tersebut cukup baik bahkan dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 3,35 persen. Penurunan sebesar 0,08 poin tersebut diakibatkan pertumbuhan angkatan kerja yang jauh melampaui pertumbuhan jumlah wirausaha dengan buruh tetap. Perkembangan rasio kewirausahaan dapat dilihat pada Gambar 2.102.




*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)*

Gambar 2.102. Rasio Kewirausahaan Aceh Tahun 2020-2024

Selain itu sektor ini juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru baik bagi laki-laki maupun perempuan. Seiring dengan perkembangan ekonomi digital, maka akan semakin besar peluang terbuka untuk berwirausaha, selanjutnya juga membangun status sosial yang baik di tengah masyarakat. Hal ini menunjukan iklim dunia usaha mulai membaik, sehingga mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha. Meningkatnya

rasio kewirausahaan menunjukan meningkatnya peluang penciptaan lapangan kerja baru, dan diharapkan dapat memberi efek ganda dalam perekonomian di Aceh.

## G. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dibanding Agustus 2021. TPAK pada Agustus 2022 sebesar 63,50 persen, turun 0,28 persen poin dibanding Agustus 2021. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2022, TPAK laki-laki sebesar 81,06 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 46,15 persen. Dibandingkan Agustus 2021, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 1,66 persen poin sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 2,21 persen poin.

Tabel 2.101.
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2019 - Agustus 2024

| Karakteristik | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Penduduk Usia Kerja | 3.734.614 | 3.881.102 | 3.951.368 | 4.019.977 | 4.021.068 | 4.087.000 |
| a. Angkatan Kerja | 2.366.320 | 2.526.505 | 2.520.157 | 2.552.562 | 2.604.452 | 2.661.000 |
| - Bekerja | 2.219.698 | 2.359.905 | 2.361.300 | 2.394.994 | 2.447.354 | 2.508.000 |
| - Pengangguran | 146.622 | 166.600 | 158.857 | 157.568 | 157.107 | 153.000 |
| b. Bukan Angkatan Kerja | 1.368.294 | 1.354.597 | 1.431.211 | 1.467.415 | 1.416.616 | 1.426.000 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 63,13 | 65,10 | 65,14 | 64,15 | 64,77 | 65,11 |
| Laki-laki | 80,79 | 81,47 | 79,4 | 81,06 | 80,57 | 80,68 |
| Perempuan | 45,68 | 48,94 | 48,36 | 46,15 | 49,05 | 49,62 |

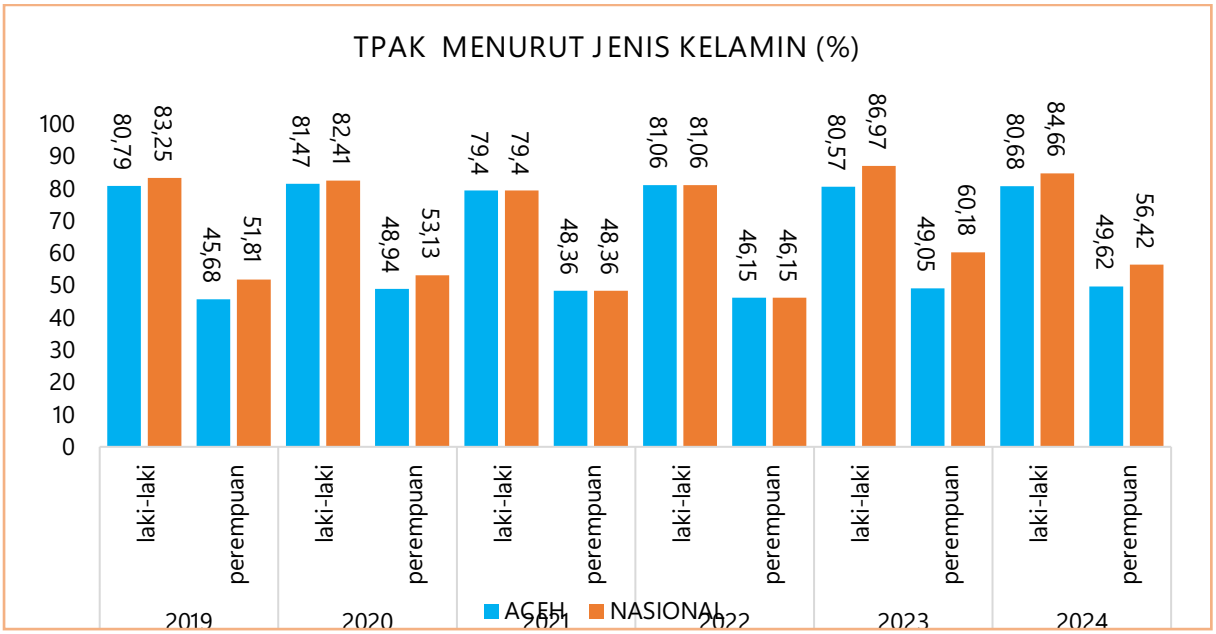
*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 2025*

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari berdasarkan tahun perhitungan yang dilakukan. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, maka semakin kecil pula nilai TPAK yang diperoleh. Tabel 2.101 mendeskripsikan tentang perkembangan kondisi TPAK dari 2019 hingga 2024. Secara umum perkembangan TPAK Aceh dari tahun 2019 hingga 2024 berfluktuatif dan pada tahun 2024 kembali meningkat bila dibandingkan pada tahun 2022 dan 2023. TPAK tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 65,14 persen dan terendah di tahun 2019 sebesar 63,19 persen.

Bila di tinjau dari TPAK laki-laki dan perempuan juga berfluktuasi, pada tahun 2020 TPAK Laki-laki dan Perempuan terjadi peningkatan yang signifikan masing-masing sebesar 81.47 persen dan 48.94 persen. Meningkatnya nilai TPAK pada tahun 2020 karena penambahan angkatan kerja sebesar 6,79 persen. Pada tahun 2023 TPAK Laki-laki cenderung mengalami penurunan sedangkan TPAK perempuan meningkat. Pada tahun 2024 TPAK laki laki meningkat menjadi 80.68 persen dan TPAK perempuan menjadi 49.62

persen. Besarnya partisipasi angkatan kerja dalam pasar kerja dapat diukur dengan menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Secara umum selama tahun 2019-2024 TPAK Aceh baik laki-laki maupun perempuan masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini juga tercermin dengan perbandingan TPT Aceh dan nasional, dimana Aceh masih berada di atas rata-rata nasional. Pada Agustus 2021 TPAK tercatat sebesar 63,78 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, TPAK perempuan masih lebih kecil daripada TPAK laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 48,36 persen dan 79,40 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan untuk TPAK laki-laki dan TPAK Perempuan yaitu sebesar 2,07 persen dan 0,57 persen. Menurunnya TPAK laki-laki dan perempuan disebabkan karena turunnya tingkat angkatan kerja baik angkatan kerja laki-laki maupun angkatan kerja perempuan. Mereka beralih dari penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.




*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh dan Nasional, 2025*

Gambar 2.103. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin Aceh dan Nasional, 2019-2024

## H. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

*(menggunakan Proporsi UMKM terhadap Angkatan Kerja sebagai proxy pengganti)*

Proporsi PDRB ekonomi kreatif adalah suatu indikator yang dimaksudkan untuk mengukur capaian persentase bagian PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif. Nilai PDRB ekonomi kreatif merupakan perhitungan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit dalam sektor ekonomi kreatif. Terdapat 17 subsektor yang termasuk kedalam aktivitas ekonomi kreatif yaitu: fesyen, kuliner, kriya, film,

animasi dan video, pengembang permainan, aplikasi, musik, seni pertunjukan, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, seni rupa, desain produk, periklanan, penerbitan, arsitektur, dan desain interior.

Sampai saat ini, nilai proporsi ekonomi kreatif terhadap PDRB untuk Aceh belum dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik maupun Kementerian terkait. Oleh sebab itu, untuk sementara waktu perlu menggunakan proxy yang mendekati untuk mengetahui gambaran perkembangan ekonomi kreatif di Aceh. Melihat aktivitas dari 17 sektor ekonomi kreatif tersebut dan perkiraan pelaku usaha pada bidang tersebut merupakan UMKM, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menerangkan usaha dengan kepemilikan modal sampai dengan Rp. 10 Milyar masih termasuk dalam usaha menengah. Selain itu, ketersedian lini data juga menjadi pertimbangan digunakannya Proporsi UMKM terhadap Angkatan Kerja sebagai proxy pengganti indikator Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif.

Indikator ini diharapkan dapat menggambarkan proporsi jumlah UMKM terhadap total angkatan kerja. Dimana, semakin tinggi persentase proporsi jumlah UMKM terhadap total angkatan kerja mengindikasikan semakin tingginya aktivitas pelaku UMKM yang secara dominan bergerak di sektor kreatif dibandingkan dengan angkatan kerja yang beraktivitas pada sektor lain. Di Aceh sendiri, sektor UMKM yang paling dominan bergerak dibidang kuliner, fesyen dan kriya. Aktivitas pada sektor-sektor ini yang kemudian memberikan kontribusi pada ekonomi kreatif yang dalam PDRB lapangan usaha tersebar di beberapa kelompok. Adapun gambaran proporsi UMKM terhadap angkatan kerja dapat dilihat pada Tabel 2.102.

Tabel 2.102.
Perkembangan Proporsi UMKM Terhadap Angkatan Kerja Tahun 2020 – 2025)
(sebagai proxy Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif)

| Indikator | 2020* | 2021* | 2022** | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Proporsi UMKM terhadap Angkatan Kerja | 10,28 | 10,31 | 8,80 | 16,31 | 23,47 |

*Sumber : Kemenkopukm, 2024*
*Diskopukm, 2025*
*KemenUMKM, 2025*
*Badan Pusat Statistik, 2025*
** Tidak dilakukan sensus, data menggunakan tahun sebelumnya*
*** Sensus hanya dilakukan pada 7 kabupaten*
*- 2024 Data KemenUMKM merupakan sandingan SIDT dan Regsosek*

Dari Tabel 2.102 dapat dilihat meskipun berfluktuasi namun proporsi UMKM terhadap angkatan kerja menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam 5 tahun terakhir. Fluktuasi tersebut disebabkan keterbatasan data UMKM sebagai data dasar perhitungan proporsi UMKM terhadap angkatan kerja, dimana pada tahun 2020 dan 2021 KemenkopUKM tidak melakukan sensus, sehingga data UMKM mengunakan data tahun 2019. Pada tahun 2022, Kementerian Koperasi dan UKM hanya melakukan sensus di 7 Kabupaten/Kota di Aceh yaitu di Kabupaten Aceh Besar, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Tamiang, dan Kota Banda Aceh.

Pada tahun 2024 proporsi UMKM terhadap angkatan kerja mencapai 23,47 persen, menunjukkan geliat perekonomian pada sektor UMKM yang aktivitas utamanya diketahui sebagai ekonomi kratif terutama pada sub sektor kuliner, kriya, dan fesyen memiliki bagian yang cukup besar dibanding dengan aktivitas angkatan kerja pada sektor lain. Hal ini mengindikasikan peran aktivitas ekonomi dalam menghasilkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit dalam sektor ekonomi kreatif yang cukup signifikan dalam membentuk PDRB di Aceh.

## I. Indeks Inovasi Daerah

Pemerintah Aceh menyadari bahwa tantangan pembangunan saat ini menuntut adanya perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Keterbatasan sumber daya, tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, serta perubahan sosial dan teknologi yang cepat harus dijawab dengan inovasi yang berdampak nyata dan berkelanjutan. Salah satu ukuran keberhasilan daerah dalam melakukan inovasi adalah Indeks Inovasi Daerah (IID) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). IID menjadi instrumen strategis untuk menilai kapasitas daerah dalam merancang, melaksanakan, dan mendokumentasikan inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Penerapan IID mengacu pada beberapa regulasi penting:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah,
- Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

Berikut adalah capaian nilai Indeks Inovasi Daerah Aceh selama empat tahun terakhir:

Tabel 2.103.
Capaian Indeks Inovasi Daerah Aceh (2021–2024)

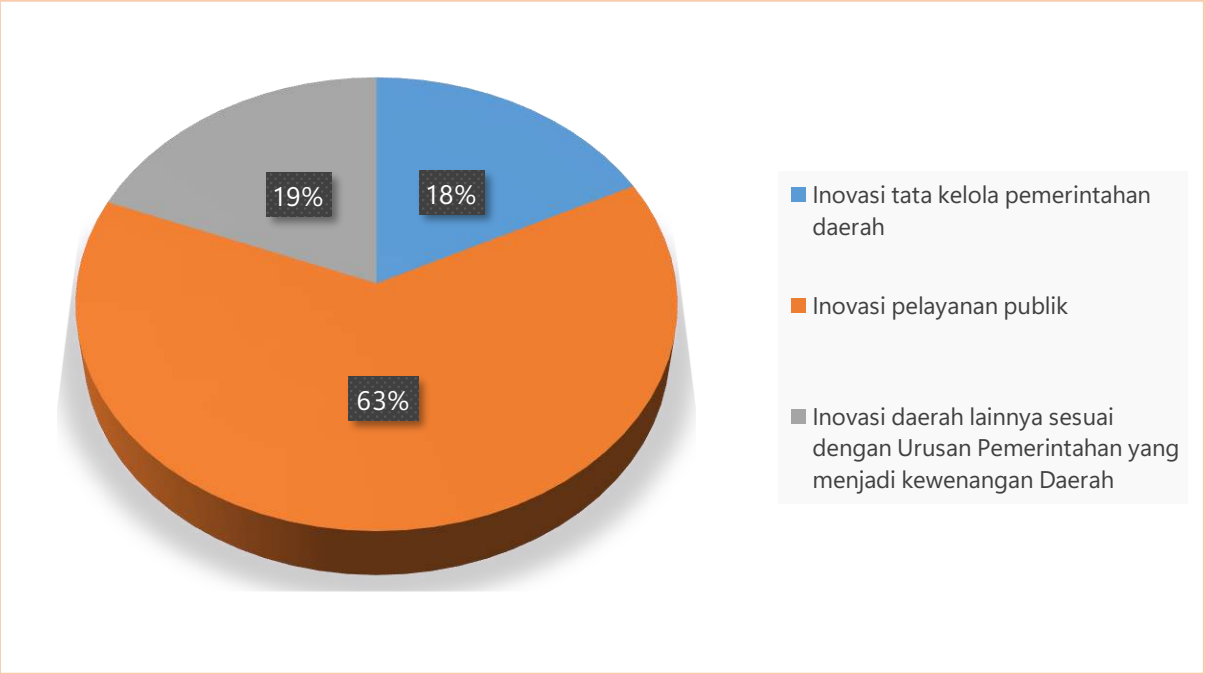
| Tahun | Nilai IID | Kategori | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 2021 | 46,40 | Inovatif | Minim dokumentasi dan pelaporan |
| 2022 | 51,67 | Inovatif | Adanya peningkatan jumlah inovasi |
| 2023 | 55,38 | Inovatif | Adanya peningkatan jumlah inovasi dan dokumentasi |
| 2024 | 55,87 | Inovatif | Adanya peningkatan jumlah inovasi, kualitas profil Inovasi dan dokumentasi data dukung indikator |

Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan, namun masih dibutuhkan kerja sistematis dan kolaboratif lintas perangkat daerah untuk mendorong perbaikan nilai IID secara berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa "pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah" dan "pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif

kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi". Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai wujud komitmen, Pemerintah Aceh telah menetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Aceh. Peraturan ini menjadi acuan bagi semua pihak, terutama pemerintah daerah di lingkup Pemerintahan Aceh, dalam membangun ekosistem inovasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam rangka memperkuat kebijakan pengelolaan inovasi daerah, Pemerintah Aceh telah menetapkan Inovasi Aceh dalam Keputusan Gubernur Aceh nomor 050/1329/2023 tanggal tentang penetapan Inovasi Aceh Tahun 2023 dan sebanyak 74 Inovasi daerah telah dilaksanakan oleh SKPA. Komposisi inovasi yang ditetapkan tersebut terbagi atas 3 bentuk inovasi, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.104.




Gambar 2.104. Komposisi Bentuk Inovasi Aceh

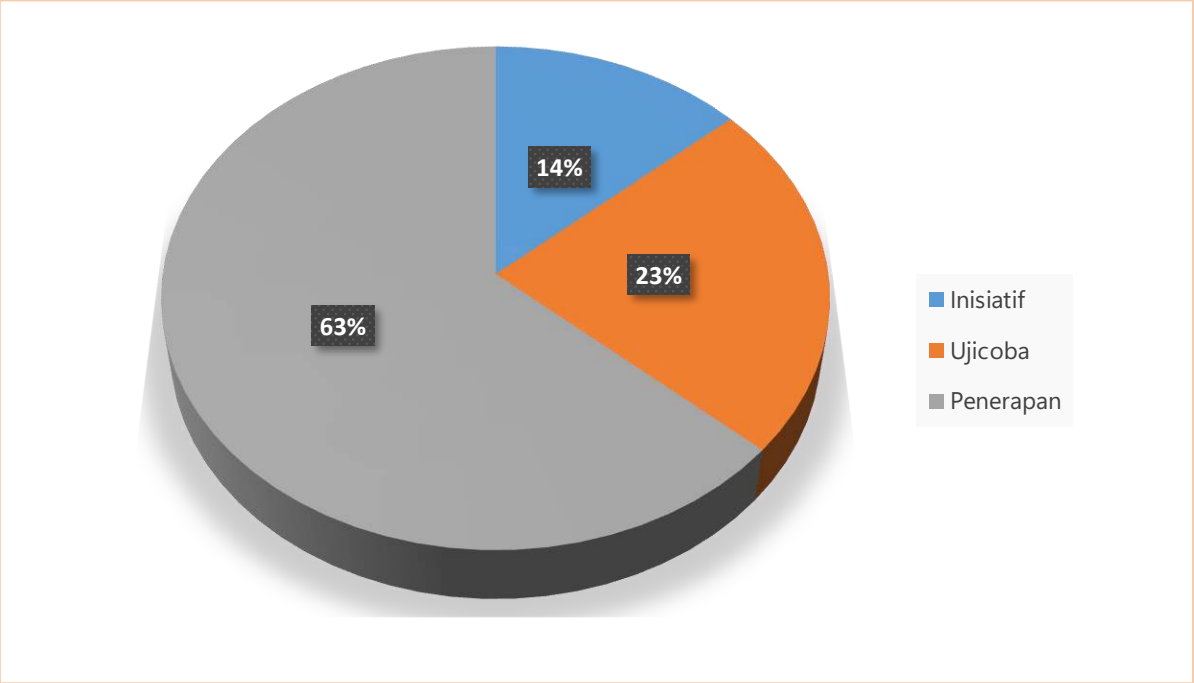
Gambar di atas, menunjukkan bahwa bentuk inovasi yang dominan dilaksanakan oleh SKPA adalah inovasi pelayanan publik dengan persentase sebesar 63 persen, dan selanjutnya bentuk Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan persentase 19 persen, serta bentuk inovasi tata Kelola pemerintahan dengan persentase sebesar 18 persen.

Pada tahun 2024, melalui sistem penilaian mandiri, telah dilakukan pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pelaksanaan pengukuran dan penilaian indeks inovasi daerah provinsi aceh telah dilakukan dalam beberapa tahapan, antara lain bimtek penilaian indeks inovasi daerah

provinsi aceh; desk pembahasan inovasi skpa; rapat pembahasan indikator satuan pemerintah daerah (SPD).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Provinsi Aceh berhasil meraih nilai IID sebesar 55,87, meningkat dari 55,38 pada tahun 2023. Peningkatan ini menempatkan Aceh dalam kategori "inovatif", mencerminkan adanya komitmen dan upaya yang berkesinambungan dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif. Hal ini sekaligus menjadi indikasi bahwa kapasitas birokrasi daerah dalam menciptakan dan mengelola inovasi publik terus mengalami peningkatan.

Selain itu, makna nilai ini menggambarkan bahwa berbagai program dan kebijakan inovatif di Aceh telah bergerak secara progresif, yaitu tidak hanya fokus pada gagasan, tetapi juga menindaklanjuti dan mengembangkan inovasi tersebut hingga ke tahap implementasi, dengan porsi penerapan yang dominan sebagai indikator keberhasilan transformasi inovasi dari ide menjadi aksi nyata. Komposisi tahapan yaitu tahap penerapan sebesar 63 persen, tahap inisiatif sebesar 14 persen; dan tahap uji coba sebesar 23 persen, seperti yang tersaji pada Gambar 2.105.



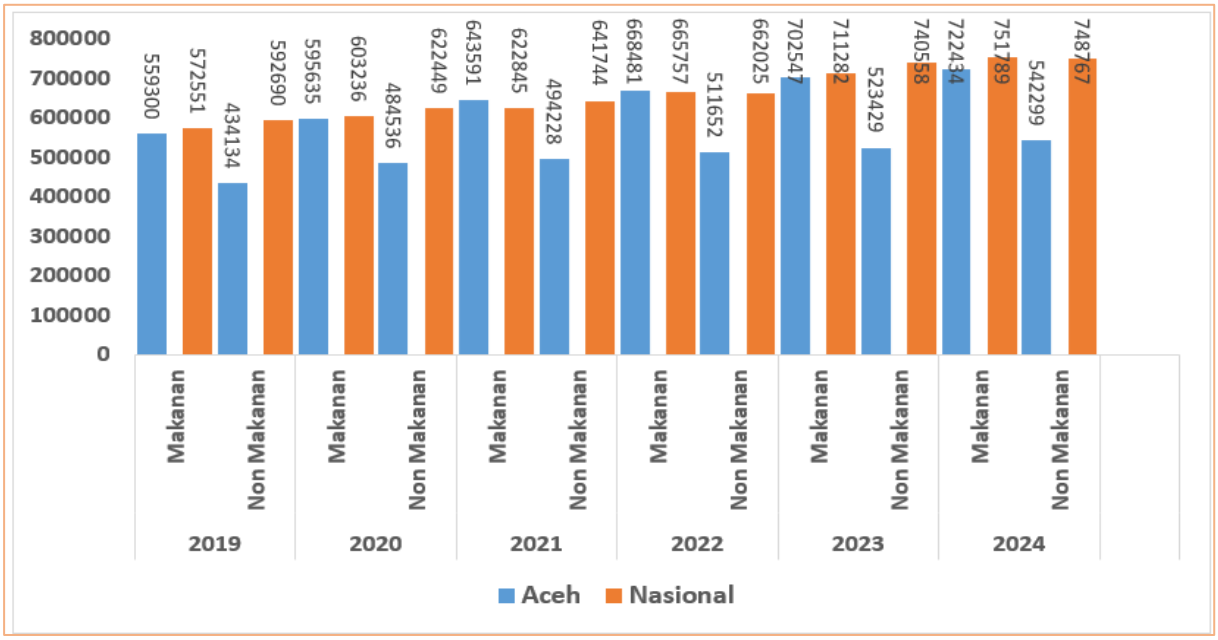

Gambar 2.105. Komposisi Tahapan Inovasi Aceh

## J. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Konsumsi merupakan bagian penting dalam kehidupan seseorang. Pemenuhan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi setiap hari oleh manusia tidak terlepas dari aktivitas konsumsi. Pengeluaran konsumsi dapat menjadi sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi individu atau rumah tangga. Secara umum pola konsumsi penduduk Aceh didominasi oleh makanan dibandingkan dengan konsumsi non makanan. Selama periode 5 (lima) tahun terakhir 2019-2023 pengeluaran konsumsi

rumah tangga perkapita perbulan makanan dan nonmakanan baik Aceh maupun nasional terus mengalami peningkatan, namun kondisi ini masih menggambarkan tingkat kesejahteraan Aceh yang diukur dengan indikator pengeluaran rumah tangga perkapita perbulan masih di bawah rata-rata nasional.

Pada tahun 2024 pengeluaran konsumsi per kapita perbulan Aceh sebesar Rp.722.434, dan nasional adalah sebesar Rp.751.789. Sedangkan pengeluaran konsumsi per kapita perbulan untuk non makanan Aceh sebesar Rp.542.299 dan nasional relatif lebih baik yaitu sebesar Rp. 748.767. Dari nilai pengeluaran tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita masyarakat Aceh dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terkahir mengalami peningkatan. Besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.106.




*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025*

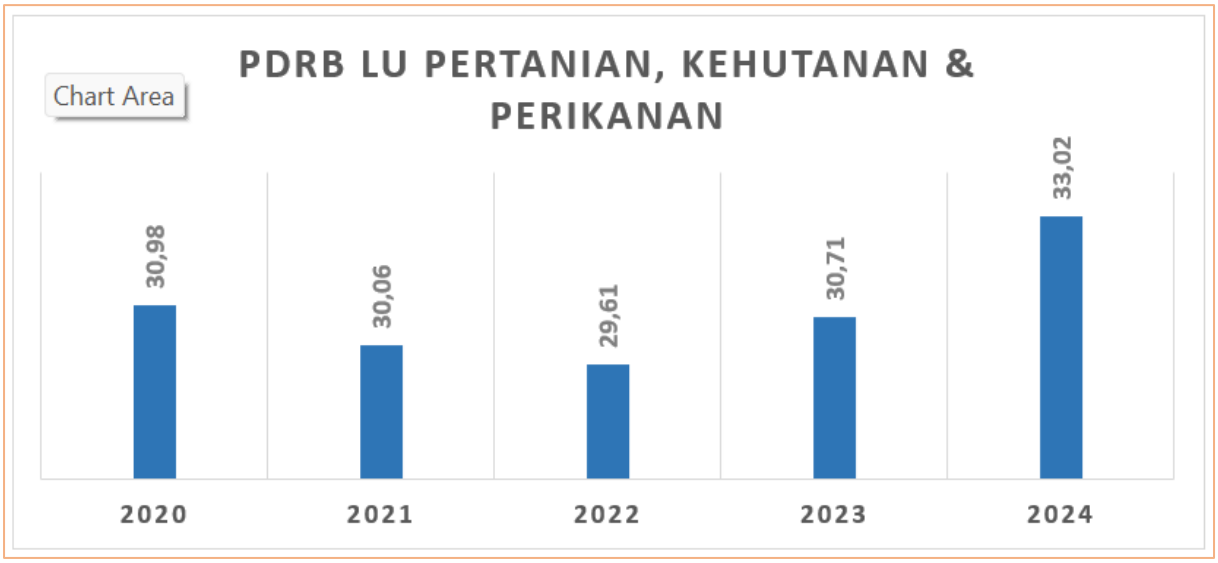
Gambar 2.106. Perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Makanan dan Non Makanan) Tahun 2019-2024

### 2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Menguraikan Indikator terkait: Indeks Ekonomi Hijau, Indeks Ekonomi Biru Indonesia, Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer, indikator lain sesuai konteks daerah.

#### A. Pertanian

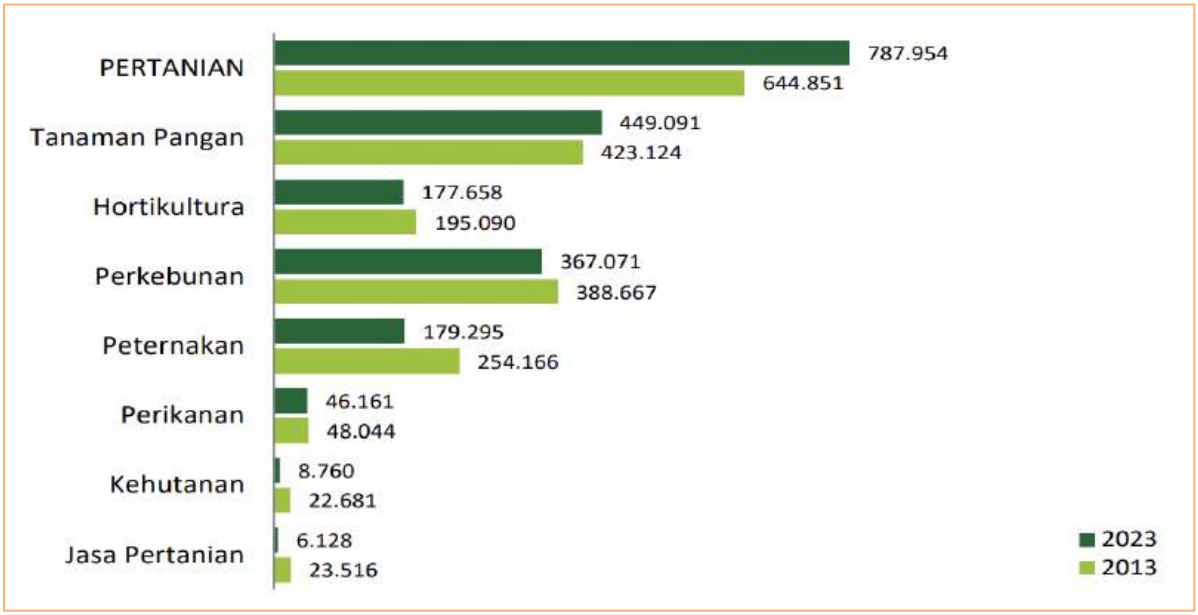
Pertanian masih menjadi sektor unggulan dan tulang punggung perekonomian Aceh dengan kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Aceh. Lapangan Usaha Pertanian secara umum (termasuk Kehutanan dan Perikanan) sedikit mengalami fluktuasi pada saat terjadinya pandemic Covid 19 dengan kecenderungan menurun hingga tahun 2022, namun kembali mengalami peningkatan sejak tahun 2023. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tetap menjadi lapangan usaha terbesar berdasarkan PDRB Aceh. Perkembangan PRDB Aceh berdasarkan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.107.




*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2025*

Gambar 2.107. PDRB ADHB Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Besarnya kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap PDRB tidak terlepas dari besarnya jumlah rumah tangga yang berusaha atau menggeluti lapangan usaha ini. Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Menurut Subsektor di Provinsi Aceh (rumah tangga) tahun 2013 dan 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jumlah Rumah Tangga yang bekerja pada sektor Pertanian bertambah secara signifikan dibandingkan dengan sektor lainnya. Jika dilakukan pemilahan berdasarkan sub sektor, maka tanaman pangan menjadi sub sektor terbesar, diikuti oleh Perkebunan, Horrtikultura, dan Peternakan.




*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2022*

Gambar 2.108. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Menurut Subsektor pada Sektor Pertanian di Provinsi Aceh (rumah tangga), Tahun 2013 dan 2023

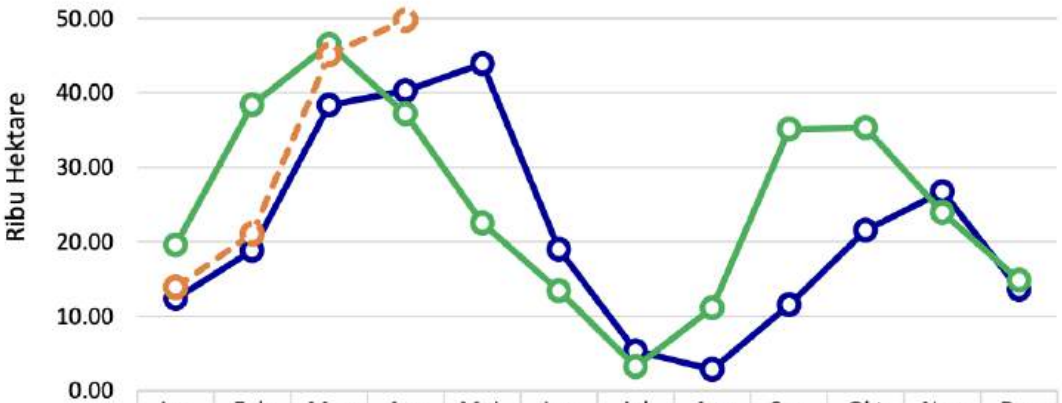
Sementara itu jumlah Usaha Pertanian Perorangan pada sub sektor tanaman pangan menempati urutan pertama, diikuti oleh sub sector perkebunan, sementara Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum terdapat pada sub sektor perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan jasa pertanian lainnya.

Tabel 2.104.
Jumlah Usaha Pertanian Menurut Subsektor dan Jenis Usaha di Aceh (unit)

| Subsektor | Usaha Pertanian Perorangan (UTP0 | Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) | Usaha Pertanian Lainnya (UTL) |
|---|---|---|---|
| Tanaman Pangan | 465.507 | 0 | 33 |
| Hortikultura | 180.047 | 0 | 129 |
| Perkebunan | 372.452 | 85 | 52 |
| Peternakan | 181.726 | 1 | 43 |
| Perikanan | 47.242 | 3 | 45 |
| Kehutanan | 8.804 | 2 | 0 |
| Jasa Pertanian | 6.210 | 1 | 3 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2024*

Pada Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdapat 4 komoditi unggulan Aceh, yaitu: Padi, Jagung, Cabai Besar dan Bawang Merah. Dari keempat komoditi ini, Padi merupakan jenis tanaman pangan utama yang memiliki luas lahan dan produksi paling besar di Aceh. Meskipun memiliki luas lahan terbesar, namun Aceh mengalami degradasi lahan sawah yang cukup besar.




| | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.35 | 18.82 | 38.36 | 40.26 | 43.88 | 18.97 | 5.33 | 2.85 | 11.55 | 21.56 | 26.75 | 13.61 |
| 2024 | 19.59 | 38.37 | 46.54 | 37.19 | 22.52 | 13.43 | 3.22 | 11.13 | 35.13 | 35.30 | 23.95 | 14.84 |
| 2025 | 13.87 | 21.07 | 45.15 | 49.79 | | | | | | | | |

Keterangan: [1] Luas panen Februari–April 2025 adalah angka potensi
Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2025*

Gambar 2.109. Perkembangan Luas Panen Padi di Provinsi Aceh (Ribu Hektare), Tahun 2023–2025*

Perkembangan Luas Panen Padi di Provinsi Aceh tahun 2023-2025 seperti pada Gambar 2.109. Luas lahan baku sawah di Aceh pada tahun 2018 sebesar 260.428 Ha. Pada

tahun 2019, sesuai dengan SK Menteri ATR BPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019, berkurang menjadi 213.997 Ha. Hal ini terjadi akibat dari alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan, tegalan, permukiman dan sarana infrastruktur lainnya. Berkurangnya luas lahan baku sawah telah menyebabkan berkurangnya luas panen padi di Aceh. Disamping akibat dari degradasi lahan, Aceh juga memiliki permasalahan tidak berfungsinya lahan sawah akibat tidak adanya jaringan irigasi yang memadai, sehingga usaha pertanian sangat tergantung pada curah hujan. Di sisi lain luas Panen Padi mengalami fluktuasi akibat seringnya terjadi bencana banjir yang melanda berbagai wilayah di Aceh.

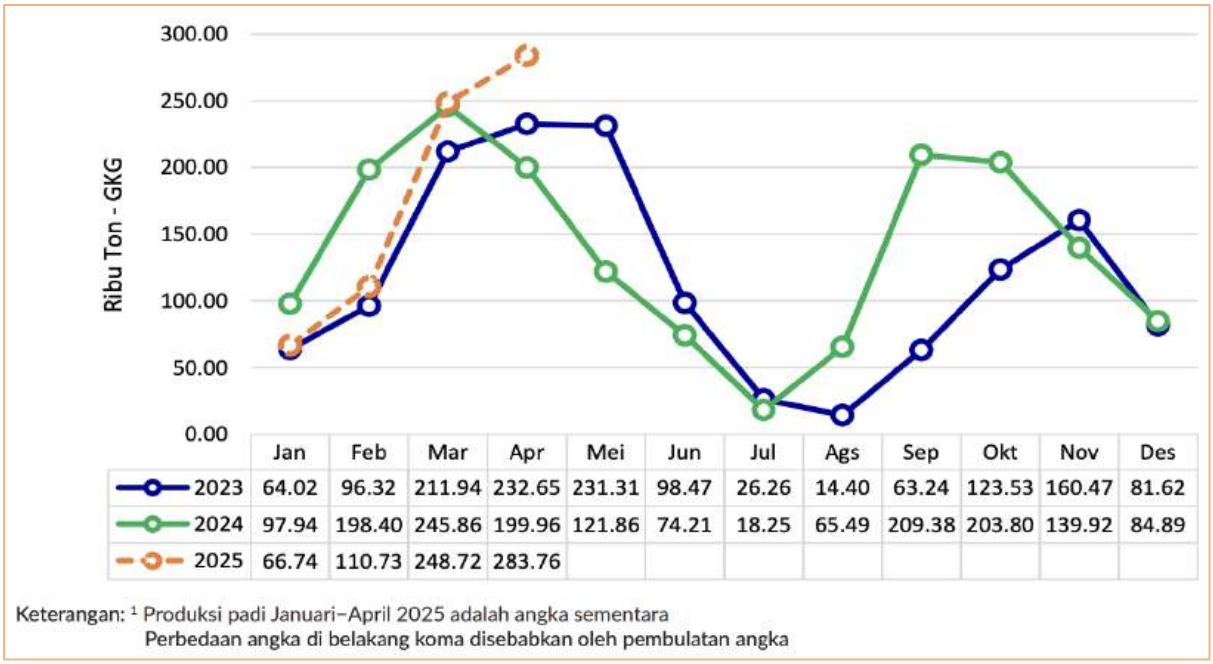
Realisasi luas panen padi sepanjang Januari hingga Desember 2024 mencapai sekitar 301,20 ribu hektare, atau mengalami peningkatan sebesar 46,91 ribu hektare (18,45 persen) dibandingkan 2023 yang sebesar 254,29 ribu hektare. Puncak panen padi pada 2024 mengalami pergeseran ke Bulan Maret, dari sebelumnya terjadi pada Mei 2023. Luas panen padi pada Maret 2024 adalah sebesar 46,54 ribu hektare, sedangkan pada Mei 2023 luas panen padi mencapai 43,88 ribu hektare.

Luas panen padi pada Januari 2025 mencapai 13,87 hektare, dan potensi panen sepanjang Februari hingga April 2025 diperkirakan seluas 116,01 ribu hektare. Dengan demikian, total luas panen padi pada Subround Januari–April 2025 diperkirakan mencapai 129,87 ribu hektare, atau mengalami penurunan sekitar 11,82 ribu hektare (8,34 persen) dibandingkan luas panen padi pada Subround Januari–April 2024 yang sebesar 141,69 ribu hektare. Produksi padi di Provinsi Aceh sepanjang Januari hingga Desember 2024 mencapai sekitar 1,66 juta ton GKG, atau mengalami peningkatan sebanyak 0,26 juta ton GKG (18,21 persen) dibandingkan 2023 yang sebesar 1,40 juta ton GKG. Produksi padi tertinggi pada 2024 terjadi pada Bulan Maret, yaitu sebesar 245,86 ribu ton GKG sementara produksi terendah terjadi pada Bulan Juli, yaitu sekitar 18,25 ribu ton GKG. Sementara itu, pada Januari 2025, produksi padi sebesar 66,74 ribu ton GKG, dan potensi produksi padi sepanjang Februari hingga April 2025 mencapai 643,20 ribu ton GKG. Total potensi produksi padi pada Subround Januari–April 2025 diperkirakan mencapai 709,95 ton GKG, atau mengalami penurunan sekitar 32,21 ribu ton GKG (4,34 persen) dibandingkan 2024 yang sebesar 742,16 ribu ton GKG.

Peningkatan produksi padi pada 2024 terjadi di beberapa wilayah potensi penghasil padi seperti Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Besar. Di sisi lain, terdapat beberapa kabupaten/ kota yang mengalami penurunan produksi padi, misalnya Aceh Selatan, Nagan Raya, dan Gayo Lues. Tiga kabupaten/kota dengan total produksi padi (GKG) tertinggi pada 2024 adalah Aceh Utara, Pidie, dan Aceh Besar. Sementara itu, tiga kabupaten/kota dengan produksi padi terendah yaitu Bener Meriah, Subussalam, dan Banda Aceh.

Komoditi pangan lainnya yang menjadi unggulan aceh adalah jagung pipil yang dapat dijadikan sebagai sumber bahan pangan, pakan ternak, bahan baku berbagai macam industry, dan juga dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan. realisasi panen jagung pipilan sepanjang JanuariSeptember 2024 sebesar 8,10 ribu hektare atau mengalami penurunan sekitar 0,95 ribu hektare (10,49 persen) dibandingkan Januari-September 2023 yang mencapai 9,05 ribu hektare. Sementara itu, potensi luas panen jagung pipilan pada Oktober-Desember 2024 diperkirakan sekitar 2,56 ribu hektare. Dengan demikian, total luas panen jagung pipilan pada 2024 diperkirakan sebesar 10,66 ribu hektare atau mengalami penurunan sebesar 1,07 ribu hektare (9,14 persen) dibanding

2023 yang sebesar 11,73 ribu hektare.Terjadinya penurunan luas panen disebabkan oleh kekeringan dan dampak fenomena El-nino, tak terkecuali di Provinsi Aceh.



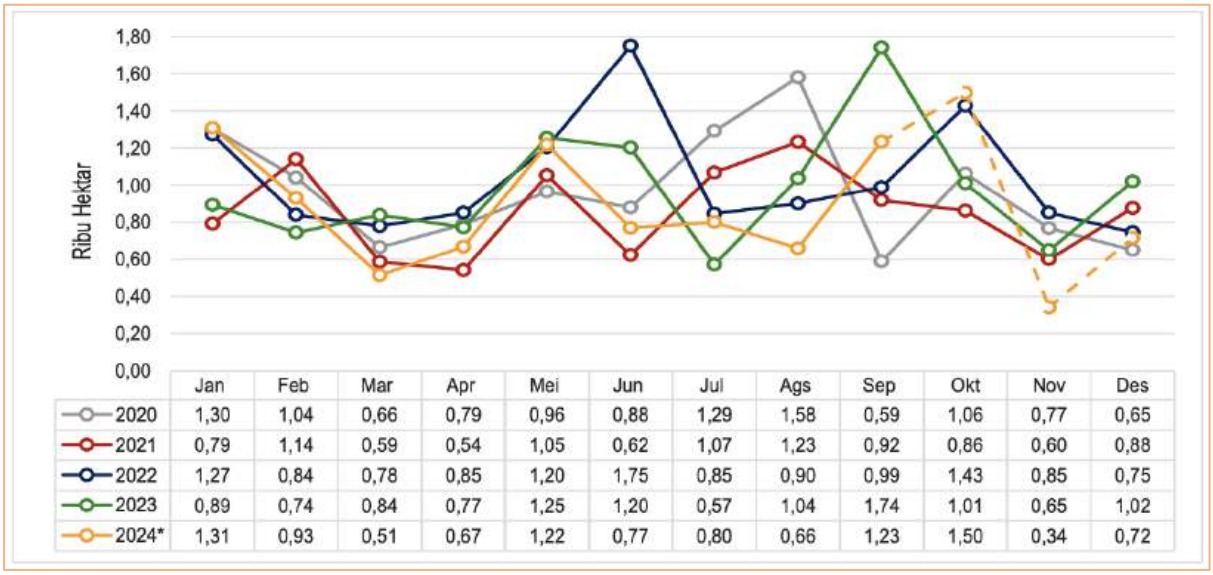

| | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 64.02 | 96.32 | 211.94 | 232.65 | 231.31 | 98.47 | 26.26 | 14.40 | 63.24 | 123.53 | 160.47 | 81.62 |
| 2024 | 97.94 | 198.40 | 245.86 | 199.96 | 121.86 | 74.21 | 18.25 | 65.49 | 209.38 | 203.80 | 139.92 | 84.89 |
| 2025 | 66.74 | 110.73 | 248.72 | 283.76 | | | | | | | | |

Keterangan: [1] Produksi padi Januari–April 2025 adalah angka sementara
Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2025*

Gambar 2.110. Perkembangan Produksi Padi di Provinsi Aceh (Ribu Ton-GKG), 2023–2025*

Puncak panen jagung pipilan pada 2024 terjadi di bulan Oktober, dengan luas panen sebesar 1,50 ribu hektare. Sementara puncak panen pada 2023 terjadi di bulan September, dengan luas panen sebesar 1,74 ribu hektare. Perkembangan Luas Panen dan produktivitas Jagung Provinsi Aceh tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilipat pada Gambar 2.111.

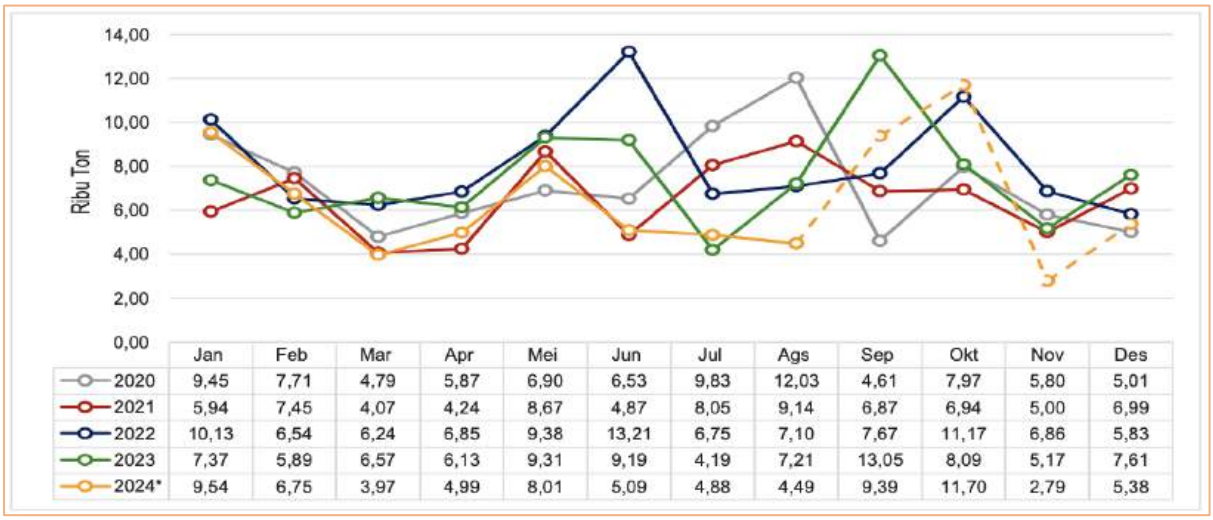



| | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1,30 | 1,04 | 0,66 | 0,79 | 0,96 | 0,88 | 1,29 | 1,58 | 0,59 | 1,06 | 0,77 | 0,65 |
| 2021 | 0,79 | 1,14 | 0,59 | 0,54 | 1,05 | 0,62 | 1,07 | 1,23 | 0,92 | 0,86 | 0,60 | 0,88 |
| 2022 | 1,27 | 0,84 | 0,78 | 0,85 | 1,20 | 1,75 | 0,85 | 0,90 | 0,99 | 1,43 | 0,85 | 0,75 |
| 2023 | 0,89 | 0,74 | 0,84 | 0,77 | 1,25 | 1,20 | 0,57 | 1,04 | 1,74 | 1,01 | 0,65 | 1,02 |
| 2024* | 1,31 | 0,93 | 0,51 | 0,67 | 1,22 | 0,77 | 0,80 | 0,66 | 1,23 | 1,50 | 0,34 | 0,72 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2025*

Gambar 2.111. Perkembangan Luas Panen dan Produksi Jagung di Aceh Tahun 2020–2024

Produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 28 persen (JPK-KA28%) Januari hingga Desember 2024 (angka sementara) diperkirakan sebesar 76,96 ribu ton, mengalami penurunan sebesar 12,81 ribu ton atau 14,27 persen dibanding 2023 yang sebesar 89,77 ribu ton (Gambar 2). Produksi JPK-KA28% tertinggi pada 2024 diperkirakan terjadi di bulan Oktober yaitu sebesar 11,70 ribu ton, sementara pada 2023 terjadi di bulan September yaitu sebesar 13,05 ribu ton.




| | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9,45 | 7,71 | 4,79 | 5,87 | 6,90 | 6,53 | 9,83 | 12,03 | 4,61 | 7,97 | 5,80 | 5,01 |
| 2021 | 5,94 | 7,45 | 4,07 | 4,24 | 8,67 | 4,87 | 8,05 | 9,14 | 6,87 | 6,94 | 5,00 | 6,99 |
| 2022 | 10,13 | 6,54 | 6,24 | 6,85 | 9,38 | 13,21 | 6,75 | 7,10 | 7,67 | 11,17 | 6,86 | 5,83 |
| 2023 | 7,37 | 5,89 | 6,57 | 6,13 | 9,31 | 9,19 | 4,19 | 7,21 | 13,05 | 8,09 | 5,17 | 7,61 |
| 2024* | 9,54 | 6,75 | 3,97 | 4,99 | 8,01 | 5,09 | 4,88 | 4,49 | 9,39 | 11,70 | 2,79 | 5,38 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2024*

Gambar 2.112. Perkembangan Luas Panen dan Produksi Jagung di Aceh Tahun 2020–2024

Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, sumbangan produksi jagung Aceh untuk Nasional masih jauh dibandingkan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Barat dan beberapa provinsi lain. Padahal Aceh memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Dari luas budidaya dan luas panen, aceh menempati posisi ke 5 dari 10 provinsi di sumatera.

Tabel 2.105.
Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung Sumatera 2020-2024

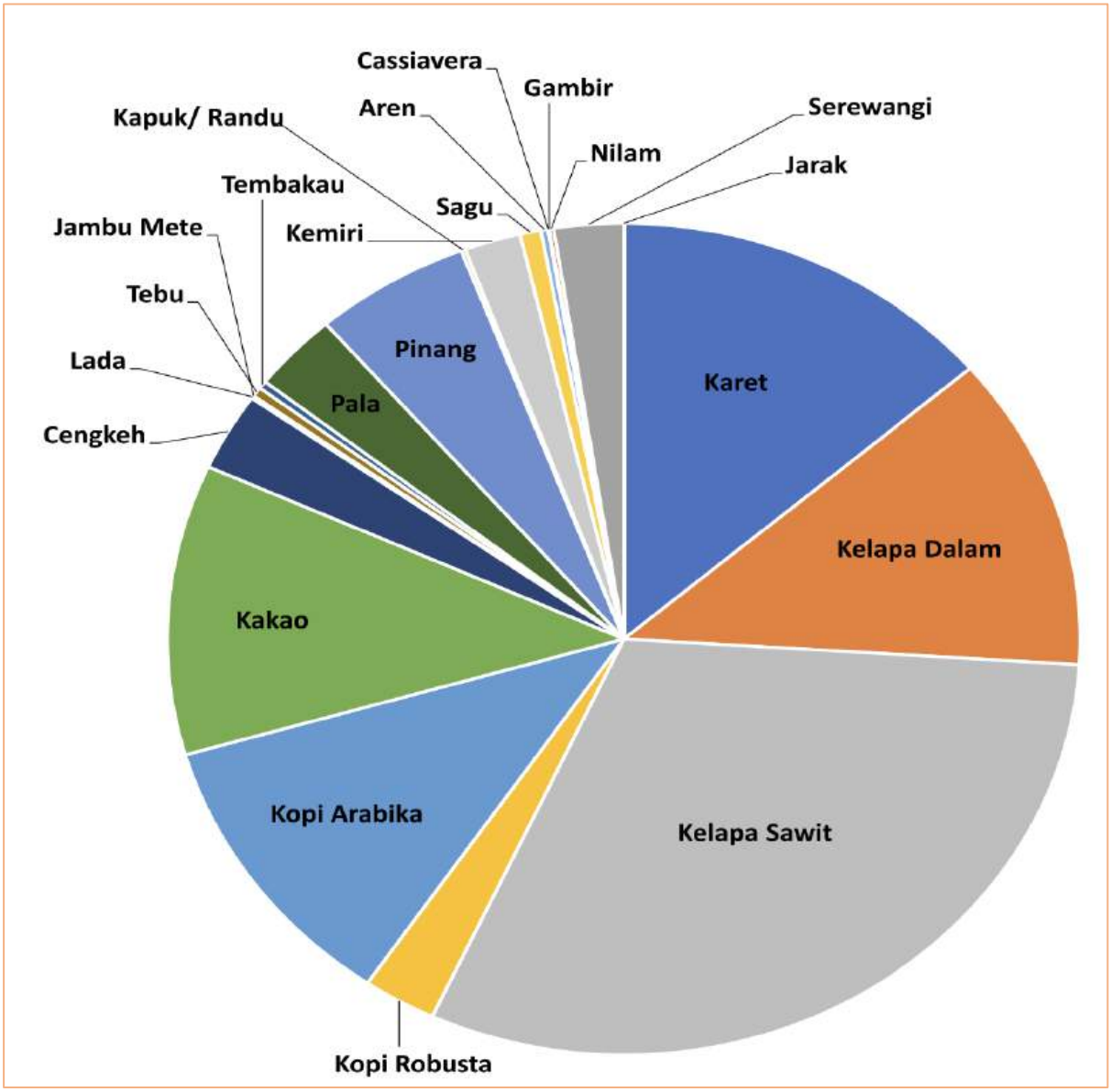
| Provinsi | Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Jagung Menurut Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Luas Panen (ha) | | | | | Produktivitas (ku/ha) | | | | | Produksi (ton) | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Aceh | 11.581 | 10.290 | 12.454 | 11.728 | 10.090 | 55,22 | 56,21 | 58,01 | 56,58 | 51,78 | 63.951 | 57.836 | 72.242 | 66.364 | 52.249 |
| Sumatera Utara | 135.334 | 153.632 | 207.757 | 211.105 | 210.586 | 57,87 | 62,29 | 62,93 | 63,63 | 65,24 | 783.127 | 956.939 | 1.307.477 | 1.343.291 | 1.373.900 |
| Sumatera Barat | 65.756 | 67.159 | 84.565 | 79.631 | 83.918 | 64,64 | 65,19 | 67,34 | 62,19 | 61,76 | 425.025 | 437.814 | 569.450 | 495.224 | 518.316 |
| Riau | 138,92 | 306,22 | 217,27 | 216,35 | 327,17 | 34,03 | 32,32 | 34,64 | 31,83 | 34,83 | 472,78 | 989,61 | 752,62 | 689 | 1.139 |
| Jambi | 1.111 | 1.666 | 1.892 | 781 | 1.514 | 68,45 | 58,34 | 55,37 | 60,46 | 69,56 | 7.604 | 9.719 | 10.477 | 4.725 | 10.531 |
| Sumatera Selatan | 35.074 | 51.691 | 60.187 | 46.248 | 53.171 | 60,37 | 61,23 | 76,48 | 61,55 | 63,76 | 211.736 | 316.506 | 460.321 | 284.643 | 338.999 |
| Bengkulu | 4.146 | 5.983 | 10.417 | 7.901 | 9.861 | 56,48 | 61,73 | 68,89 | 63,82 | 63,76 | 23.416 | 36.935 | 71.756 | 50.421 | 62.877 |
| Langpung | 156.655 | 172.108 | 223.860 | 166.215 | 170.017 | 62,04 | 65,6 | 64,46 | 66,4 | 65,15 | 971.957 | 1.129.112 | 1.443.096 | 1.103.640 | 1.107.739 |
| Kep. Bangka Belitung | 28,73 | 97,31 | 62,8 | 23,25 | 0 | 44,09 | 35,85 | 41,08 | 47,87 | 57,16 | 126,66 | 348,85 | 257,95 | 111,3 | 0 |
| Kep. Riau | 2,75 | 2,62 | 2,45 | 2,07 | 2,49 | 55,4 | 48,95 | 51,31 | 50,48 | 48,19 | 15,22 | 12,84 | 12,59 | 10,45 | 12 |
| **Sumatera** | **409.828** | **462.935** | **601.414** | **526.643** | | **559** | **548** | **581** | **564** | | **2.487.430** | **2.946.212** | **3.935.842** | **3.350.786** | |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2025*

Dari sisi produksi dan produktivitas, Aceh juga masih berada di bawah Provinsi Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Sumatera Utara mampu menghasilkan 6 s.d. 7 ton jagung per hektar, sementara Aceh hanya mampu pada kisaran 5 s.d. 6 ton per hektar.

B. Perkebunan

Aceh memiliki total luas wilayah yang mencapai 5.677.081 ha. Dari luasan tersebut, 1.078.728 ha atau sekitar 19% dari luas total merupakan areal perkebunan dengan melibatkan 834.525 KK, dan perkebunan besar seluas 233.147,97 Ha melibatkan 56 perusahaan yang di klasifikasikan meniadi 3 jenis kepemilikan lahan yaitu: Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perkebunan Besar Swasta Asing (PBSA), (Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 2022).




*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2023*

Gambar 2.113. Proporsi Komoditi paad sub Sektor Perkebunan

Aceh sangat kaya akan berbagai komoditi perkebunan, disebabkan Aceh memiliki kesuburan tanah dan kesesuaian agroklimat yang baik untuk berbagai jenis tanaman perkebunan. Sub Sektor Perkebunan menyumbangkan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB sektor Pertanian setelah sub sektor tanaman pangan. Peningkatan persentase kontribusi sub sektor perkebunan sangat dipengaruhi oleh produksi dan produktivitas dari beberapa komoditas perkebunan, diantaranya Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kakao dan Kelapa.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019–2023) kondisi luasan areal tanaman perkebunan rakyat belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, dimana pada tahun 2018 luas areal perkebunan sebesar 838.538 Ha, pada tahun 2021 menjadi 845.580 ha, namun pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 835.192 Ha. Hal ini diperkirakan akibat dari banyaknya lahan pruntukan perkebunan yang belum dimanfaatkan serta banyaknya tanaman-tanaman tua sehingga produksi dan produktivitasnya menurun.

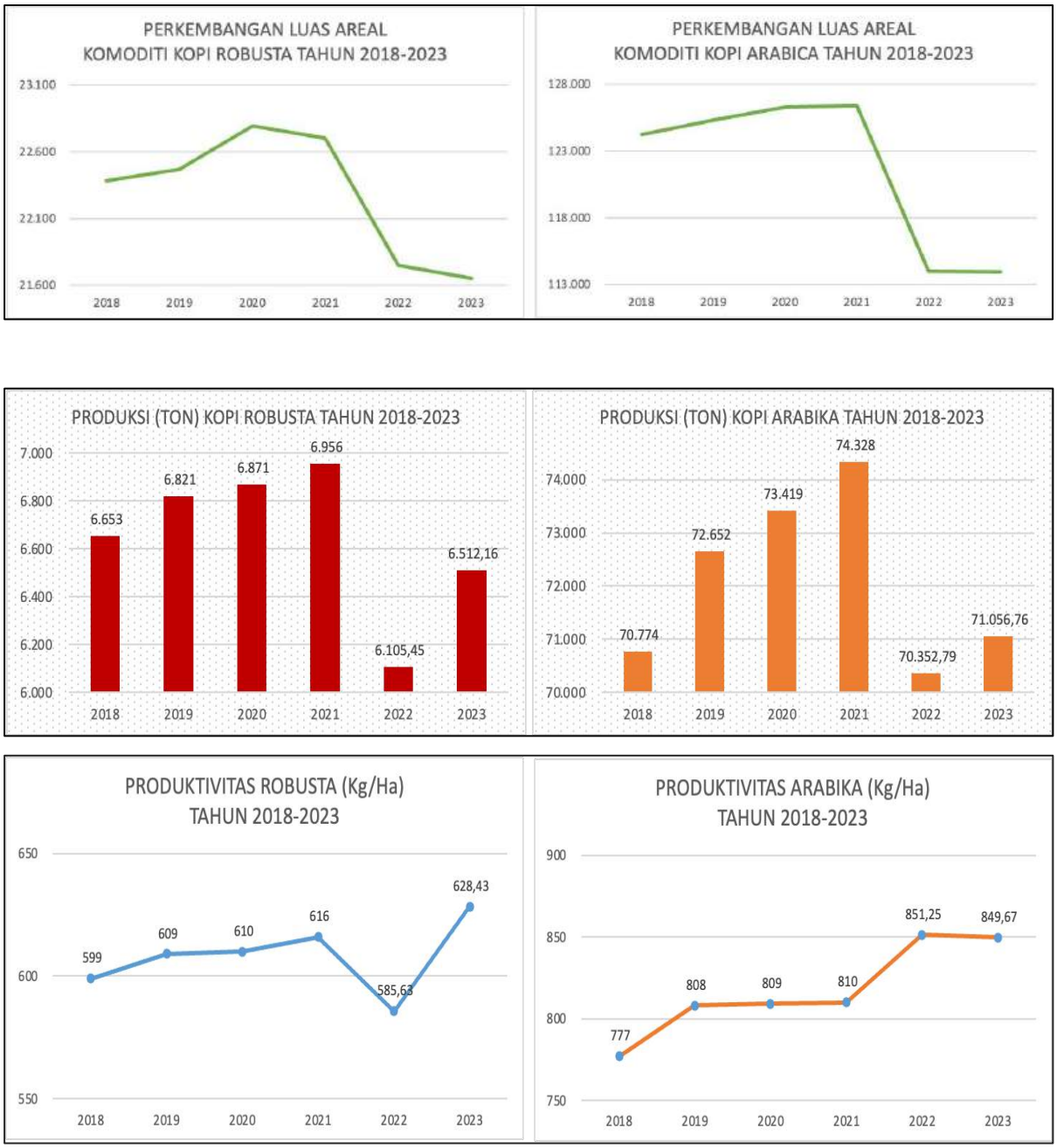
Tabel 2.106 menunjukkan Luas Lahan, Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani dari komoditi perkebunan yang dihasilkan oleh 23 kabupaten/kota di Aceh pada tahun 2023 berdasarkan Statistik Perkebunan Provinsi Aceh.

Tabel 2.106.
Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani pada Sub sektor Perkebunan Tahun 2023

| No. | Komoditi | Luas Areal (Ha) | | | Jumlah | Produksi | Rata-Rata Produktivitas | Jumlah Petani | Wujud Produksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBM | TM | TR | (Ha) | (Ton) | (Kg/Ha) | (KK) | |
| | Nasional | | | | | | | | |
| 1. | Karet | 21.356,01 | 72.891,52 | 18.603,97 | 112.851,50 | 61.845,12 | 848,45 | 89.865 | K3 |
| 2. | Kelapa Dalam | 11.441,77 | 75.139,63 | 16.019,36 | 102.600,76 | 63.070,71 | 839,38 | 145.316 | Kopra |
| 3. | Kelapa Sawit | 65.635,20 | 175.944,22 | 21.521,68 | 263.101,10 | 474.492,71 | 2.696,84 | 146.102 | CPO |
| 4. | Kopi Robusta | 4.732,25 | 10.362,52 | 6.558,52 | 21.653,29 | 6.517,22 | 628,92 | 24.689 | Biji Kering |
| | Arabika | 7.493,54 | 75.964,00 | 8.857,00 | 92.314,54 | 64.566,60 | 849,96 | 81.191 | Biji Kering |
| 5. | Kakao | 23.322,52 | 51.793,53 | 18.314,38 | 93.430,43 | 36.598,79 | 706,63 | 119.776 | Biji Kering |
| 6. | Cengkeh | 6.001,10 | 9.871,65 | 9.551,60 | 25.424,35 | 5.916,65 | 599,36 | 23.645 | Bunga Kering |
| 7. | Lada | 228,67 | 409,27 | 265,25 | 903,19 | 257,57 | 629,34 | 2.254 | Lada Hitam |
| 8. | Jambu Mete | - | - | - | - | - | - | - | Biji Kering |
| 9. | Tebu | 2.775,90 | 1.217,90 | - | 2.775,90 | 6.745,01 | 5.538,23 | 3.320 | Gula Merah |
| 10. | Tembakau | 2.528,76 | 2.306,46 | - | 2.528,76 | 2.206,34 | 956,59 | 4.114 | Daun Kering |
| | Daerah | | | | | | | | |
| 11. | Pala | 7.406,75 | 10.477,94 | 6.045,75 | 23.930,44 | 6.660,64 | 635,68 | 28.878 | Biji Kering |
| 12. | Pinang | 10.052,24 | 32.360,08 | 3.639,31 | 46.051,63 | 12.532,02 | 387,27 | 83.478 | Biji Kering |
| 13. | Kapuk / Randu | 51,56 | 779,15 | 395,00 | 1.225,71 | 268,87 | 345,08 | 5.806 | Serat Kering |
| 14. | Kemiri | 1.353,97 | 12.611,15 | 2.660,60 | 16.625,72 | 8.544,35 | 677,52 | 21.068 | Biji Kering |
| 15. | Sagu | 1.903,22 | 3.455,76 | 844,55 | 6.203,53 | 1.649,89 | 477,43 | 12.427 | Tepung |
| 16. | Aren | 388,90 | 1.445,46 | 250,51 | 2.084,87 | 914,74 | 632,84 | 5.460 | Gula Merah |
| 17. | Cassiavera | 53,30 | 102,00 | 80,70 | 236,00 | 48,23 | 472,84 | 1.331 | Kulit Kering |
| 18. | Gambir | 13,00 | 91,00 | 11,00 | 115,00 | 57,72 | 634,29 | 216 | Getah Bening |
| 19. | Nilam | 1.018,00 | 808,70 | - | 1.018,00 | 147,34 | 182,19 | 2.759 | Minyak |
| 20. | Sereh Wangi | 20.634,40 | 17.127,80 | - | 20.634,40 | 2.875,83 | 167,90 | 19.952 | Minyak |
| 21. | Jarak | 2,70 | 5,50 | 4,00 | 12,20 | 7,10 | 1.290,91 | 15 | Biji Kering |
| | Jumlah | 188.393,76 | 555.165,24 | 113.623,18 | 835.721,32 | 755.923,45 | 1.361,62 | 821.662 | |

*Sumber: Statistik Perkebunan Aceh 2023 (diolah)*

Kopi merupakan komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomi cukup baik dan menjadi salah satu komoditi ekspor Aceh. Aceh memiliki 2 jenis kopi andalan, yaitu: Robusta dan Arabika. Kopi Robusta terdapat di hampir seluruh kabupaten/kota di Aceh, sementara itu, Kopi Arabika hanya dibudidayakan di 5 (lima) kabupaten, yaitu: Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues dan Pidie.




*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2024*

Gambar 2.114. Perkembangan Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Kopi Robusta dan Arabika

Luas tanaman kopi di Provinsi Aceh secara keseluruhan pada tahun 2021 seluas 113,967 ha dengan melibatkan petani sebanyak 105.880 KK. Untuk perkebunan rakyat komoditi kopi terdiri dati Jenis 2 yaitu: arabika 103.706 Ha dengan petani 80.760 KK

dan robusta 21.653 Ha dengan petani 24.689 KK. Sebaran Kopi berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat dalam Tabel 2.107.

Tabel 2.107.
Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Kopi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

| No. | Kabupaten/ Kota | Luas Areal (Ha) | | | Jumlah (Ha) | Produksi (Ton) | Rata-Rata | Jumlah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBM | TM | TR | | | Produktivitas (Kg/Ha) | Petani (KK) | |
| 1 | Simeulue | | | | | | | | Wujud Produksi |
| 2 | Aceh Singkil | | 10,00 | 63,00 | 73,00 | 5,20 | 520,00 | 156 | Biji Kering |
| 3 | Aceh Selatan | 135,00 | 969,00 | 325,00 | 1.429,00 | 361,00 | 372,55 | 3.579 | |
| 4 | Aceh Tenggara | 349,00 | 140,00 | 22,00 | 511,00 | 103,00 | 735,71 | 792 | |
| 5 | Aceh Timur | 14,00 | 384,00 | 89,25 | 487,25 | 145,37 | 378,57 | 777 | |
| 6 | Aceh Tengah (R) | 74,90 | 908,80 | 136,90 | 1.120,60 | 486,20 | 534,99 | 1.462 | |
| 7 | Aceh Barat | 16,60 | 428,85 | 133,85 | 579,30 | 85,77 | 200,00 | 1.060 | |
| 8 | Aceh Besar | 73,20 | 450,20 | 133,00 | 656,40 | 200,83 | 446,09 | 836 | |
| 9 | Pidie (R) | 2.278,00 | 4.050,00 | 4.214,00 | 10.542,00 | 2.542,00 | 627,65 | 6.604 | |
| 10 | Bireuen | | 2,50 | 1,00 | 3,50 | 1,40 | 560,00 | 35 | |
| 11 | Aceh Utara (R) | 86,00 | 370,00 | 157,00 | 613,00 | 170,00 | 459,46 | 1.778 | |
| 12 | Aceh Barat Daya | 346,00 | 247,20 | 107,80 | 701,00 | 150,05 | 607,00 | 1.610 | |
| 13 | Gayo Lues (R) | 144,25 | 294,37 | 211,62 | 650,24 | 176,62 | 599,99 | 999 | |
| 14 | Aceh Tamiang | 64,00 | 18,00 | 2,00 | 84,00 | 5,22 | 290,00 | 184 | |
| 15 | Nagan Raya | 99,00 | 157,30 | 78,10 | 334,40 | 82,78 | 526,26 | 629 | |
| 16 | Aceh Jaya | 774,00 | 851,00 | 599,00 | 2.224,00 | 754,60 | 886,72 | 2.598 | |
| 17 | Bener Meriah (R) | 180,00 | 1.038,00 | 246,00 | 1.464,oo | 1.232,00 | 1.186,90 | 1.252 | |
| 18 | Pidie Jaya | 98,30 | 37,30 | 34,00 | 169,60 | 12,40 | 332,44 | 295 | |
| 19 | Banda Aceh | | | | | | | | |
| 20 | Sabang | | | | | | | | |
| 21 | Langsa | | | | | | | | |
| 22 | Lhokseumawe | | | 1,00 | 1,00 | | | 10 | |
| 23 | Subulussalam | | 6,00 | 4,00 | 10,00 | 2,78 | 463,33 | 33 | |
| | Aceh | 4.732,25 | 10.362,52 | 6.558,52 | 21.653,29 | 6.517,22 | 628,92 | 24.689 | |
| | Kopi Arabika | | | | | | | | |
| 1 | Aceh Tengah | 598,00 | 45.603,00 | 3.873,00 | 50.074,00 | 37.258,00 | 817,01 | 38.239 | |
| 2 | Aceh Utara | 530,00 | 1.515,00 | 203,00 | 2.248,00 | 780,00 | 514,85 | 2.887 | |
| 3 | Bener Meriah | 3.033,00 | 26.817,00 | 4.672,00 | 34.522,00 | 25.118,00 | 936,64 | 32.095 | |
| 4 | Gayo Lues | 3.328,54 | 1.988,00 | 97,00 | 5.413,54 | 1.391,60 | 700,00 | 7.905 | |
| 5 | Pidie | 4,00 | 41,00 | 12,00 | 57,00 | 19,00 | 463,41 | 65 | |
| | Aceh | 7.493,54 | 75.964,00 | 8.857,00 | 92.314,54 | 64.566,60 | 849,96 | 81.191 | |
| Robusta + Arabika | | 12.225,79 | 86.326,52 | 15.415,52 | 113.967,83 | 71.083,82 | 823,43 | 105.880 | |

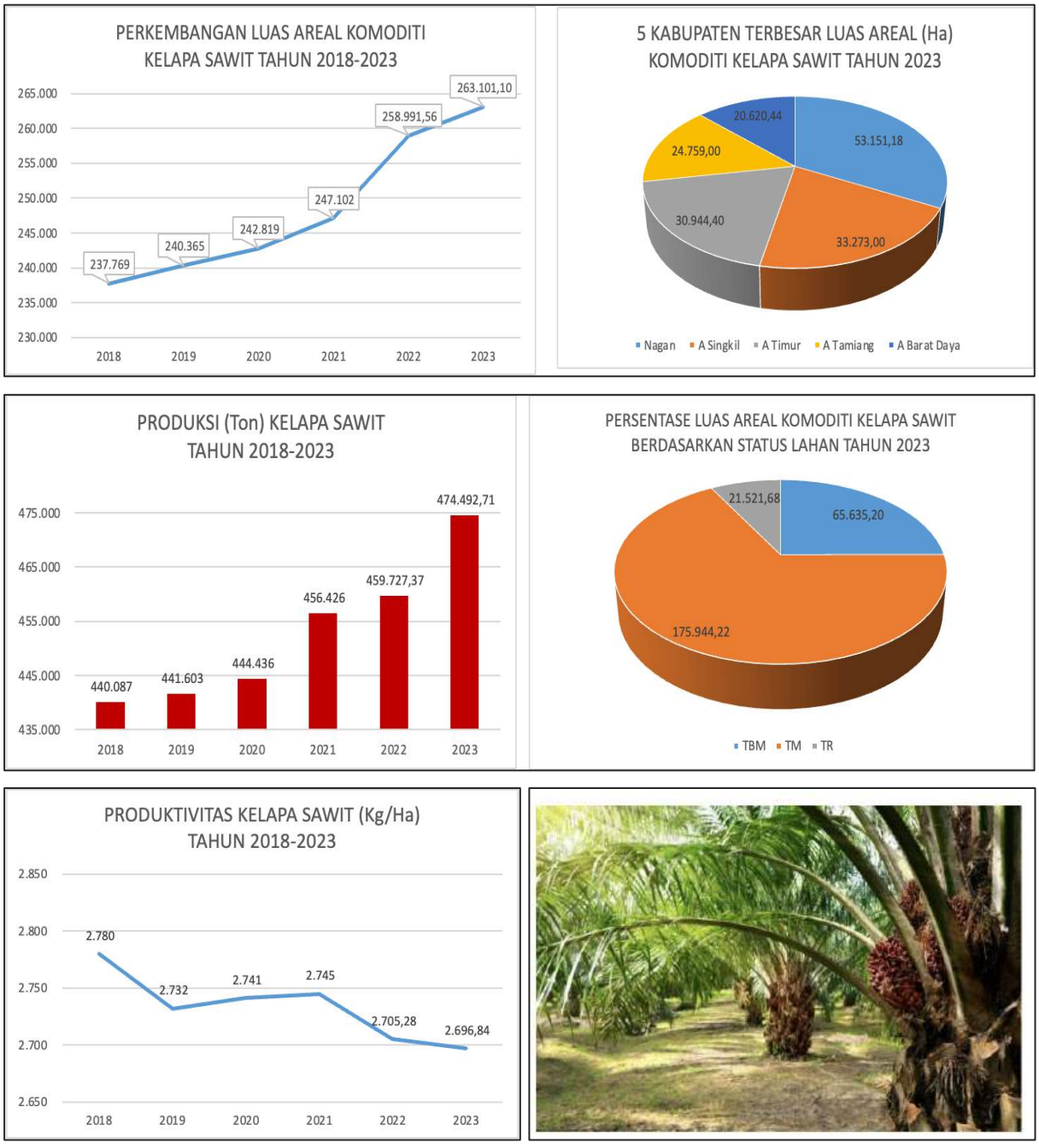
*Sumber: Distanbun (2023)*

Secara keseluruhan pada tahun 2023, produksi kopi sebesar 71.083 Ton, yang terdiri dari; Kopi Robusta 6.517 ton dan Kopi Arabika 64.566 ton. Produktivitas rata-rata sebesar 823 Kg/Ha per tahun (kopi arabika 823 Kg/Ha dan kopi robusta 628 Kg/Ha per tahun).

Komoditi andalan ekspor lainnya adalah Kelapa Sawit, terutama untuk produk Crude Palm Oil (CPO). Luas lahan kelapa Sawit di Aceh mencapai 565.135 Ha, yang terdiri atas: Perkebunan Rakyat, Perkebunan Negara dan Perkebunan Swasta. Sebanyak 52

persen dari total lahan merupakan perkebunan milik rakyat dengan jumlah petani swadaya mencapai 279.000 kepala keluarga

Aceh, merupakan daerah pertama di Indonesia yang mengembangkan Kelapa Sawit dalam skala besar. Saat ini Kelapa Sawit dibudidayakan di 15 kab/kota di Aceh. Antusiasme masyarakat terhadap Kelapa Sawit masih tinggi, yang ditunjukkan dari semakin meningkatnya luas lahan budidaya kelapa sawit. Namun demikian, secara individu rata-rata kepemilikan kebun rakyat relatif rendah sebesar 1,76 ha dengan rentang 0,67-2,9 ha.




*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2024*

Gambar 2.115. Perkembangan Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Kelapa Sawit

Permasalahan utama yang dihadapi petani Kelapa Sawit Aceh adalah produktivitas cukup yang rendah, hanya sebesar 15,25-ton TBS/ha/tahun atau 0,64-ton TBS/panen. Bahkan jika dilihat dalam kurun waktu 5 tahun, terlihat adanya kecenderungan penurunan produktivitas yang signifikan.

Sebaran luas, produksi, produktivitas dan jumlah petani Kelapa Sawit berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat dalam Tabel 2.108.

Tabel 2.108.
Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Kelapa Sawit Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

| No. | Kabupaten/ Kota | Luas Areal (HS) | | | Jumlah (Ha) | Produksi (Ton) | Rata-Rata Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBM | TM | TR | | | | | |
| 1 | Simeulue | 4.440,00 | 2.698,00 | 1.233,00 | 8.371,00 | 2.477,00 | 918,09 | 3.291 | Wujud Produksi |
| 2 | Aceh Singkil | 6.673,00 | 23.374,00 | 3.226,00 | 33.273,00 | 80.778,82 | 3.455,93 | 11.253 | CPO |
| 3 | Aceh Selatan | 1.166,00 | 10.117,00 | 238 | 11.521,00 | 26.178,00 | 2.587,53 | 8.913 | |
| 4 | Aceh Tenggara | 1.075,00 | 2.650,00 | 288 | 4.013,00 | 7.155,00 | 2.700,00 | 1.492 | |
| 5 | Aceh Timur | 13.453,45 | 15.073,37 | 2.417,58 | 30.944,40 | 35.521,29 | 2.356,56 | 17.380 | |
| 6 | Aceh Tengah | | | | | | | | |
| 7 | Aceh Barat | 5.385,26 | 4.747,60 | 523,12 | 10.655,98 | 16.692,56 | 3.516,00 | 8.663 | |
| 8 | Aceh Besar | 301,5 | 922 | 297,5 | 1.521,00 | 555,79 | 602,81 | 756 | |
| 9 | Pidie | 35 | 186 | 47 | 268 | 152 | 817,2 | 194 | |
| 10 | Bireuen | 1.066,00 | 4.491,90 | 477,5 | 6.035,40 | 9.500,40 | 2.115,01 | 4.164 | |
| 11 | Aceh Utara | 1.295,00 | 15.930,00 | 960 | 18.185,00 | 62.398,00 | 3.917,01 | 10.794 | |
| 12 | Aceh Barat Daya | 2.630,94 | 17.511,50 | 478 | 20.620,44 | 24.718,73 | 1.411,57 | 11.890 | |
| 13 | Gayo Lues | | | | | | | | |
| 14 | Aceh Tamiang | 4.026,00 | 20.075,00 | 658 | 24.759,00 | 53.198,90 | 2.650,01 | 11.732 | |
| 15 | Nagan Raya | 8.472,55 | 37.746,75 | 6.931,88 | 53.151,18 | 100.217,64 | 2.655,00 | 27.006 | |
| 16 | Aceh Jaya | 5.540,00 | 8.152,00 | 2.992,00 | 16.684,00 | 23.353,70 | 2.864,78 | 11.559 | |
| 17 | Bener Meriah | 575 | 333 | 392 | 1.300,00 | 402 | 1.207,21 | 1.040 | |
| 18 | Pidie Jaya | 1.195,50 | 370,5 | 10,5 | 1.576,50 | 885,3 | 2.389,47 | 1.845 | |
| 19 | Banda Aceh | | | | | | | | |
| 20 | Sabang | | | | | | | | |
| 21 | Langsa | 58 | 537,6 | 113,6 | 709,2 | 1.189,78 | 2.213,13 | 130 | |
| 22 | Lhokseumawe | 78 | 129 | 2 | 209 | 317,8 | 2.463,57 | 13.614 | |
| 23 | Subulussalam | 8.169,00 | 10.899,00 | 236 | 19.304,00 | 28.800,00 | 2.642,44 | | |
| | ACEH | 65.635,20 | 175.944,22 | 21.521,68 | 263.101,10 | 474.492,71 | 2.696,84 | 146.102 | |
| | 2022 | 65.772,25 | 169.936,95 | 23282,36 | 258.991,56 | 459727,37 | 2705,28 | 144.871 | |
| | 2021 | 59.363 | 166.279 | 21459 | 247.102 | 456.426 | 2.745 | 140.658 | |
| | 2020 | 63.023 | 162.159 | 17.638 | 242.819 | 444.436 | 2.741 | 139.153 | |
| | 2019 | 61.460 | 161.629 | 17.277 | 240.365 | 441.603 | 2.732 | 138.305 | |
| | 2018 | 60.508 | 158291 | 18.969 | 237.769 | 440.087 | 2.780 | 137.063 | |

*Sumber: Distanbun (2024)*

Hasil produksi Kelapa Sawit berupa tandan Buah Segar (TBS) kemudian diolah menjadi *Crude Palm Oil* (CPO). Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (2023), jumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Aceh sebanyak 60 pabrik yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota, dengan kapasitas olah sebesar 11,8 juta ton TBS/tahun. Bila asumsi tingkat operasional 80%, maka kapasitas yang terpasang saat ini terindikasi melebihi jumlah pasokan TBS yang ada. Hal ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas perkebunan sawit yang sebagian besar dikelola oleh petani kecil (smallholder) jauh lebih

rendah dari rata-rata produktivitas nasional, yaitu sebesar 2,838-ton CPO/ha/tahun, sedangkan rata rata-rata produktivitas nasional sebesar 3,745-ton CPO/ha/tahun.

Sementara itu, Kakao juga menjadi komoditi unggulan perkebunan di Aceh. Komoditi Kakao tersebar di 22 kabupaten/kota dengan total luas lahan perkebunan Kakao di seluruh wilayah Aceh mencapai 93 ribu hektar lebih. Wilayah utama penghasil kakao di Aceh adalah Kabupaten Aceh Tenggara, Pidie Jaya, Aceh Utara, Pide, Aceh Timur dan Kabuten Aceh Besar.

Produksi Kakao Aceh pada tahun 2023 sebesar 36.598 Ton dengan produktivitas 706,63 Kg/Ha/Thn. Produksi ini dihasilkan dari luas lahan sebesar 93.430 Ha yang utamanya tersebar di 14 kab/kota penghasil Kakao di Aceh. Produksi kakao mengalami penurunan sebesar 924 Ton atau 2,22 persen bila dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya. Penurunan ini diakibatkan oleh banyaknya tanaman yang tidak produktif lagi serta serangan hama penyakit dan gangguan satwa liar (gajah). Sebaran luas areal, produksi dan produktivitas Kakao menurut kabupaten/kota dapat dilihat dalam Tabel 2.109.

Tabel 2.109.
Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Kakao Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

| No. | Kabupaten/ Kota | Luas Areal (HS) | | | Jumlah (Ha) | Produksi (Ton) | Rata-Rata Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBM | TM | TR | | | | | |
| 1 | Simeulue | 893,00 | 572,00 | 641,00 | 2.106,00 | 142,40 | 248,95 | 1.400 | Wujud Produksi Biji Kering |
| 2 | Aceh Singkil | 24,00 | 74,00 | 187,00 | 285,00 | 64,23 | 867,97 | 773 | |
| 3 | Aceh Selatan | 134,00 | 700,00 | 520 | 1.354,00 | 346,00 | 494,29 | 2.410 | |
| 4 | Aceh Tenggara | 7.929,00 | 11.638,00 | 1.982,00 | 21.549,00 | 10.533,00 | 905,05 | 20.651 | |
| 5 | Aceh Timur | 2.669,00 | 9.178,50 | 1.725,00 | 13.572,50 | 6.057,81 | 660,00 | 12.145 | |
| 6 | Aceh Tengah | 8,1 | 221,9 | 82,5 | 312,5 | 135 | 608,38 | 651 | |
| 7 | Aceh Barat | | 633,50 | 337,5 | 971,00 | 407,30 | 642,94 | 1.415 | |
| 8 | Aceh Besar | 1.202,60 | 870,5 | 931,05 | 3.004,15 | 484,21 | 556,24 | 3.055 | |
| 9 | Pidie | 1.050,00 | 4.865,00 | 3.657,00 | 9.572,00 | 2.099,00 | 431,45 | 11.646 | |
| 10 | Bireuen | 77,7 | 4.388,80 | 614,7 | 5.081,20 | 2.690,30 | 612,99 | 8.331 | |
| 11 | Aceh Utara | 3.219,00 | 5.747,00 | 437 | 9.403,00 | 3.816,00 | 664,00 | 18.763 | |
| 12 | Aceh Barat Daya | 29,00 | 721,20 | 420 | 1.170,20 | 413,42 | 573,24 | 2.498 | |
| 13 | Gayo Lues | 851,62 | 2.387,09 | 293,1 | 3.531,81 | 1.909,67 | 800 | 4.355 | |
| 14 | Aceh Tamiang | 184 | 724,00 | 166 | 1.074,00 | 348,00 | 480,66 | 2.670 | |
| 15 | Nagan Raya | 3,00 | 133,47 | 1.588,53 | 1.725,00 | 66,40 | 497,49 | 6.650 | |
| 16 | Aceh Jaya | 56,00 | 155,10 | 431,00 | 642,10 | 65,20 | 420,37 | 256 | |
| 17 | Bener Meriah | 22,00 | 1.234,00 | 122 | 1.378,00 | 1.026,00 | 831,44 | 1.825 | |
| 18 | Pidie Jaya | 4.663,00 | 6.911,00 | 3.640,00 | 15.214,00 | 5.528,80 | 800,00 | 17.920 | |
| 19 | Banda Aceh | | | | | | | | |
| 20 | Sabang | 61,00 | 144 | 450 | 655 | 142,2 | 987,5 | 969 | |
| 21 | Langsa | 0,5 | 15,97 | 8 | 24,47 | 8,35 | 522,86 | 170 | |
| 22 | Lhokseumawe | 42 | 89,5 | 81 | 131,5 | 80,50 | 899,44 | 151 | |

| No. | Kabupaten/ Kota | Luas Areal (HS) | | | Jumlah (Ha) | Produksi (Ton) | Rata-Rata Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBM | TM | TR | | | | | |
| 23 | Subulussalam | 204 | 389 | | 674 | 235 | 604,11 | 1.072 | |
| | ACEH | 23.322,52 | 51.793,53 | 18.314,38 | 93.430,43 | 36.598,79 | 706,63 | 119.776 | |
| | 2022 | 23.511,05 | 52.147,64 | 18.971,83 | 94.630,52 | 36.595,64 | 701,77 | 120.493 | |
| | 2021 | 26.823 | 56.664 | 13.668 | 97.155 | 40.724 | 719 | 124.868 | |
| | 2020 | 27.597 | 57.825 | 13.973 | 99.395 | 41.648 | 720 | 127.072 | |
| | 2019 | 27.987 | 57.618 | 13.662 | 99.267 | 41.093 | 713 | 126.880 | |
| | 2018 | 30.085 | 54,756 | 14.500 | 99.341 | 39.295 | 718 | 127.951 | |

*Sumber: Distanbun (2023)*

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir *trend* produksi kakao terus mengalami penurunan. Penurunan ini diakibatkan oleh banyaknya tanaman yang tidak produktif dan sudah tua, kurangnya perawatan, serangan hama penyakit, gangguan satwa liar (gajah) serta adanya konversi dan alih fungsi lahan. Kondisi tersebut menimbulkan keprihatinan berbagai pemangku kepentingan, apalagi saat ini permintaan Kakao di pasar global terus meningkat. Pemerintah Aceh dengan dukungan dari berbagai mitra pembangunan, saat ini sedang membangkitkan kembali Kakao Aceh yang dimulai dengan membangun pusat-pusat pelatihan, pusat pembibitan, dan melatih Cocoa Doctor yang memiliki ketrampilan dan keahlian dalam penanganan budidaya Kakao.

Karet yang merupakan salah satu komoditi perkebunan yang terus bertahan di Aceh, meskipun perkembangannya tidak signifikan. Karet yang ada saat ini merupakan tanaman karet yang telah lama dikembangkan. Tanaman karet tersebar di 20 kabupaten/kota, dimana kabupaten penghasil Karet tersebar adalah Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Tamiang dan Aceh Jaya.

Tabel 2.110.
Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Karet Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

| No. | Kabupaten/ Kota | Luas Areal (HS) | | | Jumlah (Ha) | Produksi (Ton) | Rata-Rata Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBM | TM | TR | | | | | |
| 1 | Simeulue | 2.495,00 | 735,00 | 577,00 | 3.807,00 | 983,00 | 1.337,41 | 4.325 | Wujud Produksi K3 |
| 2 | Aceh Singkil | 247,00 | 1.473,00 | 807,00 | 2.527,00 | 1.330,12 | 903,00 | 2.756 | |
| 3 | Aceh Selatan | 50,00 | 299,00 | 572,00 | 921,00 | 134,00 | 448,16 | 1.319 | |
| 4 | Aceh Tenggara | 1.520,00 | 3.756,00 | 664,00 | 5.940,00 | 3.219,00 | 857,03 | 8.642 | |
| 5 | Aceh Timur | 3.385,85 | 17.383,20 | 2.776,05 | 23.545,10 | 15.724,32 | 904,57 | 12.702 | |
| 6 | Aceh Tengah | | | | | | | | |
| 7 | Aceh Barat | 6.926,02 | 14.762,95 | 2.968,50 | 24.657,47 | 14.762,95 | 1.000,00 | 22.588 | |
| 8 | Aceh Besar | 30,00 | 145,50 | 140,00 | 315,50 | 42,99 | 295,46 | 333 | |
| 9 | Pidie | | 14,00 | 126,00 | 140,00 | | | 132 | |
| 10 | Bireuen | 34,20 | 2.698,10 | 371,40 | 3.103,70 | 2.388,00 | 885,07 | 2.676 | |
| 11 | Aceh Utara | 592,00 | 7.002,00 | 1.185,00 | 8.779,00 | 4.971,00 | 709,94 | 8.816 | |
| 12 | Aceh Barat Daya | 17,50 | 320,00 | 167,00 | 504,50 | 181,06 | 565,81 | 1.001 | |

| No. | Kabupaten/ Kota | Luas Areal (HS) | | | Jumlah (Ha) | Produksi (Ton) | Rata-Rata Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBM | TM | TR | | | | | |
| 13 | Gayo Lues | | 20,00 | 27,00 | 47,00 | 10,00 | 500,00 | 41 | |
| 14 | Aceh Tamiang | 1.474,00 | 11.742,00 | 1.154,00 | 14.370,00 | 8.219,40 | 700,00 | 10.941 | |
| 15 | Nagan Raya | 129,84 | 5.046,69 | 1.333,02 | 6.509,55 | 4.138,28 | 820,00 | 4.052 | |
| 16 | Aceh Jaya | 3.861,00 | 4.780,00 | 4.990,00 | 13.631,00 | 4.075,10 | 852,53 | 5.494 | |
| 17 | Bener Meriah | | | | | | | | |
| 18 | Pidie Jaya | 304,00 | 10,00 | 78,00 | 392,00 | 6,80 | 680,00 | 190 | |
| 19 | Banda Aceh | | | | | | | | |
| 20 | Sabang | | | | | | | | |
| 21 | Langsa | 3,60 | 167,58 | 10,50 | 181,68 | 100,70 | 600,91 | 201 | |
| 22 | Lhokseumawe | | 5,50 | 7,50 | 13,00 | 340,00 | 618,18 | 17 | |
| 23 | Subulussalam | 286,00 | 2.531,00 | 650,00 | 3.467,00 | 1.555,00 | 614,38 | 3.639 | |
| | ACEH | 21.356,01 | 72.891,52 | 18.603,97 | 112.851,50 | 61.845,12 | 848,45 | 89.865 | |
| | 2022 | 22.609,46 | 72.362,52 | 19.940,02 | 114.912,00 | 61.596,76 | 851,22 | 91.187 | |
| | 2021 | 25.376 | 73.195 | 18.503 | 117.074 | 63.736 | 871 | 92.285 | |
| | 2020 | 27.538 | 74.348 | 19.664 | 121.551 | 63.854 | 859 | 96.019 | |
| | 2019 | 29.437 | 74.922 | 18.762 | 123.121 | 65.652 | 876 | 96.701 | |
| | 2018 | 32.792 | 74.611 | 21.625 | 129.028 | 64.926 | 870 | 100.205 | |

*Sumber: Distanbun, ATAP 2024*

Untuk meningkatkan nilai tambah produksi Karet di Aceh, telah dibangun sebuah perusahaan pengolahan karet yang berlokasi di Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat. Pabrik ini direncanakan mampu memproduksi hingga 2.500 ton rubber crumb atau karet remah per bulan. kehadiran pabrik ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani karet di Aceh.

Aceh juga memiliki potensi Kelapa yang cukup besar. Potensi kelapa rakyat dapat dilihat dari keadaan luas tanam, luas panen, produksi dan potensi peningkatan produksi tanaman. Pada tahun 2022 luas areal tercatat seluas 102.779,69 Ha, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan areal sebesar 1,93 persen. Penurunan areal ini disebabkan adanya konversi lahan perkebunan Kelapa ke komoditi lainnya serta alih fungsi lahan.

Pada tahun 2023, luas perkebunan kelapa tercatat seluas 102.600 Ha, menurun cukup signifikan dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 104.800 Ha. Sebaran komoditi Kelapa dapat dilihat dalam Statistik Perkebunan Aceh Tahun 2023.

Pada tahun 2023, produksi tanaman kelapa rakyat di Aceh mencapai 63.070 Ton dengan produktivitas rata-rata 839 kg/ha/thn. Dari table di atas dapat dilihat adanya penurunan produksi dan produktivitas dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurunnya produksi dan produktivitas Kelapa disinyalir akibat dari menurunnya luas areal perkebunan dan juga usia tanaman yang sudah tua namun tidak adanya penggantian (*replanting*). Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Kelapa Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.111.

Tabel 2.111.
Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Kelapa Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

| No. | Kabupaten/ Kota | Luas Areal (HS) | | | Jumlah (Ha) | Produksi (Ton) | Rata-Rata Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBM | TM | TR | | | | | |
| 1 | Simeulue | 2.874,30 | 4.017,70 | 1.295,00 | 8.187,00 | 4.138,00 | 1.029,94 | 3.736 | Wujud Produksi Kopra |
| 2 | Aceh Singkil | 333,00 | 1.249,30 | 2.171,00 | 3.753,30 | 1.124,37 | 900,00 | 8.537 | |
| 3 | Aceh Selatan | 434,00 | 5.508,00 | 1.045,oo | 6.987,00 | 3.330,00 | 604,58 | 11.763 | |
| 4 | Aceh Tenggara | 412,00 | 1.131,00 | 48,00 | 1.591,00 | 849,00 | 750,66 | 8.371 | |
| 5 | Aceh Timur | 875,95 | 6.475,70 | 224,00 | 7.575,65 | 6.522,65 | 1.007,25 | 10.808 | |
| 6 | Aceh Tengah | 1,55 | 42,05 | 8,40 | 52,00 | 6,80 | 161,71 | 131 | |
| 7 | Aceh Barat | 409,75 | 2.586,15 | 357,50 | 3.353,40 | 1.293,00 | 499,97 | 3.168 | |
| 8 | Aceh Besar | 2.106,97 | 7.127,30 | 3.296,01 | 12.530,28 | 5.462,38 | 766,40 | 10.720 | |
| 9 | Pidie | 658,00 | 7.285,00 | 794,00 | 8.737,00 | 5.901,00 | 810,02 | 19.361 | |
| 10 | Bireuen | 764,50 | 15.207,00 | 445,00 | 16.416,50 | 17.107,00 | 1.124,94 | 21.041 | |
| 11 | Aceh Utara | 272,00 | 13.820,00 | 981,00 | 15.073,00 | 9.950,00 | 719,97 | 20.757 | |
| 12 | Aceh Barat Daya | 102,00 | 1.672,00 | 191,00 | 1.965,00 | 903,36 | 540,29 | 1.473 | |
| 13 | Gayo Lues | 113,00 | 294,00 | 23,00 | 407,00 | 118,00 | 401,36 | 1.712 | |
| 14 | Aceh Tamiang | 272,00 | 472,00 | 1.044,60 | 767,00 | 249,77 | 529,17 | 4.281 | |
| 15 | Nagan Raya | 516,05 | 1.080,25 | 2.458,00 | 2.640,90 | 271,01 | 250,88 | 4.497 | |
| 16 | Aceh Jaya | 408,00 | 2.341,00 | 4,00 | 5.207,00 | 2.052,00 | 876,55 | 3.866 | |
| 17 | Bener Meriah | | 9,00 | 278,50 | 13,00 | 3,70 | 411,11 | 10 | |
| 18 | Pidie Jaya | 710,00 | 2.850,50 | | 3.839,00 | 2.517,00 | 883,00 | 7.193 | |
| 19 | Banda Aceh | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Sabang | 65,00 | 943,00 | 1.072,00 | 2.080,00 | 580,00 | 615,06 | 1.840 | |
| 21 | Langsa | 2,70 | 39,18 | 1,35 | 43,23 | 20,17 | 514,80 | 204 | |
| 22 | Lhokseumawe | 22,00 | 571,50 | 8,00 | 601,50 | 372,50 | 651,79 | 805 | |
| 23 | Subulussalam | 89,00 | 418,00 | 274,00 | 781,00 | 299,00 | 715,31 | 1.042 | |
| | ACEH | 11.441,77 | 75.139,63 | 16.019,36 | 102.600,76 | 63.070,71 | 839,38 | 145.316 | |
| | 2022 | 11.744,17 | 74.901,77 | 16.133,75 | 102.779,69 | 62.787,78 | 838,27 | 145.420 | |
| | 2021 | 11.426 | 77.360 | 16.014 | 104.800 | 66.434 | 859 | 149.441 | |
| | 2020 | 13.154 | 74.839 | 15.576 | 103.568 | 63.769 | 852 | 148.413 | |
| | 2019 | 12.688 | 74.847 | 15.413 | 102.947 | 63.772 | 852 | 149.573 | |
| | 2018 | 12.452 | 74.391 | 15.359 | 102.203 | 63.500 | 854 | 148.818 | |

*Sumber: Statistik Perkebunan Aceh (2024)*

Komoditi yang juga menjadi incaran dunia internasional adalah Nilam. Minyak Nilam merupakan salah satu produksi atsiri terbesar yang diekspor oleh Indonesia. Minyak nilam Aceh diekspor ke berbagai negara seperti Perancis, Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, India, Spanyol dan Belanda. Aceh pernah menjadi penyumbang terbesar (80 persen) dari ekspor Nilam Indonesia, namun saat ini hanya mampu menyumbang 20 persen.

Keberadaan minyak nilam Aceh sangatlah istimewa. Nilam Aceh merupakan nilam terbaik dunia yang dapat menghasilkan rendemen minyak mentah nilam (*Patchouli Oil*)

di atas 3% dan kandungan Patchouli Alkohol (PA) di atas 30%. Keistimewaan minyak nilam Aceh kemudian diformalisasi dengan Sertifikasi Indikasi Geografis (IG) Nilam Aceh dari Menkumham RI (IG 00 2012 000004/10 September 2013).

Aceh memiliki agroklimat yang sangat sesuai untuk tanaman nilam, 16 dari 23 Kab/Kota di Aceh merupakan wilayah penghasil Nilam. Produksi tertinggi adalah Kabupaten Aceh Selatan dengan angka mencapai 62 ton/tahun, kemudian Kabupaten Aceh Jaya di peringkat kedua dengan produksi mencapai 207 ton/tahun serta Aceh Tamiang dengan produksi mencapai 20 ton/tahun pada peringkat ketiga. Produktifitas minyak nilam di Aceh sangat tergantung pada kesuburan lahannya. Namun rata-rata produktifitas minyak nilam di Aceh berkisar antara 120 – 150 kg/ha.

Tabel 2.112.
Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Kelapa Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

| No. | Kabupaten/ Kota | Luas Areal (Ha) | | Produksi (Ton) | Rata -Rata Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tanam | Panen | | | | |
| 1 | Simeulue | | | | | | Wujud Produksi Minyak |
| 2 | Aceh Singkil | 6 | | | | 8 | |
| 3 | Aceh Selatan | 411 | 321 | 62 | 193,15 | 1.516 | |
| 4 | Aceh Tenggara | 26 | 16 | 2,2 | 137,5 | 34 | |
| 5 | Aceh Timur | | | | | | |
| 6 | Aceh Tengah | | | | | | |
| 7 | Aceh Barat | 162 | 117 | 22,82 | 195,04 | 286 | |
| 8 | Aceh Besar | 48,5 | 44 | 8,7 | 197,73 | 69 | |
| 9 | Pidie | | | | | | |
| 10 | Bireuen | 10 | 4,5 | 0,75 | 166,67 | 25 | |
| 11 | Aceh Utara | 3 | 1 | 0,2 | 200 | 25 | |
| 12 | Aceh Barat Daya | 55,5 | 48,5 | 5,91 | 121,86 | 135 | |
| 13 | Gayo Lues | 118 | 85 | 14,45 | 170 | 292 | |
| 14 | Aceh Tamiang | 5 | 2 | 0,16 | 80 | 29 | |
| 15 | Nagan Raya | | | | | | |
| 16 | Aceh Jaya | 162 | 162 | 28,7 | 177,16 | 271 | |
| 17 | Bener Meriah | | | | | | |
| 18 | Pidie Jaya | 10 | 7 | 1,4 | 200 | 49 | |
| 19 | Banda Aeeh | | | | | | |
| 20 | Sabang | 1 | 0,7 | 0,05 | 70 | 20 | |
| 21 | Langsa | | | | | | |
| 22 | Lhokseumawe | | | | | | |
| 23 | Subulussalam | | | | | | |
| | ACEH | 1.018,00 | 808,7 | 147,34 | 182,19 | 2.759 | |
| | 2022 | 1.321,00 | 1.015,00 | 181,4 | 17872 | 3.301 | |
| | 2021 | 1.212 | 871 | 159 | 182 | 3.179 | |
| | 2020 | 1.228 | 1.022 | 178 | 174 | 3.300 | |
| | 2019 | 1.219 | 864 | 225 | 261 | 3.166 | |
| | 2018 | 1.210 | 780 | 178 | 228 | 3.318 | |

*Sumber: BPS, 2024*

Selain komoditi yang telah diuraikan di atas, beberapa komoditi lainnya yang dibudidayakan dalam luasan yang besar di Aceh diantaranya: Pala, Pinang, Kemiri, dan Tembakau.

C. Peternakan

Komoditas peternakan masih menjadi andalan tersendiri pemerintah Provinsi Aceh, sektor peternakan berperan dalam pemenuhan kebutuhan pangan asal hewan bagi masyarakat Aceh, dan mampu meningkatkan peningkatan perekonomian masyarakat disamping sektor lainnya. Populasi ternak di Aceh tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.113.

Tabel 2.113.
Populasi Ternak di Aceh Tahun 2020-2024

| No | Jenis Hewan Ternak | Jumlah Populasi (Ekor)/Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Sapi Potong | 435.376 | 455.177 | 533.593 | 229.295 | 270.224 |
| 2 | Sapi Perah | 19 | 28 | 19 | 21 | 11 |
| 3 | Kerbau | 103.866 | 112.402 | 124.161 | 40.969 | 58.456 |
| 4 | Kambing Potong | 634.073 | 649.511 | 657.012 | 190.057 | 200.873 |
| 5 | Kambing Perah | 686 | 451 | 631 | 1.129 | 546 |
| 6 | Domba | 102.000 | 100.760 | 118.914 | 16.531 2 | 20.233 |
| 7 | Babi | 1.361 | 1.631 | 2.086 | 4.279 | 2.415 |
| 8 | Kuda | 2.996 | 3.310 | 1.802 | 1.811 | 1297 |
| 9 | Ayam Ras Pedaging | 31.232.588 | 34.047.386 | 14.498.541 | 35.758.787 | 35.891.791 |
| 10 | Itik | 1.721.992 | 1.714.738 | 2.381.401 | 501.024 | 540.230 |
| 11 | Itik Manila | 613.828 | 465.571 | 540.562 | 540.580 | N/A |
| 12 | Puyuh | 95.181 | 80.202 | 92.946 | 92.992 | N/A |

*Sumber: Dinas Peternakan Aceh (2025)*

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa telah terjadi penurunan populasi ternak yang sangat signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023 dan 2024. Sebagai contoh populasi Sapi Potong dari 533.590 pada tahun 2022 menjadi hanya 229.295 ekor pada tahun 2023 dan 270.224 pada tahun 2024. Sementara itu ternak kerbau yang pada tahun 2022 sejumlah 124.161 ekor, menjadi hanya 40.969 ekor tahun 2023 dan 200.873 ekor pada tahun 2024.

Dalam upaya Pemerintah mencapai swasembada daging dari hewan ruminansia dan non ruminansia Provinsi Aceh membutuhkan berbagai upaya terutama menyangkut sumber daya manusia dan sumber daya alam. Pemerintah Provinsi Aceh terus menerus berupaya meningkatkan sektor peternakan, berbagai langkah dilakukan melalui Dinas Peterkanan dan Kesehatan Hewan melalui revitalisasi peternakan sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru. Produksi daging dan telur berdasarkan menurut kabupaten/kota tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.114.

Tabel 2.114.
Produksi Daging dan Telur Berdasarkan Kab/Kota di Aceh Tahun 2020-2024

| No | Jenis Daging | Jumlah Produksi (Ton)/Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Sapi Potong | 435.376 | 455.177 | 533.593 | 11.011 | 11.006 |
| 2 | Sapi Perah | 19 | 28 | 19 | 21 | N/A |
| 3 | Kerbau | 103.866 | 112.402 | 124.161 | 1.916 | 1.945 |
| 4 | Kambing Potong | 634.073 | 649.511 | 657.012 | 1.361 | 1.342 |
| 5 | Kambing Perah | 686 | 451 | 631 | 648 | N/A |
| 6 | Domba | 102.000 | 100.760 | 118.914 | 118.958 | 389.415 |
| 7 | Babi | 1.361 | 1.631 | 2.086 | 2.093 | 5.813 |
| 8 | Kuda | 2.996 | 3.310 | 1.802 | 1.811 | N/A |
| 9 | Ayam Ras Pedaging | 31.232.588 | 34.047.386 | 14.498.541 | 14.498.562 | 43.729.453 |
| 10 | Itik | 1.721.992 | 1.714.738 | 2.381.401 | 2.381.428 | 351.132 |
| 11 | Itik Manila | 613.828 | 465.571 | 540.562 | 540.580 | 88.115 |
| 12 | Puyuh | 95.181 | 80.202 | 92.946 | 92.992 | 5.034 |

*Sumber: Dinas Peternakan Aceh (2025)*

Penurunan produksi dan populasi ternak secara umum di Aceh pada tahun 2023–2024 disebabkan oleh beberapa faktor utama, baik yang bersifat biologis, ekonomi, maupun kebijakan. Berikut adalah beberapa penyebabnya:

1) Wabah Penyakit Ternak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang melanda Aceh sejak 2022 berdampak besar terhadap populasi sapi. PMK menyebabkan kematian terutama pada pedet (anak sapi), serta menurunkan produktivitas sapi dewasa. Selain itu, terdapat kasus penyakit Brucellosis, parasistik dan infeksius, serta dan Penyakit Reproduksi Lainnya, yang menyebabkan keguguran, infertilitas, dan penurunan angka kelahiran sapi.
2) Pemotongan Betina Produktif Banyak sapi betina produktif yang dipotong, baik secara legal maupun ilegal, karena harga daging yang tinggi. Hal ini menyebabkan penurunan populasi secara signifikan karena jumlah kelahiran tidak bisa mengimbangi pemotongan
3) Menurunnya Minat Beternak dan Alih Fungsi Lahan Minimnya Regenerasi Peternak: Generasi muda di Aceh semakin berkurang yang tertarik pada usaha peternakan, sehingga jumlah peternak menurun.
4) Alih Fungsi Lahan Lahan penggembalaan berkurang akibat konversi menjadi lahan pertanian, perkebunan, atau pembangunan infrastruktur seperti di wilayah Kota Lhokseumawe, hal ini berdampak pada ketersediaan pakan hijauan bagi ternak.
5) Krisis pakan yang disebabkan oleh rendahnya minat budidaya pakan ternak, musim kemarau panjang dan banjir menyebabkan berkurangnya produksi Hijauan Pakan Ternak (HPT), serta kenaikan harga pakan konsentrat:

6) Perdagangan dan Penyelundupan Ternak ke Luar Daerah Permintaan Tinggi dari Luar Aceh: Banyak sapi Aceh yang dijual ke luar daerah, terutama ke Sumatera Utara, Riau, dan wilayah lain yang membutuhkan suplai daging sapi. Perdagangan Ilegal: Adanya perdagangan sapi yang tidak terkontrol menyebabkan populasi lokal menurun tanpa ada penggantian yang cukup.

7) Program Pemerintah yang Belum Optimal dalam Pemulihan Populasi yang disebabklan oleh keterbatasan Inseminasi Buatan (IB): Walaupun program IB berjalan, tingkat keberhasilannya masih rendah di beberapa daerah karena kurangnya tenaga inseminator dan kualitas semen beku yang kurang optimal.

Upaya yang dilakukan melalui revitalisasi peternakan sejak beberapa tahun lalu adalah peningkatan kemampuan peternak dan pendukungnya, peningkatan ketahanan pangan, akses petani terhadap teknologi, pengolahan hasil-hasil peternakan dan pemasaran yang bisa diterima oleh masyarakat konsumen sebagai kelompok *demand*, perbaikan iklim usaha peternakan secara menyeluruh, peningkatan daya saing dan nilai tambah melalui peningkatan mutu serta efisiensi distribusi dan pemasaran.

Tabel 2.115.
Sebaran Padang Pengembalaan Masyarakat Berdasarkan Kabupaten/Kota

| Rekap Pendataan Padang Penggembalaan Bidang Pakan di Kabupaten/Kota 2022 | Kabupaten | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pidie | Pidie Jaya | Bireuen | Bener Meriah | Aceh Timur | Aceh Utara | Aceh Jaya | Nagan Raya |
| Luas Padang Penggembalaa n (Hektar) | 1000 | 700 | 1694 | 4166 | 45917,51 | 556 | 6438 | Umum: 444 Kebun sawit: 194287,49 |
| Status Kepemilikan Padang Penggembala | Milik masyarakat: Geumpang, Padang Tiji, Laweung | Belum ditetapkan | Tanah masyarakat | Penetapan oleh Pemda | Dinas / Masyarakat | Milik Pemerintah | Pribadi (pinjam pakai) | Milik Desa dan Perusahaan |
| Luas HPT (Hektar) | 50 | 22 | 901 | | 50 | 160 | 173,75 | 25 |
| Produksi Jerami | 10% dari total produksi dimanfaatkan oleh peternak sebagai pakan | 700-800 Kg | Tidak ada | | Tidak ada | 96.042 Ton | | 11.684 |
| Jenis Rumput Dibudidayakan | King Grass, Odot dan Bracharia Humidicola (BH) | King Grass, Odot dan Bracharia Humidicola (BH) | Gajah | Odot, Gajah mini | Odot, Gajah mini | Odot, rumput Gajah, rumput Mexico | King Grass, Pakchong, Sorgum, Rumput Gajah | Rumput Gajah, rumput Raja, rumput Lampung, Odot, Gajah Thailand, BH, Indigofera, BD, Guetemala |
| Bantuan Yang Pernah Diterima dari Pusat | Belum ada | Tidak ada | Tidak ada | Lahan HMT 2017 | Lahan HMT 2017 | Tidak ada | | 2,5 Ha |
| Data Kelompok Terdaftar Pada SIMLUHTAN | Ada, Keputusan Bupati ND.520/786/Kep. 30/2020 Tanggal 7 Desember 2020 | Ada | Ada | Ada sekitar seratusan, terekap di Dinas 40-50 kelompok | Ada | 150 Kelompok | 748 Kelompok | 98 Kelompok |
| Data Kelompok Yang Telah Ditetapkan Kepala Daerah | Ada, Keputusan Bupati ND.520/786/Kep. 30/2020 Tanggal 7 Desember 2020 | Ada | Ada | Ada | Tidak ada | Ada, harus ambil ke Kesbangpol | 739 Kelompok | 212 Kelompok |
| Jumlah Poultry Shop | 7 unit | 38 unit | 1 unit | 45 unit | 48 unit | 64 unit | 23 unit | 61 unit |
| Jumlah Fungsional Wastukan | Tidak ada | Tidak ada | Belum ada | Belum ada | Belum ada | Belum ada, sedang penyetaraan fungsional | 1 orang | Tidak ada |

| Rekap Pendataan Padang Penggembalaan Bidang Pakan di Kabupaten/Kota 2022 | Kabupaten | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pidie | Pidie Jaya | Bireuen | Bener Meriah | Aceh Timur | Aceh Utara | Aceh Jaya | Nagan Raya |
| Jumlah Pabrik Pakan Mini | Tidak ada | Tidak ada | Belum ada | Belum ada | Belum ada | Belum ada | Belum ada | Tidak ada |
| Jumlah Peternak Memberi Pakan Tambahan | 40% | 10% | 70% | Tidak ada | 4-5 Kelompok | Ada tergantung pada kelompok ternak dan pribadi kelompok tani ternak | | 94 orang |

*Sumber : Dinas Peternakan Aceh. 2025*

Untuk memastikan keberlanjutan produksi peternakan, dibutuhkan pakan yang memadai. Saat ini umumnya masyarakat memberikan Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang diperoleh dari padang penggembalaan. Jumlah HPT di Aceh sebesar 3.192 ha, yang terdapat pada 265.413 padang penggembalaan. Padang penggembalaan ini umumnya dikelola secara tradisional oleh peternak/kelompok petani ternak. Sebaran padang penggembalaan di seluruh Aceh dapat dilihat pada Gambar di atass.

## D. Kehutanan

Luas kawasan hutan Aceh sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.580/MenLHK/Setjen/Set.1/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh adalah seluas 3.550.390.23 Ha. Kawasan hutan Aceh berdasarkan luas dan fungsi, Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK 6616/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Aceh. Kawasan hutan Aceh berdasarkan luas dan fungsi dapat dilihat pada Tabel 2.116.

Tabel 2.116.
Kawasan Hutan Aceh Berdasarkan Luas dan Fungsinya

| Kawasan Hutan | Luas (ha) | Persentase |
|---|---|---|
| Hutan Konservasi | 1.058.364,40 | 29.81 |
| Hutan Lindung | 1.781.677,92 | 50.18 |
| Hutan Produksi Tetap (HP) | 549.794,88 | 15.49 |
| Hutan Produksi Terbatas (HPT) | 145.178,34 | 4.09 |
| Hutan Produksi Konversi | 15.374,88 | 0.43 |
| Jumlah | 3.550.390,23 | 100,00 |

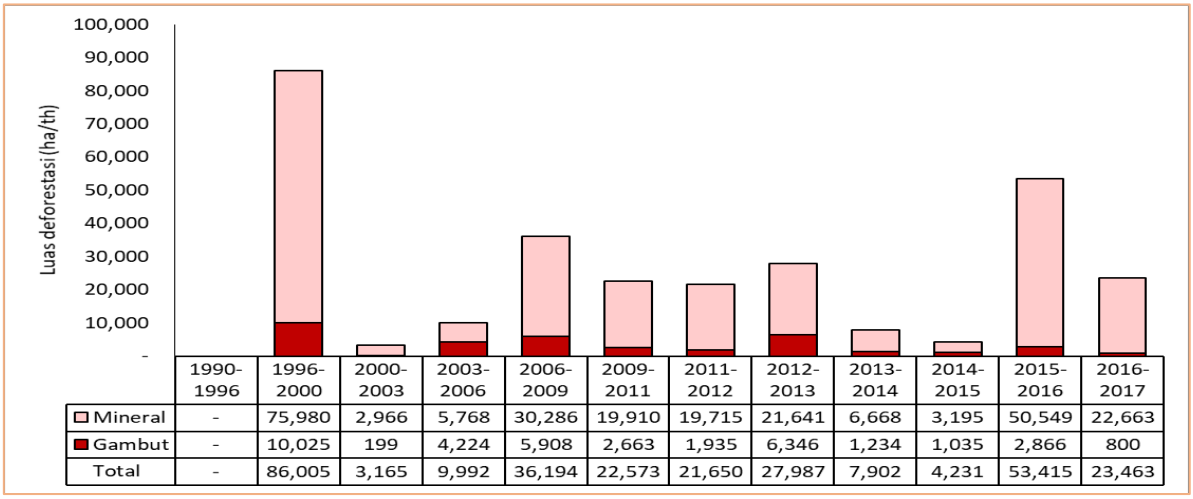
*Sumber: SK Menteri LHK Nomor SK.580/MenLHK/Setjen/Set.1/12/2018*

Tabel 2.116 memberikan informasi kawasan hutan Aceh didominasi oleh hutan lindung seluas 1.781.677,92 Ha atau 50.18 persen dan hutan konservasi seluas 1.058.364,40 Ha atau 29.81 persen dari total luas kawasan hutan. Luas kawasan hutan Aceh sebesar 62,55 persen dari luas total daratan sebesar 5.675.840,82 Ha. Ditinjau dari

peran hutan dalam mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan maka kondisi hutan Aceh perlu dijaga dengan baik.

### D1. Deforestasi

Pendekatan analisis kerusakan hutan dan lahan dilakukan menggunakan analisis perubahan tutupan lahan pada periode tertentu yang dikelompokan dan dikalkulasi dengan metodelogi tertentu menjadi nilai kehilangan tutupan hutan (*deforestasi*). Berdasarkan baseline emisi aceh menggunakan data series selama 27 tahun terakhir (1990–2017), Total Deforestasi mencapai ± 675.864 hektar, atau rata-rata 25.032 hektar per tahun (ILEDSA, Bappeda Aceh 2020). Berbeda dengan situasi provinsi lain di Pulau Sumatera, pada periode 1990-1996 deforestasi belum terjadi di Aceh mengingat pada saat tersebut konflik bersenjata sedang terjadi sehingga aktifitas dalam sektor berbasis lahan masih sangat terbatas. Deforestasi Aceh baru dimulai pada periode 1996 -2000 dengan luas mencapai 86,000. Setelah periode tersebut luas deforestasi tahunan cenderung menurun. Luas deforetasi meningkat kembali pada periode 2006-2013 pasca peristiwa gempa bumi dan tsunami Aceh, sejalan dengan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan kondisi lahannya, rata-rata deforestasi lebih banyak terjadi di tanah mineral yang mencapai luas 21.675 ha per tahun (87%) dan dalam jumlah sedikit di tanah gambut mencapai luas 3.356 hektar per tahun (13%). sebagaimana yang tersaji pada Gambar 2.116.




| | 1990-1996 | 1996-2000 | 2000-2003 | 2003-2006 | 2006-2009 | 2009-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mineral | - | 75,980 | 2,966 | 5,768 | 30,286 | 19,910 | 19,715 | 21,641 | 6,668 | 3,195 | 50,549 | 22,663 |
| Gambut | - | 10,025 | 199 | 4,224 | 5,908 | 2,663 | 1,935 | 6,346 | 1,234 | 1,035 | 2,866 | 800 |
| Total | - | 86,005 | 3,165 | 9,992 | 36,194 | 22,573 | 21,650 | 27,987 | 7,902 | 4,231 | 53,415 | 23,463 |

*ILEDSA, Bappeda Aceh Tahun 2020*

Gambar 2.116. Luas deforestasi di Aceh pada periode 1990–2017

Baseline deforestasi yang terjadi di Aceh selama periode 1990 -2012 sebagian besar terjadi di luar kawasan hutan negara (APL) mencapai 406.500 hektar (73 % dari luas keseluruhan), sedangkan deforestasi yang terjadi di dalam kawasan hutan sebesar 152.366 hektar atau 27% (ILEDSA, Bappeda Aceh 2020). Deforestasi yang tinggi di luar kawasan hutan sebagian besar adalah deforestasi terencana (deforestasi plan) untuk tujuan pengembangan wilayah dan kegiatan budidaya berbasis lahan khususnya pada kawasan yang telah dibebani izin.

Berdasarkan hasil pemantauan tahunan terhadap perubahan kelas tutupan lahan berhutan menjadi kelas tutupan lahan tidak berhutan di Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2020, diperoleh hasil bahwa selama tahun 2019 s.d 2020 terdapat seluas ± 1.956,83 hektar tutupan hutan yang hilang atau terdeforestasi. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.117.

Tabel 2.117.
Deforestasi Aceh Tahun 2013-2024

| Tahun | Luas (Ha) | Luas Kawasan Hutan SK.580/MENLHK/SETJENSET.1/12/2018 | Persentase |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15.140 | 3.550.390,23 | 0,43 |
| 2020 | 14.759 | 3.550.390,23 | 0,42 |
| 2021 | 8.617 | 3.550.390,23 | 0,24 |
| 2022 | 9.383 | 3.550.390,23 | 0,26 |
| 2023 | 8.906 | 3.550.390,23 | 0,25 |
| 2024 | 6.780,35 | 3.550.390,23 | 0,19 |

*Sumber: DLHK Aceh, 2025*

Tabel 2.118.
Hutan Rusak (Deforestasi) Provinsi Aceh Periode Tahun 2022-2023

| No | Kabupaten/ Kota | Fungsi Kawasan Hutan | | | | | Tubuh Air | APL | Jumlah (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KSA/KPA | HL | HPT | HP | HPK | | | |
| 1 | Aceh Barat | | 276,69 | | 27,95 | | 0,51 | 158,28 | 463,43 |
| 2 | Aceh Barat Daya | | 14,43 | 16,77 | | | | 35,73 | 66,92 |
| 3 | Aceh Besar | | 27,62 | | 55,70 | | | 2,11 | 85,43 |
| 4 | Aceh Jaya | | 44,88 | 21,75 | 60,82 | | 1,77 | 412,62 | 541,83 |
| 5 | Aceh Selatan | 542,54 | 54,81 | 94,95 | 6,83 | | | 606,01 | 1305,15 |
| 6 | Aceh Singkil | 2,66 | 1,37 | | 52,15 | 4,49 | | 67,51 | 128,17 |
| 7 | Aceh Tamiang | | | | 31,40 | | | 70,72 | 102,12 |
| 8 | Aceh Tengah | 36,70 | 211,97 | | 45,50 | | 0,01 | 84,10 | 378,27 |
| 9 | Aceh Tenggara | 34,01 | 9,01 | | | | | 28,48 | 71 ,50 |
| 10 | Aceh Timur | | 61,05 | | 286,22 | | 7,91 | 293,31 | 648,50 |
| 11 | Aceh Utara | | 9,70 | | 128,60 | | | 404,36 | 542,66 |
| 12 | Bener Meriah | | 80,59 | | 256,19 | | | 75,96 | 412,73 |
| 13 | Bireuen | | 33,84 | | 235,62 | | | 49,51 | 318,97 |
| 14 | Gayo Lues | 6,77 | 39,72 | 13,07 | 2,09 | | | 21,06 | 82,71 |
| 15 | Subulussalam | 38,30 | 39,44 | | 11,67 | | | 248,99 | 338,39 |
| 16 | Nagan Raya | | 110,24 | 48,81 | 69,79 | | 0,28 | 133,00 | 362,12 |
| 17 | Pidie | | 77,63 | | 12,53 | | | 11,83 | 102,00 |
| 18 | Pidie Jaya | | 48,17 | 12,66 | | | | 364,85 | 425,68 |
| 19 | Simeulue | | 7,28 | | 59.69 | | | 336.81 | 403,78 |
| Jumlah | | 660,98 | 1148,44 | 208,01 | 1342,74 | 4,49 | 10,48 | 3405,21 | 6780,35 |

Catatan:
1. Perhitungan luas deforestasi (dalam hektar) menggunakan proyeksi Cylindrical Equal Area (World)
2. Data didapatkan dengan analisa spasial identity (data administrasi permendagri, data fungsi kawasan hutan SK. 6616/2021 dan penutupan lahan tahun 2022 dan 2023
3. Sumber daya BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2024

Aktifitas deforestasi tersebut terbesar terjadi di dalam Kawasan Hutan yakni seluas ± 3.375,14 hektar dan seluas ± 3.405,21 hektar lainnya terjadi di Areal Penggunaan Lain (APL). Kerusakan hutan yang menjadi penyebab deforestasi di Aceh masih didominasi oleh kegiatan illegal berupa: pengembangan komoditi non kehutanan meliputi; pertanian, perkebunan, pertambangan, infrastruktur serta kebakaran hutan dan lahan.

Menurut data KLHK, Aceh memiliki tren deforestasi yang menurun. Hal tersebut menyebutkan Aceh memiliki tren kehilangan tutupan hutan yang terus menurun di 2019 seluas 15.140 hektare, 2020 seluas 14.759 hektare dan cukup stabil 2 tahun terakhir 2021 dan 2022. Memperkirakan Aceh telah kehilangan tutupan hutan seluas ± 9.383 Ha sepanjang 2022. Kehilangan tutupan hutan seluas 8.906 hektare sepanjang 2023, juga terjadi di dalam kawasan ekosistem leuser (KEL) seluas 4.854 hektare. berdasarkan pantauan dan analisis dari citra satelit serta data glad alert dari global forest watch, sebanyak 50 persen aktivitas penggundulan hutan terjadi di area penggunaan lain (APL), mencapai 4.422 hektare, sisanya terjadi dalam kawasan hutan. Hasil interpretasi (HAkA), aktivitas deforestasi dalam kawasan hutan paling tinggi berada di wilayah hutan lindung, yakni mencapai 1.598 hektare, 1.574 hektare di hutan produksi, dan 832 hektare di Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil. "Jika dirinci, kegiatan deforestasi paling tinggi pada 2023, terjadi di Kabupaten Aceh Selatan dengan luas hutan yang hilang mencapai 1.854 hektare,". Persentase tutupan hutan di Aceh masih menjadi yang terbaik di Sumatera dan menduduki peringkat ke-9 di Indonesia pada 2022, karena luas hutan lahan mineral dan rawa gambut yang tersebar di bagian barat Aceh Selatan. "Sebanyak 55 persen hutan Aceh masih luas dibanding rata-rata hutan di Indonesia, luas hutan kita masih di atas rata-rata nasional," Kabupaten dengan dugaan kehilangan tutupan hutan terbesar adalah kabupaten Aceh Selatan dengan luas 1.883 Ha, diikuti Aceh Jaya 776 Ha dan Aceh Timur 753 Ha. Sekitar 56% dugaan hilangnya tutupan hutan terjadi di Kawasan Hutan. Taman Nasional Gunung Leuser Aceh (TNGL Aceh) yang merupakan kawasan konservasi ternyata memiliki tren kehilangan tutupan hutannya yang terus menurun. Di Tahun 2022 dugaan kehilangan hutan di TNGL Aceh hanya seluas 179 Hektar atau merupakan yang terendah selama 8 tahun terakhir. Tren kehilangan hutan terus meningkat. Kehilangan hutan sangat masif terjadi ada sekitar 716 hektar hutan yang hilang selama tahun 2022. Angka ini bahkan lebih tinggi dibanding akumulasi 4 tahun sebelumnya.

Kerusakan juga disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan terjadi pada tanah mineral dan lahan gambut secara umum dipicu oleh kegiatan pembukaan lahan untuk sektor pertanian dan perkebunan melalui pembakaran. Sebagian besar kejadian kebakaran hutan dan lahan di Aceh merupakan tipe kebakaran bawah khususnya yang terjadi pada lahan gambut dengan dampak berupa asap dan hilangnya vegetasi serta komoditi yang dikembangkan di atasnya. Tipe kebakaran ini juga sangat sulit untuk dikendalikan serta memerlukan biaya, waktu serta teknologi (high cost). Kebakaran hutan dan lahan terjadi 63 kali. Lahan yang terbakar seluas 214 hektar.

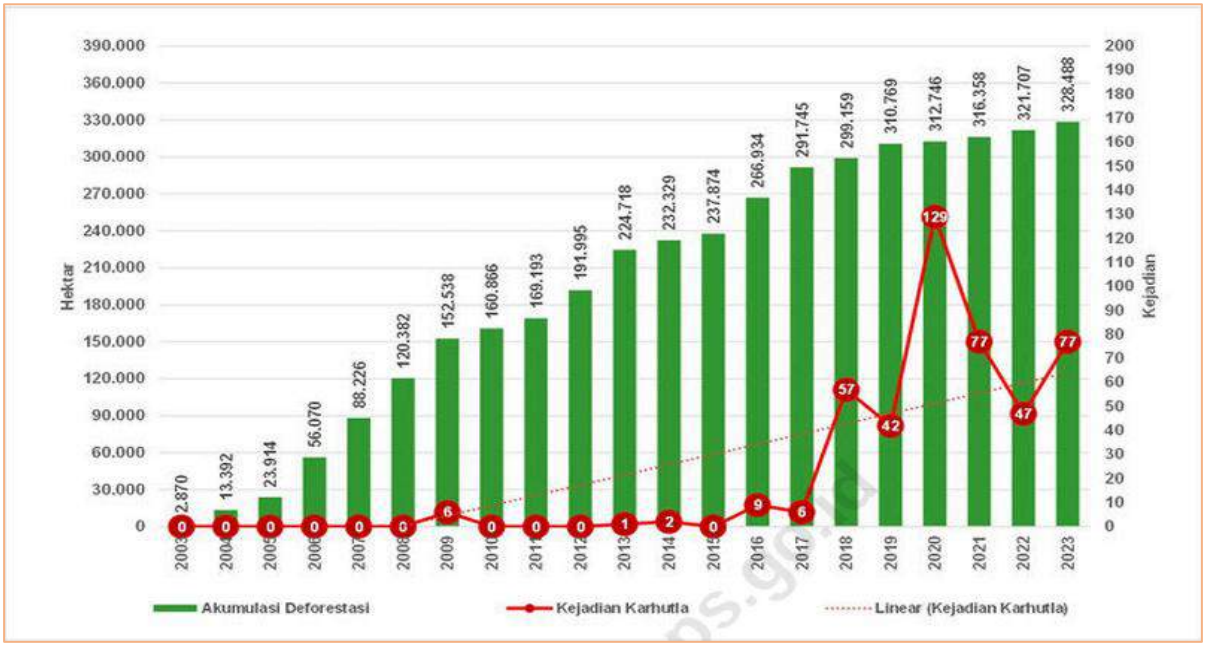
Lahan gambut Aceh tersebar di wilayah Barat-Selatan Aceh meliputi; Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam dengan luas mencapai ± 338.164 Ha. Dari luas tersebut, sekitar ± 256.362 Ha

(75,8 %) berada di APL, dengan fungsi budidaya ± 159.651 Ha. Trend kebakaran hutan dan lahan selama kurun waktu tahun 2015-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.119.

Tabel 2.119.
Kebakaran Hutan Dan Lahan Aceh Tahun 2015 s.d. 2024.

| Provinsi | Tahun | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Aceh | 1.025 | 9,158,45 | 3,865,16 | 1,284,70 | 730,00 | 1,078,00 | 788,00 | 175,00 | 1.642,65 | 214,00 |

*Sumber: DLHK Aceh Tahun 2025*




*Sumber: BPS, 2024*

Gambar 2.117. Kebakaran Hutan dan Lahan Aceh Tahun 2003-2023

Berdasarkan luasan, kebakaran hutan dan lahan di Aceh terjadi penurunan. Upaya mitigasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui peningkatan patroli oleh tenaga pengamanan hutan (PAMHUT), Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) pada masing-masing wilayah KPH. Sosisalisasi dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan bersama-sama TNI, POLRI dan melibatkan masyarakat terutama kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

Deforestasi di Aceh tahun 2015 sampai 2024 menurun. Deforestasi tertinggi pada tahun 2015 mencapai 23.072 ha atau 0,648 persen dari total luas kawasan hutan. Persentase deforestasi di Aceh disajikan pada Tabel 2.120.

Tabel 2.120.
Persentase Deforestasi di Aceh Tahun 2015-2024

| Tahun | Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) | Luas Kawasan Hutan (Ha) | Persentase |
|---|---|---|---|
| 2015 - 2016 | 23.072 | 3.557.928,00 | 0,648 |
| 2016 - 2017 | 15.515 | 3.557.928,00 | 0,435 |
| 2017 - 2018 | 7.502 | 3.563.813,00 | 0,211 |

| Tahun | Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) | Luas Kawasan Hutan (Ha) | Persentase |
|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 | 11.608 | 3,550,390.23 | 0,327 |
| 2019 - 2020 | 1.956 | 3,550,390.23 | 0,055 |
| 2020-2021 | 1.956 | 3,550,390.23 | 0,055 |
| 2021-2022 | 1.956,83 | 3,550,390.23 | 0,055 |
| 2023-2024 | 6.780,35 | 3,550,390.23 | 0,190 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. 2025*

Penyebab deforestsi antara lain perambahan permukiman liar, perladangan liar, kebakaran hutan dan *Illegal Logging.* Deforestasi dapat menimbulkan beragam masalah dan kerugian dalam bentuk hilangnya sumber daya hutan dan kemerosotan fungsi ekologis yang tak ternilai. Dalam rangka menekan laju deforestasi Pemerintah Aceh telah melakukan operasi pemberantasan *Illegal logging* dan tertanganinya kasus *illegal logging*, operasi pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

Deforestasi juga berakibat berkurangnya habitat satwa. Beberapa organisasi masyarakat sipil mencatat bahwa laju berkurangnya populasi satwa dilindungi atau satwa kunci di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) pada tahun 2011 – 2017 mencapai angka cukup tinggi. Setidaknya populasi gajah yang hilang mencapai 14 persen. sedangkan harimau mencapai 4 persen. dan orangutan sebesar 4 persen.

Berkurangnya satwa-satwa kunci tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya konflik dengan manusia secara terus menerus. Baik secara tersembunyi maupun secara terbuka. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mencatat bahwa konflik antara orangutan dengan manusia pada tahun 2017 adalah berjumlah 20 kasus atau lebih besar dibanding tahun 2015 yang hanya sebanyak 17 kasus. Konflik juga terjadi antara manusia dengan harimau. Pada tahun 2017 BKSDA menghimpun data konflik tersebut mencapai 10 kejadian. padahal pada tahun 2016 hanya berjumlah 1 kejadian.

Selain itu, masih tingginya intensitas konflik gajah liar dan masyarakat di Aceh, dengan jumlah kasus sebanyak 872 kasus dalam kurun waktu 2015-2024. Tahun 2024 Dari 290 kasus tersebut, kasus konflik gajah sebanyak 108 kasus, Harimau 43 kasus, Orang Hutan 30 kasus, Beruang 17 Kasus, Buaya 8 Kasus, dengan jumlah konflik yang tertangani 206 kasus atau setara 71,03 persen.Tingginya konflik disebabkan maraknya kasus perambahan hutan, alih fungsi hutan dan praktik penebangan liar. Penyebab kematian gajah didominasi konflik gajah dengan masyarakat yakni 57 persen, sementara 10 persen akibat perburuan dan 33 persen mati secara alami

### D2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan kritis di Aceh cenderung meningkat dari tahun 2013 sampai 2017. Lahan kritis yang direhabilitasi pada tahun 2017 seluas 23.876 ha atau 24.10 persen dari total luas hutan dan lahan kritis. Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Aceh tahun 2016 sampai 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.121.

Tabel 2.121.
Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Aceh Tahun 2016-2024

| Tahun | Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha) | Luas total hutan dan lahan kritis (Ha) | Persentase |
|---|---|---|---|
| 2016 | 23.876 | 99.052.00 | 24.10 |
| 2017 | 23.876 | 99.052.00 | 24.10 |
| 2018 | 3.144 | 95,884.00 | 12.87 |
| 2019 | 12.520 | 94.949,00 | 15.89 |
| 2020 | 4.009 | 82.429,00 | 4,86 |
| 2021 | 2.456 | 56.753,26 | 4,32 |
| 2022 | 2.194 | 56.753,00 | 3,86 |
| 2023 | 3.157 | 164.110,00 | 1,92 |
| 2024 | 3.437 | 164.110,00 | 2,46 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. 2025*

Upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis masih penting untuk dilakukan karena luas hutan dan lahan kritis masih tergolong tinggi. Untuk meningkatkan efektifitas rehabilitasi hutan dan lahan tersebut memerlukan beberapa strategi kunci diantaranya adalah: 1) identifikasi dan validasi serta menetapkan prioritas penanganan pemulihan lahan pada kawasan yang memiliki dampak penting; 2) melakukan analisis kesesuaian lahan dan syarat tumbuh komoditi yang akan digunakan; 3) keterlibatan masyarakat dan para pihak dalam pelaksanaannya; 4) mempertimbangkan karakterisitik sosial budaya masyarakat setempat; dan 5) memberikan jaminan tidak adanya gangguan bagi lahan yang telah direhabilitasi.

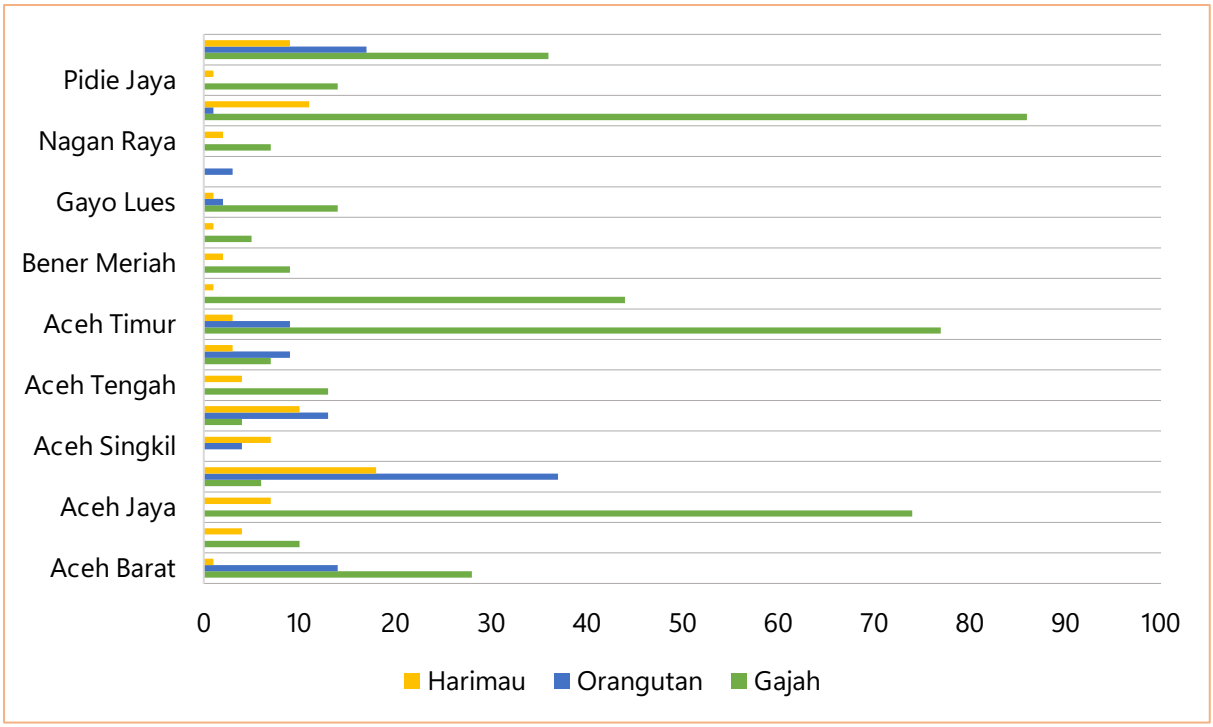
Pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar, satwa liar yang berkonflik dengan manusia meliputi; Gajah Sumatera (Elephas masximus sumatranus), Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) Orangutan Sumatera (Pongo abelii). Dari 3 species satwa liar tersebut yang paling dominan berkonflik dengan manusia adalah gajah terutama di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Birueun, Aceh Besar, dan Aceh Selatan. Secara rinci penjelasan data konflik antara manusia dan satwa liar di aceh tahun 2024 dan konflik satwa liar di aceh tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.122 dan Gambar 2.118.

Tabel 2.122.
Data Konflik antara Manusia dan Satwa Liar di Aceh Tahun 2024

| No. | Jenis Satwa Liar | Jumlah Konflik | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| 1. | Gajah Sumatera | 583 | Kabupaten Pidie, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang (8 Lokasi, 5 CRU) |
| 2. | Harimau Sumatera | 113 | Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Bener Meriah, Aceh Tengah, Nagan Raya, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Subulussalam. |
| 3. | Orangutan Sumatera | 91 | Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Gayo Lues, Langsa, Pidie, Subulussalam. |

*Sumber: BKSDA Aceh Tahun 2024*

Mengingat keberadaan habitat gajah sebagian besar berada diluar kawasan konservasi, maka penanganan konflik yang dilakukan dilaksanakan melalui pembentukan CRU (Conservation Response Unit) yang menjadi unit mitigasi konflik gajah. Aceh memiliki 7 unit CRU yaitu: CRU Trumon di Kabupaten Aceh Selatan, CRU Alue Kuyun di Kabupaten Aceh Barat, CRU Sampoiniet di Kabupaten Aceh Jaya, CRU Mila di Kabupaten Pidie, CRU DAS Peusangan di Kabupaten Bener Meriah, CRU Cot Girek di Kabupaten Aceh Utara, dan CRU Serbajadi di Aceh Timur. Namun, dari 7 unit CRU hanya 2 unit CRU yang masih aktif yaitu: CRU DAS Peusangan di Kabupaten Bener Meriah dan CRU Trumon di Kabupaten Aceh Selatan yang dana operasionalnya didukung oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Mitra lainnya. Penanggulangan konflik satwa liar dilakukan dengan beberapa pendekatan kegiatan seperti: penggiringan gajah/mitigasi konflik dengan menggunakan mercon, pembangunan pagar kejut (electric fence), penanaman tanaman yang tidak disukai gajah/komoditi berkesusaian, dan membentuk kelompok Masyarakat Peduli Konflik Gajah (MPKG).




*Sumber: DLHK Aceh,2025*

Gambar 2.118. Konflik Satwa Liar di Aceh Tahun 2017-2024

Selain unit CRU dan beberapa kegiatan tersebut di atas sebagai upaya penanggulangan konflik manusia dan satwa liar jangka pendek dan menengah, pemerintah Aceh bersama pihak terkait telah melakukan pendekatan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang melalui inisiatif koridor hidupan liar.

Inisiatif pendekatan koridor hidupan liar ini didasarkan kepada kebutuhan peran dan dukungan para pihak. Sebagaimana diketahui, intensitas kejadian konflik manusia-satwa liar (terutama gajah) terjadi pada kawasan atau areal yang berbeda kewenangan dengan areal/kawasan konservasi. Intensitas kejadian konflik ini terjadi di 19 kabupaten/kota yang disebabkan oleh beberapa penyebab, diantaranya deforestasi, kegiatan pembangunan termasuk di dalamnya permukiman, jalan raya, dan penambangan.

Gubernur Aceh melalui Surat Keputusan Nomor 522/1246/2023 tanggal 27 Juni 2023 telah menetapkan Peta Indikatif Koridor Hidupan Liar Sebagai Kawasan Ekosistem Esensial Provinsi Aceh, dimana inisiatif ini telah melalui beberapa proses teknis, diantaranya inventarisasi data satwa liar (intensitas kejadian konflik), delineasi, sosialisasi di bentang utara, timur, tengah, dan barat-selatan. Sebagaimana diketahui, jumlah koridor hidupan liar tersebut sejumlah 9 koridor dengan luasan 943.194 hektar.

Salah satu amanah Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2019 Pemerintah Aceh diwajibkan menyusun Pergub tentang Strategi Rencana Aksi Pengelolaan (SRAP) satwa liar, salah satu rencana aksi yang akan dilaksanakan yaitu penetapan Koridor hidupan liar.

Pengelolaan koridor hidupan liar sangat diperlukan dalam upaya perlindungan dan pengawetan satwa liar di luar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Disamping itu, pengelolaan koridor satwa liar dapat membantu mengurangi dampak negatif dari kehilangan habitat dan fragmentasi habitat satwa liar. Saat ini, pemerintah Aceh bersama mitra pembangunan telah menginisiasi kegiatan yang mendukung koridor hidupan liar. Dari 9 koridor hidupan liar indikatif, 2 koridor hidupan liar telah memulai kegiatan pendukung yaitu koridor Cot Girek, meliputi Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Pengelolaan koridor Cot Girek yang dikenal juga sebagai kawasan ekosistem penting tersebut telah pula memiliki forum pengelolaan melalui Surat Keputusan Bupati dengan anggota yang berasal dari lintas sektor dan para pihak. Koridor lain yang sedang berproses melalui tahapan koordinasi adalah Koridor Pidie-Pidie Jaya.

Penetapan dan pengelolaan koridor hidupan liar diutamakan pada ekosistem yang merupakan habitat dari beberapa spesies kunci yang merupakan jenis satwa prioritas terancam punah yang dilindungi sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 180/IV/KKH/2015.

Pengelolaan koridor hidupan liar sangat diperlukan dalam upaya perlindungan dan pengawetan satwa liar di luar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Disamping itu, pengelolaan koridor satwa liar dapat membantu mengurangi dampak negatif dari kehilangan habitat dan fragmentasi habitat satwa liar.

Kawasan koridor merupakan areal yang dapat berfungsi sebagai jembatan bagi pergerakan satwa-satwa yang melintas dari satu kawasan habitat ke habitat lainnya atau sebagai tempat mereka bermigrasi (sebagai pengguna koridor atau user), dapat berupa jalan yang dapat dilalui baik oleh satwa arboreal maupun terestrial. Untuk satwa terestrial yang perlu diperhatikan adalah kawasan tersebut dapat memenuhi kebutuhan sumber pakan dan air untuk mereka makan dan minum maupun dapat digunakan sebagai tempat istirahat saat mereka melintas menuju hutan fragmen atau blok hutan lainnya, Bagi satwa arboreal diperlukan kesinambungan tajuk untuk menjamin keamanan pergerakan mereka dari satu tajuk pohon ke tajuk pohon lainnya.

Pengelolaan koridor hidupan liar sampai dengan 20 (dua puluh) tahun yang akan datang adalah untuk meningkatkan kualitas habitat dan kelangsungan hidup

keanekaragaman hayati (*population viability*) melalui upaya mengurangi ancaman dan gangguan sehingga memungkinkan pergerakan satwa liar dalam suatu bentang alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Koridor Hidupan Liar.

### D3. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

PDRB Aceh beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. PDRB ADHB mengalami peningkatan dari tahun 2020 senilai Rp.166.372,32 (Milyar) menjadi Rp.243.202,09 (Milyar) pada tahun 2024. PDRB ADHK juga mengalami peningkatan dari tahun 2020 senilai Rp.131.580,97 (Milyar) menjadi Rp.153.780,44 (Milyar) pada tahun 2024. PDRB Aceh dan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Aceh tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.123.

Tabel 2.123.
PDRB Aceh dan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Aceh
Tahun 2020-2024

| No | Lapangan Usaha/industri | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | PDRB ADHB (Milyar Rp) | 166.372,32 | 184.979,88 | 209.698,36 | 227.018,20 | 243.202,09 |
| 2 | PDRB ADHK (Milyar Rp) | 131.580,97 | 135.274,04 | 140.971,72 | 146,932,42 | 153.780,44 |
| 3 | Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB ADHB (Miliar Rp) | 2.074,44 | 1.768,15 | 1.959,68 | 2.144,53 | 1.989,33 |
| 4 | Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB ADHK (Miliar Rp) | 1.667,01 | 1.382,88 | 1.412,75 | 1.434,46 | 1.338,76 |
| 5 | Distribusi Persentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB ADHB (%) | 1,25 | 0,96 | 0,93 | 0,94 | 0,82 |
| 6 | Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%) | -0,67 | -17,04 | 2,16 | 1,54 | -6,67 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2025*

Tabel 2.123, memberikan informasi kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB mengalami penurunan. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB ADHB dari tahun 2020 senilai Rp.2.074,44 (Milyar) menjadi Rp.1.989,33 (Milyar) pada tahun 2024. Distribusi persentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB ADHB dari tahun 2020 sebesar 1,25 persen menjadi 0,82 persen pada tahun 2024. Selanjutnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB ADHK juga mengalami penurunan dari tahun 2020 senilai Rp.1.667,01 (Milyar) menjadi Rp.1.338,76 (Milyar) pada tahun 2024. Kontribusi sektor kehutanan terhadap laju pertumbuhan PDRB ADHK sebesar -0,67 persen menjadi -6,67 persen.

### D4. Rasio Luas Kawasan Lindung

Pada tahun 2015, Kementerian Kehutanan mencatat bahwa luas Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil hanya tersisa 81.338 hektar, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 103/MenLHK-II/2015. Artinya, dalam waktu 18 tahun (1997-2015), kawasan tersebut telah mengalami penyusutan sebesar 21.162 hektar akibat aktivitas perambahan.

Penyusutan ini tidak berhenti pada 2015 saja. Pada 2016 dan 2017, SM Rawa Singkil terus mengalami kehilangan luas hutan. Berdasarkan data dari Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HaKA) yang menggunakan *Geographic Information System* (GIS), luas tutupan hutan SM Rawa Singkil pada 2016 tercatat sekitar 77.227 hektar. Sedangkan pada 2017, angka ini turun lagi menjadi 76.707 hektar, dengan kehilangan mencapai 5.095 hektar. Salah satu faktor utama penyusutan ini adalah konversi hutan menjadi lahan perkebunan.

Lebih memperihatinkan lagi, data dari Januari hingga Juli 2022 menunjukkan bahwa tutupan hutan SM Rawa Singkil berkurang sebanyak 338 hektar. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya: 165 hektar di tahun 2021, 43 hektar di 2020, dan hanya 28 hektar di 2019.

Namun, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (SK No: SK 6616/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021) tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Aceh, SM Rawa Singkil kini memiliki luas 82.188 hektar. Kawasan ini terbagi di tiga daerah: Kabupaten Aceh Selatan (58.112 hektar), Kabupaten Aceh Singkil (20.867 hektar), dan Kota Subulussalam (3.206 hektar). Kawasan ini mencakup beberapa kecamatan, yaitu Trumon, Trumon Tengah, Trumon Timur, Kuala Baru, Singkil, Kota Baharu, Rundeng, dan Longkib, sebagaimana yang tersaji Tabel 2.124.

Tabel 2.124.
Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan 2016-2024

| Tahun | Luas kawasan lindung (ha) | Total luas kawasan hutan (ha) | Rasio |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1.788.265.00 | 3.557.928.00 | 0.5 |
| 2017 | 1.794.350.00 | 3.563.813.00 | 0.5 |
| 2018 | 1,781,677.92 | 3,550,390.23 | 50.18 |
| 2019 | 1,781,677.92 | 3,550,390.23 | 50.18 |
| 2020<br>2021 | 2.840.042,32 | 3,550,390.23 | 79,99 |
| 2022 | 2.840.042,32 | 3,550,390.23 | 79,99 |
| 2023 | 2.642.964,03 | 3.333.973.89 | 79,27 |
| 2024 | 2.642.964,03 | 3.333.973.89 | 79,27 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2025*

Tabel 2.124 memberikan informasi perkembangan rasio luas kawasan lindung terhadap total kawasan hutan di Aceh dari tahun 2016 hingga 2024. Pada tahun 2016, sekitar 50 persen dari total kawasan hutan di Aceh telah ditetapkan sebagai kawasan lindung. Angka ini meningkat signifikan pada tahun 2021, mencapai hampir 80 persen, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas perlindungan terhadap kawasan hutan. Meskipun luas kawasan lindung tetap stabil sekitar 2,8 juta hektar pada tahun 2021 hingga 2024, rasio perlindungan tetap di kisaran 79 persen, menunjukkan bahwa mayoritas kawasan hutan di Aceh kini telah dilindungi dengan baik.

## D5. Penyelesaian Konflik Tenurial

Konflik Tenurial Dalam Kawasan Hutan adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengunaan kawasan hutan. Jenis konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan Aceh seperti batas kawasan, pemilikan, dan penguasaan lahan, perizinan, akibat tumpang tindih kebijakan, pemanfaatan dan pengelolaaan sumber daya hutan oleh masyarakat hukum adat dan perhutanan sosial. Pencegahan konflik tenurial dalam kawasan hutan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh melalui UPTD KPH dengan upaya pemetaan potensi konflik, sosialisasi penyuluhan, pemantapan batas kawasan hutan serta pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar hutan.

Konflik tenurial adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dan lahan serta sumberdaya alam lainnya. Melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, salah satu skema penyelesaian konflik tenurial melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Menindaklanjuti peraturan diatas Gubernur membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi (Inver) Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan pada tahun 2017 dan berlanjut hingga tahun 2019 melalui SK Nomor 522.12/1351/2019. Dalam Keputusan Gubernur tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh sebagai ketua Tim Inver.

Tujuan dari skema TORA didalam Kawasan hutan adalah untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat didalam kawasan hutan dan menyelesaikan sengketa konflik dalam kawasan hutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK /SETJEN/PLA.2/9/2021 tanggal 10 September 2021 Tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) terdapat seluas 95.387 Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten Kota yang terdiri dari beberapa kriteria penguasaan lahan seperti yang tersaji dalam Tabel 2.125.

Tabel 2.125.
Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) berdasarkan Kabupaten/Kota di Aceh, 2024

| Kabupaten | Kawasan HPK tidak produktif | Lahan Garapan Pertanian, Perkebunan dan Tambak | Permukiman Transmigrasi Beserta Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Yang Sudah Memperoleh Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Transmigrasi | Permukiman, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum | Ket- |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceh Barat | | | | 121 | 121 |
| Aceh Barat Daya | | 113 | | 0 | 113 |
| Aceh Besar | 1.276 | 7.524 | | 128 | 8.928 |
| Aceh Jaya | | 939 | | 479 | 1.418 |
| Aceh Selatan | | 522 | | 36 | 558 |
| Aceh Singkil | 2.704 | 10.070 | 2.446 | 36 | 15.256 |
| Aceh Tamiang | | 5.427 | 940 | 38 | 6.405 |

| Kabupaten | Kawasan HPK tidak produkti | Lahan Garapan Pertanian, Perkebunan dan Tambak | Permukiman Transmigrasi Beserta Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Yang Sudah Memperoleh Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Transmigrasi | Permukiman, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum | Ket- |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceh Tengah | | 20.969 | | 93 | 21.062 |
| Aceh Tenggara | | 3.056 | | 55 | 3.111 |
| Aceh Timur | | 11.340 | 1.813 | 174 | 13.327 |
| Aceh Utara | | 186 | | 4 | 190 |
| Bener Meriah | | 2.641 | | 53 | 2.694 |
| Bireuen | | 370 | | | 370 |
| Gayo Lues | 654 | 1.285 | 544 | 508 | 2.991 |
| Kota Langsa | | 813 | | 2 | 815 |
| Kota Sabang | | 46 | | 22 | 68 |
| Subulussalam | 2.460 | 940 | 3.644 | 8 | 7.052 |
| Nagan Raya | | 159 | 2.896 | | 3.055 |
| Pidie | | 3.135 | 3.672 | 182 | 6.989 |
| Simeulue | | 423 | | 441 | 864 |
| Grand Total | 7.094 | 69.958 | 15.955 | 2.380 | 95.387 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2025*

Penanganan konflik tenurial melalui skema TORA yang dimulai dari tahun 2018 hingga tahun 2021 terdapat 5 Kabupaten/Kota yang telah direkomendasikan Gubernur untuk dilanjutkan proses penyelesaiannya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 1.579,47 Ha diselesaikan melalui perubahan batas dan 319,18 Ha diselesaikan melalui skema Perhutanan Sosial, dan hingga tahun 2021 baru satu Kabupaten yang telah terbit SK dari Menteri LHK dengan rincian yang tersaji pada Tabel 2.126.

Tabel 2.126.
Penyelesaian konflik tenurial melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) menurut Kabupaten/Kota di Aceh

| No | Kab/Kota | Surat Rekom Gubernur | Pertimbangan Tim Percepatan PPTKH (Ha) | | Persetujuan MenLHK (Ha) | | Keputusan MenLHK Atas Penataan Batas Perubahan Batas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Perubahan Batas | Perhutanan Sosial | Perubahan Batas | Perhutanan Sosial | SK | Tangga | Luas (Ha) |
| 1 | Aceh Tamiang | 522.12/4433 tanggal 19 Maret 2019 | 1.326,99 | 47,54 | 1.326,99 | 47,54 | SK.188/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/4/2020 | 13 April 2020 | 1.365,546 |
| 2 | Aceh Timur | 522.12/4434 tanggal 19 Maret 2019 | 139,03 | 178,06 | 139,03 | 178,06 | | | |
| 3 | Langsa | 522.12/4435 tanggal 19 Maret 2019 | 7,51 | 0.00 | 7,51 | 0.00 | | | |
| 4 | Aceh Utara | 522/1614 tanggal 30 Januari 2020 | 78,77 | 88,77 | 78,77 | 88,77 | | | |
| 5 | Sabang | 522.12/21064 tanggal 3 Desember 2019 | 27,17 | 4,81 | 27,17 | 4,81 | | | |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2025*

## D6. Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial merupakan program strategis pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian, penyuluh kehutanan berperan sebagai peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaaan hutan. Dalam perannya sebagai fasilitator, terdapat 55 izin yang sudah dikeluarkan oleh kementerian LHK, 10 izin telah didampingi oleh penyuluh, dan 25 izin didampingi Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sedangkan 15 izin lagi belum dapat didampingi dikarenakan keterbatasan tenaga penyuluh. Untuk hal tersebut, DLHK Aceh akan bermitra dengan PKSM dalam rangka memfasilitasi kelompok binaannya. Selain itu, Penyuluh kehutanan juga berfungsi sebagai pendamping dalam penyusunan Rencana Kegiatan Usaha (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Selain itu Tabel 2.127 secara rinci memberikan penjelasan capaian izin perhutanan sosial aceh tahun 2017-2024.

Tabel 2.127.
Capaian Izin Perhutanan Sosia Aceh Tahun 2017 – 2024

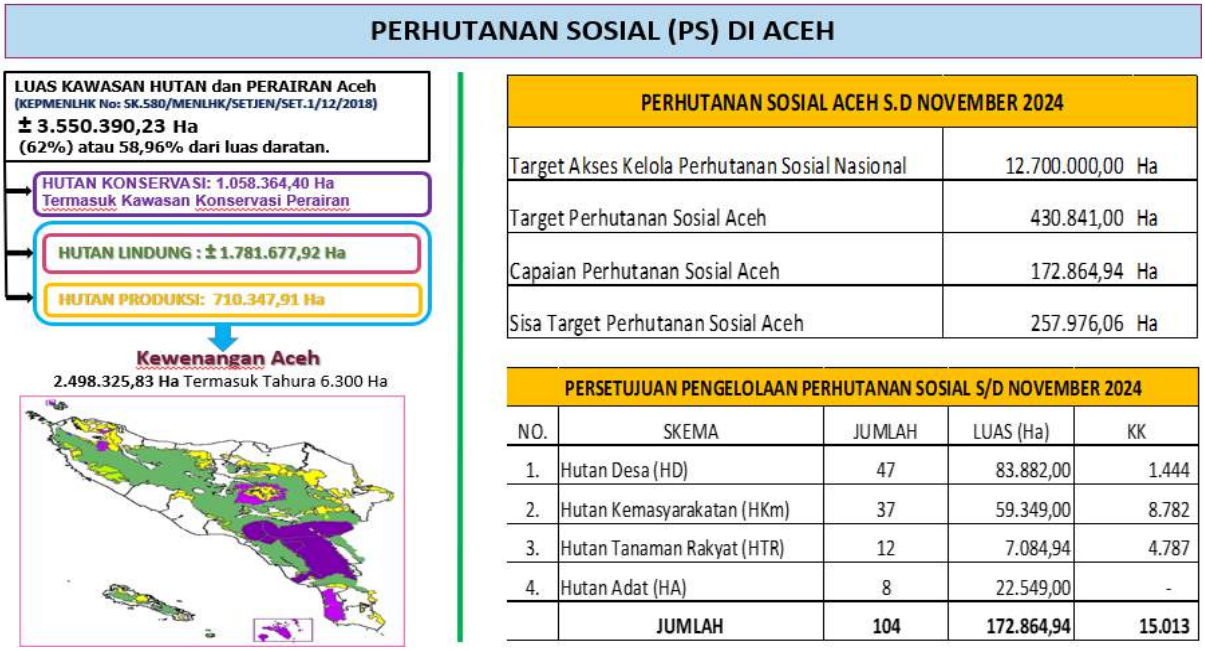
| No. | Tahun | Jumlah Izin | Luasan (Ha) | Jumlah KK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 28 | 38.065 | 8.833 |
| 2 | 2018 | 22 | 72.717 | 5.535 |
| 3 | 2019 | 3 | 2.281 | 234 |
| 4 | 2021 | 11 | 14.659 | 1.400 |
| 5 | 2022 | 21 | 42.693,13 | 2.033 |
| 6 | 2023 | 25 | 28.000 | 2.800 |
| 7 | 2024 | 27 | 30.000 | 3.500 |
| Jumlah | | 137 | 228.415,13 | 24.335 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2025*

Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Tujuan Perhutanan Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan dan menuju kelestarian hutan.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh menunjukkan bahwa dari Target akses Kelola Perhutanan Sosial Nasional dengan luas 12.700.000 Ha,Target Perhutanan Sosial Aceh seluas 430.841,00 Ha capaian Program Perhutanan Sosial sampai dengan bulan Desember 2024 sebanyak 104 izin dengan luasan 172.864,94 Ha yang terbagi dalam Hutan Desa (HD) 47 izin dengan luas 83.882 Ha, Hutan Kemasyarakatan (HKm) 37 izin dengan luas 59.960,9 Ha dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 12 izin dengan luas 7.085 Ha. Dengan capaian outcome penerimaan manfaat dari Kelompok Tani Hutan berjumlah 15.013 KK, Provinsi Aceh memiliki potensi perluasan dan capaian Perhutanan Sosial pada skema Hutan Adat, berdasarkan data dari Go KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) diakses

pada bulan Desember 2024 menunjukkan bahwa ada sekitar 112.610,98 Ha luasan indikatif Hutan Adat di Provinsi Aceh sebagaimana yang tersaji dalam Gambar 2.119.




| PERHUTANAN SOSIAL ACEH S.D NOVEMBER 2024 | |
|---|---|
| Target Akses Kelola Perhutanan Sosial Nasional | 12.700.000,00 Ha |
| Target Perhutanan Sosial Aceh | 430.841,00 Ha |
| Capaian Perhutanan Sosial Aceh | 172.864,94 Ha |
| Sisa Target Perhutanan Sosial Aceh | 257.976,06 Ha |

| PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL S/D NOVEMBER 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NO. | SKEMA | JUMLAH | LUAS (Ha) | KK |
| 1. | Hutan Desa (HD) | 47 | 83.882,00 | 1.444 |
| 2. | Hutan Kemasyarakatan (HKm) | 37 | 59.349,00 | 8.782 |
| 3. | Hutan Tanaman Rakyat (HTR) | 12 | 7.084,94 | 4.787 |
| 4. | Hutan Adat (HA) | 8 | 22.549,00 | - |
| | **JUMLAH** | **104** | **172.864,94** | **15.013** |

Gambar 2.119. Capaian Perhutanan Sosial Aceh sd. 2024

D7. Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Wilayah Aceh ditetapkan berdasarkan peraturan Gubernur Aceh nomor 01 tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja satuan kerja perangkat aceh, cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah sebagai perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 tahun 2018. Peraturan Gubernur ini menetapkan:

1. UPTD Balai Pengujian, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan; merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
2. UPTD Balai Penanganan Sampah Regional Blang Bintang; merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
3. UPTD KPH Wilayah I; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Banda Aceh, dengan wilayah kerja meliputi Unit I KPHP dan Unit XV KPHL mencakup wilayah administratif Kota Banda Aceh, Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Besar.
4. UPTD KPH Wilayah II; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Pidie dengan wilayah kerja meliputi Unit II KPHL mencakup wilayah administratif Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya.
5. UPTD KPH Wilayah III; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Aceh Jaya dengan wilayah kerja meliputi Unit X KPHL mencakup wilayah administratif Kabupaten Aceh Jaya.

6. UPTD KPH Wilayah IV; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Aceh Barat, dengan wilayah kerja meliputi Unit XI KPHL mencakup wilayah administratif Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya
7. UPTD KPH Wilayah V; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Aceh Utara, dengan wilayah kerja meliputi Unit III KPHP mencakup wilayah administratif Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara.
8. UPTD KPH Wilayah VI; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Bener Meriah, dengan wilayah kerja meliputi Unit VI KPHL dan Unit VII KPHL mencakup wilayah administratif Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah.
9. UPTD KPH Wilayah VII; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Langsa dengan wilayah kerja meliputi Unit IV KPHL dan Unit V KPHL mencakup wilayah administratif Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang
10. UPTD KPH Wilayah VIII; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Gayo Lues dengan wilayah kerja meliputi Unit VIII KPHL dan Unit IX KPHL mencakup wilayah administratif Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tenggara.
11. UPTD KPH Wilayah IX; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Aceh Selatan dengan wilayah kerja meliputi Unit XII KPHL dan Unit XIII KPHP mencakup wilayah administratif Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil
12. UPTD KPH Wilayah X; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Simeulue dengan wilayah kerja meliputi Unit XIV KPHL mencakup wilayah administratif Kabupaten Simeulue
13. UPTD KPHK Tahura PMI; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Saree Kabupaten Aceh Besar dengan wilayah kerja meliputi Kelompok Hutan Seulawah Agam dan Kelompok Hutan Seulawah Inong di Kabupaten Aceh Besar, Kelompok Hutan Seulawah Inong di Kabupaten Pidie dan kawasan penyangganya.

UPTD Kawasan Pengelolaan Hutan Wilayah I sampai dengan UPTD Kawasan Pengelolaan Hutan Wilayah X mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan hutan meliputi perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian serta pengawasan pengelolaan hutan di bidang pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, pengolahan hasil hutan, penelitian, pengembangan dan penyuluhan kehutanan, peredaran serta pemasaran hasil hutan.

### E. Kelautan dan Perikanan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan perekonomian suatu daerah. Kelautan dan perikanan berkontribusi besar dalam penyediaan bahan pangan, penyumbang devisa, peningkatan pendapatan,

pembuka lapangan pekerjaan, dan sumber potensi wisata yang sangat besar. Pada saat krisis ekonomi seperti halnya akibat pandemi Covid 19 yang melanda dunia tak terkecuali Indonesia, peranan sub sektor kelautan dan perikanan semakin signifikan, terutama dalam hal mendatangkan devisa. Hal ini dikarenakan laut dan pantai menyimpan potensi sumber daya alam baik berupa perikanan maupun lainnya dalam jumlah yang melimpah. Sektor kelautan dan perikanan telah menjadi prioritas Pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota.

Kebijakan Ekonomi Biru di Provinsi Aceh bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan sambil menjaga kelestarian ekosistem. Beberapa kebijakan yang diterapkan meliputi penangkapan ikan terukur, perluasan kawasan konservasi, dan pemanfaatan energi laut terbarukan.

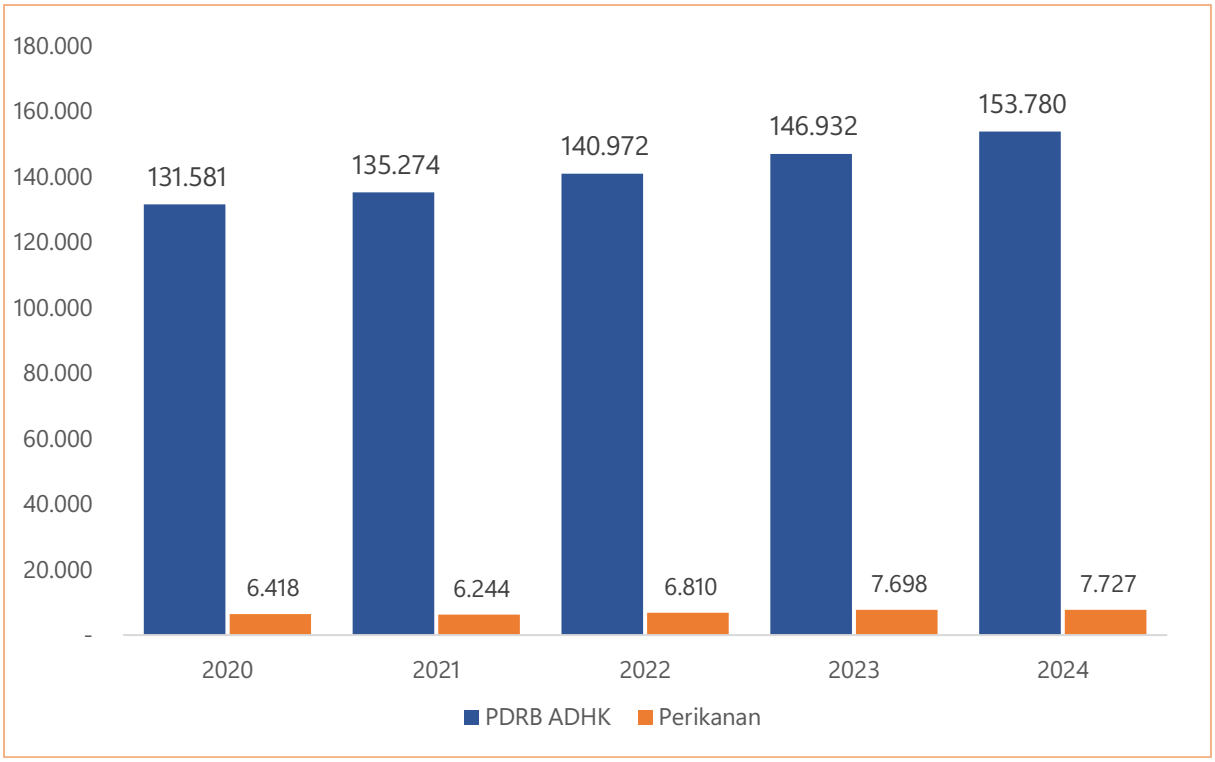
Adapun beberapa kebijakan Pemerintah Aceh :

1. Penangkapan Ikan Terukur (PIT): Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur penangkapan ikan secara lebih terukur dan berkelanjutan. Ini melibatkan pengaturan kuota penangkapan ikan dan sosialisasi kepada nelayan serta pihak terkait.
2. Perluasan Kawasan Konservasi Laut: Upaya untuk melindungi dan melestarikan ekosistem laut yang sehat, sehingga berbagai jenis kehidupan laut dapat tumbuh dan berkembang.
3. Pemanfaatan Energi Laut Terbarukan: Aceh memiliki potensi energi laut yang besar, seperti energi angin dan energi laut, yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil
4. Kerja Sama dengan Pihak Terkait: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk LSM dan Universitas Syiah Kuala (USK) untuk memastikan implementasi ekonomi biru berjalan dengan baik dan efektif
5. Hukum Adat Laut: Aceh juga memiliki aturan hukum adat laut (hukom adat laot) yang mengatur pemanfaatan laut, termasuk hari pantang melaut untuk memberi kesempatan bagi ikan untuk berkembang.

Aceh memiliki luas wilayah laut mencapai 295.000 $km^2$ dengan panjang garis pantai mencapai 2.666 km. Bentangan geografis ini menjadikan Aceh sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Kelautan dan perikanan menjadi salah satu sub sektor penting dalam sektor pertanian yang memiliki peranan krusial dalam pembangunan perekonomian Aceh bahkan nasional. Sub sektor ini menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk di Aceh, terutama masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir utara timur dan barat selatan Aceh. Sub sektor ini memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian Aceh saat ini.

Besarnya peranan sektor tersebut tergambar dari nilainya yang terus mengalami perkembangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sub sektor perikanan sebesar 6,418 Triliun (4,88 persen)

dari total PDRB yang mencapai 131,58 Triliun. Kontribusi sub sector perikanan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 7,27 Triliun (5,02 persen) dari total nilai PDRB Aceh tahun 2024 yang mencapai 153,78 Triliun. Besarnya pencapaian nilai sub sektor perikanan selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada Gambar 2.120.




*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2025*

Gambar 2.120. Perkembangan Nilai PDRB ADHK Sub Sektor Perikanan dan Nilai PDRB Aceh Tahun 2020-2024 (Rp Triliun)

Peningkatan kontribusi sub sector perikanan terhadap total PDRB Aceh disebabkan adanya peningkatan produksi baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap didominasi oleh beberapa jenis ikan, diantaranya; Tuna, Tongkol, Cakalang, Kakap, Kerapu, Bawal, Kuwe, Teri, dan Cumi. Diantara berbagai jenis ikan tersebut, kelompok terbesar didominasi oleh Tuna, Tongkol dan Cakalang (TTC). Besarnya produksi TTC pada tahun 2024 menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.128.

Tabel 2.128.
Produksi Ikan Tuna/Tongkol/Cakalang Menurut Kabupaten/Kota Di Aceh

| Kabupaten/Kota | Produksi (Kg) | Persentase Produksi (%) | Nilai Produksi (Rp) |
|---|---|---|---|
| Aceh Selatan | 7.155.459 | 16,7 | 9.093.927.000 |
| Bireuen | 6.144.995 | 14,35 | 8.065.998.000 |
| Aceh Timur | 5.543.885 | 12,94 | 5.408.722.000 |
| Pidie Jaya | 5.441.702 | 12,7 | 14.860.934.000 |
| Pidie | 3.781.234 | 8,83 | 7.581.110.000 |
| Simeulue | 3.727.144 | 8,7 | 6.087.851.000 |
| Kota Banda Aceh | 2.251.280 | 5,26 | 3.290.520.000 |

| Kabupaten/Kota | Produksi (Kg) | Persentase Produksi (%) | Nilai Produksi (Rp) |
|---|---|---|---|
| Kota Lhokseumawe | 1.519.075 | 3,55 | 9.466.316.000 |
| Aceh Tamiang | 1.242.461 | 2,9 | 10.565.474.000 |
| Aceh Jaya | 1.220.020 | 2,85 | 12.538.482.000 |
| Aceh Barat | 1.078.080 | 2,52 | 6.732.574.000 |
| Kota Sabang | 906.194 | 2,12 | 7.704.536.000 |
| Aceh Barat Daya | 902.576 | 2,11 | 11.122.537.000 |
| Aceh Utara | 692.859 | 1,62 | 6.634.846.000 |
| Aceh Besar | 514.368 | 1,2 | 288.275.000 |
| Aceh Singkil | 458.568 | 1,07 | 2.362.251.000 |
| Kota Langsa | 242.950 | 0,57 | 11.525.508.000 |
| Nagan Raya | 12.295 | 0,03 | 14.581.412.000 |
| Total | 42.835.145 | 100 | 147.911.273.000 |

*Sumber: Statistik KKP, data diolah, 2024*

Dari kelompok TTC, Ikan Tuna Sirip Kuning merupakan komoditi ekspor andalan Aceh yang saat ini telah dipasarkan hingga ke Jepang dan Amerika Serikat. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, jumlah produksi ikan tuna sirip kuning terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah produksi 42.832 ton, sementara itu jumlah produksi terendah terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah produksi 14.264 ton. Tabel 2.129 menunjukkan jumlah produksi (Ton) untuk ikan tuna sirip kuning pada tahun 2020 hingga 2024

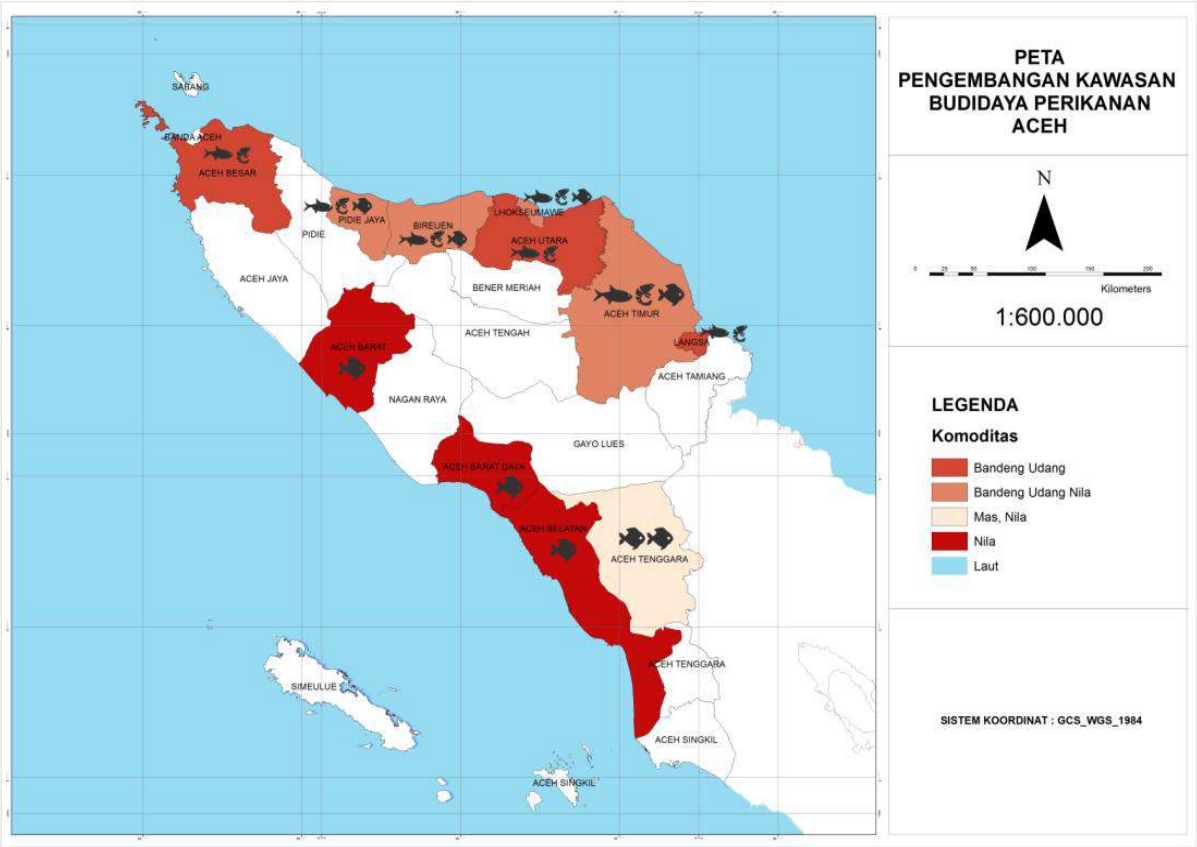
Tabel 2.129.
Jumlah Produksi Ikan Tuna Sirip Kuning di Aceh Tahun 2020 – 2024

| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Produksi Tuna (Ton) | 14.264 | 15.343 | 16.275 | 18.392 | 42.832 |

*Sumber: DKP Aceh (2025)*

Jumlah produksi ikan tuna, terutama tuna sirip kuning dinilai masih rendah dibandingkan dengan potensi pada Maximum Sustainable Yield (MSY) atau produksi maksimum lestari. Besarnya potensi sumber daya ikan tuna yang diestimasi dalam bentuk MSY mengacu pada RFMO termasuk WPP 571 dan WPP 572 untuk ikan tuna sirip kuning (Thunnus albacares) diperkirakan sebanyak 344.000 ton/tahun dan sebanyak 132.000 ton/tahun untuk ikan tuna mata besar (*Thunnus obesus*).

Kawasan budidaya di pesisir timur banyak didominasi oleh komoditas ikan bandeng. ikan nila. dan udang. Di wilayah pesisir timur ini terdiri dari Kemukiman Glee Bruek. Jambo Aye. Jangka. Julok Cut. Lampanah Leungah. Lancok. Seunebok Antara. Muara Satu. dan Musa. Sedangkan wilayah pesisir barat selatan terdiri dari Kemukinan Pasie. Krueng Batee. dan Indra Damai dengan komoditas ikan nila. Pengembangan kawasan berbasis mukim tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.121.




*Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (diolah)*

Gambar 2.121. Peta Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Berbasis Mukim

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi perikanan adalah dengan usaha perikanan budidaya, yakni; dengan pengembangan kawasan perikanan berbasis mukim. Pengembangannya dilakukan di berbagai kabupaten/kota yang memiliki komoditas perikanan budidaya unggulan. Adapun sebaran wilayah yang menjadi klaster pengembangannya tersebar di sepanjang wilayah pesisir timur dan sebagian lainnya berada di pesisir barat dan selatan Aceh.

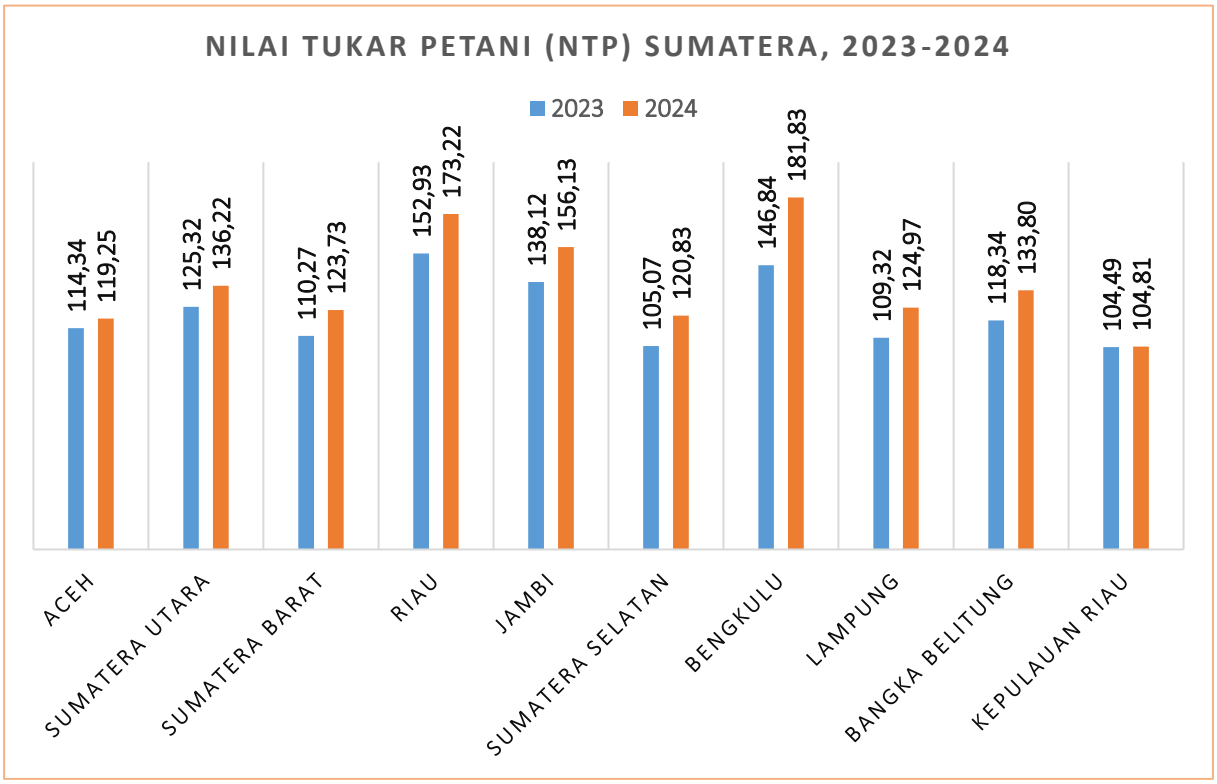
Secara umum peningkatan produksi perikanan juga akan berdampak terhadap angka konsumsi ikan. Peningkatan tersebut terlihat dari angka konsumsi yang terus meningkat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2022 angka konsumsi ikan di Aceh sebesar 65,93 Kg/Kapita/tahun dan terus meningkat menjadi 58,97 Kg/Kapita/tahun di tahun 2019. Angka tersebut telah melewati angka yang ditargetkan nasional sebesar 47 Kg/Kapita/tahun

## F. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan alah satu indikator yang penting bagi daerah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian seperti halnya Aceh. NTP mencerminkan tingkat kemampuan petani dalam memperoleh barang dan jasa dari hasil penjualan produk pertaniannya. Pada dasarnya nilai NTP juga merupakan gambaran tentang pendapatan yang diperoleh petani dari hasil berproduksi dan yang dikeluarkannya untuk kebutuhan konsumsi. Dengan kata lain, NTP menunjukkan daya tukar

(*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi/diproduksi oleh petani.

Secara umum, NTP di Sumatera tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023. NTP tertinggi dialami oleh Provinsi Bengkulu, dari 146,84 pada tahun 2023 menjadi 181,83 pada tahun 2024. Posisi tertinggi kedua ditempati oleh Provinsi Riau, yaitu: dari 152,93 pada tahun 2023 menjadi 172,93 pada tahun 2024.




*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2024*

Gambar 2.122. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Sumatera, 2023-2024

Sementara itu, NTP terendah dialami oleh Provinsi Kepulauan Riau, yaitu: 104,49 pada tahun 2023, naik sedikit menjadi 104,81 pada tahun 2024. Aceh menempati posisi terendah kedua atau urutan ke 9 dari 10 provinsi di Sumatera, dengan NTP sebesar 114,34 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 119,25 pada tahun 2024.

NTP Provinsi Aceh terus mengalami perbaikan yang terlihat dari grafik perkembangan yang terus mengalami kenaikan dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, NTP Aceh berada pada angka 92,29 dan meningkat menjadi 107,45 pada tahun 2022. NTP Aceh terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 menjadi 119,25. Meskipun terjadi peningkatan, perkembangan NTP Aceh dinilai lebih lambat jika dibandingkan dengan perkembangan NTP provinsi lainnya di Sumatera.

Perlambatan kenaikan NTP utamanya disebabkan oleh kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) lebih cepat dibandingkan dengan Indeks Harga yang Diterima Petani (It). Kenaikan Indeks Harga Konsuman (IHK), yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan pokok, diperkirakan memengaruhi daya beli petani secara keseluruhan.




*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2025 (diolah)*

Gambar 2.123. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Aceh Tahun 2020-2024

Perkembangan NTP dipengaruhi oleh harga-harga komoditas pertanian yang fluktuatif karena dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya: iklim, harga dan kualitas. Harga komoditas akan mengalami kenaikan pada saat terjadinya kelangkaan akibat adanya musim kemarau, musim angin barat, gelombang laut tinggi, serta produksi menurun. Sebaliknya, harga akan menurun apabila persediaan komoditas di sentra-sentra pertanian melimpah karena musim panen. Hal ini mengakibatkan pendapatan petani tidak tetap, sehingga diperlukan alternatif program yang menjaga kestabilan angka yang diterima oleh Petani serta menekan pengeluaran.

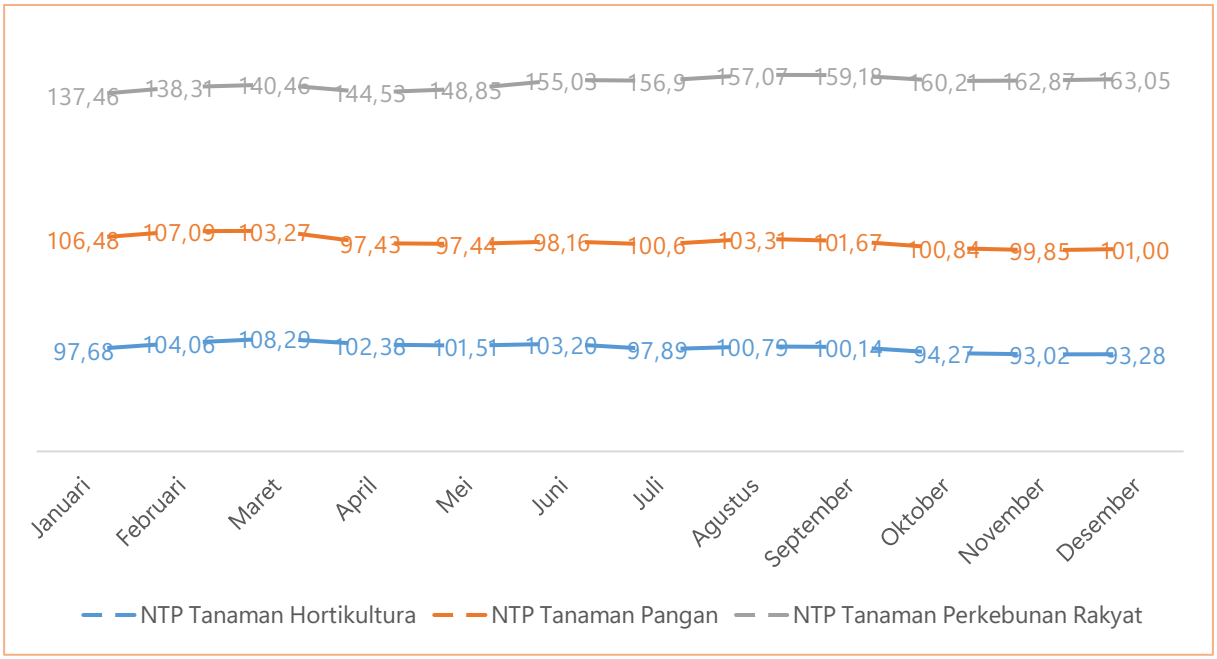
Secara umum NTP terbentuk dari 5 sub sektor, yaitu: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Apabila dilihat lebih dalam berdasarkan sub sektor, pembentukan NTP Aceh utamanya disumbangkan oleh sub sektor Perkebunan, diantaranya kelapa sawit dan kopi yang merupakan komoditi unggulan ekspor Aceh. Perkembangan NTP Aceh berdasarkan sub sektor dapat dilihat pada Tabel 2.130.

Tabel 2.130.
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Berdasarkan Sub Sektor,
Tahun 2020-2024

| Sub Sektor | Nilai Tukar Petani (NTP)/Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Tanaman Pangan | 99,08 | 97,13 | 98,21 | 104,17 | 101,43 |
| Tanaman Hortikultura | 94,94 | 95,32 | 99,58 | 99,13 | 99,71 |
| Tanaman Perkebunan Rakyat | 99,17 | 109,17 | 123,37 | 133,89 | 151,99 |
| Peternakan | 97,27 | 97,08 | 95,34 | 96,26 | 97,14 |
| Perikanan | 96,63 | 104,50 | 109,5 | 111,01 | 104,71 |

*Sumber: BPS (2025)*

Berdasarkan table di atas, dapat dilihat bahwa NTP tertinggi disumbangkan oleh sub sector Perkebunan. Hasil pemantauan harga-harga pada beberapa daerah di Aceh, dihasilkan NTP Januari sampai dengan Desember 2024 untuk 3 (tiga) sub sektor, yaitu: NTP Tanaman Hortikultura, NTP Tanaman Pangan, dan NTP Tanaman Perkebunan, sebagaimana tersajikan pada Gambar 2.124.




*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2025*

Gambar 2.124. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) 3 Sub Sektor Tahun 2024

Khusus NTP untuk sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, terjadi peningkatan yang cukup baik pada komponen Nilai Tukar Usaha Pertanian, terutama pada komoditi Padi, Jagung, Cabai dan Bawang Merah. Keempat komoditi tersebut merupakan bahan pangan pokok yang permintaannya terus meningkat, sehingga intervensi terhadap keempat komoditi ini menjadi fokus Pemerintah Aceh dalam menjaga dan mengendalikan ketersediaan bahan pangan pokok yang berpengaruh terhadap inflasi dan Garis Kemiskinan.

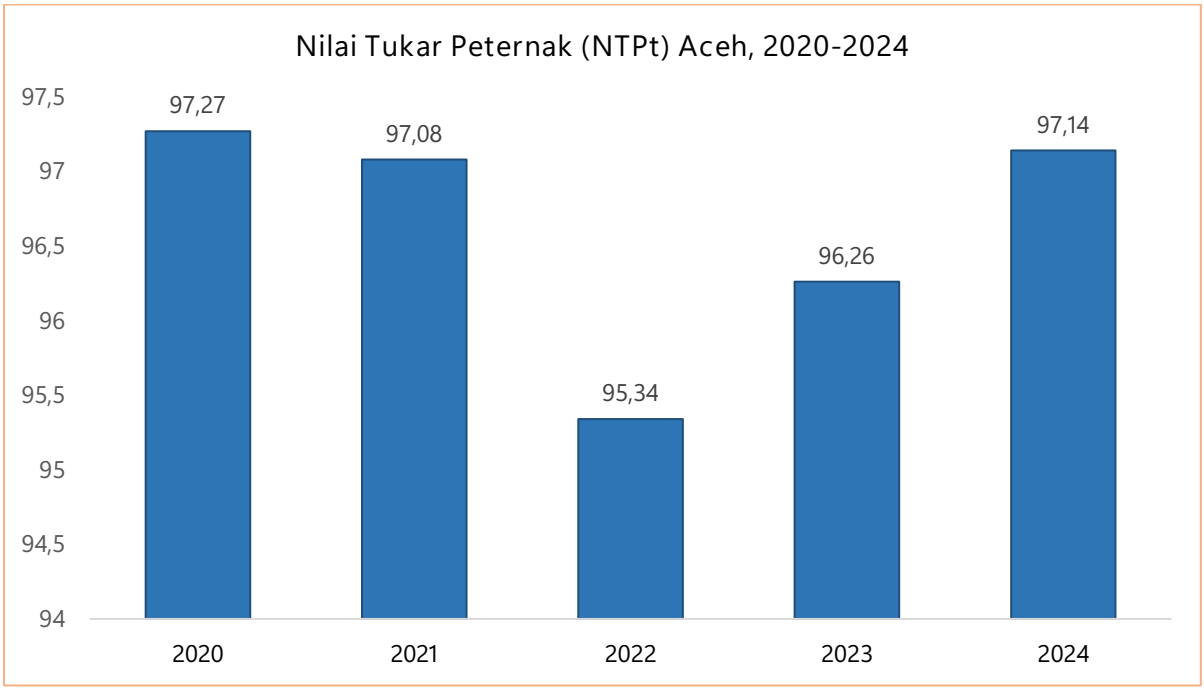
Tabel 2.131.
Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

| Subsektor/Rincian | Bulan | | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|
| | Okt'24 | Nov'24 | |
| 1. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) | 110,86 | 108,89 | -1,78 |
| a. Indeks yang Diterima Petani (It) | 134,09 | 132,28 | -1,35 |
| b. Indeks yang Dibayar Petani (Ib) | 120,96 | 121,49 | 0,44 |
| 2. Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) | 108,57 | 112,32 | 3,46 |
| a. Indeks yang Diterima Petani (It) | 130,69 | 135,72 | 3,85 |
| b. Indeks yang Dibayar Petani (Ib) | 120,37 | 120,83 | 0,38 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2025*

G. Nilai Tukar Peternakan

Pada sub sektor peternakan juga terjadi peningkatan taraf hidup para peternak yang ditandai dengan NTP Peternak sebagai dampak positif dari pembangunan peternakan. Perkembangan Nilai Tukar Peternakan (NTPt) sebagaimana pada tabel di atas dari tahun 2020-2024 menggambarkan kondisi yang cenderung menurun. NTPt yang tertinggi yaitu pada tahun 2020 sebesar 97,27 dan yang terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 93.96. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 97,14.04 (meningkat 2,12 poin dari tahun sebelumnya). Secara umum NTPt selama lima tahun kurang menggembirakan dan mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan petani di sektor peternakan relatif lebih rendah. Perkembangan nilai tukar peternak (NTPt) tahun 2023-2024 Gambar 2.125.

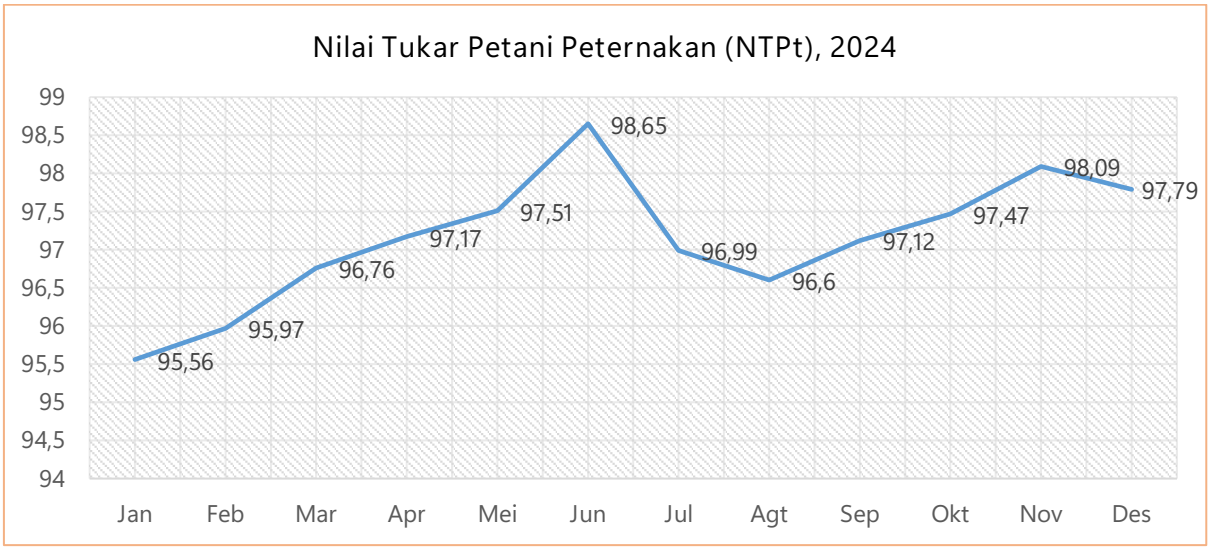



*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024*

Gambar 2.125. Perkembangan Nilai Tukar Peternak (NTPt), 2023–2024

Fluktuasi NTPt terjadi diantaranya akibat wabah penyakit ternak yang beberapa kali melanda Aceh dalam 5 tahun terakhir. Penanganan penyakit belum dapat dilakukan secara intensif karena berbagai kendala, diantaranya keterbatasan dalam pengadaan obat-obatan dan juga pola peternakan yang masih dilakukan secara tradisional (tidak dilakukan secara intensif).

Gambar 2.126 di atas menunjukkan bahwa NTP pada subsektor Peternakan periode Januari sampai dengan desember 2024 terjadi fluktuasi NTPt yang sulit dikendalikan akibat kenaikan harga-harga barang untuk kebutuhan konsumsi dan produksi yang terus meningkat, sementara pendapatan dari petani peternak tidak meningkat secara signifikan. Di samping itu, produksi peternakan juga mengalami fluktuasi karena minimnya penanganan penyakit ternak.




*Sumber: BPS (2025)*

Gambar 2.126. Nilai Tukar Petani Peternak (NTPt), 2024

Tabel 2.132.
Perkembangan NTP Peternakan Tahun 2024

| Subsektor/Rincian | Bulan | | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|
| | Okt'24 | Nov'24 | |
| Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPt) | 102,23 | 102,06 | -0,16 |
| a. Indeks yang Diterima Petani (It) | 122,59 | 122,65 | 0,05 |
| - Ternak Besar | 124,57 | 124,24 | -0,27 |
| - Ternak Kecil | 123,52 | 123,25 | -0,22 |
| - Unggas | 118,97 | 119,79 | 0,69 |
| - Hasil Ternak/Unggas | 123,90 | 123,85 | -0,05 |
| b. Indeks yang Dibayar Petani (Ib) | 119,91 | 120,17 | 0,21 |
| - Indeks KRT | 122,72 | 123,44 | 0,58 |
| - Indeks BPPBM | 117,64 | 117,57 | -0,06 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2024*

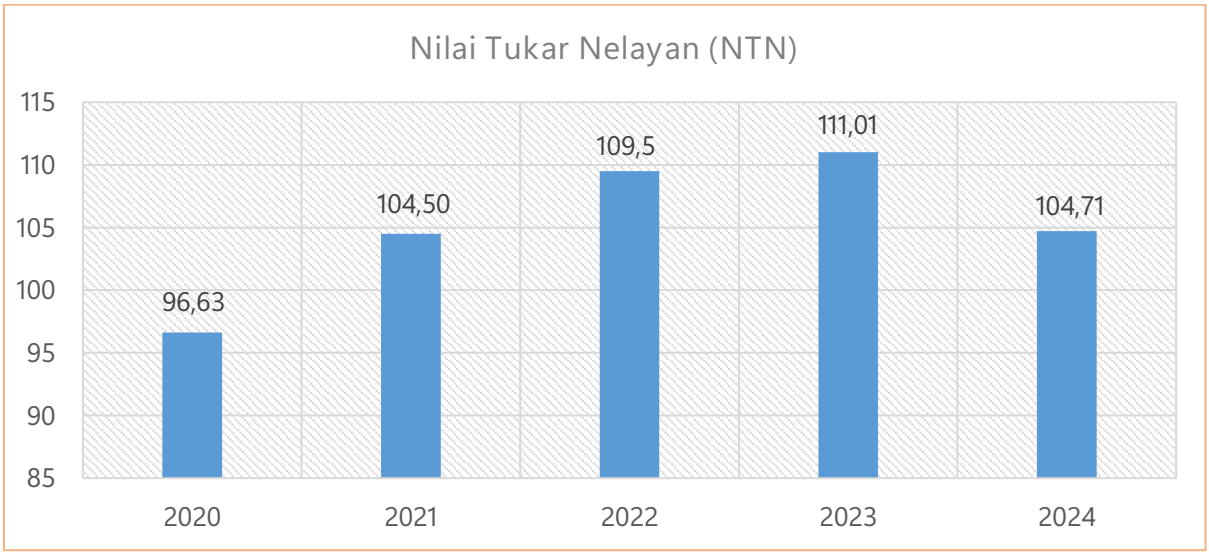
Pada November 2024, Nilai Tukar Petani untuk Subsektor Peternakan (NTPT) sebesar 102,06 atau mengalami penurunan sebesar 0,16 persen dibanding periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Indeks yang diterima petani (It) naik sebesar 0,05 persen. Peningkatan It akibat dari meningkatnya harga jual komoditas ternak Unggas. Begitu juga dengan Ib yang mengalami peningkatan sebesar 0,21persen karena meningkatnya indeks KRT sebesar 0,58 persen dan Indeks BPPBM menurun sebesar -0,06 persen.

## H. Nilai Tukar Nelayan

Pada sektor Perikanan, kesejahteraan nelayan diukur dari Nilai Tukar Nelayan (NTN). NTN merupakan alat ukur pendapatan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Persentase tingkat capaian NTN tahun 2020 adalah 96,63 persen, kemudian meningkat menjadi 104,50

pada 2021, serta yang paling tinggi pada tahun 2023, yaitu: 111,01. Realisasi NTN selama lima tahun terakhir, mulai dari tahun 2020-2024 berfluktuatif antara bidang.

Dari Gambar 2.127 dapat dilihat bahwa secara umum NTN semakin membaik dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan meningkat. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan karena adanya.




*Sumber : BPS Aceh, 2025 (diolah DKP Aceh)*

Gambar 2.127. Perkembangan NTP Nelayan 2020-2024

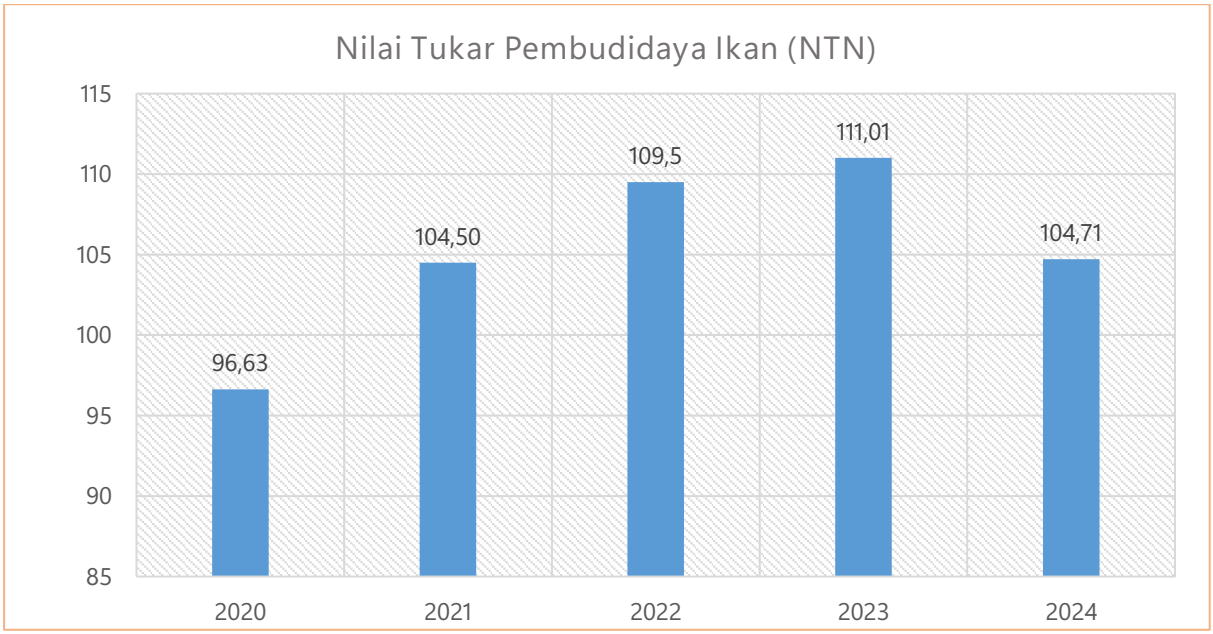
Keberhasilan pencapaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan dampak peningkatan volume dan nilai produksi perikanan tangkap yang dinikmati oleh nelayan. Indeks yang diterima petani (It) dan Indeks yang dibayar petani (Ib) sektor perikanan (tangkap dan budidaya) menunjukkan perubahan yang positif kecuali pada indeks yang diterima petani pada subsektor budidaya (sebesar 12,19%). Secara lebih jelas dapat dilihat Perkembangan Indeks yang diterima petani dan indeks yang dibayar nelayan Tahun 2024 pada Tabel 2.133.

Tabel 2.133.
Perkembangan Indeks Yang Diterima Nelayan dan Indeks Yang Dibayar Nelayan Tahun 2024

| No | Subsektor/Rincian | Bulan | | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | Okt-24 | Nov-24 | |
| 1. | Perikanan | | | |
| a. | Indeks yang diterima Nelayan (It) | 121,40 | 121,39 | -0,01 |
| | - Penangkapan | 116,26 | 119,20 | 2,53 |
| | - Budidaya | 121,16 | 118,50 | -2,19 |
| b. | Indeks yang dibayar Nelayan (Ib) | 118,63 | 118,92 | 0,24 |
| | - Indeks KRT | 121,41 | 121,92 | 0,42 |
| | - Indeks BPPBM | 115,75 | 115,82 | 0,07 |
| 1a. | Perikanan (Penangkapan) | | | |
| a. | Indeks yang diterima Nelayan (It) | 121,07 | 120,99 | -0,07 |

| No | Subsektor/Rincian | Bulan | | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | Okt-24 | Nov-24 | |
| | - Panangkapan di Perairan Umum | 118,20 | 118,54 | 0,29 |
| | - Penangkapan di Laut | 121,24 | 121,10 | -0,12 |
| b. | Indeks yang dibayar Nelayan (Ib) | 118,66 | 118,96 | 0,25 |
| | - Indeks Konsumsi Rumah Tangga | 121,71 | 122,21 | 0,41 |
| | - Indeks BPPBM | 115,30 | 115,38 | 0,07 |
| 1b. | Perikanan (Budidaya) | | | |
| a. | Indeks yang diterima Petani (It) | 121,94 | 122,03 | 0,07 |
| | - Budidaya Air Tawar | 116,40 | 116,31 | -0,08 |
| | - Budidaya Air Payau | 123,40 | 121,66 | -0,05 |
| b. | Indeks dibayar Petani (Ib) | 118,87 | 118,85 | 0,23 |
| | - Indeks KRT | 120,93 | 121,46 | 0,43 |
| | - Indeks BPPBM | 116,45 | 116,53 | 0,06 |

Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTPi) selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 juga menunjukkan perkembangan yang sangat baik, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan secara signifikan.




*Sumber : BPS Aceh, 2025 (diolah DKP Aceh)*

Gambar 2.128. Perkembangan NTPi Tahun 2020-2024

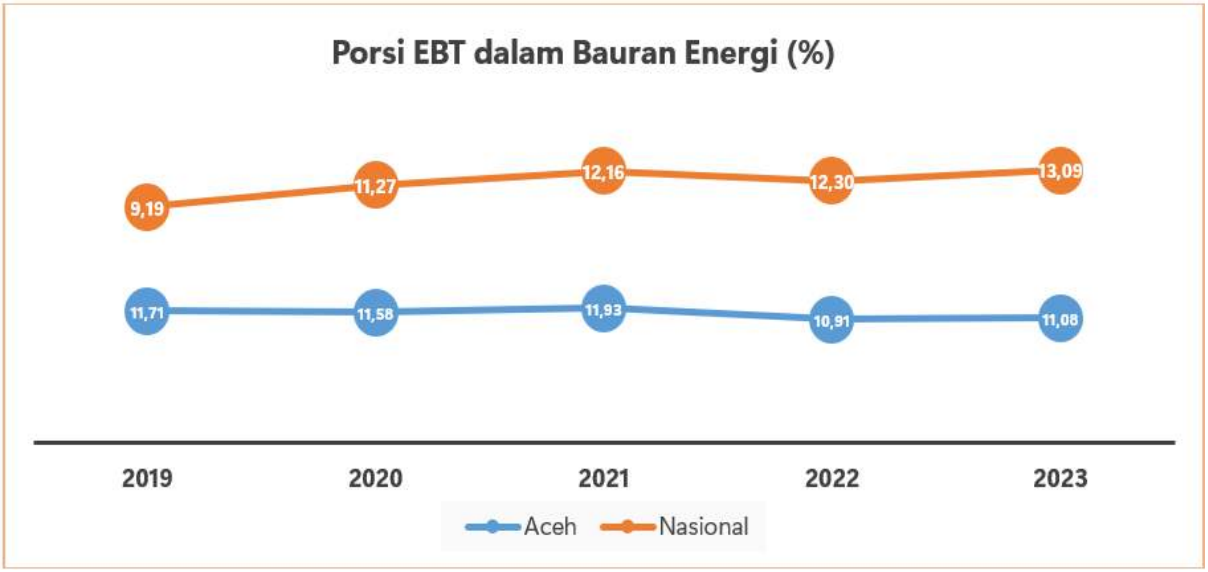
Fluktuasi Nilai Tukar Pembudidaya Ikan akibat berbagai kendala, diantaranya yang paling krusial adalah karena tidak adanya pakan murah yang berkualitas sehingga menyebabkan produktivitas petani pembudidaya ikan mengalami penurunan.

## I. Porsi EBT dalam Bauran Energi

Energi baru dan terbarukan (EBT) adalah salah satu bentuk pengelolaan alam yang berkelanjutan dan dikembangkan menjadi energi alternatif. Secara umum, energi baru terbarukan adalah sumber energi yang dapat dimanfaatkan tanpa batas dan diperbarui

secara alami. Itulah mengapa EBT termasuk energi yang ramah lingkungan sehingga dapat berkontribusi dalam mengurangi pemanasan global.

Porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer di Provinsi Aceh masih dalam proses peningkatan. Demikian pula halnya terhadap porsi energi baru terbarukan (EBT) secara nasional. Adapun perkembangan porsi energi baru terbarukan (EBT) baik secara nasional maupun Aceh selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.129.




*Sumber : Dinas ESDM Aceh dan Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)*

Gambar 2.129. Porsi EBT dalam Bauran Energi Aceh (%)

Aceh memiliki potensi besar dalam energi baru terbarukan, meliputi panas bumi di wilayah Seulawah Agam, Aceh Besar, Pembangkit Listrik Tenaga Air Peusangan, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Potensi ini membutuhkan Kebijakan dalam pengembangannya, baik secara wewenang dan kapasitas fiskal.

### 2.1.3.4. Transformasi Digital

Disajikan indikator antara lain, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi dan indikator lain sesuai konteks daerah.

#### A. Persandian

Persandian memiliki peran yang sangat vital dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu untuk mengamankan informasi. Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Sektor persandian perlu mendapat pengembangan serius ke depan terkait pengamanan informasi pemerintah. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemberdayaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko diantaranya penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. Hadirnya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi penting. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 (ayat 2) bahwa Persandian sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

B. Statistik

A1. Statistik Sektoral Daerah

Keberadaan Statistik Sektoral Daerah sangat dibutuhkan untuk memperkuat data dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah dari berbagai bidang kegiatan. Untuk itu Pemerintah Aceh terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan statistik sektoral pada lingkup daerah masing-masing. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI) menyatakan tujuan dari pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) yang turunannya dapat dilaksanakan pada skala Pemerintah Provinsi seperti Satu Data Aceh adalah untuk:

a. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan.
b. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
c. Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.
d. Mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Aceh juga telah mengatur terkait Satu Data di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Aceh dengan Satu data.

A2. Geospasial

Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi satu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Selain statistik sektoral, geospasial juga memegang peranan penting dalam mendukung berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Geospasial dapat mengambil peran dalam pembangunan dari berbagai sektor. Informasi tentang geospasial menjadi bahan pendukung dalam pengambilan keputusan dan kebijakan tertentu oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berbasis spasial.

Informasi Geospasial (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011) adalah informasi yang sangat berharga dan dapat digunakan serta dimanfaatkan untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA), penyusunan rencana tata ruang dan perencanaan lokasi investasi. Selain itu informasi geospasial juga dapat digunakan untuk menentukan garis batas wilayah, pertanahan, pertahanan keamanan, dan lain-lain yang semuanya dapat dijadikan dalam penyusunan Kebijakan Satu Peta (KSP) yang merupakan solusi sempurna untuk mengatasi tumpang tindih izin penggunaan lahan.

Oleh karena itu ketersediaan informasi geospasial yang akurat dapat mendukung dalam mengambil keputusan yang efisien, efektif dan komunikatif. Selembar peta mengandung beragam informasi yang menyangkut aspek keruangan. Informasi geospasial sangat penting untuk mendukung program pembangunan daerah dan nasional.

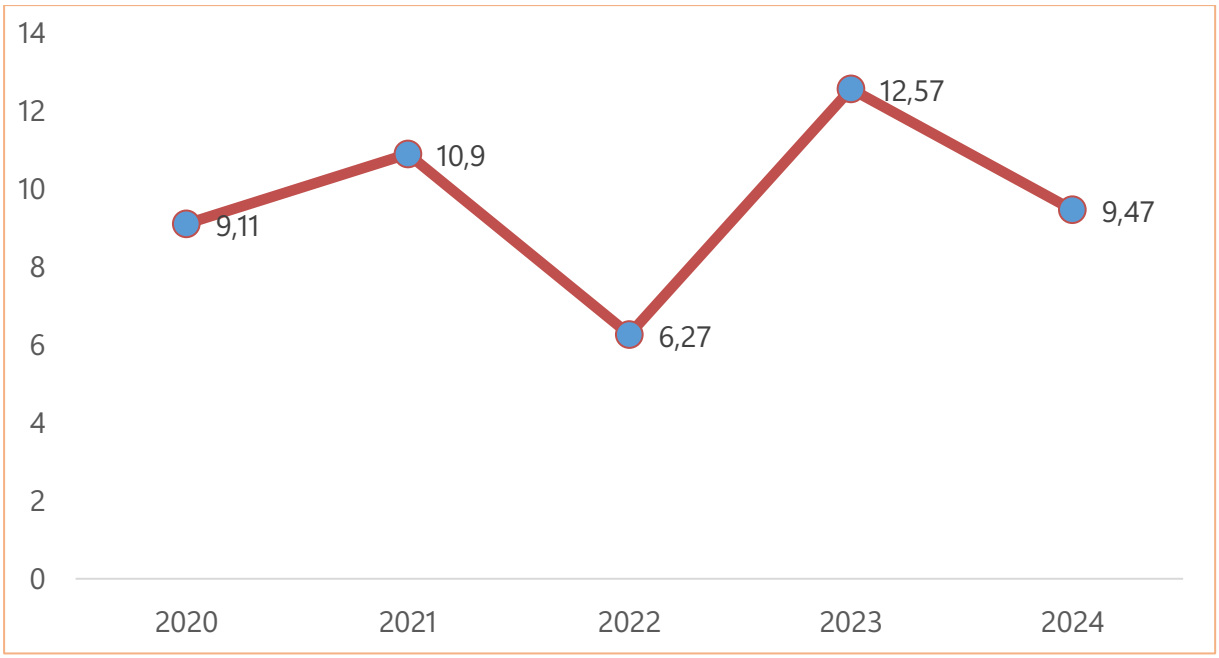
Adapun data dan informasi Geospasial yang selama ini tersedia dan di produksi oleh Satuan Perangkat Kerja Aceh (SKPA) serta disebarluaskan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebagai wali data ke Geoportal Aceh (https://geoportal.acehprov.go.id). Jumlah data dan informasi geospasial yang tersedia di Geoportal Aceh adalah 320 peta.

2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Disajikan indikator antara lain, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Ekspor Barang dan Jasa dan indikator lain sesuai konteks daerah

A. Penanaman Modal

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah sangat dibutuhkan peran investasi. Perkembangan investasi di Aceh masih menunjukkan kondisi yang belum cukup baik dengan realisasi yang sangat berfluktuasi dalam periode 5 (lima) tahun terakhir. Tercatat bahwa pada tahun 2020 realisasi nilai investasi sebesar 9,11 triliun. Pada tahun berikutnya nilai investasi sedikit meningkat mencapai 10,9 triliun, dan kembali turun drastis mencapai 6,27 triliun. Pada tahun 2024 nilai realisasi investasi tercatat sebesar 9,47 triliun yang merupakan gabungan antara Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Perkembangan nilai realisasi investasi Aceh dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.7.




*Sumber: DPMPTSP Aceh*

Gambar 2.130. Perkembangan Nilai Realisasi Investasi di Aceh Tahun 2020-2024

Keberhasilan peruntukan investasi tidak terlepas dari indikator serapan tenaga kerja yang mempekerjakan tenaga kerja lokal sesuai dengan kriteria keterampilan pada sektor yang dimiliki. Dari total nilai realisasi investasi di tahun 2024, tenaga kerja yang terserap pada PMDN dan PMA sebanyak 13.727 orang dengan jumlah tenaga kerja Indonesia sebanyak 13.681 orang serta tenaga kerja asing sebanyak 46 orang. Adapun rasio daya serap tenaga kerja tersebut sebesar 14,87 atau 1:15 orang.

B. Ekspor Barang dan Jasa

Perkembangan dari sisi ekspor dan impor, neraca perdagangan Aceh masih mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan ekonomi Aceh dipengaruhi oleh faktor eksternal karena masih tingginya kebutuhan pada pasokan barang-barang dari luar Aceh (dominasi barang impor) termasuk untuk kebutuhan pokok, serta produksi industri lokal yang masih kurang.

Tabel 2.134.
Neraca Perdagangan Provinsi Aceh Tahun 2020-2024

| Tahun | Ekspor | | | Impor | | | Neraca (USD) | Neraca (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Volume (Kg) | Nilai (USD) | Pertumbuhan (%) | Volume (Kg) | Nilai (USD) | Pertumbuhan (%) | | |
| 2020 | 8.118.173.063 | 300.417.274 | -5,44 | 109.695.439 | 25.776.718 | -80,36 | 274.640.556 | 47,29 |
| 2021 | 9.658.678.737 | 536.923.577 | 78,73 | 72.354.765 | 119.048.308 | 361,84 | 417.875.269 | 52,15 |
| 2022 | 8.900.165.533 | 745.801.580 | 38,90 | 100.488.223 | 113.741.363 | -4,46 | 632.059.944 | 51,26 |
| 2023 | 7.900.445.913 | 609.246.201 | -18,31 | 350.596.488 | 148.020.520 | 30,14 | 461.225.536 | -27,03 |
| 2024 | 11.243.254.894 | 674.855.855 | 10,77 | 843.863.572 | 454.421.658 | 207,00 | 220.434.197 | -52,21 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2025*

Perkembangan ekspor Provinsi Aceh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir meskipun berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 ekspor dari Aceh sebesar 300.417.274 USD atau berkontraksi sebesar 5,44 persen sebagai

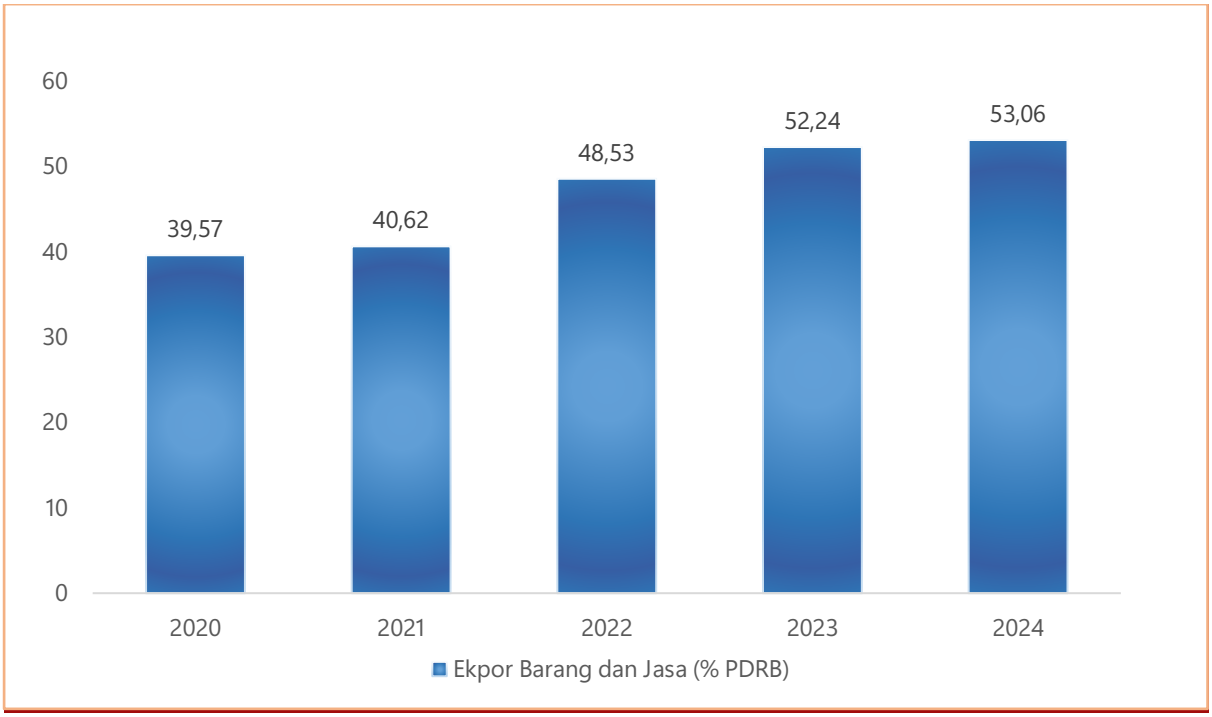
dampak dari pandemi covid-19. Pada tahun 2021, seiring upaya pemulihan ekonomi nasional dan ekonomi global, nilai ekspor dari Aceh meningkat tajam menjadi 536.923.577 USD atau tumbuh sebesar 78,73 persen. Nilai ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 745.801.580 USD atau tumbuh sebesar 38,90 persen. Pada tahun 2023 nilai ekspor Aceh cukup baik yaitu sebesar 609.351.386, namun jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 18,31 persen, hal ini disebabkan karena berkurangnya nilai ekspor pada kelompok non migas terutama akibat turunnya harga CPO di pasar global. Pada tahun 2024, nilai ekspor Aceh kembali tumbuh sebesar 10,77 persen atau senilai 674.855.855 USD. Hal ini selain akibat perubahan harga-harga di pasar dunia, juga dikarenakan meningkatnya volume ekspor Aceh.

Perkembangan impor Aceh dalam kurun waktu lima tahun terakhir tercatat cukup stabil, dimana nilai impor terendah Aceh terjadi pada tahun 2020 yaitu senilai 25.776.718 USD, sedangkan impor teritinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu senilai 454.421.658 USD atau tumbuh sebesar 207 persen dibanding tahun sebelumnya. Pembentuk impor Aceh pada tahun 2024 dipengaruhi oleh kelompok komoditas adalah bahan bakar mineral, beras, belerang dan kapur.

Sedangkan neraca ekspor dan impor Aceh dalam 5 tahun terakhir, meskipun berfluktuasi namun tetap mengalami surplus, yang menandai nilai ekspor Aceh lebih besar daripada nilai impor. Surplus terbesar terjadi pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 632.056.844 USD, sedangkan surplus terkecil terjadi pada tahun 2024 sebesar 220.434.197USD.

Negara tujuan utama ekspor Provinsi Aceh adalah India, Amerika Serikat, Thailand, Jepang dan Belgia dengan jenis komoditas utama diantaranya bahan bakar mineral, buah-buahna, dan kelompok kopi, teh, rempah-rempah. Sedangkan negara asal impor utama adalah Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Qatar, Vietnam, dan Thailand dengan komoditas paling dominan berupa bahan bakar mineral, beras, belerang dan kapur.

Nilai total ekspor Aceh dengan menghitung ekspor luar negeri maupun ekspor antar daerah terus mengalami peningkatan, sebagaimana digambarkan dengan persentase ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Aceh seperti disajikan pada Gambar 2.131 menunjukkan kondisi perkembangan share ekspor barang dan jasa Aceh terhadap PDRB yang terus meningkat. Dimana pada tahun 2020 sebesar 39,57 persen dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 53,06 persen pada tahun 2024. Capaian ekspor barang dan jasa tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap PDRB Aceh. Selain itu, ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk lokal di pasar domestik maupun di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya persentase ekspor barang dan jasa, juga mempengaruhi rasio perdagangan antar wilayah yang juga terus membaik. Pada tahun 2024 capaian Aceh terhadap rasio perdagangan antar wilayah sebesar minus 0,05, yang mana jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 seebsar minus 0,20. Namun demikian, hal ini juga menunjukkan bahwa ketergantungan Aceh terhahap barang dan jasa dari luar masih cukup tinggi, terutama dari provinsi lain di dalam negeri.




*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025 (diolah)*

Gambar 2.131. Persentase Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB Provinsi Aceh Tahun 2020-2024

## C. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Perkembangan Nilai PMTB dan Perubahan Inventori (ADHB) Tahun 2019-2024 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2019 nilai PMTB Aceh sekitar 60,70 Trilyun Rupiah dan pada 2024 menjadi 79,43 Trilyun Rupiah. Nilai perubahan inventori dari tahun 2019 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan, pada tahun 2019 sebesar 15,13 Milyar Rupiah. Bila dilihat nilai PMTB dan Perubahan Inventori berdasarkan atas ADHK, nilai ini secara umum mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2022 sebesar 45,10 Trilyun Rupiah, selanjutnya pada tahun 2023 dan 2024 meningkat menjadi masing-masing sebesar (47,75 dan 49,98 Trilyun Rupiah). Sedangkan nilai perubahan inventori ADHK relative sama dengan pergerakan nilai perubahan inventori ADHB. Pada Tahun 2020 mengalami minus sebesar (239,13) Milyar Rupiah akibat dari pandemi.

Tabel 2.135.
Nilai PMTB dan Perubahan Inventori (ADHB dan ADHK) Tahun 2019-2024 (Milyar Rupiah)

| Komponen | Tahun | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | ADHB | ADHK | ADHB | ADHK | ADHB | ADHK | ADHB | ADHK | ADHB | ADHK | ADHB | ADHK |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 60.700,30 | 43.513,91 | 63.218,09 | 45.045,62 | 65.451,34 | 45.438,25 | 66.941,19 | 45.103,70 | 73.733,30 | 47.746,95 | 79.431,79 | 49.982,89 |
| Perubahan Inventori | 15,13 | 8,77 | 40,30 | - 239,13 | 166,77 | 87,31 | 267,76 | 152,44 | 455,77 | 260,65 | 412,52 | 218,84 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2025*

2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Disajikan indikator antara lain, Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak, Persentase Desa Mandiri, dan indikator lain sesuai konteks daerah.

A. Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

A1. Jalan

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang esensial dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan merupakan infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Peningkatan infastruktur jalan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi disuatu wilayah. Untuk mengevaluasi manfaat jalan maka dilakukan peritungan rasio pada bagian ini. Panjang jalan yang dihitung adalah panjang jalan yang merupakan jalan nasional (tidak termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota.

Jalan menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah. Kriteria yang digunakan untuk pengelompokan jalan sebagai berikut:

1. Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol;
2. Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
3. Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;
4. Jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota;
5. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Sistem jaringan jalan yang ada di Aceh, berdasarkan status jalan, meliputi:

1. Jaringan Jalan Nasional sepanjang 2.112,07 km (Kepmen PUPR No. 1688/KPTS/M/2022 tanggal 2 Desember 2022) tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional.

2. Jaringan Jalan Provinsi sepanjang 1.897,91 km (Keputusan Gubernur Aceh Nomor 600.1.8/603/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi Di Aceh.
3. Jaringan Jalan kabupaten/kota sepanjang 19.679,91 km.

### A2. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi Mantap

Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap telah mempunyai andil besar terhadap kemudahan mobilitas perdagangan barang, mobilitas penumpang, mobilitas sosial, kemudahan akses terhadap sarana transportasi lainnya seperti Bandara dan Pelabuhan maupun kemudahan akses terhadap sarana-prasarana pendidikan maupun kesehatan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat. Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi dengan panjang jalan seluruhnya. Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap untuk jalan nasional dan provinsi disajikan pada Tabel 2.136.

Tabel 2.136.
Proporsi Panjang Jalan Provinsi dan Nasional dalam Kondisi Mantap
Tahun 2020 – 2024

| Tahun | Jalan Provinsi | | | | Jalan Nasional | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Panjang Jalan (Km) | Kondisi Mantap | | | Panjang Jalan (Km) | Kondisi Mantap | | |
| | | Baik (B) (Km) | Sedang (S) (Km) | Proporsi | | Baik (B) (Km) | Sedang (S) (Km) | Proporsi |
| 2020 | 1.781,72 | 1.321,82 | 92,14 | 0,79 | 2.111,39 | 1.210,51 | 821,74 | 0,96 |
| 2021 | 1.781,72 | 1.157,10 | 206,83 | 0,77 | 2.102,07 | 954,84 | 1.109,10 | 0,98 |
| 2022 | 1.781,72 | 1.391,21 | 112,72 | 0,84 | 2.102,07 | 983,54 | 1.090,25 | 0,98 |
| 2023 | 1.781,72 | 1.439,46 | 95,15 | 0,86 | 2.112,07 | 887,426 | 1176,975 | 0,98 |
| 2024 | 1.897,91 | 1.228,57 | 304,90 | 0,81 | 2.112,07 | 756,72 | 1.269,22 | 0,96 |

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh 2025 dan Satker P2JN Aceh 2025*

Secara garis besar total proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap telah menunjukkan kinerja yang membanggakan meskipun belum handal. Telah terjadi peningkatan proporsi jalan provinsi dalam keadaan mantap, dari 0,79 di tahun 2020 menjadi 0,81 di tahun 2024. Sementara itu, proporsi jalan provinsi dalam kondisi mantap masih jauh dibawah kondisi mantap jalan nasional sebesar 0,96.

Untuk dapat mempertahankan dan mempercepat peningkatan proporsi kondisi mantap jalan provinsi perlu dikelola pemeliharaannya dengan baik agar tetap dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana melalui kegiatan peningkatan, rekonstruksi dan pemeliharaan rutin maupun berkala berdasarkan data hasil survey lapangan (Integrated Road Management System/IRMS).

### A3. Rasio Jumlah Penduduk dengan Panjang Jalan

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di

wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah.

Jumlah penduduk Aceh yang semakin bertambah tanpa diiringi penambahan panjang jalan menyebabkan menurunnya rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin baik atau semakin tinggi pula jumlah masyarakat atau penduduk yang dilayani. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk memberikan informasi tingkat penggunaan jalan atau mencerminkan tingkat kepadatan penggunaan jalan yang ada. Rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan tahun tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada Tabel 2.137.

Tabel 2.137.
Rasio Jumlah Penduduk per Panjang Jalan Tahun 2020-2024

| Tahun | Panjang Jalan (km) | | | | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Rasio (Jiwa/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jalan Nasional | Jalan Provinsi | Jalan Kabupaten | Total Panjang Jalan | | |
| 2020 | 2.111,39 | 1.781,72 | 19,766,26 | 23.650,05 | 5.274.871 | 223,04 |
| 2021 | 2.102,08 | 1.781,72 | 19,766,26 | 23.650,05 | 5.333.733 | 225,53 |
| 2022 | 2.102,08 | 1.781,72 | 19,766,26 | 23.650,05 | 5.407.855 | 228,66 |
| 2023 | 2.112,07 | 1.781,72 | 19,766,26 | 23.650,05 | 5.482.527 | 231,72 |
| 2024 | 2.112,07 | 1.897,91 | 19,679,91 | 23.689,89 | 5.554.815 | 234,48 |

*Sumber: Badan Pusat StatistikProvinsi Aceh, 2025*

Dari informasi Tabel 2.137 Aceh pada tahun 2024, 1 km jalan melayani 233 penduduk. Sementara pada tahun 2020, 1 km jalan melayani 223 penduduk. Kondisi rasio jumlah penduduk per panjang jalan di Aceh lebih rendah dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk per panjang jalan Sumatera sebesar 300 jiwa/km, Sulawesi sebesar 250 jiwa/km dan Kalimantan sebesar 260 jiwa/km. Sementara itu, rasio jumlah penduduk per panjang jalan di Jawa sebesar 1.360 jiwa/km. Dengan demikian, panjang jalan di Aceh masih mampu melayani aksessibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa.

### A4. Persentase jalan provinsi dalam kondisi Mantap

Kriteria jalan kondisi mantap adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai *international roughness index/IRI*) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai *road condition index/RCI*). Sedangkan menurut Peraturan Menteri PU No. 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, disebutkan kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, kriteria kondisi jalan tidak mantap meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Capaian persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap antara tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2022 dan 2023 kondisi mantap jalan mengalami

peningkatan yaitu 84,41 persen tahun 2022 dan 86,13 persen tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2024 capaian persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap mengalami penurunan menjadi sebesar 80,80 persen. Peningkatan kondisi mantap jalan diperlukan sebagai upaya memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa serta meningkatkan pelayanan kebutuhan pergerakan masyarakat. Kondisi mantap jalan dari tahun 2020-2024 ditunjukkan pada Tabel 2.138.

Tabel 2.138.
Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2020-2024

| Tahun | Jalan Provinsi | Kondisi | | | | Mantap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Baik (B) (km) | % Baik | Sedang (S) (km) | % Sedang | Km | % |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)=(3)/(2)*100* | *(5)* | *(6)=(5)/(2)*100* | *(7)=(3)/(5)* | *(8)=(7)/(2)*100* |
| 2020 | 1.781,72 | 1.321,82 | 74,19 | 92,14 | 5,17 | 1.413,96 | 79,36 |
| 2021 | 1.781,72 | 1.157,10 | 64,94 | 206,83 | 11,61 | 1.363,93 | 76,55 |
| 2022 | 1.781,72 | 1.391,21 | 78,08 | 112,72 | 6,32 | 1.503,93 | 84,41 |
| 2023 | 1.781,72 | 1.439,46 | 80,79 | 95,15 | 5,34 | 1.534,61 | 86,13 |
| 2024 | 1.897,91 | 1.228,57 | 64,73 | 304,90 | 16.07 | 1.533,47 | 80,80 |

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, 2025*

Pada Tabel 2.138 atas menunjukkan bahwa kondisi mantap jalan provinsi mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 80,80% dari tahun 2023 sebesar 86, 13%, hal ini disebabkan karena : adanya penambahan panjang ruas jalan provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh nomor 600.1.8/603/2024 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi di Aceh yang sebelumnya 1.781,72 Km menjadi 1.897,91 Km, dimana kondisi jalan masih banyak dalam kategori rusak berat dan rusak ringan; adanya bencana alam seperti longsor dan banjir yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada ruas jalan; dan kurangnya alokasi anggaran untuk kegiatan pemeliharaan jalan baik pemeliharaan rutin dan berkala, sehingga kerusakan jalan yang terjadi kurang dapat ditangani dengan optimal.

Kedepannya, Pemerintah Aceh akan terus meningkatkan pencapaian target untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi sistem konektivitas secara global di Aceh antara lain meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistic, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Provinsi Aceh.

B. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum.

Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1)

Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah.

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Selanjutnya Air minum dan sanitasi merupakan salah satu jenis pelayanan dasar yang pemenuhannya bukan sekadar akan meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup, tetapi pada akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi merupakan salah satu urusan wajib pemerintah dalam rangka penyediaan kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal (PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal).

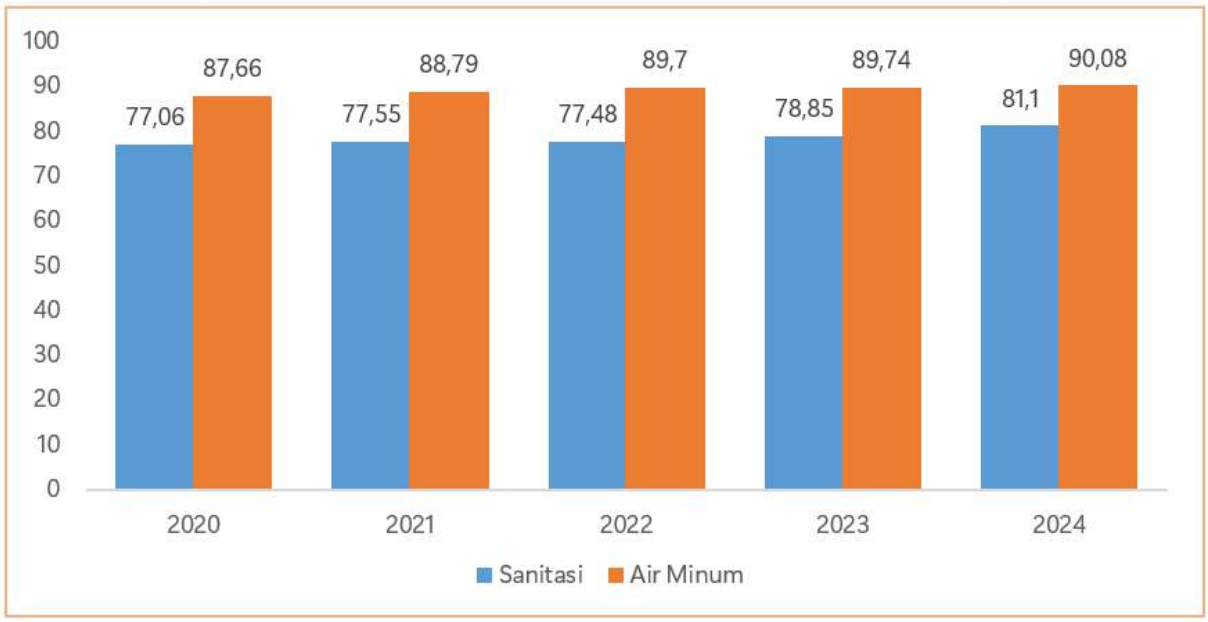
Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan (seperti permukaan sungai/danau/waduk/kolam/irigasi)

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL),dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum dan sanitasi sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan angka yang beragam. Rumah tangga berakses air minum layak mengalami peningkatan sebesar 2,42 persen dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Kondisi pelayanan akses sanitasi layak juga terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan demikian akses sanitasi layak dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 4,04 persen. Sektor sanitasi peningkatan capaian terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang lebih baik.

Gambar 2.132 menjelaskan bahwa, persentase Rumah Tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak Aceh sampai dengan 2024 adalah 90,08 persen, sedangkan capaian nasional adalah 92,64 persen. Dan capaian akses sanitasi layak tahun 2024 adalah 81,10 persen sedangkan capaian nasional adalah 83,60 persen. Dari

data tersebut menunjukkan bahwa capaian akses air minum dan sanitasi layak Aceh masih berada dibawah capaian nasional.




*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025*

Gambar 2.132. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi layak Aceh 2020-2024

Persentase Rumah Tangga terhadap akses sanitasi layak menurut Kabupaten/Kota sejak tahun 2020 sampai dengan 2024, Kota Banda Aceh masih mendominasi tingkat Rumah Tangga dengan Akses terhadap sanitasi layak tertinggi dan yang terendah adalah Kabupaten Gayo Lues. Secara rinci Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2020–2024 disajikan pada Tabel 2.139.

Tabel 2.139.
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2020–2024

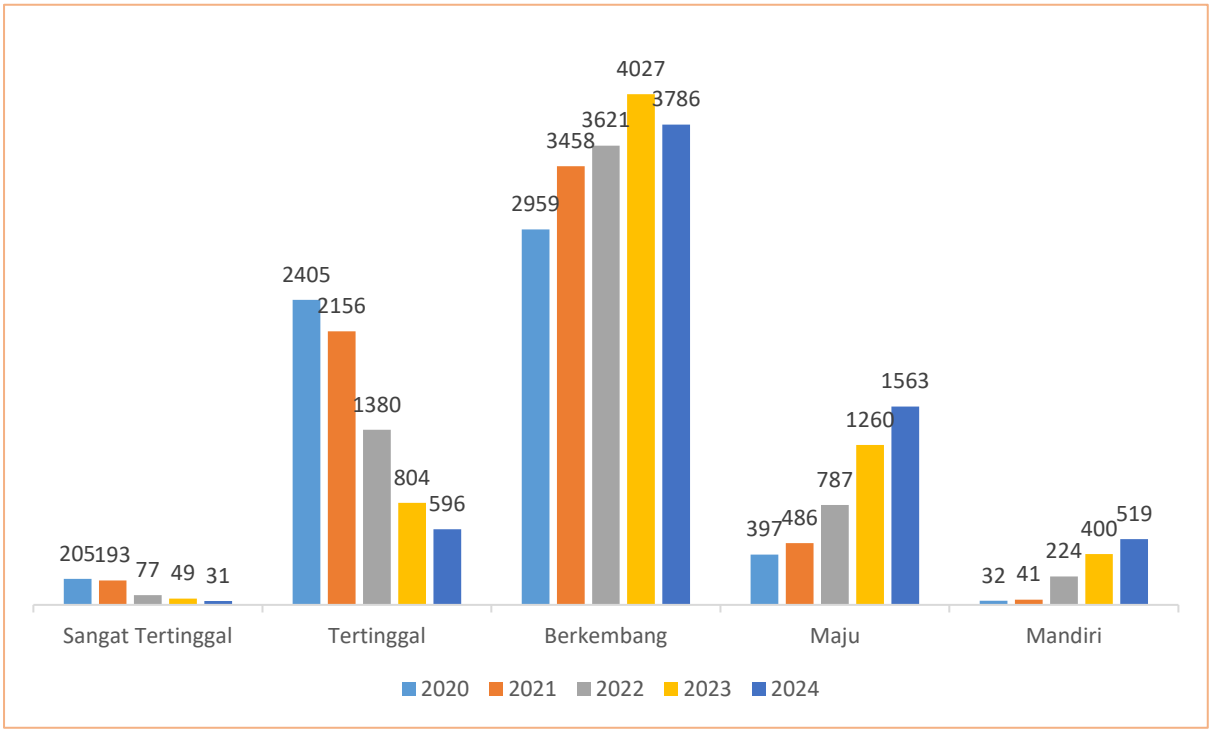
| Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Simeulue | 66,51 | 71,56 | 70,21 | 72,67 | 76,51 |
| Aceh Singkil | 64,22 | 69,56 | 78,92 | 67,93 | 63,22 |
| Aceh Selatan | 68,78 | 62,55 | 70,83 | 74,54 | 77,96 |
| Aceh Tenggara | 54,04 | 62,71 | 62,88 | 65,08 | 64,01 |
| Aceh Timur | 74,65 | 66,75 | 69,06 | 70,01 | 73,59 |
| Aceh Tengah | 81,26 | 90,58 | 89,69 | 92,61 | 86,34 |
| Aceh Barat | 83,45 | 89,60 | 88,39 | 90,16 | 91,09 |
| Aceh Besar | 87,51 | 87,40 | 83,49 | 89,07 | 90,30 |
| Pidie | 63,54 | 54,10 | 54,68 | 60,36 | 63,88 |
| Bireuen | 84,16 | 81,89 | 85,39 | 84,96 | 88,26 |
| Aceh Utara | 75,83 | 79,97 | 78,92 | 77,95 | 80,63 |
| Aceh Barat Daya | 50,27 | 65,71 | 65,94 | 64,69 | 69,39 |
| Gayo Lues | 43,32 | 47,63 | 46,33 | 46,05 | 49,79 |

| Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Aceh Tamiang | 84,61 | 87,45 | 82,74 | 78,61 | 85,93 |
| Nagan raya | 80,35 | 74,86 | 79,97 | 82,72 | 87,32 |
| Aceh Jaya | 83,27 | 81,60 | 78,05 | 78,83 | 82,31 |
| Bener Meriah | 84,12 | 86,69 | 81,56 | 87,04 | 88,05 |
| Pidie Jaya | 66,39 | 74,30 | 73,49 | 78,07 | 80,82 |
| Banda Aceh | 99,41 | 99,88 | 96,88 | 99,91 | 99,39 |
| Sabang | 89,20 | 92,25 | 89,52 | 93,96 | 95,90 |
| Langsa | 91,57 | 91,81 | 91,92 | 92,92 | 94,30 |
| Lhokseumawe | 88,07 | 93,10 | 90,27 | 90,36 | 93,71 |
| Subulussalam | 73,54 | 69,71 | 72,46 | 63,40 | 61,57 |
| Aceh | 77,06 | 77,55 | 77,48 | 78,85 | 81,10 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025*

## C. Persentase Desa mandiri (Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong)

Dalam rangka mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri, Kementerian Desa PDTT meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) melalui Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM. Perkembangan status desa di Aceh pada tahun 2019-2024 dapat kita lihat dalam Gambar 2.133.




*Sumber : DPMG Aceh, 2025*

Gambar 2.133. Status Desa di Aceh Tahun 2019 – 2024

Dari Gambar 2.133 di atas, terlihat bahwa status desa yang sangat tertinggal dan tertinggal di Aceh terus menurun dari tahun 2020 ke tahun 2024. Sedangkan status desa berkembang, maju, dan mandiri terus meningkat. Pada tahun 2020, desa maju di Aceh

berjumlah 397 desa meningkat menjadi 1.563 desa di tahun 2024. Sedangkan desa mandiri di tahun 2020 berjumlah 32 desa meningkat menjadi 519 desa di tahun 2024.

Tabel 2.140.
Status Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2024

| No | Kabupaten/Kota | Status Desa (Persen) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mandiri | Maju | Berkembang | Tertinggal | Sangat Tertinggal |
| 1 | Aceh Selatan | 5.00 | 14.23 | 61.15 | 18.85 | 0.77 |
| 2 | Aceh Tenggara | 1.30 | 38.44 | 56.10 | 3.38 | 0.78 |
| 3 | Aceh Timur | 5.26 | 34.50 | 54.19 | 5.65 | 0.39 |
| 4 | Aceh Tengah | 16.95 | 24.07 | 50.17 | 8.81 | 0.00 |
| 5 | Aceh Barat | 6.52 | 17.70 | 58.39 | 16.77 | 0.31 |
| 6 | Aceh Besar | 7.28 | 32.45 | 58.61 | 1.49 | 0.00 |
| 7 | Pidie | 1.92 | 15.62 | 79.59 | 2.88 | 0.00 |
| 8 | Aceh Utara | 0.94 | 11.74 | 63.62 | 22.18 | 1.41 |
| 9 | Simeulue | 2.90 | 13.04 | 65.22 | 18.84 | 0.00 |
| 10 | Aceh Singkil | 12.93 | 25.86 | 34.48 | 22.41 | 4.31 |
| 11 | Bireuen | 3.45 | 22.82 | 65.52 | 8.21 | 0.00 |
| 12 | Aceh Barat Daya | 4.61 | 19.74 | 73.68 | 1.97 | 0.00 |
| 13 | Gayo Lues | 3.68 | 24.26 | 58.82 | 13.24 | 0.00 |
| 14 | Aceh Jaya | 6.98 | 17.44 | 67.44 | 6.98 | 0.58 |
| 15 | Nagan Raya | 7.66 | 29.73 | 53.60 | 9.01 | 0.00 |
| 16 | Aceh Tamiang | 18.06 | 32.41 | 41.20 | 7.41 | 0.46 |
| 17 | Bener Meriah | 20.69 | 26.29 | 42.24 | 10.34 | 0.43 |
| 18 | Pidie Jaya | 6.31 | 41.89 | 49.10 | 1.80 | 0.90 |
| 19 | Banda Aceh | 93.33 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Sabang | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Lhokseumawe | 36.76 | 42.65 | 20.59 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Langsa | 21.21 | 37.88 | 39.39 | 1.52 | 0.00 |
| 23 | Subulussalam | 28.05 | 29.27 | 34.15 | 7.32 | 1.22 |

*Sumber: DPMG Aceh, 2025*

Dari Tabel 2.140 menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar desa di Aceh sudah berkembang, beberapa Kabupaten/Kota masih memiliki desa sangat tertinggal dengan persentase kecil, yaitu Kabupaten Aceh Singkil (4,31%), Aceh Utara (1,41%), dan Kota Subulussalam (1,22%). Sementara itu, hampir semua Kabupaten/Kota lainnya memiliki desa yang sudah berkembang, kecuali Kota Sabang dan Banda Aceh, yang seluruh desanya sudah maju dan mandiri.

Tabel 2.141
Alokasi Dana Desa Tahun 2019 – 2024

| No | Kabu/Kota | Jlh Desa | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Provinsi Aceh | 6.497 | 4.980.088.180.000 | 4.986.622.278.000 | 4.669.371.747.000 | 4.761.060.876.000 | 4.958.897.983.000 |
| 1 | Aceh Selatan | 260 | 205.268.050.000 | 205.268.050.000 | 194.090.688.000 | 195.811.103.000 | 196.339.440.000 |
| 2 | Aceh Tenggara | 385 | 284.561.253.000 | 284.561.253.000 | 265.902.419.000 | 270.051.986.000 | 281.372.115.000 |

| No | Kabu/Kota | Jlh Desa | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3 | Aceh Timur | 513 | 387.787.938.000 | 387.787.938.000 | 373.119.830.000 | 376.847.461.000 | 395.019.867.000 |
| 4 | Aceh Tengah | 295 | 223.350.548.000 | 223.350.548.000 | 209.831.057.000 | 212.942.662.000 | 222.523.597.000 |
| 5 | Aceh Barat | 321 | 250.632.328.000 | 250.632.328.000 | 234.408.383.000 | 224.045.853.000 | 236.111.096.000 |
| 6 | Aceh Besar | 603 | 437.555.848.000 | 437.555.848.000 | 415.515.724.000 | 422.285.475.000 | 440.931.838.000 |
| 7 | Pidie | 730 | 524.715.756.000 | 524.715.756.000 | 494.424.865.000 | 525.206.131.000 | 538.343.872.000 |
| 8 | Aceh Utara | 852 | 626.338.212.000 | 626.338.212.000 | 607.509.747.000 | 620.592.204.000 | 650.152.994.000 |
| 9 | Simeulue | 138 | 119.684.330.000 | 119.684.330.000 | 107.641.709.000 | 101.844.034.000 | 106.573.474.000 |
| 10 | Aceh Singkil | 116 | 108.080.283.000 | 108.080.283.000 | 96.138.732.000 | 92.832.222.000 | 96.528.106.000 |
| 11 | Bireuen | 609 | 455.523.085.000 | 455.523.085.000 | 442.297.899.000 | 446.168.583.000 | 462.263.930.000 |
| 12 | Aceh Barat Daya | 152 | 119.823.288.000 | 119.823.288.000 | 111.846.686.000 | 113.155.818.000 | 118.693.008.000 |
| 13 | Gayo Lues | 136 | 114.193.644.000 | 114.381.709.000 | 101.044.300.000 | 105.937.563.000 | 110.597.264.000 |
| 14 | Aceh Jaya | 172 | 135.065.795.000 | 135.065.795.000 | 118.845.057.000 | 121.957.443.000 | 128.024.164.000 |
| 15 | Nagan Raya | 222 | 175.871.395.000 | 175.871.395.000 | 161.264.111.000 | 165.760.447.000 | 172.968.346.000 |
| 16 | Aceh Tamiang | 215 | 171.672.967.000 | 171.672.967.000 | 163.372.347.000 | 166.158.308.000 | 177.156.461.000 |
| 17 | Bener Meriah | 232 | 182.834.539.000 | 182.834.539.000 | 167.049.012.000 | 164.707.235.000 | 173.100.709.000 |
| 18 | Pidie Jaya | 222 | 165.862.465.000 | 165.862.465.000 | 151.746.896.000 | 163.021.845.000 | 169.168.059.000 |
| 19 | Banda Aceh | 90 | 75.977.398.000 | 77.702.442.000 | 70.100.703.000 | 73.484.769.000 | 77.088.372.000 |
| 20 | Sabang | 18 | 25.156.301.000 | 26.798.027.000 | 14.179.325.000 | 15.014.733.000 | 15.636.770.000 |
| 21 | Lhokseumawe | 68 | 60.285.819.000 | 61.983.149.000 | 53.928.333.000 | 56.545.740.000 | 62.402.165.000 |
| 22 | Langsa | 66 | 59.424.404.000 | 60.706.341.000 | 53.156.136.000 | 59.732.506.000 | 58.843.788.000 |
| 23 | Subulussalam | 82 | 70.422.534.000 | 70.422.530.000 | 61.957.788.000 | 66.956.755.000 | 69.058.548.000 |

*Sumber: DPMG Aceh, 2025*

Tabel 2.141 menunjukkan bahwa alokasi dana desa untuk Aceh terus meningkat antara 2020 hingga 2024, meskipun sempat turun pada 2022 dan kembali naik pada 2023. Kabupaten Aceh Utara dan Pidie mendapatkan dana desa terbesar karena keduanya memiliki jumlah desa terbanyak di Aceh.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap tahun seluruh desa memperoleh alokasi dana desa sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, dan mandiri. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat desa yang lebih sejahtera.

## D. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator sebagai berikut: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum. jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun. ketaatan terhadap RTRW. luas wilayah produktif. luas wilayah industri. luas wilayah kebanjiran. luas wilayah kekeringan. luas wilayah perkotaan. jenis dan jumlah bank dan cabang. jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang. jenis. kelas. dan jumlah restoran. jenis. kelas. dan jumlah penginapan/hotel. persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih. rasio ketersediaan daya

listrik. persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

## E. Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh

Kondisi prasarana jaringan jalan mempengaruhi mobilitas masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Parameter yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan indeks mobilitas dan indeks aksesibilitas. Wilayah yang memiliki jaringan prasarana jalan yang rapat dengan panjang jalan yang tinggi akan mempermudah masyarakatnya melakukan kebutuhan pergerakannya. Selain itu juga maka wilayah tersebut mudah dijangkau dari arah manapun. Indeks aksesibilitas dan mobilitas kabupaten/kota di Aceh disajikan secara lengkap pada Tabel 2.142.

Tabel 2.142.
Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2024

| Kabupaten/ Kota | Luas ($Km^2$) | Jumlah Penduduk | Panjang Jalan (Km) | Indeks Aksesibilitas ($Km/Km^2$) | Indeks Mobilitas (Km/1.000 jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Simelue | 1.821,75 | 98.633 | 795,37 | 0,44 | 8,06 |
| Aceh Singkil | 1.852,82 | 135.684 | 556,76 | 0,30 | 4,10 |
| Aceh Selatan | 4.175,37 | 241.994 | 1.232,35 | 0,30 | 5,09 |
| Aceh Tenggara | 4.179,12 | 234.430 | 1.253,58 | 0,30 | 5,35 |
| Aceh Timur | 5.432,63 | 443.638 | 1.766,57 | 0,33 | 3,98 |
| Aceh Tengah | 4.521,70 | 226.744 | 1.159,75 | 0,26 | 5,11 |
| Aceh Barat | 2.818,17 | 206.822 | 867,41 | 0,31 | 4,19 |
| Aceh Besar | 2.882,83 | 428.254 | 1.644,63 | 0,57 | 3,84 |
| Pidie | 3.133,93 | 452.547 | 1.288,84 | 0,41 | 2,85 |
| Bireuen | 1.793,27 | 459.073 | 1.352,21 | 0,75 | 2,95 |
| Aceh Utara | 2.711,15 | 631.984 | 2.223,13 | 0,82 | 3,52 |
| Aceh Barat Daya | 1.882,28 | 159.187 | 844,36 | 0,45 | 5,30 |
| Gayo Lues | 5.541,28 | 106.791 | 1.109,87 | 0,20 | 10,39 |
| Aceh Tamiang | 2.184,40 | 309.039 | 1.082,24 | 0,50 | 3,50 |
| Nagan Raya | 3.416,32 | 176.429 | 1.147,02 | 0,34 | 6,50 |
| Aceh Jaya | 3.893,05 | 99.200 | 710,73 | 0,18 | 7,16 |
| Bener Meriah | 1.930,75 | 172.036 | 1.479,10 | 0,77 | 8,60 |
| Pidie Jaya | 953,12 | 166.467 | 580,56 | 0,61 | 3,49 |
| Banda Aceh | 55,85 | 265.019 | 676,06 | 12,10 | 2,55 |
| Sabang | 122,04 | 43.470 | 209,97 | 1,72 | 4,83 |
| Langsa | 217,17 | 197.909 | 657,87 | 3,03 | 3,32 |
| Lhokseumawe | 136,49 | 200.403 | 447,25 | 3,28 | 2,23 |
| Subulussalam | 1.183,60 | 99.062 | 604,72 | 0,51 | 6,10 |

*Sumber: BPS 2025, diolah*

Tabel 2.142, memberikan informasi bahwa indeks aksesibilitas tertinggi ditemukan di Kota Banda Aceh (12,10 km/km2), sedangkan indeks aksesibilitas terendah di Kabupaten Aceh Jaya dan Gayo Lues (0,20 km/Km2). Dengan demikian, pembangunan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas pada kabupaten/kota yang memiliki indeks aksesibilitas rendah sangat diperlukan. Selanjutnya, Kabupaten Gayo Lues memiliki indeks mobilitas tertinggi (10,39 km per 1.000 penduduk), sedangkan Kota Lhokseumawe memiliki nilai

indeks mobilitas terendah (2,23 km per 1.000 penduduk). Kota-kota di Aceh (kecuali Subulussalam mencapai 6.1) pada umumnya memiliki indeks mobilitas yang lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya.

## F. Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah Aceh dimaksudkan untuk menyelaraskan pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menghindari prinsip eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan dan mengarahkannya kepada pemanfaatan jasa lingkungan serta sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

Pelayanan umum urusan penataan ruang Aceh diselenggarakan berdasarkan pada Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033, yang mengambarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan, termasuk pengendalian pemanfaatan ruang dan peran serta masyarakat dan kelembagaan.

### F1. Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA

Pola ruang Aceh secara umum terbagi ke dalam kawasan lindung dan budidaya. Luas kawasan lindung sebesar 2.938.579,68 Ha (49,91%) dan kawasan budidaya sebesar 2.949.506,83 Ha (50,09%). Pola ruang berdasarkan RTRW Aceh secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.143.

Tabel 2.143.
Pola Ruang Berdasarkan RTRW Aceh 2013-2033

| Kawasan Lindung | Luas (ha) | Kawasan Budidaya | Luas (ha) |
|---|---|---|---|
| Hutan Lindung | 1.790.626 | Permukiman Perkotaan | 64.164,14 |
| Cagar Alam Serbajadi | 300 | Permukiman Perdesaan | 89.847,78 |
| SM. Rawa Singkil | 81.837 | Bandar Udara | 835,06 |
| SM. Pinus Jantho | 15.375 | Hutan Produksi Terbatas | 141.876,42 |
| TNGL Aceh | 624.651 | Hutan Produksi | 555.948,52 |
| TWA Pulau Weh Darat | 1.250 | Hutan Produksi Konversi | 15.578,28 |
| TWA P. Weh Laut | 5.280 | Hutan Pendidikan | 230,36 |
| TWA Pinus Jantho | 2.614 | Kawasan Konservasi | 4.764,08 |
| TWA P. Banyak Darat | 24.693 | Pertanian Lahan Basah | 252.063,34 |
| TWA P. Banyak Laut | 205.725 | Pertanian Lahan Kering | 436.004,66 |
| TWA Kuta Malaka | 1.549 | Hortikultura | 24.131,38 |
| Tahura PMI | 6.218,34 | Perkebunan Besar | 392.713,78 |
| Tahura Teupah Selatan | 919,58 | Perkebunan Rakyat | 761.099,36 |
| Tahura Gunung Kapor | 1.484,95 | Hutan Rakyat | 11.711,78 |
| Taman Buru Lingga Isaq | 86.319,80 | Kawasan Peternakan | 12.930,99 |
| Kawasan Lindung Mangrove | 1.122,50 | Budidaya Perikanan | 45.223,43 |
| Kawasan Lindung Resapan Air | 2.910 | Kawasan Pertambangan | 27.776,62 |

| Kawasan Lindung | Luas (ha) | Kawasan Budidaya | Luas (ha) |
|---|---|---|---|
| Kawasan Lindung Sempadan Danau | 1.504,23 | Kawasan Transmigrasi | 69.354,01 |
| Kawasan Lindung Sempadan Pantai | 9.865,06 | Kawasan Industri | 6.838,58 |
| Kawasan Lindung Sempadan Sungai | 72.780,35 | Pelabuhan | 264,18 |
| Kawasan Lindung Sempadan Waduk | 27,86 | Kawasan Pariwisata | 1.909,77 |
| Kawasan Lindung Cagar Budaya | 64,55 | Cagar Budaya | 510,26 |
| Kawasan Lindung Geologi | 1.141,87 | Pertahanan Keamanan | 567,04 |
| Kawasan Lindung Laut | 319,88 | Aset Sumber Daya Air | 180,64 |
| | | TPA | 20,44 |
| | | Tubuh Air | 32.961,93 |
| Jumlah | 2.938.579,68 | Jumlah | 2.949.506,83 |

*Sumber: Qanun Nomor 19/2013 Tentang RTRW Aceh 2013-2033*

Pola ruang yang diuraikan di dalam Tabel 2.143 menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang menyebabkan menurunnya tingkat kesesuaian pelaksanaan struktur dan polar uang terhadap RTRWA. Hasil peninjauan kembali terhadap RTRWA yang dituangkan ke dalam rumusan rekomendasi pada tahun 2019 berdasarkan tingkat kualitas RTRWA, tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang dan tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, maka RTRWA mendapatkan nilai sebesar 53,10 dan dinyatakan buruk. Hal ini berbanding dengan passing grade senilai 85 sebagai RTRW yang dinyatakan baik. Penilaian ini tentunya berdampak kepada harus direvisinya RTRWA.

Selain itu, berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Penataan Ruang pada pasal 245 poin (b) mengamanatkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3-K) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Sesuai dengan amanat tersebut, dokumen dan muatan teknis RZWP3K 2020-2040 harus diintegrasikan ke dalam revisi RTRWA 2013-2033 dan menjadi produk tata ruang. Untuk menciptakan kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang terhadap RTRWA, hal utama yang harus dilakukan adalah merevisi RTRWA 2013-2033 dan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Aceh. Senada dengan itu, pada pasal 60-84 PP Nomor 21 Tahun 2021, maka jangka waktu penyusunan dan penetapan RTRWA dibatasi paling lama 18 bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan RTRWA.

### F2. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30 persen wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20

persen publik dan 10 persen privat. Ketersediaan RTH publik di Aceh sampai dengan tahun 2019 telah mencapai sebesar 33.23 persen, hal ini disebabkan karena meningkatnya beberapa Kawasan RTH terutama di Kota Subulussalam sebesar 1806,64 Ha. Meskipun demikian masih ada beberapa kabupaten/kota lainnya yang harus memenuhi kebutuhan RTH Publik.

Tabel 2.144.
Luasan RTH Publik di Aceh Tahun 2019-2024

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Persentase Luasan RTH publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan (%) | 3,82 | 12,19 | 83,13 | 14,61 | 46,87 | 46,86 |
| 2 | Luasan dalam Ha | 516,19 | 1.013,70 | 78.527,13 | 1.211,76 | 9.928,85 | 19.432,11 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, (SIPSN KLHK 2025)*

## G. Pengairan

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air. Konservasi Sumber Daya Air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air. Konservasi Sumber Daya Air dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan : perlindungan dan pelestarian Sumber Air; pengawetan air; pengelolaan kualitas air; dan pengendalian pencemaran air.

Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari – hari masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan : penatagunaan Sumber Daya Air; penyediaan Sumber Daya Air; Penggunaan Sumber Daya Air; dan Pengembangan Sumber Daya Air. Pengendalian Daya Rusak Air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pengendalian Daya Rusak Air ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh Daya Rusak Air.

### G1. Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi meliputi bangunan saluran dan bangunan pelengkapnya sebagai satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan kedalam tiga kategori yaitu jaringan primer, skunder dan tersier. Sedangkan ditinjau dari sisi kewenangan jaringan dibedakan menjadi jaringan irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten/kota.

## G1.1. Luas dan Jenis Daerah Irigasi Berdasarkan Kewenangan

Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 14/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Luas Daerah Irigasi di Provinsi Aceh adalah 390.518 Ha yang terdiri dari 1.499 Daerah Irigasi (DI), terdiri dari Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota dan Daerah Irigasi utuh Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.145.

Tabel 2.145.
Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangannya

| No | Kewenangan | Lintas Kabupaten/ Kota (Ha) | Utuh Kabupaten/ Kota (Ha) | Total | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemerintah | 26.397,00 | 82.225 | 108.622 | Ha | 13 | DI |
| 2 | Pemerintah Provinsi | 2.144,00 | 76.324 | 78.468 | Ha | 47 | DI |
| 3 | Pemerintah Kabupaten/Kota | 0,00 | 203.428 | 203.428 | Ha | 1.439 | DI |
| Total | | 28.541 | 361.977 | 390.518 | Ha | 1.499 | DI |

*Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015*

Penjabaran total Daerah Irigasi dan luasannya berdasarkan kewenangan, terdiri dari Irigasi Permukaan seluas 363.292 Ha yang mencangkup 1.400 D.I; Irigasi Air Tanah seluas 1.858 Ha yang mencangkup 66 D.I; Irigasi Rawa seluas 5.724 Ha yang mencangkup 3 D.I; dan Irigasi Tambak seluas 19.644 Ha yang mencangkup 30 D.I. Irigasi kewenangan pemerintah pusat sebanyak 13 D.I dengan luas 108.622 Ha, kewenangan pemerintah provinsi sebanyak 47 D.I dengan luas 78.468 Ha, dan kewenangan pemerintah Kabupaten/kota sebanyak 1.439 DI dengan luas 203.428 Ha sebagaimana disajikan pada Tabel 2.146.

Tabel 2.146.
Jenis Irigasi dan Luasannya

| No | Daerah Irigasi | Kewenangan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pemerintah | | Aceh | | Kabupaten/Kota | |
| | | D.I | Ha | D.I | Ha | D.I | Ha |
| 1 | Permukaan | 12 | 101.622 | 38 | 65.409 | 1.350 | 196.261 |
| 2 | Air Tanah | - | - | - | - | 66 | 1.858 |
| 3 | Rawa | - | - | 3 | 5.724 | - | - |
| 4 | Tambak | 1 | 7.000 | 6 | 7.335 | 23 | 5.309 |
| Total | | 13 | 108.622 | 47 | 78.468 | 1.439 | 203.428 |

*Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015*

Tabel 2.146, menunjukkan bahwa irigasi kewenangan pemerintah pusat sebanyak 13 D.I dengan luas 108.622 Ha, kewenangan pemerintah provinsi sebanyak 47 D.I dengan luas 78.468 Ha, dan kewenangan pemerintah Kabupaten/kota sebanyak 1.439 DI dengan luas 203.428 Ha. Jumlah dan Luasan Daerah Irigasi tersebut seluruhnya berada di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana disajikan pada Tabel 2.147.

Tabel 2.147
Luasan Daerah Irigasi Wilayah Aceh Berdasarkan Kewenangan Menurut Kabupaten/Kota

| No. | Kabupaten/Kota | Kewenangan Pemerintah Pusat | | Kewenangan Provinsi | | Kewenangan Kabupaten/Kota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D.I | Luasan (Ha) | D.I | Luasan (Ha) | D.I | Luasan (Ha) |
| 1 | Simeulue | - | - | - | - | 52 | 5,343 |
| 2 | Aceh Singkil | 1 | 7,000 | 1 | 1,300 | 11 | 698 |
| 3 | Aceh Selatan | - | - | 6 | 10,630 | 131 | 13,655 |
| 4 | Aceh Tenggara | 1 | 15,000 | 6 | 8,169 | 83 | 15,028 |
| 5 | Aceh Timur | - | - | 6 | 10,179 | 73 | 7,578 |
| 6 | Aceh Tengah | - | - | - | - | 126 | 16,010 |
| 7 | Aceh Barat | - | - | 1 | 1,000 | 97 | 15,660 |
| 8 | Aceh Besar | 2 | 12,040 | - | - | 131 | 21,070 |
| 9 | Pi d i e | 2 | 19,118 | 1 | 1,100 | 121 | 12,232 |
| 10 | Bireuen | 2 | 9,683 | 5 | 8,380 | 74 | 13,045 |
| 11 | Aceh Utara | 3 | 32,539 | 5 | 7,834 | 132 | 22,040 |
| 12 | Aceh Barat Daya | 1 | 5,793 | 2 | 3,234 | 30 | 3,040 |
| 13 | Gayo Lues | - | - | 2 | 4,675 | 116 | 10,011 |
| 14 | Aceh Tamiang | - | - | 1 | 2,000 | 41 | 7,115 |
| 15 | Nagan Raya | 1 | 7,449 | - | - | 37 | 6,931 |
| 16 | Aceh Jaya | - | - | 7 | 13,859 | 58 | 10,669 |
| 17 | Bener Meriah | - | - | 1 | 1,270 | 72 | 14,617 |
| 18 | Pidie Jaya | - | - | 3 | 4,838 | 58 | 6,258 |
| 19 | Banda Aceh | - | - | - | - | 2 | 655 |
| 20 | Sabang | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Langsa | - | - | - | - | 2 | 1,773 |
| 22 | Lhokseumawe | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Subulussalam | - | - | - | - | - | - |
| Total | | 13 | 108,622 | 47 | 78,468 | 1,439 | 203.428 |

*Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015*

Keberhasilan pembangunan jaringan irigasi bukan hanya menghadirkan jaringan irigasi secara fisik, tetapi bagaimana kemampuan jaringan irigasi tersebut bisa membawa air lebih efisien sampai ke areal persawahan yang menjadi daerah pelayanannya sehingga dapat terjaga kelestariannya dan berkesinambungan. Pada beberapa Daerah Irigasi khususnya daerah irigasi permukaan, kondisi jaringan irigasi sangat memprihatinkan karena kemampuan pelayanan air irigasi telah mengalami penurunan fungsi, yang disebabkan oleh kondisi saluran pembawa, pintu-pintu air dan bangunan ukur tidak berfungsi dan beroperasi dengan baik. Kondisi jaringan irigasi Daerah Irigasi permukaan dan bangunan-bangunan yang ada pada Daerah Irigasi disajikan pada Tabel 2.148.

Tabel 2.148.
Kondisi Saluran Irigasi Permukaan berdasarkan Kewenangan

| 2022 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kewenangan | Luas | | Kuantitas (Km) | Kondisi Saluran | | | | | |
| | | Baku | Fungsional | | Baik | | Rusak Sedang | | Rusak Berat | |
| | | (Ha) | (Ha) | | (km) | (%) | (km) | (%) | (km) | (%) |
| 1 | Pusat | 101,622 | 90.544 | 1.011 | 817 | 68,36 | 351 | 29,40 | 27 | 2,24 |
| 2 | Provinsi | 65,409 | 38.462 | 532.51 | 416.68 | 78.25 | 41.38 | 7.77 | 35.02 | 6.58 |
| 3 | Kab/Kota | 196,261 | 104,018 | 2,770 | 1,395.72 | 50.38 | 716.02 | 25.85 | 658.48 | 23.77 |

*Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2023*

Daerah irigasi memiliki luas layanan, fungsi dari saluran dan bangunan yang telah dibangun berdasarkan kewenangan masing-masing. Berdasarkan data tahun 2025, Daerah Irigasi kewenangan Kab/Kota, memiliki jumlah jaringan dan bangunan irigasi terbesar dengan panjang jaringan sepanjang 2.668,97 km, jumlah bangunan sebanyak 10.234 unit dan luas layanan fungsional 68.941 Ha, selanjutnya daerah irigasi kewenangan pusat dengan panjang jaringan sepanjang 1.189,46 km, jumlah bangunan 1011 unit dengan luas layanan fungsional 67.689 Ha, sedangkan daerah irigasi kewenangan provinsi berdasarkan data yang ada pada Tahun 2025, memiliki panjang jaringan 537,34 km, jumlah bangunan 1.117 unit dengan luas layanan fungsional 23.254 Ha. Terjadinya penurunan panjang saluran pembawa dan luas layanan jaringan irigasi kewenangan provinsi jika dibandingkan dengan data tahun–tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya upaya updating data inventarisasi jaringan dan luasan irigasi yang dilakukan oleh Dinas Pengairan Aceh sebagaimana disajikan pada Tabel 2.149.

Tabel 2.149.
Kondisi Bangunan Irigasi Permukaan Berdasarkan Kewenangan

| 2022 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kewenangan | Luas | | Kuantitas (Unit) | Kondisi Bangunan | | | |
| | | Baku | Fungsional | | Baik | | Rusak | |
| | | (Ha) | (Ha) | | (Unit) | (%) | (Unit) | (%) |
| 1 | Pusat | 101,622 | 90.544 | 1011 | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 2 | Provinsi | 65.409 | 38.462 | 1,117 | 928 | 83.08 | 189 | 16.92 |
| 3 | Kab/Kota | 196.261 | 104.018 | 10,943 | 5,023 | 45.90 | 5,920 | 54.10 |

*Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2023*

Ditinjau dari kondisi jaringan terdapat kondisi baik, kondisi rusak ringan, kondisi rusak sedang dan kondisi rusak berat. Pada tahun 2025 kondisi jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam keadaan baik mencapai 78.25 dalam kondisi rusak sedang 7.77 % dan dalam kondisi rusak berat 13.98 %. Persentase irigasi Aceh dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan dan pelayanan kepada masyarakat juga meningkat dari tahun ke tahun.

### G1.2. Persentase Irigasi Aceh Dalam Kondisi Baik

Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik memiliki Indikator untuk mengukur kinerja suatu Daerah Irigasi yang selanjutnya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah Persentase Irigasi Aceh Dalam Kondisi Baik. Melalui serangkaian kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 yang meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, Persentase Irigasi Aceh Dalam Kondisi Baik mencapai 72,98 persen. Angka capaian ini melampaui angka yang ditargetkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023 – 2026 yang sebesar 72,65 persen dengan persentase capaian mencapai 100,45 persen. Perkembangan Persentase Irigasi Aceh Dalam Kondisi Baik dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2024 di sajikan dalam Tabel 2.150.

Tabel 2.150
Hasil Capaian Persentase Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik Tahun 2017-2024

| Keterangan | Satuan | Tahun | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik | % | 67,37 | 71,16 | 74,20 | 78,79 | 79,55 | 82,56 | 71,21 | 72,98 |

*Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2024*

Hasil Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik Tahun 2017-2024 menargetkan luas lahan budidaya seluas 65.409 Ha dengan hasil luas lahan fungsional seluas 38.462 Ha. Selanjutnya berdasarkan Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kebijakan satu peta yang merupakan target pemerintah untuk memanfaatkan Informasi Geospasial Tematik (IGT) dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan. Maka dari hasil pemetaan Informasi Geospasial Tematik (IGT), dihasilkan luas lahan budidaya yang ditargetkan di tahun 2024 masih digunakan luasan 38.462 Ha dengan realisasi luasan lahan fungsional mencapai 23.254 Ha. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan realisasi terhadap Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik.

G2. Rawa

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2013 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak, Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung didalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar datau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem. Pengembangan Rawa di wilayah Pantai Utara Timur diprioritaskan untuk budidaya perikanan (tambak), sedangkan di Pantai Barat Selatan untuk lahan pertanian. Namun belum seluruh rawa dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena belum didukung oleh jaringan drainase yang memadai. Pengembangan rawa menjadi lahan pertanian harus dilakukan secara hati-hati dan berpedoman kepada RTRW Aceh yang telah ditetapkan. Dengan kata lain beberapa kawasan rawa yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan suaka marga satwa tidak boleh dimanfaatkan sebagai lahan budidaya (pertanian). Selanjutnya pengembangan rawa di luar kawasan lindung dan suaka marga satwa harus berpedoman kepada undang-undang tata ruang (UU Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penataan Tata Ruang).

G3. Pantai

Fenomena kerusakan pantai sampai saat ini masih terus terjadi, dimana abrasi paling dominan yang terjadi disebabkan oleh perubahan iklim ekstrim arah angin Barat dan Timur. Panjang garis pantai Aceh sepanjang 2.442 Km dengan total panjang pantai dalam kondisi kritis yang telah teridentifikasi pada tahun 2024 adalah sepanjang 226.53 Km. Berdasarkan Tabel 2.25, total panjang pantai kritis pada tahun 2017 adalah sepanjang 233,94 km, dimana 16,54 persen diantaranya berada di Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan kondisi pantai kritis pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 226,53 km. Hal ini menunjukkan

penanganan terhadap pantai kritis ini telah dilakukan sepanjang 7,41 km selama rentang waktu 2017 hingga 2024. Pada tahun 2024 total pantai yang masih kritis terbesar masih berada di Kabupaten Aceh Besar yaitu sepanjang 38,52 km atau 17 persen. Kerusakan pantai karena abrasi di Aceh, berdasarkan data pada tahun 2024 diperkirakan sepanjang 226,53 km. Panjang Pantai dalam kondisi kritis tahun 2017-2024 disajikan dalam Tabel 2.151.

Tabel 2.151.
Panjang Pantai Dalam Kondisi Kritis Tahun 2017-2024

| No. | Kabupaten/ Kota | Panjang Pantai dalam Kondisi Kritis (km) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Sabang | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3.57 | 3.57 |
| 2 | Banda Aceh | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5.86 | 5.86 |
| 3 | Aceh Besar | 38,69 | 38,62 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.52 |
| 4 | Aceh Jaya | 35.03 | 34.76 | 34,49 | 33.22 | 33.22 | 32.98 | 32.98 | 32.98 |
| 5 | Aceh Barat | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 |
| 6 | Nagan Raya | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 7 | Aceh Barat Daya | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 |
| 8 | Aceh Selatan | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 17.84 | 17.56 | 17.56 | 16.83 | 16.83 |
| 9 | Aceh Singkil | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
| 10 | Pidie | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 |
| 11 | Pidie Jaya | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.83 |
| 12 | Bireuen | 3.66 | 3.66 | 3.52 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.35 | 2.35 |
| 13 | Lhokseumawe | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 |
| 14 | Aceh Utara | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.07 | 14.89 | 14.89 |
| 15 | Aceh Timur | 9.12 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.11 |
| 16 | Langsa | 5.11 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
| 17 | Simeulue | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |
| Jumlah | | 233,94 | 231,94 | 231.43 | 229.38 | 229.10 | 228.71 | 226.95 | 226.62 |

*Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2023*

## G4. Sungai

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Aceh memiliki 152 DAS, yang terletak dalam Daerah Strategis Nasional sebanyak 56 DAS yaitu WS. Aceh– Meureudu memiliki 30 DAS, WS. Woyla–Bateue memiliki 13 DAS dan WS. Jambo Aye memiliki 13 DAS. Pada Daerah Lintas Provinsi yaitu WS. Alas–Singkil memiliki 8 DAS, sedangkan pada Daerah Lintas Kab/Kota terdapat 62 DAS yaitu WS. Teunom–Lambeso memiliki 14 DAS, WS. Pase–Peusangan memiliki 10 DAS, WS. Tamiang–Langsa memiliki 17 DAS dan WS. Baru–Kluet memiliki 21 DAS dan dalam pemerintahan Kabupaten/Kota yaitu WS Simeulue memiliki 26 DAS.

Terdapat beberapa sungai yang telah mengalami degradasi dan sedimentasi sehingga diperlukan penanganan menyeluruh mulai dari bagian hulu, tengah, dan hilir sungai. Untuk bagian hulu dilakukan penanganan terhadap rehabilitasi lahan kritis melalui reboisasi pada luasan daerah aliran sungai. Sementara itu wilayah tengah sungai diperlukan pengawasan dan penertiban pemanfaatan sungai, berikut pembangunan

tanggul terhadap penyelamatan fasilitas publik yang didahului dengan perencanaan. Sedangkan wilayah hilir dilakukan Pengerukan pada daerah – daerah yang terjadi sedimentasi yang telah mengganggu aktivitas pelayaran dan aktivitas perekonomian lainnya. Ada beberapa sungai yang perlu dilakukan kegiatan Pemeliharaan seperti Krueng Arakundo, Krueng Keureuto, Krueng Tamiang, Krueng Langsa dan Krueng Teunom dan pada beberapa lokasi sungai-sungpendidikai tersebut diperlukan upaya penertiban terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sempadan sungai untuk mengamankan asset pemerintah.




*Sumber: Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015*

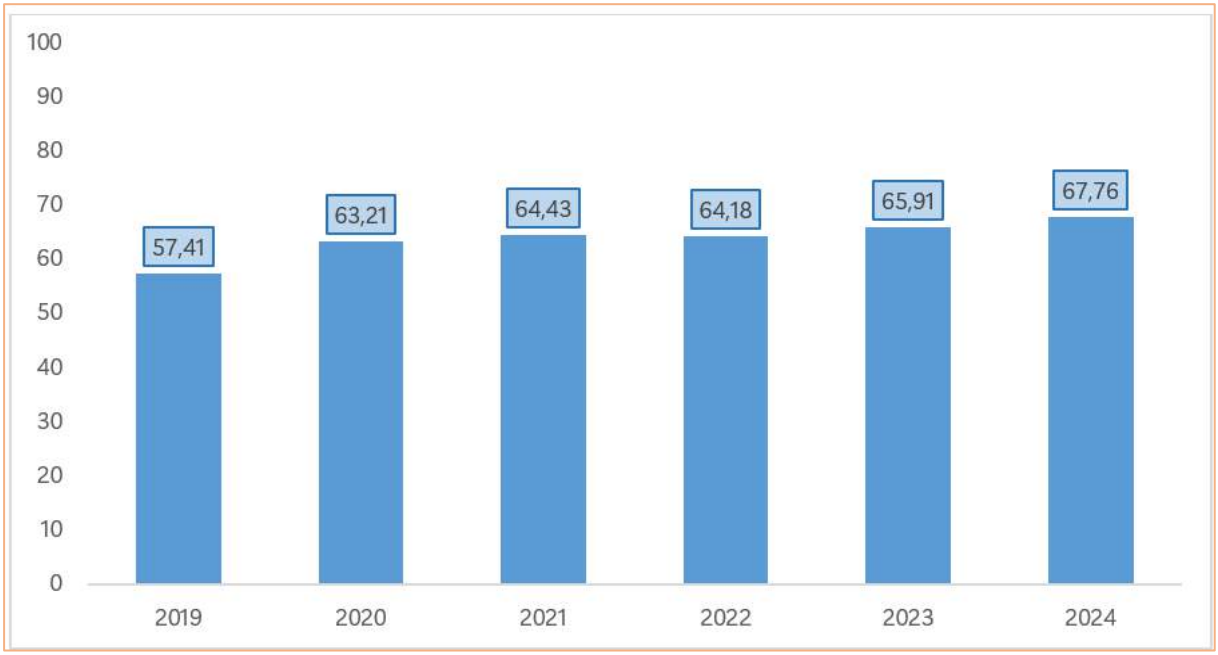
Gambar 2.134. Pembagian Wilayah Sungai Aceh

Sebagian besar muara sungai, terjadi endapan sedimen yang sangat besar sehingga menyebabkan terhambatnya aliran banjir dan mengganggu lalu lintas kapal/perahu nelayan. Sungai-sungai yang muaranya terjadi endapan sedimen antara lain, Krueng Baro di Kabupaten Pidie, Krueng Ulim dan Krueng Pante Raja di Kabupaten Pidie Jaya, Krueng Peudada, Krueng Samalanga, Krueng Jeunib dan Krueng Plimbang di Kabupaten Bireuen, Krueng Idi di Kabupaten Aceh Timur, Krueng Langsa di Kota Langsa, Krueng Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang, Krueng Teunom di Kabupaten Aceh Jaya, Krueng Seunagan dan Krueng Tripa di Kabupaten Nagan Raya dan Krueng Singkil di Kabupaten Aceh Singkil, Krueng Labuhan Haji dan Krueng Kluet di Aceh Selatan, Krueng Sarah di Kabupaten Aceh Besar.

H. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat serta mutu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur. Perumahan dan permukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan.

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian yang baik termasuk didalamnya kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta keterlibatan dan peran serta masyarakat. Selanjutnya, capaian persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di Aceh sampai dengan tahun 2024 adalah 67,76 persen, diatas capaian nasional yaitu 65,25 persen, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.135.




*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi, 2025*

Gambar 2.135. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Persen

Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas

terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman).

Sementara itu, luas kawasan kumuh pada tahun 2020 mengacu pada Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan total luasan sebesar 6646,01 ha. Total luasan ini mengalami peningkatan menjadi 6141,62 ha pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 luas kawasan kumuh meningkat lagi menjadi 7315,46 ha, pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 7526,51 ha. Sehingga Total Luasan kawasan kumuh Aceh di awal Tahun 2024 adalah sebesar 7627,54 ha. Secara lebih rinci luas kawasan kumuh di Aceh dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 (awal) dapat dilihat pada Tabel 2.152.

Tabel 2.152
Luas Kawasan Kumuh di Aceh Tahun 2020 dan 2024

| Kabupaten/ Kota | SK Bupati/ Walikota 2020 | | SK Bupati/ Walikota 2021 | | SK Bupati/Walikota 2022 | | SK Bupati/ Walikota 2023 | | SK Bupati/ Walikota 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kawasan | Luas (Ha) | Kawasan | Luas (Ha) | Kawasan | Luas (Ha) | Kawasan | Luas (Ha) | Kawasan | Luas (Ha) |
| Aceh | 473 | 6646,01 | 547 | 6141,62 | 613 | 7315,46 | 669 | 7526,51 | 582 | 7627,545 |
| Banda Aceh | 20 | 451,40 | 26 | 451,4 | 26 | 451,4 | 26 | 451,4 | 26 | 451,4 |
| Aceh Barat | 12 | 152,29 | 12 | 152,29 | 9 | 194,67 | 9 | 194,67 | 9 | 185,35 |
| Sabang | 4 | 123,71 | 4 | 123,713 | 4 | 123,71 | 16 | 100,277 | 16 | 100,277 |
| Aceh Besar | 7 | 185,37 | 13 | 152,28 | 13 | 152,28 | 13 | 152,28 | 13 | 152,28 |
| Langsa | 18 | 359,40 | 18 | 359,40 | 18 | 359,40 | 56 | 359,40 | 56 | 359,40 |
| Simeulue | 1 | 29,55 | 1 | 29,55 | 1 | 29,55 | 1 | 29,55 | 1 | 29,55 |
| Aceh Tamiang | 41 | 348,12 | 41 | 348,12 | 34 | 307,55 | 34 | 307,55 | 34 | 307,55 |
| Aceh Timur | 20 | 538,85 | 20 | 538,85 | 20 | 538,85 | 20 | 538,85 | 20 | 538,85 |
| Bireuen | 29 | 1031,72 | 38 | 588,90 | 38 | 588,90 | 38 | 588,90 | 38 | 588,90 |
| Aceh Tenggara | 52 | 563,89 | 51 | 284,35 | 51 | 284,35 | 51 | 284,35 | 51 | 284,35 |
| Bener Meriah | 10 | 337,25 | 10 | 337,25 | 12 | 87,05 | 12 | 87,05 | 12 | 87,05 |
| Aceh Utara | 7 | 62,97 | 7 | 62,97 | 7 | 62,97 | 13 | 297,45 | 13 | 297,45 |
| Aceh Singkil | 9 | 108,86 | 9 | 108,86 | 9 | 108,86 | 9 | 108,86 | 9 | 108,86 |
| Aceh Barat Daya | 33 | 832,51 | 33 | 832,51 | 33 | 832,51 | 33 | 832,51 | 33 | 832,51 |
| Nagan Raya | 43 | 108,33 | 43 | 108,33 | 43 | 108,33 | 43 | 108,33 | 34 | 260,93 |
| Gayo Lues | 30 | 69,34 | 30 | 69,34 | 30 | 69,34 | 30 | 69,34 | 30 | 69,34 |
| Pidie Jaya | 12 | 206,10 | 66 | 457,16 | 66 | 457,16 | 66 | 457,16 | 42 | 1015,43 |
| Lhokseumawe | 17 | 78,10 | 17 | 78,1 | 17 | 78,1 | 17 | 78,1 | 17 | 78,1 |
| Subulussalam | 12 | 320,17 | 12 | 320,17 | 12 | 320,17 | 12 | 320,17 | 12 | 320,17 |
| Aceh Tengah | 14 | 187,39 | 14 | 187,39 | 14 | 187,39 | 14 | 187,39 | 6 | 161,61 |
| Pidie | 66 | 294,30 | 66 | 294,3 | 66 | 294,3 | 66 | 294,3 | 66 | 294,3 |
| Aceh Selatan | 8 | 120,10 | 8 | 120,1 | 82 | 1542,33 | 82 | 1542,33 | 36 | 967,6 |
| Aceh Jaya | 8 | 136,29 | 8 | 136,29 | 8 | 136,29 | 8 | 136,29 | 8 | 136,29 |

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, 2024*

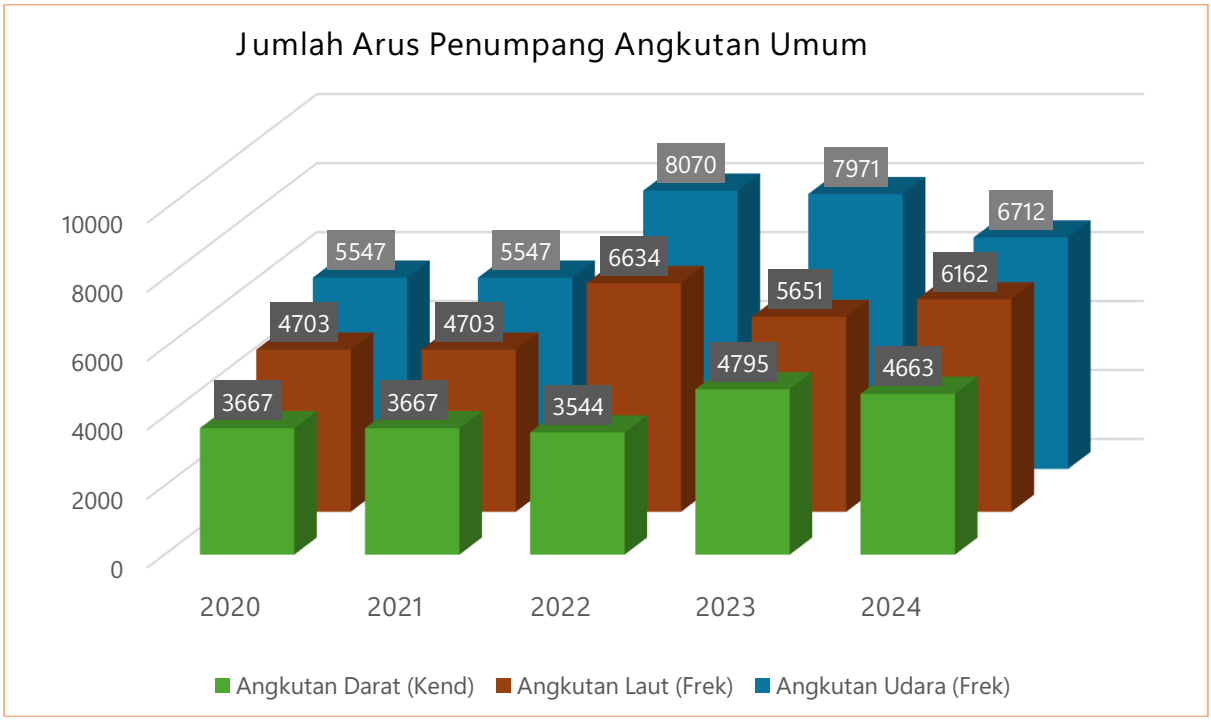
Dalam hal infrastuktur pemerintah Aceh terutama gedung-gedung pelayanan publik belum ramah terhadap disabilitas hal ini disampaikan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) pada saat konsultasi publik, oleh karenanya kepada SKPA yang berkepentingan untuk membangun dan memelihara sarana fasilitas publik pemerintah seperti Perkim, Pora, Dishub, Dinkes, Disdik, PUPR agar mengambil langkah – langkah signifikan sebagai berikut.

1) Mengubah infrastuktur pelayanan publik yang sudah ada agar merehabilitasi saranan umum sehingga ramah disabilitas;
2) Perencanaan/DED pembangunan infrastruktur pelayanan publik agar didiskusikan dengan para disabilitas.

## I. Perhubungan

### I1. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum berupa angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara pada tahun 2024 secara keseluruhan mengalami tren peningkatan yang cukup baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya khususnya pada arus penumpang angkutan laut, sedangkan jumlah arus penumpang yang menggunakan transportasi udara dan darat cenderung menurun meski tidak signifikan. Tren peningkatan jumlah arus penumpang yang menggunakan angkutan umum di Aceh seiring dengan peningkatan frekuensi penyediaan jasa layanan angkutan serta peningkatan dalam pemenuhan aspek standar pelayanan minimal sebagaimana yang tersaji pada Gambar 2.136.




*Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2025*

Gambar 2.136. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Aceh Tahun 2020-2025

### I2. Rasio izin trayek

Seluruh angkutan umum yang melayani trayek antar Kabupaten/Provinsi (AKDP dan AKAP) wajib memiliki izin trayek sesuai dengan trayek yang diusulkan serta armada yang didaftarkan. . Rasio izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2024 sebanyak 1 : 1399. izin/jumlah penduduk sebagaimana yang tersaji pada Gambar 2.137.




*Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2025*

Gambar 2.137. Rasio Izin Trayek di Aceh Tahun 2020-2024

Hal ini dimaksudkan untuk dilakukannya penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga dapat meminimalisir adanya trayek ilegal (tidak berizin) yang dilakukan para penyedia jasa (operator) angkutan umum.

I3. Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal

Sarana perhubungan tersebar di 7 zona sebagai pusat kegiatan, yaitu :

a. Zona 1 Pusat Kegiatan di Sabang;
b. Zona 2 Pusat Kegiatan di Banda Aceh (Aceh Besar dan Aceh Jaya);
c. Zona 3 Pusat Kegiatan di Lhokseumawe (Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara);
d. Zona 4 Pusat Kegiatan di Takengon (Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara);
e. Zona 5 Pusat Kegiatan di Blang Pidie (Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan);
f. Zona 6 Pusat Kegiatan di Singkil (Subulussalam dan Simeulue);
g. Zona 7 Pusat Kegiatan di Langsa (Aceh Timur dan Aceh Tamiang).

Fasilitas dan Prasarana Transportasi di Aceh secara garis besar dibedakan menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kemenhub), Pemerintah Provinsi (Dinas Perhubungan Aceh), dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dishub Kab/Kota). Fasilitas prasarana perhubungan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi terdiri dari 6 pelabuhan penyeberangan, 11 terminal penumpang tipe B dengan 9 diantaranya fungsional, dan 1 fasilitas penerbangan berupa gedung penumpang VIP yang tersebar di beberapa kabupaten/ kota yang ada di Aceh. Berikut visualisasi peta sebaran prasarana perhubungan kewenangan pemerintah provinsi.

Sampai tahun 2018 Aceh memiliki 12 bandara, 11 pelabuhan laut dan 8 pelabuhan penyeberangan serta 36 terminal yang terdiri dari 4 tipe A, 11 tipe B dan 20 tipe C. Di tahun 2019 terdapat 1 penambahan status terminal tipe A baru yaitu Terminal Tipe A Paya Ilang

Kabupaten Aceh Tengah sehingga jumlah terminal tipe A menjadi 5 terminal, sedangkan terminal tipe C berkurang menjadi 22 terminal.

Kemudian di tahun 2022 terdapat penambahan status terminal tipe B Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, sehingga jumlah terminal tipe B menjadi 10 terminal, sedangkan terminal tipe C berkurang menjadi 20 terminal. Selanjutnya, pada tahun 2023 terdapat pengurangan jumlah terminal Tipe B yaitu Terminal Tipe B Nagan Raya dikarenakan belum termasuk dalam Surat Keputusan Gubernur Aceh, kondisi ini tetap bertahan hingga tahun 2024. Di tahun 2024, status Air Strip di Langsa dihapuskan dari data bandar udara nasional yang tercantum dalam KM Perhubungan No. 33 Tahun 2014 Tatanan Kebandarudaraan Nasional sehingga jumlah bandara turun menjadi 11 bandara, meskipun di dalam KM tersebut terdapat rencana pembangunan Bandara Bireuen yang belum terbangun sampai dengan saat ini, sehingga jumlah bandara tetap menjadi 12 unit. Jumlah pelabuhan, bandara dan terminal di Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.153.

Tabel 2.153
Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2020-2024

| Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Jumlah Pelabuhan Laut | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Jumlah Pelabuhan Penyeberangan | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Jumlah Bandar Udara | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Jumlah Terminal Tipe A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jumlah Terminal Tipe B | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 |
| Jumlah Terminal Tipe C | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2025*

## I4. Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR

Layanan angkatan darat cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun-tahun. Hal ini menujukkan minat masyarakat terhadap angkutan darat semakin menurun. Faktor penyebab utama adalah jarak tempuh dari Banda Aceh ke Medan lebih lama dibandingkan dengan angkutan udara dan pendapatan masyarakat semakin meningkat sehingga mampu untuk menggunakan angkutan udara. Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Aceh Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.154.

Tabel 2.154
Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Aceh Tahun 2020-2024

| Uraian | | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase layanan angkutan darat | Aceh | 47 | 10 | 71.43 | 32.28 | 38.07 |
| | Nasional | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | Aceh | 27 | 64 | 66 | 60 | 54 |
| | Nasional | 27 | 27 | 30 | n/a | n/a |

*Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2025*

### I5. Pemasangan Rambu-rambu

Perlengkapan jalan merupakan prasarana jalan yang diharuskan dipasang pada ruas jalan yang bertujuan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Perlengkapan jalan terdiri dari beberapa jenis, yaitu: Rambu – Rambu Lalu Lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan, Delineator, Guard Rail (Pagar Pengaman Jalan), Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Cermin Tikungan, Speed Bump, Alat Penerangan Jalan dan Marka Jalan. Secara rinci penjelasan persentase pemasangan rambu-rambu di Aceh tahun 2020-2024 tersaji pada Gambar 2.138. Rendahnya persentase fasilitas perlengkapan jalan diakibatkan kebutuhan penanganan pada jalan nasional yang harus diutamakan, peningkatan/rehab panjang jalan Provinsi serta bertambahnya daerah rawan kecelakaan lalu lintas akibat peningkatan jumlah kendaraan (volume lalu lintas).




*Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2025*

Gambar 2.138. Persentase Pemasangan Rambu-Rambu di Aceh Tahun 2020-2024

### I6. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan semakin menurun pada periode 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas dijalan maupun jumlah kepemilikan kendaraan, namun total panjang jalan yang cenderung tetap. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Aceh tahun 2020-2024 di sajikan pada Tabel 2.155.

Tabel 2.155
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Aceh Tahun 2020-2024

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Total Panjang Jalan (km) | 23.650,05 | 23.650,05 | 23.650,05 | 23.650,05 | 23.766,24 |
| Total Jumlah Kendaraan (unit) | 3.058.000 | 3.544.000 | 2.611.882 | 2.842.966 | 2.623.223 |

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rasio Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan (%) | 129,30 | 149,85 | 110,44 | 120,21 | 110,38 |
| Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan (%) | 0,77% | 0,67% | 0,91% | 0,83% | 0,91% |

*Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2025*

### I7. Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum pada tahun 2024 didominasi oleh angkutan darat yaitu 2.317.048 orang (62.63%). Sementara jumlah orang yang terangkut angkutan laut yaitu 960.338 orang (25.96%) dan angkutan udara sebesar 422.361 orang (11.42%). Kondisi ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dimana Angkutan laut mendominasi mobilasi orang dari pada angkutan umum lainnya karena adanya pandemi. Seperti, pada Tahun 2022 proporsi jumlah orang terangkut angkutan umum pada moda Angkutan Laut sebesar 69.35 persen diikuti angkutan laut yaitu 25.34 persen dan angkutan udara sebanyak 5.30 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa angkutan darat yang terdiri dari AKAP, AKDP, dan Angkutan Perkotaan/Perdesaan masih menjadi moda primadona utama, yang dibarengi dengan peningkatan drastis di banding dua tahun sebelumnya, meskipun kemudian terdapat tren penurunan pada tahun 2023 karena beberapa faktor yang menyebabkan pendataan jumlah penumpang menjadi tidak optimal namun pada tahun 2024 jumlah orang yang terangkut angkutan umum darat mengalami peningkatan cukup signifikan. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum di Aceh Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.156.

Tabel 2.156
Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Aceh Tahun 2020-2024

| Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Angkutan Darat | 633.082 | 612.980 | 2,964,869 | 602.784 | 2.317.048 |
| Angkutan Laut | 566.099 | 729.669 | 1,083,553 | 869.381 | 960.338 |
| Angkutan Udara | 219.111 | 157.975 | 226,687 | 324.524 | 422.361 |
| Jumlah | 1.418.292 | 1.500.624 | 4.275.109 | 1.796.689 | 3.699.747 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2025*

### I8. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

Faktor aksesibiltas daerah menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelayanan transportasi. Implikasi logis dari kondisi prasarana jaringan jalan dari suatu wilayah adalah kemudahan mobilitas masyarakatnya dan juga kemudahan mencapai suatu tujuan. Parameter yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan indeks mobilitas dan indeks aksesibilitas. Wilayah yang memiliki jaringan prasarana jalan yang

rapat dengan panjang jalan yang tinggi akan mempermudah masyarakatnya melakukan kebutuhan pergerakannya.

Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di Aceh dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan. Jumlah orang melalui terminal lebih tinggi dibandingkan jumlah orang melalui bandara dan dermaga.

Selanjutnya persentase jumlah orang melalui terminal, pelabuhan dan bandara pada tahun 2024 mengalami sebaran antar moda yang cukup berimbang, seperti pada jumlah orang melalui terminal yaitu sebesar 51.69 persen cenderung mengalami peningkatan positif dibandingkan dengan persentase jumlah orang melalui terminal pada tahun 2023 yaitu sebesar 42.44 persen. Pada kedua jenis moda tranportasi lain yaitu angkutan udara dan laut, juga terdapat tren positif kenaikan dari periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi efisien dan efektif sisi waktu tempuh dan pelayanan dengan jangkauan pelayanan yang lebih membuat hampir semua moda transportasi kini lebih nyaman untuk digunakan.

Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal di Aceh Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.157.

Tabel 2.157
Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2020-2024

| Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Angkutan Darat | 633.082 | 612.980 | 2,964,869 | 602.784 | 2.317.048 |
| Angkutan Laut | 566.099 | 729.669 | 1,083,553 | 869.381 | 960.338 |
| Angkutan Udara | 219.111 | 157.975 | 226,687 | 324.524 | 422.361 |
| Jumlah | 1.418.292 | 1.500.624 | 4.275.109 | 1.796.689 | 3.699.747 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Aceh. 2025*

### 2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

#### A. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak terhadap PDRB tercatat masih sangat minim, di mana pada tahun 2024 rasio pajak terhadap PDRB sebesar 0,79 persen. Persentase ini sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023, dimana rasio pajak hanya sebesar 0,78 persen. Pemerintah perlu berupaya meningkatkan penghasilan dari pajak dengan memperluas wilayah jangkauan objek pajak. Pada Tabel 2.158 menggambarkan perkembangan Rasio Pajak Asli Aceh (PAA) berfluktuasi dan cenderung menurun. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,89 persen, dan pada tahun 2021 sampai dengan 2024 terus mengalamai penurunan masing-masing sebesar (0,83%, 0,81%,0,78% dan 0,79%). Penurunan Rasio Pajak Asli Aceh terhadap PDRB dipengaruhi oleh berkurangnya penerimaan yang bersumber dari Otsus sebesar 1 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) sejak tahun 2023, dan semakin meningkatnya nilai PDRB sebagai

pembanding. Namun secara nominal PAD terus mengalami peningkatan seiring membaik perekonomian Aceh.

Tabel 2.158
Rasio Pajak Asli Aceh (PAA) terhadap PDRB Tahun 2019-2024 (Persen)

| Uraian | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| PDRB (ADHB) (Trilyun Rupiah) | 164,17 | 166,37 | 184,98 | 209,70 | 227,02 | 243,20 |
| Pendapatan Pajak Aceh (Trilyun Rupiah) | 1,41 | 1,478 | 1,53 | 1,72 | 1,79 | 1,93 |
| Rasio Pajak Terhadap PDRB (persen) | 0,86 | 0,89 | 0,83 | 0,81 | 0,78 | 0,79 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik dan BPKA, 2025*

B. Rasio Aset Perbankan Syariah terhadap PDRB

Ekonomi dan Keuangan Syariah telah dimuat dalam UU 59/2024 tentang RPJPN 2025-2045. Arah kebijakan jangka Panjang ekonomi dan keuangan syariah yang termuat dalam RPJPN 2025-2045 telah mengakomodasi keseluruhan aspek ekonomi dan keuangan syariah. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi dilakukan melalui antara lain :

1. Peningkatan posisi keuangan syariah
2. Peningkatan peran keuangan sosial syariah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial ekonomi
3. Penguatan ekosistem industri halal utamanya makanan minuman, fesyen muslim, industri kosmetika dan obat-obatan, pariwisata dan ekonomi kreatif, yang mencakup bahan baku halal, penguatan rantai nilai industri, kewirausahaan dan UMKM industri halal.

Pengembangan ekonomi syariah dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025) menjadi Prioritas Nasional (PN) 2 yakni Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Adapun sasaran untuk terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan. Indikator sasarannya yaitu peringkat ekonomi syariah Indonesia di tingkat dunia. Selanjut program prioritas ekonomi syariah serta sasaran menguatnya peran ekonomi dan keuangan syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi. Indikator sasaran program prioritaas adalah Kontribusi PDB Syariah (%) → 45,66 (2022); 52,45-55,00.

Pengarusutamaan ekonomi syariah dalam pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros ekonomi syariah. Aceh merupakan salah satu provinsi basis dalam pelaksanaan syariah islam, meningkatnya kontribusi ekonomi syariah terhadap ekonomi daerah menjadi tujuan dalam pelaksanaannya. Adapun dalam pelaksaanaannya memiliki lima sasaran strategis yaitu:

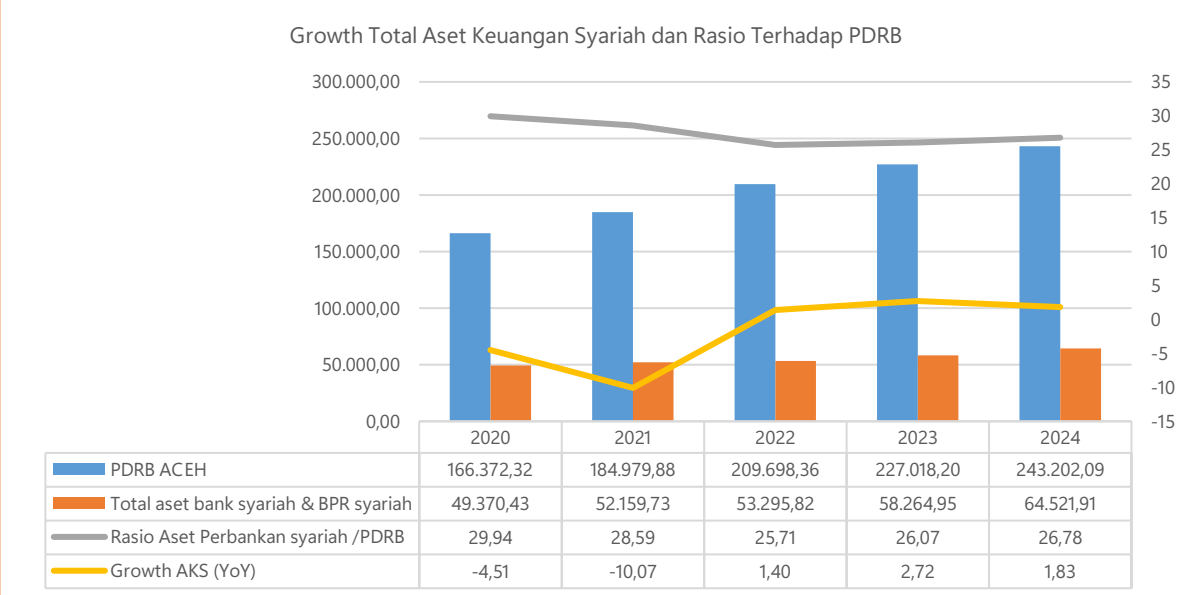
1. Meningkatnya peran keuangan syariah dalam mendukung perekonomian
2. Meningkatnya peran dana sosial syariah mendukung perlindungan sosial
3. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing industri halal

4. Meningkatnya ekspor produk halal dan menguatnya Kerjasama ekonomi syariah internasional
5. Meningkatnya indeks literasi ekonomi syariah

Aceh islami, maju, bermartabat dan berkelanjutan merupakan visi yang sangat sejalan dengan penerapan ekonomi syariah. Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi pembangunan, Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah terdapat pada misi pertama yaitu mewujudkan pelaksanaan syariat Islam dan perdamaian melalui kekhususan dan keistimewaan Aceh (misi 1) dan mewujudkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, industri pariwisata dan industri halal, serta industri kreatif dan prestasi olahraga (misi 4).

Perkembangan posisi aset keuangan syariah di Aceh dalam tiga tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif. Adapun rasio asset perbankan syariah di Aceh terhadap PDRB juga mengalami peningkatan dan mencapai 26,78 persen pada tahun 2024. Penguatan keuangan syariah dilakukan dengan beberapa strategi utama yaitu struktur dan ketahanan industri berdasarkan karakteristik dan kekhasan keuangan syariah, peran keuangan syariah dalam ekosistem syariah dan peran keuangan syariah dalam perekonomian daerah.

Secara lebih rinci kondisi pertumbuhan dan perkembangan asset keuangan syariah dan rasio terhadap PDRB dalam lima tahun terakhir dapat dilihat seperti yang disajikan dalam gambar berikut ini.




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| PDRB ACEH | 166.372,32 | 184.979,88 | 209.698,36 | 227.018,20 | 243.202,09 |
| Total aset bank syariah & BPR syariah | 49.370,43 | 52.159,73 | 53.295,82 | 58.264,95 | 64.521,91 |
| Rasio Aset Perbankan syariah /PDRB | 29,94 | 28,59 | 25,71 | 26,07 | 26,78 |
| Growth AKS (YoY) | -4,51 | -10,07 | 1,40 | 2,72 | 1,83 |

Gambar 2.139. Growth Total Aset Keuangan Syariah dan Rasio Terhadap PDRB

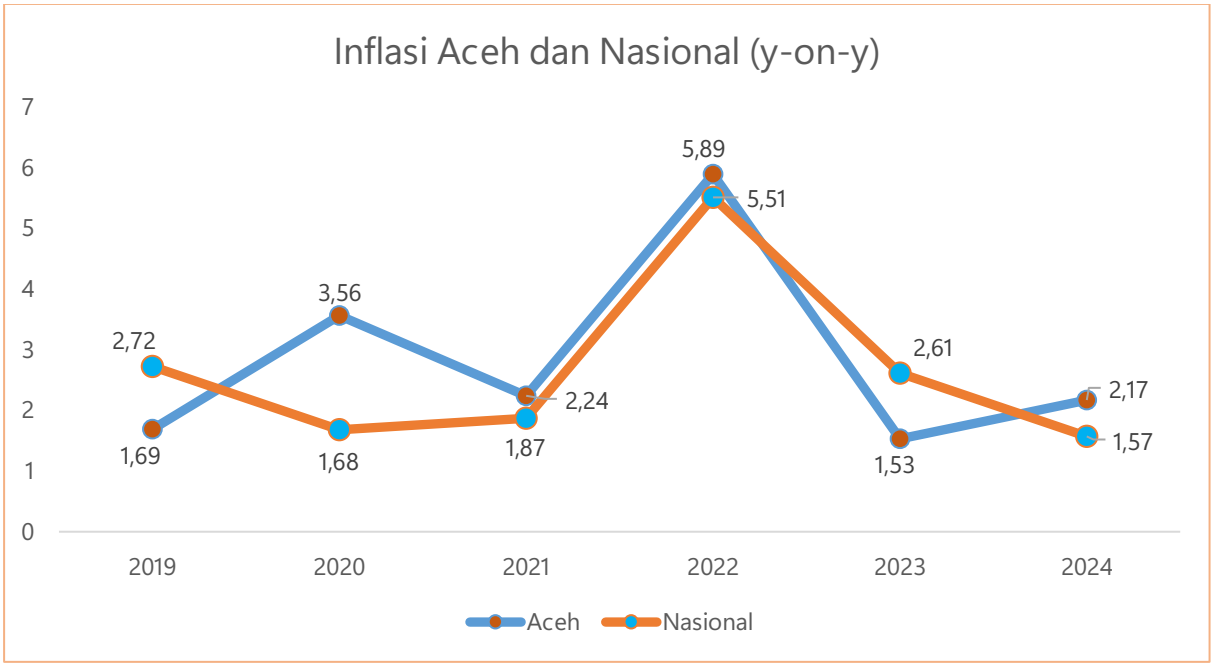
## C. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas ekonomi suatu wilayah dalam memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Terjadinya inflasi karena ketidakseimbangan antara

permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dalam perekonomian. Inflasi dapat dibedakan berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu: *cost push inflation*, *demand pull inflation* dan *expected inflation*. Faktor-faktor ini mengakibatkan perubahan nilai tukar yang fluktuatif dan secara tidak langsung menyebabkan kecendrungan kenaikan perubahan struktur harga.

Bank Indonesia, menyatakan bahwa tingkat inflasi menunjukkan pertumbuhan harga secara kontinu dalam periode waktu tertentu. Adapun, pertumbuhan harga yang dimaksud yaitu kenaikan harga dari beberapa barang yang juga akan berdampak pada kenaikan harga barang lainnya. Berdasarkan tingkat keparahannya, kenaikan angka inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu, Inflasi ringan, yaitu tingkat inflasi kurang dari 10 persen per tahun, Inflasi sedang, di antara 10 persen – 30 persen per tahun, Inflasi berat, berkisar antara 30 persen – 100 persen per tahun dan Hiperinflasi, yaitu mencapai lebih dari 100 persen per tahun.

Perkembangan inflasi Aceh dan Nasional tahun 2019-2024 (*y-on-y*) relatif mengalami fluktuasi dengan pergerakan yang sama, hal ini terlihat pada Gambar 2.140 Inflasi Aceh pada tahun 2019 dapat dikendalikan sebesar 1.69 persen dan nasional sebesar 2.72 persen. Pada tahun 2020 inflasi Aceh meningkat sebesar 3.56 persen dan nasional relative lebih yaitu sebesar 1.68 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu Aceh sebesar 5.89 persen dan Nasional sebesar 5.51 persen, kondisi ini meningkat disebabkan oleh kenaikan harga BBM. Secara umum penyebab inflasi di Aceh adalah naiknya harga komoditas *volatile food* dan *administrerad prices*. Kemudian pada tahun 2023 inflasi Aceh kembali dapat dikendalikan sebesar 1.53 persen dan Nasional sebesar 2.61 persen atau masih berada dibawah rata-rata nasional.



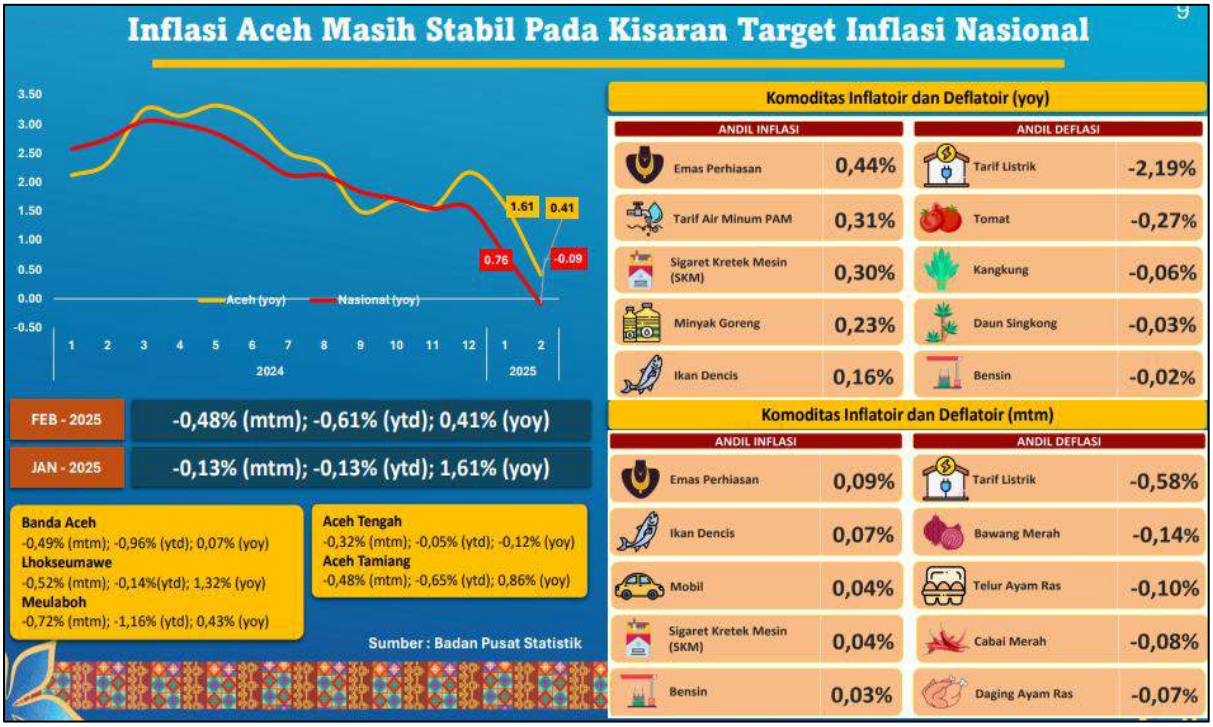

*Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh dan Nasional, 2025*

Gambar 2.140. Laju Inflasi Aceh dan Nasional Tahun 2019-2024 (y-on-y) (Persen)

Selama periode 2019 - 2024 inflasi Provinsi Aceh relatif stabil dan terkendali. Inflasi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 1.69 persen, sedangkan inflasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 5.89 persen akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Inflasi tahun 2021 ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 106,54 pada bulan Desember 2020 menjadi 108,93 pada bulan Desember 2021 dan mengalami inflasi selama 7 bulan dan 5 bulan deflasi. Pada tahun 2024 inflasi (y-on-y) Aceh terkendali sebesar 2,17 persen atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan berada di atas rata-rata nasional yang mampu dikendalikan sebesar 1.57 persen.

Pengaruh inflasi sepanjang tahun 2024- Februari 2025 (y-on-y) karena adanya beberapa komoditas inflator yang mengalami kenaikan atau memberi andil inflasi seperti, Emas Perhiasan sebesar 0.44 persen, Tarif Air Minum PAM sebesar 0.31 persen, Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 0.23 persen, Minyak Goreng sebesar 0,23 persen dan Ikan Dencis sebesar 0,16 persen. Sedangkan komoditas inflator dan deflator (m-to-m) masih disumbangkan oleh perhiasan emas dan Ikan Dencis, masing-masing sebesar (0.09 % dan 0.07%). Andil deflator terjadi pada Trif Listrik sebesar -0.58 persen, Bawang Merah sebesar -0.14 persen dan Telur Ayanm Ras sebesar -0.10 persen.

Kabupaten dan Kota penyumbang inflasi tertinggi selama tahun 2024 (y-on-y) yaitu kota Lhokseumawe dan Aceh Tamiang masing-masing sebesar (1.32% dan 0.86%). Secara (m-to-m) penyumbang deflator terdapat di Kabupaten Meulaboh dan Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Tengah secara berturut-turut sebagai berikut (-0.72 %, -0.52%, -0.49), untuk lebih jelasnya sebagai mana pada Gambar 2.141.




*Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh dan Nasional, 2025*

Gambar 2.141. Laju Inflasi Aceh dan Nasional (m-to-m)
Tahun 2024- Februari 2025 (Persen)

Inflasi (Gabungan 3 Kota) di Aceh (kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kota Meulaboh), selama tahun 2019-2023 relatif dapat dikendalikan atau berada dibawah 6 persen. Pada tahun 2019 inflasi terjadi ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 129,68 pada bulan Desember 2018 menjadi 131,87 pada bulan Desember 2019. Selama tahun 2019 kelompok Bahan Makanan inflasi sebesar 0,14 persen, kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau inflasi 3,58 persen, kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar inflasi 1,68 persen, Kelompok Sandang inflasi 5,62 persen, kelompok Kesehatan inflasi 2,22 persen, kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga inflasi 2,31 persen dan kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami deflasi sebesar 0,16 persen.

Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Aceh dan Nasional pada periode 2019-2023 cenderung mengalami fluktuasi. IHK Aceh tertinggi terjadi pada tahun 2019 dimana IHK Bulan Desember berada pada level 131,87 namun masih di bawah rerata nasional yaitu pada level 139,07. Pada tahun 2022 IHK Aceh per Desember berada pada level 115,35, IHK tersebut lebih tinggi dari IHK nasional yang berada pada level 113,59. Penyumbang kenaikan IHK tertinggi adalah kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau, Kelompok Sandang dan kelompok Kesehatan, serta kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga

Tabel 2.159.
Perkembangan Inflasi Umum Aceh, 2019-2024 (Persen)

| Bulan | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Jan | 0,4 | 0,66 | 0,79 | 1,04 | 1,04 | 1,69 |
| Feb | -0,6 | 0,44 | -0,65 | -0,6 | -0,6 | 0,71 |
| Maret | -0,34 | 0,6 | -0,37 | 0,68 | 0,68 | 0,52 |
| April | 0,42 | -0,15 | 0,51 | 1,23 | 1,23 | 0,25 |
| Mai | 1,27 | 0,26 | 0,25 | 1 | 1 | 0,15 |
| Juni | -0,47 | -0,15 | -0,06 | 0,75 | 0,75 | 0,03 |
| Juli | -0,04 | -0,31 | -0,07 | 0,86 | 0,86 | 0,11 |
| Agust | -0,1 | 0,46 | 0,08 | -0,51 | -0,51 | 0,10 |
| Sept | -0,32 | -0,1 | -0,2 | 0,77 | 0,77 | 0,16 |
| Okt | 0,22 | 0,65 | 0,43 | -0,25 | -0,25 | -0,03 |
| Nov | -0,12 | 0,19 | 0,8 | -0,12 | -0,12 | 0,37 |
| Des | 0,42 | 0,99 | 0,71 | 0,93 | 0,93 | 0,57 |
| Inflasi | 1,69 | 3,59 | 2,24 | 5,89 | 1,53 | 2,17 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 2025*

Inflasi (Gabungan 3 Kota) pada tahun 2023 mengalami inflasi year on year sebesar 1,53 persen. Inflasi tahun 2023 dimulai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 115,35 pada bulan November 2023 menjadi 117,11 pada bulan Desember 2023. Sepanjang tahun 2023, IHK gabungan 3 kota di Aceh mengalami inflasi year on year yang cukup stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Diawali dengan bulan januari hingga april 2023 terjadi inflasi y-on-y berada diatas target inflasi nasional (inflasi y-on-y Januari sebesar 5,52 persen) dan mencapai puncak inflasi y-on-y tertinggi (6,71 persen) pada bulan

februari 2023. Sedangkan inflasi y-on-y bulan desember 2023 berada dibawah target inflasi nasional yaitu sebesar 1,53 persen.

Inflasi (m-to-m) selama bulan Januari-Desember 2023 diatas 5 persen terjadi pada bulan Januari-Maret. Selama April -Desember inflasi mampu dikendalikan dibawah 5 persen dan terkecil sebesar 1.53 persen.. Dalam kurun waktu 12 bulan juga terjadi deflasi (m-to-m) selama 4 bulan (Maret, April, Agustus dan Oktober) dan deflasi cukup dalam terjadi pada bulan maret 2023 (deflasi m-to-m 0,51 persen).

Pada tahun 2023 seluruh kelompok mengalami inflasi, kecuali kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami deflasi y-on-y di bulan Desember sebesar 0,03 persen. Kelompok yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi y-on-y selama tahun 2023 adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil sebesar 0,72 persen, kemudian kelompok perawatan pribadi dan lainnya dengan andil sebesar 0,25 persen. Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi y-on-y antara lain Beras dengan andil 0,66 persen, Rokok Kretek Filter dengan andil sebesar 0,26 persen, Cabai Merah dengan andil sebesar 0,24 persen, Emas Perhiasan dengan andil sebesar 0,23 persen, Nasi dengan Lauk dengan andil 0,09 persen, serta Mobil dengan andil sebesar 0,08 persen. Sementara komoditas yang memberikan andil negatif antara lain Ikan Tongkol/Ambu-Ambu dengan andil -0,32 persen, Daging Ayam Ras dengan andil sebesar -0,08 persen, juga Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar -0,04 persen.

Selama lima tahun terakhir, penyumbang inflasi tertinggi dilihat dari komoditas yang dihitung dalam IHK adalah Beras, rokok/tembakau, Ikan Tongkol/Ikan Ambu-Ambu, Angkutan Udara, Ikan Dencis, Telur Ayam Ras, Ikan Kembung, dan minyak goreng. Komoditas tersebut memberikan andil dalam meningkatnya tingkat kemiskinan di Aceh.

## D. Inklusi Keuangan

Stabilitas ekonomi makro memiliki hubungan signifikan dengan inklusi keuangan. Inklusi keuangan merujuk pada kondisi di mana individu dan bisnis memiliki akses yang memadai terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini mencakup akses ke rekening bank, kredit, asuransi, dan layanan keuangan lainnya. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 76/POJK.07/2016, inklusi keuangan bertujuan untuk menghilangkan berbagai hambatan yang menghalangi masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan.

Memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang tidak memiliki rekening bank, dapat mengakses layanan keuangan. Inkusi keuangan memungkinkan lebih banyak orang dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengakses layanan keuangan formal. Melalui akses keuangan yang lebih luas, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan , sehingga mengurangi tekanan pada stabilitas ekonomi makro. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dengan memberikan akses ke produk keuangan yang dapat membantu masyarakat dalam perencanaan keuangan dan investasi.

### 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

#### A. Komunikasi dan Informatika (Indeks SPBE)

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks serta perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini maka telekomunikasi wajib dikembangkan agar menjadi wahana yang dapat diandalkan. Hal ini sangat penting guna mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan. Keberadaan website milik Pemerintah Aceh diharapkan dapat meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya, keadaan sosial ekonomi rumah tangga dapat juga digambarkan melalui kepemilikan alat komunikasi dan informasi. Semakin banyak penduduk yang memiliki alat komunikasi dan informasi menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Kondisi kepemilikan alat komunikasi dan informasi selama ini sudah banyak beralih dari telepon rumah ke telepon selular.

Selain daripada itu, seiring dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan bidang komunikasi dan informatika yang transparan dan akuntabel serta keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan, maka implementasi *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan terus ditingkatkan dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Provinsi Aceh.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) tidak terlepas dari ketersediaan berbagai Aplikasi yang ada pada setiap OPD. Pemerintah Aceh melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh sejak tahun 2018 hingga tahun 2024 telah mengembangkan sebanyak 136 aplikasi baik berbasis web maupun berbasis mobile. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE oleh Pemerintah pada tahun 2024, Pemerintah Aceh mendapatkan predikat Sangat Baik (nilai indeks 3,64). Capaian tersebut telah melampaui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 2,60.

Tabel 2.160.
Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Aceh
Tahun 2019-2024

| Indikator | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 3,00 | 3,00 | 3,19 | 2,76 | 3,62 | 3,64 |

*Sumber: Hasil evaluasi SPBE oleh Pemerintah Pusat*

Tata kelola pemerintahan masih belum optimal antara lain terlihat dari distribusi aparatur pemerintah khususnya guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh masih belum merata di semua wilayah baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun, kewenangan dalam mengatur distribusi guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh tersebut berada di masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena

itu perlu dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar pendistribusian guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh dilakukan secara tersistem dan terintegrasi.

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Tujuan dari IP-ASN adalah untuk memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Capaian IP ASN di Aceh periode tahun 2020-2024 pada Tabel 2.161.

Tabel 2.161.
Data Kesesuaian Jabatan dengan Keahlian Pejabat/Angka IPP Tahun 2019 – 2024

| Indikator | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indeks Profesionalisme Pegawai (IPP) | 64,20 | 61,63 | 86,1 | 86,1 | 57,59 | 76,76 |

*Sumber : Badan Kepegawaian Aceh. Tahun 2025*

Dari Tabel 2.161 terlihat bahwa IP-ASN Aceh mengalami fluktuasi peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 yaitu dari 61,63 menjadi 86,1 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi menjadi 57,59. Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 77,5 dapat direalisasikan sebesar 57,59 dengan persentase tingkat capaian 74,30 persen. Adapun penyebab tidak tercapainya target terhadap indikator ini dikarenakan belum optimalnya pengintegrasian dan sinkronisasi database pegawai ASN Aceh melalui aplikasi E-Keurani dengan aplikasi SIASN Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini menyebabkan proses sinkronisasi data tidak dapat terupdate secara menyeluruh. Untuk nilai IP ASN tahun 2024 belum keluar data realnya hingga saat ini, namun pencapaian sementara hingga januari 2025 nilai Indeks Profesionalitas ASN sebanyak 76,76 dari target 79,8 sehingga capaian kinerja yang di dapat sebanyak 96,19.

Mengenai upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme ASN, dapat merujuk pada Tabel 2.*162*, yang menunjukkan data mengenai kegiatan Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) Aparatur Pemerintah Aceh dari tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2.162.
Data Diklat Aparatur Pemerintah Aceh Tahun 2019 – 2024

| No. | Tahun | Diklat Teknis Fungsional | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Jlh PNS Aceh | Jlh Peserta Diklat | % |
| 1 | 2019 | 22.685 | 813 | 3.58 |
| 2 | 2020 | 21.690 | 207 | 0,95 |
| 3 | 2021 | 21.830 | 333 | 1,53 |

| No. | Tahun | Diklat Teknis Fungsional | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Jlh PNS Aceh | Jlh Peserta Diklat | % |
| 4 | 2022 | 22.851 | 540 | 2,36 |
| 5 | 2023 | 22.640 | 565 | 2,50 |
| 6 | 2024 | 19.194 | | |

*Sumber : BPSDMA / BKA. Tahun 2025*

Tabel 2.*162* dapat diketahui bahwa persentase aparatur Pemerintah Aceh yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional pada tahun 2020 sebesar 0,95 persen dikarenakan refocusing anggaran karena pandemi covid-19 serta penerapan protokol. IP-ASN Aceh mengalami fluktuasi peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 yaitu dari 61,63 menjadi 86,1 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi menjadi 57,59. Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 77,5 dapat direalisasikan sebesar 57,59 dengan persentase tingkat capaian 74,30 persen. Adapun penyebab tidak tercapainya target terhadap indikator ini dikarenakan belum optimalnya pengintegrasian dan sinkronisasi database pegawai ASN Aceh melalui aplikasi E-Keurani dengan aplikasi SIASN Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini menyebabkan proses sinkronisasi data tidak dapat terupdate secara menyeluruh. Untuk nilai IP ASN tahun 2024 belum keluar data realnya hingga saat ini, namun pencapaian sementara hingga januari 2025 nilai Indeks Profesionalitas ASN sebanyak 76,76 dari target 79,8 sehingga capaian kinerja yang di dapat sebanyak 96,19.

Mengenai upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme ASN, dapat merujuk pada Tabel 2.152, yang menunjukkan data mengenai kegiatan Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) Aparatur Pemerintah Aceh dari tahun 2020 hingga 2024.

## B. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai infrastruktur dan aksesibilitas layanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki daya akselerasi dalam rangka untuk mendukung upaya perbaikan kesejahteraan hidup rakyat. Pelayanan perpustakaan yang diberikan dapat diakses melalui 2 (dua) cara yaitu akses layanan perpustakaan berkunjung langsung ke gedung perpustakaan dan layanan perpustakaan digital yang dapat diakses melalui aplikasi playstore i-pustaka, dimana masyarakat dapat memperoleh bahan bacaan dimanapun dan kapanpun tanpa harus datang ke gedung layanan perpustakaan. Layanan i-pustaka merupakan salah satu inovasi bidang kearsipan yang diluncurkan tahun 2019. Adapun data rinci mengenai jumlah koleksi buku perpustakaan di Aceh tahun 2019-2024 disajikan pada Tabel 2.163 berikut.

Tabel 2.163.
Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Aceh Tahun 2019 – 2024

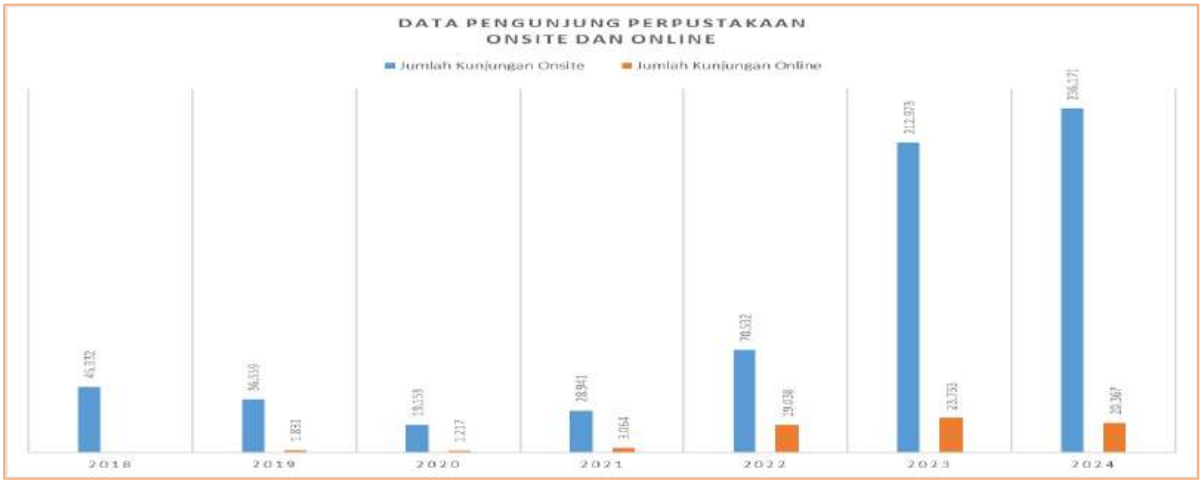
| No. | Indikator | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Judul Buku | | | | | | |
| | - Buku cetak | 65.208 | 65.278 | 66.004 | 63.071 | 72.342 | 79.640 |
| | Buku digital | 6.024 | 7.699 | 11.766 | 12.354 | 12.510 | 16.227 |

| No. | Indikator | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | Jumlah Eksamplar Buku | | | | | | |
| | - Buku cetak | 278.554 | 278.628 | 285.890 | 286.485 | 347.331 | 365.127 |
| | - Buku digital | 43.310 | 46.045 | 86.709 | 123.989 | 127.084 | 153.630 |

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2025*

Pemerintah Aceh berupaya meningkatkan layanan perpustakaan sebagai infrastruktur dan aksesibilitas layanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki daya akselerasi dalam rangka mendukung upaya perbaikan kesejahteraan hidup masyarakat. Salah satu informasi ilmu pengetahuan masyarakat melalui minat baca masyarakat. Pada tahun 2024, jumlah koleksi bahan pustaka perpustakaan yaitu jumlah judul buku cetak sebanyak 79.640 judul dan jumlah buku sebanyak 365.127 Eksemplar, sedangkan koleksi buku digital sebanyak 16.227 judul dan 153.630 Eksemplar. Hal ini terus meningkat dari tahun sebelumnya.

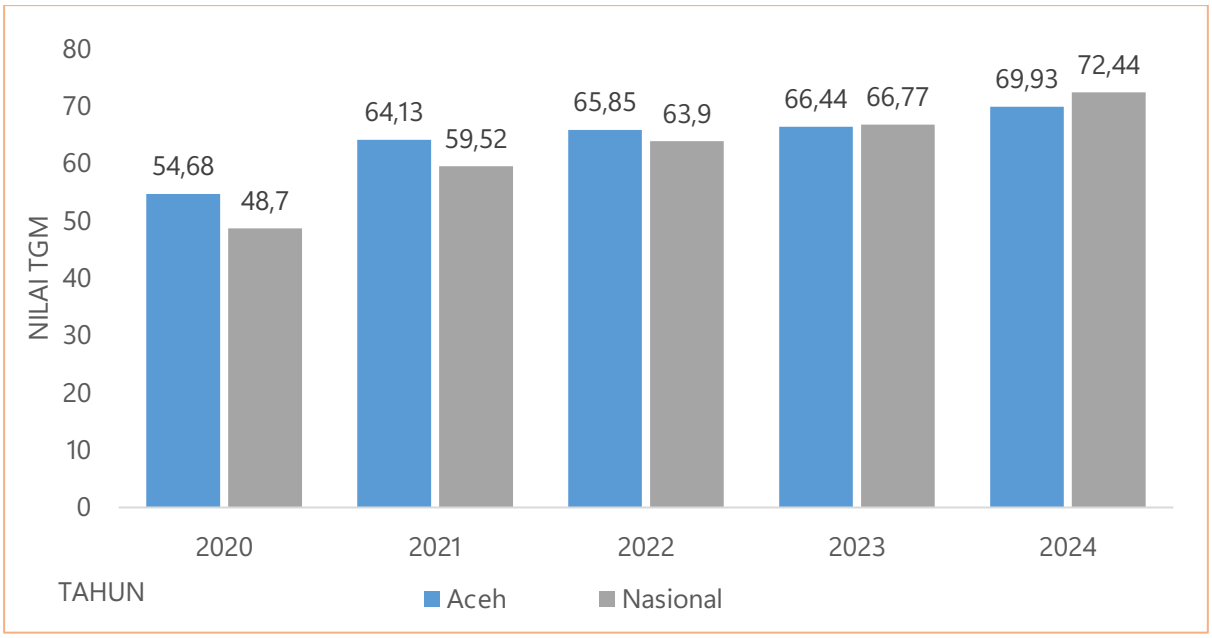
Berdasarkan Tabel 2.163 diatas, diketahui bahwa jumlah koleksi buku perpustakaan di Aceh setiap tahunnya terus meningkat sehingga berdampak positif kepada jumlah pemustaka baik secara offline maupun online, yang setiap tahunnya juga terus meningkat. Peningkatan jumlah kunjungan dapat dilihat pada grafik dibawah ini Gambar 2.142.




*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2025*

Gambar 2.142. Jumlah Kunjungan Perpustakaan Tahun 2018 – 2024

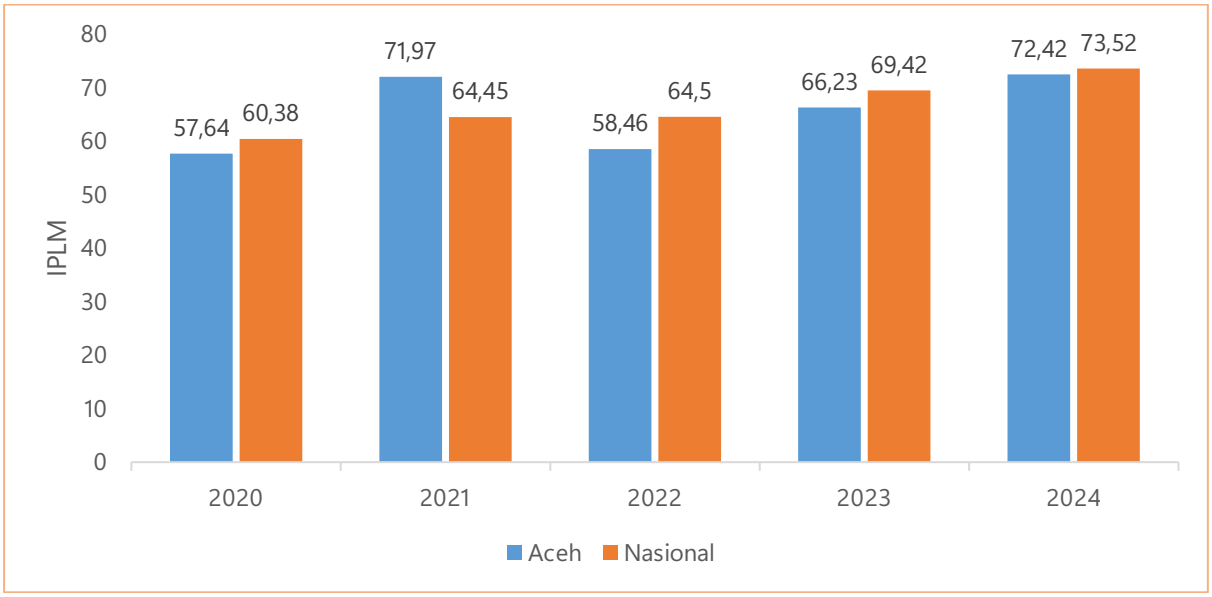
Berdasarkan Gambar 2.142 diatas, jumlah pemustaka offline yaitu pemustaka yang berkunjung langsung ke gedung layanan perpustakaan dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, ini dikarenakan pandemi covid-19, dimana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh melakukan pembatasan layanan perpustakaan untuk menghindari kerumunan dan juga kebijakan menutup layanan perpustakaan. Tahun 2021 ke tahun 2022 layanan perpustakaan kembali meningkat sebesar 41.591 pengunjung menjadi 70.532 pengunjung, Tahun 2024 pemustakaan offline meningkat secara signifikan yaitu sebesar 236.171 pengunjung, terdiri dari pengunjung offline sebesar 236.171 pengunjung, sedangkan pengunjung perpustakaan secara online 20.367 pengunjung.




*Sumber : Perpustakaan Nasional, 2025*

Gambar 2.143. Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Aceh Tahun 2020-2024*

Gambar 2.143 memperlihatkan tingkat kegemaran membaca masyarakat Aceh tahun 2020-2024. Hal ini merupakan meningkatnya jumlah kunjungan ke pustaka, sangat berpengaruh dengan tingkat kegemaran membaca di Aceh. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh kembali melakukan pembukaan layanan dengan tetap menjalankan protap pencegahan covid-19. Selain itu, peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan juga dipengaruhi oleh peresmian dan pembukaan gedung layanan perpustakaan baru yang berada di jalan T. Nyak Arief, Banda Aceh. Meningkatnya jumlah kunjungan ke pustaka, sangat berpengaruh dengan tingkat kegemaran membaca di Aceh.




*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2025*

Gambar 2.144. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Aceh Tahun 2020-2024

Dari Gambar 2.143 diatas terlihat bahwa Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Aceh dibandingkan dengan nasional, dimana kebiasaan membaca masyarakat Aceh meningkat dari tahun sebelumnya. Nilai TGM ini didapat dari hasil survei Perpustakaan Nasional yang dilakukan secara berkala. Data menunjukkan bahwa Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat Aceh tahun 2024 yaitu sebesar 69,93 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional, namun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pencapaian nilai IPLM Aceh Vs IPLM Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.69.

Selain tingkat kegemaran membaca, Perpustakaan Nasional menjadikan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebagai indikator kinerja pada RPJMN 2020-2024. Terdapat 7 Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), yaitu: (1) Pemerataan layanan perpustakaan; (2) Ketercukupan koleksi; (3) Ketercukupan tenaga perpustakaan; (4) Tingkat kunjungan masyarakat per hari; (5) Jumlah perpustakaan ber-SNP; (6) Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi; dan (7) Anggota perpustakaan.

Pencapaian IPLM Provinsi Aceh tahun 2024 sebesar 72,42 dan masuk dalam kategori sedang. Angka ini meningkat dari tahun 2023 yang hanya 66,23. Jika dibandingkan dengan angka nasional, IPLM Aceh masih berada dibawah rata-rata nasional. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) diharapkan dapat menjadi ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang dapat meningkatkan literasi masyarakat dalam suatu daerah. Ketersediaan layanan perpustakaan menjadi hal dasar dalam pembangunan literasi masyarakat di suatu daerah sehingga hal tersebut menjadi ukuran dasar bagi pembangunan literasi masyarakat. Demikian juga, terhadap capaian UPLM Provinsi Aceh dan Nasional dapat dilihat pada Tabel 2.164.

Tabel 2.164.
Rekapan UPLM Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020 – 2024

| No. | Unsur IPLM | Tahun | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | Aceh | Nas | Aceh | Nas | Aceh | Nas | Aceh | Nas | Aceh | Nas |
| 1 | Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1) | 0,0015 | 0,00095 | 0,00102 | 0,00069 | 0,0033 | 0,0030 | 0,2841 | 0,4361 | 0,3212 | 0,4531 |
| 2 | Ketercukupan Koleksi (UPLM2) | 0,0929 | 0,08325 | 0,10789 | 0,08946 | 0,9208 | 1,5311 | 0,2736 | 0,3203 | 0,3815 | 0,3793 |
| 3 | Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3) | 0,0001 | 0,00001 | 0,00012 | 0,00006 | 0,0032 | 0,0033 | 1,0000 | 0,6508 | 1,0000 | 0,7811 |
| 4 | Tingkat Kunjungan Masyarakat (UPLM4) | 0,0002 | 0,00135 | 0,00013 | 0,00073 | 0,4386 | 0,4144 | 0,0785 | 0,4520 | 0,3666 | 0,5327 |
| 5 | Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5) | 0,0002 | 0,00012 | 0,00047 | 0,00017 | 1,7031 | 1,6833 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 6 | Keterlibatan Masyarakat di Kegiatan Sosialisasi (UPLM6) | 0,0046 | 0,01424 | 0,00750 | 0,01413 | 0,2481 | 0,3050 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 7 | Anggota Perpustakaan (UPLM7) | 0,0216 | 0,02938 | 0,03407 | 0,03020 | 0,6852 | 0,5733 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| IPLM Skala (0-100) | | 57,64 | 61,55 | 71,97 | 64,45 | 58,46 | 64,48 | 66,23 | 69,42 | 72,42 | 73,52 |

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2025*

Tabel 2.164 menunjukkan bahwa, Pertama nilai pemerataan layanan perpustakaan (UPLM1) meningkat dari 0,0015 pada 2020 menjadi 0,3212 pada 2024, yang menunjukkan perbaikan signifikan. Namun, dibandingkan dengan tingkat nasional yang mencapai

0,4531 pada 2024, Aceh masih tertinggal dalam hal pemerataan layanan; Kedua, nilai ketercukupan koleksi (UPLM2) pada tahun 2022 terjadi lonjakan yang cukup besar dengan nilai 0,9208, meskipun pada 2024 turun sedikit ke 0,3815. Sebagai perbandingan, koleksi di tingkat nasional terus lebih tinggi, mencapai 1,5311 pada 2022 dan tetap stabil pada 0,3793 pada 2024, yang menandakan koleksi perpustakaan di Aceh masih kurang dibandingkan dengan nasional; Ketiga, nilai ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM3) pada 2024, Aceh mendapatkan nilai maksimal yaitu 1,0000, yang menunjukkan bahwa tenaga perpustakaan di Aceh sudah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Dibandingkan dengan nilai nasional yang lebih rendah (0,7811), Aceh menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam hal jumlah tenaga kerja.

Lebih lanjut; Keempat, nilai tingkat kunjungan masyarakat per hari (UPLM4) menunjukkan fluktuasi, dengan angka yang cukup tinggi pada 2022 (0,4386), namun turun menjadi 0,3666 pada 2024. Dibandingkan dengan angka nasional yang lebih tinggi pada 2024 (0,5327), tingkat kunjungan di Aceh cenderung lebih rendah, meskipun masih menunjukkan adanya peningkatan dalam partisipasi masyarakat; Kelima, jumlah perpustakaan ber-SNP (UPLM5) menunjukkan nilai mencapai 1,0000 pada 2024, yang berarti semua perpustakaan yang terdaftar telah memenuhi standar nasional. Nilai ini sama dengan tingkat nasional, yang juga menunjukkan 1,0000, mencerminkan kualitas layanan yang baik dan terstandarisasi; Keenam, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi (UPLM6) di Aceh mendapatkan nilai 1,0000 pada 2024, yang menunjukkan partisipasi masyarakat yang sangat baik dalam kegiatan tersebut. Ini sejalan dengan tingkat nasional yang juga mencapai nilai 1,0000, menunjukkan keberhasilan perpustakaan dalam melibatkan masyarakat.

Terakhir, Ketujuh, anggota perpustakaan (UPLM7) menunjukkan bahwa pada 2024, Aceh dan nasional keduanya menunjukkan nilai maksimal 1,0000, yang berarti jumlah anggota perpustakaan sudah optimal dan menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan. Mengenai perkembangan koleksi buku dan karya cetak di Aceh, ini menjadi bagian penting dalam memperkaya layanan perpustakaan seperti yang tersaji pada pada Tabel 2.165.

Tabel 2.165.
Koleksi Buku Deposit, Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) Aceh
Tahun 2022-2024

| No. | Uraian | Jumlah Judul/Naskah | | | Jumlah Eksamplar | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Koleksi Buku Deposit dan KCKR | 3.001 | 3.150 | 5.269 | 3.754 | 3.850 | 6.010 | |
| 2 | Koleksi Buku Muatan Lokal | 902 | 950 | 1.413 | 1.009 | 1.100 | 1.671 | |
| 3 | Jumlah Naskah Kuno/Manuskrip yang telah ganti rugi | 241 | 286 | 306 | - | - | - | Naskah |
| 4 | Jumlah Digitalisasi Naskah Kuno/Manuskrip/Alih Media | 74 | 74 | 125 | - | - | - | Naskah |

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2025*

Pada Tabel 2.165 diatas menyajikan data koleksi deposit sampai dengan akhir tahun 2024. Selain itu juga, agar memudahkan pengunjung untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, maka dibutuhkan pustakawan yang profesional. Adapun data rinci mengenai jumlah fungsional pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.166.

Tabel 2.166.
Jumlah Fungsional Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
Tahun 2022-2024

| No. | Jabatan | 2022 | | | | | | | | | | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jenis Kelamin | | Golongan Ruang | | | Pendidikan | | | | | | |
| | | L | P | II | III | IV | SMA | D3 | S1 | S2 | S3 | | |
| 1 | Kabid/Koordinator | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pustakawan Ahli Muda/Sub. Koordinator | 3 | 5 | | 7 | 1 | | | 7 | 1 | | 8 | 8 |
| 3 | Pustakawan Ahli Utama | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 |
| 4 | Pustakawan Ahli Madya | 5 | 8 | | 4 | 9 | | | 11 | 2 | | 15 | 14 |
| 5 | Pustakawan Ahli Muda | 7 | 10 | | 17 | | | | 17 | | | 24 | 14 |
| 6 | Pustakawan Ahli Pertama | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 2 |
| 7 | Pustakawan Penyelia | | 5 | | 5 | | 1 | 3 | 1 | | | 5 | 4 |
| 8 | Pustakawan Mahir | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 |
| | **Jumlah** | **18** | **28** | **0** | **35** | **11** | **1** | **4** | **38** | **3** | **0** | **46** | **44** |

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2025*

Berdasarkan Tabel 2.166 diatas dijelaskan bahwa Sampai dengan tahun 2024, jumlah pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sebanyak 44 orang dengan berbagai tingkat jabatan dan golongan. Jumlah tersebut tentu masih kurang apabila dibandingkan dengan tugas utama yang harus dijalankan yaitu meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. Dari jumlah 44 orang fungsional pustakawan, yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi adalah sebanyak 4 (empat) orang.

## C. Kearsipan

Bidang kearsipan terus diupayakan pelacakan terhadap naskah-naskah penting yang bernilai guna tinggi dan yang sampai sekarang ini masih sangat berada pada masyarakat luas, naskah tersebut tersebar diberbagai daerah di Aceh maupun di luar Aceh, bahkan sampai keluar negeri. Arsip merupakan memori kolektif bangsa karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh berkewajiban memotivasi seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan pentingnya arsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu dibangun tempat penyimpanan arsip (DEPO) di beberapa wilayah untuk mendukung program penyelamatan arsip. Jumlah koleksi arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dapat dilihat pada tabel diatas. Pengolahan arsip dari tahun ke tahun terus meningkat, apabila kita lihat tabel di atas, pada Tahun 2024 jumlah arsip yang diolah menurun menjadi 6.982 berkas. Apabila dirata-ratakan selama periode 5 (lima) tahun terakhir, jumlah arsip yang diolah pertahunnya sebanyak 7.474 berkas.

Sementara itu ditingkat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang telah mengelola arsip secara baku sebanyak 21 SKPA dari 46 SKPA atau sebesar 45,65 persen. Adapun yang dinilai diantaranya Daftar Arsip Aktif dan In Aktif, sarana dan prasana (record center, lemari, filling cabinet, dll), SDM (Arsiparis/Pengelola Arsip). Adapun data rinci mengenai jumlah koleksi arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan OPD pengelola arsip secara baku tahun 2019-2024 disajikan pada Tabel 2.167.

Tabel 2.167.
Jumlah Koleksi Arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan OPD Pengelola Arsip Secara Baku Tahun 2019 – 2024

| No. | Uraian | Tahun | | | | | | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Jumlah Arsip | 5.698 | 5.781 | 6.065 | 7.201 | 9.775 | 9.954 | Berkas |
| 2 | Jumlah Arsip Terolah | 8.045 | 8.178 | 9.034 | 10.032 | 13.086 | 6.982 | Berkas |
| 3 | Jumlah Arsip Belum Terolah | 3.871 | 2.100 | 1.874 | 1.061 | 8.490 | 2.972 | Boks |
| 4 | Jumlah Arsip yang telah Alih Media | 1.217 | 3.931 | 10.333 | 14.000 | 6.830 | 7.000 | Lembar |
| 5 | Jumlah OPD yang telah mengelola | 3 | 4 | 4 | 5 | 15 | 21 | SKPA |

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2025*

JIKN yang merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip dinamis dan statis secara nasional. Secara umum, arsip yang telah diproses digitalisasi dapat dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan kemudian diakses oleh publik secara online melalui website JIKN. Saat ini, sudah tersedia informasi arsip dinamis dan statis, yang dapat diakses publik. Adapun data rinci mengenai jumlah koleksi arsip pada JIKN Tahun 2019-2024 yang disajikan pada Tabel 2.168.

Tabel 2.168.
Jumlah Koleksi Arsip pada JIKN Tahun 2019 – 2024

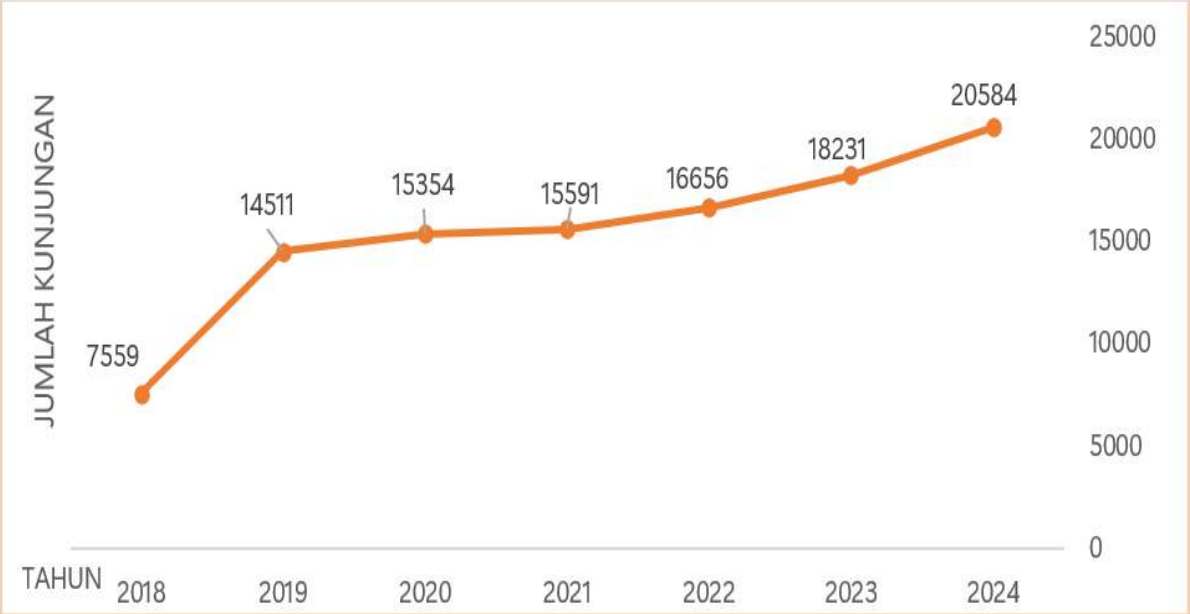
| No. | Uraian | Tahun | | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Jumlah Arsip yang diinput pada Sistem JIKN | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.733 | 4.405 | Berkas |
| 2 | Kabupaten/Kota yang telah menjalankan JIKN | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 21 | Simpul JIKN Kab/Kota |

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2025*

Jumlah arsip yang sudah terinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) pada website Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Tahun 2022 adalah sebanyak 5.500 berkas. Adapun Kabupaten/Kota yang telah menjalankan JIKN sampai akhir 2024 sebanyak 21 Kabupaten/Kota. Semua Kabupaten/ Kota di Aceh sudah menerapkan aplikasi JIKN kecuali Kabupaten Aceh Tenggara dan Kota Sabang. Jumlah pengunjung pada Layanan Arsip/JIKN terus mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun. Dilihat dari grafik diatas bahwa kunjungan layanan arsip/JIKN terus terjadi peningkatan dan di Tahun 2024 meningkat menjadi 20.584 pengunjung.

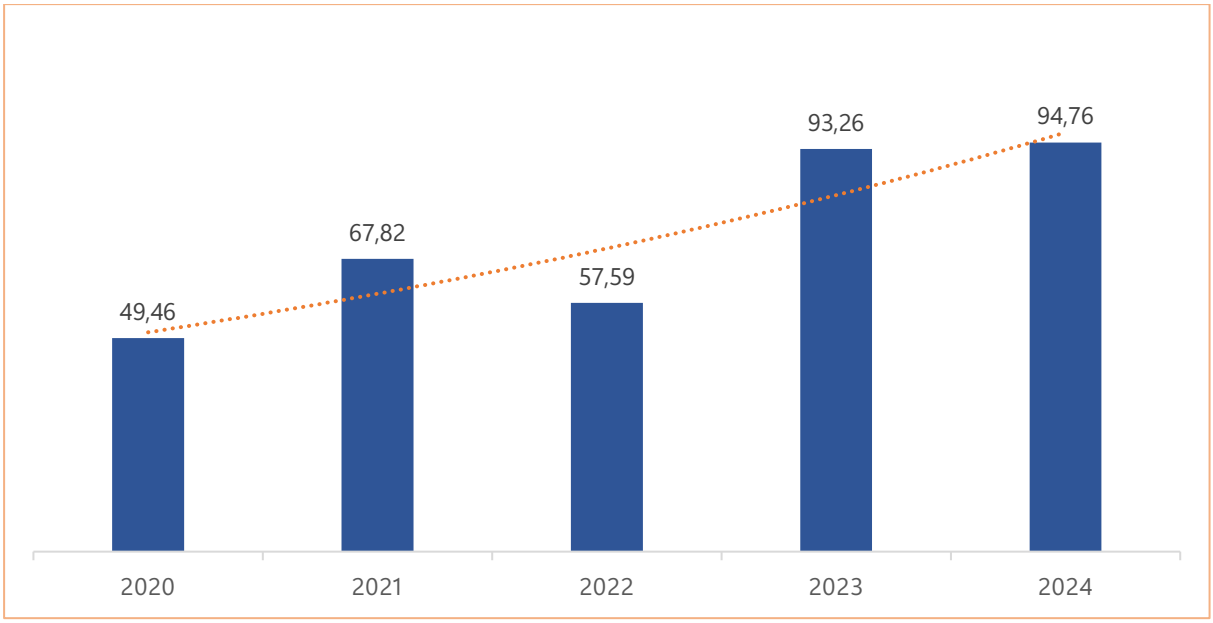
Selain itu juga, agar memudahkan pengunjung untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, maka dibutuhkan arsiparis yang profesional. Pejabat fungsional arsiparis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2024, diberbagai jenjang keahlian, mulai dari arsiparis ahli pertama, muda dan madya adalah sebanyak 18 orang. Sedangkan total Fungsional Arsiparis yang tersebar di 40 SKPA terdata sebanyak 108 Arsiparis yang terdiri dari berbagai jenjang keahlian. Jenjang Arsiparis didominasi oleh Arsiparis Ahli Muda sebanyak 61 Arsiparis, selanjutnya di ikuti oleh Arsiparis Ahli Madya sebanyak 19 Arsiparis dan Arsiparis Ahli Pertama sebanyak 15 Arsiparis. Pada jenjang keterampilan, fungsional arsiparis sebanyak 5 orang pada jenjang arsiparis penyelia dan 8 orang pada jenjang arsiparis mahir.




Gambar 2.145. Jumlah Pengunjung Pada Layanan Arsip/JIKN Pada Tahun 2018-2014

## D. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Keberhasilan pencapaian target SPM tidak hanya diwujudkan oleh Perangkat Daerah (PD) yang menangani tugas dan fungsi urusan pemerintahan wajib tersebut, namun juga didukung oleh semua pihak, baik dari berbagai unsur Pemerintahan sebagai pelaksana maupun masyarakat sebagai penerima manfaat. Dengan dukungan semua pihak diharapkan target SPM yang telah ditetapkan dapat tercapai seluruhnya. Karena pencapaian target SPM merupakan* komitmen Pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Pencapaian target SPM juga dapat turut menyumbang upaya Pemerintah dalam meningkatkan taraf kehidupan dan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya.




*Sumber: Sekretariat Bersama SPM Kemendagri,2025 (data diolah)*

Gambar 2.146. Capaian SPM Provinsi Aceh Tahun 2020-2024

Gambar 2.146 dapat dilihat capaian SPM mengalami fluktuasi baik itu di bidang Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU); Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pera); Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) maupun Sosial. Pada Tahun 2020 capaian SPM Provinsi Aceh berada pada angka 49,46 persen dan meningkat pada tahun 2021 yaitu 67,82 persen. Pada Tahun 2022 Kembali turun diangka 57,59 persen dan Tahun 2023 naik menjadi 93,26 persen dan terus meningkat pada Tahun 2024 sebesar 94,76 persen. Capaian SPM Provinsi Aceh Tahun 2020-2024. Capaian SPM Seluruh Bidang Se-Aceh e-SPM Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.147.



| | Aceh | Aceh Selatan | Aceh Tenggara | Aceh Timur | Aceh Tengah | Aceh Barat | Aceh Besar | Pidie | Aceh Utara | Simeulue | Aceh Singkil | Bireuen | Aceh Barat Daya | Gayo Lues | Aceh Jaya | Nagan Raya | Aceh Tamiang | Bener Meriah | Pidie Jaya | Banda Aceh | Sabang | Lhokseumawe | Langsa | Subulussalam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENDIDIKAN | 73,58 | 96,02 | 69,14 | 100,00 | 93,65 | 81,92 | 100,00 | 81,81 | 100,00 | 84,62 | 77,69 | 80,64 | 92,79 | 100,00 | 99,99 | 52,30 | 98,30 | 100,00 | 97,65 | 94,30 | 100,00 | 98,52 | 100,00 | 99,26 |
| KESEHATAN | 100,00 | 79,20 | 81,79 | 86,81 | 95,40 | 90,00 | 84,26 | 85,82 | 100,00 | 76,61 | 59,11 | 87,76 | 93,18 | 90,94 | 100,00 | 96,67 | 91,76 | 98,68 | 90,04 | 87,08 | 72,14 | 92,16 | 99,24 | 82,23 |
| PEKERJAAN UMUM | 96,25 | 97,50 | 100,00 | 100,00 | 93,63 | 100,00 | 93,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 67,06 | 81,92 | 66,37 | 97,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,97 | 84,52 | 97,85 | 95,16 | 100,00 | 100,00 | 51,62 |
| PERUMAHAN RAKYAT | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 87,88 | 100,00 | 100,00 | 95,00 | 100,00 | 88,75 | 100,00 | 100,00 | 72,50 |
| TRANTIBUMLINMAS | 99,59 | 62,30 | 98,89 | 100,00 | 94,56 | 95,56 | 97,68 | 93,13 | 100,00 | 90,35 | 89,10 | 83,09 | 89,25 | 98,33 | 100,00 | 93,44 | 99,29 | 99,44 | 89,29 | 90,92 | 97,78 | 92,00 | 100,00 | 97,95 |
| SOSIAL | 99,60 | 78,14 | 100,00 | 99,03 | 100,00 | 79,69 | 99,78 | 62,57 | 100,00 | 80,40 | 99,12 | 90,66 | 78,67 | 48,40 | 100,00 | 90,22 | 100,00 | 98,95 | 93,81 | 98,07 | 100,00 | 97,74 | 100,00 | 80,64 |
| RATA RATA | 94,84 | 85,53 | 91,64 | 97,64 | 96,21 | 91,20 | 95,84 | 87,22 | 100,00 | 87,83 | 80,35 | 87,35 | 86,71 | 80,89 | 100,00 | 86,75 | 98,23 | 99,01 | 91,72 | 94,70 | 92,31 | 96,74 | 99,87 | 80,70 |

*Sumber: Sekretariat Bersama SPM Kemendagri, 2025 (data diolah)*

Gambar 2.147. Capaian SPM Seluruh Bidang Se-Aceh e-SPM Tahun 2024

Capaian terbaik SPM terdapat pada bidang Kesehatan dimana telah mencapai 100% di tahun 2024, walaupun sempat mengalami penurunan tahun 2021 pada angka 48,12 persen. Diikuti dengan bidang sosial yang juga mengalami fluktuasi, dan pada tahun 2024 berada pada angka 99,60 persen. Sedangkan, capaian SPM terendah pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU), dimana mendapat nilai terendah dalam empat tahun terakhir, namun mengalami kenaikan secara signifikan di angka 100 persen pada tahun 2023 dan kembali turun pada tahun 2024 di angka 96,34 persen.

Berdasarkan capaian SPM Se-Aceh berbasis aplikasi hanya 1 (satu) Kabupaten yang telah melakukan pelaporan capaian SPM Triwulan IV Tahun 2024 dengan baik (Progres sudah mencapai 100%) yaitu Kabupaten Aceh Utara, sementara Kab/Kota lainnya telah melakukan pelaporan walaupun setiap bidangnya masih belum terlaksana 100 persen.

## E. Kepuasan Pelayanan Keuangan

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) menggunakan Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan (IKPK) sebagai alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan keuangan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA). Pengukuran Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan (IKPK) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana layanan yang diberikan telah memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna layanan.

Dasar hukum penyusunan IKPK adalah Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Jenis Layanan Keuangan yang dinilai adalah jenis layanan yang diselenggarakan oleh BPKA umumnya meliputi:

1. Pelayanan Penyusunan Anggaran SKPA
2. Pelayanan Penyusunan Anggaran Kabupaten/Kota
3. Penerbitan SP2D dan Pencairan Dana
4. Rekonsiliasi Laporan Keuangan.

Unsur-Unsur yang Dinilai dalam IKPK Berdasarkan PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur pelayanan yang menjadi standar evaluasi, yaitu:

1. Persyaratan: Kejelasan dan kemudahan persyaratan layanan
2. Prosedur: Kejelasan alur atau tata cara pelayanan
3. Waktu Penyelesaian: Ketepatan waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif: Kesesuaian dan kewajaran biaya layanan
5. Produk Layanan: Kualitas dan kesesuaian hasil layanan
6. Kompetensi Pelaksana: Kemampuan dan keahlian petugas
7. Perilaku Pelaksana: Sopan santun dan keramahan petugas
8. Sarana dan Prasarana: Fasilitas dan kemudahan akses
9. Penanganan Pengaduan: Mekanisme dan efektivitas penyelesaian keluhan
10. Metode dan Perhitungan IKPK meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
11. Penyusunan Kuesioner: Berbasis skala Likert 5 poin
12. Pengumpulan Data Responden: Responden adalah pengguna jasa BKPA.
13. Perhitungan Nilai IKPK: IKPK (1-5) = $Jumlah\ total\ skor\ Jumlah\ unsur \times Jumlah\ responden$
    Interpretasi Nilai IKPK: Skor IKPK Mutu Pelayanan 5 Sangat Baik 4 Baik 3 Cukup Baik 2 Kurang Baik 1 Tidak Baik.

Pelaksanaan survei IKPK secara berkala pada BPKA bertujuan untuk memastikan pelayanan keuangan publik menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Hasil survei menjadi dasar untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam peningkatan mutu layanan keuangan daerah

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substantial

Disajikan indikator antara lain, Persentase Penegakan Perda, persentase Capaian Aksi HAM, Indeks Demokrasi Indonesia Indeks Ketentraman dan Ketertiban dan indikator lain sesuai konteks daerah.

A. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (civil liberty), hak-hak politik (political rights) dan lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democracy*). Pada Tahun 2021 untuk terakhir kalinya angka IDI yang dikeluarkan oleh BPS merupakan angka IDI yang penghitungannya menggunakan metode lama untuk IDI 2020.

Pada tahun 2022 IDI dihitung menggunakan metode baru untuk IDI 2021 mencakup tiga aspek yaitu Aspek Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi. IDI menggunakan metode kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi silang (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain, yaitu: 1. media review (analisis isi berita surat kabar) 2. document review (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah) 3. *focused group discussion* (FGD).

Tabel 2.169.
Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh Tahun 2019 – 2023

| Aspek | Tahun | | Aspek | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Aspek kebebasan sipil | 93,28 | 84,49 | Aspek Kebebasan | 85,5 | 84,66 | 77,48 |
| Aspek hak-hak politik | 65,22 | 64,94 | Aspek Kesetaraan | 81,41 | 80,1 | 83,74 |
| Aspek lembaga demokrasi | 79,08 | 74,91 | Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi | 75,82 | 77,9 | 76,46 |
| Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh | 78 | 73,93 | Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh | 80,92 | 80,82 | 77,53 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024 (Data termutakhir)*

Berdasarkan Tabel 2.169 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023 Provinsi Aceh mencapai angka 77,53 dalam skala 0 sampai 100. Klasifikasi tingkat Kinerja demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni tinggi (indeks > 80), sedang (indeks 60 – 80), dan rendah (indeks < 60). Hal ini berarti Indeks demokrasi Provinsi Aceh termasuk dalam kategori kinerja demokrasi sedang. IDI Tahun 2021 merupakan tahun pertama

yang dihitung menggunakan metode baru sehingga angkanya tidak dapat dibandingkan dengan metode sebelumnya (2013-2020). Kinerja Demokrasi Aceh menempati peringkat 18 Nasional dari 34 Provinsi di Indonesia meskipun nilai rata-rata IDI Aceh turun dari tahun 2022 sebesar 80,82 menjadi 77,53 pada tahun 2023.

B. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan MAsyarakat

C1. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Sesuai Undang-undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 17 tahun 2013 yang berbunyi bahwa Organisasi Kemasyarakatan tidak lagi dipisahkan menjadi kesamaan agama, LSM, kesamaan profesi dan kesamaan fungsi tetapi sudah menjadi organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum, dengan (Surat Keterangan Terdaftar) SKT yang dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri dan yayasan yang berbadan hukum dikeluarkan SK Kemenkumham Oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.170.

Tabel 2.170.
Rekapitulasi Jumlah Ormas, LSM danYayasan/Perkumpulan
yang Telah Terdaftar pada Badan Kesbangpol Aceh 2019 – 2024

| No. | Ormas/LSM/Yayasan/ Perkumpulan | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) | 14 | 10 | 25 | 7 | 6 | 29 |
| 2 | Yayasan / Perkumpulan | 37 | 119 | 42 | 39 | 45 | 11 |
| Jumlah | | 51 | 129 | 67 | 46 | 51 | 43 |

*Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, 2025*

Berdasarkan Tabel 2.170 diatas bahwa Ormas dan LSM yang mengajukan permohonan untuk mendaftarkan lembaga ke Badan Kesbangpol Aceh selama bulan Januari s/d Desember 2024 dengan target penyelesaian Surat Tanda Lapor untuk Yayasan/ Perkumpulan dan Surat Keterangan Terdaftar untuk Ormas/LSM.

Proses verifikasi berkas permohonan (Proposal) selambat-lambatnya terhitung 3 hari kerja akan di keluar surat Tanda Lapor, sedangkan Ormas/LSM proses penginputan melalui aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) pada web ULA Kemendagri membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen permohonan terverifikasi lengkap untuk diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Politik Pemerintahan Umum yang selanjutnya akan dikeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Permendagri No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Pada Tahun 2024 sebanyak 29 Ormas/LSM yang memenuhi syarat untuk dikeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sesuai dengan Permendagri No. 57 Tahun 2017. Sementara Yayasan/Perkumpulan yang melaporkan keberadaan kepada

Kesbangpol Aceh sebanyak 45 Yayasan/Perkumpulan yang memenuhi syarat untuk dikeluarkannya Surat Tanda Lapor.

C2. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Pemerintah Aceh melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh telah melakukan Kegiatan Pembinaan Politik Daerah di Tingkat Provinsi sejak tahun 2018-2022 sebanyak 7 (tujuh) kegiatan untuk setiap tahunnya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD. sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Bantuan keuangan diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi hasil Pemilu Periode sebelumnya diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Provinsi hasil Pemilu Periode berikutnya. Jumlah bantuan keuangan diterima Partai Politik setiap tahunnya dihitung secara Proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Provinsi hasil Pemilu sebelumnya.

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk Tahun 2022 diberikan dalam 1 tahap dan mendapat kenaikan dari sebelumnya sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) menjadi Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dihitung berdasarkan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Periode 2019-2024. Hak Partai Politik yang mendapatkan bantuan keuangan diatur sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang berbunyi "Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Aceh melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh telah menyalurkan bantuan keuangan kepada Partai Politik hasil Pemilu Periode 2019-2024 sampai dengan Tahun 2022 seluruhnya berjumlah Rp. 16.660.150.000,- (enam belas milyar enam ratus enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

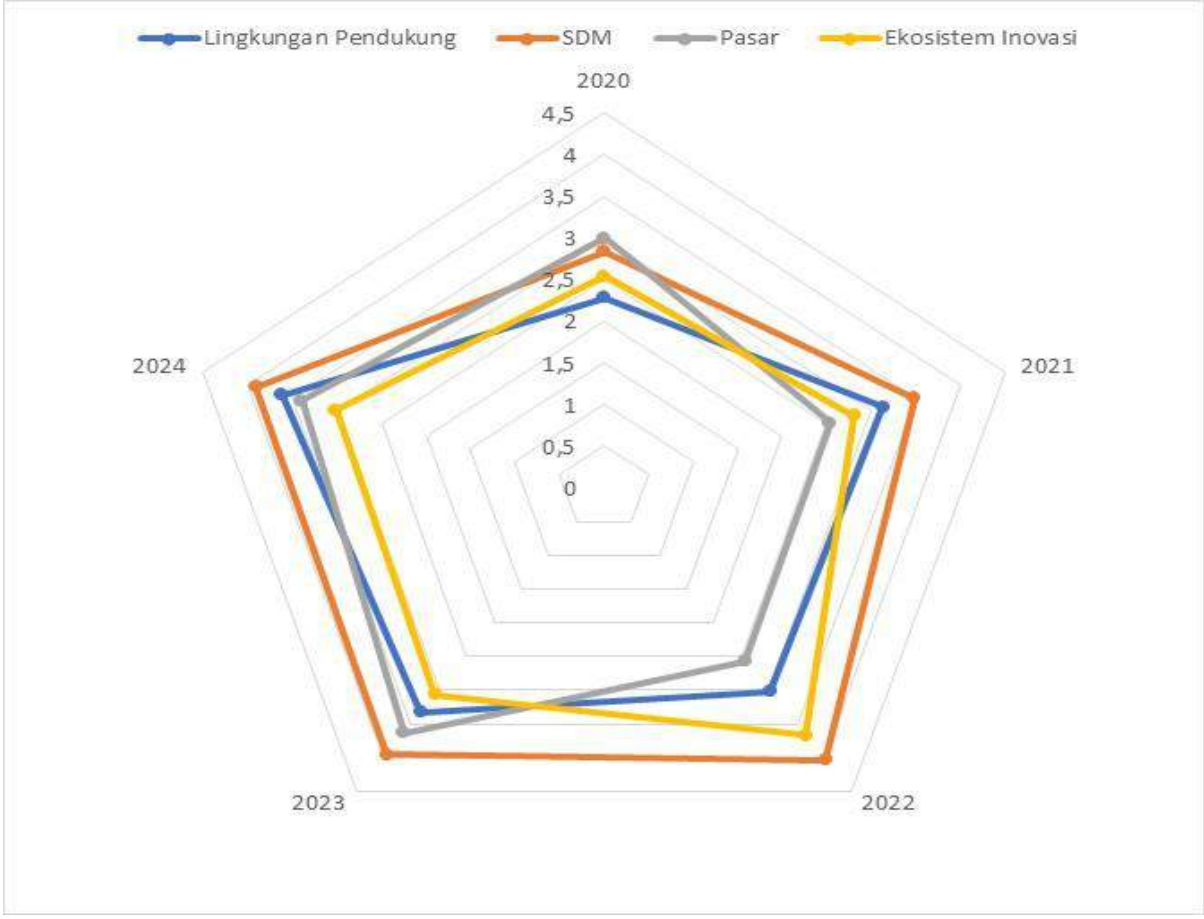
2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya Gentar Kawasan

A. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan semua potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing, baik di pasar domestik maupun internasional, demi mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Pengukuran IDSD ini melibatkan empat aspek utama, yaitu Ekosistem Inovasi,

Pasar/Market, Sumber Daya Manusia (SDM)/Human Capital, dan Penguat/Enabling Environment. Secara keseluruhan, ada 12 pilar, 23 dimensi, dan 97 indikator yang digunakan untuk menilai keempat aspek tersebut.

Berdasarkan nilai IDSD yang dirilis oleh Kemenristek, Aceh termasuk dalam kategori daerah dengan daya saing tinggi, dengan nilai 2,66 pada tahun 2020 dan 2,99 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, nilai IDSD yang disusun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tidak lagi menggunakan kategori seperti sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Sebagai gantinya, pendekatan yang digunakan lebih berbasis pada perbandingan antar daerah secara objektif dan terukur, dengan menggunakan indikator yang lebih spesifik.




Gambar 2.148. Perbandingan Nilai Aspek IDSD Aceh Tahun 2020-2024

Nilai IDSD Aceh pada tahun 2022 mencapai 3,15, mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi karena meredanya kondisi Covid-19 di Aceh, yang memungkinkan aktivitas ekonomi kembali berjalan, serta berkat dampak dari diterbitkannya Keppres No. 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Covid-19 di Indonesia.

Aspek IDSD di tahun 2020, 2021 dan 2022 menunjukkan peningkatan. Peningkatan terjadi pada aspek komponen SDM, ekosistem inovasi dan pasar. Penurunan signifikan terjadi pada penilaian aspek komponen lingkungan pendukung, dimana kontributor utama yang menyebabkan penurunan ini adalah pada pilar perekomian daerah. Pada

tahun 2023 dan 2024 aspek ekosistem inovasi mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pertama, kurangnya keanekaragaman sektor dan kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah yang membatasi potensi inovasi; kedua, keterbatasan dana riset dan fasilitas penelitian, serta tantangan dalam komersialisasi inovasi yang menyebabkan banyak produk inovatif gagal mencapai pasar.

Lebih lanjut untuk aspek lingkungan pendukung, pasar dan SDM mengalami peningkatan. Hal ini sangat ditentukan oleh berbagai hal, seperti perbaikan infrastruktur, transparansi pemerintahan, kemajuan sektor pendidikan dan pelatihan, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Pemerintah Aceh dan sektor swasta diharapkan terus memperbaiki berbagai aspek ini, menciptakan iklim yang lebih baik untuk investasi, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan memperbaiki konektivitas serta pelayanan publik, yang pada gilirannya mendukung perkembangan pasar dan ekosistem inovasi di daerah tersebut. Aspek yang memiliki rata-rata nilai IDSD tertinggi adalah aspek SDM sebesar 3,95 (2023) dan 3,92 (2024) sedangkan aspek yang memiliki rata-rata nilai IDSD terendah adalah aspek ekosistem inovasi sebesar 3,06 (2023) dan 3,01 (2024).

### 2.1.4.4. Kinerja Pembangunan Masa Lalu

Untuk melihat capaian kinerja Bidang Pembangunan menurut Urusan Pemerintahan, berikut disajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama 5 tahun terakhir berdasarkan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) disajikan pada Tabel 2.171.

Tabel 2.171.
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2020-2024

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja | | | | | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1.a.1 | PENDIDIKAN | Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah | 68,357 | 28,72 | 101,27 | 104,05 | 87,45 | Dinas Pendidikan Aceh | |
| 1.a.2 | | Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus | 96,89 | 974.023 | 58,71 | 45 | 52,60 | Dinas Pendidikan Aceh | |
| 1.b.1 | KESEHATAN | Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan | 1,59 | 0,18 | 1,93 | 1,80 /1000 penduduk | 1,92 | Dinas Kesehatan Aceh | |
| 1.b.2 | | Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi | 100,00 | 100,00 | 6,94 | 94,52 | 9,88 | Dinas Kesehatan Aceh | |
| 1.b.3 | | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | 7,098 | 2,315 | 0,00 | 27,56 | 4,00 | Dinas Kesehatan Aceh | |
| 1.b.4 | | Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi | 0,154 | 0,08 | 0,00 | 31,77 | 82,86 | Dinas Kesehatan Aceh | |
| 1.c.1.1 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir | 32,87 | 20,00 | 19,91 | 65,98 | 100 | Dinas Pengairan Aceh | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja | | | | | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1.c.1.2 | | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi | 4,89 | 4,99 | 4,99 | 57,37 | 100 | Dinas Pengairan Aceh | |
| 1.c.2 | | Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi | 78,79 | 39,13 | 82,56 | 58,80 | 46,32 | Dinas Pengairan Aceh | |
| 1.c.3 | | Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota | | 0 | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh | |
| 1.c.4 | | Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional | | 0 | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh | |
| 1.c.5 | | Rasio kemantapan Jalan | 79,81 | 76,55 | 89,26 | 86,13 | 80,80 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh | |
| 1.c.6 | | Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli | | 0 | 100 | 0 | 100 | Dinas Nakermobdu k Aceh | |
| 1.d.1 | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh | |
| 1.d.2 | | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh | |
| 1.d.3 | | Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani | 4,046 | 11,25 | 38,88 | 23,92 | 9,73 | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh | |
| 1.d.4 | | Persentase satuan pemukiman yang sudah dilengkapi PSU | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh | |
| 1.e.1 | KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | 87,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | Satuan Polisi PP dan WH Aceh | |
| 1.e.2 | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 35 | 37,5 | 62,50 | 87,50 | 14,55 | Satuan Polisi PP dan WH Aceh | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja | | | | | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1.e.3 | | Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | Badan Pengendalian Bencana Aceh | |
| 1.e.4 | | Persentase penanganan pra bencana | 13,04 | 60,87 | 39 | 43,48 | | Badan Pengendalian Bencana Aceh | |
| 1.e.5 | | Persentase penanganan tanggap darurat bencana | 60,87 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Pengendalian Bencana Aceh | |
| 1.f.1 | SOSIAL | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 0,247 | Dinas Sosial Aceh | |
| 1.f.2 | | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100,00 | 100,0 | 67 | 100,00 | 100 | Dinas Sosial Aceh | |
| 1.f.3 | | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 | 100 | Dinas Sosial Aceh | |
| 1.f.4 | | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 | 100 | Dinas Sosial Aceh | |
| 1.f.5 | | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | Dinas Sosial Aceh | |
| | | | | | | | | | |
| 2.a.1.1 | TENAGA KERJA | Persentase kabupaten/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja | 100 | 100 | 83 | | 0 | Dinas Nakermobduk Aceh | |
| 2.a.1.2 | | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | 0,020 | 0,370 | 0,001 | 0,10 | 0,490 | Dinas Nakermobduk Aceh | |
| 2.a.2 | | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | 0,00016 | 357,756 | 569,945 | 5.938.454.937,9021 | 3.546.326.810,3473 | Dinas Nakermobduk Aceh | |
| 2.a.3 | | Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | 85,43 | 94,774 | 19,016 | 100,00 | 40,74 | Dinas Nakermobduk Aceh | |
| 2.a.4 | | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | 5,91 | 38,182 | 28,199 | 50,30 | 35,22 | Dinas Nakermobduk Aceh | |
| 2.a.5 | | Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang- undangan bidang ketenagakerjaan | 85,42 | 89,376 | 12,388 | 100 | 10,35 | Dinas Nakermobduk Aceh | |
| 2.b.1 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | 0,0 | 31,7430 | 17,6440 | 8,49 | 8,1 | Dinas PP dan PA Aceh | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja | | | | | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | |
| | | Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak | 11,255 | 2,4481 | 0,1780 | 0,66 | 0,4356 | Dinas PP dan PA Aceh | |
| | | Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak termaksud TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | 1,39 | 17,16 | 16,87 | 24,95 | 24,55 | Dinas PP dan PA Aceh | |
| 2.c.1 | PANGAN | Persentase Cadangan Pangan | 73,79 | 87,87 | 77,64 | 101,59 | 96,71 | Dinas Pangan Aceh | |
| 2.d.1 | PERTANAHAN | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | | 0 | 0 | 100 | 0 | Dinas Pertanahan Aceh | |
| 2.d.2 | | Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu | 100 | 4,947 | 100 | 0 | 100 | Dinas Pertanahan Aceh | |
| 2.d.3 | | Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota | | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pertanahan Aceh | |
| 2.e.1 | LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi | 78,99 | 75,54 | 78.29 | 78,53 | 79,66 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh | |
| 2.e.2 | | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 75 | 57,143 | 12,281 | 100 | 35,90 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh | |
| 2.f.1.1 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun | 100 | 100 | 100 | 99,20 | | Dinas Registrasi Kependudukan Aceh | |
| 2.f.1.2 | | Pemanfaatan data kependudukan | 113,04 | 39,13 | 74,468 | 74,47 | 14,29 | Dinas Registrasi Kependudukan Aceh | |
| 2.g.1 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Persentase pengentasan desa tertinggal | 95,84 | 22,552 | | 58,67 | 73,67 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh | |
| 2.g.2 | | Persentase peningkatan status desa mandiri | 105,78 | 1,132 | | 41,14 | 31,32 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh | |
| 2.h.1 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | TFR (Angka Kelahiran Total) | 100660 | 8642 | | 2,34 | 2,32 | Dinas Kesehatan Aceh | |
| 2.h.2 | | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 42,302 | 39,535 | | 65,33 | 63,85 | Dinas Kesehatan Aceh | |
| 2.h.3 | | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | 0 | 0 | | 8,05 | 21,21 | Dinas Kesehatan Aceh | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja | | | | | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 2.i.1 | PERHUBUNGAN | Rasio konektivitas provinsi | 77,45 | | | 0,66 | 0,82 | Dinas Perhubungan Aceh | |
| 2.i.2 | | V/C Ratio di Jalan Provinsi | 53,83 | 39,78 | 0,46 | 0,5 | 0,52 | Dinas Perhubungan Aceh | |
| 2.j.1 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | 100 | 100 | 100 | 100 | | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh | |
| 2.j.2 | | Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi | 8,602 | 100 | | 60 | 100 | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh | |
| 2.j.3 | | Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi | 0 | 4,239 | | 81 | 67,63 | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh | |
| 2.k.1 | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | 7,750 | 57,609 | | 8,79 | 14,29 | Dinas Koperasi & UKM Aceh | |
| 2.k.2 | | Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha | 1,189 | 100,00 | | 39,05 | 38,05 | Dinas Koperasi & UKM Aceh | |
| 2.l | PENANAMAN MODAL | Persentase peningkatan investasi di provinsi | 85,917 | 19,631 | | 668,29 | - 45,118736 | DPMPTSP Aceh | |
| 2.m.1 | KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | 1,164 | 1,185 | | 0,140 | 0,130 | Dispora Aceh | |
| 2.m.2 | | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | 0,2 | 0,204 | | 6,31 | 8,97 | Dispora Aceh | |
| 2.m.3 | | Peningkatan Prestasi Olahraga | 3 | 29 | | 108 Medali | 261 | Dispora Aceh | |
| 2.n.1 | STATISTIK | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | 100 | 100 | 100 | | | Bappeda Aceh | |
| 2.n.2 | | Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | 100 | 100 | 100 | | | Bappeda Aceh | |
| 2.o | PERSANDIAN | Tingkat keamanan informasi pemerintah | 10,540 | 48,936 | 54,20 | 48,530 | 54,109 | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh | |
| 2.p | KEBUDAYAAN | Terlestarikannya Cagar Budaya | 0,25 | 2,22 | 140,32 | 100 | 91,39 | Disbudpar Aceh | |
| 2.q.1 | PERPUSTAKAAN | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | 59,89 | 3,57 | 64,13 | 66,64 | 69,93 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja | | | | | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 2.q.2 | | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | 34,37 | 34,37 | 56,5 | 66,23 | 72,47 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh | |
| 2.r.1 | KEARSIPAN | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 56,25 | 79 | 77 | 27132 | 96 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh | |
| 2.r.2 | | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | 47,50 | 13223 | 2476 | 1401 | 67 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh | |
| 3.a.1 | KELAUTAN DAN PERIKANAN | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi | 319594,46 | 417947,05 | 95,24 | 102,66 | 100,53 | Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh | |
| | | Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku | 10,30 | 60 | 69,00 | 68,57 | 78 | Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh | |
| 3.b.1 | PARIWISATA | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | -25,294 | -91,802 | 229.062 | 1,036 | 1,608 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh | |
| 3.b.2 | | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi | -25,294 | 9,136 | 17,28 | 25,66 | 25,68 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh | |
| 3.b.3 | | Tingkat hunian akomodasi | 0,00 | 0,00 | 3794,09 | 0,00 | 0,08 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh | |
| 3.b.4 | | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | 11,122 | 26,331 | 8,25 | 1,670 | 1,737 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh | |
| 3.c.1 | PERTANIAN | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | 567,21 | 560,303 | 554,24 | 0 | 0.070565 | Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh | |
| 3.c.2 | | Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular | 0 | 4,027 | 45,04 | 57,23 | -13.2089126 | Dinas Peternakan Aceh | |
| 3.d.1 | KEHUTANAN | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam | 2,866 | 4,56 | 100,00 | 80,00 | 51,79 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh | |
| 3.d.2 | | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) | 0,01 | 8,869 | 0,055 | 0,08 | 0,20 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh | |
| 3.d.3 | | Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi | 0,147 | 1,088 | 0,257 | 0,24 | 2,46 | Dinas Lingkungan Hidup dan | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja | | | | | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | | | | | | | | Kehutanan Aceh | |
| 3.e.1 | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda | 96,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas ESDM Aceh | |
| 3.e.2 | | Persentase Desa Yang Teraliri Listrik | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas ESDM Aceh | |
| 3.f.1 | PERDAGANGAN | Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas | -99,098 | 67,417 | 37,462 | 13,3 | 10,13 | Disperindag Aceh | |
| 3.f.2 | | Persentase penanganan pengaduan konsumen | 100 | 50 | 100 | 40 | 83,72 | Disperindag Aceh | |
| 3.f.3 | | Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku | 52,406 | 89,513 | 94,332 | 88,89 | 92,90 | Disperindag Aceh | |
| 3.f.4 | | Tertib Usaha | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disperindag Aceh | |
| 3.f.5 | | Persentase kinerja realisasi pupuk | 0,024 | 87,575 | 97959 | 70 | 52,67 | Distanbun | |
| 3.f.6 | | Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan | 90,9 | 98,118 | 3,859 | 6,98 | 21,09 | Disperindag Aceh | |
| 3.f.7 | | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | 11,49 | 11,51 | 324,034 | 8,60 | 92,66 | Disperindag Aceh | |
| 3.g.1 | PERINDUSTRIAN | Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi | 175 | 61,364 | 10,345 | 6,25 | 1,47 | Disperindag Aceh | |
| 3.g.2 | | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | 10 | 0 | 267,44 | 164,08 | 112,23 | Disperindag Aceh | |
| 3.g.3 | | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,00 | Disperindag Aceh | |
| 3.g.4 | | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Disperindag Aceh | |
| 3.g.5 | | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Disperindag Aceh | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja | | | | | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 3.g.6 | | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | 43 | 1 | 1 | 50 | 120 | Disperindag Aceh | |
| 32 | TRANSMIGRASI | - | | | | | 100,00 | Disnakermobduk | |
| 4.a.1 | Perencanaan Dan Keuangan | Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan | 9,648 | 5,389 | 13,206 | 12,57 | 21,00 | Badan Pengelolaan Keuangan Aceh | |
| 4.a.2 | | Rasio PAD | 5,187 | 1852,783 | 21,752 | 28,41 | 28,66 | Badan Pengelolaan Keuangan Aceh | |
| 4.a.3 | | Rasio Belanja Pemerintahan (dikurangi expenditures) | 74,763 | 83,927 | 54,738 | 59,98 | 62,60 | Badan Pengelolaan Keuangan Aceh | |
| 4.a.4 | | Opini Keuangan | | 6 | 7 | 8 | 10 | Badan Pengelolaan Keuangan Aceh | |
| 4.a.5 | | Maturitas Sistem Ingindalian Intern Pemerintah (SPIP) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Inspektorat Aceh | |
| 4.a.6 | | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Inspektorat Aceh | |
| 4.i.1 | Pengadaan | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama | 5,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | Biro PBJ Setda Aceh | |
| 4.i.2 | | Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif | 30,207 | 1710,256 | 7034,831 | 99,8 | 87,22 | Biro PBJ Setda Aceh | |
| 4.i.3 | | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | 29,68 | 89,144 | 99,777 | 35,90 | 17,89 | Biro PBJ Setda Aceh | |
| 4.i.4 | | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Milik Daerah | | | | 51,11 | -23,1648921 | Biro PBJ Setda Aceh | |
| 4.j.1 | Kepegawaian | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 13,975 | 292,105 | 333,172 | 77,35 | 79,82 | Badan Kepegawaian Aceh | |
| | | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 5,314 | 84,414 | 12,19 | 12,83 | 19,15 | Badan Kepegawaian Aceh | |
| | | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 20,462 | 14,083 | 100 | 16,79 | 74,97 | Badan Kepegawaian Aceh | |
| 4.k.1 | Manajemen Keuangan | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | 16,326 | 18,3727 | 2,4554 | 2,2 | 0,8979 | Badan Pengelolaan Keuangan Aceh | |
| 4.k.2 | | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | 15,068 | 4,3511 | 13,614 | 4,60 | 8,8836 | Badan Pengelolaan Keuangan Aceh | |
| 4.k.3 | | Assets management | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Badan Pengelolaan Keuangan Aceh | |
| 4.k.4 | | Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja | 34,342 | 29,977 | 9,5336 | 31,65 | 4,2663 | Badan Pengelolaan Keuangan Aceh | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja | | | | | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | | dalam APBD tahun sebelumnya | | | | | | | |
| 4.1.1 | Transparansi dan Partisipasi Publik | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) | 110,679 | 107,958 | 100 | 99,87 | 93,35 | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh | |
| 4.1.2 | | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) | 126,31 | 978,623 | 33,333 | 100 | 100 | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh | |

*Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Aceh, 2021-2025*

Selanjutnya, selain capaian kinerja Bidang Pembangunan menurut Urusan Pemerintahan selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2020-2024, Pemerintah Aceh juga memiliki capaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020-2024 dari indikator tujuan dan sasaran (Impact/Benefit dan Outcome) sebagaimana disajikan pada Tabel 2.172.

## Tabel 2.172.
## Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Tahun 2020-2024

| Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit/Outcome) | Satuan | Data Capaian Awal Tahun Perencanaan | | | Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2026) | Capaian Target Rpa Melalui Pelaksanaan Rkpa Dan Apba Tahun Ke- | Tingkat Capaian Target Rpa Hasil Pelaksanaan Rkpd Dan Apba Provinsi Tahun Ke- (%) | Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 | Rasio Capaian Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 (%) | Status Pencapaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Akhir Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2024 | s.d 2024 | | | H | K | M |
| | | K | K | K | K | K | K | K | K | 4 | 1 | 3 |
| *2* | *3* | | *4* | | *5a* | *11a* | 13a | 14a | 15 | | | |
| Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh | Indeks | 73,93 | 80,92 | 80,82 | 74,26 | 77,53 *) | 104,46% | 77,53 *) | 104,40% | H | | |
| Skor aspek hak-hak politik | Skor | 64,94 | 80,28 | 80,10 | 65,90 | 74,47 *) | 113,69% | 74,47 *) | 113,00% | H | | |
| Skor aspek lembaga demokrasi | Skor | 74,91 | 75,82 | 77,90 | 76,00 | 73,12 *) | 96,85% | 73,12 *) | 96,21% | H | | |
| Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 62,58 | 63,36 | 64,09 | 68 | 80,36 | 112,95% | 80,36 | 97,06% | H | | |
| Opini BKP | WTP/WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 100,00% | WTP | 100,00% | H | | |
| Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Skor | - | 2,55/ Rendah | 2,9618/ Sedang | 2,9500/ Tinggi | 2,8734/ Sedang | 101,75% | 2,8734/ Sedang | 98,31% | H | | |
| Level Maturitas SPIP Terintegrasi | Level | 2 | 2 | 3 | Level 3 | 3 | 100,00% | 3 | 100,00% | H | | |
| Nilai SAKIP | Nilai | 63,21 | 64, 17 | 64,8 | 71 | 67,02 | 101,55% | 67,02% | 94,39% | H | | |
| Indeks Profesionalitas ASN | Indeks | 85,66 | 61,63/ 86,10 | 31,53 | 84,55 | 76,76 | 96,19% | 76,76% | 90,79% | H | | |
| Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 3 | 3,19 | 2,76 | 3,55 | 3,64 | 107,06% | 36,4% | 102,54% | H | | |
| Pertumbuhan ekonomi | % | -0,37 | 2,79 | 4,21 | 4,25 | 4,15 | 111% | 4,15 | 97,65% | H | | |
| Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan | % | 35 | 35 | 50 | 91 | 96,24 | 155% | 96,24 | 105,76% | H | | |
| Meningkatkan Kebijakan dibidang Pendaftaran Penduduk | % | n/a | 65,00 | 90,00 | 99,00 | 99,88 | 102% | 99,88 | 100,89% | H | | |
| Meningkatkan Kebijakan dibidang Pencatatan Sipil | % | n/a | 65,00 | 90,00 | 99,00 | 98,96 | 102% | 98,96 | 99,96% | H | | |

| Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit/Outcome) | Satuan | Data Capaian Awal Tahun Perencanaan | | | Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2026) | Capaian Target Rpa Melalui Pelaksanaan Rkpa Dan Apba Tahun Ke- | Tingkat Capaian Target Rpa Hasil Pelaksanaan Rkpd Dan Apba Provinsi Tahun Ke- (%) | Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 | Rasio Capaian Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 (%) | Status Pencapaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Akhir Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2024 | s.d 2024 | | | H | K | M |
| | | K | K | K | K | K | K | K | K | 4 | 1 | 3 |
| *2* | *3* | | *4* | | *5a* | *11a* | 13a | 14a | 15 | | | |
| Profil Perkembangan Kependudukan | Database | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100,00% | H | | |
| Indeks pengendalian kegiatan pembangunan | Indeks | n/a | n/a | n/a | 0,9 | 1 | 111% | 1 | 111,11% | H | | |
| Indeks Penyelesaian Fasilitasi Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum | Indeks | n/a | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 100% | 0,95 | 100,00% | H | | |
| Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA | % | n/a | 100 | 84 | 90 | 60 | 75% | 60 | 66,67% | | | M |
| Persentase Pembahasan Qanun yang terfasilitasi | % | n/a | 30,77 | 33,33 | 90 | 90,91 | 114% | 90,91 | 101,01% | H | | |
| Indeks Pembangunan Syariat Islam | Indeks | 32 | 81,84 | 81,84 | 89 | 83,9 | 98,71% | 83,9 | 94,27% | H | | |
| Angka Melek Alqur'an | % | 83 | 82 | 82 | 90 | 83,25 | 97,94% | 83,25% | 92,50% | H | | |
| Persentase Dayah yang Mandiri | % | n/a | 31,72 | 34,32 | 47 | 39 | 95,12% | 39,00% | 82,98% | | K | |
| Persentase Peningkatan Penerbitan Sertifikat Halal | % | n/a | 42 | 44,25 | 60,00 | 39,71 | 77,86% | 39,71% | 66,18% | | K | |
| Persentase Pendapatan dan Pendistribusian serta Pendayagunaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama | % | 76 | 69 | 77,79 | 90 | 96,54 | 120,68% | 96,54% | 107,27% | H | | |
| Rasio Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat | Rasio | n/a | 0,005 | 0,089 | 0,065 | 0,054 | 85,71% | 5% | 83,08% | | K | |
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 71,99 | 72,18 | 72,8 | 73,18 | 75,36 | 103,54% | 75,36 | 102,98% | H | | |
| Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 14,31 | 14,36 | 14,37 | 14,57 | 14,39 | 99,10% | 14,39% | 98,76% | H | | |
| Angka Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 9,33 | 9,37 | 9,44 | 10,03 | 9,64 | 98,17% | 9,64% | 96,11% | H | | |

| Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit/Outcome) | Satuan | Data Capaian Awal Tahun Perencanaan | | | Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2026) | Capaian Target Rpa Melalui Pelaksanaan Rkpa Dan Apba Tahun Ke- | Tingkat Capaian Target Rpa Hasil Pelaksanaan Rkpd Dan Apba Provinsi Tahun Ke- (%) | Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 | Rasio Capaian Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 (%) | Status Pencapaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Akhir Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2024 | s.d 2024 | | | H | K | M |
| | | K | K | K | K | K | K | K | K | 4 | 1 | 3 |
| *2* | *3* | | *4* | | *5a* | *11a* | 13a | 14a | 15 | | | |
| Meningkatnya Sekolah dengan Akreditasi A | % | 94,00 | 27,95 | 27,57 | 96,2 | 95,81 | 100,00% | 95,81% | 99,59% | H | | |
| Persentase SMA dan SMK yang menerapkan kurikulum pengembangan bahasa dan sastra | % | 95 | 95 | 97,5 | 100 | 100 | 100% | 100,00 | 100,00% | H | | |
| Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 92,07 | 92,23 | 92,24 | 93,58 | 93,28 | 100,32% | 93,28% | 99,68% | H | | |
| Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 63,47 | 63,24 | 63,92 | 68,51 | 67,5 | 101,52% | 67,50% | 98,53% | H | | |
| Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprenhensif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100,00 | 100,00% | H | | |
| Persentase kab/kota yang difasilitasi penguatan 5 dimensi penguatan kualitas keluarga | % | 0 | 56,5 | 60,5 | 72,5 | 72,5 | 112% | 72,50 | 100,00% | H | | |
| Persentase SIGA/SDGA yang digunakan dalam dokumen perencanaan | % | 0 | 9,62 | 19,23 | 48,08 | 48,08 | 167% | 48,08 | 100,00% | H | | |
| Persentase Kab/kota menuju layak anak (KLA) | % | 0 | 26 | 28 | 34 | 34 | 113% | 34,00 | 100,00% | H | | |
| Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | % | 80 | 78,8 | 80 | 80 | 80 | 100% | 80,00 | 100,00% | H | | |
| Persentase Wanita berumur 15 s/d 49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Mengunakan /Memakai alat KB | % | 0 | 43,38 | 43,88 | 45,38 | 45,38 | 102% | 45,38 | 100,00% | H | | |

| Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit/Outcome) | Satuan | Data Capaian Awal Tahun Perencanaan | | | Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2026) | Capaian Target Rpa Melalui Pelaksanaan Rkpa Dan Apba Tahun Ke- | Tingkat Capaian Target Rpa Hasil Pelaksanaan Rkpd Dan Apba Provinsi Tahun Ke- (%) | Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 | Rasio Capaian Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 (%) | Status Pencapaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Akhir Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2024 | s.d 2024 | | | H | K | M |
| | | K | K | K | K | K | K | K | K | 4 | 1 | 3 |
| *2* | *3* | | *4* | | *5a* | *11a* | 13a | 14a | 15 | | | |
| Persentase Pemuda Berpretasi | % | 0,5 | 7,43 | 2,97 | 4,66 | 4,2 | 100,72% | 42,0% | 90,13% | H | | |
| Persentase Atlet yang Berprestasi | % | 2 | 17,35 | 49,32 | 80 | 50 | 58,82% | 50 | 62,50% | | | M |
| Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | 12,11 | 15,12 | 12,28 | 19,91 | 15,21 | 86,86% | 15,21 | 76,39% | | K | |
| Rasio naskah kuno yang ada di aceh | Rasio | 0,0227 | 0,0227 | 0,041 | 0,001 | 0,0510 | 8160% | 0,051 | 8160,00% | H | | |
| Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | % | 7,41 | 7,41 | 9,26 | 97 | 50 | 66% | 50,00 | 51,55% | | K | |
| Persentase dokumen/arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan | % | 0,099 | 0,09 | 0,27 | 0,1 | 0,05 | 50% | 0,05 | 50,00% | | | M |
| Rasio arsip yang dimanfaatkan | Rasio | 0,04 | 0,009 | 0,025 | 0,015 | 0,035 | 308% | 0,04 | 230,78% | H | | |
| Angka Usia Harapan Hidup | Tahun | 72,69 | 72,71 | 72,92 | 70,1 | 73,2 | 104,34% | 73,2 | 104,22% | H | | |
| Persentase Balita Stunting | % | 19 | 33,2 | 31,2 | 25 | 27 | 98,64% | 27 | 85,03% | | K | |
| Angka Kematian Bayi | /1000 LH | 10 | 11 | 10 | 7 | 8 | 69,23% | 8 | 53,85% | | | M |
| Angka Kematian Ibu | /100.000 LH | 172 | 223 | 141 | 175 | 98 | 72,13% | 98 | 75,43% | | K | |
| Persentase Rumah Sakit Regional yang fungsional | % | 45 | 45,4 | 45,4 | 100 | 20 | 100% | 20 | 20,00% | | | M |
| Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Jiwa | Indeks | 81,89 | 85,1 | 85,53 | 86,4 | 86,1 | 100,47% | 86,10% | 99,65% | H | | |
| Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Zaenal Abidin | Indeks | 96,5 | 91,1 | 80,63 | 92,5 | 83,82 | 91,34% | 83,82% | 90,62% | H | | |
| Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Ibu Anak | Indeks | 82,5 | 81,4 | 84,00 | 86,25 | 81 | 96,72% | 81,00% | 93,91% | H | | |

| Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit/Outcome) | Satuan | Data Capaian Awal Tahun Perencanaan | | | Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2026) | Capaian Target Rpa Melalui Pelaksanaan Rkpa Dan Apba Tahun Ke- | Tingkat Capaian Target Rpa Hasil Pelaksanaan Rkpd Dan Apba Provinsi Tahun Ke- (%) | Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 | Rasio Capaian Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 (%) | Status Pencapaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Akhir Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2024 | s.d 2024 | | | H | K | M |
| | | K | K | K | K | K | K | K | K | 4 | 1 | 3 |
| *2* | *3* | | *4* | | *5a* | *11a* | 13a | 14a | 15 | | | |
| Persentase Penduduk Miskin | % | 14,99 | 15,53 | 14,64 | 13,53 | 12,64 | 86,99% | 12,64 | 107,04% | H | | |
| Nilai Tukar Petani (NTP) | Indeks | 98,74 | 101,19 | 107,45 | 101,8 | 122,11 | 120,32% | 122,11% | 119,95% | H | | |
| Rasio Kabupaten yang memiliki Qanun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | Persen | | 23,81 | 23,81 | 38,09 | 28,5225 | 100% | 28,52 | 74,88% | | K | |
| Persentase Keberhasilan Panen | Persen | n/a | 95 | 95 | 95,3 | 71,485 | 75% | 71,49 | 75,01% | | K | |
| Persentase Perusahaan Berizin yang dibina | Persen | | 70 | 90 | 76 | 58 | 79% | 58,00 | 76,32% | | K | |
| Rasio jumlah ternak yang diasuransikan/polis yang diajukan terhadap populasi ternak besar | Rasio | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00% | | | M |
| Persentase jumlah izin usaha peternakan yang dikeluarkan terhadap total unit pelaku usaha peternakan | Persen | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0% | 0,00 | 0% | | | M |
| Indek Terima Peternak (ItPt) | Indeks | 102,65 | 104,21 | 104,7 | 106,43 | 114,21 | 108% | 114,21 | 107,31% | H | | |
| Nilai Tukar Nelayan (NTN) | NTN | 97,48 | 105,07 | 111,83 | 104 | 105,94 | 102,85% | 105,94% | 101,87% | H | | |
| Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial | % | n/a | 65,18 | 68,98 | 87,68 | 100 | 131,41% | 100,00% | 114,05% | H | | |
| Persentase pemulihan kondisi fisik, psikologis dan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan | % | 98 | 98 | 98,00 | 98 | 100 | 102% | 100,00 | 102,04% | H | | |
| Persentase (%) penyandang masalah kesejahteraan sosial yang meningkat keberfungsian sosialnya. | % | 49 | 55 | 57,00 | 68 | 94 | 152% | 94,00 | 138,24% | H | | |

| Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit/Outcome) | Satuan | Data Capaian Awal Tahun Perencanaan | | | Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2026) | Capaian Target Rpa Melalui Pelaksanaan Rkpa Dan Apba Tahun Ke- | Tingkat Capaian Target Rpa Hasil Pelaksanaan Rkpd Dan Apba Provinsi Tahun Ke- (%) | Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 | Rasio Capaian Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 (%) | Status Pencapaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Akhir Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2024 | s.d 2024 | | | H | K | M |
| | | K | K | K | K | K | K | K | K | 4 | 1 | 3 |
| *2* | *3* | | *4* | | *5a* | *11a* | 13a | 14a | 15 | | | |
| Persentase Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional Yang Terawat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100,00 | 100,00% | H | | |
| Laju inflasi | % | 3,59 | 2,24 | 5,89 | 2,09 | 2,17 | 99,08% | 21,7% | 96,31% | H | | |
| Terbangunnya pusat distribusi perdagangan Aceh | % | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2,00 | 100,00% | H | | |
| Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan | Dokumen | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2,00 | 100,00% | H | | |
| Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) | % IKK | n/a | 43,1 | 54,93 | 43,1 | 58,77 | 136% | 58,77 | 136,36% | H | | |
| Pengendalian inflasi daerah | % | 3,59 | 2,24 | 5,89 | 2,09 | 2,17 | 101% | 2,17 | 103,83% | H | | |
| Indeks Desa Membangun | Indeks | 0,6129 | 0,62 | 0,6483 | 0,68 | 0,685 | 105,38% | 69% | 100,74% | H | | |
| Rasio gampong yang melakukan kerjasama | Rasio | n/a | 0,58 | 0,3 | 0,63 | 0,6 | 98% | 0,60 | 95,24% | H | | |
| Rasio desa berkembang | Rasio | n/a | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,25 | 500% | 0,25 | 277,78% | H | | |
| Rasio UMKM yang diberdayakan | Rasio | n/a | 0,008 | 36,33 | 0,019 | 0,014 | 93,33% | 1% | 73,68% | | K | |
| Rasio Koperasi Modern | Rasio | n/a | 0,01 | 36,33 | 0,0625 | 0,001 | 4% | 0,00 | 1,60% | | | M |
| Pertumbuhan PDRB | % | -0,37 | 2,79 | 4,21 | 4,25 | 4,15 | 110,67% | 4,15 | 97,65% | H | | |
| Persentase kontribusi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dan perikanan | % | 30,98 | 30,06 | 29,71 | 31,48 | 30,97 | 99,17% | 30,97% | 98,38% | H | | |
| Persentase Kawasan konservasi yang dikelola (%) | % | n/a | 30 | 36,33 | 65 | 48,92 | 98% | 48,92 | 75,26% | | K | |
| Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perudang-udangan yang berlaku (%) | % | n/a | 60 | 61,69 | 70 | 69 | 110% | 69,00 | 98,57% | H | | |

| Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit/Outcome) | Satuan | Data Capaian Awal Tahun Perencanaan | | | Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2026) | Capaian Target Rpa Melalui Pelaksanaan Rkpa Dan Apba Tahun Ke- | Tingkat Capaian Target Rpa Hasil Pelaksanaan Rkpd Dan Apba Provinsi Tahun Ke- (%) | Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 | Rasio Capaian Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 (%) | Status Pencapaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Akhir Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2024 | s.d 2024 | | | H | K | M |
| | | K | K | K | K | K | K | K | K | 4 | 1 | 3 |
| *2* | *3* | | *4* | | *5a* | *11a* | 13a | 14a | 15 | | | |
| Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB | % | 5,57 | 5,15 | 5,23 | 5,45 | 5,32 | 99% | 5,32 | 97,61% | H | | |
| Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB | % | 4,45 | 6,65 | 9,99 | 4,6 | 7,05 | 163,95% | 70,5% | 153,26% | H | | |
| Usulan penetapan warisan geologi | % | n/a | n/a | n/a | 50 | 21,88 | 88% | 21,88 | 43,76% | | | M |
| Rasio ketersediaan energi baru terbarukan atau (EBT) terhadap pemakaian energi listrik | % | 3,15 | 5,65 | 5,35 | 0,22 | 5,87 | 32,63% | 5,87 | 26,98% | H | | |
| Rasio Elektrifikasi | % | n/a | 99,81 | 99,13 | 99,9 | 99,2 | 100% | 99,20 | 99,30% | H | | |
| Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB | % | 4,56 | 5,04 | 5,19 | 6 | 4,71 | 94,20% | 47,1% | 78,50% | | K | |
| Tingkat kepuasan pelaku usaha yang mengajukan izin | Kegiatan | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1,00 | 100,00% | H | | |
| Indeks Keberdayaan Konsumen | IKK | n/a | 43,1 | 54,93 | 43,1 | 58,77 | 136% | 58,77 | 136,36% | H | | |
| Pertumbuhan ekspor non migas | % | | 67,42 | 29,81 | 5 | 6,4 | 106,67% | 640% | 128,00% | H | | |
| Nilai realisasi Investasi (PMDN/PMA) | Rp.Miliar | 9.111 | 10.900 | 6.266 | 12,86 | 9.470 | 85,35% | 94,70% | 73,63% | H | | |
| Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan | Indeks | 0 | 0 | 0 | 4 | 3,25 | 100% | 3,25 | 81,25% | | K | |
| Indeks Kepuasan Masyarakat | % | 86,82 | 87,34 | 88,04 | 89,50 | 90,13 | 103% | 90,13 | 100,70% | H | | |
| Indeks SPBE | Indeks | 3 | 3,19 | 2,76 | 4 | 4,18 | 129% | 4,18 | 104,50% | H | | |
| Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB | % | 1,59 | 1,37 | 1,69 | 2 | 1,72 | 95,56% | 1,72 | 86,00% | | K | |
| Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Festival | 0 | 44 | 72 | 60 | 27 | 52% | 27,00 | 45,00% | | | M |

| Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit/Outcome) | Satuan | Data Capaian Awal Tahun Perencanaan | | | Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2026) | Capaian Target Rpa Melalui Pelaksanaan Rkpa Dan Apba Tahun Ke- | Tingkat Capaian Target Rpa Hasil Pelaksanaan Rkpd Dan Apba Provinsi Tahun Ke- (%) | Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 | Rasio Capaian Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 (%) | Status Pencapaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Akhir Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2024 | s.d 2024 | | | H | K | M |
| | | K | K | K | K | K | K | K | K | 4 | 1 | 3 |
| *2* | *3* | | *4* | | *5a* | *11a* | 13a | 14a | 15 | | | |
| Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Event | 0 | 44 | 72 | 60 | 27 | 52% | 27,00 | 45,00% | | | M |
| Literasi sejarah | Dokumen | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 67% | 2,00 | 66,67% | | | M |
| Pemugaran Cagar Budaya | Objek | 2 | 18 | 14 | 4 | 17 | 42,5% | 17,00 | 42,5% | H | | |
| Sertifikasi/Penghargaan Pariwisata Berkelanjutan | Dokumen | 0 | 5 | 2 | 8 | 1 | 20% | 1,00 | 12,50% | | | M |
| Penyerapan tenaga kerja | Orang | 114.219 | 122.315 | 118.313 | 3000 | 141.645 | 7082% | 141.645 | 47,50% | H | | |
| Rasio pengunjung museum terhadap jumlah wisatawan | Rasio | 74,06 | 78,85 | 179,15 | 140,6 | 140,62 | 106% | 140,62 | 100,02% | H | | |
| Pertumbuhan 10 % per tahun (APBA, PAA, CSR dan Dana LSM) | % | -48,21 | 4,61 | 144,91 | 10 | 28,58 | 285,80% | 28,58% | 28,80% | H | | |
| Indeks Ketahanan Pangan | Indeks | 70,92 | 71,63 | 70,16 | 78,23 | 73,94 | 97,82% | 73,94% | 94,52% | H | | |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 6,59 | 6,3 | 6,17 | 5,12 | 5,75 | 107,28% | 5,75 | 89,04% | | K | |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 65,1 | 63,78 | 63,5 | 64,79 | 65,11 | 100,87% | 65,11% | 100,49% | H | | |
| Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Pemerintah | Perusahaan | n/a | 19 | 23 | 50 | 50 | 100% | 50,00 | 100% | H | | |
| Rasio penduduk yang bekerja | % | 93,41 | 93,70 | 44,29 | 98,79 | 94,25 | 95,22% | 94,25% | 95,40% | H | | |
| Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan | Perusahaan | n/a | 867 | 995 | 1558 | 436 | 28% | 43,0 | 27,98% | | | M |

| Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit/Outcome) | Satuan | Data Capaian Awal Tahun Perencanaan | | | Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2026) | Capaian Target Rpa Melalui Pelaksanaan Rkpa Dan Apba Tahun Ke- | Tingkat Capaian Target Rpa Hasil Pelaksanaan Rkpd Dan Apba Provinsi Tahun Ke- (%) | Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 | Rasio Capaian Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 (%) | Status Pencapaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Akhir Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2024 | s.d 2024 | | | H | K | M |
| | | K | K | K | K | K | K | K | K | 4 | 1 | 3 |
| *2* | *3* | | *4* | | *5a* | *11a* | 13a | 14a | 15 | | | |
| Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) | Indeks | 0,360 | 0,491 | 0,398 | 0,400 | 0,394 *) | 96,10% | 0,394 *) | 98,50% | H | | |
| Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap | % | 79,36 | 76,55 | 84,41 | 95,3 | 80,8 | 90,62% | 80,8 | 84,78% | | K | |
| Rasio Konektivitas Daerah | Rasio | n/a | 0,71 | 0,73 | 0,77 | 0,76 | 104,11% | 0,76 | 98,70% | H | | |
| Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA | % | 97,2 | 60 | 98,47 | 95 | 79,5 | 99,38% | 79,5 | 83,68% | H | | |
| Persentase Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum | % | n/a | 30 | 89,40 | 87 | 85 | 144% | 85,00 | 97,70% | H | | |
| Meningkatnya Kertesediaan Kepemilikan Lahan Untuk Fasilitas Publik dan Tanah Masyarakat Miskin | Persil | 150 | 1000 | 62,60 | 1000 | 850 | 85% | 850,00 | 85,00% | | K | |
| Persentase Meningkatnya peran kelembagaan pertanahan secara mandiri | % | n/a | n/a | 100 | 87 | 75 | 100% | 75,00 | 86,21% | | K | |
| Persentase Sengketa dan konflik tanah ulayat lintas kab/kota yang diselesaikan | % | 0 | 40 | 40 | 85 | 65 | 100% | 65,00 | 76,47% | | K | |
| Persentase penyelesaian pemetaan pertanahan | % | 10 | 9 | 10 | 56 | 22 | 100% | 22,00 | 39,29% | | | M |
| Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik | % | 78,79 | 79,55 | 54,11 | 60,11 | 56,45 | 100,39% | 56,45 | 93,91% | H | | |
| Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur kawasan | % | n/a | n/a | n/a | 53,91 | 30,35 | 64,68% | 30,35 | 56,30% | | | M |

| Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit/Outcome) | Satuan | Data Capaian Awal Tahun Perencanaan | | | Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2026) | Capaian Target Rpa Melalui Pelaksanaan Rkpa Dan Apba Tahun Ke- | Tingkat Capaian Target Rpa Hasil Pelaksanaan Rkpd Dan Apba Provinsi Tahun Ke- (%) | Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 | Rasio Capaian Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 (%) | Status Pencapaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Akhir Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2024 | s.d 2024 | | | H | K | M |
| | | K | K | K | K | K | K | K | K | 4 | 1 | 3 |
| *2* | *3* | | *4* | | *5a* | *11a* | 13a | 14a | 15 | | | |
| permukiman, gedung, kawasan strategis dan rumah layak huni | | | | | | | | | | | | |
| Persentase rumah tangga dengan Akses sanitasi layak | % | 87,66 | 77,06 | 77,48 | 80 | 81,10 | 103,31% | 81,1 | 101,38% | H | | |
| Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak | % | 88,20 | 87,66 | 89,70 | 88,8 | 90,08 | 102,13% | 90,08 | 101,44% | H | | |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 78,99 | 75,54 | 78,29 | 76,91 | 79,66 | 104,16% | 79,66 | 103,58% | H | | |
| Indeks kualitas lahan (IKL) | Indeks | 60,59 | 76,52 | 89,2 | 77,09 | 76,66 | 99,32% | 76,66 | 99,25% | H | | |
| Indeks Resiko Bencana Aceh (IRB) | Indeks | 153,58/ Tinggi | 149,99/ Tinggi | 149,1/ Sedang | 139/ Sedang | 144,29 / Tinggi | 99,11% | 144,29 / Tinggi | 96,33% | H | | |
| Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar | % | 68 | 70 | 100 | 83 | 99 | 127% | 99,00 | 119,28% | H | | |
| Skor Aspek Kebebasan Sipil | Skor | 84,49 | 85,5 | 84,66 | 85,25 | 85,71 *) | 100,72% | 85,71 *) | 100,54% | H | | |
| Pencegahan dan Mitigasi Konflik | Rasio | 0 | 0,571 | 0,571 | 0,857 | 0,143 | 16,69% | 14% | 16,69% | | | M |

*Sumber: Laporan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Aceh 2020-2024, Tahun 2025*

## 2.2. Gambaran Keuangan Aceh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD, sementara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Secara garis besar, struktur APBD mencakup tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam kondisi ketika pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah (anggaran defisit), maka selisih tersebut dapat ditutup melalui sumber pembiayaan yang sah, antara lain Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 9tahun sebelumnya, penggunaan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan kembali atas pemberian pinjaman atau penerimaan piutang daerah. Sebaliknya, apabila pendapatan daerah melebihi belanja daerah (anggaran surplus), maka surplus anggaran dimanfaatkan terutama untuk pembayaran pokok utang, investasi, pemberian pinjaman daerah, serta pendanaan belanja yang bersifat strategis, termasuk peningkatan jaminan sosial.

Dalam rangka memberikan gambaran yang komprehensif terhadap kondisi dan kinerja keuangan Pemerintah Aceh, maka dalam bab ini akan diuraikan secara rinci mengenai perkembangan APBA dalam periode tahun 2018 s.d 2024 yang mencakup tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Data yang digunakan bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2018 s.d 2023 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/*Audited*. Sementara itu, untuk tahun 2024 data yang disajikan masih bersifat *Unaudited.* Namun demikian, untuk mendukung perencanaan keuangan daerah kedepan, proyeksi anggaran pada periode Tahun 2025-2029 dalam dokumen ini disusun berdasarakan capaian kinerja masa lalu serta pendekatan dan metode Perencanaan lainnya yang relevan, dengan mempertimbangkan tren realisasi keuangan yang telah diaudit.

### 2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) selama beberapa tahun terakhir mencerminkan kapasitas keuangan daerah dalam mendukung Penyelenggaraan pembangunan. Kinerja APBA dievaluasi berdasarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang menjadi indikator efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Stabilitas keuangan daerah dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, serta sejauh mana optimalisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) dapat diwujudkan. Oleh karena itu, analisis terhadap tren pendapatan dan belanja menjadi penting dalam merumuskan strategi keuangan yang lebih berkelanjutan pada periode 2025-2029.

Mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sementara itu, Belanja Daerah dibagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

Sementara itu, Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan yang mencakup antara lain Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta penerimaan pembiayaan lainnya. adapun pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah dan bentuk pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Dengan memahami struktur APBD secara utuh, Pemerintah Aceh dapat melakukan evaluasi atas efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta merumuskan langkah langkah strategis guna meningkatkan kemandirian fiskal dan optimalisasi alokasi belanja untuk mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Indikator pengukuran kinerja keuangan pada bab ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal pasal 7 ayat (4) huruf c, menjelaskan penilaian kinerja daerah dilaksanakan melalui penentuan dan penilaian indikator kinerja. Selanjutnya pasal 8 menjelaskan bahwa Penilaian kinerja Daerah berdasarkan indikator kinerja yang mencerminkan perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah. Indikator kinerja dimaksud berupa: (a) pengelolaan Keuangan Daerah; (b) pelayanan umum pemerintahan; dan (c) pelayanan dasar, Seluruhnya mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Salah satu indikator kriteria utama penilaian capaian kinerja keuangan daerah antara lain adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Berdasarkan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, yang mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan selama periode tahun 2019 s.d 2023, Pemerintah Aceh dinyatakan telah menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan, sehingga memperoleh opini WTP. Adapun kinerja keuangan daerah tahun 2024 masih dalam proses pelaporan dan pemeriksaan oleh BPK. WTP Pemerintah Aceh Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.173.

Tabel 2.173.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2019-2023

| Tahun | Capaian | Nomor Laporan | Tanggal Laporan |
|---|---|---|---|
| 2019 | WTP | 9.B/LHP/XVIII.BAC/05/2019 | 20 Mei 2019 |
| 2020 | WTP | 23.B/LHP/XVIII.BAC/05/2021 | 03 Mei 2021 |
| 2021 | WTP | 21.B/LHP/XVIII.BAC/04/2022 | 27 April 2022 |
| 2022 | WTP | 2.B/LHP/XVIII.BAC/04/2023 | 12 April 2023 |

| Tahun | Capaian | Nomor Laporan | Tanggal Laporan |
|---|---|---|---|
| 2023 | WTP | 22.A/LHP/XVIII.BAC/05/2024 | 22 Mei 2024 |
| 2024 | WTP | - | - |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, 2024*

Secara umum, indeks kapasitas fiskal Aceh menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, apabila merujuk pada rasio kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Provinsi Aceh diklasifikasikan dalam katagori sangat rendah, dengan rasio kapasitas fiskal sebesar 0,849. Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 rasio kapasitas fiskal Aceh tercatat sebesar 1,049 dan masih berada dalam kategori rendah.

Kondisi fiskal daerah memiliki pengaruh yang sangat signitifikan terhadap kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dari tahun ke tahun, khususnya dalam proses penetapan APBA yang harus disepakati secara bersama. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Namun demikian, Selama periode tahun 2019 hingga 2023, penetapan APBA secara tepat waktu hanya terjadi pada APBA Tahun Anggaran 2020, yang telah disahkan pada pada tanggal 23 Oktober 2019. Sebaliknya, Penetapan APBA pada tahun 2019, serta tahun 2021 hingga 2023, dilaksanakan melewati batas waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Perundang undangan yang berlaku. Lebih jelas mengenai penetapan APBA Tahun 2019 s.d 2023 dapat dlihat pada Tabel 2.174.

Tabel 2.174.
Penetapan APBA Tahun 2019-2024

| Tahun | Nomor Qanun/Pergub | Tanggal Pengesahan | Pagu (Rp.) |
|---|---|---|---|
| 2019 | Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 | 31 Desember 2018 | 17.104.324.024.413 |
| 2020 | Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 | 23 Oktober 2019 | 17.279.528.340.753 |
| 2021 | Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 | 31 Januari 2021 | 17.070.469.972.136 |
| 2022 | Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2022 | 11 Januari 2022 | 16.766.150.661.277 |
| 2023 | Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2022 | 30 Desember 2022 | 11.193.859.700.979 |
| 2024 | Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2024 | 18 Maret 2024 | 11.497.052.017.694 |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, 2023*

Berdasarkan Laporan Realisasi Keuangan (LRA) *Audited* periode tahun 2018 hingga 2024, diketahui bahwa tingkat realisasi anggaran terendah terjadi pada Tahun Anggaran 2018, yakni sebesar 81,59 persen, atau sebesar Rp. 12.306.306.187.481 dari total anggaran

Rp.15.084.003.946.127, dengan SILPA sebesar Rp. 2.954.457.964.943. Sebaliknya, Realisasi keuangan APBA tertinggi tercatat pada tahun 2023 yang mencapai sebesar 97,70 persen (Rp. 11.354.450.553.133) dari anggaran sebesar Rp. 11.621.219.098.956 dengan SILPA sebesar Rp. 1.304.607.179.450. Lebih jelas mengenai anggaran dan realisasi APBA Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.175.

Tabel 2.175.
Anggaran dan Realisasi APBA Tahun 2018-2024

| Tahun | Anggaran (Rp.) | Realisasi | | SILPA |
|---|---|---|---|---|
| | | Rp. | % | |
| 2018 | 15.084.003.946.127 | 12.306.306.187.481 | 81,59 | 2.954.457.964.943 |
| 2019 | 17.328.154.517.122 | 15.787.883.385.490 | 91,11 | 2.846.141.906.063 |
| 2020 | 15.827.709.393.003 | 13.242.212.801.895 | 83,66 | 3.969.617.354.782 |
| 2021 | 16.482.338.309.498 | 13.683.582.127.432 | 83,02 | 3.933.680.612.390 |
| 2022 | 16.763.157.517.180 | 15.773.078.722.046 | 94,09 | 1.304.678.718.450 |
| 2023 | 11.621.219.098.956 | 11.354.450.553.133 | 97,70 | 1.304.607.179.450 |
| 2024 | 11.672.120.348.557 | 11.287.148.887.852 | 96,70 | 421.372.974.556 |

*Sumber: LRA Tahun 2018 – 2023 (Audited), 2024 (Unaudited)*

Mengacu pada Pasal 27 s.d Pasal 28 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari atas komponen pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1(satu) tahun anggaran. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diakui sebagai pengurangan ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1(satu) tahun anggaran.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dari Tabel 2.176 diketahui realisasi APBA selama periode tahun 2018 hingga 2023 menunjukan tren yang bervariasi pada masing masing komponen anggaran, realisasi pendapatan daerah mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar 3,23 persen, sementara belanja daerah juga tercatat tumbuh rata-rata sebesar 0,36 persen. Hal ini disebabkan oleh menurunnya penerimaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada tahun 2023 sebesar 1 persen dari DAU Nasional, sehingga pendapatan DOKA tahun 2023 menurun sebesar 47,62 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan sangat berdampak pada pembangunan di Aceh.

Adapun pembiayaan daerah yang menunjukkan pertumbuhan yan signifikan, yaitu sebesar 66,54 persen. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan realisasi masing masing komponen struktur APBA Tahun 2018 s.d 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.176.

Tabel 2.176.
Rata Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2018 – 2024

| Kode | Uraian | Tahun | | | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 14.427.783.075.799 | 15.752.800.901.652 | 14.439.920.557.022 | 13.948.388.273.436 | 13.713.584.703.596 | 10.572.492.903.656 | 11.396.038.068.930 | (3,23) |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI ACEH | 2.359.385.393.646 | 2.698.912.471.144 | 2.570.775.877.184 | 2.505.887.909.031 | 2.917.145.003.052 | 2.987.188.692.204 | 3.225.685.925.856 | 5,65 |
| 4.1.1 | Pendapatan Pajak Aceh | 1.309.081.813.533 | 1.409.251.915.061 | 1.477.991.066.970 | 1.529.610.318.108 | 1.717.834.522.320 | 1.791.227.845.430 | 1.930.621.844.261 | 6,73 |
| 4.1.2 | Pendapatan Retribusi Aceh | 20.762.789.454 | 17.087.692.809 | 8.159.969.910 | 8.307.103.680 | 15.000.911.792 | 16.462.009.498 | 790.959.745.325 | 787,82 |
| 4.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 181.654.111.575 | 182.385.550.448 | 181.700.799.036 | 152.434.096.229 | 179.862.545.156 | 252.723.801.693 | 267.660.903.349 | 8,06 |
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah | 847.886.679.084 | 1.090.187.312.826 | 902.924.041.268 | 815.536.391.014 | 1.004.447.023.784 | 926.775.035.583 | 236.443.432.921 | (9,56) |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 12.065.901.692.555 | 13.049.675.124.487 | 11.826.017.687.067 | 11.431.169.265.498 | 10.775.168.990.686 | 7.580.381.361.583 | 8.167.778.560.238 | (5,37) |
| 4.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 12.065.901.692.555 | 13.049.675.124.487 | 11.826.017.687.067 | 11.431.169.265.498 | 10.775.168.990.686 | 7.580.381.361.583 | 8.167.778.560.238 | (5,37) |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 2.495.989.598 | 4.213.306.021 | 43.126.992.771 | 11.331.098.907 | 21.270.709.858 | 4.922.849.869 | 2.573.582.836 | 146,97 |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 2.495.989.598 | 4.213.306.021 | 43.126.992.771 | 9.815.653.425 | 21.164.409.858 | 4.922.849.869 | 2.573.582.836 | 151,05 |
| 4.3.3 | Lain Lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan | - | - | - | 1.515.445.482 | 106.300.000 | - | - | |
| 5 | BELANJA | 12.306.306.187.481 | 15.787.883.385.491 | 13.242.212.801.895 | 13.683.582.127.430 | 15.773.078.722.046 | 11.354.800.577.744 | 11.287.148.887.851 | 0,36 |

| Kode | Uraian | Tahun | | | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 9.054.782.711.093 | 9.282.694.398.477 | 7.985.982.044.904 | 8.649.317.139.857 | 9.853.395.736.247 | 7.920.985.964.478 | 8.209.331.872.526 | (0,87) |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 2.274.436.642.148 | 2.461.315.744.896 | 2.483.284.443.746 | 2.631.227.115.328 | 2.672.636.562.975 | 2.777.232.840.075 | 3.371.730.786.947 | 6,99 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.396.750.243.456 | 4.514.524.421.392 | 3.702.404.761.737 | 5.125.955.152.315 | 5.961.654.335.730 | 4.023.048.182.624 | 3.726.959.739.159 | 4,97 |
| 5.1.4 | Belanja Subsidi | - | - | - | - | 13.225.283.500 | 18.244.902.500 | 6.386.180.000 | (13,52) |
| 5.1.5 | Belanja Hibah | 3.146.293.151.466 | 1.946.365.153.670 | 1.422.789.246.409 | 758.581.422.107 | 1.026.826.661.463 | 909.872.227.035 | 1.017.004.886.267 | (12,66) |
| 5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 237.302.674.023 | 360.489.078.519 | 377.503.593.012 | 133.553.450.107 | 179.052.892.579 | 192.587.812.244 | 87.250.280.153 | (3,51) |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 2.503.941.129.737 | 3.162.088.165.983 | 1.755.472.079.287 | 2.199.333.370.928 | 2.868.705.757.386 | 1.676.030.003.504 | 1.244.417.671.176 | (4,97) |
| 5.2.1 | Belanja Modal Tanah | 12.431.133.469 | 86.773.892.473 | 71.123.465.326 | 24.732.040.448 | 45.923.196.963 | 7.431.814.316 | - | 103,33 |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 294.027.634.090 | 841.812.882.309 | 421.332.296.913 | 259.171.614.346 | 345.149.313.315 | 485.458.694.474 | 409.877.240.494 | 26,02 |
| 5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 731.613.352.208 | 820.034.893.479 | 567.190.383.203 | 734.555.768.110 | 827.643.754.162 | 519.361.756.751 | 325.817.680.306 | (8,51) |
| 5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.405.078.708.994 | 1.320.184.310.775 | 572.579.779.265 | 1.055.849.598.983 | 1.519.021.873.143 | 551.432.860.935 | 402.230.663.576 | (4,19) |
| 5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 60.790.300.976 | 93.282.186.947 | 123.246.154.580 | 125.024.349.041 | 130.967.619.803 | 112.344.877.028 | 83.856.301.999 | 8,70 |
| 5.2.6 | belanja Modal Aset Lainnya | | | | | | | 22.635.784.801 | |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 48.704.400 | 4.838.896.611 | 158.460.075.459 | 412.071.890 | 4.335.030.000 | 34.500.000 | 19.848.398 | 2.286,76 |
| 5.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 48.704.400 | 4.838.896.611 | 158.460.075.459 | 412.071.890 | 4.335.030.000 | 34.500.000 | 19.848.398,45 | 2.286,76 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 747.533.642.251 | 3.338.261.924.420 | 3.342.298.602.245 | 2.834.519.544.755 | 3.046.642.198.413 | 1.757.750.109.762 | 1.833.379.495.751 | 50,16 |
| 5.4.1 | Belanja Bagi Hasil | 642.408.224.651 | 691.068.684.916 | 802.937.015.414 | 715.264.216.632 | 764.976.522.259 | 892.314.580.120 | 881.118.949.469 | 5,86 |
| 5.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 105.125.417.600 | 2.647.193.239.504 | 2.539.361.586.831 | 2.119.255.328.123 | 2.281.665.676.154 | 865.435.529.642 | 952.260.546.282 | 392,19 |

| Kode | Uraian | Tahun | | | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 6 | PEMBIAYAAN | 832.981.076.625 | 2.881.224.389.902 | 2.771.909.599.655 | 3.668.874.466.385 | 3.364.172.736.899 | 1.255.603.592.331 | 421.372.974.556 | 22,84 |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 907.571.981.763 | 2.956.538.853.604 | 2.848.097.021.013 | 3.970.103.175.594 | 3.934.600.250.977 | 1.305.536.023.919 | 474.004.949.183 | 21,68 |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 907.571.981.763 | 2.954.457.964.943 | 2.846.141.906.063 | 3.969.606.675.281 | 3.933.596.612.390 | 1.304.607.179.450 | 473.295.918.242 | 21,65 |
| 6.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | - | 2.080.888.661 | 1.955.114.950 | 496.500.313 | 1.003.638.587 | 928.844.469 | 709.030.941 | (1,92) |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 74.590.905.138 | 75.314.463.702 | 76.187.421.358 | 301.228.709.209 | 570.427.514.078 | 49.932.431.588 | 52.631.974.627 | 50,17 |
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 74.590.905.138 | 75.314.463.702 | 76.187.421.358 | 59.791.509.209 | 50.427.514.078 | 49.351.316.199 | 52.631.974.627 | (5,09) |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Aceh | - | - | - | 241.437.200.000 | 520.000.000.000 | - | - | - |
| 6.2.3 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | | | | | | 581.115.389 | - | - |

*Sumber: LRA Tahun 2018 – 2023 (Audited), 2024 (Unaudited)*

2.2.1.1. Pendapatan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan Pendapatan Aceh dikelompokkan atas beberapa komponen utama sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Aceh (PAA), yang terdiri atas pajak Aceh, retribusi Aceh, hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan dan lain-lain PAA yang sah.
2. Pendapatan Transfer, yang meliputi transfer Pemerintah Pusat, dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, Dana Otonomi Khusus (Otsus). Sedangkan transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
3. Lain-Lain Pendapatan Aceh yang sah, yang berasal dari hibah dan dana darurat serta pendapatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan LRA Tahun 2018 hingga 2023 Audited, diketahui bahwa pencapaian realisasi pendapatan Aceh mengalami tren penurunan atau pertumbuhan negatif. Pada tahun 2018, realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp. 14.427.783.075.799, sementara pada tahun 2023 realisasi pendapatan menurun menjadi sebesar Rp. 10.572.492.903.656. Adapun untuk tahun 2024, berdasarkan LRA *unaudited,* realisasi pendapatan mencapai Rp. 11.396.038.068.930. Perkembangan lebih rinci mengenai perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan Aceh selama peroide Tahun 2018 hingga 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.177.

Tabel 2.177.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Aceh Tahun 2018-2024

| Tahun | Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rp. | % | Pertumbuhan (%) |
| 2018 | 14.622.475.324.280 | 14.427.783.075.799 | 98,67 | - |
| 2019 | 15.692.775.230.941 | 15.752.800.901.652 | 100,38 | 9,18 |
| 2020 | 14.005.401.514.224 | 14.439.920.557.021 | 103,1 | -8,33 |
| 2021 | 13.864.978.453.942 | 13.948.388.273.436 | 100,6 | -3,40 |
| 2022 | 13.413.980.404.477 | 13.713.584.703.596 | 102,23 | -1,68 |
| 2023 | 10.369.121.496.506 | 10.572.492.903.656 | 101,96 | -22,90 |
| 2024 | 11.262.824.430.316 | 11.396.038.068.930 | 101,18 | -7,79 |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited), 2024 (Unaudited)*

Secara terperinci kondisi pendapatan Aceh dapat dijelaskan berdasarkan kelompok pendapatan sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Aceh (PAA)

Pendapatan Asli Aceh (PAA) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah melalui pemunguutan berdasarkan peraturan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAA bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah

Aceh untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki, sebagai perwujudan prinsip desentralisasi. Selain itu, penguatan PAA juga menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah, sekaligus sebagai solusi dalam mengantisipasi berahirnya dana Otonomi Khusus.Dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, realisasi PAA menunjukkan tren peningkatan yang positif. Realisasi tertinggi pada tahun 2024, dengan capaian sebesar Rp. 3.225.685.925.856. Meskipun nilai nominal terbesar terjadi pada tahun 2024, pertumbuhan persentase tertinggi dicapai pada tahun 2022, dengan peningkatan sebesar 16,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran dan realisasi PAA Tahun 2018 s.d 2024 dapat dilihat Tabel 2.178.

Tabel 2.178.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) Tahun 2018-2024

| Tahun | Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rp. | % | Pertumbuhan (%) |
| 2018 | 2.324.662.431.200 | 2.359.385.393.646 | 101,49 | - |
| 2019 | 2.589.284.044.683 | 2.698.912.471.144 | 104,23 | 14,39 |
| 2020 | 2.184.607.197.048 | 2.570.775.877.183 | 117,68 | -4,75 |
| 2021 | 2.401.682.455.965 | 2.505.887.909.031 | 104,34 | -2,52 |
| 2022 | 2.572.750.100.699 | 2.917.145.003.052 | 113,39 | 16,41 |
| 2023 | 2.853.177.437.034 | 2.987.188.692.204 | 104,7 | 2,40 |
| 2024 | 3.019.019.705.316 | 3.225.685.925.856 | 106,84 | 7,98 |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited), 2024 (Unaudited)*

Pencapaian realisasi PAA selama periode Tahun 2018 s.d 2024 menunjukkan bahwa pendapatan pajak Aceh merupakan sumber utama PAA, dengan kontribusi sebesar 57,03 persen dari total realisasi PAA. Komponen lain-lain PAA yang sah menjadi kontributor terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 35,71 persen. Selanjutnya, Pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi sebesar 6,73 persen, menempati urutan ketiga dalam struktur PAA. Sementara itu, retribusi Aceh tercatat sebagai sumber pendapatan terkecil, dengan kontribusi sebesar 0,53 persen terhadap total PAA. Secara umum, kontribusi masing masing komponen terhadap total realisasi PAA selama periode 2018-2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

### A.1. Pendapatan Pajak Aceh

Pajak Aceh merupakan iuran wajib yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Aceh tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan dari sektor pajak Aceh terdiri atas: a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), b)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), d) pajak air permukaan, dan e) pajak rokok.

Selama kurun waktu tahun 2018-2024, pendapatan dari sektor pajak Aceh menunjukkan tren peningkatan. Meskipun demikian, Pemerintah Aceh perlu terus melakukan berbagai upaya yang komprehensif dan keberlanjutan untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan dari sektor ini, mengingat pajak aceh menjadi komponen utama dalam PAA. Perkembangan anggaran dan realisasi pajak Aceh tahun 2018-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.179.

Tabel 2.179.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2018-2024

| Tahun | Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rp. | % | Pertumbuhan (%) |
| 2018 | 1.371.597.749.941 | 1.309.081.813.533 | 95,44 | - |
| 2019 | 1.453.552.654.141 | 1.409.251.915.061 | 96,95 | 7,65 |
| 2020 | 1.275.366.715.499 | 1.477.991.066.970 | 115,89 | 4,88 |
| 2021 | 1.374.555.532.889 | 1.529.610.318.108 | 111,28 | 3,49 |
| 2022 | 1.574.358.019.378 | 1.717.834.522.320 | 109,11 | 12,31 |
| 2023 | 1.789.594.976.388 | 1.791.227.845.430 | 100,09 | 4,27 |
| 2024 | 1.877.493.725.719 | 1.930.621.844.261 | 102,83 | -7,78 |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited), 2024 (Unaudited)*

### A.2. Pendapatan Retribusi Aceh

Retribusi Aceh merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau badan, baik dalam bentuk pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu. Selama periode tahun 2018 hingga 2024, pendapatan restribusi Aceh menunjukkan tren yang dinamis dengan lonjakan peningkatan pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2022, yaitu sebesar 80,58 persen dan pada tahun 2024 peningkatan pertumbuhannya sangat singnifikan karena meningkatnya realisasi retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi jasa usaha. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas pengelolaan restribusi daerah, meskipun kedepan diperlukan strategi untuk menjaga kesinambuingan peningkatan tersebut. Lebih jelas mengenai perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan retribusi Aceh Tahun 2018 s,d 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.180.

Tabel 2.180.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Aceh Tahun 2018-2024

| Tahun | Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rp. | % | Pertumbuhan (%) |
| 2018 | 17.799.646.000 | 20.762.789.454 | 116,65 | - |
| 2019 | 28.864.400.000 | 17.087.692.809 | 59,20 | -17,70 |

| Tahun | Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rp. | % | Pertumbuhan (%) |
| 2020 | 12.133.554.700 | 8.159.969.910 | 67,25 | -52,25 |
| 2021 | 12.133.554.700 | 8.307.103.680 | 68,46 | 1,80 |
| 2022 | 9.458.309.000 | 15.000.911.792 | 158,6 | 80,58 |
| 2023 | 14.277.225.253 | 16.462.009.498 | 115,3 | 9,73 |
| 2024 | 693.832.792.144 | 790.959.745.325 | 114,0 | 4.705,76 |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2022 (Audited), 2023 (Unaudited),*

### A.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, khususnya dari hasil penyertaan modal Pemerintah Aceh selama periode 2018 hingga 2023 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pendapatan ini bersumber bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Aceh (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. Realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 226.689.202.474, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp. 132.444.587.380.

Tabel 2.181.
Deviden Pemerintah dari BUMD Tahun 2019-2023

| Tahun | Bank Aceh | BPR Mustaqim | PT Pembangunan Aceh | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 158.314.541.101 | 1.098.799.023 | - | 159.413.340.124 |
| 2020 | 158.284.954.748 | - | - | 158.284.954.748 |
| 2021 | 132.444.587.380 | - | - | 132.444.587.380 |
| 2022 | 136.504.728.222 | 825.560.175 | 21.659.933.276 | 158.990.221.673 |
| 2023 | 201.137.939.392 | 1.249.085.766 | 24.302.177.316 | 226.689.202.474 |

Adapun secara rinci anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2018 s.d 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.182.

Tabel 2.182.
Anggaran dan Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2018-2023

| Tahun | Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rp. | % | Pertumbuhan (%) |
| 2018 | 192.982.069.855 | 181.654.111.575 | 94,13 | - |
| 2019 | 196.934.994.855 | 182.385.550.448 | 92,61 | 0,40 |
| 2020 | 202.386.465.655 | 181.700.799.036 | 89,78 | -0,38 |
| 2021 | 182.385.550.448 | 152.434.096.229 | 83,58 | -16,11 |
| 2022 | 179.862.545.155 | 179.862.545.156 | 100 | 17,99 |
| 2023 | 252.723.801.693 | 252.723.801.693 | 100 | 40,51 |
| 2024 | 265.530.274.530 | 267.660.903.349 | 100,80 | 5,91 |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited), 2024 (Unaudited)*

### A.4. Lain-Lain PAA yang Sah

Realisasi pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain PAA yang sah selama periode Tahun 2018 s.d 2023 mencapai sebesar Rp. 5.587.747.995.507. Pendapatan ini diperoleh dari berbagai sumber, antara lain hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan dari pengembalian, pendapatan angsuran/cicilan penjualan, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, pendapatan zakat, pendapatan BLUD dan lain-lain pendapatan sah lainnya. Selain itu, terdapat pula pendapatan BLUD pada UPTD Pengelola Mesjid Raya Baiturrahman yang bersumber dari kas tunai dalam bentuk mata uang asing. Perkembangan anggaran dan realisasi lain lain pendapatan Asli Aceh yang sah untuk periode Tahun 2018 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.183.

Tabel 2.183.
Anggaran dan Realisasi Lain Lain PAA yang Sah Tahun 2018-2024

| Tahun | Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rp. | % | Pertumbuhan (%) |
| 2018 | 742.282.965.404 | 847.886.679.084 | 114,23 | - |
| 2019 | 909.931.995.687 | 1.090.187.312.826 | 119,81 | 28,58 |
| 2020 | 694.720.461.194 | 902.924.041.268 | 129,97 | -17,18 |
| 2021 | 832.607.817.928 | 815.536.391.014 | 97,95 | -9,68 |
| 2022 | 809.071.227.166 | 1.004.447.023.784 | 124,15 | 23,16 |
| 2023 | 796.581.433.700 | 926.775.035.583 | 116,34 | -7,73 |
| 2024 | 182.162.912.923 | 236.443.432.921 | 129,80 | -74,49 |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited), 2024 (Unaudited)*

### B. Pendapatan Transfer

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan serta disalurkan kepada daerah untuk dikelola dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pendapatan transfer terdiri atas transfer dari Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer ini mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (OTSUS) dan Dana Insentif Daerah (DID). Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.184.

Tabel 2.184.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2018-2024

| Tahun | Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rp. | % | Pertumbuhan (%) |
| 2018 | 12.274.206.245.080 | 12.065.901.692.555 | 98,3 | - |
| 2019 | 13.077.284.732.062 | 13.049.675.124.487 | 99,79 | 8,15 |
| 2020 | 11.818.700.337.176 | 11.826.017.687.067 | 100,06 | -9,38 |
| 2021 | 11.435.885.996.400 | 11.431.169.265.498 | 99,96 | -3,34 |
| 2022 | 10.821.625.873.000 | 10.775.168.990.686 | 99,57 | -5,74 |
| 2023 | 7.512.362.697.472 | 7.580.381.361.583 | 100,91 | -29,65 |
| 2024 | 8.241.836.725.000 | 8.167.778.560.238 | 99,10 | |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited) 2024 (Unaudited)*

Secara umum, komponen terbesar dari pendapatan transfer Aceh berasal dari dana Otonomi Khusus (Otsus), dengan kontribusi sebesar 65,98 persen terhadap total pendapatan transfer. Komponen terbesar kedua adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dengan kontribusi sebesar 17,28 persen. Diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai komponen terbesar ketiga dengan kontribusi sebesar 13,05 persen. Secara garis besar, komposisi masing-masing jenis pendapatan transfer tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam subbagian berikut.

### B.1. Transfer Dana Pusat-Dana Perimbangan

#### B.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan/atau berdasarkan kinerja tertentu. DBH dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah pusat dan Daerah serta kepada daerah non-penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negative dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. DBH terdiri atas DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak mencakup pendapatan dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan serta cukai hasil tembakau. Sementara itu, DBH Sumber Daya Alam melipuiti hasil dari sektor kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi serta perikanan. Berdasarkan perkembangan realisasi DBH, pertumbuhan tertinggi tercatat pada tahun 2023 dengan peningkatan sebesar 76,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan anggaran dan realisasi DBH Tahun 2018 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.185.

Tabel 2.185.
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2018-2024

| Tahun | Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rp. | % | Pertumbuhan (%) |
| 2018 | 227.967.248.000 | 191.892.691.947 | 84,18 | - |
| 2019 | 285.842.184.062 | 211.948.683.718 | 74,15 | 10,45 |
| 2020 | 206.211.622.869 | 167.139.992.425 | 81,05 | -21,14 |
| 2021 | 153.487.130.400 | 202.310.251.468 | 131,81 | 21,04 |
| 2022 | 237.377.250.000 | 275.867.239.481 | 116,21 | 36,36 |
| 2023 | 394.572.348.472 | 486.170.016.772 | 123,21 | 76,23 |
| 2024 | 386.970.913.000 | 384.647.924.000 | 99,40 | -20,88 |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited) 2024 (Unaudited)*

### B.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan serta meningkatkan kualitas layanan public antar daerah. DAU diarahkan untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah. Penggunaan DAU terdiri atas dua bagian, yaitu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan peundang uandangan. Berdasarkan data realisasi, peningkatan DAU tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan pertumbuhan sebesar 12,72 persen, sedangkan Penurunan realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2020 dengan pertumbuhan negatif sebesar minus 15,75 persen. Perkembangan anggaran dan realisasi DAU tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.186.

Tabel 2.186.
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2018-2024

| Tahun | Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rp. | % | Pertumbuhan (%) |
| 2018 | 2.060.263.235.000 | 2.060.263.235.000 | 100 | - |
| 2019 | 2.126.619.991.000 | 2.322.266.506.000 | 109,2 | 12,72 |
| 2020 | 1.961.334.010.000 | 1.956.492.796.000 | 99,75 | -15,75 |
| 2021 | 1.945.980.616.000 | 1.945.980.616.000 | 100 | -0,54 |
| 2022 | 1.947.783.847.000 | 1.941.752.249.876 | 99,69 | -0,22 |
| 2023 | 2.015.956.282.000 | 2.015.956.282.000 | 100 | 3,82 |
| 2024 | 2.333.567.650.000 | 2.310.752.304.717 | 99,02 | 14,62 |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited) 2024 (Unaudited)*

### B.1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang

menjadi prioritas nasional serta membantu operasionalisasi layanan publik di daerah, dengan penggunaannya yang telah ditentukan oleh Pemerintah. DAK dialokasikan untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu : (a) mencapai prioritas nasional, (b) mempercepat pembangunan daerah,(c) mengurangi kesenjangan layanan public,(d) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah , dan/atau (e) mendukung operasionalisasi layanan publik. DAK terdiri atas tiga bentuk, yaitu : (a)DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah, (b) DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah, dan (c) Hibah kepada daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Perkembangan anggaran dan realisasi DAK Tahun 2018 s.d 2024 disajikan pada Tabel 2.187.

Tabel 2.187.
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018-2024

| Tahun | Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rp. | % | Pertumbuhan (%) |
| 2018 | 1.576.403.565.000 | 1.483.635.794.660 | 94,12 | - |
| 2019 | 1.826.271.773.000 | 1.744.873.155.047 | 95,54 | 17,61 |
| 2020 | 1.730.846.802.924 | 1.808.564.320.066 | 104,49 | 3,65 |
| 2021 | 1.773.862.244.000 | 1.720.322.392.030 | 96,98 | -4,88 |
| 2022 | 1.044.584.607.000 | 965.669.332.329 | 92,45 | -43,87 |
| 2023 | 1.131.385.358.000 | 1.107.806.353.811 | 97,92 | 14,72 |
| 2024 | 1.226.455.645.000 | 1.177.535.814.521 | 95,56 | 6,29 |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited) 2024 (Unaudited)*

### B.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

#### B.2.1. Dana Otonomi Khusus (OTSUS)

Dana Otonomi Khusus (OTSUS) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengamanatkan bahwa dana otonomi khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang bertujuan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. Selanjutnya, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, pada Pasal 10 ditegaskan bahwa dana otonomi khusus diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan dibidang infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, social, kesehatan, serta pembiayaan program pembangunan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh.

Realisasi Dana OTSUS Tahun 2018 s.d 2024 mencapai sebesar Rp. 47.295.362.436.000. Sejalan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh , alokasi dana Otsus mulai tahun 2023 hingga 2027 ditetapkan sebesar 1 persen dari DAU nasional, dan pada tahun 2028 tidak terdapat lagi alokasi dana otsus. Terhadap keberlanjutan dana otsus pasca 2027, saat ini masih dalam tahapan kajian serta pembahasan dampaknya terhadap perekonomian Aceh dalam Proses Lageslasi Nasional. Secara detail perkembangan anggaran dan realisasi Dana OTSUS Tahun 2018 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.188.

Tabel 2.188.
Anggaran dan Realisasi Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun 2018-2024

| Tahun | Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rp. | % | Pertumbuhan (%) |
| 2018 | 8.029.791.592.980 | 8.029.791.593.000 | 100 | |
| 2019 | 8.357.471.654.000 | 8.357.471.654.000 | 100 | 4,08 |
| 2020 | 7.555.278.348.000 | 7.555.278.348.000 | 100 | -9,6 |
| 2021 | 7.555.827.806.000 | 7.555.827.806.000 | 100 | 0,01 |
| 2022 | 7.560.000.000.000 | 7.560.000.000.000 | 100 | 0,06 |
| 2023 | 3.960.000.000.000 | 3.960.000.000.000 | 100 | -47,62 |
| 2024 | 4.276.993.035.000 | 4.276.993.035.000 | 100 | 8,00 |
| Total | 47.295.362.435.980 | 47.295.362.436.000 | | |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited) 2024 (Unaudited)*

### B.2.2. Dana Penyesuaian

Realisasi dana penyesuaian selama periode Tahun 2018 s.d 2023 mencapai sebesar Rp. 1.098.269.652.746 atau sebesar 98,69 persen dari total anggaran yang dialokasikan. Namun demikian, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Pemerintah Aceh tidak menerima lagi dana penyesuaian, seiring dengan perubahan regulasi yang mengintegrasikan dana penyesuaian ke dalam kelompok dana transfer. Lebih detail perkembangan anggaran dan realisasi dana penyesuaian Tahun 2018 s,d 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.189.

Tabel 2.189.
Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2018-2023

| Tahun | Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rp. | % | Pertumbuhan (%) |
| 2018 | 379.780.604.100 | 300.318.377.948 | 79,08 | - |
| 2019 | 481.079.130.000 | 413.115.125.722 | 85,87 | 37,56 |
| 2020 | 252.012.084.307 | 384.836.149.076 | 152,71 | -6,85 |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | |
| Total | 1.112.871.818.407 | 1.098.269.652.746 | 98,69 | |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2022 (Audited) 2023 (Unaudited)*

### B.2.3. Dana Insentif Daerah (DID)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID), DID merupakan bagian dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). DID dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria dan kategori tertentu sebagai bentuk penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di berbagai bidang, seperti tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Selama periode Tahun 2018 s.d 2024, Pemerintah Aceh mendapatkan alokasi DID pada tahun 2021 dan 2022. Pada Tahun 2021, alokasi DID yang diteriima berjumlah Rp. 6.728.200.000 yang diperoleh dari penilaian kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah pada indikator kualitas belanja modal kesehatan. Perkembangan anggaran dan realisasi DID Tahun 2018 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.190.

Tabel 2.190.
Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2018-2023

| Tahun | Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rp. | % | Pertumbuhan (%) |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2021 | 6.728.200.000 | 6.728.200.000 | 100 | - |
| 2022 | 31.880.169.000 | 31.880.169.000 | 100 | 373,83 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| Total | 38.608.369.000 | 38.608.369.000 | 100 | |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited) 2024 (Unaudited)*

Pada tahun 2022, Pemerintah Aceh kembali mendapatkan alokasi DID dengan total sebesar Rp. 31.880.169.000, yang pengalokasiannya dilakukan dalam dua periode. Periode pertama sesuai dengan PMK Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022, serta Pengunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2021, dengan alokasi sebesar Rp. 8.965.706.000. Periode kedua sesuai dengan PMK Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Tahun 2022, dengan alokasi sebesar Rp. 22.914.463.000.

## C. Lain-Lain Pendapatan Aceh Yang Sah

Pencapaian realisasi lain-lain pendapatan Aceh yang sah selama periode Tahun 2018 s.d 2024 mencapai Rp. 89.934.529.859. Pertumbuhan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2020, dengan peningkatan signifikan sebesar 923 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, pada tahun 2023, realisasi lain-lain pendapatan Aceh yang sah mengalami penurunan yang sangat drastic, dengan tingkat penurunan

mencapai minus 76 persen. Perkembangan lebih rinci terkait anggaran dan realisasi lain-lain Pendapatan Aceh Yang Sah Tahun 2018 hingga 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.191.

Tabel 2.191.
Anggaran dan Realisasi Lain Lain Pendapatan Aceh Yang Sah Tahun 2018-2024

| Tahun | Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rp. | % | Pertumbuhan (%) |
| 2018 | 23.606.648.000 | 2.495.989.598 | 10,57 | - |
| 2019 | 26.206.454.196 | 4.213.306.021 | 16,08 | 68,8 |
| 2020 | 2.093.980.000 | 43.126.992.771 | 2059,57 | 923,59 |
| 2021 | 27.410.001.577 | 11.331.098.907 | 41,34 | -73,73 |
| 2022 | 19.604.430.778 | 21.270.709.858 | 108,5 | 87,72 |
| 2023 | 3.581.362.000 | 4.922.849.869 | 130,77 | -76,49 |
| 2024 | 1.968.000.000 | 2.573.582.836 | 130,77 | -47,72 |
| Total | 104.470.876.551 | 89.934.529.859 | | |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited) 2024 (Unaudited)*

### C.1. Pendapatan Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, maupun badan usaha dari dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat, untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah ini merupakan bagian komponen dari lain-lain pendapatan Aceh yang sah. Realisasi pendapatan hibah tertinggi tercatat pada tahun 2020, dengan capaian sebesar Rp. 43.126.992.771, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.495.989.598. Lebih jelas mengenai perkembangan anggaran dan realisasi pendaapatan hibah Tahun 2018 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.192.

Tabel 2.192.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2018-2023

| Tahun | Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rp. | % | Pertumbuhan (%) |
| 2018 | 23.606.648.000 | 2.495.989.598 | 10,57 | - |
| 2019 | 26.206.454.196 | 4.213.306.021 | 16,08 | 68,80 |
| 2020 | 2.093.980.000 | 43.126.992.771 | 2059,57 | 923,59 |
| 2021 | 27.410.001.577 | 9.815.653.425 | 35,81 | -77,24 |
| 2022 | 19.604.430.778 | 21.164.409.858 | 107,96 | 115,62 |
| 2023 | 3.581.362.000 | 4.922.849.869 | 137,46 | -76,38 |
| 2024 | 1.968.000.000 | 2.573.582.836 | 130,77 | -47,72 |
| Total | 104.470.876.551 | 88.312.784.378 | | |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited) 2024 (Unaudited)*

### C.2. Pendapatan Lainnya

Realisasi pendapatan lainnya selama periode Tahun 2018 s.d 2024 berjumlah sebesar Rp. 3.231.745.482. Pendapatan lainnya ini berasal dari Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Pendapatan lainnya ini hanya diperoleh pada tahun 2021 dan 2022. Perkembangan realisasi pendapatan lainnya Tahun 2018 s.d 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.193.

Tabel 2.193.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lainnya Tahun 2018-2024

| Tahun | Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rp. | % | Pertumbuhan (%) |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2021 | - | 1.515.445.482 | - | - |
| 2022 | - | 106.300.000 | - | -92,99 |
| 2023 | - | - | | |
| 2024 | - | - | | |
| Total | - | 3.231.745.482 | | |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited) 2024 (Unaudited)*

### 2.2.1.2. Belanja Aceh

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan atas beberapa komponen sebagai berikut:

1. Belanja operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Aceh yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran anggaran atas beban APBA untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja transfer, yaitu pengeluaran uang dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Secara umum, belanja pemerintah Aceh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan alokasi belanja ini menjadi peluang strategis bagi pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi, yang dampaknya diharapkan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Selama periode tahun 2018 s.d 2024, realisasi belanja Aceh mencapai Rp. 93.435.012.689.941 atau 89,70 persen dari total anggaran sebesar Rp. 104.778.703.130.443, dengan tren yang bersifat fluktuatif. Realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2023 dengan capaian 97,70 persen yaitu sebesar Rp. 11.354.800.577.745 dari total anggaran Rp. 11.621.219.098.956. Lebih jelas mengenai perkembangan anggaran dan realisasi belanja Aceh Tahun 2018 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.194.

Tabel 2.194.
Anggaran dan Realisasi Belanja Aceh Tahun 2018-2024

| Tahun | Anggaran (Rp.) | Realisasi | |
|---|---|---|---|
| | | Rp. | % |
| 2018 | 15.084.003.946.127 | 12.306.306.187.481 | 81,59 |
| 2019 | 17.328.154.517.122 | 15.787.883.385.490 | 91,11 |
| 2020 | 15.827.709.393.003 | 13.242.212.801.895 | 83,66 |
| 2021 | 16.482.338.309.498 | 13.683.582.127.432 | 83,02 |
| 2022 | 16.763.157.517.180 | 15.773.078.722.046 | 94,09 |
| 2023 | 11.621.219.098.956 | 11.354.800.577.745 | 97,71 |
| 2024 | 11.672.120.348.557 | 11.287.148.887.852 | 96,70 |
| Total | 104.778.703.130.443 | 93.435.012.689.941 | 89,70 |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited), 2024 (unaudited)*

A. Belanja Operasi

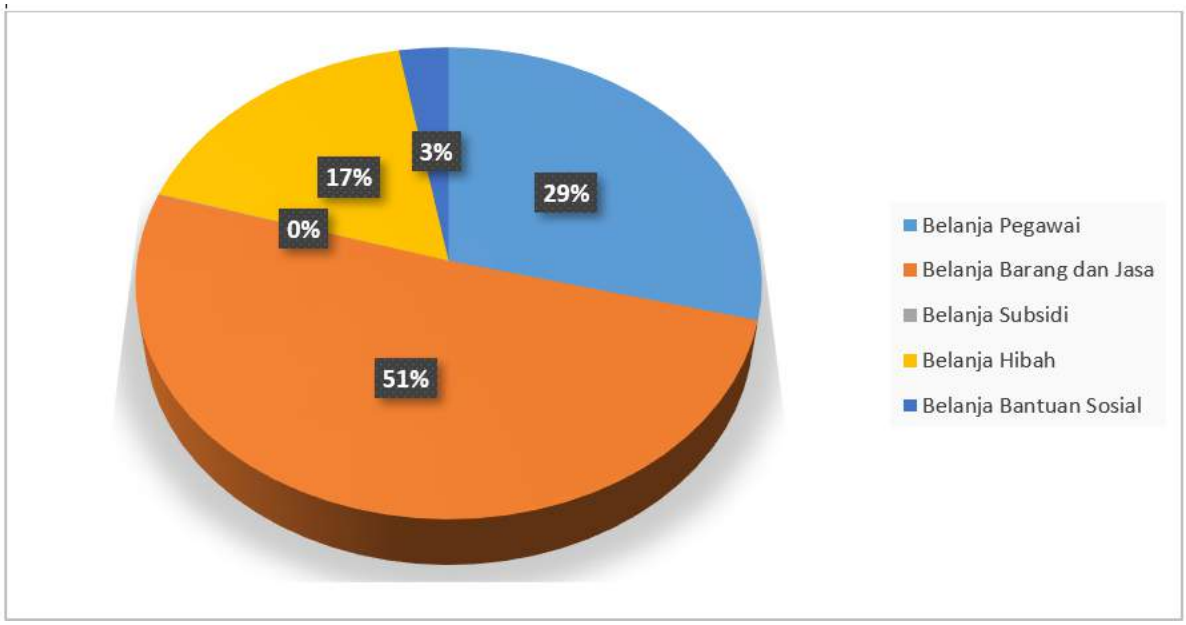
Realisasi belanja operasi Pemerintah Aceh selama periode Tahun 2018 s.d 2024 adalah sebesar Rp. 60.956.483.867.584 atau 87,20 persen dari total anggaran Rp. 59.923.241.685.546. Capaian realisasi belanja operasi menunjukkan tren yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2023 sebesar 97,95 persen, sedangkan realisasi terendah tercatat pada tahun 2018 dengan capaian sebesar 82,44 persen (Tabel 2.195).

Tabel 2.195.
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2018-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | |
|---|---|---|---|
| | | Rp. | % |
| 2018 | 10.983.996.927.963 | 9.054.782.711.093 | 82,44 |
| 2019 | 10.221.501.126.868 | 9.282.694.398.477 | 90,82 |
| 2020 | 9.665.729.666.500 | 7.985.982.044.904 | 82,62 |
| 2021 | 10.058.436.337.426 | 8.649.311.139.858 | 85,99 |
| 2022 | 10.474.623.803.456 | 9.853.395.736.247 | 94,07 |
| 2023 | 8,094,074,034,684 | 7.920.985.964.479 | 97,95 |
| 2024 | 8.518.953.823.333 | 8.209.331.872.526 | 96,37 |
| Total | 59.923.241.685.546 | 60.956.483.867.584 | 87,2 |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited), 2024 (unaudited)*

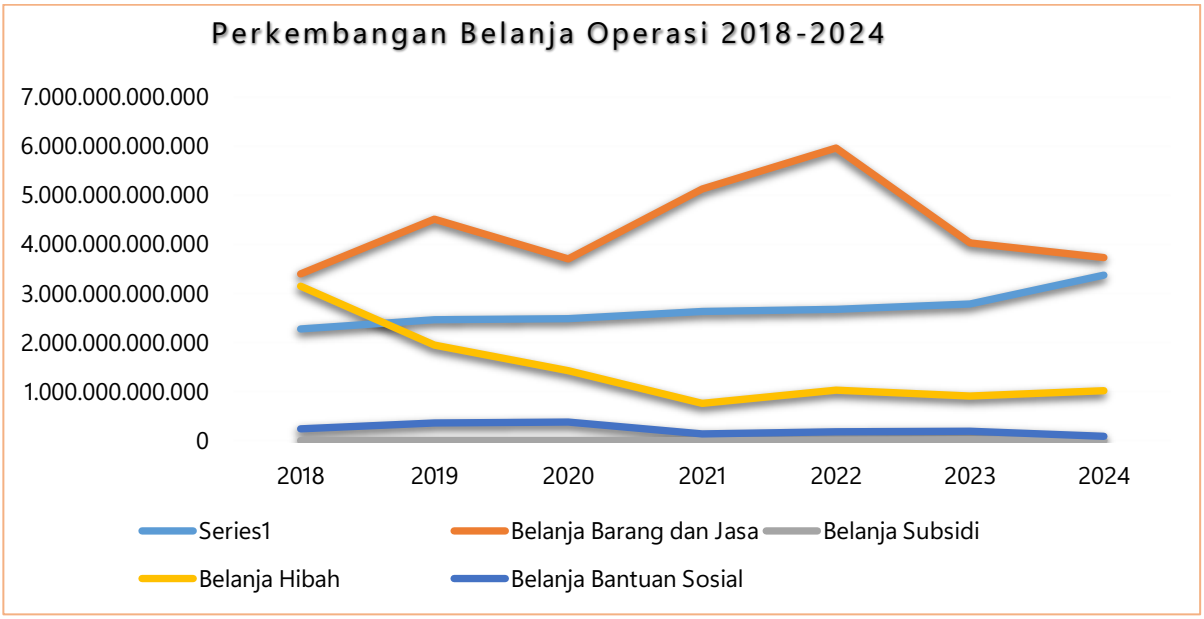
Komponen belanja operasi Pemerintah Aceh selama periode Tahun 2018 s.d 2024 terdiri dari beberapa pos pengeluaran utama. dari total realisasi belanja operasi, belanja barang dan jasa menjadi komponen terbesar dengan kontribusi sebesar 50,64 persen, diikuti belanja pegawai sebesar 29,01 persen, belanja hibah sebesar 17,46 persen. Sementara itu, belanja subsidi dan belanja bantuan sosial masing-masing memberikan kontribusi sebesar 0,06 persen dan 2,87 persen terhadap total belanja operasi. Lebih jelas lihat Gambar 2.149.




*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited), 2024 (unaudited)*

Gambar 2.149. Kontribusi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2018 s.d 2024

Perkembangan realisasi belanja operasi Pemerintah Aceh mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dari seluruh komponen belanja operasi, belanja barang dan jasa menjadi kontributor terbesar, terutama dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2022, realisasi belanja barang dan jasa mencapai nilai tertinggi. Peningkatan ini diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama melalui: belanja pendidikan dan kesehatan guna membangun SDM unggul dan produktif, penguatan hilirisasi industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan kemiskinan ekstrem dan Pengurangan kesenjangan sosial di Aceh.




*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited), 2024 (unaudited)*

Gambar 2.150. Perkembangan Realisasi Belanja Operasi, 2018-2024

### A.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan salah satu komponen pengeluaran anggaran yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pegawai honorer di lingkungan pemerintah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi organisasi Pemerintah. Selama periode Tahun 2018 hingga 2024 realisasi belanja Pegawai Pemerintah Aceh mencapai angka Rp. 18.671.864.136.115 atau sebesar 93,39 persen dari total anggaran sebesar Rp. 19.835.877.305.723 (Tabel 2.196).

Tabel 2.196.
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018-2023

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | |
|---|---|---|---|
| | | Rp. | % |
| 2018 | 2.452.195.185.618 | 2.274.436.642.148 | 92,75 |
| 2019 | 2.599.175.938.705 | 2.461.315.744.896 | 94,7 |
| 2020 | 2.886.272.033.465 | 2.483.284.443.746 | 86,04 |
| 2021 | 2.829.428.312.694 | 2.631.227.115.328 | 93 |
| 2022 | 2.806.337.723.413 | 2.672.636.562.975 | 95,24 |
| 2023 | 2.810.065.283.664 | 2.777.232.840.075 | 98,83 |
| 2024 | 3.452.402.828.164 | 3.371.730.786.947 | 97,66 |
| Total | 19.835.877.305.723 | 18.671.864.136.115 | 93,39 |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited), 2024 (unaudited))*

### A.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dengan nilai manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan, guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan. Selama periode tahun 2018 hingga tahun 2024, realisasi belanja barang dan jasa Pemerintah Aceh tercatat sebesar Rp. 30.451.296.836.413 atau mencapai 91,87 persen dari total anggaran yang telah dialokasikan dengan nilai Rp. 32.830.898.517.073. Realisasi belanja barang dan jasa tersebut menunjukkan tren yang fluktuaktif dari tahun ke tahun (Tabel 2.197).

Tabel 2.197.
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | |
|---|---|---|---|
| | | Rp. | % |
| 2018 | 4.091.203.458.789 | 3.396.750.243.456 | 83,03 |
| 2019 | 4.968.430.836.893 | 4.514.524.421.392 | 90,86 |
| 2020 | 3.907.674.602.124 | 3.702.404.761.737 | 94,75 |
| 2021 | 5.936.917.132.917 | 5.125.955.152.315 | 86,34 |
| 2022 | 6.191.098.137.082 | 5.961.654.335.730 | 96,29 |
| 2023 | 4.000.024.822.724 | 4.023.048.182.624 | 100,58 |
| 2024 | 3.735.549.526.544 | 3.726.959.739.159 | 99,77 |
| Total | 32.830.898.517.073 | 30.451.296.836.413 | 91,85 |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited), 2024 (unaudited)*

## A.3. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran anggaran pemerintah Aceh yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat,khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi. Subsidi ini digunakan untuk operasi pasar murah, menjaga stabilitas harga serta menutupi kerugian yang dialami oleh masyarakat dan perusahaan, terutama akibat dampak pandemi Covid-19. Belanja subsidi terbagi dalam 2 (dua) jenis peruntukan yaitu kepada BUMN dan Badan Usaha Milik Swasta. Pada triode tahun 2022 hingga 2024, Pemerintah Aceh telah merealisasikan belanja subsidi sebesar Rp.37.856.366.000 yang setara dengan 70,81 persen dari anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2.198.
Anggaran dan Realisasi Belanja Susidi Tahun 2018-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | |
|---|---|---|---|
| | | Rp. | % |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |
| 2022 | 26.194.608.000 | 13.225.283.500 | 50,49 |
| 2023 | 18.247.410.999 | 18.244.902.500 | 99,99 |
| 2024 | 6.387.680.000 | 6.386.180.000 | 99,98 |
| Total | 50.829.698.999 | 37.856.366.000 | 70,81 |

*Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2018 s.d 2023 (Audited), 2024 (unaudited)*

## A.4. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Aceh dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pihak lain, baik lembaga/organisasi, maupun pemerintah daerah. Hibah ini bersifiat sukarela, tidak mengikat dan tidak wajib untuk dibayar kembali. Proses pemberian hibah dilakukan melalui naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah, serta tidak dilakukan secara terus menerus. Realisasi belanja Hibah Pemerintah Aceh selama periode Tahun 2018 s.d 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan realisasi sebesar Rp. 10.227.732.748.417 yang setara dengan 90,39 persen dari nilai total anggaran sejumlah Rp. 11.275.033.833.225. (Tabel 2.199).

Tabel 2.199.
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2018-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | |
|---|---|---|---|
| | | Rp. | % |
| 2018 | 3.844.422.125.578 | 3.146.293.151.466 | 81,84 |
| 2019 | 2.096.940.221.820 | 1.946.365.153.670 | 92,82 |
| 2020 | 1.376.016.275.582 | 1.422.789.246.409 | 103,4 |

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | |
|---|---|---|---|
| | | Rp. | % |
| 2021 | 907.787.487.926 | 758.581.422.107 | 83,56 |
| 2022 | 1.049.661.826.280 | 1.026.826.661.463 | 97,82 |
| 2023 | 914.818.537.702 | 909.872.227.035 | 99,46 |
| 2024 | 1.085.387.358.337 | 1.017.004.886.267 | 93,70 |
| Total | 11.275.033.833.225 | 10.227.732.748.417 | 90,39 |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited), 2024 (unaudited)*

### A.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran yang diberikan oleh Pemerintah Aceh dalam bentuk transfer uang, barang atau jasa kepada masyarakat. Tujuan utama dari belanja ini adalah untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, serta meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada periode Tahun 2018 s.d 2024, Pemerintah Aceh telah merealisasikan belanja bantuan sosial sebesar Rp. 1.567.739.780.637, yang setara dengan 39,11 persen dari total anggaran Rp. 4.024.676.365.210 dan menunjukkan tren yang fluktuaktif (Tabel 2.200)

Tabel 2.200.
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2018-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | |
|---|---|---|---|
| | | Rp. | % |
| 2018 | 596.176.157.978 | 237.302.674.023 | 39,8 |
| 2019 | 556.954.129.450 | 360.489.078.519 | 64,73 |
| 2020 | 1.495.766.755.329 | 377.503.593.012 | 25,24 |
| 2021 | 384.303.403.889 | 133.553.450.107 | 34,75 |
| 2022 | 401.331.508.681 | 179.052.892.579 | 44,61 |
| 2023 | 350.917.979.595 | 192.587.812.244 | 54,88 |
| 2024 | 239.226.430.288 | 87.250.280.153 | 36,47 |
| Total | 4.024.676.365.210 | 1.567.739.780.637 | 39,11 |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited), 2024 (unaudited)*

## B. Belanja Modal

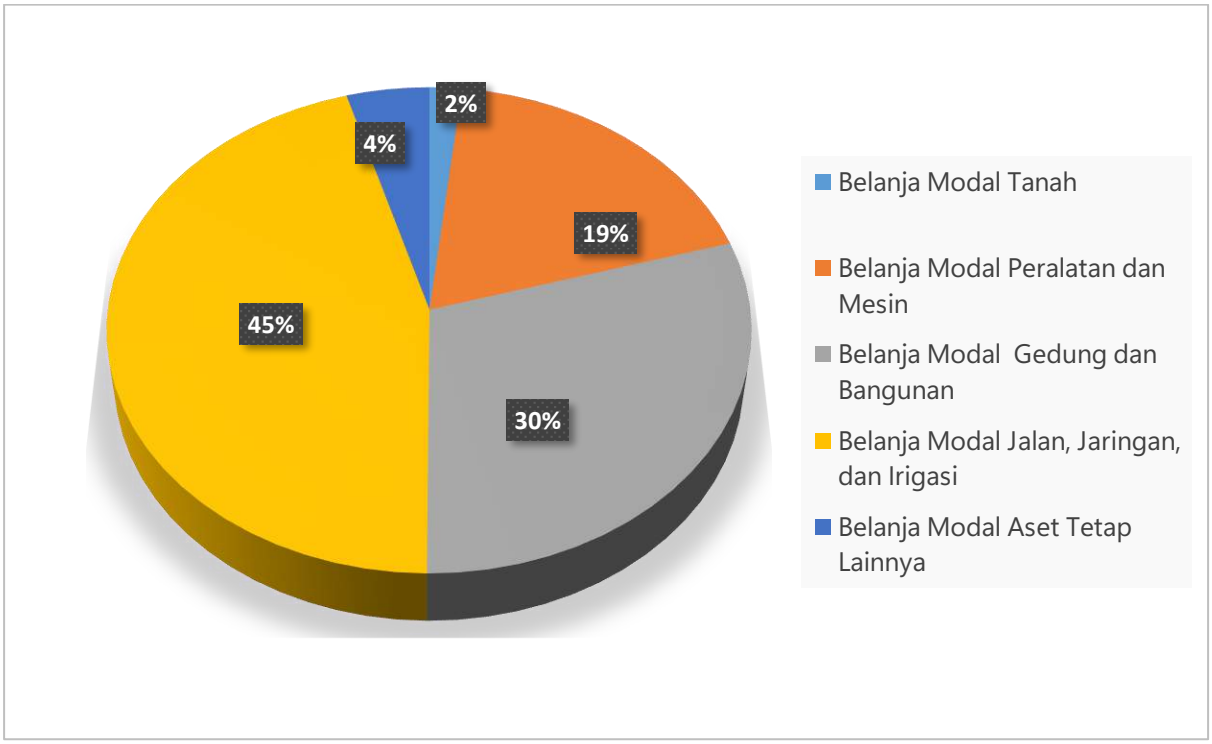
Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pada periode Tahun 2018 s.d 2024, Pemerintah Aceh telah merealisasikan belanja modal sebesar Rp. 15.409.988.178.000 atau setara dengan 81,67 persen dari anggaran Rp. 18.619.944.805.430 dan menunjukkan tren yang fluktuaktif (Tabel 2.201).

Tabel 2.201.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2018-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | |
|---|---|---|---|
| | | Rp. | % |
| 2018 | 3.301.299.641.247 | 2.503.941.129.737 | 75,85 |
| 2019 | 3.670.230.927.927 | 3.162.088.165.983 | 86,16 |
| 2020 | 2.094.518.027.289 | 1.755.472.079.286 | 83,81 |
| 2021 | 3.315.459.457.224 | 2.199.333.370.928 | 66,34 |
| 2022 | 3.214.492.236.095 | 2.868.705.757.385 | 89,24 |
| 2023 | 1.740.133.476.500 | 1.676.030.003.504 | 96,32 |
| 2024 | 1.283.811.039.148 | 1.244.417.671.176 | 96,93 |
| Total | 18.619.944.805.430 | 15.409.988.178.000 | 81,67 |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited), 2024 (unaudited)*

Dari Gambar 2.151 dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar dalam belanja modal selama periode Tahun 2018 hingga 2024 bersumber dari belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang mencapai Rp. 6.424.147.132.094 atau 45,37 persen dari total belanja modal sebesar Rp. 14.158.452.270.853, selanjutnya kontribusi terbesar kedua adalah dari belanja modal gedung dan bangunan yang mencapai 29,67 persen (Rp. 4.200.399.907.911), diikuti oleh belanja modal peralatan dan mesin yang berkontribusi sebesar 18,70 persen (Rp. 2.646.952.435.445). Sementara belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal tanah masing-masing memberikan berkontribusi sebesar Rp. 638.537.252.408 atau 4,51 persen dan Rp. 248.415.542.995 yang setara dengan 1,75 persen.




*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited), 2024 (unaudited)*

Gambar 2.151. Kontribusi Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 s.d 2024

Perkembangan realisasi belanja modal menjunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Komponen belanja modal jalan, jaringan dan irigasi merupakan yang terbesar, terutama dalam lima tahun terakhir, dengan tahun 2022 mencatatkan nilai tertinggi. Mengingat bahwa wilayah Aceh memiliki potensi besar di sektor pertanian, investasi pada jalan, jaringan dan irigasi menjadi sangat krusial. Infrasrtuktur ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga berperan penting dalam mengurangi kesenjangan, serta memastikan distribusi hasil pertanian yang lebih efesien dan merata keseluruh daerah.

## C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran yang dialokasikan untuk keperluan darurat atau situasi mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Selama periode Tahun 2018 s.d 2024 Pemerintah Aceh telah meealisasikan belanja tidak terduga sebesar Rp. 168.149.126.758. Realisasi terendah tercata pada tahun 2024, yang hanya mencapai Rp. 19.848.398, mencerminkan kebuutuhan darurat yang relatih lebih rendah pada tahun tersebut. (Tabel 2.202).

Tabel 2.202.
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2018-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | |
|---|---|---|---|
| | | Rp. | % |
| 2018 | 40.000.000.000 | 48.704.400 | 0,12 |
| 2019 | 97.712.075.877 | 4.838.896.611 | 4,95 |
| 2020 | 439.760.468.964 | 158.460.075.459 | 36,03 |
| 2021 | 147.985.369.115 | 412.071.890 | 0,28 |
| 2022 | 16.828.950.631 | 4.335.030.000 | 25,76 |
| 2023 | 29.261.478.010 | 34.500.000 | 0,12 |
| 2024 | 8.595.194.981 | 19.848.398 | 0,23 |
| Total | 780.143.537.578 | 168.149.126.758 | 21,79 |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited) , 2024 (unaudited)*

## D. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Realisasi belanja transfer Pemerintah Aceh selama periode Tahun 2018 s.d 2024 berjumlah sebesar Rp. 13.309.255.912.084 atau sebesar 96,85 persen dari anggaran sebesar Rp. 16.901.385.517.597 dan menunjukkan tren yang fluktuaktif dengan rata rata pertumbuhan sebesar 84,75 persen (Tabel 2.203).

Tabel 2.203.
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2018-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | |
|---|---|---|---|
| | | Rp. | % |
| 2018 | 758.707.376.917 | 747.533.642.251 | 98,53 |
| 2019 | 3.338.710.386.450 | 3.338.261.924.420 | 99,99 |

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi | |
|---|---|---|---|
| | | Rp. | % |
| 2020 | 3.627.701.230.250 | 3.342.298.602.245 | 92,13 |
| 2021 | 2.960.457.145.733 | 2.834.519.544.755 | 95,75 |
| 2022 | 3.057.212.526.998 | 3.046.642.198.413 | 99,65 |
| 2023 | 1.758.750.109.762 | 1.758.750.109.762 | 100 |
| 2024 | 1.860.760.291.095 | 1.833.379.495.751 | 98,5285157 |
| Total | 17.362.299.067.205 | 16.901.385.517.597 | 97,2 |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited), 2024 (unaudited)*

### 2.2.1.3. Pembiayaan Aceh

Pembiayaan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Aceh meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Aceh meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Aceh terdiri dari: Penerimaan Pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan Aceh, yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan yang didalamnya meliputi pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 2.204.
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Aceh Tahun 2018-2024

| Tahun | Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rp. | % | Pertumbuhan (%) |
| 2018 | 767.354.993.296 | 832.981.076.625 | 108,55 | - |
| 2019 | 2.882.457.964.942 | 2.881.224.389.901 | 99,96 | 245,89 |
| 2020 | 1.822.307.878.779 | 2.771.909.599.656 | 152,11 | -3,79 |
| 2021 | 2.617.359.855.556 | 3.668.874.466.386 | 140,17 | 32,36 |
| 2022 | 3.349.177.112.703 | 3.364.172.736.900 | 100,45 | -8,31 |
| 2023 | 1.252.097.602.450 | 1.255.603.592.331 | 100,28 | -62,67 |
| 2024 | 409.295.918.241 | 421.372.974.556 | 102,95 | -66,44 |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2022 (Audited), 2023 (Unaudited)*

Realisasi pembiayaan Pemerintah Aceh menunjukkan fluktuasi yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, realisasi pembiayaan tercatat mencapai angka tertinggi yaitu sebesar Rp. 3.668.874.466.386. Sebaliknya, tahun 2024 mencatatkan realisasi pembiayaan terendah sebesar Rp. 421.372.974.556. Fluktuasi ini sangat dipengaruhi oleh besarnya penerimaan, yang salah satu komponennya adalah SilPA. Selaiin itu, pengeluaran pembiayaan juga sangat tergantung pada besarnya dana yang dialokasikan untuk dana cadangan dan penyertaan modal pada BUMA. Gambaran lebih jelas tentang capaian pembiayaan keuangan ini dapat dilihat pada perkembangan pembiayaan sebagai berikut:

## A. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Aceh mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu (SiLPA), penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Realisasi penerimaan pembiayaan tercatat pada tahun 2021, dengan jumlah sebesar Rp. 3.970.103.175.595. Sebaliknya, penerimaan pembiayaan terendah terjadi pada tahun 2024, yang hanya mencapai Rp. 1.305.536.023.919. Sebagian besar penerimaan pembiayaan ini berasal dari SiLPA daerah, yang menunjukkan pentingnya pengelolaan anggaran yang efesien pada tahun-tahun sebelumnya. anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2018 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.205.

Tabel 2.205.
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018-2024

| Tahun | Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rp. | % | Pertumbuhan (%) |
| 2018 | 832.354.993.296 | 907.571.981.763 | 109,04 | - |
| 2019 | 2.954.457.964.942 | 2.956.538.853.604 | 100,07 | 225,76 |
| 2020 | 1.822.307.878.779 | 2.848.097.021.013 | 156,29 | -3,67 |
| 2021 | 2.924.359.855.556 | 3.970.103.175.595 | 135,76 | 39,39 |
| 2022 | 3.934.177.112.703 | 3.934.600.250.977 | 100,01 | -0,89 |
| 2023 | 1.304.678.718.450 | 1.305.536.023.919 | 100,07 | -66,82 |
| 2024 | 473.295.918.241 | 474.004.949.183 | 100,15 | |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited) 2024 (Unaudited)*

## B. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Pemerintahan Aceh mencakup pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pembentukan Dana Cadangan dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Realisasi pengeluaran pembiayaan terendah tercatat pada tahun 2023 sebesar Rp. 49.932.431.588, yang

mencerminkan pengelolaan pembiayaan yang lebih terkendali pada tahun tersebut. Lebih jelas mengenai perkembangan pengeluaran pembiayaan dapat dilihat pada (Tabel 2.206).

Tabel 2.206.
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2018-2024

| Tahun | Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rp. | % | Pertumbuhan (%) |
| 2018 | 65.000.000.000 | 74.590.905.138 | 114,76 | - |
| 2019 | 72.000.000.000 | 75.314.463.702 | 104,6 | 0,97 |
| 2020 | - | 76.187.421.358 | 0 | 1,16 |
| 2021 | 307.000.000.000 | 301.228.709.209 | 98,12 | 295,38 |
| 2022 | 585.000.000.000 | 570.427.514.078 | 97,51 | 89,37 |
| 2023 | 52.581.116.000 | 49.932.431.588 | 94,96 | -91,25 |
| 2024 | 64.000.000.000 | 52.631.974.627 | 82,24 | |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2022 (Audited) 2023 (unaudited)*

### 2.2.2. Neraca Daerah

Neraca merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Berdasarkan Neraca Pemerintah Aceh, Selama periode Tahun 2018 s.d 2023, nilai aset menunjukkan tren peningkatan dengan rata rata pertumbuhan sebesar 9,22 persen. Pertumbuhan aset ini terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu aset lancar dan asset tidak lancar. Asset lancar mengalami pertumbuhan negatif sebesar 12,22 persen, penurunan terbesar terjadi pada komponen persediaan sebesar minus 16,58 persen dan bagian lancar tagihan penjualan angsuran netto yang mengalami pertumbuhan minus 14,38 persen. Sementara komponen asset lancar yang mengalami pertumbuhan tertinggi terdapat pada komponen belanja dibayar dimuka dengan pertumbuhan sebesar 66,94 persen, diikuti komponen piutang dengan pertumbuhan sebesar 18,96 persen. Pertumbuhan asset tidak lancar mencatat pertumbuhan positif sebesar 13,46 persen selama periode tersebut. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada komponen investasi jangka Panjang yang mencapai 16,20 persen, diikuti asset tetap sebesar 14,44 persen dan asset lainnya sebesar 12,70 persen. Sebaliknya, pertumbuhan asset tidak lancar dari komponen dana cadangan hanya tumbuh sebesar 5,52 persen.

Selanjutnya, pertumbuhan kewajiban keuangan selama periode Tahun 2018 s.d 2023, Pemerintah Aceh mencatat tren penurunan, dengan rata rata pertumbuhan negatif sebesar minus 19,08 persen. Sementara itu, ekuitas dana menunjukkan tren peningkatan dengan rata rata pertumbuhan sebesar 13,04 persen, yang mencerminkan peninghkatan kapasitas keuangan daerah dari tahun ke tahun (Tabel 2.207).

Tabel 2.207.
Rata Rata Pertumbuhan Necara Aceh Tahun 2018 s.d 2023

| URAIAN | Tahun | | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | | *7* |
| ASET | 24.072.598.327.197,20 | 28.454.501.537.454,90 | 30.293.837.027.323,30 | 31.850.790.344.624,20 | 34.101.352.240.031,80 | 33.009.930.661.798,30 | 9,22 |
| Aset Lancar | 4.536.491.179.707,18 | 4.086.981.599.830,59 | 4.703.174.170.476,42 | 4.845.944.935.312,66 | 2.079.249.759.476,71 | 1.233.402.766.814,97 | -12,22 |
| Kas | 3.054.343.798.585,65 | 2.846.680.593.730,38 | 3.973.124.797.499,29 | 3.933.680.612.390,39 | 1.304.678.718.450,03 | 474.275.855.060,60 | -8,76 |
| Piutang | 216.025.651.452,37 | 283.060.783.057,38 | 124.273.733.844,27 | 288.429.359.335,71 | 198.465.968.369,34 | 199.391.244.619,11 | 18,96 |
| Belanja Dibayar Dimuka | 5.256.175.317,67 | 20.953.960.335,92 | 3.440.814.702,92 | 6.151.108.897,29 | 4.547.580.828,82 | 3.581.215.818,02 | 66,94 |
| Persediaan | 1.260.826.427.453,15 | 936.254.444.823,39 | 602.280.998.808,15 | 617.647.953.016,98 | 571.548.406.004,65 | 556.146.603.309,67 | -16,58 |
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto | 39.126.898,34 | 31.817.883,52 | 53.825.621,79 | 35.901.672,29 | 9.085.823,87 | 7.848.007,57 | -14,38 |
| Aset Tidak Lancar | 19.536.107.147.490,10 | 24.367.519.937.624,30 | 25.590.662.856.846,90 | 27.004.845.409.311,60 | 32.022.102.480.555,10 | 31.776.527.894.983,40 | 13,46 |
| Investasi Jangka Panjang | 1.458.208.640.023,48 | 1.588.251.026.918,74 | 1.592.869.162.510,55 | 1.965.004.767.319,77 | 2.598.499.040.602,32 | 2.684.124.948.748,24 | 16,2 |
| Aset Tetap | 14.287.441.839.867,30 | 17.207.374.062.909,60 | 18.446.505.002.719,90 | 19.299.133.970.277,70 | 24.221.176.113.243,50 | 24.227.737.588.183,1 | 14,44 |
| Dana Cadangan | 1.092.859.104.220,88 | 1.168.173.567.923,20 | 1.244.360.989.281,02 | 1.304.152.498.489,66 | 1.354.580.012.567,35 | 1.403.931.328.766,30 | 5,52 |
| Aset Lainnya | 2.697.597.563.378,41 | 4.403.721.279.872,80 | 4.306.927.702.335,42 | 4.436.554.173.224,45 | 3.847.847.314.141,96 | 3.460.734.029.285,72 | 12,7 |
| KEWAJIBAN | 3.379.737.047.419,80 | 2.745.018.328.614,29 | 3.037.487.998.856,06 | 519.675.649.403,62 | 595.981.306.943,91 | 934.364,190.146,39 | -19,08 |
| Kewajiban Jangka Pendek | 3.355.903.121.371,58 | 2.721.184.402.566,07 | 3.037.487.998.856,06 | 519.675.649.403,62 | 595.981.306.943,91 | 934.364,190.146,39 | -18,87 |
| Kewajiban jangka Panjang | 23.833.926.048,22 | 23.833.926.048,22 | - | - | - | - | - |
| EKUITAS DANA | 20.692.861.279.778,40 | 25.709.483.208.840,60 | 27.256.349.028.467,20 | 31.331.114.695.220,60 | 33.505.370.933.088,00 | 32.308.546.824.458,70 | 13,04 |
| TOTAL KEWAJIBAN DAN AKUITAS DANA | 24.072.598.327.198,20 | 28.454.501.537.454,90 | 30.293.837.027.323,30 | 31.850.790.344.624,20 | 34.101.352.240.031,90 | 33.242.911.014.605,10 | 9,22 |

*Sumber; LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited)*

Salah satu alat penting untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap Neraca yang telah disusun. Hasil dari analisis rasio keuangan ini digunakan untuk tolak ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelengggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendaptan dalam pembentukan pendapatan daerah dan melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Terdapat 2 (dua) analisis rasio keuangan yang digunakan yaitu:

1. Rasio likuiditas, digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek secara tepat pada waktu. Rasio likuiditas terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*).
2. Rasio solvabilitas, digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri atas *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER).

### 3.2.2.1. Aset

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (39) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 1 ayat (2), Barang Milik Daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud barang dalam hal ini mencakup benda dalam berbagai bentuk dan uraian, meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah meliputi barang yang diperoleh melalui hibah/sumbangan atau yang sejenis, hasil pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, perolehan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dapat diukur dengan satuan uang yang terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar.

#### A. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut :

1. Diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka siklus operasi normal badan/unit; atau
2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset lancar terdiri dari: (a) kas, (b) piutang), (c) belanja dibayar dimuka, (d) persediaan, dan (e) bagian lancar tagihan penjualan angsuran netto. Berdasarkan Tabel 3.48 total aset lancar Pemerintah Aceh selama periode Tahun 2018 hingga 2023 mencapai Rp. 21.485.244.411.618, dengan kontribusi terbesar berasal dari kas sebesar Rp. 15.586.784.375.716 atau 72,55 persen diikuti oleh persediaan sebesar Rp. 4.544.704.833.416 atau 21,15 persen (Tabel 2.208).

Tabel 2.208.
Kontribusi Aset Lancar Tahun 2023

| Uraian | Dalam (Rp.) | Persentase (%) |
|---|---|---|
| Kas | | 72,55 |
| Piutang | | 6,10 |
| Belanja Dibayar Dimuka | | 0,20 |
| Persediaan | | 21,15 |
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto | | 0,00 |
| Total Aset Lancar | | 100,00 |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2022 (Audited)*

B. Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar mencakup asset yang bersifat jangka Panjang dan aset tidak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk mendukung kegiatan pemerintahan. Selama periode Tahun 2018 hingga 2023, total aset tidak lancar Pemerintah Aceh tercatat sebesar Rp. 160.530.746.079.618, sebagian besar asset tidak lancer ini berasal dari asset tetap yang mencapai Rp. 117.689.368.577.201 atau sekitar 73,31 persen dari total asset tidak lancar. Aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan aset tetap Pemerintah Aceh sebahagian besar bersumber dari dana APBA, selain itu juga berasal dari Pendapatan BLUD, hibah/donasi, pengalihan aset tetap kepada Pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat, serta penyesuaian nilai asset tetap yang telah dilakukan. Untuk rincian lebih lengkap mengenai kontribusi masing-masing komponen aset tidak lancar Pemerintah Aceh selama periode Tahun 2018 hinghga 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.209.

Tabel 2.209.
Kontribusi Aset Tidak Lancar Tahun 2018 s.d 2022

| Uraian | Dalam (Rp.) | Persentase (%) |
|---|---|---|
| Investasi Jangka Panjang | 11.886.957.586.123 | 7,40 |
| Aset Tetap | 117.689.368.577.201 | 73,31 |
| Dana Cadangan | 7.568.057.501.248 | 4,71 |
| Aset Lainnya | 23.153.382.062.239 | 14,42 |
| Properti Investasi Netto | 232.980.352.807 | 0,15 |
| Total Aset Tidak Lancar | 160.530.746.079.618 | 100,00 |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2022 (Audited)*

### 3.2.2.2. Kewajiban

Kewajiban merupakan utang atau beban yang timbul sebagai konsekuensi atas pelaksanaan tugas atau tanggungjawab masa lalu. Kewajiban ini dapat muncul dari penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari Lembaga keuangan, entitias pemerintah lain atau Lembaga internasional. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua katagori, yaitu:

1. Kewajiban jangka pendek, yaitu kewajiban yang penyelesaiannya diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan, seperti utang transfer pemerintah, bunga pinjaman, bagian lancar utang jangka Panjang dan utang jangka pendek lainnya;
2. Kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Total kewajiban Pemerintah Aceh Tahun 2018 s.d 2023 tercatat sebesar Rp. 11.212.264.521.384, dimana Sebagian besar bersumber dari kewajiban jangka pendek yakni sebesar Rp. 11.164.596.669.288 atau sekitar 99,57 persen dari total kewajiban. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.210.

Tabel 2.210.
Kontribusi Kewajiban Tahun 2018 s.d 2022

| Uraian | Dalam (Rp.) | Persentase (%) |
|---|---|---|
| Kewajiban Jangka Pendek | 11.164.596.669.288 | 99,57 |
| Kewajiban jangka Panjang | 47.667.852.096 | 0,46 |
| Total | 11.212.264.521.384 | 100,00 |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2022 (Audited)*

### A. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek Pemerintah Aceh selama periode Tahun 2018 s.d 2023 tercatat sebesar Rp. 12.583.289.197.277, Dari jumlah tersebut, sekitar Rp. 8.970.694.195.127 atau 71,29 persen berasal dari pendapatan diterima dimuka. Pendapatan diterima dimuka terdiri dari pendapatan diterima dimuka dari SKPA serta pendapatan diterima dimuka dari BLUD. Lebih jelas mengenai kewajiban jangka pendek Tahun 2018 s.d 2023 disajikan pada Tabel 2.211.

Tabel 2.211.
Kontribusi Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2018 s.d 2022

| Uraian | Dalam (Rp.) | Persentase (Rp.) |
|---|---|---|
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 1.507.575.673 | 0,01 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 8.970.694.195.127 | 71,29 |
| Utang Belanja | 2.280.794.203.131 | 18,13 |
| Utang Transfer bagi Hasil Pajak | 492.207.298.199 | 3,91 |
| Utang Transfer Dana OTSUS | 222.510.153.940 | 1,77 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 570.080.070.359 | 4,53 |

| Uraian | Dalam (Rp.) | Persentase (Rp.) |
|---|---|---|
| Utang Dana Sertifikasi | 28.658.630.848 | 0,23 |
| Utang Dana BOS | 16.837.070.000 | 0,13 |
| Total | 12.583.289.197.277 | 100 |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2022 (Audited)*

B. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang Pemerintah Aceh Tahun 2018 s.d 2022 tercatat sebesar Rp.47.667.852.096 (lihat Tabel 3.52). Kewajiban jangka panjang ini berasal dari utang dalam negeri Pemerintah Pusat yang bersumber dari rekening dana investasi, yaitu hak tagih pemerintah/posisi piutang pinjaman per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp. 23.833.926.048. Kewajiban ini timbul dalam rangka pembiayaan tambahan penyertaan modal Pemerintah Aceh pada PT. Bank BPD Aceh pada tahun 1999, berdasarkan perjanjian pinjaman Nomor RDI-352/DP3/1999 tanggal 7 Mei 1999. Pinjaman tersebut berasal dari rekening dana investasi sebesar Rp. 16.915.000.000. Selanjutnya, terhadap perjanjian pinjaman tersebut telah dilakukan amandemen melalui naskah amandemen nomor AMA-171/RDI-352/DSMI/2013 tanggal 30 Agustus 2013.

Tabel 2.212.
Kontribusi Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2018 s.d 2022

| Uraian | Dalam (Rp.) | Persentase (Rp.) |
|---|---|---|
| Utang Dalam Negeri- Setor Perbankan | 47.667.852.096 | 100,00 |
| Total | 47.667.852.096 | 100,00 |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2022 (Audited)*

3.2.2.3. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban yang dimiliki Pemerintah Daerah. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Aceh yang berasal dari akumulasi surplus atau deficit anggaran, koreksi-koreksi terhadap laporan keuangan, serta investasi pemerintah daerah dalam bentuk aset. Selama periode Tahun 2018 s.d 2023 jumlah ekuitas Pemerintah Aceh tercatat sebesar Rp. 170.803.725.969.854. Peningkatan nilai ekuitas ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Aceh dalam mengelola sumber daya keuangan efektif, mempertahankan nilai kekayaan daerah, serta menjaga stabilitas keuangan daerah dalam jangka panjang.

3.2.1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Dalam pengelolaan keuangan daerah, terdapat 2 (dua) aspek penting yang harus berjalan beriringan, yaitu kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan (*revenue policy*) dan kebijakan di bidang belanja (*expenditure policy*). Kedua aspek ini memiliki peran yang sama penting dan harus saling bersinergi. Secara ideal, *expenditure policy* disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung peningkatkan pendapatan

daerah. Sementara *revenue policy* diharapkan mampu menunjang kebijakan anggaran, khususnya pada sisi pengeluaran. Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Aceh tercermin dalam strategi pengelolaan pendapatan, belanja serta pembiayaan APBA.

Arah dan Strategi terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Aceh dalam 5 (lima) tahun terakhir antara lain dilakukan melalui :

a. Peningkatan pendataan objek dan subjek pajak yang lebih intensif dan akurat.
b. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, melalui peningkatan prasarana dan sarana kerja dan pembentukan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) baru secara bertahap di setiap Kabupaten/Kota.
c. Peningkatan ketrampilan petugas pemungut pajak.
d. Sosialisasi dan peningkatan operasional pemeriksaan lapangan terhadap wajib pajak.
e. Menggali sumber-sumber pendapatan baru (termasuk zakat/infaq/shadaqah), sesuai dengan peluang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Adapun kebijakan umum dan strategi peningkatkan penerimaan dari sector Minyak dan Gas Bumi (Migas) meliputi:

a. Optimalisasi tugas Tim advokasi Migas untuk secara proaktif melakukan verifikasi perhitungan bagi hasil pajak dan bukan pajak serta memastikan ketepatan penyalurannya, termasuk pembentukan Badan Pengelolaan Minyak dan Gas Aceh (BPMA).
b. Percepatan proses pencairan anggaran dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota, dengan membentuk sistem pencairan keuangan yang lebih efisien dan efektif melalui kesepakatan dan rencana aksi bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
c. Penataan prosedur dan mekanisme pembagian dana otonomi khusus antara Pemerintah Aceh dengan Kabupaten/Kota secara adil dan merata, mengacu pada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Di sisi belanja, kebijakan diarahakan untuk mendukung penyelenggaraan urusan wajib dareah, khususnya dalam melindungi dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mendukung pengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Arah kebijakan pada pengelolaan keuangan daerah untuk Tahun 2023-2026, difokuskan pada:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan

dalam RPJM Aceh Tahun 2018- 2022 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Prioritas belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Aceh yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji dan insentif Aparatur Sipil Negara (ASN), belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
4. Pemberian stimulus belanja dalam rangka perbaikan dan pemerataan pembangunan;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Aceh dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi;
6. Memperkuat efisiensi belanja seperti kegiatan rehabilitasi gedung dan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kumendesakkan melalui kebijakan standarisasi rehabilitasi; dan
7. Efisiensi belanja pegawai untuk mengantisipasi berakhirnya dana Otsus 2028.

#### 2.2.4.1. Proporsi Pengunaan Anggaran

Rasio belanja pegawai digunakan untuk mengukur porsi belanja pegawai terhadap total pengeluaran daerah (belanja + pembiayaan pengeluaran). Kualitas belanja daerah dinilai semakin membaik apabila porsi belanja pegawai dalam APBD menunjukkan tren penurunan. Semakin kecil porsi belanja aparatur, semakin besar pula ruang fiscal untuk belanja yang lebih produktif seperti belanja modal yang secara langsung mendorong pelayanan public dan pertumbuhan ekonomi daerah. Diketahui, rata rata persentase belanja aparatur terhadap total pengeluaran Pemerintah Aceh selama periode Tahun 2018 hingga 2024 adalah sebesar 18,37 persen yaitu senilai Rp. 15.300.133.349.167 dari total pengeluaran sebesar Rp. 83.295.545.247.155. capaian ini menunjukkan bahwa komposisi belanja Aceh selama periode tersebut tergolong sehat dan ideal, karena proporsi belanja aparatur tetap dibawah 50 persen, dengan dapat disimpulkan bahwa proporsi belanja publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lebih dominan daripada belanja aparatur. Lebih jelas mengenai proporsi belanja pemenuhan aparatur Tahun 2018 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.213.

Tabel 2.213.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur Tahun 2018 s.d 2024

| Uraian | Total Belanja Untuk Pemenuhan Aparatur | Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2.274.436.642.148 | 12.380.897.092.619 | 18,37 |
| 2019 | 2.461.315.744.896 | 15.863.197.849.193 | 15,52 |
| 2020 | 2.483.284.443.746 | 13.318.400.223.253 | 18,65 |

| Uraian | Total Belanja Untuk Pemenuhan Aparatur | Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2.631.227.115.328 | 13.984.810.836.638 | 18,81 |
| 2022 | 2.672.636.562.974 | 16.343.506.236.119 | 16,35 |
| 2023 | 2.777.232.840.075 | 11.404.733.009.333 | 24,35 |
| 2024 | 3.371.730.786.947 | 11.339.780.862.479 | -0,57 |

*Sumber: LRA Tahun 2018 s.d 2023 (Audited), 2024 (Unaudited)*

#### 2.2.4.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus atau defisit anggaran daerah, yang selanjutnya menjadi bahan dalam menentukan kebijakan pembiayaan dimasa depan guna mendukung kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berdasarkan analisis yang dilakukan selama periode tahun 2015-2021, diketahui bahwa defisit anggaran terjadi pada tahun 2015, 2019, dan 2021. Defisit tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah belanja dengan jumlah pendapatan Aceh. Adanya defisit anggaran pada ketiga tahun tersebut menunjukkan adanya peningkatan belanja pembangunan di Aceh namun belum diikuti dengan peningkatan sumber pendapatan Aceh, sehingga ke depan diharapkan Pemerintah Aceh dapat mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Aceh (PAA) seperti pajak Aceh, retribusi Aceh, Zakat/Infaq dan sumber-sumber pendapatan sah lainnya, serta mencari alternative sumber pendanaan lainnya.

Dalam hal terjadi defisit APBA, maka pembiayaan ditetapkan untuk menutupi kekurangan tersebut, yang dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Aceh yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Berdasarkan data pada tabel 3.26, diketahui bahwa SiLPA tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp. 3.969.617.354.782,29, sedangkan SiLPA terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp. 286,676,554,172.33. Secara keseluruhan, tren SiLPA selama periode tahun 2015-2021 menunjukkan kecenderungan meningkat.

### 3.2.2. Kerangka Pendanaan

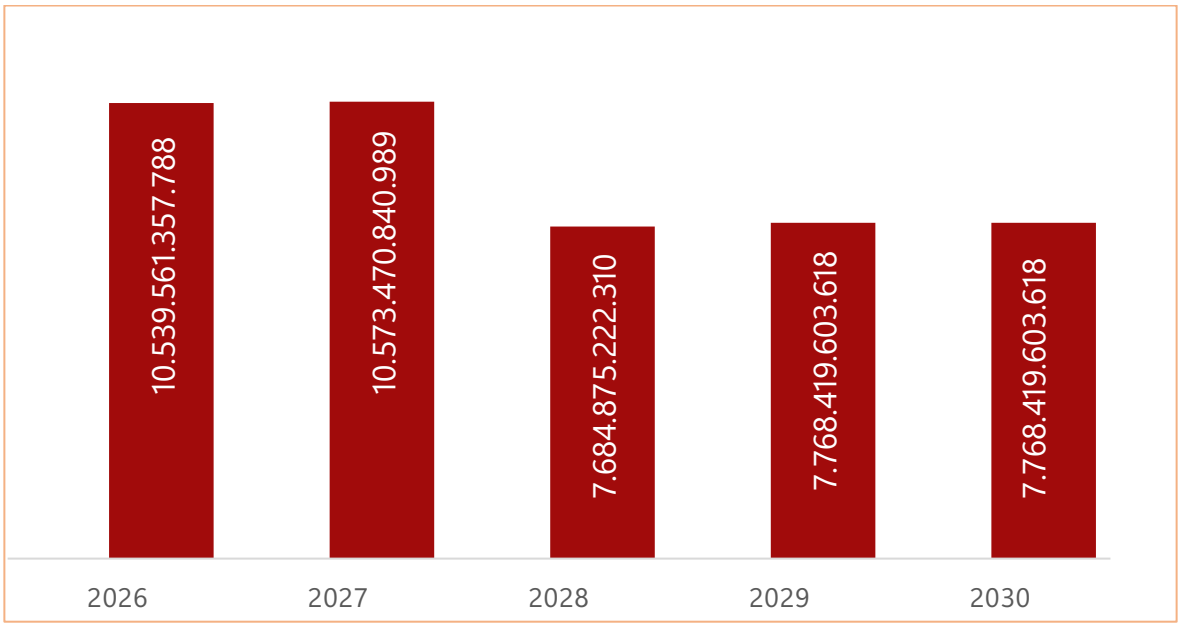
Kerangka pendanaan menggambarkan kondisi umum keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah mencakup tiga komponen utama APBA yaitu : 1) Pendapatan; 2) Belanja; dan 3) Pembiayaan. Untuk menganalisis kerangka pendanaan, perlu dipahami terlebih dahulu jenis-jenis objek pendapatan, belanja, pembiayaan berdasarkan kewenangan dan susunan/struktur APBA serta didukung dengan data perkembangan realisasi anggaran dan neraca daerah. Data ini akan menjadi dasar dalam memproyeksikan kerangka pendanaan APBA untuk 5 (lima) tahun mendatang dalam periode RPJMA 2025-2029. Proyeksi dilakukan menggunakan pendekatan yakni *Smoothing exponential* dan *Least*

*Square Method* yang disesuaikan dengan tren, perkembangan historis, serta asumsi dalam setiap komponen APBA tersebut. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 ditetapkan bahwa kerangka keuangan daerah diproyeksikan hingga tahun 2030.

### 3.2.4.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Aceh

#### A. Pendapatan

Pendapatan Aceh pada periode 2026-2030 diproyeksikan mengalami trend penurunan. Hal ini disebabkan oleh berakhirnya Otsus, yang selama ini menjadi bagian signifikan dari komponen pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Meskipun demikian, Pemerintah Aceh terus melakukan upaya untuk mengantisipasi penurunan tersebut dengan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAA) melalui optimalisasi sector pajak, retribusi, dan sumber-sumber pendapatan sah lainnya, sebagai bagian dari *exit strategy* menghadapi berakhirnya dana otsus pada tahun 2027. Untuk melihat perkembangan pendapatan Aceh dalam kerangka proyeksi 2026-2030 dapat dilihat pada Gambar 2.152.




Gambar 2.152. Proyeksi Pendapatan Aceh 2025-2029

Pada tahun 2026 pendapatan Aceh diproyeksikan mengalami penurunan menjadi 10,8 triliun. Sebuah penurunan dibandingkan dengan pendapatan Aceh pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 11,02 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh Perubahan kebijakan terkait pajak kendaraan bermotor.Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai tahun 2025 kebijakan Opsen PKB, Opsen BBNKB diterapkan, yang sebelumnya merupakan bagi hasil, serta penghapusan jenis Pajak BBNKB kedua. Namun demikian, Pendapatan Aceh diproyeksikan akan mengalami pemulihan secara perlahan mulai tahun 2027, meskipun masih ada penurunan yang signifikan pada tahun 2028 dan 2029, yang diperkirakan mencapai kontraksi sebesar minus 27 persen. Penurunan tajam ini dipengaruhi oleh

hilangnya pendapatan dari dana Otsus yang berahir di tahun 2027. di tahun  dengan asumsi hilangnya pendapatan transfer Dana Otonomi Khusus. Proyeksi pergerakan pendapatan ini disesuaikan dengan tren dan asumsi perkembangan setiap komponen pendapatan Aceh, termasuk pendapatandari pajak, retribusi, serta sumber-sumber pendapatan lainnya. Pemetaan ini memberikan gambaran realistis terkait potensi pendapatan daerah dan akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pendanaan pembangunan di masa depan.

### A.1. Pendapatan Asli Aceh (PAA)

Pendapatan Asli Aceh (PAA) pada periode 2026-2030 diproyeksikan akan mengalami peningkatan yang signifikan, didorong oleh beberapa komponen pembentuknya, seperti pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan sah. Dalam memproyeksikan pendapatan dari sektor pajak, digunakan metode least square method. Pendekatan ini dipakai karena melihat tren perkembangan yang stabil selama 5 (lima) tahun terakhir (2019-2023), yang menunjukkan adanya kenaikan yang cukup konsisten. Berdasarkan proyeksi ini, penerimaan pajak Aceh diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2030. Akselerasi inovasi dalam digitalisasi keuangan di Aceh diharapkan memberikan kontribusi besar dalam memperluas akses pembayaran pajak dan retribusi. Pemerintah Aceh telah membentuk TP2DD (Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah) sebagai katalis di daerah untuk mendorong perluasan elektronifikasi sarana/fasilitas umum termasuk pendapatan daerah baik pajak dan retribusi.

Penerimaan dari sektor pajak juga diperkirakan meningkat, seiring dengan upaya kebijakan pemberlakuan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang berlakukan oleh Pemerintah Aceh selama beberapa tahun terakhir. Pada saat ini pemberlakukan pemutihan pajak kendaraan tersebut telah diberlakukan dari Maret hingga 31 Desember 2024 berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pembebasan Pajak Progresif dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. proyeksi penerimaan pajak kendaraan menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,11 persen (Tabel 2.214).

Selain pajak kendaraan, pajak rokok juga diproyeksikan meningkat hingga beberapa tahun mendatang. Kebijakan atas naiknya tarif cukai tembakau sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.010/2022, menyatakan bahwa kenaikan tarif cukai berada pada kisaran 10 persen. Kenaikan tarif ini diprediksi akan menyebabkan terjadinya lonjakan pendapatan dari sektor pajak rokok yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,65 persen (Tabel 2.214). Namun asumsi realisasi penerimaan pajak rokok dimaksud sangat bergantung pada penganggaran belanja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terafiliasi BPJS Kesehatan bila tidak menganggarkan total 37,5% dari pajak rokok untuk premi JKN maka dikenakan potongan pendapatan atas hak Pemerintah Aceh dari pajak rokok sebesar kekurangan penganggaran JKN dimaksud, seperti yang telah terjadi pada tahun 2024 ini. Mulai tahun 2025, jenis pajak baru akan diterapkan, yaitu Pajak Alat Berat dan

Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh.

Untuk jenis opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan memiliki kecenderungan terjadi penurunan disebabkan mekanisme pemungutannya self asessment, metode dan formula pemungutan antara pemerintah aceh dengan kabupaten kota masiih dalam adaptasi sehingga diperkirakan akan meningkat pada tahun 2029 nanti, sedangkan pajak alat berat mekanisme pemungutan pajak alat berat yang mempunyai pola yang berbeda dibandingkan pada tahun 2019 lalu yang memungut pajak kendaraan bermotor beserta bea balik nama kendaraan bermotornya sehingga perlu pengembangan pola pemungutan dan diproyeksikan terus meningkat hingga 2030 nanti.

PAA dari sektor retribusi belum menunjukkan perkembangan yang cukup stabil dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Terjadi ketimpangan penerimaan retribusi antar waktu dari tahun ke tahun. Dalam memproyeksikan retribusi yang demikian sehingga dilakukan peramalan dengan menggunakan smoothing exponential yang mengikuti trend yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Melalui penetapan Qanun Aceh No. 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh diharapkan retribusi Aceh dapat dikelola menjadi lebih baik. Dalam qanun ini juga telah diatur mekanisme pengaturan tarif retribusi khususnya pada layanan BLUD seperti BLUD SMK pada Dinas Pendidikan Aceh, BLUD Balai ternak Non Ruminansia (BTNR) di bawah Dinas Peternakan Aceh, RSUZA, RSIA, RSJ, Mekanisasi Pertanian, serta Masjid Raya Baiturrahman pada objek retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan objek perizinan usaha lainnya. Secara umum retribusi Aceh ditargetkan meningkat hingga tahun 2030, dengan jumlah retribusi sebesar 14,4 miliar (Tabel 2.215).

Pendapatan Aceh pada kelompok hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan juga diproyeksikan mengalami kenaikan, dengan rata-rata pertumbuhan 13 persen. Proyeksi ini juga mencerminkan besarnya *sharing return profit* dari Badan Usaha Milik Aceh (BUMA), seperti Bank Aceh Syariah, BPR Mustaqim, dan Perusahaan-perusahaan Pemerintah Aceh lainnya. Besar kecilnya nilai pendapatan sektor ini juga dipengaruhi oleh kapasitas penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Aceh, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh (Tabel 2.216).

Lain-lain PAA yang sah juga diproyeksikan mengalami peningkatan hingga tahun 2029, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6 persen. Salah satu komponen yang diproyeksikan meningkat yakni pendapatan Ziswaf. Besarnya proyeksi pendapatan ziswaf ini merupakan target yang akan dicapai oleh Baitul Mal Aceh (BMA). Selain zakat, optimalisasi pemanfaatan wakaf sektor produktif juga akan dikembangkan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh. Selanjutnya, selain pemanfaatan dari sektor ziswaf, upaya optimalisasi pendapatan Aceh juga diupayakan melalui penjualan aset, pemanfaatan aset idle, pendapatan dari jasa giro, bunga deposito, serta pengelolaan BLUD di Aceh diantaranya RSUZA, RSIA, RSJ, khususnya terkait pendapatan dari hasil kerjasama. Beberapa dari BLUD tersebut memberikan pendapatan yang besar bila dikelola dengan baik dan berkesinambungan di masa mendatang.

Tabel 2.214.
Proyeksi Pajak Aceh Tahun 2026-2030

| Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 438.355.922.508 | 461.518.369.147 | 486.496.447.554 | 513.385.083.495 | 513.385.083.495 | 5,11 |
| Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 342.559.825.068 | 345.013.676.743 | 347.428.772.480 | 349.860.773.887 | 349.860.773.887 | 0,7 |
| Pajak Bahan Baka3r Kendaraan Bermotor (PBB-KB) | 516.950.000.000 | 545.382.250.000 | 575.378.273.750 | 607.024.078.806 | 607.024.078.806 | 5,5 |
| Pajak Air Permukaan (PAP) | 2.908.025.410 | 2.922.565.537 | 2.937.178.364 | 2.951.864.256 | 2.951.864.256 | 0,5 |
| Pajak Rokok | 464.458.521.672 | 482.433.066.461 | 501.103.226.133 | 520.495.920.984 | 520.495.920.984 | 3,87 |
| Pajak Alat Berat | 570.284.220 | 587.392.747 | 605.014.529 | 623.164.965 | 623.164.965 | 3 |
| Opsen MBLB | 9.993.230.760 | 9.943.264.606 | 9.893.548.283 | 9.943.016.025 | 9.943.016.025 | 0,5 |
| Jumlah | 1.775.795.809.637 | 1.847.800.585.240 | 1.923.842.461.093 | 2.004.283.902.418 | 2.004.283.902.418 | 2,74 |

Tabel 2.215.
Proyeksi Retribusi Aceh Tahun 2026-2030

| Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Retribusi Jasa Umum | 687.583.637.094 | 698.928.767.106 | 710.461.091.763 | 722.183.699.777 | 722.183.699.777 | 1,65 |
| Retribusi Jasa Usaha | 24.024.340.928 | 24.194.913.748 | 24.366.697.636 | 24.539.701.189 | 24.539.701.189 | 0,71 |
| Retribusi Perizinan Tertentu | 200.340.000 | 200.680.578 | 201.021.735 | 201.363.472 | 201.363.472 | 0,17 |
| Retribusi Aceh | 711.808.318.022 | 723.324.361.432 | 735.028.811.134 | 746.924.764.438 | 746.924.764.438 | 2,53 |

Tabel 2.216.
Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan Tahun 2026-2030

| Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan (Bank Aceh Syariah, BPR Mustaqim, PT. PEMA) | 238.612.933.900 | 247.722.190.241 | 356.831.446.582 | 356.831.446.582 | 356.831.446.582 | 13 |

Tabel 2.217.
Proyeksi Lain-Lain PAA yang Sah Tahun 2026-2030

| Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Lain-Lain Pendapatan Sah | 1.049.251.820.973 | 1.074.701.152.923 | 1.295.695.933.040 | 1.295.695.933.040 | 1.295.695.933.040 | 6 |

Tabel 2.218.
Bagian dari Komponen Lain-Lain PAA yang Sah Tahun 2026-2030

| Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Pendapatan BLUD | 889.477.121.528 | 945.935.138.961 | 1.002.393.156.394 | 1.058.851.173.827 | 1.115.309.191.259 | 6 |
| Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf | 102.887.798.773 | 105.799.839.938 | 108.711.881.104 | 111.623.922.270 | 114.535.963.435 | 3 |

Secara umum pendapatan dari lain-lain PAA yang sah terdiri atas beberapa komponen utama yang berkontribusi besar terhadap pendapatan asli Aceh. Kedua komponen tersebut adalah pendapatan BLUD dan Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf. Peran BLUD memberi solusi konkret terhadap keterbatasan fiskal daerah karena tidak sepenuhnya tergantung pada APBA dan mampu menyumbangkan pendapatan melalui skema yang sah dan transparan. Terdapat beberapa unit BLUD yang saat ini dikelola oleh Pemerintah Aceh, diantaranya: a) Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin; b) UPTD balai Penanganan Sampah Regional; c) UPTD Balai Ternak Non-Ruminansia (BTNR) Blang Bintang; dll. Optimalisasi pengelolaan semua unit BLUD ini dapat menjadi salah satu exit strategy peningkatan pendapatan sebagai salah satu langkah strategis berhentinya dana otsus di tahun 2027.

Selain pemanfaatan BLUD, pendapatan Ziswaf juga menjadi salah satu tulang punggung bagi peningkatan PAA saat ini dan masa mendatang. Pengelolaan dan pemanfaatan dana ziswaf tersebut juga telah diperkuat melalui Undang-Undang No.10 tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh. Penghimpunan dan pendistribusian dana Ziswaf tersebut juga menjadi langkah konkret bagi Pemerintah Aceh untuk menggerakkan sektor riil dan sebagai antisipatif bila berakhirnya dana Otsus. Meskipun secara pemanfaatan dana zakat memiliki skema khusus yang diperuntukkan berdasarkan senifnya, namun pendistribusiannya cukup memberikan dampak bagi penurunan jumlah penduduk miskin di Aceh. Untuk meningkatkan pengumpulan dana ziswaf, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh diantaranya: 1) Pemanfaatan teknologi digital; 2) Edukasi dan sosialisasi; 3) Kemitraan strategis; dan 4) Penguatan regulasi dan kebijakan.

Bila dilihat dari optimalisasi kedua komponen pendapatan yakni BLUD dan dana Ziswaf tersebut, menjadi sebuah keniscayaan bahwa pengelolaan dan pemanfataannya secara berkelanjutan dan intensif akan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas fiskal Aceh pada masa periode RPJM 2025-2029. Adapun proyeksi kedua komponen lain-lain PAA yang sah dapat dilihat pada Tabel 2.218.

### A.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat mengalami fluktuasi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Besaran pendapatan transfer yang diterima Pemerintah Aceh disesuaikan dengan alokasi fiskal negara, yang mencerminkan proporsi dan kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan transfer, terdiri dari 4 (empat) komponen utama, yaitu : 1) dana perimbangan; 2) dana otonomi khusus dan tambahan infrastruktur; 3) Insentif fiskal; dan 4) dana insentif daerah (DID). Dalam memproyeksikan dana perimbangan, digunakan metode *smoothing exponential,* mengingat fluktuasi yang terjadi pada pendapatan yang diterima Aceh, Metode ini diharapkan dapat menggambarkan dengan lebih akurat tren perubahan pendapatan perimbangan di masa depan, berdasarkan kondisi yang terjadi selama ini.

Secara keseluruhan, dana perimbangan Aceh diproyeksikan mengalami kontraksi sebesar minus 0,27 persen. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik, sebagai komponen

pendapatan terbesar,diperkirakan mangalami penurunan dengan rata-rata minus 1,19 persen hingga tahun 2029. Penurunan terhadap DAK-NF tersebut didasari oleh penurunan alokasi dana tersebut dalam beberapa tahun terakhir. DAK fisik dan Dana Alokasi Umum (DAU) juga diproyeksikan mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar minus 0,68 persen dan minus 0,11 persen. Penurunan terhadap DAU dan sejumlah transfer lainnya ini diperkirakan akibat pengalokasian dana APBN yang akan berkurang ke daerah, karena lebih difokuskan untuk proyek-proyek strategis lainnya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat pada periode pemerintahan berikutnya. Namun demikian, dalam memproyeksikan DAU tahun 2025-2029, telah diperhitungkan kenaikan sebesar 8 (delapan) persen kenaikan gaji pokok ASN, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan hasil proyeksi, Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai komponen perimbangan diperkirakan mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,29 persen. Meskipun proyeksi ini menunjukkan pertumbuhan positif, namun besaran peningkatannya secara nominal tidak diperkirakan akan signifikan. Secara umum, perkembangan proyeksi dana perimbangan untuk periode tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 2.219.

Dana Otonomi khusus sebagai bagian dari pendapatan transfer, diperkirakan akan mengalami penurunan yang cukup tajam. Pada tahun 2025 diprediksi bahwa dana otsus yang akan diterima Aceh akan berkurang di bandingkan dengan tahun 2024. Berdasarkan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2024, alokasi dana Otsus untuk Aceh tahun 2024 ditetapkan sebesar 3,3 triliun. Berdasarkan pendapatan otsus yang diterima tahun 2024 tersebut alokasi dana otsus tahun 2025 hingga 2027 juga diproyeksi mendapatkan tetap sebesar 3,3 triliun. Namun, mulai tahun 2028 dan seterusnya, Pemerintah Aceh tidak akan menerima alokasi dana Otsus lagi, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menyebutkan bahwa alokasi dana otsus diberikan selama 20 tahun. Proyeksi Penerimaan Dana Otonomi Khusus Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.220.

Tabel 2.219.
Proyeksi Dana Perimbangan Tahun 2026-2030

| Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Dana Perimbangan | 3.739.743.636.328 | 3.745.693.097.642 | 3.768.639.287.546 | 3.800.586.277.955 | 3.800.586.277.955 | 0,52 |
| Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 292.274.666.820 | 295.197.413.488 | 298.149.387.623 | 299.640.134.561 | 299.640.134.561 | 1,13 |
| Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.231.805.658.730 | 2.242.964.687.024 | 2.254.179.510.459 | 2.276.721.305.563 | 2.276.721.305.563 | 0,75 |
| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 365.847.223.658 | 366.213.070.882 | 366.579.283.953 | 370.245.076.792 | 370.245.076.792 | 0,13 |
| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 849.816.087.120 | 841.317.926.249 | 849.731.105.511 | 853.979.761.039 | 853.979.761.039 | -0,13 |

Tabel 2.220.
Proyeksi Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun 2026-2030

| Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur | 3.300.000.000.000 | 3.300.000.000.000 | - | - | - | 0 |
| Otonomi Khusus | 3.300.000.000.000 | 3.300.000.000.000 | - | - | - | 0 |

### A.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

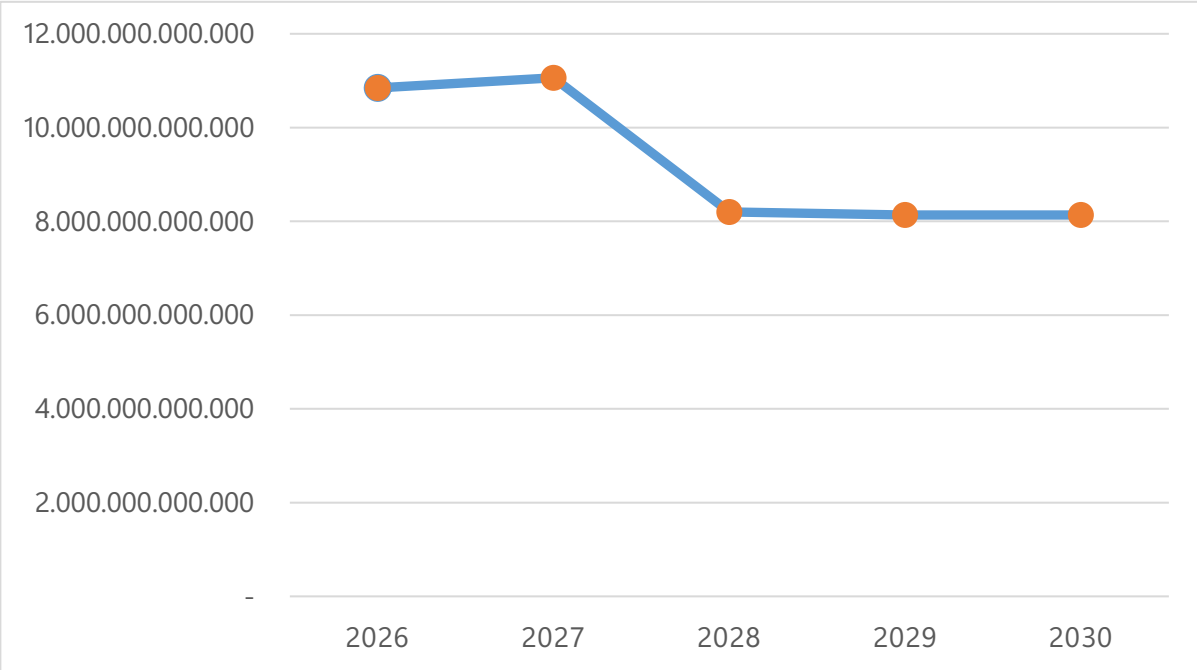
Pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, pendapatan dari dana hibah pemerintah pusat diproyeksikan akan mengalami fluktuasi sebagaimana tren yang terjadi pada 5 (lima) tahun terakhir. Meskipun demikian, pendapatan hibah yang diproyeksikan akan diterima oleh Pemerintah Aceh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,6 persen. Sedangkan untuk lain-lain pendapatan sesuai perundang-undangan, diperkirakan tidak akan diterima dalam periode 2025-2029. Hal ini didasari oleh fakta bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Pemerintah Aceh hanya menerima dana tersebut sebanyak 2 kali, yaitu tahun 2021 sebesar 1,4 miliar dan tahun 2022 sebesar 106 juta. Oleh karena itu, pendapatan dari sumber ini tidak dapat dijasikan sebagai bagian dari pendapatan yang diharapkan akan diperoleh pada tahun-tahun mendatang, seperti yang dapat dilihat pada (Tabel 2.221).

Tabel 2.221.
Proyeksi Dana Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2025-2029

| Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 1.980.000.000 | 1.980.000.000 | 1.980.000.000 | 1.980.000.000 | 1.980.000.000 | 0 |
| Hibah | 1.980.000.000 | 1.980.000.000 | 1.980.000.000 | 1.980.000.000 | 1.980.000.000 | 0 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

B. Belanja

Belanja Aceh dalam kurun waktu 2025-2029 diproyeksikan akan mengalami penurunan. Penurunan yang signifikan diperkirakan terjadi pada tahun 2027, seiring dengan berakhirnya alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus), Hal ini berpotensi mengurangi kapasitas fiskal Aceh, yang pada gilirannya juga akan mempengaruhi besaran alokasi belanja yang juga harus dikurangi terutama pada tahun 2028 dan 2029. Secara umum proyeksi belanja Aceh pada tahun 2025 dan 2026 berada di atas 10,5 triliun. Sedangkan pada tahun 2027, belanja Aceh diperkirakan akan melebihi 11 triliun. Proyeksi ini disesuaikan dengan perkembangan tren belanja sebelumnya, yang juga menunjukkan fluktuasi. Proyeksi belanja Aceh tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Gambar 2.153.




Gambar 2.153. Proyeksi Belanja Aceh Tahun 2025-2029

Belanja operasi Aceh diproyeksikan mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,26 persen. Penurunan ini terjadi pada semua komponen Pembentuk belanja operasi. Belanja barang dan jasa mencatatkan penurunan terbesar, dengan proyeksi rata-rata pertumbuhan sebesar minus 8,18 persen. Sementara itu, belanja hibah dan belanja bantuan sosial juga diproyeksikan mengalami penurunan, masing-masing dengan rata-rata pertumbuhan minus 7,06 persen dan minus 6,61 persen. Adapun belanja pegawai diperkirakan akan mengalami penurunan rata-rata sebesar minus 0,65 persen, meskipun proyeksi ini telah mempertimbangkan kenaikan gaji pegawai sebesar 8 persen yang berlaku dari tahun 2024 hingga 2029.

Pada kelompok belanja transfer, diproyeksikan akan terjadi penurunan alokasi yang cukup signifikan pada tahun 2028 dan 2029. Penurunan ini disebabkan oleh berakhirnya dana Otsus, yang juga akan mempengaruhi belanja bantuan keuangan, termasuk alokasi dana Otonomi Khusus (DOKA) untuk Kabupaten/Kota. Selain itu,

belanja transfer untuk kelompok bagi hasil diperkirakan akan terus menurun dengan rata-rata peprtumnbuhan minus 2,82 persen.

Pada kelompok Belanja Tidak Terduga (BTT) diproyeksikan akan dialokasikan sebesar 50 miliar setiap tahunnya hingga tahun 2029. Alokasi BTT ini digunakan untuk pengeluaran yang sifatnya darurat atau mendesak, yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Termasuk dalam anggaran ini adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah dari tahun –tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.

Selain kelompok belanja di atas, juga terdapat kelompok belanja modal yang peruntukan bersifat tidak mengikat. Alokasi belanja modal ini diprediksi akan mengalami fluktuasi secara nominal. Secara umum fluktuasi pada belanja modal tersebut dilakukan untuk memperbesar ruang fiskal Aceh yang terus menyempit seiring dengan asumsi pendapatan Aceh yang mengalami perlambatan. Untuk melihat besarnya proyeksi belanja Aceh secara umum dapat dilihat pada Tabel 2.222.

Tabel 2.222.
Proyeksi Belanja Tahun 2025-2029

| Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| TOTAL BELANJA ACEH | | | | | | |
| BELANJA OPERASI | 7.907.481.233.667 | 8.141.306.750.848 | 6.291.758.135.222 | 6.255.221.043.640 | 6.255.221.043.640 | (5,26) |
| Belanja Pegawai | 3.002.763.153.498 | 2.937.393.160.566 | 2.946.517.614.479 | 2.983.082.076.613 | 2.983.082.076.613 | (0,65) |
| Belanja Barang dan Jasa | 3.772.558.439.348 | 4.063.147.168.769 | 2.522.300.689.221 | 2.451.490.376.861 | 2.451.490.376.861 | (8,18) |
| Belanja Subsidi | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 | - |
| Belanja Hibah | 950.000.000.000 | 960.867.512.820 | 700.850.000.000 | 700.000.000.000 | 700.000.000.000 | (7,06) |
| Belanja Bantuan Sosial | 174.159.640.821 | 171.898.908.692 | 114.089.831.523 | 112.648.590.167 | 112.648.590.167 | (6,61) |
| BELANJA MODAL | 1.220.969.113.181 | 1.222.739.932.474 | 1.157.159.434.165 | 1.129.469.337.529 | 1.129.469.337.529 | 1,61 |
| BELANJA TIDAK TERDUGA | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | 0,00 |
| BELANJA TRANSFER | 1.667.283.156.371 | 1.646.800.258.207 | 700.000.000.000 | 700.000.000.000 | 700.000.000.000 | (14,27) |
| Belanja Bagi Hasil | 817.283.156.371 | 796.800.258.207 | 700.000.000.000 | 700.000.000.000 | 700.000.000.000 | (2,82) |
| Belanja Bantuan Keuangan | 850.000.000.000 | 850.000.000.000 | | | | |

C. Pembiayaan

Pembiayaan Aceh diproyeksikan mengalami penurunan antara tahun 2025 hingga tahun 2029. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Aceh. Penerimaan silpa diperkirakan akan menurun seiring dengan target realisasi belanja yang lebih maksimal, yang diharapkan dapat mencapai lebih dari 95 persen setiap tahunnya, sebagai dampaknya, SiLPA yang terjadi setiap tahunnya diperkirakan berkisar antara 4,9 sampai 5 persen. Meskipun demikian, proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan bahwa silpa yang tersisa di prediksi mencapai 5,44 persen atau sebesar 622 miliar.

Dalam upaya memperkecil terjadinya SiLPA tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) dalam proses tender pekerjaan Pemerintah Aceh di tahun 2024 pasca penetapan APBA 2024, optimalisasi ini juga dapat dilakukan lebih awal setelah penetapan APBA di masa mendatang.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan, alokasi untuk Pembentukan Dana Cadangan diproyeksikan akan dialokasikan sebesar 51 miliar pada tahun 2025 dan 2026, namun, pada tahun 2028 dan 2029, alokasi dana cadangan ini akan dialokasikan sebesar 40 miliar, mengingat kapasitas fiskal Aceh yang terus mengalami penurunan. Dana cadangan ini diperuntukkan bagi dana Abadi Pendidikan seperti beasiswa dan program pendidikan lainnya yang telah berjalan sejak tahun 2002 dan terus berlanjut hingga saat ini. Untuk memberikan fleksibilitas fiskal yang lebih besar, penggunaan dana yang tersimpan dalam bentuk deposito ini dapat dimanfaatkan, meskipun harus melalui proses revisi qanun.

Selain itu, Pada pengeluaran pembiayaan juga diproyeksikan adanya penyertaan modal Pemerintah Aceh untuk sektor BUMA seperti Bank Aceh Syariah, BPR Mustaqim serta PEMA sebagai upaya mewujudkan ruang fiskal Aceh yang lebih besar dari deviden pembiayaan tersebut sebagaimana Qanun No. 5 thn 2019 Tentang Penyertaan Modal Aceh. Untuk melihat proyeksi pembiayaan Aceh dari tahun 2025 hingga 2029 dapat dilihat pada Tabel 2.223.

Tabel 2.223.
Proyeksi Pembiayaan Tahun 2025-2029

| Uraian | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III. PEMBIAYAAN | 392.302.600.885 | 306.172.145.432 | 487.376.100.540 | 514.042.347.076 | 366.270.777.551 | 3,49 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 623.302.600.885 | 537.172.145.432 | 538.376.100.540 | 554.042.347.076 | 406.270.777.551 | -9,34 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 622.302.600.885 | 536.172.145.432 | 537.376.100.540 | 553.042.347.076 | 405.270.777.551 | -9,36 |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0,00 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 231.000.000.000 | 231.000.000.000 | 51.000.000.000 | 40.000.000.000 | 40.000.000.000 | -24,97 |
| Pembentukan Dana Cadangan | 51.000.000.000 | 51.000.000.000 | 51.000.000.000 | 40.000.000.000 | 40.000.000.000 | -5,39 |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 180.000.000.000 | 180.000.000.000 | | | | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | | | | | | |
| SILPA | 536.172.145.432 | 537.376.100.540 | 553.042.347.076 | 405.270.777.551 | | |

Tabel 2.224.
Proyeksi Kerangka Pendanaan/Struktur APBA Tahun 2026-2030

| URAIAN | Proyeksi (Rp) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| I. PENDAPATAN | 10.539.561.357.788 | 10.573.470.840.989 | 7.684.875.222.310 | 7.768.419.603.618 | 7.768.419.603.618 |
| A. PENDAPATAN ASLI ACEH | 3.372.836.140.191 | 3.504.182.444.811 | 3.931.916.533.936 | 4.028.903.199.035 | 4.028.903.199.035 |
| Pajak Aceh | 2.071.540.518.186 | 2.168.339.677.893 | 2.265.138.837.600 | 2.361.937.997.308 | 2.361.937.997.308 |
| Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 695.322.003.359 | 731.675.174.819 | 768.028.346.279 | 804.381.517.738 | 804.381.517.738 |
| Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 382.301.904.385 | 393.483.731.719 | 404.665.559.053 | 415.847.386.387 | 415.847.386.387 |
| Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) | 544.299.877.093 | 575.772.940.744 | 607.246.004.395 | 638.719.068.047 | 638.719.068.047 |
| Pajak Air Permukaan (PAP) | 3.380.063.144 | 3.615.651.121 | 3.851.239.097 | 4.086.827.074 | 4.086.827.074 |
| Pajak Rokok | 446.236.670.205 | 463.792.179.491 | 481.347.688.776 | 498.903.198.062 | 498.903.198.062 |
| Retribusi Aceh | 13.430.867.132 | 13.419.423.754 | 14.250.316.715 | 14.437.822.106 | 14.437.822.106 |
| Retribusi Jasa Umum | 3.700.582.503 | 3.727.887.659 | 4.107.323.420 | 3.804.215.774 | 3.804.215.774 |
| Retribusi Jasa Usaha | 8.956.536.580 | 8.906.625.294 | 9.346.919.742 | 9.826.370.028 | 9.826.370.028 |
| Retribusi Perizinan Tertentu | 773.748.050 | 784.910.801 | 796.073.552 | 807.236.304 | 807.236.304 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 238.612.933.900 | 247.722.190.241 | 356.831.446.582 | 356.831.446.582 | 356.831.446.582 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan (Bank Aceh Syariah, BPR Mustaqim) | 238.612.933.900 | 247.722.190.241 | 356.831.446.582 | 356.831.446.582 | 356.831.446.582 |
| Lain-Lain Pendapatan Sah | 1.049.251.820.973 | 1.074.701.152.923 | 1.295.695.933.040 | 1.295.695.933.040 | 1.295.695.933.040 |
| B. PENDAPATAN TRANSFER | 7.151.725.217.597 | 7.056.147.637.070 | 3.740.958.688.374 | 3.727.638.040.157 | 3.727.638.040.157 |
| Dana Perimbangan | 3.851.725.217.597 | 3.756.147.637.070 | 3.740.958.688.374 | 3.727.638.040.157 | 3.727.638.040.157 |
| Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 388.182.190.732 | 299.243.218.277 | 318.525.741.343 | 321.648.365.649 | 321.648.365.649 |

| URAIAN | Proyeksi (Rp) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.203.834.209.063 | 2.201.669.956.251 | 2.201.603.888.030 | 2.195.911.454.907 | 2.195.911.454.907 |
| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 314.890.055.536 | 314.039.507.812 | 314.021.967.320 | 313.460.560.823 | 313.460.560.823 |
| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 944.818.762.265 | 941.194.954.730 | 906.807.091.681 | 896.617.658.778 | 896.617.658.778 |
| Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur | 3.300.000.000.000 | 3.300.000.000.000 | - | - | - |
| Otonomi Khusus | 3.300.000.000.000 | 3.300.000.000.000 | - | - | - |
| Insentif Fiskal | | | | | |
| Dana Insentif Daerah (DID) | | | | | |
| C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 15.000.000.000 | 13.140.759.108 | 12.000.000.000 | 11.878.364.426 | 11.878.364.426 |
| Hibah | 15.000.000.000 | 13.140.759.108 | 12.000.000.000 | 11.878.364.426 | 11.878.364.426 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | |
| II. BELANJA | 10.845.733.503.219 | 11.060.846.941.529 | 8.198.917.569.387 | 8.134.690.381.169 | 8.134.690.381.169 |
| A. BELANJA OPERASI | 7.907.481.233.667 | 8.141.306.750.848 | 6.291.758.135.222 | 6.255.221.043.640 | 6.255.221.043.640 |
| Belanja Pegawai | 3.002.763.153.498 | 2.937.393.160.566 | 2.946.517.614.479 | 2.983.082.076.613 | 2.983.082.076.613 |
| Belanja Barang dan Jasa | 3.772.558.439.348 | 4.063.147.168.769 | 2.522.300.689.221 | 2.451.490.376.861 | 2.451.490.376.861 |
| Belanja Subsidi | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 |
| Belanja Hibah | 950.000.000.000 | 960.867.512.820 | 700.850.000.000 | 700.000.000.000 | 700.000.000.000 |
| Belanja Bantuan Sosial | 174.159.640.821 | 171.898.908.692 | 114.089.831.523 | 112.648.590.167 | 112.648.590.167 |
| B. BELANJA MODAL | 1.220.969.113.181 | 1.222.739.932.474 | 1.157.159.434.165 | 1.129.469.337.529 | 1.129.469.337.529 |
| C. BELANJA TIDAK TERDUGA | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 |

| URAIAN | Proyeksi (Rp) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| D. BELANJA TRANSFER | 1.667.283.156.371 | 1.646.800.258.207 | 700.000.000.000 | 700.000.000.000 | 700.000.000.000 |
| Belanja Bagi Hasil | 817.283.156.371 | 796.800.258.207 | 700.000.000.000 | 700.000.000.000 | 700.000.000.000 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 850.000.000.000 | 850.000.000.000 | | | |
| III. PEMBIAYAAN | 306.172.145.432 | 487.376.100.540 | 514.042.347.076 | 366.270.777.551 | 366.270.777.551 |
| A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 537.172.145.432 | 538.376.100.540 | 554.042.347.076 | 406.270.777.551 | 406.270.777.551 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 536.172.145.432 | 537.376.100.540 | 553.042.347.076 | 405.270.777.551 | 405.270.777.551 |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 231.000.000.000 | 51.000.000.000 | 40.000.000.000 | 40.000.000.000 | 40.000.000.000 |
| Pembentukan Dana Cadangan | 51.000.000.000 | 51.000.000.000 | 40.000.000.000 | 40.000.000.000 | 40.000.000.000 |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 180.000.000.000 | | | | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | | | | | |
| SiLPA | 537.376.100.540 | 553.042.347.076 | 405.270.777.551 | | |

## 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Aceh

### 2.3.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Pembangunan yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan ini dibuat. Adapun yang menjadi Permasalahan pembangunan di Aceh adalah :

#### 2.3.1.1. Implementasi Keistimewaan Aceh Belum Optimal terutama pelaksanaan otonomi khusus Aceh, Syariat Islam, Korban Konflik serta perdamaian.

1. Implementasi Dinul Islam Aceh belum optimal, hal ditandai dengan Indeks Pembangunan Syariat Aceh tahun 2024 masih sekitar sebesar 87,01 dengan rincian dimensi, yaitu aqidah 87,01, akhlak 82,50, melek Al-Qur'an 83,25, manajemen masjid 83,47, ZIS 84,03, hukum jinayat 83,51 dan Lembaga Keuangan Syariah 83,58.
2. Belum optimalnya pelaksanaan pemajuan kebudayaan terutama adat istiadat meliputi adat, hukum adat, lembaga adat, dan kapasitas tokoh adat, serta penguatan kembali sistem peradilan adat di gampong dan mukim hal ini ditandai dengan masih rendahnya indeks pembangunan kebudayaan Aceh tahun 2023, yaitu sebesar 55,33 dan nasional 57,13 dan berada diperingkat 22 nasional. Disamping itu, masih adanya potensi konflik antara agama terutama di perbatasan dan pertentangan aliran dalam agama Islam.
3. Belum optimalnya Aspek pendapatan dan Pendistribusian Baitul Mal, hal ini ditandai dengan besarnya silpa dari Ziswaf pada tahun 2024 ini hampir mencapai Rp. 95,54 Milyar (meningkat 7 persen dibandingkan dengan tahun 2023). Jumlah ini jika dibandingkan dengan potensi Ziswaf masih tergolong rendah yang disebabkan oleh masih kecilnya pembayaran zakat oleh muzaki dibandingkan mereka yang sudah mencapai masa nisab. Disamping itu, masih terdapat kendala dalam dengan regulasi dalam penyaluran dan belum optimalnya dalam proses pendistribusian. Selanjutnya, beberapa masalah utama berkenaan dengan pengelolaan aset wakaf seperti tanah wakaf yang tidak produktif, adanya sengketa tanah wakaf, terbatasnya tanah wakaf yang bersertifikat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf dan minimnya koordinasi antar lembaga terkait, dan permasalahan lainnya dalam pengelolaan oleh Baitul Mal di Aceh dan Kabupaten/Kota.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan implementasi Keistimewaan Aceh belum optimal, antara lain, belum optimalnya kesepakatan politik yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Aceh. Ketidaksepakatan politik atau konflik kepentingan antara kedua belah pihak dapat menghambat proses implementasi dan menyebabkan stagnasi, sumber daya manusia yang memadai, keuangan, dan infrastruktur yang tidak memadai. Kurangnya sumber daya dan kapasitas di tingkat pemerintah daerah Aceh dapat menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan program-program yang terkait dengan keistimewaan. Ketidakjelasan dalam regulasi

dan kebijakan terkait dengan keistimewaan Aceh dapat mempersulit implementasi. Kurangnya panduan yang jelas dan konsisten dari pemerintah pusat mengenai otonomi khusus Aceh dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di tingkat lokal. Implementasi Keistimewaan Aceh mungkin menghadapi resistensi atau penolakan dari pihak-pihak eksternal, termasuk kelompok-kelompok kepentingan di luar Aceh. Faktor-faktor ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan tertentu yang diusulkan atau dijalankan oleh pemerintah Aceh. Praktik korupsi dan tata kelola yang buruk di tingkat lokal dapat menghambat implementasi kebijakan dan program-program yang terkait dengan keistimewaan Aceh. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan pemborosan anggaran. Beberapa kebijakan atau program yang terkait dengan keistimewaan Aceh mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat. Ketidaksesuaian ini dapat mengurangi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam implementasi, sehingga menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan.

Untuk meningkatkan implementasi Keistimewaan Aceh, penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Aceh untuk bekerja sama dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, termasuk dengan memperkuat kapasitas institusi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperjelas regulasi dan kebijakan terkait. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses implementasi juga merupakan kunci keberhasilan.

Jika implementasi Keistimewaan Aceh, termasuk pelaksanaan otonomi khusus, penerapan syariat Islam, dan penanganan korban konflik, belum optimal, beberapa akibat yang mungkin timbul antara lain: Ketidakpuasan Masyarakat di kalangan masyarakat Aceh. Jika kebijakan-kebijakan tersebut tidak mampu memenuhi harapan atau kebutuhan masyarakat, hal ini dapat menciptakan ketegangan sosial dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Implementasi yang tidak optimal dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan kebijakan di Aceh. Kurangnya kejelasan dalam regulasi dan kebijakan terkait syariat Islam atau otonomi khusus Aceh dapat menghambat kepastian hukum dan menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis. Mengakibatkan ketimpangan dalam pembangunan antara daerah yang satu dengan yang lain. Daerah yang mendapatkan manfaat lebih besar dari kebijakan-kebijakan tersebut mungkin mengalami pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lebih cepat, sementara daerah lain dapat tertinggal. Kurangnya Pemenuhan Hak Asasi Manusia, kebijakan-kebijakan tersebut tidak memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan, hal ini dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Penegakan syariat Islam yang tidak memenuhi standar hak asasi manusia atau perlakuan yang tidak adil terhadap korban konflik dapat menciptakan kerentanan dan ketidakadilan bagi sebagian masyarakat, Ketidakstabilan Politik dan Sosial Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, ketegangan antar-atau dalam daerah, dan konflik kepentingan politik dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial di wilayah tersebut.

Kerugian Ekonomi dan Pemborosan Sumber Daya, program-program yang tidak efektif atau tidak efisien dapat menyia-nyiakan anggaran publik yang berharga, sementara peluang-peluang pembangunan yang terlewatkan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Aceh untuk memastikan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat serta memperbaiki hambatan-hambatan yang menghambat pencapaian tujuan tersebut.

2.3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Aceh belum maksimal dan fluktuatif:

1) Perkembangan laju perekonomian Aceh mengalami fluktuasi dan masih kurang menggembirakan, hal ini ditandai oleh pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2024 sebesar 4,66 persen sedangkan nasional 5,03 persen.
2) Inflasi Aceh masih belum stabil, hal ini ditandai tahun 2021 angka inflasi Aceh sebesar 2,24 persen, sementara itu di tahun 2022 tercatat sebesar 5,89 persen, di tahun 2023 inflasi yang dapat dikendalikan sebesar 1,53 persen , namun tahun 2024 meningkat kembali menjadi 2,17 persen.
3) Ketimpangan pendapatan dalam masyarakat masih tinggi dan dinamis, hal ini ditandai dengan rasio gini tahun 2020 sebesar 0,319 naik menjadi 0,323 pada tahun 2021, sementara itu pada tahun 2024 turun menjadi 0,294.
4) Belum optimalnya iklim berusaha untuk usaha kecil dan mikro. Hal ini ditandai Masih rendahnya persentase jumlah usaha kecil dan menengah, termasuk jumlah koperasi aktif lintas kabupaten/kota yang hanya mencapai 63 persen dan diharapkan mencapai 67 persen pada tahun 2045,
5) Masih rendahnya rasio kewirausahaan di kalangan masyarakat Aceh yaitu sebesar 1,8 persen yang akan ditingkatkan mencapai 1,93 persen,
6) Masih minimnya pengetahuan dan pemanfaatan ekonomi digital, terutama bagi pengembangan koperasi, ekonomi kreatif, dan UMKM, Masih rendahnya Proporsi Ekonomi Kreatif terhadap PDRB,
7) Belum optimalnya *Return On Asset* (ROA) BUMD yang hanya 2 persen. Walaupun secara Indonesia ini sudah baik, namun angka idealnya adalah 5-20 persen.
8) Pembangunan koperasi masih lemah, hal ini ditandai dengan Masih rendahnya rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB yang hanya berskisar 1 persen atau Rp. 1.564.088 juta rupiah sedangkan nasional sudah mencapai Rp. 182.352.359 juta rupiah.
9) Industri Pengolahan dan pariwisata masih lemah, hal ditandai dengan Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Aceh masih sangat rendah

dan Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi yang hanya 1,5 (%) dimana komoditi-komoditi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan langsung dijual tanpa melalui proses hilirisasi.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2024 baru sekitar 4,71 persen. Rendahnya pertumbuhan investasi di sektor industri, khususnya pengolahan hasil komoditi unggulan dan belum adanya kawasan industri yang representatif dan produktif.

10) Iklim investasi belum baik, hal ini ditandai dengan masih minimnya Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB dan Nilai investasi Aceh masih sangat rendah dengan realisasi investasi pada tahun 2024 sebesar 9,47 triliun. Masih rendahnya nilai investasi tersebut dikarenakan belum optimalnya Kawasan Peruntukan Investasi (KPI) diantaranya : a) Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong; b) Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang; c) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun; dan d) Kawasan Industri Perikanan Lampulo.

11) Daerah rawan pangan masih tinggi. Hal ini ditandai dengan masih tingginya persentase daerah rawan pangan di Aceh tahun 2024 yang mencapai 11,42 persen.

12) Belum memadai fasilitas infrastruktur ketersediaan dan distribusi pangan. Menurut data terakhir, skor PPH ketersediaan dan konsumsi Aceh tahun 2019 sebesar 66 dan belum mencapai angka 100.

13) Produktivitas Pertanian semakin menurun, hal ini ditandai dengan produktivitas padi atau bahan pangan utama bahan lokal yang masih berkisar 5,6 ton per hektar di tahun 2021 turun menjadi 5,5 ton/ha pada tahun 2022. Produksi padi juga mengalami penurunan di tahun 2013 sebanyak 1.937.889,5 ton menjadi 1.533.138,1 ton di tahun 2022. Dengan kata lain terjadi penurunan sebesar 20,88 persen dalam kurun waktu 10 tahun;

    Luas panen juga mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu pada tahun 2013 luas panen padi Aceh sebesar 411.441,51 ha menjadi 276.639,86 pada tahun 2022 atau terjadi penyusutan sebesar 32,76 persen;

14) Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan. Hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya Nilai Tukar Petani Aceh dengan nasional pada tahun 2024 yaitu masing-masing 119,25 dan 120,30 dan belum berjalannya industri pengolahan untuk hasil pertanian.

15) Kesejahteraan Petani belum maksimal, hal ini ditandai dengan Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Peternak (NTPt) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih sekitar 106,81.

Pengelolaan dan produktivitas kelautan dan perikanan belum maksimal, hal ini ditandai belum optimalnya industrialisasi perikanan dan sarana prasarana pelabuhan

yang modern terintegrasi sehingga produksi perikanan tangkap masih dijual dalam bentuk bahan baku.

Potensi Kelautan dan perikanan Aceh rawan terhadap ancaman IUU Fishing (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) dan Destructive Fishing, dan belum optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan kawasan konservasi perairan dalam menjaga kelestarian sumberdaya dan mendukung pemanfaatan potensi perikanan yang berkelanjutan.

Belum optimalnya pengelolaan perikanan budidaya serta sarana prasarana perikanan budidaya, peningkatan sumberdaya manusia dan penerapan teknologi terbaru yang adaptif.

Produksi garam masih dilakukan secara tradisional, belum mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Kandungan garam yang dihasilkan petani garam di Aceh masih mengandung impurities.

Pertumbuhan ekonomi yang rendah di Aceh dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk diantaranya sejarah konflik bersenjata di Aceh, yang berlangsung selama beberapa dekade sebelum perdamaian pada tahun 2005, telah meninggalkan dampak yang signifikan pada infrastruktur, perekonomian, dan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun situasinya telah membaik sejak itu, tetapi dampaknya masih terasa dalam pembangunan ekonomi jangka panjang. Aceh terlalu bergantung pada sektor ekonomi seperti pertanian atau perikanan, yang mengalami kendala struktural atau alamiah yang membatasi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kurangnya infrastruktur yang memadai, termasuk jaringan transportasi yang baik dan layanan dasar seperti listrik dan air bersih, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Kurangnya investasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan inovasi ekonomi juga dapat membatasi potensi pertumbuhan ekonomi Aceh. Ini mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk industri kreatif dan teknologi.

Aceh terletak di daerah rawan bencana alam, seperti gempa bumi dan tsunami. Bencana-bencana ini dapat merusak infrastruktur dan mengganggu aktivitas ekonomi, serta meningkatkan kerentanan ekonomi secara keseluruhan. Perubahan iklim juga dapat mempengaruhi sektor-sektor tertentu, seperti pertanian dan perikanan.

Praktik korupsi dan tata kelola yang buruk dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi efisiensi alokasi sumber daya dan menghalangi investasi serta pengembangan bisnis yang berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat memiliki sejumlah dampak negatif bagi masyarakat Aceh, antara lain tingkat pengangguran yang tinggi dan pendapatan yang rendah bagi penduduk. Hal ini dapat memperburuk tingkat kemiskinan di Aceh, mengakibatkan kesulitan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi yang rendah cenderung meningkatkan kesenjangan antara kelompok-kelompok ekonomi, dengan beberapa

bagian masyarakat mungkin mengalami peningkatan pendapatan dan akses ke peluang, sementara yang lain tetap terpinggirkan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, pemerintah kesulitan untuk menyediakan layanan dasar seperti pendidikan yang berkualitas, perawatan kesehatan yang terjangkau, dan infrastruktur yang memadai. Ini dapat menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat membatasi investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan sumber daya manusia secara umum. Hal ini dapat menghambat kemampuan masyarakat Aceh untuk bersaing dalam pasar kerja global yang semakin kompetitif. Jika pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh sektor-sektor sumber daya alam yang terbatas, seperti pertanian atau perikanan, maka masyarakat akan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan dampak lingkungan yang mungkin merugikan.

Ketidakpuasan ekonomi di kalangan masyarakat yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat meningkatkan risiko konflik sosial, termasuk protes, demonstrasi, atau bahkan tindakan kekerasan.

Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di Aceh untuk bekerja sama dalam mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan memastikan bahwa masyarakat Aceh dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan upaya yang terkoordinasi dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, termasuk investasi dalam infrastruktur, pendidikan, pelatihan keterampilan, diversifikasi ekonomi, dan perbaikan tata kelola.

2.3.1.3. Masih belum optimalnya Transformasi tata kelola pemerintahan Aceh:

1) Reformasi Hukum Aceh masih belum optimal, hal ini ditandai capaian Indeks Reformasi hukum Aceh adalah 67.8.
2) Pemanfaatan Digital untuk pelayanan publik belum optimal, Hal ini ditandai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Aceh sebesar 3.64 (sangat baik) pada tahun 2024 sedangkan yang paling tinggi adalah Jawa Barat sebesar 4,73 (memuaskan). Aceh tidak masuk dalam sepuluh besar pemanfaatan IT ini.
3) Pelayanan publik di Pemerintah Aceh belum optimal, hal ini ditandai masih Indeks Pelayanan Publik hanya sebesar 4.01 (2022) sedangkan nasional 61,1 persen
4) Masih belum optimalnya SDM ASN, hal ini ditandai dengan Indeks Profesionalitas ASN 76,76 (2023).
5) Masih belum optimalnya Integritas Pemerintah Aceh, hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Integritas Nasional 72,43 (2021) sedangkan pada tahun 2023 tercatat menurun menjadi 70,97.

6) Pelaksanaan otonomi khusus Aceh belum optimal yang diindikasikan belum diaplikasikan secara penuh peraturan-peraturan hukum yang diatur dalam UUPA dan Mulai tahun 2028 Pemerintah Aceh tidak lagi menerima dukungan Dana Otonomi Khusus.

7) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu dan pilkada. partisipasi pemilih pada pemilu presiden tahun 2024 sebesar 87,01 persen, pemilu legislatif 86,86 persen, pemilihan kepala daerah 77,5 persen.

8) Belum terintegrasinya data dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pembangunan. SIPD masih mencakup perencanaan dan penganggaran sedangkan integrasi dengan monitoring dan evaluasi belum berjalan.

9) Kemandirian Fiskal Masih Rendah. Persentase kemandirian fiskal tahun 2024 sebesar 28,67 persen (*unaudited*) atau tergolong dalam kriteria rendah. Pendanaan pembangunan masih bertumpu pada anggaran Pemerintah Pusat (dana transfer) sebesar 71,31 persen dari total APBA yang menandakan kapasitas fiskal Aceh masih rendah, berkurangnya Dana Otsus yang menyebabkan terganggunya pendanaan pembangunan Aceh terutama sektor pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan serta pemeliharaan infrastruktur. Penurunan tersebut mulai tahun 2023 sebesar 50 persen (1 persen dari DAU Nasional) dan pada tahun 2028 menjadi 0 persen, banyak potensi pembiayaan dan kemitraan yang belum dioptimalkan pemanfaatannya (diantaranya PEN, TJSLP, CSO, dan PPP).

10) Pembangunan Sumber daya ASN belum optimal, hal ini ditandai belum optimalnya pelaksanaan manajemen Kepegawaian, terutama setelah terjadinya restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah dan juga rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan P3K yang mencapai 7300 formasi, rendahnya Pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi ASN yaitu jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal baru mencapai 0,49 persen dan pelatihan teknis baru mencapai 16 persen dan sertifikasi kompetensi manajerial dan fungsional baru mencapai 60,7 persen.

11) Belum optimalnya pelaksanaan riset serta pemanfaatan hasil riset untuk mendukung perencanaan pembangunan Aceh. Hal ini dikarenakan penelitian dan pengembangan tidak fokus pada pelayanan Pemerintah daerah dan masih kecilnya penggunaan hasil penelitian dalam pengembangan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*) dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran.

12) Masih lemahnya implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi dan birokrasi belum berjalan secara efektif dan efisien.

13) Belum optimalnya tingkat Inovasi Daerah. Hal ini ditandai dengan pencapaian nilai indeks inovasi daerah Aceh tahun 2024 yang baru

mencapai sebesar 55,87 pada level "inovatif" sedangkan level tertinggi adalah "sangat inovatif" (nilai indeks 100-60,01). Sementara itu, Sumatera Barat menduduki peringkat pertama Indeks Inovasi Daerah dengan nilai indeks sebesar 88,92 (katagori "Sangat Inovatif").

14) Pelayanan dasar belum optimal, hal ini ditandai oleh belum maksimalnya standar pelayanan minimal di Aceh, menurut data terakhir pada tahun 2023 indeks pemenuhan SPM Aceh baru mencapai 93,26 persen dan berada pada ranking 24 dari 38 provinsi. Pada tahun 2024 meningkat sebesar 94,76 persen.

15) Pembangunan di gampong masih belum optimal, yang ditandai dengan masih rendahnya Indeks Desa Membangun (IDM) Aceh tahun 2024 yang baru mencapai 0,6848 (status: berkembang), sedangkan nasional dengan status yang sama memiliki IDM yang lebih tinggi yaitu sebesar 0,7034.

16) Belum tuntasnya rekonsiliasi dan penanganan korban pasca konflik. Hal ini ditandai belum tersedianya data korban konflik yang akurat, sehingga pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial korban konflik yang dilaksanakan selama ini belum memberikan hasil yang maksimal.

17) Masih terdapat potensi lahan HPH/HGU yang tidak dimanfaatkan serta memiliki potensi yang besar untuk dialihfungsikan kepada daerah. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan skala ekonomi masyarakat pengembalian lahan tersebut dapat dilakukan melalui kerangka UUPA guna menerbitkan sertifikat tanah untuk masyarakat (redistribusi).

18) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil seperti cakupan akta kelahiran yang masih 96,40 persen pada tahun 2023, sementara yang diharapkan cakupan kepemilikan tersebut adalah sebesar 100 persen. Demikian pula dengan cakupan akta kematian yang capaiannya masih rendah dan data kependudukan *by name by address* perlu diperbaharui.

Adapun sebab mengapa tatakelola Pemerintah Aceh belum optimal adalah Pemerintah Aceh menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi yang diperlukan untuk melakukan transformasi tata kelola yang efektif. Kurangnya anggaran dan tenaga kerja terlatih dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk menerapkan perubahan yang diperlukan.

Budaya organisasi yang kaku dan tidak responsif terhadap perubahan mungkin menghambat kemampuan pemerintah Aceh untuk mengadopsi praktik tata kelola yang lebih baik. Resistensi terhadap perubahan dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dapat menghambat transformasi tata kelola.

Praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam birokrasi pemerintah dapat menghambat upaya untuk melakukan transformasi tata kelola. Korupsi dapat

mengakibatkan penggunaan yang tidak efisien atau tidak adil dari sumber daya publik, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Institusi pemerintah di Aceh belum optimal belum memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola transformasi tata kelola dengan efektif. Kurangnya kepemimpinan yang kuat, sistem pengawasan yang lemah, dan kurangnya keterampilan manajerial di kalangan pejabat pemerintah dapat menghambat kemampuan institusi untuk melaksanakan perubahan.

Faktor politik, termasuk perubahan kepemimpinan atau perselisihan politik, dapat mengganggu upaya transformasi tata kelola pemerintah. Ketidakstabilan politik dapat mengalihkan perhatian dari reformasi tata kelola dan menghambat implementasi kebijakan yang diperlukan.

Untuk meningkatkan transformasi tata kelola pemerintah, diperlukan komitmen yang kuat dari para pemimpin politik dan pemerintah, upaya untuk memperkuat kapasitas institusi, pemberantasan korupsi, dan pembangunan budaya organisasi yang responsif dan terbuka terhadap perubahan. Ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang mendukung reformasi tata kelola yang berkelanjutan.

Jika tata kelola pemerintah di Aceh tidak berjalan dengan optimal, dapat timbul sejumlah akibat negatif, seperti penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan tidak efektif. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan anggaran, penundaan proyek-proyek pembangunan, dan penurunan kualitas layanan publik. Ketidakoptimalan dalam tata kelola pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Praktik korupsi dapat merugikan masyarakat dengan mengalihkan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga mengurangi akses masyarakat terhadap layanan publik yang layak, pemerintah akan gagal merespons kebutuhan mendesak masyarakat secara efektif. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dan menimbulkan potensi konflik sosial atau politik, dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial di Aceh. Penundaan proyek-proyek pembangunan, kurangnya investasi dalam infrastruktur, dan ketidakstabilan kebijakan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Jika tata kelola pemerintah dianggap tidak efektif atau tidak transparan, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Ketidakpercayaan ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan, serta mengganggu stabilitas politik dan sosial secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Aceh untuk memperbaiki tata kelola pemerintah secara menyeluruh, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memerangi korupsi, memperkuat kapasitas institusi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini akan membantu menciptakan

lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara keseluruhan.

2.3.1.4. Masih tingginya ketimpangan antar wilayah:

1) Belum optimalnya interkoneksi transportasi di Aceh, hal ini ditandai masih rendahnya kondisi kemantapan jalan Provinsi yaitu sebesar 80,80 persen (2024). Sedangkan kondisi mantap jalan nasional di wilayah Aceh sudah mencapai sebesar 95,92 persen;
2) Belum optimalnya pengendalian kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang terhadap RTRW; hal ini ditandai belum optimalnya pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Strategis Nasional (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Kawasan Bandar Aceh Darussalam, Kawasan Hutan Aceh (termasuk Leuser), Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Strategis dan Khusus Wilayah sesuai dengan potensi masing-masing daerah.
3) Penanganan perumahan dan permukiman masih rendah, hal ini ditandai dengan masih luasnya permukiman kumuh di Aceh mengalami peningkatan dari 7.526,51 ha tahun 2023 menjadi 7.627,54 ha di tahun 2024, Capaian rumah tangga dengan akses air minum layak Aceh tahun 2024 sebesar 90,08 persen, masih di bawah capaian nasional sebesar 92,64 persen; dan Rumah tangga dengan akses sanitasi layak Aceh adalah 81,1 persen dan nasional sebesar 83,60 persen pada tahun 2024;
4) Infrastruktur dan pelestarian sumber daya air masih belum optimal, hal ini disebabkan masih belum optimalnya pemeliharaan dan pelestarian Sumber Daya Air dan masih belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian SDA; infrastruktur SDA dalam kondisi baik yang baru mencapai 60,39 persen tahun 2022, adanya pengurangan debit air andalan dan beberapa daerah irigasi yang tidak berfungsi secara optimal, penanganan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama baru mencakup 38,21 persen dari potensi genangan banjir; dan Masih rendahnya irigasi Aceh dalam kondisi baik yang mencapai 82,56 persen dari luas areal 65.409 Ha.
5) Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan, baik darat, laut dan udara serta belum optimalnya pemanfaatan angkutan umum untuk mobilitas masyarakat. Rasio Konektivitas Daerah Aceh pada tahun 2024 sebesar 0,73, capaiannya masih dalam katagori rendah.
6) Kawasan transmigrasi belum optimal, hal ini dikarenakan banyaknya kawasan transmigrasi nasional maupun lokal yang ditelantarkan.

Ketimpangan antara daerah di Aceh dapat tinggi karena beberapa faktor, di antaranya Ketidakmerataan Pembangunan Infrastruktur. Beberapa daerah mungkin memiliki akses yang lebih baik terhadap infrastruktur seperti jalan raya, listrik, air bersih, dan telekomunikasi daripada daerah lain. Ketidakmerataan dalam pembangunan infrastruktur ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi antar daerah.

Ketergantungan pada Sektor Ekonomi Tertentu, dimana Kabupaten/kota yang tergantung pada sektor ekonomi tertentu, seperti pertanian atau perikanan, mungkin mengalami ketimpangan ekonomi jika sektor tersebut tidak berkembang dengan merata di seluruh wilayah Aceh. Ketimpangan ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kualitas tanah, akses pasar, dan perubahan iklim.

Alokasi anggaran yang tidak merata dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat menyebabkan ketimpangan antara daerah. Daerah-daerah yang mendapatkan lebih banyak dana dapat mengalokasikan sumber daya tersebut untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program ekonomi, sementara daerah-daerah lain mungkin terbatas dalam kemampuan mereka untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.

Kurangnya Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan. Ketimpangan pendidikan dan kesehatan antara daerah di Aceh juga dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi. Daerah yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang baik mungkin mengalami kesulitan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perbedaan dalam Kebijakan Pembangunan Regional. Perbedaan dalam kebijakan pembangunan regional antara pemerintah daerah dapat memperburuk ketimpangan antar daerah. Daerah-daerah yang menerapkan kebijakan yang lebih inklusif dan pro-poor mungkin dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, sementara daerah-daerah lain yang fokus pada kepentingan kelompok tertentu atau pengembangan infrastruktur yang tidak merata dapat memperburuk ketimpangan.

Untuk mengurangi ketimpangan antar daerah di Aceh, diperlukan upaya yang terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar, mendistribusikan sumber daya secara lebih merata, memperkuat infrastruktur, dan mendorong diversifikasi ekonomi di seluruh wilayah Aceh.

Ketika ketimpangan antar daerah di Aceh tinggi, dapat timbul sejumlah akibat yang merugikan, seperti Peningkatan Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi, polarisasi ekonomi dan sosial antara Kabupaten/kota yang kaya dan miskin di Aceh. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan antara kelompok-kelompok ekonomi, mengakibatkan kesenjangan pendapatan yang lebih besar, dan memperdalam ketidaksetaraan sosial.

Kurangnya Akses Terhadap Layanan Dasar. Daerah-daerah yang miskin atau terpinggirkan mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Ketidakmerataan dalam akses

terhadap layanan dasar ini dapat meningkatkan risiko kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan kesehatan antara daerah.

Ketergantungan pada Bantuan dan Dana Pemerintah: Daerah-daerah yang miskin atau terpinggirkan mungkin menjadi lebih tergantung pada bantuan pemerintah atau dana pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Ketergantungan ini dapat menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kerentanan ekonomi daerah terhadap perubahan kebijakan atau kondisi ekonomi global.

Ketimpangan yang tinggi dapat menciptakan ketegangan sosial antara daerah yang berbeda, terutama jika ada persepsi ketidakadilan dalam alokasi sumber daya atau pembangunan oleh pemerintah. Ketegangan sosial ini dapat meningkatkan risiko konflik antar-atau dalam daerah, mengganggu stabilitas politik dan sosial, dan menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Aceh. Daerah-daerah yang miskin atau terpinggirkan mungkin tidak mampu berkontribusi sepenuhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, mengurangi potensi pembangunan regional dan nasional secara keseluruhan, dapat mendorong migrasi tenaga kerja dari daerah-daerah yang miskin ke daerah-daerah yang lebih makmur, menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi tenaga kerja dan meningkatkan tekanan pada infrastruktur dan layanan di daerah tujuan.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Aceh untuk mengurangi ketimpangan antar daerah dengan menerapkan kebijakan dan program yang memperkuat akses terhadap layanan dasar, meningkatkan investasi dalam pembangunan ekonomi lokal, memperkuat infrastruktur, dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Aceh.

2.3.1.5. Sumber Daya Manusia masih rendah:

1. Sumber daya manusia masih rendah dan adanya diparitas yang tinggi antar kabupaten/kota, hal ini ditandai dengan IPM Aceh sebesar 75,36% (2024) dan yang paling tinggi adalah Banda Aceh 88,35 dan yang paling rendah Subulussalam sebesar 70,4.
2. Mutu guru belum optimal dan merata. Guru tersertifikasi pada jenjang pendidikan SMK sudah mencapai 60 persen, sedangkan pada jenjang pendidikan SMA guru yang tersertifikasi belum mencapai 40 persen dan pada SLB guru yang tersertifikasi belum mencapai 30 persen, selain itu masih tingginya guru dengan status bukan PNS yaitu mencapai 86,9 persen pada tingkatan pendidikan SLB.
3. Masih rendahnya APS anak usia 4-18 tahun penyandang Disabilitas. Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 16-18 tahun di Aceh sudah baik (83,10 persen) dibandingkan Nasional (73,15 tahun) meskipun belum mencapai target 100 persen, namun APS anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dibawah 40 persen.

4. Masih rendahnya minat baca masyarakat Aceh, dimana Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Aceh tahun 2024 masih sebesar 72,42 masih di bawah rata-rata nasional dan masuk dalam katagori Sedang;
5. Angkatan kerja masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah dan pendidikan dasar. Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2024, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebesar 34,62 persen. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 17,54 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2022 dan Agustus 2023.
6. Angka ketergantungan penduduk masih tinggi, hal ini ditandai dengan rasio ketergantungan hidup di Aceh tahun 2024 tercatat mencapai 48,61 persen lebih baik dari nasional 46,80 persen, namun Aceh perlu mengoptimalkan penurunan angka ini agar masyarakat semakin produktif.
7. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) masih tinggi yaitu sebesar 5,75 persen (2024) sedangkan nasional sebesar 4,91 persen.
8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Aceh (%) 49,62 sedangkan nasional 55,41 (2024).
9. Kemandirian dayah secara ekonomi juga masih rendah, dayah masih kurangnya inisiatif membekali para santri dengan ilmu kewirausahaan, kurangnya mendapatkan pelatihan-pelatihan ilmu baik dibidang pertanian, perikanan dsb akan tetapi lebih focus pada perbaikan sapras. Dari 1.484 jumlah dayah hanya 44% yang mandiri.
10. Derajat kesehatan masyarakat belum maksimal, hal ini ditandai dengan Angka Harapan Hidup Aceh sebesar 73,2 masih di bawah rata-rata nasional yaitu 74,15 pada tahun 2024;
11. Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil belum optimal, hal ini ditandai angka Kematian Ibu tahun 2024 di Aceh 98/100.000 kelahiran hidup, kondisi ini belum memenuhi target.
12. Masih tingginya prevalensi stunting, data terakhir tahun 2023 menunjukkan angka sebesar 29,40 persen, masih diatas angka Nasional 21,50 persen;
13. Berkurangnya pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh, dikarenakan menurunnya pendapatan dari Otsus dari 2% (2018-2022) menjadi 1% (2023-2027) dan pada tahun 2028 akan berakhir;

    Belum optima Capaian terbaik SPM terdapat pada bidang Kesehatan dimana telah mencapai 100% di tahun 2024, walaupun sempat mengalami

penurunan tahun 2021 pada angka 48,12 persen. Diikuti dengan bidang sosial yang juga mengalami fluktuasi, dan pada tahun 2024 berada pada angka 99,60 persen. Sedangkan, capaian SPM terendah pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU), dimana mendapat nilai terendah dalam empat tahun terakhir, namun mengalami kenaikan secara signifikan di angka 100 persen pada tahun 2023 dan kembali turun pada tahun 2024 di angka 96,34 persen.

14. Inya cakupan pelayanan kesehatan rujukan di tingkat provinsi yang masih bertumpu pada rumah sakit Zainal Abidin,
15. Penduduk miskin Aceh masih tinggi, dimana angka kemiskinan Aceh sebesar 14,23 (Maret 2024) sedangkan nasional 9,03%, sedangkan angka kemiskinan ekstrem Aceh sebesar 14,23%. (2023)
16. Pendapatan perkapita Aceh masih rendah, hal ini ditandai tahun 2024 sebesar Rp. 39.16 sedangkan nasional Rp. 71.03, pendapatan perkapita penduduk Aceh setengah dari rata-rata pendapatan perkapita penduduk Indonesia.
17. Ketimpangan Gender dan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi. Hal ini ditandai masih rendahnya partisipasi perempuan di ruang publik, terutama dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. Partisipasi perempuan pada lembaga legislatif di tingkat Aceh sebanyak 11 persen sedangkan di tingkat nasional sebanyak 21 persen, masih rendahnya indeks pemberdayaan gender dibandingkan dengan nasional, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh 69,92 sedangkan nasional 76,90. Sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sudah lebih baik dibandingkan nasional, dimana tahun 2024 IPG Aceh 92,64 sedangkan nasional 91,85, Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2022 (1.029 kasus) menjadi 1.098 kasus di tahun 2023. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, trend kekerasan seksual meningkat di Aceh
18. Pembangunan keluarga masih perlu ditingkatkan, hal ditandai dengan pembangunan indeks pembangunan keluarga yang belum maksimal, demikian juga dengan kepemudaan dan keolahrgaan, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) belum optimal yaitu sebesar sebesar 58,01 belum mencapai indeks ideal sebesar 75,00, lemahnya pembinaan atlet berprestasi dan masih rendahnya prestasi olahraga sebesar 1,96 persen dari jumlah penduduk berusia 18 tahun ke atas sampai dengan 45 tahun, terbatasnya prasarana dan sarana olahraga yang berstandar dan cakupan pembinaan olahraga baru 53,57 persen dari seluruh cabang olahraga yang diakui di Indonesia.
19. Daya tampung dalam panti masih belum optimal dibandingkan dengan jumlah PPKS yang ada di Aceh, sehingga pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Aceh belum terpenuhi.

20. Penanganan Disabilitas belum maksimal, hal ini ditandai oleh masih rendahnya persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal, yaitu hanya 20 persen dari jumlah 8,361 PPKS.
21. Kesejahteraan pekerja belum maksimal, hal ini ditandai oleh masih redahnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 20,86 persen. Sedangkan nasional sudah mencapai 26,97 persen.

Penyebab masih rendahnya SDM Aceh adalah adanya keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, meskipun Aceh memiliki banyak sekolah dan lembaga pendidikan, tidak semua wilayah memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Wilayah pedalaman atau terpencil mungkin menghadapi kendala dalam hal infrastruktur pendidikan, kurangnya tenaga pendidik yang berkualifikasi, dan kurangnya dukungan untuk pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Konflik bersenjata yang telah lama berlangsung di Aceh telah mengganggu proses pembangunan SDM. Konflik ini dapat mengganggu akses pendidikan, menghambat pembangunan infrastruktur pendidikan, dan menyebabkan gangguan pada proses belajar-mengajar. Pembangunan SDM memerlukan investasi yang signifikan dari pemerintah dalam hal pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan ekonomi masih belum fokus dan masif. Namun, Aceh mungkin mengalami kurangnya investasi dan dukungan yang memadai dari pemerintah, yang dapat menghambat kemajuan dalam pembangunan SDM.

Kondisi Kesehatan masyarakat yang buruk, termasuk tingginya angka kematian ibu dan anak, stunting, serta prevalensi penyakit menular seperti malaria dan tuberkulosis, dapat menghambat pembangunan SDM di Aceh. Kondisi kesehatan yang buruk dapat menghambat partisipasi dalam pendidikan dan produktivitas tenaga kerja. Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan, beberapa komunitas mungkin kurang menyadari pentingnya pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang ekonomi. Kesadaran akan pentingnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan perlu ditingkatkan di Aceh. Untuk meningkatkan pembangunan SDM di Aceh, perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, meningkatkan kesehatan masyarakat, memperkuat infrastruktur pendidikan, dan memberikan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Penyebab masih tingginya disparitas adalah karena konflik dan juga bencana alam, akses layanan dasar yang belum merata, terkendalanya dengan infrastruktur dan akses tranportasi yang belum maksimal, Ketidakseimbangan dalam investasi pembangunan manusia antara wilayah-wilayah di Aceh, Faktor-faktor sosial dan budaya seperti ketidaksetaraan gender, diskriminasi, dan tradisi yang membatasi akses perempuan dan kelompok minoritas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan juga dapat menyebabkan disparitas dalam IPM di Aceh.

2.3.1.6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana masih rendah;

1) Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana masih rendah, hal ini ditandai dengan masih tingginya indeks Risiko Bencana Aceh mencapai 144,30/tinggi (2024) bandingkan nasional adalah sebesar 128,5.

2) Belum optimalnya pengelolaan Lingkungan hidup. hal ini ditandai dengan Indeks kualitas lingkungan hidup Aceh Tahun 2024, masih sebesar 79,66 walaupun sedikit lebih tinggi dari nasional (73,53), dengan rincian kualitas air 63,25 persen, tutupan lahan 76,66 persen, indeks kualitas udara 92,81 persen, indeks kualitas air laut sebesar 83,24 persen. disamping itu, selama periode tahun 2003-2022 peningkatan suhu udara sebesar 0.4°C.

3) Pembangunan kehutanan belum maksimal, hal ini ditandai dengan masih tingginya deforestasi hutan di Aceh akibat permukiman liar, perladangan liar, kebakaran hutan, dan pembalakan liar selama tahun 2019 s.d 2020 terdapat seluas ± 1.956,83 hektar tutupan hutan yang hilang atau terdeforestasi, meningkatnya konflik satwa liar dengan manusia sebanyak 275 kasus pada tahun 2020-2022 terutama dengan Gajah, harimau, orang utan, dan badak Sumatera, Luas lahan kritis di Aceh semakin meningkat dimana pada tahun 2021 seluas 262.728 ha menjadi 264.922,53 pada tahun 2022; dan Kurangnya penegakan hukum secara terbuka dan tuntas dalam penanganan kejahatan kehutanan.

4) Pembangunan energi dan Sumber Daya Mineral belum optimal, hal ini ditandai dengan rasio elektrifikasi Aceh tahun 2024 yang belum mencapai 100 persen (99,99 persen) dari yang diharapkan saat ini. Disamping itu, belum optimalnya pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti energi surya, energi panas bumi, energi angin (bayu), dan juga energi alternatif lainnya dari bahan nabati.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana yang masih rendah di Aceh dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: kurangnya Kesadaran dan Pendidikan Lingkungan akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam di kalangan masyarakat dan pengambil keputusan dapat menjadi faktor utama yang menghambat upaya untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Praktek-praktek eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, seperti penebangan hutan liar, overfishing, atau penambangan yang tidak terkendali, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius dan menimbulkan dampak jangka panjang bagi keberlanjutan ekosistem. Praktik korupsi dan tata kelola yang buruk dalam pengelolaan sumber daya alam dapat menghambat upaya untuk melaksanakan kebijakan dan program perlindungan lingkungan hidup serta mendorong praktek-praktek eksploitasi yang merugikan. Ketidakstabilan politik dan konflik di Aceh dapat mengganggu upaya

untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Konflik dapat mengakibatkan kerusakan infrastruktur, pengungsi, dan ketidakpastian keamanan, yang semuanya dapat memperburuk kondisi lingkungan hidup. Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi yang diperlukan untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta mitigasi bencana dapat menghambat kemampuan pemerintah dan lembaga terkait untuk bertindak secara efektif. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem lainnya di Aceh. Kurangnya perencanaan adaptasi dan mitigasi yang memadai dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial yang besar akibat bencana-bencana tersebut.

Jika pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana masih rendah di Aceh, beberapa akibat yang mungkin timbul antara lain: kerusakan lingkungan yang parah, seperti deforestasi, kerusakan lahan, kerusakan ekosistem terumbu karang, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Ini akan berdampak buruk pada ekosistem dan spesies yang ada di Aceh. krisis kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan polusi udara, air, dan tanah. Ini dapat menyebabkan peningkatan penyakit pernapasan, penyakit kulit, dan masalah kesehatan lainnya, yang pada gilirannya akan membebani sistem kesehatan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.: Kerusakan lingkungan dan bencana alam dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi Aceh. Misalnya, banjir, tanah longsor, atau gempa bumi dapat merusak infrastruktur, properti, dan tanaman, serta mengganggu kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Ketidakmampuan dalam mengelola risiko bencana dan mengadaptasi perubahan iklim dapat meningkatkan kerentanan Aceh terhadap bencana alam dan fenomena ekstrem lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kerugian manusia, kerugian ekonomi, dan memerlukan upaya pemulihan yang mahal. Kerusakan lingkungan dan bencana alam dapat mengganggu produksi pangan dan rantai pasokan makanan di Aceh. Ini dapat menyebabkan ketidakpastian keamanan pangan, peningkatan harga pangan, dan meningkatnya risiko kelaparan dan malnutrisi di kalangan masyarakat. Kerusakan lingkungan dan bencana alam dapat menyebabkan gangguan sosial, termasuk konflik antar-masyarakat, pengungsi, dan migrasi paksa. Ini dapat menciptakan ketegangan sosial, memicu konflik, dan meningkatkan tekanan pada infrastruktur dan layanan publik di daerah tujuan migrasi.

Oleh karena itu, penting bagi Aceh untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan bencana, dan mengadopsi strategi adaptasi perubahan iklim yang tepat. Ini melibatkan investasi dalam infrastruktur pengelolaan bencana, penegakan hukum lingkungan yang ketat, pendidikan lingkungan yang lebih luas, dan promosi kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup.

Untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana di Aceh, diperlukan upaya yang terkoordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Ini meliputi peningkatan kesadaran dan pendidikan lingkungan, penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran

lingkungan, investasi dalam infrastruktur pengelolaan bencana, dan promosi kebijakan dan praktik yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup.

### 2.3.2. Isu Strategis Pembangunan

#### 2.3.2.1. Isu Strategis Nasional

Isu dan tantangan pembangunan nasional

1. Rendahnya Produktivitas
2. RendahnyaKualitas Sumber Daya Manusia
3. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat
4. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif
5. Krisis Lingkungan
6. Geopolitik dan Geoekonomi
7. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

#### 2.3.2.2. Isu Strategis Aceh

1. Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh

Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk memperkuat Syariat Islam, dan budaya Aceh dengan cara meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi Syariat Islam dan budaya Aceh. Melakukan program pendidikan dan penyuluhan syariat Islam kepada masyarakat. Meningkatkan implementasi hukum syariat dalam berbagai aspek kehidupan dan mendorong promosi dan pelestarian cagar budaya dan objek kemujuan kebudayaan Aceh sebagai bagian dari identitas daerah. mengembangkan industri pariwisata berbasis syariah yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dan mengakui serta melindungi hak-hak masyarakat Aceh untuk menjalankan agama dan budaya mereka. Disamping itu, pengelolaan harta agama terhadap wakaf perlu ditangani secara serius seperti menajemen kelembagaan dan status hukum aset wakaf (sertifikasi tanah wakaf).

2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan Stunting

Pemerintah Aceh dapat mengimplementasikan beberapa upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan angka stunting yang meliputi:

1. Peningkatan Akses Makanan Bergizi dengan upaya meningkatkan akses masyarakat, terutama ibu hamil, bayi, dan anak-anak, ke makanan bergizi seimbang melalui promosi praktik pemberian makanan tambahan, edukasi tentang pentingnya gizi seimbang, dan penyediaan suplemen gizi bagi kelompok rentan.
2. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat termasuk daerah terpencil, terutama ibu hamil dan anak-anak, ke pelayanan kesehatan maternal dan anak yang berkualitas, termasuk pemeriksaan kehamilan rutin, pemantauan

pertumbuhan anak, imunisasi, dan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, dan penanganan penyakit menular dan tidak menular

3. Pendidikan Kesehatan dan Penyuluhan Gizi dilakukan dengan memberikan pendidikan kesehatan dan penyuluhan gizi kepada masyarakat, terutama kepada ibu hamil dan keluarga dengan anak balita, tentang pentingnya pola makan sehat, praktik pemberian makan yang baik, dan pentingnya nutrisi selama masa kehamilan dan pertumbuhan anak.
4. Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan dengan mengimplementasikan program pemberian makanan tambahan kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan anak-anak balita yang mengalami stunting.
5. Akses Sanitasi dan Air Bersih dengan meningkatkan akses kepada masyarakat, terutama di pedesaan, ke sanitasi yang layak dan air bersih untuk mencegah penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi status gizi.
6. Kolaborasi dan Sinergi antara pemerintah daerah berbagai stakeholder termasuk lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam upaya menurunkan stunting.

3. Pemerataan Pendidikan, Perkuatan Pendidikan Vokasi dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat.

Pemerintah Aceh dapat mengimplentasikan pemerataan Pendidikan, perkuatan pendidikan vokasi dan meningkatkan minat baca Masyarakat dengan cara sebagai berikut:

1. Menurunkan Disparitas Indeks Pembanguan Manusia (IPM)

Untuk menurunkan disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Aceh, diperlukan upaya lintas sektor yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- Meningkatkan akses pendidikan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat
- Mendorong pengembangan ekonomi inklusif dan berkelanjutan
- Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan
- Pemberdayaan perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya
- Kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil

2. Memperkuat Pendidikan Vokasi

Untuk memperkuat pendidikan vokasi, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- Meningkatkan investasi dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendidikan vokasi
- Mengembangkan kurikulum pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
- Membangun kemitraan dengan industri dan perusahaan lokal

- Memberikan bantuan keuangan atau beasiswa bagi siswa
- Melakukan evaluasi rutin terhadap program pendidikan vokasi

3. Meningkatkan Minat Baca Masyarakat

Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- Peningkatan Akses terhadap Bahan Bacaan
- Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Buku
- Integrasi Literasi dalam Kurikulum Pendidikan
- Pembangunan Keterampilan Literasi Digital
- Kolaborasi dengan Pihak-pihak Terkait
- Pengembangan Inisiatif Inovatif dalam promosi literasi
- Membangun budaya membaca yang kuat dan berkelanjutan

4. Penanggulangan Kemiskinan.

Pemerintah Aceh dapat melakukan beberapa upaya untuk mengurangi kemiskinan dengan peningkatan akses layanan dasar akses masyarakat terutama pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak; pemberdayaan ekonomi dengan memberikan pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, atau pengembangan pertanian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya beriktunya dengan memberikan bantuan tunai, pangan, atau pendidikan kepada keluarga miskin; membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi kemiskinan. Disamping itu, perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dilakukan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan.

5. Peningkatan Pendapatan Perkapita, Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Pemerintah Aceh dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya mendukung peningkatan UMKM terhadap akses modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan pengembangan produk bagi UMKM, dan pengembangan produk berseritifikasi halal. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan, membangun jalan, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas. Meningkatkan promosi investasi dan kemitraan dengan sektor swasta, serta menyediakan insentif dan kemudahan perizinan. Optimalisasi potensi pariwisata Aceh, termasuk wisata bahari, agrowisata, wisasta budaya dan sejarah, ekowisata, wisata spiritual, wisata edukasi, wisata minat khusus lainnya serta membangunan membangun infrastruktur wilayah yang mendukung. Disamping itu, pengembangan pariwisata di Aceh perlu dilakukan dalam kerangka dan branding pada wisata

halal/*Muslim Friendly* . Mengembangkan sektor-sektor baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, serta menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

6. Optimalisasi Riset dan Inovasi Serta Digital

Riset dan Inovasi merupakan dua hal yang saling berkaitan erat dan sangat penting untuk kemajuan suatu daerah yang didukung oleh pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk optimalisasi riset dan inovasi dengan cara pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang riset dan teknologi, mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi dan pelayanan publik. membangun infrastruktur penelitian dan inovasi untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga penelitian, universitas, dan perusahaan swasta. Selanjutnya membangun budaya inovasi dan kewirausahaan di kalangan masyarakat Aceh yang didukung oleh kebijakan dan regulasi yang pengembangan riset dan inovasi, serta meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan melalui anggaran pemerintah dan kerjasama dengan lembaga penelitian.

7. Membuka Lapangan Kerja dan Meningkat Produktivitas Masyarakat.

Permasalahan lapangan kerja di Aceh saat ini masih menjadi permasalahan utama yang didukung oleh beberapa faktor yaitu masih tingginya angka pengangguran dan rendahnya kualitas tenaga kerja. Hal ini tergambar dari rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja yang terbatas, serta lemahnya perlindungan tenaga kerja. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Aceh yang belum cukup kuat dan terbatasnya investasi juga menjadi penghambat penciptaan lapangan kerja.

Berbagai upaya pembangunan yang dapat dilakukan dalam menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat antara lain yaitu: 1) pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menciptakan lapangan kerja baru, dan penguatan mutu produk UMKM diarahkan pada sertifikasi produk terutama sertifikat halal; 2) memberikan dukungan kepada petani dan nelayan dengan teknologi pertanian modern, pelatihan keterampilan, dan akses pasar; 3) meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan pelatihan keterampilan; 4) menyediakan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas; 5) mengembangkan sektor-sektor strategis seperti pariwisata, perkebunan, dan industri manufaktur sebagai salah satu sumber pendapatan alternatif; 6) mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan proyek-proyek ekonomi; 7) mengembangkan ekonomi berbasis komunitas seperti pertanian organik dan pariwisata berbasis masyarakat; dan 8) mengembangkan sektor pertanian dengan memberikan dukungan kepada petani.

8. Memperkuat Industri Pengolahan dan Ekspor

Pemerintah Aceh dapat melakukan beberapa upaya untuk memperkuat industri pengolahan dan eksport dengan cara mengembangkan kawasan industri dan pusat produksi khusus dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan positioning pada Industri Halal sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang Islami di Aceh. Membangun infrastruktur logistik seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi darat secara mamadai. Memberikan akses mudah terhadap modal usaha dan teknologi bagi industri pengolahan. Mendorong diversifikasi produk-produk industri pengolahan dan mencari pasar ekspor baru. Meningkatkan kualitas dan standarisasi produk industri pengolahan untuk memenuhi persyaratan pasar ekspor, dan mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha dalam sertifikasi produk halal. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga riset dalam mengembangkan industri pengolahan. Membangun jejaring dan kerjasama dengan negara-negara lain untuk meningkatkan akses pasar internasional.

9. Mengembangkan Produktivitas Pangan dan Ekonomi Hijau.

Pemerintah Aceh dapat mengambil upaya strategis untuk pengembangan produktivitas pangan dan ekonomi hijau dengan upaya meningkatkan investasi dalam pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan dengan dukungan kepada petani. Membangun dan meningkatkan infrastruktur pertanian untuk meningkatkan aksesibilitas dan distribusi produk. Memberikan bantuan langsung dan pembiayaan kepada petani untuk memperoleh sarana produksi yang ramah lingkungan dengan mendorong pengembangan pertanian organik sebagai alternatif untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan dan memperkuat pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan dan ekonomi hijau. Selanjutnya mendorong pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dan memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya praktik pertanian berkelanjutan dan perlindungan lingkungan, serta mengembangkan strategi promosi dan pemasaran untuk meningkatkan daya saing produk pangan lokal Aceh.

10. Memperkuat Perkotaan dan Pendesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Pembangunan saat ini juga diarahkan pada peningkatan perkotaan dan pedesaanb sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masa depan, dalam hal ini, Pemerintah Aceh dapat melakukan dengan upaya mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus di daerah perkotaan dan pedesaan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah melalui pusat-pusat pelayanan dan perdagangan di perkotaan dan pedesaan. Memberikan dukungan kepada UMKM melalui penyediaan akses modal, pelatihan keterampilan, dan promosi pasar. Mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di kota-kota dan desa-desa yang memiliki potensi wisata. Meningkatkan penyediaan fasilitas dan layanan publik seperti

pendidikan, kesehatan, dan transportasi dan meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur di perkotaan dan pedesaan.

11. Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas

Tata kelola pemerintahan merupakan cerminan kinerja pemerintahan dalam memastikan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dengan cara melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintah dalam hal etika dan integritas. Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik. Memperkuat lembaga pengawasan dan pengendalian untuk memastikan penggunaan sumber daya publik yang efektif. Meningkatkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak korupsi dan pelanggaran etika. Mengimplementasikan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi untuk memperbaiki efisiensi dan akuntabilitas. Membangun komitmen kuat dari pemimpin pemerintah untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan pemerintahan.

12. Memperkuat Otonomi Khusus

Otonomi Khusus Aceh memberikan kewenangan lebih luas dalam mengatur daerahnya, terutama terkait penerapan hukum Syariah, pendidikan, dan pengelolaan sumber daya alam. Otonomi khusus ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintah Aceh dapat mengimplementasikan upaya untuk memperkuat otonomi khusus kedepan di arahkan pada memperkuat implementasi hukum dan peraturan terkait otonomi khusus Aceh. Meningkatkan kapasitas institusi pemerintahan dalam mengelola urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Menyusuna perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dan potensi Aceh serta dapat memberikan manfaat bagi semua komponen masyarakat Aceh. Menyusun qanun yang mendukung implementasi otonomi khusus Aceh dan menjaga konsistensi dengan hukum nasional serta membangun kerjasama yang baik antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. Selanjutnya memperkuat peran lembaga adat dan agama dalam pengelolaan urusan keagamaan dan kebudayaan.

13. Kemandirian dalam Ruang Fiskal

Kemandirian fiskal merupakan kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terlalu bergantung pada pendanaan pemerintah pusat atau sumber luar lainnya. Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk meningkatkan kemandirian dalam ruang fiskal dengan cara memperkuat pengumpulan pajak dan retribusi daerah dengan reformasi perpajakan dan penegakan hukum. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keuangan dan perpajakan. Meningkatkan sumber pendapatan daerah di luar transfer pemerintah pusat.

Menggalakkan promosi investasi dan pengembangan ekonomi lokal. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Mendorong pengembangan sistem perekonomian daerah yang mandiri. Membangun komitmen yang kuat bersama stakeholder untuk memperkuat kemandirian fiskal di Aceh.

14. Penanganan PPKS dan Disabilitas, Memperkuat Gender dan Keluarga

Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk penangganan PPKS dan disablitas, memperkuat gender dan keluarga dengan cara mengembangkan program rehabilitasi fisik, mental, dan sosial bagi penyandang disabilitas. Memperkuat aksesibilitas fisik dan sosial bagi penyandang disabilitas, mendorong implementasi pendidikan inklusif di Aceh serta pelatihan keterampilan, akses modal usaha bagi PPKS, penyandang disabilitas, dan perempuan. Memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi dengan melakukan program pendidikan dan kesadaran gender untuk meningkatkan kesetaraan gender. Selanjutnya memberikan dukungan kepada keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan keterampilan parenting.

15. Pembangunan Berorientasi Lingkungan dan Energi Terbarukan

Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk melaksanakan Pembangunan Berorientasi Lingkungan dan Energi Terbarukan dengan cara: mengembangkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Mendorong investasi dalam pengembangan sumber energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor dan mendorong pengembangan transportasi berkelanjutan. Selanjutnya melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan kepada masyarakat. Mengembangkan rencana tata ruang yang berkelanjutan untuk mengatasi degradasi, deforestasi, alam dan alih fungsi lahan kawasan hutan lindung, mangrove dan Kawasan Hidrologi Gambut (KHG)/Kawasan Lindung Aceh. Membangun kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendukung pembangunan berorientasi lingkungan.

16. Pengurangan Risiko Bencana

Aceh merupakan daerah dengan Indek Risiko Bencana yang tinggi. Beberapa bencana yang sering terjadi di Aceh antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Aceh dalam upaya pengurangan risiko bencana dilakukan dengan membuat dan melaksanakan rencana penanggulangan bencana yang komprehensif dan terpadu. Meningkatkan infrastruktur dan sistem peringatan dini untuk memantau dan memberi peringatan dini tentang ancaman bencana. Melakukan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pengurangan risiko bencana dan tindakan darurat. Mengendalikan pemanfaatan lahan yang rawan bencana. Pengelolaan

keanekaragaman hayati (flora dan fauna), pengendalian pencemaran lingkungan dan mitigasi ancaman perubahan iklim. Meningkatkan infrastruktur kedaruratan seperti rumah sakit, pos evakuasi, dan shelter. Meningkatkan pengelolaan air dan drainase untuk mengurangi risiko banjir. Meningkatkan kapasitas institusi pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana.

17. Memperkuat Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan di Aceh mencakup pembangunan infrastruktur, ekonomi, penanggulangan kemiskinan, perumahan, dan konektivitas antar wilayah. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi secara merata, menyelesaikan ketimpangan antar wilayah dan antar sektor, potensi wilayah tertinggal juga menjadi perhatian dan mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah terpinggirkan. Pembangunan Aceh ke depan juga berfokus pada peningkatan infrastruktur layanan dasar masyarakat dan pembangunan jalan nasional dan provinsi menjadi prioritas utama dalam menjaga konektivitas antar wilayah. Selain itu, pemerintah Aceh juga mendorong pemanfaatan lahan transmigrasi untuk menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru serta pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses layanan kesehatan dan mendorong pengembangan ekonomi lokal di wilayah pinggiran dan terpencil serta memperkuat pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

18. Memperkuat Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang berkualitas

Memmperkuat sarana dan prasarana infrastruktur yang berkualitas Pemerintah Aceh dapat melakukan beberapa upaya penting seperti: 1). mengembangkan rencana pembangunan infrastruktur jangka panjang yang komprehensif dan terintegrasi serta alokasi anggaran sesuai dengan skala prioritas; 2). meningkatkan pengembangan infrastruktur transportasi, termasuk jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara; 3). mengembangkan infrastruktur energi yang handal dan berkelanjutan; 4). memperluas akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak di seluruh wilayah Aceh; 5) meningkatkan akses dan penetrasi teknologi informasi dan komunikasi; 6) meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan; dan 7) mengembangkan infrastruktur pariwisata yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan.

# BAB III
# VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

## 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

### 3.1.1. Visi

" ACEH ISLAMI, MAJU, BERMARTABAT, DAN BERKELANJUTAN"

Visi ini mengandung empat frasa kunci sebagai berikut:

1) Islami

   Dimaknai sebagai suatu kondisi dimana seluruh Masyarakat Aceh menjalankan aktivitas dalam seluruh aspek kehidupan berlandaskan Syariat Islam.

2) Maju

   Dimaknai sebagai suatu kondisi dimana seluruh Masyarakat Aceh telah mencapai tingkat peradaban dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi

3) Bermartabat

   Dimaknai sebagai suatu kondisi dimana seluruh Masyarakat Aceh yang religius, memiliki harga diri, peradaban, pengetahuan, dan kepercayaan yang tinggi sebagai sebuah bangsa.

4) Berkelanjutan

   Dimaknai sebagai suatu kondisi dimana proses pembangunan daerah dan aktivitas kehidupan masyarakat berlangsung harmoni dengan kondisi lingkungan hidup yang tetap lestari.

### 3.1.2. Misi

Visi di atas akan dicapai melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah
2. Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas.
4. Mewujudkan insfrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional aceh, koneksitas, dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas.

6. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh, serta membina stabilitas politik dan supremasi hukum
7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya.

### 3.1.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan, diperlukan tujuan dan sasaran yang jelas dalam rencana pembangunan jangka menengah, sebagaimana diuraikan berikut.

Misi 1. Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah;
- 1.1. Meningkatkan Aqidah, Syariah, Akhlak dan Muamalah dengan sasaran sebagai berikut:
  - 1.1.1. Meningkatnya pelaksanaan syariat Islam
  - 1.1.2. Meningkatnya penyaluran terhadap pengumpulan zakat, infaq, dan sadaqah
- 1.2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan muamalah, dengan sasaran sebagai berikut:
  - 1.2.1. Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam serta kemakmuran mesjid
- 1.3. Meningkatkan pengawasan kehidupan keagamaan
  - 1.3.1. Meningkatnya pembinaan akhlak dan kerukunan antar dan sesama ummat
  - 1.3.2. Meningkatnya upaya pencegahan potensi konflik.

Misi 2. Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA;
- 2.1. Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh dengan sasaran sebagai berikut::
  - 2.1.1. Terakomodirnya butir-butir MoU Helsinki dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
  - 2.1.2. Menguatnya pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe.
  - 2.1.3. Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaraan Ketentraman dan Ketertiban.
  - 2.1.4. Terwujudnya pelaksanaan kebudayaan dan adat istiadat.
  - 2.1.5. Terwujudnya pelaksanaan keistimewaan di bidang Pendidikan.
  - 2.1.6. Terwujudnya peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Misi 3. Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas;
- 3.1. Mewujudkan kemandirian ekonomi, dengan sasaran sebagai berikut:
  - 3.1.1. Terwujudnya peningkatan produksi hilirisasi pangan utama.
  - 3.1.2. Meningkatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi.

3.1.3. Terwujudnya industrialisasi sektor unggulan.

3.2. Meningkatkan stabilitas ekonomi makro, dengan sasaran:
3.2.1. Meningkatnya penerimaan Aceh.
3.2.2. Terbukanya jaringan pasar domestik dan global.
3.2.3. Pengembangan kawasan transmigrasi berstatus mandiri.
2.3.4. Terwujudnya perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

3.3. Menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, dengan sasaran:
3.3.1. Pemanfaatan lahan-lahan terlantar dan HGU.
3.3.2 Terwujudnya lumbung pangan Aceh.
3.3.3 Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Investasi Daerah.
3.3.4. Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja Sektor Formal dan Informal.

Misi 4. Mewujudkan insfrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional aceh, koneksitas, dan berkelanjutan;

4.1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, perumahan dan pulau terluar, dengan sasaran:
4.1.1. Meningkatnya Ketahanan Air Daerah
4.1.2. Meningkatnya Volume Air Baku
4.1.3. Tersedianya jaringan air bersih
4.1.4. Meningkatnya penyediaan dan penataan perumahan dan pemukiman yang layak huni.
4.1.5. Tersedianya sarana dan prasarana perikanan.
4.1.6. Tersedianya jaringan listrik yang terkoneksi dan mandiri sampai ke pulau terluar.
4.1.7. Meningkatnya koneksitas wilayah dan pulau terluar untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan orang dan barang.

4.2. Meningkatkan kesesuian pembangunan dengan rencana tata ruang, dengan sasaran:
4.2.1. Meningkatnya kinerja perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4.2.2. Tersedianya jaringan teknologi informatika yang terkoneksi.

Misi 5. Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas ;

5.1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya Manusia, dengan sasaran:
5.1.1. Meningkatnya akses pendidikan.
5.1.2. Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang merata.
5.1.3. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat.

5.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan untuk Semua, dengan sasaran:
5.2.1. Meningkatkan kualitas kesehatan.

5.3. Menguatkan kesetaraan gender, hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas, dengan sasaran:
5.3.1. Meningkatnya partisipasi dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
5.3.2. Meningkatnya pelindungan dan keselamatan perempuan.
5.3.3. Meningkatnya pelindungan dan keselamatan anak.
5.3.4. Meningkatnya Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif.
5.3.5. Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan disabilitas dalam pembangunan

5.4. Peningkatan Prestasi Olah Raga serta Kepemudaan, dengan sasaran:
5.4.1. Meningkatnya kualitas olahraga dan kepemudaan

Misi 6. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh, membina stabilitas politik, dan supremasi hukum;
6.1. Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintah Aceh, dengan sasaran:
6.1.1. Terwujudnya tata kelola Pemerintah Aceh yang baik dan bersih (*Good Governance dan Clean Government*).
6.1.2. Tersedianya database perencanaan dan penganggaran serta pengawasan yang valid, akurat, dan terintegrasi.
6.1.3. Terwujudnya kompetensi sumberdaya aparatur pemerintah Aceh yang berintegritas dan melayani.
6.1.4. Terwujudnya sistem digitalisasi dalam pelayanan publik.

6.2. Meningkatkan stabilitas politik, dengan sasaran:
6.2.1. Terwujudnya partisipasi politik secara demokratis.

6.3. Menegakkan Implementasi hukum, dengan sasaran:
6.3.1. Terwujudnya kepatuhan hukum dalam melayani publik.
6.3.2. Terwujudnya optimalisasi peran dan fungsi APIP dalam pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan.

Misi 7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya.;
7.1. Meningkatkan pengelolaan konservasi lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, dengan sasaran:
7.1.1. Meningkatnya kualitas air.
7.1.2. Meningkatnya keanekaragaman hayati.
7.1.3. Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan.
7.1.4. Terwujudnya pengelolaaan sumber energi baru dan terbarukan.
7.2. Meningkatkan Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, dengan sasaran:
7.2.1. Meningkatnya Ketahanan Daerah.
7.2.2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

## 3.2. Keterkaitan Visi dan Misi

Untuk menjelaskan hubungan masing-masing Misi terhadap pencapaian pokok-pokok Visi dapat dilihat uraian keterkaitan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Keterkaitan Visi dan Misi Aceh Tahun 2025-2029

| Pokok Visi | Misi |
|---|---|
| Islami | Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah |
| Maju | Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas |
| | Mewujudkan infrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional Aceh, koneksitas, dan berkelanjutan |
| Bermartabat | Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas |
| | Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh, serta membina stabilitas politik dan supremasi hukum |
| | Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA |
| Berkelanjutan | Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya |

## 3.3. Penyelarasan dengan Visi dan Misi Aceh dan Nasional

Perencanaan pembanguan perencanaan nasional akan terlaksana dengan baik, sinergi dan terarah apabila didukung oleh perencanaan pembangunan daerah. Salah satunya adalah terjadinya keselarasan antara Visi dan Misi Daerah dengan Nasional. Wujud dari keselarasan Visi, Misi Aceh dan Nasional dapat dilihat pada penjelasan yang disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Penyelarasan Visi dan Misi Aceh dan Nasional Tahun 2025-2029

| Visi RPJMA 2025-2029: Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan | | Visi RPJMN 2025-2029: Bersama Indonsia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 | |
|---|---|---|---|
| Misi Aceh | | Misi (Asta Cita) | |
| 1 | Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah | 1. | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) |
| 2 | Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA | | |

| Visi RPJMA 2025-2029: Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan | | Visi RPJMN 2025-2029: Bersama Indonsia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 | |
|---|---|---|---|
| Misi Aceh | | Misi (Asta Cita) | |
| 3 | Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas | 2 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |
| | | 5 | Melanjutkan hilirisasi dan membangun industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri |
| | | 6 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan |
| | | 3 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi |
| 4 | Mewujudkan insfrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional Aceh, koneksitas, dan berkelanjutan | 3 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi |
| 5 | Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas | 4 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas |
| 6 | Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh, serta membina stabilitas politik dan supremasi hukum | 7 | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. |
| 7 | Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya | 8 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. |

*Keterangan: Nomor sesuai dengan urutan Misi.*

## 3.4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh

Untuk mendukung pencapaian Visi, Misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan indikator dari tujuan dan sasaran yang disertai dengan target dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Uraian indikator dan target dimaksud dapat dilihat sebagaimana yang disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh, 2025-2030 Berdasarkan Misi

| No | Misi/Tujuan/Sasaran | Indikator | Satuan | Baseline | | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 (R) | 2025 (T) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | Misi - 1. Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Meningkatkan Aqidah, Syariah, dan Akhlak | Indeks Pembangunan Syariat | Indeks | | 80,00 - 87,00 | 80,63 - 87,50 | 81,25 - 88,00 | 81,87 - 88,5 | 82,50 - 89,00 | 83,13 - 89-50 |
| 1.1.1. | Meningkatnya pelaksanaan syariat Islam | Persentase dayah yang mandiri | % | 42,02 | 44,00 | 47,19 | 50,38 | 53,56 | 56,75 | 59,94 |
| 1.1.2. | Meningkatnya penyaluran terhadap pengumpulan zakat, infaq, dan sadaqah | Indeks Zakat Nasional Aceh | Indeks | 0,53 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 |
| 1.2. | Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan muamalah | Rasio Aset Perbankan Syariah/PDRB (ADHB) | % | 26,78 | 27,27 | 27,72 | 28,23 | 29,21 | 30,13 | 31,05 |
| 1.2.1. | Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjalankan Syariat Islam serta kemakmuran mesjid | Indeks kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjalankan syariat islam | % | 83,00 | 83,50 | 84,00 | 85,00 | 86,00 | 87,00 | 88,00 |
| 1.3. | Meningkatkan pengawasan kehidupan keagamaan | Tingkat kepatuhan Masyarakat dalam menjalankan ajaran agama | Indeks | | | | | | | |
| 1.3.1. | Meningkatnya pembinaan akhlak dan kerukunan antar dan sesama ummat | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | Indeks | | 73,7 - 73,81 | 74,08 - 74,26 | 74,46 - 74,71 | 74,84 - 75,15 | 75,22-75,60 | 75,60 - 76,05 |

| No | Misi/Tujuan/Sasaran | Indikator | Satuan | Baseline | | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 (R) | 2025 (T) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.3.2. | Meningkatnya upaya pencegahan potensi konflik. | Persentase potensi konflik yang tertangani | % | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Misi - 2. Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA | | | | | | | | | |
| 2.1. | Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh | Persentase kajian wali nanggroe terhadap implementasi MoU Helsinki dan UUPA | % | | | | | | | |
| 2.1.1. | Terakomodirnya butir-butir MoU Helsinki dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh | Indeks perdamaian Aceh | Indeks | | | | | | | |
| 2.1.2 | Menguatnya pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe. | Persentase pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga Wali Nanggroe | % | | | | | | | |
| 2.1.3. | Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaraan Ketentraman dan Ketertiban. | Indek Pelaksanaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) | Indeks | 51,25 | 52,50 | 53,75 | 55,00 | 56,25 | 57,50 | 58,75 |
| | | Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban | | | | | | | | |

| No | Misi/Tujuan/Sasaran | Indikator | Satuan | Baseline | | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 (R) | 2025 (T) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.1.4. | Terwujudnya pelaksanaan kebudayaan dan adat istiadat. | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | Indeks | 55,33 | 56,53-56,56 | 57,11 - 57,15 | 57,69 - 57,74 | 58,27 - 58,33 | 58,85-58,92 | 59,43 - 59,51 |
| 2.1.5. | Terwujudnya pelaksanaan keistimewaan di bidang pendidikan. | Persentase penerapan kurikulum pendidikan islami dan ke-Aceh-an di kabupaten/kota | % | 15,12 | 17,39 | 34,78 | 52,17 | 69,67 | 78,26 | 86,96 |
| 2.1.6. | Terwujudnya peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. | Persentase fatwa dan tausiyah yang telah ditetapkan untuk diterapkan | % | | | | | | | |
| | Misi - 3. Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas. | | | | | | | | | |
| 3.1. | 3.1. Mewujudkan kemandirian ekonomi | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,15 | 4,51 - 4,74 | 4,74 - 5,00 | 5,00 - 5,29 | 5,29 - 5,69 | 5,69 - 6,09 | 6,09 - 6,60 |
| 3.1.1. | 3.1.1. Terwujudnya peningkatan produksi hilirisasi pangan utama. | Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks) | Indeks | 119,25 | 117,66 | 119,74 | 121,81 | 123,89 | 125,96 | 128,04 |
| 3.1.2. | 3.1.2. Meningkatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi. | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | % | 3,70 | 3,78 | 3,87 | 3,87 | 3,95 | 4,03 | 4,11 |
| | | Peringkat Inovasi Daerah | Peringkat | | 13,00 | 12,60 | 12,20 | 11,80 | 11,40 | 11,00 |
| | | Presentase Dana untuk Inovasi dari APBA | % | | 0,50 | 0,56 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,81 |
| 3.1.3. | 3.1.3. Terwujudnya industrialisasi sektor unggulan. | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)* | Ribu Orang | 34,10 | 34,78 | 35,48 | 36,42 | 36,91 | 37,65 | 38,40 |

| No | Misi/Tujuan/Sasaran | Indikator | Satuan | Baseline | | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 (R) | 2025 (T) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%) | % | 0,34 | 3,32 | 3,34 | 3,35 | 3,40 | 3,45 | 3,47 |
| | | Proporsi UMKM terhadap jumlah angkatan kerja (%) (sebagai proxy proporsi PDRB ekonomi kreatif) | % | NA | 16,41 | 16,48 | 16,54 | 16,61 | 16,67 | 16,74 |
| | | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) | % | 4,61 - 5,28 | 5,20 – 5,30 | 5,31 - 5,41 | 5,42 - 5,53 | 5,53 - 5,63 | 5,64-5,75 | 5,75 - 5,86 |
| | | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)* | % | 1,72 | 1,84 | 1,90 | 1,97 | 2,03 | 2,09 | 2,16 |
| | | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) | % | 0,62 | 0,78 | 0,85 | 0,96 | 1,02 | 1,49 | 1,20 |
| 3.2. | Meningkatkan stabilitas ekonomi makro | Inklusi Keuangan (%) | % | 89,87 (2022) | 94,91 | 95,17 | 95,43 | 95,69 | 95,95 | 96,21 |
| | | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | % | | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| | | Rasio gini (Indeks) | Indeks | 0,29 | 0,290 - 0,293 | 0,287 - 0,291 | 0,284 - 0,289 | 0,281 - 0,287 | 0,278 - 0,285 | 0,275 - 0,283 |
| | | Tingkat Inflasi (%) | % | 2,17 | 1,5 – 3,5 | 1,5 – 3,5 | 1,5 – 3,5 | 1,5 – 3,5 | 1,33-3,30 | 1,29 - 3,25 |
| | | Tingkat Kemiskinan (%) | % | 12,64 | 12,00 - 13,00 | 11,27 - 12,24 | 10,54 - 11,48 | 9,8 - 10,72 | 9,08-9,96 | 8,35 - 9,00 |
| 3.2.1. | Meningkatnya penerimaan Aceh. | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) | % | | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,19 | 1,21 | 1,23 |
| 3.2.2. | Terbukanya jaringan pasar domestik dan global. | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) | % PDRB | 53,36 | 53,76 | 54,46 | 55,16 | 55,86 | 56,59 | 57,26 |

| No | Misi/Tujuan/Sasaran | Indikator | Satuan | Baseline | | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 (R) | 2025 (T) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | Indeks Harga Konsumen | % | 107,21 | 110,00 | 110,00 | 109,00 | 108,00 | 107,00 | 106,00 |
| 3.2.3. | Meningkatnya Pengembangan kawasan transmigrasi berstatus mandiri | Persentase kawasan transmigrasi berstatus mandiri | % | | 14,29 | 14,28 | 28,57 | 35,71 | 40,00 | 42,86 |
| 3.2.4. | Terwujudnya perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi | Persentase Desa Mandiri | % | | 0,54 | 0,95 | 1,36 | 1,77 | 2,18 | 2,59 |
| 3.3. | Menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal | PDRB per kapita (Rp Juta) | Rp Juta | 27,68 | 44,23 - 44,41 | 53 - 55,12 | 61,77 - 65,83 | 70,54 - 76,54 | 79,31 - 87,25 | 88,08 - 97,96 |
| | | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | % | 5,75 | 4,60 – 5,28 | 4,53 - 5,23 | 4,46 - 5,18 | 4,39 - 5,13 | 4,32-5,08 | 4,25 - 5,03 |
| 3.3.1. | Meningkatnya Pemanfaatan lahan-lahan terlantar dan HGU. | Persentase pemanfaatan lahan terlantar | % | 0,00 | 14,53 | 15,64 | 17,32 | 18,99 | 20,11 | 26,82 |
| | Terwujudnya lumbung pangan Aceh. | Indeks Ketahanan Pangan | Indeks | 73.,94 | 75,14 | 76,34 | 77,54 | 78,74 | 79,94 | 81,14 |
| | | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment* (%) | % | 9,10 | 8,48 | 7,99 | 7,49 | 7,00 | 6,50 | 6,01 |
| 3.3.3. | Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Investasi Daerah | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | % PDRB | | 32,48 | 32,18 | 31,89 | 31,59 | 31,29 | 30,99 |

| No | Misi/Tujuan/Sasaran | Indikator | Satuan | Baseline | | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 (R) | 2025 (T) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 3.3.4. | Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja Sektor Formal dan Informal | Persentase lapangan kerja Menurut Status Formal dan Informal | % | | 42 : 58 | 43,9 : 56,1 | 45,8 : 54,2 | 47,7 : 52,3 | 49,6 : 50,4 | 51,5 : 48,5 |
| | | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal | % | NA | 42,00 | 44,38 | 46,75 | 49,13 | 51,50 | 53,88 |
| | Misi - 4. Mewujudkan insfrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional aceh, koneksitas, dan berkelanjutan. | | | | | | | | | |
| 4.1. | Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, perumahan dan pulau terluar | Indeks Williamson | Indeks | 0,40 | | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,38 |
| 4.1.1. | Meningkatnya Ketahanan Air Daerah. | Indeks Ketahanan Air Daerah | Indeks | 3,54 | 3,58 | 3,61 | 3,65 | 3,69 | 3,72 | 3,76 |
| 4.1.2. | Meningkatnya Volume Air Baku. | Kapasitas Air Baku (m3/detik) | m3/detik | | 0,19 | 0,65 | 1,11 | 1,57 | 2,03 | 2,49 |
| 4.1.3. | Tersedianya jaringan air bersih. | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) | % | | 30,47 | 34,82 | 39,16 | 43,51 | 47,85 | 52,20 |
| 4.1.4. | Meningkatnya penyediaan dan penataan perumahan dan pemukiman yang layak huni. | Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) | % | | 68,50 | 70,47 | 72,44 | 74,41 | 76,38 | 78,35 |
| 4.1.5. | Tersedianya sarana dan prasarana perikanan | Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%) | % | 5,63 | 5,63 | 5,70 | 5,72 | 5,74 | 5,76 | 5,65 |

| No | Misi/Tujuan/Sasaran | Indikator | Satuan | Baseline | | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 (R) | 2025 (T) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 4.1.6. | Tersedianya jaringan listrik yang terkoneksi dan mandiri sampai ke pulau terluar. | Rasio Elektrifikasi | % | 99,20 | 99,45 | 99,60 | 99,72 | 99,83 | 99,92 | 99,99 |
| 4.1.7. | Meningkatnya koneksitas wilayah dan pulau terluar untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan orang dan barang | Rasio Konektivitas | Rasio | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,76 |
| 4.2. | Meningkatkan kesesuian pembangunan dengan rencana tata ruang | Persentase kesesuain pembangunan dengan tata ruang | % | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 78,00 | 80,00 |
| 4.2.1. | Meningkatnya kinerja perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang. | Persentase kepatuhan pembangunan terhadap rencana tataruang | % | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 78,00 | 80,00 |
| 4.2.2. | Tersedianya jaringan teknologi informatika yang terkoneksi. | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Indeks | | 5,70 | 5,80 | 5,90 | 6,00 | 6,10 | 6,20 |
| | Misi - 5. Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas | | | | | | | | | |
| 5.1. | Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya Manusia | Indeks Modal Manusia | Indeks | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 |
| 5.1.1. | Meningkatnya akses pendidikan. | Harapan Lama Sekolah | Tahun | | 14,66-14,68 | 14,77 - 14,78 | 14,88 - 14,89 | 14,98 - 14,98 | 15,06 - 15,09 | 15,16 - 15,19 |

| No | Misi/Tujuan/Sasaran | Indikator | Satuan | Baseline | | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 (R) | 2025 (T) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 5.1.2. | Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang merata. | Kualitas Pendidikan (SPM) | % | 69,33 | 70,67 | 73,17 | 75,67 | 78,17 | 80,67 | 83,17 |
| | | Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca | % | NA | 8,70 – 13,04 | 9,00 – 26,36 | 9,29 - 39,68 | 9,59 - 53 | 9,88 - 66,32 | 10,18 - 79,63 |
| | | Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi | % | NA | 0,00 – 4,35 | 3,81 - 8,16 | 7,61 - 11,96 | 11,42 - 15,76 | 15,22-19,57 | 19,03 - 23,38 |
| | | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | % | | 58,19 | 59,24 | 60,29 | 61,34 | 62,39 | 63,44 |
| | | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca | % | | 27,18-29,18 | 27,42 - 38,17 | 27,67 - 47,17 | 27,91 - 56,15 | 28,15-65,15 | 28,39 - 74,14 |

| No | Misi/Tujuan/Sasaran | Indikator | Satuan | Baseline | | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 (R) | 2025 (T) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi | % | | 22,94-24,94 | 25,19 - 27,19 | 27,45 - 29,45 | 29,70 - 31,69 | 31,95-33,95 | 34,20 - 36,20 |
| | | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) | % | | 13,58 | 13,66 | 13,74 | 13,81 | 13,89 | 13,97 |
| | | Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) | Tahun | | 10,20-10,21 | 10,37 - 10,39 | 10,55 - 10,57 | 10,72 - 10,74 | 10,89-10,92 | 11,07 - 11,10 |
| 5.1.3. | Meningkatnya Minat Baca Masyarakat | Tingkat Kegemaran Membaca | Indeks | 69,93 | 73,28 | 72,00 | 73,20 | 74,50 | 75,50 | 77,00 |
| 5.2. | Meningkatnya Derajat Kesehatan untuk Semua | Usia Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 70,44 | 73,28 | 73,60 | 73,93 | 74,25 | 74,57 | 74,89 |
| 5.2.1. | Meningkatnya kualitas kesehatan | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%) | % | NA | 92,29 | 93,21 | 94,13 | 95,05 | 95,97 | 96,89 |
| | | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%) | % | NA | 71,00 | 72,50 | 74,00 | 75,50 | 77,00 | 78,50 |
| | | Usia Harapan Hidup Sehat (UHHS) | | | | | | | | |

| No | Misi/Tujuan/Sasaran | Indikator | Satuan | Baseline | | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 (R) | 2025 (T) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 5.3. | Menguatkan kesetaraan gender, hak perempuan,anak dan penyandang disabilitas | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | Indeks | 65,70 | 66,00 | 66,35 | 66,70 | 67,00 | 67,35 | 67,75 |
| 5.3.1. | Meningkatnya partisipasi dan kesetaraan gender dalam pembangunan. | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,39 | 0,38 |
| 5.3.2. | Meningkatnya pelindungan dan keselamatan perempuan. | Indeks Pemberdayaan Gender | Indeks | | | | | | | |
| 5.3.3. | Meningkatnya pelindungan dan keselamatan anak. | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks | 66,34 | 68,34 | 70,34 | 72,34 | 74,34 | 76,34 | 78,34 |
| 5.3.4. | Meningkatnya Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif | Indeks Kesejahteraan Sosial | Indeks | NA | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 5.3.5. | Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan disabilitas dalam pembangunan | Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) | % | | 22,00 | 24,06 | 24,06 | 26,13 | 30,25 | 28,19 |
| 5.4. | Peningkatan Prestasi Olah Raga serta Kepemudaan | Indeks Pembangunan Olahraga | Indeks | 0,46 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,60 |
| 5.4.1. | Meningkatnya kualitas olahraga dan kepemudaan | Indeks Pembangunan Pemuda | Angka | | 62,00 | 64,00 | 66,00 | 68,00 | 70,00 | 72,00 |

| No | Misi/Tujuan/Sasaran | Indikator | Satuan | Baseline | | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 (R) | 2025 (T) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | Misi - 6. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh, membina stabilitas politik, dan supremasi hukum. | | | | | | | | | |
| 6.1. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintah Aceh | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 79,69 | 81,00 | 82,00 | 83,00 | 84,00 | 85,00 | 86,00 |
| 6.1.1. | Terwujudnya tata kelola Pemerintah Aceh yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Government) | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 4,45 | 4,47 | 4,50 | 4,53 | 4,55 | 4,57 | 4,60 |
| | | Opini BPK | Opini | | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 6.1.2. | Tersedianya database perencanaan dan penganggaran serta pengawasan yang valid, akurat, dan terintegrasi | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | Indeks | 91,77 | 93,00 | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 |
| 6.1.3. | Terwujudnya kompetensi sumberdaya aparatur pemerintah Aceh yang berintegritas dan melayani. | Indeks Profesionalisme ASN | Indeks | 76,76 | | 84.55 | 85,00 | 85.5 | 86,00 | 87,00 |
| 6.1.4. | Terwujudnya sistem digitalisasi dalam pelayanan publik. | Indeks Transformasi Digital | Indeks | 49,47 | 50,10 | 50,73 | 51,36 | 51,99 | 52,62 | 53,25 |
| 6.2. | Meningkatkan stabilitas politik | Indeks Demokrasi Indonesia | Indeks | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi |
| 6.2.1. | Terwujudnya partisipasi politik secara demokratis | Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi | Indeks | 73,12 | 75,90 | 76,00 | 76,10 | 76,20 | 76,30 | 76,40 |

| No | Misi/Tujuan/Sasaran | Indikator | Satuan | Baseline | | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 (R) | 2025 (T) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 6.3. | Menegakkan Implementasi hukum | Indeks Pembangunan Hukum | Indeks | | | | | | | |
| 6.3.1. | Terwujudnya kepatuhan hukum dalam melayani publik | Indeks Reformasi Hukum | Indeks | 67,80 | 68,00 | 69,00 | 70,00 | 71,00 | 72,00 | 73,00 |
| 6.3.2. | Terwujudnya optimalisasi peran dan fungsi APIP dalam pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan | Maturitas SPIP terintegrasi | Level | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | Misi - 7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya. | | | | | | | | | |
| 7.1. | Meningkatkan pengelolaan konservasi lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | | 82,89 | 83,06 | 83,27 | 83,40 | 83,57 | 83,74 |
| 7.1.1. | Meningkatnya kualitas air | Indeks Kualitas Air (IKA) | Indeks | 63,25 | 77,25 | 77,57 | 77,77 | 77,97 | 78,17 | 78,37 |
| 7.1.2. | Meningkatnya keanekaragaman hayati | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah | Indeks | | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 7.1.3. | Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan. | Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%) | % | 0,00 | 5,00 | 10,31 | 15,63 | 20,94 | 26,25 | 31,56 |
| 7.1.4. | Terwujudnya pengelolaaan sumber energi baru dan terbarukan | Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)* | SBM/Rp milyar | 108,19 | 107,25 | 106,62 | 106,00 | 105,39 | 104,78 | 104,17 |

| No | Misi/Tujuan/Sasaran | Indikator | Satuan | Baseline | | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 (R) | 2025 (T) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) | % | 7,08 | 29,55 | 30,89 | 32,23 | 33,56 | 34,90 | 36,24 |
| 7.2. | Meningkatkan Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | Indeks Risiko Bencana (IRB) | Indeks | 144,29/ Tinggi | 143/ Sedang | 142/ Sedang | 141/ Sedang | 140/ Sedang | 139/ Sedang | 138/ Sedang |
| 7.2.1. | Meningkatnya Ketahanan Daerah | Indeks Ketahanan Daerah | Indeks | 0,54/ sedang | 0,54/ sedang | 0,55/ sedang | 0,56/ sedang | 0,57/ sedang | 0,58/ sedang | 0,6/ sedang |
| 7.2.2. | Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) | Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) Kumulatif | % | | 18,54 | 19,72 | 20,09 | 22,08 | 23,26 | 24,44 |
| | | Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) Tahunan | % | | 29,56 | 32,43 | 35,29 | 38,16 | 41,02 | 43,89 |

## 3.5. Pentahapan Pembangunan Aceh 2026-2030

Pentahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pentahapan ini terdiri atas 5 tahapan pembangunan yang mempertimbangkan kebijakan dan strategi prioritas untuk masing-masing tahapan. Tahap pertama RPJMA dilaksanakan pada tahun 2026 yang difokuskan untuk menurunkan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Kebijakan dan strategi untuk tahap selanjutnya pada dilihat secara rinci pada Error! Reference source not found..

| Tahap | Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan |
|---|---|
| TAHAP I (2026) | Arah kebijakan pembangunan Aceh Tahap I difokuskan pada :<br>1. Penguatan implementasi Syariat Islam, kekhususan dan keistimewaan, dan perdamaian Aceh dengan strategi, yaitu :<br>a. Penguatan perdamaian dan penjaminan stabilitas Aceh-Nasional;<br>b. Pemerataan pembangunan antar kabupaten-kota dan wilayah pedesaan dalam upaya penurunan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;<br>c. Pengawalan keberlanjutan dana Otonomi Khusus sebagai sumber utama pembangunan; dan<br>d. Peningkatan kapasitas dan peran Wali Nanggroe sebagai lembaga pengawal perdamaian Aceh.<br>2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas. Arah kebijakan pembangunan untuk penguatan kekhususan dan keistimewaan, dan perdamaian Aceh dilakukan dengan strategi, yaitu :<br>a. Membangun infrastruktur yang terintegrasi untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah; dan<br>b. Membangun infrastruktur pendukung investasi sesuai standar negara maju. |
| TAHAP II (2027) | Arah kebijakan pembangunan Aceh pada Tahap II, disamping melanjutkan pembangunan pada Tahap I difokuskan pada :<br>1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, sains dan teknologi dilakukan dengan strategi, yaitu :<br>a. Beasiswa unggulan Aceh yang inklusif;<br>b. Pembangunan sekolah-sekolah unggul; dan<br>c. Peningkatan kualitas fasilitas pendidikan dan guru<br>2. Tata kelola birokrasi dan kemandirian fiskal daerah dilakukan dengan strategi, yaitu :<br>a. Penciptaan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, profesional, dan berintegritas;<br>b. Peningkatan kapasitas badan pengelolaan keuangan Aceh;<br>c. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah untuk mendukung kemandirian fiskal; dan peningkatan profesionalisme ASN. |

| Tahap | Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan |
|---|---|
| TAHAP III (2028) | Arah kebijakan pembangunan Aceh pada Tahap III di samping melanjutkan pembangunan pada Tahap II, difokuskan pada:<br>1. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia, hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan maritime, dilakukan dengan strategi, yaitu :<br>a. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan hasil laut;<br>b. Penyiapan tenaga kerja terampil yang sesuai dan dibutuhkan oleh usaha hilirisasi dan industrialisasi;<br>c. Penyediaan infrastruktur pendukung hilirisasi dan industrilisasi; dan<br>d. Penyusunan regulasi kemudahan berinvestasi.<br>2. Transformasi digital yang terintegrasi, dilakukan dengan strategi, yaitu :<br>a. Pembangunan dan penguatan infrastruktur digital pemerintahan; dan<br>b. Peningkatan kapasitas SDM berbasis teknologi informasi yang layak dan mantap |
| TAHAP IV (2029) | Arah kebijakan pembangunan Aceh pada Tahap IV di samping melanjutkan pembangunan pada Tahap III, difokuskan pada:<br>1. Penurunan tingkat kemiskinan masyarakat Aceh, dilakukan dengan strategi, yaitu :<br>a. Pembangunan Sumber Daya Manusia dan perlindungan sosial yang adaptif;<br>b. Percepatan penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin;<br>c. Menciptakan swasembada pangan dan energi; dan<br>d. Mewujudkan ekonomi hijau dan ekonomi biru<br>2. Penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan, dilakukan dengan strategi, yaitu :<br>a. Peningkatan akses kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan; dan<br>b. Pemenuhan infrastruktur dasar pendukung perekonomian. |
| TAHAP V (2030) | Arah kebijakan pembangunan Aceh Tahap V yang merupakan tahun transisi, di samping melanjutkan pembangunan tahap sebelumnya, difokus pada :<br>1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, dilakukan dengan strategi, yaitu :<br>a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi hijau dan biru; dan<br>b. Pembentukan dana abadi lingkungan dan dana CSR yang bersumber dari hilirisasi sumber daya alam dan maritim secara berkelanjutan. |

## 3.6. Rumusan Program Prioritas

Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari Visi, misi, tujuan dan sasaran sampai dengan *outcome* yang dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya. Program prioritas yang disusun diimplementasikan oleh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. rumusan program prioritas RPJMA Tahun 2025-2029 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.*4*.

Tabel 3.4.
Rumusan Program Prioritas RPJMA Tahun 2026-2030

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| Misi - 1. Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah. | | | | |
| 1.1. | Meningkatkan Aqidah, Syariah, dan Akhlak | Meningkatnya Kualitas dan Pemahaman Syariat Islam Masyarakat yang tergambar dari Kuatnya Aqidah, Syariat dan Akhlak | | Indeks Pembangunan Syariat |
| 1.1.1. | Meningkatnya pelaksanaan syariat Islam | Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Dayah dalam Penguatan pelaksanaan Syariat Islam | | Persentase dayah yang mandiri |
| | | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dayah, kompetensi kurikulum dan tenaga pengajar serta kuantitas sarana belajar mengajar | 07. Program Pendidikan Dayah | Indeks kompetensi kurikulum dayah |
| | | | | Indeks Standarisasi Dayah Aceh (ISDA) |
| | | | | Persentase kelengkapan sarana belajar mengajar |
| | | | | Persentase kompetensi tenaga pengajar/teungku dayah |
| 1.1.2. | Meningkatnya penyaluran terhadap pengumpulan zakat, infaq, dan sadaqah | Meningkatnya indeks zakat Aceh | | Indeks Zakat Nasional Aceh |
| | | Meningkatnya Pengelolaan Ziswaf untuk penguatan ekonomi ummat | 04. Program Baitul Mal Aceh | Indeks Wakaf Nasional Aceh |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Persentase Penyaluran terhadap Pengumpulan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya |
| 1.2. | Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan muamalah | Meningkatnya Rasio Aset Perbankan Syariah dan sertifikasi produk halal | | Rasio Aset Perbankan Syariah/PDRB (ADHB) |
| 1.2.1. | Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjalankan Syariat Islam serta kemakmuran mesjid | Meningkatnya aktifitas pengajian (beuet) Alquran dan kemakmuran | | Indeks kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjalankan syariat islam |
| 1.3. | Meningkatkan pengawasan kehidupan keagamaan | Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama | | Tingkat kepatuhan Masyarakat dalam menjalankan ajaran agama |
| 1.3.1. | Meningkatnya pembinaan akhlak dan kerukunan antar dan sesama ummat | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat serta menurunnya persentase konflik sosial | | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) |
| | | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat | 05. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Persentase masyarakat yang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi dalam rangka Pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial dan budaya |
| 1.3.2. | Meningkatnya upaya pencegahan potensi konflik. | Meningkatnya upaya pencegahan penyebaran aliran sesat dan radikalisme | | Persentase potensi konflik yang tertangani |
| | | Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan | 06. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase penanganan potensi konflik sosial |
| | | Meningkatnya Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Masyarakat melalui pengelolaan mesjid berbasis aktifitas (magrib sampai isya mengaji) dan meningkatnya pemahaman serta ketaatan masyarakat dalam pelaksanaan syariat Islam. | 02. Program Syariat Islam Aceh | Persentase mesjid yang tertata manajemen dan kemakmurannya |
| Misi - 2. Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA | | | | |
| 2.1. | Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh | Meningkatnya tindak lanjut peraturan, keputusan, pertimbangan dan rekomendasi Wali Nanggroe | | Persentase kajian wali nanggroe terhadap implementasi MoU Helsinki dan UUPA |
| 2.1.1. | Terakomodirnya butir-butir MoU Helsinki dalam Undang-Undang Republik | Terlaksananya pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi, jaminan sosial dan pendidikan bagi mantan kombatan, tapol/napol Aceh | | Indeks perdamaian Aceh |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh | dan masyarakat korban konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat | | |
| | | Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Korban Konflik dan Mantan Kombatan | 05. Program Reintegrasi Aceh | Persentase korban konflik yang mendapatkan rehabilitasi sosial |
| | | | | Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi |
| | | Terdatanya korban pelanggaran HAM yang mendapatkan rekomendasi KKR Aceh | 05. Program Reintegrasi Aceh | Persentase korban pelanggaran HAM yang direkomendasikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh |
| 2.1.2. | Menguatnya pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe. | Terpenuhinya kelengkapan perangkat kerja lembaga Wali Nanggroe | | Persentase pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga Wali Nanggroe |
| | | Meningkatnya Peran Lembaga Wali Nanggroe Dalam Pembangunan | 06. Program Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh | Indeks Pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe |
| 2.1.3. | Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaraan Ketentraman dan Ketertiban. | Meningkatnya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat | | Indek Pelaksanaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) |
| | | Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan dan penyelesaian pelanggaran qanun syariat islam dan kebijakan kepala daerah | 02. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase penegakan peraturan daerah |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Persentase penyelesaian pelanggaran qanun syariat islam dan kebijakan kepala daerah |
| | | | | Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban |
| | | Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakatn | | Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban |
| 2.1.4. | Terwujudnya pelaksanaan kebudayaan dan adat istiadat. | Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan Aceh | | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) |
| | | Meningkatnya Peran Lembaga Adat Aceh | 07. Program Majelis Adat Aceh (MAA) | Indeks Adat Istiadat Aceh |
| | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan | 02. Program Pengembangan Kebudayaan | Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan |
| | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional | 03. Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan |
| 2.1.5. | Terwujudnya pelaksanaan keistimewaan di bidang pendidikan. | Meningkatnya pemahaman generasi Aceh terhadap identitas dan keislaman | | Persentase penerapan kurikulum pendidikan islami dan ke-Aceh-an di kabupaten/kota |
| | | Meningkatnya Peran Majelis Pendidikan Aceh | 08. Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh | Jumlah kebijakan yang dihasilkan dibandingkan dengan target atau kebutuhan kebijakan. |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.6. | Terwujudnya peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. | Meningkatnya penerapan fatwa dan tausiyah yang telah ditetapkan | | Persentase fatwa dan tausiyah yang telah ditetapkan untuk diterapkan |
| | | Meningkatnya Peran Ulama Dalam Pembangunan | 03. Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh | Persentase Fatwa dan Tausyiah yang ditetapkan |
| Misi - 3. Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas. | | | | |
| 3.1. | Mewujudkan kemandirian ekonomi | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah | | Pertumbuhan Ekonomi |
| 3.1.1. | Terwujudnya peningkatan produksi hilirisasi pangan utama. | Meningkatnya ketahanan pangan daerah dan Menigkatnya Nilai Tukar Petani | | Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks) |
| 3.1.2. | Meningkatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi. | Meningkatnya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif | | Peringkat Inovasi Daerah |
| | | Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah serta fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah | 03. Program Riset dan Inovasi Daerah | Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah |
| | | | | Persentase kajian berabasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya sistem pengelolaan pemerintahan berbasi elektronik | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |
| | | Meningkatnya hasil inovasi daerah | | Presentase Dana untuk Inovasi dari APBA |
| 3.1.3. | Terwujudnya industrialisasi sektor unggulan. | Meningkatnya jumlah industri pengolahan secara fokus dan terintegrasi berbasis digital | | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) |
| | | Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara | | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)* |
| | | Meningkatnya Kontribusi Sektor Kepariwisataan Terhadap PDRB | | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)* |
| | | Meningkatnya Populasi UMKM Pada Level Provinsi | | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%) |
| | | Meningkatnya Usaha Berbasis Koperasi Aktif | | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) |
| | | Meningkatnya daya saing UMKM | 08. Program Pengembangan Umkm | Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil |
| | | Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata | 02. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Persentase pertumbuhan Kunjungan Wisatawan mancanegara dan nusantara |
| | | Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata | 03. Program Pemasaran Pariwisata | Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata |
| | | Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian | 07. Program Penyuluhan Pertanian | Indek Terima Peternak (ItPt) |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif | 05. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi |
| | | Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri | 07. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Rasio Kewirausahaan Daerah |
| | | Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif | 04. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual |
| | | Meningkatnya kualitas penzinan berusaha sektor perindustrian | 03. Program Pengendalian Izin Usaha Industri | Persentase jumlah izin yang dikeluarkan |
| | | | 07. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Proporsi penggunaan produk lokal dalam promosi yang difasilitasi (%) |
| | | Meningkatnya pemanfaatan informasi industri | 04. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Persentase kepatuhan pelaporan informasi industri |
| | | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi | 03. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase Koperasi Sehat |
| | | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | 04. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Bakteri yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Parasit yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak |
| | | | | Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Virus yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak |
| | | Meningkatnya produktivitas koperasi | 06. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Jumlah Koperasi meningkat kapasitas produksinya |
| | | Meningkatnya realisasi pembangunan industri dan sertifikasi produk halal | 02. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Jumlah produk tersertifikasi halal |
| | | | | Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%) |
| | | Meningkatnya jumlah UMKM | | Proporsi UMKM terhadap jumlah angkatan kerja (%) (sebagai proxy proporsi PDRB ekonomi kreatif) |
| 3.2. | Meningkatkan stabilitas ekonomi makro | Meningkatnya kontribusi PDRB Provinsi terhadap PDB | | Kontribusi PDRB Provinsi (%) |
| | | Meningkatnya kualitas pengelolaan produk dan layanan keuangan yang mudah diakses serta Terkendalinya Inflasi Daerah | | Inklusi Keuangan (%) |
| | | | | Tingkat Inflasi (%) |
| | | Menurunnya angka kemiskinan Aceh | | Tingkat Kemiskinan (%) |
| | | Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat | | Rasio gini (Indeks) |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.1. | Meningkatnya penerimaan Aceh. | Meningkatnya Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Aceh (PAA) | | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) |
| | | Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan | 04. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase kemandirian fiskal Aceh |
| 3.2.2. | Terbukanya jaringan pasar domestik dan global. | Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa | | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) |
| | | Terkendalinya harga ditingkat konsumen | | Indeks Harga Konsumen |
| | | Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | 04. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat provinsi |
| | | Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha | 02. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Persentase fasilitasi pelaku usaha dalam izin perdagangan |
| | | Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi | 03. Program Peningkatan Sarana distribusi Perdagangan | Menjamin ketersediaan stok bapokting dan keterjangkauan harga |
| | | Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor | 05. Program Pengembangan Ekspor | Persentase peningkatan ekspor |
| | | Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | 05. Program Pengembangan Ekspor | Nilai Ekspor bersih Aceh |
| | | Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk | 06. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | Persentase penanganan pengaduan konsumen |
| 3.2.3. | Meningkatnya Pengembangan kawasan transmigrasi berstatus mandiri | Meningkatnya kawasan transmigrasi yang berstatus mandiri | | Persentase kawasan transmigrasi berstatus mandiri |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi | 04. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Persentase transmigrasi yang dibina dan diberdayakan |
| 3.2.4. | Terwujudnya perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi | Meningkatnya persentase desa mandiri | | Persentase Desa Mandiri |
| | | Meningkatnya efektivitas kerja sama gampong | 03. Program Peningkatan Kerja Sama Desa | Persentase pembinaan kerjasama gampong berbasis kawasan perdesaan |
| | | Meningkatnya kapasitas Lembaga bisnis di gampong | 05. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Peningkatan BUMG Maju |
| | | Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan | 05. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase lembaga kemasyarakatan gampong, adat dan lembaga lainnya yang aktif |
| 3.3. | Menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal | Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat | | PDRB per kapita (Rp Juta) |
| | | Menurunnya angka pengangguran Aceh | | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) |
| 3.3.1. | Meningkatnya Pemanfaatan lahan-lahan terlantar dan HGU. | Termanfaatnya lahan dan HGU | | Persentase pemanfaatan lahan terlantar |
| | | Meningkatnya kejelasan hak milik atas tanah | 13. Program Survei, Pengukuran dan Pemetaan | Persentase penyelesaian pemetaan pertanahan |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya kejelasan hak-hak atas tanah bagi pemerintah dan masyarakat miskin | 12. Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah | Meningkatnya Kertesediaan Kepemilikan Lahan Untuk Fasilitas Publik dan Tanah Masyarakat Miskin |
| | | Meningkatnya penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan | 17. Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan | Tersusunnya Mapping/Pemetaan Sengketa dan konflik tanah dan terfasilitasinya sengketa dan konflik tanah |
| | | Meningkatnya tata kelola sistem informasi manajemen pertanahan | 16. Program Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan | Terintegrasinya sistem informasi pertanahan di kabupaten/kota se Aceh |
| | | Meningkatnya tata kelola tanah ulayat | 07. Program Penetapan Tanah Ulayat | Persentase Sengketa dan konflik tanah ulayat lintas kab/kota yang diselesaikan |
| 3.3.2. | Terwujudnya lumbung pangan Aceh. | Meningkatnya ketahanan pangan daerah dan Menigkatnya Nilai Tukar Petani | | Indeks Ketahanan Pangan |
| | | Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat yang sehat | | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment (%) |
| | | Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian | 02. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Pertumbuhan produksi telur (ayam, itik, puyuh) |
| | | | | Rasio Kabupaten yang memiliki Qanun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian | 02. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pertumbuhan Produksi daging (Ternak Besar, Kecil dan Unggas) |
| | | | | Produktivitas komoditas pangan utama (padi) |
| | | Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | 03. Program Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi |
| | | Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian | 07. Program Penyuluhan Pertanian | Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya |
| | | Meningkatnya penanganan kerawanan pangan | 04. Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase Daerah Rawan Pangan |
| | | Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan | 05. Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan |
| | | Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan | 02. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Ketersediaan Pangan Utama |
| | | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | 05. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase Keberhasilan Panen |
| 3.3.3. | Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Investasi Daerah | Meningkatnya nilai investasi Aceh | | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) |
| | | Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal | 03. Program Promosi Penanaman Modal | Pelaku Usaha/Perusahaan yang berminat berinvestasi |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya kemudahan berinvestasi | 02. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA) |
| | | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan | 04. Program Pelayanan Penanaman Modal | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan |
| | | Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal | 06. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dapat di akses |
| | | Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal | 05. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Meningkatnya Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam Penyampaian LKPM |
| 3.3.4. | Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja Sektor Formal dan Informal | Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja Formal | | Persentase lapangan kerja Menurut Status Formal dan Informal |
| | | Meningkatnya penempatan tenaga kerja | 04. Program Penempatan Tenaga Kerja | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan |
| | | Meningkatnya produktivitas tenaga kerja | 03. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja yang mendapat sertifikat kompetensi melalui pelatihan dan pemagangan yang ditempatkan |
| | | Terlindunginya hak-hak pekerja | 02. Program Perencanaan Tenaga Kerja | Persentase Angkatan Kerja yang bekerja |
| | | | 06. Program Pengawasan Ketenagakerjaan | Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya lapangan kerja sektor formal | | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal |
| Misi - 4. Mewujudkan insfrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional aceh, koneksitas, dan berkelanjutan. | | | | |
| 4.1. | Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, perumahan dan pulau terluar | Meningkatnya pemerataan pembangunan | | Indeks Williamson |
| 4.1.1. | Meningkatnya Ketahanan Air Daerah. | Meningkatnya Ketersediaan Kualitas dan Akses terhadap air serta menjaga ketersediaan air baku | | Indeks Ketahanan Air Daerah |
| | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | 05. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase Pemenuhan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Regional |
| | | | | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) |
| 4.1.2. | Meningkatnya Volume Air Baku. | Meningkatnya Ketersediaan Kualitas dan Akses terhadap air serta menjaga ketersediaan air baku | | Kapasitas Air Baku (m3/detik) |
| | | Meningkatnya distribusi air secara lancar | 02. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Persentase irigasi modern |
| | | Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | 02. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.3. | Tersedianya jaringan air bersih. | Meningkatnya rumah tangga yang berakses air minum | | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) |
| | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum | 03. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase Pemenuhan Layanan Air Minum SPAM Lintas Kab/Kota |
| 4.1.4. | Meningkatnya penyediaan dan penataan perumahan dan pemukiman yang layak huni. | Meningkatnya akses hunian layak dan terjangkau kepada masyarakat miskin | | Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) |
| | | Meningkatnya Akses Terhadap Hunian Yang Layak | 03. Program Kawasan Permukiman | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak |
| | | Meningkatnya kualitas bangunan gedung | 08. Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan |
| | | Meningkatnya penyediaan PSU permukiman | 05. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU |
| 4.1.5. | Tersedianya sarana dan prasarana perikanan | Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan | | Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%) |
| | | Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati | 05. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Luas Kawasan Konservasi (Ha) |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat | 06. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) |
| | | Meningkatnya nilai hasil perikanan yang diterima oleh nelayan | 02. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Nilai Tukar Nelayan (NTN) |
| | | Meningkatnya produksi perikanan budidaya | 04. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) |
| | | Meningkatnya produksi perikanan tangkap | 03. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) |
| 4.1.6. | Tersedianya jaringan listrik yang terkoneksi dan mandiri sampai ke pulau terluar. | Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan | | Rasio Elektrifikasi |
| | | Terpenuhinya konsumsi listrik masyarakat | 06. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan | Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)* |
| 4.1.7. | Meningkatnya koneksitas wilayah dan pulau terluar untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan orang dan barang | Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah | | Rasio Konektivitas |
| | | Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman | 10. Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap |
| | | Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat | 02. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Jalan |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut | 03. Program Pengelolaan Pelayaran | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Penyeberangan |
| 4.2. | Meningkatkan kesesuian pembangunan dengan rencana tata ruang | Meningkatnya keselarasan pembangunan dengan rencana tata ruang | | Persentase kesesuain pembangunan dengan tata ruang |
| 4.2.1. | Meningkatnya kinerja perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang. | Meningkatnya kepatuhan terhadap tataruang | | Persentase kepatuhan pembangunan terhadap rencana tataruang |
| | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | 12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA |
| 4.2.2. | Tersedianya jaringan teknologi informatika yang terkoneksi. | Meningkatnya pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung pelayanan pemerintah | | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| Misi - 5. Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas | | | | |
| 5.1. | Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya Manusia | Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat | | Indeks Modal Manusia |
| 5.1.1. | Meningkatnya akses pendidikan. | Meningkatnya Harapan Lama Sekolah | | Harapan Lama Sekolah |
| | | Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan | 05. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | Akreditasi Sekolah SLB |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Akreditasi Sekolah SMA |
| | | | | Akreditasi Sekolah SMK |
| 5.1.2. | Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang merata. | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Ditingkat Menengah dan Luar Biasa | | Kualitas Pendidikan (SPM) |
| | | Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan | 04. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Indeks Distribusi Guru SDLB |
| | | | | Indeks Distribusi Guru SMA |
| | | | | Indeks Distribusi Guru SMALB |
| | | | | Indeks Distribusi Guru SMK |
| | | | | Indeks Distribusi Guru SMPLB |
| | | | | Proporsi PTK bersertifikat SDLB |
| | | | | Proporsi PTK bersertifikat SMA |
| | | | | Proporsi PTK bersertifikat SMALB |
| | | | | Proporsi PTK bersertifikat SMK |
| | | | | Proporsi PTK bersertifikat SMPLB |
| | | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah | 02. Program Pengelolaan Pendidikan | Iklim Inklusivitas SMK |
| | | | | Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB |
| | | | | Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA |
| | | | | Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB |
| | | | | Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB |
| | | | | Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB |
| | | | | Indeks Iklim Kebhinekaan SMA |
| | | | | Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB |
| | | | | Indeks Iklim Kebhinekaan SMK |
| | | | | Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB |
| | | | | Indeks Inklusivitas SDLB |
| | | | | Indeks Inklusivitas SMA |
| | | | | Indeks Inklusivitas SMALB |
| | | | | Indeks Inklusivitas SMPLB |
| | | | | Indeks Literasi SDLB |
| | | | | Indeks Literasi SMA |
| | | | | Indeks Literasi SMALB |
| | | | | Indeks Literasi SMK |
| | | | | Indeks Literasi SMPLB |
| | | | | Indeks Numerasi SDLB |
| | | | | Indeks Numerasi SMA |
| | | | | Indeks Numerasi SMALB |
| | | | | Indeks Numerasi SMK |
| | | | | Indeks Numerasi SMPLB |
| | | | | Kepuasan Dunia Kerja terhadap Kompetensi Lulusan SMK |
| | | | | Kualitas Pembelajaran SDLB |
| | | | | Kualitas Pembelajaran SMA |
| | | | | Kualitas Pembelajaran SMALB |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Kualitas Pembelajaran SMK |
| | | | | Kualitas Pembelajaran SMPLB |
| | | | | Penyerapan Lulusan SMK |
| | | Meningkatnya jumlah pekerja pada bidang keahlian menengah tinggi | | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) |
| | | Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca | | Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca |
| | | Meningkatnya jumlah kabupaten/kotayang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi | | Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi |
| | | Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca | | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca |
| | | Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi | | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun | | Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) |
| | | Meningkatnya jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tingg | | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) |
| 5.1.3. | Meningkatnya Minat Baca Masyarakat | Meningkatnya tingkat kegemaran membaca masyarakat | | Tingkat Kegemaran Membaca |
| | | Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan | 02. Program Pembinaan Perpustakaan | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat |
| 5.2. | Meningkatnya Derajat Kesehatan untuk Semua | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat | | Usia Harapan Hidup (UHH) |
| 5.2.1. | Meningkatnya kualitas kesehatan | Meningkatnya usia harapan hidup sehat | | Usia Harapan Hidup Sehat (UHHS) |
| | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | 02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Angka Kematian Bayi (AKB) |
| | | | | Angka Kematian Ibu (AKI) |
| | | | | Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM) |
| | | | | Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) |
| | | | | Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap |
| | | | | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis |
| | | | | Persentase Kab/Kota Memenuhi Syarat Kualitas Kesehatan Lingkungan |
| | | | | Persentase Kab/Kota Mencapai Target Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) |
| | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Luar Biasa |
| | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana |
| | | | | Persentase RS Regional yang Fungsional |
| | | | | Prevalensi Stunting |
| | | | | Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita |
| | | | | Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan |
| | | Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan | 03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase fasyankes yang terpenuhi SDM kesehatan yang standar |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | 05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage)* | | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) |
| | | Meningkatnya Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) | | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%) |
| 5.3. | Menguatkan kesetaraan gender, hak perempuan,anak dan penyandang disabilitas | Meningkatnya ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga | | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga |
| 5.3.1. | Meningkatnya partisipasi dan kesetaraan gender dalam pembangunan. | Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak semua anak secara komprehensif | | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) |
| | | Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan | 02. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Indeks Pembangunan Gender |
| | | | | Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBA |
| | | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) |
| 5.3.2. | Meningkatnya pelindungan dan keselamatan perempuan. | Meningkatnya perlindungan dan keselamatan terhadap perempuan | | Indeks Pemberdayaan Gender |
| | | Menurunnya kekerasan terhadap perempuan | 03. Program Perlindungan Perempuan | Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | | | mendapatkan Layanan Komprenhensif |
| 5.3.3. | Meningkatnya pelindungan dan keselamatan anak. | Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak semua anak secara komprehensif | | Indeks Perlindungan Anak (IPA) |
| | | Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak | 05. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Tingkat pemahaman data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan |
| | | Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | 07. Program Perlindungan Khusus Anak | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) |
| | | | | Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif |
| | | Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif | 06. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) |
| | | | | Persentase kabupaten kota menuju layak anak (KLA) |
| 5.3.4. | Meningkatnya Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat | | Indeks Kesejahteraan Sosial |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial | 05. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dan Kemiskinan |
| | | | | Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi |
| | | | | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar |
| | | Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana | 06. Program Penanganan Bencana | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana |
| | | | | Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial |
| | | | | Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya |
| 5.3.5. | Meningkatnya partisipasi dan kesejahteraan disabilitas dalam pembangunan | Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal | | Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) |
| 5.4. | Peningkatan Prestasi Olah Raga serta Kepemudaan | Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi olahraga | | Indeks Pembangunan Olahraga |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| 5.4.1. | Meningkatnya kualitas olahraga dan kepemudaan | Meningkatnya Kualitas Pembangunan Olah Raga dan Kepemudaan | | Indeks Pembangunan Pemuda |
| | | Meningkatnya daya saing kepemudaan | 02. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Persentase pemuda yang dibina |
| | | Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga | 03. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan | Persentase pembinaan olahraga |
| Misi - 6. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh, membina stabilitas politik, dan supremasi hukum | | | | |
| 6.1. | Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintah Aceh | Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi | | Indeks Reformasi Birokrasi |
| 6.1.1. | Terwujudnya tata kelola Pemerintah Aceh yang baik dan bersih (*Good Governance dan Clean Government)* | Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah | | Opini BPK |
| | | Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah Aceh | | Indeks Pelayanan Publik |
| | | Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan | 08. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | Persentase Peningkatan Kualitas Penyeleggaraan pembangunan |
| | | Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat | 04. Program Kesejahteraan Rakyat | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat |
| | | Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah | 03. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah | Efektivitas kerjasama daerah |
| | | | | Nilai LPPD |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Persentase penyelesaian sengketa tapal batas wilayah |
| | | Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan | 06. Program Perekonomian dan Pembangunan | Persentase perumusan bahan kebijakan umum perekonomian yang ditindaklanjuti |
| | | Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil | 03. Program Pencatatan Sipil | Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan |
| | | | | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan |
| | | | | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan |
| | | | | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan |
| | | Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa | 07. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa |
| | | Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan serta penganggaran dan Pengawasan | 02. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRA |
| | | Meningkatnya pelayanan kepada KDH/WKDH dan masyarakat | 02. Program Pelayanan Penghubung | Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA |
| | | Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan | 04. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan |
| | | Meningkatnya tata kelola anggaran | 02. Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Indeks kualitas pelayanan keuangan |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya tata kelola aset daerah | 03. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Peningkatan kualitas laporan keuangan |
| | | Meningkatnya tata kelola organisasi dan akuntabilitas kinerja | 02. Program Penataan Organisasi | Persentase OPD yang melakukan penataan organisasi |
| 6.1.2. | Tersedianya database perencanaan dan penganggaran serta pengawasan yang valid, akurat, dan terintegrasi | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah | | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 03. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJP,RPJMA,RKPA) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |
| | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | 03. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJP,RPJMA,RKPA) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
| | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perkenomian dan SDA | 03. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJP,RPJMA,RKPA) bidang Perekonomian dan SDA |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | 02. Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan |
| | | Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah | 02. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah |
| 6.1.3. | Terwujudnya kompetensi sumberdaya aparatur pemerintah Aceh yang berintegritas dan melayani. | Meningkatnya profesionalisme ASN | | Indeks Profesionalisme ASN |
| | | Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian; 2. Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN; 3. Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN; 4. Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN | 02. Program Kepegawaian Daerah | Persentase fasilitasi pembinaan pelayanan kepegawaian kepada SKPA |
| | | Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional | 02. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal |
| | | | | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| 6.1.4. | Terwujudnya sistem digitalisasi dalam pelayanan publik. | Meningkatnya Transformasi Digital Pemerintah Daerah | | Indeks Transformasi Digital |
| | | Meningkatnya Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) | 02. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) |
| | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | 02. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) |
| | | Meningkatnya Indeks Pemerintahan Digital | 03. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Indeks Pemerintahan Digital |
| | | Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK | 03. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | Tingkat Digitalisasi Arsip |
| 6.2. | Meningkatkan stabilitas politik | Meningkatnya nilai demokrasi | | Indeks Demokrasi Indonesia |
| 6.2.1. | Terwujudnya partisipasi politik secara demokratis | Meningkatnya partisipasi partai politik dalam Pemilu secara demokrasi | | Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi |
| | | Meningkatnya etika dan budaya politik | 03. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase Masyarakat yang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas pendidikan politik |
| | | Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan | 02. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase masyarakat yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | | | pengembangan wawasan kebangsaan |
| 6.3. | Menegakkan Implementasi hukum | Meningkatnya kepercayaan publik dalam implementasi hukum | | Indeks Pembangunan Hukum |
| 6.3.1. | Terwujudnya kepatuhan hukum dalam melayani publik | Meningkatnya kepercayaan publik terhadap kepatuhan hukum | | Indeks Reformasi Hukum |
| | | Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan | 05. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Indeks penyelesaian fasilitas perundang-undangan |
| | | | | Persentase penyelesaian bantuan hukum |
| 6.3.2. | Terwujudnya optimalisasi peran dan fungsi APIP dalam pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan | Meninngkatnya kualitas hasil pengawasan terhadap kinerja pemerintahan | | Maturitas SPIP terintegrasi |
| | | Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi | 03. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Aparatur yang memenuhi kompetensi |
| | | Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan | 02. Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| Misi - 7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya. | | | | |
| 7.1. | Meningkatkan pengelolaan konservasi lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |
| 7.1.1. | Meningkatnya kualitas air | Meningkatnya kualitas air | | Indeks Kualitas Air (IKA) |
| | | Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP | 02. Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti |
| | | Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan | 06. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan hidup |
| | | Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | 09. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup |
| | | Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup | 10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup |
| | | Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | 03. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air (IKA) |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| 7.1.2. | Meningkatnya keanekaragaman hayati | Meningkatnya keanekaragaman hayati | | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah |
| | | Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) | 06. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) | Rehalibitasi lahan di sempadan sungai |
| | | Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya | 04. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya | Indeks Keanekaragaman Hayati |
| | | Meningkatnya produktivitas hasil hutan dan kualitas tutupan lahan | 03. Program Pengelolaan Hutan | Indek Tutupan Lahan (IKL) |
| | | | | Persentase Kerusakan Kawasan Hutan |
| | | | | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis |
| | | Meningkatnya ruang terbuka hijau | 04. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) |
| 7.1.3. | Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan. | Meningkatnya pengelolaan sampah secara optimal | | Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%) |
| | | Meningkatnya tata kelola persampahan | 11. Program Pengelolaan Persampahan | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) |
| | | Meninngkatnya proporsi rumah tangga yang terlayani penuh pengelolaan sampah | 11. Program Pengelolaan Persampahan | Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT) |
| 7.1.4. | Terwujudnya pengelolaaan sumber energi baru dan terbarukan | Meningkatnya pengelolaan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan | | Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)* |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) |
| | | Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan | 05. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan | Rasio ketersediaan energi baru terbarukan atau (EBT) terhadap pemakaian energi listrik |
| | | Meningkatnya tata kelola kegeologian | 02. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian | Luas Wilayah Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota |
| | | Meningkatnya tata kelola mineral dan Batubara | 03. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara | Persentase kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB |
| 7.2. | Meningkatkan Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | Meningkatnya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana | | Indeks Risiko Bencana (IRB) |
| 7.2.1. | Meningkatnya Ketahanan Daerah | Meningkatnya kemampuan daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana | | Indeks Ketahanan Daerah |
| | | Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 03. Program Penanggulangan Bencana | Indeks Ketahanan Daerah |
| | | Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran | 04. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) |
| 7.2.2. | Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) | Berkurangnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara komulatif dan tahunan | | Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) Kumulatif |

| Misi/Tujuan/Sasaran | | Outcome | Program Prioritas | Indikator |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) Tahunan |
| | | Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup | 08. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensi |
| | | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan | 05. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok usaha Perhutanan Sosial (KUPS) |
| | | | | Persentase Peningkatan Kelompok Petani Hutan |
| | | Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | 05. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) | Jumlah Limbah B3 yang dikelola |

## 3.7. Rumusan Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMA 2025-2029. Arah kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan 7 misi pembangunan yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Rumusan Arah Kebijakan RPJMA Tahun 2025-2029

| No. | Misi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| 1 | Misi 1 - Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah | Arah Kebijakan Misi 1 dalam mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah diarahkan pada 1. Peningkatan Aqidah, Syariah, Akhlak, dan Muamalah melalui peningkatan pelaksanaan syariat Islam; peningkatan penyaluran terhadap pengumpulan zakat, infaq, dan sadaqah 2. peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan muamalah melalui peningkatan manajemen mesjid untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam pelaksanaan Syariat Islam; 3. Peningkatan pengawasan kehidupan keagamaan melalui peningkatan pembinaan akhlak dan kerukunan antar dan sesama ummat; dan peningkatan upaya pencegahan potensi konflik. |
| 2 | Misi 2 - Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA | Arah Kebijakan Misi 2 dalam mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA diarahkan pada 1. Penguatan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh melalui terakomodirnya butir-butir MoU Helsinki dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; penguatan pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe; peningkatan penyelesaian pelanggaraan ketentraman dan ketertiban; penguatan pelaksanaan kebudayaan dan adat istiadat; penguatan pelaksanaan keistimewaan di bidang pendidikan; dan penguatan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. |
| 3 | Misi 3 - Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas | Arah Kebijakan Misi 3 dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas diarahkan pada: 1. Kemandirian ekonomi melalui hilirisasi produksi |

| No. | Misi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | pangan utama, peningkatan Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi, dan industrialisasi sektor unggulan. 2. Peningkatan stabilitas ekonomi makro melalui peningkatan penerimaan Aceh, pembukaan jaringan pasar domestik dan global; pengembangan kawasan transmigrasi berstatus mandiri; pengembangan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal melalui pemanfaatan lahan-lahan terlantar dan HGU; mewujudkan lumbung pangan Aceh, peningkatan pembangunan infrastruktur investasi daerah; dan peningkatan ketersediaan lapangan kerja sektor Formal dan Informal. |
| 4 | Misi 4 - Mewujudkan insfrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional Aceh, koneksitas, dan berkelanjutan | Arah Kebijakan Misi 4 dalam mewujudkan mewujudkan insfrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional Aceh, koneksitas, dan berkelanjutan diarahkan pada: 1. Peningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, perumahan dan pulau terluar melalui peningkatan ketahanan air daerah; peningkatan volume air baku; ketersediaan jaringan air bersih; peningkatan penyediaan dan penataan perumahan dan pemukiman yang layak huni; ketersediaan sarana dan prasarana perikanan; ketersediaan jaringan listrik yang terkoneksi dan mandiri sampai ke pulau terluar; peningkatan koneksitas wilayah dan pulau terluar untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan orang dan barang. 2. Peningkatan kesesuian pembangunan dengan rencana tata ruang melalui peningkatan kinerja perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan ketersedian jaringan teknologi informatika yang terkoneksi. |
| 5 | Misi 5 - Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan | Arah Kebijakan Misi 5 dalam mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas diarahkan pada: 1. Peningkatan kualitas dan daya saing |

| No. | Misi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas | sumber daya manusia melalui peningkatan akses pendidikan; peningkatan pendidikan berkualitas yang merata; peningkatan minat baca masyarakat. 2. Peningkatan derajat kesehatan untuk semua melalui peningkatan kualitas kesehatan. 3. Penguatan kesetaraan gender, hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas melalui, peningkatan partisipasi dan kesetaraan gender dalam pembangunan; peningkatan pelindungan dan keselamatan perempuan; peningkatan pelindungan dan keselamatan anak; peningkatan pelindungan dan keselamatan anak; peningkatan partisipasi dan kesejahteraan disabilitas dalam pembangunan. 4. Peningkatan prestasi olah raga serta kepemudaan melaui peningkatan kualitas olahraga dan kepemudaan. |
| 6 | Misi 6 - Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh, serta membina stabilitas politik dan supremasi hukum | Arah Kebijakan Misi 6 dalam mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh, membina stabilitas politik, dan supremasi hukum diarahkan pada: 1. Penguatan transformasi tata kelola Pemerintah Aceh melalui penguatan tata kelola Pemerintah Aceh yang baik dan bersih (*Good Governance dan Clean Government*); ketersediaan database perencanaan dan penganggaran serta pengawasan yang valid, akurat, dan terintegrasi; penguatan kompetensi sumberdaya aparatur pemerintah Aceh yang berintegritas dan melayani; penguatan sistem digitalisasi dalam pelayanan publik. 2. Peningkatan stabilitas politik melalui peningkatan partisipasi politik secara demokratis. 3. Penegakkan Implementasi hukum melalui, penguatan kepatuhan hukum dalam melayani publik melalui optimalisasi peran dan fungsi APIP dalam pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan. |

| No. | Misi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| 7 | Misi 7 - Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya | Arah Kebijakan Misi 7 dalam mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya diarahkan pada: 1. Peningkatan pengelolaan konservasi lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati melalui peningkatan kualitas air, peningkatan keanekaragaman hayati; peningkatan kinerja pengelolaan persampahan; peningkatan pengelolaaan sumber energi baru dan terbarukan. 2. Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan Iklim melalui peningkatan ketahanan daerah; penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). |

## 3.8. Prioritas Aceh

Prioritas Aceh di susun untuk pencapaian Visi dan Misi Guberunur dan Wakil Gubernur terpilih. Program prioritas Aceh diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun program dan kegiatan strategis untuk pencepaian Visi dan Misi pembangunan Aceh. Prioritas Aceh secara rinci diuraikan berikut ini:

### 3.8.1. Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam (Aqidah, Syariat, Akhlak dan Muamalah).

Pembangunan Aceh dikhususkan pada peningkatan pengamalan nilai aqidah, syariah, akhlak dan muamalah. Prioritas aqidah merupakan suatu konsep yang menekankan pentingnya memahami dan mengamalkan aqidah Islam dengan benar dan mendalam. Syariah adalah suatu konsep yang menekankan pentingnya memahami dan mengamalkan syariah Islam dalam berbagai aspek kehidupan dan akhlak adalah suatu konsep yang menekankan pentingnya memahami dan mengamalkan akhlak yang baik dan mulia dalam berbagai aspek kehidupan. Prioritas muamalah adalah suatu konsep yang menekankan pentingnya memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip muamalah yang baik dan benar dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

Penguatan pelaksanaan syariat islam dilakukan dengan melaksanakan beberapa kebijakan antara lain :

a. Pengelolaan Harta Agama (zakat, infaq, sadaqah dan waqaf). Pendapatan zakat dan infak dan sadaqah selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan nilai yang semakin meningkat seiring dengan perbaikan perekonmian, oleh karena itu pendapatan yang bersumber dari harta agama ini dapat dijadikan andalan untuk membantu ekonomi ummat sesuai dengan golongan yang berhak menerima (senif). Adapun wakaf juga merupakan instrument ekonomi yang sudah lama dipraktekkan oleh masyarakat Aceh, untuk mendukung sector Pendidikan, social dan keagamaan, terutama dalam penyediaan fasilitas umum seperti sekolah serta masjid, sekolah, serta pusat kesehatan. Oleh karena itu, wakaf menjadi salah satu bentuk amal jariyah yang memiliki dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
b. Penguatan masjid sebagai rumah Ibadah yang juga memiliki fungsi iradah, imarah dan riayah. Disamping itu penggunaan masjid akan difokuskan pada kegiatan pengajian ba'da magrib (semeubet) bagi generasi muda dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam membaca Al Qur'an (Melek Al Qu'an).
c. Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan dayah. Tujuan pendidikan dayah adalah untuk menjaga kebutuhan masyarakat dalam bidang studi keagamaan dan dalam upaya untuk mengendalikan gejala-gejala negatif yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Lembaga pendidikan dayah dalam masyarakat merupakan sebuah cita-cita, karena dayah berperan sebagai media kontrol dalam lingkungan masyarakat. Perkembangan dayah di Aceh dari tahun ke tahun terus meningkat dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pendidikan agama islam

d. Penguatan peran Ulama. Peran dan fungsi ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) diharapkan akan lebih berpengaruh melalui fatwa dan taushiyah yang ditetapkan sebagai pedoman bagi Pemerintahan dan masyarakat Aceh. Sertifikat kehalalan produk baik berupa pangan, obat-obatan dan kosmetika yang dikeluarkan berdasarkan hasil fatwa dari MPU. Kebijakan Pemerintah Aceh selama lima tahun kedepan adalah berupaya untuk memperhatikan dan mempertimbangkan fatwa dan tausyiah ulama untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah maupun social budaya. Disamping itu, akan dilakukan juga pelatihan dan pendidikan bagi Kader Ulama (PKU) untuk melahirkan ulama yang mempunyai kompetensi dalam artian mempunyai wawasan ke-islaman yang luas dan tersebar di seluruh wilayah Aceh

### 3.8.2. Penguatan implementasi kekhususan dan keistiwewaan Aceh

Upaya memperkuat perdamaian, kekhususan dan keistimewaan pasca MoU Helsinki bagi Aceh masih terus dilaksanakan. Hal ini merupakan kewajiban dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan serta inklusivitas Masyarakat. Penguatan lembaga kekhususan Aceh sepertia Lembaga Wali Nanggroe sebagai lembaga pengawal keberlanjutan perdamaian Aceh, menjamin stabilitas Aceh-nasional melalui komitmen yang telah ditandatangani sehingga mendorong gaya hidup aktif rakyat Aceh dalam memupuk persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, upaya untuk mengatasi kemiskinan bagi para kombatan GAM, korban konflik, dan perbedaan antar kelompok masyarakat menjadi prioritas pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota dan wilayah pedesaan akan dijembatani dengan penekanan khusus pada pembangunan sosio-ekonomi di Kawasan-kawasan tertentu. Hal ini akan menciptakan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Aceh pada nantinya. Disamping itu, penguatan perdamaian ini akan digunakan untuk membangun masyarakat yang aktif, sedangkan persatuan dalam keberagaman akan diperkuat untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dengan menghargai dan mengakui perbedaan. Implementasi inisiatif ini akan berkontribusi pada tujuan membangun Aceh yang inklusif, bersatu dan sejahtera.

### 3.8.3. Penurunan Angka Kemiskinan

Pemerintah Aceh berkomitmen menurunkan angka kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan, melalui :

a. Pengunaan data kemiskinan yang akurat dan terpadu untuk merencanakan melaksakan dan evaluasi program program pengantasan kemiskinan;
b. pemberian dukungan modal menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor padat karya;
c. Memberikan dukungan modal pelatihan dan akses pasar bagi UMKM sehingga dapat membantu mereka untuk berkembang dan meningkatkan pendapatan;

d. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar;
e. Layanan Kesehatan yang terjangkau dan berkualitas melalui program jaminan Kesehatan Aceh;
f. Memberikan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pendampingan dibidang kewirausahaan dan manajemen keuangan;
g. Memberikan akses Pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan vokasi untuk dapat meningkatkan peluang ekonomi di masa depan.

### 3.8.4. Hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumberdaya alam dan maritim

Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dan maritim di implementasikan dengan mengembangkan potensi sumberdaya alam dan maritim yang tersedia disertai dengan upaya maksimal untuk meningkatkan nilai tambah. Disamping meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan industrialisasi tersebut juga dimaksudkan untuk dapat membuka lapangan pekerjaan seluas luasnya bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam mendukung hilirisasi dan industrialisasi antara lain :

a. Mengupayakan peningkatan nilai tambah komoditi unggulan pertanian dan kelautan Aceh menjadi produk turunan sebagai komoditas ekspor. Beberapa produk yang diupayakan untuk peningkatan nilai tambah antara lain: komoditi pertanian dan perkebunan seperti *Crude Palm Oil* (CPO), Kopi, Nilam, Karet dan hasil laut.
b. Hilirisasi produk CPO dan Migas akan dilakukan dan akan ditambah dengan hilirisasi sumber daya alam lainnya, seperti mineral lainnya, produk agro, serta produk maritim. Pemanfaatan sektor maritim juga perlu diperkuat untuk dapat menunjang proses industrialisasi dan pengembangan ekonomi hijau/biru
c. Pelatihan dan Pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal;
d. Memberikan kemudahan bagi investor serta melakukan perlindungan bagi industri lokal;
e. Mempermudah perizinan, permodalan, dan mengupayakan akses pasar;
f. Mengembangkan inovasi dan penerapan teknologi dan penerapan hilirisasi;

### 3.8.5. Penciptaan lapangan kerja

Upaya penciptaan lapangan kerja dalam rangka perluasan lapangan berusaha akan dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

a. Mewujudkan Penguatan UMKM Rakyat Aceh.

Penguatan kelembagaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta kewirausahaan merupakan langkah penting ditujukan untuk menumbuhkan wirausahawan baru terutama dikalangan penduduk usia muda. Penguatan program Kredit Usaha Tani Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Produksi Pangan Rakyat,

Nelayan, Pesisir, Industri Hilir UKM, pembiayaan perlu dilakukan untuk mendukung hal tersebut dengan melibatkan peran serta perbankan daerah dan nasional. Disamping itu perlu dilakukan inovasi dan adopsi teknologi guna meningkatkan tingkat kompetensi UMKM sehingga dapat bersaing secara lebih kompetitif.

b. Mewujudkan Industri Pariwisata dan Industri Halal.

Industri pariwisata mencatat pertumbuhan positif, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah kelas menengah berpenghasilan tinggi dan menengah di luar Aceh dan manca negara yang berkunjung ke Aceh, lebih banyak konektivitas daerah wisata dan pilihan perjalanan yang terjangkau, serta kondisi perekonomian yang lebih baik. Mengkampanyekan promosi dan acara wisata secara profesional terkait Visit Aceh yang harus semakin banyak dilakukan baik di luar Aceh dan di Luar negeri sesuai standar promosi international. Industri Halal, berbagai inisiatif harus dilaksanakan untuk memastikan pengembangan industri halal lokal secara terintegrasi dan komprehensif. Upaya-upaya yang dilakukan kedepan harus difokuskan pada pengembangan standar dan sertifikasi halal, branding dan promosi serta komersialisasi produk dan layanan halal yang mengikuti standar international. Alam Aceh yang eksotik dan natural akan meningkatkan minat para investor luar dan dalam untuk menginvestasikan dana mereka di Aceh, lapangan kerja baru akan terbuka secara signifikan dengan upah yang layak.

c. Mewujudkan industri kreatif.

Industri kreatif yang mencakup multimedia serta budaya, seni dan wakaf/warisan menjadi semakin penting di tingkat global. Program Aceh Digital Content akan membantu perusahaan animasi lokal memasarkan produk kreatif yang memiliki kekayaan intelektual (IP) seperti cerita-cerita rakyat Aceh yang dapat di filmkan yang nantinya akan dapat menembus pasar lokal, nasional dan global. Upaya menggenjot segmen budaya, seni, dan warisan harus mulai dilakukan untuk meningkatkan kontribusi pemuda/i Aceh dalam mengembangkan bakat dan minat dalam membentuk generasi Aceh unggul.

### 3.8.6. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas

Pemantapan infrastruktur dasar adalah untuk membangun dan memantapkan infrastruktur dasar yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Prioritas keseimbangan dan inklusi regional Aceh dan koneksitas adalah menekankan pentingnya membangun dan memantapkan keseimbangan dan inklusi regional di Aceh melalui pengembangan infrastruktur dan koneksitas yang memadai.

Langkah yang dilakukan dalam peningkatan infrastruktur yang berkualitas dalam jangka menengah adalah dengan menjamin infrastruktur yang berkualitas. Untuk meningkatkan daya saing Aceh sebagai daerah tujuan Investasi di Indonesia dan global serta guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan

kualitas infrastruktur menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh Aceh dan pemerintah RI melalui Pembangunan dengan dana APBN.

Berdasarkan data dari *World Economic Forum* (2023), kualitas infrastruktur Indonesia secara keseluruhan berada pada peringkat ke-51 dari 144 negara yang di survei. Bandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Singapura yang menduduki peringkat ke-5, Malaysia diperingkat ke-17. Dalam 5 tahun ke depan, kualitas infrastruktur Aceh harus dibenahi dan diperbaiki mengikuti standar negara maju, baik di sistem perencanaan, penganggaran maupun sistem tender terbuka, hal ini akan menjamin Aceh menjamin menjadi daerah yang memiliki infrastruktur yang handal.

Pemerintah Aceh, memfokuskan sejumlah program prioritas yang ditujukan untuk peningkatan konektivitas, integrasi antar wilayah, serta pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar. Langkah ini sejalan dengan visi pemerataan pembangunan dari pinggiran dan penguatan integrasi wilayah nasional. Peningkatan infrastruktur dimaksud antara lain:

1. Penyeberangan Jalur Laut Lhokseumawe – Penang

   Program ini dirancang untuk membuka jalur penyeberangan laut internasional yang menghubungkan Lhokseumawe (Aceh) dengan Penang (Malaysia). Selain memperkuat hubungan dagang dan mobilitas masyarakat antarnegara, inisiatif ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk baru investasi, pariwisata, dan perdagangan bagi wilayah utara Aceh.

2. Pembangunan Terowongan Geureute

   Terowongan Geureute merupakan solusi jangka panjang atas permasalahan konektivitas lintas barat Aceh yang selama ini rawan longsor dan sulit dilalui saat cuaca ekstrem. Pembangunan terowongan ini akan meningkatkan keamanan, efisiensi logistik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan barat Aceh dan sekitarnya.

3. Jalan Tol Langsa – Binjai

   Pembangunan ruas tol Langsa – Binjai merupakan bagian dari jaringan Tol Trans Sumatera yang bertujuan mempercepat arus barang dan orang dari wilayah timur Aceh menuju Sumatera Utara. Tol ini akan membuka akses ekonomi baru, mengurangi biaya logistik, serta mendukung integrasi ekonomi regional di pantai timur Sumatera.

4. Pembangunan 4 Pulau Terluar Aceh

   Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Ketek merupakan bagian dari wilayah strategis NKRI yang berbatasan langsung dengan perairan internasional. Pembangunan di keempat pulau terluar ini mencakup infrastruktur dasar seperti dermaga, listrik, air bersih, dan fasilitas pertahanan, serta pembangunan mercusuar guna memperkuat kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir yang tinggal di wilayah perbatasan.

### 3.8.7. Peningkatan sumber daya manusia, sains dan teknologi

Penguatan kualitas dan daya saing umber Daya Manusia untuk menekankan pentingnya meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pengembangan pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kemampuan. Penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak untuk menekankan pentingnya mempromosikan kesetaraan gender dan melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Sumber daya manusia adalah faktor penting dalam rangka menjawab tantangan Aceh secara global yang ada saat ini dan di masa yang akan datang. Dunia terus berubah sehingga menciptakan generasi masa depan bangsa yang memiliki pengetahuan global dan kemampuan untuk beradaptasi menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan. Dalam hal ini, Program Beasiswa Unggulan Aceh di bawah BPSDM Aceh sebagai salah satu organisasi sektor publik yang berupaya melaksanakan tujuan tersebut dengan terus memberikan dukungan untuk pengembangan sumber daya manusia Aceh yang unggul, termasuk mengakomodir anak korban konflik. Pemerintah Aceh akan melaksanakan visi misi Bersama Indonesia maju secara maksimal dengan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. Untuk itu, kedepan kita akan bekerja dengan penuh kesungguhan serta dedikasi yang tinggi dalam upaya mewujudkan SDM Aceh Unggul Bersama Indonesia Maju.

Penguatan Pendidikan, sains dan teknologi perlu diupayakan dalam jangka menengah karena kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan, serta penguasaan sains dan teknologi. Inovasi akan lahir seiring dengan kemajuan di bidang tersebut. Untuk itu, dana riset dan inovasi akan diupayakan mencapai 1.5-2.0% dari APBA dalam 5 tahun. Untuk itu, kebijakan pemerintah dalam berinvestasi yang mendukung pendidikan, sains dan teknologi merupakan suatu keharusan dalam memperkuat kemandirian bangsa. Badan riset dan pengembangan Aceh yang profesional dan mandiri menjadi motor penggerak kemajuan kedepan. Dana abadi Pendidikan perlu terus dimaksimalkan untuk menjamin Pendidikan generasi Aceh unggul.

Renovasi dan Pembangunan Sekolah/dayah diupayakan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama, serta membangun dasar yang kuat untuk generasi mendatang. Hal tersebut diwujudkan melalui komitmen terhadap pendidikan yang bermutu, inovasi dalam sains dan teknologi, serta peningkatan kesehatan publik. Beberapa langkah harus dilakukan untuk mendorong percepatan pencapaian tersebut melalui renovasi dan Pembangunan sekolah-sekolah unggul sampai ke pelosok. Pembangunan dan renovasi fasilitas pendidikan yang merata diperlukan untuk mempersiapkan kualitas SDM menuju bonus demografi dan Indonesia emas.

Akselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang tercermin dari peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) dapat dicapai melalui upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat termasuk perubahan perilaku. Hal ini dicapai melalui penguatan kebijakan, komitmen kolaborasi pembiayaan dan sumber daya kesehatan, peningkatan kualitas layanan, penguatan data dan sistem informasi kesehatan. Peningkatan kualitas layanan diwujudkan melalui peningkatan sarana dan

prasarana layanan kesehatan yang modern, terstandar, dan ramah pasien, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan yang kompeten dan profesional, termasuk memperkuat peran Rumah Sakit Daerah Provinsi dan Rumah Sakit Regional. Hasil yang diharapkan adalah adanya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam reformasi pelayanan publik.

### 3.8.8. Transformasi digital yang terintegrasi

Peningkatan digitalisasi dan teknologi maju (*advance technology*) akan diprioritaskan melalui upaya antara lain dengan mengintensifkan ekonomi digital, mengarusutamakan digitalisasi untuk mencapai pembangunan inklusif, mempercepat R&D&C&I serta memanfaatkan potensi teknologi maju. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan ketahanan negara terutama Aceh, sehingga menjadikan Aceh lebih siap sebagai daerah dengan perekonomian berteknologi tinggi.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi dalam penguasaan digitalisasi. Tantangan-tantangan tersebut antara lain kurangnya infrastruktur digital, tata kelola yang tidak terintegrasi, kurangnya kapasitas dan kapabilitas, serta tidak terjangkaunya akses terhadap layanan digital. Tantangan-tantangan ini berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi digital serta semakin melebarnya kesenjangan digital. Selain itu, rendahnya adopsi teknologi, kurangnya investasi dalam penelitian, pengembangan, komersialisasi dan inovasi dan kurangnya talenta terampil telah menghambat upaya modernisasi perekonomian.

### 3.8.9. Tata Kelola birokrasi dan kemandirian fiskal daerah

Penguatan tata kelola pemerintahan Aceh menekankan pada pentingnya peningkatan kualitas dan efektivitas pemerintahan Aceh melalui reformasi dan inovasi, diantaranya: 1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan Aceh melalui pengembangan sistem informasi dan pengawasan yang efektif; 2. Pengembangan pemerintahan yang berbasis pada teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik; 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui pengembangan mekanisme partisipasi yang efektif; 4. Penguatan kelembagaan pemerintahan Aceh dilakukan melalui pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan.

Kemajuan teknologi dan perekonomian global yang terus berubah mengharuskan negara-negara untuk segera mengadopsi pendekatan yang lebih dinamis dan proaktif. Hal ini penting untuk menjadikan perekonomian yang berbasis teknologi tinggi. Revolusi Industri Keempat (RI4.0) yang berbasis pada digitalisasi dan teknologi baru mempengaruhi kehidupan manusia dalam situasi yang belum pernah dialami sebelumnya.

Kemandirian fiskal perlu diwujudkan dalam rangka meningkatkan kemampuan Aceh untuk membiayai kegiatan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan mengurangi ketergantungan pada pendanaan pemerintah pusat. Pemerintah Aceh akan melakukan beberapa upaya, yaitu: 1. Intensifikasi untuk meningkatkan jumlah

Pendapatan Asli Aceh (PAA) yang disertai dengan reformasi kebijakanyang disertai dengan upaya penegakan hukum; 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keuangan dan perpajakan; 3. Meningkatkan sumber pendapatan daerah di luar transfer pemerintah pusat seperti dana Coorperate Social Rensposibility (CSR); 4. Meningkatkan upaya pengumpulan dana yang bersumber dari Zakat Infaq dan Sadaqah (ZISWAF) serta Waqaf yang bersifat produktif; 5. Menggalakkan promosi investasi dan pengembangan ekonomi lokal.

### 3.8.10. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Penguatan manajemen kelestarian lingkungan dan ekosistemnya adalah untuk menekankan pentingnya memelihara dan melestarikan lingkungan dan ekosistem untuk keberlanjutan hidup manusia dan makhluk lainnya, diantaranya 1. Pengembangan program lingkungan, 2. Pengadaan teknologi lingkungan dan 3. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sipil.

Berbagai permasalahan harus terus dilakukan untuk mentransformasi sektor publik agar lebih berpusat pada masyarakat, efisien dan produktif dengan penekanan pada integritas dan transparansi. Pendekatan pemerintah secara keseluruhan harus diadopsi dan beberapa perbaikan perlu dilaksanakan. Perbaikan tersebut mencakup rasionalisasi sektor publik, digitalisasi pemberian layanan publik, penguatan kapasitas dan kapabilitas, peningkatan tata kelola dalam manajemen proyek, dan peningkatan keterlibatan dengan pemangku kepentingan. Pemerintah Aceh 5 tahun mendatang, akan lebih banyak berfokus pada pengembangan sektor publik yang efektif dan bertanggung jawab untuk memenuhi harapan masyarakat yang semakin meningkat akibat kemajuan teknologi serta peningkatan kelompok berpenghasilan menengah dan perubahan demografi di masyarakat. Sektor publik perlu menjadi lebih efisien dengan mempercepat digitalisasi dan mendorong inovasi. Dalam kaitan ini, upaya penguatan penyediaan layanan sektor publik akan fokus pada pengembangan layanan publik yang berkinerja tinggi, penguatan pendekatan pemerintah secara keseluruhan, serta peningkatan anggaran dan manajemen proyek.

Pemerintah Aceh akan memaksimalkan sumber penerimaan Aceh sesuai amanah UUPA pasal 179 secara taat asas sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan kapasitas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Diharapkan Badan ini mampu memberikan kontribusi positif terhadap upaya mendapatkan sumber pendapatan/pembiayaan pembangunan berkelanjutan di Aceh.

Tata Kelola birokrasi pemerintah Aceh harus efektif, efesian, transparan, professional dan berintegritas merupakan unsur penting dalam menggerakkan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa agar peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat diakomodasi dan terlayani dengan baik. Untuk itu, diperlukan upaya meminimalisasi sistem birokrasi yang selama ini dilakukan. Birokrasi yang efektif, efisien, transparan, profesional, dan berintegritas harus menjadi bagian penting bagi setiap ASN dalam melayani rakyat. Korupsi yang massif sekarang ini telah menyebabkan kebocoran diberbagai aspek pembiayaan dalam pembangunan di Aceh

dan mengakibatkan rusaknya perekonomian serta sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi seimbang antara pencegahan dan penindakan perlu secara terstruktur dilakukan. Pemberantasan korupsi seimbang menitik beratkan pada menghilangkan keuntungan pada pelaku sekaligus mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara. Bila kebijakan ini dapat dilakukan dengan seksama, maka akan diperoleh manfaat sosial ekonomi yang merata dan efisien, tambahan pembiayaan pemerintah serta percepatan kemajuan Aceh Bersama Indonesia. Digitalisasi dengan satu data terintegrasi Aceh Nasional dipastikan akan sangat membantu efisiensi dan kesatuan pengelolaan, serta tentunya bagi pembinaan karir bagi ASN. Reward dan punishment menjadi bagian dari profesionalisme pengelolaan birokrasi Aceh kedepannya.

Menjamin Terwujudnya Pemberantasan Narkoba. Peredaran dan penggunaan narkoba adalah salah satu penyakit sosial masyarakat yang dapat menghancurkan produktivitas dan kualitas hidup Masyarakat serta generasi Aceh masa depan. Untuk itu, langkah-langkah konkrit untuk pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba yang harus dilakukan secara tepat sasaran dan menyeluruh dimulai dari kesadaran dalam keluarga dan pemerintah beserta aparat penegakan hukum. Penegakan hukum yang tanpa pandang bulu, memberantas segera mungkin oknum-oknum dan mafia-mafia yang menjadi sindikat terorganisir yang telah terbentuk kuat di Aceh, menutup dan mengawasi seluruh pintu-pintu masuk narkoba mancanegara ke Aceh dengan melibatkan peran aktif pemerintah Aceh dengan instansi vertikal negara lainnya.

Dalam upaya pembangunan dan peningkatan ekonomi hijau dan biru di aceh, kepastian keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup menjadi prioritas utama untuk menjamin generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi hijau dan biru, pendekatan holistik negara dan Aceh akan diadopsi. Ini adalah pendekatan inklusif agar seluruh pemangku kepentingan berbagi tanggung jawab dan akuntabilitas dalam melaksanakan agenda bersih dan hijau/biru yang tangguh. Pendekatan ini akan mendorong kontribusi Aceh rendah karbon, melindungi kekayaan alam dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana. Penerapan siklus ekonomi ini mewakili perubahan sistemik akan dipercepat untuk menciptakan bisnis dan investasi yang lebih bertanggung jawab serta memperluas pasar hijau/biru dan menghasilkan peluang perekonomian baru. Apalagi aset alam kita akan terus berlanjut dikelola secara efisien melalui konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan, sambil memastikan pembagian manfaat secara adil. Pertumbuhan ekonomi hijau/biru akan diperkuat dengan lingkungan yang mendukung dan mendorong perubahan pikiran dan perilaku masyarakatnya. Pembentukan Dana Abadi Lingkungan dan Dana CSR yang bersumber dari setiap hilirisasi sumber daya alam dan maritim perlu segera terwujud untuk memastikan keberlanjutan bagi generasi Aceh masa depan. Selanjutnya Pemerintah Aceh juga mendukung inisiasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk mewujudkan Rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam mengurangi emisi karbon melalui Proyek *Pionir Carbon Capture Storage* (CCS) Arun.

## 3.9. Pembangunan Kewilayahan Aceh

Pembangunan kewilayahan dirumuskan berdasarkan pengembangan kewilayahan yang tercantum di dalam RPJM Nasional tahun 2025-2029 yang difokuskan kepada: 1. Kawasan pertumbuhan; 2. Kawasan komoditas unggulan; 3. Kawasan swasembada pengan, air dan energi; 4. Kawasan afirmasi; dan 5. Kawasan konservasi/rawan bencana. Penyelarasan pembangunan kewilayahan Nasional dan Aceh secara rinci dapat di lihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6.
Penyelarasan Pembangunan Kewilayahan Nasional dan Aceh

| No | Pengembangan kewilayahan | |
|---|---|---|
| | Nasional | Aceh |
| 1. | Kawasan Pertumbuhan:<br>1. Kawasan Perkotaan Banda Aceh-Jantho<br>2. Kawasan Perkotaan Lhokseumawe dan Kawasan Pengembangan Industri Arun-Lhokseumawe<br>3. Kawasan Perkotaan Takengon dan Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan DT Gayo-Danau Laut Tawar<br>4. Kawasan Perkotaan Meulaboh<br>5. Kawasan Perkotaan Langsa<br>6. Kawasan Perkotaan Subulussalam<br>7. KPBPB Sabang | 1. Pengembangan kawasan perkotaan Banda Aceh-Sabang dan Jantho (Basajan)<br>2. Pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya KEK Arun secara berkelanjutan<br>3. Dukungan terhadap Rencana PSN dalam mengurangi emisi karbon melalui Proyek Pionir *Carbon Capture Storage* (CCS) Arun<br>4. Pengembangan daerah pariwisata DTGA, Kabupeten Simelue, dan Kabupaten Aceh Singkil.<br>5. Pengembangan wilayah perkotaan Meulaboh<br>6. Pengembangan pusat pertumbuhan LATIMTA (Kota Langsa)<br>7. Pengembangan wilayah perkotaan Kota Subulussalam<br>8. Mendukung pertumbuhan ekonomi maritim dan kepariwisataan. |
| 2 | Kawasan Komoditas Unggulan:<br>1. Kopi di DT Gayo (Kab. Aceh Tengah dan Kab. Bener Meriah)<br>2. Sawit dan Karet di Pesisir Timur Laut Aceh (Kab. Aceh Timur dan Kab. Aceh Tamiang) dan Pesisir Barat-Selatan Aceh (Kab. Aceh Jaya, | 1. Pengembangan kawasan komoditas unggulan kopi dan hortikultura di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues<br>2. Pengembangan kawasan komoditas unggulan sawit dan karet di Kab. Aceh Timur dan Aceh Tamiang serta Pesisir Barat-Selatan Aceh (Kab. Aceh Jaya, Kab. |

| No | Pengembangan kewilayahan | |
|---|---|---|
| | Nasional | Aceh |
| | Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam) | Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam, serta Kabupaten Simelue) |
| 3 | Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi<br>*A. Swasembada Pangan*<br>1. Pesisir Utara Aceh (Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Pidie Jaya, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Tamiang)<br>*B. Swasembada Air dan Energi*<br>2. DT Gayo (Kab. Aceh Tengah dan Kab. Bener Meriah)<br>*C. Swasembada Pangan dan Energi*<br>3. Pesisir Barat Aceh (Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, dan Kab. Aceh Barat Daya) | Pengembangan infrastruktur pengairan untuk mendukung swasembada pangan di pesisir utara (Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Pidie Jaya, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Tamiang dan Kab. Simelue )<br>Pengembangan waduk dan PLTMH untuk mendukung swasembada air dan energi di Kab. Aceh Tengah, Kab. Bener Meriah, Kab. Gayo Lues dan Kab. Aceh Tenggara.<br>Pengembangan infrastruktur pengairan untuk mendukung swasembada pangan di pesisir barat Aceh dan Energi Baru Terbarukan |
| 4 | Kawasan Afirmasi<br>1. Simeulue (Daerah Terdepan dan Percepatan Pemerataan Pembangunan) | Pemenuhan infrastruktur layanan dasar di Kab. Aceh Besar (Pulo Aceh), Kab. Aceh Singkil (Pulau Banyak) dan Kab. Simeulue yang meliputi pendidikan, kesehatan (peningkatan status rumah sakit Daerah), perpanjangan runway bandara Lasikin, lanjutan pembangunan irigasi Sigulai, pembangunan SPAM terintegrasi, konektivitas, perumahan dan permukiman, serta pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan) |
| 5 | Kawasan Konservasi/Rawan Bencana<br>1. TN Gunung Leuser | Peningkatan ekonomi masyarakat dan pengawasan TN Gunung Leuser. |

## 3.10. Kegiatan Prioritas Utama Aceh

Kegiatan prioritas utama merupakan kegiatan penting dan mendesak untuk dilakukan dalam mendukung kegiatan prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terutama dalam pengembangan komoditi kepala, pengembangan pangan lokal dan nabati, pangan hewani. Menyelesaikan permasalah kesehatan khususnya TBC, pengembangan SPAM dalam mencapai akses air minum perpipaan dan

penyediaan perumahan terintegrasi PSU. Berikut dukungan Pemerintah Aceh untuk mensukseskan kegiatan prioritas Utama sebagaimana disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7.
Penyelarasan Kegiatan Priorias Utama Aceh

| No | Kegiatan Prioritas Utama (KPU) | Uraian Kegiatan | Program | SKPA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Hilirisasi Kelapa | Peremajaan tanaman kelapa dalam Kabupaten Simeulue dan Kota Sabang . | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Tanbun |
| 2 | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya | Pengembangan Kawasan Padi (di Abes, Pidie, Pijay, Bireuen, Acut, Lhok, Atim, Langsa, Atam, Bener, Ateng, Galus, Agara, Ajay, Abar, Nagan, Abdya, Asel, Simeulue, Subulussalam, Singkil) | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Tanbun |
| | | Pengadaan/Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pangan |
| | | Pengembangan Kawasan Jagung (di Abes, Pidie, Pijay, Bireuen, Acut, Atim, Atam, Bener, Ateng, Galus, Agara, Ajay, Abar, Nagan, Abdya, Asel, Subulussalam, Singkil | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Tanbun<br>Tanbun |
| 3 | Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan (PUPM dan Kios Pangan) 23 kab/kota | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pangan<br>Pangan |
| | | Pembinaan dan Pengembangan Gampong (Desa) B2SA/P2L pada 23 kab/kota | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pangan<br>Pangan |
| 4 | Pengembangan Pangan Hewani | Pengembangan Kawasan Peternakan Sapi Terpadu (di Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Bener Meriah), Pengembangan Kawasan Peternakan Kerbau Terpadu (di Gayo Lues dan Simeulue), Pengembangan Kawasan Peternakan Kambing dan Domba (Pidie dan Bireuen), dan pembinaan peternakan unggas berbasis masyarakat | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Disnak |
| 5 | Pengembangan Pangan Akuatik *(Blue Food)* | Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap pada 3 Pelabuhan besar (Pelabuhan Perikanan Samudera di Kota Banda Aceh, Pelabuhan Perikanan Nusantara di Aceh Timur, dan Pelabuhan Perikanan Pantai di Aceh Selatan) 18 Pelabuhan Kecil di WPP 571 dan 572. Di samping itu dilakukan pengembangan | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | DKP |

| No | Kegiatan Prioritas Utama (KPU) | Uraian Kegiatan | Program | SKPA |
|---|---|---|---|---|
| | | Perikanan Budidaya di daerah pesisir utara dan timur Aceh. | | |
| | | Peningkatan Fasilitas untuk memperbaiki rantai pasok perikanan (fasilitas pelabuhan, kapal, alat tangkap, cool storage, cool box, garam, dll) serta pengembangan fasilitas perikanan budidaya. | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | DKP |
| 6 | Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses | Lanjutan pembangunan RS Regional dr. Yulidin Away di Aceh Selatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinkes |
| | | Peningkatan mutu dan pendampingan akreditasi Rumah Sakit | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinkes |
| | | Penyediaan sarana dan prasarana di RSUD dr. Zainal Abidin | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinkes |
| | | Melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (dokter spesialis) | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Dinkes |
| 7 | Penuntasan TBC | Peningkatan edukasi tentang TBC kepada masyarakat, pelaksanaan penemuan aktif TBC baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun populasi umum dan beresiko, optimalisasi jejaring layanan TBC di semua layanan serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pencegahan, pengobatan dan perawatan kasus di layanan kesehatan. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinkes/ RSIA/RS UZA |
| 8 | Konservasi Sumber Daya Air | Menjaga ketersediaan air dengan melakukan Pembangunan dan rehabilitasi embung dan tampungan air lainnya serta Pembangunan dan Rehabilitasi Unit Air Baku. Melakukan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Pengairan |

| No | Kegiatan Prioritas Utama (KPU) | Uraian Kegiatan | Program | SKPA |
|---|---|---|---|---|
| | | Air dan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi. Selanjutnya, melakukan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air dan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi, Mendorong Dewan Sumber Daya Air (DSDA) dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber daya Air (TKPSDA) utk menginisiasi lahirnya Kepgub, Pergub ataupun Qanun terkait penetapan Zona Konservasi, Zona Sempadan Sungai dan Zona Sempadan Tampungan Air | | |
| | | Melakukan penguatan tata kelola air melalui konservasi lahan dengan melakukan pembangunan dan rehabilitasi dam serta tampungan air lainnya. Selanjutnya, mengembalikan fungsi ekologis DAS yang mengalami penurunan daya dukung melalui Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu untuk DAS yang dipulihkan | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Pengairan |
| 9 | Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir | Untuk meningkatkan capaian akses air minum jaringan perpipaan melalui pengembangan SPAM telah masuk dalam Misi 2 RPJMA 2025 - 2029 yaitu Mewujudkan Kemandirian Rakyat melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, melalui Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan yang dituangkan dengan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum dengan indikator capaian Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan. | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Perkim |
| 10 | Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU | Untuk Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU telah masuk dalam dua Misi, yaitu Misi nomor 2 RPJMA 2025 - 2029 yaitu Mewujudkan Kemandirian Rakyat melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, melalui Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang dituangkan dengan Program Kawasan Permukiman dengan | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Perkim |

| No | Kegiatan Prioritas Utama (KPU) | Uraian Kegiatan | Program | SKPA |
|---|---|---|---|---|
| | | Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan .<br>Serta juga tertuang kedalam Misi 9 RPJMA 2025 - 2029 yaitu Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteran Rakyat Aceh melalui Meningkatnya Kualitas Permukiman yang dituangkan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dan Program Pengelolaan persampahan, dengan indikator capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dan Persentase Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah. | | |

# BAB IV
# PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

## 4.1. Program Perangkat Daerah

Rencana program Perangkat Daerah Aceh untuk periode tahun 2025 hingga 2030 disusun sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil (outcome-based planning), serta sebagai wujud komitmen Pemerintah Aceh dalam menjaga kesinambungan arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah. Periode ini merupakan tahapan strategis dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Aceh Tahun 2025–2030 dan sebagai bagian dari kontribusi terhadap capaian target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Aceh hingga tahun 2045.

Secara eksplisit, program pembangunan yang dirancang untuk tahun 2030 tidak hanya dimaksudkan untuk menuntaskan target-target RPJMD periode berjalan, tetapi juga merupakan bagian dari mekanisme transisi dan kesinambungan perencanaan yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030. Dengan demikian, seluruh rencana program tahun 2030 menjadi rujukan bagi kepala daerah terpilih pada periode 2030–2034 dalam menetapkan arah dan prioritas pembangunan pada awal masa pemerintahannya.

Program Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud mencakup seluruh program prioritas dan pendukung yang termuat dalam Bab IV Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Aceh. Ini termasuk program-program utama yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, serta program penunjang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab sekretariat perangkat daerah, sebagai unsur pendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan secara menyeluruh.

Dengan penyusunan program yang terstruktur, konsisten, dan berorientasi hasil, Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya sinergi antar perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal dan berkesinambungan. Namun pencapaian IKU dan IKD sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fiskal daerah yang cenderung menurun sampai tahun 2030. Hal ini disebabkan berkurangnya pendapatan Aceh terutama dari dana transfer keuangan daerah yang bersumber dari dana otonomi khusus. Oleh karena itu upaya untuk memperpanjang sumber pendanaan dari Dana Otonomi Khusus menjadi sangat penting untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Aceh ke depan.

Informasi lebih rinci mengenai program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1.

## Tabel 4.1
## Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

| Urusan/Bidang Urusan/Program | Indikator | Satuan | Baseline (2024) | Tahun | | | | | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | |
| **1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Pengelolaan Pendidikan | | | | | 796.114.401.517 | | 812.073.205.695 | | 521.271.471.305 | | 516.042.521.422 | | 515.859.884.397 | DISDIK |
| | Iklim Inklusivitas SMK | Nilai | 57,42 | 57,00 | | 58,00 | | 59,00 | | 60,00 | | 70,00 | | DISDIK |
| | Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB | Nilai | 78,45 | 82,00 | | 83,00 | | 85,00 | | 87,00 | | 89,00 | | DISDIK |
| | Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA | Nilai | 73,89 | 74,00 | | 74,00 | | 75,00 | | 75,00 | | 76,00 | | DISDIK |
| | Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB | Nilai | 77,68 | 78,00 | | 83,00 | | 89,00 | | 94,00 | | 99,00 | | DISDIK |
| | Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK | Nilai | 71,71 | 72,00 | | 74,00 | | 76,00 | | 78,00 | | 83,00 | | DISDIK |
| | Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB | Nilai | 74,51 | 76,00 | | 77,00 | | 78,00 | | 79,00 | | 80,00 | | DISDIK |
| | Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB | Nilai | 66,84 | 76,00 | | 80,00 | | 84,00 | | 89,00 | | 94,00 | | DISDIK |
| | Indeks Iklim Kebhinekaan SMA | Nilai | 73,93 | 74,00 | | 74,00 | | 74,00 | | 75,00 | | 76,00 | | DISDIK |
| | Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB | Nilai | 69,39 | 74,00 | | 76,00 | | 78,00 | | 80,00 | | 82,00 | | DISDIK |
| | Indeks Iklim Kebhinekaan SMK | Nilai | 71,96 | 72,00 | | 73,00 | | 75,00 | | 76,00 | | 83,00 | | DISDIK |
| | Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB | Nilai | 67,04 | 74,00 | | 78,00 | | 82,00 | | 85,00 | | 88,00 | | DISDIK |
| | Indeks Inklusivitas SDLB | Nilai | 65,12 | 74,00 | | 79,00 | | 83,00 | | 88,00 | | 92,00 | | DISDIK |
| | Indeks Inklusivitas SMA | Nilai | 59,39 | 62,00 | | 63,00 | | 65,00 | | 66,00 | | 68,00 | | DISDIK |
| | Indeks Inklusivitas SMALB | Nilai | 72,06 | 72,00 | | 75,00 | | 79,00 | | 82,00 | | 85,00 | | DISDIK |
| | Indeks Inklusivitas SMPLB | Nilai | 68,85 | 83,00 | | 91,00 | | 95,00 | | 99,00 | | 100,00 | | DISDIK |
| | Indeks Literasi SDLB | % | 83,51 | 91,00 | | 94,00 | | 97,00 | | 99,00 | | 100,00 | | DISDIK |
| | Indeks Literasi SMA | % | 64,95 | 72,00 | | 76,00 | | 80,00 | | 83,00 | | 87,00 | | DISDIK |
| | Indeks Literasi SMALB | % | 64,62 | 83,00 | | 88,00 | | 84,00 | | 90,00 | | 96,00 | | DISDIK |
| | Indeks Literasi SMK | % | 59,06 | 62,00 | | 63,00 | | 64,00 | | 65,00 | | 66,00 | | DISDIK |
| | Indeks Literasi SMPLB | % | 76,62 | 86,00 | | 91,00 | | 96,00 | | 99,00 | | 100,00 | | DISDIK |

| Urusan/Bidang Urusan/Program | Indikator | Satuan | Baseline (2024) | Tahun | | | | | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | |
| | Indeks Numerasi SDLB | % | 83,51 | 84,00 | | 86,00 | | 89,00 | | 92,00 | | 95,00 | | DISDIK |
| | Indeks Numerasi SMA | % | 61,96 | 74,00 | | 81,00 | | 87,00 | | 93,00 | | 100,00 | | DISDIK |
| | Indeks Numerasi SMALB | % | 63,40 | 85,00 | | 88,00 | | 92,00 | | 96,00 | | 100,00 | | DISDIK |
| | Indeks Numerasi SMK | % | 57,89 | 61,00 | | 62,00 | | 64,00 | | 65,00 | | 66,00 | | DISDIK |
| | Indeks Numerasi SMPLB | % | 63,64 | 85,00 | | 89,00 | | 95,00 | | 99,00 | | 100,00 | | DISDIK |
| | Kepuasan Dunia Kerja terhadap Kompetensi Lulusan SMK | % | 72,31 | 87,00 | | 90,00 | | 93,00 | | 97,00 | | 100,00 | | DISDIK |
| | Kualitas Pembelajaran SDLB | Nilai | 71,23 | 71,00 | | 74,00 | | 77,00 | | 79,00 | | 81,00 | | DISDIK |
| | Kualitas Pembelajaran SMA | Nilai | 66,14 | 66,00 | | 67,00 | | 67,00 | | 68,00 | | 75,00 | | DISDIK |
| | Kualitas Pembelajaran SMALB | Nilai | 69,57 | 70,00 | | 75,00 | | 81,00 | | 86,00 | | 91,00 | | DISDIK |
| | Kualitas Pembelajaran SMK | Nilai | 64,84 | 65,00 | | 67,00 | | 70,00 | | 73,00 | | 80,00 | | DISDIK |
| | Kualitas Pembelajaran SMPLB | Nilai | 69,31 | 69,00 | | 71,00 | | 72,00 | | 74,00 | | 76,00 | | DISDIK |
| | Penyerapan Lulusan SMK | % | 87,19 | 87,00 | | 91,00 | | 95,00 | | 99,00 | | 100,00 | | DISDIK |
| 03. Program Pengembangan Kurikulum | Nilai rerata karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitias, nalar kritis, kebinekaan global dan kemandirian pada survei karakter. | Nilai | 57,74 | 60,14 | 138.000.000 | 64,14 | 207.000.000 | 72,14 | | 82,14 | | 85,14 | | DISDIK |
| 04. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | 428.067.753 | | 435.737.357 | | 323.209.710 | | 319.967.547 | | 319.234.263 | DISDIK |
| | Indeks Distribusi Guru SDLB | Nilai | 0,17 | 0,33 | | 0,41 | | 0,49 | | 0,57 | | 0,65 | | DISDIK |
| | Indeks Distribusi Guru SMA | Nilai | 0,42 | 0,58 | | 0,66 | | 0,74 | | 0,82 | | 0,90 | | DISDIK |
| | Indeks Distribusi Guru SMALB | Nilai | 0,17 | 0,33 | | 0,41 | | 0,49 | | 0,57 | | 0,65 | | DISDIK |
| | Indeks Distribusi Guru SMK | Nilai | 0,44 | 0,60 | | 0,68 | | 0,76 | | 0,84 | | 0,92 | | DISDIK |
| | Indeks Distribusi Guru SMPLB | Nilai | 0,17 | 0,33 | | 0,41 | | 0,49 | | 0,57 | | 0,65 | | DISDIK |
| | Proporsi PTK bersertifikat SDLB | % | 23,01 | 42,00 | | 51,00 | | 61,00 | | 70,00 | | 73,00 | | DISDIK |
| | Proporsi PTK bersertifikat SMA | % | 32,32 | 64,00 | | 80,00 | | 96,00 | | 112,00 | | 114,00 | | DISDIK |

| Urusan/Bidang Urusan/Program | Indikator | Satuan | Baseline (2024) | Tahun | | | | | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | |
| | Proporsi PTK bersertifikat SMALB | % | 23,01 | 42,00 | | 51,00 | | 61,00 | | 70,00 | | 73,00 | | DISDIK |
| | Proporsi PTK bersertifikat SMK | % | 28,57 | 59,00 | | 74,00 | | 89,00 | | 104,00 | | 108,00 | | DISDIK |
| | Proporsi PTK bersertifikat SMPLB | % | 23,01 | 42,00 | | 51,00 | | 61,00 | | 70,00 | | 73,00 | | DISDIK |
| 05. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | | | | | 201.688.870 | | 205.302.489 | | 152.283.840 | | 150.756.259 | | 150.410.764 | DISDIK |
| | Akreditasi Sekolah SLB | % | 78,57 | 80,00 | | 85,00 | | 90,00 | | 95,00 | | 100,00 | | DISDIK |
| | Akreditasi Sekolah SMA | % | 96,25 | 93,00 | | 94,00 | | 96,00 | | 98,00 | | 100,00 | | DISDIK |
| | Akreditasi Sekolah SMK | % | 93,33 | 97,00 | | 98,00 | | 99,00 | | 100,00 | | 100,00 | | DISDIK |
| 07. Program Pendidikan Dayah | | | | | 158.135.937.368 | | 172.900.201.762 | | 82.741.503.382 | | 81.911.511.337 | | 81.723.791.174 | DAYAH |
| | Indeks kompetensi kurikulum dayah | Indeks | 65,00 | 68,90 | | 73,03 | | 77,42 | | 82,06 | | 86,98 | | DAYAH |
| | Indeks Standarisasi Dayah Aceh (ISDA) | Indeks | 39,00 | 45,05 | | 55,00 | | 65,05 | | 73,80 | | 83,06 | | DAYAH |
| | Persentase kelengkapan sarana belajar mengajar | % | 60,00 | 64,20 | | 68,69 | | 73,50 | | 78,65 | | 84,15 | | DAYAH |
| | Persentase kompetensi tenaga pengajar/teungku dayah | % | 65,00 | 68,25 | | 71,66 | | 75,26 | | 79,01 | | 82,96 | | DAYAH |
| 08. Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh | Jumlah kebijakan yang dihasilkan dibandingkan dengan target atau kebutuhan kebijakan. | Rasio | 1,33 | 1,60 | 568.248.815 | 1,60 | 578.430.014 | 1,60 | 429.052.489 | 1,60 | 424.748.601 | 1,33 | 423.775.186 | MPA |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 100,00 | 100,00 | 33.486.881.501 | 100,00 | 33.269.216.771 | 100,00 | 33.052.966.862 | 100,00 | 32.838.122.578 | 100,00 | 32.724.674.781 | DAYAH |
| | | % | 100,00 | 100,00 | 1.967.284.202.364 | 100,00 | 1.954.426.958.049 | 100,00 | 1.941.928.837.322 | 100,00 | 1.929.306.299.879 | 100,00 | 1.928.765.808.930 | DISDIK |
| | | % | 95,00 | 95,00 | 7.136.471.001 | 95,00 | 7.090.083.939 | 95,00 | 7.043.998.394 | 95,00 | 6.998.212.404 | 95,00 | 6.952.724.024 | MPA |
| **1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | 795.682.084.304 | | 825.459.027.767 | | 377.050.661.661 | | 365.992.908.200 | | 365.670.870.725 | DINKES |
| | Angka Kematian Bayi (AKB) | /1.000 LH | 8,00 | 8,00 | | 7,00 | | 7,00 | | 7,00 | | 7,00 | | DINKES |
| | Angka Kematian Ibu (AKI) | /100.000 LH | 98,00 | 145,50 | | 137,00 | | 128,50 | | 120,00 | | 111,50 | | DINKES |
| | Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM) | % | 0,00 | 45,00 | | 50,00 | | 55,00 | | 60,00 | | 65,00 | | DINKES |

| Urusan/Bidang Urusan/Program | Indikator | Satuan | Baseline (2024) | Tahun | | | | | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | |
| | Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) | % | 0,00 | 42,00 | | 44,00 | | 46,00 | | 48,00 | | 50,00 | | DINKES |
| | Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap | % | 36,70 | 47,50 | | 48,50 | | 49,58 | | 50,63 | | 51,72 | | DINKES |
| | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional | % | 99,50 | 99,50 | | 99,50 | | 99,50 | | 99,50 | | 99,50 | | DINKES |
| | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis | % | n/a | 46,00 | | 55,00 | | 62,00 | | 67,00 | | 70,00 | | DINKES |
| | Persentase Kab/Kota Memenuhi Syarat Kualitas Kesehatan Lingkungan | % | 0,00 | 13,04 | | 21,74 | | 30,43 | | 39,13 | | 47,83 | | DINKES |
| | Persentase Kab/Kota Mencapai Target Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | % | 0,00 | 13,04 | | 17,40 | | 21,74 | | 26,08 | | 30,43 | | DINKES |
| | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Luar Biasa | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | DINKES |
| | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | DINKES |
| | Persentase RS Regional yang Fungsional | % | 20,00 | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | | 100,00 | | DINKES |
| | Prevalensi Stunting | % | 28,60 | 25,60 | | 24,00 | | 22,50 | | 21,00 | | 19,00 | | DINKES |
| | Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita | % | 11,50 | 10,50 | | 9,50 | | 8,50 | | 7,50 | | 6,50 | | DINKES |
| | Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan | % | NA | 77,50 | 13.775.649.002 | 78,00 | 14.022.464.531 | 78,50 | 8.746.382.112 | 79,00 | 8.658.645.882 | 80,00 | 8.638.802.487 | RSIA |
| | | % | NA | 77,50 | 34.077.256.190 | 78,00 | 34.687.811.526 | 78,50 | 25.729.805.694 | 79,00 | 25.471.706.273 | 80,00 | 25.413.331.660 | RSJ |
| | | % | NA | 77,50 | 29.735.163.819 | 78,00 | 30.267.922.761 | 78,50 | 22.451.337.722 | 79,00 | 22.226.125.090 | 80,00 | 22.175.188.515 | RSUZA |
| 03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase fasyankes yang terpenuhi SDM kesehatan yang standar | % | n/a | 26,00 | 2.772.569.566 | 34,00 | 2.822.245.137 | 43,00 | 2.093.410.215 | 53,00 | 2.072.410.913 | 55,00 | 2.067.661.479 | DINKES |
| 05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup | % | 50,00 | 55,00 | 428.127.492 | 60,00 | 435.798.166 | 65,00 | 323.254.816 | 70,00 | 320.012.200 | 75,00 | 319.278.814 | DINKES |

| Urusan/Bidang Urusan/Program | Indikator | Satuan | Baseline (2024) | Tahun | | | | | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 100,00 | 100,00 | 68.839.963.741 | 100,00 | 68.392.503.977 | 100,00 | 67.947.952.701 | 100,00 | 67.506.291.009 | 100,00 | 67.067.500.117 | DINKES |
| | | % | 100,00 | 100,00 | 112.796.881.791 | 100,00 | 112.063.702.059 | 100,00 | 111.335.287.996 | 100,00 | 110.611.608.624 | 100,00 | 109.892.633.168 | RSIA |
| | | % | 100,00 | 100,00 | 101.959.871.516 | 100,00 | 101.297.132.351 | 100,00 | 100.638.700.991 | 100,00 | 99.984.549.434 | 100,00 | 99.334.649.863 | RSJ |
| | | % | 100,00 | 100,00 | 909.466.411.908 | 100,00 | 903.554.880.231 | 100,00 | 897.681.773.509 | 100,00 | 891.846.841.982 | 100,00 | 890.049.837.509 | RSUZA |
| **1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | | | | | 66.223.929.858 | | 67.410.450.672 | | 50.001.937.892 | | 49.500.361.186 | | 49.486.919.062 | PENGAIRAN |
| | Persentase irigasi modern | % | | | | | | | | | | | | PENGAIRAN |
| | Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik | % | 56,44 | 56,71 | | 56,83 | | 56,97 | | 57,12 | | 57,28 | | PENGAIRAN |
| 03. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase Pemenuhan Layanan Air Minum SPAM Lintas Kab/Kota | % | 0,00 | 20,00 | 1.200.000.000 | 30,00 | 1.700.000.000 | 60,00 | 3.000.000.000 | 70,00 | 2.500.000.000 | 80,00 | 1.500.000.000 | PERKIM |
| 05. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | | | | | 1.500.000.000 | | 1.249.360.127 | | 926.717.250 | | 917.421.215 | | 915.318.721 | PERKIM |
| | Persentase Pemenuhan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Regional | % | 0,00 | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | | 60,00 | | PERKIM |
| | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) | % | | 19,87 | | 22,54 | | 25,22 | | 27,89 | | 30,57 | | PERKIM |
| 08. Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan | % | 80,50 | 81,00 | 200.367.960.715 | 81,50 | 217.519.608.668 | 82,00 | 115.838.104.734 | 83,00 | 114.676.115.872 | 83,50 | 114.413.307.644 | PERKIM |
| 10. Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap | % | 80,80 | 81,44 | 109.387.849.860 | 81,69 | 161.454.208.405 | 81,86 | 66.074.054.940 | 82,01 | 65.411.256.493 | 82,16 | 65.411.000.000 | PUPR |
| 11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | % | 0,00 | 3,12 | 197.253.185 | 3,34 | 291.141.630 | 3,56 | 119.147.765 | 3,78 | 117.952.576 | 4,00 | 117.682.259 | PUPR |
| 12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA | % | 79,50 | 82,00 | 404.408.858 | 85,00 | 411.654.570 | 91,00 | 305.346.219 | 92,00 | 302.283.247 | 94,00 | 301.590.491 | PUPR |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 100,00 | 100,00 | 46.862.008.604 | 100,00 | 46.557.405.548 | 100,00 | 46.254.782.412 | 100,00 | 45.954.126.326 | 100,00 | 45.855.424.505 | PENGAIRAN |

| Urusan/Bidang Urusan/Program | Indikator | Satuan | Baseline (2024) | Tahun | | | | | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | |
| | | % | 100,00 | 100,00 | 51.002.354.129 | 100,00 | 63.042.354.129 | 100,00 | 63.542.354.129 | 100,00 | 63.042.354.129 | 100,00 | 63.542.354.129 | PERKIM |
| | | % | 95,00 | 95,00 | 79.142.746.973 | 95,00 | 78.628.319.118 | 95,00 | 78.117.235.043 | 95,00 | 77.609.473.015 | 95,00 | 77.505.011.441 | PUPR |
| 1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 03. Program Kawasan Permukiman | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak | % | 67,76 | 69,56 | 206.653.607.668 | 71,56 | 278.471.293.165 | 73,56 | 107.563.954.396 | 75,56 | 106.484.964.738 | 77,56 | 106.240.928.526 | PERKIM |
| 05. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU | % | 66,38 | 67,88 | 241.935.212.150 | 69,38 | 234.378.845.762 | 70,88 | 142.639.876.564 | 72,38 | 141.679.129.513 | 73,88 | 141.841.323.084 | PERKIM |
| 1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | 1.330.842.331 | | 1.354.686.765 | | 1.004.843.653 | | 994.763.920 | | 992.484.176 | POL PP |
| | Persentase penegakan peraturan daerah | % | | | | | | | | | | | | POL PP |
| | Persentase penyelesaian pelanggaran qanun syariat islam dan kebijakan kepala daerah | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | POL PP |
| | Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban | % | 81,00 | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 | | POL PP |
| 03. Program Penanggulangan Bencana | Indeks Ketahanan Daerah | Indeks | 0,54 | 0,55 | 17.008.169.711 | 0,56 | 17.312.901.662 | 0,57 | 12.841.905.446 | 0,58 | 12.713.086.427 | 0,60 | 12.683.951.295 | BPBA |
| 04. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | % | 79,47 | 80,00 | 1.827.879.519 | 81,00 | 2.077.702.683 | 82,00 | 1.541.143.242 | 83,00 | 1.525.683.810 | 84,00 | 1.522.187.334 | BPBA |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 100,00 | 100,00 | 12.784.433.849 | 100,00 | 12.701.335.029 | 100,00 | 12.618.776.351 | 100,00 | 12.536.754.305 | 100,00 | 12.455.265.402 | BPBA |
| | | % | 95,00 | 95,00 | 40.954.225.895 | 95,00 | 40.688.023.427 | 95,00 | 40.423.551.274 | 95,00 | 40.160.798.191 | 95,00 | 39.899.753.003 | POL PP |
| **1.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Pemberdayaan Sosial | | | | | 8.134.668.284 | | 8.280.415.497 | | 6.142.027.197 | | 6.080.415.630 | | 6.066.480.878 | DINSOS |

| Urusan/Bidang Urusan/Program | Indikator | Satuan | Baseline (2024) | Tahun | | | | | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | |
| | Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial | % | 68,59 | 68,65 | | 68,70 | | 68,76 | | 68,81 | | 68,89 | | DINSOS |
| | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar | % | 68,59 | 68,65 | | 68,70 | | 68,76 | | 68,81 | | 68,89 | | DINSOS |
| | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial | % | 68,59 | 68,65 | | 68,70 | | 68,76 | | 68,81 | | 68,89 | | DINSOS |
| | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA | % | 68,59 | 68,65 | | 68,70 | | 68,76 | | 68,81 | | 68,89 | | DINSOS |
| | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial | % | 68,59 | 68,65 | | 68,70 | | 68,76 | | 68,81 | | 68,89 | | DINSOS |
| 03. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (KTK)Dalam & Luar Negeri yang mendapatkan layanan pemulangan. | % | 100,00 | 100,00 | 442.621.854 | 100,00 | 350.000.000 | 100,00 | 250.000.000 | 100,00 | 200.000.000 | 100,00 | 175.000.000 | DINSOS |
| 04. Program Rehabilitasi Sosial | | | | | 22.457.421.057 | | 22.859.786.147 | | 12.354.407.987 | | 12.230.479.125 | | 12.202.450.006 | DINSOS |
| | Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | DINSOS |
| | Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | DINSOS |

| Urusan/Bidang Urusan/Program | Indikator | Satuan | Baseline (2024) | Tahun | | | | | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | |
| | Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | DINSOS |
| | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | DINSOS |
| | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | DINSOS |
| 05. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | | | | | 4.613.853.844 | | 4.696.519.334 | | 3.483.659.665 | | 3.448.714.569 | | 3.440.811.000 | DINSOS |
| | Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dan Kemiskinan | % | 29,92 | 31,92 | | 32,92 | | 33,92 | | 34,92 | | 35,92 | | DINSOS |
| | Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi | % | 28,92 | 30,92 | | 31,92 | | 32,92 | | 33,92 | | 34,92 | | DINSOS |
| | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar | % | 27,92 | 29,92 | | 30,92 | | 31,92 | | 32,92 | | 33,92 | | DINSOS |
| 06. Program Penanganan Bencana | | | | | 15.009.864.562 | | 15.379.345.503 | | 10.622.978.600 | | 10.563.910.257 | | 10.564.242.138 | DINSOS |
| | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | DINSOS |
| | Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | DINSOS |
| | Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya | % | 90,51 | 92,51 | | 93,51 | | 94,51 | | 95,51 | | 96,51 | | DINSOS |
| 07. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN) yang terkelola dengan baik. | % | 76,10 | 90,53 | 643.853.602 | 90,53 | 655.389.396 | 90,53 | 453.040.773 | 90,53 | 448.496.261 | 90,53 | 447.468.422 | DINSOS |

| Urusan/Bidang Urusan/Program | Indikator | Satuan | Baseline (2024) | Tahun | | | | | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 100,00 | 100,00 | 36.657.353.390 | 100,00 | 36.441.036.109 | 100,00 | 35.973.743.816 | 100,00 | 35.737.517.070 | 100,00 | 35.508.051.673 | DINSOS |
| 2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Perencanaan Tenaga Kerja | Persentase Angkatan Kerja yang bekerja | % | 94,16 | 94,56 | 208.818.470 | 94,78 | 212.559.828 | 95,00 | 114.342.243 | 95,22 | 113.195.259 | 95,44 | 112.935.845 | NAKER |
| 03. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja yang mendapat sertifikat kompetensi melalui pelatihan dan pemagangan yang ditempatkan | % | 0,00 | 45,45 | 2.244.798.548 | 47,30 | 2.285.018.152 | 49,75 | 1.029.080.185 | 50,55 | 1.018.757.332 | 52,15 | 1.016.422.602 | NAKER |
| 04. Program Penempatan Tenaga Kerja | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | % | | 77,61 | 156.613.852 | 78,39 | 159.419.871 | 79,08 | 100.039.570 | 79,69 | 99.917.155 | 80,23 | 67.761.507 | NAKER |
| 05. Program Hubungan Industrial | | | | | 520.532.821 | | 529.859.103 | | 393.024.845 | | 389.082.356 | | 388.190.679 | NAKER |
| | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%) | % | | 32,67 | | 36,17 | | 39,67 | | 43,17 | | 46,67 | | NAKER |
| | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Pemerintah | Perusahaan | 161,00 | 245,00 | | 329,00 | | 413,00 | | 497,00 | | 581,00 | | NAKER |
| 06. Program Pengawasan Ketenagakerjaan | Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan | Perusahaan | 544,00 | 1.924,00 | 477.889.835 | 2.044,00 | 486.452.091 | 2.044,00 | 360.827.542 | 2.044,00 | 355.208.029 | 2.044,00 | 353.389.400 | NAKER |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 100,00 | 100,00 | 36.044.658.777 | 100,00 | 35.810.368.495 | 100,00 | 35.577.601.099 | 100,00 | 35.346.346.692 | 100,00 | 35.116.595.439 | NAKER |
| **2.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | | | | | 590.021.610 | | 600.592.908 | | 445.491.893 | | 441.023.099 | | 440.012.387 | DP3A |
| | Indeks Pembangunan Gender | Indeks | 92,64 | 93,05 | | 93,50 | | 93,70 | | 93,70 | | 93,75 | | DP3A |
| | Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBA | % | 8,06 | 10,00 | | 11,00 | | 12,00 | | 13,00 | | 14,00 | | DP3A |
| | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | % | 49,62 | 51,32 | | 51,60 | | 51,90 | | 52,00 | | 52,10 | | DP3A |

| Urusan/Bidang Urusan/Program | Indikator | Satuan | Baseline (2024) | Tahun | | | | | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | |
| 03. Program Perlindungan Perempuan | Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprenhensif | % | 100,00 | 100,00 | 775.681.538 | 100,00 | 789.579.267 | 100,00 | 585.673.187 | 100,00 | 579.798.214 | 100,00 | 578.469.466 | DP3A |
| 04. Program Peningkatan Kualitas Keluarga | | | | | 412.270.746 | | 421.448.998 | | 286.786.820 | | 282.906.708 | | 282.029.184 | DP3A |
| | Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar | % | 60,50 | 70,00 | | 70,50 | | 80,00 | | 80,50 | | 90,00 | | DP3A |
| | Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan kualitas keluarga | % | 12,90 | 21,50 | | 25,80 | | 30,10 | | 34,40 | | 38,70 | | DP3A |
| 05. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Tingkat pemahaman data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan | % | 13,02 | 13,02 | 293.920.384 | 13,02 | 297.394.817 | 13,02 | 246.418.297 | 13,02 | 244.949.554 | 13,02 | 244.617.366 | DP3A |
| 06. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | | | | | 367.634.127 | | 374.220.953 | | 277.579.703 | | 274.795.260 | | 274.165.500 | DP3A |
| | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | Indeks | 0,00 | 66,47 | | 67,15 | | 67,80 | | 68,50 | | 68,80 | | DP3A |
| | Persentase kabupaten kota menuju layak anak (KLA) | % | 73,91 | 82,60 | | 86,90 | | 91,30 | | 93,60 | | 100,00 | | DP3A |
| 07. Program Perlindungan Khusus Anak | | | | | 258.189.697 | | 262.815.630 | | 194.944.414 | | 192.988.898 | | 192.546.617 | DP3A |
| | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | % | NA | 76,15 | | 76,20 | | 76,20 | | 76,30 | | 76,30 | | DP3A |
| | Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | % | NA | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | | DP3A |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 95,00 | 95,00 | 14.713.502.241 | 95,00 | 14.617.864.476 | 95,00 | 14.522.848.357 | 95,00 | 14.428.449.843 | 95,00 | 14.334.664.919 | DP3A |
| **2.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Ketersediaan Pangan Utama | Kg/Kap/Tahun | 156,55 | 156,74 | 2.190.419.725 | 157,49 | 2.229.665.034 | 158,24 | 1.653.861.848 | 158,99 | 1.637.271.720 | 159,74 | 1.633.519.513 | PANGAN |
| 03. Program Peningkatan diversifikasi dan | Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | % | 100,00 | 100,00 | 5.660.243.698 | 100,00 | 5.761.657.144 | 100,00 | 3.363.572.830 | 100,00 | 3.329.832.342 | 100,00 | 3.322.201.221 | PANGAN |

| Urusan/Bidang Urusan/Program | Indikator | Satuan | Baseline (2024) | Tahun | | | | | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | |
| Ketahanan Pangan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 04. Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase Daerah Rawan Pangan | % | 11,42 | 10,38 | 2.140.637.458 | 9,68 | 2.178.990.829 | 8,99 | 1.616.274.079 | 8,30 | 1.600.060.999 | 6,92 | 1.596.394.070 | PANGAN |
| 05. Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan | % | 100,00 | 95,00 | 1.488.489.768 | 95,00 | 1.515.158.739 | 95,00 | 1.123.874.301 | 95,00 | 1.112.600.555 | 95,00 | 1.110.050.760 | PANGAN |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 100,00 | 100,00 | 15.178.971.666 | 100,00 | 15.080.308.350 | 100,00 | 14.982.286.346 | 100,00 | 14.884.901.484 | 100,00 | 14.788.149.625 | PANGAN |
| **2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 03. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum | Persentase Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum | Dokumen | 6,00 | 2,00 | 65.469.654 | 2,00 | 66.642.661 | 2,00 | 49.432.427 | 2,00 | 48.936.563 | 2,00 | 48.824.413 | TANAH |
| 06. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | Persentase legalisasi aset dan penataan akses hasil reforma agraria | % | 30,00 | 10,00 | 25.583.780 | 11,00 | 26.042.159 | 11,00 | 19.316.863 | 10,00 | 19.123.093 | 10,00 | 19.079.267 | TANAH |
| 07. Program Penetapan Tanah Ulayat | Persentase Sengketa dan konflik tanah ulayat lintas kab/kota yang diselesaikan | % | 52,63 | 10,53 | 31.644.381 | 10,53 | 32.211.347 | 10,53 | 23.892.880 | 10,53 | 23.653.207 | 5,26 | 23.599.000 | TANAH |
| 12. Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah | Meningkatnya Kertesediaan Kepemilikan Lahan Untuk Fasilitas Publik dan Tanah Masyarakat Miskin | Persil | 1.970,00 | 400,00 | 882.346.733 | 400,00 | 898.155.562 | 400,00 | 666.210.034 | 400,00 | 659.527.184 | 400,00 | 658.015.717 | TANAH |
| 13. Program Survei, Pengukuran dan Pemetaan | Persentase penyelesaian pemetaan pertanahan | % | 30,85 | 11,00 | 95.893.330 | 11,00 | 97.611.431 | 11,00 | 72.403.621 | 11,00 | 71.677.330 | 11,00 | 71.513.064 | TANAH |
| 14. Program Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan | Persentase Meningkatnya peran kelembagaan pertanahan secara mandiri | % | 75,00 | 75,00 | 217.776.974 | 75,00 | 221.678.840 | 80,00 | 164.431.056 | 80,00 | 162.781.624 | 80,00 | 162.408.571 | TANAH |
| 16. Program Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan | Terintegrasinya sistem informasi pertanahan di kabupaten/kota se Aceh | % | 21,74 | 13,04 | 575.976.380 | 13,04 | 586.296.032 | 13,04 | 434.887.135 | 13,04 | 430.524.719 | 13,04 | 429.538.067 | TANAH |
| 17. Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan | Tersusunnya Mapping/Pemetaan Sengketa dan konflik tanah dan terfasilitasinya sengketa dan konflik tanah | % | 80,00 | 85,00 | 283.414.332 | 85,00 | 288.492.210 | 90,00 | 140.660.556 | 90,00 | 139.249.569 | 100,00 | 138.930.445 | TANAH |

| Urusan/Bidang Urusan/Program | Indikator | Satuan | Baseline (2024) | Tahun | | | | | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 100,00 | 100,00 | 12.275.028.176 | 100,00 | 12.195.240.493 | 100,00 | 12.115.971.429 | 100,00 | 12.037.217.615 | 100,00 | 11.958.975.701 | TANAH |
| **2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti | % | 80,00 | 80,00 | 185.112.466 | 80,00 | 188.429.088 | 80,00 | 139.767.936 | 80,00 | 138.365.904 | 80,00 | 138.048.805 | DLHK |
| 03. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air (IKA) | Indeks | 63,25 | 77,57 | 9.020.562.788 | 77,77 | 9.182.182.395 | 77,97 | 6.810.915.952 | 78,17 | 6.742.594.665 | 78,37 | 6.727.142.368 | DLHK |
| 04. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) | % | 20,00 | 20,00 | 186.294.675 | 20,00 | 218.635.094 | 20,00 | 115.838.105 | 20,00 | 114.676.116 | 20,00 | 114.413.308 | DLHK |
| 05. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) | Jumlah Limbah B3 yang dikelola | Ton | 7.851,20 | 7.855,00 | 34.679.507 | 7.860,00 | 35.300.852 | 7.865,00 | 26.184.531 | 7.870,00 | 25.921.870 | 7.875,00 | 25.862.464 | DLHK |
| 06. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan hidup | % | | 35,00 | 54.996.123 | 35,00 | 55.981.477 | 35,00 | 41.524.457 | 35,00 | 41.107.919 | 35,00 | 41.013.710 | DLHK |
| 08. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensi | % | | 50,00 | 210.068.373 | 50,00 | 213.832.126 | 50,00 | 158.610.729 | 50,00 | 157.019.681 | 50,00 | 156.659.832 | DLHK |
| 09. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup | Jumlah | 12,00 | 6,00 | 96.502.376 | 6,00 | 98.231.390 | 6,00 | 72.863.477 | 6,00 | 72.132.573 | 6,00 | 71.967.264 | DLHK |
| 10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup | % | 80,00 | 10,00 | 36.129.938 | 10,00 | 36.777.271 | 10,00 | 27.279.669 | 10,00 | 27.006.023 | 10,00 | 26.944.132 | DLHK |

| Urusan/Bidang Urusan/Program | Indikator | Satuan | Baseline (2024) | Tahun | | | | | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | |
| 11. Program Pengelolaan Persampahan | | | | | 5.476.049.312 | | 5.574.162.585 | | 4.134.654.621 | | 4.093.179.299 | | 4.083.798.783 | DLHK |
| | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) | % | 48,00 | 55,00 | | 56,50 | | 58,00 | | 59,00 | | 61,00 | | DLHK |
| | Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT) | % RT | | 26,88 | | 31,75 | | 36,63 | | 41,50 | | 46,38 | | DLHK |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 95,00 | 95,00 | 98.344.486.556 | 95,00 | 97.705.247.394 | 95,00 | 97.070.163.286 | 95,00 | 96.439.207.224 | 95,00 | 95.812.352.377 | DLHK |
| **2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Pendaftaran Penduduk | | | | | 202.401.366 | | 206.027.750 | | 152.821.805 | | 151.288.828 | | 150.942.112 | DRKA |
| | Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) | % | 12,05 | 22,90 | | 28,02 | | 34,19 | | 41,00 | | 41,00 | | DRKA |
| | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) | % | 53,46 | 62,18 | | 65,08 | | 68,29 | | 72,04 | | 72,04 | | DRKA |
| 03. Program Pencatatan Sipil | | | | | 160.267.553 | | 163.139.035 | | 121.008.950 | | 119.795.092 | | 119.520.552 | DRKA |
| | Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan | % | 96,65 | 98,00 | | 98,28 | | 98,55 | | 98,79 | | 98,84 | | DRKA |
| | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | DRKA |
| | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | DRKA |
| | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | DRKA |
| 04. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan | % | 52,81 | 59,68 | 316.949.824 | 68,89 | 322.628.550 | 77,62 | 239.310.857 | 86,67 | 236.910.295 | 86,67 | 236.367.358 | DRKA |
| 05. Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan | % | 100,00 | 100,00 | 48.739.009 | 100,00 | 49.612.256 | 100,00 | 36.800.065 | 100,00 | 36.430.918 | 100,00 | 36.347.428 | DRKA |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 97,00 | 98,00 | 11.314.382.081 | 98,00 | 11.240.838.598 | 98,00 | 11.167.773.147 | 98,00 | 11.095.182.621 | 98,00 | 11.023.063.934 | DRKA |

| Urusan/Bidang Urusan/Program | Indikator | Satuan | Baseline (2024) | Tahun | | | | | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | |
| **2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Penataan Desa | Persentase penataan wilayah Mukim dan Gampong yang difasilitasi | % | 0,00 | 0,00 | 308.618.679 | 20,00 | 314.148.137 | 40,00 | 233.020.481 | 60,00 | 230.683.019 | 80,00 | 230.154.353 | DPMG |
| 03. Program Peningkatan Kerja Sama Desa | Persentase pembinaan kerjasama gampong berbasis kawasan perdesaan | % | 0,00 | 0,00 | 116.758.776 | 20,00 | 118.850.720 | 40,00 | 88.157.938 | 60,00 | 87.273.613 | 80,00 | 87.073.604 | DPMG |
| 04. Program Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang sudah menggunakan pelayanan administrasi Pemerintahan secara digital melalui SIGAP | % | 41,00 | 43,00 | 834.413.465 | 46,00 | 849.363.483 | 51,00 | 630.018.338 | 56,00 | 623.698.533 | 61,00 | 622.269.176 | DPMG |
| 05. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | 3.510.810.949 | | 3.573.713.441 | | 2.650.814.462 | | 2.624.223.757 | | 2.618.209.710 | DPMG |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan gampong, adat dan lembaga lainnya yang aktif | % | 46,00 | 47,00 | | 47,50 | | 48,00 | | 48,50 | | 49,00 | | DPMG |
| | Persentase Peningkatan BUMG Maju | % | 2,00 | 4,00 | | 6,00 | | 8,00 | | 10,00 | | 12,00 | | DPMG |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 100,00 | 100,00 | 16.281.363.153 | 100,00 | 16.175.534.293 | 100,00 | 16.070.393.320 | 100,00 | 15.965.935.763 | 100,00 | 15.862.157.181 | DPMG |
| **2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Pengendalian Penduduk | | | | | 79.651.626 | | 81.078.728 | | 60.140.431 | | 59.537.154 | | 59.400.710 | DP3A |
| | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19) | % | 13,90 | 13,60 | | 13,50 | | 13,40 | | 13,20 | | 13,10 | | DP3A |
| | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR) | % | 2,32 | 2,30 | | 2,28 | | 2,27 | | 2,26 | | 2,25 | | DP3A |
| 03. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | | | | | 79.651.626 | | 81.078.725 | | 60.140.431 | | 59.537.154 | | 59.400.710 | DP3A |
| | Angka Prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCR) | % | 57,80 | 57,84 | | 57,86 | | 57,88 | | 57,90 | | 57,92 | | DP3A |
| | Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) | % | 16,50 | 15,10 | | 14,50 | | 13,90 | | 13,30 | | 12,80 | | DP3A |
| 04. Program Pemberdayaan dan | Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga | % | 73,80 | 76,10 | 39.825.813 | 77,10 | 40.539.365 | 78,10 | 30.070.115 | 79,00 | 29.768.580 | 79,85 | 29.700.352 | DP3A |

| Urusan/Bidang Urusan/Program | Indikator | Satuan | Baseline (2024) | Tahun | | | | | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | |
| Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Jalan | Indeks | 76,76 | 76,96 | 58.426.651.362 | 77,16 | 59.473.469.907 | 77,36 | 24.822.451.015 | 77,56 | 24.573.453.401 | 77,96 | 24.567.137.352 | DISHUB |
| 03. Program Pengelolaan Pelayaran | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Penyeberangan | Indeks | 77,34 | 78,49 | 13.264.147.567 | 79,83 | 13.501.798.628 | 81,18 | 10.015.006.422 | 82,52 | 9.914.544.437 | 83,87 | 9.891.822.846 | DISHUB |
| 05. Program Pengelolaan Perkeretaapian | Persentase Masyarakat Berkeselamatan di Daerah Perlintasan Sebidang Kereta Api dengan Jalan Provinsi | % | 0,00 | 20,00 | 836.994.992 | 25,00 | 851.991.263 | 30,00 | 631.967.503 | 35,00 | 625.628.145 | 40,00 | 624.194.366 | DISHUB |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 100,00 | 100,00 | 56.302.966.214 | 100,00 | 55.936.996.934 | 100,00 | 55.573.406.453 | 100,00 | 55.212.179.312 | 100,00 | 54.853.300.146 | DISHUB |
| **2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) | Indeks | 81,33 | 81,20 | 4.280.689.863 | 81,50 | 4.357.386.121 | 81,70 | 3.232.106.417 | 81,80 | 3.199.684.688 | 82,00 | 3.192.351.831 | KOMINSA |
| 03. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Indeks Pemerintahan Digital | Indeks | 1,82 | 2,06 | 7.426.427.964 | 2,25 | 7.559.485.779 | 2,50 | 5.607.275.053 | 2,75 | 5.551.027.663 | 3,00 | 5.538.306.132 | KOMINSA |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 100,00 | 100,00 | 22.583.257.307 | 100,00 | 22.436.466.135 | 100,00 | 22.290.629.105 | 100,00 | 22.145.740.016 | 100,00 | 22.131.792.706 | KOMINSA |
| **2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Persentase Usaha Simpan Pinjam Koperasi Berizin | % | 2,40 | 1,11 | 1.266.223.753 | 1,31 | 1.288.910.429 | 1,45 | 956.053.825 | 1,50 | 946.463.510 | 1,60 | 944.294.459 | KOP UKM |
| 03. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase Koperasi Sehat | % | 37,00 | 39,00 | 1.031.079.855 | 40,00 | 1.049.553.505 | 41,00 | 778.509.988 | 42,00 | 770.700.642 | 43,00 | 768.934.393 | KOP UKM |
| 05. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Jumlah Koperasi yang Meningkat Kapasitas SDM | Koperasi | 150,00 | 200,00 | 948.705.252 | 250,00 | 965.703.013 | 300,00 | 716.313.592 | 350,00 | 709.128.147 | 400,00 | 707.503.007 | KOP UKM |
| 06. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Jumlah Koperasi meningkat kapasitas produksinya | Koperasi | 5,00 | 6,00 | 2.215.493.579 | 4,00 | 2.255.188.131 | 5,00 | 1.672.793.695 | 5,00 | 1.656.013.658 | 5,00 | 1.652.218.500 | KOP UKM |

| Urusan/Bidang Urusan/Program | Indikator | Satuan | Baseline (2024) | Tahun | | | | | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | |
| 07. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Rasio Kewirausahaan Daerah | Rasio | 3,94 | 3,95 | 19.401.724.480 | 3,96 | 19.749.341.270 | 3,96 | 10.512.067.890 | 3,97 | 10.406.619.809 | 3,98 | 10.404.770.508 | KOP UKM |
| 08. Program Pengembangan Umkm | Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil | % | 25,10 | 1,10 | 5.520.020.958 | 1,15 | 5.618.922.061 | 1,20 | 4.167.855.119 | 1,25 | 4.126.046.759 | 1,30 | 4.125.590.919 | KOP UKM |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 100,00 | 100,00 | 23.001.587.732 | 100,00 | 22.852.077.411 | 100,00 | 22.703.538.908 | 100,00 | 22.555.965.905 | 100,00 | 22.509.352.127 | KOP UKM |
| **2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA) | Rp Trilliun | 9,47 | 9,80 | 182.606.929 | 10,00 | 185.878.661 | 10,20 | 137.876.148 | 10,40 | 136.493.092 | 10,60 | 136.180.285 | DPMPTSP |
| 03. Program Promosi Penanaman Modal | Pelaku Usaha/Perusahaan yang berminat berinvestasi | Perusahaan | 100,00 | 200,00 | 452.767.414 | 300,00 | 460.879.556 | 350,00 | 341.859.025 | 400,00 | 338.429.787 | 450,00 | 337.654.193 | DPMPTSP |
| 04. Program Pelayanan Penanaman Modal | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan | Indeks | 90,13 | 90,15 | 445.664.597 | 90,20 | 453.649.480 | 90,25 | 336.496.091 | 90,25 | 333.120.650 | 90,25 | 332.357.223 | DPMPTSP |
| 05. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Meningkatnya Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam Penyampaian LKPM | % | 10,00 | 10,00 | 162.987.693 | 10,00 | 165.907.911 | 10,00 | 123.062.774 | 10,00 | 121.828.313 | 10,00 | 121.549.114 | DPMPTSP |
| 06. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dapat di akses | % | 100,00 | 100,00 | 182.995.581 | 100,00 | 186.274.276 | 100,00 | 138.169.597 | 100,00 | 136.783.597 | 100,00 | 136.470.125 | DPMPTSP |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 100,00 | 100,00 | 22.404.424.628 | 100,00 | 22.258.795.868 | 100,00 | 22.114.113.695 | 100,00 | 21.970.371.956 | 100,00 | 21.827.564.538 | DPMPTSP |
| **2.19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Persentase pemuda yang dibina | % | 0,03 | 0,04 | 1.165.876.387 | 0,05 | 1.186.765.159 | 0,06 | 880.287.214 | 0,07 | 871.456.925 | 0,08 | 869.459.769 | PORA |
| 03. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan | Persentase pembinaan olahraga | % | 55,73 | 55,57 | 65.751.061.827 | 60,60 | 71.391.051.050 | 63,63 | 33.096.601.353 | 68,18 | 32.764.604.535 | 72,72 | 32.759.516.470 | PORA |
| 04. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Persentase gerakan kepramukaan yang aktif | % | 95,00 | 95,00 | 6.770.388.240 | 96,00 | 6.891.691.923 | 97,00 | 4.284.521.588 | 98,00 | 4.241.542.929 | 100,00 | 4.231.822.402 | PORA |

| Urusan/Bidang Urusan/Program | Indikator | Satuan | Baseline (2024) | Tahun | | | | | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 100,00 | 100,00 | 26.547.506.226 | 100,00 | 26.374.947.436 | 100,00 | 26.203.510.277 | 100,00 | 26.033.187.460 | 100,00 | 25.863.971.742 | PORA |
| **2.20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Indeks | 2,20 | 2,25 | 299.515.026 | 2,30 | 304.881.377 | 2,35 | 226.146.829 | 2,40 | 223.878.317 | 2,60 | 223.365.246 | KOMINSA |
| **2.21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Indeks Keamanan Informasi (KAMI) | Indeks | 40,00 | 45,00 | 363.732.895 | 50,00 | 370.249.824 | 55,00 | 274.634.104 | 60,00 | 271.879.209 | 65,00 | 271.256.132 | KOMINSA |
| **2.22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Pengembangan Kebudayaan | Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan | % | 0,86 | 0,90 | 3.849.470.997 | 0,91 | 3.918.441.194 | 0,96 | 2.906.517.480 | 0,98 | 2.877.361.781 | 1,00 | 2.870.767.606 | BUDPAR |
| 03. Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan | % | 14,75 | 4,92 | 536.439.075 | 6,56 | 546.050.346 | 9,84 | 405.034.757 | 11,48 | 400.971.794 | 12,30 | 400.052.870 | BUDPAR |
| 04. Program Pembinaan Sejarah | persentase masyarakat penerima akses informasi sejarah | % | 0,01 | 4,38 | 1.057.596.640 | 8,77 | 1.076.545.386 | 13,25 | 798.531.311 | 17,54 | 790.521.127 | 21,92 | 788.709.455 | BUDPAR |
| 05. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | persentase warisan budaya yang dilestarikan | % | 61,49 | 61,86 | 7.612.514.182 | 62,89 | 7.748.906.066 | 63,62 | 4.092.948.147 | 64,14 | 4.051.891.189 | 64,65 | 4.042.605.295 | BUDPAR |
| 06. Program Pengelolaan Permuseuman | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan ke museum | % | -1,54 | 0,50 | 19.645.590.266 | 0,50 | 19.997.576.350 | 0,50 | 12.411.225.507 | 0,50 | 12.286.726.701 | 0,50 | 12.258.568.676 | BUDPAR |
| 07. Program Majelis Adat Aceh (MAA) | Indeks Adat Istiadat Aceh | Indeks | 0,06 | 0,15 | 872.137.472 | 0,30 | 887.763.383 | 0,45 | 658.501.599 | 0,60 | 651.896.074 | 0,65 | 650.402.095 | MAA |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 100,00 | 100,00 | 29.035.258.155 | 100,00 | 28.846.528.977 | 100,00 | 28.659.026.538 | 100,00 | 28.472.742.866 | 100,00 | 28.373.482.471 | BUDPAR |
| | | % | 100,00 | 100,00 | 9.768.491.047 | 100,00 | 9.704.995.855 | 100,00 | 9.641.913.382 | 100,00 | 9.579.240.945 | 100,00 | 9.516.975.879 | MAA |
| **2.23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Pembinaan Perpustakaan | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | 72,42 | 74,25 | 10.627.309.713 | 75,50 | 10.817.717.081 | 77,00 | 7.312.694.069 | 78,50 | 7.239.339.372 | 79,00 | 7.222.748.664 | ARPUS |

| Urusan/Bidang Urusan/Program | Indikator | Satuan | Baseline (2024) | Tahun | | | | | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 97,33 | 95,00 | 32.383.333.386 | 95,00 | 32.172.841.719 | 95,00 | 31.963.718.248 | 95,00 | 31.755.954.079 | 95,00 | 31.649.540.377 | ARPUS |
| **2.24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Pengelolaan Arsip | Indeks Pengawasan Kearsipan | Indeks | 75,77 | 77,00 | 1.573.289.373 | 80,00 | 1.601.477.682 | 83,00 | 1.187.901.680 | 85,00 | 1.175.985.665 | 87,00 | 1.173.290.608 | ARPUS |
| 03. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | Rasio Naskah Kuno | Rasio | 0,05 | 0,06 | 194.797.938 | 0,07 | 198.288.093 | 0,08 | 134.041.235 | 0,08 | 132.696.648 | 0,09 | 132.392.542 | ARPUS |
| 03. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | Tingkat Digitalisasi Arsip | Indeks | 93,54 | 94,50 | 112.100.962 | 95,00 | 114.109.453 | 96,00 | 84.641.086 | 97,00 | 83.792.039 | 98,00 | 83.600.009 | ARPUS |
| 04. Program Perizinan Penggunaan Arsip | Rasio arsip yang dimanfaatkan | Rasio | 0,05 | 0,50 | 113.470.213 | 0,70 | 115.503.236 | 0,75 | 85.674.930 | 0,80 | 84.815.512 | 0,85 | 84.621.137 | ARPUS |
| **3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Nilai Tukar Nelayan (NTN) | Indeks | 104,71 | 107,13 | 199.129.066 | 108,34 | 202.696.821 | 109,55 | 150.351.077 | 110,76 | 148.842.884 | 111,97 | 148.501.774 | DKP |
| 03. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | Ton | 270.260,17 | 274.000,00 | 8.028.606.753 | 276.000,00 | 8.172.453.683 | 278.000,00 | 4.407.116.076 | 280.000,00 | 4.362.907.654 | 282.000,00 | 4.352.908.990 | DKP |
| 04. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | Ton | 91.116,55 | 92.000,00 | 7.377.576.152 | 92.500,00 | 7.509.758.699 | 93.000,00 | 3.915.559.750 | 93.500,00 | 3.876.282.201 | 94.000,00 | 3.867.398.757 | DKP |
| 05. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Luas Kawasan Konservasi (Ha) | Ha | 149.691,39 | 149.691,39 | 149.346.799 | 149.691,39 | 152.022.616 | 149.691,39 | 112.763.308 | 149.691,39 | 111.632.163 | 149.691,39 | 111.376.330 | DKP |
| 06. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) | Kg/Kapita/ Tahun | 65,93 | 59,52 | 2.546.968.999 | 59,65 | 2.592.602.530 | 59,73 | 1.923.072.007 | 59,87 | 1.903.781.392 | 59,94 | 1.900.418.414 | DKP |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 100,00 | 100,00 | 42.934.241.820 | 100,00 | 42.655.169.249 | 100,00 | 42.377.910.649 | 100,00 | 42.102.454.229 | 100,00 | 41.828.788.277 | DKP |
| **3.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Peningkatan Daya | Persentase pertumbuhan Kunjungan Wisatawan mancanegara dan nusantara | % | 44,41 | 18,00 | 4.518.696.115 | 21,00 | 4.599.656.683 | 24,00 | 3.411.811.455 | 27,00 | 3.377.587.079 | 30,00 | 3.369.846.516 | BUDPAR |

| Urusan/Bidang Urusan/Program | Indikator | Satuan | Baseline (2024) | Tahun | | | | | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | |
| Tarik Destinasi Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | |
| 03. Program Pemasaran Pariwisata | Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata | % | 44,41 | 58,00 | 5.099.735.944 | 61,00 | 5.191.106.886 | 64,00 | 3.850.521.714 | 67,00 | 3.811.896.571 | 70,00 | 3.803.160.683 | BUDPAR |
| 04. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual | % | 29,70 | 30,90 | 52.313.637 | 31,51 | 53.250.930 | 32,14 | 39.499.064 | 32,79 | 39.102.843 | 33,44 | 39.013.229 | BUDPAR |
| 05. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi | % | 0.03 | 0,05 | 247.251.737 | 0,06 | 251.681.697 | 0,07 | 186.685.780 | 0,08 | 184.813.108 | 0,09 | 184.389.564 | BUDPAR |
| **3.27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Pertumbuhan produksi telur (ayam, itik, puyuh) | Ton | 16.984,00 | 344,00 | 2.986.935.988 | 564.655,00 | 3.040.452.319 | 564.655,00 | 2.255.266.157 | 564.655,00 | 2.232.643.254 | 564.655,00 | 2.227.526.609 | DISNAK |
| | Rasio Kabupaten yang memiliki Qanun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | % | 35,00 | 39,00 | 56.957.207.813 | 43,00 | 57.977.698.634 | 48,00 | 34.731.010.691 | 52,00 | 34.382.618.875 | 56,00 | 34.303.822.737 | TANBUN |
| 02. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pertumbuhan Produksi daging (Ternak Besar, Kecil dan Unggas) | Ton | 63.011,00 | 12.500,00 | 4.417.944.259 | 12.670,00 | 4.497.099.676 | 12.700,00 | 3.335.739.436 | 12.715,00 | 3.302.278.149 | 12.810,00 | 3.294.710.175 | DISNAK |
| | Produktivitas komoditas pangan utama (padi) | Ton/Ha | 5,54 | 5,56 | 105.811.200.779 | 5,57 | 107.706.998.753 | 5,58 | 70.330.277.874 | 5,59 | 69.624.784.636 | 5,60 | 69.465.222.498 | TANBUN |
| 04. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | % | 8,74 | 7,87 | 3.225.743.205 | 7,08 | 3.283.538.197 | 6,37 | 2.435.575.958 | 5,73 | 2.411.144.342 | 5,16 | 2.405.618.618 | DISNAK |
| | Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Bakteri yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak | % | 0,13 | 0,11 | | 0,10 | | 0,09 | | 0,08 | | 0,07 | | DISNAK |
| | Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Parasit yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak | % | 8,74 | 7,87 | | 7,08 | | 6,37 | | 5,73 | | 5,16 | | DISNAK |
| | Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Virus yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak | % | 8,91 | 7,20 | | 6,48 | | 5,83 | | 5,25 | | 4,73 | | DISNAK |

| Urusan/Bidang Urusan/Program | Indikator | Satuan | Baseline (2024) | Tahun | | | | | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | |
| 05. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase Keberhasilan Panen | % | 95,20 | 95,30 | 597.387.198 | 95,40 | 608.090.464 | 95,50 | 372.336.765 | 95,60 | 368.601.801 | 95,70 | 367.757.060 | TANBUN |
| 06. Program Perizinan Usaha Pertanian | Persentase Perusahaan Berizin yang dibina | % | 80,00 | 90,00 | 2.887.984.972 | 95,00 | 2.939.728.417 | 97,00 | 2.180.553.850 | 98,00 | 2.158.680.397 | 100,00 | 2.153.733.256 | TANBUN |
| 07. Program Penyuluhan Pertanian | Indek Terima Peternak (ItPt) | Indeks | 105,55 | 106,43 | 3.045.870.657 | 106,66 | 3.100.442.908 | 106,73 | 2.299.764.386 | 106,84 | 2.276.695.116 | 107,00 | 2.271.477.515 | DISNAK |
| | Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya | KEP | 604,00 | 60,00 | 7.477.296.424 | 60,00 | 7.611.265.638 | 60,00 | 5.645.682.946 | 60,00 | 5.589.050.280 | 60,00 | 5.576.241.611 | TANBUN |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 100,00 | 100,00 | 37.589.166.952 | 100,00 | 37.344.837.367 | 100,00 | 37.102.095.924 | 100,00 | 36.860.932.300 | 100,00 | 36.621.336.240 | DISNAK |
| | | % | 100,00 | 100,00 | 108.177.251.000 | 100,00 | 107.474.098.869 | 100,00 | 106.775.517.226 | 100,00 | 106.081.476.364 | 100,00 | 105.391.946.768 | TANBUN |
| **3.28. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 03. Program Pengelolaan Hutan | | | | | 92.961.042.913 | | 107.021.209.144 | | 57.803.214.262 | | 57.223.381.820 | | 57.222.240.514 | DLHK |
| | Indek Tutupan Lahan (IKL) | Indeks | 76,60 | 87,01 | | 87,08 | | 87,15 | | 87,22 | | 87,22 | | DLHK |
| | Persentase Kerusakan Kawasan Hutan | % | 0,19 | 0,30 | | 0,30 | | 0,30 | | 0,30 | | 0,30 | | DLHK |
| | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis | % | 2,50 | 0,50 | | 0,70 | | 0,90 | | 1,00 | | 1,00 | | DLHK |
| 04. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya | Indeks Keanekaragaman Hayati | % | | 0,60 | 3.628.179.720 | 0,60 | 3.693.185.085 | 0,60 | 2.739.432.972 | 0,60 | 2.711.953.322 | 0,61 | 2.705.738.221 | DLHK |
| 05. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | | 16.538.669.373 | | 16.834.989.381 | | 10.832.582.270 | | 10.723.919.063 | | 10.699.342.593 | DLHK |
| | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok usaha Perhutanan Sosial (KUPS) | % | | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 | | DLHK |
| | Persentase Peningkatan Kelompok Petani Hutan | % | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | | DLHK |
| 06. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) | Rehalibitasi lahan di sempadan sungai | Hektare | | 15,00 | 49.782.266 | 15,00 | 50.674.205 | 15,00 | 37.587.769 | 15,00 | 37.210.721 | 15,00 | 37.125.443 | DLHK |
| **3.29. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian | Luas Wilayah Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota | Km2 | 3.086,00 | 6.200,00 | 1.450.000.000 | 7.053,00 | 1.490.000.000 | 7.644,00 | 1.634.000.000 | 8.769,00 | 1.792.400.000 | 9.894,00 | 1.792.400.000 | ESDM |

| Urusan/Bidang Urusan/Program | Indikator | Satuan | Baseline (2024) | Tahun | | | | | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | |
| 03. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara | Persentase kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB | % | 7,05 | 4,75 | 1.744.780.000 | 4,90 | 1.706.080.000 | 5,05 | 1.695.400.000 | 5,20 | 2.066.174.000 | 5,35 | 1.907.394.800 | ESDM |
| 05. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan | Rasio ketersediaan energi baru terbarukan atau (EBT) terhadap pemakaian energi listrik | % | 6,15 | 20,86 | 61.538.398.879 | 21,38 | 71.526.293.869 | 20,39 | 37.070.393.185 | 25,55 | 42.490.161.104 | 31,47 | 47.428.247.714 | ESDM |
| 06. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan | Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)* | kWh | 641,00 | 714,50 | 34.217.500.000 | 779,00 | 25.555.000.000 | 843,50 | 18.625.000.000 | 908,00 | 11.695.000.000 | 972,50 | 6.497.500.000 | ESDM |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 100,00 | 100,00 | 27.125.257.177 | 100,00 | 27.469.626.272 | 100,00 | 24.864.935.060 | 100,00 | 25.088.390.791 | 100,00 | 25.346.718.520 | ESDM |
| **3.30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Persentase fasilitasi pelaku usaha dalam izin perdagangan | % | 100,00 | 100,00 | 593.250.474 | 100,00 | 603.879.623 | 100,00 | 447.929.825 | 100,00 | 443.436.576 | 100,00 | 442.420.333 | INDAG |
| 03. Program Peningkatan Sarana distribusi Perdagangan | Menjamin ketersediaan stok bapokting dan keterjangkauan harga | % | 10,00 | 20,00 | 691.035.009 | 25,00 | 703.416.144 | 60,00 | 521.761.388 | 80,00 | 516.527.524 | 100,00 | 515.343.776 | INDAG |
| 04. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat provinsi | % | 7,23 | 6,95 | 5.469.603.001 | 6,81 | 5.567.600.777 | 6,67 | 4.129.787.377 | 6,53 | 4.088.360.879 | 6,39 | 4.078.991.405 | INDAG |
| 05. Program Pengembangan Ekspor | | | | | 521.430.915 | | 530.773.288 | | 393.702.945 | | 389.753.654 | | 388.860.438 | INDAG |
| | Nilai Ekspor bersih Aceh | USD | 220.434.197,00 | 238.421.628,00 | | 247.958.493,00 | | 258.203.769,00 | | 268.531.920,00 | | 279.273.197,00 | | INDAG |
| | Persentase peningkatan ekspor | % | 10,77 | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | | INDAG |
| 06. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | Persentase penanganan pengaduan konsumen | % | 100,00 | 100,00 | 1.884.870.453 | 100,00 | 1.918.641.297 | 100,00 | 1.423.158.902 | 100,00 | 1.408.882.988 | 100,00 | 1.405.654.190 | INDAG |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 100,00 | 100,00 | 26.852.681.636 | 100,00 | 26.678.139.205 | 100,00 | 26.504.731.300 | 100,00 | 26.332.450.547 | 100,00 | 26.161.289.618 | INDAG |
| **3.31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | | | | | 8.916.128.436 | | 9.075.876.913 | | 6.619.320.271 | | 6.552.920.907 | | 6.537.903.294 | INDAG |
| | Jumlah produk tersertifikasi halal | Produk | 44.577,00 | 42.202,00 | | 42.703,00 | | 43.173,00 | | 43.573,00 | | 43.973,00 | | INDAG |

| Urusan/Bidang Urusan/Program | Indikator | Satuan | Baseline (2024) | Tahun | | | | | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | |
| | Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%) | % | 1,25 | 1,35 | | 1,40 | | 1,44 | | 1,49 | | 1,54 | | INDAG |
| 03. Program Pengendalian Izin Usaha Industri | Persentase jumlah izin yang dikeluarkan | % | 100,00 | 100,00 | 25.641.004 | 100,00 | 26.100.408 | 100,00 | 19.360.069 | 100,00 | 19.165.866 | 100,00 | 19.121.942 | INDAG |
| 04. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Persentase kepatuhan pelaporan informasi industri | % | 70,00 | 80,00 | 25.634.741 | 90,00 | 26.094.033 | 100,00 | 19.355.341 | 100,00 | 19.161.184 | 100,00 | 19.117.272 | INDAG |
| 07. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Proporsi penggunaan produk lokal dalam promosi yang difasilitasi (%) | % | 100,00 | 100,00 | 236.959.262 | 100,00 | 241.204.814 | 100,00 | 178.914.515 | 100,00 | 177.119.798 | 100,00 | 176.713.885 | INDAG |
| **3.32. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi | Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan | % | 35,71 | 38,17 | 89.608.080 | 40,63 | 91.213.570 | 43,09 | 67.657.985 | 45,55 | 66.979.298 | 50,00 | 66.825.798 | NAKER |
| 03. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang | % | 35,71 | 38,17 | 258.867.786 | 40,63 | 263.505.868 | 43,09 | 195.456.400 | 45,55 | 193.495.749 | 50,00 | 193.052.306 | NAKER |
| 04. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Persentase transmigrasi yang dibina dan diberdayakan | % | 35,71 | 38,17 | 601.055.155 | 40,63 | 611.824.139 | 43,09 | 353.783.128 | 45,55 | 351.353.181 | 50,00 | 351.304.880 | NAKER |
| **4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.01. SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Penataan Organisasi | Persentase OPD yang melakukan penataan organisasi | % | 86,00 | 88,00 | 751.279.212 | 89,00 | 764.739.730 | 90,00 | 567.248.374 | 91,00 | 561.558.223 | 92,00 | 560.271.275 | SETDA/RO ORGAN |
| 03. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah | | Skor | | | 2.050.381.334 | | 2.087.117.603 | | 1.548.126.793 | | 1.532.597.308 | | 1.529.084.988 | SETDA/RO PEMOTDA |
| | Efektivitas kerjasama daerah | % | | | | | | | | | | | | SETDA/RO PEMOTDA |
| | Nilai LPPD | Skor | | 2,95 | | 2,96 | | 2,96 | | 2,97 | | 2,97 | | SETDA/RO PEMOTDA |
| | Persentase penyelesaian sengketa tapal batas wilayah | % | | | | | | | | | | | | SETDA/RO PEMOTDA |
| 04. Program Kesejahteraan Rakyat | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | % | | 75,00 | 8.787.446.037 | 75,00 | 8.944.888.938 | 75,00 | 6.634.902.699 | 75,00 | 6.568.347.026 | 75,00 | 6.553.294.061 | SETDA/RO ISRA |
| 05. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | | | | | 3.841.424.281 | | 3.910.250.306 | | 2.900.441.860 | | 2.871.347.106 | | 2.864.766.716 | SETDA/RO HUKOM |

| Urusan/Bidang Urusan/Program | Indikator | Satuan | Baseline (2024) | Tahun | | | | | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | |
| | Indeks penyelesaian fasilitas perundang-undangan | % | 85,00 | 85,00 | | 85,00 | | 85,00 | | 85,00 | | 85,00 | | SETDA/RO HUKOM |
| | Persentase penyelesaian bantuan hukum | % | 85,00 | 85,00 | | 85,00 | | 85,00 | | 85,00 | | 85,00 | | SETDA/RO HUKOM |
| 06. Program Perekonomian dan Pembangunan | Persentase perumusan bahan kebijakan umum perekonomian yang ditindaklanjuti | % | 100,00 | 99,00 | 1.599.799.204 | 99,00 | 1.628.462.484 | 99,00 | 1.207.917.751 | 99,00 | 1.195.800.953 | 99,00 | 1.193.060.484 | SETDA/RO EKO |
| 07. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa | Indeks | 81,84 | 82,00 | 7.972.752.249 | 83,25 | 8.115.598.445 | 84,50 | 6.019.773.572 | 85,15 | 5.959.388.348 | 86,10 | 5.945.730.959 | SETDA/RO PBJ |
| 08. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | Persentase Peningkatan Kualitas Penyeleggaraan pembangunan | % | 85,00 | 87,00 | 1.347.177.192 | 88,00 | 1.371.314.294 | 89,00 | 1.017.177.181 | 90,00 | 1.006.973.729 | 90,50 | 1.004.666.003 | SETDA/RO ADPEM |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | SETDA/RO ADPEM |
| | | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | SETDA/RO ADPIM |
| | | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | SETDA/RO HUKOM |
| | | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | SETDA/RO ISRA |
| | | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | SETDA/RO ORGAN |
| | | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | SETDA/RO PEMOTDA |
| | | % | 100,00 | 100,00 | 196.390.634.228 | 100,00 | 195.114.095.106 | 100,00 | 193.845.853.488 | 100,00 | 192.585.855.440 | 100,00 | 191.334.047.380 | SETDA/RO UMUM |
| **4.02. SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRA | % | 95,00 | 95,00 | 145.557.562.811 | 95,00 | 152.456.521.814 | 95,00 | 121.769.374.446 | 95,00 | 104.085.650.380 | 95,00 | 117.336.385.050 | DPRA |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 95,00 | 95,00 | 116.863.974.682 | 95,00 | 110.647.592.692 | 95,00 | 111.249.253.301 | 95,00 | 127.169.253.301 | 95,00 | 112.709.253.301 | DPRA |
| **5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.01. PERENCANAAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan | % | 90,00 | 100,00 | 12.605.631.935 | 100,00 | 12.831.484.504 | 100,00 | 8.690.383.539 | 100,00 | 8.603.209.039 | 100,00 | 8.583.492.692 | BAPPEDA |

| Urusan/Bidang Urusan/Program | Indikator | Satuan | Baseline (2024) | Tahun | | | | | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | |
| 03. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | 4.504.924.569 | | 4.585.638.395 | | 3.401.413.341 | | 3.367.293.269 | | 3.359.576.297 | BAPPEDA |
| | Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJP,RPJMA,RKPA) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | BAPPEDA |
| | Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJP,RPJMA,RKPA) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | BAPPEDA |
| | Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJP,RPJMA,RKPA) bidang Perekonomian dan SDA | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | BAPPEDA |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 100,00 | 100,00 | 35.595.220.078 | 100,00 | 35.363.851.147 | 100,00 | 35.133.986.115 | 100,00 | 34.905.615.205 | 100,00 | 34.678.728.706 | BAPPEDA |
| **5.02. KEUANGAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Indeks kualitas pelayanan keuangan | Skor | n/a | 3,20 | 1.846.364.553.722 | 3,50 | 1.807.109.639.287 | 3,80 | 841.537.364.810 | 3,90 | 822.765.348.539 | 3,95 | 821.993.332.269 | BPKA |
| 03. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Peningkatan kualitas laporan keuangan | % | 88,80 | 90,80 | 4.412.900.503 | 90.82 | 4.491.965.552 | 90.84 | 3.331.931.182 | 90.86 | 3.298.508.096 | 90.88 | 3.290.948.762 | BPKA |
| 04. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase kemandirian fiskal Aceh | % | | 27,66 | 25.517.132.499 | 27,80 | 25.974.317.823 | 47,14 | 19.266.541.220 | 48,41 | 19.073.275.746 | 48,41 | 19.059.564.692 | BPKA |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 100,00 | 100,00 | 130.224.560.302 | 100,00 | 129.378.100.660 | 100,00 | 128.537.143.006 | 100,00 | 127.701.651.577 | 100,00 | 126.871.590.841 | BPKA |
| **5.03. KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Kepegawaian Daerah | Persentase fasilitasi pembinaan pelayanan kepegawaian kepada SKPA | % | 98.2 | 98,00 | 944.330.230 | 98,00 | 970.472.100 | 98,00 | 695.028.628 | 98,00 | 688.056.695 | 98,00 | 686.479.846 | BKA |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 98,00 | 98,00 | 205.863.678.549 | 98,00 | 204.525.564.638 | 98,00 | 203.196.148.468 | 98,00 | 201.875.373.503 | 98,00 | 200.563.183.575 | BKA |

| Urusan/Bidang Urusan/Program | Indikator | Satuan | Baseline (2024) | Tahun | | | | | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | |
| **5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | | | 50.323.258.017 | | 51.224.889.696 | | 37.996.241.348 | | 37.615.095.529 | | 37.528.891.383 | BPSDM |
| | Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal | Orang | 115,00 | 150,00 | | 175,00 | | 200,00 | | 210,00 | | 230,00 | | BPSDM |
| | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | % | 0,30 | 1,80 | | 3,30 | | 4,80 | | 6,30 | | 8,10 | | BPSDM |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 95,00 | 95,00 | 30.105.543.227 | 95,00 | 29.909.857.196 | 95,00 | 29.715.443.124 | 95,00 | 29.522.292.744 | 95,00 | 29.330.397.841 | BPSDM |
| **5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah | | 80,00 | 80,00 | 1.029.346.001 | 81,00 | 1.055.884.553 | 82,00 | 779.794.638 | 82,00 | 769.348.734 | 82,00 | 770.855.318 | BAPPEDA |
| 03. Program Riset dan Inovasi Daerah | | | | | 1.010.000.000 | | 1.020.000.000 | | 760.000.000 | | 755.000.000 | | 750.000.000 | BAPPEDA |
| | Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah | % | NA | 82,00 | | 85,00 | | 89,00 | | 92,00 | | 95,00 | | BAPPEDA |
| | Persentase kajian berabasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah | % | NA | 82,00 | | 85,00 | | 89,00 | | 92,00 | | 95,00 | | BAPPEDA |
| **5.07. PENGELOLAAN PENGHUBUNG** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Pelayanan Penghubung | Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA | % | 100,00 | 70,00 | 3.675.000.000 | 75,00 | 3.675.000.000 | 80,00 | 3.675.000.000 | 85,00 | 3.675.000.000 | 90,00 | 3.675.000.000 | BPA |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 100,00 | 100,00 | 31.548.521.933 | 100,00 | 31.393.934.499 | 100,00 | 30.385.512.746 | 100,00 | 30.155.999.152 | 100,00 | 29.945.677.936 | BPA |
| **6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.01. INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal | % | 75,28 | 80,00 | 7.029.851.422 | 83,50 | 7.155.803.854 | 85,00 | 5.307.842.572 | 87,50 | 5.254.598.832 | 90,00 | 5.242.556.640 | INSPEKTORAT |
| 03. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Aparatur yang memenuhi kompetensi | Level | 3,00 | 3,00 | 5.810.783.297 | 3,00 | 5.914.893.931 | 3,00 | 4.387.393.290 | 3,00 | 4.343.382.710 | 3,00 | 4.333.428.792 | INSPEKTORAT |

| Urusan/Bidang Urusan/Program | Indikator | Satuan | Baseline (2024) | Tahun | | | | | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 100,00 | 100,00 | 38.804.594.950 | 100,00 | 38.552.365.083 | 100,00 | 38.301.774.710 | 100,00 | 38.052.813.174 | 100,00 | 37.805.469.889 | INSPEKTORAT |
| **8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase masyarakat yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan | % | 31,00 | 42,00 | 2.375.893.750 | 46,00 | 2.418.462.160 | 52,00 | 1.793.902.778 | 57,00 | 1.775.907.878 | 62,00 | 1.773.837.953 | KESBANGPOL |
| 03. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase Masyarakat yang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas pendidikan politik | % | 10,00 | 17,00 | 28.636.779.128 | 23,00 | 31.010.487.800 | 33,00 | 21.460.994.698 | 43,00 | 21.245.716.341 | 54,00 | 21.235.026.612 | KESBANGPOL |
| 04. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah LSM/ORMAS yang terdaftar | LSM/ORMAS | 10,00 | 15,00 | 459.567.221 | 20,00 | 467.801.194 | 26,00 | 346.993.174 | 30,00 | 343.512.435 | 35,00 | 342.725.193 | KESBANGPOL |
| 05. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | | | | | 786.695.803 | | 800.790.873 | | 593.989.435 | | 588.031.041 | | 586.683.424 | KESBANGPOL |
| | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | Indeks | | 74,08 - 74,26 | | 74,46 - 74,71 | | 74,84 - 75,15 | | 75,22- 75,60 | | 75,60 - 76,05 | | KESBANGPOL |
| | Persentase masyarakat yang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi dalam rangka Pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial dan budaya | % | 44,98 | 52,00 | | 55,00 | | 57,00 | | 59,00 | | 61,00 | | KESBANGPOL |
| 06. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase penanganan potensi konflik sosial | % | 75,00 | 80,00 | 1.238.749.063 | 82,00 | 1.260.943.480 | 84,00 | 935.309.243 | 86,00 | 925.927.020 | 88,00 | 923.805.033 | KESBANGPOL |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 95,00 | 95,00 | 16.017.418.964 | 95,00 | 15.913.305.741 | 95,00 | 15.809.869.253 | 95,00 | 15.707.105.103 | 95,00 | 15.705.008.920 | KESBANGPOL |

| Urusan/Bidang Urusan/Program | Indikator | Satuan | Baseline (2024) | Tahun | | | | | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | T | Rp | |
| **9. UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.01. KEKHUSUSAN ACEH** | | | | | | | | | | | | | | |
| 02. Program Syariat Islam Aceh | | | | | 12.570.969.491 | | 14.075.720.392 | | 8.039.814.945 | | 8.399.814.945 | | 7.639.814.945 | DSI |
| | Persentase mesjid yang tertata manajemen dan kemakmurannya | % | 76,00 | 82,00 | | 85,00 | | 88,00 | | 91,00 | | 94,00 | | DSI |
| 03. Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh | Persentase Fatwa dan Tausyiah yang ditetapkan | % | 94,11 | 96,00 | 6.575.044.519 | 97,00 | 6.692.848.268 | 98,00 | 4.964.443.644 | 98,50 | 4.914.644.589 | 99,00 | 4.903.381.485 | MPU |
| 04. Program Baitul Mal Aceh | | | | | 251.992.717.886 | | 271.788.426.929 | | 148.934.706.087 | | 147.440.720.406 | | 147.102.824.113 | BMA |
| | Indeks Wakaf Nasional Aceh | Indeks | 0,65 | 0,71 | | 0,74 | | 0,77 | | 0,80 | | 0,83 | | BMA |
| | Persentase Penyaluran terhadap Pengumpulan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya | % | 80,00 | 90,00 | | 91,00 | | 92,00 | | 93,00 | | 94,00 | | BMA |
| 05. Program Reintegrasi Aceh | | | | | 22.855.909.067 | | 23.301.247.383 | | 16.767.288.865 | | 16.579.031.463 | | 16.536.453.090 | BRA |
| | Persentase korban konflik yang mendapatkan rehabilitasi sosial | % | 12,67 | 14,90 | | 15,43 | | 17,57 | | 18,86 | | 19,61 | | BRA |
| | Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi | % | 6,36 | 15,28 | | 16,11 | | 17,21 | | 18,17 | | 19,18 | | BRA |
| | Persentase korban pelanggaran HAM yang direkomendasikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh | % | | | | | | | | | | | | BRA |
| 06. Program Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh | Indeks Pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe | Indeks | 85,00 | 90,00 | 14.996.690.447 | 92,00 | 15.265.383.129 | 93,50 | 9.668.321.335 | 96,00 | 9.571.336.999 | 98,00 | 9.549.401.951 | KKW |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran | % | 100,00 | 100,00 | 12.618.521.171 | 100,00 | 12.536.500.783 | 100,00 | 12.455.013.528 | 100,00 | 12.374.055.940 | 100,00 | 12.293.624.577 | BMA |
| | | % | 95,00 | 95,00 | 10.631.112.154 | 95,00 | 10.575.009.925 | 95,00 | 10.519.272.360 | 95,00 | 10.463.897.090 | 95,00 | 10.408.881.759 | BRA |
| | | % | 100,00 | 100,00 | 35.377.421.678 | 100,00 | 33.978.960.407 | 100,00 | 32.833.790.282 | 100,00 | 32.171.238.931 | 100,00 | 32.711.029.725 | DSI |
| | | % | 95,00 | 96,00 | 17.377.669.622 | 96,50 | 17.264.714.770 | 97,00 | 17.152.494.124 | 97,50 | 17.041.002.912 | 98,00 | 16.930.236.393 | KKW |
| | | % | 98,00 | 98,00 | 10.215.808.672 | 98,00 | 10.149.405.915 | 98,00 | 10.083.434.777 | 98,00 | 10.017.892.451 | 98,00 | 9.952.776.150 | MPU |

## 4.2. Kinerja Penyelenggara pemerintah daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Aceh merupakan cerminan dari kemampuan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pelayanan publik. Penilaian terhadap kinerja tersebut dilakukan secara sistematis melalui penetapan indikator dan target yang terukur serta relevan dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah.

Salah satu instrumen utama dalam mengukur penetapan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan indikator terpilih yang digunakan untuk menggambarkan secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Indikator ini bersifat strategis, terukur, dan relevan dengan misi serta arah kebijakan pembangunan daerah. Indikator yang digunakan merupakan indikator yang telah diseleksi dan dianggap paling representatif dalam menggambarkan capaian kinerja pembangunan daerah yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Selain IKU, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Aceh juga dievaluasi melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang mencerminkan capaian kinerja secara lebih luas dengan mencakup berbagai aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. IKD berfungsi untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan urusan pemerintahan secara umum dan menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance). IKD disusun berdasarkan dimensi-dimensi kinerja seperti efektivitas, efisiensi, kualitas layanan, dan kepatuhan terhadap regulasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD ini berlaku untuk periode perencanaan tahun 2025 hingga tahun 2030. Tahun 2030 menjadi tahun transisi dalam siklus pembangunan daerah, di mana pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun tersebut akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya. Oleh karena itu, perumusan target tahun 2030 tetap disusun secara terukur, realistis, dan mempertimbangkan kesinambungan kebijakan lintas periode. Indikator Kinerja Daerah secara rinci dapat dilihat pada

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2030

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,51 - 4,74 | 4,74 - 5,00 | 5,00 - 5,29 | 5,29 - 5,69 | 5,69 - 6,09 | 6,09 - 6,60 | BAPPEDA |
| 2 | Rasio Aset Perbankan Syariah/PDRB (ADHB) | % | 27,27 | 27,72 | 28,23 | 29,21 | 30,13 | 31,05 | RO EKO |
| 3 | Rasio Gini | Indeks | 0,290 - 0,293 | 0,287 - 0,291 | 0,284 - 0,289 | 0,281 - 0,287 | 0,278 - 0,285 | 0,275 - 0,283 | BAPPEDA |
| 4 | Tingkat Inflasi | % | 1,5 – 3,5 | 1,5 – 3,5 | 1,5 – 3,5 | 1,5 – 3,5 | 1,33-3,30 | 1,29 - 3,25 | BAPPEDA |
| 5 | Tingkat Kemiskinan | % | 12,00 - 13,00 | 11,27 - 12,24 | 10,54 - 11,48 | 9,8 - 10,72 | 9,08-9,96 | 8,35 - 9,00 | BAPPEDA |
| 6 | Inklusi Keuangan | % | 94,91 | 95,17 | 95,43 | 95,69 | 95,95 | 96,21 | SETDA/RO EKO |
| 7 | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) | % | 30,47 | 34,82 | 39,16 | 43,51 | 47,85 | 52,20 | PERKIM |
| 8 | Indeks Demokrasi Indonesia | Indeks | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi | KESBANGPOL |
| 9 | Indeks Ketahanan Pangan | Indeks | 75,14 | 76,34 | 77,54 | 78,74 | 79,94 | 81,14 | PANGAN |
| 10 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 82,89 | 83,06 | 83,27 | 83,40 | 83,57 | 83,74 | DLHK |
| 11 | Indeks Modal Manusia | Indeks | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | BAPPEDA |
| 12 | Indeks Pembangunan Olahraga | Indeks | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | PORA |
| 13 | Indeks Pembangunan Syariat | Indeks | 80,00 - 87,00 | 80,63 - 87,50 | 81,25 - 88,00 | 81,87 - 88,5 | 82,50 - 89,00 | 83,13 - 89-50 | DSI |
| 14 | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 81,00 | 82,00 | 83,00 | 84,00 | 85,00 | 86,00 | SETDA/RO ORGAN |
| 15 | Indeks Risiko Bencana (IRB) | Indeks | 143/Sedang | 142/Sedang | 141/Sedang | 140Sedang | 139/Sedang | 138/Sedang | BPBA |
| 16 | Indeks Transformasi Digital | Indeks | 50,10 | 50,73 | 51,36 | 51,99 | 52,62 | 53,25 | KOMINSA |
| 18 | Peringkat Inovasi Daerah | Peringkat | 13,00 | 12,60 | 12,20 | 11,80 | 11,40 | 11,00 | BAPPEDA |
| 19 | Persentase kajian Wali Nanggroe terhadap implementasi MoU Helsinki dan UUPA | % | | | | | | | KKW |

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025-2030

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | INDIKATOR KINERJA DAERAH | | | | | | | | |
| A.1. | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | |
| 1 | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%) | % | 92,29 | 93,21 | 94,13 | 95,05 | 95,97 | 96,89 | DINKES |
| 2 | Angka Prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCR) | % | 57,82 | 57,84 | 57,86 | 57,88 | 57,90 | 57,92 | DP3A |
| 3 | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | % | 71,00 | 72,50 | 74,00 | 75,50 | 77,00 | 78,50 | DINKES |
| 4 | Efektivitas kerjasama daerah | % | (blank) | | | | | | |
| 5 | Indeks Keamanan Informasi (KAMI) | Indeks | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | KOMINSA |
| 6 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan | Indeks | 90,13 | 90,15 | 90,20 | 90,25 | 90,25 | 90,25 | DPMPTSP |
| 7 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Jalan | Indeks | 84,58 | 76,96 | 77,16 | 77,36 | 77,56 | 77,96 | DISHUB |
| 8 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Penyeberangan | Indeks | 76,10 | 78,49 | 79,83 | 81,18 | 82,52 | 83,87 | DISHUB |
| 9 | Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) | Indeks | 79,65 | 81,20 | 81,50 | 81,70 | 81,80 | 82,00 | KOMINSA |
| 10 | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 4,47 | 4,50 | 4,53 | 4,55 | 4,57 | 4,60 | SETDA/RO ORGAN |
| 11 | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Indeks | 2,20 | 2,25 | 2,30 | 2,35 | 2,40 | 2,60 | KOMINSA |
| 12 | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Indeks | 5,70 | 5,80 | 5,90 | 6,00 | 6,10 | 6,20 | KOMINSA |
| 13 | Indeks Pemerintahan Digital | Indeks | 1,85 | 2,06 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | KOMINSA |
| 14 | Indeks Pengawasan Kearsipan | Indeks | 67,00 | 77,00 | 80,00 | 83,00 | 85,00 | 87,00 | ARPUS |
| 15 | Indeks penyelesaian fasilitas perundang-undangan | % | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | SETDA/RO HUKOM |

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 16 | Indeks Profesionalisme ASN | Indeks | | 84,55 | 85,00 | 85.5 | 86,00 | 87,00 | BKA |
| 17 | Indeks Reformasi Hukum | Indeks | 68,00 | 69,00 | 70,00 | 71,00 | 72,00 | 73,00 | SETDA/RO HUKOM |
| 18 | Indeks Standarisasi Dayah Aceh (ISDA) | Indeks | 44,12 | 45,05 | 55,00 | 65,05 | 73,80 | 83,06 | DAYAH |
| 19 | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa | Indeks | 100,00 | 82,00 | 83,25 | 84,50 | 85,15 | 86,10 | SETDA/RO PBJ |
| 20 | Indeks Wakaf Nasional Aceh | Indeks | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,80 | 0,83 | BMA |
| 21 | Indeks Zakat Nasional Aceh | Indeks | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | BMA |
| 22 | Jumlah kebijakan yang dihasilkan dibandingkan dengan target atau kebutuhan kebijakan. | Rasio | 1,33 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,33 | MPA |
| 23 | Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan | Perusahaan | 1.558,00 | 1.924,00 | 2.044,00 | 2.044,00 | 2.044,00 | 2.044,00 | NAKER |
| 24 | Maturitas SPIP terintegrasi | Level | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | INSPEKTORAT |
| 25 | Nilai LPPD | Skor | 2,90 | 2,95 | 2,96 | 2,96 | 2,97 | 2,97 | SETDA/RO PEMOTDA |
| 26 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | BPKA |
| 27 | Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan | % | 97,67 | 98,00 | 98,28 | 98,55 | 98,79 | 98,84 | DRKA |
| 28 | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DRKA |
| 29 | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DRKA |
| 30 | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DRKA |
| 31 | Persentase dayah yang mandiri | % | 44,00 | 47,19 | 50,38 | 53,56 | 56,75 | 59,94 | DAYAH |
| 32 | Persentase Desa yang sudah menggunakan pelayanan administrasi Pemerintahan secara digital melalui SIGAP | % | 42,00 | 43,00 | 46,00 | 51,00 | 56,00 | 61,00 | DPMG |
| 33 | Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRA | % | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | DPRA |

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 34 | Persentase fasilitasi pelaku usaha dalam izin perdagangan | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | INDAG |
| 35 | Persentase Fatwa dan Tausyiah yang ditetapkan | % | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 | 98,50 | 99,00 | MPU |
| 36 | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan | % | 46,83 | 59,68 | 68,89 | 77,62 | 86,67 | 86,67 | DRKA |
| 37 | Persentase Kab/Kota Memenuhi Syarat Kualitas Kesehatan Lingkungan | % | 13,04 | 13,04 | 21,74 | 30,43 | 39,13 | 47,83 | DINKES |
| 38 | Persentase Kab/Kota Mencapai Target Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | % | 13,04 | 13,04 | 17,40 | 21,74 | 26,08 | 30,43 | DINKES |
| 39 | Persentase kepatuhan pembangunan terhadap rencana tataruang | % | 0,00 | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 78,00 | 80,00 | PUPR |
| 40 | Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) | % | 15,51 | 22,90 | 28,02 | 34,19 | 41,00 | 41,00 | DRKA |
| 41 | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) | % | 58,80 | 62,18 | 65,08 | 68,29 | 72,04 | 72,04 | DRKA |
| 42 | Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA | % | 95,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | BPPA |
| 43 | Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA | % | 88,00 | 82,00 | 85,00 | 91,00 | 92,00 | 94,00 | PUPR |
| 44 | Persentase lapangan kerja Menurut Status Formal dan Informal | % | 42 : 58 | 43,9 : 56,1 | 45,8 : 54,2 | 47,7 : 52,3 | 49,6 : 50,4 | 51,5 : 48,5 | NAKER |
| 45 | Persentase lembaga kemasyarakatan gampong, adat dan lembaga lainnya yang aktif | % | 46,50 | 47,00 | 47,50 | 48,00 | 48,50 | 49,00 | DPMG |
| 46 | Persentase OPD yang melakukan penataan organisasi | % | 87,00 | 88,00 | 89,00 | 90,00 | 91,00 | 92,00 | SETDA/RO ORGAN |
| 47 | Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi | % | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | BUDPAR |

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 48 | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINKES |
| 49 | Persentase Pemenuhan Layanan Air Minum SPAM Lintas Kab/Kota | % | 15,00 | 20,00 | 30,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | PERKIM |
| 50 | Persentase Peningkatan Kualitas Penyeleggaraan pembangunan | % | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | 90,00 | 90,50 | SETDA/RO ADPEM |
| 51 | Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata | % | 55,00 | 58,00 | 61,00 | 64,00 | 67,00 | 70,00 | BUDPAR |
| 52 | Persentase penyelesaian bantuan hukum | % | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | SETDA/RO HUKOM |
| 53 | Persentase penyelesaian sengketa tapal batas wilayah | % | (blank) | | | | | | SETDA/RO PEMOTDA |
| 54 | Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprenhensif | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DP3A |
| 55 | Persentase perumusan bahan kebijakan umum perekonomian yang ditindaklanjuti | % | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | SETDA/ RO EKO |
| 56 | Persentase RS Regional yang Fungsional | % | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 | DINKES |
| 57 | Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup | % | 78,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | DINKES |
| 58 | Rasio arsip yang dimanfaatkan | Rasio | 0,01 | 0,50 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | ARPUS |
| 59 | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | % | 17,19 | 19,87 | 22,54 | 25,22 | 27,89 | 30,57 | PERKIM |
| 60 | Terintegrasinya sistem informasi pertanahan di kabupaten/kota se Aceh | % | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | TANAH |
| 61 | Tersusunnya Mapping/Pemetaan Sengketa dan konflik tanah dan terfasilitasinya sengketa dan konflik tanah | % | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | TANAH |
| 62 | Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan | % | 77,00 | 77,50 | 78,00 | 78,50 | 79,00 | 80,00 | RSIA/RSJ/ RSUZA |

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| A.2. | ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI | | | | | | | | |
| 63 | Indek Tutupan Lahan (IKL) | Indeks | 86,94 | 87,01 | 87,08 | 87,15 | 87,22 | 87,22 | DLHK |
| 64 | Indeks Adat Istiadat Aceh | Indeks | 0,08 | 0,15 | 0,30 | 0,45 | 0,60 | 0,65 | MAA |
| 65 | Indeks Keanekaragaman Hayati | % | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | DLHK |
| 66 | Indeks kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjalankan syariat islam | % | 83,50 | 84,00 | 85,00 | 86,00 | 87,00 | 88,00 | DSI |
| 67 | Indeks Ketahanan Air Daerah | Indeks | 3,58 | 3,61 | 3,65 | 3,69 | 3,72 | 3,76 | PERKIM |
| 68 | Indeks Ketahanan Daerah | Indeks | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,60 | BPBA |
| 69 | Indeks Kualitas Air (IKA) | Indeks | 77,25 | 77,57 | 77,77 | 77,97 | 78,17 | 78,37 | DLHK |
| 70 | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah | Indeks | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | DLHK |
| 71 | Indeks perdamaian Aceh | Indeks | (blank) | | | | | | BRA |
| 72 | Kapasitas Air Baku (m3/detik) | m3/detik | 0,19 | 0,65 | 1,11 | 1,57 | 2,03 | 2,49 | PENGAIRAN |
| 73 | Ketersediaan Pangan Utama | Kg/Kap/ Tahun | 153,14 | 156,74 | 157,49 | 158,24 | 158,99 | 159,74 | PANGAN |
| 74 | Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)* | kWh | 650,00 | 714,50 | 779,00 | 843,50 | 908,00 | 972,50 | ESDM |
| 75 | Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | PANGAN |
| 76 | Persentase Daerah Rawan Pangan | % | 10,00 | 10,38 | 9,68 | 8,99 | 8,30 | 6,92 | PANGAN |
| 77 | Persentase kawasan transmigrasi berstatus mandiri | % | 14,29 | 14,28 | 28,57 | 35,71 | 40,00 | 42,86 | NAKER |
| 78 | Persentase legalisasi aset dan penataan akses hasil reforma agraria | % | 12,00 | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | TANAH |
| 79 | Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang | % | 35,71 | 38,17 | 40,63 | 43,09 | 45,55 | 50,00 | NAKER |
| 80 | Persentase Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum | Dokumen | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | TANAH |
| 81 | Persentase Meningkatnya peran kelembagaan pertanahan secara mandiri | % | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | TANAH |

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 82 | Persentase pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga Wali Nanggroe | % | (blank) | | | | | | KKW |
| 83 | Persentase Pemenuhan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Regional | % | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | PERKIM |
| 84 | Persentase penataan wilayah Mukim dan Gampong yang difasilitasi | % | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 80,00 | DPMG |
| 85 | Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) Kumulatif | % | 18,54 | 19,72 | 20,09 | 22,08 | 23,26 | 24,44 | DLHK |
| 86 | Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) Tahunan | % | 29,56 | 32,43 | 35,29 | 38,16 | 41,02 | 43,89 | DLHK |
| 87 | Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban | (blank) | (blank) | | | | | | POL PP |
| 88 | Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) | % | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | DLHK |
| 89 | Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%) | % | 61,17 | 62,26 | 63,35 | 64,43 | 65,52 | 66,61 | KESBANGPOL |
| 90 | Indeks Ekonomi Hijau Daerah | % | 63,58 | 65,06 | 66,54 | 68,01 | 69,49 | 70,97 | DLHK |
| A.3. | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | | |
| 91 | Angka Kematian Bayi (AKB) | /1.000 LH | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | DINKES |
| 92 | Angka Kematian Ibu (AKI) | /100.000 LH | 154,00 | 145,50 | 137,00 | 128,50 | 120,00 | 111,50 | DINKES |
| 93 | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional | % | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | DINKES |
| 94 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 14,66-14,68 | 14,77 - 14,78 | 14,88 - 14,89 | 14,98 - 14,98 | 15,06 - 15,09 | 15,16 - 15,19 | DISDIK |
| 95 | Iklim Inklusivitas SMK | nilai | 56,00 | 57,00 | 58,00 | 59,00 | 60,00 | 70,00 | DISDIK |
| 96 | Indek Terima Peternak (ItPt) | Indeks | 105,11 | 106,43 | 106,66 | 106,73 | 106,84 | 107,00 | DISNAK |
| 97 | Indeks Distribusi Guru SDLB | nilai | 0,25 | 0,33 | 0,41 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | DISDIK |
| 98 | Indeks Distribusi Guru SMA | nilai | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,90 | DISDIK |
| 99 | Indeks Distribusi Guru SMALB | nilai | 0,25 | 0,33 | 0,41 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | DISDIK |
| 100 | Indeks Distribusi Guru SMK | nilai | 0,52 | 0,60 | 0,68 | 0,76 | 0,84 | 0,92 | DISDIK |
| 101 | Indeks Distribusi Guru SMPLB | nilai | 0,25 | 0,33 | 0,41 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | DISDIK |

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 102 | Indeks Harga Konsumen | % | 110,00 | 110,00 | 109,00 | 108,00 | 107,00 | 106,00 | INDAG |
| 103 | Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB | nilai | 80,00 | 82,00 | 83,00 | 85,00 | 87,00 | 89,00 | DISDIK |
| 104 | Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA | nilai | 73,00 | 74,00 | 74,00 | 75,00 | 75,00 | 76,00 | DISDIK |
| 105 | Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB | nilai | 72,00 | 78,00 | 83,00 | 89,00 | 94,00 | 99,00 | DISDIK |
| 106 | Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK | nilai | 70,00 | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 78,00 | 83,00 | DISDIK |
| 107 | Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB | nilai | 75,00 | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 79,00 | 80,00 | DISDIK |
| 108 | Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB | nilai | 71,00 | 76,00 | 80,00 | 84,00 | 89,00 | 94,00 | DISDIK |
| 109 | Indeks Iklim Kebhinekaan SMA | nilai | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 75,00 | 76,00 | DISDIK |
| 110 | Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB | nilai | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 78,00 | 80,00 | 82,00 | DISDIK |
| 111 | Indeks Iklim Kebhinekaan SMK | nilai | 71,00 | 72,00 | 73,00 | 75,00 | 76,00 | 83,00 | DISDIK |
| 112 | Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB | nilai | 71,00 | 74,00 | 78,00 | 82,00 | 85,00 | 88,00 | DISDIK |
| 113 | Indeks Inklusivitas SDLB | nilai | 70,00 | 74,00 | 79,00 | 83,00 | 88,00 | 92,00 | DISDIK |
| 114 | Indeks Inklusivitas SMA | nilai | 61,00 | 62,00 | 63,00 | 65,00 | 66,00 | 68,00 | DISDIK |
| 115 | Indeks Inklusivitas SMALB | nilai | 69,00 | 72,00 | 75,00 | 79,00 | 82,00 | 85,00 | DISDIK |
| 116 | Indeks Inklusivitas SMPLB | nilai | 76,00 | 83,00 | 91,00 | 95,00 | 99,00 | 100,00 | DISDIK |
| 117 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | Indeks | 73,7 - 73,81 | 74,08 - 74,26 | 74,46 - 74,71 | 74,84 - 75,15 | 75,22-75,60 | 75,60 - 76,05 | KESBANGPOL |
| 118 | Indeks Kesejahteraan Sosial | Indeks | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | DINSOS |
| 119 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,39 | 0,38 | DP3A |
| 120 | Indeks Literasi SDLB | % | 88,00 | 91,00 | 94,00 | 97,00 | 99,00 | 100,00 | DISDIK |
| 121 | Indeks Literasi SMA | % | 69,00 | 72,00 | 76,00 | 80,00 | 83,00 | 87,00 | DISDIK |
| 122 | Indeks Literasi SMALB | % | 74,00 | 83,00 | 88,00 | 84,00 | 90,00 | 96,00 | DISDIK |
| 123 | Indeks Literasi SMK | % | 60,00 | 62,00 | 63,00 | 64,00 | 65,00 | 66,00 | DISDIK |
| 124 | Indeks Literasi SMPLB | % | 82,00 | 86,00 | 91,00 | 96,00 | 99,00 | 100,00 | DISDIK |
| 125 | Indeks Numerasi SDLB | % | 81,00 | 84,00 | 86,00 | 89,00 | 92,00 | 95,00 | DISDIK |
| 126 | Indeks Numerasi SMA | % | 68,00 | 74,00 | 81,00 | 87,00 | 93,00 | 100,00 | DISDIK |
| 127 | Indeks Numerasi SMALB | % | 78,00 | 85,00 | 88,00 | 92,00 | 96,00 | 100,00 | DISDIK |
| 128 | Indeks Numerasi SMK | % | 59,00 | 61,00 | 62,00 | 64,00 | 65,00 | 66,00 | DISDIK |
| 129 | Indeks Numerasi SMPLB | % | 82,00 | 85,00 | 89,00 | 95,00 | 99,00 | 100,00 | DISDIK |

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 130 | Indeks Pembangunan Gender | Indeks | 92,85 | 93,05 | 93,50 | 93,70 | 93,70 | 93,75 | DP3A |
| 131 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | Indeks | 66,00 | 66,35 | 66,70 | 67,00 | 67,35 | 67,75 | DP3A |
| 132 | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | Indeks | 65,79 | 66,47 | 67,15 | 67,80 | 68,50 | 68,80 | DP3A |
| 133 | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks | 68,34 | 70,34 | 72,34 | 74,34 | 76,34 | 78,34 | DP3A |
| 134 | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | % | 75,34 | 76,15 | 76,20 | 76,20 | 76,30 | 76,30 | DP3A |
| 135 | Indeks Williamson | Indeks | | 0,391 | 0,389 | 0,387 | 0,385 | 0,383 | BAPPEDA |
| 136 | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | Ton | 91.500 | 92.000 | 92.500 | 93.000 | 93.500 | 94.000 | DKP |
| 137 | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | Ton | 273.000 | 274.000 | 276.000 | 278.000 | 280.000 | 282.000 | DKP |
| 138 | Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya | KEP | 11,45 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | TANBUN |
| 139 | Kepuasan Dunia Kerja terhadap Kompetensi Lulusan SMK | % | 80,00 | 87,00 | 90,00 | 93,00 | 97,00 | 100,00 | DISDIK |
| 140 | Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%) | % | 5,63 | 5,70 | 5,72 | 5,74 | 5,76 | 5,65 | DKP |
| 141 | Kualitas Pembelajaran SDLB | nilai | 69,00 | 71,00 | 74,00 | 77,00 | 79,00 | 81,00 | DISDIK |
| 142 | Kualitas Pembelajaran SMK | nilai | 62,00 | 65,00 | 67,00 | 70,00 | 73,00 | 80,00 | DISDIK |
| 143 | Kualitas Pendidikan (SPM) | % | 70,67 | 73,17 | 75,67 | 78,17 | 80,67 | 83,17 | DISDIK |
| 144 | Nilai rerata karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitias, nalar kritis, kebinekaan global dan kemandirian pada survei karakter. | nilai | 58,14 | 60,14 | 64,14 | 72,14 | 82,14 | 85,14 | DISDIK |
| 145 | Persentase gerakan kepramukaan yang aktif | % | 95,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 | 100,00 | PORA |
| 146 | Persentase kabupaten kota menuju layak anak (KLA) | % | 78,23 | 82,60 | 86,90 | 91,30 | 93,60 | 100,00 | DP3A |
| 147 | Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca | % | 8,70 – 13,04 | 9,00 – 26,36 | 9,29 - 39,68 | 9,59 - 53 | 9,88 - 66,32 | 10,18 - 79,63 | DISDIK |

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 148 | Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi | % | 0,00 – 4,35 | 3,81 - 8,16 | 7,61 - 11,96 | 11,42 - 15,76 | 15,22-19,57 | 19,03 - 23,38 | DISDIK |
| 149 | Persentase korban konflik yang mendapatkan rehabilitasi sosial | % | 13,63 | 14,90 | 15,43 | 17,57 | 18,86 | 19,61 | BRA |
| 150 | Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi | % | 14,05 | 15,28 | 16,11 | 17,21 | 18,17 | 19,18 | BRA |
| 151 | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | % | 58,19 | 59,24 | 60,29 | 61,34 | 62,39 | 63,44 | BAPPEDA |
| 152 | Persentase pembinaan olahraga | % | 55,73 | 55,57 | 60,60 | 63,63 | 68,18 | 72,72 | PORA |
| 153 | Persentase penanganan potensi konflik sosial | % | 20,00 | 80,00 | 82,00 | 84,00 | 86,00 | 88,00 | KESBANGPOL |
| 154 | Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi | % | 29,92 | 30,92 | 31,92 | 32,92 | 33,92 | 34,92 | DINSOS |
| 155 | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar | % | 28,92 | 29,92 | 30,92 | 31,92 | 32,92 | 33,92 | DINSOS |
| 156 | Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) | % | 22,00 | 24,06 | 24,06 | 26,13 | 30,25 | 28,19 | NAKER |
| 157 | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca | % | 27,18-29,18 | 27,42 - 38,17 | 27,67 - 47,17 | 27,91 - 56,15 | 28,15-65,15 | 28,39 - 74,14 | DISDIK |
| 158 | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi | % | 22,94-24,94 | 25,19 - 27,19 | 27,45 - 29,45 | 29,70 - 31,69 | 31,95-33,95 | 34,20 - 36,20 | DISDIK |
| 159 | Persentase transmigrasi yang dibina dan diberdayakan | % | 35,71 | 38,17 | 40,63 | 43,09 | 45,55 | 50,00 | NAKER |
| 160 | Pertumbuhan Produksi daging (Ternak Besar, Kecil dan Unggas) | Ton | 14,08 | 12.500 | 12.670 | 12.700 | 12.715 | 12.810 | DISNAK |
| 161 | Pertumbuhan produksi telur (ayam, itik, puyuh) | Ton | 23,58 | 344 | 564.655 | 564.655 | 564.655 | 564.655 | DISNAK |
| 162 | Prevalensi Stunting | % | 27,10 | 25,60 | 24,00 | 22,50 | 21,00 | 19,00 | DINKES |

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 163 | Produktivitas komoditas pangan utama (padi) | Ton/Ha | 5,55 | 5,56 | 5,57 | 5,58 | 5,59 | 5,60 | TANBUN |
| 164 | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal | % | 42,00 | 44,38 | 46,75 | 49,13 | 51,50 | 53,88 | NAKER |
| 165 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) | % | 13,58 | 13,66 | 13,74 | 13,81 | 13,89 | 13,97 | BAPPEDA |
| 166 | Proporsi UMKM terhadap jumlah angkatan kerja (%) (sebagai proxy proporsi PDRB ekonomi kreatif) | % | 16,41 | 16,48 | 16,54 | 16,61 | 16,67 | 16,74 | KOP UKM |
| 167 | Rasio Kabupaten yang memiliki Qanun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) | % | 37,00 | 39,00 | 43,00 | 48,00 | 52,00 | 56,00 | TANBUN |
| 168 | Rasio Konektivitas | Rasio | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,76 | DISHUB |
| 169 | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)* | % | 1,84 | 1,90 | 1,97 | 2,03 | 2,09 | 2,16 | BUDPAR |
| 170 | Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) | Tahun | 10,20-10,21 | 10,37 - 10,39 | 10,55 - 10,57 | 10,72 - 10,74 | 10,89-10,92 | 11,07 - 11,10 | BAPPEDA |
| 171 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | % | 51,00 | 51,32 | 51,60 | 51,90 | 52,00 | 52,10 | DP3A |
| 172 | Usia Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 73,28 | 73,60 | 73,93 | 74,25 | 74,57 | 74,89 | DINKES |
| A.4. | ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | | | | |
| 173 | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) | % PDRB | 53,76 | 54,46 | 55,16 | 55,86 | 56,59 | 57,26 | INDAG |
| 174 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | Indeks | 56,53-56,56 | 57,11 - 57,15 | 57,69 - 57,74 | 58,27 - 58,33 | 58,85-58,92 | 59,43 - 59,51 | BUDPAR |
| 175 | Indeks Pembangunan Pemuda | Angka | 62,00 | 64,00 | 66,00 | 68,00 | 70,00 | 72,00 | PORA |
| 176 | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | Indeks | 93,00 | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 | BAPPEDA |
| 177 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | % | 3,78 | 3,87 | 3,87 | 3,95 | 4,03 | 4,11 | KOMINSA |
| 178 | Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)* | SBM/Rp milyar | 107,25 | 106,62 | 106,00 | 105,39 | 104,78 | 104,17 | ESDM |
| 179 | Jumlah produk tersertifikasi halal | Produk | 41.695,00 | 42.202,00 | 42.703,00 | 43.173,00 | 43.573,00 | 43.973,00 | INDAG |

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 180 | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)* | Ribu Orang | 34,78 | 35,48 | 36,42 | 36,91 | 37,65 | 38,40 | BUDPAR |
| 181 | Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat provinsi | % | 7,09 | 6,95 | 6,81 | 6,67 | 6,53 | 6,39 | INDAG |
| 182 | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | % | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | BAPPEDA |
| 183 | Luas Kawasan Konservasi (Ha) | Ha | 149.691,39 | 149.691,39 | 149.691,39 | 149.691,39 | 149.691,39 | 149.691,39 | DKP |
| 184 | Nilai Ekspor bersih Aceh | USD | 229.251.565 | 238.421.628 | 247.958.493 | 258.203.769 | 268.531.920 | 279.273.197 | INDAG |
| 185 | Nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA) | Rp Trilliun | 9,50 | 9,80 | 10,00 | 10,20 | 10,40 | 10,60 | DPMPTSP |
| 186 | Nilai Tukar Nelayan (NTN) | Indeks | 105,92 | 107,13 | 108,34 | 109,55 | 110,76 | 111,97 | DKP |
| 187 | Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks) | Indeks | 117,66 | 119,74 | 121,81 | 123,89 | 125,96 | 128,04 | TANBUN |
| 188 | PDRB per kapita (Rp Juta) | Rp Juta | 44,23 - 44,41 | 53 - 55,12 | 61,77 - 65,83 | 70,54 - 76,54 | 79,31 - 87,25 | 88,08 - 97,96 | BAPPEDA |
| 189 | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | % PDRB | 32,48 | 32,18 | 31,89 | 31,59 | 31,29 | 30,99 | DPMPTSP |
| 190 | Persentase Desa Mandiri | % | 0,54 | 0,95 | 1,36 | 1,77 | 2,18 | 2,59 | DPMG |
| 191 | Persentase irigasi modern | % | | | | | | | PENGAIRAN |
| 192 | Persentase kajian berabasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah | % | NA | 82,00 | 85,00 | 89,00 | 92,00 | 95,00 | BAPPEDA |
| 193 | Persentase kemandirian fiskal Aceh | % | 26,80 | 27,66 | 27,80 | 47,14 | 48,41 | 48,41 | BPKA |
| 194 | Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik | % | 56,59 | 56,71 | 56,83 | 56,97 | 57,12 | 57,28 | PENGAIRAN |
| 195 | Persentase kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB | % | 4,60 | 4,75 | 4,90 | 5,05 | 5,20 | 5,35 | ESDM |
| 196 | Persentase Koperasi Sehat | % | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 41,00 | 42,00 | 43,00 | KOP UKM |
| 197 | Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap | % | 81,01 | 81,44 | 81,69 | 81,86 | 82,01 | 82,16 | PUPR |
| 198 | Persentase pembinaan kerjasama gampong berbasis kawasan perdesaan | % | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 80,00 | DPMG |
| 199 | Persentase Peningkatan BUMG Maju | % | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | DPMG |
| 200 | Persentase peningkatan ekspor | % | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | INDAG |

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 201 | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan ke museum | % | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | BUDPAR |
| 202 | Persentase pertumbuhan Kunjungan Wisatawan mancanegara dan nusantara | % | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00 | BUDPAR |
| 203 | Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil | % | 1,00 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | KOP UKM |
| 204 | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) | % | 29,55 | 30,89 | 32,23 | 33,56 | 34,90 | 36,24 | ESDM |
| 205 | Presentase Dana untuk Inovasi dari APBA | % | 0,50 | 0,56 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | BAPPEDA |
| 206 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment (%) | % | 8,48 | 7,99 | 7,49 | 7,00 | 6,50 | 6,01 | PANGAN |
| 207 | Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%) | % | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,44 | 1,49 | 1,54 | INDAG |
| 208 | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%) | % | 3,32 | 3,34 | 3,35 | 3,40 | 3,45 | 3,47 | KOP UKM |
| 209 | Rasio Elektrifikasi | % | 99,45 | 99,60 | 99,72 | 99,83 | 99,92 | 99,99 | ESDM |
| 210 | Rasio Kewirausahaan Daerah | Rasio | 3,95 | 3,95 | 3,96 | 3,96 | 3,97 | 3,98 | KOP UKM |
| 211 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) | % | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,19 | 1,21 | 1,23 | BPKA |
| 212 | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) | % | 0,78 | 0,85 | 0,96 | 1,02 | 1,49 | 1,20 | KOP UKM |
| 213 | Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) | % | 68,50 | 70,47 | 72,44 | 74,41 | 76,38 | 78,35 | PERKIM |
| 214 | Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%) | % | 5,00 | 10,31 | 15,63 | 20,94 | 26,25 | 31,56 | DLHK |
| 215 | Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan | % | 0,88 | 0,90 | 0,91 | 0,96 | 0,98 | 1,00 | BUDPAR |
| 216 | Indeks Inovasi Daerah | Indeks | 56,00 | 58,50 | 60,00 | 62,00 | 64,00 | 64,00 | BAPPEDA |
| | INDIKATOR KINERJA KUNCI | | | | | | | | |
| 1.01. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | | |
| 217 | Akreditasi Sekolah SLB | % | | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | DISDIK |

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 218 | Akreditasi Sekolah SMA | % | | 93,00 | 94,00 | 96,00 | 98,00 | 100,00 | DISDIK |
| 219 | Akreditasi Sekolah SMK | % | | 97,00 | 98,00 | 99,00 | 100,00 | 100,00 | DISDIK |
| 220 | Kualitas Pembelajaran SMA | nilai | 66,00 | 66,00 | 67,00 | 67,00 | 68,00 | 75,00 | DISDIK |
| 221 | Kualitas Pembelajaran SMALB | nilai | 64,00 | 70,00 | 75,00 | 81,00 | 86,00 | 91,00 | DISDIK |
| 222 | Kualitas Pembelajaran SMPLB | nilai | 68,00 | 69,00 | 71,00 | 72,00 | 74,00 | 76,00 | DISDIK |
| 223 | Penyerapan Lulusan SMK | % | 83,00 | 87,00 | 91,00 | 95,00 | 99,00 | 100,00 | DISDIK |
| 224 | Proporsi PTK bersertifikat SDLB | % | 33,00 | 42,00 | 51,00 | 61,00 | 70,00 | 73,00 | DISDIK |
| 225 | Proporsi PTK bersertifikat SMA | % | 48,00 | 64,00 | 80,00 | 96,00 | 112,00 | 114,00 | DISDIK |
| 226 | Proporsi PTK bersertifikat SMALB | % | 33,00 | 42,00 | 51,00 | 61,00 | 70,00 | 73,00 | DISDIK |
| 227 | Proporsi PTK bersertifikat SMK | % | 44,00 | 59,00 | 74,00 | 89,00 | 104,00 | 108,00 | DISDIK |
| 228 | Proporsi PTK bersertifikat SMPLB | % | 33,00 | 42,00 | 51,00 | 61,00 | 70,00 | 73,00 | DISDIK |
| 1.02. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | |
| 229 | Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM) | % | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | DINKES |
| 230 | Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) | % | 40,00 | 42,00 | 44,00 | 46,00 | 48,00 | 50,00 | DINKES |
| 231 | Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap | % | 40,00 | 47,50 | 48,50 | 49,58 | 50,63 | 51,72 | DINKES |
| 232 | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis | % | 36,00 | 46,00 | 55,00 | 62,00 | 67,00 | 70,00 | DINKES |
| 233 | Persentase fasyankes yang terpenuhi SDM kesehatan yang standar | % | 10,00 | 26,00 | 34,00 | 43,00 | 53,00 | 55,00 | DINKES |
| 234 | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Luar Biasa | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINKES |
| 235 | Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita | % | 10,00 | 10,50 | 9,50 | 8,50 | 7,50 | 6,50 | DINKES |

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1.03. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | |
| 236 | Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan | % | 80,50 | 81,00 | 81,50 | 82,00 | 83,00 | 83,50 | PERKIM |
| 237 | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | % | 0,00 | 3,12 | 3,34 | 3,56 | 3,78 | 4,00 | PUPR |
| 1.04. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | |
| 238 | Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU | % | 66,00 | 67,88 | 69,38 | 70,88 | 72,38 | 73,88 | PERKIM |
| 239 | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak | % | 35,00 | 69,56 | 71,56 | 73,56 | 75,56 | 77,56 | PERKIM |
| 1.05. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | |
| 240 | Persentase penegakan peraturan daerah | % | (blank) | | | | | | POL PP |
| 241 | Persentase penyelesaian pelanggaran qanun syariat islam dan kebijakan kepala daerah | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | POL PP |
| 242 | Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban | % | 81,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | POL PP |
| 243 | Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | % | 79,80 | 80,00 | 81,00 | 82,00 | 83,00 | 84,00 | BPBA |
| 1.06. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | |
| 244 | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (KTK)Dalam & Luar Negeri yang mendapatkan layanan pemulangan. | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINSOS |

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 245 | Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINSOS |
| 246 | Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINSOS |
| 247 | Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dan Kemiskinan | % | 30,92 | 31,92 | 32,92 | 33,92 | 34,92 | 35,92 | DINSOS |
| 248 | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINSOS |
| 249 | Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINSOS |
| 250 | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINSOS |
| 251 | Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial | % | 68,64 | 68,65 | 68,70 | 68,76 | 68,81 | 68,89 | DINSOS |
| 252 | Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya | % | 91,51 | 92,51 | 93,51 | 94,51 | 95,51 | 96,51 | DINSOS |
| 253 | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar | % | 68,64 | 68,65 | 68,70 | 68,76 | 68,81 | 68,89 | DINSOS |
| 254 | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial | % | 68,64 | 68,65 | 68,70 | 68,76 | 68,81 | 68,89 | DINSOS |
| 255 | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan | % | 68,64 | 68,65 | 68,70 | 68,76 | 68,81 | 68,89 | DINSOS |

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA | | | | | | | | |
| 256 | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINSOS |
| 257 | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINSOS |
| 258 | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial | % | 68,64 | 68,65 | 68,70 | 68,76 | 68,81 | 68,89 | DINSOS |
| 259 | Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN) yang terkelola dengan baik. | % | 87,98 | 90,53 | 90,53 | 90,53 | 90,53 | 90,53 | DINSOS |
| BU 2.07. | 2.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | | | |
| 260 | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | % | 52,80 | 77,61 | 78,39 | 79,08 | 79,69 | 80,23 | NAKER |
| 261 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%) | % | 29,17 | 32,67 | 36,17 | 39,67 | 43,17 | 46,67 | NAKER |
| 262 | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Pemerintah | Perusahaan | 50,00 | 245,00 | 329,00 | 413,00 | 497,00 | 581,00 | NAKER |
| 263 | Persentase Angkatan Kerja yang bekerja | % | 94,35 | 94,56 | 94,78 | 95,00 | 95,22 | 95,44 | NAKER |
| 264 | Persentase tenaga kerja yang mendapat sertifikat kompetensi melalui pelatihan dan pemagangan yang ditempatkan | % | 87,80 | 45,45 | 47,30 | 49,75 | 50,55 | 52,15 | NAKER |

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 2.08. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | |
| 267 | Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar | % | 60,50 | 70,00 | 70,50 | 80,00 | 80,50 | 90,00 | DP3A |
| 268 | Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | % | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | DP3A |
| 269 | Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBA | % | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | DP3A |
| 270 | Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan kualitas keluarga | % | 17,20 | 21,50 | 25,80 | 30,10 | 34,40 | 38,70 | DP3A |
| 271 | Tingkat pemahaman data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan | % | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | DP3A |
| 2.09. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | | | |
| 272 | Persentase pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan | % | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | PANGAN |
| 2.10. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | | | | |
| 273 | Meningkatnya Kertesediaan Kepemilikan Lahan Untuk Fasilitas Publik dan Tanah Masyarakat Miskin | Persil | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | TANAH |
| 274 | Persentase penyelesaian pemetaan pertanahan | % | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | TANAH |
| 275 | Persentase Sengketa dan konflik tanah ulayat lintas kab/kota yang diselesaikan | % | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 5,26 | TANAH |

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 2.11. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | |
| 276 | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) | % | 52,00 | 55,00 | 56,50 | 58,00 | 59,00 | 61,00 | DLHK |
| 277 | Jumlah Limbah B3 yang dikelola | Ton | 7.851,20 | 7.855,00 | 7.860,00 | 7.865,00 | 7.870,00 | 7.875,00 | DLHK |
| 278 | Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup | Jumlah | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | DLHK |
| 279 | Persentase ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan hidup | % | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | DLHK |
| 280 | Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup | % | 80,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | DLHK |
| 281 | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensi | % | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | DLHK |
| 282 | Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti | % | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | DLHK |
| 283 | Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT) | % RT | 22,00 | 26,88 | 31,75 | 36,63 | 41,50 | 46,38 | DLHK |
| 2.12. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | |
| 284 | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DRKA |
| 2.14. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | |
| 285 | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19) | % | 13,80 | 13,60 | 13,50 | 13,40 | 13,20 | 13,10 | DP3A |
| 286 | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR) | % | 2,31 | 2,30 | 2,28 | 2,27 | 2,26 | 2,25 | DP3A |
| 287 | Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) | % | 15,80 | 15,10 | 14,50 | 13,90 | 13,30 | 12,80 | DP3A |

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 288 | Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga | % | 74,95 | 76,10 | 77,10 | 78,10 | 79,00 | 79,85 | DP3A |
| 2.15. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | | | |
| 289 | Persentase Masyarakat Berkeselamatan di Daerah Perlintasan Sebidang Kereta Api dengan Jalan Provinsi | % | 0,58 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | DISHUB |
| 2.17. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | | | |
| 290 | Jumlah Koperasi meningkat kapasitas produksinya | Koperasi | NA | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | KOP UKM |
| 291 | Jumlah Koperasi yang Meningkat Kapasitas SDM | Koperasi | 0,00 | 200,00 | 250,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | KOP UKM |
| 2.18. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | | | |
| 292 | Meningkatnya Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam Penyampaian LKPM | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | DPMPTSP |
| 293 | Pelaku Usaha/Perusahaan yang berminat berinvestasi | Perusahaan | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 | DPMPTSP |
| 294 | Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dapat di akses | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DPMPTSP |
| 2.19. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | |
| 295 | Persentase pemuda yang dibina | % | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | PORA |
| 2.22. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | | |
| 296 | Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan | % | 1,64 | 4,92 | 6,56 | 9,84 | 11,48 | 12,30 | BUDPAR |
| 297 | persentase masyarakat penerima akses informasi sejarah | % | 2,19 | 4,38 | 8,77 | 13,25 | 17,54 | 21,92 | BUDPAR |

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 298 | persentase warisan budaya yang dilestarikan | % | 61,63 | 61,86 | 62,89 | 63,62 | 64,14 | 64,65 | BUDPAR |
| 2.23. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | | | | |
| 299 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | 0,02 | 74,25 | 75,50 | 77,00 | 78,50 | 79,00 | ARPUS |
| 2.24. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | | | | |
| 300 | Rasio Naskah Kuno | Rasio | 0,02 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | ARPUS |
| 301 | Tingkat Digitalisasi Arsip | Indeks | 0,10 | 94,50 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 | ARPUS |
| 3.25. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | |
| 302 | Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) | Kg/Kapita/Tahun | 59,00 | 59,52 | 59,65 | 59,73 | 59,87 | 59,94 | DKP |
| 3.26. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | | | |
| 303 | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual | % | 30.29 | 30,90 | 31,51 | 32,14 | 32,79 | 33,44 | BUDPAR |
| 3.27. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | |
| 304 | Persentase Keberhasilan Panen | % | 95,00 | 95,30 | 95,40 | 95,50 | 95,60 | 95,70 | TANBUN |
| 305 | Persentase Perusahaan Berizin yang dibina | % | 83,00 | 90,00 | 95,00 | 97,00 | 98,00 | 100,00 | TANBUN |
| 306 | Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Bakteri yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak | % | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | DISNAK |
| 307 | Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Parasit yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak | % | 8,66 | 7,87 | 7,08 | 6,37 | 5,73 | 5,16 | DISNAK |
| 308 | Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Virus yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak | % | 7,92 | 7,20 | 6,48 | 5,83 | 5,25 | 4,73 | DISNAK |

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 3.28. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | | | | | |
| 309 | Persentase Kerusakan Kawasan Hutan | % | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | DLHK |
| 310 | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok usaha Perhutanan Sosial (KUPS) | % | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | DLHK |
| 311 | Persentase Peningkatan Kelompok Petani Hutan | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | DLHK |
| 312 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis | % | 2,50 | 0,50 | 0,70 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | DLHK |
| 313 | Rehalibitasi lahan di sempadan sungai | Hektare | 100,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | DLHK |
| 3.29. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | | | |
| 314 | Luas Wilayah Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota | Km2 | 5.002,00 | 6.200,00 | 7.053,00 | 7.644,00 | 8.769,00 | 9.894,00 | ESDM |
| 315 | Rasio ketersediaan energi baru terbarukan atau (EBT) terhadap pemakaian energi listrik | % | 0,11 | 20,86 | 21,38 | 20,39 | 25,55 | 31,47 | ESDM |
| 3.30. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | | | |
| 316 | Menjamin ketersediaan stok bapokting dan keterjangkauan harga | % | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | INDAG |
| 317 | Persentase penanganan pengaduan konsumen | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | INDAG |
| 3.31. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | | |
| 318 | Persentase jumlah izin yang dikeluarkan | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | INDAG |
| 319 | Persentase kepatuhan pelaporan informasi industri | % | 2,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | INDAG |
| 3.32. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | | | | | |
| 320 | Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan | % | 35,71 | 38,17 | 40,63 | 43,09 | 45,55 | 50,00 | NAKER |

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 4.01. | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | |
| 321 | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | % | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | SETDA/RO ISRA |
| 5.01. | PERENCANAAN | | | | | | | | |
| 322 | Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJP,RPJMA,RKPA) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | BAPPEDA |
| 323 | Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJP,RPJMA,RKPA) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | BAPPEDA |
| 324 | Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJP,RPJMA,RKPA) bidang Perekonomian dan SDA | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | BAPPEDA |
| 325 | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | BAPPEDA |
| 5.02. | KEUANGAN | | | | | | | | |
| 326 | Indeks kualitas pelayanan keuangan | Skor | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 3,90 | 3,95 | BPKA |
| 327 | Persentase Peningkatan kualitas laporan keuangan | % | 88,80 | 90,80 | 90.82 | 90.84 | 90.86 | 90.88 | BPKA |
| 5.03. | KEPEGAWAIAN | | | | | | | | |
| 328 | Persentase fasilitasi pembinaan pelayanan kepegawaian kepada SKPA | % | 85,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | BKA |
| 5.04. | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | | | |
| 329 | Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal | Orang | 85,00 | 150,00 | 175,00 | 200,00 | 210,00 | 230,00 | BPSDM |

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 330 | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | % | 0,85 | 1,80 | 3,30 | 4,80 | 6,30 | 8,10 | BPSDM |
| 6.01. | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | | |
| 331 | Aparatur yang memenuhi kompetensi | Level | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | INSPEKTORAT |
| 332 | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal | % | 75,00 | 80,00 | 83,50 | 85,00 | 87,50 | 90,00 | INSPEKTORAT |
| 8.01. | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | |
| 333 | Jumlah LSM/ORMAS yang terdaftar | LSM/ ORMAS | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 26,00 | 30,00 | 35,00 | KESBANGPOL |
| 334 | Persentase masyarakat yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan | % | 25,00 | 42,00 | 46,00 | 52,00 | 57,00 | 62,00 | KESBANGPOL |
| 335 | Persentase masyarakat yang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi dalam rangka Pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial dan budaya | % | 95,00 | 52,00 | 55,00 | 57,00 | 59,00 | 61,00 | KESBANGPOL |
| 336 | Persentase Masyarakat yang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas pendidikan politik | % | 12,00 | 17,00 | 23,00 | 33,00 | 43,00 | 54,00 | KESBANGPOL |
| 9.01. | KEKHUSUSAN ACEH | | | | | | | | |
| 337 | Indeks kompetensi kurikulum dayah | Indeks | 67,00 | 68,90 | 73,03 | 77,42 | 82,06 | 86,98 | DAYAH |
| 338 | Indeks Pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe | Indeks | 87,00 | 90,00 | 92,00 | 93,50 | 96,00 | 98,00 | KKW |
| 339 | Persentase kelengkapan sarana belajar mengajar | % | 62,50 | 64,20 | 68,69 | 73,50 | 78,65 | 84,15 | DAYAH |
| 340 | Persentase kompetensi tenaga pengajar/teungku dayah | % | 66,50 | 68,25 | 71,66 | 75,26 | 79,01 | 82,96 | DAYAH |

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | SKPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 341 | Persentase korban pelanggaran HAM yang direkomendasikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh | % | (blank) | | | | | | BRA |
| 342 | Persentase mesjid yang tertata manajemen dan kemakmurannya | % | 79,00 | 82,00 | 85,00 | 88,00 | 91,00 | 94,00 | DSI |
| 343 | Persentase Penyaluran terhadap Pengumpulan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya | % | 85,00 | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 | BMA |
| 5.05. | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | |
| 344 | Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah | % | NA | 82,00 | 85,00 | 89,00 | 92,00 | 95,00 | BAPPEDA |

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025–2029 memuat latar belakang maksud dan tujuan, landasan penyusunan, kondisi umum Aceh, isu-isu strategis serta tujuan dan sasaran pembangunan, visi dan misi pembangunan. Di samping itu, RPJMA ini juga memuat arah kebijakan, kerangka pendanaan, indikator kinerja utama dan indikator kinerja pembangunan. RPJMA disusun dengan landasan pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional.

RPJMA Tahun 2025-2029 ini juga disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMA Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi pemerintahan dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan jangka menengah periode 5 (lima) tahun, serta menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renstra-SKPA), Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota.

Keberhasilan Pemerintahan Aceh periode 2025-2029 dalam mewujudkan visi ""ACEH ISLAMI, MAJU, BERMARTABAT DAN BERKELANJUTAN" perlu dukungan dan komitmen dari semua pihak terkait (*stakeholders*) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya.

RPJMA ini adalah komitmen nyata pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu, pelaksanaan RPJMA ini memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Semoga program-program dan kebijakan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

## 5.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka memastikan keberlanjutan pembangunan daerah, pedoman transisi dirancang untuk menjembatani peralihan dari periode RPJMA sebelumnya ke periode yang baru. Pedoman ini menjadi acuan strategis bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan program-program prioritas serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Pada masa transisi periode Pemerintahan Aceh Tahun 2025-2029 dan belum ada dasar dokumen perencanaan pada tahun 2030, maka RPJM Aceh ini dapat dijadikan pedoman pada masa transisi untuk menyusun program dan kegiatan prioritas sampai tersedianya dokumen RPJMA periode berikutnya ditetapkan. Hasil evaluasi target dan capaian program menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan di masa transisi, terutama untuk program-program prioritas yang capaiannya belum memenuhi target. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dasar dokumen perencanaan.

## 5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan disusun sebagai panduan normatif yang memastikan penyelenggaraan pembangunan daerah dilakukan secara konsisten, akuntabel, dan terarah. Kaidah-kaidah ini mencakup prinsip-prinsip, mekanisme, serta prosedur pelaksanaan yang harus diikuti oleh seluruh pihak terkait dalam mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMA.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025-2029 hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, efisien, efektif, partisipatif dan penuh tanggung jawab dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh (SKPA) di lingkungan Pemerintah Aceh agar melaksanakan program-program dalam RPJMA ini dengan sebaik-baiknya.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh (SKPA) berkewajiban menyusun rencana strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing berpedoman pada RPJMA yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja SKPA) di lingkungan Pemerintah Aceh.
3. RPJMA ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) mulai tahun 2026 sampai dengan 2030.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota (RPJMK) dengan RPJMA.
5. Periode RPJMA dan RPJMK mengikuti periode RPJMN yaitu Tahun 2025-2029.
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMA, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh melakukan fasilitasi, pengendalian dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMA ke dalam dokumen Renstra SKPA.
7. Untuk menjaga sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi RPJM Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berupa konsultasi/fasilitasi dan evaluasi terhadap penyusunan dokumen perencanaan kabupaten/kota.

Selain itu, kaidah ini menegaskan pentingnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat. Penetapan

prioritas pembangunan dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi secara adil dan merata.

Kaidah pelaksanaan RPJMA ini juga mencakup mekanisme monitoring dan evaluasi yang berfungsi sebagai alat pengendali untuk mengukur kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan. Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap proses pembangunan berjalan sesuai dengan visi, misi, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

GUBERNUR ACEH,

MUZAKIR MANAF

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh**